WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

BAB II

RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tangal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada:
   a. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
   b. rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
c. BAB III : TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
e. BAB V : PENUTUP.

(2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Bappeda Litbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renja Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

(2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda Litbang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Oktober 2023
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

A. RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja SKPD memuat pedoman pembangunan daerah tahunan yang berupa kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Diharapkan pedoman tersebut dapat menjamin terwujudnya pembangunan daerah yang terarah, berkesinambungan, efektif serta efisien untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024 berpedoman kepada Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dengan mengangkat Isu Strategis:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana Pendidikan, sehingga daya tampung sekolah belum terpenuhi;
2. Terbatasnya kompetensi guru khususnya di bidang teknologi informasi;
3. Berkurangnya kemampuan ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 untuk pembiayaan sekolah;
4. Terbatasnya tenaga pendidik yang telah tersertifikasi;
5. Terbatasnya SDM pengelola kebudayaan di Kota Balikpapan.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD

1.2 Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
20. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
21. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.3 Maksud danTujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja perangkat daerah masih bersifat indikatif dan disinergikan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Penyusunan kebutuhan dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mengacu pada ketentuan target kinerja pada Sustainable Development Goals Support (SDG's),Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kota Balikpapan dan mempertimbangkan capaian kinerja yang ada. Rumusan program dan kegiatan didasarkan atas pertimbangan urutan prioritas daerah dan menyesuaikan pagu dana indikatif yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024 meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja, oleh karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran-ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja periode sebelumnya yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan, dalam kaitan ini adalah keberhasilan atau kegagalan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam mengemban Visi dan Misi Kota Balikpapan. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi kinerja berfungsi untuk:

1. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi
2. Memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Melalui evaluasi kinerja dapat diketahui apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra tahun 2016-2021 yang pada saat disusun mengacu pada ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang secara garis besar terdiri atas Kegiatan-Kegiatan yang mempedomani Renstra yang merupakan penjabaran dari Program-program di urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum di dalam RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021, dimana keseluruhannya berpedoman kepada Peraturan dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam melihat tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, maka dibutuhkan proses reviu. Reviu dilakukan dengan menganalisa Tingkat Realisasi Capaian Kinerja yang menggambarkan seberapa jauh suatu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dapat mencapai Target Kinerja yang telah direncanakan. Review terhadap hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan keterkaitannya dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini yang tersaji ke dalam tiga kriteria yaitu:

1. Realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan secara keseluruhan (tabel 2.1.1);
2. Realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (tabel 2.1.2);
3. Realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihil target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan (tabel 2.1.3);

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Kota Balikpapan

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah - (nilai)**	**89,18**	**2.025.447.312.150**	**85,89**	**4.091.170.686**	**86.18**	**4.746.775.427**	**85,89**	**1.582.327.042**	**99.66%**	**33.33%**	**85,89**	**5.673.497.728**	**96,31%**	**0,28%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah - (nilai)**	**86,03**	**885.000.000**	**78,03**	**112.954.541**	**80.03**	**60.000.000**	**78,03**	**5.170.000**	**97.50%**	**8.62%**	**78,03**	**118.124.541**	**90,70%**	**13.35%**
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja - (Dokumen)*			*12*	*112.954.541*	*21*	*60.000.000*	*10*	*5.170.000*	*47.62%*	*8.62%*				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah) - (nilai)**	**88,75**	**4.372.679.295**	87,32	671.755.711	**87.55**	**692.250.000**	**87.32**	**299.060.232**	**99.74%**	**43.20%**	**87.32**	**970.815.943**	**98,39%**	**22.20%**
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN*			*140*	*671.755.711*	*13*	*692.250.000*	*7*	*299.060.232*	*53.85%*	*43.20%*				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - (nilai)**	**87,21**	**9.636.170.843**	86,09	1.574.648.288	**85.71**	**1.930.200.000**	**84.69**	**606.274.014**	**98.81%**	**31.41%**	**84.69**	**2.180.922.302**	**97.11%**	**22.63%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan*			*100*	*39.624.000*	*12*	*40.000.000*	*12*	*0*	*100,00%*	*0*				

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Bangunan Kantor - (jenis)														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor - (Jenis)*			*82*	*427.410.400*	*5*	*200.000.000*	*4*	*199.131.000*	*100%*	*99.57%*				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jenis bahan logistik kantor - (jenis)*			*86*	*514.871.100*	*80*	*685.000.000*	*80*	*114.353.000*	*100%*	*16.69%*				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan - (Jenis)*			*4*	*166.160.000*	*4*	*280.000.000*	*2*	*53.500.000*	*50%*	*19.11%*				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - (Jenis)*					*4*	*25.200.000*	*3*	*11.260.000*	*75%*	*44.68%*				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah - (kali)*			*750*	*399.102.788*	*750*	*400.000.000*	*338*	*228.030.014*	*45.07%*	*57.01%*				
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Bersabasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*					*1*	*300.000.000*	-	-	-	-				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - (nilai)**	**88,04**	**5.068.325.650**	87,25	840.683.410	**86.84**	**969.049.722**	**83.88**	**318.379.696**	**96.59%**	**32.85%**	**83.88**	**1.159.063.106**	**95.27%**	**22.87%**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - (rekening)*					*3*	*344.049.722*	*3*	*184.603.696*	*100,00%*	*53.66%*				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan - (m2)*			*1.028*	*533.360.529*	*2*	*625.000.000*	*2*	*133.776.000*	*100%*	*21.40%*				

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - (nilai)**	**84,47**	**5.017.984.281**	82,66	891.128.736	**82.97**	**1.095.275.705**	**82,66**	**353.443.100**	**99.63%**	**32.27%**	**82,66**	**1.244.571.836**	**97.86%**	**24.80%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan yang dipelihara - (unit)*			*67*	*346.574.279*	*78*	*555.000.000*	*32*	*282.890.390*	*41.03%*	*50.97%*				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara - (Jenis)*			*100*	*301.843.855*	*207*	*340.275.705*	*43*	*70.552.710*	*20.77%*	*20.73%*				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Frekuensi Pemeliharaan - (kali)*			*1*	*242.710.602*	*3*	*200.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) - (%)**	**87,33**	**1.737.532.481.517**	90,81	413.334.772.961	**87.03**	**359.521.625.000**	**90.81**	**92.114.357.688**	**104.34%**	**25.62%**	**90,81**	**505.449.130.649**	**103,98%**	**29.09%**
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD - (%)**	**91,50**	**796.035.319.400**	88,73	188.074.418.782	**89.40**	**148.090.888.050**	**88.73**	**41.537.608.102**	**99.25%**	**28.05%**	**88,73**	**229.612.026.884**	**96,97%**	**28.84%**
Penambahan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah - (ruang)*					*6*	*600.000.000*	*0*	*119.507.500*	*0,00%*	*19,92%*				
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun- (ruang)*					*151*	*200.000.000*	*-*	*132.750.000*	*0,00%*	*66,38%*				
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun - (ruang)*					*2*	*400.000.000*	*-*	*11.190.500*	*0,00%*	*2,80%*				
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun - (unit)*					*20*	*4.445.189.500*	*-*	*1.781.811.500*	*0,00%*	*40,08%*				

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	*Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat - (ruang)*					*57*	*13.343.071.150*	*-*	*4.677.089.500*	*0,00%*	*35,05%*				
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - (ruang)*					*1*	*200.311.510*	*0*	*-*	*0,00%*	*0,00%*				
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - (ruang)*					*1*	*53.491.200*	*0*	*-*	*0,00%*	*0,00%*				
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - (ruang)*					*1*	*65.544.150*	*0*	*-*	*0,00%*	*0,00%*				
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi - (unit)*					*1*	*77.413.350*	*0*	*-*	*0,00%*	*0,00%*				
Pengadaan Perlengkapan Siswa	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia - (unit)*					*13000*	*11.590.495.000*	*-*	*37.105.339*	*0,00%*	*0,32%*				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (peserta didik)*			*192*	*86.400.000*	*170*	*90.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*				
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (paket)*			*2*	*10.454.266.740*	*3*	*375.000.000*	*1*	*-*	*33,33%*	*0,00%*				
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan*					*192*	*17.661.417.000*	*192*	*512.258.138*	*100,00%*	*2,90%*				

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Ujian - (satuan pendidikan)														
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	*Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi - (satuan pendidikan)*			*213*	*108.900.900*	*192*	*137.812.000*	*192*	*26.675.000*	*100,00%*	*19,36%*				
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik - (peserta didik)*			*5*	*559.388.900*	*5349*	*517.700.250*	*-*	*74.934.000*	*0,00%*	*14,47%*				
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi – (orang)*			*3.310*	*6.506.307.377*	*2960*	*7.440.000.000*	*1.690*	*294.650.462*	*57,09%*	*3,96%*				
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah - (satuan pendidikan)*					*192*	*488.740.800*	*192*	*117.676.878*	*100,00%*	*24,08%*				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS –(satuan pendidikan)*					*214*	*89.994.700.000*	*214*	*33.751.959.285*	*100,00%*	*37,50%*				
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun - (ruang)*			*5*	*1.041.247.592*	*1*	*257.700.690*	*1*	*-*	*100,00%*	*0,00%*				

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(ruang)*					*1*	*152.301.450*	*0*	*-*	*0,00%*	*0,00%*				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP - (%)**	**98,46**	**719.908.078.725**	**95,26**	**184.256.136.556**	**96,06**	**154.399.620.950**	**95,26**	**41.829.666.948**	**99,16%**	**27,09%**	**95,26**	**226.085.803.504**	**96,75%**	**31,40%**
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun – (unit)*					*2*	*43.300.000.000*	*1*	*4.450.318.149*	*50,00%*	*10,28%*				
Penambahan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah – (ruang)*					*2*	*800.000.000*	*-*	*29.392.078*	*0,00%*	*3,67%*				
Pembangunan Laboratorium	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun – (ruang)*			*2*	*1.445.313.952*	*2*	*1.435.811.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*				
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun – (unit)*					*20*	*5.125.000.000*	*-*	*4.964.429.670*	*0,00%*	*96,87%*				
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	*Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat – (unit)*					*21*	*3.650.000.000*	*-*	*3.122.218.868*	*0,00%*	*85,54%*				
Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia – (paket)*			*714*	*5.991.237.160*	*2963*	*6.700.000.000*	*2.963*	*27.172.813*	*100,00%*	*0,41%*				
Pengadaan Perlengkapan Siswa	*Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia – (paket)*			*12.224*	*10.478.829.208*	*37500*	*11.132.415.000*	*-*	*14.266.140*	*0,00%*	*0,13%*				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik – (peserta didik)*			*380*	*263.375.000*	*400*	*300.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*				
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses*					*30.278*	*9.418.264.000*	*30.278*	*6.751.331.069*	*100,00%*	*71,68%*				

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Belajar dan Ujian – (peserta didik)														
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi – (satuan pendidikan)*			*77*	*181.656.000*	*76*	*170.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*				
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik – (peserta didik)*			*5*	*417.966.517*	*1000*	*500.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*				
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi – (orang)*			*1.125*	*5.232.281.960*	*1679*	*6.850.000.000*	*-*	*168.728.000*	*0,00%*	*2,46%*				
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan – (satuan pendidikan)*					*91*	*300.000.000*	*91*	*40.668.682*	*100,00%*	*13,56%*				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS – (satuan pendidikan)*					*74*	*64.718.130.950*	*74*	*22.261.141.479*	*100,00%*	*34,40%*				
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD - (%)**	**31,30**	**116.295.589.706**	**36,62**	**15.369.497.645**	**29,80**	**32.413.417.700**	**36,62**	**4.643.937.091**	**122,89%**	**14,33%**	**36,62**	**20.013.434.736**	**117,00%**	**17,21%**

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat – (unit)*					***526***	*350.000.000*	*0*	*37.403.700*	*0,00%*	*10,69%*				
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	*Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan – (unit)*					***6***	*2.159.676.000*	*0*	*3.600.000*	*0,00%*	*0,17%*				
Pengadaan Mebel PAUD	*Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia – (paket)*					***2298***	*5.020.500.000*	*0*	*44.200.171*	*0,00%*	*0,88%*				
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	*Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi – (satuan pendidikan)*			*486*	*55.840.000*	*50*	*110.000.000*	*50*	*106.507.500*	*100,00%*	*96,83%*				
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi – (orang)*			*1.803*	*3.828.225.000*	*2096*	*15.116.593.700*	*2.096*	*195.164.680*	*100,00%*	*1,29%*				
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen – (satuan pendidikan)*			*498*	*446.493.150*	*556*	*760.000.000*	*146*	*247.324.590*	*26,26%*	*32,54%*				
Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP – (satuan pendidikan)*					*477*	*8.846.648.000*	*349*	*3.961.815.529*	*73,17%*	*44,78%*				
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat*			*526*	*5.657.600.000*	*35*	*50.000.000*	*25*	*47.920.921*	*71,43%*	*95,84%*				

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD – (orang)														
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**Persentase SPNF yang terakreditasi - (%)**	**100,00**	**105.293.493.685**	**63,64**	**25.634.719.977**	**78,57**	**24.617.698.300**	**63,64**	**4.103.145.547**	**81,00%**	**16,67%**	**63,64**	**29.737.865.524**	**63,64%**	**28,24%**
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun – (unit)*					*3*	*460.000.000*	*-*	*21.764.000*	*0,00%*	*4,73%*				
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	*Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia – (paket)*			*1.995*	*3.939.409.986*	*3686*	*2.800.000.000*	*-*	*58.827.542*	*0,00%*	*2,10%*				
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	*Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi – (satuan pendidikan)*			*14*	*68.668.400*	*18*	*83.000.000*	*18*	*79.818.500*	*100,00%*	*96,17%*				
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi – (orang)*			*153*	*230.905.200*	*2586*	*13.502.722.300*	*2.232*	*155.609.180*	*86,31%*	*1,15%*				
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan*			*17*	*55.641.000*	*98*	*6.919.460.000*	*18*	*3.058.400.824*	*18,37%*	*44,20%*				

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Manajemen – (satuan pendidikan)														
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP – (satuan pendidikan)*					*1*	*852.516.000*	*1*	*728.725.501*	*100,00%*	*85,48%*				
PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1 (%)**	**92,95**	**8.394.166.476**	**95,16**	**1.036.413.997**	**91,45**	**1.250.000.000**	**95,16**	**512.584.091**	**104,06%**	**41,01%**	**95,16**	**1.548.998.088**	**102,38%**	**18,45%**
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%)**	**71,75**	**8.394.166.476**	**94,00**	**1.036.413.997**	**70,70**	**1.250.000.000**	**94,00**	**512.584.091**	**132,96%**	**41,01%**	**94,00**	**1.548.998.088**	**131,01%**	**18,45%**
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (dokumen)*			*9*	*1.036.413.997*	*2*	*1.250.000.000*	*1*	*512.584.091*	*50,00%*	*41,01%*				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												-	-		

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												-	-		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - (Orang/bulan)*					*2.510*	*411.737.633.573*	*2.510*	*144.735.508.605*	*100,00%*	*35,15%*				
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase pengembangan kebudayaan - (%)**	**78,08**	**7.047.245.447**	**22,90**	**631.788.941**	**45,00**	**1.050.000.000**	**22,90**	**269.568.480**	**50,89%**	**25,67%**	**22,90**	**901.357.421**	**29,33%**	**12,79%**
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina - (%)**	**60,00**	**558.224.776**	**12,00**	**119.589.445**	**30,00**	**125.000.000**	**12,00**	**-**	**40,00%**	**0,00%**	**12,00**	**119.589.445**	**20,00%**	**21,42%**
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan – (objek)*			*1*	*14.321.940*	*3*	*65.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*				
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan – (objek)*			*3*	*105.267.505*	*40*	*60.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*				
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya - (%)**	**90,91**	**6.012.746.694**	**56,37**	**479.641.131**	**80,00**	**875.000.000**	**56,37**	**269.568.480**	**70,46%**	**30,81%**	**56,37**	**749.209.611**	**62,01%**	**12,46%**
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan – (objek)*			*4*	*479.641.131*	*220*	*875.000.000*	*155*	*269.568.480*	*70,45%*	*30,81%*				

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase lembaga adat yang aktif - (%)**	**83,33**	**476.273.977**	**6,03**	**32.558.365**	**25,00**	**50.000.000**	**6,03**	**-**	**24,12%**	**0,00%**	**6,03**	**32.558.365**	**7,24%**	**6,84%**
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	*Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina - (orang)*			*3*	*32.558.365*	*10*	*50.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*				
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni - (%)**	**39,80**	**1.730.767.258**	**24,87**	**2.212.257.271**	**27,36**	**220.000.000**	**24,87**	**123.873.000**	**90,90%**	**56,31%**	**24,87**	**2.336.130.271**	**62,49%**	**134,98%**
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelaku seni yang dibina - (%)**	**60,00**	**1.730.767.258**	**40,00**	**2.212.257.271**	**45,00**	**220.000.000**	**40,00**	**123.873.000**	**88,89%**	**56,31%**	**40,00**	**2.336.130.271**	**66,67%**	**134,98%**
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) – (orang)*			*3*	*164.146.271*	*100*	*180.000.000*	*100*	*123.593.000*	*100,00%*	*68,66%*				
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi – (sertifikat)*			*1*	*48.111.000*	*10*	*40.000.000*	*-*	*280.000*	*0,00%*	*0,70%*				
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal - (%)**	**80,00**	**1.021.510.033**	**26,66**	**145.033.900**	**33,33**	**60.000.000**	**26,66**	**50.000**	**79,99%**	**0,08%**	**26,66**	**145.083.900**	**33,33%**	**14,20%**
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu)**	**75,00**	**1.021.510.033**	**50,00**	**145.033.900**	**60,00**	**60.000.000**	**50,00**	**50.000**	**83,33%**	**0,08%**	**50,00**	**145.083.900**	**66,67%**	**14,20%**

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Daerah Kabupaten/Kota - (%)														
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (orang)*			*105*	*145.033.900*	*25*	*60.000.000*	*-*	*50.000*	*0,00%*	*0,08%*				
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan - (%)**	**100,00**	**6.400.623.999**	**85,63**	**1.101.001.127**	**95,59**	**990.000.000**	**85,63**	**339.498.303**	**89,58%**	**34,29%**	**85,63**	**1.440.499.430**	**85,63%**	**22,51%**
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - (%)**	**100,00**	**717.604.388**	**75,86**	**78.239.150**	**95,59**	**80.000.000**	**75,86**	**24.020.660**	**79,36%**	**30,03%**	**75,86**	**102.259.810**	**75,86%**	**14,25%**
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	*Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan – (objek)*			*145*	*42.900.000*	*2*	*30.000.000*	*-*	*12.489.500*	*0,00%*	*41,63%*				
Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan – (objek)*			*145*	*35.339.150*	*130*	*50.000.000*	*27*	*11.531.160*	*20,77%*	*23,06%*				
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase pengelolaan cagar budaya - (%)**	**28,57**	**5.683.019.611**	**19,97**	**1.022.761.977**	**21,43**	**910.000.000**	**19,97**	**315.477.643**	**93,19%**	**34,67%**	**19,97**	**1.338.239.620**	**69,89%**	**23,55%**
Pelindungan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi – (objek)*			*120*	*640.774.285*	*130*	*760.000.000*	*44*	*315.477.643*	*33,85%*	*41,51%*				
Pemanfaatan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan – (objek)*			*4*	*234.267.683*	*66*	*150.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*				

Tabel 2.1.2
Realisasi capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 TW II (%)		Penjelasan atas tidak tercapainya Target Kinerja
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah**	***86,18***	***4.746.775.427***	***85,89***	***1.582.327.042***	***99,66***	***33,33***	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	***80,03***	***60.000.000***	***78,03***	***5.170.000***	***97,50***	***8,62***	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*21*	*60.000.000*	*10*	*5.170.000*	*47,62*	*8,62*	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)**	***87,55***	***692.250.000***	**87,32**	**299.060.232**	**99,74%**	**43,20%**	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	***13***	***692.250.000***	*7*	*299.060.232*	*53,85%*	*43,20%*	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**85,71**	**1.930.200.000**	**84,69**	**606.274.014**	**98,81%**	**31,41%**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*4*	*200.000.000*	*-*	*199.131.000*	*0,00%*	*99,57%*	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*4*	*280.000.000*	*2*	*53.500.000*	*50,00%*	*19,11%*	*Proses Pencairan anggaran*
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*4*	*25.200.000*	*3*	*11.260.000*	*75,00%*	*44,68%*	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*750*	*400.000.000*	*338*	*228.030.014*	*45,07%*	*57,01%*	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*1*	*300.000.000*	*0*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**86,84**	**969.049.722**	**83,88**	**318.379.696**	**96,59%**	**32,85%**	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**82,97**	**1.095.275.705**	**82,66**	**353.443.100**	**99,63%**	**32,27%**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*78*	*555.000.000*	*32*	*282.890.390*	*41,03%*	*50,97%*	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*207*	*340.275.705*	*-*	*70.552.710*	*0,00%*	*20,73%*	*Proses Pencairan anggaran*

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 TW II (%)		Penjelasan atas tidak tercapainya Target Kinerja
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*3*	*200.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD**	**89,40**	**148.090.888.050**	**88,73**	**41.537.608.102**	**99,25%**	**28,05%**	
Penambahan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	*6*	*600.000.000*	*0*	*119.507.500*	*0,00%*	*19,92%*	*Progress Fisik telah mencapai 100% dan Sisa Pembayaran kepada Pihak Ketiga*
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*	*151*	*200.000.000*	*-*	*132.750.000*	*0,00%*	*66,38%*	*Progress Fisik telah mencapai 100% dan Sisa Pembayaran kepada Pihak Ketiga*
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*	*2*	*400.000.000*	*-*	*11.190.500*	*0,00%*	*2,80%*	*Progress Fisik telah mencapai 100% dan Sisa Pembayaran kepada Pihak Ketiga*
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	*20*	*4.445.189.500*	*-*	*1.781.811.500*	*0,00%*	*40,08%*	*Proses Kontrak dan Proses Pencairan*
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	*Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat*	*57*	*13.343.071.150*	*-*	*4.677.089.500*	*0,00%*	*35,05%*	*Proses Kontrak dan Proses Pencairan*
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*1*	*200.311.510*	*0*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*Progress Fisik telah mencapai 100% dan sedang proses Review APIP Tahap 1*
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*1*	*53.491.200*	*0*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*Tidak DIlaksanakan dikarenakan lokasi yang dimaksud untuk drehabilitasi tidak ada*
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*1*	*65.544.150*	*0*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*Proses Review Apip Tahap 1*
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi*	*1*	*77.413.350*	*0*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*Proses Review Apip Tahap 1*
Pengadaan Perlengkapan Siswa	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	*13000*	*11.590.495.000*	*-*	*37.105.339*	*0,00%*	*0,32%*	*proses pembagian seragam di TW 2, pencairan sedang dalam proses*
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	*170*	*90.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*proses SK beasiswa Keluarga Miskin*
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*	*3*	*375.000.000*	*1*	*-*	*33,33%*	*0,00%*	*Proses Review Apip Tahap 1*
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	*5349*	*517.700.250*	*-*	*74.934.000*	*0,00%*	*14,47%*	*kihajar dan pentas PAI belum terjadwal dilaksanakan*
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	*2960*	*7.440.000.000*	*1.690*	*294.650.462*	*57,09%*	*3,96%*	*Yang sudah dilaksanakan Workshop penulisan buku guru (35 orang), Workshop BOS Fisik (400 orang), K3S (210 Orang), Peningkatan mutu (200), kurikulum merdeka (200)*
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*1*	*152.301.450*	*0*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*Tidak DIlaksanakan dikarenakan lokasi yang dimaksud untuk drehabilitasi tidak ada*
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP**	**96,06**	**154.399.620.950**	**95,26**	**41.829.666.948**	**99,16%**	**27,09%**	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*	*2*	*43.300.000.000*	*1*	*4.450.318.149*	*50,00%*	*10,28%*	*Saat ini 1 USB di Balikpapan Selatan (kegiatan tahun jamak) sedang proses pembangunan dengan realisasi*

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 TW II (%)		Penjelasan atas tidak tercapainya Target Kinerja
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								fisik 32%, sedangkan USB Graha Indah proses awal pelaksanaan kontrak dan MCo
Penambahan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	*2*	*800.000.000*	*-*	*29.392.078*	*0,00%*	*3,67%*	*reaslisasi fisik 30%, target sesuai masa kontrak 6 bulan*
Pembangunan Laboratorium	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun*	*2*	*1.435.811.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*Realisasi fisik 15% target sesuai masa kontrak 6 bulan*
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	*20*	*5.125.000.000*	*-*	*4.964.429.670*	*0,00%*	*96,87%*	*Pekerjaan sudah selesai 100%*
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	*Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat*	*21*	*3.650.000.000*	*-*	*3.122.218.868*	*0,00%*	*85,54%*	*Pekerjaan sudah selesai 100%*
Pengadaan Perlengkapan Siswa	*Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia*	*37500*	*11.132.415.000*	*-*	*14.266.140*	*0,00%*	*0,13%*	*Proses pengadaan, pemesanan dan produksi. Pembayaran menunggu barang diterima.*
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	*400*	*300.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*Pembiayaan untuk Tahun Pelajaran 2023/2024, dimulai bulan Juli 2023*
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi*	*76*	*170.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*Pelaksanaan PBD menunggu Raport Pendidikan*
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	*1000*	*500.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	*1679*	*6.850.000.000*	*-*	*168.728.000*	*0,00%*	*2,46%*	*Tahap penerbitan SK Penerima Tamsil. Realisasi pencairan mulai bulan Juli 2023, karena penerimaan adalah per semester.*
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**							
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*526*	*350.000.000*	*0*	*37.403.700*	*0,00%*	*10,69%*	*menunggu hasil lelang*
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	*Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan*	*6*	*2.159.676.000*	*0*	*3.600.000*	*0,00%*	*0,17%*	
Pengadaan Mebel PAUD	*Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia*	*2298*	*5.020.500.000*	*0*	*44.200.171*	*0,00%*	*0,88%*	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	*556*	*760.000.000*	*146*	*247.324.590*	*26,26%*	*32,54%*	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*	*477*	*8.846.648.000*	*349*	*3.961.815.529*	*73,17%*	*44,78%*	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*	*35*	*50.000.000*	*25*	*47.920.921*	*71,43%*	*95,84%*	
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**Persentase SPNF yang terakreditasi**	**78,57**	**24.617.698.300**	**63,64**	**4.103.145.547**	**81,00%**	**16,67%**	

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 TW II (%)		Penjelasan atas tidak tercapainya Target Kinerja
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun*	*3*	*460.000.000*	*-*	*21.764.000*	*0,00%*	*4,73%*	
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	*Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia*	*3686*	*2.800.000.000*	*-*	*58.827.542*	*0,00%*	*2,10%*	*Proses Pengiriman*
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	*2586*	*13.502.722.300*	*2.232*	*155.609.180*	*86,31%*	*1,15%*	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	*98*	*6.919.460.000*	*18*	*3.058.400.824*	*18,37%*	*44,20%*	
PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1**							
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**							
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan*	*2*	*1.250.000.000*	*1*	*512.584.091*	*50,00%*	*41,01%*	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase pengembangan kebudayaan**	**45,00**	**1.050.000.000**	**22,90**	**269.568.480**	**50,89%**	**25,67%**	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina**	**30,00**	**125.000.000**	**12,00**	**-**	**40,00%**	**0,00%**	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	*3*	*65.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*Pelaksanaan pada TW III (Perubahan Jadwal)*
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*40*	*60.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*Pelaksana pada TW III (Dalam Proses Kegiatan)*
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya**	**80,00**	**875.000.000**	**56,37**	**269.568.480**	**70,46%**	**30,81%**	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*	*220*	*875.000.000*	*155*	*269.568.480*	*70,45%*	*30,81%*	*Akan dilaksanakan pada TW III*

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 TW II (%)		Penjelasan atas tidak tercapainya Target Kinerja
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase lembaga adat yang aktif**	**25,00**	**50.000.000**	**6,03**	**-**	**24,12%**	**0,00%**	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	*Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina*	*10*	*50.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*Pelaksanaan pada TW III (Menyesuaikan jadwal)*
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni**	**27,36**	**220.000.000**	**24,87**	**123.873.000**	**90,90%**	**56,31%**	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelaku seni yang dibina**	**45,00**	**220.000.000**	**40,00**	**123.873.000**	**88,89%**	**56,31%**	
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi*	*10*	*40.000.000*	*-*	*280.000*	*0,00%*	*0,70%*	*Pelaksanaan pada TW III*
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah local**	**33,33**	**60.000.000**	**26,66**	**50.000**	**79,99%**	**0,08%**	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**60,00**	**60.000.000**	**50,00**	**50.000**	**83,33%**	**0,08%**	
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*	*25*	*60.000.000*	*-*	*50.000*	*0,00%*	*0,08%*	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan**	**95,59**	**990.000.000**	**85,63**	**339.498.303**	**89,58%**	**34,29%**	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**95,59**	**80.000.000**	**75,86**	**24.020.660**	**79,36%**	**30,03%**	
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	*Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan*	*2*	*30.000.000*	*-*	*12.489.500*	*0,00%*	*41,63%*	*pelaksanaan TW ke III, realisasi pembayaran sdh ada tapi kinerja fisik kok belum ada*
Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan*	*130*	*50.000.000*	*27*	*11.531.160*	*20,77%*	*23,06%*	*yang sudah diproses di tetapkan cagar budaya 27*
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase pengelolaan cagar budaya**	**21,43**	**910.000.000**	**19,97**	**315.477.643**	**93,19%**	**34,67%**	
Pelindungan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi*	*130*	*760.000.000*	*44*	*315.477.643*	*33,85%*	*41,51%*	
Pemanfaatan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan*	*66*	*150.000.000*	*-*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*pelaksanaan TW ke III*

Faktor penyebab realisasi kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tidak tercapai dari yang direncanakan secara umum selain yang dijelaskan di tabel di atas adalah:

1. Masih kurangnya kerja sama beberapa pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.
2. Masih kurangnya pemahaman dari beberapa pejabat dalam substansi kinerja dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Kemudian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.3
Realisasi capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,03	359.521.625.000	90,81	92.114.357.688	104,34	25,62
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	29,80	32.413.417.700	36,62	4.643.937.091	122,89	14,33
PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	91,45	1.250.000.000	95,16	512.584.091	104,06	41,01
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70,70	1.250.000.000	94,00	512.584.091	132,96	41,01

Faktor yang meyebabkan beberapa capaian kinerja melebihi dari target yang telah direncanakan adalah:

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan internal Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan juga pihak-pihak eksternal yang terkait dalam pencapaian target kinerja.
2. Adanya tambahan dana diluar anggaran Renja awal yaitu Dana Alokasi Khusus terutama pada bidang DAK Fisik pada anggaran Dinas Pendidikan, hal ini sangat mendongkrak angka pencapaian kinerja seperti contoh pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
3. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan internal maupun eksternal Dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam mencapai Sasaran.
4. Penetapan target kinerja yang terlalu rendah pada saat penyusunan Renstra maupun Renja tahun berjalan.
5. Efek berakhirnya Pandemi Covid-90 yang yang menyebabkan antusiasisme peserta didik meningkat.

Kebijakan/tindakan perlu diambil untukmengantisipasi adanya realisasi capaian kinerja beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023 yang tidak mencapai dari target yang telah direncanakan:

1. Mendorong pemerintah pusat untuk meyempurnakan regulasi menyangkut perencanaan dan evaluasi pembangunan agar pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengevaluasi capaian Tujuan dan Sasarannya dengan baik.
2. Perbaikan atas penentuan indikator dan target capaian kinerja terutama pada penyusunan Renstra periode 2021-2026.
3. Mendorong terciptanya kerja sama antar seluruh pihak yang terkait dalam memanfaatkan kondisi berakhirnya pandemi wabah Covid-90 agar suasana yang kondusif dapat secepatnya kembali normal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional sebagai penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran Visi, Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan periode 2021-2026 dalam menyelenggarakan

pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Visi yang dimaksud yaitu:

"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"

Visi tersebut mempunyai 6 Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi;
3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai;
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan;
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan melaksanakan misi ke-2 yakni "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Tinggi" dimana misi tersebut mempunyai Tujuan dan Sasarannya sebagai berikut :

Tujuan Misi:

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing.

Sasaran Misi:

1. Meningkatnya Kualitas dan Aksebilitas Pendidikan
2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat
4. Meningkatnya Kualitas Pemuda
5. Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah
6. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender

Dari ke 6 (enam) Sasaran Misi tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mengemban pelaksanaan dari Sasaran Misi ke 1 (Satu) yaitu "*Meningkatnya Kualitas dan Aksebilitas Pendidikan*" dan ke 5 (Lima) yaitu "*Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah*". Amanah pelaksanaan kedua Sasaran Misi tersebut dituangkan kedalam Renstra Perangkat Daerah dengan menetapkannya sebagai Tujuan

Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Misi Kepala Daerah

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibiltas Pendidikan	1.1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
		1.2.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	2.1.	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75 %	Sedang
4	50,01% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Pendukung pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan pencanangan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota

terpilih 2021–2026 di dalam RPJMD Kota Balikpapan yang kemudian diturunkan ke dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, secara teknis adalah dengan mengalokasikan pendanaan tahunan diluar anggaran reguler dari Pemerintah Pusat (DAK Fisik/Non Fisik)/Provinsi (Bankeuprov). Program Prioritas berbasis anggaran mandiri tersebut adalah:

a. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada seluruh sekolah jenjang SD/SMP sederajat.

   Pengalokasian dana diberikan untuk 194 SD Negeri/Swasta, 77 SMP Negeri/Swasta dan 25 MI serta 15 MTs di Balikpapan dengan perhitungan pengalokasian dana sebesar Rp. 200.000,-/Siswa/Tahun SD Negeri, Rp. 500.000,-/Siswa/Tahun SD Swasta-Sederajat, Rp. 300.000,-/Siswa/Tahun SMP Negeri, Rp 850.000,-/Siswa/Tahun SMP Swasta-Sederajat. Dana ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kelancaran proses Belajar-Mengajar di sekolah karena Dana DAK Non Fisik BOS Pusat dirasa masih belum memadai.

b. Pemberian Subsidi SPP bagi Siswa sekolah SD dan SMP Swasta/Sederajat;

   Dana ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya yang bersekolah di sekolah swasta jenjang SD/SMP sederajat. Besaran dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 75.000,-/Siswa/Bulan untuk SD Swasta/Sederajat dan Rp 110.000,-/Siswa/Bulan untuk SMP Swasta-Sederajat dan diberikan selama 12 bulan penuh. Untuk tahun 2022 telah dialokasikan untuk sebanyak 64.223 Siswa SD Negeri/Swasta, 30.241 siswa SMP Negeri/Swasta dan 10.104 siswa MI/MTs.

c. Pemberian Beasiswa terhadap Tenaga Pendidik Non PNS di sekolah SD/SMP Swasta/Sederajat;

   Dana ini diberikan sebagai stimulus agar para Tenaga Pendidik termotivasi meningkatkan kompetensi pendidikannya. Besaran dana yang diberikan adalah sebesar Rp 2.500.000,-/Orang/Tahun. Tahun 2022 telah dialokasikan

untuk 50 orang Tenaga Pendidik SD dan 20 orang Tenaga Pendidik SMP. Sampai dengan tahun 2022 Tenaga Pendidik yang memenuhi persyaratan berpendidikan minimal DIV/S1 untuk jenjang PAUD 56,30%; jenjang SD 97,80% dan jenjang SMP 98,30%.

d. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik PNS Kementerian Agama yang mengajar/diperbantukan di SD/SMP Negeri;

   Dana ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap Tenaga Pendidik Mata Pelajaran Agama yang berstatus PNS Kementerian Agama yang mengajar/diperbantukan di SD/SMP Negeri. Besaran yang diberikan adalah Rp 1.365.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan IV dan Rp 1.275.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan III dan Rp 1.200.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan II dimana untuk tahun 2022 telah diberikan kepada 15 orang Tenaga Pendidik golongan IV dan 15 orang Tenaga Pendidik golongan III, dan 1 orang Tenaga Pendidik golongan II.

e. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik Non PNS yang mengajar di sekolah PAUD/SD/SMP Negeri-Swasta/Sederajat;

   Dana ini diberikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Pendidik Non PNS sehingga diharapkan kualitas pembelajaran agar lebih baik. Besaran yang diberikan adalah Rp. 850.000,-/Orang/Bulan diberikan selama 12 Bulan. Untuk tahun 2024 telah dialokasikan dana untuk 625 orang guru SD/MI dan 700 orang guru SMP/MTs. Untuk Tenaga Pendidik jenjang pendidikan PAUD adalah sebagai berikut:

   - Tenaga Pendidik dengan Pendidikan SMA/SMK Sederajat: 718 Orang x Rp. 650.000 x 12 bulan
   - Tenaga Pendidik dengan Pendidikan Diploma: 74 Orang x Rp 700.000 x 12 bulan
   - Tenaga Pendidik dengan Pendidikan S1 Non PAUD: 250 Orang x Rp. 750.000 x 12 bulan
   - Tenaga Pendidik dengan Pendidikan S1 PAUD:

810 Orang x Rp. 850.000 x 12 bulan

f. Pemberian Seragam Sekolah kepada kelas I dan VII;

Pemberian seragam ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak mereka. Siswa yang diberi seragam adalah siswa baru kelas I (SD) dan kelas VII (SMP). Seragam yang diberikan sebanyak 3 stel/siswa berupa Seragam Batik, Nasional dan Pramuka dimana untuk tahun 2024 telah dialokasikan untuk 13.150 x 3 stel x 1 kali untuk siswa kelas I (SD) dan 12.680 x 3 stel x 1 kali untuk siswa kelas VII (SMP).

2. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Non Formal Kesetaraan dalam meningkatkan nilai Akreditasinya dan koordinasi yang intens ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal di Samarinda. Kondisi akreditasi Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Kondisi Akreditasi Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

JENJANG	Akreditasi A		Akreditasi B		Akreditasi C		Belum Akreditasi	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
SD	151	77,84%	32	16,49%	3	1,55%	8	4,12%
SMP	45	58,44%	18	23,38%	5	6,49%	9	11,69%
PAUD	41	9,30%	194	43,99%	91	20,63%	115	26,08
Kesetaraan	1	4,17%	7	29,16%	3	12,5%	13	54,17%

Dari tabel di atas terlihat masih terdapat beberapa Satuan Pendidikan yang berstatus "*Belum Terakreditasi"* yaitu sebesar 4,12% Satuan Pendidikan SD; 11,69% Satuan Pendidikan SMP; 26,08% Satuan Pendidikan PAUD dan 54,17% Satuan Pendidikan Kesetaraan. Sesuai dengan Permendikbudristek. Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan

Minimal Pendidikan ditargetkan bahwa akreditasi minimal untuk Satuan Pendidikan adalah "*Akreditasi C*".

2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat diukur melalui nilai "Indeks Kepuasan Masyarakat" (IKM) yang juga menjadi indikator kinerja Kegiatan seperti yang tercantum pada "Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Kota Balikpapan" pada Kegiatan-Kegiatan yang termasuk di dalam "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota" dengan resume sebagai berikut:

Tabel 2.5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2023

Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85,47
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	83,65
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84,77
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84,69
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84,38
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,59
	Rata-Rata	84,35

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2023 cukup baik berdasarkan rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 84,35.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendidikan di Balikpapan tidak seluruhnya dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yaitu untuk Satuan Pendidikan yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Agama Cabang Balikpapan (RA/MI/MTs), tetapi

dalam hal pencapaian kinerja secara nasional tetap menjadi ukuran pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;

2. Kebijakan Pemerintah Pusat yang kurang mengakomodir kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sampai saat ini masih belum mencapai tingkat ratio yang ideal;
3. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang cepat berubah tanpa memperhatikan proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan baik itu dalam hal Perencanaan dan Kepegawaian;
4. Belum optimalnya pengalokasian penganggaran terhadap Perencanaan Pembangunan untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan bidang pendidikan, terutama pengalokasian Pokok Pikiran DPRD;
5. Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja yang masih terdapat kerancuan dalam pelaksanaan teknisnya sehingga terjadi tumpang tindih antar Bidang;
6. Masih kurangnya koordinasi antar Bidang dalam mencapai Tujuan Sasaran Perangkat Daerah;
7. Masih banyaknya Aparatur Sipil Negara baik itu Pejabat/Jabatan Fungsional ataupun Pelaksana yang kurang memahami kewajibannya berdasar Tugas Pokok dan Fungsi jabatan yang diembannya;
8. Masih kurangnya Etos Kerja ASN secara keseluruhan;
9. Kurangnya pemahaman ASN terhadap arti pentingnya Indikator Kinerja yang telah ditetapkan mulai dari Tujuan – Sasaran Strategis sampai dengan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan, hal ini berdampak pada capaian kinerja Perangkat Daerah;
10. Masih kurangnya kemampuan dan motivasi ASN dalam implementasi Perencanaan Berbasis Data, sehingga perencanaan yang dihasilkan kurang tepat sasaran dan kurang menunjang capaian kinerja Perangkat Daerah;
11. Masih adanya pengalokasian anggaran yang kurang memperhatikan prioritas pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan secara umum;

Hal-hal tersebut di atas meyebabkan kurang optimalnya pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan juga terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ataupun *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang secara substansi berisi pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur maka otomatis menjadikan hal ini suatu tantangan dan sekaligus peluang bagi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam usaha mempersiapkan diri untuk peningkatan pelayanan dalam dunia pendidikan yang merupakan urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan baik nasional maupun pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi Kota Balikpapan yang dipersiapkan menjadi salah satu kota penyangga calon Ibu Kota Negara tentu akan semakin kompleks di seluruh aspek kehidupan termasuk dalam aspek bidang pendidikan. Secara teknis pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut masih menunggu regulasi turunan dari Undang-undang tersebut di atas sampai dengan tingkat Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Proses membandingkan antara program/kegiatan/sub kegiatan yang ada pada rancangan akhir RKPD Tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan pada saat penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dimana dokumen tersebut merupakan suatu analisa kebutuhan dan apa yang harus dilakukan dalam lima tahun kedepan, secara khusus terhadap indikator dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan. Perubahan-perubahan hanya dapat dimungkinkan dalam hal penentuan pagu anggaran per program/kegiatan/sub kegiatan dan target capaian kinerja. Perubahan-perubahan yang dimaksud berpedoman pada hasil-hasil pembahasan/analisa pada tahapan-tahapan perencanaan pembangunan sesuai yang diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Hasil Review terhadap Rancangan akhir RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2024, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6.
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	87,18 nilai	399.691.594.659	87,18 Nilai	345.346.550.904,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.03 nilai	177.000.000,00	82.03 Nilai	400.000.000,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	177.000.000,00	21 Laporan	400.000.000,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.95 nilai	395.026.438.052,00	87.95 %	336.831.656.004,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2342 Orang/bulan	394.381.902.193,00	2510 Orang/bulan	336.057.399.504,00
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	644.535.859,00	13 Dokumen	774.256.500,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	82.99 nilai	0	82.99 nilai	188.837.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	0	4 Laporan	188.837.000,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.43 nilai	339.635.786,00	86.43 %	66.322.400,00
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	443 Orang	339.635.786,00	443 Orang	66.322.400,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.21 Nilai	1.904.554.281,00	86.21 Nilai	5.577.905.500,00
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	12 Paket	60.000.000,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	367.514.281,00	4 Paket	2.020.315.500,00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	500.000.000,00	80 Paket	1.762.590.000,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	167.040.000,00	4 Paket	400.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	250.000.000,00	500 Laporan	700.000.000,00
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	550.000.000,00	1 Dokumen	600.000.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.24 Nilai	973.872.540,00	87.24 Nilai	1.050.000.000,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	461.872.540,00	3 Laporan	350.000.000,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	512.000.000,00	2 Laporan	700.000.000,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.47 Nilai	920.094.000,00	83.47 %	1.231.830.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	423.094.000,00	67 Unit	600.000.000,00
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	304.000.000,00	7 Unit	231.830.000,00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	193.000.000,00	3 Unit	400.000.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87.13 %	330.127.543.020,00	87.23 %	244.098.977.696,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.10 %	155.143.220.180,00	90.10 %	58.261.243.390,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	154 Ruang	600.000.000,00	3 Ruang	50.000.000,00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	156 Ruang	600.000.000,00	3 Ruang	50.000.000,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	215 Unit	1.820.000.000,00	5 Unit	1.000.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	214 Ruang	600.000.000,00	214 Ruang	600.000.000,00
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	148 Ruang	600.000.000,00	148 Ruang	600.000.000,00
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	150 Ruang	600.000.000,00	150 Ruang	600.000.000,00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1667 Paket	2.500.000.000,00	1666 Paket	1.000.000.000,00
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	400 Paket	4.000.000.000,00	1 Paket	1.000.000.000,00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	240.000.000,00	192 Peserta Didik	149.999.700,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	21569 Peserta Didik	1.500.000.000,00	21569 Peserta Didik	1.517.700.200,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3310 Orang	9.758.900.000,00	3310 Orang	8.238.000.000,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	213 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	213 Satuan Pendidikan	1.045.855.900,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	185 Satuan Pendidikan	105.440.960.180,00	185 Satuan Pendidikan	26.839.016.000,00
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	639 Orang	350.000.000,00	639 Orang	500.000.000,00
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	217 Dokumen	166.999.790,00
1.01.02.2.01.46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	40818 Unit	12.933.360.000,00	1 Paket	11.699.999.300,00
1.01.02.2.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1764 Ruang	6.500.000.000,00	1764 Ruang	840.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.02.2.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	215 Unit	600.000.000,00	215 Unit	1.000.000.000,00
1.01.02.2.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	217 Satuan Pendidikan	700.000.000,00	217 Satuan Pendidikan	763.672.500,00
1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1746 Ruang	4.600.000.000,00	5 Ruang	600.000.000,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	96.86 %	139.286.587.840,00	96.86 %	134.946.814.306,00
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	94 Unit	29.000.000.000,00	94 Unit	60.000.000.000,00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	69 Ruang	750.000.000,00	1 Ruang	850.000.000,00
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	72 Ruang	750.000.000,00	72 Ruang	1.200.000.000,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	142 Ruang	1.000.000.000,00	2 Ruang	3.000.000.000,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	91 Unit	5.000.000.000,00	91 Unit	4.000.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1129 Unit	3.000.000.000,00	1 Ruang	1.500.000.000,00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	91 Unit	500.000.000,00	91 Unit	2.000.000.000,00
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1667 Paket	2.500.000.000,00	1666 Paket	1.000.000.000,00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	300.000.000,00	400 Peserta Didik	300.000.000,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	17041 Peserta Didik	550.000.000,00	17041 Peserta Didik	1.600.000.000,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1679 Orang	7.500.900.000,00	1679 Orang	8.390.000.000,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	91 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	91 Satuan Pendidikan	500.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	75 Satuan Pendidikan	69.171.133.840,00	75 Satuan Pendidikan	27.119.454.306,00
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	273 Orang	250.000.000,00	273 Orang	300.000.000,00
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	91 Dokumen	300.000.000,00
1.01.02.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	22461 Satuan Pendidikan	475.264.000,00	22460 Satuan Pendidikan	1.587.360.000,00
1.01.02.2.02.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1129 Ruang	6.500.000.000,00	1129 Ruang	10.000.000.000,00
1.01.02.2.02.62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	39969 Paket	11.689.290.000,00	39969 Paket	11.300.000.000,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	30.30 %	20.661.875.000,00	30.30 %	27.832.520.000,00
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	526 Unit	300.000.000,00	256 Unit	180.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	528 Unit	400.000.000,00	528 Unit	250.000.000,00
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	340 Paket	750.000.000,00	340 Paket	2.675.000.000,00
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0	0	1 Paket	4.667.500.000,00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2096 Orang	18.601.875.000,00	2096 Orang	16.934.000.000,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	571 Satuan Pendidikan	560.000.000,00	571 Satuan Pendidikan	1.493.620.000,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	0	0	1 Satuan Pendidikan	1.392.400.000,00
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	526 Orang	50.000.000,00	526 Orang	110.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	646 Dokumen	130.000.000,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi	85.71 %	15.035.860.000,00	85.71 %	23.058.400.000,00
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2586 Orang	10.494.650.000,00	2586 Orang	18.358.400.000,00
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	98 Satuan Pendidikan	116.000.000,00	98 Satuan Pendidikan	410.000.000,00
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50 Orang	150.000.000,00	50 Orang	100.000.000,00
1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	15 Dokumen	100.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.02.2.04.36	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10200 Paket	3.525.210.000,00	10200 Paket	2.890.000.000,00
1.01.02.2.04.48	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2365 Paket	750.000.000,00	2365 Paket	1.200.000.000,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	88.89%	487.731.951,00	88.89%	200.000.000,00
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	55.56%	487.731.951,00	55.56%	200.000.000,00
1.01.03.2.01.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	5 Dokumen	487.731.951,00	5 Dokumen	200.000.000,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	91.95 %	1.170.674.387,00	92.45 %	2.000.000.000,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	71.05 %	1.170.674.387,00	71.05 %	2.000.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2 Dokumen	1.170.674.387,00	2 Dokumen	2.000.000.000,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	55.10%	1.185.000.000,00	55.10%	1.595.000.000,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	40.00%	100.000.000,00	40.00%	728.000.000,00
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	50.000.000,00	4 Objek	668.000.000,00
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40 Orang	50.000.000,00	40 Orang	60.000.000,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	83.64 %	1.035.000.000,00	83.63%	817.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	230 Objek	1.035.000.000,00	230 Objek	817.000.000,00
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	41.67%	50.000.000,00	41.67%	50.000.000,00
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	15 Orang	50.000.000,00	15 Orang	50.000.000,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	34.83%	292.141.111,00	34.82 %	250.000.000,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	50%	292.141.111,00	50%	250.000.000,00
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	110 Orang	220.000.000,00	110 Orang	200.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	15 Sertifikat	72.141.111,00	15 Sertifikat	50.000.000,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan	46.67%	201.229.387,00	46.66 %	60.000.000,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.67 %	201.229.387,00	66.66%	60.000.000,00
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30 Orang	201.229.387,00	30 Orang	60.000.000,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang ditetapkan	97.06 %	1.028.652.730,00	97.05 %	1.095.000.000,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	97.06 %	130.652.730,00	97.05 %	95.000.000,00
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 Objek	70.000.000,00	2 Objek	35.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	132 Objek	60.652.730,00	132 Objek	60.000.000,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	21.43 %	898.000.000,00	21.43 %	1.000.000.000,00
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	132 Objek	612.000.000,00	132 Objek	800.000.000,00
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	68 Objek	286.000.000,00	68 Objek	200.000.000,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menyamakan pandangan tentang bagaimana penyusunan Renja SKPD yang komprehensif dan dapat sesuai dengan kebutuhan lokal, selain itu agar perencanaan dapat tepat guna dan tepat sasaran, yang selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, maka perlu adanya penelaahan terhadap usulan masyarakat atau dalam konteks perencanaan disebut dengan perencanaan *"bottom up"*.

Usulan dari masyarakat ini diakomodir melalui kegiatan musrenbang secara berjenjang, yang selanjutnya di rekapitulasi untuk dimasukkan dalam renja SKPD sesuai dengan tahapan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selain dari peraturan menteri tersebut Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan wajib melakukan proses usulan masyarakat tersebut melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang merupakan suatu aplikasi resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Secara garis besar usulan masyarakat yang masuk sampai dengan penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 ini terdiri dari Hibah/Bansos dan Non Hibah/Bansos, dimana perlakuan atas kedua jenis usulan ini berbeda-beda sesuai dengan pedoman perundangan yang berlaku.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan Nasional dengan Pembangunan, Provinsi dan Kota Balikpapan, maka berdasarkan Renja 2024 terdapat hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Renstra Kementrian, RPJMD Provinsi dengan Kota;

RENSTRA KEMENDIKBUD	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD KOTA BALIKPAPAN
2020 - 2024	2019 - 2024	2021-2026
mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global	Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat	Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman
M1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.	Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi
M2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.		

RENSTRA KEMENDIKBUD	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD KOTA BALIKPAPAN
2020 - 2024	2019 - 2024	2021-2026
M3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.		

Berdasarkan identifikasi keterkaitan berdasarkan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang mengacu pada Visi, misi, tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan serta telahaan Rencana Strategis Dinas pendidikan yang mengacu pada Rencana Stategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja tahun 2024 merupakan tujuan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 yaitu:

a. Visi Walikota : TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN

b. Misi Walikota : M2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi

c. Tujuan SKPD : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

d. Sasaran :
   1. Meningkatnya kualitas dan aksesibiltas pendidikan
   2. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas SDM Pemajuan Kebudayaan
   3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Sesuai dengan arah pembangunan Kota Balikpapan periode 2021–2026. RKPD 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2021–2026 dan merupakan tahun terakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005 –2025 dengan visi nya "MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA 5 DIMENSI (JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN) DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN"

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dan menyesuaikan Kepmendari nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran, Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memegang Dua Urusan Wajib, yaitu:

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN; dan
2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024, program dan kegiatan tahun 2024 disusun berdasarkan;

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota Balikpapan;
2. Berkorelasi dan bersinergi dengan Kebijakan Nasional; dan
3. Peningkatan tugas pokok dan funsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai ikhtiar untuk merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran pendidikan dan Kebudayaan, Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dibagi dalam 1 (satu) program Prioritas dan 7 (Delapan) program penunjang dari 8 (sembilan) Program keseluruhan. Masing-masing program tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN;
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM;

3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN;
5. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL;
6. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH;
7. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA; dan
8. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan
Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			594.645.528.600,00				594.645.528.000,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			591.645.528.600,00				591.645.528.000,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			591.645.528.600,00				591.645.528.000,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah*	87,18 Nilai	345.346.550.904,00			-	352.217.404.938,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah.*	82,03 Nilai	400.000.000,00			-	400.000.000,00
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		400.000.000,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)*	87.95 %	336.831.656.004,00			-	343.191.741.162,00
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2510 Orang/bulan	336.057.399.504,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		342.417.484.662,00
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	774.256.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		774.256.500,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	188.837.000,00			-	200.000.000,00
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	188.837.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	86.43 %	66.322.400,00			-	200.000.000,00
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	443 Orang	66.322.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	86,21 %	5.577.905.500,00			-	5.757.590.000,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.000.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.020.315.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.200.000.000,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	1.762.590.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.762.590.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		400.000.000,00
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	700.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		700.000.000,00
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		600.000.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	87,24 %	1.050.000.000,00			-	1.050.000.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		350.000.000,00
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	700.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		700.000.000,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	83,47 %	1.231.830.000,00			-	1.418.073.776,00
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		600.000.000,00
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	231.830.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		418.073.776,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		400.000.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)*	87,23 Persen	244.098.977.696,00			-	237.228.123.062,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	90.10 %	58.261.243.390,00			-	71.390.388.756,00
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.250.000.000,00
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.250.000.000,00
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.000.000.000,00
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	214 Ruang	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		400.000.000,00
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	148 Ruang	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.000.000.000,00
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	150 Ruang	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.000.000.000,00
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah							
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1666 Paket	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.500.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
					Semua Kel/Desa			
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		625.000.000,00
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar							
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	192 Peserta Didik	149.999.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		150.000.000,00
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	21569 Peserta Didik	1.517.700.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.517.700.250,00
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3310 Orang	8.238.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.238.000.000,00
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	213 Satuan Pendidikan	1.045.855.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.050.000.000,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	185 Satuan Pendidikan	26.839.016.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		26.839.016.000,00
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	639 Orang	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	217 Dokumen	166.999.790,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		167.000.000,00
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	11.699.999.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.700.000.000,00
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1764 Ruang	840.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		840.000.000,00
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	215 Unit	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.000.000.000,00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik							
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	217 Satuan Pendidikan	763.672.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		763.672.506,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
					Semua Kel/Desa			
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		600.000.000,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	96.86 %	134.946.814.306,00			-	114.946.814.306,00
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	94 Unit	60.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40.000.000.000,00
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	850.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		850.000.000,00
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	72 Ruang	1.200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.200.000.000,00
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium							
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	3.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.000.000.000,00
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	91 Unit	4.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.000.000.000,00
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1.500.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.500.000.000,00
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	91 Unit	2.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah							
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1666 Paket	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.000.000.000,00
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		300.000.000,00
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	17041 Peserta Didik	1.600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.600.000.000,00
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1679 Orang	8.390.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.390.000.000,00
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	91 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	75 Satuan Pendidikan	27.119.454.306,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		27.119.454.306,00
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	273 Orang	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		300.000.000,00
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	91 Dokumen	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		300.000.000,00
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	22460 Satuan Pendidikan	1.587.360.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.587.360.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
					Semua Kel/Desa			
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1129 Ruang	10.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10.000.000.000,00
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	39969 Paket	11.300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.300.000.000,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD*	30,30 %	27.832.520.000,00			-	27.832.520.000,00
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD							
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	526 Unit	180.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		180.000.000,00
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	528 Unit	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		250.000.000,00
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD							
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	340 Paket	2.675.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.675.000.000,00
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD							
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	4.667.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.667.500.000,00
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2096 Orang	16.934.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16.934.000.000,00
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	571 Satuan Pendidikan	1.493.620.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.493.620.000,00
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD							
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	1.392.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.392.400.000,00
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD							
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	526 Orang	110.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		110.000.000,00
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	646 Dokumen	130.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		130.000.000,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase spnf yang terakreditasi*	85,71 %	23.058.400.000,00			-	23.058.400.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2586 Orang	18.358.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18.358.400.000,00
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	98 Satuan Pendidikan	410.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		410.000.000,00
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50 Orang	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.000.000,00
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.000.000,00
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10200 Paket	2.890.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.890.000.000,00
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah							
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2365 Paket	1.200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.200.000.000,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	*Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal*	88,89 %	200.000.000,00			-	200.000.000,00
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar*	55,56 %	200.000.000,00			-	200.000.000,00
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	5 Dokumen	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	*Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1*	92,45 %	2.000.000.000,00			-	2.000.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	71,05 %	2.000.000.000,00			-	2.000.000.000,00
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	2.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.000.000.000,00				3.000.000.000,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.000.000.000,00				3.000.000.000,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	*Persentase pengembangan kebudayaan*	55,10 %	1.595.000.000,00			-	1.595.000.000,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina*	40,00 %	728.000.000,00			-	728.000.000,00
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	668.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		668.000.000,00
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan							
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40 Orang	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.000.000,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	83,63 %	817.000.000,00			-	817.000.000,00
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya							
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	230 Objek	817.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		817.000.000,00
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga adat yang aktif*	41,67 %	50.000.000,00			-	50.000.000,00
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	15 Orang	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	*Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni*	34,82 %	250.000.000,00			-	250.000.000,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaku seni yang dibina*	50 %	250.000.000,00			-	250.000.000,00
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional							
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	110 Orang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000,00
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan							
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	15 Sertifikat	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	*Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal*	46,66 %	60.000.000,00			-	60.000.000,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	66,66 %	60.000.000,00			-	60.000.000,00
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota							
		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30 Orang	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.000.000,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	*Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan*	97,05 %	1.095.000.000,00			-	1.095.000.000,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota*	97,05 %	95.000.000,00			-	95.000.000,00
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya							
		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 Objek	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya							
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	132 Objek	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.000.000,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentase pengelolaan cagar budaya*	21,43 %	1.000.000.000,00			-	1.000.000.000,00
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya							
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	132 Objek	800.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		800.000.000,00
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya							
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	68 Objek	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000,00

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026. Merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dengan berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, sehingga Visi dan Misi Walikota Balikpapan serta target dan sasaran Pembangunan uang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Daerah tahun 2024. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien;
2. Renja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2024, dimana Renja Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksaan anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja tahun 2024;
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tatacara Penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
5. Renja Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan.

RANCANGAN AKHIR

RENJA

DINAS KESEHATAN
KOTA BALIKPAPAN

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia- Nya jua kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2024 sesuai waktu yang telah ditentukan. Dokumen Rancanagan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan disusun sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama kurun waktu perencanaan per tahun yaitu tahun 2024.

Kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rancanagan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2024. Pada kesempatan ini pula kami mengajak kepada seluruh pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami berharap Rancangan Akhir Rencana Kerja ini menjadi pedoman yang memberikan semangat untuk berupaya mencapai segenap tujuan dan indikator kinerja demi kontribusi dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan amanah demi terwujudnya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Balikpapan, 10 Agustus 2023
Kepala Dinas Kesehatan

Andi Sri Juliarty

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....**i**

DAFTAR ISI .....**ii**

BAB I

PENDAHULUAN **1**

I.2 Landasan Hukum.....**2**

I.3 Maksud danTujuan **3**

I.4 Sistematika Penulisan **4**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU **6**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan **6**

tahun yang lalu **6**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan....**28**

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 33

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....**38**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....**77**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **80**

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.....**81**

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan **81**

BAB IV

PENUTUP.....**114**

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk arah bagi program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam pembangunan bidang kesehatan Kota Balikpapan. Sebagai suatu dokumen rencana pelaksanaan program dan kegiatan, maka wajar apabila Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen renja perangkat daerah diikuti proses pemantauan, evaluasi dan revieu bertahap atas pelaksanaannya/implementasinya.

Rencana Kerja merupakan juga komponen dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dilanjutkan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran lebih rinci dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) mencakup periode tahunan. Rencana Kerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target – target capaian berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja adalah perencanaan pada unit organisasi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang pada saat penyusunan harus sinergi dan sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yakni RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra OPD.

Dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerjasasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan perlu menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2024. Penetapan Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan target yang harus dicapai dan akan dievaluasi melalui LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2024.

I.2 Landasan Hukum

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan berupaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui pembangunan bidang kesehatan yang akan menunjang keberhasilan pembangunan nasional, untuk itu perlu disusun rencana pembangunan bidang kesehatan yang spesifik, tepat tujuan dan sasaran dengan tetap berlandasakan pada aturan yang berlaku, yakni :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 –2021;
19. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Nomor 050/1072/Bappeda tentang Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tanggal 07 Agustus 2023;

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancanagn Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan bagi masyarakat agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja perangkat daerah masih bersifat indikatif dan disinergikan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang merupakan rangkaian kegiatan berkelanjutan saat penyusunan RKPD.

Penyusunan kebutuhan dan kegiatan perangkat daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mengacu pada ketentuan target kinerja pada Sustainable Development Goals Support (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kota Balikpapan dan mempertimbangkan capaian kinerja yang ada. Rumusan program dan kegiatan didasarkan atas pertimbangan urutan prioritas daerah dan menyesuaikan pagu dana indikatif yang telah ditetapkan.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika Penulisan penyusunan renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2022

Berisikan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Berisikan Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan serta Program dan Kegiatan Usulan 2023

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

Berisikan kesimpulan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan saran Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun yang lalu

Dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2024, diperlukan hasil evaluasi Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan yakni Tahun 2023 yang diuraikan dalam tabel T.C 29 dan tabel T.C 30 yakni rekapitulasi hasil realisasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan pencapaian Renstra OPD. Selain itu, salah satu target kinerja yang di gunakan dalam mengukur keberhasilan Program dan Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran.

Program dan kegiatan berdasarkan pencapaian atau realisasi APBD tiap program dan kegiatan, antara lain :

Tabel T.C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) 2016-2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BIDANG KESEHATAN									
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	85		80,00	84,00	105,00%	81	81	100,00%
1	02	02	2,01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA	Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementrian kesehatan	95,66		93,10	93,10	100,00%	96	96	100,00%
						Presentase Sapras memnuhi Standar Kesehatan	65		60	60	100,00%	65	65	100,00%

1	02	02	2.01	01	Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	2		1	0	0,00%	1	1	100,00%
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1					1	1	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Beriman	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1							
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1							
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan RS	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	3							
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	4		2	2	100,00%	2	2	100,00%

1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	4		3	2	66,67%	3	3	100,00%
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasiltas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	2		3	3	100,00%	3	3	100,00%
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasiltas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	10		5	5	100,00%	1	1	100,00%
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)			10	10	100,00%	542	542	100,00%
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Beriman	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)			7	7	100,00%			#DIV/0!
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSIA Sayang Ibu	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)			11	11	100,00%			#DIV/0!
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)			2	2	100,00%	5	5	100,00%
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan (Paket)	2		10	10	100,00%	10	10	100,00%

1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin RSUD Beriman	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan (Paket)	2							
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan (Paket)	1		11	11	100,00%	10	10	100,00%
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai RSUD Beriman	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan (Paket)	1							
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)			2	0	0,00%	2	2	100,00%
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasiltas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)			5	3	60,00%	2	2	100,00%
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)			5	5	100,00%	1.267	1.267	100,00%
1	**02**	**02**	**2,02**		**PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**	**100**		**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**100**	**100,00%**
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.904		11.549	10.880	94,21%	10.944	10.944	100,00%
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.409		11.024	9.934	90,11%	10.446	10.446	100,00%

1	02	02	2,02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.913		10.746	10.028	93,32%	9.949	9.949	100,00%
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	48.775		52.173	48.918	93,76%	49.030	49.030	100,00%
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	84.246		26.250	23.231	88,50%	84.814	84.814	100,00%
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	441.073		440.139	338.586	76,93%	440.792	440.792	100,00%
1	02	02	2,02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	39.453		60.966	32.493	53,30%	37.301	37.301	100,00%
1	02	02	2,02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	64.603		175.805	132.970	75,63%	64.082	64.082	100,00%
1	02	02	2,02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	17.552		17.263	22.233	128,79%	17.412	17.412	100,00%

1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	718		742	611	82,35%	698	698	100,00%
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	16.794		14.278	12.361	86,57%	14.580	14.580	100,00%
1	02	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	16.538		15.000	15.686	104,57%	18.246	18.246	100,00%
1	02	02	2,02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1		1	1	100,00%	10	10	100,00%
1	02	02	2,02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1		100	100	100,00%	11	11	100,00%
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyaraka (Dokumen)	1		1	1	100,00%	6	6	100,00%
1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		2	2	100,00%	4	4	100,00%

1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		34	34	100,00%	3	3	100,00%
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokuemen)	1		60	60	100,00%	5	5	100,00%
1	02	02	2,02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1		70	70	100,00%	4	4	100,00%
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1		60	60	100,00%	7	7	100,00%
1	02	02	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	5000		100	100	100,00%	5	5	100,00%
1	02	02	2,02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	35		100	100	100,00%	33	33	100,00%
1	02	02	2,02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dokumen)	1		7	7	100,00%	21	21	100,00%
1	02	02	2,02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1		100	100	100,00%	10	10	100,00%

1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1		100	100	100,00%	5	5	100,00%
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1		100	100	100,00%	10	10	100,00%
1	02	02	2,02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1		1	1	100,00%	4	4	100,00%
1	02	02	2,02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSIA Sayang Ibu)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1		1	1	100,00%	4	4	100,00%
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional PelayananPuskesmas	1		27	27	100,00%	1	1	100,00%
1	02	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1		3	3	100,00%	9	9	100,00%
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1					1	1	
					Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1					1	1	
					Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4					4	4	
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	10					17	17	

1	**02**	**02**	**2,03**		**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI**	**Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi**	**61,54**		**53,85**	**53,85**	**100,00%**	**62**	**62**	**100,00%**
1	02	02	2,03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dokumen)	1		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	02	02	2,03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1		1	1	100,00%	9	9	100,00%
1	02	02	2,03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan (Unit)	1		5	5	100,00%	5	5	100,00%
1	**02**	**02**	**2,04**		**PENERBITAN IZIN RS KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan**	**100**		**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**100**	**100,00%**
1	02	02	2,04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	15		4	4	100,00%	15	15	100,00%
1	02	02	2,04	02	Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	28		4	4	100,00%	28	28	100,00%

1	02	02	2,04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	28		10	10	100,00%	28	28	100,00%
1	02	02	2,04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1		2	2	100,00%	2	2	100,00%
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan Berijin**	**86**		**82**	**82**	**100,00%**	**84**	**84**	**100,00%**
1	**02**	**03**	**2,01**		**PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KAB/KOTA**	**Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)**	**86**		**82**	**82**	**100,00%**	**84**	**84**	**100,00%**
1	02	03	2,01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1		4	4	100,00%	2	2	100,00%
1	02	03	2,01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1		4	4	100,00%	4	4	100,00%

1	**02**	**03**	**2,02**		**PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMKyang ada di fasilitas kesehatan /Jumlah SDMKyang kuantitasnya sesuai dengan standar)**	**80**		**70**	**70**	**100,00%**	**75**	**75**	**100,00%**
1	02	03	2,02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1		1	1	100,00%	2	2	100,00%
1	02	03	2,02	02	Pemenuhan Kebutuhan SDMK sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	15		1	1	100,00%	10	10	100,00%
1	02	03	2,02	03	Pembinaan dan Pengawasan SDMK	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1		1	1	100,00%	2	2	100,00%
1	**02**	**03**	**2,03**		**PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SDMK TINGKAT DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase SDMK yang berkualitas (Jumlah SDMK yang berkualitas/Jumlah SDMK Keseluruhan)**	**76**		**72**	**72**	**100,00%**	**74**	**74**	**100,00%**
1	02	03	2,03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	160		100	203	203,00%	154	154	100,00%

1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Ijin Usaha Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan minum yang diterbitkan**	**100**		**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**100**	**100,00%**
1	**02**	**04**	**2,01**		**PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)**	**Persentase rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang diterbitkan**	**100**		**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**100**	**100,00%**
1	02	04	2,01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1		45	45	100,00%	3	3	100,00%
1	02	04	2,01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Sarana)	100		1	0	0,00%	100	100	100,00%
1	02	04	2,01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin (Sarana)	100		4	4	100,00%	100	100	100,00%

1	**02**	**04**	**2,02**		**PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI UNTUK SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS I TERTENTU DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA KELAS I TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA**	**Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diterbitkan**	**88**		**50**	**50**	**100,00%**			**#DIV/0!**
1	02	04	2,02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan PKRT Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	1		2	2	100,00%			#DIV/0!
1	02	04	2,02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	1		3	3	100,00%			#DIV/0!
1	**02**	**04**	**2,03**		**PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR PIRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA**	**Persentase rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh DKK**	**100**		**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**100**	**100,00%**

1	02	04	2,03	01	Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1		5	5	100,00%	6	6	100,00%
1	**02**	**04**	**2,04**		**PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)**	**Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang di terbitkan**	**85**		**75**	**75**	**100,00%**	**80**	**80**	**100,00%**
1	02	04	2,04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1		10	10	100,00%	8	8	100,00%
1	**02**	**04**	**2**		**PENERBITAN STICKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN**	**Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan**	**100**		**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**100**	**100,00%**
1	02	04	2,05	01	Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1		10	3	30,00%	1	1	100,00%

1	**02**	**04**	**2**		**PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**	**Persentase Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di periksa**	**85**		**75**	**75**	**100,00%**	**80**	**80**	**100,00%**
1	02	04	2,06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	150		4	4	100,00%	150	150	100,00%
1	02	04	2,06	02	Penyediaan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak LanjutPengawasan (Dokumen)	1		1	1	100,00%			#DIV/0!
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif**	**86**		**82**	**80**	**97,56%**	**84**	**84**	**100,00%**
1	**02**	**05**	**2,01**		**ADVOKASI, PEMBERDAYAAN< KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KAB/KOTA**	**Presentase Kelurahan yang cakupan Posyandu aktif minimal 80 %**	**83**		**81**	**100**	**123,46%**	**82**	**82**	**100,00%**
1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	3		4	4	100,00%	3	3	100,00%
1	**02**	**05**	**2,02**		**PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan GERMAS**	**100**		**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**100**	**100,00%**

1	02	05	2,02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1		2	2	100,00%	2	2	100,00%
1	**02**	**05**	**2,03**		**PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT TINGKAT DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya**	**100**		**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**100**	**100,00%**
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		1.250	1.040	83,20%	1	1	100,00%
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**84,05**		**83,93**	**81,00**	**96,51%**	**84**	**84**	**100,00%**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN**	**85,50**							
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**2**							
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**1**							
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	**1**							

1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	**1**							
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	**1**							
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**1**							
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**2**							
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**7**		**7**	**7**	**100,00%**	**7**	**7**	**100,00%**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DKK dan Puskesmas)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1287					1.287	1.287	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD Beriman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						2.100	2.100	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN (RSKB Sayang Ibu)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						80	80	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian**	**1406**							
1	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5							

1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (RSUD Beriman)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (RSIA Sayang Ibu)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30							
1	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10							
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49							
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**11**		**11**	**11**	**100,00%**	**11**	**11**	**100,00%**
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5		5	5	**100,00%**	7	7	**100,00%**
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15		16	16	**100,00%**	10	10	**100,00%**
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5					8	8	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4		4	4	**100,00%**	5	5	**100,00%**

1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9		9	9	**100,00%**	10	10	**100,00%**
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1		3	3	**100,00%**	3	3	**100,00%**
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5		1	1	**100,00%**			**#DIV/0!**
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			300	300	**100,00%**	1	1	**100,00%**
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1		150	128	**85,33%**	1	1	**100,00%**
1	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12		12	1	**8,33%**	1	1	**100,00%**
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah jenis layanan pengadaan BMD**	6		6	6	**100,00%**	6	6	**100,00%**
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan							6	6	
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1		3	3	**100,00%**	1	1	**100,00%**
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1		5	5	**100,00%**			**#DIV/0!**
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20							
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1		4	4	**100,00%**	1	1	**100,00%**

1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3	3	**100,00%**			**#DIV/0!**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis layanan jasa penunjang**	3					**3**	**3**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3	3	**100,00%**	36	36	**100,00%**
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3		3	3	**100,00%**	3	3	**100,00%**
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD**	6					**6**	**6**	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2		1	1	**100,00%**	6	6	**100,00%**
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	245		241	137	**56,85%**	243	243	**100,00%**
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5	5	**100,00%**	1	1	**100,00%**
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	1	**100,00%**	2	2	**100,00%**

1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			9	9	**100,00%**	2	2	**100,00%**
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	1	**100,00%**			**#DIV/0!**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Hasil Penilaian Kinerja BLUD**	**76**		**72**	**72**	**100,00%**	**74**	**74**	**100,00%**
1	02	01	2.10	01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			28	28	**100,00%**	28	28	**100,00%**
1	02	01	2.10	01	Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Beriman	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1	1	**100,00%**	1	1	**100,00%**
1	02	01	2.10	01	Peningkatan Pelayanan BLUD RS Sayang Ibu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1	1	**100,00%**	1	1	**100,00%**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Merujuk pada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, terdapat beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi dalam proses pelaksanaan segenap program dan kegiatan, antara lain :

a. Masih rendahnya Capaian Indikator Derajat Kesehatan

1. Meningkatnya Angka Kematian Ibu

   Terjadi peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2021 dibanding kan dengan tahun sebelumnya sangat dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid 19 yang melanda saat ini. Covid 19 yang menyerang semua kelompok termasuk ibu hamil. Hal ini terlihat dari proporsi penyebab kematian ibu akibat terkonfirmasi covid-19 sebesar 78%

   Tingginya angka kematian bayi (AKB) di Kota Balikpapan disebabkan oleh tingginya kasus ibu hamil terkonfirmasi covid 19 yang berdampak pada kematian bayi, masih tingginya kasus komplikasi selama persalinan dan ibu hamil KEK (Kurang energi Kronis), yang menyebabakan Berat Badan Bayi Lahir Rendah serta Asfiksia. Selain itu disebabkan oleh penyakit bawaan lahir dan Infeksi. Rendahnya Status Gizi Masyarakat terutama Gizi Lebih, Gizi Kurang dan stunting Rendahnya status gizi masyarakat di Kota Balikpapan disebabkan karena masih belum optimalnya penangan kesehatan ibu dan anak. Masih rendahnya cakupan ASI ekslusif, cakupan bayi baru lahir mendapat IMD, cakupan bayi mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) juga menjadi penyebab rendahnya status gizi masyarakat. Selain itu rendahnya kualitas kesehatan lingkungan terutama air baersih dan jamban juga mempengaruhi status gizi masyarakat. Terjadi peningkatan prevalensi kasus gizi kurang dan kasus gizi buruk dari target, hal ini karena selama masa pandemi kegiatan posyandu tidak dilaksanakan sebagai upaya pengendalian penyebaran virus Pemantauan pertumbuhan dilakukan secara mandiri oleh orang tua balita sehingga kemungkinan juga adanya kesalahan pengukuran pencatatan.

2. Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit

   Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ada yang berhasil baik di tahun 2021 yaitu Pengendalian Penyakit Demam Berdarah,

   Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Balikpapan pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan, dimana insiden Rate Kasus DBD kota Balikpapan pada tahun 2022 adalah 160.2/100.000.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan tetap dalam kondisi yang bersih melalui kegiatan 3 M plus yang optimal

Untuk pengendalian penyakit TB baru pada tahun 2022 mengalami peningkatan karena adanya peningkatan upaya yaitu alat pendeteksi penambahan mesin TCM sehingga meningkatkan sensitivitas diagnosis TB Paru dipuskesmas, selain itu juga dilakukan penyisiran missing case di rs swasta yg juga berkontribusi meningkatkan capaian penemuan kasus.

Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit dapat diatasi dengan Penguatan Penyakit yang dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), peningkatan deteksi dini Testing Lacak Isolasi, penguatan surveilans, peningkatan kompetensi petugas kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan dukungan pemerintah/lintas sektor serta peningkatan upaya promotif dan preventif.

3. Masih kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya.

   Rencana relokasi dan pembangunan Dinas Kesehatan serta Puskesmas. Puskesmas yang akan direlokasi yaitu Puskesmas Margasari. Puskesmas yang akan dilakukan pembangunan yaitu Puskesmas Gunung Bahagia. Untuk Puskesmas Klandasan Ilir, Puskesmas Baru Ilir (Pembangunan dan Perluasan), dan Puskesmas yang dilakukan pembangunan baru yaitu Puskesmas Sepinggan Baru.

   Sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu belum terpenuhinya IPAL di setiap puskesmas, masih belum cukupnya daya listrik dan jaringan internet di setiap puskesmas, masih belum cukupnya Meubelair di setiap puskesmas, belum terpenuhinya sarana TPS di setiap puskesmas, dan belum terpenuhinya bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang sesuai standar, serta rumah dinas tenaga kesehatan di setiap puskesmas, serta Penguatan sistem penanganan kegawatdaruratan dan penyediaan sarana prasarana PSC 119.

   Presentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas tidak mencapai target dikarenakan di Aplikasi ASPAK, jika ada 1 alat yang tidak bisa terpenuhi maka tidak bisa diadakan, dan ini mempengaruhi ketersediaan Sarana dan Prasarana baik Rumah Sakit maupun Puskesmas

Presentase Ketersediaan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit yang tidak mencapai target dikarenakan Rumah Sakit milik Pemerintah yang ada di kota Balikpapan belum memenuhi syarat Ketersediaan SDM minimal 4 Spesialis Dasar (Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Kandungan, Spesialis Bedah, Spesialis Anak) dan 2 Spesialis Penunjang (Spesialis Patologi Klinik dan Spesialis Radiologi). RSKB Sayang Ibu belum memenuhi syarat tersebut, itu yang membuat tidak tercapainya target.

4. Untuk Perencanaan kebutuhan obat, vaksin, dan BHMP sudah seseuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Penyediaannya mengunakan E katalog, jika tidak bisa dengan E katalog maka di lakukan Penunjukan langsung ataupun Tender sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Untuk pemetuhan alat kesehatan baik di Puskesmas maupun di Puskesmas Pembantu harus sesuai dengan Rencanan Kebutuhan Barang Unit (RKBU) yang diusulkan oleh Puskesmas. Selama semua alat kesehatan yang di perlukan oleh Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu ada di dalam RKBU ,maka Alat kesehatan yang diperlukan akan disediakan.
6. Pengelolaan sistem informasi kesehatan di puskesmas belum optimal yang disebabkan oleh masih kurangnya perangkat dan jaringan (sebagian), banyaknya aplikasi yang tidak terintegrasi serta kemampuan petugas operasional dan sumber daya yang berkompeten di bidang Teknologi Informasi.
7. Masih beredarnya sediaan farmasi, makanan minuman yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikarenakan masih kurangnya tenaga pengawas serta kurangnya kemampuan petugas pengawas (DFI/PKP).
8. Terbatasnya SDM Puskesmas , dimana satu orang dapat merangkap beberapa program sehingga sulit fokus pada satu program. Ditambah lagi dengan banyaknya program-program dari pusat yang dibebankan kepada puskesmas dengan SDM terbatas.
9. Monitoring Mutu Pelayanan Kesehatan dan Reakreditasi Fasilitas Kesehatan sulit dijalankan pada masa pandemi.

   Pada saat Pandemi Covid 19 , Kementriaan Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor YM02.02/VI/3099/2020 Tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas.
10. Pandemi Covid - 19 yang memberikan dampak negatif pada derajat kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat membutuhkan penanganan bersama lintas sektor.

b. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah mencapai UHC.
    1. Melalui program prioritas Walikota terpilih Kota Balikpapan, Pemberian Jaminan Kesehatan Nasional BPJS kelas III pada pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja, Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 26 membuat kota Balikpapan dapat mencapai UHC, yaitu 99,58% per Desember 2022
    2. Belum optimalnya pemutakhiran Data Penduduk yang didaftarkan Pemeritah Kota Balikpapan terkait perubahan status kependudukan serta perubahan status kesejahteraan.
    3. Masih ditemukan penduduk yang seharusnya masuk dalam DTKS namun belum terdata karena belum memiliki Dokumen Kependudukan (KK dan KTP) yang umumnya adalah penduduk pendatang.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yaitu berdasarkan indikator kinerja yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, seperti pada tabel 2.2 berikut:

Tabel T.C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		100%	100%	100%	100%	98,64%	100%	100%	100%	Belum Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%		100%	100%	100%	100%	96,15%	100%	100%	100%	Belum Tercapai
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%		100%	100%	100%	100%	99,16%	100%	100%	100%	Belum Tercapai
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Belum Tercapai
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%		100%	100%	100%	100%	76,72%	100%	100%	100%	Belum Tercapai
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%		100%	100%	100%	100%	60,46%	100%	100%	100%	Belum Tercapai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%		100%	100%	100%	100%	75,63%	100%	100%	100%	Belum Tercapai
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%		100%	100%	100%	100%	85,94%	100%	100%	100%	Belum Tercapai
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100%		100%	100%	100%	100%	86,12%	100%	100%	100%	Belum Tercapai
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%		100%	100%	100%	100%	88,44%	100%	100%	100%	Belum Tercapai

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil review capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021 dan faktor - faktor yang mempengaruhinya, kajian Renstra Kementerian Kesehatan RI, kajian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan kajian RTRW dan KLHS Kota Balikpapan, maka isu - isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

a. Derajat Kesehatan Yang Belum Optimal

- Jumlah Kematian Ibu

  Jumlah Kematian Ibu di Kota Balikpapan selama lima tahun terakhir (2016 - 2020) berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan sampai pada tahun 2020, namun mengalami peningkatan kembali dengan beberapa kasus kematian ibu hamil dan bersalin yang terpapar Covid - 19 khususnya pada tahun 2021. Kematian ibu yang berfluktuasi pada tahun 2016 – 2021 berjalan jauh melewati target Renstra Dinas Kesehatan disebabkan oleh perdarahan, eklamsi dan infeksi sebagai penyebab langsung serta gangguan sistem peredaran darah dan gangguan metabolic, namun yang harus diwaspadai adalah meningkatnya jumlah kematian karena penyakit tidak menular yang dialami oleh ibu hamil dan bersalin di samping adanya pandemi Covid – 19 yang berdampak pada beberapa kematian ibu hamil dan ibu bersalin. Kurangnya sarana dan prasarana persalinan khusus ibu bersalin dengan covid 19, antara lain kurangnya kamar bersalin khusus covid 19, ruang operasi khusus covid 19, dan ketakutan ibu hamil untuk melakukan Antenatal Care selama pandemic covid 19 karena takut tertular virus covid 19 juga menjadi penyumbang kasus kematian ibu bersalin di Kota Balikpapan. Kematian juga didominasi oleh ibu usia produktif dan juga tinggi pada ibu dengan paritas antara 1-3, begitu pun tempat terjadinya kematian yang jauh lebih tinggi di RS dibanding dengan di puskesmas atau pun di rumah. Pergeseran penyebab kematian yang terjadi di Kota Balikpapan disebabkan karena lemahnya pengelolaan pada determinan antara maupun determinan jauh dari penyebab kematian ibu. Faktor 3 (tiga) terlambat juga masih menjadi penyebab utama. Pelayanan kesehatan di Kota Balikpapan bertahap dilakukan berbagai upaya dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, hal ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan ibu nifas dibandingkan dengan cakupan tahun 2021, seperti K1(100%), K4(98,6%), TTD (90.6%), persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (96.2%),

persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (96.2%), KN1 (99.9%), KN Lengkap (98.5%) dan Vitamin A bufas (92.9%).

- Angka Kematian Bayi

  Kematian bayi di Kota Balikpapan juga masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016 - 2021). Jumlah kematian bayi di Tahun 2022 sebanyak 72 kasus atau 7/1.000 KH pada Angka Kematian Bayi, yang mana jauh lebih tinggi dari target Angka Kematian Bayi pada Renstra Dinas Kesehatan yaitu 1/1.000 KH.

  Penyebab kematian bayi karena BBLR, asfiksia, peneumonia, sepsis, kelainan congenital dan lain-lain, tidak terlepas dari riwayat kesehatan ibunya selama hamil. Selama Pandemi Covid 19 , kematian bayi di Kota Balikpapan juga di sebabkan virus Covid 19, dan kurangnya sarana prasarana untuk menangani bayi lahir yang terpapar Covid 19, seperti ruang PICU dan NICU yang khusus untuk bayi yang lahir dengan Covid 19. Kualitas kehamilan seorang ibu sangat menentukan kualitas janin yang dikandungnya. Begitu pun pemilihan pelayanan kesehatan mulai hamil hingga bersalin dan nifas, sangat menentukan kesehatan dan keselamatan bayinya. Oleh karena itu, faktor pengetahuan ibu, faktor gizi, kesehatan lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan dan faktor pendukung lainnya menjadi penting dalam upaya menurunkan kematian bayi.

- Morbiditas (kesakitan) pada Penyakit

  Kondisi kesehatan masyarakat di Kota Balikpapan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016 - 2020) cukup memprihatinkan dengan beban ganda penyakit. Saat penyakit menular masih tinggi, di saat yang sama penyakit tidak menular juga semakin meningkat. Hal ini terjadi karena kondisi lingkungan yang belum kondusif untuk hidup sehat, disertai dengan perilaku hidup masyarakat yang tidak sehat. Bahkan beberapa kasus kematian ibu yang terjadi di Kota Balikpapan, bukan disebabkan oleh kehamilannya, tetapi akibat penyakit tidak menular yang dideritanya, seperti Penyakit Jantung, Diabetes Mellitus dan Hipertensi.

  Untuk Tahun 2022 angka kesakitan mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 22,6 % pada tahun 2021 menjadi 6,47%, dikarenakan beberapa factor, salah satunya adalah Pandemi Covid 19 yang sudah melandai menyebabkan masyarakat memeriksakan kesehatannya, tetapi selain itu bisa juga dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam

menjaga kesehatannya dengan penerapan protocol kesehatan yang sangat baik selama masa pandemic ini menjadi penyumbang terbeasar juga dalam menurunkan angka kesakitan

Hasil review capaian indikator kinerja untuk Program Pengendalian Penyakit menunjukkan bahwa Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Balikpapan pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana insiden Rate Kasus DBD kota Balikpapan pada tahun 2022 adalah 160 /100.000, hal ini disebabkan oleh menurunnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan tetap dalam kondisi yang bersih melalui kegiatan 3 M plus yang optimal.

Untuk Pengendalian Penyakit TB paru pada tahun 2022 mengalami peningkatan karena adanya penambahan mesin TCM sehingga meningkatkan sensitivitas diagnosis TB Paru dipuskesmas. Selain itu juga dilakukan penyisiran missing case di RS swasta yg juga berkontribusi meningkatkan capaian penemuan kasus

- Status Gizi

  Kondisi kurang gizi pada Balita di Kota Balikpapan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016 - 2020) berfluktuasi dan cenderung menurun. Prevalensi kurang gizi pada balita menunjukkan angka 7,4% pada tahun 2022, sementara stunting pada balita, yang merupakan dampak dari kurang gizi mengalami penurunan , sebesar 6,82% pada tahun 2022.

b. Komitmen Global dan Nasional dan Daerah pada bidang kesehatan
   - Sustainable Development Goals (SDGs)

     Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari Milenium Development Goals (MDGs). SDGs berisi 17 tujuan transformative yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali dan terdapat 3 tujuan yang sangat terkait dengan kesehatan yaitu :

     Tujuan 2 : Mengakhiri kelaparan, termasuk di dalamnya mengatasi Gizi buruk.

     Tujuan 3: Kesehatan untuk semua lapisan penduduk (usia).

     Tujuan 6: Ketersediaan air bersih dan sanitasi.

     Saat ini Indonesia ternyata belum berhasil menurunkan angka kematian ibu, akses kepada sanitasi dan air minum, dan penurunan

prevalensi AIDS dan HIV, oleh karena itu SDGs menjadi suatu yang penting dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

- Balikpapan Kota Beriman

  Secara umum kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan di bidang Kesehatan yang tertuang dalam Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan dan program prioritas sangat mendukung pembangunan kesehatan dan juga sangat berkesesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baik aspek tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program strategis.

c. Sumber Daya Kesehatan yang masih kurang

   Sumber daya manusia kesehatan di Kota Balikpapan masih menjadi masalah, dimana presentase Ketersediaan SDM RS yang tidak mencapai target dikarenakan RS milik Pemerintah yang ada di kota Balikpapan belum memenuhi syarat Ketersediaan SDM minimal 4 Spesialis Dasar (Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Kandungan, Spesialis Anak dan Spesialis Bedah) dan 2 Spesialis Penunjang (Spesialis Patologi Klinik dan Spesialis Radiologi)

   RSKB Sayang Ibu belum memenuhi syarat tersebut, itu yang membuat tidak tercapainya target. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan spesifik seperti dokter, dokter gigi, tenaga kefarmasian/apoteker, tenaga ahli gizi (nutrisionis), tenaga ahli sanitasi (sanitarian), tenaga laboratorium (analis kesehatan), tenaga kesehatan masyarakat (penyuluh kesehatan masyarakat) dan lainnya. Persoalan berikutnya adalah distribusi tenaga tertentu yang kurang merata, tidak bersedia ditugaskan ke wilayah yang jauh dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Penyebab ketiga adalah tenaga yang tersedia, sebagian besar berstatus tenaga honorarium daerah, yang mempunyai hak berbeda dengan ASN, mereka diberi kewenangan terbatas padahal pada beberapa puskesmas seperti puskesmas perawatan lebih didominasi oleh jenis tenaga honorarium daerah tersebut. Selain itu, kompetensi tenaga dan juga kualitas sumber daya kesehatan kesehatan masih kurang.

d. Peran serta stakholder pada bidang kesehatan

   Upaya meningkatkan peran serta stakeholder membutuhkan kualitas dan kuantitas petugas Promosi Kesehatan . Sumber daya Manusia Tenaga Promosi Kesehatan sudah tersedia di semua Puskesmas. Oleh karena itu perlu penambahan tenaga promosi kesehatan sebagai penggerak

pemberdaya masyarakat

e. Kinerja dan akuntabilitas serta reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang profesional, sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (*mind-set*) dan pola budaya (*culture-set*) pegawai negeri dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

f. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Upaya peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dapat diatasi dengan penguatan Surveilans, penguatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan deteksi dini Testing, Lacak, Isolasi, peningkatan kompetensi petugas kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarkat dan dukungan pemerintah / lintas sector serta peningkatan upaya promotive dan preventif

g. Jaminan Kesehatan Masyarakat (*Universal Health Coverage*)

Untuk kota Balikpapan dengan adanya Peraturan Wali kota No 26 tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan kelas III, membuat kota Balikpapan bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) 99,58% per Desember 2022.

h. Pandemi dan pasca pandemi

Selama masa Pandemi COVID-19 tidak dipungkiri membawa pengaruh yang signifikan terhadap sektor perekonomian. Pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) secara langsung ataupun tidak, telah berdampak pada sektor industri yang harus mengurangi biaya produksi dengan menutup pabrik, merumahkan karyawan, hingga melakukan PHK, sebagai upaya rasional dalam

merespons penurunan jumlah permintaan dan pendapatan juga terhadap bidang kesehatan . Hal ini membawa efek domino seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah pun harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit dari anggaran negara untuk menyediakan stimulus dalam rangka menopang berbagai sektor yang terdampak.

Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pemerintah untuk menerapkan kebijakan new normal atau tatanan kehidupan normal baru sebagai respons realistis terhadap eksistensi COVID-19 serta diperkuat dengan estimasi cakupan vaksin sebagai satu-satunya senjata untuk menanggulangi COVID-19. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan tatanan kehidupan normal baru muncul sebagai kalkulasi rasional terhadap prakiraan kondisi ekonomi nasional, kompromi terhadap rentang waktu yang cukup lama , serta pemahaman realistis bahwa kemungkinan besar COVID-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi, sehingga masyarakat harus menjajaki kemungkinan untuk hidup berdampingan secara damai.

New normal sendiri dimaknai sebagai perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal. New normal juga diartikan sebagai skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Kebijakan new normal akan dikawal oleh penerapan protokol kesehatan secara ketat.

i. Fokus Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Kota Balikpapan yaitu: Pengembangan Rumah Sakit yaitu Instalasi Rawat Inap dan Rawat Jalan, Penambahan Bank Darah serta Kajian Kelayakan Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Kota Balikpapan dari tipe C menjdi Tipe B.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra OPD dan tingkat kinerja oleh OPD, sesuai arahan Kepala Daerah sesuai prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Review rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2022 adalah seperti pada tabel T.C 31 berikut ini :

Tabel T.C 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Balikpapan

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)**	**Satuan**	**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**		**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)**	**Satuan**	**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**	
				Target	**Rp**					**Target**	**Rp**
2		*3*		*5*	*6*	*2*		*3*		*5*	*6*
					467.366.255.172,00						528.538.586.943,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BIDANG KESEHATAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BIDANG KESEHATAN					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	345.962.655.172,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	273.149.987.543,00
PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA		Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementrian kesehatan	%	95,66	140.510.155.172,00	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA		Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementrian kesehatan	%	95,66	108.974.996.243,00
		Persentase Sapras memenuhi Standar Kesehatan	%	65				Persentase Sapras memenuhi Standar Kesehatan	%	65	

Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Balikpapan	Jumlah RS Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	71.810.155.172,00	Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Balikpapan	Jumlah RS Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	70.000.000.000,00
Pembangunan Puskesmas	Balikpapan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	3	25.000.000.000,00	Pembangunan Puskesmas	Balikpapan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat	Unit	1	18.420.000.000,00
Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Beriman	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	3.300.000.000,00	Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Beriman	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	0	0

Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	3.500.000.000,00	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	Unit	1	0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Balikpapan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	3	6.000.000.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Balikpapan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	1	0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Balikpapan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	5	1.000.000.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Balikpapan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	5	2.000.000.000,00

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	Unit		-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	Unit		-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	3	600.000.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan	Unit	6	2.250.000.000,00
Pengadaan Sarana Fasiltas Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	3	700.000.000,00	Pengadaan Sarana Fasiltas Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	0,00
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasiltas Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	10	700.000.000,00	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasiltas Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	0	0,00

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	15	3.000.000.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	27	3.000.000.000,00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Beriman	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	3	3.500.000.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Beriman	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	0
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSIA Sayang Ibu	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5	1.500.000.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSIA Sayang Ibu	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	6.504.996.243,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Balikpapan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	2	300.000.000,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Balikpapan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance	Unit	2	100.000.000,00

	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	Unit	10	275.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	Unit	10	700.000.000,00
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	2	11.500.000.000,00	Pengadaan Obat, Vaksin	Balikpapan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	6	6.000.000.000,00
Pengadaan Obat, Vaksin RSUD Beriman	Balikpapan	Jumlah jenis pengadaan obat dan vaksin RSUD Beriman	Paket	2	1.500.000.000,00	Pengadaan Obat, Vaksin RSUD Beriman	Balikpapan	Jumlah jenis pengadaan obat dan vaksin RSUD Beriman	Paket	0	0
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Balikpapan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	4.500.000.000,00	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Balikpapan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	0	0
Pengadaan Bahan Habis Pakai RSUD Beriman	Balikpapan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1.250.000.000,00	Pengadaan Bahan Habis Pakai RSUD Beriman	Balikpapan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	0	0
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)	Unit	3	300.000.000,00	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	0	0

Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasiltas Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)	Unit	10	275.000.000,00	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasiltas Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)	Unit	0	0
PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	%	100	203.950.000.000,00	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	%	100	161.624.991.300,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Balikpapan	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	12.733	450.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Balikpapan	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	10.904	500.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Balikpapan	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	12.154	400.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Balikpapan	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	10.409	300.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Balikpapan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	11.847	400.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Balikpapan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	9.913	400.000.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balikpapan	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	57.521	450.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balikpapan	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	48.775	400.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Balikpapan	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	28.941	250.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Balikpapan	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	84.246	300.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Balikpapan	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	508.341	350.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Balikpapan	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	441.073	625.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Balikpapan	Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	67.215	450.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Balikpapan	Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	39.453	400.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Balikpapan	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	213.877	200.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Balikpapan	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	64.603	250.000.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus	Balikpapan	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	19.799	200.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus	Balikpapan	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	17.552	500.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Balikpapan	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	818	200.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Balikpapan	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	718	250.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Balikpapan	Jumlah Orang Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	15.741	450.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Balikpapan	Jumlah Orang Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	16.794	600.000.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Balikpapan	Jumlah Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	16.538	450.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Balikpapan	Jumlah Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	16.538	300.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	Dokumen	1	600.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	Dokumen	1	250.000.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi Bencana	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	Dokumen	1	250.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi Bencana	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	Dokumen	1	200.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	Dokumen	1	1.000.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	Dokumen	1	700.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	Dokumen	2	300.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	Dokumen	1	350.000.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	Dokumen	1	600.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	Dokumen	1	500.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	6.000.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	3.400.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	Dokumen	1	200.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	Dokumen	1	200.000.000,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	500.000.000,00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	250.000.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Balikpapan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	Orang	5000	400.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Balikpapan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	Orang	5000	300.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Balikpapan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	Orang	35	250.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Balikpapan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	Orang	35	150.000.000,00
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dokumen)	Dokumen	1	10.000.000.000,00	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dokumen)	Dokumen	1	0,00
Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	100.000.000,00	Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca	Dokumen	1	100.000.000,00

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	Dokumen	1	1.500.000.000,00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	Dokumen	1	2.450.000.000,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	Dokumen	1	85.000.000.000,00	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	Dokumen	12	97.500.000.000,00
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	Dokumen	1		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	Dokumen	1	250.000.000,00
Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	Dokumen	1	13.000.000.000,00	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	Dokumen	4	12.499.992.000,00
Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSIA Sayang Ibu)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	Dokumen	1	10.000.000.000,00	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSIA Sayang Ibu)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	Dokumen	4	2.900.000.000,00

Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	Dokumen	27	60.000.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	Dokumen	27	26.699.999.300,00
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	Dokumen	3	10.000.000.000,00	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	Dokumen	3	4.950.000.000,00
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Sehat	Balikpapan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	Unit	0	0	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Sehat	Balikpapan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	Unit	3	600.000.000,00
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Balikpapan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	Unit	0	0	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Balikpapan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	Unit	1	1.650.000.000,00
	Balikpapan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	Orang	0	0	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Balikpapan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	Orang	0	200.000.000,00

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Balikpapan	Jumlah Orang Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	Orang	0	0	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Balikpapan	Jumlah Orang Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	Orang	0	150.000.000,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	0	0	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	300	100.000.000,00
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Balikpapan	Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok yang Tidak Ditemukan Aktifitas Merokok	Tatanan	0	0	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Balikpapan	Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok yang Tidak Ditemukan Aktifitas Merokok	Tatanan	4	150.000.000,00
	Balikpapan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Balikpapan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	4	300.000.000,00
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	61,54	1.000.000.000,00	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	61,54	1.550.000.000,00
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	350.000.000,00	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	0	0,00

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	350.000.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	1.550.000.000,00
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi	Balikpapan	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan (Unit)	Unit	1	300.000.000,00	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi	Balikpapan	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan (Unit)	Unit	0	0,00
PENERBITAN IZIN RS KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan	%	100	502.500.000,00	PENERBITAN IZIN RS KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan	%	100	1.000.000.000,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	Unit	15	45.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	Unit	15	100.000.000,00

Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	Unit	28	45.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	Unit	28	100.000.000,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	Unit	28	352.000.000,00	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	Unit	28	425.000.000,00
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	Dokumen	1	60.500.000,00	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	Dokumen	1	375.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan Berijin		86	1.522.600.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan Berijin		86	1.325.000.000,00
PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KAB/KOTA		Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)		86	350.000.000,00	PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KAB/KOTA		Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)		86	280.000.000,00
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	100.000.000,00	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	80.000.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	250.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	200.000.000,00

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN KOTA		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMKyang ada di fasilitas kesehatan /Jumlah SDMKyang kuantitasnya sesuai dengan standar)		80	172.600.000,00	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN KOTA		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMKyang ada di fasilitas kesehatan /Jumlah SDMKyang kuantitasnya sesuai dengan standar)		80	195.000.000,00
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	60.500.000,00	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	70.000.000,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Stabdar	Balikpapan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Orang	15	12.100.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Stabdar	Balikpapan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Orang	15	25.000.000,00

Pembinaan dan Pengawasan SDMK	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	100.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan SDMK	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	Dokumen	1	100.000.000,00
PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SDMK TINGKAT DAERAH KAB/KOTA		Persentase SDMK yang berkualitas (Jumlah SDMK yang berkualitas/Jumlah SDMK Keseluruhan)	%	76	1.000.000.000,00	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SDMK TINGKAT DAERAH KAB/KOTA		Persentase SDMK yang berkualitas (Jumlah SDMK yang berkualitas/Jumlah SDMK Keseluruhan)	%	76	850.000.000,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	Orang	200	1.000.000.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	Orang	160	850.000.000,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Ijin Usaha Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan minum yang diterbitkan	%	100	1.571.000.000,00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Ijin Usaha Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan minum yang diterbitkan	%	100	1.420.750.000,00

PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)		Persentase rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang diterbitkan	%	100	600.000.000,00	PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)		Persentase rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang diterbitkan	%	100	450.000.000,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	Dokumen	1	200.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	Dokumen	1	450.000.000,00

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Balikpapan	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Sarana)	Sarana	100	200.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Balikpapan	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Sarana)	Sarana	0	0
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Balikpapan	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin (Sarana)	Sarana	150 Sarana	200.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Balikpapan	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin (Sarana)	Sarana	0	0

PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI UNTUK SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS I TERTENTU DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA KELAS I TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA		Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diterbitkan	%	88	330.000.000,00	PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI UNTUK SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS I TERTENTU DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA KELAS I TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA		Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diterbitkan	%	88	265.750.000,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan PKRT Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	Dokumen	1	165.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan PKRT Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	Dokumen	1	265.750.000,00

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	Dokumen	1	165.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	Dokumen	0	0
PENEBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR PIRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA		Persentase rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh DKK	%	100	275.000.000,00	PENEBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR PIRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA		Persentase rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh DKK	%	100	350.000.000,00

Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	Dokumen	6	275.000.000,00	Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	Dokumen	6	350.000.000,00

PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)		Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang di terbitkan	%	80	100.000.000,00	PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)		Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang di terbitkan	%	80	80.000.000,00
Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	Dokumen	8	100.000.000,00	Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	Dokumen	1	80.000.000,00

PENERBITAN STICKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN		Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	%	100	100.000.000,00	PENERBITAN STICKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN		Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	%	100	75.000.000,00
Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	Dokumen	1	100.000.000,00	Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	Dokumen	1	75.000.000,00
PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA		Persentase Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di periksa	%	85	166.000.000,00	PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA		Persentase Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di periksa	%	85	200.000.000,00

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Balikpapan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan *Post Market* dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	Unit	150	121.000.000,00	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Balikpapan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan *Post Market* dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	Unit	150	200.000.000,00
Penyediaan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dokumen	1	45.000.000,00	Penyediaan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dokumen	0	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	86	10.275.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	86	4.100.000.000,00
ADVOKASI, PEMBERDAYAAN< KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KAB/KOTA		Presentase Kelurahan yang cakupan Posyandu aktif minimal 80 %	%	83	5.000.000.000,00	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN< KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KAB/KOTA		Presentase Kelurahan yang cakupan Posyandu aktif minimal 80 %	%	83	3.000.000.000,00

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	Dokumen	3	5.000.000.000,00	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	Dokumen	3	3.000.000.000,00
PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KAB/KOTA		Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan GERMAS	%	100	5.000.000.000,00	PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KAB/KOTA		Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan GERMAS	%	100	750.000.000,00
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	Dokumen	1	5.000.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	Dokumen	1	750.000.000,00
PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT TINGKAT DAERAH KAB/KOTA		Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	%	100	275.000.000,00	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT TINGKAT DAERAH KAB/KOTA		Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	%	100	350.000.000,00

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	Dokumen	1	275.000.000,00	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	Dokumen	1	350.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	%	84,05	108.035.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	%	84,05	248.542.849.400,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN		85,5	30.250.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN		85,5	30.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	30.250.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat		1	30.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jenis	7	97.450.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jenis	7	121.333.600.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DKK dan Puskesmas)	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1287	73.150.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DKK dan Puskesmas)	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	11200	86.000.000.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD Beriman	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	2	15.000.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD Beriman	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	2954	26.400.000.000,00
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN (RSKB Sayang Ibu)	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	14	9.300.000.000,00	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN (RSKB Sayang Ibu)	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	850	8.933.600.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	1406	730.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	1406	0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Balikpapan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	5	150.000.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Balikpapan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	300.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	30.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0

Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	49	250.000.000,00	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jenis	11	1.738.250.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jenis	11	2.645.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	4.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	220.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	320.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	16.500.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	15.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	600.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	600.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	300.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	350.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	35.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	35.000.000,00
Penyediaan Bahan/Material	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	20.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	40.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	50.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	500.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.250.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	2.750.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	15.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis layanan pengadaan BMD	Jenis	6	2.750.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis layanan pengadaan BMD	Jenis	6	7.895.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	602.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	500.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	256.700.000,00

Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	900.000.000,00	Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	1.000.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	750.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	576.300.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	300.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5.460.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	300.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis layanan jasa penunjang	Jenis	3	2.250.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis layanan jasa penunjang	Jenis	3	1.999.999.400,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	800.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	749.999.400,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	550.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	900.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	1.250.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	Jenis	6	3.086.500.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	Jenis	6	6.300.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	181.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	100.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	243	2.000.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	170	2.700.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	165.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	200.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	165.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.250.000.000,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	300.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1.050.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	275.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD					0	Peningkatan Pelayanan BLUD					108.339.250.000,00
	Balikpapan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	28		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Dinkes)	Balikpapan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	28	27.239.250.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)	Balikpapan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)	Balikpapan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	70.000.000.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSKB Sayang Ibu)	Balikpapan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSKB Sayang Ibu)	Balikpapan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	11.100.000.000,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna (pelayanan kesehatan primer), peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Usulan ini diperoleh selain dari saran dan masukan melalui kotak saran yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, juga melalui rekapitulasi data pengaduan layanan yang berada pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, juga melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan sampai kepada Forum OPD. Rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan terlihat pada tabel T.C 32 berikut:

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu (Rp.)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pembangunan Puskesmas	Puskesmas Gunung Bahagia	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	15.000.000.000	Rencana dialokasikan di tahun 2024 karena mengikuti kemampuan keuangan daerah
2	Pembangunan Puskesmas	Relokasi Puskesmas Margasari	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	15.000.000.000	Belum dialokasikan di tahun 2024 karena mengikuti kemampuan keuangan daerah
3	Pameran dan Seminar Kesehatan tingkat nasional	Balikpapan Sport Convention Center	Terselenggaranya Kegiatan Pameran dan Seminar Kesehatan	1 Paket	2.000.000.000	Rencana Akan dialokasikan di Tahun Anggaran 2024
4.	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	15.000.000.000	Anggaran Pembangunan belum di alokasikan di Tahun Anggaran 2024, yang dianggarkan hanya Anggaran untuk pembuatan Studi Kelayakan
5	Pembangunan Puskesmas	Keluirahan Sungai Nagka	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	15.000.000.000	Anggaran Pembangunan belum di alokasikan di Tahun Anggaran 2024, yang dianggarkan hanya Anggaran untuk pembuatan Studi Kelayakan
6	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 paket	15.000.000.000	Anggaran Pembangunan belum di alokasikan di Tahun Anggaran 2024, yang dianggarkan hanya Anggaran untuk pembuatan DED

7	Pembangunan Puskesmas	Relokasi Puskesmas dikarenakan Puskesmas yang ada dijadikan Rumah Sakit	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	15.000.000.000	Anggaran Pembangunan belum di alokasikan di Tahun Anggaran 2024, yang dianggarkan hanya Anggaran untuk pembuatan DED

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang kesehatan (RPJPK) 2005 – 2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat , bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi – tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Usia Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu dan menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita.

Strategi pembangunan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan 2005 – 2025 adalah :

- Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan;
- Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah ;
- Pengembangan Upaya dan Pembiayaan Kesehatan;
- Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan.

RPJMN 2020 – 2024, sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan misi " Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas", Arah dan kebijakan provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tahun 2019-2023, pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga Kesehatan sesuai standar;
2. Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

dan penyakit tidak menular serta wabah sejak dini dengan penguatan sistem surveillance melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat;

3. Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
4. Peningkatan pencapaian derajat Kesehatan melalui promosi kesehatan dan membangun kemitraan dengan lintas sektor;
5. Peningkatan kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan, maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menindak lanjuti perwujudan visi dan misi tersebut sebagaimana terdapat dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan lebih terarah dan mengetahui hal – hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

3.2.2 Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, dirumuskan beberapa sasaran untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sasaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) terdiri dari dua (2) yaitu :

1. Meningkatnya Angka Harapan Hidup
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan

fungsi serta sesuai dengan amanat Undang - undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada tujuan akhir Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan berikut indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024.

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Balikpapan

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									528.538.586.943,00				**654.795.125.939,00**
1	02				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BIDANG KESEHATAN**					APBD			
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**82**	**273.149.987.543,00**	APBD		**84**	**394.262.500.939,00**
1	02	02	2.01		**PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA**	**Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementrian kesehatan**		**95,66**	**108.974.996.243,00**	APBD		**100**	**196.588.458.939,00**
						Persentase Sapras memenuhi Standar Kesehatan		**65**				**65**	
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah RS Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Balikpapan	1	70.000.000.000,00	APBD		1	80.331.350.000,00

1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat	Balikpapan	1	18.420.000.000,00	APBD		1	26.000.000.000,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Balikpapan	5	2.000.000.000,00	APBD		5	3.000.000.000,00
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan	Balikpapan	6	2.250.000.000,00	APBD		6	2.000.000.000,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Balikpapan	27	3.000.000.000,00	APBD		27	10.000.000.000,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSIA Sayang Ibu	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Balikpapan	0	6.504.996.243,00	APBD		0	64.000.000.000,00

1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance	Balikpapan	2	100.000.000,00	APBD		2	350.000.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	Balikpapan	10	700.000.000,00	APBD		10	300.000.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Balikpapan	6	6.000.000.000,00	APBD		6	10.607.108.939,00
1	02	02	2.02		**PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**		**100**	**161.624.991.300,00**	APBD		**100**	**196.707.492.000,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	10.904	500.000.000,00	APBD		10.904	495.000.000,00

1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	10.409	300.000.000,00	APBD		10.409	440.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	9.913	400.000.000,00	APBD		9.913	440.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	48.775	400.000.000,00	APBD		48.775	495.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	84.246	300.000.000,00	APBD		84.246	275.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	441.073	625.000.000,00	APBD		441.073	385.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	39.453	400.000.000,00	APBD		39.453	495.000.000,00

1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	64.603	250.000.000,00	APBD		64.603	220.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	17.552	500.000.000,00	APBD		17.552	220.000.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	718	250.000.000,00	APBD		718	220.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Orang Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	16.794	600.000.000,00	APBD		16.794	495.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	16.538	300.000.000,00	APBD		16.538	495.000.000,00

1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	Balikpapan	1	250.000.000,00	APBD		1	660.000.000,00
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	Balikpapan	1	200.000.000,00	APBD		1	300.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	Balikpapan	1	700.000.000,00	APBD		1	4.000.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	Balikpapan	1	350.000.000,00	APBD		1	900.000.000,00

1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	Balikpapan	1	500.000.000,00	APBD		1	1.400.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Balikpapan	1	3.400.000.000,00	APBD		1	7.000.000.000,00
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	Balikpapan	1	200.000.000,00	APBD		1	220.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	Balikpapan	1	250.000.000,00	APBD		1	550.000.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	Balikpapan	5000	300.000.000,00	APBD		5000	475.000.000,00

1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	Balikpapan	35	150.000.000,00	APBD		35	300.000.000,00
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca	Balikpapan	1	100.000.000,00	APBD		1	900.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	Balikpapan	1	2.450.000.000,00	APBD		1	6.500.000.000,00
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	Balikpapan	12	97.500.000.000,00	APBD		12	95.000.000.000,00
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	Balikpapan	1	250.000.000,00	APBD		1	275.000.000,00
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	Balikpapan	4	12.499.992.000,00	APBD		4	12.499.992.000,00

1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSIA Sayang Ibu)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	Balikpapan	4	2.900.000.000,00	APBD		4	12.000.000.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	Balikpapan	27	26.699.999.300,00	APBD		27	29.447.500.000,00
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	Balikpapan	3	4.950.000.000,00	APBD		3	5.315.000.000,00
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	Balikpapan	3	600.000.000,00	APBD		3	660.000.000,00
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	Balikpapan	1	1.650.000.000,00	APBD		1	1.430.000.000,00

1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	Balikpapan	0	200.000.000,00	APBD		0	250.000.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	Balikpapan	0	150.000.000,00	APBD		0	175.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Balikpapan	300	100.000.000,00	APBD		300	110.000.000,00
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok yang Tidak Ditemukan Aktifitas Merokok	Balikpapan	4	150.000.000,00	APBD		4	165.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Balikpapan	4	300.000.000,00	APBD		4	11.500.000.000,00
1	02	02	2.03		**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI**	**Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi**		**61,54**	**1.550.000.000,00**	APBD		**61,54**	**400.000.000,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	Balikpapan	1	1.550.000.000,00	APBD		1	400.000.000,00

1	02	02	2.04		**PENERBITAN IZIN RS KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan**		**100**	**1.000.000.000,00**	APBD		**100**	**566.550.000,00**
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	Balikpapan	15	100.000.000,00	APBD		15	50.000.000,00
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	Balikpapan	28	100.000.000,00	APBD		28	50.000.000,00
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	Balikpapan	28	425.000.000,00	APBD		28	400.000.000,00

1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	Balikpapan	1	375.000.000,00	APBD		1	66.550.000,00
1	02	03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan Berijin**		**86**	**1.325.000.000,00**	APBD		**88**	**1.676.550.000,00**
1	02	03	2.01		**PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KAB/KOTA**	**Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)**		**86**	**280.000.000,00**	APBD		**88**	**385.000.000,00**
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	Balikpapan	1	80.000.000,00	APBD		1	110.000.000,00

1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	Balikpapan	1	200.000.000,00	APBD		1	275.000.000,00
1	02	03	2.02		**PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMKyang ada di fasilitas kesehatan /Jumlah SDMKyang kuantitasnya sesuai dengan standar)**		**80**	**195.000.000,00**	APBD		**85**	**191.550.000,00**
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	Balikpapan	1	70.000.000,00	APBD		1	66.550.000,00

1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Stabdar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	15	25.000.000,00	APBD		15	15.000.000,00
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan SDMK	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	Balikpapan	1	100.000.000,00	APBD		1	110.000.000,00
1	02	03	2.03		**PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SDMK TINGKAT DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase SDMK yang berkualitas (Jumlah SDMK yang berkualitas/Jumlah SDMK Keseluruhan)**		**76**	**850.000.000,00**	APBD		**78**	**1.100.000.000,00**
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	Balikpapan	160	850.000.000,00	APBD		160	1.100.000.000,00
1	02	04			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Ijin Usaha Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan minum yang diterbitkan**		**100**	**1.420.750.000,00**	APBD		**100**	**1.178.100.000,00**

1	02	04	2.01		**PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)**	**Persentase rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang diterbitkan**		**100**	**450.000.000,00**	APBD		**100**	**220.000.000,00**
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	Balikpapan	1	450.000.000,00	APBD		1	220.000.000,00
1	02	04	2.02		**PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI UNTUK SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS I TERTENTU DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA KELAS I TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA**	**Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diterbitkan**		**88**	**265.750.000,00**	APBD		**90**	**200.000.000,00**

1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan PKRT Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	Balikpapan	1	265.750.000,00	APBD		1	200.000.000,00
1	02	04	2.03		**PENEBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR PIRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA**	**Persentase rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh DKK**		**100**	**350.000.000,00**	APBD		**100**	**325.000.000,00**

1	02	04	2.03	0001	Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	Balikpapan	6	350.000.000,00	APBD		6	325.000.000,00
1	02	04	2.04		**PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)**	**Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang di terbitkan**		**85**	**80.000.000,00**	APBD		**90**	**150.000.000,00**

1	02	04	2.04	0001	Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	Balikpapan	1	80.000.000,00	APBD		1	150.000.000,00
1	02	04	2.05		**PENERBITAN STICKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN**	**Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan**		**100**	**75.000.000,00**	APBD		**100**	**150.000.000,00**
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	Balikpapan	1	75.000.000,00	APBD		1	150.000.000,00

1	02	04	2.06		**PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**	**Persentase Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di periksa**		**85**	**200.000.000,00**	APBD		**90**	**133.100.000,00**
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan *Post Market* dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	Balikpapan	150	200.000.000,00	APBD		150	133.100.000,00
1	02	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif**		**86**	**4.100.000.000,00**	APBD		**88**	**10.302.500.000,00**
1	02	05	2.01		**ADVOKASI, PEMBERDAYAAN< KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KAB/KOTA**	**Presentase Kelurahan yang cakupan Posyandu aktif minimal 80 %**		**83**	**3.000.000.000,00**	APBD		**84**	**5.500.000.000,00**
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	Balikpapan	3	3.000.000.000,00	APBD		3	5.500.000.000,00

1	02	05	2.02		**PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan GERMAS**		**100**	**750.000.000,00**	APBD		**100**	**4.500.000.000,00**
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	Balikpapan	1	750.000.000,00	APBD		1	4.500.000.000,00
1	02	05	2.03		**PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT TINGKAT DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya**		**100**	**350.000.000,00**	APBD		**100**	**302.500.000,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	Balikpapan	1	350.000.000,00	APBD		1	302.500.000,00
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**		**84,05**	**248.542.849.400,00**	APBD		**84,10**	**247.375.475.000,00**

1	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN**		**85,50**	**30.000.000,00**	APBD		**85,61**	**6.050.000,00**
1	02	01	2.01	0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat**		**1**	**30.000.000,00**	APBD		**1**	6.050.000,00
1	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah**		**7**	**121.333.600.000,00**	APBD		**7**	**124.685.000.000,00**
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DKK dan Puskesmas)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	11200	86.000.000.000,00	APBD		11200	80.465.000.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD Beriman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	2954	26.400.000.000,00	APBD		2954	30.220.000.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN (RSKB Sayang Ibu)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	850	8.933.600.000,00	APBD		850	14.000.000.000,00
1	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah**		**11**	**2.645.000.000,00**	APBD		**11**	**2.335.425.000,00**
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	5	10.000.000,00	APBD		5	4.400.000,00

1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	15	320.000.000,00	APBD		15	270.000.000,00
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Balikpapan	5	15.000.000,00	APBD		5	18.000.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balikpapan	4	600.000.000,00	APBD		4	900.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	9	350.000.000,00	APBD		9	450.000.000,00
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Balikpapan	1	35.000.000,00	APBD		1	45.000.000,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	1	50.000.000,00	APBD		1	45.000.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	1	1.250.000.000,00	APBD		1	600.000.000,00
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	12	15.000.000,00	APBD		12	3.025.000,00

1	02	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah jenis layanan pengadaan BMD**		6	**7.895.000.000,00**	APBD		6	**3.480.000.000,00**
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Balikpapan	6	602.000.000,00	APBD		6	1.000.000.000,00
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Balikpapan	7	256.700.000,00	APBD		7	650.000.000,00
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Balikpapan	5	1.000.000.000,00	APBD		5	1.000.000.000,00
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Balikpapan	10	576.300.000,00	APBD		10	500.000.000,00
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Balikpapan	1	5.460.000.000,00	APBD		1	330.000.000,00
1	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis layanan jasa penunjang**		**3**	**1.999.999.400,00**	APBD		**3**	**1.870.000.000,00**
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Balikpapan	12	749.999.400,00	APBD		12	880.000.000,00

1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	3	1.250.000.000,00	APBD		3	990.000.000,00
1	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD**		6	**6.300.000.000,00**	APBD		6	**3.114.000.000,00**
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Balikpapan	6	100.000.000,00	APBD		6	200.000.000,00
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Balikpapan	170	2.700.000.000,00	APBD		170	2.200.000.000,00
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Balikpapan	5	200.000.000,00	APBD		5	182.000.000,00
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balikpapan	1	2.250.000.000,00	APBD		1	182.000.000,00

1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balikpapan	4	1.050.000.000,00	APBD		4	350.000.000,00
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Hasil Penilaian Kinerja Indikator**	**Balikpapan**	**76**	**108.339.250.000,00**	APBD		**78**	**111.885.000.000,00**
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Dinkes)	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Balikpapan	28	27.239.250.000,00	APBD		28	30.685.000.000,00
1	02	01	2.11	0002	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Balikpapan	1	70.000.000.000,00	APBD		1	70.000.000.000,00
1	02	01	2.12	0003	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSKB Sayang Ibu)	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Balikpapan	1	11.100.000.000,00	APBD		1	11.200.000.000,00

Program dan Kegiatan yang telah diuraikan di atas sebagai bagian dari upaya Dinas Kesehatan dalam rangka pencapaian target bidang kesehatan agar tetap sejalan dengan yang diuraikan pada SDG's, SPM, RPJMN, RPJMD Kota Balikpapan. Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan disesuaikan dengan target capaian kinerja serta kebutuhan pagu dana pada Tahun 2024. Harapan yang ingin dicapai adalah agar segenap program dan kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal dan berdaya guna sesuai dengan target yang terus direncanakan dan ujungnya adalah pada peningkatan pencapaian status kesehatan di Kota Balikpapan.

BAB IV
PENUTUP

Status kesehatan dan faktor penentu status kesehatan mengindikasikan berbagai area masalah kesehatan masyarakat yang harus memperoleh prioritas dalam pembangunan kesehatan. Rumusan Strategi dan Program yang berhasil dirumuskan dalam dokumen Perjanjian Kinerja ini diharapkan senantiasa dapat mencerminkan kerjasama, koordinasi dan integrasi antar unit-unit kerja jajaran kesehatan untuk mencapai tujuan Program Pembangunan khususnya bidang Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi renja merupakan hal penting yang perlu terus diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Rencana Kerja memberikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun anggaran tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yangada.

Diharapkan dengan telah disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2024.

C. RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen rencana kerja yang disuse oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Penyusuna Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Undag-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keungan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja Perangkat Daerah disusun guna mengoperasionalkan Renstra Perangkat Daerah tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Renja dimaksud agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024 terutama berpedoman Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan Perangkat Daerah Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024 Kota Balikpapan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di

Kalimantan (lembar negara RI Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-undang (lembar Negara RI nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 tahun 2024, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024;
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renja.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini menguraikan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota Balikpapan Nomor : 188.45-919/2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2022 dapat dilihat pada pada Tabel 2-1:

Tabel 2-1 Capaian Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	54,26	51,41	100,27
2	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	%	47,37	46,94	100,66

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	%
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	97,85	97,96	100,11
4	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	79,95	82,18	102,79
5	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	Unit	45	68	151,11
6	Meningkatknya pelayanan jasa konstruksi	persentase pelayanan Jasa konstruksi	%	29,12	28,37	97,43
7	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum	Nilai	27	27	100

Sumber : LKjIP DPU Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran IKU dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian IKU Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022 sebesar 107,47% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “SANGAT TINGGI” .

2.1.2 PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Adapun Perkiraan Capaian Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024, dan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra s/d tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2-2.

TABEL 2-2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
KOTA BALIKPAPAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**Meningkatnya kepuasan pelayanan infrastruktur Kota Balikpapan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**			78	**19.213.632.612**	**78**	**14.479.531.381**	**78**	**75,36 %**	**78**	**50.806.299.521**	100%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			0	**13.114.378.000**	**0**	**8.988.366.866**	**0%**	**68,54 %**	**0%**	**47.423.003.266**	0%	361,61%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	38.434.636.400	65	9.608.659.100	65	8.988.366.866	100%	93,54 %	65	47.423.003.266	100%	94,85%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Perkantoran**				**756.700.000**	**0**	**656.571.365**	**0%**	**86,77 %**	**0**	**3.837.902.987**	0%	31,96%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Listrik	7	49.725.500	7	20.000.000	7	19.846.200	100%	**99,23 %**	14	69.571.700	41%	86,96%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	34	363.656.840	250	375.000.000	216	280.653.075	86,40%	74,84 %	250	644.309.915	100%	107,07%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Harian	120	695.936.950	120		0	-			120	695.936.950	100%	62,87%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	4	404.361.970	25	121.000.000	21	117.220.400	84	96,88 %	25	521.582.370	100%	94,62%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	56	1.667.650.362	333	240.700.000	277	238.851.690	83,18	99,23 %	333	1.906.502.052	100%	86,27%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**				**5.100.000.000**	**0%**	**1.485.959.200**	**0,00%**	29,14 %	**0%**	**2.738.986.340**	**0%**	**8,52%**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas				4.100.000.000	1	523.600.000	0,00%		1		25%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan mesin	16	1.776.627.140		1.000.000.000	16	962.359.200	0,00%	96,24 %	16	2.738.986.340	100%	83,80%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				**1.857.472.512**	**0**	**1.772.498.440**	**0,00%**	**95,43 %**	**136**	**4.115.936.967**	13600%	503,48%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Jasa Komunikasi,	4	1.182.208.587	95	379.922.200	48	317.637.219	0,51%	83,61 %	95	1.499.845.806	100%	102,05%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Sumber Daya Air dan Listrik												
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Tenaga Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	13	304.200.000	37	1.477.550.312	167	1.454.861.221	4,51%	98,46 %	37	1.759.061.221	100%	40,65%
			Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor	4	857.029.940	4				0,00%		4	857.029.940	100%	77,18%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Disiplin Pegawai**				**1.890.801.000**	**0**	**1.576.135.510**	**0,00%**	**83,36 %**	**75**	**4.949.935.520**	75%	1752,19 %
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	85	157.370.790	50	1.140.801.000	61	843.702.860	1,22%	73,96 %	50	1.001.073.650	100%	28,98%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	0		1	250.000.000	22	239.888.250	22	95,96 %	22	239.888.250	100%	100,00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis sapras gedung kantor yang dipelehara	2	3.216.429.220	1	500.000.000	9	492.544.400	9,00%	98,51 %	3	3.708.973.620	100%	275,20%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan**			**55,85%**	**12.170.000.000**	**-**	**10.768.878.847**	0,00%	0,88%	**0,56**	**52.883.862.414**		
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Titik Banjir**	**26**	**42.438.882.884**		**12.170.000.000**		**10.768.878.847**	**0,00%**	0,88%		**52.883.862.414**	0,00%	38,14%
		Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi				320.000.000	1	306.186.000	**0,00%**	0,96%	1	306.186.000	100,00%	95,68%
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Titik Bendali yang di normalisasi (Mengembalikan Kapasitas Tampungan)	64	25.443.099.691	50	7.430.000.000	28	7.090.527.933	0,56%	0,95%	92	32.533.627.624	184,00%	104,44%
		Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Bendali yang dipelihara	0	16.671.883.876	2.500	4.420.000.000	6	3.372.164.914	0,00%	0,76%	6	20.044.048.790	0,24%	131,33%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan**	**0,796**	**38.214.563.590**	**1**	**19.500.082.910**	**0**	**17.555.802.023**	0,00%	0,90%		**68.889.464.526**		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Layanan Air Bersih**				**19.500.082.910**	**0**	**17.555.802.023**	**0,00%**	0,90%		**68.889.464.526**		
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen Supervisi				500.000.000	1	483.160.300	**0,00%**	0,97%	1	483.160.300	14,29%	23,71%
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa Sambungan Rumah Air Bersih yang dibangun (km)	2721	51.333.662.503	5309,9	14.899.999.910	5.310	13.559.138.514	1,00%	0,91%	8031	64.892.801.016	12747,46 %	109,05%
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa Sambungan Rumah Air Bersih yang dibangun (km)			500	4.100.083.000	516	3.513.503.209	1,03%	0,86%	516	3.513.503.209	819,05%	85,69%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik**	**0,6**	**352.672.567.794**	**43,58%**	**71.077.799.837**		**41.828.314.091**	0,00%	0,59%		**179.600.420.835**		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Panjang Saluran Drainase yang Terpelihara**	**0,9**	**68.611.846.881**	**90,00%**	**71.077.799.837**		**41.828.314.091**	0,00%	0,59%		**179.600.420.835**		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen Perencanaan				1.049.562.414	11	1.049.562.414	**0,00%**	1,00%	11	1.049.562.414	100	18,43%
			Luas Lahan Bendali yang dibebaskan		-	-		0	0	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0	0,00%
		Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen Supervisi	2	3.853.037.633	5	1.920.000.000	33	1.734.854.700	6,60%	0,90%	35	5.587.892.333	700	98,53%
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang dibangun	2928,8	80.772.326.161	2.500	38.358.000.000	4.949	16.389.096.814	1,98%	0,43%	7877	97.161.422.976	315,10%	53,37%
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran yang ditingkatkan	1160,4	36.474.859.073	12.500	11.107.000.000	3.319	9.562.711.443	0,27%	0,86%	4479	46.037.570.517	35,84	71,92%
		Rehabilitasi Saluran	Panjang Saluran yang dipelihara	0	16.671.883.876	2.500	4.080.000.000	1.430	4.196.407.900	0,57%	1,03%	1430	20.868.291.776	57,20	136,73%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Drainase Perkotaan													
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran yang dipelihara			1	9.917.799.837	0	8.895.680.820	0,00%	0,90%	0	8.895.680.820	0,00	18,21%
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Presentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik**	**0,6**	**444.080.680.317**	**70%**	**164.961.999.700**	**-**	**131.294.525.643**	0,00%	0,80%		**212.066.851.804**	0	114,43%
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik**	**0,6**	**352.672.567.794**	**70,00%**	**164.961.999.700**		**131.294.525.643**	0,00%	0,80%		**212.066.851.804**	0,00%	239,49%
			Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik						-	**0,00%**	**0,00%**				
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Lingkungan	2928,8	80.772.326.161,39	209386	158.212.000.000	209.386	124.604.224.363	1,00%	0,79%	212315	205.376.550.524	101,40%	117,86%
			Panjang Drainase Lingkungan						0	**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Lingkungan			750	4.000.000.000	750	3.972.069.000	1,00%	0,99%	750	3.972.069.000	100,00%	88,27%
			Panjang Drainase Lingkungan							**0,00%**	**0,00%**	0	-	0,00%	0,00%
		Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Supervisi			23	1.349.999.700	23	1.335.499.600	1,00%	0,99%	23	1.335.499.600	18,11%	21,72%
		Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan			24	1.400.000.000	24	1.382.732.680	1,00%	0,99%	24	1.382.732.680	126,32%	329,22%
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik**	**0,8548**	**120.614.411.846**	**82,26**	**72.397.122.000**		**67.668.314.319**	0,00%	0,93%		**162.342.615.944**	0,00%	31,89%
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot	**persentase bangunan layak teknis**				**72.397.122.000**		**67.668.314.319**	0,00%	0,93%		**162.342.615.944**	0,00%	224,24%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		a, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung													
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	0	41.400.465.525	4	17.005.000.000	4	15.650.909.179	1,00%	0,92%	4	57.051.374.704	100	13,61%
			Jumlah Gedung Kantor yang ditingkatkan	45	23.049.647.614	25		72	0	2,88%	0,00%	117	23.049.647.614	468	46,10%
			Dokumen Perencanaan	10	3.006.327.326	4		22	0	5,50%	0,00%	32	3.006.327.326	800	85,31%
			Dokumen Supervisi	10	1.355.534.155	84		19	0	0,23%	0,00%	29	1.355.534.155	34,52	25,65%
		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Negara yang dibangun			1	55.000.000.000	1	51.625.283.140	1,00%	0,94%	1	51.625.283.140	0,00	0,00%
		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	0	25.862.327.004	150	392.122.000	1	392.122.000	0,01%	1,00%	1	26.254.449.004	0,67	186,17%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
								0	0	0,00%	0,00%	0	-	0,00	0,00%
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga**	**0,9107**	**46.161.147.736**	**1**	**30.950.000.000**	**0%**	**29.721.774.175**			**0**	**121.977.683.771**	0%	94,34%
			Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	**0,77**	**39.828.705.376**	**1**			**-**						
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					**30.950.000.000**	**0**	**29.721.774.175**				**121.977.683.771**	0,00%	0,00%
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ ditingkatkan	0	38.092.462.601	5	30.950.000.000	1	29.721.774.175	0,20%	0,96%	1	67.814.236.776	20%	86,12%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ ditingkatkan	1	32.973.614.875	1		1	0	1,00%	0,00%	2	32.973.614.875	200%	71,05%
			Dokumen Perencanaan	2	795.874.240	3		1	0	0,33%	0,00%	3	795.874.240	100	53,36%
			Dokumen Supervisi	2	509.087.980	3		3	0	1,00%	0,00%	5	509.087.980	166,67	22,75%
			Jumlah Prasarana Olahraga yang dilakukan	0	19.884.869.900			11.822	0	0,11%	0,00%	11822	19.884.869.900	11,26	25,12%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			pengadaan lahannya (M2)												
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Indeks Aksesibilitas**	**1,4753**	**99.392.341.183**	**1,478**	147.334.728.705		**143.490.631.833**					0,00%	0,00%
			Tingkat Kemantapan Jalan	0,91674	232.560.364.328	87,09									
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					**147.334.728.705**		**143.490.631.833**				**485.623.413.461**	0,00%	0,00%
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan	1	1.937.821.900	5	2.175.000.000	19	2.074.650.800	3,80%	0,00%	20	4.012.472.700	400%	38,45%
			Dokumen Perencanaan Peningkatan Jalan	11	6.598.595.400	50		0	0	0,00%	0,00%	11	6.598.595.400	22%	62,08%
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen				425.000.000	1	365.148.200	0,00%	0,00%	1	365.148.200	0%	0,00%
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	2,195	95.122.019.133	20	23.272.000.000	1.809	20.821.652.069	90,45%	0,00%	1811	115.943.671.202	9056	55,85%
			Dokumen Supervisi	2	1.877.892.250	25		4	0	0,16%	0,00%	6	1.877.892.250	24%	36,57%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan	10844	196.017.793.889	42.490	42.721.235.351	24.784	39.725.185.069	0,58%	0,00%	35628	235.742.978.958	84%	63,06%
			Dokumen Supervisi	15	5.174.301.875	100		22	0	0,22%	0,00%	37	5.174.301.875	37%	32,46%
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	0	16.404.357.181	1.900	35.293.000.000	26.852	34.126.088.900	14,13%	0,00%	26852	50.530.446.081	1413%	265,95%
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	1900	19.000.000.000	1	4.149.962.354	2.780	3.993.643.795	2779,95 %	0,00%	4680	22.993.643.795	467995%	114,97%
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan yang dipelihara				39.298.531.000	2.261	42.384.263.000	0,00%	0,00%	2261	42.384.263.000	0%	0,00%
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi**	**1**	**635.210.960**	**100**	**250.000.000**	**150**	**257.947.353**				**893.158.313**	0%	80,82%
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Persentase Tenaga Kerja Bersertfikat**	**0,95**	**635.210.960**	**95,00%**	**250.000.000**	**150**	**257.947.353**				**893.158.313**	0,00%	80,82%
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti sosialiasi / pembinaan (orang)	455	635.210.960	150	250.000.000	150	257.947.353	0,00%	0,00%	605	893.158.313	448,15%	80,82%

Penentuan target kinerja dari program kegiatan didasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan tahun 2024, yaitu:

VISI KOTA	MISI KOTA
TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN	1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Tinggi 3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai 4. Mewujudkan Kota Nyaman dihuni yang Berwawasan Lingkungan 5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif

Sumber : RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026

Misi Pertama: Pada hakikatnya pemerintahan yang baik mencakup beberapa prinsip utama yakni: partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada kepentingan masyarakat, kesempatan yang sama, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi yang strategis. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan perbedaan di antara mereka. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik memerlukan berbagai upaya dari seluruh pemangku kepentingan khususnya sektor pemerintah itu sendiri. Dalam konteks ini tidak hanya pemerintah, namun meliputi tiga domain yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah, peningkatan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM. Mewujudkan daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram dengan tetap memprioritaskan perbaikan yang signifikan dalam sistem kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan berjalannya reformasi birokrasi;

Misi Kedua: Pembangunan diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, dimulai sejak individu berada pada usia dini sampai dengan usia produktif. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan merata perlu

diupayakan guna melahirkan dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mandiri, berdaya saing dan mengembangan ekonomi lokal melalui kewirausahaan.

Misi Ketiga: Infrastruktur adalah kelengkapan dasar fisik kota. Infrastruktur perkotaan meliputi, antara lain, sistem drainase atau pengendalian banjir, air bersih atau air minum, persampahan, sanitasi atau limbah, jaringan jalan dan transportasi umum, listrik, gas, dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur perkotaan penting bagi masyarakat luas, kondisi kuantitas dan kualitas infrastruktur amat diperlukan untuk mendukung aktivitas warga sehari-hari dan karenanya sangat penting bagi ekonomi perkotaan.

Misi Keempat: Nyaman dihuni adalah kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman menandakan kota ini dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai serta berwawasan lingkungan. Mewujudkan kota yang nyaman dihuni dan berwawasan lingkungan dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan) yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan yang antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana (green city) dengan mengedepankan pengolahan sampah terpadu (zero waste) serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas kota, serta meningkatkan partisipasi masyarakat (komunitas hijau).

Misi Kelima: Pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengolah sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan guna meningkatkan pandapatan dan kesejahteraan. Ekonomi kreatif adalah sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia yang diperlukan untuk mencapai target pembangunan jangka panjang. Industri kreatif ini dapat menjadi pilar utama dalam pembentukan ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif ini sangatlah penting bagi Indonesia karena diyakini ekonomi kreatif akan memberikan dampak positif bagi kehidupan dan bernegara. Industri kreatif perlu dikembangkan karena industri kreatif dapat memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan dan menciptakan iklim bisnis yang positif.

2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah:

a. Kenaikan Indek Satuan Barang

b. Masih minimnya Rekanan yang mampu dari segi financial dan memiliki sarana peralatan yang lengkap.

d. Masih minimnya tenaga sumber daya manusia yang berkualitas di Dinas Pekerjaan Umum

e. Masih minimnya alat berat yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum.

f. Masih minimnya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tentang ke PU- an bagi Pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

2.1.4 Kebijakan/Tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tidak tercapainya kinerja program/kegiatan

a. Diupayakan anggaran yang cukup dari berbagai sumber untuk membiayai kegiatan pembangunan

b. Diupayakan penambahan tenaga SDM yang terampil untuk lingkup Dinas Pekerjaan umum

c. Diupayakan penambahan alat berat untuk Dinas Pekerjaan Umum.

d. Memperketat proses pengadaan barang dan jasa

e. Mengupayakan pengiriman Pegawai untuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bidang ke PU-an

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), ataupun terhadap Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Adapun jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisa kinerja pelayanan sektor pekerjaan umum dapat dilihat pada table 2-3. Pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022, terdapat 1 target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan belum sesuai pencapaiannya dengan apa yang di tuangkan dalam RPJMD sedangkan 6 target indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan umum Kota Balikpapan telah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022 KOTA BALIKPAPAN

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA DPU Kota Balikpapan			Realisasi Capaian RENSTRA DPU Kota Balikpapan			Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum			82,03	83,00	84,00	78,73	77,71		
2	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air			54,02	55,79	57,48	54,02	54,41%		
3	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik			97,54	97,85	97,93	70,00	97,96%		
4	Persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik			78,92	79,95	81,25	74,41	82,18%		
5	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF			6	45	65	15,00	68		
6	Persentase pelayanan Jasa konstruksi			27,32	29,12	30,72	27,92	28,37%		
7	Nilai SAKIP OPD			76,65	77	78	N/a	78,87		
8	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			N/A	27,00	28,75	N/a	27,00		
9	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan			55,88%	61,76%	64,71%	55,85	55,88%		
10	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota			52,15%	53,09%	53,46%	52,15	53,06%		
11	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak			96,79%	97,10%	97,25%	81,27	97,18%		
12	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan			97,98%	98,54%	98,80%	98,36	98,54%		
13	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan			97,82%	97,82%	98,00%	98,54	97,82%		
14	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab			85,11%	87,36%	89,12%	89,25	85,36%		
15	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan			80%	76%	78,18%	81,00	79,00%		
16	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin			92,38%	93,39%	93,90%	92,38%	92,80%		
17	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi			100%	100%	100%	100	100%		
18	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			78	82	84	78	82		

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup dan budaya. Salah satu isu strategis yang dihadapi saat ini adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi besarnya kesenjangan antar-kawasan, antara Kecamatan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Secara teoritik, kota merupakan mesin pertumbuhan ekonomi (the engine of economic growth), sehingga proses pengembangan wilayah terjadi karena adanya perkembangan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yang lalu diikuti dengan penyebaran pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Menghadapi tantangan di atas, maka diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersedian infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Isu dan permasalahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yang akan dihadapi antara lain:

1. Penyediaan Prasarana Jalan
    a. Kuantitas dan kualitas jalan: luas penyediaan jalan Kota Balikpapan masih kurang dari luas total wilayah kota. Fly over/underpasss belum terbangun pada persimpangan jalan yang padat. Selain itu, desain jalan dan persimpangan serta pedestrian yang memenuhi prinsip-prinsip jalan yang berkeselamatan (road safety) pun harus menjadi perhatian.
    b. Konfigurasi jalan: jaringan jalan primer masih terganggu dan jaringan jalan sekunder belum terintegrasi.
    c. Kondisi fisik jalan: cukup banyak ruas jalan yang belum memenuhi persyaratan teknis fungsi jalan, dari sisi lebar maupun pengaturan aksesnya.
2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kota Balikpapan sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kota Balikpapan saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir/ genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir/ genangan adalah berkurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase

sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase dan desain teknis drainase yang bermasalah. Hingga tahun 2022, teridentifikasi sebanyak 88 titik yang masih berpotensi terjadi genangan. Untuk menangani permasalahan tersebut telah dilakukan intervensi program dan kegiatan, sehingga pada 88 titik telah dapat tertangani dengan menurunnya waktu genangan menjadi rata-rata di bawah 2 jam.

3. Masih Adanya defiSit Air Baku untuk pemenuhan Air Minum sebesar 1000 liter/detik. Pengelolaan dan pengembangan SPAM dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum di Kota Balikpapan.
4. Terjadinya abrasi pantai di Kelurahan Manggar, Manggar Baru dan Sepinggan, untuk menanggulangi keadaan tersebut dibutuhkan Penyusunan Kajian Penyebab Abrasi dan Pembangunan Bangunan Penahan Abrasi.
5. Terdapat sarana dan prasarana persampahan dalam kondisi rusak sebanyak 62,15%, dibutuhkan revitalisasi sarana dan prasarana persampahan.
6. Masih terdapat 4,40% atau 10.043 KK/RT yang melakukan praktek BABS (Buang Air Besar Sembarangan) sehingga dibutuhkan pembangunan Sarana dan prasarana sanitasi air limbah.
7. 7,62% bangunan belum memiliki izin, untuk itu diperlukan sosilaisasi dan penyelenggaraan bangunan Gedung.
8. 27,42 Gedung Pemerintah yang sudah tidak layak karena kondisi atau status sewa.
9. Belum Optimalnya pembinaan Jasa Konstruksi di Kota Balikpapan, sehingga Kota Balikpapan tidak memiliki data-data penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dan untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum yang disyaratkan.

Dalam tahapan RPJMD tahun 2021-2026, RKPD tahun 2024 merupakan penggalan tahun kedua dari tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan Kota Balikpapan. Dengan demikian, segala kebijakan yang akan dirumuskan pada tahun 2024 ini akan sangat mempengaruhi capaian pembangunan pada akhir periode RPJMD. Dengan adanya penekanan tersebut diharapkan program prioritas pada tahun 2024 akan memberikan fondasi dan dukungan yang positif pada pembangunan daerah

Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sehingga perencaaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan optimal.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan terbatasnya kemampuan fiskal keuangan daerah Kota Balikpapan, maka pada tahun 2024, penyusunan proram dan kegiatan prioritas harus mempertimbangkan kemampuan pendanaan keuangan daerah. Oleh karena itu, program-program prioritas yang disertai target dan pagu indikatif sebagaimana tersebut di atas selanjutnya akan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran yang sejalan dengan tema pembangunan pada RKPD Tahun 2024. Untuk lebih jelas tentang Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhannya dapat terlihat pada Tabel 2.4. Tentang Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 pada lampiran.

Tabel 2-4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Balikpapan

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Meningkatnya Infrastruktur Terpadu dan berkualitas		**Meningkatnya Infrastruktur Terpadu dan berkualitas**	**85**	**602.721.865.000**	**Meningkatnya Infrastruktur Terpadu dan berkualitas**		**Meningkatnya Infrastruktur Terpadu dan berkualitas**	**85**	**720.051.865.000**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	**Balikpapan**	**IS 1: Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air**	**59,18**	**99.703.443.700**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air**	**Balikpapan**	**IS 1: Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air**	**59,18**	**106.703.443.700**
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Balikpapan**	**Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan**	**64,71%**	**99.703.443.700**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Balikpapan**	**Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan**	**64,71%**	**106.703.443.700**
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik**	**91,67%**	**99.703.443.700**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik**	**91,67%**	**106.703.443.700**
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun**	**2**	**76.000.000.000**	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya**	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun**	**2**	**76.000.000.000**
	Pembebasan Lahan Bendali Ampal Hulu				70.000.000.000	Pembebasan Lahan Bendali Ampal Hulu				70.000.000.000
	Pembebasan Lahan Bendali V				5.000.000.000	Pembebasan Lahan Bendali V				5.000.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Pembebasan Lahan Normalisasi Saluran Primer Ampal				1.000.000.000	Pembebasan Lahan Normalisasi Saluran Primer Ampal				1.000.000.000
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai yang disusun**	**1**	**1.500.000.000**	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai**	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai yang disusun**	**1**	**1.500.000.000**
	Adm. Pengadaan Lahan				1.115.000.000	Adm. Pengadaan Lahan				1.115.000.000
	Kajian Abrasi Pantai AURI dan Tanjung Bayur				300.000.000	Kajian Abrasi Pantai AURI dan Tanjung Bayur				300.000.000
	Appraisal Pembebasan Lahan Bendali V				50.000.000	Appraisal Pembebasan Lahan Bendali V				50.000.000
	Appraisal Pembebasan Lahan Normalisasi Saluran Primer Ampal				35.000.000	Appraisal Pembebasan Lahan Normalisasi Saluran Primer Ampal				35.000.000
						Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	**Balikpapan**	**Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun**	**4**	**4.000.000.000**
						RT. 56 Kel. Karang Joang (KM.17)				950.000.000
						RT. 58 Kel. Batu Ampar				950.000.000
						Supervisi Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Paket I				100.000.000
						RT. 21 Kel. Margomulyo				950.000.000
						RT. 14 dan RT. 15 Kel. Sumber Rejo				950.000.000
						Supervisi Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Paket II				100.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
						Sumur Air Baku di Kota Balikpapan				-
	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	**Balikpapan**	**Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun**	**1**	**7.850.000.000**	**Pembangunan Polder/Kolam Retensi**	**Balikpapan**	**Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun**	**1**	**7.850.000.000**
	Pembangunan Bendali Gunung Bahagia Kel. Gunung Bahagia				7.550.000.000	Pembangunan Bendali Gunung Bahagia Kel. Gunung Bahagia				7.550.000.000
	Supervisi Pembangunan Bendali Gunung Bahagia Kel. Gunung Bahagia				300.000.000	Supervisi Pembangunan Bendali Gunung Bahagia Kel. Gunung Bahagia				300.000.000
	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	**Balikpapan**	**Jumlah Polder/Kolam Retensi yang ditingkatkan**	**3**	**6.200.000.000**	**Peningkatan Polder/Kolam Retensi**	**Balikpapan**	**Jumlah Polder/Kolam Retensi yang ditingkatkan**	**3**	**9.200.000.000**
	Peningkatan Bendali Blok II				3.000.000.000	Peningkatan Bendali Blok II				3.000.000.000
	Supervisi Peningkatan Bendali Blok II				100.000.000	Supervisi Peningkatan Bendali Blok II				100.000.000
	Peningkatan Bendali Blok I				3.000.000.000	Penanganan Bendali Telaga Sari				3.000.000.000
	Supervisi Peningkatan Bendali Blok I				100.000.000	Peningkatan Bendali Blok I				3.000.000.000
						Supervisi Peningkatan Bendali Blok I				100.000.000
	Normalisasi/Restorasi Sungai	**Balikpapan**	**Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi**	**3**	**5.000.000.000**	**Normalisasi/Restorasi Sungai**	**Balikpapan**	**Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi**	**3**	**5.000.000.000**
	Swakelola Karya Bakti (Saluran Primer Somber)				2.000.000.000	Swakelola Karya Bakti (Saluran Primer Somber)				2.000.000.000
	Normalisasi Saluran Sekota Balikpapan				3.000.000.000	Normalisasi Saluran Sekota Balikpapan				3.000.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi (UPTD)	**Balikpapan**	**Jumlah Polder/Kolam Retensi yang terpelihara**	**6**	**3.153.443.700**	**Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi (UPTD)**	**Balikpapan**	**Jumlah Polder/Kolam Retensi yang terpelihara**	**6**	**3.153.443.700**

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	S2 :Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	**Balikpapan**	**IS 2: Persentase penurunan luas genangan banjir**	**46,36**	**154.699.563.200**	**S2 :Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir**	**Balikpapan**	**IS 2: Persentase penurunan luas genangan banjir**	**46,36**	**161.029.563.200**
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Balikpapan**	**Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota**	**53,46%**	**154.699.563.200**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Balikpapan**	**Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota**	**53,46%**	**161.029.563.200**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**71,04%**	**154.699.563.200**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**71,04%**	**161.029.563.200**
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	**Balikpapan**	**Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun**	**1**	**1.000.000.000**	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan**	**Balikpapan**	**Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun**	**1**	**1.000.000.000**
	DED Saluran Tersier SD Negeri 24				100.000.000	DED Saluran Tersier SD Negeri 24				100.000.000
	DED Saluran Tersier/Sekunder/Primer				700.000.000	DED Saluran Tersier/Sekunder/Primer				700.000.000
	DED Saluran Sekunder Panji				200.000.000	DED Saluran Sekunder Panji				200.000.000
	DED Bendung D.I Gunung Binjai				-	DED Bendung D.I Gunung Binjai				-
	Kajian Alat Pemantauan Pasang Surut Air Laut				-	Kajian Alat Pemantauan Pasang Surut Air Laut				-
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	**Balikpapan**	**Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun**	**2200**	**74.012.000.000**	**Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan**	**Balikpapan**	**Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun**	**2200**	**82.992.000.000**

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	Rp	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	Rp
	Saluran Tersier Ampar Lestari II				5.000.000.000	Saluran Tersier Ampar Lestari I				5.400.000.000
	Supervisi Saluran Tersier Ampar Lestari II				150.000.000	Supervisi Saluran Tersier Ampar Lestari I				162.000.000
	Saluran Tersier Ampar Lestari I				5.400.000.000	Saluran Primer Sepinggan (Lanjutan)				3.000.000.000
	Supervisi Saluran Tersier Ampar Lestari I				162.000.000	Supervisi Saluran Primer Sepinggan (Lanjutan)				100.000.000
	Saluran Primer Sepinggan (Lanjutan)				3.000.000.000	Saluran Sekunder Balikpapan Baru (Lanjutan)				30.000.000.000
	Supervisi Saluran Primer Sepinggan (Lanjutan)				100.000.000	Supervisi Saluran Sekunder Balikpapan Baru (Lanjutan)				900.000.000
	Saluran Sekunder Balikpapan Baru (Lanjutan)				30.000.000.000	Saluran Sekunder Inhutani (Lanjutan)				20.000.000.000
	Supervisi Saluran Sekunder Balikpapan Baru (Lanjutan)				820.000.000	Supervisi Saluran Sekunder Inhutani (Lanjutan)				600.000.000
	Saluran Sekunder Inhutani (Lanjutan)				20.000.000.000	Gorong-Gorong Jl. Mulawarman				2.000.000.000
	Supervisi Saluran Sekunder Inhutani (Lanjutan)				600.000.000	Supervisi Gorong-Gorong Jl. Mulawarman				100.000.000
	Gorong-Gorong Jl. Mulawarman				2.000.000.000	Saluran Sekunder Strat III Hulu				6.420.000.000
	Supervisi Gorong-Gorong Jl. Mulawarman				100.000.000	Supervisi Saluran Sekunder Strat III Hulu				230.000.000
	Saluran Sekunder Strat III Hulu				6.000.000.000	Drainase Jl. Soekarno Hatta Km. 17 Kel. Karang Joang				13.500.000.000
	Supervisi Saluran Sekunder Strat III Hulu				180.000.000	Drainase RT. 05 Kel. Lamaru				500.000.000
	Drainase RT. 05 Kel. Lamaru				500.000.000	Supervisi Drainase RT. 05 Kel. Lamaru				80.000.000
	Supervisi Drainase RT. 05 Kel. Lamaru				80.000.000					

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	**Balikpapan**	**Panjang saluran drainase perkotaan yang ditingkatkan**	**700**	**37.016.082.600**	**Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan**	**Balikpapan**	**Panjang saluran drainase perkotaan yang ditingkatkan**	**700**	**34.366.082.600**
	Drainase Jl. Ahmad Yani				5.000.000.000	Drainase Jl. Ahmad Yani				5.000.000.000
	Supervisi Drainase Jl. Ahmad Yani				150.000.000	Supervisi Drainase Jl. Ahmad Yani				150.000.000
	Saluran Sekunder Depsos Bawah				5.100.000.000	Saluran Sekunder Depsos Bawah				5.000.000.000
	Supervisi Saluran Sekunder Depsos Bawah				153.000.000	Supervisi Saluran Sekunder Depsos Bawah				150.000.000
	Drainase RT. 12 Kel. Sepinggan Raya				500.000.000	Drainase RT. 12 Kel. Sepinggan Raya				500.000.000
	Drainase RT. 05 Kel. Sepinggan				200.000.000	Drainase RT. 05 Kel. Sepinggan				200.000.000
	Drainase RT. 52 Kel. Sepinggan				200.000.000	Drainase RT. 52 Kel. Sepinggan				200.000.000
	Supervisi Drainase Paket I				100.000.000	Supervisi Drainase Paket I				100.000.000
	Gorong-Gorong Tersier Martapura				3.000.000.000	Drainase RT. 54 Kel. Manggar				1.500.000.000
	Supervisi Gorong-Gorong Tersier Martapura				150.000.000	Supervisi Drainase RT. 54 Kel. Manggar				100.000.000
	Drainase RT. 54 Kel. Manggar				1.500.000.000	Saluran Tersier Agus Salim Kel. Klandasan Ulu				2.500.000.000
	Supervisi Drainase RT. 54 Kel. Manggar				75.000.000	Supervisi Saluran Tersier Agus Salim Kel. Klandasan Ulu				150.000.000
	Saluran Tersier Agus Salim Kel. Klandasan Ulu				4.500.000.000	Saluran Sekunder Perhubungan				5.000.000.000
	Supervisi Saluran Tersier Agus Salim Kel. Klandasan Ulu				200.000.000	Supervisi Saluran Sekunder Perhubungan				200.000.000
	Saluran Sekunder Perhubungan				5.000.000.000	Gorong-Gorong Saluran Sekunder Balikpapan Baru				6.106.082.600
	Supervisi Saluran Sekunder Perhubungan				225.000.000	Supervisi Gorong-Gorong Saluran				225.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
						Sekunder Balikpapan Baru				
	Gorong-Gorong Saluran Sekunder Balikpapan Baru				6.203.082.600	Drainase RT. 25 Kel. Batu Ampar				1.000.000.000
	Supervisi Gorong-Gorong Saluran Sekunder Balikpapan Baru				180.000.000	Supervisi Drainase RT. 25 Kel. Batu Ampar				80.000.000
	Drainase RT. 25 Kel. Batu Ampar				1.000.000.000	Saluran Tersier Wonorejo Kel. Gunung Samarinda				1.000.000.000
	Supervisi Drainase RT. 25 Kel. Batu Ampar				80.000.000	Supervisi Saluran Tersier Wonorejo Kel. Gunung Samarinda				80.000.000
	Saluran Tersier Wonorejo Kel. Gunung Samarinda				1.000.000.000	Drainase Jl. Sultan Hasanuddin (kawasan lapangan Golf) Kel. Kariangau				3.000.000.000
	Supervisi Saluran Tersier Wonorejo Kel. Gunung Samarinda					Saluran Primer Telindung				2.000.000.000
	Drainase Jl. Satu Kel. Gunung Samarinda				2.500.000.000	Supervisi Saluran Primer Telindung				125.000.000
	Supervisi Drainase Paket II				200.000.000					
	Saluran Primer Sepinggan (Lanjutan)				2.300.000.000					
	Saluran Primer Telindung				2.000.000.000					
	Supervisi Saluran Primer Telindung				250.000.000					
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	**Balikpapan**	**Panjang saluran drainase perkotaan yang direhab**	**0**	**4.000.000.000**	**Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan**	**Balikpapan**	**Panjang saluran drainase perkotaan yang direhab**	**0**	**4.000.000.000**
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan				4.000.000.000	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan				4.000.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	**Balikpapan**	**Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara**	**93000**	**16.821.480.600**	**Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase**	**Balikpapan**	**Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara**	**93000**	**16.821.480.600**

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**		**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	**Balikpapan**	**Panjang Saluran drainase Lingkungan yang dibangun**	**1000**	**12.350.000.000**		**Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan**	**Balikpapan**	**Panjang Saluran drainase Lingkungan yang dibangun**	**1000**	**12.350.000.000**
	Drainase RT. 19 Kel. Batu Ampar				150.000.000		Drainase RT. 19 Kel. Batu Ampar				150.000.000
	Saluran Tersier Pipa 1				200.000.000		Saluran Tersier Pipa 1				200.000.000
	Drainase RT. 17 Kel. Damai Baru				200.000.000		Drainase RT. 17 Kel. Damai Baru				200.000.000
	Pembangunan Drainase Lingkungan Sekota Balikpapan				9.400.000.000		Pembangunan Drainase Lingkungan Sekota Balikpapan				9.400.000.000
	Gorong-gorong Jalan Mulawarman RT. 44 Kel. Lamaru				200.000.000		Gorong-gorong Jalan Mulawarman RT. 44 Kel. Lamaru				200.000.000
	Drainase RT. 34 Kel. Manggar				200.000.000		Drainase RT. 34 Kel. Manggar				200.000.000
	Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Sekota Balikpapan				1.000.000.000		Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Sekota Balikpapan				1.000.000.000
	DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				1.000.000.000		DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				1.000.000.000
	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	**Balikpapan**	**Panjang Panjang Saluran drainase Lingkungan yang dibangun yang ditingkatkan**	**1000**	**9.500.000.000**		**Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan**	**Balikpapan**	**Panjang Panjang Saluran drainase Lingkungan yang dibangun yang ditingkatkan**	**1000**	**9.500.000.000**
	Drainase RT. 13 Kel. Graha Indah				-		Drainase RT. 13 Kel. Graha Indah				-
	Drainase RT. 10 Kel. Manggar				-		Drainase RT. 10 Kel. Manggar				-
	Drainase RT. 22 Kel. Baru Ulu				-		Drainase RT. 22 Kel. Baru Ulu				-
	Drainase RT. 24 Kel. Baru Ulu				-		Drainase RT. 24 Kel. Baru Ulu				-
	Drainase RT. 22 Kel. Sepinggan				-		Drainase RT. 22 Kel. Sepinggan				-

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	Rp	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	Rp
	Drainase RT. 49 Kel. Sepinggan				-	Drainase RT. 49 Kel. Sepinggan				-
	Drainase RT. 64 Kel. Sepinggan				-	Drainase RT. 64 Kel. Sepinggan				-
	Drainase RT. 70 Kel. Sepinggan				-	Drainase RT. 70 Kel. Sepinggan				-
	Drainase RT. 10 Kel. Sepinggan				-	Drainase RT. 10 Kel. Sepinggan				-
	Drainase RT. 46 Kel. Gunung Bahagia				-	Drainase RT. 46 Kel. Gunung Bahagia				-
	Drainase RT. 48 Kel. Batu Ampar				-	Drainase RT. 48 Kel. Batu Ampar				-
	Drainase RT. 63 Kel. Muara Rapak				-	Drainase RT. 63 Kel. Muara Rapak				-
	Drainase RT. 21 Kel. Sumber Rejo				-	Drainase RT. 21 Kel. Sumber Rejo				-
	Drainase RT. 26 Kel. Sumber Rejo				-	Drainase RT. 26 Kel. Sumber Rejo				-
	Drainase RT. 29 Kel. Gunung Sari Ulu				-	Drainase RT. 29 Kel. Gunung Sari Ulu				-
	Drainase RT. 19 Kel. Karang Rejo				-	Drainase RT. 19 Kel. Karang Rejo				-
	Drainase RT. 04 Kel. Telaga Sari				-	Drainase RT. 04 Kel. Telaga Sari				-
	Drainase RT. 21 Kel. Telaga Sari				-	Drainase RT. 21 Kel. Telaga Sari				-
	Drainase RT. 26 Kel. Telaga Sari				-	Drainase RT. 26 Kel. Telaga Sari				-
	Drainase RT. 37 Kel. Telaga Sari				-	Drainase RT. 37 Kel. Telaga Sari				-
	Drainase RT. 40 Kel. Telaga Sari				-	Drainase RT. 40 Kel. Telaga Sari				-
	Drainase RT. 29 Kel. Prapatan				-	Drainase RT. 29 Kel. Prapatan				-
	Peningkatan Drainase Lingkungan Sekota Balikpapan				7.500.000.000	Peningkatan Drainase Lingkungan Sekota Balikpapan				7.500.000.000
	Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan Sekota Balikpapan				1.000.000.000	Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan Sekota Balikpapan				1.000.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	DED Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan				1.000.000.000	DED Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan				1.000.000.000
	S3: meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan)	**Balikpapan**	**(IS 3 : Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik)**	**98,14**	**61.915.000.000**	**S3: meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan)**	**Balikpapan**	**(IS 3 : Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik)**	**98,14**	**61.915.000.000**
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Balikpapan**	**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan**	**98,80%**	**13.320.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Balikpapan**	**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan**	**98,80%**	**13.320.000.000**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)**	**82,27%**	**13.320.000.000**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)**	**82,27%**	**13.320.000.000**
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun**	**1**	**700.000.000**	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM**	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun**	**1**	**700.000.000**
	DED Lanjutan SPAM Manggarsari				80.000.000	DED Lanjutan SPAM Manggarsari				80.000.000
	DED Lanjutan SPAM Perum Bukit Batuah Kel. Graha Indah				60.000.000	DED Lanjutan SPAM Perum Bukit Batuah Kel. Graha Indah				60.000.000
	DED Lanjutan SPAM Jl. Daksa Raya Kel. Sepinggan				60.000.000	DED Lanjutan SPAM Jl. Daksa Raya Kel. Sepinggan				60.000.000
	DED Jaringan Perpipaan dari Sumur Dalam (HIBAH ESDM)				100.000.000	DED Jaringan Perpipaan dari Sumur Dalam (HIBAH ESDM)				100.000.000
	DED Jaringan Perpipaan dari Sumur Dalam Ke. Gunung Sari Ulu				100.000.000	DED Jaringan Perpipaan dari Sumur Dalam Ke. Gunung Sari Ulu				100.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	DED/Dokumen Penunjang SPAM Regional Sepaku Semoi				300.000.000	DED/Dokumen Penunjang SPAM Regional Sepaku Semoi				300.000.000
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	**Balikpapan**	**Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM**	**1**	**520.000.000**	**Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM**	**Balikpapan**	**Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM**	**1**	**520.000.000**
	Supervisi Lanjutan SPAM Manggarsari				100.000.000	Supervisi Lanjutan SPAM Manggarsari				100.000.000
	Supervisi Lanjutan SPAM Perum Bukit Batuah Kel. Graha Indah				100.000.000	Supervisi Lanjutan SPAM Perum Bukit Batuah Kel. Graha Indah				100.000.000
	Supervisi Lanjutan SPAM Jl. Daksa Raya Kel. Sepinggan				140.000.000	Supervisi Lanjutan SPAM Jl. Daksa Raya Kel. Sepinggan				140.000.000
	Supervisi Jaringan Perpipaan dari Sumur Dalam (HIBAH ESDM)				90.000.000	Supervisi Jaringan Perpipaan dari Sumur Dalam (HIBAH ESDM)				90.000.000
	Supervisi Jaringan Perpipaan dari Sumur Dalam Ke. Gunung Sari Ulu				90.000.000	Supervisi Jaringan Perpipaan dari Sumur Dalam Ke. Gunung Sari Ulu				90.000.000
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	**Balikpapan**	**Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu**	**600**	**11.800.000.000**	**Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan**	**Balikpapan**	**Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu**	**600**	**11.800.000.000**

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Lanjutan SPAM Manggarsari				2.500.000.000	Lanjutan SPAM Manggarsari				2.500.000.000
	Lanjutan SPAM Perum Bukit Batuah Kel. Graha Indah				2.500.000.000	Lanjutan SPAM Perum Bukit Batuah Kel. Graha Indah				2.500.000.000
	Lanjutan SPAM Jl. Daksa Raya Kel. Sepinggan				3.500.000.000	Lanjutan SPAM Jl. Daksa Raya Kel. Sepinggan				3.500.000.000
	Jaringan Perpipaan dari Sumur Dalam (HIBAH ESDM)				2.000.000.000	Jaringan Perpipaan dari Sumur Dalam (HIBAH ESDM)				2.000.000.000
	Jaringan Perpipaan dari Sumur Dalam Ke. Gunung Sari Ulu				1.300.000.000	Jaringan Perpipaan dari Sumur Dalam Ke. Gunung Sari Ulu				1.300.000.000
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM			**12**	**300.000.000**	**Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM**			**12**	**300.000.000**
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM				300.000.000	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM				300.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	**Balikpapan**	**Persentase Penyediaan Sarana Persampahan**	**98,00%**	**16.805.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Balikpapan**	**Persentase Penyediaan Sarana Persampahan**	**98,00%**	**16.805.000.000**
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Persentase Kapasitas Sarana Persampahan**	**56,40%**	**16.805.000.000**	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase Kapasitas Sarana Persampahan**	**56,40%**	**16.805.000.000**

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**		**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kotali	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun**		**335.000.000**		**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kotali**	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun**		**335.000.000**
	DED Peningkatan TPS se-kota Balikpapan				85.000.000		DED Peningkatan TPS se-kota Balikpapan				85.000.000
	DED Peningkatan Landasan Kontainer se-kota Balikpapan				85.000.000		DED Peningkatan Landasan Kontainer se-kota Balikpapan				85.000.000
	DED Peningkatan ITF Daksa Raya Kel. Sepinggan				80.000.000		DED Peningkatan ITF Daksa Raya Kel. Sepinggan				80.000.000
	DED Bangunan Infrastruktur Pengurangan Sampah TPST/TPS-3R/Bank Sampah				85.000.000		DED Bangunan Infrastruktur Pengurangan Sampah TPST/TPS-3R/Bank Sampah				85.000.000
	DED Pembangunan TPST Kelurahan Graha Indah						DED Pembangunan TPST Kelurahan Graha Indah				
	DED Pembangunan TPST KM. 12 Kelurahan Karang Joang						DED Pembangunan TPST KM. 12 Kelurahan Karang Joang				
	DED Pembangunan TPST Daksa Raya Kelurahan Sepinggan						DED Pembangunan TPST Daksa Raya Kelurahan Sepinggan				
	DED Pemeliharaan Infrastruktur TPA Manggar						DED Pemeliharaan Infrastruktur TPA Manggar				
	DED Pembangunan MRF Kota Balikpapan						DED Pembangunan MRF Kota Balikpapan				

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Jumlah Konsultasi supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1**	**790.000.000**	**Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Jumlah Konsultasi supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1**	**790.000.000**
	Lanjutan Pool Kendaraan				100.000.000	Lanjutan Pool Kendaraan				100.000.000
	Lanjutan TPS Pasar Pandan Sari				90.000.000	Lanjutan TPS Pasar Pandan Sari				90.000.000
	Peningkatan TPS se-kota Balikpapan				80.000.000	Peningkatan TPS se-kota Balikpapan				80.000.000
	Peningkatan Landasan Kontainer se-kota Balikpapan				80.000.000	Peningkatan Landasan Kontainer se-kota Balikpapan				80.000.000
	Penanganan Longsoran Zona 7 TPA Manggar Kel. Manggar				130.000.000	Penanganan Longsoran Zona 7 TPA Manggar Kel. Manggar				130.000.000
	Pembangunan ITF Kelurahan Graha Indah				150.000.000	Pembangunan ITF Kelurahan Graha Indah				150.000.000
	Peningkatan ITF Daksa Raya Kel. Sepinggan				80.000.000	Peningkatan ITF Daksa Raya Kel. Sepinggan				80.000.000
	Pembangunan Gudang Limbah B3 di TPA Manggar Kel. Manggar				80.000.000	Pembangunan Gudang Limbah B3 di TPA Manggar Kel. Manggar				80.000.000
	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	**Balikpapan**	**Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS**	**2000**	**15.680.000.000**	**Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS**	**Balikpapan**	**Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS**	**2000**	**15.680.000.000**
	Lanjutan Pool Kendaraan				2.400.000.000	Lanjutan Pool Kendaraan				2.400.000.000
	Lanjutan TPS Pasar Pandan Sari				1.880.000.000	Lanjutan TPS Pasar Pandan Sari				1.880.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Peningkatan TPS se-kota Balikpapan				800.000.000	Peningkatan TPS se-kota Balikpapan				800.000.000
	Peningkatan Landasan Kontainer se-kota Balikpapan				700.000.000	Peningkatan Landasan Kontainer se-kota Balikpapan				700.000.000
	Penanganan Longsoran Zona 7 TPA Manggar Kel. Manggar				2.800.000.000	Penanganan Longsoran Zona 7 TPA Manggar Kel. Manggar				2.800.000.000
	Pembangunan ITF Kelurahan Graha Indah				4.000.000.000	Pembangunan ITF Kelurahan Graha Indah				4.000.000.000
	Peningkatan ITF Daksa Raya Kel. Sepinggan				1.500.000.000	Peningkatan ITF Daksa Raya Kel. Sepinggan				1.500.000.000
	Pembangunan Gudang Limbah B3 di TPA Manggar Kel. Manggar				1.600.000.000	Pembangunan Gudang Limbah B3 di TPA Manggar Kel. Manggar				1.600.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Balikpapan**	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.**	**97,25%**	**31.790.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Balikpapan**	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.**	**97,25%**	**31.790.000.000**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)**	**92,53%**	**31.790.000.000**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)**	**92,53%**	**31.790.000.000**
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun**	**2**	**420.000.000**	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun**	**2**	**420.000.000**
	DED Pembangunan Pengolahan Air Limbah Setempat di Kota Balikpapan				70.000.000	DED Pembangunan Pengolahan Air Limbah Setempat di Kota Balikpapan				70.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**		**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	DED Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat di Kota Balikpapan				100.000.000		DED Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat di Kota Balikpapan				100.000.000
	Dokumen RISPALD Kota Balikpapan				250.000.000		Dokumen RISPALD Kota Balikpapan				250.000.000
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	**Balikpapan**	**Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman**	**350**	**800.000.000**		**Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman**	**Balikpapan**	**Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman**	**350**	**800.000.000**
	Rehabilitasi Jaringan Ipal Margasari (Lanjutan)				800.000.000		Rehabilitasi Jaringan Ipal Margasari (Lanjutan)				800.000.000
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	**Balikpapan**	**Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik**	**150**	**2.400.000.000**		**Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat**	**Balikpapan**	**Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik**	**150**	**2.400.000.000**
	Pembangunan Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat			150	2.400.000.000		Pembangunan Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat			150	2.400.000.000
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	**Balikpapan**	**Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik**	**10**	**150.000.000**		**Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik**	**Balikpapan**	**Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik**	**10**	**150.000.000**

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**		**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT**	**3**	**330.000.000**		**Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman**	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT**	**3**	**330.000.000**
	Supervisi Pembangunan Pengolahan Air Limbah Setempat				80.000.000		Supervisi Pembangunan Pengolahan Air Limbah Setempat				80.000.000
	Supervisi Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat di Kota Balikpapan				180.000.000		Supervisi Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat di Kota Balikpapan				180.000.000
	Supervisi Rehabilitasi Jaringan Ipal Margasari (Lanjutan)				70.000.000		Supervisi Rehabilitasi Jaringan Ipal Margasari (Lanjutan)				70.000.000
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	**Balikpapan**	**Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman**	**100**	**4.000.000.000**		**Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman**	**Balikpapan**	**Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman**	**100**	**4.000.000.000**
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat di Kota Balikpapan				4.000.000.000		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat di Kota Balikpapan				4.000.000.000
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	**Balikpapan**	**Kapasitas IPLT Terbangun**		**23.000.000.000**		**Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT**	**Balikpapan**	**Kapasitas IPLT Terbangun**		**23.000.000.000**

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Pembangunan IPLT Manggar				23.000.000.000	Pembangunan IPLT Manggar				23.000.000.000
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT**		**690.000.000**	**Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT**	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT**		**690.000.000**
	Supervisi Pembangunan IPLT Manggar				690.000.000	Supervisi Pembangunan IPLT Manggar				690.000.000
	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	**Balikpapan**	**IS 4: persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik**	**82,55%**	**209.350.000.000**	**Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan**	**Balikpapan**	**IS 4: persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik**	**82,55%**	**266.850.000.000**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Balikpapan**	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab**	**89,12%**	**153.350.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Balikpapan**	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab**	**89,12%**	**185.850.000.000**
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**persentase jalan dalam kondisi baik**	**73,95%**	**134.350.000.000**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**persentase jalan dalam kondisi baik**	**73,95%**	**161.750.000.000**
		Balikpapan	**Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik**	**89,00%**	**19.000.000.000**		**Balikpapan**	**Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik**	**89,00%**	**24.100.000.000**
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian**	**4**	**1.700.000.000**	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian**	**4**	**1.700.000.000**
	DED Jembatan Somber-Kariangau				700.000.000	DED Jembatan Somber-Kariangau				700.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	DED Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan				1.000.000.000	DED Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan				1.000.000.000
	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	**Balikpapan**	**Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan**	**2**	**650.000.000**	**Survei Kondisi Jalan/Jembatan**	**Balikpapan**	**Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan**	**2**	**650.000.000**
	Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan				475.000.000	Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan				475.000.000
	Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan				175.000.000	Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan				175.000.000
	Pembangunan Jalan	**Balikpapan**	**Panjang Jalan yang Dibangun**	**2,65**	**11.800.000.000**	**Pembangunan Jalan**	**Balikpapan**	**Panjang Jalan yang Dibangun**	**2,65**	**16.800.000.000**
	Pembangunan Jalan Mukmin Faisyal Kel. Sepinggan				-	Pembangunan Jalan Mukmin Faisyal Kel. Sepinggan				-
	Pembangunan Jalan KPIK				-	Pembangunan Jalan KPIK				-
	Pembangunan Jalan Mukmin Faisyal Tembus Mulawarman				7.500.000.000	Pembangunan Jalan Mukmin Faisyal Tembus Mulawarman				12.500.000.000
	Pembangunan Jalan Traktor VI				1.800.000.000	Pembangunan Jalan Traktor VI				1.800.000.000
	Jalan Tembus Pasar Karang Joang KM.15 (Karya Bakti TNI)				2.500.000.000	Jalan Tembus Pasar Karang Joang KM.15 (Karya Bakti TNI)				2.500.000.000
	Karya bhakti TNI				-	Karya bhakti TNI				-
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	**Balikpapan**	**Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar**	**4500**	**27.700.000.000**	**Pelebaran Jalan Menuju Standar**	**Balikpapan**	**Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar**	**4500**	**27.700.000.000**
	Jalan Taman Sari Kel. Graha Indah (lanjutan 2023)				3.000.000.000	Jalan Taman Sari Kel. Graha Indah (lanjutan 2023)				3.000.000.000
	Simpang jalan Tjutjup Suparna - Jalan MT. Haryono				2.000.000.000	Simpang jalan Tjutjup Suparna - Jalan MT. Haryono				2.000.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Jalan Agrowisata KM. 23 Kel. Karang Joang				5.000.000.000	Jalan Agrowisata KM. 23 Kel. Karang Joang				5.000.000.000
	Penataan Jalan MT. Haryono (Lanjutan)				10.000.000.000	Penataan Jalan MT. Haryono (Lanjutan)				10.000.000.000
	Perbaikan Geometris Jalan Agung Tunggal-MT Haryono dan BDS-MT.Haryono				5.000.000.000	Perbaikan Geometris Jalan Agung Tunggal-MT Haryono dan BDS-MT.Haryono				5.000.000.000
	Pelebaran jalan RT. 01 Kel. Baru Tengah				2.500.000.000	Pelebaran jalan RT. 01 Kel. Baru Tengah				2.500.000.000
	Pagar Pembatas Jembatan RT. 50 Kel. Baru Tengah				200.000.000	Pagar Pembatas Jembatan RT. 50 Kel. Baru Tengah				200.000.000
	Rekonstruksi Jalan	**Balikpapan**	**Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan**	**3100**	**54.500.000.000**	**Rekonstruksi Jalan**	**Balikpapan**	**Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan**	**3100**	**56.900.000.000**
	Jalan Batu Ratna				3.000.000.000	Jalan Batu Ratna				8.000.000.000
	Jalan Proklamasi				10.000.000.000	Jalan Proklamasi				-
	Jalan Tepo				3.000.000.000	Jalan Tepo				3.000.000.000
	Jalan Pemuda				1.000.000.000	Jalan Pemuda				1.000.000.000
	Jalan Telindung				2.000.000.000	Jalan Telindung				2.000.000.000
	Jalan Bukit Cinta				9.000.000.000	Jalan Bukit Cinta				9.000.000.000
	Jalan S. Parman				1.500.000.000	Jalan S. Parman				1.500.000.000
	Jalan Gunung Empat (Lanjutan)				6.000.000.000	Jalan Gunung Empat (Lanjutan)				6.000.000.000
	Penanganan Longsoran Kawasan RT 32 Kel Prapatan				3.400.000.000	Jalan Alam Baru				10.000.000.000
	Penanganan Longsoran RT. 35 & RT. 52 Kel. Graha Indah				10.000.000.000	Penanganan Longsoran Kawasan RT 32 Kel Prapatan				3.400.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	Rp	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	Rp
	Jalan menuju Tanjung Bayur (Tempat Wisata)				2.300.000.000	Jalan menuju Tanjung Bayur (Tempat Wisata)				2.300.000.000
	Gorong-gorong Jalan Mulawarman RT. 44 Kel. Lamaru				200.000.000	Jalan Akses Sekolah SD-SMP Terpadu regency				3.000.000.000
	Jalan Gunung Bubukan RT. 28 Kel. Teritip				500.000.000	Peningkatan Median Jl. Jend. Sudirman				4.400.000.000
	Jalan Swadaya RT.03 Kel. Teritip				200.000.000	Jalan Gunung Bubukan RT. 28 Kel. Teritip				500.000.000
	Jalan Handil Sulawesi RT. 45 Kel. Teritip				200.000.000	Jalan Swadaya RT.03 Kel. Teritip				200.000.000
	Jalan Handil Marga RT. 33 Kel. Teritip				200.000.000	Jalan Handil Sulawesi RT. 45 Kel. Teritip				400.000.000
	Turap / Siring Sungai RT. 29 Kel.				200.000.000	Jalan Handil Marga RT. 33 Kel. Teritip				400.000.000
	Jalan Pantai Teritip Indah RT. 29 Kel. Teritip				200.000.000	Turap / Siring Sungai RT. 29 Kel. Teritip				200.000.000
	Jalan Sriwijaya RT. 41 Kel. Teritip				200.000.000	Jalan Pantai Teritip Indah RT. 29 Kel. Teritip				200.000.000
	Jalan Gunung Bahagia RT. 10 Kel. Teritip				200.000.000	Jalan Sriwijaya RT. 41 Kel. Teritip				200.000.000
	Jalan Gg. Gaharu RT. 31 Kel. Teritip				200.000.000	Jalan Gunung Bahagia RT. 10 Kel. Teritip				200.000.000
	Jalan Gg. Amanah RT. 03 Tembus RT. 28 Kel. Teritip				200.000.000	Jalan Gg. Gaharu RT. 31 Kel. Teritip				200.000.000
	Jalan Julak RT. 01 Kel. Lamaru				200.000.000	Jalan Gg. Amanah RT. 03 Tembus RT. 28 Kel. Teritip				200.000.000
	Jalan Celebes RT. 24 Kel.				200.000.000	Jalan Julak RT. 01 Kel. Lamaru				200.000.000
	Jalan Mulawarman Gang Empang RT.51 Kel. Manggar Baru				200.000.000	Jalan Celebes RT. 24 Kel. Teritip				200.000.000
	Drainase RT. 34 Kel.				200.000.000	Jalan Mulawarman Gang Empang RT.51 Kel. Manggar Baru				200.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Rehabilitasi Jalan	**Balikpapan**	**Panjang Jalan yang Direhabilitasi**	**4500**	**15.000.000.000**	**Rehabilitasi Jalan**	**Balikpapan**	**Panjang Jalan yang Direhabilitasi**	**4500**	**15.000.000.000**
	Rehabilitasi Jalan (tersebar)				10.000.000.000	Rehabilitasi Jalan (tersebar)				10.000.000.000
	Barrier Jalan KM. 5,5 - KM. 13				2.000.000.000	Barrier Jalan KM. 5,5 - KM. 13				2.000.000.000
	Jalan Dr. Soetomo				3.000.000.000	Jalan Dr. Soetomo				3.000.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan	**Balikpapan**	**Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala**	**2250**	**11.000.000.000**	**Pemeliharaan Berkala Jalan**	**Balikpapan**	**Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala**	**2250**	**31.000.000.000**
	Pemeliharaan Jalan Kota Balikpapan				10.000.000.000	Pemeliharaan Jalan Kota Balikpapan				30.000.000.000
	Pemeliharaan Jalan Sektor Barat (Semoi) Kel. Marga Sari				1.000.000.000	Pemeliharaan Jalan Sektor Barat (Semoi) Kel. Marga Sari				1.000.000.000
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPT)	**Balikpapan**	**Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin**	**4700**	**6.500.000.000**	**Pemeliharaan Rutin Jalan (UPT)**	**Balikpapan**	**Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin**	**4700**	**6.500.000.000**
	Pembangunan Jembatan	**Balikpapan**	**Panjang Jembatan yang Dibangun**	**1**	**-**	**Pembangunan Jembatan**	**Balikpapan**	**Panjang Jembatan yang Dibangun**	**1**	**5.100.000.000**
	Pembebasan Lahan Jembatan Somber Kariangau				-	Pembebasan Lahan Jembatan Somber Kariangau				-
	Pembangunan Jembatan RT. 26 Kel. Gunung Samarinda (Masjid Ishlahul Ummah)				-	Pembangunan Jembatan RT. 26 Kel. Gunung Samarinda (Masjid Ishlahul Ummah)				5.100.000.000
	Pembangunan Jembatan Atas Air (lanjutan)				-	Pembangunan Jembatan Atas Air (lanjutan)				-
	Penggantian Jembatan	**Balikpapan**	**Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian**	**4**	**18.000.000.000**	**Penggantian Jembatan**	**Balikpapan**	**Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian**	**4**	**18.000.000.000**

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Jembatan Jalan Mukmin Faisal (2 Jembatan)				9.000.000.000	Jembatan Jalan Mukmin Faisal (2 Jembatan)				9.000.000.000
	Jembatan RT. 90 Kel. Manggar				-	Jembatan RT. 90 Kel. Manggar				-
	Penggantian Jembatan Jalan Julak RT. 34 Kel. Manggar				1.500.000.000	Penggantian Jembatan Jalan Julak RT. 34 Kel. Manggar				1.500.000.000
	Jembatan Jalan Taman Sepinggan Kel. Sepinggan				4.000.000.000	Jembatan Jalan Taman Sepinggan Kel. Sepinggan				4.000.000.000
	Revitalisasi JPO Jend. Sudirman-A Yani				2.500.000.000	Revitalisasi JPO Jend. Sudirman-A Yani				2.500.000.000
	Beautifikasi Jembatan (anggaran dari JJ, tentukan titik lokasinya 2 jembatan, pasar baru dan zurich)				1.000.000.000	Beautifikasi Jembatan (anggaran dari JJ, tentukan titik lokasinya 2 jembatan, pasar baru dan zurich)				1.000.000.000
	Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPT)	**Balikpapan**	**Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin**	**40**	**1.000.000.000**	**Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPT)**	**Balikpapan**	**Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin**	**40**	**1.000.000.000**
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan**	**10**	**5.500.000.000**	**Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan**	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan**	**10**	**5.500.000.000**
	Supervisi Jalan				4.000.000.000	Supervisi Jalan				4.000.000.000
	Supervisi Jembatan				1.500.000.000	Supervisi Jembatan				1.500.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Balikpapan**	**Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan**	**78,18%**	**56.000.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Balikpapan**	**Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan**	**78,18%**	**81.000.000.000**
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik**	**60,30%**	**56.000.000.000**	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik**	**60,30%**	**81.000.000.000**

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	15250	50.000.000.000	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	15250	75.000.000.000
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1250	6.000.000.000	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1250	6.000.000.000
	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	**Balikpapan**	**IS 5: Jumlah Bangunan yang memiliki SLF**	**85**	**43.004.149.200**	**Meningkatnya keandalan bangunan gedung**	**Balikpapan**	**IS 5: Jumlah Bangunan yang memiliki SLF**	**85**	**89.504.149.200**
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Balikpapan**	**persentase bangunan yang memiliki ijin**	**93,90**	**43.004.149.200**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Balikpapan**	**persentase bangunan yang memiliki ijin**	**93,90**	**89.504.149.200**
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Balikpapan**	**persentase bangunan layak teknis**	**96,66%**	**43.004.149.200**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Balikpapan**	**persentase bangunan layak teknis**	**96,66%**	**89.504.149.200**
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		**Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan**	**500**	**500.000.000**	**Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung,**		**Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan**	**500**	**1.000.000.000**

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
			Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			**serta Implementasi SIMBG**		**Gedung, serta Implementasi SIMBG**		
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**	**2**	**22.350.000.000**	**Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**	**2**	**77.350.000.000**
	Pembangunan Gedung Serba Guna Kel. Gunung Bahagia				0	Pembangunan Gedung Serba Guna Kel. Gunung Bahagia				0
	Pembangunan Kantor Lurah Sepinggan Baru Kel. Sepinggan Baru				16.000.000.000	Pembangunan Kantor Lurah Sepinggan Baru Kel. Sepinggan Baru				16.000.000.000
	Pembangunan Kantor BKPSDM Tahap 2				5.000.000.000	Pembangunan Kantor BKPSDM Tahap 2				5.000.000.000
	Pembangunan Kantor Dinas Sosial				0	Pembangunan Gedung Smart City Center (pagu 23.970.000.000)				25.000.000.000
	Supervisi Pembangunan Gedung				1.350.000.000	Kantor UPTD dan Gedung Arsip DPU				24.000.000.000
						Penataan Kawasan Bendali Telaga Sari				6.000.000.000
						Supervisi				1.350.000.000
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi,**	**3**	**15.154.149.200**	**Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai**	**3**	**6.154.149.200**

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**		**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
			Renovasi dan Ubahsuai								
	Renovasi Kantor Kelurahan Klandasan Ulu Kel. Klandasan Ulu			1	9.000.000.000		Renovasi Kantor Kelurahan Klandasan Ulu Kel. Klandasan Ulu			1	-
	Supervisi Renovasi Kantor Kelurahan Klandasan Ulu Kel. Klandasan Ulu				405.000.000		Supervisi Renovasi Kantor Kelurahan Klandasan Ulu Kel. Klandasan Ulu				405.000.000
	Peningkatan Gedung Kantor Pemerintah				5.749.149.200		Peningkatan Gedung Kantor Pemerintah				5.749.149.200
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan**	**45**	**5.000.000.000**		**Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan**	**45**	**5.000.000.000**
	Pemeliharaan Gedung-Gedung Kantor Pemerintah				5.000.000.000		Pemeliharaan Gedung-Gedung Kantor Pemerintah				5.000.000.000
	Meningkatknya pelayanan jasa konstruksi	**Balikpapan**	**IS 6: persentase pelayanan Jasa konstruksi**	**33,11**	**4.000.000.000**		**Meningkatknya pelayanan jasa konstruksi**	**Balikpapan**	**IS 6: persentase pelayanan Jasa konstruksi**	**33,11**	**4.000.000.000**
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Balikpapan**	**Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi**	**100%**	**4.000.000.000**		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Balikpapan**	**Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi**	**100%**	**4.000.000.000**
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Balikpapan**	**Presentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**10,81%**	**3.700.000.000**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Balikpapan**	**Presentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**10,81%**	**3.700.000.000**

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	Rp	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	Rp
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			**500**	**3.000.000.000**	**Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**			**500**	**3.000.000.000**
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			**100**	**700.000.000**	**Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi**			**100**	**700.000.000**
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Persentasi jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia**	**60%**	**300.000.000**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentasi jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia**	**60%**	**300.000.000**
	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			**2**	**300.000.000**	**Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**			**2**	**300.000.000**
	NON URUSAN					**NON URUSAN**				
	S7: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum	**DPU**	**IS 7: Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum**	**30,50**	**30.049.708.900**	**S7: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum**	**DPU**	**IS 7: Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum**	**30,50**	**30.049.708.900**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**DPU**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**84**	**30.049.708.900**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**DPU**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**84**	**30.049.708.900**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**DPU**	**Nilai SAKIP DPU**	**83,18**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**DPU**	**Nilai SAKIP DPU**	**83,18**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**DPU**	**Nilai SAKIP DPU**	**85,85**	**10.522.998.900**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**DPU**	**Nilai SAKIP DPU**	**85,85**	**10.522.998.900**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26	**10.522.998.900**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26	**10.522.998.900**

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**DPU**	**Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**113**	**300.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**DPU**	**Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**113**	**300.000.000**
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	**300.000.000**	**Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**		IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	**300.000.000**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**DPU**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**83,6**	**400.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**DPU**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**83,6**	**400.000.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	**70**	**100.000.000**	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**		Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	**70**	**100.000.000**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	**70**	**300.000.000**	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**		Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	**70**	**300.000.000**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**DPU**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**85,6**	**2.205.050.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**DPU**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**85,6**	**2.205.050.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**9**	**25.000.000**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**		Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**9**	**25.000.000**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	5	**950.000.000**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**		Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	5	**950.000.000**
	Air Conditioner 2 PK					Air Conditioner 2 PK				
	Air Conditioner 1 PK					Air Conditioner 1 PK				
	PC All In One					PC All In One				
	Printer					Printer				
	Printer & Scanner A3					Printer & Scanner A3				
	Logitech Rally Plus System Ultra HD Video					Logitech Rally Plus System Ultra HD Video				

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Conference Cam - Rally Plus					Conference Cam - Rally Plus				
	Laptop					Laptop				
	Tablet Tab with Pen					Tablet Tab with Pen				
	Scanner Jet					Scanner Jet				
	Kursi Sofa					Kursi Sofa				
	Drone					Drone				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis bahan logistik kantor	59	435.000.000	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**		Jenis bahan logistik kantor	59	435.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	7	130.050.000	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	7	130.050.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	300	15.000.000	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**		jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	300	15.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekunsi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	100	450.000.000	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**		Frekunsi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	100	450.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2	200.000.000	**Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**			2	200.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**DPU**	**Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**82,1**	**12.420.500.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**DPU**	**Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**82,1**	**12.420.500.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	**2**	**1.200.000.000**	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	**2**	**1.200.000.000**
	Pick Up Isuzu Traga (1 Unit)					Pick Up Isuzu Traga (1 Unit)				
	Dump Truck (2 Unit)					Dump Truck (2 Unit)				
	Kendaraan Lapangan R2 jenis matic 150cc (5 Unit)					Kendaraan Lapangan R2 jenis matic 150cc (5 Unit)				
	Pengadaan Alat Besar		Jumlah Alat Besar	**1**	**5.500.000.000**	**Pengadaan Alat Besar**		Jumlah Alat Besar	**1**	**5.500.000.000**

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Excavator Short Arm Komatsu PC 210-10MO				1.760.000.000	Excavator Short Arm Komatsu PC 210-10MO				1.760.000.000
	Excavator Mini Komatsu PC-70-8				1.240.000.000	Excavator Mini Komatsu PC-70-8				1.240.000.000
	Pengadaan Bekhoe Loader (1 unit)				1.500.000.000	Pengadaan Bekhoe Loader (1 unit)				1.500.000.000
	Selfloader Mini 5M-Hino				1.000.000.000	Selfloader Mini 5M-Hino				1.000.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	**2**	**5.720.500.000**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**		Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	**2**	**5.720.500.000**
	Pengadaan Pompa Tugu Adipura dan Bozem Sepinggan				5.720.500.000	Pengadaan Pompa Tugu Adipura dan Bozem Sepinggan				5.720.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**DPU**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85,55**	**2.396.160.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPU**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85,55**	**2.396.160.000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48	416.160.000	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**		Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48	416.160.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Luasan Gedung Kantor yang dilayani	2004,8	250.000.000	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**		Luasan Gedung Kantor yang dilayani	2004,8	250.000.000
			Jumlah tenaga Non PNS	42	1.480.000.000			Jumlah tenaga Non PNS	42	1.480.000.000
			Jumlah Tenaga Profesional	3	250.000.000			Jumlah Tenaga Profesional	3	250.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**DPU**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**81,15**	**1.805.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPU**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**81,15**	**1.805.000.000**

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**	**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Rp**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan yang dipelihara	6	250.000.000	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**		Jumlah Kendaraan yang dipelihara	6	250.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	58	450.000.000	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**		Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	58	450.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang dipelihara	6	450.000.000	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**		Jumlah Alat Besar yang dipelihara	6	450.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jenis peralatan yang dipelihara	8	310.000.000	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**		Jenis peralatan yang dipelihara	8	310.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan	1	200.000.000	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**		Frekuensi Pemeliharaan	1	200.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	145.000.000	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**		Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	145.000.000
	TOTAL USULAN RENJA 2024				**602.721.865.000**	**TOTAL USULAN RENJA 2024**				**720.051.865.000**

Sesuai dengan table 2-4 diatas, Pagu Indikatif Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 720.051.865.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Milyar Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)** berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 050/0734/Bappeda-Litbang tanggal 05 Mei 2023 tentang Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dan program kegiatan masyarakat yang dimaksud adalah program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, baik dari masyarakat, LSM, asosiasi – asosiasi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian dan pengamatan lapangan, serta dari pelaksanaan musrenbang.

Dalam hal ini DPU memperoleh usulan pemangku kepentingan dari musrenbang, reses dewan, proposal dan surat pengajuan masyarakat, penelitian dan pengamatan lapangan.

Usulan pemangku kepentingan yang telah diajukan kepada DPU baik melalui musrenbang, reses dewan dan proposal/surat pengajuan dari masyarakat akan disurvey serta dilakukan pengamatan langsung di lapangan dan disesuaikan dengan Kriteria Penentuan Skala Prioritas Perencanaan, yang telah disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan DPU Kota Balikpapan. Berdasarkan beberapa hal tersebut kemudian akan disusun urutan prioritas penanganan bagi masing-masing usulan untuk akuntabilitas pemilihan usulan yang dilaksanakan. Sekitar 30% hasil usulan masyarakat melalui forum MUSRENBANG akan menjadi bagian dari pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapanyang usulan prioritasnya mempertimbangkan prioritas usulan dari kewilayahan serta kemudian dilakukan pengurutan melalui perhitungan bobot dan nilai sebagai penentu urutan prioritas dalam penanganan, sisanya didasarkan pada perhitungan teknis dan program *topdown* yang telah dituangkan di dalam dokumen RPJMD.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di level kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan *bottom-up* di mana suara masyarakat bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Balikpapan

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
1	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	sepanjang jalan Jend. A. Yani mulai dari Karang Bugis sampai dengan masjid Al Wustho (800 m) Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Jati	penutup drainase sudah lama tidak pernah mengalami perbaikan, kayu sebagian sudah jabuk/lapuk/keropos, tidak aman bagi pengguna jalan, sekaligus perbaikan trotoar jalan
2	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT.17, JL. CEMPAKA PUTIH, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ilir	perbaikan drainase besar dan pembuatan pagar drainase besar
3	(DPU) Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	RT.52, JL. PREVAB, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ilir	pelebaran drainase RT.52
4	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jalan Utama Taman Sari 1 RT.28, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Belum adanya drianase Lanjutan di Taman Sari
5	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 10, jalan Penegak, depan Posyandu RT 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	Air sering meluap jika hujan
6	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT.08, Jalan Penegak, depan Masjid Nurul Ikhlas, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	Buntunya saluran drainase akibat gorong-gorong yang rusak sehingga menyebabkan banjir
7	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	jl. bunga matahari RT. 55, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	saluran drainase sudah rusak parah
8	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	jl. bukit niaga RT. 13, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	bila hujan air meluap ke jalan
9	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Telindung RT. 87 Kel Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, TITIK KOORDINAT:	Balikpapan Utara	Muararapak	(Prioritas 14)Perbaikan Drainase RT. 87 LOKASI: Jl. Telindung RT. 87 Kel Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara TITIK KOORDINAT: 116°50.0550'E,1°13.077'S

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
		116°50.0550'E,1°13.077'S , Kota Balikpapan			KONDISI: Rusak DAMPAK: Banjir VOLUME: Panjang 65 M Lebar 80 cm Tinggi 120 cm
10	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jalan Inpres II RT.48 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	(Prioritas13)Perbaikan Drainase, dan dan Crossing Jalan Inpres II RT.48, Titik Koordinat-1.236997, 116.838208 Kondisi, Saluran Air Tersumbat dan setiap hujan mengakibatkan banjir, dan berdampak kerumah warga, Volume: Panjang 8 Meter Lebar 2m, Dalam 1,5 m
11	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jalan Inpres.2 RT 46 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	(Prioritas 12)Perbaikan/Peningkatan Drainase Lingkungan, Jalan Inpres.2 RT 46, Titik Koordinat (1'14'22.2'S 116'50'11.0"E), Kondisi : Rusak, Mengakibatkan banjir, Volume : Panjang : 50 m, Lebar : 7 m, Tinggi : 3 m, Ketebalan : 50 cm
12	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT.24 Jl Tengiri, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar Baru	Sering terjadinya banjir dikawasan BTN sehingga perlu dilakukan perbaikan drainase utama BTN dengan usulan (320x2,2x1,5) meter
13	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Inpres II RT.35 Kel. Muara Rapak , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	(Prioritas 11) Perbaikan Drainase dan Crossing Jalan, Jl. Inpres II RT 35 Kel. Muara Rapak Titik Koordinat: -1.236997, 116.838208, Kondisi: Rusak Tujuan: Untuk penanggulangan banjir
14	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	jl. mayjen sutotyo RT. 62, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	lantai parit sudah rusak
15	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Inpres IV dan Jalan Padat Karya RT. 9 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	(PRIORITAS 10)Perbaikan Parit RT. 9 LOKASI: Jl. Inpres IV dan Jalan Padat Karya RT. 9 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, KONDISI: keadaan drainase sudah banyak yang rusak dan amblas sehingga mengakibatkan banjir VOLUME: Panjang 400 m, Lebar 100 m , tinggi 70 cm
16	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT. 4,5,88,86,87,85 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	(Prioritas 9)RT. 4,5,88,86,87,85 bersambungan dengan Drainase Batu Ampar (RT. 17,06,30,03 Batu ampar) Kondisi Rusak, Volume: Tinggi 2 m Lebar 2,5 m

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
17	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	jl. mayjen sutoyo RT. 43, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	pembuatan gorong-gorong jalan lingkungan karena air meluap ke jalan saat hujan
18	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT. 60- RT. 85 Jalan Batu Butok Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Titik Koordinat: -1.2238679, 116.8312805 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	(Prioritas 8) Perbaikan Drainase RT. 60 dan RT 85, Lokasi Jl. Batu Butok RT. 60 dan RT. 85 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tujuan: Penanggulangan Banjir, Volume: Panjang: 100 M Lebar: 80 CM Tinggi: 60 CM, Titik Koordinat: -1.2238679, 116.8312805
19	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	SDN 007 Jl. mayjen sutoyo RT. 38, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	parit disekitar SDN 007 mengalami buntu dan kerusakan, bila hujan air meluap ke jalan
20	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT 12, RT 15, RT 16,RT 18, RT 19,RT 23,RT 35,RT 46,RT 48 ,RT 51,RT 52,RT 54 Jl. Inpres II dan Inpres III Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat: -1.2338261, 116.8361948 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	(Prioritas 6) Perbaikan Drainase Primer (RT 12, RT 15, RT 16,RT 18, RT 19,RT 23,RT 35,RT 46,RT 48 ,RT 51,RT 52,RT 54) Lokasi: Jl. Inpres II dan Inpres III Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tujuan: Penanggulangan Banjir, Volume:Panjang: 1.500 M Lebar: 3 M Tinggi: 2 M, Titik Koordinat: -1.2338261, 116.8361948
21	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT. 18 dan RT. 54 Jl. Inpres II Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat: -1.2338261, 116.8361948, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	(Prioritas 5) Perbaikan Drainase RT. 18 dan RT. 54, Lokasi: Jl. Inpres II Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tujuan: Penanggulangan Banjir, Volume: Panjang: 150 M Lebar: 2 M Tinggi: 1,5 M, Titik Koordinat: -1.2338261, 116.8361948
22	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT 83 dan RT. 8 Jl. Telindung Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat: -1.2274888, 116.8369342, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	(Prioritas 4) Pembangunan Drainase (Kondisi Sebagian Masih Parit Alam) RT. 83 dan RT. 8, Lokasi: Jl. Telindung RT. 83 dan RT. 8 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Tujuan: Penanggulangan Banjir, Volume: Panjang : 600 M Lebar : 1.5 M Tinggi : 1 M, Titik Koordinat: -1.2274888, 116.8369342

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
23	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT. 7 dan RT. 88 Jl. Padat Karya Perum Cluster Nusa Indah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat: -1.2233015,116.8373238, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	(Prioritas 3) Perbaikan Drainase RT.7 dan RT. 88 Lokasi: Jl. Padat Karya Perum Cluster Nusa Indah RT. 7- RT. 88 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Tujuan: Penanggulangan Banjir, Volume: Panjang 75 M Lebar 1,5 M Tinggi 1 M, Titik Koordinat: - 1.2233015,116.8373238
24	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Indrakila Gg. Cakra RT 20, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Kondisi drainase rusak parah, tertimbun tanah saat hujan
25	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 3, jalan. indrakila, gang bahari, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda Baru	Penyempitan parit dan dinding parit belum ada
26	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Indrakila Gg. Tower RT 57, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Kondisi Belum tersedia parit
27	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT. 87 Jl. Telindung Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat: -1.2185695,116.8359062, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	(Prioritas 2) Pembangunan Drainase Primer RT. 87 Lokasi: Jl. Telindung RT. 87 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Tujuan: Penanggulangan Banjir, Volume: Panjang 600 M Lebar 5 M Tinggi 2 M, Titik Koordinat: -1.2185695,116.8359062
28	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT 11 No. 72 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Air meluap
29	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 11, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Perbaikan Drainase & selokan
30	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 11 No rumah 33 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Perbaikan Drainase & selokan
31	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Graha Indah Jalan Poros RT.13, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Belum adanya drainase di lingkungan kami

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
32	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT. 03 Jl. Mulawarman Gg. Padat karya, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	tersumbatnya jalan air
33	(DPU) Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 32, Sepinggan baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	Parit rusak
34	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jalan menuju Masjid Babussalam RT 11, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Perbaikan Drainase & selokan
35	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 11 Gg. Perdamaian , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Perbaikan Drainase & selokan
36	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT 11 No rumah 51, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Perbaikan Drainase & selokan
37	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.21 Jl. TEnggiri (Belakang Gedung Serbaguna dan didepan kantor kelurahan lapangan BTN), Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar Baru	tidak adanya drainase menyebabkan air hujan tidak ada salurannya, akibatnya menggenangi badan jalan, kondisi jalanan juga rusak banyak semenisasi yang sudah rusak, lokasi ada dijalan tempat gedung fasum. jika hujan lebat akan terjadi banjir , volume yang diusulkan 150mx 70 m x 60 cm
38	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 11 No rumah 01-50 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Perbaikan Drainase & selokan
39	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 11 No rumah 01-50, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Perbaikan Drainase & selokan
40	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT 46, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Kondisi drainase rusak parah
41	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Satu Gg. Adidaya RT 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	drainase masih belum di semenisasi

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
42	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.8, Jalan MT.Haryono, gang aryo penangsang, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda Baru	Parit buntu, dinding parit rusak
43	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Satu Gg. Adiguna RT 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	drainase masih belum di semenisasi
44	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 12, JL. Pelayaran, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Prapatan	Drainase perlu di tingkatkan agar air tidak meluap kejalan
45	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 11, JL. Pelayaran, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Prapatan	Drainase perlu di tingkatkan untuk mencegah air meluap
46	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 11, JL. Pelayaran , Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Prapatan	Pembuatan drainase dikarenakan belum ada drainase untuk memecah aliran air agar tidak terjadi banjir
47	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 54, Jl. Batu Ratna, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Belum ada drainase sehingga air kejalan bila terjadi hujan
48	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 9, Jl. Yos Sodarso , Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Prapatan	Pembuatan Drainase Di Depan Kantor KPU
49	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Soekarno Hatta Gg. Sembada RT 23, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Kondisi rusak berat
50	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 24, Jalan Gunung Empat, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Margo Mulyo	Rusak, bocor dan amblas
51	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Gunung Steling Gg. Harmoni RT 54, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Kondisi drainase rusak dan belum di semenisasi/masih berupa tanah
52	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Bunga Matahari RT 01, RT 55 Jl. Bukit Niaga RT. 09, RT. 11, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	penuhnya daya tampung air di parit besar belakang benakutai sehingga menyebabkan banjir

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
53	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 44, Jl. Al Falah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Drainase yang ada sekarang merupakan parit alam yang terus melebar karena abrasi/longsor
54	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 43, Jl. Wanayasa Km. 10 Gg. Wonosari, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Untuk melancarkan aliran air agar tidak ada genangan air
55	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Indrakila III RT 26 - Sebelah Bakso Gendon, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Kondisi drainase rusak parah
56	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.13 Jl. H Daeng Polo; Jl. Rekreasi, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar Baru	belum memiliki saluran drainase di jalan pemukiman menyebabkan air hujan akan menggenangi badan jalan bahkan menyebabkan banjir terutama , volume yang diusulkan panjang 250 meter, lebar 40 cm tinggi/kedalaman 40 cm
57	(DPU) Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	RT 54, jl batu piruz, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	parit buntu
58	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 34, Jl. Swadaya Km. 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Sering terjadi banjir
59	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 32, Jl. Giri Rejo II Km. 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Parit yang sudah ada patah , tanah ambruk. Ada bangunan TK/TPA yang ditakutkan bisa terkena longsor
60	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Bangun Reksa Asri RT.21, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Luapan curah hujan tinggi mengakibatkan air kerumah warga
61	(DPU) Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	RT 54, JL Topaz Raya, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	Parit buntu
62	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT. 25, Jl. Prapatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Prapatan	pembuatan dan perbaikan drainase, karena dalam keadaan rusak parah

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
63	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	JL. Marsma R Iswahyudi RT. 01, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sungainangka	Belum terbangunnya drainase secara permanen... Sambungan Pembangunan Drainase dari RT 07 menuju RT. 01
64	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT.89 Jl. manggar indah , Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	drainase tidak lancar dan banjir
65	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jalan Batu Ampar Permai RT.33, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Drainase masih alami
66	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 13 jalan gunung Empat, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Margo Mulyo	Rusak dan mengakibatkan banjir atau genangan air hujan
67	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 11, Jalan Gunung Satu, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Margo Mulyo	Rusak dan amblas
68	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 24, Jl. Giri Mulyo Km. 14, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Agar air lancar mengalir dan tidak menimbulkan banjir
69	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 14, Jl. Batu Ratna Km. 11, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Untuk memperlancar aliran air agar tidak ke jalan bila hujan lebat
70	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.16 Gg.Sepakat , -1.258591, 116.843099, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ulu	Parit rusak sebagian masih berupa tanah p : 100 m , l : 0,30 m , t : 0,30 m
71	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jalan depan masjid Namira RT. 15 Komp. Balikpapan baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Baru	Voliume drainase kecil
72	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jalan Muamalat RT.52, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Drainase masih alami dan membutuhkan bantuan pengecoran
73	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 04, Jalan Sidomulyo, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Margo Mulyo	Rusak dan mengakibatkan Banjir atau genangan air

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
74	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 02, Jalan Sidomulyo, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Margo Mulyo	Rusak dan Amblas
75	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Graha Indah RT.01, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Drainase melebar dan sering banjir
76	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Graha Indah Blok Kebun RT.02, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Kerusakan Gorong gorong
77	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jalan Taman Sari RT.25, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Drainase sudah masih alami dan butuh pembanunan
78	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Batu Ampar Permai RT.58, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Pembangunan Drainase Lanjutan
79	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. DI Panjaitan RT. 7, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Kondisi drainase rusak parah
80	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Wonorejo 1 RT 50, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Belum ada Parit
81	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Wonorejo 8 RT 50, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Belum ada Parit
82	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Wonorejo 7 RT 50, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Belum ada Parit
83	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Wonorejo 6, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Belum ada Parit
84	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Wonorejo 5 RT 50 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Belum ada Parit

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
85	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Wonorejo Puncak RT 50, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Belum ada Parit
86	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Sumber Rejo 3, Gg. Depag 2 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Kondisi drainase rusak parah. Air buangan limbah rumah tangga dari warga Jl. Sumber Rejo mengalir melalui dinding rumah warga sehingga menimbulkan bau
87	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Satu RT 12, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Kondisi drainase rusak dan kecil
88	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT. 06, Jl. Tepo Gg. Jembatan - Gg. makmur, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Kondisi saat ini masih parit alami dan volume air sudah berlebih dan alur drainase tidak lancar sehingga bila hujan sering banjir
89	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Indrakila III Gg. Pelangi RT 32, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Drainase masih berupa tanah/alami
90	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Gunung Traktor RT.22, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Tengah	Parit bentukan alami, tidak mampu menampung kiriman air dari atas kebawah dan beresiko terjadi penggerusan bawah tanah dan berakibat longsor, sehingga perlu dibuatkan parit drianase volume panjang 100 Lebar 2 Meter Kedalaman 60 Cm
91	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Wiluyo Puspoyudo RT. 24, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	perbaikan drainase agar air tidak meluap atau tidak membuat banjir
92	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 66, Jl. Jaya Wijaya 1, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	Drainase masih alam, Panjang = 50 M, Lebar = 40 Cm, Tinggi = 50 Cm
93	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jalan Soekarno Hatta Gang Firdaus RT.39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Belum adanya bantuan semenisasi drainase di lingkungan tersebut
94	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Sultan Hasanuddin RT.32, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Tengah	Terjadi luapan air ketika hujan, disebabkan kapasitas tampung drainase kurang lebar, di empat titik lokasi draianse dengan volume yang sama, Pelebaran

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
					drainase di 4 titik lokasi P.14.M, P.30.m, P.16.m, P.45.m, L.40, Tinggi 50.cm, volume Panjang 105 Meter, Lebar 50 Cm, Tinggi 50 Cm
95	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Riko RT.25, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Tengah	pembuatan parit baru di permukiman masyarakat dan lingkungan pendidikan sekolah Dasar, Belum terdapat saluran pembuangan di 3 titik Volume Panjang 350 Meter, Lebar 50 Cm, Kedalaman 50 Cm
96	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Riko Gang Murni RT.23, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Tengah	Sanitiasi, Jalur parit rusak, kondisi rusak berat, perbaikan drainase Volume 200 Meter, Lebar 40 Cm, kedalaman 50 cm
97	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Indrakila III SMKN 2 Balikpapan, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Drainase tidak berfungsi secara optimal sehingga jika hujan deras sering terjadi banjir di kawasan SMKN 2 Kota Balikpapan
98	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Sultan Hasanuddin RT.34, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Tengah	Kondisi parit masih berupa bentukan alam, beresiko terjadinya pengikisan pada lapisan bawah tanah, Pembuatan Drainase baru, volume Panjang 70 M, Lebar 60 cm, Tinggi 60 cm, Niaya 140 Juta
99	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT 48, Jalan Pattimura Gang Aulia, dekat Mushollah Al-Auliya, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Drainase masih berupa parit alam sehingga air tidak dapat mengalir dengan sempurna
100	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Joko Tole RT. 44, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Sumber Rejo	Pembangunan drainase baru P = 50m, L = 2m, T = 2m
101	(DPU) Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Marsma R Iswahyudi Poka RT. 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sungainangka	Belum Selesainya Pelebaran Drainase dari Usulan Th. 2022 ..daerah Rawan Longsor Wilayah RT 10 dan RT 15
102	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT.44 Jl. Persatuan, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar Baru	drainase saat ini amsih alami sehingga jika hujan dinding selokan yang masih berupa tanah akan tergerus sehingga terjadi sedimentasi dan banjir
103	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.25, Jln. Mulawarman Gg. Joyoboyo 6, Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Lamaru	Pembangunan drainase (Kondisi drainase masih alami) P: 200 M, L: 40 CM, T: 50 CM

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
104	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.52 Jl. Lumba-lumba (gg Sulir;Gg kakap; gg kecil 1; gg kecil 2; gg kecil 3 dan gg kecil 4), Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar Baru	volume saluran air saat ini tidak dapat menampung limpahan air hujan, sehingga air meluap ke badan jalan dan mengenang dirumah warga, lokasinya berada di gg sulir bagian sisi kanan(p 150 mx80 cmx 70 cm); gg kakap; gg kecil 1; gg kecil 2; gg kecil 3 dan gg kecil 4
105	(DPU) Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Indrakila III RT 55 - drainase besar sebelah perumahan Calladium Residen, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Ukuran Drainase kurang besar sehingga jika hujan deras air lama surutnya
106	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT 29, Jl. Praja Muda I kanan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	parit rusak
107	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Indrakila III, jalan protokol Kampung Timur RT 34-35, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Drainase tidak berfungsi secara optimal, jika hujan deras air dari Sungai besar malah masuk berbalik arah ke drainase ini, sehingga air genangan dijalan pada saat hujan susah untuk surutnya
108	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT.45 Jl. selili , Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	air masuk kerumah warga saat musim penghujan
109	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Sultan Hasanuddin RT.33, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Tengah	Drainase parit dalam keadaan rusak berat, Perbaikan Drainase, volume Panjang 35 M, Lebar 60 cm, Tinggi 60 cm, Biaya 70 Juta
110	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Marsma R Iswahyudi Belakang Warung Khoirul RT. 37, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sungainangka	Lanjutan Pembangunan Drainase dari atas Jalan Marsma R Iswahyudi
111	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 07, Jl.Penegak, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	Parit rusak masih dari tanah
112	(DPU) Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	Jl. ZA. Maulani Depan TPU RT. 24 Prioritas, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sungainangka	Drainase yg ada surah Rusak Pecah Pecah...luapan Air meluber ke jalan ..Drainase Depan TPU BDS II

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
113	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT 29 Jl. Praja Muda I kiri , Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	parit rusak
114	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. ZA. Maulani depan Pasar Sore naik Sampe ke TPS RT. 21, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sungainangka	Belum adanya Saluran drainase dari Arah RT. 21sampe turun ke RT. 22 depan pasar Sore...aliran air meluap ke jalan raya
115	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT.63 Perum taman intan griya Gg. pelamboyan, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	menghabat aktivitas warga saat musim penghujan
116	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT.43 Jl. Perum Graha Kartini Permai, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Teritip	Tanah bibir parit longsor (Usulan Peningkatan Drainase P= 300 M x L= 1 M) RENCANA PRIORITAS 14
117	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT. 11, jalan tamansari bukit mutiara , perbatasan RT.11 dan RT. 12, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda Baru	Dinding parit rusak sehingga mengikis tanah/pagar pembatas antar RT
118	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 77, Jalan MT. Haryono Pelangi Residence, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Pengendapan (pendangkalan) bendali yang menumpuk, material tanah, pasir, sampah dan tumbuh tanaman liar diatasnya endapan tsb.
119	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT 5, Jl. Kavling Blok ll RT.5 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	Parit rusak
120	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Padat Karya Gg. Steling I RT 40 Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Drainase rusak parah, banyak rembesan air yang mengalir dibawah saluran drainase dan tembus ke siringan rumah warga lainnya
121	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.41 Jl. Persatuan, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar Baru	saluran air masih berupa saluran alami yang belum pernah dibangun, jika hujan sebagian tanahnya akan terkikis menjadi sedimentasi selokan tersebut, selokannya tidak dapat menampung debit air saat musin hujan, sehingga kadang limpahan airnya akan menggenangi badan jalan bahkan banjirnya masuk ke rumah warga(p 150 m, l 1 m, t 1 m)

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
122	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 25 Kel Telaga sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	drainase sudah rusak
123	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. DR. sutomo RT.05 GG. Utari 1 dan 3, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Sumber Rejo	Perbaikan drainase rusak P = 150m
124	(DPU) Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.22 jl. Kerapu 1,2,3(volume p 300 meter, l 40 cm), Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar Baru	drainase yang ada saat ini tidak dapat menampung air jika hujan terjadi, akibatnya limpahan air akan meluap ke badan jalan pemukiman
125	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. K.H. Agus Salim RT. 32, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	melanjutkan pekerjaan sebelumnya yang belum dikerjakan
126	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT.18, perumahan pemda, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda Baru	Parit buntu sehingga saluran air tidak lancar
127	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 39 Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ulu	Drainase yang ada tidak layak
128	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jalan PJHI Padat Karya RT. 014, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	SALURAN DRAINASE TIDAK ADA
129	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	JL. Telogorejo RT 29, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	dasar dinding mulai keropos dan bolong
130	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 61, Jl. Sepinggan Asri VII, IX dan XI, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	Drainase lingkungan terlalu kecil sehingga air sering meluap ke rumah warga (jika hujan), Panjang = 375 M, Lebar = 50 Cm, Tinggi = 50 Cm
131	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	JL. Tanjung pura RT 27 kel telaga sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	drsinsde sudah jebol dan rusak rawan terjadi nya longsor di jalan warga
132	(DPU) Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Prapatan dalam , parit pinggir jalan utama RT 04 kel telagasari, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	tidak ada saluran air,pembuangan limbah langsung ke jalan

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
133	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Bukit Pelajar RT.37, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Tengah	Air buangan dari bagian atas permukiman masyarakat yang tidak terdapat saluran pembuangann air, menimbulkan dampak pengikisan dan terjadinya longsor serta banjir saat hujan turun, Pembuatan Drainase Baru / Parit (Volume = Panjang 250 Meter, Lebar 50 Cm Kedalaman 50 Cm)
134	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 68, Jl. Semeru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	Air tidak mengalir di parit karena parit rusak, Panjang = 150 M, Lebar = 40 Cm, Tinggi = 70 Cm
135	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 56, Jl. Teratai Merah, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	Drainase sudah rusak, Panjang = 200 , Lebar = 60 Cm, Tinggi = 50 Cm
136	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT.30, Handil I Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur. , Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Lamaru	Kondisi Drainase kurang memadai, drainase masih alami, jika hujan sering terjadi banjir di beberapa RT yakni RT.13, 14, 34, 17,16 dan 6. (P : 500 M L : 1 M T : 70 CM)
137	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 37, Gg. Assolihin, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	Bila hujan sering banjir dan pendangkalan parit, Panjang= 250 M, Lebar = 50 Cm, Tinggi = 50 Cm
138	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT. 36 Jl. Sosial V, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	Jika hujan deras sering terjadi banjir, Panjang = 70 M, Lebar = 1.5 M, T = 1.5 M
139	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Penggalang RT 33 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	drainase kecil dan apabila hujan air parit naik sehingg banjir dan drainase tersebut belum pernah diperbaiki volume P : 200 M, L : 80 M T : 100 M
140	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Merdeka RT. 36, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	Kondisi drainase kurang memadai
141	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 14, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Raya	BELUM ADA DRAINASE P 15M, L 0.5M, T 15 CM

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
142	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 13, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Raya	(LANJUTAN DARI DRAINASE SEBELUMNYA) BELUM MEMILIKI DRAINASE P 200M, L 0,5M
143	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 75, Jalan Abdul Wahab Syahrani, Gang Podomoro 2, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Kondisi drainase masih berupa parit alam sehingga mengakibatkan banjir
144	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	rt.16, perum. tamansari bukit mutiara, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda Baru	gorong-gorong parit pecah
145	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT 58, Jalan Abdul Wahab Syahrani, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Drainase masih berupa parit alam
146	(DPU) Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.28 Jl. Banjar, Gang Kates III, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar Baru	Ukuran parit yang kurang besar sehingga saat musim penghujan air akan meluap ke badan jalan (p 150 m, l 40 cm)
147	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Hendriawan sie RT 31, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	Kondisi drainase kurang memadai
148	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 31, Jl. Teratai Merah bagian atas, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	Belum ada parit si sisi kanan dan kiri badan jalan utama, air meluber ke segala arah, Panjang = 80 M, Lebar = 80 Cm, Tinggi = 50 Cm
149	(DPU) Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Jend Sudirman RT. 23, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	drainase buntu dikarenakan banyaknya sampah P: 200 M, L: 1 M, T: 1 M
150	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT 30, jl Bhineka, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	parit lama ketutupan tanah
151	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl. Dahor Rt 54 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ilir	Drainase lingkungan RT 54 banyak yang rusak
152	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 10, Jalan Ulin Raya Perumnas Blok IV, Belakang Kantor Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Drainase sudah rusak

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
153	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 27, Jl. Intan X, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	Apabila hujan terjadi banjir, Panjang = 35 M, Lebar = 80 Cm, Tinggi = 70 Cm
154	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 6, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Raya	LOKASI RAWAN BANJIR P 250M, L 2M, T 15 CM
155	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 25, Jl. Intan 1, 2, 3, 4, 6 dan 7, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	Drainase rusak, Panjang = 56 M, Lebar = 1 M, Tinggi = 1 M
156	(DPU) Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Arbain Asnawi Dari Belakang Rumah Bpk. tanto lewat samping TP. Garindo RT. 30 Prioritas, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sungainangka	Aliran Drainase yang tidak bisa Lancar Penyumbang Banjir di daerah BJ BJ..
157	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 3, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Raya	kondisi drainase rusak parah P 150m, L 1m, T 30cm
158	(DPU) Pengerukan sedimen pada sungai/drainase primer	Jl. RE Martadinata RT 17 Gang Jurang, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	Penumpukan sedimen pada saluran drainase
159	(DPU) Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	RT. 19, Jl. Marsma R. Iswahyudi, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	Apabila hujan terjadi banjir, Panjang = 10 M, Lebar = 2 M, Tinggi = 6 M
160	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 18, Jl. Prona 3, Gg. Arpati, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	Banyaknya daun kering menyumbat parit dan tumbuhan liar, airnya tidak bisa lancar, Panjang = 70 M, Lebar = 1 M, Tinggi = 80 Cm
161	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Nuri I RT.17 (Perbatasan Villa Damai), Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunungbahagia	Lanjutan pembangunan drainase karena baru sebagian yang jadi
162	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT. 12, Jl. Mulawarman, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	Terjadi genangan air sehingga membuat lingkungan terlihat jorok dan kumuh, Panjang = 80 M, Lebar = 50 Cm, Tinggi = 50 Cm
163	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl Bukit Cinta Damai I no 3 RT 038 Kel Damai kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	drainase rusak dengan volume panjang 300 meter dan lebar 2 meter ketinggian 1 meter

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
164	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jalan Depan Masjid Komp. Balikpapan Baru RT. 08, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Baru	Kondisi exitingmasih drainase alam, dinding tergerus
165	(DPU) Pengerukan sedimen pada sungai/drainase primer	Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	terdapat saluran drainase yang memerlukan pembersihan
166	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 35, Jalan LKMD Blok L3, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Drainase masih berupa parit alam
167	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.4, Jalan indrakila, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda Baru	Belum nada saluran air/parit
168	(DPU) Pengerukan sedimen pada sungai/drainase primer	Jalan Jend. Sudirman RT. 13 Kelurahan Damai , Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	Terjadinya sedimentasi sungai di sisi bsb Pengangkatan atau penerukan sedimentasi RT 13, Volume diperkirakan Sepanjang wilayah RT 1
169	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 66, Jalan MT. Haryono, Gang Ganesha 1, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Drainase masih berupa parit alam
170	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl.Al Makmur 2 RT14 kel.Damai, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	Belum ada drainasenya, Sepanjang 300 M
171	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl Asrama Bukit RT 63 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ilir	Drainase sempit sering meluap ke badan jalan
172	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Gang Blambangan RT.62, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Dimensi air sudah melibihi, dan dapat mengakibatkan luapa hingga ke jalan
173	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Jl Al Falah RT 37 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ilir	Gorong-gorong buntu sudah 3 tahun
174	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT.44 Jl. Mulawarman, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Teritip	Sering terjadi banjir karena Diameter Gorong-gorong yg melintang di Jl. Mulawarman berukuran kecil dan tersumbat)

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
					(Perbaikan/Penggantian Gorong-Gorong menjadi Box Culvert) RENCANA PRIOROTAS 1
175	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 3, Jalan Abdul Wahab Syahrani Gang Villa, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Belum ada drainase atau drainase masih berupa parit alam
176	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT 18, Perumnas, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Drainase masih berupa parit alam, belum terpasang bata semen sehingga mengakibatkan banjir
177	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Jl. Lingkungan Wono agung RT.30, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Drainase dilingkungan tersebut belum ada (alami)
178	(DPU) Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	jl. p. antasari rt. 07, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Rejo	pembuatan dan cor parit
179	(DPU) Pengerukan sedimen pada sungai/drainase primer	RT 20, Jalan Pandan Sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Marga Sari	Terjadinya penumpukan sampah eks kebakaran RT 20
180	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT 20, Jalan Pandan Sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Marga Sari	Kerusakan siring drainase eks kebakaran RT 20
181	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT 16, Jalan Pandan Barat, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Marga Sari	Menyebabkan genangan air saat hujan dan aliran drainase buntu
182	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jl Sumber makmur 1 RT 16, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Kariangau	Jalan rusak karena beban jalan melebihi kapasitas sehingga jalan rusak dan berlubang
183	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT 12, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Kariangau	Jalan tanah dan kalau hujan becek
184	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jl. Solar RT 11, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Kariangau	Kondisi jalan kampung jika turun hujan jalan licin dan berlumpur

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
185	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Jl. DMR RT 17 dan RT 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Kariangau	Jalan kondisi rusak yang jadi akses utama keluar masuk warga rt 10, rt 13, dan rt 17
186	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT.38 Gg.Pesantren 3 , -1.254385, 116.851684 , Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ulu	Jalan rusak dan sebagian masih berupa tanah p: 150 m , l: 4 m , t : 0,10 m
187	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Teluk waru RT 9, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Kariangau	Jalan tanah kalau hujan kondisi becek dan berbahaya
188	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Selok Baru Gang Iskandar RT 8, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Kariangau	Pengecoran jalan sepanjang 150 meter
189	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Kenanga RT 7, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Kariangau	Masih jalan tanah sepanjang 150 meter
190	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Ruhui Rahayu RT 6, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Kariangau	Jalan rusak sehingga perlu pengecoran sekitar 1500 meter
191	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jl. Sultan Hasanuddin RT 1, rt 2 dan RT 14. Mulai dari samping gerbang ferry hingga ke kantor kelurahan., Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Kariangau	Jalan rusak parah karena digunakan kendaraan truk holling batu bara dan trailer bermuatan.
192	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Manuntung gang firdaus, belakang Bapak Caco, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Kariangau	Jalan rusak dan licin
193	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RT.51, JL. RE MARTADINATA, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ilir	perbaikan siring RT.51
194	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jl. Samratulangi RT 2, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Kariangau	Jembatan putus karena banjir rob
195	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi	Jl. MT. Haryono Gg. PLN RT. 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunungbahagia	Jalan akses masuk Gang PLN rusak dan berlubang

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
	jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)				
196	(DPU) Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	RT.32 ,-1.253788, 116.847320 , Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ulu	Jalan jembatan masih berupa kayu dan hampir rumtuh p : 500 m , l : 2 m
197	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jl. MT Haryono Gg. PLN RT. 38, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunungbahagia	Jalan akses utama Gg. PLN berlubang dan sangat berbahaya bagi masyarakat yang melintas
198	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT.28, -1.256414, 116.846590 , Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ulu	Jalan masih berupa tanah p : 200 m , l : 3 m , t : 0,10 m
199	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT 24, Jalan Pandan Sari, gang 8, SDN 019, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Marga Sari	Tergenangnya air(belakang) di sekitar area pos satpam
200	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jl. Ruhui Rahayu RT. 54, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunungbahagia	Sering terjadi penumpukan kendaraan / macet
201	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT 22, Jalan Jend.Sudirman, Depan Torani sampai TK Biduri, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	Jalanan Lingkungan Rusak
202	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT. 01 Jl. Mulawarman Gang Julak, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Teritip	Jalan Rusak (Usulan Semenisasi Jalan P= 500 M X L=6 M) RENCANA PRORITAS 12
203	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	RT 11, Jalan MT.Haryono, depan Masjid Jami Nurul Haq, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	Usulan Jalan Flamboyan untuk di perbaiki karena akses orang beribadah Masjid Jami Nurul Haq
204	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jl. mayjen sutoyo RT. 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	rehab jalan diatas drainase
205	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	jl. mayjen sutoyo RT. 49, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	rawan longsor dekat posyandu

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
206	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT.15 gang samping rivera, -1.258462, 116.843281 , Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ulu	Jalan Rusak p: 100 m , l : 2 m , t : 0,10 m
207	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jl. Padat Karya Gg. Karya Prima No. 54 RT. 5 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, Titik koordinat Lat -1.222022 Long 116.838361, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	Kondisi Jembatan lama sudah rusak dimakan usia, Volume: Panjang: 5m, Lebar: 3m
208	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jl. Inpres IV dan V RT.19 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	(PRIORITAS 16)Perbaikan Jembatan, Jl. Inpres IV dan V, Kondisi: Rusak Parah dan Berlubang, Karna mengakibatkan terganggunya akses jalan dan aktivitas warga khususnya kendaraan roda dua dan roda empat, Volume: Panjang: 4 m, Lebar: 1 m
209	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Jl. Soekarno Hatta GG. Putingan RT. 1 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	(Prioritas 15)Perbaikan Jalan, Jl. Soekarno Hatta GG. Putingan RT. 1, Titik Koordinat: -1.2259983333333333S, 116.84465E, Kondisi: Jalan banyak lubang, besinya terlihat, dapat mengakibatkan pengendara sepeda motor terjatuh, Agar jalannya mulus kembali dan aman bagi pengendara sepeda motor, Volume: Panjang: 500m, Lebar: 5 m, Luas 2.500 m2
210	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jl. Bunga matahari RT. 01, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	jalan mengalami kerusakan
211	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT. 49, Gg. Ansor, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Jalan tanah, saat hujan dan dalam kondisi basah jalan sangat licin dan membahayakan pejalan kaki apalagi kendaraan bermotor
212	(DPU) Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT. 85 Jl. Bambang Sutikno Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Perbatasan dengan Kelurahan Batu Ampar Titik Koordinat: -1.2134114, 116.8340887 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	(Prioritas 7) Pembangunan Jembatan RT. 85 Jalan Bambang Sutikno Perbatasan Kelurahan Batu Ampar, Lokasi Jl. Bambang Sutikno RT. 85 Kelurahan Muaara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Volume: Panjang: 12 M Lebar: 10 M Koordinat : -1.2134114, 116.8340887

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
213	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jl. mayjend sutoyo RT. 61, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	jalan sudah banyak berlubang
214	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Bubutan No. 11 RT 59, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Kondisi Jalan Rusak
215	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Bubutan No. 06 RT 59, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Kondisi Jalan Rusak
216	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Dua Gg. Camar RT 20, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Kondisi Jalan bergelombang saat dilewati
217	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Dua Gg. Dara RT 20, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Kondisi Jalan Banyak yang semennya terkelupas
218	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jl. Indrakila RT 57, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Kondisi Jalan Rusak, Perbaikan Jalan Masuk PKG
219	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT.10 Jl. Gunung Bahagia, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Teritip	Jalan Rusak dan Becek (Usulan Semenisasi Jl. Gunung Bahagia P=400m x L=5m) RENCANA PRIORITAS 9
220	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Indrakila Gg. Tower RT 57, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Kondisi jalan rusak parah
221	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT 32, sepinggan baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	jalan rusak
222	(DPU) Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT.81 Jl.PJHI dalam perum CGS 2, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	jembatan kayu ulin amblas/rusak
223	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RT 12, Jalan Gunung Satu, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Margo Mulyo	Khawatir longsor mengingat daerah perbukitan
224	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT. 14, JL. Pelayaran, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Prapatan	Jalan Sudah Rusak dan perl;u segera perbaikan

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
225	(DPU) Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT. 14, JL. Pelayaran, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Prapatan	perbaikan turap, karena turap sudah rusak dan perlu segera di perbaiki
226	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Satu Gg. Adikarya Rt 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Jalan rusak dan kurang tinggi
227	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Satu Gg Adidaya RT 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Jalan masih berupa tanah belum ada semenisasi
228	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jl. Tulip RT. 06 Komplek Balikpapan Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Baru	Pondasi jembatan tergerus air
229	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT. 57, Gg. Rahmat, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Jalan masih tanah
230	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jl. mayjend sutoyo (dari lampu merah roti netti s/d hotel cinderella), Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	trotoar sudah rusak berat
231	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT. 56, Jl. Lindung Km. 16,5, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Kondisi jalan masih tanah dan bila hujan becek dan licin
232	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Jl. Dua Latsitarda RT 18, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Pengaspalan Jalan
233	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RT. 44 Jl. Al Falah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Jalan yang sudah disemenisasi dapat longsor bila terjadi hujan
234	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT 20, perum her mandiri I blok a, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	jalan rusak
235	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Indrakila III GG. Antasena RT 26 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Kondisi Jalan Licin dan Rusak

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
236	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT. 43, Jl. Wanayasa Km. 10 Gg. Wonosalam, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Pengecoran jalan agar melancarkan transportasi warga
237	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT 16, Jalan gunung Empat, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Margo Mulyo	Rusak dan berlobang
238	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT. 35, Kel. Prapatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Prapatan	jalan dalam keadaan rusak
239	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT. 37 Jl. Proklamasi, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	membahayakan dan menyulitkan warga beraktivitas
240	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT.03 Gg Swadaya, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Teritip	Jalan masih tanah (Usulan Semenisasi jalan P= 250 M x L= 4 M) RENCANA PRIORITAS 3
241	(DPU) Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	RT. 30, Jl. Giri Rejo Km. 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Jembatan yang ada sangat rapuh dan sempit jadi perlu di tingkatkan
242	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT. 30, Jl. Giri Rejo Km. 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Jalan poros masuk kampung giri rejo sudah rusak dan berlubang sangat perlu diadakan peningkatan
243	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT. 28, Jl. Giri Rejo Km. 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Kondisi jalan masih tanah
244	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT. 22, Jl. Giri Mulyo Kmm. 14, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Untuk akses jalan warga kondisi masih jalan tanah
245	(DPU) Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	RT. 21, Jl. Akasia, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Jembatan sudah lama dan rapuh serta sempit ditakutkan dapat roboh dan memutus akses warga

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
246	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RT. 14, Jl. Batu Ratna Km. 11, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	kondisi jalan longsor dan merupakan Jalan Utama yang digunakan oleh warga
247	(DPU) Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT. 13, Jl. Sehati Km. 11, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Jembatan kayu sudah rapuh, beberapa kayu sudah patah, tujuannya agar dapat dilalui kendaraan
248	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Gg. Radar RT.37, -1.257614, 116.849758 , Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ulu	Jalan menanjak kondisi rusak dan berlubang p : 120 m , l : 4 m , t : 0,10 m
249	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RT.25 Jalan Belakang SDN 026, -1.256250, 116.843335 , Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ulu	Siring Jalan rawan longsor p : 15 m , l : 2 m , t : 5 m
250	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT. 12, Jl. Batu Ratna Km. 10 Gg. Mandiri, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Untuk mempermudah aktifitas masyarakat
251	(DPU) Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan Projakal RT.22, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Perbaikan Siring Kantor Kecamatan Balikpapan Utara
252	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	SDN 014 Balteng RT.16, -1.258591, 116.843099, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ulu	Siring sekolah berupa ulin dan rawan roboh p : 15 m , l : 0,5 m , t : 2 m
253	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Gunung Kidul RT.25 & RT.67, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Kerusakan Jalan Lingkungan
254	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	RT.26 Jl. Tanjung Kelor, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar Baru	jembatan mengalami kerusakan(jembatan kayu), sehingga kadang membuat penggunanya mengalami kecelakaan, usulan perbaikan panjang 80 meter, lebar 1,5 meter. selain perlu adanya semenisasi agar
255	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT 40 Gg Malioboro , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Jalan Gg Malioboro rusak
256	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Jl. Padat Karya Kuburan Cina RT 40, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Jalan Utama Rusak Parah

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
257	(DPU) Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jl. Wonorejo 3 RT. 51, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	jembatan kurang lebar dan membuat air meluap ke jalan pada saat hujan deras
258	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RT.09 , -1.260591, 116.840813 , Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ulu	Siring masjid berupa ulin dan rawan roboh p : 10 m, l : 2 m , t : 4 m
259	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Sumber Rejo 3, Gg. Depag 1 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Permukaan Jalan Rusak
260	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Sumber Rejo 3, Gg. Depag 2 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Permukaan Jalan Rusak
261	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Indrakila III Gg. Pelangi RT 32, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Jalan masih berupa tanah, jalan setapak
262	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Tanjung Pura RT. 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	karena siring sudah rusak
263	(DPU) Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jl. Jend. Sudirman RT. 4 , Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	jembatan sudah rusak dan dapat membahayakan warga
264	(DPU) Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jl. Jend. Sudirman Gang Selewangan RT. 5, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	jembatan sudah rusak berat dan dapat membahayakan warga
265	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT.34, jalan tamansari bukit mutiara, cendana I, depan masjid assalam, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda Baru	Jalan berlubang
266	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT.22 Jl. puskesmas pjhi, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	jalan rusak
267	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Jl. ZA Maulani ..Jalan BDS II ..RT Se-BDS tembus Poka, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sungainangka	Jalan untama BDS II dalam Kondisi Rusak/Berlubang lubang

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
268	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT.41 JL.Selili, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	akses jalan menghambat aktivitas warga
269	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jl. Strat I Gg. Olahraga RT 10 - Samping Langgar Miftahul Huda, Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Masih sering terjadi kemacetan di jalan Strat I (depan SMP 6) sehingga membutuhkan alternatif jalan lainnya untuk mengurai kemacetan melalui Gg. Olahraga ke arah Kampung Kangkung Sumber Rejo
270	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jl. Sumber Rejo II RT. 37, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Sumber Rejo	Perbaikan jalan P = 110m, L = 4.5m, T = 15cm
271	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Binaraga RT. 34, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Sumber Rejo	Peningkatan jalan tanah P = 125m, L = 3m, T = 15cm
272	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT 55, Jalan Abdul Wahab Syahrani, Gang Podomoro 2, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Kondisi jalan yang masih berbatu sehingga mengganggu pengguna jalan
273	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT.83 Jl. mulawarman pjhi dalam, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	jalan rusak dan berlubang
274	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Ery Suparjan dan Jl. ARS. Muhammad RT. 34, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	Trotoar sudah rusak dan dapat membahayakan pejalan kaki
275	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT.90 JL.padat karya, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	jalan rusak dan menghambat aktivitas warga
276	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT.31 Gang Gaharu, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Teritip	Jalan rusak dan Becek (Usulan Semenisasi Jalan P= 300 M x L= 4 M) RENCANA PRIORITAS 10
277	(DPU) Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT 38 Kelurahan telaga sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	siring ambruk dan sudah terjadi longsor

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
278	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT 44, Jalan Soekarno Hatta Km.4, samping warung makan jauhari, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Kondisi jalan saat ini sudah rusak dan sebagian jalan masih berupa tanah sehingga mengganggu aktifitas pengguna jalan
279	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Jl D.I.Panjaitan RT. 28 GG Bambu, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Sumber Rejo	Pebuatan Siring dan drainase P = 250m, T = 1m dan L = 50cm, T = 70cm
280	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT.62 Perum taman intan griya Gg hidayah, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	jalanan rusak
281	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT 30, gang selar, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Marga Sari	Jalan sudah mulai retak-retak dan berlobang
282	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RT 14, Jl. Jend A. Yani, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Jati	siring masih berupa siring kayu, rawan longsor
283	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RT.12, JL. ABADI, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ilir	perbaikan siring
284	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Letjen Suprapto RT 04 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ilir	Jalan berlubang dan retak-retak
285	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	jl. senayan rt. 70 & 71, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Rejo	perbaikan jalan rt. 70 & 71
286	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Padat Karya Gg. Steling I RT 37 Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Jalan longsor, diterdapat rembesan air dari drainase yang rusak masuk ke bawah badan jalan dan rembes ke siringan rumah warga
287	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT.14, Jalan borneo hills, perum. tamansari bukit mutiara, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda Baru	Jalan berlubang/rusak
288	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	JL Tanjungpura 1 RT 22 dan RT 07 kel telagsari, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	turap lama sudah pecah dan retak

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
289	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RT 21 kelurahan telagasari, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	Siring berupa tanah dan belum permanen bahaya longsor ketika hujan
290	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. D.I Panjaitan RT. 26, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Sumber Rejo	Pembangunan SIring P = 100m, L = 1m, T = 2m
291	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Letjend S. Parman RT. 19, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Sumber Rejo	Pembangunan Siring Jalan Rusak P = 35m, T = 5 m
292	(DPU) Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT.29 Jl. Pantai Teritip Indah, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Teritip	Longsor pada tepi/dinding sungai (Pembangunan Siring/Turap jalan/sungai, sepanjang 1200m) RENCANA PRIORITAS 6
293	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. P. Antasari RT.15, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Sumber Rejo	Perbaikan Siring rusak P = 30m, T = 2m
294	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT.29 Jl. Pantai Teritip Indah, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Teritip	Jalan Masih tanah, becek, dan merupakan jalan Alternatif ke Pantai (Semenisasi Jl. Pantai Teritip Indah, P=1200m x L=5m) RENCANA PRIORITAS 7
295	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. P. Antasari RT.11, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Sumber Rejo	Perbaikan Siring rusak P = 25m, T = 2.5m
296	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan Bonto Bulaeng RT. 01 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Sumber Rejo	Jalan rusak terkikis, retak dan berlubang P = 300m , L = 4m
297	(DPU) Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jalan Beraan Parre RT.57, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Pondasi jembatan sudah gantung
298	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	RT.04 , -1.261440, 116.846274, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ulu	Jalan rusak karena galian jargas serta tidak memiliki reling p : 100 m , l : 1 m , t : 0,10 m
299	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Jl. Tanjung pura RT. 10 (samping kantor Kodam dan Imigrasi), Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	Trotoar sudah tidak layak dan dapat membahayakan pejalan kaki
300	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi	Jl. Belatuk IV & V RT. 27, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunungbahagia	Jalan rusak

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
	jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)				
301	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT 10, Jalan semoi, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Marga Sari	Jalan rusak
302	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RT 02, JL. Karang Bugis, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Jati	siring kayu sudah rapuh, rawan longsor
303	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	RT 10, Jalan Ulin Raya, Samping Kantor Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Kondisi jalan saat ini sudah rusak (berlubang)
304	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jln jenderal sudirman rt 16 kel damai kec balikpapan kota, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	jalan rusak dikarenakan air parit meluap sehingga meninmbulkan bau
305	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Blok K. 12 Simpang Empat Posyandu RT. 49, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	Menghambat dan membayakan warga yang melintas bahu jalan longsor karena bahu jalan longsor
306	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RT 22, JL. Karang Jati Dalam, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Jati	penguatan siring kayu, struktur tanah rawan longsor
307	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RT 15, Jl. Panorama Atas, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Jati	penambahan dinding siring untuk keamanan jalan lingkungan, posisi tanah tinggi
308	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	JL. prapatan dalam RT 01, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	tidak ada siringan, siringan tanah mudah longsor
309	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	JL. Telagasari RT 30, trotoar depan sekolah SMPN 2 balikpapan, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	trotoar jalan masih tanah dan pasir
310	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT.16,JL.Pupuk Baru 1, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	Kondisi jalan sudah sangat jelek aspal terkelupas

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
311	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RT 30, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Raya	RUSAK P 8M L 5M
312	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	JL. pembangunan RT 24 , Jalan utama RT 24 Blok B, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	pagar siring terkikis air,mengakibatkan jebol dan berbahaya
313	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT.34, Jln. Mulawarman Gg. Rachman Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur., Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Lamaru	Semenisasi jalan lingkungan (kondisi jalan masih tanah, jika hujan terjadi genangan air) (P : 135 M L : 4 M T :15 CM)
314	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT. 23, pesona mediterania blok T, balikpapan baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda Baru	Jalan berlubang dan rusak
315	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT.30Jl. Mulawarman Gg. Bersama Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Lamaru	Semenisasi Jalan Lingkungan jalan berlubang kalau hujan tergenang dan membahayakan pengguna jalan p : 150m L:3m t : 15cm
316	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT.26 Jl. Mulawarman Gg. Kalkun Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Lamaru	Peningkatan semenisasi jalan lingkungan (keadaan jalanan masi latrit dan tanah) kalau hujan tergenang) p : 150m L:4.5 :15CM
317	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT.19 Jl. Sosial Dalam Gg. Asnawi Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Lamaru	Peningkatan Jalan lingkungan (kondisi jalan rusak dan berlubang) P : 200M L : 2.5M T:15CM
318	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT 31, Jalan pandan sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Marga Sari	Semenisasi yang membuat rumah warga lebih rendah dari jalan
319	(DPU) Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT. 02 Jalan Mulawarman Gg. Bubuhan, Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur., Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Lamaru	Belum memiliki siring sungai, jika hujan dan aliran sungai deras sering terjadi longsor yang merusak jalan lingkungan. (P : 300 M L : 4 M T : 2 M)
320	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi	RT.08 Jl. Traktor VI Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Lamaru	Jalan Rusak dan masih tanah jika hujan jalan berlumpur P : 2 km L : 4m t:15cm

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
	jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)				
321	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jl. RE Martadinata RT. 17 Gang Jurang, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	Terdapat kerusakan pada beberapa bagian badan jalan
322	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Sultan Alauddin RT. 37 Gang Amanah, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	Kondisi siring longsor
323	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Karang Anyar RT 53 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ilir	Jalan lingkungan RT 52 banyak yang rusak
324	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl Dahor RT 52 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ilir	Jalan lingkungan RT 52 Banyak yang rusak
325	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jl. senayan (gang swadaya) rt. 71, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Rejo	semenisasi jalan
326	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	jl. d.i. panjaitan rt. 79, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Rejo	perbaikan dan pengecoran jalan dan pembuatan parit
327	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	RT. 23, JL. Serobong, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Prapatan	Jalan perlu di perbaiki (pengaspalan) karena sudah rusak
328	(DPU) Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	RT 12, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Raya	TERJADI PENYEMPITAN DAN PENIMBUNAN SAMPAH DIBAWAH JEMBATAN P 5M, L 3.5M, T 25 CM
329	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT 56, Perum Puri Mandastana, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Jalan sudah rusak
330	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	RT. 21, Jl. Serobong , Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Prapatan	Jalan Dalam Keadaan Rusak
331	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	RT.25, JL. Prapatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Prapatan	Jalan dalam kedaan berlubang dan rusak
332	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT.4 Jl. Mulawarman, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar Baru	perlu adanya perbaikan semenisasi karena jalanan sudah rusak (volume p 60 meter, l 3 meter)

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
333	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. RE Martadinata RT. 17 Gang 5, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	Kondisi siring kurang memadai
334	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. RE Martadinata RT. 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	Kondisi siring kurang memadai
335	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	RT 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Raya	RAWAN TERSUMBAT DAN BANJIR P 4M, L 2M
336	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perum Poka BAA 26-BAA 34 RT. 12 usulan 1, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sungainangka	Akses Jalan yang ada dalam kondisi Rusak
337	(DPU) Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jl markoni dalam rt 8 kel damai kec balikpapan kota, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	siring hancur dan akan mengakibatkan longsor
338	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl Sultan Hasanuddin RT 01 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ilir	Jalan lingkungan RT 01 banyak yang rusak
339	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	RT 7, Jalan Telindung Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Jalan sudah rusak
340	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT 73, Jalan Abdul Wahab Syahrani Gang Baruna, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Kondisi jalan masih tanah dan berbatu
341	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RT.27, jalan lembah mutiara blok e, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda Baru	Dinding parit rusak dan longsor
342	(DPU) Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	RT 76, Jalan Pattimura, Depan AKBID, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Air tersumbat karena rusak
343	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT. 44 , Jalan Klamono, Jembatan Lampu Merah dari Gedung Ramayana (Titik Koordinat : -1.2414558,116.8350368) , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	(PRIORITAS 1)RT. 44 Perbaikan Jembatan Lampu Merah dari Gedung Ramayana ke Jl. Klamono RT. 44 , Lokasi: Lampu Merah Rapak Plaza Jl. Klamono RT. 44 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tujuan: Penangulangan banjir Volume : Panjang 12 M Lebar 10 M Titik Koordinat : -1.2414558,116.8350368

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
344	(DPU) Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	RT.34 Jl. Julak, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Teritip	Jembatan yang ada hasil hibah material Program SPGRM, yang dikerjakan Masyarakat secara Gotong Royong, kondisi jembatan mulai Rusak (Usulan Pembangunan/Perbaikan Jembatan, P=6m x L=4,5m) RENCANA PRIORITAS 13
345	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Sultan Alauddin RT. 01 daerah karang bugis ujung, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	Terdapat kerusakan pada beberapa bagian badan jalan
346	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Marga Utama RT. 21 jalan depan Masjid Al- Islamiyah, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	Terdapat kerusakan pada beberapa bagian badan jalan
347	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. RE Martadinata RT. 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	Kondisi siring kurang memadai
348	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Kol. Syarifuddin Yoes PMIP RT.50 (Gapura turun ke bawah), Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunungbahagia	Jalan Rusak
349	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jl. Malioboro RT.37, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunungbahagia	Jalan rusak/belum di aspal
350	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jln penggalang Atas Rt. 28, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	jalan tembus antar warga blm ada semenisasi/pengecoran jalan Tembus antar warga antara gang 2 tembus jln penggalang Atas P. 150 m L. 3 m
351	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jl. Ruhui Rahayu RT.20, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunungbahagia	Jalan rusak berat
352	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jl. Wolter Monginsidi RT.22 Gang Macan berbatasan dengan RT 44 dan 14, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ulu	Jalan lingkungan belum pernah diperbaiki
353	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Sepanjang Jl. gajah mada (mulai dari D'Luv Bilyard sampai dengan Bank Danamon, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	jalan mengalami kerusakan parah

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
354	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	jl. mayjend sutoyo (dari lampu merah nuansa elektronik s/d sekolah pelita hati), Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	perbaikan trotoar dari nuansa elektronik s/d sekolah pelita hati sudah mengalami kerusakan
355	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT.29, Jalan mt.haryono, perum. depsos, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda Baru	Jalan rusak dan berlubang
356	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Asrama Bukit RT 63 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ilir	Jalan di komplekAsrama bukit RT 63 banyak yang yang pecah dan rusak di Blok A,B dan C
357	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Letjen Suprapto RT. 06, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ulu	Rawan longsor
358	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jl.siaga dalam GG Al-Hikmah lll RT 36 No 52 kel damai kec balikpapan kota, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	jalan rusak volume panjang 100 meter lebar 2,5 meter
359	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jl. sulawesi rt. 41 dan rt. 42, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Rejo	peningkatan jalan sulawesi
360	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Patriot RT 28 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ilir	Jalan tembur ke SD 016 banyak yang rusak
361	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jl swadaya rt. 36, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Rejo	peningkatan jalan (karna banyak jalan bolong yg mengakibatkan kecelakaan)
362	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	RT 62, Jalan Perum Batu Ampar Lestari II, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Kondisi jalan rusak dan sedikit berlubang
363	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jl. Letjen Suprapto RT.01 Jembatan 2 , Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ulu	Tiang suwai jembatan patah
364	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	jl. p. antasari rt. 65, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Rejo	perbaikan / peningkatan jalan di rt. 062, rt. 063, rt. 065, rt. 066

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
365	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	jl. swadaya (gang abadi) rt. 75, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Rejo	perbaikan jembatan
366	(DPU) Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jl. Letjen Suprapto RT. 52, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ulu	Tidak ada suwai dan tiang-tiang jembatan kayu mulai keropos nyaris putus di makan tiram
367	(DPU) Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jl. MT. Haryono Gg. Surya RT. 11, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Baru	Jembatan yang ada harus ditinggikan
368	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT.33 Jl. Handil Marga, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Teritip	Jalan Rusak (Usulan Semenisasi jalan P= 400 M x L= 4 M) RENCANA PRIORITAS 5
369	(DPU) Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	jl. siaga dalam no 118/ 75 rt 17 kelurahan damai kecamatan balikpapan kota, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	turap jalan volume 200 meter
370	(DPU) Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	RT 18, Jalan Pandan Sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Marga Sari	Pemasangan papin blok perbatasan RT 18 dan RT 31

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan konektivitas transportasi jalan adalah meningkatkan konektivitas koridor utama logistik dan kawasan-kawasan prioritas melalui:

1) Mendorong penyusunan rencana umum jaringan jalan, dan kriteria pemilihan program/kegiatan untuk pembangunan/ penanganan jalan nasional, dan daerah;
2) Penyusunan standar teknis dan kualitas jalan nasional dan daerah;
3) Peningkatan kapasitas SDM daerah melalui pendanaan DAK dan memperluas pelaksanaan skema pendanaan hibah jalan daerah yang difokuskan pada perbaikan tata kelola pemeliharaan jalan daerah;
4) Membangun jaringan jalan arteri utama nasional di tiap pulau terintegrasi dengan kawasan (KEK, KI, dan KSPN, daerah 3T);
5) Membangun jalan akses menuju simpul transportasi
6) Preservasi jalan sesuai dengan standar lebar dan daya dukung; dan
7) Meningkatkan kinerja kemantapan jalan daerah (jalan provinsi, kabupaten/kota).

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan infrastruktur jalan perkotaan, adalah:

1) Penyediaan infrastruktur jalan yang terintegrasi dengan aspek tata guna lahan, melalui pembangunan jaringan jalan mendukung pusat kegiatan ekonomi dan kawasan perumahan; pembangunan jalan lingkar kota untuk jalur logistik; serta peningkatan kapasitas jalan dan penataan sistem drainase jalan perkotaan;
2) Mengurangi bottleneck pada persimpangan dan perlintasan sebidang, melalui pembangunan flyover/underpass untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan mengurangi gangguan samping pada koridor jalan arteri perkotaan.

Arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPU Kota Balikpapan adalah:

1) Konektivitas Transportasi Jalan
    a. Membangun jalan akses menuju simpul transportasi;
    b. Preservasi jalan sesuai dengan standar lebar dan daya dukung;
    c. Meningkatkan kinerja kemantapan jalan daerah;

2) Pengembangan Infrastruktur Jalan Perkotaan
   a. Pembangunan jaringan jalan mendukung pusat kegiatan ekonomi dan kawasan
   b. Pembangunan Plyover/Underpas
3) Perumahan
   a. Peningkatan kapasitas jalan
   b. Penataan sistem drainase jalan Lingkungan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikansecara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan visi dan misi dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN KINERJA UTAMA	TARGET				
				2022	2024	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Infrastruktur Terpadu dan berkualitas		Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Poin	83	84	85	86	87
	S1 :Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	IS 1: Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	55,79	57,48	59,18	60,87	62,56
	S2 :Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	IS 2: Persentase penurunan luas genangan banjir	%	47,25	46,80	46,36	45,92	45,48
	S3: meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan)	(IS 3 : Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan	%	97,85	97,93	98,14	98,31	98,53

		dalam kondisi baik)						
	S4: Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	IS 4: persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	79,95	81,25	82,55	83,76	84,91
	S5: Meningkatnya keandalan bangunan gedung	IS 5: Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	Unit	45	65	85	105	125
	S6: Meningkatknya pelayanan jasa konstruksi	IS 6: persentase pelayanan Jasa konstruksi	%	29,12	30,72	33,11	35,51	37,90
	S7: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum	IS 7: Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum	Nilai	27,00	28,75	30,50	32,25	34,00

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan mempertimbangkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan program prioritas kepala daerah yang tercantum di dalam RPJMD 2021-2026.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Balikpapan

Kode					TUJUAN/SASARAN/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
					Meningkatnya Infrastruktur Terpadu dan berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Poin	Balikpapan	84	720.051.865.000			85	880.846.848.900
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
					S1 :Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	IS 1: Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	Balikpapan	57,48	106.703.443.700			59,18	203.500.000.000
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	%	Balikpapan	61,76%	106.703.443.700			64,71%	203.500.000.000
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik	%	Balikpapan	87,50%	106.703.443.700			91,67%	198.500.000.000
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun	Dok	Balikpapan	1	76.000.000.000	APBD		2	138.550.000.000

Kode					TUJUAN/SASARAN/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai yang disusun	Dok	Balikpapan	1	1.500.000.000	APBD			
1	3	2	2.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun	Titik	Balikpapan	4	4.000.000.000	APBD			
1	3	2	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun	Unit	Balikpapan	1	7.850.000.000	APBD		1	29.400.000.000
1	3	2	2.01	39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit	Balikpapan	3	9.200.000.000	APBD			
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	Balikpapan	1,5	5.000.000.000	APBD		3	10.000.000.000
1	3	2	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi (UPTD)	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang terpelihara	Unit	Balikpapan	6	3.153.443.700	APBD		6	2.250.000.000
					S2 :Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	IS 2: Persentase penurunan luas genangan banjir	%	Balikpapan	46,80	161.029.563.200			46,36	350.000.000.000
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	Balikpapan	53,09%	161.029.563.200			53,46%	350.000.000.000

Kode					TUJUAN/SASARAN/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	Balikpapan	70,56%	161.029.563.200			71,04%	350.000.000.000
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dok	Balikpapan	1	1.000.000.000	APBD		1	1.000.000.000
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	Meter	Balikpapan	2100	82.992.000.000	APBD		2200	195.000.000.000
1	3	6	2.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang ditingkatkan	Meter	Balikpapan	600	34.366.082.600	APBD		700	95.000.000.000
1	3	6	2.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhab	Meter	Balikpapan	1000	4.000.000.000	APBD		0	-
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	meter	Balikpapan	83000	16.821.480.600	APBD		93000	22.800.000.000
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran drainase Lingkungan yang dibangun	Meter	Balikpapan	1000	12.350.000.000	APBD		1000	10.000.000.000
1	3	6	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Panjang Saluran drainase Lingkungan yang dibangun yang ditingkatkan	Meter	Balikpapan	1000	9.500.000.000	APBD		1000	10.000.000.000
					S3: meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan)	**(IS 3 : Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik)**	%	Balikpapan	97,93	61.915.000.000			98,14	31.800.000.000
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	Balikpapan	97,10%	31.790.000.000			97,25%	4.300.000.000

Kode					TUJUAN/SASARAN/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)	%	Balikpapan	92,29%	31.790.000.000			92,53%	4.300.000.000
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dok	Balikpapan	2	420.000.000	APBD		2	1.000.000.000
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	Balikpapan	1	800.000.000	APBD		5	1.000.000.000
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	Balikpapan	70	2.400.000.000	APBD		140	800.000.000
1	03	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	Balikpapan	10	150.000.000	APBD		10	100.000.000
1	03	05	2.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Dokumen Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dok	Balikpapan	3	330.000.000				

Kode					TUJUAN/SASARAN/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	SR	Balikpapan	100	4.000.000.000				
1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M³/Hari	Balikpapan	40	23.000.000.000				
1	03	05	2.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Dokumen Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dok	Balikpapan	5	690.000.000	APBD		5	350.000.000
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	%	Balikpapan	98,54%	13.320.000.000			98,80%	20.000.000.000
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	%	Balikpapan	82,05%	13.320.000.000			82,27%	20.000.000.000
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dok	Balikpapan	1	700.000.000	APBD		1	400.000.000
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Dok	Balikpapan	1	520.000.000	APBD		1	600.000.000

Kode					TUJUAN/SASARAN/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	Balikpapan	400	11.800.000.000	APBD/DAK		6000	5.000.000.000
1	03	03	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	Penyelenggara SPAM	Balikpapan	9	300.000.000	APBD			
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	%	Balikpapan	97,82%	16.805.000.000	APBD		98,00%	7.500.000.000
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Sarana Persampahan	%		48,88%	16.805.000.000			56,40%	7.500.000.000
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kotali	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	Dok	Balikpapan	1	335.000.000	APBD			

Kode					TUJUAN/SASARAN/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
1	03	04	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dok	Balikpapan	1	790.000.000	APBD		1	200.000.000
1	03	04	2.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah	Balikpapan	20	15.680.000.000	APBD		20	100.000.000
					S4: Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	**IS 4: persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik**	%	Balikpapan	81,25%	266.850.000.000			82,55%	204.983.000.000
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	%	Balikpapan	87,36%	185.850.000.000			89,12%	174.183.000.000
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	persentase jalan dalam kondisi baik	%	Balikpapan	72,19%	161.750.000.000			73,95%	144.310.000.000
1	3	10	2.01			Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	%	Balikpapan	85,00%	24.100.000.000			89,00%	29.873.000.000
1	3	10	2,01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dok	Balikpapan	4	1.700.000.000	APBD		4	1.573.000.000
1	3	10	2,01	4	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dok	Balikpapan	2	650.000.000	APBD		2	650.000.000
1	3	10	2,01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	Balikpapan	6,550	16.800.000.000	BANKEU		2650	50.000.000.000

Kode					TUJUAN/SASARAN/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
1	3	10	2,01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	KM	Balikpapan	1,200	27.700.000.000	APBD		4500	38.200.000.000
1	3	10	2,01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	Balikpapan	3	56.900.000.000	DAK		3100	22.080.000.000
1	3	10	2,01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	Balikpapan	2,65	15.000.000.000	APBD		4500	15.100.000.000
1	3	10	2,01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	Balikpapan	2,25	31.000.000.000	APBD			
1	3	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPT)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	Balikpapan	5900	6.500.000.000	APBD		4700	5.500.000.000
1	3	10	2,01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	Balikpapan	3	5.100.000.000	APBD		1	19.000.000.000
1	3	10	2,01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	M	Balikpapan	4	18.000.000.000	APBD			
1	3	10	2,01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPT)	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	Balikpapan	40	1.000.000.000	APBD		40	500.000.000
1	3	10	2,01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dok	Balikpapan	10	5.500.000.000	APBD		10	5.280.000.000
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	%	Balikpapan	76,36%	81.000.000.000			78,18%	30.800.000.000
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	Balikpapan	57,42%	81.000.000.000			60,30%	30.800.000.000

Kode					TUJUAN/SASARAN/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	Balikpapan	15000	75.000.000.000	APBD		15250	27.500.000.000
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	Balikpapan	1125	6.000.000.000	APBD		1250	1.700.000.000
					S5: Meningkatnya keandalan bangunan gedung	**IS 5: Jumlah Bangunan yang memiliki SLF**	Unit	Balikpapan	65	89.504.149.200			85	66.000.000.000
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase bangunan yang memiliki ijin	%	Balikpapan	93,39	89.504.149.200			93,90	66.000.000.000
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	persentase bangunan layak teknis	%	Balikpapan	96,11%	89.504.149.200			96,66%	66.000.000.000
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dok	Balikpapan	1000	1.000.000.000	APBD		1000	500.000.000

Kode					TUJUAN/SASARAN/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dok	Balikpapan	3	77.350.000.000	APBD		2	38.000.000.000
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	unit	Balikpapan	5	6.154.149.200	APBD		3	18.150.000.000
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	unit	Balikpapan	40	5.000.000.000	APBD		45	9.350.000.000
					S6: Meningkatknya pelayanan jasa konstruksi	IS 6: persentase pelayanan Jasa konstruksi	%	Balikpapan	30,72	4.000.000.000			33,11	1.950.000.000
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	Balikpapan	100%	4.000.000.000			100%	1.950.000.000
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Presentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Balikpapan	7,62%	3.700.000.000			10,81%	1.750.000.000
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	orang	Balikpapan	300	3.000.000.000	APBD		500	1.500.000.000

Kode					TUJUAN/SASARAN/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	Balikpapan	100	700.000.000	APBD		100	250.000.000
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia	%	Balikpapan	40%	300.000.000			60%	200.000.000
1	03	11	2.02	02	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dok	Balikpapan	2	300.000.000	APBD		2	200.000.000
					NON URUSAN					-				
					S7: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum	AA;-0p0p-a	Nilai	DPU	28,75	30.049.708.900			30,50	22.813.848.900
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	DPU	82	30.049.708.900			84	22.613.848.900
X	XX	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPU	Nilai	DPU	83,08	-			83,18	
X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai	DPU	85,8	10.522.998.900			85,85	10.522.998.900
X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Dok	DPU	26	10.522.998.900	APBD		26	10.522.998.900
X	XX	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Poin	DPU	113	300.000.000			113	

Kode					TUJUAN/SASARAN/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
X	XX	1	2.02	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok	DPU	26	300.000.000	APBD		26	10.522.998.900
X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	DPU	83,55	400.000.000			83,6	
X	XX	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	orang	DPU	70	100.000.000	APBD		70	50.000.000
X	XX	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	orang	DPU	70	300.000.000	APBD		70	150.000.000
X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	DPU	85,55	2.205.050.000			85,6	1.969.190.000
X	XX	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	DPU	9	25.000.000	APBD		9	25.000.000
X	XX	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	jenis	DPU	5	950.000.000	APBD		5	500.000.000
X	XX	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	jenis	DPU	59	435.000.000	APBD		59	435.000.000
X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	jenis	DPU	7	130.050.000	APBD		7	130.050.000
X	XX	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	porsi	DPU	300	15.000.000	APBD		300	15.000.000
X	XX	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekunsi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	kali	DPU	100	450.000.000	APBD		100	364.140.000

Kode					TUJUAN/SASARAN/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
X	XX	1	2.06	9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip	Jenis	DPU	2	200.000.000	APBD		100	-
X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	DPU	82,05	12.420.500.000			82,1	6.200.000.000
X	XX	1	2.07	3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	unit	DPU	4	1.200.000.000	APBD		1	4.000.000.000
X	XX	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar	unit	DPU	1	5.500.000.000	APBD		1	4.000.000.000
X	XX	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	DPU	25	5.720.500.000	APBD		25	500.000.000
X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	DPU	85,5	2.396.160.000			85,55	2.116.660.000
X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	DPU	48	416.160.000	APBD		48	416.160.000
X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	m2	DPU	2004,8	1.980.000.000	APBD		2004,8	170.050.000
						Jumlah tenaga Non PNS	orang	DPU	42		APBD		42	
						Jumlah Tenaga Profesional	orang	DPU	3		APBD		3	
X	XX	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	DPU	81,1	1.805.000.000			81,15	1.805.000.000
X	XX	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit	DPU	6	250.000.000	APBD		6	250.000.000

Kode					TUJUAN/SASARAN/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
X	XX	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	Unit	DPU	58	450.000.000	APBD		58	450.000.000
X	XX	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah	Unit	DPU	6	450.000.000	APBD		6	450.000.000
X	XX	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan yang dipelihara	Jenis	DPU	8	310.000.000	APBD		8	310.000.000
X	XX	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	Unit	DPU	1	200.000.000	APBD		1	200.000.000
X	XX	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	DPU	2	145.000.000	APBD		2	145.000.000

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan 2021–2026. Program dan kegiatan untuk mecapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024 tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian salah satu kendala penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan. Hal ini terlihat dari usulan kegiatan yang begitu banyak tetapi yang dialokasikan setiap tahunnya hanya sedikit yang terakomodir. Apabila terjadi keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 maka Program dan kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah Program-Program dan Kegiatan-Kegiatan yang dapat mengatasi banjir di Kota Balikpapan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terbitnya permendagri No. 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2024 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini di karenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2024, masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri No. 54 tahun 2010 sedangkan pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda;
3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2024 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur padahal selama ini anggaran yang disediakan untuk itu sangatlah terbatas;
2. Menerapkan system *reward and punishment* terhadap seluruh staf dan mengaplikasikan pada pendistribusian pekerjaan secara merata;
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan TAPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat;
5. Taat azas dalam melaksanakan semua kegiatan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

D. RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah disusun dalam beberapa tahapan, yaitu

a. Persiapan penyusunan;

   Pada tahapan ini perangkat daerah membentuk tim Renja Perangkat Daerah dan melakukan penyiapan data dan informasi perencanaan perangkat daerah.

b. Penyusunan Rancangan Awal;

   Penyusunan Rancangan Awal renja dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Desember. Rancangan Awal renja disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

c. Penyusunan rancangan

   Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

   Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima.

e. Perumusan rancangan akhir

   Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam

program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

f. Penetapan.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi yang dilakukan BAPPEDA harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

Dalam hal hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA tersebut, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah tersebut kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Berikut adalah gambar tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

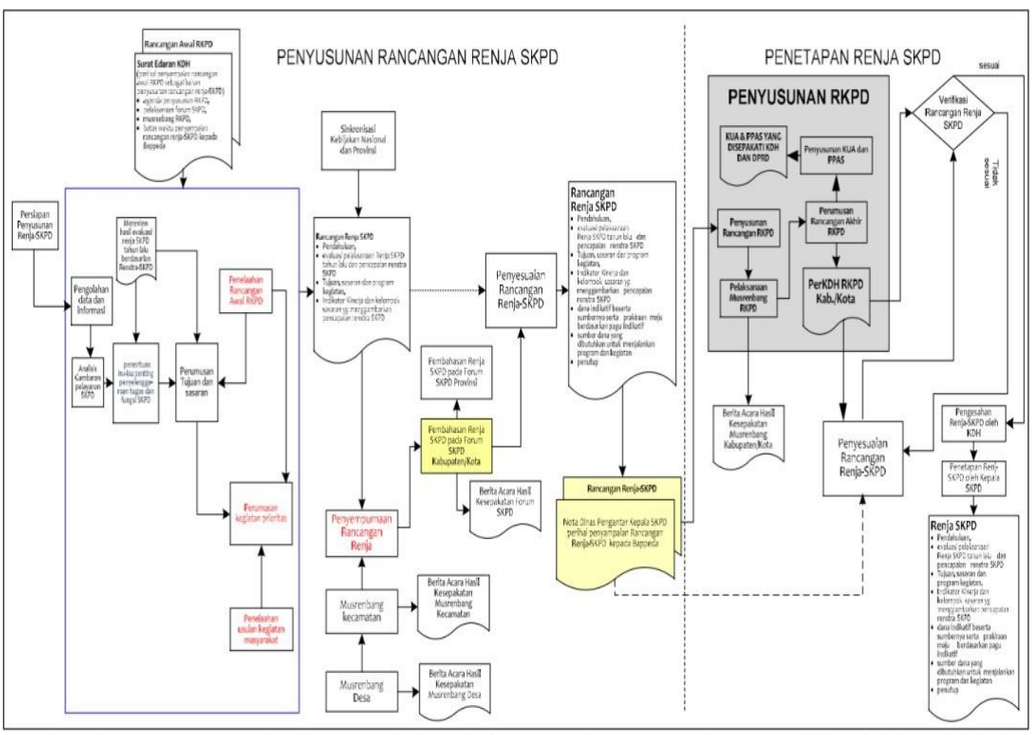

Untuk dapat mewujudkan visi misi Kepala Daerah terpilih 2021-2026 , Disperkim Kota Balikpapan menyusun Rankhir Renja Tahun 2024. Renja

Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari pembuatan Rankhir Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah di muktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaimana telah dimuktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud danTujuan

Rankhir Renja Disperkim Kota Ballikpapan Tahun 2024, disusun dengan maksud untuk mewujudkan dokumen perencanaan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Tujuan penyusunan Rankhir Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah:

1) Pedoman kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan selama 1 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2024;
2) Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi kinerja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024; dan
3) Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ini memberikan penjelasan mengenai target kinerja selama tahun 2024. Sistematika penyajian Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, Menjelaskan secara ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran kinerja Renja OPD, Program dan Kegiatan OPD, dan Menjelaskan secara ringkas program dan kegiatan OPD.

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Menjelaskan secara ringkas tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

BAB V. INOVASI PERANGKAT DAERAH, Menjelaskan secara ringkas Inovasi Perangkat Daerah

BAB VI. PENUTUP, berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seumpama ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.

BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Balikpapan. Adapun Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2022 dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan disebabkan beberapa hal. Berdasarkan hasil monitoring, pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Renja Tahun 2022, selanjutnya dilakukan evaluasi Renja 2022 dengan uraian sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
    1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
    2. Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP;
    3. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator;
    4. Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana;
    5. Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus;
    6. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
    7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
    8. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
2. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
3. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
4. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
5. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota;
6. Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota;
7. Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan;
8. Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana;
9. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota;
10. Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus;
11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
12. Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;
13. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
14. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh;
15. Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh;
16. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh;
17. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
18. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
19. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
20. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
21. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
22. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
23. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
24. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

25. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
26. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
27. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
28. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
29. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
30. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
   1. Program Kawasan Permukiman;
   2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
   3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
   4. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   5. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   6. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   11. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun;
   12. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh;
   13. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
   14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

1. Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Realisasi kegiatan sampai dengan tahun ini adalah jumlah perumahan sesuai rekomendasi rencana tapak yang diberikan adalah 10 perumahan yaitu *baseline* 2021 terdapat 7 perumahan sesuai rencana tapak dan 3 perumahan sesuai rencana tapak yang diterbitkan. Ketidaktercapaian target dikarenakan dilakukannya pengetatan kriteria dalam rekomendasi rencana tapak dalam usaha mendukung pengendalian banjir Kota Balikpapan
Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Sub kegiatan ini memiliki target sosialisasi kepada 50 pengembang perumahan yang ada di Kota Balikpapan. Penentuan luasan minimum kaveling perumahan dalam Rencana detail tata ruang dan Peraturan Zonasi Kota Balikpapan Tahun 2021 -2041 untuk zona perumahan dengan kepadatan sedang (R-3) adalah sebesar120 m^2 , sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Permukiman luasan minimum kaveling untuk perumahan adalah sebesar 60 m^2. Luasan kaveling minimum sebesar 120 m^2 menimbulkan kendala dan hambatan untuk pengembang perumahan dalam penyediaan perumahan untuk MBR. Kendala yang timbul tersebut memunculkan kebijakan penyesuaian target kinerja sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP menjadi 0 pada saat ditetapkannya Renja Perubahan Disperkim Tahun 2022.
Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Indikator kinerja sub kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator adalah jumlah orang Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang dilatih dengan target sebanyak 50 orang. Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja 0%, hal ini dikarenakan pembentukan dan pelatihan tim tidak dapat dilaksanakan sampai dengaan akhir bulan Desember 2022. Pendataan SPM Perumahan Rakyat pada kegiatan sebelumnya yaitu kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota baru selesai pada akhir Desember 2022 sehingga pengusulan dan penerbitan SK Bencana yang menjadi dasar pembentukan Tim Satgas, pendamping dan fasilitator belum dapat dilaksanakan pada tahun 2022
Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Tidak adanya penyediaan bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah korban bencana serta bantuan relokasi membuat realisasi kinerja jumlah frekuensi rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana menjadi 0.
Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kamar rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terhuni dengan target kamar terhuni sebanyak 507 kamar. Realisasi dari target ini adalah terisinya 437 hunian teradap keseluruhan hunian rusunawa yang tersedia. Evaluasi yang dilakukan terkait tidak tercapainya target tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang rusunawa dan oleh sebab itu ditahun mendatang, penyebarluasan informasi tentang rusunawa akan ditingkatkan di 6 (enam) kecamatan di Kota Balikpapan
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Indikator sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian adalah jumlah penyediaan PSU melalui penerbitan rekomendasi siteplan perumahan. Target kinerja tahun 2022 adalah 10 penyediaan PSU dan terealisasi 30%. 3 (tiga) rekomendasi rencana tapak perumahan di keluarkan pada tahun 2022 Ketidaktercapaian target kinerja ini adalah dari 12 pemohon rencana tapak hanya 3 perumahan yang terverifikasi sesuai dengan syarat dan kriteria terkait
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah pembayaran rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Target kinerja sebanyak 27 pembayaran. Terjadi kesalahan penginputan target kinerja ke aplikasi SIPD. Target kinerja seharusnya 12 pembayaran. Realisasi kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah 44,44 % yakni berupa pembayaran rekening listrik, air dan telepon yang digunakan untuk keperluan operasional Disperkim Kota Balikpapan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 12 kali pembayaran rekening.
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara dengan target kinerja 7 unit kendaraan dan terealisasi sebanyak 5 unit kendaraan yang dipelihara dengan tingkat capaian 85,71 % berupa pemeliharaan rutin/berkala peralatan mesin seperti AC, Komputer, Laptop. Ketidaktercapaian karena kinerja dikarenakan efisiensi peralatan mesin.

2. Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan.

Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU	Program ini memiliki indikator persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan dengan target kinerja 1,39 % yang didapat dari 4 perumahan terhadap 288 pengembang perumahan.
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan memiliki indikator kinerja jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara dengan target 3 Ha dan terealisasi 100%.
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;	Kegiatan ini memiliki indikator kinerja persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan target 16,67 % yang didapat dari perbandingan antara jumlah pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman sebanyak 1 kawasan (kecamatan) terhadap perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman sebanyak 6 kawasan (kecamatan).
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.	Kegiatan ini memiliki indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani dengan target tahun 2022 sebesar 26,11 % yang didapat dari jumlah Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 ha yang ditangani tahun 2022 seluas 1,41 Ha terhadap 5,4 Ha kawasan kumuh di bawah 10 ha di Kelurahan Damai
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.	Indikator kegiatan ini adalah jumlah kawasan yang dillakukan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dengan target kinerja 1 kawasan dan terealisasi 100%.
Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota;	Indikator kinerja sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota adalah jumlah lokasi yang dilakukan pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota dengan target yang semula sebesar 2 lokasi menjadi 6 lokasi pada saat Renja Perubahan Tahun 2022. Perubahan lokasi terjadi karena pada saat penyusunan Renja Tahun 2022 hanya menyasar 2 (dua) kelurahan yaitu Gunung Sari Ulu dan Baru Ulu namun terjadi perubahan menjadi 6 lokasi yang terdiri dari 6 Kecamatan di Kota Balikpapan. Realisasi dari indikator Sub Kegiatan ini adalah 100% atau anggaran yang dikeluarkan mencukupi untuk mendata rumah korban bencana dan relokasi program Pemerintah Kota di semua kecamatan di Kota Balikpapan.
Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan;	Indikator sub kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan adalah jumlah dokumen lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen dan memiliki capaian 1 dokumen.
Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana;	Indikator sub kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana adalah jumlah dokumen pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota dengan target sebanyak 1 dokumen pendataan dan terealisasi 100 %.
Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus;	Indikator sub kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus adalah jumlah dokumen pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus dengan target sebanyak 1 dokumen RP3KP Tahun 2022 -2042 dan terealisasi 100 %.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;	Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah lokasi perumahan yang dilakukan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dengan target 86 lokasi perumahan dan terealisasi 86 lokasi perumahan. Data pengawasan tersebut juga dituangkan dalam master data perumahan berbasis *Geographic Information System* (GIS). Capaian indikator ini adalah 100%.
Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;	Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan penyediaan psu perumahan yang disusun sebanyak 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 100% dengan menghasilkan dokumen revisi Perda 5 Tahun 2013 , dokumen pendataan PSU Perumahan se Kota Balikpapan dan dokumen perencanaan penyediaan taman.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;	Indikator sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah jumlah rapat koordinasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Target kinerja tahun 2022 adalah 12 kali rapat koordinasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan terealisasi 100%.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.	Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh dengan target 10 kali rapat dan terealisasi 10 kali dengan capaian 100%.
Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh;	Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yang dibentuk dan dibina dengan target 6 KSM di/KPP di masing -masing kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Realisasi kegiatan ini adalah 100%.

Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh.	Indikator jumlah luasan pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh memiliki target kinerja 1,41 Ha dan terealisasi 100%. Penanganan dilakukan di RT. 04 Kelurahan Damai.
Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Indikator sub kegiatan Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh adalah jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh dengan target 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 100% dengan tersedianya dokumen pendataan RTLH 2022, pemuktahiran data RTLH 2021 dan verifikasi kawasan kumuh.
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencaaan Disperkim (Renstra dan Renja, Renja Perubahan) yang disusun dengan target 2 dokumen yaitu dokumen Renja Tahun 2023 Renja Perubahan 2022.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen SAKIP (LKJIP) yang disusun dengan target 1 dokumen yaitu dokumen LKJIP Tahun 2021 dan terealisasi 100%.
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen SAKIP (LKJIP) yang disusun dengan target 1 dokumen yaitu dokumen LKJIP Tahun 2021 dan terealisasi 100%.
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Target kinerja sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah 26 Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN dan terealisasi 100%.
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Indikator kinerja kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada TA.2022 adalah jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja 8 jenis dan terealisasi 8 jenis dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% berupa pembelian komponen instalasi listrik/alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) yang digunakan untuk penerangan bangunan kantor Disperkim Kota Balikpapan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;	Target kinerja sub kegiatan penyediaan logistik kantor yaitu Jumlah jenis bahan Logistik kantor dengan target sebanyak 56 jenis alat tulis kantor dan jenis logistik berupa makanan dan minuman yang di tujukan untuk konsumsi rapat, konsumsi harian pegawai dan konsumsi untuk kunjungan tamu Disperkim. Realisasi indikator sub kegiatan ini adalah 56 atau dapat dikatakan memiliki capaian Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;	Target kinerja sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah 15 jenis barang cetakan dan penggandaan dan terealisasi hingga 31 Desember 2022 adalah sebanyak 15 jenis yang merupakan jumlah keseluruhan barang cetakan dan penggandaan yang digunakan untuk keperluan administrasi kantor Disperkim.
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	Target kinerja sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah 12 jenis peralatan gedung kantor dan terealisasi sebanyak 12 jenis peralatan gedung kantor yang terdiri yang terdiri dari komputer pc spesifikasi administrasi, komputer pc spesifikasi teknis, laptop spesifikasi teknis, video conference system, kamera, printer, scanner, papan tulis, lemari arsip, brankas, televisi dan sound system dengan tingkat capaian kinerja 100%.
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;	Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah jumlah jenis surat menyurat dengan target 2 jenis yang merupakan pengiriman paket dokumen atau barang dan juga pembelian benda pos materai. Adapun realisasi kinerja hingga tanggal 31 Desember 2022 adalah 2 jenis dengan tingkat capaian 100 %.
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;	Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu jumlah Luasan Gedung Kantor yang dipelihara dengan target 1100 m2. Indikator ini terealisasi 100%. Sub kegiatan bertujuan untuk menyediakan bahan peralatan kebersihan, jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor dan jasa tenaga bantu administrasi non ASN.
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;	Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan yang dipelihara dengan target 33 unit kendaraan baik R2 maupun R4 yang dipegang oleh perorangan maupun jabatan. Realisasi target kinerja hingga akhir Desember 2022 adalah 33 unit kendaraan atau terealisasi 100%.
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara target 2 unit. Realisasi target kinerja hingga akhir Desember 2022 adalah 2 unit kendaraan.

Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan target 1 pemeliharaan dan terealisasi 1 pemeliharaan gedung kantor yaitu pengecetan gedung kantor Disperkim.

Terpenuhinya target kinerja program/ Kegiatan adalah karena kemampuan PPTK dalam memahami perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta didukung oleh anggaran yang mencukupi.

3. Faktor kinerja program/ kegiatan yang melebihi target.

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor kinerja program/ kegiatan melebihi target
Program Kawasan Permukiman;	Program ini memiliki sasaran untuk mengurangi kawasan kumuh menjadi 0 Ha pada tahun 2026 dengan berbagi kewenangan pengurangan dengan Kementrian (Pusat) untuk pengurangan diatas 15 ha dan Provinsi Kalimantan Timur untuk pengurangan 10 -15 Ha. Berdasarkan pemetaan pada saat penyusunan Renstra Disperkim 2021-2026, kewenangan Disperkim Kota Balikpapan adalah pengurangan kawasan kumuh Kelurahan Damai seluas 5,4 Ha. Target yang ditetapkan pada tahun 2022, luasan kumuh kota Balikpapan menjadi 103,39 Ha, dan memiliki capaian kinerja 102,91%. Kinerja melebihi target karena terdapat pengurangan kumuh diatas 15 Ha yang merupakan kewenangan Pusat di realisasi sebesar 51,01 Ha dari target 48,5 Ha. Hal ini didorong oleh baiknya koordinasi antara pemegang kewenangan pengurangan kumuh yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kota Balikpapan
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh memiliki indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Target kinerja pada Renja Disperkim Tahun 2022 adalah 0,01% dari formulasi 26 peningkatan kualitas RTLH terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan sejumlah 202.539 unit (*baseline* Renstra Disperkim Tahun 2021-2026). Realisasi Program ini melampau target dengan capaian 269,23 %. Kinerja melebihi target ini dikarenakan terdapat kesalahan dalam penginputan target program yang seharusnya 0,03% (66 peningkatan RTLH dibandingkan 202.539 unit rumah). Kinerja yang melampaui target juga dikarena adanya tambahan 4 peningkatan kualitas RTLH dari pendanaan CSR. Sehingga rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap hunian yang layak pada tahun 2022 adalah 0,03%. Keberhasilan ini juga didukung dari aksi perubahan dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2022. Aksi perubahan yang dilakukan adalah Strategi Peningkatan Rumah Layak Huni Kota Balikpapan (Griyaku).
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;	Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 adalah IKM Internal Perangkat Daerah dengan target kinerja 70 dan terealisasi sebesar 77,29. Realisasi skor 77, 29 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal sekretariat Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Faktor pendorong baiknya nilai IKM Internal Layanan Disperkim ini adalah karena komitmen Pimpinan dan koordinasi yang baik antar staf sekretariat Disperkim dalam perbaikan pelayanan Internal Disperkim.
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	Target kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Nilai hasil evaluasi SAKIP disperkim yang dikeluarkan oleh Inspektorat yaitu sebesar 73 dan terealisasi 74,57 dengan tingkat capaian kinerja 102,15%. Faktor pendorong kinerja melebihi target adalah karena koordinasi yang baik diantara pejabat dan staf Disperkim terkait penyusunan dokumen SAKIP Disperkim sehingga dokumen SAKIP Disperkim dinilai memadai oleh Inspektorat.
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	Target kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target skor 70 dan sesuai hasil IKM yang dilakukan didapat skor sebesar 78, 54 dengan tingkat capaian 112,20 %. Faktor pendorong kinerja melebihi target adalah koordinasi yang baik antara staf sekretariat (PA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Operator Gaji, Admin Ekin) Disperkim dalam perbaikan pelayanan keuangan Disperkim.

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor kinerja program/ kegiatan melebihi target
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;	Target kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target skor 70 dan sesuai hasil IKM yang dilakukan didapat skor sebesar 78, 54 dengan tingkat capaian 112,20 %. Realisasi skor 78, 54 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal administrasi umum Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Faktor pendorong baiknya nilai IKM Internal Layanan umum Disperkim ini adalah karena koordinasi yang baik antar staf umum dan kepegawaian Disperkim dalam perbaikan pelayanan umum Disperkim.
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;	Indikator kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan target kinerja skor IKM sebesar 70 dan terealisasi melebihi target dengan skor sebesar 88,57 atau dapat dikatakan memiliki capaian kinerja sebesar 125,81 %. Realisasi skor 88, 57 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal pengadaan barang milik daerah Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik.
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	Indikator kinerja kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja skor IKM sebesar 70 dan terealisasi 77, 12 dengan tingkat capaian 110,17 %. Realisasi skor 77,12 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal penyediaan jasa penunjang Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik.
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Indikator kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan target kinerja skor IKM sebesar 70 dan terealisasi melebihi target dengan skor sebesar 73,54 atau dapat dikatakan memiliki capaian kinerja sebesar 105,06 %. Realisasi skor 73,54 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal pemeliharaan barang milik daerah Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik.
Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun;	Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun adalah jumlah rumah susun yang dikelola dengan target 4 (empat) unit rusunawa yang fisiknya dilakukan peningkatan dan pemeliharaan terealisasi pemeliharaan dan peningkatan sebanyak 6 (lima) unit rusunawa yang terdiri atas rusunawa Sepinggan I, Sepinggan II, Perusda, Somber, Siaga dan Km 7. Capaian indikator output sub kegiatan ini adalah 150%. faktor pendorong kinerja melampaui target adalah proritas TAPD untuk memberikan anggaran yang dapat digunakan untuk perbaikan prasarana sarana Rusunawa dengan harapan meningkatnya kepuasan penghuni rusunawa.
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.	Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah dokumen peremajaan/pemugaran permukiman kumuh dengan target 3 (tiga) DED dan terealisasi 133,33 % dengan disusunnya 4 (empat) DED penataan kawasan kumuh Damai, Baru ilir, Karang Jati, Klandasan ilir
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;	Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan target 66 unit rumah dan terealiasi peningkatan kualitas RTLH sebanyak 70 unit rumah , dimana 66 peningkatan RTLH bersumber dari dana APBD dan 4 rumah bersumber dari *Corporate Social Responsibillities* (CSR). Capaian kegiatan ini adalah 106,66%. keberhasilan ini didukung dari aksi perubahan dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2022. Aksi perubahan yang dilakukan adalah Strategi Peningkatan Rumah Layak Huni Kota Balikpapan (Griyaku).
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;	Target kinerja sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adalah 35 kali berupa perjalanan dinas ke luar maupun dalam daerah dengan realisasi sebesar 87 kali dengan tingkat capaian 248,57%. Tingkat capaian yang melebihi 100% disebabkan karena perjalananan dinas lebih didominasi perjalanan ke dalam provinsi Kalimantan Timur sehingga biaya perjalanan dinas lebih hemat dan tidak membutuhkan waktu lama.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2022 berdampak positif bagi kelancaran pencapaian tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman pada khususnya dan tersedianya pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman berdampak pada perlunya usaha yang lebih optimal dari seluruh sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Permukiman di tahun mendatang agar dapat mengejar ketertinggalan dalam pencapaian target Renstra.

   Ketidak tercapaian target kinerja tersebut juga dipengaruhi ketidak tepatan dalam penentuan target renstra/ renja sehingga menyebabkan rendahnya atau bahkan melebihi target kinerja.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
   1. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi berkala di tahun berjalan agar dapat menyesuaikan pendekatan terbaik dalam pencapaian tujuan program / kegiatan .
   2. Peningkatan pemahaman perencanaan perangkat daerah ke dalam organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman agar dapat mengoptimalkan strategi /pendekatan pencapain target kinerja. Peningkatan pemahanan perencanaan pada sumber daya yang ada di di Dinas Perumahan dan Permukiman juga di perlukan pada saat penentuan target kinerja. Ketidakpahaman terhadap perencanaan perangkat daerah, membuat penentuan target terlalu pesimis atau telalu optimis. Hal ini akan berdampak pada nilai evaluasi perencanaan perangkat daerah.
   3. Penguatan data dasar (baseline kinerja) pada perencanaan perangkat daerah dimasa mendatang. Optimalisasi anggaran hanya untuk pencapaian target kinerja dan bukan untuk hal aksesoris program/ kegiatan.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90,00	-	70,00	77,29	110,41	75,00	67,93	75,47
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP disperkim yang dikeluarkan oleh Inspektorat	80,00	-	73,00	74,57	102,15	0,00	74,57	93,21
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencaaan Disperkim (Renstra dan Renja, Renja Perubahan) yang disusun	7,00	-	2,00	2,00	100,00	0,00	2,00	28,57
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP (LKJIP) yang disusun	5,00	-	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	20,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja (evaluasi Renstra dan evaluasi Renja)	10,00	-	2,00	2,00	100,00	0,00	2,00	20,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	90,00	-	70,00	77,08	110,11	75,00	152,08	168,98
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	130,00	-	26,00	26,00	100,00	26,00	52,00	40,00
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5,00	-	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	20,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90,00	-	70,00	73,93	0,00	0,00	73,93	82,14
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Bimbingan Teknis implementasi/peraturan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90,00	-	70,00	78,54	112,20	75,00	153,54	170,60
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,00	-	8,00	8,00	100,00	1,00	9,00	22,50
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan Logistik kantor	280,00	-	56,00	56,00	100,00	4,00	60,00	21,43
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	75,00	-	15,00	15,00	100,00	2,00	17,00	22,67
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makanan dan minuman fasilitasi	750,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekunsi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	195,00	-	35,00	87,00	248,57	40,00	127,00	65,13
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00	-	70,00	88,07	125,81	75,00	163,07	181,19
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel	12,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	25,00	-	12,00	12,00	100,00	5,00	17,00	68,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,00		70,00	77,12	110,17	75,00	152,12	169,02
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	10,00	-	2,00	2,00	100,00	4,00	6,00	60,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60,00	-	27,00	12,00	44,44	4,00	16,00	26,67
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara	1100,00	-	1100,00	1100,00	100,00	12,00	1112,00	101,09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00		70,00	73,54	105,06	75,00	148,54	165,04
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan yang dipelihara	165,00	-	33,00	33,00	100,00	33,00	66,00	40,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	10,00	-	2,00	2,00	100,00	2,00	4,00	40,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	35,00	-	7,00	6,00	85,71	111,00	117,00	334,29
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	5,00	-	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	40,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	60,68		0,00	0,00	0,00	0,59	0	0,00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan	100,00		11,82	11,82	100,00	0,59	12,41	12,41
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang dilakukan Pendataan Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	6,00	-	6,00	6,00	100,00	0,00	6,00	100,00
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5,00	-	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	20,00
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	5,00	-	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	20,00
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam	5,00	-	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	20,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
		atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	7,00	-	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	28,57
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	2,84		0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	20,77
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah masyarakat/ sukarelawan yang teredukasi tentang standar teknis rumah korban bencana	800,00	-	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	12,50
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah orang yang teredukasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Pengembang Perumahan yang memahami mekanisme	250,00	-	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	20,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
		akses perumahan KPR-FLPP								
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah orang Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang dilatih	450,00	-	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah frekuensi Rembug warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	30,00	-	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2,84	-	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	20,77
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang direhabilitasi	32,00	-	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	15,63
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagiRumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang disusun	12,00	-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,33

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	40,00		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	25,00
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola	81,38		66,02	59,05	89,45	70,83	129,88	159,60
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rumah susun yang dikelola	9,00	-	4,00	6,00	150,00	1,00	7,00	77,78
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Kamar Rusunawa yang terhuni	625,00	-	507,00	437,00	86,19	1,00	438,00	70,08
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	25,00		7,46	4,39	58,82	11,84	16,23	64,90
	Fasiltasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen rekomendasi siteplan	38,00	-	0,00	3,00	0,00	1,00	4,00	10,53
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang dilakukan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	86,00	-	86,00	86,00	100,00	1,00	87,00	101,16

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1,00	-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah rekomendasi teknis sarusun yang diterbitkan	40,00		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	25,00
	Koordinasi dan Sinkronisas iPenerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh	0,00		103,90	100,88	102,91	74,40	81,41	102,91
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	100,00		16,67	16,67	100,00	16,67	33,34	33,34
	Penyusunan dan/atau Review sertaLegalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	6,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	75,00	-	10,00	10,00	100,00	0,00	10,00	13,33
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	153,00		49,91	52,42	105,03	78,90	131,32	85,83
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survey Lokasi Perumahan dan permukiman Kumuh yang disusun	4,00	-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disusun	5,00	-	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	40,00
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah KSM/KPP yang dibentuk dan dibina	30,00	-	6,00	6,00	100,00	6,00	12,00	40,00
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Diseminasi Informasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	36,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	120,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah /Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP yang disusun	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	100,00		26,11	26,11	100,00	100,00	100,00	100,00
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen peremajaan/pemugaran permukiman kumuh	24,00	-	3,00	4,00	133,33	1,00	5,00	20,83
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah perbaikan RTLH	288,00	-	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	34,72
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	Jumlah kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Penyelenggaraan	51,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
		Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh								
	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah masyarakat yang diberikan Bantuan uang sewa rumah tinggal	200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Luasan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan permukiman kumuh	5,40	-	1,41	1,41	100,00	3,99	5,40	100,00
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	10,00	-	3,00	3,00	100,00	1,00	4,00	40,00
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	0,12		0,01	0,03	269,23	0,00	0,00	0,00
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Yang dillakukan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	6,00		1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	16,67

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	252,00	-	66,00	70,00	106,06	0,00	70,00	27,78
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kerjasama	3,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah masyarakat penerima bantuan	115,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	1,04		1,39	1,39	99,92		0,00	0,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	7,00		3,00	3,00	100,00	1,00	4,00	57,14

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan yang disusun	7,00	-	3,00	3,00	100,00	1,00	4,00	57,14
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah penyediaan PSU melalui penerbitan rekomendasi siteplan perumahan	26,00	-	10,00	3,00	30,00	3,00	6,00	23,08
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Rapat Koordinasi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	60,00	-	12,00	12,00	100,00	1,00	13,00	21,67

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman harus didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM yang harus diacu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum. SPM Perumahan Rakyat yang diampu oleh Disperkim Kota Balikpapan ,sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Jenis Pelayanan Dasar ,terdiri atas:
   a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
   b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Mutu Pelayanan Dasar, terdiri atas:
   a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana /kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
   b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
   c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
   d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
   e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
   f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud padahuruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

3. Penerima Pelayanan terdiri atas:
   a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
   b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja urusan pemerintahan terdiri atas Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK *Output*) dan Indikator Kinerja Hasil (IKK *Outcome*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjabarkan bahwa Urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 20 IKK *Output* dan 5 IKK *Outcome*.

Berikut dilampirkan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diampu Disperkim Kota Balikpapan pada Tahun 2022:

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	√		0	18	36	54	72	0	15	Tahun 2022 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023. Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan.
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	√		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	0,00%	Berdasarkan hasil pendataan SPM tahun 2022 tidak terdapat warga negara yang harus direlokasi akibat program Pemerintah Daerah
3	Persentase Permukiman Layak Huni		√	99,05	99,32	99,55	99,78	100,00	99,07	99,34	Persentase permukiman layak huni sampai dengan akhir tahun 2022 telah mencapai 99,07 % dari target kinerja 99,05% dengan tingkat capaian kinerja 100,02 %. Disperkim Kota Balikpapan memiliki kewenanfan mengurangi kawasan kumuh seluas 5,4 Ha. Luasan tersebut ditangani sebesar 1,41 Ha pada tahun 2022. Disperkim Kota Balikpapan juga berhasil mengupayakan dan mengkoordinasikan penanganan kawasan kumuh dengan KOTAKU dengan pendanaan diluar APBD Kota Balikpapan seluas 51,01 Ha.
4	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni		√	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,00	0,01	Tahun 2022 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023. Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah.

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU		√	16,75	16,80	16,85	16,90	16,95	21,97	21,97	Realisasi indikator sasaran ini adalah sebesar 21,97% . Pencapaian ini didukung oleh peningkatan iklim investasi di kota Balikpapan sebagai pendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang berpengaruh terhadap bertumbuhnya sektor perumahan dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap rumah yang terfasilitasi PSU
6	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh		√	32,56	51,47	67,78	84,08	100,00	34,19	53,11	Target Penanganan kumuh ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Kotaku untuk luasan kumuh diatas 15 Ha, Pemerintah Provinsi untuk luasan kumuh 10 Ha- 15 Ha, dan penanganan melalui dana APBD Kota untuk luasan kumuh dibawah 10 Ha. Pada akhir tahun 2022 telah tertangani 52,42 Ha kawasan kumuh dengan penangan oleh Kotaku seluas 51,01 Ha dan penanganan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai , Kecamatan Balikapapan Kota. Realisasi melebihi target untuk penanagan luasan kumuh oleh Pemerintah Pusat yang awalnya pada akhir Tahun 2022 di ramalkan hanya seluas 48,5 Ha ternyata terealisasi 51,01 Ha
7	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		√	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,00	0,01	Tahun 2022 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023. Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah.
8	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai pendataan SPM Tahun 2022, tidak terdapat masyarakat yang harus direlokasi
9	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kota yang di tangani		√	26,11	100,00	0,00	0,00	0,00	26,11	100,00	Penanganan kawasan kumuh Kota Balikpapan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)		√	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,003	0,002	Terjadi *Updating* data RTLH pada tahun 2022, pada saat penyusunan Renstra jumlah RTLH sebanyak 5591 dan pada 2022 terverifikasi menjadi sebanyak 583 RTLH. Dari 583 unit tersebut kemudian ditangani sebanyak 66 unit RTLH yang bersumner dari APBD dan 4 bersumber dari CSR yang merupakan usulan baru dari masyarakat melalui inovasi Griyaku. Sehingga ketidaktercapaian target bukan berasal menurunnya jumalh penanganan melainkan dari adanya updating data RTLH eksisting
11	jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum)		√	16,75	16,80	16,85	16,90	16,95	21,97	21,97	Target penambahan unit rumah yang dilengkapi PSU adalah sebesar 93 unit rumah namun berdasarkan pendataan total unit rumah yang dilengkapi PSU adalah menjadi 44.507 unit rumah terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan.
12	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		√	0	18	36	54	72	0	15	Tahun 2022 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023. Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah.
13	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	59,00	Tahun 2022 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023. Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan rumah yang terkena bencana alam akan menjadi 59 unit akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah.
14	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223	223	Terdiri dari rumah longsor dan angin puitng beliung

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0	20	sesuai pendataan SPM Tahun 2022
16	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10	sesuai pendataan SPM Tahun 2022
17	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	sesuai pendataan SPM Tahun 2022
18	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3	sesuai pendataan SPM Tahun 2022
19	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	157	sesuai pendataan SPM Tahun 2022
20	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		√	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	116,81	116,81	sesuai pendataan SPM Tahun 2022
21	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Tidak ada kegiatan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM
22	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Tidak ada kegiatan fasilitasi ganti hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM
23	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0	0	0	0	0	0	3	Lokasi 3KK berada di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0	0	0	0	0	0	33	tidak terdapat kegiatan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM pada tahun 2022
25	Jumlah rumah tangga penerima layanan belum mendapatkan penyediaan rumah pemenuhan SPM layak huni berdasarkan rencana		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	59	Lokasi 74KK tersebar di 23 Kelurahan dan 6 Kecamatan. Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan rumah yang terkena bencana alam akan menjadi 59 unit akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah.
26	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		√	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0	tidak terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk relokasi tahun 2022
27	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		√	3,99	0,00				26,11	0	Berdasarkan SK Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020
28	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		√	26,00	355,00	251,00	499,00	389,00	70	100	Telah dilakukan sebanyak 66 unit RTLH dana APBD dan 4 unit dana CSR melalui program GRIYAKU Balikpapan
29	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		√	49,91	78,90	103,90	128,90	153,30	12,82	56,98	Dilakukan penanganan kumuh di Kelurahan Gunung Sari Ulu seluas 11, 41 Ha melalui KOTAKU dan Kelurahan Damai seluas 1,41 Ha
30	Jumlah rumah di kab/kota		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202539		Jumlah rumah formal dan swadaya tahun 2022 dari pendataan RP3KP tahun 2022
31	Jumlah unit PK RTLH		√	26	355	251	499	389	70	100	66 unit RTLH bersumber dari APBD dan 4 bersumber dari CSR pada tahun 2022.
32	Jumlah rumah tidak layak huni		√	5565	5210	4959	4460	4071	517	417	66 unit RTLH bersumber dari APBD dan 4 bersumber dari CSR pada tahun 2022.
33	Jumlah rumah yang tidak dihuni		√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	Belum dilakukan pendataan
34	Rasio rumah dan KK		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202539:243852		
35	Jumlah rumah pembangunan baru		√	13176	18176	23176	28176	33176	251		92 Rumah Swadaya, 159 Rumah Formal

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		√	35524	37300	39165	41123	43179	44507		
37	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		√	22245	43145	48873	53760	59136	115049		Data sambungan PDAM tahun 2022
38	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		√	0	0	0	0	0	202539		Jumlah rumah eksisting Kota Balikpapan tahun 2022
39	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)		√	0	0	0	0	0	0	0	Kewenangan SPM Akses Sanitasi (On Site/Off Site) Tahun 2022 sudah di Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
40	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		√	0	0	0	0	0	37	37	
41	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		√	0	0	0	0	0	202539		Jumlah rumah eksisting Kota Balikpapan tahun 2022
42	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		√	122	122	122	122	122	0	0	Tidak ada pengembang yang yang tersertifikasi di tahun 2022
43	Jumlah pengembang yang terregistrasi		√	122	122	122	122	122	0	0	Tidak ada pengembang yang yang terregistrasi di tahun 2022 karena TIM SRP2 belum terbentuk
44	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		√	50	50	50	50	50	51	50	Sosialisasi penyerahan PSU dan sosialisasi permohonan bantuan PSU
45	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		√	0	0	0	0	0	0	157	Tahun 2022 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023. Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah (223 warga negara) yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan.
46	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		√	0	0	0	0	0	0	0	sesuai pendataan SPM Tahun 2022, tidak terdapat masyarakat yang harus direlokasi

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.		√	2,75	2,57	2,45	2,22	2,01	0,26	0,26	Terjadi *Updating* data RTLH pada tahun 2022, pada saat penyusunan Renstra jumlah RTLH sebanyak 5591 dan pada 2022 terverifikasi menjadi sebanyak 583 RTLH. Dari 583 unit tersebut kemudian ditangani sebanyak 66 unit RTLH yang bersumner dari APBD dan 4 bersumber dari CSR yang merupakan usulan baru dari masyarakat melalui inovasi Griyaku.
48	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		√	97,25	97,43	97,55	97,88	97,99	99,74	99,79	Terjadi *Updating* data RTLH pada tahun 2022, pada saat penyusunan Renstra jumlah RTLH sebanyak 5591 dan pada 2022 terverifikasi menjadi sebanyak 583 RTLH. Dari 583 unit tersebut kemudian ditangani sebanyak 66 unit RTLH yang bersumner dari APBD dan 4 bersumber dari CSR yang merupakan usulan baru dari masyarakat melalui inovasi Griyaku.

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Disperkim Kota Balikpapan didukung oleh 5 (lima) sasaran strategis telah sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Disperkim Kota Balikpapan dalam dokumen perjanjian kinerja revisi pada tahun 2022 dan telah disesuaikan dengan dokumen Renstra Disperkim Tahun 2021 – 2026. Secara rata -rata, capaian kinerja pelayanan Disperkim Kota Balikpapan adalah sebesar 113,25 % atau masuk dalam predikat sangat tinggi. Berikut disajikan rincian capaian Kinerja Pelayanan Disperkim Kota Balikpapan tahun 2022.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama Disperkim Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	0,00	0,00	100,00	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	16,75	21,97	131,19	Sangat Tinggi
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	32,56	34,19	105,02	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Skor	27	31,53	116,78	Sangat Tinggi

Dalam Pencapaian kinerja pembangunan tahun 2022, Disperkim merangkul pemangku kepentingan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Balikpapan untuk berkoraborasi. Sinergi kolaborasi yang dilakukan antara Disperkim dan pemangku kepentingan diantaranya ada pada hal sebagai berikut:

1. Program GRIYAKU Balikpapan;
2. Tata Kelola Siteplan Perumahan;
3. Konsolidasi Tanah Eks Kebakaran Permukiman Pandansari;
4. Penguatan Regulasi (PKP, RP3KP, RP2KPKPK dan Penyerahan PSU).

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Disperkim Kota Balikpapan menghadapi permasalahan dan hambatan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapai dalam pencapaian kinerja Tahun 2022 adalah pencapaian Kinerja Program Pengembangan Perumahan terkait pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat belum dapat tercapai atau dapat dikatakan capaian kinerja Nol (0). Capaian Kinerja ini menjadi 0 dikarenakan formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Meningkatnya cakupan rumah layak huni dan indikator Program Pengembangan Perumahan merupakan hasil dari perhitungan realisasi penyediaan rumah layak huni melalui rehabilitasi rumah korban bencana ataupun pembangunan baru bagi rumah korban bencana dan atau relokasi program pemerintah. Masing -masing formulasi adalah sebagai berikut;

- Formulasi IKU Meningkatnya cakupan rumah layak huni :

$$\text{Persentase rumah layak huni} = \frac{\text{Jumlah penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kota Balikpapan}} \text{ X } 100\ \%$$

- Formulasi Indikator Program Pengembangan Perumahan, Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota:

$$\text{Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota} = \frac{\text{Rumah tangga korban bencana yang ditangani+ Rumah Tangga yang di relokasi program pemerintah}}{\text{Jumlah total rumah tangga yang harus direlokasi karena program Pemerintah Daerah dan korban bencana yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \text{ X } 100\ \%$$

Ketiadaan realisasi penanganan rumah korban bencana atau relokasi program dikarenakan pada Tahun 2022, kegiatan pemenuhan SPM hanya berupa pendataan BNBA untuk pelaksanaan SPM mulai Tahun 2023 sampai dengan 2026. Sebagai hasil evaluasi pelaksanaan SPM, maka seharusnya pendataan SPM BNBA dilakukan pada tahun n-1 yaitu pada Tahun 2021, namun dikarenakan kurang optimalnya pendataan dan kurangnya pemahaman SDM terhadap alur pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat sehingga berdampak pada Tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan penyediaan fisik rumah korban bencana dan atau relokasi program pemerintah dan capaian kinerja menjadi Nol (0).

2.3.3. Dampak Permasalahan dan Hambatan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional

Sebagai hasil evaluasi pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat, maka seharusnya pendataan SPM BNBA dilakukan pada tahun n-1 yaitu pada Tahun 2021, namun dikarenakan kurang optimalnya pendataan dan kurangnya pemahaman SDM terhadap alur pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat sehingga berdampak pada Tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan penyediaan fisik rumah korban bencana dan atau relokasi program pemerintah dan capaian kinerja menjadi Nol (0).

Pencapaian kinerja sebesar Nol (0), namun realisasi anggaran pada program tersebut mampu mencapai capaian kinerja masing -masing kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat di dalam cakupan IKU maupun indikator program, sehingga realisasi anggaran tidak dapat dikatakan pemborosan karena tidak memenuhi kinerja sasaran maupun program terkait.

Sebagai bahan evaluasi , peningkatan kompetensi SDM dalam penanganan SPM Perumahan Rakyat telah ditingkatkan di Tahun 2022 dan data BNBA korban bencana juga telah dipetakan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Disperkim Tahun 2021-2026, terdapat implikasi terhadap pelayanan Disperkim untuk lima tahun mendatang. Adapun tantangan dan peluang terhadap pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

TANTANGAN:

1. Kebutuhan Perumahan untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Negara (IKN);
2. Meningkatnya kebutuhan terhadap perumahan layak huni sebagai implikasi dari peningkatan laju urbanisasi;
3. Belum adanya regulasi yang mengatur pemberian bantuan PSU di kota Balikpapan; dan
4. Belum tersedianya basis data bidang perumahan dan permukiman yang akurat dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (*Stakeholders*).

PELUANG:

1. Program Nawacita kedua;
2. Program Sejuta Rumah;
3. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi;
4. Kolaborasi Kewenangan Penanganan Kawasan Kumuh dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur; dan
5. Kolaborasi Pemberian Bantuan PSU Perumahan dengan Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Provinsi Kalimantan Timur.

2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi Dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Direncanakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026 dan juga kebutuhan terkait urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka isu strategis yang masih harus ditindaklanjuti dalam Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1 Masih terdapat kawasan kumuh seluas 153,30 Ha di Kota Balikpapan. Pada Tahun 2024 direncanakan kawasan kumuh yang tersisa masih 74, 40 Ha dan diupayakan pada akhir Tahun 2024 menjadi 49,40 Ha.

2 Masih terdapat 5.580 rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan. Data pada dokumen Renstra Balikpapan Tahun 2021 -2026 belum masuk tahap verifikasi akhir. Seiring dinamisasi pendataan yang dilakukan dan peningkatan kualitas RTLH setiap tahun , maka pada akhir tahun 2022 data RTLH eksisting adalah sebesar 517 unit RTLH. Direncanakan pada tahun 2023 akan berkurang Kembali 100 unit melalui pendanaan APBD, sehingga pada tahun 2024 percepatan pengurangan RTLH akan dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 250 unit. Kondisi akhir yang diinginkan pada Tahun 2024 adalah tersisa RTLH sebanyak 167 unit RTLH.

3 Semakin meningkatnya kebutuhan rumah layak huni yang terjangkau, terlebih sebagai penyangga IKN. Disperkim Kota Balikpapan dalam hal ini akan memfasilitasi kemudahan dalam penyediaan rumah layak huni diantaranya adalah sebagai berikut:

   a. Penyempurnaan tata kelola rencana tapak perumahan dalam rangka memperbaiki dan mempermudah permohonan rekomendasi rencana tapak perumahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar pengembang perumahan benar -benar menyediakan rumah beserta PSU sesuai dengan aturan berlaku.
   b. Sosialisasi dan fasilitasi kemudahan memperoleh hunian layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui mekanisme

Kredit Kepemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dan penyediaan hunian layak untuk MBR di sembilan (9) lokasi rusunawa Balikpapan yang responsif Gender.

c. Penyediaan rumah layak huni melalui rehabilitasi dan pembangunan rumah baru bagi korban bencana dan atau relokasi program pemerintah. Penyediaan rumah layak huni jenis ini merupakan SPM Perumahan Rakyat. Sesuai Rencana aksi SPM Pemerintah Kota Balikpapan, penyediaan ini akan dimulai di Tahun 2023 dan berlanjut di tahun 2024 sampai dengan akhir Renstra Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Hal ini merupakan rencana optimalisasi penerapan SPM Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan.

d. Kemudahan penyediaan rumah layak huni juga diberikan untuk jenis rumah vertikal dimana, Disperkim Kota Balikpapan memfasilitasi penerbitan rekomendasi Pertelaan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun). Hal ini agar Sarusun Kota Balikpapan yang terbangun telah memenuhi aturan yang berlaku.

4 Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan dan permukiman yang akurat. Mulai tahun 2022 akan dibangun Sistem Informasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SIM PKP). Tahun 2022 diinisiasi dengan penyusunan masterdata perumahan berbasis *Geographic Information System* (GIS). Tahun 2023 berupa pengembangan SIM PKP yang dilanjutkan di Tahun 2024 hingga ke akhir Tahun Renstra.

5 Realisasi sasaran Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang diwakili oleh Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan telah optimal dicapai pada Tahun 2022. Ketercapaian ini dalam realitasnya tetap membutuhkan pengawasan dan pengendalian, sehingga kinerja yang dicapai bukan hanya angka semata namun juga dapat mencerminkan kualitas kinerja IKU tersebut. Dari pengawasan dan pengendalian terhadap PSU perumahan maka hal yang perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti di Tahun 2023 maupun perencanaan 2024 adalah percepatan penyerahan PSU perumahan. Untuk PSU perumahan yang telah diserahkan, isu strategisnya adalah peningkatan dan pemeliharaan PSU, terutama PSU RTH yang berupa taman -taman didalam cakupan klaster perumahan yang PSU nya sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Pada perencanaan Tahun 2024 direncanakan

penyediaan/peningkatan/pemeliharaan PSU taman klaster perumahan yang responsif gender.

2.4 Review tentang Rancangan Akhir RKPD

Review Rancangan Akhir renja Disperkim Kota Balikpapan disusun sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Balikpapan. Beberapa numenklatur sub kegiatan mengalami perubahan ketika tahapan Rankhir berlangsung. Oleh karena itu terdapat perbedaan numenklatur sub kegiatan bila dibandingkan pada tahap Ranwal maupun Rancangan Renja 2024 sebagaimana terlampir pada tabel review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 dibawah ini.

Tabel 4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024

NO	2024 Rancangan RKPD					2024 Rancangan RKPD				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaia n Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaia n Kinerja	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapa n	IKM Internal Perangkat Daerah	80	12.400.932.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapa n	IKM Internal Perangkat Daerah	80	12.400.932.000
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapa n	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan	76	-					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapa n	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	-					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapa n	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	-					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapa n	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	-					
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapa n	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80	7.301.404.750	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapa n	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80	7.301.404.750
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapa n	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45	7.301.404.750	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapa n	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45	7.301.404.750

NO	2024 Rancangan RKPD					2024 Rancangan RKPD				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	480.892.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	480.892.500
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45	30.892.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45	30.892.500
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	450.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	450.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	851.562.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	851.562.950
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	16.980.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	16.980.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	418.867.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	418.867.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	112.283.950	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	112.283.950

NO	2024 Rancangan RKPD					2024 Rancangan RKPD				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaia n Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaia n Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapa n	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	320	3.432.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapa n	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	320	3.432.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapa n	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapa n	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	250.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapa n	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapa n	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	50.000.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapa n	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	267.681.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapa n	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	267.681.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapa n	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	-					
	Pengadaan Mebel	Balikpapa n	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	43.698.600	Pengadaan Mebel	Balikpapa n	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	43.698.600
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapa n	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	223.982.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapa n	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	223.982.400
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapa n	IKM Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	936.378.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapa n	IKM Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	936.378.400

NO	2024 Rancangan RKPD					2024 Rancangan RKPD				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaia n Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaia n Kinerja	Pagu Indikatif
1.7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapa n	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	170.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapa n	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	170.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapa n	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	766.378.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapa n	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	766.378.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapa n	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	2.563.012.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapa n	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	2.563.012.400
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpap an	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33	349.989.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpap an	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33	349.989.900
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapa n	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	119.982.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapa n	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	119.982.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapa n	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	95.435.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapa n	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111	95.435.000

NO	2024 Rancangan RKPD					2024 Rancangan RKPD				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaia n Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaia n Kinerja	Pagu Indikatif
	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapa n	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i	1	1.997.605.000	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapa n	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i	1	1.997.605.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Balikpapa n	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	28,00%	11.385.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Balikpapa n	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	28,00%	11.385.000.000
2.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapa n	persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	32,89%	225.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapa n	persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	32,89%	225.000.000
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpap an	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	100.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapa n	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	100.000.000
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Balikpapa n	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	75.000.000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Balikpapa n	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	75.000.000

NO	2024 Rancangan RKPD					2024 Rancangan RKPD				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaia n Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaia n Kinerja	Pagu Indikatif
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapa n	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	50.000.000	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapa n	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	50.000.000
2.2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapa n	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	32,89%	335.000.000	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapa n	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	32,89%	335.000.000
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Balikpapa n	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	200	100.000.000	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Balikpapa n	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	200	100.000.000
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Balikpapa n	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	100	100.000.000	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Balikpapa n	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	50	100.000.000

NO	2024 Rancangan RKPD					2024 Rancangan RKPD				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Balikpapan	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	100	75.000.000	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Balikpapan	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	100	75.000.000
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	60.000.000	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	60.000.000
2.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	28,00%	1.575.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	78,65%	1.575.000.000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	35	1.000.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	35	1.000.000.000
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	100.000.000	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	1	100.000.000

NO	2024 Rancangan RKPD					2024 Rancangan RKPD				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
			atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota							
	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	1	475.000.000	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	475.000.000
2.4	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Balikpapan	persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola	78,65%	6.500.000.000	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Balikpapan	persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola	78,65%	6.500.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1	4.500.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1	4.500.000.000
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	2.000.000.000	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	2.000.000.000
2.5	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Balikpapan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	13,16%	2.650.000.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Balikpapan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	13,16%	2.650.000.000

NO	2024 Rancangan RKPD					2024 Rancangan RKPD				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaia n Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaia n Kinerja	Pagu Indikatif
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Balikpapa n	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	7	50.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Balikpapa n	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	7	50.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Balikpapa n	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	2.500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Balikpapa n	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	2.500.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Balikpapa n	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Balikpapa n	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1	100.000.000
2.6	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Balikpapa n	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	3	100.000.000	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Balikpapa n	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	3	100.000.000

NO	2024 Rancangan RKPD					2024 Rancangan RKPD				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	1	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	1	100.000.000
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Balikpapan	Luasan Kawasan kumuh	25,42	9.200.000.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Balikpapan	Luasan Kawasan kumuh	25,42	9.200.000.000
3.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Balikpapan	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pegembangan kawasan Permukiman	50,00%	335.000.000					
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1	-					
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Balikpapan	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	42,44%	335.000.000

NO	2024 Rancangan RKPD					2024 Rancangan RKPD				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1	335.000.000	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	1	335.000.000
3.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Balikpapan	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	127,88	420.000.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Balikpapan	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	127,88	375.000.000
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	190.000.000	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	190.000.000
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1	85.000.000	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1	85.000.000
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	100.000.000	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	100.000.000

NO	2024 Rancangan RKPD					2024 Rancangan RKPD				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaia n Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaia n Kinerja	Pagu Indikatif
						Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Balikpapa n	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pegembangan kawasan Permukiman	50,00%	45.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikpapa n	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	45.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Balikpapa n	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	45.000.000
3.3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Balikpapa n	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	42,44%	8.445.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Balikpapa n	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	42,44%	8.445.000.000
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Balikpapa n	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	3	200.000.000	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Balikpapa n	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3	200.000.000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Balikpapa n	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	250	7.040.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Balikpapa n	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	250	7.040.000.000

NO	2024 Rancangan RKPD					2024 Rancangan RKPD				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	50.000.000
	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	1	-					
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	11,08	1.155.000.000	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	11,08	1.155.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Balikpapan	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	5,12%	2.750.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Balikpapan	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	5,12%	2.750.000.000
4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Balikpapan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	1	2.750.000.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Balikpapan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	1	2.750.000.000
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	200.000.000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	200.000.000

NO	2024 Rancangan RKPD					2024 Rancangan RKPD				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaia n Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Capaia n Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunia	Balikpapa n	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3	2.400.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunia	Balikpapa n	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3	2.400.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Balikpapa n	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Balikpapa n	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	150.000.000
TOTAL					35.735.932.000					35.735.932.000

2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Rancangan Akhir Renja Dinas Perumahan dan Permukiman ini belum terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya. Dalam cakupan Undang – undang tersebut, secara operasional bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tercantum dalam urusan wajib pembangunan nasional.

Selain merujuk pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rankhir Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 juga merujuk pada sasaran strategis ke 3 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tercantum dalam rencana strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 yakni “Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau”

Tabel 5. Pembagian Urusan Pemerintahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
1	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.
		b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
		c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
		b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha.
3	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	a. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota
4	Prasarana, sarana dan utulitas umum (PSU)	a. Penyelenggaraan PSU Perumahan
5	Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	a. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana , sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Rankhir Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Tujuan Disperkim Kota Balikpapan , sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Balikapapn Tahun 2021 -2026 adalah Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas. Tujuan Disperkim ini merupakan salah satu sasaran Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026.

Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastrukur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks kepuasan layanan infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Indeks kepuasan layanan infrastruktur didukung oleh indikator yang dihasilkan oleh Disperkim Kota Balikpapan, yaitu indikator tujuan persentase permukiman layak huni. Pada Tahun 2024, indikator tujuan memiliki target ini adalah 99,50 %.

3.2.2 Sasaran

Upaya pencapaian tujuan Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, didukung oleh beberapa sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni. Sasaran ini Mengukur persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana,rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase rumah layak huni. Pada Tahun 2024 sasaran IKU ini adalah 0,02 %.
2. Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Sasaran ini mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Sasaran ini diwakilkan oleh indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal diukur dengan Persentase unit

rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU. Pada Tahun 2024 sasaran IKU ini adalah 16,85 %.

3. Mengurangi luas kawasan kumuh. Sasaran ini mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh. Pada Tahun 2024 sasaran IKU ini adalah 67,78 %.
4. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim. Sasaran ini diukur dengan melaksanakan penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) di unit kerja Disperkim. PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Sasaran ini memiliki indikator Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim. Pada Tahun 2024 sasaran IKU ini adalah nilai 30,50

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas	Persentase Permukiman Layak Huni	98,59%	99,05%	99,32%	99,50%	99,78%	100%
1.1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04 %
1.2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	16,70%	16,75%	16,80%	16,85%	16,90%	16,95 %
1.3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	0,00%	32,56%	51,47%	67,78%	84,08%	100%
1.4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	NA	27	28, 75	30,50	32,25	34

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam menyusun program dan kegiatan di tahun 2024 , Dinas Perumahan dan Permukiman mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

   Memperhatikan rancangan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 , Rankhir Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 merujuk pada tema pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024 yaitu Mempertahankan kondusifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi iklusif. Program prioritas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan masuk ke misi ke tiga (3) RPJMD Tahun 2021 - 2026 yaitu “Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai”

b. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

   Program dan Kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024 juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG’s). Target TPB yang diampu dan menjadi salah satu indikator program pada Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Target 11.1 yaitu Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Target 11.1 TPB memiliki indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

c. Pengentasan Kemiskinan.

   Salah satu tujuan program dan kegiatan Disperkim Kota Balikpapan pada tahun 2024 adalah pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung tujuan pengentasan kemiskinan ini terdapat perbaikan rumah tidak layak huni dan juga pemberian kemudahan akses perumahan bagi MBR.

d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

   Rankhir Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 terintegrasi dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat yaitu fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

e. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rankhir Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 terdiri atas 4 Program, 14 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan.Berikut disajikan rencana program dan kegiatan Rankhir Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024.

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						**35.735.932.000,00**							**28.345.157.636,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**35.735.932.000,00**							**28.345.157.636,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**35.735.932.000,00**							**28.345.157.636,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	-			**80 Nilai**	**12.400.932.000,00**						-	**10.068.157.636,00**	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)*	-			80 Nilai	7.301.404.750,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	7.318.157.636,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	7.301.404.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		7.318.157.636,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			80 Nilai	480.892.500,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	30.892.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	450.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			80 Nilai	851.562.950,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	690.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.980.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	418.867.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		315.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	112.283.950,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		105.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				320 Dokumen	3.432.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			80 Nilai	267.681.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	43.698.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	223.982.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			80 Nilai	936.378.400,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	170.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	766.378.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			80 Nilai	2.563.012.400,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	810.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				33 Unit	349.989.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		360.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	119.982.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				111 Unit	95.435.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.997.605.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota***	**-**			**28,00 %**	**11.385.000.000,00**						**-**	**11.092.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	-			32,89 %	225.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	307.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana														
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		132.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah*	-			32,89 %	335.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	410.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				200 Orang	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator														
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				100 Orang	75.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				35 Orang	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				100 Orang	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	-			78,65 %	1.575.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	1.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				35 Unit Rumah	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah				1 Rumah Tangga	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Unit Rumah	475.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola*	-			78,65 %	6.500.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	7.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	4.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	2.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		6.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak*	-			13,16 %	2.650.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	2.125.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				7 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	2.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		2.025.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	*Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan*	-			3 rekomendasi	100.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Luasan Kawasan Kumuh (Ha)***	-			**25,42 Ha**	**9.200.000.000,00**						-	**5.370.000.000,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pegembangan kawasan Permukiman*	-			50,00 %	45.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	45.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh*	-			127,88 Hektar	375.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	420.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh														
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				6 Kelompok Masyarakat	85.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	190.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani*	-			42,44 %	8.780.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	4.850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				250 Unit Rumah	7.040.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		3.850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali				1 Ha	335.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				3 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				11.08 Ha	1.155.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan***	-			**5,21 %**	**2.750.000.000,00**						-	**1.815.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara*	-			1 Hektar	2.750.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	1.815.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				3 Lokasi	2.400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	JUMLAH							**35.735.932.000,00**							**28.345.157.636,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Rankhir Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Kerja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Kota Balikpapan.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcomes)/Kegiatan (output) Disperkim Kota Balikapapan Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Tuntutan pencapaian kinerja perangkat daerah dari para *stakeholders* tidak selalu berjalan mulus sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dibutuhkan strategi yang matang serta dinamis mengikuti perkembangan zaman dalam rangka pencapaian kinerja tersebut. Pencapaian kinerja yang tercermin dalam indikator -indikator keberhasilan perangkat daerah merupakan gambaran besar pelayanan yang memuaskan bagi para *stakeholders* perangkat daerah. Demi memberikan kepuasan pelayanan kepada *stakeholders* dan keberlanjutan organisasi maka, Disperkim Kota Balikpapan perlu membuat beberapa inovasi dalam rangka hal tersebut. Salah satu inovasi pada Disperkim Kota Balikpapan adalah Griyaku

Griyaku merupakan inovasi yang digagas oleh Kepala Disperkim Kota Balikpapan, H. Arfiansyah, ST, M.Si. Griyaku berangkat dari sasaran perencanaan strategis "Meningkatkan Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)"

GRIYAKU Balikpapan menjadi Gerakan Peningkatan Rumah Layak Huni Kota Balikpapan dengan melibatkan peran serta multi pihak, yang bertujuan tidak hanya mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni akan tetapi memudahkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"GRIYAKU Balikpapan" menghasilkan output terdiri dari :

a. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian BSPK RTLH.
b. Form Pendataan RTLH secara online yang dapat dilihat melalui 2 (dua) link berikut: https://bit.ly/RTLHBPN dan https://disperkim.balikpapan.go.id
c. Bank data RTLH per 4 november 2022 sebanyak 2.421 unit RTLH. Terdapat 5 (lima) jenis data RTLH sebagai Bank Data RTLH yaitu: (i) Data Fisik : RTLH regular dan RTLH terdampak bencana, (ii) Data Non Fisik : Penghasilan MBR/Non MBR, Status hunian (sewa/milik), dan Status lahan (legal/illegal)
d. "GRIYAKU Balikpapan" menghasilkan 5 (lima) Program/Kegiatan yaitu: (i) rehab RTLH regular, (ii) rehab RTLH terdampak bencana, (iii) fasiliasi rusunawa, (iv) fasilitasi KPR ringan untuk MBR, (v) hibah/penataan kawasan/relokasi.

Gambar 2. Inovasi Griyaku

BAB VI

PENUTUP

Rankhir Renja Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam VISI dan MISI Pemerintah Kota Balikpapan. Rankhir Renja ini berfungsi sebagai sarana peningkatan penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelengaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Renja memiliki peran vital dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan daerah, secara umum renja OPD dapat menjawab tiga hal mendasar, yaitu:

1. Langkah dan Kebijakan strategis yang akan diambil agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.
2. Memberikan arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang akan dicapai dalam satu tahun.
3. Sebagai komitmen OPD dan seluruh unsur didalamnya untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Rankhir Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 ini diharapkan juga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Renja ini juga dimaksudkan sebagai komitmen pimpinan dan pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan untuk menghasilkan kinerja yang nyata dimasa mendatang dalam upaya mewujudkan Balikpapan yang nyaman dihuni.

RENJA 2024
BPBD KOTA BALIKPAPAN

JL.RUI RAHAYU i NO 3 BALIKPAPAN SELATAN
http://bpbd.balikpapan.go.id
(0542) 874095

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan telah menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan ini dilakukan sebagai penjabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Diharapkan Rancangan Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2024 dan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan sehingga terwujud Pemerintahan yang baik dan bersih.

Balikpapan, 10 Agustus 2023

Plt.Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Balikpapan

USMAN ALI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk menyikapi hal tersebut, Rencana Kerja mencakup:

a) Pernyataan strategi, tujuan dan sasaran organisasi;
b) Rumusan tentang tugas pokok dan fungsi organisasi;
c) Uraian tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan;
d) Uraian tentang permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun ke depan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi penanggungjawab sekaligus pengendali penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat daerah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi maupun BPBD Kota, dimana hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi, komando dan pelaksana teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana selaras dengan Pembukaan Undang-Undang Tahun 1945 alinea ke empat yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Disamping itu berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah membawa konsekuensi Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah dan dokumen pengelolaan keuangan daerah, serta mengacu pada Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Maka dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Perencanaan Strategi Organisasi Perangkat Daerah tetap harus berpedoman pada Visi dan Misi RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 dimana arah pembangunan Kota Balikpapan berdasarkan Visi **"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"** serta BPBD Kota Balikpapan mendukung misi ke empat RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026, yaitu **"Mewujudkan Kota Nyaman dihuni yang Berwawasan Lingkungan"** serta melaksanakan dan mendukung salah satu dari sembilan program prioritas kepala daerah terpilih pada point **enam (6)**, **yaitu nyaman lingkungan dan sosial** dengan program OPD yaitu **"**Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota".

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, sebagai acuanyang memuat kebijakan, program, dan kegiatan serta

penggunaan anggaran keuangan Badan Penanggulangan Bencana DaerahKota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2024.

Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan daerah yang baik perlu disusun Renja Tahun 2024 yang sistematis dan akuntabel. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 disusun mengacu pada tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan 2021- 2026 yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD tahun 2021- 2026, yaitu "Meningkatkan Nilai Indeks Kapasitas Daerah Dalam Menghadapi Bencana dan Kebakaran"**.** Renja juga disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah periode tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan

Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) Badan Penanggulangan Bencana DaerahKota BalikpapanTahun 2024 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan program kegiatan tahun 2024 di Kota Balikpapan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan tahun 2024 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4723);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
15. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 17 tahun 2019 tentang jabatan fungsional analis kebakaran;
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalia Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan;

19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
23. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Penanggulangan Bencana Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

1. Menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program kegiatan 1 tahun anggaran.
2. Sebagai tolak ukur indikator kunci keberhasilan dan media akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan.
3. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat dicapai sesuai target dan berorientasi pada hasil.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD

3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPBD TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Tahun 2022

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 dimana arah pembangunan Kota Balikpapan berdasarkan Visi Walikota Terpilih adalah **"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"** serta BPBD Kota Balikpapan mendukung misi ke empat RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026, yaitu **"Mewujudkan Kota Nyaman dihuni yang Berwawasan Lingkungan"** serta melaksanakan dan mendukung salah satu dari sembilan program prioritas kepala daerah terpilih pada point enam (6), yaitu nyaman lingkungan dan sosial yang di tuangkan dalam **"Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Serta Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran"**

memiliki Tujuan **" Meningkatkan Nilai Indeks Kapasitas Daerah Dalam Menghadapi Bencana dan Kebakaran "** Sedangkan Sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Bagi Warga Kota Balikpapan Yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan Yang Menjadi Korban Bencana
2. Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Kebakaran dan Menjadi Korban Kebakaran
3. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Dalam rancangan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 dijabarkan mengenai rencana kegiatan kerja yang telah menjadi komitmen perangkat daerah untuk dicapai dalam tahun 2023 melaksanakan 1 (satu)

urusan, 3 (Tiga) Program dan 18 (Delapan Belas) kegiatan

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH S/D TAHUN 2023
KOTA BALIKPAPAN

Tabel TC.29

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target progra dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
1	5	3			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	83%	83,2 %	85 %	79,64%	94%	87,5 %		
1	05	03	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana**		80 %	100 %	94,22%	94%	100 %		
1	05	03	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**		83,4 %	100 %	98,36%	99%	100 %		
1	05	03	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		95,4 %	100 %	100%	100%	100 %		
1	05	03	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		50 %	60 %	25,00%	42%	70 %		
1	05	04			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran**	83%	83,2 %	85 %	77,52%	91%	87,6 %		
1	05	04	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran**		92,6 %	94 %	94,13%	100%	96 %		
1	5	4	2.02		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		75 %	75 %	94,16%	126%	80 %		
1	5	4	2,03		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran**		N/A %	100 %	0	0	0 %		

1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran		70 %	78 %	99,99%	137%	73 %		
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Cakupan Penyelengaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		95,2 %	100 %	99,34%	99%	100 %		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	N/A	N/A %	70 %	71,69%	100%	72 %		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		69 %	70 %	70,00%	100%	71 %		
1	05	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	99,15%	99%	100 %		
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		90 %	100 %	95,01%	95%	100 %		
1	05	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	97,73%	98%	100 %		
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		90 %	90 %	90,00%	95%	95 %		
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	95,56%	96%	100 %		
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	97,72%	98%	100 %		

Rencana Kerja BPBD 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah – 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain:

1. Penanggulangan Bencana Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah
3. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerahdituntut untuk semakin mengedepankan sumber daya manusia yang tangguh.

Tugas BPBD

Berdasarkan Perda Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, BPBD mempunyai tugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPBD

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan

PENCAPAIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BALIKPAPAN
2022

Tabel TC.30

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penurunan Dampak Buruk yang diakibatkan Bencana			5%	5%	5%	5%	13,46%	-	-	-	
2	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun			5%	5%	5%	5%	11,62%	-	-	-	
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			28	29	32	34	30	-	-	-	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penentuan isu – isu penting atau strategis pelayanan BPBD perluindentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, ada beberapa hal yangmenjadi hambatan baik secara internal maupun eksternal dalam kinerja

BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan. Hambatan secara internal dan Eksternal adalah sebagai berikut :

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Belum semua petugas penanggulangan bencana dan kebakaran tersertifikasi;
b. Kekurangan jumlah personil penanggulangan bencana dan kebakaran untuk tenaga opersional lapangan dan supir pemadam kebakaran;
c. Adanya sertifikasi di bidang damkar dan kebencanaan dengan minimal jenjang pendidikan Strata 1 (S1) sehingga banyak personil damkar yang tidak bisa ikut sertifikasi di beberapa bidang diklat;
d. Tidak adanya lembaga diklat kebencanaan dan kebakaran yang berada di wilayah Indonesia bagian timur; dan
e. Kurangnya SDM yang mempunyai disiplin ilmu yang sesuai untuk menunjang tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan kebakaran.

B. Sarana Dan Prasarana

a. BPBD belum mempunyai gedung kantor yang layak;
b. Bangunan gedung UPTD PBD yang masih kurang memenuhi standar;
c. Mobil tangga pemadam kebakaran di BPBD hanya menjangkau 32 meter (maksimal 8 lantai), sementara ada bangunan di Kota Balikpapan mencapai 96 meter (24 lantai);
d. Beberapa unit damkar sudah berusia lebih dari 25 tahun perlu penggantian;
e. Melihat kondisi topografi dan kelas jalan di Kota Balikpapan mobil damkar dengan kapasitas di bawah 5.000 liter harus lebih diperbanyak agar mampu menjangkau gang sempit;
f. APD petugas operasional masih belum mencukupi untuk semua personil;
g. Penggunaan IT sebagai penunjang kelancaran tugas harus dikembangkan;
h. Belum semua acaman bencana mempunyai *Early Warning System* (EWS);
i. Belum mempunyai unit yang mampu mengendalikan bahan beracun dan berbahaya (B3);
j. Perlu pengembangan pencegahan kebakaran di kawasan yang dianggap rawan dengan membangun sistem pemadam kawasan; dan
k. Belum adanya dermaga.

C. Dokumen Dasar Kebencanaan.

a. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);
b. BPBD Kota Balikpapan belum menyusun Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB);
c. BPBD Kota Balikpapan belum menyusun Dokumen Peta Rawan Bencana (PRB);
d. BPBD Kota Balikpapan belum menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
e. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKDB); dan
f. Dokumen Rencana Kontinjensi harus disusun setiap jenis ancaman bencana.

D. Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

a. Masih ada beberapa kawasan yang tidak masuk dalam WMK karena tidak mampu dijangkau dalam waktu maksimal 15 menit (*response time*) yaitu Kariangau, Teritip;
b. Masih banyak kawasan yang tidak bisa di akses mobil damkar (gang sempit/ kawasan perbukitan); dan
c. Belum ada UPTD Pesisir sehingga tidak bisa mengendalikan kebakaran dari wilayah pesisir.

E. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kebakaran.

a. Pembentukan forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB);
b. Belum terbentuknya Redkar (Relawan Pemadam Kebakaran);
c. Belum adanya sekolah aman bencana;
d. Belum adanya rumah sakit aman bencana; dan
e. Belum adanya kampung siaga bencana.

F. Antisipasi dampak peningkatan ancaman bencana dan kebakaran akibat dari sebagai salah satu kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

a. Peningkatan jumlah penduduk dengan pemindahan IKN; dan
b. Terus bertambahnya jumlah dan ketinggian bangunan.

2.3 Isu – Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu – isu strategi adalah suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintahan kota yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berepngaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

➢ **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Belum semua petugas penanggulangan bencana dan kebakaran tersertifikasi;	Kurangnya sertifikasi
		b. Kekurangan jumlah personil penanggulangan bencana dan kebakaran untuk tenaga opersional lapangan dan supir pemadam kebakaran;	Kurangnya personil
		c. Adanya sertifikasi di bidang damkar dan kebencanaan dengan minimal jenjang pendidikan Strata 1 (S1) sehingga banyak personil damkar yang tidak bisa ikut sertifikasi di beberapa bidang diklat;	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi
		d. Tidak adanya lembaga diklat kebencanaan dan kebakaran yang berada di wilayah Indonesia bagian timur; dan	Kurangnya lembaga diklat kebencanaan dan kebakaran
		e. Kurangnya SDM yang mempunyai disiplin ilmu yang sesuai untuk menunjang tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan kebakaran.	Kurangnya kompetensi
2.	Sarana dan Prasarana	a. BPBD belum mempunyai gedung kantor yang layak;	Kondisi kantor kurang layak
		b. Bangunan gedung UPTD PBD yang masih kurang memenuhi standar;	Kondisi bangunan belum standar
		c. Mobil tangga pemadam kebakaran di BPBD hanya menjangkau 32 meter (maksimal 8 lantai), sementara ada bangunan di Kota Balikpapan mencapai 96 meter (24 lantai);	Kurangnya kemampuan sarana dan prasarana
		d. Beberapa unit damkar sudah berusia lebih dari 25 tahun perlu penggantian;	Kurangnya peremajaan kendaraan
		e. Melihat kondisi topografi dan kelas jalan di Kota Balikpapan mobil damkar dengan kapasitas di bawah 5.000 liter harus lebih diperbanyak agar mampu menjangkau gang sempit;	Akses jalan kurang memadai
		f. APD petugas operasional masih belum mencukupi untuk semua personil;	Kurangnya jumlah APD
		g. Penggunaan lT sebagai penunjang kelancaran tugas harus dikembangkan;	Kurangnya pemanfaatan IT

		h. Belum semua acaman bencana mempunyai *Early Warning System* (EWS);	Kurangnya pengadaan EWS
		i. Belum mempunyai unit yang mampu mengendalikan bahan beracun dan berbahaya (B3);	Kurangnya pengadaan kendaraan
		j. Perlu pengembangan pencegahan kebakaran di kawasan yang dianggap rawan dengan membangun sistem pemadam kawasan; dan	Kurangnya sistem pemadam kawasan
		k. Belum adanya dermaga.	Belum adanya dermaga
3.	Dokumen Dasar Kebencanaan	a. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);	Perlunya pembaharuan RISPK
		b. BPBD Kota Balikpapan belum menyusun Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB);	Belum adanya dokumen KRB
		c. BPBD Kota Balikpapan belum menyusun Dokumen Peta Rawan Bencana (PRB);	Belum adanya dokumen PRB
		d. BPBD Kota Balikpapan belum menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);	Belum adanya dokumen RPB
		e. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKDB); dan	Belum adanya dokumen RPKDB
		f. Dokumen Rencana Kontinjensi harus disusun setiap jenis ancaman bencana.	Belum lengkapnya dokumen Rencana Kontijensi per bencana
4.	Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	a. Masih ada beberapa kawasan yang tidak masuk dalam WMK karena tidak mampu dijangkau dalam waktu maksimal 15 menit (*response time*) yaitu Kariangau, Teritip;	Kurangnya jumlah UPTD
		b. Masih banyak kawasan yang tidak bisa di akses mobil damkar (gang sempit/ kawasan perbukitan); dan	Badan jalan kurang lebar
		c. Belum ada UPTD pesisir sehingga tidak bisa mengendalikan kebakaran dari wilayah pesisir.	Belum adanya UPTD pesisir
5.	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kebakaran	a. Pembentukan forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB);	Kurangnya legalitas forum PRB
		b. Belum terbentuknya Redkar (Relawan Pemadam Kebakaran);	Kurangnya Redkar
		c. Belum adanya sekolah aman bencana;	Belum adanya sekolah aman bencana
		d. Belum adanya rumah sakit aman bencana; dan	Belum adanya rumah sakit aman bencana
		e. Belum adanya kampung siaga bencana.	Kurangnya kampung siaga bencana
6.	Antisipasi dampak peningkatan ancaman bencana dan kebakaran akibat dari sebagai salah satu kawasan penyangga	a. Peningkatan jumlah penduduk dengan pemindahan IKN; dan	Pertambahan penduduk
		b. Terus bertambahnya jumlah dan ketinggian bangunan	Pertambahan jumlah dan tinggi bangunan

	lbu Kota Negara (lKN)		

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan masih banyak terdapat kegiatan – kegiatan yang tidak terlaksana, ini diakibatkan tidak pahamnya atau mengertinya tentang bencana tersebut. Dalam proses perumusan program kegiatan pada BPBDtelah dirancangan sesuai dengan jenis bencana dan besar dampakyang terjadi akibat bencana.

Tabel T-C.31
REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA BALIKPAPAN

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 20224

Badan Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**42.401.500.000**					**42.401.500.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana		**33.156.500.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana		**33.156.500.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	**76 Nilai**	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	**76 Nilai**	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 Dokumen	22.700.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 Dokumen	22.700.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Paket		
		Balikpapan	Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		120.000.000		Balikpapan	Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		120.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	20 Laporan	2.850.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	20 Laporan	2.850.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	9 Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	9 Unit		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	0 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	0 Unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran	1 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran	1 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	1 Unit		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Balikpapan	Persentase Cakupan Penyelengaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	12 Unit	**1.525.000.000**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Balikpapan	Persentase Cakupan Penyelengaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	12 Unit	**1.525.000.000**	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 Orang		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 Orang		
		Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah		200.000.000		Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah		200.000.000	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 Orang		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 Orang		
		Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		150.000.000		Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		150.000.000	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**92,5 %**	6.610.000.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**92,5 %**	6.610.000.000	
		Balikpapan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1.000.000.000		Balikpapan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1.000.000.000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Orang	200.000.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Orang	200.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	250 Orang		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	250 Orang		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan			Penyediaan Jasa	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa	10 Jenis		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pola pikir penyusunan Renja diawali oleh kegiatan untukmembuat suatu perencanaan yang melibatkan komitmen danpengerahan tenaga serta diikuti oleh pengumpulan data dan analisanyasehingga diperoleh rumusan yang disepakati. Dalam penyusunanrenstra ini diperlukan tahap perumusan yaitu :

1. Diawali oleh keinginan untuk merencanakan yang diikuti dengan pengerahan tenaga untuk pengumpulan data serta menganalisanya sehingga diperoleh rumusan yang disepakati.
2. Mengimbas tata nilai yang merujuk kepada lima prinsip yaitu : kualitas, responsibilitas/tanggap dan bertanggungjawab, mutualbersama dan saling menguntungkan, efektif dan efisien sertakebebasan/ inovasi.
3. Meformulasi visi dan misi sehingga tergambar tujuan dan saranserta strategis kebijakan yang relevan dengan pelaksanaan danperubahan.
4. Menetepkan modal strategis mengikuti sistem, organisasi danmekanisme yang relevan dangan pelaksanaan.
5. Berkaca diri untuk menilai kinerja dan membandingkannya dengansasaran atau keadaan yang ideal berdasarkan pencapaian tugaspokok dan fungsi (TUPOKSI) dan ketersediaan sumber daya.
6. Mengintegrasikan rencana tindakan dalam bentuk program dankegiatan.
7. Menyusun skenario alternarif/kemungkinan dengan merujukkepada hasil analisa SWOT, sehingga ditentukan strategis kebijakanyang tepat berdasarkan kelayakan dari segi sumber daya dandampaknya.
8. Implementasi berdasarkan kepada program/ kegiatan yang telahditetapkan termasuk mengembangkan sistem informasi danpeningkatan kualitas sumber daya (peningkatan kemampuanaparat sebagai tujuan antara)

Dari hasil kegiatan Musrenbang Kota Balikpapan yang telah lalu, adapun yang diusulkan oleh pihak kecamatan terkait dengan program atau kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kota Balikpapan

Tabel T-C. 32

No	Program / Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Alamat	Kelurahan	Kecamatan			
1	2	3			4	5	6
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	JL. Padan Sari Rt 18 dan 31	Marga Sari	Balikpapan Barat	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	2 Unit Instalasi Hydrant kering/ Tangki Tanam	Jika bisa terakomodir dalam Penetapan Pagu RKPD dan sesuai KUAPPA T.A 2024 Menjadi Ground Water Tank dan Pompa
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Jl. 21 Januari RT, 02,08, dan 09	Baru Tengah	Balikpapan Barat	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	3 Unit Instalasi Hydrant kering/ Tangki Tanam	Jika bisa terakomodir dalam Penetapan Pagu RKPD dan sesuai KUAPPA T.A 2024 Menjadi Ground Water Tank dan Pompa
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jl. Gunung Satu , RT 06	Margo Mulyo	Balikpapan Barat	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindung Diri yang disediakan Dalam Satu Tahun	1 Unit Instalasi Hydrant kering/ Tangki Tanam	Jika bisa terakomodir dalam Penetapan Pagu RKPD dan sesuai KUAPPA T.A 2024 Menjadi Ground Water Tank dan Pompa
		Jl. Jend Dsudirman RT. 28,29,30,32,36,50 dan 59	Klandasan Ilir	Balikpapan Kota		7 Unit Instalasi Hydrant kering/ Tangki Tanam	Jika bisa terakomodir dalam Penetapan Pagu RKPD dan sesuai KUAPPA T.A 2024 Menjadi Ground Water Tank dan Pompa

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BALIKPAPAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional merupakanacuan utama bagi setiap daerah propinsi dan kota dalammerumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraanpemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnyaberupa pola dasar pembangunan daerah.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rencana programdan kegiatan didasari kepada ***Melindungi Segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara***. Disini BPBD berperan sertadalam proses melindungi segenap bangsa dalam penanggulangan bencana,dan memberikan kenyamanan pada warga dari semua faktor – factor penyebab bencana yang ada di Kota Balikpapan.Selanjutnya penjabaran program dan kegiatan yang menyangkutpenanggulangan bencana serta pembangunan baik pra bencana, tanggapdarurat dan pasca bencana secara konkrit dituangkan dalam bentukrencana kerja tahunan dan operasionalnya dirumuskan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalamjangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi BPBD Kota Balikpapan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) BPBD tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Memberikan dukungan kelembagaan yang handal dalam mewujudkanpelayanan penanggulangan bencana yang handal.
2) Terlindunginya masyarakat Kota Balikpapan dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
3) Terlindunginya masyarakat Kota Balikpapan pada saat tanggap darurat.
4) Merehabilitasi dan merekonstruksi daerah terdampak bencana.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalamrumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingindicapai dalam Renja ini adalah :

1. Tersedianya dukungan administrasi perkantoran, sarana prasaranaaparatur serta dokumen – dokumen perencanaan dan evaluasi;
2. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana;
3. Terpenuhinya kebutuhan korban bencana;
4. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampakbencana;

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam penentuaan atau pengambilan bahan pertimbangan pembuatan program dan kegiatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menentukan faktor – faktor yang menjadi rumusan program dan kegiatan sesuai dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian standar pelayanan minimun, pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir. Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 adalah :

1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
   a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
   b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
   d) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
   a) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan erbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
   b) Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
   c) Investigasi Kejadian Kebakaran
   d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
   e) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
e) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
f) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
g) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
h) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
i) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan BPBD tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
BPBD Kota Balikpapan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan rogram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		Balikpapan		**60.600.000.000**	APBD			**66.660.000.000**
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		Balikpapan		**60.600.000.000**	APBD			**66.660.000.000**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	Balikpapan	**76 Nilai**	**48.750.000.000**	APBD		**76 Nilai**	**53.625.000.000**
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	Balikpapan	73 Nilai	10.000.000	APBD		**76 Nilai**	**11.000.000**
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	**11.000.000**
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Balikpapan	175 Orang/bulan	23.500.000.000	APBD		175 Orang/bulan	**25.850.000.000**
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	175 Orang/bulan	23.500.000.000	APBD		175 Orang/bulan	**25.850.000.000**

1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Balikpapan	10 Unit	2.950.000.000	APBD		10 Unit	**3.245.000.000**
1.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Balikpapan	10 Unit	1.100.000.000	APBD		10 Unit	**1.210.000.000**
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Balikpapan	1 Paket	500.000.000	APBD		1 Paket	**550.000.000**
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Balikpapan	100 Orang	500.000.000	APBD		100 Orang	**550.000.000**
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	20 Orang	850.000.000	APBD		20 Orang	**935.000.000**
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Balikpapan	100 %	3.285.000.000	APBD		1 Paket	**3.613.500.000**
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 Paket	20.000.000	APBD		1 Paket	**22.000.000**
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 Paket	40.000.000	APBD		1 Paket	**44.000.000**

1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 Paket	2.300.000.000	APBD		1 Paket	**2.530.000.000**
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	**110.000.000**
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Balikpapan	2 Dokumen	75.000.000	APBD		2 Dokumen	**82.500.000**
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	12 Laporan	50.000.000	APBD		12 Laporan	**55.000.000**
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	20 Laporan	700.000.000	APBD		20 Laporan	**770.000.000**
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Balikpapan	90 %	15.550.000.000	APBD		9 Unit	**17.105.000.000**
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Balikpapan	9 Unit	15.200.000.000	APBD		9 Unit	**16.720.000.000**
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Balikpapan			APBD			

		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Balikpapan	15 Unit	300.000.000	APBD		15 Unit	**330.000.000**
1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Balikpapan	10 Unit	50.000.000	APBD		10 Unit	**55.000.000**
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Balikpapan	100 %	600.000.000	APBD		12 Laporan	**660.000.000**
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Balikpapan	12 Laporan	400.000.000	APBD		12 Laporan	**440.000.000**
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	12 Laporan	200.000.000	APBD		12 Laporan	**220.000.000**
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Balikpapan	1 Unit	2.855.000.000	APBD		1 Unit	**3.140.500.000**
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Balikpapan	1 Unit	555.000.000	APBD		1 Unit	**610.500.000**
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Balikpapan			APBD			

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Balikpapan	1 Unit	1.800.000.000	APBD		1 Unit	**1.980.000.000**
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balikpapan	5 Unit	400.000.000	APBD		5 Unit	**440.000.000**
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balikpapan	12 Unit	100.000.000	APBD		12 Unit	**110.000.000**
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana***	Balikpapan	**92 %**	**2.050.000.000**	APBD		**92 %**	**2.255.000.000**
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana*	Balikpapan	100 %	100.000.000	APBD		250 Orang	**110.000.000**
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Balikpapan	250 Orang	100.000.000	APBD		250 Orang	**110.000.000**
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase CakupanPelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana*	Balikpapan	100 Orang	650.000.000	APBD		100 Orang	**715.000.000**

Rencana Kerja BPBD 2024

1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Balikpapan	100 Orang		APBD		100 Orang	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Balikpapan			APBD			
		Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Balikpapan	7 Dokumen	272.000.000	APBD		7 Dokumen	**299.200.000**
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Balikpapan	2 Kawasan	178.000.000	APBD		2 Kawasan	**195.800.000**
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Balikpapan	4 Dokumen	200.000.000	APBD		4 Dokumen	**220.000.000**
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	Balikpapan	100 %	300.000.000	APBD		100 Orang	**330.000.000**
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Balikpapan	100 Orang	100.000.000	APBD		100 Orang	**110.000.000**
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan	Balikpapan	200 Orang	200.000.000	APBD		200 Orang	**220.000.000**

		Evakuasi Korban Bencana							
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	Balikpapan	5 Laporan	1.000.000.000	APBD		5 Laporan	**1.100.000.000**
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Balikpapan	5 Laporan	135.000.000	APBD		5 Laporan	**148.500.000**
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Balikpapan	5 Dokumen	865.000.000	APBD		5 Dokumen	**951.500.000**
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran***	Balikpapan	**92,5 %**	**9.800.000.000**	APBD		**92,5 %**	**10.780.000.000**
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran*	Balikpapan	12 Dokumen	6.850.000.000	APBD		12 Dokumen	**7.535.000.000**
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Balikpapan	12 Dokumen	5.000.000.000	APBD		12 Dokumen	**5.500.000.000**

1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	365 Laporan	350.000.000	APBD		365 Laporan	**385.000.000**
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Balikpapan	3 Dokumen	100.000.000	APBD		3 Dokumen	**110.000.000**
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Balikpapan	50 Unit	1.200.000.000	APBD		50 Unit	**1.320.000.000**
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Balikpapan	20 Orang	200.000.000	APBD		20 Orang	**220.000.000**
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*	Balikpapan	34 Dokumen	450.000.000	APBD		35 Dokumen	**495.000.000**
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Balikpapan			APBD			**0**

		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Balikpapan	348 Dokumen	200.000.000	APBD		348 Dokumen	**220.000.000**
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Balikpapan	10 Dokumen	250.000.000	APBD		10 Dokumen	**275.000.000**
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran*	Balikpapan	7 Dokumen		APBD		7 Dokumen	**0**
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Balikpapan	7 Dokumen		APBD		7 Dokumen	**0**
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran*	Balikpapan	250 Orang	1.400.000.000	APBD		250 Orang	**1.540.000.000**
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Balikpapan	250 Orang	300.000.000	APBD		250 Orang	**330.000.000**
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah	Balikpapan	3 Dokumen	1.100.000.000	APBD		3 Dokumen	**1.210.000.000**

		Tersedia Dukungan Sapras Damkar							
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Persentase Cakupan Penyelengaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia*	Balikpapan	12 Laporan	1.100.000.000	APBD		12 Laporan	**1.210.000.000**
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Balikpapan	12 Laporan	200.000.000	APBD		12 Laporan	**220.000.000**
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Balikpapan			APBD			**0**
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Balikpapan	100 Unit	900.000.000	APBD		100 Unit	**990.000.000**
TOTAL PAGU					60.600.000.000				**66.660.000.000**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah disusun berdasarkan tabel sebagai berikut:

NO	Rencana Kerja	Sumber Pendananaan
1	**IKM Internal Perangkat Daerah**	APBD
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	APBD
3	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	APBD
4	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	APBD
5	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	APBD
6	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD
7	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD
8	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD
9	**Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana**	APBD
10	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	APBD
11	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	APBD
12	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	APBD
13	**Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran**	APBD
14	Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	APBD
15	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	APBD
16	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	APBD
17	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	APBD
18	Persentase Cakupan Penyelengaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	APBD

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana DaerahKota Balikpapan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalamperencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam kurun waktu tahun 2024, sehingga upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di

Balikpapan, 10 Agustus 2023

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Balikpapan

USMAN ALI

2024

Laporan
Rencana Kerja (RENJA)

Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Balikpapan

SATPOLPP_BALIKPAPAN
SATPOL PP BALIKPAPAN
SATPOLPP_BPN
+62 811 5351 111

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2024 telah dapat disusun dengan baik, dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini tidaklah lepas dari Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Wali Kota Balikpapan yang terpilih Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan.

Berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas agar lebih terarah pada tujuan dan sasaran yang telah direncanakan, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam playanan dan pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.

Kami menyadari dalam penyusunan hasil Renja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian hasil penyusunan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan agar tahun mendatang pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Balikpapan, 10 Agustus 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BALIKPAPAN

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BOEDI LILIONO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KERJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2022

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

2.4 Revie terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARANPERANGT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

5.2 Kaidah Kidah Pelaksanan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan merupakan dokumen Perencanaan Kerja Periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan serta penggunaan Anggaran Keuangan Satuan polisi Pamong Praja Kota BalikpapanDalam Periode Tahun Anggaran 2023, juga sebagai implementasi dan penjabaran dari perencanaan strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun .

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode 1 tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.

2. RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
3. RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Satpol PP Tahun 2024 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ;
3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;

5 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Satuan Polis Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan Satpol PP dalam rangka mewujudkan sinegritas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah, serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, penyelengaraan pemerintah di Bidang linmas, Penegakan, Tratibum, yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2021 dan berpedoman pada Renstra Satpol PP Tahun 2016-2021.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2023 ini adalah untuk menjadi acuan sebagai acuan dalam penyusunan program proritas dan indikasi kegiatan program dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2024.

BAB I PENDAHULUAN,

I.1 Latar Belakang :

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3.Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4.Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33,

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

Pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;

c. Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Strategis Satua Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, "*Menyelenggarakan urusan menegakan perda dan perwali, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat*"

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun, akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Kinerja Pemerintah Dalam rangka pencapaianm visi misi walikota terpilih dan sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tahun 2023, menjalankan 2 (dua) urusan, 2 (dua) Program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan total pagu tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 43.269.232.992,00

Dengan table sebagai berikut :

Table TC 29

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RKPD

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Satpol PP : 28
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP : 77

No	Sasaran	Program / Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
										I		II													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5 X100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	IKM internal Perangkat Daerah	81	**134.058.268.845**		**26.859.788.736**	**78**	**29.198.724.053**		**6.423.978.980**		**8.968.494.292**	**0**	**15.392.473.272**	**0%**	**52,72%**	**0**	**42.252.262.008**	**0**	**31,52 %**	**Satpol PP**	

	Satpol PP																				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**117.573.268.845**		**24.463.871.358**	**78**	**26.328.120.857**	**0**	**5.645.613.687**		**8.431.158.746**	**0**	**14.076.772.433**	**0%**	**53,47%**	**0**	**38.540.643.791**	**0%**	**32,78 %**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				24.463.871.358	174	26.328.120.857	0	5.645.613.687		8.431.158.746	0	14.076.772.433	0%	53,47%	0	38.540.643.791				Realisasi diakhir tahun
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM layanan adminsitrasi umum perangkat daerah**		**4.540.000.000**		**522.852.482**	**77**	**631.180.200**	**0**	**154.663.126**		**158.962.379**	**0**	**313.625.505**	**0%**	**49,69%**	**0**	**836.477.987**	**0%**	**18,42 %**		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				17.047.600	6	24.878.800	3	2.800.000	0	21.356.900	3	24.156.900	50 %	97,10%	3	41.204.500				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yag disediakan				16.650.000	10	24.893.000	4	1.955.000	1	6.730.000	5	8.685.000	50 %	34,89%	5	25.335.000				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				225.711.850	3	294.838.500	8	78.099.500	0	44.750.200	8	122.849.700	26 7%	41,67%	8	348.561.550				Perubahan target pada DPA setelah asistensi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan				44.896.750	7	86.569.900	1	8.107.200	1	21.018.845	2	29.126.045	29 %	33,64%	2	74.022.795				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				218.546.282	24	200.000.000	12	63.701.426	7	65.106.434	19	128.807.860	79 %	64,40%	19	347.354.142				

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daearh**		**695.000.000**		**19.717.500**	**100 %**	**30.000.000**	**0%**	**27.972.000**		**-**	**0%**	**27.972.000,00**	**0%**	**93,24%**	**0%**	**47.689.500**	**0%**	**6,86%**		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				19.717.500	2	30.000.000	1	27.972.000	0	-	1	27.972.000	50 %	93,24%	1	47.689.500				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**3.430.000.000**		**595.714.099**	**100 %**	**651.922.996**	**0%**	**126.561.093**		**161.520.354**	**0%**	**288.081.447**	**0%**	**44,19%**	**0%**	**883.795.546**	**0%**	**25,77 %**		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				172.582.470	4	200.000.000	4	44.735.740	0	43.485.317	4	88.221.057	10 0%	44,11%	4	260.803.527				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				423.131.629	12	451.922.996	12	81.825.353	0	118.035.037	12	199.860.390	10 0%	44,22%	12	622.992.019				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**6.875.000.000**		**1.257.633.297**	**100 %**	**1.557.500.000**	**0%**	**469.169.074**		**216.852.813**	**0%**	**686.021.887**	**0%**	**44,05%**	**0%**	**1.943.655.184**	**0%**	**28,27 %**		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				1.135.125.782	59	1.232.500.000	52	469.169.074	0	132.854.713	52	602.023.787	88 %	48,85%	52	1.737.149.569				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				49.229.500	3	50.000.000	16	-	0	9.050.000	16	9.050.000	53 3%	18,10%	16	58.279.500				

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehablitasi				73.278.015	1	275.000.000	0	-	1	74.948.100	1	74.948.100	100%	27,25%	1	148.226.115				
	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketretiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan yarakat Yang Profesional Dan Humanis	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																				
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda**	**15 %**	**29.411.124.512**		**3.481.278.000**	**13,5%**	**4.670.516.000**		**493.463.668**		**977.852.902**	**0%**	**1.471.316.570**	**0,00%**	**31,50%**	**0%**	**4.952.594.570**	**0%**	**16,84 %**		
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat**	**100%**	**24.866.124.512**		**3.375.265.500**	**100 %**	**4.227.516.000**	**85,58 %**	**398.863.668**		**933.139.002**	**85,58 %**	**1.332.002.670**	85,58 %	**31,51%**	**85,58 %**	**4.707.268.170**	**86 %**	**18,93 %**		
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan				291.125.000	365	647.575.000	333	118.188.000	330	172.877.200	663	291.065.200	182%	44,95%	663	582.190.200				pelaksanaan patroli dilakukan oleh masing-masing regu dan jumlah kasus sesuai

		Pengamanan, dan Pengawalan																				dengan pelaksanaan patroli yang dilaporkan dilapangan
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa				2.244.940.500	144	1.635.476.000	6	264.889.668	4	459.488.002	10	724.377.670	7%	44,29%	10	2.969.318.170				
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum				792.000.000	12	1.740.750.000	2	4.750.000	2	198.056.000	4	202.806.000	33 %	11,65%	4	994.806.000				

		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				47.200.000	233	203.715.000		11.036.000	60	102.717.800	60	113.753.800	26 %	55,84%	60	160.953.800				
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Persentase Penegakan Perda**	**98, 50 %**	**4.295.000.000**		**92.328.500**	**100 %**	**373.000.000**	**0%**	**90.600.000**		**40.705.000**	**0%**	**131.305.000**	**0%**	**35,20%**	**0%**	**223.633.500**	**0%**	**5,21%**		
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha				27.995.500	156	130.000.000	0	-	26	4.001.000	26	4.001.000	17 %	3,08%	26	31.996.500				
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota					240	168.000.000	80	81.984.000	192	31.267.000	272	113.251.000	113%	67,41%	272	113.251.000				
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran				64.333.000	10	75.000.000	1	8.616.000	2	5.437.000	3	14.053.000	30 %	18,74%	3	78.386.000				

		Peraturan Bupati/Wali Kota	peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP																		
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	**Rasio PPNS Kota Balikpapan**	**33, 33 %**	**250.000.000**		**13.684.000**	**33 %**	**70.000.000**	**0%**	**4.000.000**		**4.008.900**	**0%**	**8.008.900**	**0%**	**11,44%**	**0**	**21.692.900**	**0%**	**8,68%**		
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada				13.684.000	1	70.000.000	1	4.000.000	1	4.008.900	2	8.008.900	200%	11,44%	2	21.692.900				
Rata-rata capaian kinerja (%)													**71%**		**43,51%**				**9%**		**19%**		
Predikat Kinerja													**Sedang**		**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN													**98%**		**40,87%**								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN													**Sangat Tinggi**		**Sangat Rendah**								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN													**11%**		**45,35%**				**10,70%**		**18,11%**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN													**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**0%**	**42,11%**			**0,00%**	**24,18%**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

3.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Wilayah Kota Balikpapan terdiri dari 6 kecamatan dan 34 kelurahan, memiliki sumber daya alam dengan kondisi penduduk yang beraneka ragam dan sangat memungkin menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Perda Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai penegakan perda Kota Balikpapan.

Dalam Lampiran peraturan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Bidang Dalam negeri di kabupaten kota disebut bahwa pelayanan standar minimum dan Kota adalah Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu, maka langkah yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah :

a. Melakukan monitoring terhadap gangguan trantibum dengan instansi terkait dijalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang ketertiban, ketentraman dan keindahan.
d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui piket pelayanan masyarakat/call canter.
e. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan instansi terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah;
f. Monitoring dan evaluasi

Untuk dapat melakukan analis kinerja pelayanan perangkat daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan maka perlu disajikan dalam bentuk format sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021

No	Indikator	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Penegakan Produk Hukum Daerah	Cakupan Penegakan perda dan perkada kota balikpapan		80	81,63	83,63	85,11	86,96	81	90,6	90	95,5	114,95	
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Ketretiban Umumm Dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan Penyelenggraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		64,1	60.26	62,82	60,26	58,97	65,5	75,3	75	85,5	78,67	
3	Meningkatkan Penyelenggaraan perlindungan masyarakat	Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat		5,26	6.57	5,26	6,57	7,88	7,25	8,9	9	12,54	29,33	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas fungsi dan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan permasalahan perangkat, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggraan tugas dan fungsi perangkat daerah digambarkan sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Belum idealnya sarana dan prasarana	1.	Belum ada Kejelasan Kepemilikan Aset Gedung Kantor	Keterbatasan Anggaran	
		2.	Keterbatasan Kendaraan Operasional		
		3.	Keterbatasan Perlengkapan Operasional		
2	Belum idealnya personel Satpol PP	1.	Jumlah personel Satpol PP yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk	1.	Kurangnya Sosialisasi Kinerja Satpol PP
		2.	Belum Terpenuhinya Kompetensi dan Keahlian Personel Satpol PP	2.	Adanya Moratorium pegawai
		3.	Kurangnya Kepercayaannya Terhadap Satpol PP	3.	Jumlah Personil Satpol PP
3	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Linmas Dalam Membantu Penyelenggaraan Trantibum	1.	Jumlah personel Linmas	Keterbatasan Anggaran Linmas	
		2.	Belum Terpenuhinya Kompetensi dan Keahlian Personel Linmas		
		3.	Kurangnya Sarana dan Prasaran yang Mendukung Tugas Kelinmasan		
4	Belum maksimalnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1.	Kurangnya Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (Sosialisasi) Kepada Masyarakat terkait Perda dan Perkada	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah	
		2.	Kurangnya Personel Satpol PP dan PPNS Selaku Penegak Perda		
		3.	Kurangnya Sarana dan Prasaran yang Mendukung Tugas Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (Sosialisasi) Kepada Masyarakat terkait Perda dan Perkada		
5	Belum optimalnya penegakan perda dan perkada	1.	Terjadinya Gangguan Trantibum	1.	Tidak Mudahnya Merubah Prilaku Masyarakat
		2.	Belum Terlaksananyan SOP		
		3.	Kurangnya Sinergitas dan Koordinasi Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	2.	Lingkup Lingkungan Wilayah/Masyarakat
		4.	Adanya Kejadian Luar Biasa (Pandemi) Sehingga Kegiatan Penegakan Perda dan Perkada	3.	Kurang pemahaman terhadap pandemi covid

			Terhambat		
6	Terbatasnya kewenangan Satpol PP dalam penegakan perda dan perkada	Bahwa Personel Satpol PP Tidak Secara Otomatis Menjadi PPNS, Sehingga Proses Penyidikan Sampai dengan ke Persidangan, Terhambat Dikeranakan Tidak Adanya Kewenangan Personel Pol PP yang Bukan Merangkap Sebagai PPNS		Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	
7	Bertambahnya beban cakupan penyelenggaraan trantibum terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)	1.	Adanya Penambahan Mobilisasi Masyarakat Pendatang	Adanya Keterbatasan Lahan dan Fasilitas	

Isu isu startegis yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

No	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Belum ada Kejelasan Kepemilikan Aset Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana yang ada memang sudah tidak layak pakai namun masih bisa dimanfaatkan / dipergunakan.
2	Keterbatasan Kendaraan Operasional	Pengadaan Kendaraan Operasional
3	Keterbatasan Perlengkapan Operasional	Pengadaan Peralatan Operasional
4	Jumlah personel Satpol PP yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk	Penambahan jumlah personil setiap tahun
5	Belum Terpenuhinya Kompetensi dan Keahlian Personel Satpol PP	SDM yang ada dapat melaksana-kan tugas dan fungsinya walau pun latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan.
6	Adanya Stigma Negatif Masyarakat Terhadap Satpol PP	Kurangnya Penge-tahuan tentang Produk Hukum Daerah.
7	Jumlah personel Linmas	Penambahan jumlah personil linmas masing masing kelurahan
8	Kurangnya Sarana dan Prasaran yang Mendukung Tugas Kelinmasan	Penambahan pengadaan sarana dan prasarana linmas
9	Belum Terpenuhinya Kompetensi dan Keahlian Personel Linmas	Pelatihan peningkatan SDm linmas
10	Kurangnya Personel Satpol PP dan PPNS Selaku Penegak Perda	Penambahan personil satpol PP dan PPNS

11	Kurangnya Sarana dan Prasaran yang Mendukung Tugas Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (Sosialisasi) Kepada Masyarakat terkait Perda dan Perkada	Meningkatkan pendukung sarana dan prasarana
12	Terjadinya Gangguan Trantibum	Melakukan Sosialisasi Ke masyarakat dalam kesadaran trantibum
13	Belum Terlaksananyan SOP	Membuat SOP
15	Adanya Kejadian Luar Biasa (Pandemi) Sehingga Kegiatan Penegakan Perda dan Perkada Terhambat	Kesadaran Masyarakat dalam standar protokol kesehatan

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, berkembangnya teknoknologi informasi, keterbatasan anggaran dalam mendukung program, meningkatnya jumlah penduduk Kota Balikpapan sebagai penyanggah Ibu Kota Negara (IKN).

2.4. **Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Renstra 2021-2026)						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu indikatif (Rp. 000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**			**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana(RP.000)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12
1	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	SATPOL PP	IKM Internal Perangkat Daerah	**100%**	**27.798.196.508**	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	SATPOL PP	IKM Internal Perangkat Daerah			**100%**	**26.124.022.112**	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		22.648.915.212	
								Keluaran	:	Jumlah jenis layanan administrasi	**3 Jenis**		
								(Output)		Keuangan Perangkat Daerah			
								Hasil	:	IKM layanan Administrasi	**80 Nilai**		
								(OutCome)		Keuangan perangkat daerah			
						Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah		Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		495.443.600	

								Keluaran (Output)	:	Jumlah jenias layanan administrasi umum perangkat daerah	**5 Jenis**		
								Hasil (OutCome)	:	IKM layanan Administrasi umum perangkat daerah	**75%**		
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		IKM Internal Perangkat Daerah			100%		
								Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		19.854.000	
								Keluaran (Output)	:	jumlah jenis layanan pengadaan BMD	2 Jenis		
								Hasil (OutCome)	:	IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		IKM Internal Perangkat Daerah					
								Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		599.924.396	

								Keluaran	:	Jumlah penyediaan jasa penunjang	2 Jenis		
								(Output)		pemerintah daerah			
								Hasil	:	IKM layanan pengadaan barang milik daerah	100%		
								(OutCome)		penunjang urusan pemerintah daerah			
						Pemeliharaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		IKM Internal Perangkat Daerah					
								Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		1.074.250.000	
								Keluaran	:	jumlah jenis layanan pengadaan BMD	3 Jenis		
								(Output)					
								Hasil	:	IKM layanan pengadaan barang milik daerah	100%		
								(OutCome)		penunjang urusan pemerintah daerah			
2	**Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	SAT POL PP	Persentase Penegakan Perda	**14,00 %**	2.979.663.300	**Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	SATPOL PP	Persentase Penegakan Perda			**14,00%**		
						Penangangan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		2.865.671.100	

								Keluaran	:	Angka pelanggaran perda/perkada	4700 pelanggaran		
								(Output)		perlanggaran perda/perkada yang diselesaikan	4250 Pelanggaran		
								Hasil	:	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban	100%		
								(OutCome)		umum dan ketentraman masyarakat			
						Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SATPOL PP	Persentase penurunan Kasus pelanggarab Perda			**14,00%**	99.992.200	
								Masukan	:	Dana yang dibutuhkan			
								Keluaran	:	Jumlah pelanggaran perda	26 Perda		
								(Output)		jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan	16 Perda		
								Hasil	:	persentase penegakan perda	97,60%		
								(OutCome)					
						Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	SATPOL PP	Persentase penurunan kasus pelanggara			14%	14.000.000	

								n perda					
								Masukan	:	Dana yang dibutuhkan			
								Keluaran	:	Jumlah PPNS Kota Balikpapan	16 Orang		
								(Output)					
								Hasil	:	Rasio PPNS Kota Balikpapan	33,33%		
								(OutCome)					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. sejak diberlakukannya undang undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan satuan polisi pamong praja

Dengan demikian Polisi Pamong Praja mempunyai 2 peran yaitu :

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat

   Salah satuarah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah nantinya adalah penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sertaperlindunganmasyarakat.

   Kemudiaan tantangan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang kedepan akan semakin berat diantaranya kemungkinan terjadinya konflik horizontal maupun konflik vertikal serta berbagai bentuk gangguan lainnya yang mengancam kenyamanan masyarakat dan kekayaan daerah dan harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan profesio

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang.

Tujuan

Tujuan merupakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelindungan masyarakat yang profesional dan humanis, semua program dan kegiatan yang dicanangkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas;
2. Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap aturan/produk hukum yang berlaku;
3. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum;
4. Meningkatnya perasaan aman dan nyaman di lingkungan masyarakat;
5. Meningkatnya Koordinasi untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas;
6. Menciptakan Kondisi yang solid di antara Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat ;
7. Menciptakan profesionalisme dan humanis Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat agar mempunyai kompetensi dan inovasi dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Sasaran

Sasaran adalah terwujudnya penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang professional dan humanis

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengelolaan barang, pengelolaan keuangan dan pelaporan, administrasi surat-menyurat dan kebutuhan operasional kantor yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Terlaksananya Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum terhadap Masyarakat;
3. Terlaksananya Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah yang berlaku
4. Terlaksananya Pelindungan Masyarakat secara optimal;
5. Terlaksananya Orientasi dan koordinasi yang baik dengan instansi/lembaga/aparat terkait;
6. Terlaksananya kerjasama dan disiplin yang tinggi di antara personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat ;
7. Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan keteriban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang professional dan humanis.

Table TC.25
RENCANA STARTEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BALIKPAPAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Satpol PP	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Satpol PP	27	28	29	30	31
2		Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	75	77	79	81	83

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan memiliki 2 sasaran startegis yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Satpol PP
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi pamong praja sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka mencapai tujuan

Untuk melaksanakan visi dan misi Walikota Balikpapan dan sesuai tujuan dan sasaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja **Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan**

RENJA TAHUN 2024		
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	**INDIKATOR**	**KETERANGAN**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**IKM internal Perangkat Daerah**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM layanan adminsitrasi umum perangkat daerah**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yag disediakan	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daearh**	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehablitasi	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda**	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat**	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Persentase Penegakan Perda**	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan	

	peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Rasio PPNS Kota Balikpapan**	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada	

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**43.269.232.992,00**							**40.423.605.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**43.269.232.992,00**							**40.423.605.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**43.269.232.992,00**							**40.423.605.000,00**	
1,	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**-**			**79 Nilai**	**32.752.439.192,00**						**-**	**34.250.000.000,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			86 Nilai	26.986.323.878,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	30.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				170 Orang/bulan	26.986.323.878,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		30.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			86 Nilai	399.791.900,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	399.791.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			81 Nilai	869.549.800,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	775.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	129.982.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	74.989.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	309.577.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		375.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	90.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	265.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	1.619.097.350,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	1.619.097.350,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	790.975.600,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	825.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	273.735.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	517.240.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	2.086.700.664,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	2.200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				54 Unit	1.784.454.664,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		2.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	102.289.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	199.956.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2,	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda***	**-**			**13 %**	**10.516.793.800,00**						**-**	**6.173.605.000,00**	

	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat*	-			100 Persen	9.519.023.900,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	5.620.845.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	1.339.125.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				233 Orang	233.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				365 laporan	698.664.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		3.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				365 Laporan	7.248.234.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		2.120.845.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Penegakan Perda*	-			100 Persen	972.192.300,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	502.760.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	103.399.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		105.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				10 Laporan	187.495.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	681.297.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		97.760.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Rasio PPNS Kota Balikpapan*	-			4/12 %	25.577.600,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS													
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	25.577.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	JUMLAH							**43.269.232.992,00**							**40.423.605.000,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada tahun 2024.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.

Pada tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan akan melaksanakan 2 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN 2023	
			Target	Rp.
3	4	5	9	10
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota	0,82	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Satpol PP	28	**29.877.257.980**
1 05 02	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	IKM Internal Perangkat Daerah	**78**	**25.346.741.980**

1	**05**	**02**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82	**22.726.138.784**
1	05	02	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	174	22.726.138.784
1	**05**	**02**	**2**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**77**	**581.180.200**
1	05	02	2,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	24.878.800
1	05	02	2,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	24.893.000
1	05	02	2,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangDisediakan	3	294.838.500
1	05	02	2,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	86.569.900
1	05	02	2,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD	24	150.000.000
1	**05**	**02**	**2**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**30.000.000**
1	05	02	2,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan	2	30.000.000
1	**05**	**02**	**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**651.922.996**
1	05	02	2,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	200.000.000
1	05	02	2,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yangDisediakan	12	451.922.996
1	**05**	**02**	**2**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.357.500.000**

1	05	02	2,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59	1.232.500.000
1	05	02	2,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara	3	50.000.000
1	05	02	2,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	75.000.000
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	13,5%	**4.530.516.000**
1	**05**	**02**	**2**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketentraman	**100%**	**4.227.516.000**
1	05	02	2	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	365	647.575.000
1	05	02	2	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	144	1.635.476.000
1	05	02	2	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	1.740.750.000

1	05	02	2	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	233 Orang	203.715.000
1	**05**	**02**	**2**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Persentase Penegakan Perda	**100%**	**273.000.000**
1	05	02	2	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	156	30.000.000
1	05	02	2	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	240	168.000.000
1	05	02	2	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10	75.000.000
1	**05**	**02**	**2**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Rasio PPNS Kota Balikpapan	**33%**	**30.000.000**
1	05	02	2	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	30.000.000

GRAFIK DAN PAGU TAHUN 2024

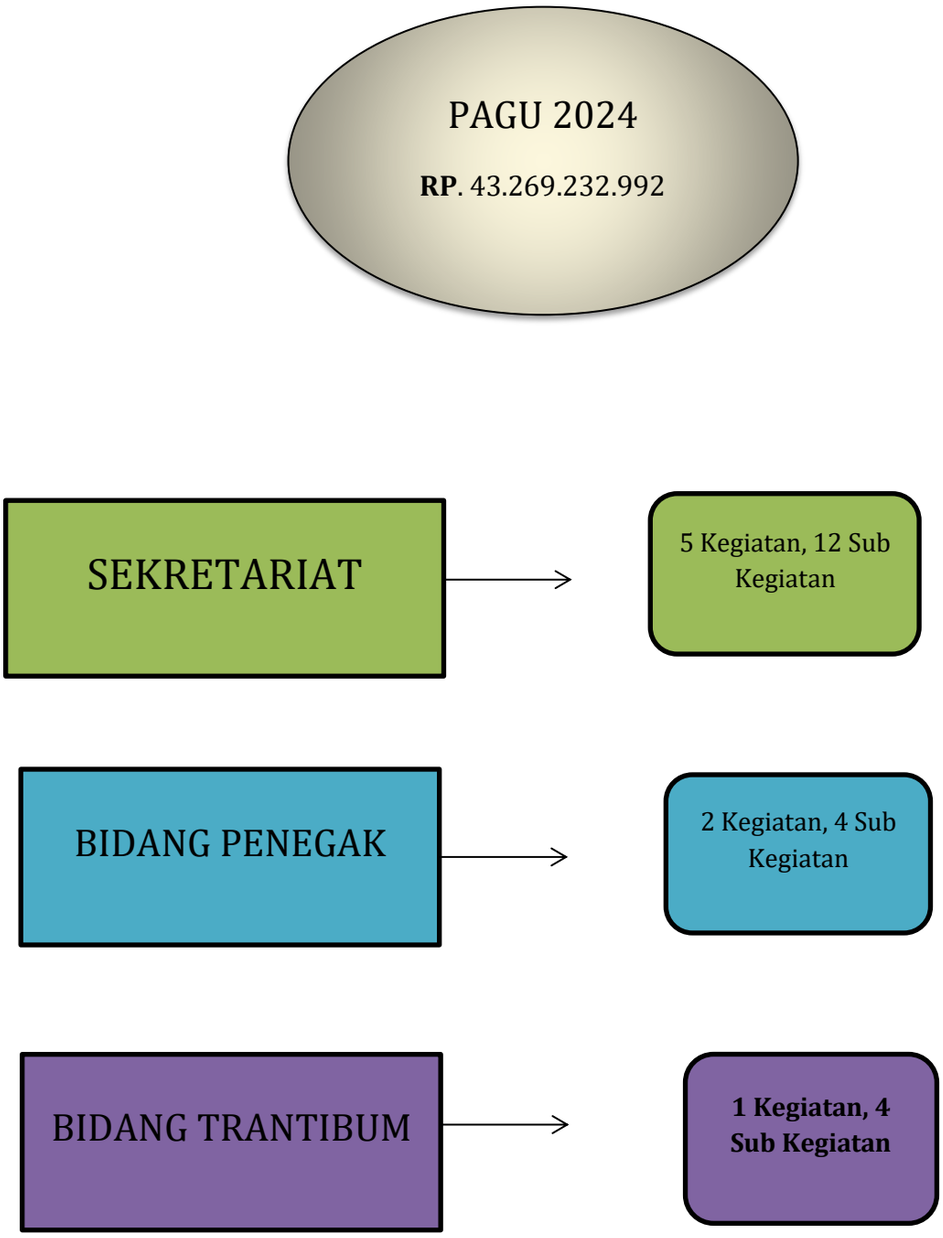

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA PERUBAHAN

Dokumen Renja OPD disusun disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dankegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan danprogduk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunanyang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas,transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisas antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Satpol PP serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memper oleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatifdankoordinatif untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Kota Balikpapan.

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare tahun 2020 sebagai berikut di dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2023 memerlukan waktu yang cukup panjang dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di dalam penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2024 ini masih belum sempurna, sehingga dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Propinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Dinas).

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan unntuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, yaitu dengan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Perlu menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif melaksanakan koodinasi dengan instansi terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
e. Dalam menerapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan ammanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2023 ini kami susun sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024

DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kita sehingga sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dan memuat rencana kegiatan pembangunan melalui Dinas Sosial di Kota Balikpapan Tahun 2024

RENJA Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2024, dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu – isu yang dapat segera ditangani dalam upaya menjabarkan Visi, Misi dan program kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini. Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud Dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIALKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial ... 13
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD 14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 25
3.3 Program dan Kegiatan 26

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 33

BAB V Inovasi Perangat Daerah 35

BAB VI Penutup 46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Balikpapan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja tersebut adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Balikpapan dan berorientasi pada hasil yang akan

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024 dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak Corona Virus Disease 19 baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD.

Dinas Sosial Kota Balikpapan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.1.2.Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja tersebut dapat dikerjakan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan yang disesuaikan.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program / kegiatan, target keluaran kegiatan dan total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan merupakan dokumen resmi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana anggaran dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja
   - Orientasi mengenai Renja
   - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
   - Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

   Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
   - Pengolahan data dan informasi;
   - Analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial Kota Balikpapan;
   - Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan;
   - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Balikpapan
   - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
   - Perumusan tujuan dan sasaran
   - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan;
- Penyempurnaan rancangan kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan;
- Pembahasan di forum Perangkat; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:

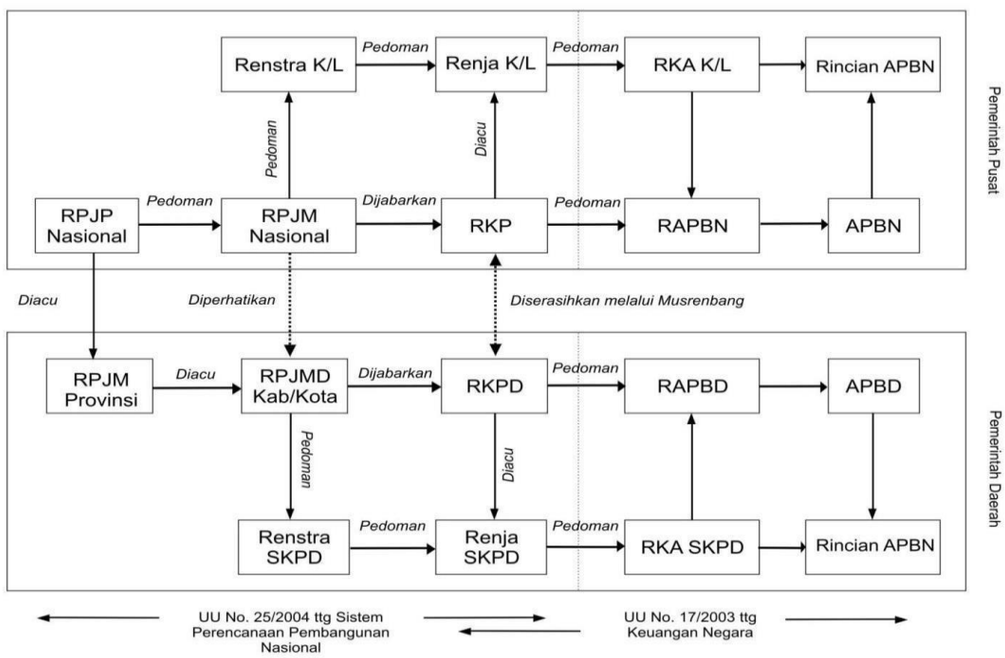

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem

perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

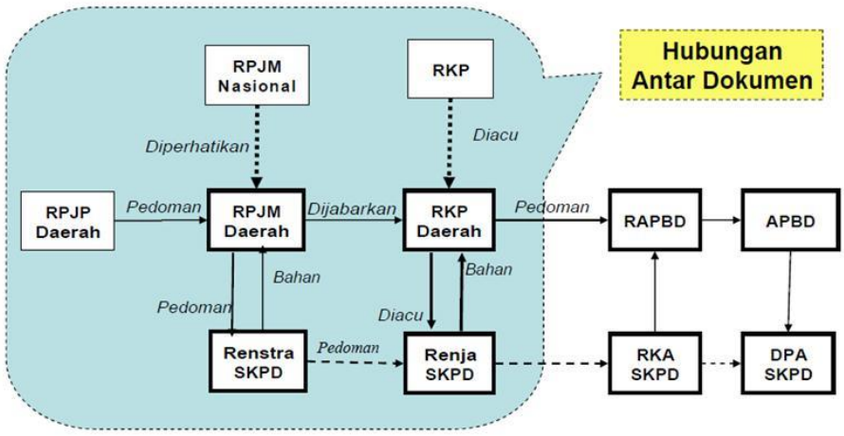

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rancanagan Awal RENJA Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2024 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang menjiwai keseluruhan aktivitas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja

Renja Dinas Sosial tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing- masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan serta untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2022, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai perwujudan terselenggaranya pemerintah yang baik

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan tahunan Dinas Sosialberdasarkan Renstra SKPD
2. Menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabeldalam kurun waktu satu tahun
3. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial

4. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIALKOTA BALIKPAPANTAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 terhadap capaian renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2022 terhadap target di Tahun 2023.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam tabel T-C.29 di bawah ini :

TABEL T - C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2022 (n-2)			Target Kegiatan Renja PD Berjalan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
A	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial PMKS yang Terpenuhi	81.81	-	77.77	43.43	55.84	78.94	78.94	100
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	64.18	-	60.83	12.05	19.81	61.06	61.06	100
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	94.05	-	90.25	70.22	77.81	91.63	91.63	100
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PSKS YANG MENDAPAT PEMBINAAN	96.68	-	80	83.65	104.56	86.66	86.66	100
3	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan UGB dan PUB yang Terminitor	100	-	100	100	100.00	100	100	100
4	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Mendapat Pembinaan	84	-	70	84	120.00	70	70	100

TABEL T - C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022

C	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN YANG MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	92.68	-	82.92	81.46	98.24	85.36	85.36	100
5	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Keluarga Miskin yang Terdaftar di DTKS	88.65	-	97.59	17.2	17.62	95	95	100
D	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH	85	-	81	100	123.46	92	92	100
6	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten / Kota	85	-	81	81	100.00	82	82	100
7	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana	67	-	61	61	100.00	62	62	100
E	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	87	-	79	79	100.00	80	80	100
8	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Persentase TMP Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	60	-	52	52	100.00	55	55	100
F	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INTERNAL (IKM) INTERNAL PERANGKAT DAERAH	74	-	70	93	132.86	71	71	100
9	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50	-	50	92	184.00	50	50	100
10	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	-	70	92.71	132.44	75	75	100
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	-	70	95	135.71	75	75	100
12	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	-	70	92	131.43	75	75	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kota Balikpapan sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolok ukur yangjelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja. Adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKU) sebagai berikut :

1. Persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial
2. Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola
3. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Sosial Kota Balikpapan diukur berdasarkan Tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

TABEL T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA BALIKAPAPAN

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				
		N-2 (2022)	N-1 (2023)	N	N+1 (2025)	N-2 (2022)	N-1 (2023)	N	N+1 (2025)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial	60	62	64	65	81.03				
2	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	79	80	82	85	79				
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27	28	29	30	30.29				

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Ketercapaian dan ketidaktercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Balikpapan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

1. Belum Optimalnya Pemenuhan kebutuhan dasar bagi khususnya PMKS terlantar sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM)
2. Sampai dengan saat ini Dinas Sosial Kota Balikpapan masih belum memiliki Pusat Rehabilitasi Sosial Terpadu
3. Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam penanganan PMKS
4. Belum optimalnya peran serta kelembagaan dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5. Bantuan Sosial yang belum tepat sasaran
6. Keterbatasan pendanaan pemerintah sehingga seluruh program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal
7. Masih lemahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam penanganan PMKS

Seluruh permasalahan dan tantangan ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada serta memanfaatkan peluang yang tersedia, misalnya :

1. Meningkatkan peran serta lembaga CSR dan lembaga sosial lainnya
2. Meningkatnya Peran Aktif PSKS dalam menanggulangi PMKS
3. Adanya regulasi yang bersifat komprehensif di daerah tentang kesejahteraan sosial
4. Keterlibatan aktif seluruh instansi pemerintah dan lembaga masyarakat sebagai mitra dalam memecahkan permasalahan sosial, khususnya di Kota Balikpapan

5. Meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjaring informasi seluas-luasnya dari berbagai sumber terkait penanganan masalah di Bidang Sosial;
6. Adanya kesempatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan lain-lain yang disediakan oleh berbagai instansi dan organisasi masyarakat.
7. Tersedianya dana-dana tambahan yang bersumber dari level pemerintahan yang lebih tinggi.

Peluang-peluang ini perlu diberdayakan agar program/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi secara optimal. Hal ini telah diupayakan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan sepanjang Tahun 2022. Terbukti dengan terselenggaranya beberapa kegiatan hingga tingkat capaian 100 %. Kondisi ini dapat dicapai berkat koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan di samping kerja keras para staf Dinas Sosial untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada. Kondisi ini perlu terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, agar kinerja yang ditargetkan dapat dipenuhi semaksimal mungkin.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Sosial kota Balikpapan kemudian dibandingkan dengan rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak baik terpisah dalam tahapan penyusunan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kajian Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA- OPD).

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kota Balikpapan, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial yaitu : ”***Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman“.*** Dalam Tabel T-C.31, review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Balikpapan dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL T-C.31

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Keterangan
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
I	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Balikpapan**	**PERSENTASE PSKS YANG MENDAPAT PEMBINAAN**	**persen**	**90**	**1,589,821,335**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Balikpapan**	**PERSENTASE PSKS YANG MENDAPAT PEMBINAAN**	**persen**	**90**	**1,394,500,000**	
A	**Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase Pelaksanaan UGB dan PUB yang Terminitor**	**persen**	**100**	**793,001,335**	**Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase Pelaksanaan UGB dan PUB yang Terminitor**	**persen**	**100**	**500,000,000**	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	dokumen	12	793,001,335	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	dokumen	12	500,000,000	Pemberian Hibah Untuk Lembaga : 1. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Balikpapan 2. Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Kota Balikpapan 3. Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Balikpapan
B	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase PSKS yang Mendapat Pembinaan**	**persen**	**80**	**796,820,000**	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase PSKS yang Mendapat Pembinaan**	**persen**	**80**	**894,500,000**	
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	34	667,820,000	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	34	753,000,000	Transport kepada 34 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) @ Rp. 1.500.000 / bulan dan untuk Kegiatan Operasional PSKS lainnya
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	6	108,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	6	121,500,000	Transport kepada 6 orang TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) @ 1.500.000 / bulan
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten / kota	keluarga	40	21,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten / kota	keluarga	40	20,000,000	Penguatan peranan keluarga pioneer dalam penanganan PMKS di masyarakat

II	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Balikpapan**	**Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial PMKS yang Terpenuhi**	**persen**	**80**	**1,678,497,027**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Balikpapan**	**Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial PMKS yang Terpenuhi**	**persen**	**80**	**3,045,000,000**	
C	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Balikpapan**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti**	**orang**	**62.03**	**1,018,922,850**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Balikpapan**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti**	**orang**	**62.03**	**1,840,000,000**	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai denga standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	600	584,060,000	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai denga standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	600	1,300,000,000	1. Pemberian bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas berat
6	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	25	57,845,000	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	25	70,000,000	Penyediaan sandang di asrama anak penyandang disabilitas, RPSA, RPLUT dan LPKS berupa pempers, pakaian dalam dll
7	Penyediaan Alat Bantu	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	orang	30	34,437,850	Penyediaan Alat Bantu	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	orang	30	350,000,000	Pembelian kaki palsu dan tangan palsu bagi penyandang disabilitas, kursi roda bagi lansia terlantar
8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten / kota	orang	2	-	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten / kota	orang	2	20,000,000	Reunifikasi bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan LU terlantar ke keluarga mereka
9	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	10	170,900,000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	10	20,000,000	Monitoring / evaluasi penyandang disabilitas ke Dinas sosial/UPTD/LKS/ Keluarga
10	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balikpapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	600	171,680,000	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balikpapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	600	80,000,000	Pemberian bantuan hibah kepada lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Balikpapan

D	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Balikpapan**	**Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**persen**	**92.44**	**659,574,177**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Balikpapan**	**Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**persen**	**92.44**	**1,205,000,000**	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	270	245,600,000	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	270	340,000,000	Penyediaan permakanan bagi Orang Terlantar (OT), Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Penampungan
12	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20	18,400,000	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20	25,000,000	Penyediaan sandang bagi OT, ODGJ di RPTC
13	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balikpapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	270	16,574,177	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balikpapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	270	20,000,000	Pemberian bimbingan mental, fisik dan spiritual kepada PMKS yang ditampung di RPTC
14	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Balikpapan	Jumlah Peserta Dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20	44,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Balikpapan	Jumlah Peserta Dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20	35,000,000	Sosialisasi / pemberian motivasi kepada keluarga ODGJ serta uang transport bagi keluarga ODGJ ke tempat kegiatan
15	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	28	21,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	28	25,000,000	Reunifikasi / pengembalian ke daerah asal bagi PMKS terlantar
16	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	112	84,000,000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	112	150,000,000	Pendampingan / Pengantaran ODGJ ke RSJ /balai / loka / daerah asal
17	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	30	200,000,000	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	30	520,000,000	Tindakan perawatan kesehatan bagi PMKS terlantar di RSUD/RSKD/RSJ dan pemulangan OT ke daerah asal
18	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	dokumen	12	30,000,000	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	dokumen	12	90,000,000	Pemulasaran jenasah terlantar melalui yayasan Kasimo

III	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Balikpapan**	**PERSENTASE ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN YANG MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**persen**	**87.8**	**1,702,481,868**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Balikpapan**	**PERSENTASE ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN YANG MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**persen**	**87.8**	**1,803,500,000**	
E	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase Keluarga Miskin yang Terdaftar di DTKS**	**persen**	**93**	**1,702,481,868**	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase Keluarga Miskin yang Terdaftar di DTKS**	**persen**	**93**	**1,803,500,000**	
19	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	54885	50,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	54885	150,000,000	Pembuatan aplikasi Pengelolaan PMKS
20	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	keluarga	30000	1,150,000,000	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	keluarga	30000	1,328,500,000	Honor Pukesos 64 orang di setiao kelurahan @ 1.500.000/bulan
21	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Balikpapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	keluarga	6273	452,481,868	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Balikpapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	keluarga	6273	300,000,000	Transport SDM Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
22	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan kabupaten / Kota	orang	50	50,000,000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan kabupaten / Kota	orang	50	25,000,000	Sosialisasi kepada anggota KUBE
IV	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Balikpapan**	**PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persen**	**83**	**1,101,000,000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Balikpapan**	**PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persen**	**83**	**1,025,000,000**	
F	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten / Kota**	**persen**	**83**	**740,000,000**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten / Kota**	**persen**	**83**	**655,000,000**	
23	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	12230	415,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	12230	400,000,000	Bantuan permakanan bagi korban bencana
24	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	407	150,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	407	150,000,000	Bantuan sandang bagi korban bencana
25	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Balikpapan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota	unit	57	55,000,000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Balikpapan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota	unit	57	55,000,000	Pengadaan tenda pengungsi bagi korban bencana
26	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	50	60,000,000	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	50	25,000,000	Bantuan tongkat dan alat dengar bagi kelompok rentan korban bencana
27	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Balikpapan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	7	60,000,000	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Balikpapan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	7	25,000,000	Pemberian dukungan psikososial bagi pemulihan trauma pasca bencana

G	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana**	**persen**	**64**	**361,000,000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana**	**persen**	**64**	**370,000,000**	
28	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Balikpapan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	kampung	100	70,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Balikpapan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	kampung	100	70,000,000	Penguatan kampung siaga bencana
29	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Balikpapan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	104	291,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Balikpapan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	104	300,000,000	Transport pengerahan anggota TAGANA pada saat kejadian bencana dan rapat evaluasi dan penguatan peran anggota TAGANA sebagai antisipasi bencana, pada saat kejadian dan pasca bencana
V	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Balikpapan**	**PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**persen**	**82**	**633,957,770**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Balikpapan**	**PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**persen**	**82**	**505,000,000**	
H	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase TMP Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara**	**persen**	**57**	**633,957,770**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase TMP Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara**	**persen**	**57**	**505,000,000**	
30	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam pahlawan Nasional	dokumen	2	70,000,000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam pahlawan Nasional	dokumen	2	200,000,000	Rehabilitasi TMP (Gapura, Pemagaran dan Jalan)
31	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten /	makam	1	563,957,770	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten /	makam	1	305,000,000	Pelaksanaan peringatan hari Pahlawan
VI	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Balikpapan**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INTERNAL (IKM) INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**nilai**	**72**	**9,958,967,290**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Balikpapan**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INTERNAL (IKM) INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**nilai**	**72**	**10,561,942,000**	
I	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**nilai**	**50**	**6,000,000,000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**nilai**	**50**	**6,000,000,000**	
32	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	50	6,000,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	50	6,000,000,000	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Sosial
J	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**nilai**	**76**	**289,500,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**nilai**	**76**	**475,000,000**	
33	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	53	79,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	53	75,000,000	Pengadaan pakaian waskat beserta atributnya untuk seluruh ASN Dinsos
34	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Bidang Sosial	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	orang	35	210,000,000	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Bidang Sosial	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	orang	37	400,000,000	Bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pegawai di Dinas Sosial

K	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**nilai**	**77**	**1,056,872,254**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**nilai**	**77**	**1,090,400,000**	
35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	56,872,254	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	30,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
36	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	200,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	300,000,000	Biaya makan minum rapat dan ATK kantor
37	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	paket	11	50,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	paket	11	35,400,000	Fotocopy,spanduk, umbul - umbul, cetak
38	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	500,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	500,000,000	Biaya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah
39	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	5	100,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	5	100,000,000	Pengadaan TV di ruang rapat, UPS, Komputer dan printer
40	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	5	50,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	5	100,000,000	Pengadaan Gorden Kantor (Vertical blind)
41	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	2	100,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	2	25,000,000	Biaya makan minum kunjungan tamu
L	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**nilai**	**80**	**1,040,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**nilai**	**80**	**1,270,000,000**	
42	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	2	700,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	2	700,000,000	Sewa Kendaraan dinas pejabat sebanyak tiga unit + BBM
43	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan	unit	1	300,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan	unit	1	450,000,000	Pengadaan truck untuk operasional penangangan bencana
44	Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	4	40,000,000	Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	4	120,000,000	Pengadaan mebel untuk ruang Kadis dan ruang Pantri
M	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**nilai**	**80**	**1,040,000,000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**nilai**	**80**	**1,055,490,720**	
45	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	5	140,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	5	155,490,720	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
46	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	2	900,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dised	laporan	2	900,000,000	Gaji pegawai Non ASN dan karyawan outsourching
			2. Jumlah Tenaga Non PNS	orang	27				2. Jumlah Tenaga Non PNS	orang	21		

N	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**nilai**	**78**	**532,595,036**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**nilai**	**78**	**671,051,280**	
47	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	41	342,595,036	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	41	332,771,280	Biaya perawatan kendaraan dinas jabatan dan operasional dan pajak kendaraan
48	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	15	140,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	15	188,280,000	Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin yang digunakan di Dinas Sosial
49	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	1	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	1	150,000,000	Biaya perbaikan / renovasi gedung kantor dan gedung RPTC
TOTAL						**16,664,725,290**						**18,334,942,000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Kota Balikpapan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, serta melayani dan memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di sisi lain, dalam era globalisasi, dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum khususnya di Kota Balikpapan.

Agar program dan kegiatan tersebut lebih dapat dirasakan oleh masyarakat, salah satu caranya adalah menyerap aspirasi atau usulan masyarakat yang disampaikan secara langsung melalui lembaga atau kelompok yang menjadi wadah organisasi mereka. Tahapan usulan program dari masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi usulan program dan kegiatan yang masuk ke Dinas Sosial
2. Meneliti kelengkapan proposal tersebut sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
3. Melakukan verifikasi tentang usulan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tahun perencanaan
4. Menetapkan jumlah hibah yang akan diberikan kepada setiap lembaga yang telah memenuhi syarat, sesuai dengan anggaran yang tersedia di Dinas Sosial Kota Balikpapan
5. Menginput usulan hibah tersebut ke dalam Aplikasi SIPD untuk ditetapkan sebagai Rencana Kerja pada tahun berikutnya

Jenis usulan masyarakat yang telah diterima oleh Dinas Sosial untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN PADA TAHUN 2024

No	Tanggal Proposal	Lembaga Penerima	Tujuan	Nilai Proposal	Alamat
1	30 Januari 2023	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Balikpapan	Untuk menunjang kegiatan dan operasional Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Balikpapan	Rp 171,922,500	Jl. Jend. Sudirman Komp. Balikpapan Permai Blok A1 No. 11 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota
2	03 Februari 2023	Persatuan Isteri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Kota Balikpapan	Untuk menunjang kegiatan dan operasional Persatuan Isteri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Kota Balikpapan	Rp 77,470,000	Jl. Jend. Sudirman Komp. Balikpapan Permai Blok A1 No. 11 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota
3	06 Maret 2023	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Balikpapan	Untuk menunjang kegiatan dan operasional Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Balikpapan	Rp 400,000,000	Jl. Laks. R.E. Martadinata RT. 37 No. 09 Balikpapan
4	06 Maret 2023	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia	Untuk menunjang kegiatan operasional PPDI	Rp 400,000,000	Jl. Telaga Sari II RT.36 No.09 Kelurahan Telaga Sari Balikpapan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraankesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yangmeliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;

d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;
e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius,rekereasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

Program Nasional yang menjadi prioritas terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yaitu dalam rangka penyelenggaraan

penanggulangan kemiskinan antara lain kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberian Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Kebijakan nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Kota Balikpapan sudah sangat baik, misalnya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dimana secara tidak langsung pemerintah juga merekrut karyawan dari masyarakat Kota Balikpapan sendiri sehingga mengurangi angka pengangguran dan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut Tujuan ditetapkan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Adapun Tujuan Akhir yang akan dicapai Dinas Sosial melalui penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Adalah :

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dari masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis. Adapun Sasaran stategis Dinas Sosial diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Sosial tersebut adalah :

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial dasar orang dengan kedisabilitasan, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna social
2. Pemulihan nilai – nilai luhur (restorasi sosial)
3. Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah

3.3 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Penyusunan program dan kegiatan sebagai Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2024 yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan, khususnya masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Masukan-masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kota Balikpapan
3. Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

A. Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Visi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan yaitu " Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman". Sedangkan Misi Kota Balikpapan adalah :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi
3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Dinas Sosial kota Balikpapan mendukung Misi ke III yaitu Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai dan misi V yaitu Mengembangkan Ekonomi yang Kreatif.

B. Pencapaian SDG'S

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SDG'S di sektor Sosial, adalah; Meningkatkan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui peningkatan kapasitas PSKS.

C. Pengentasan Kemiskinan

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota Balikpapan antara lain :

1. Melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui pendataan dan verifikasi lapangan oleh Puskesos
2. Memberikan bantuan sembako kepada Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lansia Terlantar
3. Mendekatkan akses pemberian bantuan sosial berupa program PKH, BPNT dan KUBE

D. Program Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan di Kota Balikpapan, Dinas Sosial Kota Balikpapan telah Menyusun rencana program / kegiatan / sub kegiatan untuk tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2024					PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025						
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
I	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**PERSENTASE PSKS YANG MENDAPAT PEMBINAAN**	**Balikpapan**	**persen**	**90**	**1,394,500,000**	**APBD**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**PERSENTASE PSKS YANG MENDAPAT PEMBINAAN**	**Balikpapan**	**persen**	**93.33**	**1,794,008,312**	APBD
A	**Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan UGB dan PUB yang Terminitor**	**Balikpapan**	**persen**	**100**	**500,000,000**	**APBD**	**Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan UGB dan PUB yang Terminitor**	**Balikpapan**	**persen**	**100**	**941,258,312**	APBD
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Balikpapan	dokumen	12	500,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Balikpapan	dokumen	12	941,258,312	APBD
B	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PSKS yang Mendapat Pembinaan**	**Balikpapan**	**persen**	**80**	**894,500,000**	**APBD**	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PSKS yang Mendapat Pembinaan**	**Balikpapan**	**persen**	**80**	**852,750,000**	APBD
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	34	753,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	34	723,750,000	APBD
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	6	121,500,000	**APBD**	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	6	108,000,000	APBD
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten / kota	Balikpapan	keluarga	40	20,000,000	**APBD**	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten / kota	Balikpapan	keluarga	40	21,000,000	APBD
II	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial PMKS yang Terpenuhi**	**Balikpapan**	**persen**	**80**	**3,045,000,000**	**APBD**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial PMKS yang Terpenuhi**	**Balikpapan**	**persen**	**80.96**	**1,855,172,882**	APBD
C	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti**	**Balikpapan**	**orang**	**62.03**	**1,840,000,000**	**APBD**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti**	**Balikpapan**	**orang**	**64.18**	**1,172,320,000**	APBD
5	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai denga standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	600	1,300,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai denga standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	800	629,820,000	APBD
6	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	25	70,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	25	60,100,000	APBD

7	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	Balikpapan	orang	30	350,000,000	**APBD**	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	Balikpapan	orang	0	-	APBD
8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten / kota	Balikpapan	orang	2	20,000,000	**APBD**	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten / kota	Balikpapan	orang	0	-	APBD
9	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	10	20,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	58	173,900,000	APBD
10	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	600	80,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	800	308,500,000	APBD
D	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**Balikpapan**	**persen**	**92.44**	**1,205,000,000**	**APBD**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**Balikpapan**	**persen**	**93.25**	**682,852,882**	APBD
11	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	270	340,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	270	255,600,000	APBD
12	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	20	25,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	20	18,400,000	APBD
13	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	270	20,000,000	**APBD**	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	270	18,210,000	APBD
14	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta Dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	20	35,000,000	**APBD**	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta Dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	20	50,000,000	APBD
15	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	orang	28	25,000,000	**APBD**	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	orang	29	22,128,576	APBD
16	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	112	150,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	116	88,514,306	APBD
17	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	30	520,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	30	200,000,000	APBD
18	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	Balikpapan	dokumen	12	90,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	Balikpapan	dokumen	12	30,000,000	APBD

III	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**PERSENTASE ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN YANG MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Balikpapan**	**persen**	**87.8**	**1,803,500,000**	**APBD**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**PERSENTASE ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN YANG MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Balikpapan**	**persen**	**90.24**	**1,887,997,831**	**APBD**
E	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Keluarga Miskin yang Terdaftar di DTKS**	**Balikpapan**	**persen**	**93**	**1,803,500,000**	**APBD**	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Keluarga Miskin yang Terdaftar di DTKS**	**Balikpapan**	**persen**	**91**	**1,887,997,831**	**APBD**
19	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	**Balikpapan**	orang	54885	150,000,000	**APBD**	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	**Balikpapan**	orang	54336	50,000,000	**APBD**
20	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	**Balikpapan**	keluarga	30000	1,328,500,000	**APBD**	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	**Balikpapan**	keluarga	30000	1,250,000,000	**APBD**
21	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	**Balikpapan**	keluarga	6273	300,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	**Balikpapan**	keluarga	23	537,997,831	**APBD**
22	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan kabupaten / Kota	**Balikpapan**	orang	50	25,000,000	**APBD**	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan kabupaten / Kota	**Balikpapan**	orang	50	50,000,000	**APBD**
IV	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Balikpapan**	**persen**	**83**	**1,025,000,000**	**APBD**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Balikpapan**	**persen**	**85**	**1,240,000,000**	**APBD**
F	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten / Kota**	**Balikpapan**	**persen**	**83**	**655,000,000**	**APBD**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten / Kota**	**Balikpapan**	**persen**	**85**	**840,000,000**	**APBD**
23	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	**Balikpapan**	orang	12230	400,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	**Balikpapan**	orang	12230	425,000,000	**APBD**
24	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	**Balikpapan**	orang	407	150,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	**Balikpapan**	orang	407	175,000,000	**APBD**
25	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota	**Balikpapan**	unit	57	55,000,000	**APBD**	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota	**Balikpapan**	unit	57	100,000,000	**APBD**
26	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten / Kota	**Balikpapan**	orang	50	25,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten / Kota	**Balikpapan**	orang	50	70,000,000	**APBD**
27	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	orang	7	25,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	orang	7	70,000,000	**APBD**

G	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana**	**Balikpapan**	**persen**	**64**	**370,000,000**	**APBD**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana**	**Balikpapan**	**persen**	**65**	**400,000,000**	APBD
28	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	kampung	100	70,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	kampung	100	80,000,000	APBD
29	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	104	300,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	orang	104	320,000,000	APBD
V	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Balikpapan**	**persen**	**82**	**505,000,000**	**APBD**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Balikpapan**	**persen**	**85**	**680,583,783**	APBD
H	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase TMP Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara**	**Balikpapan**	**persen**	**57**	**505,000,000**	**APBD**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase TMP Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara**	**Balikpapan**	**persen**	**58**	**680,583,783**	APBD
30	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam pahlawan Nasional	Balikpapan	dokumen	2	200,000,000	**APBD**	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam pahlawan Nasional Kabupaten /	Balikpapan	dokumen	2	75,000,000	APBD
31	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	Balikpapan	makam	1	305,000,000	**APBD**	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	Balikpapan	makam	1	605,583,783	APBD
VI	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INTERNAL (IKM) INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**Balikpapan**	**nilai**	**72**	**10,181,942,000**	**APBD**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INTERNAL (IKM) INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**Balikpapan**	**nilai**	**73**	**10,849,535,967**	APBD
I	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**nilai**	**50**	**6,000,000,000**	**APBD**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**nilai**	**50**	**6,000,000,000**	APBD
32	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Balikpapan	orang	50	6,000,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Balikpapan	orang	50	6,000,000,000	APBD
J	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**nilai**	**76**	**475,000,000**	**APBD**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**nilai**	**78**	**390,000,000**	APBD
33	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Balikpapan	paket	53	75,000,000	**APBD**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Balikpapan	paket	54	90,000,000	APBD
34	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Bidang Sosial	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	Balikpapan	orang	37	400,000,000	**APBD**	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Bidang Sosial	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	Balikpapan	orang	40	300,000,000	APBD

K	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**nilai**	**77**	**1,090,400,000**	**APBD**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**nilai**	**78**	**1,431,783,792**	APBD
35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	paket	12	30,000,000	**APBD**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	paket	13	60,000,000	APBD
36	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balikpapan	paket	2	300,000,000	**APBD**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balikpapan	paket	2	238,391,896	APBD
37	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	paket	11	35,400,000	**APBD**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	paket	11	70,000,000	APBD
38	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	laporan	2	500,000,000	**APBD**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	laporan	2	500,000,000	APBD
39	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Balikpapan	paket	5	100,000,000	**APBD**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Balikpapan	paket	7	200,000,000	APBD
40	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Balikpapan	paket	5	100,000,000	**APBD**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Balikpapan	paket	5	125,000,000	APBD
41	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Balikpapan	laporan	2	25,000,000	**APBD**	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Balikpapan	laporan	2	238,391,896	APBD
L	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Balikpapan**	**nilai**	**80**	**890,000,000**	**APBD**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Balikpapan**	**nilai**	**82**	**1,200,000,000**	APBD
42	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Balikpapan	unit	2	320,000,000	**APBD**	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Balikpapan	unit	3	1,100,000,000	APBD
43	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan	Balikpapan	unit	1	450,000,000	**APBD**	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan	Balikpapan	unit	-	-	APBD
44	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Balikpapan	unit	4	120,000,000	**APBD**	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Balikpapan	unit	4	100,000,000	APBD
M	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**nilai**	**80**	**1,055,490,720**	**APBD**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**nilai**	**80**	**1,210,000,000**	APBD
45	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Balikpapan	laporan	5	155,490,720	**APBD**	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Balikpapan	laporan	5	160,000,000	APBD
46	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	laporan	2	900,000,000	**APBD**	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	laporan	3	1,050,000,000	APBD
N	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**nilai**	**78**	**671,051,280**	**APBD**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**nilai**	**80**	**617,752,175**	APBD
47	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Balikpapan	unit	41	332,771,280	**APBD**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Balikpapan	unit	41	367,752,175	APBD
48	Pemeliharaan Pelaratan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Balikpapan	unit	15	188,280,000	**APBD**	Pemeliharaan Pelaratan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Balikpapan	unit	15	170,000,000	APBD
49	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Balikpapan	unit	1	150,000,000	**APBD**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Balikpapan	unit	1	80,000,000	APBD
TOTAL						**17,954,942,000**							**18,307,298,775**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rangka mencapai tujuan dan sasaran di atas, maka perlu dibuat Program yang merupakan kumpukan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu sebagai Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan, sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan untuk tahun 2024 yang bersumber dari APBD. Program dan Kegiatan Dinas sosial pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU INPUT SIPD	Keterangan
I	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan**	**1,394,500,000**	
A	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor**	**500,000,000**	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	500,000,000	Pemberian Hibah Untuk Lembaga : 1. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Balikpapan 2. Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Kota Balikpapan 3. Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Balikpapan
B	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan**	**894,500,000**	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	753,000,000	Transport kepada 34 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan untuk Kegiatan Operasional PSKS lainnya
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	121,500,000	Transport kepada 6 orang (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) TKSK

4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	20,000,000	Bimbingan dan Sosialisasi kepada keluarga pioneer dalam mendukung penanganan PMKS di masyarakat
II	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase layanan rehabilitas sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi**	**3,045,000,000**	
C	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**1,840,000,000**	
5	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai denga standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	1,300,000,000	1. Penambahan jumlah klien yang dilayani di asrama anak penyandang disabilitas, RPSA, RPLUT dan LPKS 2. Penambahan jumlah penerima bantuan bahan kebutuhan pokok bagi penyandang disabilitas berat (80 orang) dan lanjut usia tidak mampu (153 orang) selama 12 bulan 3. biaya pengiriman paket bantuan bahan kebutuhan pokok bagi penyandang disabilitas berat (80 orang) dan lanjut usia tidak mampu (153 orang) selama 12 bulan
6	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	70,000,000	Penyediaan sandang di asrama anak penyandang disabilitas, RPSA, RPLUT dan LPKS berupa pempers, pakaian dalam dll
7	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	350,000,000	Pembelian kaki palsu dan tangan palsu bagi penyandang disabilitas, kursi roda bagi lansia terlantar
8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	20,000,000	Reunifikasi bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan LU terlantar ke keluarga mereka
9	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	80,000,000	Pemberian bantuan hibah kepada lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Balikpapan
10	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	20,000,000	Monitoring / evaluasi penyandang disabilitas ke Dinas sosial/UPTD/LKS/Keluarga
D	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**1,205,000,000**	
11	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	340,000,000	Penyediaan permakanan bagi Orang Terlantar (OT), Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Penampungan

12	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	25,000,000	Penyediaan sandang bagi OT, ODGJ
13	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	20,000,000	Pemberian bimbingan mental, fisik dan spiritual kepada PMKS yang ditampung di RPTC
14	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	35,000,000	Sosialisasi / pemberian motivasi kepada keluarga ODGJ serta uang transport bagi keluarga ODGJ ke tempat kegiatan
15	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	520,000,000	Tindakan perawatan kesehatan bagi PMKS terlantar di RSUD/RSKD/RSJ dan pemulangan OT ke daerah asal
16	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	25,000,000	Reunifikasi / pengembalian ke daerah asal bagi PMKS terlantar
17	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	150,000,000	Pendampingan / Pengantaran ODGJ ke RSJ /balai / loka / daerah asal
18	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	90,000,000	Pemakaman / pengangkutan jenasah terlantar
III	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**	**1,803,500,000**	
E	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial**	**1,803,500,000**	
19	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang di Data	150,000,000	Pembuatan aplikasi Pengelolaan PMKS
20	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	1,328,500,000	Honor Pukesos 64 orang di kelurahan

21	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	300,000,000	Transport SDM Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
22	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	25,000,000	Sosialisasi kepada anggota KUBE
IV	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota**	**1,025,000,000**	
F	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota**	**655,000,000**	
23	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	400,000,000	Bantuan permakanan bagi korban bencana
24	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	150,000,000	Bantuan sandang bagi korban bencana
25	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota	55,000,000	Pengadaan tenda pengungsi bagi korban bencana
26	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten / Kota	25,000,000	Bantuan tongkat dan alat dengar bagi kelompok rentan korban bencana
27	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten / Kota	25,000,000	Pemberian dukungan psikososial bagi pemulihan trauma pasca bencana
G	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap bencana**	**370,000,000**	
28	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	70,000,000	Penguatan kampung siaga bencana
29	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	300,000,000	Transport pengerahan anggota TAGANA pada saat kejadian bencana dan rapat evaluasi dan penguatan peran anggota TAGANA sebagai antisipasi bencana, pada saat kejadian dan pasca bencana

V	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**505,000,000**	
H	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara**	**505,000,000**	
30	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam pahlawan Nasional Kabupaten	200,000,000	Rehabilitasi TMP (Gapura, Pemagaran dan Jalan)
31	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	305,000,000	Pelaksanaan peringatan hari Pahlawan
VI	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**10,181,942,000**	
I	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6,000,000,000**	
32	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	6,000,000,000	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Sosial
J	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**475,000,000**	
33	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75,000,000	Pengadaan pakaian waskat beserta atributnya untuk seluruh ASN Dinsos
34	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Bidang Sosial	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek	400,000,000	Bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pegawai di Dinas Sosial
K	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1,090,400,000**	
35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
36	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,000,000	Pengadaan TV di ruang rapat, UPS, Komputer dan printer
37	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100,000,000	Pengadaan Gorden Kantor (Vertical blind)
38	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300,000,000	Biaya makan minum rapat dan ATK kantor
39	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	35,400,000	Fotocopy,spanduk, umbul - umbul, cetak
40	Fasilitasi Kunjungan Tamu		25,000,000	Biaya makan minum kunjungan tamu
41	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500,000,000	Biaya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah

L	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**890,000,000**	
42	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	320,000,000	Sewa Kendaraan dinas pejabat sebanyak tiga unit + BBM
43	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	450,000,000	Pengadaan truck untuk operasional penangangan bencana
44	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120,000,000	Pengadaan mebel untuk ruang Kadis
M	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,055,490,720**	
45	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	155,490,720	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
46	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	200,000,000	Gaji pegawai Non ASN dan karyawan outsourching
		Jumlah tenaga Non PNS	700,000,000	
N	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**671,051,280**	
47	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	332,771,280	Biaya perawatan kendaraan dinas jabatan dan operasional dan pajak kendaraan
48	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	188,280,000	Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin yang digunakan di Dinas Sosial
49	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	150,000,000	Biaya perbaikan / renovasi gedung kantor dan gedung RPTC
			17,954,942,000	-

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

A. PROGRAM INOVASI DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program Inovasi yang dibangun oleh Dinas Sosial saat ini ada 4 (empat) kegiatan, yaitu :

1. Panji Berbakat Program Anak Jalanan Berbasis Masyarakat)
2. Senandung Sajak (Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak).
3. Teropong Jiwa (Tanggap Ketuk Rumah Pendamping Orang Dengan Gangguaan Jiwa).
4. Arlin Kobana (Aksi Perlindungan Sosial Terhadap Korban Bencana)

Sekilas mengenai program inovasi Dinas Sosial ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Panji Berbakat.

(Penanganan Anak Jalanan Integratif Berbasis Masyarakat).

Sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dalam penanganan Anak Jalanan. Selama ini pelaksanaan penanganan anak jalanan dilaksanakan secara parsial sesuai dengan tupoksi OPD dan dan LSM yang berkaitan dengan anak, sehingga dengan kondisi ini OPD dalam pelaksanaan kegiatan masing – masing tanpa arah dan pola yang teritegrasi. Dampak yang muncul adalah terjadinya disparitas terhadap psikhologi anak jalanan. Anak Jalanan jadi takut dengan Satpol PP karena Satpol PP suka merazia, Anak Jalanan jadi suka dengan Dinas Kesehatan karena selalui diperiksa kesehatannya, Anak Jalanan jadi Suka dengan Dinas Sosial karena selalu dibimbing dan diberi bantuan. Anak Jalanan suka dengan LSM Anak karena mereka selalu dibantu dan diajak bermain. Begitu juga dengan instansi lainnya.

Maka dengan di bentuknya Program Panji Berbakat ini diharapkan semua OPD dan LSM yang menangani anak jalanan dapat bekerjasama dengan membuat sebuah sarana pertemuan, menyusun jadwal kegiatan dan koordinasi terhadap permasalahan yang muncul dalam penanganan anak jalanan di Kota Balikpapan.

Saat ini sudah berjalan kegiatan Panji Berbakat ini dengan melibatkan 4 (empat) komunitas , yaitu :

a) Sekolah Rakyat (SR) di Jl. Syarifuddin Yoes Kel Sepinggan Raya
b) Lembaga Rumah Singgah Nurul Ilmi, di Jl. Perumahan Balikpapan Baru Blok F1. No. 5 Rt. 19 Kel. Gn. Samarinda Baru
c) Komunitas Peduli Pendidikan Anak Indonesia (KOPAJA) J. Manunggal Rt. 20 Kel. Sungai Nangka,
d) Peduli Anak Penerus Bangsa, Jl. Sultan Hasanudin Komp. Perumahan Guru Rt.39 Kel. Baru Ulu.

Kegiatannya dilaksanakan secara sinergi Bersama OPD terkait dengan jadwal yang sudah ditentukan seperti Narasumber dari Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Instansi terkait.

2. Senandung Sajak.

“SistEm penangaNAN terpaDU penyandaNG maSAlah keseJahteraan sosiAl anaK”

Dasar Hukum SENANDUNG SAJAK adalah Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak. Senandung Sajak merupakan pola usaha terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Contoh PMKS Anak itu seperti Anak Balita Terlantar (ABT), Anak Terlantar (AT), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Anak yang Diperlakukan Salah, Anak Korban Tindak Kekerasan, dan Anak Korban NAPZA.

Tujuan SENANDUNG SAJAK adalah untuk menjalin kerja sama dan sinergitas antara perangkat daerah terkait dan masyarakat dalam hal penanganan PMKS Anak berdasarkan amanat UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Perangkat Daerah dan Stakeholder yang terlibat dalam

SENANDUNG SAJAK meliputi : Dinas Sosial, Badan Perencana Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Balikpapan, Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan, Kementerian Agama, Pengadilan Negeri Balikpapan, Kejaksaan Negeri Balikpapan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan, Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan, Pengacara Anak dan Satuan Bhakti Pekerja Sosial.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. PANJI BERBAKAT (Penanganan ANak Jalanan Integratif BERBAsis masyaraKAT).

   PANJI BERBAKAT merupakan upaya terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar anak jalanan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.

   Terdapat 4 (empat) komunitas yang bersinergi dalam kegiatan PANJI BERBAKAT, yaitu :

a. Sekolah Rakyat (SR)
   Jl. Syarifuddin Yoes RT. 13 Kelurahan Sepinggan Raya
   Kecamatan Balikpapan Selatan
   0811 5405 181 (Dyta)
b. Lembaga Rumah Singgah Nurul Ilmi
   Komp. Perumahan Balikpapan Baru Blok F1 No. 5 RT. 19 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara
   0821 5356 4023 (Imam Muhib)
c. Komunitas Peduli Pendidikan Anak Indonesia (KOPPAJA)
   Jl. Manunggal RT. 20 Kelurahan Sungai Nangka
   Kecamatan Balikpapan Selatan
   0822 5461 8858 (Abi)
d. Peduli Anak Penerus Bangsa
   Jl. Sultan Hasanuddin Komp. Perum Guru RT. 39
   Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat
   0852 8348 2846 (Nur Sukmawati)

2. SABAH (Sayang Anak Berhadapan dengAn Hukum).

   SABAH berupa kegiatan pendampingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum pada saat diversi dan persidangan. Pendampingan dilakukan oleh tim Dinas Sosial Kota Balikpapan terhadap pelaku dengan usia termasuk kategori anak (0 s.d 18 tahun).

3. RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA)

   Merupakan rumah yang berfungsi untuk melindungi, mengamankan, menampung sementara dan merehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak korban NAPZA / ngelem, anak jalanan dan anak punk hasil razia Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.

3. Teropong Jiwa.

TEROPONG JIWA " Tanggap Ketuk Rumah Pendamping Orang Dengan Gangguan Jiwa "

Isu yang Diangkat : Belum optimalnya dukungan sosial keluarga terhadap pemulihan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) .Gagasan Pemecahan Isu : Optimalisasi dukungan sosial keluarga terhadap pemulihan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Pelaksanaan kegiatan Aktualisasi Teropong Jiwa (Tanggap Ketuk Rumah Pendamping Orang Dengan Gangguan Jiwa) ini turut membantu Dinas Sosial Kota Balikpapan khususnya Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan dalam menjalankan visi Dinas Sosial Kota Balikpapan yaitu terwujudnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang profesional dan berkualitas dan misi meningkatkan upaya – upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dengan adanya kegiatan Teropong Jiwa penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) membantu penjalanan Tupoksi dari Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan yang optimal terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dengan dibuatnya kegiatan Teropong Jiwa dapat mewujudkan kemandirian dan sisi humanistis dari keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam menangani/memperlakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pasca rawat inap di Rumah Sakit Jiwa atau pun pasca rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental. Adanya Teropong Jiwa ini meningkatkan pelayanan

Dinas Sosial Kota Balikpapan yang tidak hanya sebatas sebagai fasilitator tetapi mampu mengoptimalkan pelayanan secara administratif maupun sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa melalui keluarga.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Pendataan Orang dengan Gangguan Jiwa.
   Merekapitulasi data Orang Dengan Gangguan Jiwa yang mendapatkan pelayanan di Dinas Sosial Kota Balikpapan ke dalam aplikasi spreadsheet dan mensikronisasi data Orang dengan Gangguan Jiwa yang diperoleh dari Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama.
2. Membuat buku pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa.
   Daftar isian buku yang pertama adalah lembar identitas yang berisi identitas Orang Dengan Gangguan Jiwa, identitas keluarga (orang tua) dan identitas wali (istri/suami/keluarga lainnya). Daftar isian yang kedua berisi form pernyataan persetujuan keluarga terhadap pelayanan pekerja sosial dan 9 (sembilan) hal lainnya yang memerlukan persetujuan keluarga. Ketiga adalah lembar asesmen BPSS yang berisi 4 aspek penilaian diri Orang Dengan Gangguan Jiwa yaitu aspek biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Keempat adalah lembar intervensi yang berisi mengenai tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh keluarga dalam penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa. Kelima adalah lembar monitoring terhadap pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh keluarga. Keenam adalah lembar terminasi berisi lembar pemutusan pelayanan pekerja sosial kepada orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang digunakan apabila keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) telah mampu secara mandiri mengurus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Terakhir berisi lembar kontrol rawat jalan, rawat inap dan pelayanan rehabilitasi yang diterima Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hasil referensi yang telah didapatkan kemudian diolah untuk dimasukkan ke rancangan buku sesuai dengan daftar isi yang telah dibuat. Tema buku ini adalah jurnalku yang menjelaskan perjalanan/riwayat Orang Dengan Gangguan Jiwa. Buku ini digunakan sebagai arsip yang memudahkan untuk melihat riwayat Orang Dengan Gangguan Jiwa baik dari segi biologis, sosial, psikologis, spiritual dan riwayat pengobatan/rehabilitasi ODGJ.
3. Membuat leaflet dan sticker.
   Leaflet dirancang berisi pemahaman dasar mengenai Orang Dengan

Gangguan Jiwa seperti definisi mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa / penyandang disabilitas mental yang diambil dari sumber Undang Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, materi-materi yang diberikan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang berisi gejala-gejala seseorang dapat dikatakan mengalami gangguan jiwa, penyebab gangguan jiwa, penyebab kambuhnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan penanganan pertama ketika kambuh. Selanjutnya, leaflet berisi peran keluarga dalam menangani anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, indikator keberhasilan keluarga dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa dan alur penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sticker dirancang dengan menekankan untuk mengkampanyekan bagaimana memperlakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) seperti anggota lainnya terutama dalam hal pelibatan dalam kegiatan keluarga dan perlunya dukungan keluarga secara fisik, psikis dalam mendampingi Orang Dengan Gangguan Jiwa.

4. Sosialisasi melalui home visit ke keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa

   Sosialisasi dilaksanakan bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Sepinggan Baru dan Sepinggan Raya. Sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan asesmen dasar/asesmen lanjutan terhadap anggota keluarga dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sesuai dengan buku yang telah dibuat. Selain itu dalam sosialisasi dilakukan penyampaian edukasi dan motivasi terkait dengan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dapat dilakukan oleh keluarga.

5. Membuat forum komunikasi keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa

   Membuat grup WhatsApp yang bernama Teropong Jiwa sebagai forum komunikasi bagi pendamping/keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Forum ini dibuat sebagai sarana koordinasi, sharing informasi dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa. WhatsApp hanya diperuntukkan bagi keluarga/pendamping Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

4. Arlin Kobana.

“ Aksi Perlindungan Sosial terhadap Korban Bencana “

Sebuah inovasi pengelolaan barang logitik bencana melalui Aplikasi guna membantu memudahkan dalam mengetahui ketersedian barang

dan penyalurannya untuk korban bencana dan memfasilitasi organisasi sosial yang terlibat penanganan bencana, sehingga barang-barang bantuan dari masyarakat terarah, transparan dalam penyalurannya.

Kota Balikpapan merupakan daerah yang rawan bencana karena memiliki daerah yang berbukit-bukit, sehingga potensi bencana yang sangat menonjol di Kota Balikpapan adalah Banjir, Tanah Longsor dan Kebakaran, sementara anggaran Pemerintah Kota Balikpapan yang teralokasikan di Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam upaya memberikan perlindungan sosial terhadap Korban bencana sangat terbatas, sehingga diperlukan partisipasi dari masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban terhadap bencana.

Oleh karena itu dalam rangka membantu ketersediaan barang bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban, sehingga perlu adanya Aksi Perubahan dengan judul " Aksi Perlindungan Sosial terhadap Korban Bencana ",yang didalamnya terdapat 2 (dua) aspek yaitu:

1. Pembuatan Aplikasi Data Barang Logistik Bencana sebagai salah satu upaya untuk mempermudah penginputan data barang bencana yang tersedia dan penyalurannya serta juga untuk transparasi agar stakeholder mengetahui dan dapat berkolaborasi untuk membantu kesiapsiagaan barang logistik bencana.
2. Memfasilitasi organisasi sosial yang terlibat penanganan bencana melalui pembentukan Forum Perlindungan Sosial Korban Bencana. Dengan dilaksanakannya kedua aspek tersebut diharapkan dapat memudahkan transparasi data barang logistik bencana dan membuat pihak terkait serta masyarakat yang menjadi korban bencana lebih percaya dengan kondisi barang di Gudang logistik bencana yang terbatas, dan diharapkan pada akhirnya pihak terkait dapat membantu memenuhi kebutuhan barang logistik bencana yang masih kurang .

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Walikota. Demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, dibutuhkan kerja keras dan kerja sama semua pihak, khususnya para pemangku kepentingan di bidang sosial. Untuk mengantisipasi minimnya dana yang tersedia dari APBD Kota Balikpapan, dibutuhkan usaha aktif untuk mencari informasi terkait sumber-sumber dana dari level pemerintahan yang lebih tinggi. Selain itu, kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pihak swasta dan organisasi masyarakat lainnya, dapat menyediakan solusi demi terlaksananya seluruh program/kegiatan Dinas Sosial Kota Balikpapan.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Balikpapan ini disampaikan sebagai acuan untuk menentukan arah kebijakan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk Tahun Anggaran 2024. Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja ini pada masa yang mendatang sangat kami harapkan.

Atas segala perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Balikpapan, Maret 2023

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BALIKPAPAN

MUFIDAH HAYATI
NIP. 19751226 200604 1 004

2024

RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BALIKPAPAN

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Renja ini merupakan penjabaran dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2021– 2026 yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Dalam ranga mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat yang baik, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan menyusun Renja berdasarkan evaluasi terhadap hasil Renja pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan dijadikan dasar untuk penyusunan Renja pada tahun berikutnya. Secara garis besar Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan ini berisikan informasi mengenai rencana kerja dan capaian kinerja untuk tahun 2022, serta Rencana Kerja Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2024. Renja tersebut memuat sasaran kerja yang ingin dicapai selama tahun 2024 yang mengacu Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan 2021-2026. Pengacuan tersebut agar selalu terpadu dan konsisten terhadap perencanaan dan penganggaran.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) ini belum sepenuhnya sempurna. Namun, semoga hasil penyusunan ini dapat dijadikan pedoman atas pelaksanaan program dan kegiatan agar tahun mendatang pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Balikpapan, 28 Februari 2023

Kepala Dinas Ketenagakerjaan

Kota Balikpapan

ANI MUFAIDAH

DAFTAR ISI

COVER i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan..... 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Peragkat Daerah 4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah 19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 21

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 34

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 34

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 35

3.3. Program dan Kegiatan..... 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. 48

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan..... 48

4.2. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintahan Kota 48

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH 49

BAB V PENUTUP 52

6.1 Catatan Penting..... 52

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 52

6.3 Rencana Tindak Lanjut..... 53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Ketenagakerjaan	4
Tabel 2.2	e.81 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja	10
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Utama...	19
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	23
Tabel 3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi	34
Tabel 3.2	Identifikasi Tujuan, Sasaran, dan Indikator sasaran Renstra Perangkat daerah Terhadap Evaluasi tahun sebelumnya	35
Tabel 3.3	TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen RENJA yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kerja sesuai tuntutan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dinas Ketenagakerjaan senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang, terutama Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru. Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah. Namun pada sisi lain, sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut khususnya Dinas Ketenagakerjaan, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024.

Dengan adanya Renja diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Ketenagakerjaan dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);l;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;;
f. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
k. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
l. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
m. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan

C. MAKSUD dan TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut :

a. Maksud
   - Memenuhi kebutuhan perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis;
   - Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Balikpapan.

b. Tujuan

   Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan selama satutahun.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Peragkat Daerah

Kegiatan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran–Perangkat Daerah (DPPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2022. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Ketenagakerjaan
Tahun Anggaran 2022

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH	**7.079.207.500**	**6.446.784.050**	**632.423.450**	**91,10%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**15.000.000**	**5.974.214**	**9.025.786**	**39,80%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	4.774.214	2.725.786	63,66%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	1.200.000	6.300.000	16.00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5.591.537.000**	**5.329.700.321**	**351.836.679**	**95,30%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.589.037.000	5.238.110.321	350.926.679	93.72%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	1.590.000	910.000	63.60%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**777.050.800**	**613.265.515**	**163.785.284**	**78,90%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.000	4.997.220	1.780	99,72%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.115.900	44.273.960	5.841.940	88,34%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.990.000	29.475.272	5.514.728	84,24%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	301.751.200	243.735.190	58.016.010	80,77%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.101.500	19.873.333	15.228.167	56,62%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.217.000	830.500	7.386.500	10,11%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	12.005.000	22.995.000	34,30%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	306.876.200	258.075.040	48.801.159	84,10%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**199.170.000**	**178.661.000**	**20.509.000**	**89,70%**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.170.000	178.661.000	20.509.000	89,70%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**181.449.700**	**158.123.828**	**23.325.872**	**87,14%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	0	1.00%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.838.000	20.140.647	6.697.353	75,05%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.111.700	134.483.181	16.628.519	89,00%
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**Selisih**	**%**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**315.000.000**	**251.059.171**	**63.940.829**	**79,70%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	235.000.000	174.163.921	60.836.079	74,11%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	76.895.250	3.104.750	96,12%
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**399.952.800**	**257.703.208**	**142.249.592**	**64,40%**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**399.952.800**	**257.703.208**	**142.249.592**	**64,40%**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	299.993.800	161.954.238	138.039.562	53,99%
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	99.959.000	95.748.970	4.210.030	95,79%
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	999.871.500	876.213.529	123.657.971	87,60%
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**949.973.000**	**834.422.799**	**115.550.201**	**87,80%**
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	949.973.000	834.422.799	115.550.201	87,75%
Pelatihan Kerja Swasta	**49.898.500**	**41.790.730**	**8.107.770**	**83,80%**

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	49.898.500	41.790.730	8.107.770	83,75%
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**0**	**0**	**0**	**0**
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	0	0	0	0
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**Selisih**	**%**
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**454.969.700**	**291.993.434**	**162.976.266**	**64,20%**
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	**264.974.700**	**194.987.274**	**69.987.426**	**73,60%**
Pelayanan Antar Kerja	149.974.800	98.487.324	51.487.476	65,67%
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	64.999.900	46.995.300	18.004.600	72,30%
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	0	0	0	0
Perluasan Kesempatan Kerja	50.000.000	49.504.650	495.350	99,01%
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**139.995.000**	**97.006.160**	**42.988.840**	**69,30%**
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60.000.000	29.415.000	30.585.000	49,03%
Job Fair/Bursa Kerja	79.995.000	67.591.160	12.403.840	84,49%
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kabupaten/Kota)	**50.000.000**	**0**	**50.000.000**	**0%**
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	50.000.000	0	50.000.000	0%

Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	**0**	**0**	**0**	**0%**
Koordinasi dan Sinronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	0	0	0	0%
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**Selisih**	**%**
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**514.995.620**	**361.770.472**	**153.225.148**	**70,20%**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**40.000.000**	**18.421.000**	**21.579.000**	**46,10%**
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	15.000.000	14.985.000	15.000	99,90%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	25.000.000	3.436.000	21.564.000	13,74%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	**474.995.620**	**343.349.472**	**131.646.148**	**72,30%**
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.999.560	68.840.606	31.158.954	68,84%

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.996.500	63.652.367	36.344.133	63,65%
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**Selisih**	**%**
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	99.999.560	74.548.839	25.450.721	74,55%
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	136.307.660	38.692.340	77,89%
TOTAL KESELURUHAN	**9.448.997.120**	**8.234.464.692**	**1.214.532.427,03**	**87,15%**

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, besar anggaran (DPPA) Dinas ketenagakerjaan Kota Balikpapan tahun 2022 sebesar Rp. 9.448.997.120,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.234464.602,97 sehingga terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp.1.214.532.427,03-.

Adapun rincian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Disnaker Tahun Anggaran 2022 sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 e.81
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2022
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BALIKPAPAN

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	
					I		II		III		IV					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**81,5**	**7.079.207.500**		**1.214.591.657**	**79,32**	**2.468.882.775**		**1.124.617.756**	**79,63**	**1.638.691.862**	**79,475**	**6.446.784.050**	**98%**	**91%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	**Nilai Sakip Perangkat daerah**	**63**	**15.000.000**		**-**		**1.286.546**	**62,32**	**3.300.000**		**1.387.668**	**62,32**	**5.974.214**	**99%**	**40%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	3	7.500.000	2	-		1.286.546	1	2.100.000		1.387.668	**3**	**4.774.214**	**100%**	**64%**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	2	7.500.000	1	-		-	1	1.200.000			**2**	**1.200.000**	**100%**	**16%**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan**	**83,47**	**5.591.537.000**		**1.155.865.610**	**74,93**	**2.084.322.419**		**780.544.710**	**74,62**	**1.218.967.582**	**74,78**	**5.239.700.321**	**90%**	**94%**

		Perangkat Daerah														
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	26	5.589.037.000	6	1.155.865.610	15	2.084.322.419	2	778.954.710	2	1.218.967.582	**25**	**5.238.110.321**	**96%**	**94%**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	2.500.000		-	0,15	-	0,76	1.590.000			**0,91**	**1.590.000**	**91%**	**64%**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**81,53**	**777.050.800**		**17.802.650**	**78,95**	**264.532.504**		**108.279.433**	**84,64**	**222.650.929**	**81,8**	**613.265.516**	**100%**	**79%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	4.999.000		-	2,5	-	7,5	4.997.220			**10**	**4.997.220**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	12	50.115.900	6	-	6	12.032.900		12.452.535		19.788.525	**12**	**44.273.960**	**100%**	**88%**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	5	34.990.000	5	-		29.475.272		-			**5**	**29.475.272**	**100%**	**84%**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	78	301.751.200	38	10.835.550	14	133.425.200	8	34.510.910	18	64.963.530	**78**	**243.735.190**	**100%**	**81%**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	20	35.101.500		-	9	11.849.420	7	1.542.179	4	6.481.734	**20**	**19.873.333**	**100%**	**57%**

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	8.217.000		-		-		-	3	830.500	**3**	**830.500**	**100%**	**10%**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	200	35.000.000		-	10	-	40	-	150	12.005.000	**200**	**12.005.000**	**100%**	**34%**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekunsi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	225	306.876.200	11	6.967.100	113	77.749.712	55	54.776.589	46	118.581.639,97	**225**	**258.075.040,97**	**100%**	**84%**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79,12**	**199.170.000**		**-**	**80,5**	**5.390.000**		**159.396.000**	**84,64**	**13.875.000**	**82,6**	**178.661.000**	**104%**	**90%**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	7	199.170.000	1	-	1	5.390.000	4	159.396.000	1	13.875.000	**7**	**178.661.000**	**100%**	**90%**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**82,75**	**181.449.700**		**23.947.047**	**78,54**	**58.479.876**		**23.161.552**	**84,64**	**52.535.353**	**81,6**	**158.123.828**	**99%**	**87%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	1	3.500.000	0,5	1.750.000	0,5	1.750.000		-			**1**	**3.500.000**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6	26.838.000	1,5	4.951.647	1,2	6.670.000	0,7	1.700.800	2,6	6.818.200	**6**	**20.140.647**	**100%**	**75%**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS	7	151.111.700	7	17.245.400	7	50.059.876	7	21.460.752	7	45.717.153	**7**	**134.483.181**	**100%**	**89%**

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78,8**	**315.000.000**		**16.976.350**	**80,6**	**54.871.430**		**49.936.061**	**84,64**	**129.275.330**	**82,6**	**251.059.171**	**105%**	**80%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	15	235.000.000	6	16.976.350	1	32.493.830	5	49.936.061	3	74.757.680	**15**	**174.163.921**	**100%**	**74%**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan yang dipelihara	2	80.000.000	0,36	-	0,56	22.377.600	0,5	-	0,58	54.517.650	**2**	**76.895.250**	**100%**	**96%**
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase pencari Kerja Yang Mendapat Palatihan yang Tersalur**	**54**	**999.871.500**	**5**	**5.369.662**	**-**	**29.159.863**	**20**	**205.600.000**	**36**	**636.084.004**	**61**	**876.213.529**	**113%**	**88%**
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan**	**100**	**949.973.000**	**14,6**	**5.369.662**		**29.159.863**	**63**	**205.600.000**	**22,40**	**594.293.274**	**100**	**834.422.799**	**100%**	**88%**
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	95	949.973.000	12	5.369.662		29.159.863	60	205.600.000	20	594.293.274	**92**	**834.422.799**	**97%**	**88%**
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta**	**10**	**49.898.500**		**-**		**-**	**2,3**	**-**		**41.790.730**	**2,3**	**41.790.730**	**23%**	**84%**

		yang Terakreditasi														
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah LPK Swasta yang dibina	30	49.898.500		-	4		25	-	1	41.790.730	**30**	**41.790.730**	**100%**	**84%**
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas**	**20**	**-**		**-**		**-**		**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**100%**	
	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil	1	-		-	0	-	0	-	1	-	**1**	**-**	**100%**	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun**	**3,2**	**399.952.800**		**19.200.780**		**40.538.250**		**95.054.808**	**2,92**	**102.909.370**	**2,92**	**257.703.208**	**91%**	**64%**
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun**	**2**	**399.952.800**		**19.200.780**	**1**	**40.538.250**		**95.054.808**	**1**	**102.909.370**	**2**	**257.703.208**	**100%**	**64%**
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Kajian akademis Perda Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun dan Dokumen Kajian Akademis	1	299.993.800	0,2	19.200.780	0,24	40.538.250	0,5	95.054.808	0,06	7.160.400	**1**	**161.954.238**	**100%**	**54%**
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro yang disusun	40	99.959.000			7	-	26	-	7	95.748.970	**40**	**95.748.970**	**100%**	**96%**
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**23**	**454.969.700**	**8,67**	**-**	**3,72**	**60.572.650**	**5,4**	**83.436.260**	**7,21**	**147.984.434**	**25**	**291.993.344**	**109%**	**64%**

	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja**	**23**	**264.974.700**	**8,67**	**-**	**3,72**	**60.572.650**	**5,4**	**15.845.100**	**7,21**	**118.569.434**	**25**	**194.987.184**	**109%**	**74%**
	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	4300	149.974.800	1075	-	1075	4.018.000	1197	8.295.600	875	86.173.634	**4222**	**98.487.234**	**98%**	**66%**
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang mendapat sosialisasi bimbingan jabatan	6	64.999.900		-	1,5	7.050.000	2,7	7.549.500	0,35	32.395.800	**4,55**	**46.995.300**	**76%**	**72%**
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1	-		-		-		-			**0**	**-**		
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pembinaan wirausaha	25	50.000.000		-	25	49.504.650		-			**25**	**49.504.650**	**100%**	**99%**
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker**	**5**	**139.995.000**		**-**	**1**	**-**		**67.591.160**	**5,4**	**29.415.000**	**6,4**	**97.006.160**	**128%**	**69%**
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	jumlah aplikasi yang dipelihara	3	60.000.000		-	0	-	2,1	-	0,9	29.415.000	**3**	**29.415.000**	**100%**	**49%**
	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah JMF yang dilaksanakan	1	79.995.000		-	0	-	0,9	67.591.160			**0,9**	**67.591.160**	**90%**	**84%**

	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Permohonan Perpanjangan IMTA / Notifikasi yang diproses**	**100**	-		**-**	**0**	**-**		**-**		**-**	**0**	**-**		
	Koordinasi dan Sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu daerah kabupaten/Kota	Persentase Jumlah TKA yang mengurus perpanjangan Notifikasi	100	-			0	-		-			**0**	**-**		
	PERLINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Permohonan Perpanjangan IMTA / Notifikasi yang diproses**	**100**	**50.000.000**		**-**	**0**	**-**		**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100%**	
	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Persentase Jumlah TKA yang mengurus perpanjangan Notifikasi	100	50.000.000		-	0	-		-	100	-	**100**	**-**	**100%**	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama**	**69**	**514.995.620**	**10**	**-**	**25**	**60.404.106**	**28**	**63.339.100**	**24,5**	**238.027.266**	**87,5**	**361.770.472**	**127%**	**70%**
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan**	**80**	**40.000.000**		**-**	**20**	**-**		**14.985.000**	**62**	**3.436.000**	**82**	**18.421.000**	**103%**	**46%**

	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Dokumen pengesahan, pembaharuan, dan pelaporan Peraturan Perusahaan (PP)	40	-	0	-	0	-	0	-	55		**55**	**-**	**138%**	
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Jumlah dokumen pencatatan perjanjian kerja	100	15.000.000	88	-	12	-		14.985.000			**100**	**14.985.000**	**100%**	**100%**
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah dokumen pendataan sarana hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan pengupahan	20	25.000.000		-	5	-		-		3.436.000	**5**	**3.436.000**	**25%**	**14%**
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan**	**80**	**474.995.620**	**20**	**-**	**20**	**60.404.106**		**48.354.100**	**47,5**	**234.591.266**	**87,5**	**343.349.472**	**109%**	**72%**
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	2	99.999.560	1	-	0,6	26.218.181	0,25	-		42.622.425	**1,85**	**68.840.606**	**93%**	**69%**

	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi)	50	99.996.500	12	-		3.085.925	3	1.864.300	35	58.702.142	**50**	**63.652.367**	**100%**	**64%**
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah dokumen keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh/federasi/konfederasi yang tercatat	3	99.999.560		-	2	31.100.000	0,82	36.949.800	0,15	6.499.039	**2,97**	**74.548.839**	**99%**	**75%**
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan LKS Tripartit	4	175.000.000		-	0,85	-	0,15	9.540.000	3	126.767.660	**4**	**136.307.660**	**100%**	**78%**
		Jumlah pertemuan Dewan Pengupahan	6													
		Jumlah pertemuan Tim Deteksi Dini	4										**0**	**-**		
				9.448.997.120		**1.239.162.099**		**2.659.557.644**		**1.572.047.924**		**2.763.696.935,97**	**0**	**8.234.464.602,97**		

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa urusan ketenagakerjaan bukan merupakan urusan wajib yang bersifat dasar, sehingga untuk pengukuran kinerja pelayanannya tidak mempergunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk pengukuran kinerja pelayanan mempergunakan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Disnaker Kota Balikpapan pada tahun sebelumnya sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Capaian Kinerja	Rasio Capaian (%)
1	2	3		4	5	6	7
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	63.8	64.29	101%
		2.	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%	3.2	2.92	91%
		3.	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	%	54	61	113%
		4.	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	23	25	110%
		5.	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	69	87.5	127%
2.	Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel	1.	Nilai SAKIP OPD	Nilai	63	62.32	99%
		2.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	32.91	33.59	102%
		3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	85	86.51	102%
Rata – Rata Capaian							**104%**

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hampir seluruh sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan mencapai nilai di atas target yang telah ditentukan. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 104%. berdasarkan hasil evaluasi capaian terdiri atas 2 Sasaran Strategis, yaitu:

1. **Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja** yang terdiri atas 5 indikator kinerja, masing-masing adalah:
    - **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** Memperoleh capaian kinerja sebesar 101% dengan realisasi sebesar 64.29% dari target 63.8%.
    - **Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)** yang tersusun sebesar 2.92 % dari target 3.2 % sehingga capaian kinerjanya mencapai 91%.
    - **Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan yang Tersalur** , kegiatan tersebut mencapai realisasi sebesar 61 % dari target 54 %. Sehingga besar capaian kinerjanya sebesar 113%
    - **Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan** terealisasi sebesar 25 % dari target 23 %. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 110%.
    - **Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama** terealisasi sebesar 87.5 % dari target 69 %. Sehingga capaian Kinerjanya sebesar 127%
2. **Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel** terdiri atas 2 indikator kinerja, masing-masing adalah :
    - **Nilai SAKIP OPD** dengan capaian kinerja sebanyak 99%, Capaian tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 86.51 % dari target sebesar 63 %.
    - Realisasi **Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** sebesar 33.59 % dari target sebesar 32.91 %. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 102%.
    - **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah** teralisasi sebesar 86.51 % dari target sebesar 85 %. Sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 102%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan hasil telaah permasalahan pada lingkup tugas dan pelayanan Dinas, telaah visi dan misi OPD yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat Provinsi, serta telaah renstra kementrian dan lembaga, maka isu-isu strategis yang akan di respon oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dalam perencanaan tahun 2024 adalah :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan yang masih diatas rata – rata regional dan nasional;
2. Penyerapan tenaga kerja terdidik yang masih rendah, kompetenesi/ ketrampilan, dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan pasar kerja yang membutuhkanya;
3. Produktivitas tenaga kerja Kota Balikpapan yang masih rendah;
4. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas;
5. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan penempatan serta pemberdayaan tenaga kerja;
6. Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dan peningkatan kepersertaan jaminan social tenaga kerja;
7. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja Meningkatkan kwalitas penyelenggaraan transmigrasi.

Sebagai upaya penanganan permasalahan di atas, pada tahun 2024 Disnaker Kota Balikpapan akan melaksanakan :

a. Pemanfaatan aplikasi layanan ketenagakerjaan secara daring melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISKA), dengan konten berupa pendaftaran pencaker, pelaporan pencaker/lowongan kerja, dll.;
b. Pembuatan AK-I Online dan Bursa Kerja Online;
c. Pelayanan antar kerja dengan target penempatan sebanyak 1500 orang melalui mekanisme antar kerja local (AKL);
d. Pelayanan fasilitasi rekrutmen tenaga kerja bagi perusahaan;
e. Pelayanan pembinaan / motivasi bagi pencaker fresh graduate melalui kegiatan Wednesday Inspiring setiap bulannya pada minggu ke-1 dan minggu ke-3; dan
f. Pembinaan bagi Tenaga Kerja Mandiri Terdidik dan pencaker korban PHK melalui Kegiatan Perluasan Kerja;
g. Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

h. Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK
i. Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja
j. Pemasyarakatan Hubungan Industrial
k. Melaksanakan Seleksi Pelatihan Online
l. Berupaya untuk membangun komunikasi yang baik dengan perusahaan di Kota Balikpapan untuk penyerapan SDM yang telah dilatih
m. Berupaya membangun kerjasama dengan BLK Milik Pemerintah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Balikpapan

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana**
(2)		**(3)**	**(5)**	**(6)**	**(2)**		**(3)**	**(5)**	**(6)**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Disnaker**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**83.5%**	**8.474.636.807**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Disnaker**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**83.5%**	**8.474.636.807**
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Disnaker**	**Nilai SAKIP OPD**	**65**	**17.996.314**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Disnaker**	**Nilai SAKIP OPD**	**65**	**0**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Perencanaan Disnaker (Renstra, Renja, dan Renja Perubahan)	3 Dok	8.998.157	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Perencanaan Disnaker (Renstra, Renja, dan Renja Perubahan)	3 Dok	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	2 Laporan	8.998.157	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	2 Laporan	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Disnaker**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**83.77%**	**6.261.217.597**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Disnaker**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**83.77%**	**6,559,511,317**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/bln	6.258.218.211	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/bln	6,559,511,317
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.999.386	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Disnaker**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**82.15%**	**368.549.461**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Disnaker**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**82.15%**	**368.549.461**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disnaker	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	40.225.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disnaker	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	40,225,500
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disnaker	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	31 orang	328.323.961	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disnaker	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	31 orang	328,323,961

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Disnaker**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**81.93%**	**948.142.618**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Disnaker**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**81.93%**	**1,091,387,415**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.998.771	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.998.771
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.993.857	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	26,091,700
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disnaker	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	41.991.399	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disnaker	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	33,282,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 Paket	362.029.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 Paket	456,435,800
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	20 Paket	42.112.651	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	20 Paket	54,846,250
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	9.857.546	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	8,574,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226 Laporan	456.158.894	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226 Laporan	456,158,894
Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD	5 Dokumen	0	Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD	5 Dokumen	50,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Disnaker**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**79.62%**	**256.658.228**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Disnaker**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**79.62%**	**351,500,000**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	190,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	16 Unit	256.658.228	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	16 Unit	161,500,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Disnaker**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83.15%**	**256.147.536**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Disnaker**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83.15%**	**284,679,837**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.199.140	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,199,140

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi SumbeR Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	6 Laporan	41.991.399	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi SumbeR Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	6 Laporan	44,432,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		--	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Laporan	26,091,700
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	13 Laporan	209.956.997		Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	13 Laporan	209,956,997
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Disnaker**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79.30%**	**365.925.053**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Disnaker**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79.30%**	**365,925,053**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	269.944.711-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	269,944,711
Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	95.980.342	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang DipeliharA	16 Unit	95,980,342

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Disnaker**	**Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun**	**0.033**	**135.440.100**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Disnaker**	**Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun**	**0.033**	**135.440.100**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Disnaker**	**Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun**	**1 Dok**	**135.440.100**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Disnaker**	**Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun**	**1 Dok**	**135.440.100**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Disnaker	Jumlah SDM Kabupaten / Kota yang mengikuti pelatihan Penyusunan RTK Mikro	43 Orang	135.440.100	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Disnaker	Jumlah SDM Kabupaten / Kota yang mengikuti pelatihan Penyusunan RTK Mikro	43 Orang	135.440.100
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Disnaker**	**Persentase Pencari Kerja yang mendapat pelatihan yang tersalu**	**55%**	**1.257.334.200**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Disnaker**	**Persentase Pencari Kerja yang mendapat pelatihan yang tersalu**	**55%**	**1,347,570,600**
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Disnaker**	**Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan**	**100 %**	**1.137.807.000**	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Disnaker**	**Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan**	**100 %**	**1,287,807,000**
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	111 Orang	1.137.807.000	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	111 Orang	1,287,807,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**

Daerah dan Program/Kegiatan			Kinerja		Daerah dan Program/Kegiatan			Kinerja	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Disnaker**	**Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi**	**15 %**	**59.763.600**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Disnaker**	**Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi**	**15 %**	**0**
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Disnaker	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 LPK	59.763.600	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Disnaker	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 LPK	0
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Disnaker**	**Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil**	**1 kali**	**59.763.600**	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Disnaker**	**Jumlah sosialisasi peningkatan produktivita pada perusahaan kecil**	**1 kali**	**59,763,600**
Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Disnaker	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	20 Perusahan	59.763.600	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Disnaker	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	20 Perusahan	59,763,600
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Disnaker**	**Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan**	**23.5%**	**572.219.539**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Disnaker**	**Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan**	**23.5%**	**462,455,939**
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Disnaker**	**Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja**	**23.5%**	**359.253.941**	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Disnaker**	**Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja**	**23.5%**	**249,490,341**
Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	4.500 Pencaker	179.963.141	Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	4.500 Pencaker	154,963,141
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	480 Orang	59.763.600	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Jabatan	480 Orang	47,263,600
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**

Daerah dan Program/Kegiatan			Kinerja		Daerah dan Program/Kegiatan			Kinerja	
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	1 Orang	59.763.600	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	1 Orang	47,263,600
Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	18 Orang	59.763.600	Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	18 Orang	0
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Disnaker**	**Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada system loker Disnaker**	**5%**	**167.965.598**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Disnaker**	**Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada system loker Disnaker**	**5%**	**167,965,598**
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	71.985.256	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	71.985.256
Job Fair / Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah JMF yang dilaksanakan Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	2 Kali 500 Orang	95.980.342	Job Fair / Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah JMF yang dilaksanakan Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	2 Kali 500 Orang	95.980.342
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**

Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	**Disnaker**	**Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani**	**100%**	**45.000.000**	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota**	**Disnaker**	**Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani**	**100%**	**45.000.000**
Penyediaan Layanan Terpadu pada CPMI	Disnaker	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	5 Orang	45.000.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada CPMI	Disnaker	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	5 Orang	45.000.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Disnaker**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama**	**69%**	**617.873.449**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Disnaker**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama**	**69%**	**469.883.278**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Disnaker**	**Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan**	**80%**	**47.990.171**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Disnaker**	**Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan**	**80%**	**0**
Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial	45 Perusahaan	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial	45 Perusahaan	0
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**

Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Perusahaan	17.996.314	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Perusahaan	0
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	25 Laporan	29.993.857	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	25 Laporan	0
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	**Disnaker**	**Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan**	**80%**	**569.883.278**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota**	**Disnaker**	**Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan**	**80%**	**469.883.278**
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Disnaker	Jumlah Perselisihan yang dicegah	200 Perkara	119.975.427	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Disnaker	Jumlah Perselisihan yang dicegah	200 Perkara	119.975.427
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Disnaker	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	40 Perkara	119.975.427	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Disnaker	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	40 Perkara	94.975.427
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Disnaker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi dan 24 Serikat Pekerja	119.975.427	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Disnaker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi dan 24 Serikat Pekerja	94.975.427
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	209.956.997	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	159.956.997
				11.057.504.095					**11,436,903,000**

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Identifikasi terhadap arah kebijakan nasional maupun provinsi sebagaimana disebutkan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjan Tahun 2020-2024	
1	Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional		
2	Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja		
3	Percepatan sertifikasi profesi		
4	Perluasan kesempatan kerja formal		
5	Penguatan wirausaha produktif		
6	Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif		
7	Penegakan hukum ketenagakerjaan		
8	Peningkatan perlindungan pekerja migran		
9	Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan, dan akuntabel		
B	Provinsi	Renstra Disnakertrans Prov. Kaltim Periode 2019-2023	
1	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		
2	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja		
3	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		

Sesuai dengan hasil identifikasi kebijakan nasional, provinsi, maupun reviu terhadap rancangan awal RKPD, maka dirumuskan kebutuhan program dan kegiatan Disnaker Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi-Misi Wali Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu : "Terwujudnya Balikpapan sebagia Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman" serta dengan memperhatikan salah satu Misi ke-1 yaitu "Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik". Identifikasi pernyataan tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Renstra Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Identifikasi Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah Terhadap Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Capaian Kinerja	%Rasio Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	63.8	64.29	101%
			2.	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%	3.2	2.92	91%
			3.	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	%	54	61	113%
			4.	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	23	25	110%
			5.	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	69	87.5	127%
2.		Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel	1.	Nilai SAKIP OPD	Nilai	63	62.32	99%
				Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	32.91	33.59	102%
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	85	86.51	102%
Rata – Rata Capaian								**104%**

Berdasar hasil identifikasi di atas, maka tujuan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan adalah Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat, sedangkan Sasaran Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dirumuskan sebagai berikut :

1) Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
2) Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel

3.3 Program dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan Disnaker Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2024, meliputi 4 program prioritas yang termasuk ke dalam belanja publik sebagaimana berikut :

a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas 3 Kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :
   - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
     - ✓ Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
   - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
     - ✓ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
   - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
     - ✓ Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

b. Program Perencanaan Tenaga Kerja, terdiri atas 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan diantaranya:
   - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
     - ✓ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

c. Program Penempatan Tenaga Kerja; terdiri atas 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu :
   - Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota
     - ✓ Pelayananan Antar Kerja, Penyuluhan
     - ✓ Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
     - ✓ Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
     - ✓ Perluasan Kesempatan Kerja
   - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
     - ✓ Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
     - ✓ Job Fair / Bursa Kerja
   - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
     - ✓ Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

d. Program Hubungan Industrial, terdiri atas 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu :

- Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota,
  - ✓ Pengesahaan peraturan perusahaan bagi perusahaan;
  - ✓ Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan;
  - ✓ Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan jaminan Sosial tenaga kerja serta Pengupahan.
- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota
  - ✓ Pencegahan perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah kabupaten/Kota,
  - ✓ Penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota,
  - ✓ Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha federasi serikat pekerja / serikat buruh serta nonafiliasi
  - ✓ Pelaksanaan Operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program prioritas di atas, maka ditunjang dengan program/kegiatan yang merupakan belaja rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 6 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah,
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rincian program dan kegiatan Disnaker Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 disebutkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**07**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**85,5%**	**8,642,154,178**	**APBD Kota**	**Penting**	**85,5%**	**9.617.011.766**
2	**07**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP OPD**	**Kota Balikpapan**	**68**	**0**	**APBD Kota**	**Penting**	**68**	**19.891.326**
2	07	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	Kota Balikpapan	3 Dok	0	APBD Kota	'Penting	3 Dok	9.945.663
2	07	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	Kota Balikpapan	2 Dok	0	APBD Kota	'Penting	2 Dok	9.945.663
2	**07**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**83.77%**	**6,559,511,317**	**APBD Kota**	**Penting**	**84,07%**	**6.920.523.809**
2	07	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan	30 Org/bln	6,559,511,317	APBD Kota	Penting	26 Dok	6.917.208.588
2	07	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Balikpapan	1 Laporan	0	APBD Kota	Penting	1 Dok	3.315.221
Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Rencana Tahun 2024**				**Catatan Penting**	**Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025**	

					Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	**07**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**82.15%**	**368,549,461**	**APBD Kota**	**Penting**	**82,55%**	**406.897.362**
2	07	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Balikpapan	31 Paket	40,225,500	APBD Kota	Penting	32 orang, 2 jenis	44.461.245
2	07	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Kota Balikpapan	31 orang	328,323,961	APBD Kota	Penting	32 orang	362.436.117
2	**07**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**81.93%**	**1,091,387,415**	**APBD Kota**	**Penting**	**81,93%**	**1.098.438.096**
2	07	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	1 Paket	5,998,771	APBD Kota	Penting	12 jenis	6.630.442
2	07	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	2 Paket	26,091,700	APBD Kota	Penting	19 Jenis Dan 13Jenis	33.152.210
2	07	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Balikpapan	5 Paket	33,282,000	APBD Kota	Penting	8 jenis	46.413.094
2	07	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kota Balikpapan	3 Paket	456,435,800	APBD Kota	Penting	80 jenis	400.151.206
2	07	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Kota Balikpapan	20 Paket	54,846,250	APBD Kota	Penting	20 jenis	46.547.113
Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Rencana Tahun 2024**				**Catatan Penting**	**Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025**	

					Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	07	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Kota Balikpapan	4 Dokumen	8,574,000	APBD Kota	Penting	0	0
2	07	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan	226 Laporan	456,158,894	APBD Kota	Penting	275 kali	510.544.031
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan	5 Dokumen	50,000,000	APBD Kota	Penting	5 Dokumen	55.000.000
2	**07**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Balikpapan**	**79.62%**	**351,500,000**	**APBD Kota**	**Penting**	**80,12%**	**483.684.340**
					Pengadaan Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Dinas	Kota Balikpapan	2 Unit	190,000,000				200.000.000
2	07	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Kota Balikpapan	16 Unit	161,500,000	APBD Kota	Penting	17 Jenis	283.684.340
2	**07**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Balikpapan**	**83.15%**	**284,679,837**	**APBD Kota**	**Penting**	**83,55%**	**283.119.872**
2	07	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan	1 Laporan	4,199,140	APBD Kota	Penting	1 jenis	4.641.309
2	07	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Kota Balikpapan	6 Laporan	44,432,000	APBD Kota	Penting	6 jenis	46.413.094
2	07	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan		26,091,700	APBD Kota	Penting	8 paket	-
2	07	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kota Balikpapan	13 Laporan	209,956,997	APBD Kota	Penting	7 orang	232.065.469
Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Rencana Tahun 2024**				**Catatan Penting**	**Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025**	

					Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	**07**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Balikpapan**	**79.30%**	**365,925,053**	**APBD Kota**	**Penting**	**79,80%**	**404.456.960**
2	07	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Balikpapan	12 unit	269,944,711	APBD Kota	Penting	14 unit	298.369.889
2	7	1	2.09	7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		16 Unit	95,980,342			10 paket	106.087.072
2	**.07**	**.02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun**	**Kota Balikpapan**	**3.3 %**	**135,440,100**	**APBD Kota**	**Penting**	**3,4%**	**143.088.836**
2	.07	.02	.2.01	.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun**	Kota Balikpapan	**1 Dok**	**135,440,100**	APBD Kota	Penting	**1 Dok**	**143.088.836**
					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro		43 Orang	135,440,100			48 Orang	143.088.836
2	**.07**	**.03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur**	**Kota Balikpapan**	**55%**	**1,347,570,600**	**APBD Kota**	**Penting**	**56%**	**1.389.731.491**
2	**.07**	**.03**	**.2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan**	**Kota Balikpapan**	**100 %**	**1,287,807,000**	**APBD Kota**	**Penting**	100%	**1.257.618.077**
2	.07	.03	.2.01	.01	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Kota Balikpapan	111 Orang	1,287,807,000	APBD Kota	Penting	120 Org	1.257.618.077
Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Rencana Tahun 2024**				**Catatan Penting**	**Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025**	

					Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	.07	.03	.2.02	.01	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi**	Kota Balikpapan	**15 %**	**0**	APBD Kota	Penting	15%	**66.056.707**
2	.07	.03	.2.02	.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Kota Balikpapan	30 LPK	0	APBD Kota	Penting	30 LPK	66.056.707
2	.07	.03	.2.04		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah Sosialisasi peningkatan Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Kota Balikpapan	**1 kali**	**59,763,600**	APBD Kota	Penting	**1 Dok**	**66.056.707**
2	.07	.03	.2.04	.01	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Balikpapan	20 Perusahan	59,763,600	APBD Kota	Penting	25 Perusahaan	66.056.707
2	**.07**	**.04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan**	**Kota Balikpapan**	**23,6%**	**462,455,939**	**APBD Kota**	**Penting**	**23,6%**	**566.679.049**
2	.07	.04	.2.01 .		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja**	Kota Balikpapan	**23,6%**	**249,490,341**	APBD Kota	Penting	**23,6%**	**331.026.673**
2	.07	.04	.2.01 .	.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	Kota Balikpapan	4.500 Pencaker	154,963,141	APBD Kota	Penting	4.500 Pencaker	198.913.259
2	.07	.04	.2.01 .	.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Balikpapan	480 Orang	47,263,600	APBD Kota	Penting	480 Orang	66.056.707
2	.07	.04	.2.01 .	.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Kota Balikpapan	1 Orang	47,263,600	APBD Kota	Penting	1 Orang	66.056.707
2	.07	.04	.2.01 .	.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pembinaan wirausaha	Kota Balikpapan	18 Orang	0	APBD Kota	Penting	0	0
Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Rencana Tahun 2024**				**Catatan Penting**	**Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025**	

					Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	**.07**	**.04**	**.2.03.**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker**	Kota Balikpapan	5%	**167,965,598**	APBD Kota	Penting	**5%**	**185.652.375**
3	.07	.04	.2.03.	.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Balikpapan	1 Dokumen	71,985,256	APBD Kota	Penting	1 Dokumen	79.565.304
2	.07	.04	.2.03.	.03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah JMF yang dilaksanakan Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kota Balikpapan	2 Kali 500 Orang	95,980,342	APBD Kota	Penting	2 Kali 500 Orang	106.087.072
2	**.07**	**.04**	**.2.04.**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani**	Kota Balikpapan	**100%**	**45,000,000**	APBD Kota	Penting	**100%**	**50.000.000**
2	.07	.04	.2.04.	.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Kota Balikpapan	5 Orang	45,000,000	APBD Kota	Penting	5 Orang	50.000.000

Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Rencana Tahun 2024**				**Catatan Penting**	**Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025**	
							Lokasi	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**

2	**.07**	**.05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama**	**Kota Balikpapan**	**69%**	**469,883,278**	**APBD Kota**	**Penting**	**69%**	**682.935.523**
2	**.07**	**.05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan**	**Kota Balikpapan**	**80%**	**0**	**APBD Kota**	**Penting**	**80%**	**53.043.536**
2	.07	.05	2.01	.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan	Kota Balikpapan	45 Perusahaan	0	45 Dokumen	Penting	45 Dokumen	-
2	.07	.05	02:03	.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Balikpapan	1 Perusahaan	0	100 Dokumen	Penting	100 Dokumen	19.891.326
2	.07	.05	02:03	.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	Kota Balikpapan	25 Laporan	0	25 Dokumen	Penting	25 Laporan	33.152.210

Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Rencana Tahun 2024**				**Catatan Penting**	**Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025**	
							Lokasi	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
2	.07	.05	02:02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah**	**Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan**	Kota Balikpapan	**80%**	**469,883,278**	APBD Kota	**Penting**	**80%**	**629.891.987**

					Kabupaten/Kota								
2	.07	.05	02:02	.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Kota Balikpapan	200 Perkara	119,975,427	APBD Kota	Penting	200 Perkara	132.608.839
2	.07	.05	02:02	.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kota Balikpapan	40 Perkara	94,975,427	APBD Kota	Penting	40 Perkara	132.608.839

Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Rencana Tahun 2024**				**Catatan Penting**	**Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025**	
							Lokasi	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**

2	.07	.05	02:02	.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	Kota Balikpapan	1 Asosiasi 24 Serikat Pekerja	94,975,427	APBD Kota	Penting	1 Asosiasi dan 24 Serikat Pekerja	132.608.839
2	.07	.05	02:02	.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Kota Balikpapan	1 Lembaga	159,956,997	APBD Kota	Penting	1 Lembaga	232.065.469
									11,436,903,000				12.399.446.664

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III dalam Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Balikpapan.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai OPD yang bersinggung/berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha/perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Oleh karena itu, secara tidak langsung Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan mandukung prioritas Pemerintah Kota dengan Mewujudkan penyelenggaran tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kota.

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Inovasi ialah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya. Sementara itu, Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam menyediakan pelayanan publik. Inovasi dimaksud sangat penting untuk menyikapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi salah satu agenda reformasi birokrasi.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan merupakan Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka turut serta melaksanakan pelayanan publik berkualitas, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan beberapa Inovasi. Adapun Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. **Layanan AK-I Online**

   Kartu Tanda Pencari Kerja yang sering disebut sebagai kartu AK1. Layanan Pembuatan AK-I Online adalah layanan membuatan Kartu pencari kerja dimana Pencari kerja yang berdomisili Kota Balikpapan dapat melakukan pendaftaran secara online dan mencetak kartu AK 1 secara mandiri (tanpa harus datang ke kantor). Kartu ini berisi beberapa informasi mengenai pemiliknya seperti Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP, dan data kelulusan pendidikan. Layanan ini dilaksanakan guna Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat. Sehingga Proses pembuatan AK-I dapat lebih cepat dan Para pencari kerja dapat dengan mudah mengakses pembuatan Kartu AK-I.

2. Layanan Buka Line (Bursa Kerja Online)

Sistem Informasi Bursa Kerja Online Berbasis Web adalah sistem yang mampu menampilkan informasi lowongan sesuai dengan masukan dari pelamar kerja untuk memperoleh informasi lowongan yang tersedia dalam bursa kerja. Layanan ini dilaksanakan guna Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat. Sehingga Para pencari kerja dapat dengan mudah mengakses lowongan kerja dan Memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja.

3. Layanan Halo HI

Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan inovasi Layanan Halo HI, layanan tersebut merupakan Layanan Konsultasi Bidang Hubungan Industrial yang bertujuan untuk memudahkan layanan konsultasi tanpa harus datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Layanan Halo HI memberikan dampak positif bagi para pekerja diantaranya :

a) Tenaga kerja dapat dengan mudah melakukan konsultasi terkait permasalahan Hubungan Industrial
b) Meningkatkan layanan ketenagakerjaan bagi para pengguna layanan
c) Memfasilitasi Tenaga Kerja dengan perusahaan terkait permasalahan Hubungan Industrial

4. Layanan Halo Penta

Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan inovasi Layanan Halo Penta. Layanan Halo Penta merupakan Layanan Konsultasi Bidang PPK yang bertujuan untuk memudahkan layanan konsultasi tanpa harus datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Layanan Halo Penta memberikan dampak positif bagi para pekerja diantaranya :

a) Para pencari kerja dapat dengan mudah melakukan konsultasi terkait informasi Ketenagakerjaan
b) Meningkatkan layanan ketenagakerjaan bagi para pengguna layanan
c) Memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja

5. Layanan Halo Lattas

Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan inovasi Layanan Halo Lattas. Layanan Halo Lattas merupakan Layanan Konsultasi Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga Kerja yang bertujuan untuk memudahkan layanan konsultasi tanpa harus datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Adapun dampak positif dari Layanan Lattas adalah sebagai berikut :

a) Para pencari kerja dapat dengan mudah mengakses informasi terkait Pelatihan dan produktivitas tenagakerja
b) Meningkatkan layanan ketenagakerjaan bagi para pengguna layanan
c) Memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan terkait Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja

BAB VI

PENUTUP

6.1 Catatan Penting

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Ketenagakerjaan. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal.

b. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (misalnya tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang, Sub Koordinator, Subbag, dan seluruh staf Dinas Ketenagakerjaan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2024 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Dinas Ketenagakerjaan serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Balikpapan, 28 Februari 2023

Dinas Ketenagakerjaan

Kota Balikpapan

ANI MUFAIDAH

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis DP3AKB Tahun 2021–2026 yang memuat kebijakan,program – program, kegiatan DP3AKB Kota Balikpapan selama kurun waktu satu tahun sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) merupakan faktor mendasar untuk lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabakan. Diharapkan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024.

Balikpapan, 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Balikpapan

ALWIATI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022) 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 99

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 100

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah 103

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 131

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 132

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 132

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Perangkat Daerah 135

3.3 Program dan Kegiatan 136

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 173

BAB V Inovasi Perangkat Daerah 182

BAB VI Penutup 184

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pengukuran Sasaran Rencana Kerja DP3AKB Tahun 2022	7
Tabel 2.2	T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	9
Tabel 2.3	TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AKB Kota Balikpapan	100
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	104
Tabel 2.5	T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2024	131
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DP3AKB Tahun 2024	135
Tabel 3.2	T-C .33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	140
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DP3AKB Tahun 2024	174
Tabel 5.1	Inovasi Yang Dilakukan DP3AKB Kota Balikpapan	182

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis (Renstra) OPD lima tahunan yang dituangkan dalam Renja OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), merupakan pedoman bagi PD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Penjabaran yang lebih teknis dari Renstra PD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau Renja PD. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing OPD secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi

daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat khususnya pada urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (kelurahan) . Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya mendapatkan perhatian pada kualitas proses penyusunan dokumen rencana kerja (renja) Organisasi Perangkat Daerah, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan Pembangunan daerah, karena Renja DP3AKB Kota Balikpapan ini adalah merupakan salah satu dokumen perencanaan pada DP3AKB, yang dalam penyusunannya harus di sinkronkan dan berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Balikpapan juga dokumen Renstra DP3AKB Kota Balikpapan, khususnya yang terkait indikator kinerja dan target kinerja yang diharapkan tercapai pada tahun anggaran 2024.

Dokumen Rencana kerja DP3AKB memuat informasi tentang Sasaran Strategi, indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2024 , program dan kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan tercapai pada tahun 2024. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan kegiatan.

Sesuai dengan Peaturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) merupakan salah satu dinas teknis di jajaran Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang bersifat konkruen pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa (kelurahan).

Proses penyusunan Renja DP3AKB tahun 2024 didasarkan pada Renstra DP3AKB 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas Pembangunan daerah serta tugas dan fungsi DP3AKB dan diselaraskan dengan

hasil rapat Forum OPD DP3AKB . Tahun 2024 merupakan tahun ke-3 perencanaan pembangunan menengah Kota Balikpapan yang berpedoman pada RPJMD 2021 - 2026.

Penyusunan Renja sejalan dengan mengacu kepada Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 yaitu: : *"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"* dengan lima misi yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
Misi 3 : Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
Misi 4 : Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Untuk mewujudkan serta menunjang Visi tersebut di atas DP3AKB mendukung pada misi ke dua yaitu *" Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi"*. Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut maka akan disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (PD) DP3AKB tahun 2024, antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pementukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dilakukan perubahan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pegesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Instruksi Prsiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
16. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja DP3AKB tahun 2024 adalah untuk mengintegrasikan program-program pembangunan dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis DP3AKB Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 . Program dan Kegiatan dalam rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah ini masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan arah dan kebijakan umum dan prioritas daerah maupun ketersediaan pendanaan APBD Kota Balikpapan pada tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja DP3AKB adalah sebagai kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi,misi dan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (PD) DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Inovasi Perangkat Daerah

BAB VI : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3AKB TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2024, diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dikarenakan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 masih berjalan. Pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan 12 Program, 29 Kegiatan yang terdiri dari 79 Sub Kegiatan

Hasil Pengukuran kinerja DP3AKB didasarkan pada sasaran dengan capaian sasaran sebagimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Pengukuran Sasaran Rencana Kerja DP3AKB Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022
Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Prosentase RKA Responsif Gender	4 %	8,64 %
Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contracepive Prevelence Rate/ mCPR)	70,61 %	52,81 %
Meningkatnya Kelurahan Katergori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Bekembang	5,88 %	38,24 %
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah DP3AKB	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB	27 %	32,99 %

Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2022 sebesar Rp. 27.793.017.610, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.919.361.863,00 (75,29%).

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluaraga Berencana Kota Balikpapan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	79 Nilai	-	75 Nilai	82,19 Nilai	109,59%	76 Nilai	76 Nilai	96%
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75 Nilai	-	75 Nilai	80,58	107,44%	75 Nilai	75 Nilai	100%
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	-	37 Orang	37 Orang	
						Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan dalam setiap bulan			26 Dokumen	26 Dokumen	100 %	-	26 Dokumen	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Nilai	-	75 Nilai	82,16 Nilai	109,55%	75 Nilai	75 Nilai	100%
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	2 Paket	2 Paket	
						Jumlah Jenis Peralatan Kantor			14 Jenis	5 Jenis	35,71%	-	5 Jenis	
						Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor			6 Jenis	6 Jenis	100%	-	6 Jenis	
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	2 Paket	2 Paket	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Jenis bahan logistik kantor (ATK)			24 Jenis	24 Jenis	100%	-	24 Jenis	
						Jenis bahan logistik kantor (Makan Minum)			15352 Kotak	8053 Kotak	52%	-	8053 Kotak	
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	-	-	-	3 Paket	3 Paket	
						Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan			3 Jenis	3 Jenis	100%	-	3 Jenis	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	-	-	49 Laporan	49 Laporan	
						Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah		-	24 Kali	24 Kali	100%	-	24 Kali	
						Frekuensi rapat koordinasi dan		-	25 Kali	16 Kali	64%	-	16 Kali	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						konsultasi ke Luar Daerah								
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75 Nilai	-	75 Nilai	82,16 Nilai	109,55%	75 Nilai	75 Nilai	100%
2	08	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan			4 Unit	4 Unit	100%	-	4 Unit	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 Nilai	-	-	82,16 Nilai	109,55%	75 Nilai	75 Nilai	100%
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik		-	7 Rekening	7 Rekening	100%	-	7 Rekening	
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	13 Laporan	13 Laporan	
						Jumlah Tenaga Non PNS			18 Orang	16 Orang	89%		16 Orang	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 Nilai	-	75 Nilai	82,16 Nilai	109,55%	75 Nilai	75 Nilai	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		-	-	-	-	62 Unit	62 Unit	
						Jumlah Kendaraan yang dipelihara : Roda 4		-	12 Unit	10 Unit	83%	-	10 Unit	
						Jumlah Kendaraan yang dipelihara : Roda 2		-	50 Unit	66 Unit	132%	-	66 Unit	
						BBM		-	30300 Liter	17021 Liter	56%	-	17021 Liter	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	-	-	-	7 Unit	7 Unit	
						Jumlah jenis Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya			4 Jenis	4 Jenis	100%	-	4 Jenis	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan anggaran yang Responsif Gender	100 %	-	82,4 %	77,78	94,39%	88,24 %	88,24 %	88%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Regulasi yang Mendukung Pelaksanaan PPRG	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender		-	-	-	-	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						(PPRG) Kewenangan Kabupaten /Kota								
						Terselenggaranya Pendampingan Penyusunan PPRG di OPD (pendampingan pihak ketiga)			3 OPD	8 OPD	266,67%	-	8 OPD	
						Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Balikpapan Tahun 2021-2024			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	
						Terlaksananya Sosialisasi PUG termasuk PPRG di Instansi Pemerintah			36 OPD	36 OPD	100%	-	36 OPD	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Penerbitan Modul PPRG			50 Buku	0	0%		0	
						Pencetakan Leaflet			1000 Leaflet	1000 Leaflet	100%	-	1000 Leaflet	
						Pencetakan Banner			36 Banner	60 Banner	167%	-	60 Banner	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Rumahan yang Dibina	113 Kelompok	-	15 Kelompok	16 Kelompok	106,67%	20 Kelompok	36 Kelompok	32%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
						Terselenggaranya Pelatihan bagi Pengelola Industri Rumahan (Jumlah orang pelaku industri rumahan terbina)			15 Orang	60 Orang	400%	-	60 Orang	
						Jumlah Organisasi Perempuan Terbina			20 Organisasi	20 Organisasi	100%	-	20 Organisasi	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Jumlah Profil Industri Rumahan yang disusun			1 Dokumen	0	0%		0	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	3 Organisasi	3 Organisasi	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 Penduduk Perempuan	8,01 per 100.000 penduduk perempuan	-	9,08 per 100.000 penduduk perempuan	21,06 per 100.000 penduduk perempuan	-31,94%	8,5 per 100.000 penduduk perempuan	8,5 per 100.000 penduduk perempuan	94%
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Cakupan RT Terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	62,24 %	-	5,33 %	9,08 %	170,36%	13,33 %	13,33 %	21%
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan		-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Rapat Koordinasi		-	12 Kali	12 Kali	100%	-	12 Kali	
						Jumlah Seksi PPA tingkat RT terlatih		-	150 Orang	100 Orang	67%	-	100 Orang	
						Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi dan Regulasi Perlindungan Perempuan termasuk PKDRT		-	150 Orang	150 Orang	100%	-	150 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang mendapatkan layanan komperhensif		-	84,09 %	100 %	118,92%	-	100 %	0
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		-	-	-	-	38	38	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupeten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan AMPK yang mendapatkan Layanan Pendampingan Tenaga Ahli		-	20 Orang	82 Orang	410%	-	82 Orang	
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan AMPK yang mendapatkan Pelayanan Medikolegal		-	40 Orang	3 Orang	8%	-	3 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan AMPK yang mendapatkan Layanan Penjangkauan dan Pendampingan		-	40 Orang	82 Orang	205%	-	82 Orang	
						Rapat Gelar Kasus Kekerasan yang dilaksanakan		-	12 Kali	12 Kali	100%	-	12 Kali	
						Tersedianya Rumah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan AMPK		-	1 Unit	1 Unit	100%	-	1 Unit	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan	24 Lembaga	-	4 Lembaga	4 Lembaga	100,00%	5 Lembaga	9 Lembaga	38%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan								
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		-	40 Orang	40 Orang	0%	40 Orang	80 Orang	
						Jumlah Kemitraan UPTD PPA dengan Pihak lainnya		-	0	1 Dokumen	0%	-	1 Dokumen	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga	100 %	-	71,43 %	83,33 %	116,66%	71,43 %	71,43 %	71%
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga yang mendapatkan pelayanan PUSPAGA	1,35 %	-	1,15 %	3,14 %	273,04%	1,2 %	1,2 %	89%
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi. Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi. Informasi. Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi		-	-	-	0%	6 Dokumen	6 Dokumen	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia								
						Terselenggaranya Koordinasi Lintas Sektor dalam Pendampingan Pengasuhan Anak dan Remaja			4 Kali	2 Kali	50%	-	2 Kali	
						Jumlah Klien yang mendapatkan Pelayanan di PUSPAGA			1000 orang	9827 orang	983%	-	9827 orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Jumlah Calon Pengantin usia anak yang Mendapat Layanan Penguatan Pranikah			100 Pasangan Catin	54 Pasangan Catin	54%	-	54 Pasangan Catin	
						Jumlah Kemitraan PUSPAGA dengan Pihak Lain			6 Dokumen	6 Dokumen	100%	-	6 Dokumen	
						Terselenggaranya Psychological First Aid/Trauma Healing dalam situasi bencana/krisis			30 Dokumen	1 Dokumen	3%	-	1 Dokumen	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	41,67 %	-	14,71 %	27,77 %	188,78%	33,33 %	33,33 %	80%
2	08	05	2.01		Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	59 OPD	-	5 OPD	5 OPD	100,00%	12 OPD	17 OPD	29%
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		-	-	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Tersedianya Profil Gender (IPG)			50 Buku/CD	0	0%	-	0 Buku/CD	
						Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Terkait Penyediaan Data Terpilah dan pelatihan pemanfaatan aplikasi SIGA			10 OPD	10 OPD	100%	-	10 OPD	
						Terselenggaranya Pendampingan OPD dalam penginputan pada aplikasi SIGA (durasi pendampingan)			3 Kali	0	0%	-	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	50 %	-	25 %	67,1 %	268,40%	32 %	32 %	64%
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai Tindak Lanjut dari Hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian yang Disusun	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan		-	-	-	0%	25 Organisasi	25 Organisasi	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha								
						Jumlah Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA			2 Kali	2 Kali	100%	-	2 Kali	
						Terselenggaranya proses evaluasi KLA (Rekomendasi Gugus Tugas KLA)			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Tersusunnya RAD Balikpapan menuju KLA Tahun 2021-2024			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Dibina	120 Lembaga	-	14 Lembaga	15 Lembaga	107,14%	21 Lembaga	36 Lembaga	30%
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan		-	-	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Terselenggaranya Pembinaan di lapangan terkait kebijakan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)			10 Puskesmas	12 Puskesmas	120%	-	12 Puskesmas	
						Terselenggaranya Pembinaan Forum Anak di Kota Balikpapan			1 Forum Anak	1 Forum Anak	100%	-	1 Forum Anak	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Terselenggaranya pembinaan ke sekolah terkait kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) & Pelaksanaan Outdoor Classroom Days (OCD)			10 SRA/OCD	10 SRA/OCD	100%	-	10 SRA/OCD	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	71,50 %	-	65 %	66,37 %	102,11%	67 %	67 %	94%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	21,33 %	-	1,28 %	1,47 %	114,84%	2,13 %	3,74 %	18%
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Terselenggaranya KIE yang terkait dengan AMPK (Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus) di Wilayah RT (Lautan RT)			24 RT	26 RT	108%	-	26 RT	
						Terselenggaranya penguatan peran dan fungsi PPATBM ditingkat Kelurahan			34 Kelompok PPATBM	34 Kelompok PPATBM	100%		34 Kelompok PPATBM	
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0,009 %	-	0,014 %	0,026 %	14,29%	0,012 %	0,012 %	67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota		-	-	-	-	81 Orang	81 Orang	
						Terlaksananya Fungsi Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Anak			40 Orang	30 Orang	75%	-	30 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						yang memerlukan Perlindungan Khusus								
						Tersedianya Rumah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus			1 Unit	1 Unit	100%	-	1 Unit	
						Terselenggaranya Fungsi Mediasi dalam Penanganan Klien UPTD PPA			30 Orang	4 Orang	13%	-	4 Orang	
						Terselenggaranya Penanganan Pengaduan Perempuan Korban			80 Orang	82 Orang	103%	-	82 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus								
						Terselenggaranya Pengelolaan Kasus Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus			50 Orang	82 Orang	164%	-	82 Orang	
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina	25 Lembaga	-	0	4 Lembaga	0,00%	10 Lembaga	10 Lembaga	40%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	
						Jumlah peserta Pelatihan SIMFONI PPA			25 Orang	25 Orang	100%		25 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Jumlah peserta Sosialisasi regulasi perlindungan khusus anak bagi penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus			25 Orang	30 Orang	120%		30 Orang	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai Dengan Regulasi	58,82 %	-	5,88 %	5,88 %	100,00%	11,76 %	11,76 %	20%
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Jumlah Kelurahan yang Melakukan Evaluasi	20 Kelurahan	-	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100,00%	4 Kelurahan	4 Kelurahan	20%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Administrasi Pemerintahan Desa	Perkembangan Sesuai Dengan Regulasi								
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa		-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
						Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Profil Desa/Kelurahan			34 Kegiatan	0	0%	-	0	
						Terselenggaranya Pendampingan Penginputan Data di Aplikasi Profil Kelurahan oleh Kelurahan Piloting			14 Jml Kelurahan	4 Jml Kelurahan	29%	-	4 Jml Kelurahan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Penginputan Data Profil Kelurahan			4 Kegiatan	2 Kegiatan	50%	-	2 Kegiatan	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	
						Terselenggaranya Lomba Kelurahan Berprestasi			1 Kegiatan	0	0%	-	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Terselenggaranya Pembinaan dan Pendampingan Persiapan Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi/Tkt Nasional			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	1 Kegiatan	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai swadaya masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	Rp. 420.600.000.000	-	Rp. 83.900.000.000	Rp. 85.176.853.583	101,52%	Rp. 83.950.000.000	Rp. 169.126.853.583	40%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	70,51 %	-	62,77 %	76 %	121,08%	64,7 %	64,7 %	92%
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan		-	-	-	-	35 Dokumen	35 Dokumen	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
						Hibah Untuk LPM			28 Ormas	22 Ormas	79%	-	22 Ormas	
						Hibah Untuk Karang Taruna			1 Ormas	1 Ormas	100%	-	1 Ormas	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		-	-	-	-	10 Lembaga	10 Lembaga	
						Jumlah Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota dibina (PKK, Pokjanal			10 Jumlah Lembaga	10 Jumlah Lembaga	100%	-	10 Jumlah Lembaga	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Posyandu, LPM dan Karang Taruna)								
						Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi POKJANAL Posyandu Tingkat Kota			4 Kegiatan	1 Kegiatan	25%	-	1 Kegiatan	
						Terselenggaranya Pembinaan kepada POKJANAL Posyandu Tingkat Kecamatan			3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	-	3 Kegiatan	
						Terselenggaranya Lomba Posyandu Tingkat Kota dan Pendampingan			3 Kegiatan	2 Kegiatan	67%	-	2 Kegiatan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						persiapan lomba Posyandu di Tingkat Provinsi/Tingkat Nasional								
						Terfasilitasinya Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	1 Kegiatan	
						Rakorda Pemberdayaan Masyarakat			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	1 Kegiatan	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam		-	-	-	0%	3 Laporan	3 Laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								
						Terselenggaranya Pembinaan kepada POSYANTEK (Pos Pelayanan Teknologi) Tingkat Kecamatan			0	0	0%	-	0	
						Terselenggaranya Lomba POSYANTEK			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	1 Kegiatan	
						Terselenggaranya Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota dan Keikutsertaan/Tuan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	1 Kegiatan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Rumah di Tingkat Provinsi								
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	
						Terselenggaranya Pelaksanaan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kota (Pencanangan dan Penutupan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	1 Kegiatan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Terselenggaranya Fasilitasi Rakor LPM Tingkat Kota			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	1 Kegiatan	
						Terselenggaranya Fasilitasi Rakor Karang Taruna Tingkat Kota			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	1 Kegiatan	
						Terselenggaranya Lomba BBGRM Tingkat Kota dan Pendampingan keikutsertaan /Tuan Rumah dalam di Tingkat Propinsi/Nasional			2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	-	2 Kegiatan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		-	-	-	0%	5 Dokumen	5 Dokumen	
						Terfasilitasinya Pelaksanaan 10 kegiatan Pokok PKK : a. Sekretariat, b. Pokja I,c. Pokja II, d. Pokja III,e. Pokja IV			5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	-	5 Kegiatan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Terselenggaranya Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi/Nasional			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	1 Kegiatan	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase tindak lanjut rekomendasi kebijakan terkait pengendalian penduduk	70 %	-	62 %	64 %	103,23%	64%	64 %	91%
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam	Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan Jalur Formal Terbentuk dijenjang SD/MI	31,25 %	-	1,04%	0	0,00%	15,63%	15,63%	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
						Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan Jalur Formal Terbentuk dijenjang SLTP/MTS	48,19%	-	-	-	0%	12,05 %	12,05%	25%
2	14	02	2.01	09	Advokasi. Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS. Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi. Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur		-	13 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	69%	40 Satuan Pendidikan	49 Satuan Pendidikan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS. Jalur Non Formal dan Informal								
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian penduduk	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	14	2	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			-	-		12 Laporan	12 Laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia		-	-	-	-	14	14	
						Tersedianya Data Lapangan (Dallap) dan Telahaan pemanfaatan data lapangan			12 Dokumen	12 Dokumen	100%	-	12 Dokumen	
						Penyusunan Kajian Grand Desain Pengendalian Penduduk Tahun 2022 - 2027			1 Dokumen	0	0%	-	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Seminar Pemanfaatan Hasil Kajian Grand Desain Pengendalian Penduduk			1 Kegiatan	0	0%	-	0	
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Faskes yang Teregistrasi dalam Pelayanan KB			-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	
						Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja			-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan			12 Dokumen	12 Dokumen	100%	-	12 Dokumen	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Program Bangga Kencana								
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	11,2 %	-	13,75 %	30,57 %	-22,33%	13,4 %	13,4 %	80,36%
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	77400 PUS	-	77050 PUS	52731 PUS	68,44%	77100 PUS	77100 PUS	99,61%
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program			5 Organisasi	5 Organisasi	100%	6 Organisasi	6 Organisasi	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja								
2	14	03	2.01	02	Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Sarana Promosi KB Momentum Strategis			295 Buah	295 Buah	100%	-	295 Buah	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan		-	-	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Elektronik serta Media Luar Ruang	Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang								
						Pengadaan sarana Promosi dan KIE Program BANGGA KENCANA melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			3 Jenis	3 Jenis	100%	-	3 Jenis	
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional			1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minlok)	Program Bangga Kencana (PembangunanKeluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Kader yang terpapar program Bangga Kencana			61 Orang	61 Orang	100%	-	61 Orang	
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)						10 Laporan	10 Laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		-	-	-	0%	1 Laporan	1 Laporan	
						Terselenggaranya rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan BANGGA KENCANA (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			9 Dokumen Laporan	10 Dokumen Laporan	111%	-	10 Dokumen Laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	34 Kelompok IMP	-	34 Kelompok IMP	34 Kelompok IMP	100,00%	34 Kelompok IMP	34 Kelompok IMP	100%
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		-	-	-	0%	34	34	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Terselenggaranya pembinaan oleh PKB pada IMP terkait 6 peran IMP dengan klasifikasi IMP : a. IMP tingkat Dasar b. IMP tingkat Berkembang c. IMP tingkat Mandiri			34 Organisasi	34 Organisasi	100%	-	34 Organisasi	
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan. Penggerakan. Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan. penggerakan. pelayanan dan		-	-	-	0%	1 Laporan	1 Laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	pengembangan program bangga kencana (pembangunan keluarga. kependudukan. dan keluarga berencana) untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)								
						Jumlah masyarakat yang mendapatkan promosi dan KIE kegiatan BANGGA KENCANA oleh PKB			6152 Orang	3830 Orang	62%	-	3830 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Pengadaan sarana promosi dan KIE kegiatan BANGGA KENCANA untuk PKB			34	34	100%	-	34	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan(IMP)			-	-	-	1700 Orang	1700 Orang	
						Jumlah Pelaksanaan KIE Oleh Kader PPKBD/Sub PPKBD			408 Kali	408 Kali	100%	-	408 Kali	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepesertaan KB MKJP	28,75 %	-	26,5 %	31,41%	118,53%	26,75%	26,75 %	93,04%
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitasi Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaring	Jumlah Faskes terbina regulasi tentang standar layanan KB			66 Faskes	66 Faskes	100%	-	66 Faskes	
						Jumlah Pasangan Usia Subur Dalam Status Kawin yang dilayani dalam pelayanan KB momentum			300 Orang	779 Orang	260%	-	779Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			-	-	-	2321 Orang	2321Orang	
						Jumlah Faskes terbina regulasi tentang standar layanan KB			66 Faskes	66 Faskes	100%	-	66 Faskes	
						Jumlah Pasangan Usia Subur Dalam Status Kawin yang dilayani dalam pelayanan KB momentum			300 Orang	779 Orang	260%	-	779 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			-	-	-	12 Unit	12 Unit	
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	
						Jumlah tenaga kesehatan pemberi layanan KB yang terlatih			30 Orang	30 Orang	100%	-	30 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Indeks Kepuasan Faskes terhadap layanan Distribusi Alat & Obat Kontrasepsi KB			85 Nilai	86,27 Nilai	101%	-	86,27 Nilai	
						Jumlah Faskes terbina regulasi tentang Standar Layanan KB			66 Faskes	66 Faskes	100%	-	66 Faskes	
						Jumlah Pasangan Usia Subur dalam status kawin yang dilayani dalam pelayanan KB Momentum			465 Orang	779 Orang	168%	-	779 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah intervensi pada Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)	34 Jumlah Intervensi	-	34 Jumlah Intervensi	34 Jumlah Intervensi	100,00%	34 Jumlah Intervensi	34 Jumlah Intervensi	100%
2	14	3	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (Pembangunan Keluarga,			-	-	-	34 Kampung	34 Kampung	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB								
						Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dalam peningkatan Ketahanan Keluarga			340 Kegiatan	340 Kegiatan	100%		340 Kegiatan	
						Jumlah Rencana Kerja Masyarakat yang dihasilkan pada pertemuan di Kampung KB			34 Rencana Kerja	34 Rencana Kerja	100%		34 Rencana Kerja	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB			-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	
						Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)			10 Rumah Data KB	34 Rumah Data KB	340%	-	34 Rumah Data KB	
						Jumlah Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas) yang terbina			34 Kampung KB	34 Kampung KB	100%	-	34Kampung KB	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Persentase keluarga yang menjadi anggota	20,35 %	-	10,74 %	8,25 %	76,82%	12,75 %	12,75 %	62,65%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	kelompok kegiatan/ poktan								
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok BKB Terbentuk	10,28 %	-	9,61 %	8,6%	89,49%	9,69 %	9,69 %	94,26%
						Persentase kelompok BKR terbentuk	5,31 %				-	2,28 %	2,28 %	42,94%
						Persentase kelompok BKL terbentuk	7,19 %				-	7 %	7 %	97,36%
						Persentase kelompok UPPKA terbentuk	2,44 %				-	2,37 %	2,37 %	97,13%
						Persentase kelompok PIK-R terbentuk	26,9 %				-	24,7 %	24,7 %	91,82%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB). Bina Keluarga Remaja (BKR). Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL). Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB). Bina Keluarga Remaja (BKR). Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL). Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk		-		-	0%	17 Kelompok	17 Kelompok	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
		Terbentuknya Kelompok Kegiatan Baru : 1. Bina Keluarga Balita			0	0	0%	-	0	
		Terbentuknya Kelompok Kegiatan Baru : 2. Bina Keluarga Remaja			0	0	0%	-	0	
		Terbentuknya Kelompok Kegiatan Baru : 3. Bina Keluarga Lansia			0	0	0%	-	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Terbentuknya Kelompok Kegiatan Baru : 4. UPPKA			0	0	0%	-	0	
						Terbentuknya Kelompok Kegiatan Baru : 5. PIK-Remaja			0	0	0%	-	0	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya sarana prasarana bagi kelompok kegiatan : 1 Bina Keluarga Balita			34 Kelompok	9 Kelompok	26%	-	9 Kelompok	
						Tersedianya sarana prasarana bagi kelompok kegiatan : 2. Bina Keluarga Lansia			34 Kelompok	0	0%	-	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Tersedianya sarana prasarana bagi kelompok kegiatan : 3. Bina Keluarga Remaja			34 Kelompok	0	0%	-	0	
						Tersedianya sarana prasarana bagi kelompok kegiatan : 4 UPPKA			34 Kelompok	0	0%	-	0	
						Tersedianya sarana prasarana bagi kelompok kegiatan : 5. PIK-Remaja			34 Kelompok	9 Kelompok	26%	-	9 Kelompok	
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola		-	-	-	-	5 Laporan	5 Laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
						Jumlah kelompok yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 1. Bina Keluarga Balita			34 Kelompok	34 Kelompok	100%	-	34 Kelompok	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Jumlah kelompok yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 2. Bina Keluarga Remaja			34 Kelompok	34 Kelompok	100%	-	34 Kelompok	
						Jumlah kelompok yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 3. Bina Keluarga Lansia			34 Kelompok	34 Kelompok	100%	-	34 Kelompok	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Jumlah kelompok yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 4. UPPKA			10 Kelompok	2 Kelompok	20%	-	2 Kelompok	
						Jumlah kelompok yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 5. PIK-Remaja			34 Kelompok	34 Kelompok	100%	-	34 Kelompok	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana /Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)		-			0%	372 Orang	372 Orang	
						Terlaksananya Orientasi/ Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana / Kader Ketahanan dan			30 Kelompok	30 Kelompok	100%	-	30 Kelompok	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Kesejahteraan Keluarga : 1. Kader UPPKA								
						Terlaksananya Orientasi/ Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana / Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 2. Guru BK			40 Kelompok	40 Kelompok	100%	-	40 Kelompok	
						Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksanan/Kader Ketahanan dan			68 Kelompok	49 Kelompok	72%	-	49 Kelompok	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Kesejahteraan Keluarga : 3. PS/KS								
						Terlaksananya Cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan (Jumlah Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 4. Bina Keluarga Balita			68 Kelompok	68 Kelompok	100%	-	68 Kelompok	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 5. Bina Keluarga Remaja			68 Kelompok	55 Kelompok	81%	-	55 Kelompok	
						Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			68 Kelompok	68 Kelompok	100%	-	68 Kelompok	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						: 6. Bina Keluarga Lansia								
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			606 Orang	606 Orang	100 %	606 Orang	606 Orang	
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan		-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
						Terselenggaranya rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional.			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	1 Kegiatan	
						Terselenggaranya Pembinaan KelompokKegiatan dan Kesejahteraan Keluarga dalam bentuk lomba-lomba			7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	-	7 Kegiatan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						(BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA								
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi Berencana. Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi Berencana. Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		-			0%	1 Laporan	1 Laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Terselenggaranya pembinaan kelompok kegiatan dan kesejahteraan keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga).			4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	-	4 Kegiatan	

Realisasi target Program/Kegiatan Tahun 2022 secara keseluruhan tercapai, walaupun ada beberapa program/ kegiatan yang belum dapat mencapai target. Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangka tidak terlepas dari faktor pendorong antara lain :

1. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah berupa Kebijakan dalam bentuk Peraturan Walikota No.27 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, Adanya Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor : 900/1129/BPKD Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 dimana pada saat pelaksanaan Asistensi RKA, SKPD menyertakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan berbasis Gender, Dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Kegiatan, Pelatihan Penyusunan PPRG bagi OPD secara berkelanjutan, Pendampingan dalam penyusunan ARG bagi OPD, Review Inspektorat terkait Perencanaan dan Penganggaran Rensponsif Gender (PPRG serta Peran Serta Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan yang responsif gender.
2. Dukungan surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor 414.4/1193/SJ tanggal 31 Maret 2022 tentang penginputan Epdeskel dan pelaksanaan Lomba Desa dan kelurahan Tahun 2022 yang ditindaklanjut surat dari DP3AKB Nomor 414.1/1330/DP3AKB-BPP tanggal 18 Mei 2022 tentang pengisian Data Prodeskel dan Epdeskel. Kondisi ini memacu kelurahan untuk melengkapi data Epdeskel serta dukungan dari Kecamatan untuk mensupport seluruh kelurahan dalam melakukan update data melalui aplikasi Epdeskel.
3. Peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi dan konseling dengan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)
5. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di DP3AKB Kota Balikpapan

Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

1. Menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan tepercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern) dan adanya anggapan bahwa pemakaian alat kontrasepsi banyak efek sampingnya, karena

adanya penyakit, jika sudah berusia 40 kemungkinan hamil kecil, serta jika menyusui tidak akan hamil.

2. Masih rendahnya keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan disebabkan kesibukan bekerja.
3. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan meskipun ada kemungkinan bahwa meningkatnya jumlah data korban karena semakin banyak korban yang berani melapor yang merupakan efek gencarnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Perlindungan Perempuan dan Anak serta keberadaan lembaga layanan penanganan kasus yang dikelola UPTD PPA Pemerintah Kota Balikpapan.

Hal - hal yang pelu dilakukan oleh DP3AKB dalam meningkatkan kinerjanya adalah sebagai berikut

1. Diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai DP3AKB untuk meningkatkan kinerja masing-masing dan mempelajari /memahami serta meimplemetasikan regulasi teknis terkait tupoksi masing-masing , sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD dapat dilakukan secara efektif dan efisien ;
2. penyusunan perencanaan dengan baik dan penetapan target Kinerja disesuaikan dengan Dokumen Renstra OPD DP3AKB Tahun 2021-2026.
3. Melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan antar bidang untuk mencapai hasil yang lebih maksimal

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja DP3AKB Kota Balikpapan pada tahun 2022 ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tupoksinya. Pada tahun 2022 DP3AKB diamanahkan untuk melaksanakan 1 urusan Pemerintahan lagi yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa sehingga Tahun 2022 DP3AKB mengemban 3 Urusan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa. Adapun pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AKB Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra DP3AKB				Realisasi capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Prosentase RKA Responsif Gender			2,34%	4 %	8 %	10%	2.34%	8,64 %	-	-	
2	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contracepive Prevelence Rate/ mCPR)			67,50%	70,61%	70,63%	70,65%	70.61	52.81%	-	-	
3	Persentase Kelurahan Kategori Bekembang			n/a	5,88%	11,76%	29,41%	n/a	38.24%	-	-	
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB			n/a	27 %	27,30%	27,75%	n/a	32.99%	-	-	

Tahun 2022 adalah tahun pertama realisasi kinerja dari indikator kinerja Utama sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026, sehingga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dibandingkan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data tabel 2.3 dapat diketahui bahwa capaian kinerja DP3AKB Kota Balikpapan secara keseluruhan tercapai, kecuali untuk IKK Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contracepive Prevelence Rate/ mCPR). IKK yang belum tercapai bisa menjadi tantangan untuk ditingkatkan tahun berikutnya.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DP3AKB Kota Balikpapan melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui

pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    - Percepatan penurunan stunting sebagai isu nasional dimana DP3AKB selaku sekretariat belum didukung oleh tenaga yang maksimal.
    - Keterbatasan kapasitas daerah dalam pengendalian penduduk serta Banyaknya penduduk luar Balikpapan yang migrasi ke kota Balikpapan karena faktor ekonomi apalagi terkait dengan isu penyangga sebagai Ibukota Negara;
    - Pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kesehatan reproduksi remaja masih rendah ;
    - Pendidikan kesehatan reproduksi remaja jalur pendidikan juga belum optimal dilaksanakan ;
    - Masih minimnya pemahaman keluarga tentang pola asuh anak dan remaja ;
    - Masih rendahnya jumlah PUS yang menjadi peserta KB, khususnya kesertaan KB pola MKJP;
    - Masih tingginya angka Unmet Need di Kota Balikpapan;
    - Pembentukan dan Pembinaan terhadap Poktan dan IMP dalam mendukung ketahanan keluarga belum optimal dilaksanakan;
    - Belum optimalnya pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di kalangan remaja dan orang tua;
    - Belum optimalnya pelibatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
    - Masih minimnya jumlah pembentukan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) dan PIK Remaja;
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    - Belum tersedianya data terpilah untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan yang responsive gender ;
    - Belum meratanya tenaga/SDM Analisis Gender di seluruh OPD lingkup Pemerintah ;
    - Belum semuanya OPD menyusun anggaran yang berbasis Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender;
    - Belum optimalnya upaya pembinaan potensi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan ;

- Meningkatnya aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
- Belum optimalnya pelibatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
- Masih minimnya kesadaran orang tua dan keluarga terkait upaya perlindungan anak ;
- Masih minimnya pemahaman keluarga tentang pola asuh anak dan remaja ;
- Belum meratanya ketersediaan layanan konseling anak dan remaja di seluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan ;
- Belum optimalnya pemanfaatan waktu luang anak pada pengembangan minat dan bakat anak ;
- Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi program terkait perwujudan Balikpapan sebagai Kota Layak Anak

3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   - Belum maksimmalnya peran pokjanal posyandu di Kota Balikpapan;
   - Belum maksimalnya kelurahan secara rutin mengupdate data dalam Evdeskel;
   - Belum optimalnya Peran & Fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan di daerah;
   - Minimnya Kelurahan yang memiliki profil kelurahan sesuai yang diarahkan Kemdagri (PRODESKEL)
   - Teknologi Tepat Guna produk POSYANTEK belum sesuai dengan kebutuhanmasyarakat;
   - Kelembagaan masyarakat (LPM, Karang Taruna, RT) yang belum optimal peran dukungnya;
   - SDM yang ada pada OPD tidak bisa optimal melaksanakan Fasilitasi TP PKK Kota dalam upaya gerakan pemberdayaan masyarakat dengan alasan keterbatasan jumlah personil OPD yang tidak sesuai dengan kompleknya 3 urusan wajib yang ditangani oleh Perangkat Daerah
4. Kesekretariatan
   - Banyaknya pegawai memasuki masa purna tugas yang tidak diimbangi dengan penggatian (penambahan)pegawai ditambah dengan Pengalihan jabatan struktural Ess IV menjadi Penyetaraan Jabatan fungsional sehingga posisi yang ditinggalkan tidak ada yang mengisi sehingga diisi staff selaku Ketua Tim Kerja.

- Ketersediaan sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas yang mendukung kinerja perangkat daerah

Sesuai dengan fungsi dan tugas urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh DP3AKB mencakup lingkup yang luas. DP3AKB mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa, kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Rancangan awal RKPD tahun 2024 dibuat berdasarkan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 untuk mencapai sasaran-sasaran yang tercantum dalam RPJMD, sedangkan program/kegiatan/sub kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program – program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi DP3AKB dan isu – isu strategis.

Secara keseluruhan hasil telaah terhadap RKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
I.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Balikpapan	Prosentase Jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan anggaran yang Responsif Gender	97,06 %	1.108.735.639	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Balikpapan	Prosentase Jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan anggaran yang Responsif Gender	97,06 %	1.108.735.639	
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	1 Dokumen	708.735.639	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	1 Dokumen	708.735.639	
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Balikpapan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan	12 Perangkat Daerah	250.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
						Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Balikpapan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	458.735.639	
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Jumlah Industri Rumahan yang dibina	23 Industri Rumahan	400.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Jumlah Industri Rumahan yang di bina	23 Industri Rumahan	400.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000	
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partispasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Organisasi	100.000.000	
II.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Balikpapan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	8,36 per 100.000 penduduk perempuan	868.778.956	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Balikpapan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	8.36 per 100.000 Penduduk Perempuan	868.778.956	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	16 %	653.972.074	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	16.00 %	653.972.074	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	653.972.074	
4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	5 Lembaga	214.806.882	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	5 Lembaga	214.806.882	
						Peningkatan Kapasitas		Jumlah sumber Daya Manusia	45 Orang	214.806.882	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			
III.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Balikpapan	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	71,43 %	1.288.703.155	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Balikpapan	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	83.33 %	1.288.703.155	
5	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	1,25 %	1.288.703.155	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	1.25 %	1.288.703.155	
						Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan	Balikpapan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan	1 Dokumen	1.288.703.155	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Balikpapan	Prosentase OPD yang memiliki Data Terpilah	36,11 %	348.317.091	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Balikpapan	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	36.11 %	348.317.091	
6	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	13 Jumlah OPD	348.317.091	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	13 Jumlah OPD	348.317.091	
						Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	348.317.091	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
V.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Balikpapan	Persentase tindak lanjut rekomendasi Gugus Tugas KLA	40 %	972.204.478	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Balikpapan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	40 %	1.426.690.978	Penilaian standarisasi SRA/PRAP/RBRA
7	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun	1 dokumen	496.904.478	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun	1 Dokumen	496.904.478	
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	25 Organisasi	496.904.478	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina	25 Lembaga Penyedia Layanan	475.300.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak dibina	25 Lembaga	929.786.500	penilaian standarisasi SRA/PRAP/RBRA /RIRA
						Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	929.786.500	
VI.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Balikpapan	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	68 %	1.600.646.848	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Balikpapan	Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA	68 %	1.600.646.848	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
9	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	2,67 %	460.199.848	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	2,67 %	460.199.848	
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan ,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Perangkat Daerah	460.199.848	
10	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Balikpapan	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (	0,011 %	840.000.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Balikpapan	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0.011 %	840.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kabupaten/ Kota					Kabupaten/ Kota					
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Balikpapan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	82 Orang	840.000.000	
11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina	15 Jumlah Lembaga	300.447.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina	15 Jumlah lembaga	300.447.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.447.000	
VII.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Balikpapan	Prosentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	66 %	978.203.395	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Balikpapan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	66 %	1.128.203.395	penyusunan Grand desain pengendalian kependudukan
12	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian	Balikpapan	Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SD/ MI dan SLTP/ MTS 1.SD/MI (%) 2.SLTP/MTS (%)	 20,83 % 24,1 %	328.203.395	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian	Balikpapan	Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SD/ MI dan SLTP/ MTS 1.SD/MI (%) 2.SLTP/MTS (%)	 20,83 % 24,1 %	328.203.395	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kuantitas Penduduk					Kuantitas Penduduk					
						Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Balikpapan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	60 Satuan Pendidikan	328.203.395	
13	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk	1 Dokumen	650.000.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk	1 Dokumen	800.000.000	penyusunan Grand desain Pengendalian kependudukan
						Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	14 Dokumen	800.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
VIII.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Balikpapan	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*	13,10 %	954.207.726	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Balikpapan	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	13.10 %	954.230.000	
14	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Balikpapan	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	77200 PUS	115.000.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Balikpapan	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	77.200 PUS	115.000.000	
						Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	85.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Pengendalian Program KKBPK	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	9 Laporan	30.000.000	
15	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Balikpapan	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	34 Kelompok IMP	369.207.726	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Balikpapan	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	34 Kelompok IMP	369.207.726	
						Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/ PLKB	Balikpapan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	34 Organisasi	139.230.000	
						Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	34 Laporan	230.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Keluarga Berencana (PKB/ PLKB)		untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
16	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Kepesertaan KB MKJP	27,5 %	350.000.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Persentase Kepesertaan KB MKJP	27,50 %	350.000.000	
						Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	350.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
17	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Balikpapan	Jumlah intervensi pada Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)	34 Jumlah Intervensi	120.000.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Balikpapan	Jumlah intervensi pada Kampung KB	34 Jumlah Intervensi	120.000.000	
						Pembinaan Terpadu Kampung KB		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	34 Laporan	120.000.000	
IX.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Balikpapan	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/ poktan	15,8 %	1.458.116.769	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Balikpapan	Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/Poktan	15,8 %	3.378.116.769	kegiatan sekretariat Tim percepatan penurunan Stunting (TPPS) dan Kegiatan percepatan penurunan stunting
18	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan	Balikpapan	1. Persentase kelompok BKB terbentuk	9,76 %	1.458.116.769	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan	Balikpapan	1. Persentase kelompok BKB terbentuk	9,76 %	3.378.116.769	kegiatan sekretariat Tim percepatan penurunan Stunting (TPPS) dan Kegiatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kesejahteraan Keluarga					Kesejahteraan Keluarga					percepatan penurunan stunting
			2. Persentase kelompok BKR terbentuk	3,07 %				2. Persentase kelompok BKR terbentuk	3,07 %		
			3. Persentase kelompok BKL terbentuk	7,00 %				3. Persentase kelompok BKL terbentuk	7,00 %		
			4. Persentase kelompok UPPKA terbentuk	2,37 %				4. Persentase kelompok UPPKA terbentuk	2,37 %		
			5. Persentase kelompok PIK-R terbentuk	25,1 %				5. Persentase kelompok PIK-R terbentuk	25,1 %		
						Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL),	Balikpapan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan	19 Kelompok	178.116.769	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk			
						Pengadaan Sarana *Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Unit	70.000.000	
						Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	5 Laporan	210.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Keluarga/ UPPKS)		Keluarga/UPPKS)			
						Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)		Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	481 Orang	300.000.000	
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Laporan	2.420.000.000	
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok	2 Laporan	200.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
X.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Balikpapan	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	29,41 %	1.158.170.910	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Balikpapan	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi	29.41 %	1.158.170.910	
19	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Balikpapan	Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	10 Jumlah Kelurahan	1.158.170.910	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Balikpapan	Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	10 Jumlah Kelurahan	1.158.170.910	
						Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Balikpapan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	550.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	608.170.910	
XI	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Balikpapan	Nilai Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	Rp. 84.050.000.000	4.500.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Balikpapan	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Rp.84.050.000.000	14.800.000.000	
20	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Balikpapan	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	66,64 %	4.500.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	Balikpapan	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	66.64 %	14.700.000.000	Pemberian Honorarium untuk kader Posyandu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota					yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
						Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	35 Dokumen	550.000.000	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	5 Lembaga	11.700.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Keluarahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakar Hukum Adat		dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
						Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	600.000.000	
						Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	350.000.000	
						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.600.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
XII.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Balikpapan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	77	10.357.546.698	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77 Nilai	10.601.338.000	
21	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	75	7.193.761.895	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.00 Nilai	7.243.761.895	Besaran anggaran diperhitungkan sesuai kebutuhan
						Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	7.243.761.895	
22	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	1.017.784.803	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Nilai	1.314.384.105	Tambahan anggaran untuk Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan barang cetak dan penggandaan, penyediaan Bahan kebersihan kantor, kegiatan rapat dengan stakeholder/m
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	450.000.000	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2774 Paket	362.000.000	
						Penyediaan Barang	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	3 Paket	125.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Cetakan dan Penggandaan		Penggandaan yang Disediakan			itra kerja DP3AKB, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Penyediaan Bahan/Material	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	37.500.000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	339.884.105	
23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75	850.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75 Nilai	850.000.000	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	850.000.000	
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	596.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 Nilai	464.192.000	Besaran anggaran sesuai dengan kebutuhan dan Kegiatan pemeliharaan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	peralatan dan perlengkapan kantor tidak lagi diakomodir pada kegiatan ini sesuai pemetaan nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	364.192.000	
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	700.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75 Nilai	729.000.000	Mengakomodir kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai pemetaan nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	71 Unit	525.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	104.000.000	
						Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	
					25.593.631.665					38.661.931.741	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Tabel 2.5
T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2024

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disususun DP3AKB berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) maupun kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Kementerian Pemerintahan Desa.

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu*: "Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan lndonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan GotongRoyong"*. Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

   1. peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
   2. peningkatan perlindungan anak; dan
   3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

   Tujuan Kemen dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

   1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan
   2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
   3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA
   4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO
   5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

   Sesuai Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 – 2024, dalam upaya pencapaian visi nasional, BKKBN memiliki visi untuk "Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Untuk pencapaian visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global;
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi;
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan; kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024. Adapun Arah kebijakan dan strategi BKKB adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
    1. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
    2. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
    3. Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
    4. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
    5. Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
    6. Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
    7. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.

b. Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
   1. Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
   2. Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
   3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
   4. Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.

c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
   1. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
   2. Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
   3. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
   4. Peningkatan KB Pria.
   5. Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
   6. Peningkatan kemandirian PUS dalamber-KB.

d. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
   1. Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
   2. Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.

e. Memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
   1. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
   2. Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk penambahan satu urusan Pemberdayaan masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemrintahan Desa Kalimantan Timur sesuai Renstra Tahun 2019-2024 memiliki sasaran Jangka Menengah yaitu

”Meningkatkan Kualitas Pembangunan Wilayah Pedesaan secara Merata” namun Balikpapan tidak memiliki wilayah pedesaan maka prioritas adalah mengoptimalkan peran unsur masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan memiliki keinginan kuat untuk mengimplementasikan Visi Walikota/Wakil Walikota terpilih. Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam RPJMD Kota Balikpapan Periode Tahun 2021–2026 adalah

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman “.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AKB mendukung pencapaian misi ke-2, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang sesuai dengan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan , yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DP3AKB Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Anggaran yang Responsif Gender	Persentase Anggaran yang responsif Gender	35%	1	Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Prosentase RKA responsif Gender	10%
				2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contracepive Prevelence Rate/ mCPR)	70,65 %

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
				3	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Bekembang	29,41 %
				4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah DP3AKB	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB	33

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil pemetaan dan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kemudian disempurnakan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan disempurnakan lagi dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021, dan disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 Kota Balikpapan, dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2021 – 2026

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan rumusan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AKB untuk tahun 2024, yaitu :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Kesinambungan kegiatan;
4. Isu Prioritas Nasional;
5. Program dan Kegiatan rutin setiap tahun

Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2024 yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD antara lain :

1. Target indikator kinerja program yang disesuaikan yaitu :
   a) Target indikator kinerja program peningkatan kualitas keluarga pada rancangan awal RKPD sebear 71,43 % dan pada rumusan program tahun

2024 menjadi 100 %, hal ini karena Target disesuaikan dengan hasil evaluasi capaian kinerja program tahun sebelumnya.

b) Target Indikator Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada rancangan awal RKPD sebesar 40 % dan pada rumusan program tahun 2024 menjadi 80 %, Target 2024 disesuaikan kembali dengan melihat hasil evaluasi capaian kinerja program tahun sebelumnya.

c) Target Indikator Program Administarasi Pemerintahan Desa pada rancangan awal RKPD sebesar 29,41 %, pada rumusan program tahun 2024 disesuaikan menjadi 100 %.

d) Target Indikator Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat pada rancangan awal RKPD sebesar Rp.84.050.000.000 dan pada rumusan program tahun 2024 menjadi Rp.86.000.000.000, Target 2024 disesuaikan kembali dengan melihat hasil evaluasi capaian kinerja program tahun sebelumnya.

5. Pagu Indikatif pada rumusan program dan kegiatan yang melebihi rancangan awal RKPD ,yaitu :

a) Program pemenuhan Hak Anak

Pagu Indikatif Pada Rancangan Awal RKPD : Rp. 972.204.478

Pagu Indikatif pada rumusan program/ kegiatan : Rp. 1.426.686.500,-

dikarenakan adanya penambahan pagu indikatif untuk kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 454.486.500,- semula Rp. 475.300.000 menjadi Rp. 929.786.500,- yang akan dialokasikan untuk kegiatan standarisasi Sekolah Ramah Anak (SRA), standarisasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP), Standarisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan Standardisasi Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) dalam rangka peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak yang terstandarisasi oleh KPPA dan untuk menunjang penilaian evaluasi kota layak anak tahun 2024, serta pembulatan pagu untuk kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

b) Program Pengendalian Penduduk

Pagu Indikatif Pada Rancangan Awal RKPD : Rp. 978.203.395

Pagu Indikatif pada rumusan program/ kegiatan : Rp. 1.128.200.000

dikarenakan adanya penambahan pagu indikatif untuk kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 150.000.000 yang semula sebesar Rp. 650.000.000 menjadi Rp. 800.000.000. Penambahan pagu akan dialokasikan untuk penyusunan Review Kajian Grand Design Pengendalian Penduduk, dan adanya pembulatan pagu indikatif untuk kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Pagu Indikatif Pada Rancangan Awal RKPD : Rp. 1.458.116.769

Pagu Indikatif pada rumusan Program/ kegiatan : Rp. 1.758.110.000

Penambahan pagu indikatif dialokasikan untuk kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dari semula Rp. 1.458.116.769 menjadi Rp. 1.758.110.000, yang akan digunakan untuk kegiatan Penguatan Kelompok Kegiatan (Poktan) dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan kegiatan sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) .

d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Pagu Indikatif Pada Rancangan Awal RKPD : Rp. 10.357.546.698

Pagu Indikatif pada rumusan program/ kegiatan : Rp. 10.601.338.000

Pagu indikatif rumusan program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota melebihi rancangan awal RKPD dikarenakan adanya penambahan pagu yang dialokasikan untuk :

- Penambahan gaji dan tunjangan ASN pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas seperti Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan barang cetak dan penggandaan, penyediaan Bahan kebersihan kantor, kegiatan rapat dengan stakeholder/mitra kerja DP3AKB, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas DP3AKB.

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penyediaan kendaaraan operasional/jabatan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan untuk tahun 2024 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran secara keseluruhan terdiri dari 12 Program , 25 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan, dan lokasi kegiatan di Kota Balikpapan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 26.741.874.500,- dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Balikpapan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel T-C.33 di bawah ini :

Tabel 3.2

T-C .33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kota Balikpapan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA								26.741.874.500					28.287.575.539
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								26.741.874.500					28.287.575.539
2	08				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak								17.243.164.500					18.096.255.539
2	08	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								10.601.338.000					11.211.836.539
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.243.761.895					7.553.444.539
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Nilai	39 Orang/bulan	75.00 Nilai	7.243.761.895	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	7.553.444.539
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.298.152.005					1.410.000.000
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Nilai	20 Paket	75.00 Nilai	449.869.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	575.000.000
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Nilai	10 Paket	75.00 Nilai	361.036.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	360.000.000
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Nilai	3 Paket	75.00 Nilai	125.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	3 Paket	125.000.000
2	08	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Nilai	2 Paket	75.00 Nilai	22.764.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	50.000.000
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Nilai	12 Laporan	75.00 Nilai	339.480.705	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								866.231.300					1.000.000.000
2	08	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Nilai	5 Unit	75 Nilai	866.231.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	1.000.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								441.430.000					464.192.000
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Nilai	12 Laporan	75.00 Nilai	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Nilai	13 Laporan	75.00 Nilai	341.430.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	364.192.000
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								751.762.800					784.200.000
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Nilai	58 Unit	75.00 Nilai	523.663.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	58 Unit	575.000.000
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Nilai	144 Unit	75.00 Nilai	127.755.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	144 Unit	109.200.000
2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Nilai	2 Unit	75.00 Nilai	100.343.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								1.108.730.000					1.255.000.000
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								708.730.000					775.000.000
2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.06 %	12 Perangkat Daerah	1 Dokumen	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Perangkat Daerah	500.000.000
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.06 %	34 Perangkat Daerah	1 Dokumen	458.730.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	275.000.000
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								400.000.000					480.000.000
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Rumahan yang di bina	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97,06 %	1 Dokumen	23 Industri Rumahan	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten /Kota	1 Dokumen	380.000.000
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Rumahan yang di bina	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97,06 %	3 Organisasi	23 Industri Rumahan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Organisasi	100.000.000
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								868.770.000					989.820.000
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								653.970.000					749.190.000
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.36 per 100.000 Penduduk Perempuan	1 Dokumen	16.00 %	653.970.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	749.190.000
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								214.800.000					240.630.000
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.36 per 100.000 Penduduk Perempuan	45 Orang	5 Lembaga	214.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	45 Orang	240.630.000
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								1.288.700.000					1.453.960.000
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.288.700.000					1.453.960.000
2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1.25 %	1.288.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1.453.960.000
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								348.300.000					348.670.000
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								348.300.000					348.670.000
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah OPD Terlatih Penyedian Data Terpilah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.11 %	1 Dokumen	13 Jumlah OPD	348.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	348.670.000
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								1.426.686.500					1.038.230.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								496.900.000					530.650.000
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	25 Organisasi	1 Dokumen	496.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	25 Organisasi	530.650.000
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								929.786.500					507.580.000
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak dibina	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	25 Lembaga	929.786.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	507.580.000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								1.600.640.000					1.798.739.000
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								460.200.000					591.110.000
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68 %	114 Orang	2,67 %	460.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	114 Orang	591.110.000
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								840.000.000					870.000.000
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68 %	82 Orang	0.011 %	840.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	82 Orang	870.000.000
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								300.440.000					337.629.000
2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68 %	2 Kegiatan	15 Jumlah lembaga	300.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	337.629.000
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								5.658.170.000					6.243.770.000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								1.158.170.000					1.243.770.000
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								1.158.170.000					1.243.770.000
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa													
						Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	10 Jumlah Kelurahan	550.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	593.770.000
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah keluraha n yang melakuka n evaluasi perkemba ngan keluraha n sesuai dengan regulasi	Kota Balikpa pan, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	100 %	1 Doku men	10 Juml ah Kelur ahan	608.170.000	Pendap atan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkemban gan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokum en	650.000.000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								4.500.000.000					5.000.000.000
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								4.500.000.000					5.000.000.000
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.000.000.000 Rp	35 Dokumen	66.64 %	550.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	35 Dokumen	550.000.000
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.000.00.0.00.00 Rp	5 Lembaga	66.64 %	1.400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	1.700.000.000
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
						Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.000.00.0.00.00 Rp	1 Laporan	66.64 %	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	550.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat													
						Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.000.00.0.00 Rp	1 Laporan	66.64 %	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	450.000.000
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													
						Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.000.00.0.00 Rp	1 Dokumen	66.64 %	1.600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.750.000.000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								3.840.540.000					3.947.550.000
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								1.128.200.000					1.044.860.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								328.200.000					394.860.000
2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal													
						Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SD/ MI Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SLTP/ MTS	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66 %	60 Satuan Pendidikan	20,83 % 24,10 %	328.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	60 Satuan Pendidikan	394.860.000
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								800.000.000					650.000.000
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66 %	14 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	14 Dokumen	650.000.000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								954.230.000					1.127.690.000
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								115.000.000					150.000.000
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK													
						Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.10 %	9 Laporan	77.200 PUS	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	9 Laporan	50.000.000
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.10 %	3 Dokumen	77.200 PUS	85.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	100.000.000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								369.230.000					477.690.000
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.10 %	34 Organisasi	34 Kelompok IMP	139.230.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	34 Organisasi	177.690.000
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.10 %	34 Laporan	34 Kelompok IMP	230.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana /Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	34 Laporan	300.000.000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								350.000.000					350.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
						Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Kepesertaan KB MKJP	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13,10 %	1 Laporan	27,50 %	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	350.000.000
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								120.000.000					150.000.000
2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB													
						Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah intervensi pada Kampung KB	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.10 %	34 Laporan	34 Jumlah Intervensi	120.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	34 Laporan	150.000.000
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								1.758.110.000					1.775.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								1.758.110.000					1.775.000.000
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)													
						Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/ Poktan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase kelompok BKB terbentuk Persentase kelompok BKL terbentuk Persentase kelompok BKR terbentuk Persentase kelompok PIK-R terbentuk Persentase kelompok UPPKA terbentuk	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15,8 %	2 Laporan	9,76 % 7 % 3,07 % 25,1 % 2,37 %	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	200.000.000
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/ Poktan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok BKB terbentuk Persentase kelompok BKL terbentuk Persentase kelompok BKR terbentuk Persentase kelompok PIK-R terbentuk Persentase kelompok UPPKA terbentuk	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15,8 %	6 Laporan	9,76 % 7 % 3,07 % 25,1 % 2,37 %	800.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	6 Laporan	700.000.000
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/ Poktan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Persentase kelompok BKB terbentuk Persentase kelompok BKL terbentuk Persentase kelompok BKR terbentuk Persentase kelompok PIK-R terbentuk Persentase kelompok UPPKA terbentuk	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15,8 %	14 Unit	9,76 % 7 % 3,07 % 25,1 % 2,37 %	70.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	14 Unit	100.000.000
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/ Poktan	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase kelompok BKB terbentuk Persentase kelompok BKL terbentuk Persentase kelompok BKR terbentuk Persentase kelompok PIK-R terbentuk Persentase kelompok UPPKA terbentuk	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15,8 %	481 Orang	9,76 % 7 % 3,07 % 25,1 % 2,37 %	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	481 Orang	250.000.000
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/ Poktan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Persentase kelompok BKB terbentuk Persentase kelompok BKL terbentuk Persentase kelompok BKR terbentuk Persentase kelompok PIK-R terbentuk Persentase kelompok UPPKA terbentuk	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15, 8 %	5 Laporan	9,76 % 7 % 3,07 % 25,1 % 2,37 %	210.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKA)	5 Laporan	225.000.000
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)													
						Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/ Poktan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga	Persentase kelompok BKB terbentuk Persentase kelompok	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	15, 8 %	19 Kelompok	9,76 % 7 % 3,07 % 25,1 %	178.110.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina	19 Kelompok	300.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	BKL terbentuk Persentase kelompok BKR terbentuk Persentase kelompok PIK-R terbentuk Persentase kelompok UPPKA terbentuk	Kel/Desa			2,37 %				Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk		
TOTAL													**26.741.874.500**					**28.287.575.539**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AKB adalah Misi ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan, yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dengan tujuan Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan berbasis pengarustamaan gender yang ukuran indikatornya Persentase Anggaran Responsif Gender.

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan menetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu : Meningkatnya Anggaran yang Responsive Gender. Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
2. Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB (mCPR);
3. Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang;
4. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Program , kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Perangkat Daerah DP3AKB pada dasarnya masih tetap mengacu pada tahun 2023 dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman sedangkan untuk pendanaan bersumber dari Dana APBD tahun anggaran 2024

Berdasarkan uraian di atas, Rancangan Akhir Rencana Kerja dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berancana yang mendukung Prioritas Kota Balikpapan Tahun 2024, adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DP3AKB Tahun 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3 Penyediaan Bahan Logistik kantor
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		5 PenyediaanBahan/ Material
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		9 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		11 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2 Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	6 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		14 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
	7 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		16 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3 Program Perlindungan Perempuan	8 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	17 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	9 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	10	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	11	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
6	Program Pemenuhan Hak Anak	12	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten /Kota	21	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	22	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7	Program Perlindungan Khusus Anak	14	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	23	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	15 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	24 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	16 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
8 Program Administrasi Pemerintahan Desa	17 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	26 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
		27 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
9 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	18 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	28 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		29 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		30 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		31 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
		32 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
10 Program Pengendalian Penduduk	19 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	33 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
	20 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	34 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
11 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	21 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	35 Pengendalian Program KKBPK
		36 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Elektronik serta Media Luar Ruang
	22 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)	37 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
		38 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
	23 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	39 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	24 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	40 Pembinaan Terpadu Kampung KB
12 Program pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	25 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	41 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
		42 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
		43 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
		44 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
		45 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
		46 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

Dalam rangka melaksanakan rencana kerja 2024,Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendapatkan Pagu Indikatif sebesar Rp. 26.741.874.500 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Rupiah) untuk pembiayaan 12 (dua belas) Program, 25 (dua puluh lima) Kegiatan dan 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan.

BAB V
INOVASI PERANGKAT DAERAH

Menjadi bagian tak terpisahkan dari misi 1 Kota Balikpapan tentang Peningkatan kinerja profesionalitass dan transparansi birokrasi pemerintahan yang perlu didukung dengan perbaikan atau penyempurnaan dari sisi kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, sistem dan prosedur pelayanan umum sehingga menjadi lebih responsif dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, mendorong perangkat daerah untuk menciptakan inovasi tiap tahun. Inovasi yang diciptakan tiap perangkat daerah dipandang sebagai optimalisasi menuju good governance atau tata laksana pemerintahan yang baik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, bergegas melakukan upaya inovasi yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Selain itu memperbaiki alur sistem yang dapat memudahkan pelayanan masyarakat namun tidak mengurangi kualitas dan hasil pekerjaan dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik. Inovasi yang dilakukan DP3AKB terkait dengan pencapaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Inovasi Yang Dilakukan DP3AKB Kota Balikpapan

Inovasi	Tujuan	Sasaran
Optimalisasi Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) DP3AKB Kota Balikpapan Melalui Registrasi Klien Secara Online	Meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama mengenai proses registrasi dan rekapitulasi data klien di Puspaga	Masyarakat Pengguna Layanan Puspaga DP3AKB Kota Balikpapan
Sistem Informasi Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (SIDAK KtPA)	Media informasi data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masyarakat
LAPOR PAK BALIKPAPAN	Layanan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan Perempuan dan Anak dan yang ingin berkonsultasi dengan Psikolog	Masyarakat

Delivery Service Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Berbasis Online Menuju Pelayanan Prima (Di DISKON OM PRIMA)	Meningkatkan pelayanan prima untuk permintaan obat kontrasepsi dan alat kesehatan penunjang KB	Mitra Kerja Fasilitas Kesehatan yang melayani KB

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan merupakan dokumen perencanaan tahunan dan sebagai penjabaran Rencana Strategi (RENSTRA) DP3AKBPM Kota Balikpapan yang memuat program dan kegiatan serta pendanaan indikatif tahun 2024 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila ada program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan dikarenakan kemampuan anggaran yang tidak mencukupi maka akan ditindak lanjuti pada tahun tahun selanjutnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk :

a. Bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun anggaran 2024;
b. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
c. Perangkat Daerah (RKA/DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan tahun 2024;
d. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi jajaran DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2024.

Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2024 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh DP3AKB Kota Balikpapan, dan sebagai pedoman seluruh pejabat Struktural, Fungsional dan Staf pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi dan misi yang telah menjadi komitmen bersama.

Balikpapan, 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Balikpapan

ALWIATI

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah dokumen rancangan awal perencanaan pembangunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 serta Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2024 merupakan dasar atau pedoman bagi rencana kerja tahun ketiga atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, yang menjadi salah satu bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Balikpapan guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2024 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah (Forum PD) Kota Balikpapan bersama pemangku kepentingan yang terkait.

Dengan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2024 ini, semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada Semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun Demikian berbagai upaya korektif dari semua pihak senantiasa diharapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan pada masa yang akan datang khususnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Balikpapan, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KOTA BALIKPAPAN

NENY DWI WINAHYU

Kata Pengantar		.....	i
Daftar Isi		.....	ii
Daftar Tabel		.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN	.....	1
	1.1 Latar Belakang	.....	1
	1.2 Landasan Hukum	.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	.....	3
	1.4 Sistematika Penulisan	.....	4
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu	.....	5
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	.....	5
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	.....	12
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	.....	23
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	25
	2.5 Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat	.....	40
Bab III	Tujuan dan Sasaran	.....	41
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	.....	41

	3.2 Tujuan dan Sasaran	42	
	3.3 Program dan Kegiatan	44	
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan	51	
Bab V	Inovasi		
Bab VI	Penutup	57	

DARTAR TABEL

Tabel	2.1	Hasil Evaluasi Renja DPPR Tahun 2016-2021	.....	6
Tabel	2.2	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Balikpapan	.....	26
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran Kinerja Pelayanan DPPR Tahun 2023	.....	43
Tabel	3.2	Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024	.....	45
Tabel	4.1	Rencana Kerja Tahun 2023	.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan
d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2024, adalah:

1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang – Undang (Lembar Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cata Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah;
21. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan untuk periode tahun 2024 sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :

1) Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan;
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat :

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Adapun hal-hal yang perlu dianalisis dalam pelaksanaan evaluasi renja yakni :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada ABPD tahun 2023 yang telah disahkan. Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dan pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 (tahun berjalan)
Kota Balikpapan

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		Cat.
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4*	12
2				**URUSAN PEMERINTAHAAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	10			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**										
2	10	01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**84 Nilai**	**-**	**80 Nilai**	**76 Nilai**	**95%**	**81 Nilai**	**81 Nilai**	**96%**	
2	**10**	**01**	**2.**	**Perencanaan,penganggaran, dan Eavaluasi Perangkat Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**66%**		**65,9%**	**67,69%**	**103%**				
2	10	01	2.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan			1	1	100%	1	1	100%	
1	02	01	006	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja			2	2	100%	2	2	100%	

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		Cat.
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4*	12
2	**10**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**84 nilai**	**-**	**80**	**77**	**96%**	**81 Nilai**	**81 Nilai**	**96%**	
			2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN (dokumen)			14	14	100%				
2	**10**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**84 nilai**	**-**	**80**	**78**	**98%**	**81 Nilai**	**81 Nilai**	**96%**	
			2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek			8	8	100%	20	20	100%	
2	**10**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**84 nilai**	**-**	**80**	**76**	**95%**	**81 Nilai**	**81 Nilai**	**96%**	
			2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10	10	100%				
			2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor			12	10	83%				

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		Cat.
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4*	12
			2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor			57	57	100%				
			2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan			11	11	100%				
			2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			3	3	100%	2	2	100%	
			2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah (laporan)			100	145	145%	130	130	100%	
2	**10**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**84 Nilai**	**-**	**80**	**68**	**85%**	**81 Nilai**	**81 Nilai**	**96%**	
			2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan			1	0	0%	5	4	80%	
			2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel			2	2	100%				
2	**10**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**84 Nilai**	**-**	**80**	**80**	**100%**	**81 Nilai**	**81 Nilai**	**96%**	
			2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat			1	1	100%	-	-	-	
			2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik			2	2	100%				
			2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Luasan Gedung kantor yang dilayani			200	200	99,54%				

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		Cat.
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4*	12
					- Jumlah tenaga non PNS - Jumlah Tenaga Profesional			14 4	14 3					
2	**10**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**84 Nilai**	**-**	**80**	**69**	**86%**	**81 Nilai**	**81 Nilai**	**96%**	
			2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara			16	16	100%	17	17	100%	
			2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara			9	6	67%	9	11	122%	
			2.09.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			5	4	80				
2	**10**	**04**		**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi**	**37,5%**	**-**	**41,7%**	**56%**	**133%**	**40%**	**40%**	**107%**	
2	**10**	**04**	**2.01**	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi**	**37,5%**	**-**	**41,7%**	**100%**	**240%**	**40%**	**100%**	**140%**	

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		Cat.
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4*	12
			2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) kabupaten/ Kota			5	10	200%	5	10	200%	
2	**10**	**05**		**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Luas Tanah yang Diberikan Ganti Rugi yang Dilaksanakan oleh DPPR**	**80,24%**		**66,33%**	**62,96%**	**95%**	**69,49%**			
2	**10**	**05**	**2.01**	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Rata-rata persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR**	**100%**	**-**	**25,85%**	**62%**	**239,85%**	**41,67%**	**65%**	**65%**	
			2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Dokumen pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh DPPR - dokumen perencanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh DPPR - Dokumen persiapan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh DPPR - Dokumen persiapan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah			3 4 3 3	1 4 4 2	81,5%				

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		Cat.
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4*	12
					- Dokumen verifikasi perencanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh PD yang membutuhkan tanah - luas tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksankan oleh DPPR			3 45,5	4 10,5					
2	**10**	**09**		**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Persentase luas tanah yang sudah dimanfaatkan**	**92%**	**-**	**88%**	**63,12%**	**72%**	**89%**	**89%**	**97%**	
2	**10**	**05**	**2.01**	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan**	**92%**	**88%**	**87%**	**63%**	**73%**	**89%**	**89%**	**97%**	
			2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah penerbitan rekomendasi IMTN			230 dok	218 dok	95%	240 dok	4580 dok.		
			2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan tanah negara			0	0	0%				
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**03**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**										
1	**03**	**09**		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**33%**	**-**	**14%**	**20%**	**143%**	**22%**	**22%**	**67%**	
1	**03**	**09**	**2.01.**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya yang Ditetapkan**	**42%**	**-**	**25%**	**28,57%**	**114%**	**33%**	**33%**	**79%**	
			2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Jumlah dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan yang disusun			5 dok.	5 dok.	100%	4 dok.	9 dok.		

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		Cat.
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4*	12
				Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota										
			2.01.03	Penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah lokasi penataan bangunan dan lingkungan yang dilaksanakan			1 lokasi	1 lokasi	100%				
			2.01.06	Monitoring Penataan /Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan			1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.	2 dok.		
1	**03**	**12**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**1**	**-**	**0,14**	**0,14**	**100%**	**0,15**	**0,15**	**15%**	
1	**03**	**12**	**2.01**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan**	**100%**	**-**	**50%**	**33,33%**	**67%**	**75%**	**75%**	**75%**	
			2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			1 dok.	0	45%	1 dok.	1 dok.		
1	**03**	**12**	**2.02**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah**	**100%**	**-**	**20%**	**22%**	**111%**	**40%**	**40%**	**40%**	
			2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen berita acara rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyusunan RTRW			6 dok.	0	0%		-	-	

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		Cat.
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4*	12
			2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen standarisasi intesitas bangunan per wilayah kecamatan			6 dok.	2 dok.	33%				
			2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah konsultasi publik (FGD) dalam penyelenggaraan penataan ruang			6 dok	18 dok.	300%				
1	**03**	**12**	**2.03**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang**	**94%**	**-**	**90%**	**87,16%**	**97%**	**91%**	**91%**	**97%**	
			2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	- Jumlah dokumen konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang - Jumlah dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang			100 800	190 864	117%				
1	**03**	**12**	**2.04**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah**	**95%**	**-**	**91%**	**60%**	**66%**	**92%**	**92%**	**97%**	
			2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	- Jumlah dokumen kegiatan pengawasan tata ruang dan bangunan di Kota Balikpapan - Jumlah dokumen laporan kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang			300 10	341 6	112%				

Berdasarkan tabel T-C.29 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sampai dengan Tahun 2023, maka analisis masing-masing dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

2.1.1 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, BBM dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	-	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
-	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-

2.1.2 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan
	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	-	Pengadaan Mebel
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
-	-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
		Penataan bangunan dan lingkungan
		Monitoring Penataan /Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	-

2.1.3 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
-	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-
Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang
-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
-	-	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/sesuai/melebihi target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Capaian target kinerja			Faktor-faktor penyebab
	Tidak Tercapai	Sesuai	Melebihi	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√			Masih kurangnya pemahaman responden kuesioner IKM Internal DPPR terhadap substansi pertanyaan kuesioner yang disampaikan
Perencanaan,penganggaran, dan Eavaluasi Perangkat Kinerja Perangkat Daerah			√	Masih kurangnya pemahaman responden kuesioner IKM Internal DPPR terhadap substansi pertanyaan kuesioner yang disampaikan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√			Masih kurangnya pemahaman responden kuesioner IKM Internal DPPR terhadap substansi pertanyaan kuesioner yang disampaikan

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Capaian target kinerja			Faktor-faktor penyebab
	Tidak Tercapai	Sesuai	Melebihi	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√			Masih kurangnya pemahaman responden kuesioner IKM Internal DPPR terhadap substansi pertanyaan kuesioner yang disampaikan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Administrasi Umum Perangkat Daerah	√			Masih kurangnya pemahaman responden kuesioner IKM Internal DPPR terhadap substansi pertanyaan kuesioner yang disampaikan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√			Keterbatasan penyedia untuk menyediakan unit pengadaan untuk sarana dan prasarana kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			√	- Banyaknya menghadiri undangan rapat dari instansi Pusat - Koordinasi dan konsultasi ke Instansi Pusat yang masih diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√			Masih kurangnya pemahaman responden kuesioner IKM Internal DPPR terhadap substansi pertanyaan kuesioner yang disampaikan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√			Keterbatasan penyedia untuk menyediakan unit pengadaan untuk sarana dan prasarana kantor
Pengadaan Mebel		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√			Masih kurangnya pemahaman responden kuesioner IKM Internal DPPR terhadap substansi pertanyaan kuesioner yang disampaikan

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Capaian target kinerja			Faktor-faktor penyebab
	Tidak Tercapai	Sesuai	Melebihi	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√			Dilakukannya pemeliharaan kendaraan menyesuaikan dengan permohonan dari pemakai kendaraan dinas operasional.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√			Terdapat 1 jenis peralatan kantor yang masih dalam kondisi baik
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			√	- masih banyaknya permohonan fasilitasi/mediasi sengketa tanah - masih banyak permasalahan tumpang tindih pada IMTN - penetapan target kinerja renstra yang rendah
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			√	
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			√	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	√			- Masih terdapat beberapa bidang lahan Embung Aji Raden yang belum dilaksanakan pembayaran ganti rugi pengadaan lahan karena terkendala berkas administrasi dari pemohon yang masih belum lengkap dan terdapat tumpeng tindih pada lahan tersebut - Pembayaran ganti rugi untuk pengadaan lahan ITK belum dapat dilaksanakan karena masih pada tahapan perencanaan dengan progres pekerjaan 10% yaitu menunggu delegasi Gubernur Kalimantan Timur atas revisi dokumen perencanaan Jalan Masuk ITK; - Belum dilakukannya pembayaran ganti rugi pada pengadaan lahan untuk Penataan Simpang Muara Rapak dan Bendali II dikarenakan terkendala pada tahapan pelaksanaannya
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			√	
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	√			
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	√			Tidak tercapainya kinerja dikarenakan masih terdapat beberapa permohonan rekomendasi IMTN yang masih terkendala dalam pemenuhan dokumen administrasi hal ini berdampak pada capaian kinerja pada kegiatan dan sub kegiatan dibawahnya sehingga tidak dapat mencapai target kinerjanya
Penerbitan Izin Membuka Tanah	√			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	√			
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			√	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			√	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan		√		Seluruh pihak yang terkait melakukan pekerjaan secara optimal demi merealisasikan proses pekerjaan

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Capaian target kinerja			Faktor-faktor penyebab
	Tidak Tercapai	Sesuai	Melebihi	
Lingkungan di Kabupaten/Kota				penataan bangunan dan lingkungan
Penataan bangunan dan lingkungan		√		
Monitoring Penataan /Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		√		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	√			Masih belum terselesaikannya penyusunan substansi RTRW Kota Balikpapan karena belum mendapatka
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	√			Banyaknya tahapan dalam penyusunan penetapan Revisi RTRW Kota Balikpapan yaitu penyusunan materi teknis, pemenuhan dokumen KLHS, pembaharuan peta dasar, validasi KLHS, rekomendasi peta dasar dari BIG dan Beria Acara pembahasan dari Pemerintah provinsi Kalimantan Timur
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			√	Tingginya tingkat kinerja tim FPR yang mendongkrak kinerja pada kegiatan perencanaan tata ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	√			Dilakukan rasionalisasi anggaran karena belum terlaksananya tahapan mendapatkan persetujuan substansi RTRW untuk pelaksanaan sosialisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	√			Kurangnya penganggaran untuk melakukan penyusunan standarisasi intesitas bangunan atas 6 kecamatan
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			√	- Tingginya tingkat kinerja pelaksanaan forum FPR dari target pelaksanaan 6 dokumen telah terealisasi 18 dokumen - Tim FPR ikut aktif dalam pelaksanaan rapat KKPR
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			√	Masih banyaknya permohonan ITR, KRK, KKPR, dan Site Plan sehingga melebihi target kinerja yang ditetapkan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	√			Rendahnya tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang Kota Balikpapan sehingga hanya terdapat 6 dokumen yang dilakukan tindak lajut untuk pelanggaran pemanfaatan ruang dari target 10 dokumen.
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			√	Banyaknya berkas pemanfaatan ruang yang dilakukan pengawasan terhadap dokumen administrasi dari target 310 dokumen telah terealisasi 347 dokumen

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu:

1. Dalam bidang sekretariat tingkat pencapaian pada sub kegiatan telah tercapai sesuai dengan perencanaan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang di- harapkan;

2. Dalam Pencapaian Program Perencanaan Tata Ruang yang tidak tercapai akan mempengaruhi program prioritas dari visi dan misi Walikota Balikpapan sehingga mengurangi nilai laporan Dinas dan Pemerintah Kota serta laporan akhir RPJMD Kota Balikpapan;
3. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan target capaian telah sesuai dengan target di dalam Renstra;
4. Sedangkan dalam urusan Pembebasan Lahan masih adanya target yang belum terapai/ rendah hal ini dikarenakan dalam pembebasan lahan tersebut banyak menemui hambatan-hambatan yang kebanyakan berasal dari pihak eksternal/ luar, adanya tumpang tindih lahan, pemberkasan yang banyak belum lengkap dan data yang kurang. Hal ini tentu akan mempengaruhi pencapaian target Renstra di tahun-tahun berikutnya.

2.1.6 Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu :

1. Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja outcome dan output pada Renja dan Renstra DPPR
2. Lebih sigap untuk mendapatkan adanya bantuan dana dari Pemerintah Pusat / Provinsi
3. Melakukan penyusunan jadwal rencana kegiatan untuk tiap kegiatan yang ada di anggaran DPPR
4. Dalam perencanaan anggaran TAPD hendaknya jangan melakukan pendekatan anggaran melainkan melalui pendekatan kepentingan atau analisis kebutuhan (*money follow program*).
5. Melakukan pelayanan legalisasi tanah/IMTN dalam rangka mendukung catur tertib pertanahan.
6. Melakukan follow up secara berkala dan intensif untuk proses pengurusan persetujuan substansi di Kementerian ATR/BPN sehingga bisa terselesaikannya proses Perda Revisi RTRW
7. Melakukan integrasi One Map One Data dengan aplikasi pertanahan untuk peningkatan pelayanan pemanfaatan ruang Kota Balikpapan
8. Melaksanakan kegiatan survey dan pemetaan untuk menyediakan data yang diperlukan pada proses pertanahan serta perencanaan dan pemanfaan ruang kota.
9. Menyediakan media untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pertanahan serta perencanaan dan pengendalian tata ruang.
10. Melaksanakan pelatihan/diklat teknis mengenai pertanahan serta perencanaan dan pengawasan Tata Ruang bagi aparat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta pengusulan pemenuhan pembentukan pegawai (formasi *bezetting*).
11. Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang pada pertanahan, tata ruang dan bangunan secara intensif serta penertiban terhadap bangunan yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Penamaan Program dan Kegiatan antara Renstra 2021-2026 dan Renja 2022 telah sesuai (konsisten) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah. Meskipun pada akhir tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah, yang menetapkan indikator sub kegiatan, namun berdasarkan arahan Bappeda Litbang, Renja 2022 tidak dilakukan penyesuaian indikator sub kegiatan.

Selain itu terdapat program dan kegiatan Renstra 2021-2026 yang tidak di akomodir pada Renja 2022, dikarenakan target kinerjanya dapat dicapai dengan dukungan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga pada Renstra 2021-2026 terdapat 7 program dan 17 kegiatan, sedangkan pada Renja 2022 hanya diakomodir 6 program, 16 kegiatan dan 47 sub kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan didasarkan pada evaluasi hasil capaian Program Tahun 2022 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2022), adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja sebesar **106,29%.**
2. Predikat kinerja **“Sangat Tinggi”.**

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indikator program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Indikator program *:*

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal) Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 95% dari target yang ditetapkan sebesar 80 Nilai, terealisasi sebesar 76 Nilai.

Pada program ini terdapat tujuh kegiatan, yaitu :

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 103% dari target yang ditetapkan sebesar 65,95%, terealisasi sebesar 67,79%.

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen perencanaan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 Dokumen, terealisasi sebesar 1 Dokumen

1.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen evaluasi kinerja

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 Dokumen, terealisasi sebesar 2 Dokumen

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal) Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 96% dari target yang ditetapkan sebesar 80 Nilai, terealisasi sebesar 77 Nilai.

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 14 Dokumen, terealisasi sebesar 14 Dokumen

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal) Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 98% dari target yang ditetapkan sebesar 80 Nilai, terealisasi sebesar 78 Nilai

1.3.1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 25 orang, terealisasi sebesar 25 orang

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal) Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 95% dari target yang ditetapkan sebesar 80%, terealisasi sebesar 76%.

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 10 Jenis, terealisasi sebesar 10 Jenis.

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 83% dari target yang ditetapkan sebesar 12 jenis, terealisasi sebesar 10 jenis

1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jenis bahan logistik kantor

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 57 jenis, terealisasi sebesar 57 jenis.

1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis barang cetakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 11 jenis, terealisasi sebesar 11 jenis.

1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 3 jenis, terealisasi sebesar 3 jenis.

1.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Frekuensi rapat koordinasi dasn konsultasi ke luar dan dalam daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 145% dari target yang ditetapkan sebesar 100 kali, terealisasi sebesar 145 kali.

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85% dari target yang ditetapkan sebesar 80 Nilai, terealisasi sebesar 68 Nilai.

1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 1 unit, terealisasi sebesar 0 unit.

1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis mebel

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 jenis, terealisasi sebesar 2 jenis.

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan *:*

Nilai IKM layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 80 Nilai, terealisasi sebesar 80 Nilai.

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Sub Kegiatan *:*

jumlah jenis jasa surat menyurat

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 jenis, terealisasi sebesar 1 jenis

1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Indikator Sub Kegiatan *:*

Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 jenis, terealisasi sebesar 2 jenis.

1.6.3 Sub Kegiaatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Sub Kegiatan *:*

- Luas Gedung Kantor yang dilayani
- Jumlah tenaga non PNS
- Jumlah tenaga profesional

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 99,54% dari target yang ditetapkan sebesar 200 m^2, 14 orang tenaga non PNS dan 4 tenaga professional, terealisasi sebesar 200 m^2 luas bangunan yang dilayani, 14 orang tenaga non PNS dan 3 tenaga professional

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai IKM Layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 86% dari target yang ditetapkan sebesar 80 Nilai, terealisasi sebesar 69 Nilai.

1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah kendaran yang dipelihara

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 16 unit, terealisasi sebesar 16 unit.

1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sedang", nilai capaian kinerja sebesar 67% dari target yang ditetapkan sebesar 9 unit, terealisasi sebesar 6 unit.

1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 80% dari target yang ditetapkan sebesar 5 jenis, terealisasi sebesar 4 jenis.

2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator program :

Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 0,14 Indeks, terealisasi sebesar 0,14 Indeks.

Pada program ini terdapat empat kegiatan, yaitu :

2.4 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)

Indikator Kegiatan :

Persentase dokumen tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 67% dari target yang ditetapkan sebesar 50%, terealisasi sebesar 33,33%.

2.2.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen persetujuan subtansi penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 45% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 0 dokumen.

2.5 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase dokumen koordinasi dan sikronisasi perencanaan tata ruang daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 111% dari target yang ditetapkan sebesar 20%, terealisasi sebesar 22%.

2.5.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen berita acara rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyusunan RTRW

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 45% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 0 dokumen.

2.5.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen standarisasi intensitas bangunan per wilayah kecamatan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 33% dari target yang ditetapkan sebesar 6 dokumen, terealisasi sebesar 2 dokumen.

2.5.3 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah konsultasi publik (FGD) dalam penyelenggaraan penataan ruang

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 300% dari target yang ditetapkan sebesar 6 kegiatan, terealisasi sebesar 18 kegiatan.

2.6 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase dokumen koordinasi dan sikronisasi pemanfaatan ruang

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 97% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, terealisasi sebesar 87,16%.

2.6.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah dokumen konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
- Jumlah dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 117% dari target yang ditetapkan sebesar 100 dokumen konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan 800 dokumen persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang, terealisasi sebesar 190 dokumen konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan 864 dokumen persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang.

2.7 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase koordinasi dan sikronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 66% dari target yang ditetapkan sebesar 91%, terealisasi sebesar 60%.

2.7.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

Indikator Sub Kegiatan :

- Jumlah dokumen kegiatan pengawasan tata ruang dan bangunan di Kota Balikpapan
- Jumlah dokumen laporan kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 112% dari target yang ditetapkan sebesar 300 dokumen pengawasan tata ruang dan bangunan di Kota Balikpapan dan 10 dokumen laporan kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang, terealisasi sebesar 341 dokumen pengawasan tata ruang dan bangunan di Kota Balikpapan dan 6 dokumen laporan kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang

3 Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya

Indikator program :

Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 143% dari target yang ditetapkan sebesar 14%, terealisasi sebesar 20%.

Pada program ini terdapat satu kegiatan, yaitu :

3.4 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase RTBL yang ditetapkan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 114% dari target yang ditetapkan sebesar 25%, terealisasi sebesar 28,57%.

3.4.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan yang disusun

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 5 dokumen, terealisasi sebesar 5 dokumen.

3.4.2 Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah lokasi penataan bangunan dan limgkungan yang dilaksanakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 lokasi, terealisasi sebesar 1 lokasi.

3.4.3 Sub Kegiatan Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Limgkungan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen monitoring penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

4 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Indikator program :

Persentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 133% dari target yang ditetapkan sebesar 41,7%, terealisasi sebesar 56%.

pada program ini terdapat satu kegiatan, yaitu :

4.4 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Kegiatan :

Persentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja tidak masuk dalam kriteria penilaian realisasi kinerja (tidak terukur), karena tidak ada perencanaan target yang ditetapkan diawal tahun rencana kinerja akibat adanya penyesuaian indikator kinerja sesuai hasil pemetaan nomenklatur Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020

4.4.1 Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah terselesaikannya permasalahan pertanahan (dokumen)

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 90% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 90%.

5 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Indikator program :

Persentase luas tanah yang sudah dimanfaatkan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sedang", nilai capaian kinerja sebesar 72% dari target yang ditetapkan sebesar 88%, terealisasi sebesar 63,12%.

Pada program ini terdapat satu kegiatan, yaitu :

5.4 Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah

Indikator Kegiatan :

persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sedang", nilai capaian kinerja sebesar 73% dari target yang ditetapkan sebesar 87%, terealisasi sebesar 63%.

5.4.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah penerbitan rekomendasi IMTN

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 95% dari target yang ditetapkan sebesar 230 dokumen, terealisasi sebesar 218 dokumen.

5.4.2 Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan tanah negara

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Rendah", nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 0 kegiatan, terealisasi sebesar 0 kegiatan (rasionalisasi anggaran).

6 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Indikator program :

Persentase luas tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 95% dari target yang ditetapkan sebesar 66,33%, terealisasi sebesar 62,96%.

Pada program ini terdapat satu kegiatan, yaitu :

6.4 Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 239,85% dari target yang ditetapkan sebesar 25,85%, terealisasi sebesar 62%.

6.4.1 Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

- Dokumen pelaksanaan pengadaan tanag yang dilaksanakan oleh DPPR
- Dokumen perencanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh DPPR

- Dokumen persiapan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh DPPR
- Dokumen persiapan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membutuhkan tanah
- Dokumen verifikasi perencanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membutuhkan tanah
- Luas tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR

Evaluasi hasil :

- Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 33% dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.
- Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4 dokumen, terealisasi sebesar 4 dokumen
- Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 133% dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen, terealisasi sebesar 4 dokumen
- Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 67% dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen, terealisasi sebesar 2 dokumen
- Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 133% dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen, terealisasi sebesar 4 dokumen
- Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 23% dari target yang ditetapkan sebesar 45,5 Ha, terealisasi sebesar 10,5 Ha.

T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kota Balikpapan

No	Indikator Sasaran Strategis	SPM/Standar nasional	IKK	Target RENSTRA DPPR				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (Izin lokasi, IMTN, Fasilitasi Sengketa Tanah)	-	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (Izin lokasi, IMTN, Fasilitasi Sengketa Tanah)	80%	81%	81,5%	82%	88,86%	-	-	-	
2	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	-	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	66,33%	69,40%	72,65%	76,44%	62,96%	-	-	-	
3	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	-	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	89,205	89,40%	89,60%	89,80%	89,74%	-	-	-	
4	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	-	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	14%	22%	27%	31%	20%	-	-	-	
	Nilai Reformasi Birokrasi DPPR	-	Nilai Reformasi Birokrasi DPPR	27 nilai	27,5 nilai	28 nilai	28,5 nilai	29,38 nilai	-	-	-	

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Pertanahan dan Penataan ruang tidak terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Adapun isu-isu strategis dimaksud antara lain :

a. Fasilitasi pengadaan tanah merupakan salah satu tugas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Pada tahun 2024 terdapat beberapa agenda lanjutan pelaksanaan tahapan pengedaan tanah pada jalan masuk Institut Teknologi Kalimantan dan embung aji raden sebagai salah satu dukungan terhadap pembangunan embung aji raden yang akan dilaksanakan berdasarkan adanya Surat Tugas pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dari Bappeda Litbang.
b. Peningkatan pelayanan administrasi di bidang pertanahan melalui kegiatan pemberian rekomendasi IMTN dan fasilitasi sengketa tanah. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi Pertanahan diharapkan mampu ditingkatkan melalui sisi kualitas maupun kuantitas. Salah satu indikator penyelenggaraan pelayanan publik yang baik tentunya dapat meminimalisir berbagai keluhan dari masyarakat sebagai penerima pelayanan. Untuk itu diharapkan setiap tahunnnya angka kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi di bidang Pertanahan dapat diukur melalui survey kepuasan pelayanan administasi pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
c. Penetapan Ibu Kota Negara “Nusantara” oleh Presiden Joko Widodo melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Hal ini berdampak pada penyesuaian fungsi kawasan Kota Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN), sehingga perlu dilakukan penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Balikpapan yang memuat ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang dalam skala yang jelas. RDTR sendiri dapat dijadikan acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.
d. Peningkatan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan Penataan ruang. Kegiatan ini merupakan upaya mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan dokumen perencanaan ruang yang telah disusun. Perlu disiapkan berbagai instrument atau alat pengendalian, salah satunya Insentif dan Disinsentif. Pada Tahun 2024, Dinas Pertanahan dan Penataan

Ruang akan melanjutkan proses penyusunan instrument pengendalian ini sampai dengan tahap legalisasi peraturan daerah. Diharapkan melalui peraturan ini, Pemerintah Kota Balikpapan dapat memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang serta dapat mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

e. Penataan bangunan dan lingkungan sebagai salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan tertentu yang mengacu pada dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Penyusunan RTBL berguna untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. RTBL adalah sebuah produk pengaturan yang disusun dengan harapan dapat mensinergikan seluruh perencanaan yang ada di suatu kawasan sehingga dapat mendukung dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kota hijau yang berkelanjutan. Untuk itu, perlu disusun dokumen RTBL sebagai salah satu aspek legal formal dalam kegiatan Penataan bangunan dan lingkungan, sehingga dengan adanya RTBL diharapkan mendapatkan gambaran tentang kemampuan daya dukung fisik dan lingkungan sehingga mampu membuat perencanaan pengembangan bangunan yang mengangkat nilai kearifan maupun karakter khas lokal sesuai dengan spirit dan konteks kawasan perencanaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Balikpapan

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**10**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bpp**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**82 nilai**	**11.924.154.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Bpp	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**82 nilai**	**11.924.154.000**	
2	**10**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**82 nilai**	**9.072.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat**	**82 nilai**	**9.072.000.000**	
2	10	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ bulan	9.072.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ bulan	9.072.000.000	
2	**10**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**82 nilai**	**360.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat**	**82 nilai**	**360.000.000**	
2	10	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bpp	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	20.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bpp	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	20.000.000	
2	10	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bpp	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	40.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bpp	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	40.000.000	
2	10	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bpp	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bpp	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	10	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	20 orang	200.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	20 orang	200.000.000	
2	**10**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**82 nilai**	**1.259.468.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**82 nilai**	**1.259.468.000**	
2	10	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000	
2	10	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	300.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	300.000.000	
2	10	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bpp	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	40.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bpp	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	40.000.000	
2	10	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bpp	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	350.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bpp	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	350.000.000	
2	10	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bpp	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	70.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bpp	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	70.000.000	

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	10	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bpp	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dok.	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bpp	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dok.	10.000.000	
2	10	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpp	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	24.468.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpp	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	24.468.000	
2	10	01	2.02	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 laporan	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 laporan	450.000.000	
2	**10**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**82 nilai**	**466.686.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat**	**82 nilai**	**466.686.000**	
2	10	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	436.686.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	436.686.000	1 unit mobil dan 3 unit motor
2	10	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Bpp	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	30.000.000	Pengadaan Mebel	Bpp	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	30.000.000	
2	**10**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**82 nilai**	**1.111.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**82 nilai**	**1.111.000.000**	

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	10	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	70.000.000	
2	10	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	30.000.000	
2	10	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	1.011.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	1.011.000.000	
2	**10**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**82 nilai**	**655.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**82 nilai**	**655.000.000**	
2	10	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, BBM dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	420.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, BBM dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	420.000.000	
2	10	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	175.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	175.000.000	

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	10	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpp	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpp	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	60.000.000	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Bpp**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi**	**39%**	**270.000.000**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Bpp**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi**	**39%**	**270.000.000**	
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Bpp**	**Persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi**	**50%**	**270.000.000**	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Bpp**	**Persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi**	**50%**	**270.000.000**	
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Bpp	jumlah dokumen Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	12 dokumen	250.000.000	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Bpp	jumlah dokumen Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	12 dokumen	250.000.000	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah permasalahan tanah yang dilakukan fasilitasi/mediasi	5 Berita acara	20.000.000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah permasalahan tanah yang dilakukan fasilitasi/mediasi	10 Berita acara	20.000.000	
2	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Bpp**	**Persentase Luas Tanah yang Diberikan Ganti Rugi yang Dilaksanakan oleh DPPR**	**72,65%**	**2.500.000.000**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Bpp**	**Persentase Luas Tanah yang Diberikan Ganti Rugi yang Dilaksanakan oleh DPPR**	**72,65%**	**2.500.000.000**	

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Bpp**	**Rata-rata Persentase Tahapan Pengadaan Tanah yang Sudah Dilaksanakan oleh DPPR**	**60,26%**	**2.500.000.000**	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Bpp**	**Rata-rata Persentase Tahapan Pengadaan Tanah yang Sudah Dilaksanakan oleh DPPR**	**60,26%**	**2.500.000.000**	
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	4 dokumen	400.000.000	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	4 dokumen	400.000.000	2 sk tim persiapan, 2 sk penlok
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Bpp	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2.000.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Bpp	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2.000.000.000	
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Bpp**	**Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**27%**	**35.568.130.000**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Bpp**	**Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**27%**	**35.568.130.000**	
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Persentase RTBL yang Ditetapkan**	**38%**	**35.568.130.000**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Persentase RTBL yang Ditetapkan**	**38%**	**35.568.130.000**	

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	4 dokumen	2.000.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	4 dokumen	2.000.000.000	
1	03	09	2.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Bpp	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 kawasan	1.405.000.000	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Bpp	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 kawasan	1.405.000.000	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bpp	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	30.750.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bpp	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	30.750.000.000	(2 gerbang balikpapan utara dan timur, 1 fisik hasil sayembara landmark (simpang dome),
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Bpn	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	1.213.130.000	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Bpn	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	1.213.130.000	

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	03	09	2.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bpp	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	300 orang	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bpp	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	300 orang	150.000.000	
1	03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 dokumen	50.000.000	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 dokumen	50.000.000	pendataan bangunan yang masuk kawasan rawan banjir
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Bpp**	**Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**0,21 nilai**	**2.600.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Bpp**	**Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**0,21 nilai**	**2.600.000.000**	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**	**Bpp**	**Persentase Dokumen Tentang peraturan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Ditetapkan**	**75%**	**450.000.000**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**	**Bpp**	**Persentase Dokumen Tentang peraturan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Ditetapkan**	**75%**	**450.000.000**	
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	2 dokumen	450.000.000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	2 dokumen	450.000.000	
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/ Kota**	**Bpp**	**Persentase Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah**	**60%**	**1.100.000.000**	**Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/ Kota**	**Bpp**	**Persentase Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah**	**60%**	**1.100.000.000**	
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	6 dokumen	300.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	6 dokumen	300.000.000	

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	Bpp	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	6 dokumen	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	Bpp	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	6 dokumen	500.000.000	
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	6 dokumen	300.000.000	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	6 dokumen	300.000.000	
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kab/Kota**	**Bpp**	**Persentase Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang**	**92%**	**570.000.000**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**	**Bpp**	**Persentase Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang**	**92%**	**570.000.000**	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Bpp	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1000 dokumen	70.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Bpp	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1000 dokumen	70.000.000	
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 dokumen	500.000.000	Sistem Informasi Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 dokumen	500.000.000	
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kab/Kota**	**Bpp**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah**	**93%**	**480.000.000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kab/Kota**	**Bpp**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah**	**93%**	**480.000.000**	
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	6 dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	6 dokumen	150.000.000	

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	310 dokumen	330.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	310 dokumen	330.000.000	
2	**10**	**09**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Bpp**	**Persentase Luas Tanah yang Sudah Dimanfaatkan**	**90%**	**350.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Bpp**	**Persentase Luas Tanah yang Sudah Dimanfaatkan**	**90%**	**350.000.000**	
2	**10**	**09**	**2.01**		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**Bpp**	**Persentase Rekomendasi IMTN yang Diterbitkan**	**90%**	**350.000.000**	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**Bpp**	**Persentase Rekomendasi IMTN yang Diterbitkan**	**90%**	**350.000.000**	
2	10	09	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Bpp	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	230 dokumen	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Bpp	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	230 dokumen	250.000.000	
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Bpp	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	1 laporan	100.000.000	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Bpp	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	1 laporan	100.000.000	
TOTAL RANCANGAN AWAL RKPD									**54.112.284.000**	**TOTAL PAGU HASIL ANALISIS KEBUTUHAN**				**54.112.284.000**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.

Tabel T.C-32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu kepada RPJMN 2020-2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi Prioritas Nasional (PN) pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Tema RKP 2024 :

"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Arah Kebijakan Prioritas RKP 2024 :

1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
4) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5) Membangun lingkungan hidup;
6) Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam (politik, ekonomi, pertahanan, keamanan) dan transformasi pelayanan publik.

Adapun tema dan prioritas Pembangunan Provinsi Kalimatan Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

Tema Pembangunan : **“Peningkatan Daya Saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk Percepatan Transformasi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.**

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur :

1. Peningkatan daya saing SDM yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya;
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diverfikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan;
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrim;
6. Peningkatan kualitasn lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola Pemerintah Daerah yang profesional dan akutanbel; serta
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2024, Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2024 tidak mendukung secara langsung prioritas Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan pertanahan dan urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dukungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun rencana kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada Tahun 2024, salah satunya melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyesuaian fungsi kawasan Kota Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara “Nusantara”.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2024 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kota Balikpapan Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Formulasi	Capaian Tahun Sebelumnya (2021)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pemanfaatan ruang dan tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN, Fasilitasi Sengketa Tanah)	Survei Pelayanan Administrasi Pertanahan	88,86%	81,5%
		Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	Luas lahan yang dibebaskan / luas lahan yang dibutuhkan x 100%	62,96%	72,65%
		Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	luas lahan yang telah sesuai pemanfaatan ruang / luas lahan keseluruhan yang terbangun x 100%	89,74%	89,60%
		Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	Jumlah kawasan yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan / jumlah dokumen perencanaan kawasan pada penataan bangunan dan lingkungan yang disusun/ ditetapkan x 100%	20%	27%
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPPR	Nilai Reformasi Birokrasi DPPR	Nilai perhitungan LKE	29,38	28

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, kemudian disempurnakan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Dalam perumusan program dan kegiatan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang mendukung Misi ke-4 dari visi Kepala Daerah Kota Balikpapan yakni : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan.
2. Mempertimbangkan beberapa isu strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu :
   - Integrasi peta digital RDTR Kota Balikpapan ke dalam aplikasi OSS sebagai bentuk dukungan percepatan pelayanan perizinan dan berinvestasi;
   - Era industri 4.0 sebagai bentuk transformasi digital tata kelola dan layanan pemerintah, agar lebih efektif, efisien dan renponsif;
   - Mendukung Balikpapan sebagai kota Penyangga IKN, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melakukan penyesuaian terhadap RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Balikpapan dan dukungan infrastruktur dalam penataan bangunan dan lingkungan
3. Capaian target indikator kinerja pada beberapa program dan kegiatan untuk mendukung sasaran prioritas Kepala DPPR.

a. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah program dan kegiatan

   Dalam rangka melaksanakan fungsi tugas urusan penataan ruang dan pertanahan, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang akan melaksanakan 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan deskripsi sebagai berikut:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penataan bangunan dan lingkungannya	1. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	1. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 3. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 4. Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
2	Penyelenggaraan Penataan Ruang	2. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang
		3. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota	6. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota 8. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
		4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kab/Kota	9. Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
		5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kab/Kota	10. Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 13. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		8. Administrasi Umum Perangkat Daerah	14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			17. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20. Fasilitasi Kunjungan Tamu 21. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23. Pengadaan Mebel
		10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	12. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 31. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	13. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	32. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 33. Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
6	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	14. Penerbitan Izin Membuka Tanah	34. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah 35. Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

2. Penyebaran, kelompok program dan kegiatan

   Penyebaran kelompok program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai berikut:

   - ✓ urusan penataan bangunan dan lingkungan: seluruh kawasan strategis lainnya di Kota Balikpapan pada 6 Kecamatan
   - ✓ Urusan penataan ruang: seluruh kecamatan di Kota Balikpapan
   - ✓ Urusan pertanahan: Embung Aji Raden, Jalan Masuk ITK, Penataan Simpang Muara Rapak dan Perangkat Daerah yang membutuhkan fasilitasi tanah

3. Pendanaan Indikatif

   Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya sesuai dengan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 pada format tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

SKPD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG						**62.927.822.000,00**							**38.850.040.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**47.165.673.600,00**							**24.180.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**47.165.673.600,00**							**24.180.000.000,00**	
1.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	-	-			-	**44.165.673.600,00**						-	**22.550.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase RTBL yang ditetapkan*	-			38 %	44.165.673.600,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	-	22.550.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				6 Kawasan	38.865.673.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		19.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				6 Dokumen	3.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	2.250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang***	-			**0,21 nilai**	**3.000.000.000,00**						-	**1.630.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan*	-			75 %	450.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	-	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang														
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				600 Orang	450.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah*	-			60 %	1.500.000.000,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				6 Dokumen	550.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				6 Dokumen	650.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				6 Dokumen	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang*	-			92 %	570.000.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	570.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah*	-			93 %	480.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	-	330.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan														
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				330 Dokumen	480.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		330.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.762.148.400,00**							**14.670.040.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**15.762.148.400,00**							**14.670.040.000,00**	
1.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	-			**82 nilai**	**12.482.148.400,00**						-	**11.450.040.000,00**	
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			82 nilai	9.072.000.000,00			-	-	-	-	9.100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	9.072.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			82 nilai	366.523.000,00			-	-	-	-	280.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	56.523.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	310.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		240.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			82 nilai	1.049.960.400,00			-	-	-	-	800.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	193.322.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	23.029.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	319.791.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		320.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	70.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	9.350.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	24.468.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140 Laporan	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			82 nilai	486.079.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	436.686.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	49.393.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			82 nilai	852.586.000,00			-	-	-	-	620.040.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	45.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	777.586.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		520.040.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			82 nilai	655.000.000,00			-	-	-	-	620.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	420.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		380.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	175.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi***	-			**39 %**	**270.000.000,00**						-	**270.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi*	-			50 %	270.000.000,00			-	-	-	-	270.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Berita Acara	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
3.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	***Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR***	-			**72,65 %**	**2.500.000.000,00**						-	**2.500.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR*	-			60,26 %	2.500.000.000,00			-	-	-	-	2.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				4 Dokumen	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2.100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
4.	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	***Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan***	-			**90 %**	**510.000.000,00**						-	**450.000.000,00**	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	*Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan*	-			90 %	510.000.000,00			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				230 Dokumen	410.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	JUMLAH							**62.927.822.000,00**							**38.850.040.000,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

RENJA TAHUN 2024

SKPD : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
2.10.01.2.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	38 orang/ bulan	9.072.000.000	
2.10.01.2.05.01		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bpp	2 paket	56.523.000	
2.10.01.2.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	31 orang	310.000.000	
2.10.01.2.06.01		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bpp	1 paket	10.000.000	

2.10.01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bpp	6 paket	193.322.000	
2.10.01.2.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bpp	2 paket	23.029.400	
2.10.01.2.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bpp	7 paket	319.791.000	
2.10.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bpp	3 paket	70.000.000	
2.10.01.2.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bpp	2 dok.	9.350.000	
2.10.01.2.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpp	2 laporan	24.468.000	
2.10.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	140 laporan	400.000.000	
2.10.01.2.07.01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bpp	4 unit	436.686.000	
2.10.01.2.07.05			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bpp	17 unit	49.393.000	

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2.10.01.2.08.02	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bpp	1 laporan	45.000.000	
2.10.01.2.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bpp	1 laporan	30.000.000	
2.10.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bpp	36 laporan	777.586.000	
2.10.01.2.09.01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bpp	18 unit	420.000.000	
2.10.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bpp	10 unit	175.000.000	

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2.10.01.2.08.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bpp	30 unit	60.000.000	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
1.03.09.2.01.0007	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGANNYA**	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bpp	1 dokumen	50.000.000	1. kawasan rawan banjir
1.03.09.2.01.0008			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Bpp	6 kawasan	38.865.673.600	1. penataan landscape gerbang utara 2. landmark jalan masuk stadion batakan 3. landmark simpang dome beserta penataan kawasannya 4. penataan bekapai 5. pemeliharaan Menara jam dan air mancur

KODE	Program		Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023	

		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting
1.03.09.2.01.009			Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Bpp	6 dokumen	3.000.000.000	Pelaksanaan supervise atas Pembangunan fisik
1.03.09.2.01.010			Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	4 dokumen	2.250.000.000	Penyusunan: 1 Review DED A. Yani 2. revisi DED Sudirman 3. DED Landmark Bpp Tengah 4. DED Penataan kuliner batu ampar

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.12.2.01.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Bpp	600 orang	450.000.000	
1.03.12.2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Bpp	6 dokumen	550.000.000	
1.03.12.2.02.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Bpp	6 dokumen	650.000.000	
1.03.12.2.02.03			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Bpp	6 dokumen	300.000.000	Pelaksanaan pokmas dan FPR
1.03.12.2.03.0006		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Bpp	1 dokumen	570.000.000	Pengadaan smart board untuk pelayanan tata ruang dan pengembangan aplikasi OMOD

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.12.2..04.010	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Bpp	330 Dokumen	480.000.000	Pengadaan papan informasi sempadan 2 unit, DED Papan informasi sempadan dan sosialisasi perda indis
2.10	**URUSAN PERTANAHAN**							
2.10.04.2.01.01	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	jumlah data sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	12 dokumen	250.000.000	Pelaksanaan GTRA

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
2.10.04.2.01.02			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 daerah kabupaten/ kota	Bpp	10 berita acara	20.000.000	
2.10.09.2.01.01	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Bpp	230 dokumen	410.000.000	Pengembangan aplikasi SIMANTAN dan sosialiasi untuk kecamatan terkait IMTN
2.10.09.2.01.2			Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	Bpp	1 laporan	100.000.000	300 dokumen pengawasan
2.10.05.2.01.01	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keputusan Bupati/ Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Bpp	4 dokumen	400.000.000	2 SK Tim persiapan dan 2 SK Penlok

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2.10.05.2.01.02	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	2 dokumen	2.100.000.000	Belanja operasional dalam fasilitasi ganti rugi pengadaan tanah
T O T A L							**62.927.822.000**	

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka peningkatan kualitas rencana kerja (Renja) dan pembangunan serta keselarasan dengan program prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memiliki inovasi dalam urusan Penataan Ruang yang tertuang sesuai gambar dibawah ini:

Gambar 5.1

Inovasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2024

BAB VI

PENUTUP

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.2. Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Balikpapan, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KOTA BALIKPAPAN

NENY DWI WINAHYU

Rencana Akhir (RANKIR) RENJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun sebagai penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, Renja yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya. Renja juga harus mengantisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Periode penyusunan Renja DLH disusun untuk 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tahun 2024 yang baik, maka perlu disusun Renja DLH yang sistematis dan akuntabel.

Dokumen Renja DLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan program kegiatan tahun 2024 di Kota Balikpapan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2023 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Derah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
14. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan/pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat memberikan arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, arah kebijakan umum, program pembangunan, sasaran-sasaran strategis dan rencana kerja yang ingin dicapai DLH Kota Balikpapan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program kegiatan 1 (satu) tahun anggaran.

2. Sebagai tolak ukur indikator kunci keberhasilan dan media akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan.
3. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat dicapai sesuai target dan berorientasi pada hasil.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG, Mengemukakan gambaran umum tentang Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2024;

1.2 LANDASAN HUKUM, Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan DLH serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DLH;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2024;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2024 serta susunan garis besar isi dokumen;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DLH tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja DLH sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DLH berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja DLH tahun-tahun sebelumnya;

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing DLH, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH, memuat uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan DLH dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DLH, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DLH, dampak capaian visi dan

misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan SDGs, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024, memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra DLH dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DLH;

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT, memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi DLH;

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DLH;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DLH, pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja DLH didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DLH;

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN, pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH dalam pembangunan daerah

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH

Evaluasi Renja DLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2023. Kinerja DLH mengacu pada target pencapaian RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

IKLH merupakan indikator penting mengevaluasi efektifitas program-program pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri dari tiga indikator yaitu : Indeks Kualitas Lahan (IKL), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA).

Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2022 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2022), adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator Program :

Persentase ketersediaan data Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 35,29%, terealisasi sebesar 35,29%.

1.1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah dokumen

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen

1.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen pelaporan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Indikator Program :

Persentase Rimba Kota, Taman Kota, TPU dan Pembibitan dikelola

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 5,74%, terealisasi sebesar 5,74%.

2.1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah Rimba Kota, Taman Kota, TPU dan Pembibitan yang dikelola

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 111 kawasan, terealisasi sebesar 111 kawasan.

2.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kebun Raya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Koleksi

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 485% dari target yang ditetapkan sebesar 500 pohon, terealisasi sebesar 2424 pohon.

2.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Ruang Terbuka Hijau Kota yang dipelihara dan dikelola (Hutan Kota 18, Taman Kota 60, TPU 32, Pembibitan 2)

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 110 kawasan, terealisasi sebesar 110 kawasan.

3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator Program :

Persentase Penanganan Pengaduan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 152% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 152%.

3.1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

persentase Laporan Pengaduan yang diselesaikan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 152% dari target yang ditetapkan sebesar 70 persen, terealisasi sebesar 106,4%.

3.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

jumlah dokumen penanganan pengaduan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 25 dokumen, terealisasi sebesar 38 dokumen.

4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Program :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 99,63% dari target yang ditetapkan sebesar 64,2, terealisasi sebesar 63,96.

4.1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase pemenuhan baku mutu

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 130% dari target yang ditetapkan sebesar 50%, terealisasi sebesar 65,12%.

4.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen persetujuan teknis dan Jumlah Dokumen persetujuan lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 130% dari target yang ditetapkan sebesar 43 dokumen, terealisasi sebesar 56 dokumen.

4.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Pelaksanaan & Pelaporan Pengendalian Emisi GRK

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 dokumen, terealisasi sebesar 2 dokumen.

4.2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase Penanggulangan Pencemaran

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 50%, terealisasi sebesar 50%

4.2.1. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah informasi lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen, terealisasi sebesar 3 dokumen.

4.3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase Pemulihan Pencemaran dan / atau kerusakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 25%, terealisasi sebesar 25%

4.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Penggantain/ Penanaman Pohon

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen, terealisasi sebesar 3 dokumen.

5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator Program :

persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 20, terealisasi sebesar 20%.

5.1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah Penghargaan yang diberikan Kepada Masyarakat

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 26 Penghargaan, terealisasi sebesar 26 Penghargaan.

5.1.1 Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah kegiatan penilaian (CGH, Eco Office, Adiwiyata Kota, Kalpataru Kota)

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4 dokumen kegiatan, terealisasi sebesar 4 dokumen kegiatan.

6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Indikator Program :

persentase limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Rendah", nilai capaian kinerja sebesar 48% dari target yang ditetapkan sebesar 51%, terealisasi sebesar 24,48%.

6.1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Indikator Kegiatan :

Jumlah fasilitasi dokumen pemenuhan komitmen

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 80% dari target yang ditetapkan sebesar 15 dokumen, terealisasi sebesar 12 dokumen.

6.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah fasilitasi dokumen pemenuhan komitmen

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Rendah", nilai capaian kinerja sebesar 48% dari target yang ditetapkan sebesar 25 dokumen, terealisasi sebesar 12 dokumen.

7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator Program :

persentase ketaatan usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 101% dari target yang ditetapkan sebesar 40%, terealisasi sebesar 40,36%.

7.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah Usaha/Kegiatan yang melaksanakan kegiatan sesuai izin yang diberikan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 101% dari target yang ditetapkan sebesar 110 kegiatan, terealisasi sebesar 110 kegiatan.

7.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen Fasilitasi pemenuhan persetujuan lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 80 dokumen, terealisasi sebesar 80 dokumen.

7.1.2. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 30 kegiatan, terealisasi sebesar 31 kegiatan.

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator Program :

persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 306% dari target yang ditetapkan sebesar 20%, terealisasi sebesar 61,15%.

8.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberikan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 306% dari target yang ditetapkan sebesar 52 lembaga, terealisasi sebesar 159 lembaga.

8.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 123% dari target yang ditetapkan sebesar 22 lembaga, terealisasi sebesar 27 lembaga.

8.1.2. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 440% dari target yang ditetapkan sebesar 30 lembaga, terealisasi sebesar 132 lembaga.

8.1.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Kampanye Lingkungan yang diadakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 18 Dokumen kegiatan, terealisasi sebesar 18 Dokumen kegiatan.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator Program :

indeks kinerja pengelolaan sampah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 81,15, terealisasi sebesar 81,15.

9.1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Indikator Kegiatan :

Persentase pengelolaan sampah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 99%, terealisasi sebesar 99%.

9.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen yang disusun

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

9.1.2. Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah kelompok yang dibina

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 113% dari target yang ditetapkan sebesar 30 kelompok, terealisasi sebesar 34 kelompok.

9.1.3. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan

dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah tonase Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan Akhir Sampah (Kebersihan, MRF, ITF, TPAS Manggar), Pemeliharaan Kendaraan Operasional (BBM, Service dan Suku Cadang)

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 134.586 ton, terealisasi sebesar 134.586 ton.

9.1.4. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah kegiatan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 6 laporan kegiatan, terealisasi sebesar 6 laporan kegiatan.

9.1.5. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 2088% dari target yang ditetapkan sebesar 8 unit, terealisasi sebesar 167 unit.

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar B, terealisasi sebesar B.

10.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 jenis, terealisasi sebesar 2 jenis.

10.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 12 dokumen, terealisasi sebesar 12 dokumen.

10.2. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Jumlah jenis layanan administrasi retribusi perangkat daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 jenis, terealisasi sebesar 1 jenis.

10.2.1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

jumlah pegawai pendataan dan pendaftaran retribusi

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 23 orang, terealisasi sebesar 23 orang.

10.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pelayanan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 75 orang, terealisasi sebesar 75 orang

10.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Penggantian/ Penanaman Pohon

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 75 orang, terealisasi sebesar 75 orang

10.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 jenis, terealisasi sebesar 2 jenis.

10.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 5 jenis, terealisasi sebesar 5 jenis.

10.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 5 jenis, terealisasi sebesar 5 jenis.

10.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis ATK dan tersedianya makan minum kantor

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 5 jenis, terealisasi sebesar 5 jenis.

10.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4 jenis, terealisasi sebesar 4 jenis.

10.4.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sedang", nilai capaian kinerja sebesar 70% dari target yang ditetapkan sebesar 135 laporan, terealisasi sebesar 94 laporan.

10.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kegiatan :

Jumlah Jenis Layanan Pengadaan BMD

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sedang", nilai capaian kinerja sebesar 67% dari target yang ditetapkan sebesar 6 jenis, terealisasi sebesar 4 jenis.

10.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Rendah", nilai capaian kinerja sebesar 50% dari target yang ditetapkan sebesar 2 jenis, terealisasi sebesar 1 jenis.

10.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator Sub Kegiatan :

jumlah jenis pengadaan mebel

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 150% dari target yang ditetapkan sebesar 2 jenis, terealisasi sebesar 3 jenis.

10.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

Jumlah Jenis Layanan Penunjang

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 9 jenis, terealisasi sebesar 9 jenis.

10.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis jasa surat menyurat

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 jenis, terealisasi sebesar 2 jenis.

10.6.2. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 6 jenis, terealisasi sebesar 6 jenis.

10.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Tenaga Administrasi kantor, Tenaga Petugas Kebersihan, Keamanan, Engineering, Pertamanan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 78% dari target yang ditetapkan sebesar 32 orang, terealisasi sebesar 25 orang

10.7. Kegiatan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

Jumlah Jenis Layanan Pengadaan BMD

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 6 jenis, terealisasi sebesar 6 jenis.

10.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Kegiatan :

jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 65% dari target yang ditetapkan sebesar 71 unit, terealisasi sebesar 46 unit.

10.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

jumlah jenis pemeliharaan sarana dan prasarana

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 8 jenis, terealisasi sebesar 8 jenis.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Capaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Lingkungan Hidup.

Hasil analisis kinerja pelayanan DLH disajikan dalam tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terlampir di bawah ini:

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,33	50,32	77%
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,02	84,29	95%
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	47,32	50	106%
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81,15	81,15	100%
5	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	27	31,67	117%

Sumber : DLH, 2023

Hasil analisis anggaran DLH disajikan dalam tabel 2.2. Realisasi Anggaran DLH Tahun 2022 terlampir di bawah ini :

Tabel 2.2.

Realisasi Anggaran DLH Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran Murni TA.2022	Anggaran Murni TA.2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Anggaran TA.2022	Persentase Realisasi Anggaran TA.2022
				I	II	III	IV		
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	99.996.200	99.996.200	-	18.099.200	50.873.280	29.162.500	98.134.980	98%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	25.903.387.458	28.810.089.958	3.227.134.297	6.012.536.810	6.001.790.762	11.599.091.542	26.840.553.411	93%
3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	119.999.700	119.999.700	6.002.000	33.237.609	15.407.576	43.534.600	98.181.785	82%
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.034.999.265	1.034.999.265	1.006.500	57.095.150	285.585.115	613.589.894	957.276.659	92%
5	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	199.999.700	199.999.700	-	-	-	166.230.600	166.230.600	83%
6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000	50.000.000	4.723.440	3.350.100	1.562.250	38.731.625	48.367.415	97%
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	105.000.000	105.000.000	4.228.000	36.106.530	16.081.900	42.963.600	99.380.030	95%
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	284.996.500	284.996.500	1.290.000	33.016.500	22.075.500	207.894.759	264.276.759	93%
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	70.565.919.340	88.296.554.996	8.160.659.661	16.409.875.225	14.965.883.986	43.464.441.657,62	83.000.860.530,21	94%
10	PROGRAM PENUNJANG								91%

	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.802.523.640	17.097.187.893	2.765.978.238	4.261.966.702	3.942.661.708	4.572.001.317	15.542.607.965	
	TOTAL	**115.166.821.803**	**136.098.824.212**	**14.171.022.136**	**26.865.283.826**	**25.301.922.077**	**60.777.642.095**	**127.115.870.134**	**93%**

Sumber : DLH 2023

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH

Isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun rencana kerja Tahun, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang

Dari hasil analisis terhadap isu-isu internal dan eksternal dalam pembangunan Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan serta merujuk pada data DIKPLHD, Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH adalah sebagai berikut :

a. Kebersihan Kota
   - Belum optimalnya Kebersihan TPS setelah jam buang sampah
   - Belum berhasilnya pemilahan dan pengelolaan sampah
   - Adanya Timbulan Sampah di Pesisir dan Laut
   - Belum terkelolanya sampah B3 Rumah Tangga

b. Keindahan Kota
   - Penataan Kota melalui Program Citra Kota
   - Penataan taman kota
   - Penataan tanaman di median jalan
   - Perapian pohon pinggir jalan

c. Belum optimalnya Pengawasan, Pengendalian dan belum efektifnya Penaatan Hukum Lingkungan

d. Ketidaktaatan Pemanfaatan Ruang

e. Penataan/Pembuakaan Lahan

f. Kejadian Banjir di DAS Ampal

g. Penurunan Kualitas Air Sungai

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023, maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD DLH Tahun 2024 dapat dijelaskan dalam tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD DLH Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.144.338.453,-
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	229.990.700,-
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.699.999.475,-
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	65.429.592.872,-
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	580.000.000,-
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	225.000.000,-
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	750.000.000,-
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	300.000.000,-
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	175.000.000,-
10	Program Pengelolaan Persampahan	70.694.039.500,-
11	Program Pengelolaan Persampahan (UPTD TPAS)	13.765.787.276,-
	TOTAL PAGU	**173.993.748.276,-**

Sumber : DLH 2023

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dari hasil Musrembang di semua Kecamatan di Kota Balikpapan tidak ada usulan yang masuk untuk urusan lingkungan hidup, hampir mayoritas usulan kea rah pembangunan fisik melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Dan dari hasil forum OPD yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 usulan yang masuk sudah terakomodir di rencana program dan kegiatan yang ada di Tahun 2024.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Dengan mengacu pada Misi Presiden tahun 2020-2024 dan juga dua pilar dari KLHK di atas, maka dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan KLHK, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim;
2. Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas telah diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDG's*). Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitannya dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK diatas, maka rumusan sasaran strategis KLHK adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih 2019-

2023 mempunyai peran penting. Peran penting Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung komitmen nasional untuk menurunkan emisi GRK sebanyak 26% dari *Business as Usual* (BAU) pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional dan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi emisi GRK sebanyak 30% pada tahun 2030 dari tingkat emisi pada tahun tersebut, merupakan tujuan paling strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Mendukung upaya pemerintah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, sebagai satuan kerja dengan memerhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan lima tahun.

kedepan, menetapkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yakni: Menurunnya emisi gas rumah kaca dari BAU *Baseline*, dengan sasaran jangka menengahnya yaitu Menurunnya emisi gas rumah kaca, dengan indikator sasaran penurunan Emisi (ton CO_2 eq Juta).

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga maka perlu dilaksanakan kebijakan dan strategi daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah dengna target pengurangan sampah sebesar 30% dan target penanganan sampah sebesar 70% hingga tahun 2025.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan membantu Wali Kota Balikapapan dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi

pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2016 adalah:

"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengan Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ada pada Visi Nyaman Dihuni dengan isu strategis Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sedangkan pada misi yang terkait adalah misi keempat, yaitu: **Mewujudkan Kota Nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan**.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Renja Perubahan

Tujuan dan Sasaran DLH Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatkan Upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Indeks Kualitas Lahan	1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan
2. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	2. Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air
		3. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam	Persentase jumlah partisipasi masyarakat	4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam	- persentase peningkatan pendidikan, pelatihan,

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	dan penyuluhan LH - persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan
4. Meningkatkan Kebersihan Kota	persentase kenaikan tingkat pengelolaan sampah	5. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Persentase Pengurangan Sampah
			- Persentase Penanganan Sampah
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DLH	Nilai Reformasi Birokrasi DLH	6. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DLH	- Nilai perhitungan mandiri Lembar Kerja Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

Sumber : DLH, 2023

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan DLH adalah sekumpulan rencana kerja suatu DLH, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DLH dalam pembangunan daerah.

Adapun rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET			
			2024		2025	
			K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78,16	20.144.338.453	78,16	20.605.000.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	78,16	65.000.000	78,16	45.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai	78,16	5.000.000	78,16	15.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	10.000.000	2	30.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78,16	13.057.363.000	78,16	13.475.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	75	13.057.363.000	75	13.475.000.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78,16	1.550.000.000	78,16	1.750.000.000

Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1	1.550.000.000	1	1.750.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78,16	98.055.000	78,16	200.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	80	48.055.000	80	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	50.000.000	25	200.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78,16	1.110.000.000	78,16	1.270.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10.000.000	5	15.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	200.000.000	10	225.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	250.000.000	6	275.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	50.000.000	4	55.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	145	450.000.000	145	550.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	6	150.000.000	6	150.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78,16	744.975.787	78,16	225.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	284.058.000	1	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	360.942.000	1	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	49.976.300	15	100.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	49.999.487	2	125.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78,16	1.806.057.700	78,16	1.890.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	10.000.000	2	15.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	499.999.700	6	600.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	1.296.058.000	8	1.275.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78,66	1.712.886.966	78,66	1.750.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	71	1.500.000.000	71	1.500.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	125	112.887.000	125	100.000.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	99.999.966	1	150.000.000
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dokumen perencanaan	persen	75%	229.990.700	75%	35.000.000
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan lingkungan hidup	Dokumen	1	199.998.000	1	-
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	199.998.000	1	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	29.992.700	1	35.000.000
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	29.992.700	1	35.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	Kegiatan	23	1.699.999.475	23	3.100.000.000
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	Kegiatan	23,00	399.999.550	23,00	800.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Akumulasi Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Dokumen	20,00	100.000.000	20,00	200.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Akumulasi Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Dokumen	3,00	100.000.000	3,00	200.000.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah Akumulasi Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Dokumen	1	199.999.550	1	400.000.000
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	Kegiatan	23,00	1.124.999.925	23,00	1.900.000.000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	6	1.099.999.925	6	1.750.000.000
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	3	25.000.000	3	150.000.000

Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	Kegiatan	23,00	175.000.000	23,00	400.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Kegiatan	5	25.000.000	5	100.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	5	150.000.000	5	300.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	persen	10,63	65.429.592.872	10,63	33.925.000.000
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH yang dikelola	hektar	6802,43	65.429.592.872	6802,43	33.925.000.000
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	250.000.000	1	275.000.000
Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	309.22	5.599.999.072	309.22	5.500.000.000
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	392,46	59.479.593.800	392,46	28.000.000.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kepasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	20	100.000.000	20	150.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan limbahnya	persen	65,79	580.000.000	65,79	400.000.000
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku Usaha yang melaporkan Limbah B3	usaha/ kegiatan	20	55.000.000	20	100.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	20	55.000.000	20	100.000.000
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan pengumpulan limbah B3	usaha/ kegiatan	3	525.000.000	3	300.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	3	525.000.000	3	300.000.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	persen	32,93	225.000.000	32,93	525.000.000
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	usaha/ kegiatan	135	225.000.000	135	525.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Usaha yang memenuhi persyaratan lingkungan	Dokumen	90	100.000.000	135	200.000.000
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha yang memenuhi Persyaratan Lingkungan	usaha/ kegiatan	135	100.000.000	135	275.000.000
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha yang Memenuhi Persyaratan Lingkungan	Orang	4	25.000.000	4	50.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	persen	100	750.000.000	100	1.075.000.000
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH	Persen	100	750.000.000	100	1.075.000.000

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Dokumen	30	200.000.000	30	450.000.000
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	Orang	200	200.000.000	200	375.000.000
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	32	350.000.000	32	250.000.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat yang Terselenggara	persen	100	300.000.000	100	400.000.000
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat yang Terselenggara	Persen	100	300.000.000	100	400.000.000
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Entitas	4	300.000.000	4	400.000.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat yang Terselenggara	persen	100	175.000.000	100	300.000.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani	Persen	100	175.000.000	35	300.000.000

Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan	35	175.000.000	35	300.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	persen	100	70.694.039.500	100	69.994.035.976
Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Persampahan	Persen	100	70.694.039.500	100	69.994.035.976
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	450	4.500.000.000	450	4.000.000.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten /Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	5	200.000.000	5	475.000.000
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	ton	144728	65.394.039.500	144728	65.069.035.976
Pengurangan Sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	4	600.000.000	4	450.000.000
Program Pengelolaan Persampahan (UPTD TPAS Manggar)	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	140294	13.765.787.276	140294	13.762.914.871
Total Anggaran				**173.993.748.276**		**144.121.950.847**

Sumber : DLH, 2023

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun Anggaran.

Dalam prosesnya, Rencana Kinerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, Rencana Strategis (RENSTRA), serta mempertimbangkan isu strategis lingkungan hidup yang mengemuka dan target pencapaian Jaktrada Kota Balikpapan tahun 2024.

Renja DLH ini merupakan masukan utama untuk penetapan rencana kegiatan yang dibiayai dari APBD Kota Balikpapan, untuk Tahun Anggaran 2024. Semoga Rencana Kerja ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup .

Balikpapan, 10 Agustus 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Balikpapan,

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SUDIRMAN DJAYALEKSANA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tim Penyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan telah selesai menyusun RANKIR RENJA Tahun 2024, yang memuat program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tahun 2024 dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman sekaligus sebagai sarana evaluasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dalam mendukung penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penyusunan Renja ini jauh dari sempurna, masih terdapat kelemahan, maka dengan rendah hati mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan lebih lanjut agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan 1 (satu) tahun kedepannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL TAHUN LALU 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun Sebelumnya dan Renstra Disdukcapil 10

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disdukcapil 48

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 55

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 71

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 72

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. 72

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah. 72

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 83

BAB V INOVASI 94

BAB VI PENUTUP 102

6.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Renja 2024 102

6.2. Rencana Tindak Lanjut 103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 12

Tabel 2.2 Penjabaran Capaian Kinerja Renja Tahun 2022 14

Tabel2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 27

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 38

Tabel2.5 Pemetaan Permasalahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Renstra 2021-2026 48

Tabel 2.6 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 57

Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan 71

Tabel 3.1 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional..... 72

Tabel 3.2 Visi, Misi Walikota Balikpapan, Tujuan dan Sasaran Disdukcapil Tahun 2021-2026 73

Tabel 3.3 Visi, Misi Walikota Balikpapan, Tujuan dan Sasaran Disdukcapil Tahun 2021-2026 74

Tabel 3.4 Perekaman KTP Elektronik Tahun 2022 75

Tabel3.5 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 77

Tabel 3.6 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 84

Tabel 4.1 Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024..... 86

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalaam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panajang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonis dengan Bappeda dan Pemangku Kepentingan.
Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan disusun dengan tahapan :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan Rancangan awal;
c. Penyusuan Rancangan;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. Penetapan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan memuat rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah khususnya bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, rencana kinerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Renja ini merupakan

dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) yang disusun menjabarkan visi dan misi pembangunan Kota Balikpapan dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi maupun kabupaten/kota, Oleh karena itu penyusunan RKPD Tahun 2024 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen RPJMD Kota Balikpapan sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan;
28. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan;

31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor: 01 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
33. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor : 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Walikota Balikpapan nomor : 9 Tahun 2023 tentang RKPD Tahun 2024;
35. Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor : 188-46/08/Disdukcapil/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya rankir (rancangan akhir) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah untuk mengetahui arah pelaksanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk usulan program dan kegiatan skala prioritas yang memuat rencana kerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD dalam penyusunan RKPD Kota Balikpapan Kota Balikpapan.

Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan Kota Balikpapan ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RKA) dan anggaran tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya rancangan akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RKA) dan anggaran tahun 2024, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan hasil dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2024 terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun Sebelumnya.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Disdukcapil
2.2. Analisis Kinerja Pelayananan Disdukcapil
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Disdukcapil
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun Sebelumnya dan Renstra Disdukcapil

Pelaksanaan program/kegiatan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 dilaksanakan melalui program/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam Program/Kegiatan Non Urusan dan Program/Kegiatan Urusan Wajib. Sehubungan dengan adanya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020), Program/kegiatan urusan wajib dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan yang mencakup 3 (tiga) Program kegiatan prioritas dan 1 (satu) program penunjang Pemerintah Daerah mencakup 8 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan.

Evaluasi hasil capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2022). Dengan membandingkan target dan realisasi Kinerja tahun 2022 capaian kinerja dapat dijabarkan bahwa program prioritas yang telah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2022 terdiri dari 1 program prioritas dan 1 program penunjang dan terdapat 2 program yang tidak terdapat anggaran (program pendaftaran penduduk dan program pencatatan sipil) tetapi program tersebut terdapat kinerja yang harus dicapai, dan program penunjang di kesekretariatan saling menunjang dalam pencapaian target kinerja. Program yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk

   Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator kinerja Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk dengan target 88.11% realisasi 91.12% dengan capaian 103.41% dengan penjabaran sebagai berikut :

   a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga dengan target 100% realisasi 100% dengan capaiannya 100%
   b. Cakupan Penerbitan KTP dengan target 99.33% realisasi 98.95% dengan capaian 99.62%
   c. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan target 65% realisasi 74.41% dengan capaian 114.47%.

2. Program Pencatatan Sipil :

   Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil dengan target 96.50% realisasi 95.76% dengan capaian 99.24% dengan penjabaran sebagai berikut:

   a. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran 0-18 Tahun dengan target 98.00% realiasasi 99.58 dengan capaian 191.52%.
   b. Cakupan Penerbitan akta Kematian dengan target 95% realisasi 91.96 dengan capaian 96.80%.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:

   Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik dengan penjabaran sebagai berikut :

   - Persentase Pengolahan Data Administrasi Kependudukan secara elektronik dengan target 100% dan realisasi 100% dengan capaian 100%.

4. Program Kegiatan/Non urusan (program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuapten Kota).

   Program ini dengan indikator kinerja IKM Perangkat Daerah dengan target nilai 78.50 realisasi 86.20 dengan capaian 103.23%.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil tahunan kinerja tahunan atau realisasi APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2022 pagu Belanja operasional (APBD Murni TA.2022) sebesar Rp 13.670.482.932,- terdiri dari Belanja Pegawai Rp 6.821.298.032,- belanja barang jasa sebesar Rp 6.028.684.900,- dan belanja modal sebesar Rp 773.500.000,- APBD-P Tahun 2022 sebesar Rp 14.209.931.472.295,- terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 6.854.723.000,- Belanja barang dan jasa sebesar Rp 6.528.330.933,- dan Belanja modal sebesar Rp 826.500.000,-

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022				Realisasi (Rp) s/d Desember	%
		APBD Murni (Rp)	Pengurangan	Penambahan	Menjadi		Penyerapan
1	2	3	4	5	6=3-4+5	7	8
BELANJA OPERASI		13,670,482,932	339,620,000	878,691,001	14,209,553,933	12,931,472,295	**91.01%**
A	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN	724,500,000	180,000,000	222,221,033	766,721,033	636,433,210	**83.01%**
1	KEGIATAN PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATA BASE KEPENDUDUKAN	382,500,000	180,000,000	222,221,033	424,721,033	302,600,710	71.25%
	1 Sub Kegiatan Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan	382,500,000	180,000,000	222,221,033	424,721,033	302,600,710	71.25%
2	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	342,000,000	-	-	342,000,000	333,832,500	97.61%
	2 Sub Kegiatan Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	342,000,000	-	-	342,000,000	333,832,500	97.61%
B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	12,945,982,932	159,620,000	656,469,968	13,442,832,900	12,295,039,085	
3	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6,821,298,032	-	33,424,968	6,854,723,000	6,352,160,286	92.67%
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	6,821,298,032		33,424,968	6,854,723,000	6,352,160,286	92.67%
4	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	4,487,492,700	-	390,425,000	4,877,917,700	4,483,230,850	91.91%
	4 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	-	-	5,000,000	4,919,200	98.38%
	5 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	817,500,000	-	6,000,000	823,500,000	748,391,560	90.88%
	6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,183,142,700	-	193,425,000	3,376,567,700	3,083,590,320	91.32%
	7 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	234,350,000	-	41,000,000	275,350,000	253,712,860	92.14%
	8 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,500,000	-	-	12,500,000	11,779,000	94.23%
	9 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	235,000,000	-	150,000,000	385,000,000	380,837,910	98.92%
5	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN DAERAH	1,112,467,200	144,620,000	152,620,000	1,120,467,200	1,028,902,640	91.83%
	# Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80,000,000	30,000,000	-	50,000,000	28,043,300	56.09%
	# Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	198,000,000	90,000,000	-	108,000,000	94,247,074	87.27%
	# Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	834,467,200	24,620,000	152,620,000	962,467,200	906,612,266	94.20%

No	Uraian		Anggaran Tahun 2022				Realisasi (Rp) s/d Desember	%
			APBD Murni (Rp)	Pengurangan	Penambahan	Menjadi		Penyerapan
1	2		3	4	5	6=3-4+5	7	8
6	KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		524,725,000	15,000,000	80,000,000	589,725,000	430,745,309	73.04%
	#	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	409,725,000	-	80,000,000	489,725,000	362,860,209	74.09%
	#	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	15,000,000	15,000,000	-	-	-	0.00%
	#	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	100,000,000	-	-	100,000,000	67,885,100	67.89%
		JUMLAH BELANJA	**13,670,482,932**	**339,620,000**	**878,691,001**	**14,209,553,933**	**12,931,472,295**	**91.01%**

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

Target kinerja dimaksud menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan, maka capaian kinerja Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada akhir tahun 2022, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Penjabaran Capaian Kinerja Renja Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4		5		6=5/4X100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	78.50	13,442,832,900	86.20	12,295,039,085	109.81%	91.46%	Capaian sangat tinggi (109.81%) Alasan : kepuasan intern menjadi pokok sarana prasarana penting dalam mendukung pelayanan
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah	Nilai SAKIP	78.57	-	79.75	0.00	101.50%	0.00%	Capaian sangat tinggi (101.50) Alasan : nilai dari Inspektrat
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	-	1	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	-	1	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1	-	1	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	-	1	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1	-	1	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4		5		6=5/4X100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP	1	-	1	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	2	-	2	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.50	6,854,723,000	86.23	6,352,160,286	105.80%	92.67%	Capaian sangat tinggi (105.80%) Alasan : penilaian SKM internal ttg Adm Keuangan telah sesuai peraturan yg ditentukan dan pencairan tepat waktu
1.2.1	Sub Kegiatan penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Gaji dan Tunjagan ASN	28	6,854,723,000	28	6,352,160,286	100.00%	92.67%	Tercapai (100%)
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	-	12	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntansi dengan BPKD	4	-	4	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	-	1	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4		5		6=5/4X100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil pemeriksaan	2	-	2	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan	3	-	3	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah realisasi dan prognosis anggaran	13	-	13	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	78.00	-	85.59	-	109.73%	0.00%	Capaian sangat tinggi 109.73% Alasan : penyusunan kebutuhan dan laporan BMD telah sesuai dengan target dan permintaan barang telah sesuai dengan harapan pegawai sehinggi survei yang dilakkan nilainya melebihi target
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD	1	-	1	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Inventaris BMD	1	-	1	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Kondisi BMD	1	-	1		100.00%	0.00%	Tercapai (100%)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4		5		6=5/4X100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.3.4	Pembinaan,Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen kartu inventaris BMD	1	-	1	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD	1	-	1	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen penatausahaan BMD	1	-	1	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.3.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen pemanfaatan BMD	1	-	1	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	83.00	-	87.35	-	105.24%	0.00%	Capaian sangat tinggi 105.24% Alasan : SKM Intern pelayanan administrasi kepegawaian yg meliputi KGB, Kenaikan pangkat, dll
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya perlengkapannya	39	-	-	-	0.00%	0.00%	Tidak dianggarkan dalam APBD
1.4.2	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	39	-	-	-	0.00%	0.00%	Tidak dianggarkan dalam APBD
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.50	4,877,917,700	85.89	4,483,230,850	106.70%	91.91%	Capaian sangat tinggi 106.70% Alasan : Survei internal kepuasan pegawai sangat tinggi karena sesuai kebutuhan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4		5		6=5/4X100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	5,000,000	3	4,919,200	60.00%	98.38%	Capaian Rendah 60% Alasan : Relaisasi sesuai kebutuhan * Perencanaan : Pada Rekening Alat listik meliputi 5 jenis yaitu bola lampu, battery, lampu led , kabel NYM, Kabel Lan * Pelaksanaan : Pada Rekening Alat listrik yang meliputi 3 jenis barang yaitu battery , bola lampu , & lampu LED
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	6	823,500,000	13	748,391,560	216.67%	90.88%	Capaian sangat Tinggi 216.67% alasan : adanya penambahan Belanja Modal dalam perubahan anggaran APBD-P TA 2022
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	5	-	-	-	0.00%	0.00%	Tidak dianggarkan dalam APBD
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	47	3,376,567,700	68	3,083,590,320	144.68%	91.32%	Capaian sangat Tinggi 144.68% alasan : adanya penambahan belanja sumber dana dari DAK 2022 dalam APBD-P TA 2022
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	10	275,350,000	10	253,712,860	100.00%	92.14%	Tercapai (100%)
1.5.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	-	-	-	0.00%	0.00%	Alasan : Tidak dianggarkan dalam APBD

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4		5		6=5/4X100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.5.7	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	400	12,500,000	399	11,779,000	99.75%	94.23%	Capaian Sangat tinggi 99.75% tapi kurang (100%) Alasan : sesuai kebutuhan
1.5.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	50	385,000,000	50	380,837,910	100.00%	98.92%	Tercapai (100%)
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.00	-	85.62	-	109.77%	0.00%	Capaian sangat tinggi 109.77% Alasan : Unsur SKM yang dilakukan sesuai kebutuhan
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	1	-	-	-	0.00%	0.00%	Tidak dianggarkan dalam APBD
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	9	-	-	-	0.00%	0.00%	Tidak dianggarkan dalam APBD
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	80	1,120,467,200	86.81	1,028,902,640	108.51%	91.83%	Capaian sangat tinggi 108.51% Alasan : SKM layanan penunjang pelayanan jasa surat menyurat, pengiriman blanko KTP, dan sarana komunikasi sesuai tepat waktu.
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2	50,000,000	2	28,043,300	100.00%	56.09%	Tercapai (100%)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4		5		6=5/4X100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6	108,000,000	6	94,247,074	100.00%	87.27%	Tercapai (100%)
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	-	0	-	0.00%	0.00%	Tidak dianggarkan dalam APBD
1.7.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan	500	962,467,200	500	906,612,266	100%	94.20%	Tercapai (100%)
1.7.5		Jumlah tenaga non PNS	40		39		98%		Capaian tinggi (98%) kurang < 100% Alasan : dikarenaka ada pegawai resign
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	80	589,725,000	85.99	430,745,309	107.49%	73.04%	Capaian sangat tinggi 107.49% Alasan : IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sangat mendukung operasional kantor
1.8.1	Sub Kegiatan enyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	25	489,725,000	25	362,860,209	100.00%	74.09%	Tercapai (100%)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4		5		6=5/4X100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang dipelihara	0	-	0	-	0.00%	0.00%	Alasan : TA 2022 anggaran dialihkan ke kegiatan lain
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	15	100,000,000	6	67,885,100	40.00%	67.89%	Capaian Sangat rendah (40%) Alasan : Pemeliharaan dilakukan sesuai peralatan yg memerlukan pemeliharaan/penggantian/rusak
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	88.11%	-	91.12%	-	103.41%	0.00%	Capaian sangat tinggi (103.42%) Alasan : Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan
	Breakdown	- Cakupan penerbitan KK	100%		100%		100.00%		Jumlah KK Terbit 82,394 dan Jumlah Pemohon 82,394
		- Cakupan penerbitan KTP	99.33%		98.95%		99.62%		Jumlah KTP Terbit 501,188 dan Jumlah wajib ktp 506,511
		- Cakupan penerbitan KIA	65%		74.41%		114.47%		Jumlah KIA Terbit 161,597 dan Jumlah anak usia < 17 tahun 217,185
2.1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	100%	-	100.00%	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%) jumlah permohonan dokumen kependudukan yang dilayani dibagi jumlah pemohon x 100% (241401/241401)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4		5		6=5/4X100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.1.1	Sub Kegiatan Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Jumlah Masalah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang Terselesaikan (NIK GANDA)	2,500	-	49	-	1.96%	0.00%	Capaian Terlalu Rendah (<50%) Alasan : Pelayanan untuk NIK Ganda masih berlangsung, dikarenakan database yang sedang berjalan sudah baik sehingga NIK GANDA banyak yang terselesaikan
		Jumlah Masalah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang Terselesaikan (PERUBAHAN DATA)	25,000		26,380		105.52%	0.00%	Capaian sangat tinggi (105.52%) Alasan : adanya permohonan perubahan data penduduk
		Jumlah Masalah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang Terselesaikan (VALIDASI DATA)	1,200		4,804		400.33%	0.00%	Capaian sangat tinggi (400.33%) Alasan : permasalahan pendaftaran penduduk terlayani melalui online dan tatap muka (pengaduan pelayanan dan layanan customer servise sesuai aturan
2.1.2	Sub Kegiatan Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Pemohon KIA yang Dilayani	20,000	-	44,951	-	224.76%	0.00%	Capaian sangat tinggi (224.76%) Dikarenakan melakukan pelayanan jemput bola untuk pencetakan KIA
		Jumlah Pemohon KK yang Dilayani	50,000		82,394		164.79%	0.00%	Capaian Sangat Tinggi (164.79%) Alasan : adanya perubahan data penduduk
		Jumlah Pemohon KTP-el Dilayani	70,000		82,823		118.32%	0.00%	Capaian sangat tinggi 118.32% Dikarenakan melakukan pelayanan jemput bola untuk pencetakan KTP

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4		5		6=5/4X100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	-	100.00%	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%) jumlah permohonan layanan pendaftaran penduduk dibagi jumlah pemohon kali 100% (210168/210168)
2.2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Fasilitasi pelayanan pendaftran penduduk	70,000	-	210,168	-	300.24%	0.00%	Capaian Terlalu Tinggi (300%) Alasan : fasilitasi pelayanan cetak KTP, KIA melalui layanan online dan jemput bola, pelayanan KK melalui online
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peresentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	96.50%	-	95.76%	-	99.24%	0.00%	Capaian tinggi (99.24%) tapi kurang < 100% Alasan : sesuai permohonan
	Breakdown	- Cakupan penerbitan akta kelahiran	98.00%						Jumlah akta kelahiran Terbit 223.970 dan Jumlah kematian 224,943
		- Cakupan penerbitan akta kematian	95.00%						Jumlah akta kematian Terbit 39,319 dan Jumlah kematian 42,758
3.1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	100%	-	100.00%	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%) jumlah dokumen pencapil yang diterbitkan dibagi jumlah dokumen pemohon kali 100% (15945/15945)
3.1.1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan	Jumlah Pemohon Akta Perceraian Yang Dilayani	50	-	54	-	108.00%	0.00%	Capaian Sangat tinggi (108.00%) Alasan : sesuai permohonan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4		5		6=5/4X100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Pemohon Akta Perkawinan Yang Dilayani	450		412		91.56%	0.00%	Capaian tinggi (91.56%) kurang < 100% Alasan : sesuai permohonan
3.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Pemohon Akta Kelahiran Yang Dilayani	20,000	-	16,892	-	84.46%	0.00%	Capaian tinggi 84.46% kurang ≤ 100% Alasan : sesuai permohonan
		Jumlah Pemohon Akta Kematian Yang Dilayani	4,300		4,842		112.60%	0.00%	Capaian Sangat tinggi (112.60%) Alasan : adanya kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ttg pelaporan kematian
3.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil melalui layanan online	100%	-	100.00%	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%) Jumlah berkas permohonan penyelesaian dokumen pencapil dibagi jumlah berkas yang dimohon penyelesaiannya kali 100% (23806/23806)
3.2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait pencatatan sipil	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Sipil Yang diberikan	20,000	-	23,806	-	119.03%	0.00%	Capaian Sangat tinggi (119.03%) Alasan : sesuai permohonan
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	100%	766,721,033	100%	636,433,210	100.00%	83.01%	Tercapai (100%) (jumlah data administrasi kependudukan yang terkelola/jumlah data administrasi kependudukan yang terkelola secara elektronik) x 100% (7/7)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4		5		6=5/4X100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.1	Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Persentase Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan	100%	424,721,033	100.00%	302,600,710	100.00%	71.25%	Tercapai (100%) Jumlah data yang dimanfaatkan oleh OPD dibagi jumlah data yang ada di Disdukcapil kali 100% (2/2)
4.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah Laporan Kependudukan Yang Diolah/Disusun Tepat Waktu	7	424,721,033	7	302,600,710	100.00%	71.25%	Tercapai (100%)
4.1.2	Sub Kegiatan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Inovasi Pelayanan Yang Dilaksanakan	1	-	1	-	100.00%	0.00%	Tercapai (100%)
		Jumlah PKS yang Dilaksanakan	5		7	-	140.00%	0.00%	Capaian sangat Tinggi (140%) Alasan : Sesuai kerjasama
4.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan Yang di kelola	100%	342,000,000	100.00%	333,832,500	100.00%	97.61%	Tercapai (100%) Jumlah sistem informasi yang dikelola dibagi jumlah keseluruhan sistem informasi Disdukcapil (3/3)
4.2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Jenis Sarana Prasarana SIAK Dalam Kondisi Baik	3	342,000,000	3	333,832,500	100.00%	97.61%	Tercapai (100%)
Rata-rata capaian kinerja (%)							100.15%	25.67%	

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4		5		6=5/4X100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
TOTAL ANGGARAN DAN REALIASAI SELURUH SUB KEGIATAN				14,209,553,933		12,931,472,295			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN							102.37%	24.63%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN							Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN							103.91%	37.02%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN							Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							103.11%	43.62%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM							Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	94.79%	95.13%	88.11%	91.12%	103.41%	89.78%	92.01%	97.07%
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%
	2.12.02.2.01.03	Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Jumlah Masalah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang Terselesaikan (NIK GANDA)		0	2,500	49	1.96%	3,440	34,673	
			Jumlah Masalah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang Terselesaikan (PERUBAHAN DATA)		0	25,000	26,380	105.52%			
			Jumlah Masalah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang Terselesaikan (VALIDASI DATA)		0	1,200	4,804	400.33%			
	2.12.02.2.01.06	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Permohonan KIA yang Dilayani		50,421	20,000	44,951	224.76%	55,000	150,372	
			Jumlah Permohonan KK yang Dilayani		105,992	50,000	82,394	164.79%	55,000	243,386	

No	Kode	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			Jumlah Permohonan KTP-el Dilayani		96,714	70,000	82,823	118.32%	80,000	259,537	
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%
	2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk		0	70,000	210,168	300.24%	0	210,168	
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN %						187.99%			0.00%
		PREDIKAT KINERJA						Sangat Tinggi			0.00%
2	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	96.60%	94.31%	96.50%	95.76%	99.24%	96.53%	95.53%	98.90%
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%
	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Pemohon Akta Perceraian Yang Dilayani		75	50	54	108.00%	60	189	
			Jumlah Pemohon Akta Perkawinan Yang Dilayani		503	450	412	91.56%	432	1,347	
	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Pemohon Akta Kelahiran Yang Dilayani		25,990	20,000	16,892	84.46%	18,000	60,882	

No	Kode	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			Jumlah Pemohon Akta Kematian Yang Dilayani		6,886	4,300	4,842	112.60%	5,084	16,812	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil melalui layanan online	100%	100%	100%	0.00%	0.00%	100%	66.67%	66.67%
	2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait pencatatan sipil	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Sipil Yang diberikan		0	20,000	23,806	119.03%	1	1	
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN %						103.13%			#DIV/0!
		PREDIKAT KINERJA						Sangat Tinggi			#DIV/0!
3	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	100.00%		100.00 %	100.00%	100.00%	100.00%	66.67%	66.67%
	2.12.04.2.01	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%
	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah Laporan Kependudukan Yang Diolah/Disusun Tepat Waktu		0	7	7	100.00%	6	13	
	2.12.04.2.01.02	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Inovasi Pelayanan Yang Dilaksanakan		0	1	1	100.00%	0	1	
			Jumlah PKS yang Dilaksanakan		0	5	5	100.00%	6	11	

No	Kode	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%
	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Jenis Sarana Prasarana SIAK Dalam Kondisi Baik		3	3	3	100.00%	3	9	
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN %						100.00%			0.00%
		PREDIKAT KINERJA						Sangat Tinggi			0.00%
4	2.12.01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	83.50	78.94	78.50	86.20	109.81%	78.50	81.21	97.26%
	2.12.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah	Nilai SAKIP	80.57		78.57	79.75	101.50%	78.57	52.77	65.50%
	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		2	1	1	100.00%	1	4	
	2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA			1	1	100.00%	1	2	
	2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA			1	1	100.00%	1	2	

No	Kode	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA			1	1	100.00%	1	2	
	2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA			1	1	100.00%	1	2	
	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP		1	1	1	100.00%	2	4	
	2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja		1	2	2	100.00%	1	4	
	2.12.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.00	81.17	81.50	86.23	105.80%	81.75	83.05	98.87%
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Gaji dan Tunjagan ASN			28	28	100.00%	43	71	
	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			12	12	100.00%	12	24	
	2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntansi dengan BPKD			4	4	100.00%	4	8	
	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun			1	1	100.00%	1	2	

No	Kode	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	2.12.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil pemeriksaan			2	2	100.00%	2	4	
	2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan			3	3	100.00%	12	15	
	2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah realisasi dan prognosis anggaran			13	13	100.00%	1	14	
	2.12.01.2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	82.00		78.00	85.59	109.73%	79.00	54.86	66.91%
	2.12.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD			1	1	100.00%	1	2	
	2.12.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Inventaris BMD			1	1	100.00%	1	2	
	2.12.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Kondisi BMD			1	1	100.00%	1	2	
	2.12.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen kartu inventaris BMD			1	1	100.00%	1	2	
	2.12.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD			1	1	100.00%	4	5	

No	Kode	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen penatausahaan BMD			1	1	100.00%	2	3	
	2.12.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen pemanfaatan BMD			1	1	100.00%	2	3	
	2.12.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	85.00		83.00	87.35	105.24%	83.50	56.95	67.00%
	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			39	0	0.00%	1	1	
	2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			39	0	0.00%	0	0	
	2.12.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.00	78.60	80.50	85.89	106.70%	81.00	81.83	97.42%
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5	3	60.00%	1	4	
	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor		11	6	13	216.67%	10	34	

No	Kode	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga			5	0	0.00%	0	0	
	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor		43	47	68	144.68%	8	119	
	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan		5	5	10	200.00%	3	18	
	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2	2	0	0.00%	3	5	
	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman			400	399	99.75%	2	401	
	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah		38	50	50	100.00%	37	125	
	2.12.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.00		78.00	85.62	109.77%	79.00	54.87	66.92%
	2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan			1	0	0.00%	5	5	
	2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			0	0	0.00%	32	32	
	2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya			9	0	0.00%	1	1	

No	Kode	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	2.12.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	84.00		80.00	86.81	108.51%	81.00	55.94	66.59%
	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat			2	2	100.00%	2	4	
	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			6	6	100.00%	6	12	
	2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0	0	0.00%	0	0	
	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dilayani			500	500	100.00%	5	5	
			Jumlah tenaga non PNS			40	39	97.50%			
	2.12.01.2.09	Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	84.00		80.00	85.99	107.49%	81.00	55.66	66.27%
	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara		25	25	25	100.00%	26	76	
	2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang dipelihara			0	0	0.00%	36	36	

No	Kode	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara		3	15	6	40.00%	41	50	
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN %						82.35%			0.00%
		PREDIKAT KINERJA						Tinggi			0.00%

Capaian kinerja yang melampui target disebabkan adanya perbedaan jumlah target pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 terhadap Renja Tahun 2022. Perbedaan jumlah target tidak berbanding lurus terhadap kebutuhan anggaran yang tersedia karena secara jumlah berkurang namun secara satuan jenisnya bertambah, dimana jenis menjadi salah satu satuan yang banyak digunakan dalam indikator kinerja kegiatan. Hal ini dapat terjadi kemungkinan adanya ketidaktepatan dalam merumuskan indikator.

1. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tecapainya target kinerja/hasil keluaran adalah sebagai berikut:
   a. Terdapat jenis target yang tidak terealisasi;
   b. Target output yang terlalu tinggi pada saat penyusunan Renja dan tidak melakukan analisa terhadap rencana dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya;
   c. Perumusan indikator yang kurang tepat mempengaruhi pencapaian target;
   d. Penyesuaian terhadap kemampuan APBD serta program prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Dampak terhadap capaian program Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rendahnya tingkat capaian rencana dengan realisasi target kinerja serta keuangan.
3. Langkah dalam mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target adalah sebagai berikut:
   a. Tidak tercapainya target yang ditentukan bisa diartikan berbanding terbalik dengan hasilnya misalnya target data penduduk ganda belum tercapai yang berarti data kependudukan sudah mendekati valid/sesuai.
   b. Melakukan reviu serta penelaahan indikator kinerja program dan kegiatan;
   c. Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian pada tahun-tahun sebelumnya;
   d. Menentukan target secara realistis dan berdasar.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan mengacu pada Renstra 2021-2026, adapun kinerja utama yang tertuang dalam Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analis
			Tahun 2022 (n-4)	Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2022 (n-4)	Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	81,16	81,97	82,79	83,62	84,45	90,86					Tercapai
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	84,1	84,94	85,79	86,65	87,51	93,75					Tercapai
3	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis tekologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	75,00	77,25	79,56	81,95	84,41	78,470					Tercapai
4	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	35,30	35,35	35,40	35,45	35,50	35,66					Tercapai
5	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Perekaman KTP Elektronik	99.33	99.34	99.35	99.36	99.37	91,63					Belum Tercapai, Di isi Jumlah 476.159 dibagi 519.663 dikali 100% = 91,63%
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	66,20					Tercapai**,** Diisi Jumlah 137.689 dibagi 208.002 dikali 100% = 66,20%
		Kepemilikan akta kelahiran	98,00	98,05	98,10	98,15	98,20	99,58					Tercapai**,** Di isi Jumlah 219.297 dibagi 220.225 dikali `100% = 99,58%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analis
			Tahun 2022 (n-4)	Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2022 (n-4)	Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	41,18	55,88	70,59	85,29	94,12	25,00					Belum Tercapi, Diisi 9 OPD dibagi 36 dikali 100% = 25%
6	SDGs : Sustainable Development Goals (tujuan pembangunan berkelanjutan)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	98.00	98.05	98.10	98.15	98.20	99,58					Tercapai, Di isi Jumlah 219.297 dibagi 220.225 dikali `100% = 99,58%
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	99.15	99.20	99.25	99.30	99,35	99,90					Tercapai, Diisi jumlah 60.161 dibagi 60.223 dikali 100% = 99,90%
		Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	98.00	98.05	98.10	98.15	98.20	99,58					Tercapai Diisi jumlah 219.297 dibagi 220.225 dikali 100% = 99,58%
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	98.00	98.05	98.10	98.15	98.20	99,58					Tercapai Diisi jumlah 219.297 dibagi 220.225 dikali 100% = 99,58%
		Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	ada	ada	ada	ada					

1. Capaian kinerja sasaran strategis dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk dengan target 81.16 nilai dan realisasi 90.65 nilai dengan capaian keberhasilan 111.69% tahun 2022 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi".

   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan survey kepuasan masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk, Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan Sipil berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2022 dengan jumlah responden 6345 orang dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut :

Jenis kelamin	Jumlah	Persen
Laki-laki	3727	58,74%
Perempuan	2618	41,26%
Jumlah	6345	100,00%

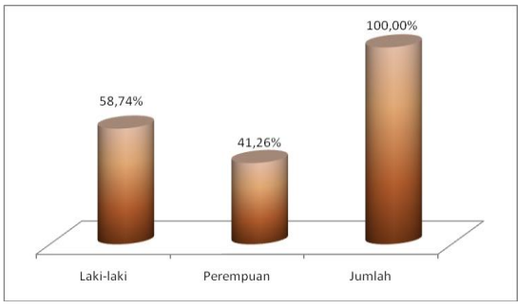

Responden Sebagian besar laki-laki (58,78%) dalam layanan kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak membedakan jenis kelamin dalam permohonan online maupun offine.

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen
Tamat SD	216	3,40%
Tamat SMA	2811	44,31%
Tamat D4/S1	1931	30,44%
Tamat SMP	406	6,40%
Tamat D1-D3	780	12,30%
Tamat S2	200	3,15%
Jumlah	6344	100,00%

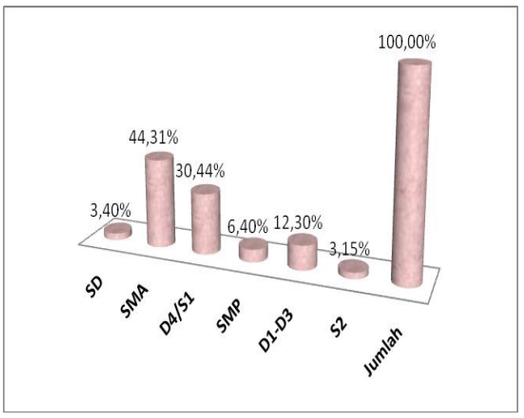

Sedangkan untuk kelompok tingkat Pendidikan yang paling banyak Pendidikan tamat SMA sebesar 44,31% dan paling sedikit tamat S2 (3.15%).

Pekerjaan	Jumlah	Persen
PNS	2811	44,30%
TNI/POLRI	780	12,29%
Pegawai Swasta	-	0,00%
Wiraswasta/ Usahawan	-	0,00%
Pelajar/mahasiswa	150	2,36%
Lainnya	2604	41,04%
Jumlah	6345	100,00%

Dari komposisi pekerjaan responden paling banyak PNS (44,30%) ini merupakan bentuk layanan pemerintah kepada masyarakat, karena dalam layanan online maupun offline peran PNS sangat membantu dalam pelayanan publik yang ada di tingkat RT, Kelurahan dan Kecamatan.

Hasil survei Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk (indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk periode tahunan (Januari s/d Desember 2022) sebagai berikut :

No.	Unsur pelayanan	Nilai
1.	Kejelasan persyaratan	92,90
2.	Kemudahan pelayanan	92,40
3.	Kesesuaian waktu pelayanan dengan standar pelayanan	89,70
4.	Komitmen petugas pelayanan terhadap aturan antipungli dan antigratifikasi	91,80
5.	Kesesuaian antara produk layanan pada standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	90,90
6.	Kompetensi petugas pelayanan	90,60
7.	Etika dan perilaku petugas pelayanan	90,00
8.	Respon petugas pelayanan terhadap pengaduan pengguna layanan	90,20
9.	Kondisi sarana prasaran penunjang penyelenggaraan pelayanan	88,60
10.	Sistem antrian yang disediakan	89,40
	Total	906,50
	Rata-rata IKM Internal (10 layanan)	90,65
	Mutu layanan	Sangat tinggi

Dalam survey pelayanan yang dilakukan secara intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 menunjukkan nilai melampaui target hal ini disebabkan respon dari semua pegawai Disdukcapil sangat tinggi dalam

menjalankan kinerja begitu pula sebaliknya masyarakat merasa puas atas layanan yang diberikan. Kejelasan persyaratan mendapat nilai yang paling tinggi 92,90 hal ini menunjukkan apa yang menjadi persyaratan dalam permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dengan aturan, dan kondisi sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan dengan nilai 88,60 yang akan diajukan sebagai bahan perbaikan untuk tahun depan.

Adapun jenis layanan layanan bidang pendaftaran penduduk melalui pelayanan online : capil.balikpapan.go.id.

Dengan jenis layanan :

a. Permohonan Kartu Keluarga
   1). Kartu Keluarga Baru (menikah)
   2). Pisah Kartu Keluarga akibat perceraian
   3). Pecah Kartu Keluarga
   4). Numpang Kartu Keluarga
   5). Penambahan anggota keluarga karena kelahiran
   6). Pergantian Kartu Keluarga karena hilang atau rusak
   7). Pergantian Kartu Keluarga karena perubahan data
   8). Penanganan pengaduan.

b. Permohonan KTP-el
   1). KTP-el baru
   2). Pergantian KTP-el karena perubahan data
   3). KIA (kartu identitas anak)

c. Pindah Luar Derah
   1). SKPWNI baru
   2). SKPWNI pergantian
   3). SKPWNI hilang/rusak
   4). Pembatalan SKPWNI

2. Capaian kinerja sasaran strategis dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan Sipil dengan target 84.10 nilai dan realisasi 93.58 nilai dengan capaian keberhasilan 111.27% tahun 2022 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi".

   Hasil survei Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil periode tahunan (Januari s/d Desember 2022) sebagai berikut :

No.	Unsur pelayanan	Nilai
1.	Kejelasan persyaratan	95,90
2.	Kemudahan pelayanan	94,90
3.	Kesesuaian waktu pelayanan dengan standar pelayanan	92,70
4.	Komitmen petugas pelayanan terhadap aturan antipungli dan antigratifikasi	95,00
5.	Kesesuaian antara produk layanan pada standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	94,10
6.	Kompetensi petugas pelayanan	94,00
7.	Etika dan perilaku petugas pelayanan	92,80
8.	Respon petugas pelayanan terhadap pengaduan pengguna layanan	93,00
9.	Kondisi sarana prasaran penunjang penyelenggaraan pelayanan	91,20
10.	Sistem antrian yang disediakan	92,20
	Total	**935,80**
	Rata-rata IKM Internal (10 layanan)	**93,58**
	Mutu layanan	**Sangat tinggi**

Dalam survey pelayanan yang dilakukan secara intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 menunjukkan nilai melampaui target hal ini disebabkan respon dari semua pegawai Disdukcapil sangat tinggi dalam menjalankan kinerja begitu pula sebaliknya masyarakat merasa puas atas layanan yang diberikan. Kejelasan persyaratan mendapat nilai yang paling tinggi 95,90 hal ini menunjukkan apa yang menjadi persyaratan dalam permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dengan aturan, dan kondisi sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan dengan nilai 91,20 yang akan diajukan sebagai bahan perbaikan untuk tahun depan.

Adapun jenis layanan bidang pelayanan pencatatan sipil melalui pelayanan online : capil.balikpapan.go.id. Dengan jenis layanan :

a. Kutipan Akta Kelahiran :
   1). Pencatatan kelahiran WNI
   2). Akta kehilangan/rusak
   3). Pencatatan Kelahiran orang asing
   4). Penanganan pengaduan
b. Kutipan akta kematian :
   1). Akta kematian baru
   2). Akta kematian hilang/rusak
c. Kutipan akta perkawinan
   1). Pencatatan perkawinan WNI

2). Pencatatan Perkawinan WNA
3). Akta perkawinan hilang/rusak

d. Kutipan akta kematian :
1). Akta kematian baru
2). Akta kematian hilang/rusak

3. Capaian kinerja sasaran strategis dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan target 75.00 nilai dan realisasi 78.47 nilai dengan capaian keberhasilan 104.63% tahun 2022 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi". Dengan responden 9 OPD yang ada di Pemerintah Kota Balikpapan : DKK, Bappeda Litbang, Dinas Tenaga Kerja, Diskominfo, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, DPOP, DKPSDM, DPPDRD.

Indeks kepuasan masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, dengan unsur-unsur penilaian :

No.	Unsur pelayanan	Nilai
1.	Kemudahan prosedur permohonan izin hak akses dan pemanfaatan data.	78,80
2.	Kemudahan persyaratan permohonan izin hak akses dan pemanfaatan data	80,00
3.	Kemudahan kejelasan dan kepastian jawan surat permohonan izin hak akses dan pemanfaatan data	78,50
4.	Kemudahan tanggung jawab petugas dalam memberikan izin hak akses dan pemanfaatan data	78,40
5.	Kemudahan kemampuan petugas dalam memberikan penjelasan tentang izin hak akses dan pemanfaatan data	79,00
6.	Kemudahan kecepatan dalam pelayanan apabila terjadi kerusakan pada penginputan hak akses dan pemanfaatan data	77,50
7.	Kemudahan keadilan untuk mendapatkan pelayanan terjadi kerusakan pada penginputan hak akses dan pemanfaatan data	78,30
8.	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan	77,70
9.	Ketepatan terhadap jadwal waktu pelayanan	78,00
	Total	**706,20**
	Rata-rata IKM Internal (9 layanan)	**78,47**
	Mutu layanan	**Sangat tinggi**

Dari 9 unsur layanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip[il yang mendapatkan nilai tinggi ada di kemudahan persyaratan permohonan izin hak akses dan pemanfatan data (80,00).

4. Capaian kinerja sasaran strategis dari indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target 35.30 nilai dan realisasi 35.66 nilai dengan capaian keberhasilan 101.02% tahun 2022 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan IKK sesuai dengan Permendagri no.18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdapat 4 indikator outcome dan 1 IKK output dengan perincian sebagai berikut :

5.1. IKK Outcome : Perekaman KTP Eketronik, target 99,33%, realisasi 91.63% dan Capaian 92,25%

Output : - Penerbitan akta perkawinan, realisasi 100%
- Penerbitan akta perceraian, realisasi 100%
- Penerbitan akta kematian, realisasi 100%
- Penyajian data kependudukan, realisasi 50%

5.2. IKK outcome : Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, target 65,00%, realisasi 66.20% dan capaian 101,84%

5.3. IKK outcome :Kepemilikan akta kelahiran, target 98,00%, realisasi 99,58% dan Capaian 101,61%

5.4. IKK outcome : Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama, target 41,18% , realisasi 26,47% dan capaian 64,29%

5.1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

a. IKK Outcome : Perekaman KTP Elektronik

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/Kota	
Rumus	:	$\frac{\textit{jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\textit{Jumlah penduduk17 tahun ke atas}}$ **x 100%**	$\frac{476.159}{519.663}$ x 100% = 91.63%

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus		Keterangan
Perekaman KTP-el	1)	Penerbitan akta perkawinan	$\frac{\textit{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\textit{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan}}$ x 100%	$\frac{412}{412}$ x 100% = 100%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Penerbitan akta perceraian	$\frac{\textit{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\textit{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}}$ x 100%	$\frac{54}{54}$ x 100% = 100%	sda
	3)	Penerbitan akta kematian	$\frac{\textit{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\textit{Peristiwa kematian yang dilaporkan}}$ x 100%	$\frac{4842}{4842}$ x 100% = 100%	sda
	4)	Penyajian data kependudukan	$\frac{\textit{Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun}}{\textit{2 tahun}}$ x 100%	$\frac{1}{2}$ X 100% = 50 %	Sda

b. IKK Outcome : Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

i. Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	
Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah anak usia 0–17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\textit{Jumlah anak usia 0–17 tahun}}$ x 100%	$\frac{137.689}{208.002}$ x 100% = 66.20%
Keterangan	:	▪ Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	

c. IKK Outcome : Kepemilikan akta kelahiran

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran	
Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah anak usia 0–18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\textit{Jumlah anak usia 0–18 tahun}}$ x 100%	$\frac{219.297}{220.225}$ x 100% = 99.58%

d. IKK Outcome : Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	
Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\textit{Jumlah OPD}}$ x 100%	$\frac{9}{34}$ x 100% = 26.47%
Keterangan	:	▪ Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yangterstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. ▪ PD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian	

6. SDGs : Sustainable Development Goals (tujuan pembangunan berkelanjutan) dengan indikator :
    a. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran memiliki target 98,00% dengan realisasi 99,58% dan capaian sebesar 101,61%;
    b. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur memiliki target 99,15% dengan realisasi 99,90% dan capaian sebesar 100,76%;
    c. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah memiliki target 98% dengan realisasi 99,90% dan capaian sebesar 101,61%;
    d. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran memiliki target 98% dengan realisasi 99,90% dan capaian sebesar 101,61%;
    e. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disdukcapil

Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam RPJMD maupun Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Dalam mencapai solusi permasalahan yang ada yakni dengan melakukan inovasi-inovasi pealayanan publik dalam rangka memuaskan keinginan masyarakat sehingga masyarakat akan tergerak hati bagi yang belum memilii dokumen kependudukan maupun pencatatan sipil untuk memperoleh doumen tersebut.

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Renstra 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Interprestasi (belum tercapai, sesuai, melampaui)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum Optimalnya sosialisasi Administrasi Kependudukan khususnya Perubahan Kebijakan Pelayanan Kependudukan	Cakupan kepemilikan e-KTP :91.63%	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan	Pemanfaatan website, media sosial dalam mensosialisasikan pentingnya kepemilikan KTP
		Cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk anak usia 0-18 Tahun : 99.58%	Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat dalam memanfaatkan/menggunakan pelayanan "DARING"	Optimalisasi program 3 in 1
		Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) : 66.20%	Adanya perubahan aturan terkait administrasi kepenudukan yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat	Koordinasi dan membangun jejaring dengan institusi pendidikan
		Cakupan Penerbitan akta kematian : 100%	Masih adanya pemahaman masyarakat tentang manfaat kepemilikan akta kematian dalam pengurusan dokumen penting	Semakin tinggi permintaan terhadap akta kematian sebagai prasyarat ahli waris pengurusan dokumen oleh Instansi/Perbankan/Jasa keuangan lainnya.

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan terdapat 4 (empat) cakupan :

1. Cakupan kepemilikan/perekaman KTP-el

   Besaran jumlah KTP-el yang diterbitkan merupakan penjumlahan dari masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dengan pembanding jumlah wajib KTP di Kota Balikpapan, mengalami kenaikan dari target yang ditentukan hal tersebut dikarenakan karena ketersediaan Blanko KTP-elektronik yang didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta telah terpenuhi untuk dilakukan pencetakan, meningkatnya permohonan KTP-el sebagai wujud kesadaran masyarakat untuk mendapatkan identitas diri yang tidak sebanding dengan ketersediaan blanko KTP-el. Meningkatnya permohonan KTP-el tersebut berkaitan dengan semua urusan-urusan yang kaitanya dengan birokrasi baik pemerintahan maupun swasta selalu bersentuhan dengan dokumen kependudukan.

2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran untuk anak usia 0-18 Tahun.

   Realisasi tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kota Balikpapan meningkat dikarenakan adanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh akte kelahiran. Dalam upaya untuk terus meningkatkan agar masyarakat Balikpapan memiliki dokumen kependudukan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan telah melakukan kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas Pemerintah/Swasta, yaitu memberi kemudahan bagi warga yang melakukan proses persalinan di 8 (delapan) Rumah Sakit/Puskesmas se Kota Balikpapan tersebut dapat langsung mengurus Penerbitan Akta Kelahiran bayinya dan penerbitan akta kelahiran yang terlambat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan juga melakukan Pencetakan Akta Kelahiran secara masal bagi Warga yang sudah terdaftar dalam Database Kependudukan Kota Balikpapan tetapi belum mencantumkan Nomor Akta Kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun. Melampauinya target yang ditetapkan atau peningkatan jumlah penerbitan akta kelahiran karena kesadaran yang tinggi untuk memiliki akta kelahiran.

3. Cakupan Penerbitan/Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

   Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di dalam Renstra 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotasesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan program Disdukcapil Kota Balikpapan (Permendagri) *three In One* yakni a bayi yang baru lahir di rumah sakit langsung memiliki Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA. Adapun pelayanan rutin yang dilaksanakan melalui permohonan onlined dimana masyarakat dalam pengurusan akte lahir mendapatkan Akte Kelahiran, perubahan KK dan KIA.

4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

   Menurunkan pembuatan Akta Kematian atas peristiwa kematian yang dilaporkan oleh masyarakat karena kegunaan Akta Kematian berkaitan dengan Hak Waris dan dihapusnya Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Camat dan adanya kerjasama pembuatan melalui Akta Kematian Online, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan melakukan jemput bola dalam pembuatan akta kematian online dimana masyarakat cukup membuat permohonan melalui jaringan "Daring". Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Juga bekerja sama dengan Dinas Pemakaman dan Pemukiman dalam pembuatan Buku Pokok Pemakaman untuk membantu masyarakat dalam membuat akta kematian.

Dari permasalahan yang ada disetiap tahun akan adanya factor-faktor pendukung guna mencapai target yang diharapkan, dengan memperhatikan kendala-kendala yag dialami masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah untuk mendorong pelayanan publik yang dekat dengan masyarakat.

1. Kemajuan teknologi menuntun respon kebijakan yang antipatif, adaptif, dan cepat dan lompatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui layanan digital/daring, pelayanan publik yang cepat dan akurat.
2. Dengan ditetapkannya Kabupaten PPU sebagai Ibu Kota Negara (IKN), Balikpapan sebagai pintu gerbang serta kota penyangga Ibu Kota Negara tentunya akan terdampak dari akan terjadinya peningkatan mobilitas penduduk yang datang sehingga Disdukcapil Kota Balikpapan perlu menyiapkan sarana dan prasarana yang representatif untuk mengantisipasi lonjakan permohonan pelayanan kependudukan di Kota Balikpapan
3. Integrasi Sistim Administrasi Kependudukan menuju satu data.
4. Penguatan Tata Kelola Kependudukan, dengan peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan percepatan kepemilikan dokumen penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan

Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Permasalahan :

1. Belum terlaksana secara maksimal pelayanan Disdukcapil Kota Balikpapan melalui daring, Masyarakat masih ada yang belum memahami beberapa perubahan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan seperti misalnya dihapuskannya pengantar RT dalam persyaratan permohonan pelayanan sesuai Perpres 96 tahun 2018 maupun perubahan blanko sebagaimana diataur dalam Permendagri 119 tahun 2019 yang saat ini tidak lagi menggunakan kertas security printing tetapi dicetak diatas kertas HVS putih 80 gram serta dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat.

2. Rata-rata pelayanan per hari di Kantor Disdukcapil adalah sebanyak 800 s/d 1.000 permohonan per hari dengan beberapa pelayanan yang tidak bisa dilakukan secara daring yaitu pengambilan KTP el, perekaman KTP el, pencatatan perkawinan dan pelayanan konsultasi dan pengaduan, maka masyarakat masih datang secara lengsung ke Kantor Disdukcapil

3. Ruang pelayanan di Kantor Disdukcapil yang ada saat ini dipandang masih belum cukup nyaman dan representative baik itu dari sisi kapasitas ruangan untuk masyarakat, maupun sarana pendukung lainnya seperti tersedianya ruang khusus konsultasi, ruangan pelayanan pengambilan KTP el yang saat ini dilakukan diarea ruang pengaduan offline, terlebih ketersediaan satuan ruang parkir yang minim juga turut mempengaruhi kenyamanan masyarakat yang datang berpelayanan.

4. Adanya penyalahgunaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, penyalahgunaan dokumen kependudukan banyak dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai motif seperti menghindari blokir oleh Bank, maupun sebagai motif untuk melakukan kejahatan lainnya.

5. Belum optimalnya sosialisasi administrasi kependudukan khususnya perubahan kebijakan pelayanan kependudukan.
   Masyarakat banyak yang belum mengetahui dan memahami beberapa perubahan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan seperti misalnya dihapuskannya pengantar RT dalam persyaratan permohonan pelayanan sesuai Perpres 96 tahun 2018 maupun perubahan blanko sebagaimana diataur dalam Permendagri 119 tahun 2019 yang saat ini tidak lagi menggunakan kertas security printing tetapi dicetak diatas kertas HVS putih 80 gram serta dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat.

6. Terbatasnya jumlah SDM pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan ketersediaan jumlah pegawai sebanyak 79 orang yang terdiri dari 42 orang ASN 37 orang tenaga bantuan (NABAN) Disdukcapil masih memerlukan tambahan personil untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, kekurangan jumlah SDM tersebut antara lain petugas operator pelayanan pada Kantor Disdukcapil, petugas operator yang akan ditempatkan pada mall pelayananan publik yang direncakan pada tahun 2023, petugas pelayanan mobil keliling dan petugas pelayanan jemput bola kepada masyarakat.

Hambatan :

Adapun hambatan dan kendala pada pelayanan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tahun 2021 yaitu sehubungan dengan telah ditetapkannya status tanggap darurat bencana percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Balikpapan, Berdasarkan Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor : 800/0281/Org tanggal 20 Maret 2020 dan Surat Edaran Kepala Disdukcapil Kota Balikpapan Nomor : 470/408/Disdukcapil Kota Balikpapan tanggal 20 Maret 2020 sehingga ada perubahan pada pelayanan yang pada awalnya berupa pelayanan tatap muka, tetapi terhitung mulai bulan Maret 2020 pelayanan berubah menjadi pelayanan dengan system online yang tentu saja dengan tujuan untuk memutus mata rantai *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Balikpapan.

Tentu saja tidak mudah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait “produk terbaru” Disdukcapil terutama pada saat pandemic seperti ini, tetapi dengan dukungan dari berbagai pihak dan juga masyarakat Kota Balikpapan, dengan perlahan masyarakat kota balikpapan mulai terbiasa dengan segala kemudahan yang di berikan dalam pelayanan online tersebut.

Pada awalnya pelayanan online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa google form sampai dengan bulan November 2020, pada bulan Desember 2020 Disdukcapil kota balikpapan telah memiliki aplikasi online secara permanen dan tentu saja dengan berbagai fitur yang lebih memudahkan masyarakat dalam kepengurusan pelayanan dokumen kependudukan.

a. Permohonan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilayani melalui “DARING” karena adanya masyarakat yang belum memiliki HP android, dan masyarakat belum familiar dengan LINK PELAYANAN ONLINE Disdukcapil :

   ‘- Salah input data.

   ‘- Merasa belum mendapatkan balasan atas permohonannya.

   Dari hambatan tersebut menimbulkan persepsi masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Masyarakat masih belum mengetahui bahwa dokumen yang dimohonkan bias dicetak mandiri dalam kertas HVS A 4 ukuran 80 gram.

c. Belum familiarnya ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) yang bias mencetak dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (suistanable Development Goals).

a. Terpenuhinya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat.

b. Tersedianya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat membuat rasa nyaman.

c. Pola pelayanan jemput bola yang akan menghasilkan inovasi pelayanan.

d. Masyarakat merasa puas akan layanan yang diberikan.

e. Tertib administrasi Kependudukan menuju penduduk yang berkualitas.

Dalam upaya pencapaian target pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan selalu menghadapi berbagai tantangan dalam pencapaian tujuan. Oleh karenanya perlu dirancang suatu strategi dengan memanfaatkan peluang yang ada agar tujuan dapat tercapai dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

1. Tantangan :

   a. Pertumbuhan penduduk yang akan terjadi peningkatan cukup tinggi sebagai dampak IKN.

b. Peningkatan jumlah masyarakat yang berpendidikan.
c. Pelayanan administrasi kependudukan yang bersifat kewenangan tunggal.
d. Dukungan Pemerintah Kota atas rencana peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas dan terjangkau.
e. Kemajuan teknologi dan informasi dalam menunjang pelayanan "DARING"
f. Integrasi data kependudukan dengan pelayanan publik lain.

1. Peluang :
   a. Adanya dukungan nasional tentang penerapan KTP-el
   b. Kerjasama dengan instansi lain.
   c. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (GISA).
   d. Permohonan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya/gratis.
   e. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bisa cetak sendiri dengan kertas A 4 80 gram.
   f. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bias diantar ke rumah melalui aplikasi "GOJEK".
   g. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan terkait kependudukan dan pencatatan sipil.
   h. Semakin berkembangnya teknologi informasi, arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tersimpan dalam DIGITALISASI ARSIP.
   i. Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Balikpapan sehingga Disdukcapil Kota Balikpapan dapat melaksanakan pelayanan Pencetakan KTP-el DRIVE TRUE.
   j. Adanya dukungan dari Instansi – Instansi Pemerintah terkait yang dapat menunjang peningkatanan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 yang direncanakan.

Dari analisis perkembangan dan masalah kependudukan dan pencatatan sipil dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka permasalahan yang masih dihadapi oleh Disdukcapil Kota Balikpapan tahun 2024 adalah:

a. Masih terdapat data kependudukan yang ganda menyebabkan adanya duplikasi data sehingga untuk perbaikan masih

memerlukan waktu.

b. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
c. Pelayanan online “DARING” belum familiar di masyarakat.
d. Peningkatan jangkauan pelayanan masyarakat/jemput bola.

Formulasi isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tahun 2024 yakni :

a. Jumlah penduduk Kota Balikpapan akan mengalami peningkatan akibat mulai dilaksanakannya perpindahan IKN (Ibu Kota Nusantara) ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur.
b. Tahun 2024 merupakan tahun politik (Pemilu serempak) pada PILKADA, Pemilu (Legeslatif dan PILPRES) sehingga permohonan KTP-el akan mengalami peningkatan.
c. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SD, SMP dipersyarati dengan kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak).

Untuk menghadapi formulasi isu-isu tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan direncanakan dalam mensukseskan DIGITALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK, maka pada tahun 2024 diprioritaskan untuk :

a. Mempermudah semua jenis layanan dalam bentuk Online kecuali perekaman dan pengambilan KTP-el/KIA.
b. Cetak dokumen kependudukan melalui ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri).
c. Digitalisasi permohonan Akta-akta pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk melalui TTE (Tanda tangan elektronik).
d. Bimbingan teknis tentang administrasi kependudukan menuju era digitalisasi.
e. Hibah Pengadaan Blanko KTP.
f. Forum Konsultasi Publik (FKP)
g. Penambahan sarana dan prasarana kantor.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan

mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

Review terhadap rancangan awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sesuai hasil analisis kebutuhan tahun 2024 dengan memperhatikan kegiatan skala prioritas kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai table berikut :

Tabel 2.6
Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wajib							Wajib						
	Pemerintahan							Pemerintahan						
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Bpp	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	91.45%	574,634,992		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Bpp	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	91.45%	427,027,500	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	3,330	100,000,000		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	3,330	-	
				- Jumlah penduduk non permanen yang terdata (Orang)	3,300	100,000,000					- Jumlah penduduk non permanen yang terdata (Orang)	3,300	-	
				- Jumlah penduduk rentan adminstrasi kependudukan yang diterbitkan NIK (Orang)	30	-					- Jumlah penduduk rentan adminstrasi kependudukan yang diterbitkan NIK (Orang)	30		
		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	7,500	-			Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	7,500	-	
				- Jumlah pemasalahan pelayanan pendaftaran penduduk yang terselesaikan	7,500	-					- Jumlah pemasalahan pelayanan pendaftaran penduduk yang terselesaikan (Masalah)	7,500	-	

	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				(Masalah)										
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	4	-			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	4	-	
				- Jumlah penerbitan perubahan kartu keluarga (lembar)	60,000	-					- Jumlah penerbitan perubahan kartu keluarga (lembar)	60,000		Kartu domisili tidak ada lagi
				- Jumlah penerbitan surat keterangan pindah penduduk /SKPWNI (lembar)	20,000	-					- Jumlah penerbitan surat keterangan pindah penduduk /SKPWNI (lembar)	20,000		
				- Jumlah penerbitan kartu domisili (lembar)		-	Kartu domisili tidak ada lagi				- Jumlah penerbitan kartu domisili (lembar)	-		
				- Jumlah penerbitan surat keterangan tempat tinggal/SKTT WNA (lembar)	900	-					- Jumlah penerbitan surat keterangan tempat tinggal/SKTT WNA (lembar)	900		
				- Jumlah surat permohonan penduduk pendatang luar daerah yang diterbitkan	11,000	-					- Jumlah surat permohonan penduduk pendatang luar daerah yang diterbitkan	11,000		
		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Bpp	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporaon)	3	374,634,992			Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Bpp	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporaon)	3	427,027,500	
				- Jumlah perekaman KTP elektronik (orang)	12,864						- Jumlah perekaman KTP elektronik (orang)	12,864		ada hibah blanko, jadi tidak
				- Jumlah Pencetakan KTP elektronik (lembar)	90,000	374,634,992					- Jumlah Pencetakan KTP elektronik (lembar)	90,000	427,027,500	

	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				- Jumlah penerbitan surat keterangan KTP elektronik sementara (lembar)			ada hibah blanko, jadi tidak ada suket				- Jumlah penerbitan surat keterangan KTP elektronik sementara (lembar)	-		ada suket
				- Jumlah penerbitan kartu identitas anak (lembar)	60,000						- Jumlah penerbitan kartu identitas anak (lembar)	60,000		
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	100,000,000		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	-	
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Bpp	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	96.55%	344,780,995		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Bpp	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	96.55%	-	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	32,000	100,000,000		Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	32,000	-	
				- Jumlah penerbitan akta kelahiran (lembar)	18,000	100,000,000					- Jumlah penerbitan akta kelahiran (lembar)	18,000	-	
				- Jumlah penerbitan akta kelahiran usia 0-18 tahun (lembar)	14,000						- Jumlah penerbitan akta kelahiran usia 0-18 tahun (lembar)	14,000		
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan	Bpp	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	12	144,780,995			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan	Bpp	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	*12*	-	

	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sipil		- Jumlah penerbitan kutipan akta perubahan nama (lembar)	152				Sipil		- Jumlah penerbitan kutipan akta perubahan nama (lembar)	152		
				- Jumlah penerbitan akta pengangkatan anak (lembar)	8						- Jumlah penerbitan akta pengangkatan anak (lembar)	8		
				- Jumlah penerbitan kutipan ke dua akta perkawinan (lembar)	27						- Jumlah penerbitan kutipan ke dua akta perkawinan (lembar)	27		
				- Jumlah penerbitan akta pengesahan anak (lembar)	100						- Jumlah penerbitan akta pengesahan anak (lembar)	100		
				- Jumlah penerbitan akta pengakuan anak (lembar)	-						- Jumlah penerbitan akta pengakuan anak (lembar)	-		
				- Jumlah penerbitan akta perubahan nama dari Pengadilan Negeri (lembar)	152	144,780,995					- Jumlah penerbitan akta perubahan nama dari Pengadilan Negeri (lembar)	152	-	
				- Jumlah penerbitan akta perubahan kewarganegaraan (lembar)	2						- Jumlah penerbitan akta perubahan kewarganegaraan (lembar)	2		
				- Jumlah penerbitan kutipan akta kelahiran kedua, ketiga dan seterusnya (lembar)	1,367						- Jumlah penerbitan kutipan akta kelahiran kedua, ketiga dan seterusnya (lembar)	1,367		
				- Jumlah penerbitan kutipan kedua akta kematian (lembar)	40						- Jumlah penerbitan kutipan kedua akta kematian (lembar)	40		
				- Jumlah penerbitan kutipan akta perkawinan (lembar)	432						- Jumlah penerbitan kutipan akta perkawinan (lembar)	432		
				- Jumlah penerbitan akta perceraian (lembar)	60						- Jumlah penerbitan akta perceraian (lembar)	60		

	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				- Jumlah penerbitan akta kematian (lembar)	5,084						- Jumlah penerbitan akta kematian (lembar)	5,084		
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	100,000,000		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	-	
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	5,679	-			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	5,679	-	
		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1				Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1		
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	100.00 %	1,024,097,062		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	100.00 %	853,387,700	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Bpp	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	6	574,097,062		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Bpp	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	6	-	
				- Jumlah laporan tahunan yang tersedia (dokumen)	6	574,097,062					- Jumlah laporan tahunan yang tersedia (dokumen)	6	-	

	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Database Kependudukan			- Jumlah laporan agregat kependudukan yang tersedia (dokumen)				Database Kependudukan			- Jumlah laporan agregat kependudukan yang tersedia (dokumen)			
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Bpp	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1	50,000,000			Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Bpp	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1	341,185,000	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bpp	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan (Laporan)	3	350,000,000		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bpp	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan (Laporan)	3	512,202,700	
				- Jumlah software dan hardware aplikasi SIAK yang dipelihara & diperbaiki (jenis)	3	350,000,000					- Jumlah software dan hardware aplikasi SIAK yang dipelihara & diperbaiki (jenis)	3	512,202,700	
				- Jumlah software dan hardware aplikasi SIAK yang dikembangkan							- Jumlah software dan hardware aplikasi SIAK yang dikembangkan			
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	50,000,000			Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	-	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Bpp	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat	100%	75,000,000		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Bpp	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat	100%	-	

	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Bpp	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1	75,000,000		Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Bpp	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1	-	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			IKM Internal Perangkat Daerah	81	14,620,168,324		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			IKM Internal Perangkat Daerah	81	16,855,225,180	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	-			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	-			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	-	

	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	-			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	-			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	-			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	-			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	6,700,000,000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	7,201,452,000	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	-			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	-	

	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	-			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	-			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	-	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	-			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	-			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	-	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	-			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bpp	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	-		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bpp	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	-	

	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	-			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	-	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	-			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	-	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	-			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	-			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	-			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	-			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	-	

	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bpp	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bpp	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	-	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	-			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	-	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	-			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	-	
		Bimbingan Teknis implementasi Peraturan perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	80	200,000,000			Bimbingan Teknis implementasi Peraturan perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	80	869,200,000	
	Administras Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15,000,000		Administras Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	13,170,500	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	900,000,000			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	856,544,640	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	20,000,000			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	-	

	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	3,300,000,000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	2,281,652,500	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	500,000,000			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	1,203,630,200	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	15,000,000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	28,070,000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	15,000,000			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	21,271,500	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	37	350,000,000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	500,000,000	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2,200	-			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2,250	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	500,000,000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	750,826,000	
		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	32	70,000,000			Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	33	160,020,800	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	70,000,000			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	

	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	120,000,000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	84,400,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6	250,000,000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	204,000,000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	30,000,000			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	945,168,324			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	2,000,562,200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	450,000,000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28	566,144,840	
		Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	36	20,000,000			Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	36	15,000,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	48	150,000,000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	26	99,280,000	

	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
JUMLAH						16,638,681,373							*18,135,640,380*	

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dilakukan untuk membandingkan Rancangan awal (Renstra) terhadap analisis kebutuhan setelah diadakannya musyawarah antar OPD dengan pemangku kepentingan, dan mengingat kebutuhan sarana dan prasarana yang harus terpenuhi untuk mendukung pelayanan masyarakat. Pada rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tahun 2024 anggaran sebesar Rp 16.638.681.373,00 (enam belas milyard enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan analisa kebutuhan Rp 18.135.640.380,00 (ibu sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tahun 2024 disamping berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan menyediakan melalui website : capil.balikpapan.go.id. Melalui website dan Wa bisnis tersebut akan menjadi perhatian dalam rangka perbaikan mutu pelayanan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

Dalam melaksanakan tugas pokok pelayanan kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan tidak mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang, tetapi melalui Forum OPD dengan memperhatikan OPD pendukung pelayanan (Kecamatan se-Balikpapan) dan Lintas Sektor yang lain.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
-	-	-	nihil	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terdapat realisasi kinerja yang mengacu pada Standar Nasional/Lainnya.

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Nasional Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7 = 5 / 6 *100
		N I H I L				

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tidak dapat disandingkan dengan dengan standar nasional/ lainnya, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan Renja Perangkat Daerah

   Tujuan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

   1) Meningkatkan kualitas data base kependudukan.
   2) Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan.
   3) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
   4) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan.
   5) Meningkatkan penataan dokumen kependudukan.

2. Sasaran Renja SKPD

   1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengolahan data berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

2) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang transparan dan profesional sesuai Standar Operasional Prosedur.
3) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, memiliki integritas dan profesional.
4) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan
5) Meningkatnya pengeloaan dokumen kependudukan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Balikpapan yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Tujuan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dicapai melalui program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan konsisten dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategik dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut. Adapun tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan sesuai tabel 3.2. yaitu:

Tabel 3.2
Visi, Misi Walikota Balikpapan, Tujuan dan Sasaran Disdukcapil Tahun 2021-2026

VISI Walikota Balikpapan : "Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"			
MISI I : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik			
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan terhadap Administrasi Kependudukan		Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk
		Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil
		Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis tekologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
		Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Untuk mendapatkan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tahun 2024 menggunakan data base dari aplikasi siak sebagai berikut:

a. Kepemilikan bisa dilihat dari table sebagai berikut:

1. Kepemilikan Kartu Keluarga.

Jumlah Kepala keluarga penduduk Kota Balikpapan tahun 2022 sebanyak 247.248 KK, untuk mendapatkan cakupan penerbitan kartu keluarga setiap tahun yang diperolehan adanya permohonan masyarakat dari beberapa perubahan data yang dilakukan oleh warga masyarakat seperti perubahan nama, tambah anak, pisah KK karena menikah/meninggal atau perubahan status, adanya pendatang dari luar Kota Balikpapan dan perubahan biodata lainnya. Bagi Penduduk Balikpapan setiap Kepala Keluarga harus/wajib memiliki Kartu Keluarga oleh karenanya Jumlah Kartu Keluarga yang dimiliki Masyarakat Balikpapan sama dengan Jumlah Kepala Keluarga Penduduk Balikpapan, tersaji data sebagai berikut:

Tabel 3.3
Visi, Misi Walikota Balikpapan, Tujuan dan Sasaran Disdukcapil Tahun 2021-2026

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepemilikan KK
1	Balikpapan Timur	100.003	32.841
2	Balikpapan Barat	97.215	33.406
3	Balikpapan Utara	183.444	61.003
4	Balikpapan Tengah	106.183	37.698
5	Balikpapan Selatan	155.495	51.843
6	Balikpapan Kota	85.325	30.457
TOTAL		727.665	247.248

Dari data diatas digambarkan bahwa pelayanan pencetakan kartu keluarga mencakup setiap kepala keluarga yang ingin melakukan perubahan di dalam kartu keluarga maka di layani pencetakan kartu keluarga yang di mohonkan.

2. Kepemilikan/perekaman KTP-el

a. Jumlah Penduduk yang sudah melakukan perekaman di tiap-tiap kecamatan perbandingan nya tidak sama dikarenakan penduduk yang sudah melakukan perekaman karena adanya penduduk yang

pindah/datang antar kecamatan dan luar daerah serta adanya Perpres 96 Tahun 2018 dengan tujuan agar pelayanan kependudukan dipermudah dan cepat selesai.

b. Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah melakukan perekaman dan sudah memiliki KTP-el di Kota Balikpapan mencapai 97.95% dari jumlah penduduk wajib KTP-el, :

Tabel 3.4
Perekaman KTP Elektronik Tahun 2022

NO	KECAMATAN	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman			Jumlah penduduk wajib KTP-el		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	BALIKPAPAN SELATAN			108268	55738	54552	110290
2	BALIKPAPAN UTARA			126884	65882	63943	129825
3	BALIKPAPAN TIMUR			67595	35542	33604	69146
4	BALIKPAPAN BARAT			67867	35783	33627	69410
5	BALIKPAPAN TENGAH			76435	39412	38525	77937
6	BALIKPAPAN KOTA			61916	32018	31040	63058
Jumlah				508965	264375	255291	519666

Sumber Data : Disdukcapil

3.3. Program dan kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tahun 2024 akan melaksanakan Program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat langsung dengan melakukan INOVASI percepatan pencapaian pelayanan dengan melaksanakan Inovasi. Jenis layanan berbasis online "DARING" terdiri dari :

1. Perubahan Data Kartu Keluarga
2. Pindah tempat tinggal
3. Kedatangan di Balikpapan
4. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi WNA
5. Akte Kelahiran
6. Akte Kematian
7. Akte Perkawinan
8. Update data: (keperluan BPJS, PERBANKAN, INSTANSI LAINNYA)
9. Permohonan Dokumen Kependudukan Karena Kehilangan
10. Permohonan Cetak Ulang Kartu Keluarga tanpa ada perubahan data (bukan karena Kehilangan)
11. Pelayanan jemput bola perekaman KTP, pelayanan IKD (identitas kependudukan digitalisasi

Pelayanan tersebut diatas pada tahun 2021 bisa diakses sekaligus melalui link https://capil.balikpapan.go.id/layanan/ Link tersebut diperlukan sesuai kebutuhan pelayanan, Silahkan mengisi secara lengkap dan no HP yang di input adalah nomor yang aktif (bisa di SMS),

Setelah permohonan di proses maka untuk permohonan perubahan data Kartu Keluarga (KK) dan permohan akta-akta pencatatan sipil maka :

1. Berdasarkan Permendagri No 19/2019 diterbitkan kertas putih pengganti kertas security printing.
2. Memiliki kekuatan hukum.
3. Seluruh dokumen kependudukan menggunakan kertas putih ukuran A4 80 gram kecuali KTP-el dan KIA.
4. Semua layanan dokumen kependudukan bisa dikirimkan langsung ke warga dalam bentuk file PDF lewat Smart Phone atau Email.
5. Penandatangan dokumen oleh Kepala Dinas dalam bentuk QR CODE.
6. Penduduk dapat mencetak sendiri di rumah melalui file PDF yang telah diberikan.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 tergambar dalam tabel 3.5

Tabel 3.5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2024				RENCANA AKHIR TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**IKM Internal Disdukcapil**	**Nilai**	**Balikpapan**	**81,00**	**14.500.595.000**	**APBD**	**81,00**	**14.978.006.000**	**83,00**	**15.819.063.367**
X.XX.01.2,02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**Balikpapan**	**82**	**7.201.452.000**	**APBD**	**82**	**7.201.452.000**	**83**	**7.300.000.000**
X.XX.01.2,02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Balikpapan	46	7.201.452.000	APBD	46	7.201.452.000	46	7.300.000.000
X.XX.01.2,05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Nilai**	**Balikpapan**	**84**	**543.500.000**	**APBD**	**84**	**543.500.000**	**84.50**	**350.000.000**
X.XX.01.2,05.11	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Balikpapan	43	543.500.000	APBD	43	543.500.000	80	350.000.000
X.XX.01.2,06	**Kegiatan Administras Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**Balikpapan**	**82**	**4.362.578.806**	**APBD**	**82**	**4.937.166.600**	**83**	**5.435.000.000**
X.XX.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	Balikpapan	12	775.280.000	APBD	12	775.279.590	6	950.000.000
X.XX.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Balikpapan	8	2.219.697.700	APBD	8	1.965.083.200	8	3.500.000.000
X.XX.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Balikpapan	4	968.163.406	APBD	4	1.679.103.800	3	550.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2024				RENCANA AKHIR TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
X.XX.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Balikpapan	2	28.070.000	APBD	2	28.070.000	1	15.000.000
X.XX.01.2,06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Balikpapan	2	18.750.000	APBD	2	28.165.000	2	20.000.000
X.XX.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Balikpapan	12	352.617.700	APBD	12	461.465.010	12	400.000.000
X.XX.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Balikpapan	2.250	-		2.250	-	2.300	-
X.XX.01.2,07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**Balikpapan**	**80**	**416.305.600**	**APBD**	**80**	**413.200.000**	**81**	**500.000.000**
X.XX.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	Balikpapan	3	416.305.600	APBD	3	413.200.000	1	500.000.000
X.XX.01.2,08	**Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah**	**IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**Balikpapan**	**82**	**1.387.562.200**	**APBD**	**82**	**1.175.531.200**	**83**	**1.354.063.367**
X.XX.01.2,08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Balikpapan	2	80.000.000	APBD	2	79.999.400	2	125.000.000
X.XX.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Balikpapan	12	204.000.000	APBD	12	186.602.400	12	275.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2024				RENCANA AKHIR TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
X.XX.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Balikpapan	12	1.103.562.200	APBD	12	908.929.400	12	954.063.367
X.XX.01.2,09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**Balikpapan**	**82**	**589.196.394**	**APBD**	**82**	**707.156.200**	**83**	**880.000.000**
X.XX.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Balikpapan	28	474.196.394	APBD	28	592.156.200	29	570.000.000
X.XX.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Balikpapan	36	15.000.000	APBD	36	15.000.000	36	20.000.000
X.XX.01.2,09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Balikpapan	26	100.000.000	APBD	26	100.000.000	48	290.000.000
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk**	**%**	**Balikpapan**	**91,45% = KK 100%, KTP 99,35% KIA 75,00%**	**186.755.000**	**APBD**	**91,45% = KK 100%, KTP 99,35% KIA 75,00%**	**249.756.500**	**93,12% = KK 100%, KTP 99,36% KIA 80,00%**	**635.120.133**
2.12.02.201	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan**	**%**	**Balikpapan**	**100%**	**186.755.000**	**APBD**	**100%**	**249.756.500**	**100%**	**485.120.133**
2.12.02.201.01	Pendataan penduduk non permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi ependudukan	Dokumen	Balikpapan	3.330	-	APBD	3.330	-	3.220	110.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2024				RENCANA AKHIR TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
2.12.02.201.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	orang	Balikpapan	7.500		APBD	7.500	-	4.700	-
2.12.02.201.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Balikpapan	4		APBD	4	-	4	-
2.12.02.201.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	Balikpapan	3	186.755.000	APBD	3	249.756.500	3	375.120.133
2.12.02.203	**Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**%**	**Balikpapan**	**100%**	**-**	**APBD**	**100%**	**-**	**100%**	**150.000.000**
2.12.02.203.05	Sosialisai Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	Balikpapan	1	-	APBD	1	-	1	150.000.000
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil**	**%**	**Balikpapan**	**96,55% = akte lahir 98,10% dan akte kematian 95.00%**	**-**	**APBD**	**96,55% = akte lahir 98,10% dan akte kematian 95.00%**	**-**	**96,58% = kate lahir 98.15%, akte kematian 95.00%**	**381.072.041**
2.12.03.201	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan**	**%**	**Balikpapan**	**100%**	**-**	**APBD**	**100%**	**-**	**100%**	**256.072.041**
2.12.03.201.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokument atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	Balikpapan	32.000	-	APBD	32.000	-	32.000	100.000.000
2.12.03.201.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	Balikpapan	12	-	APBD	12	-	12	156.072.041

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2024				RENCANA AKHIR TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
2.12.03.202	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil melalui layanan online**	**%**	**Balikpapan**	**100%**	**-**	**APBD**	**100%**	**-**	**100%**	**125.000.000**
2.12.03.202.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan		1	-	APBD	1	-	1	125.000.000
2.12.03.202.07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen		5.679	-	APBD	5.679	-	5.679	-
2.12.03.202.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	Balikpapan	1	-	APBD	1	-	1	-
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik**	**%**	**Balikpapan**	**100%**	**593.650.000**	**APBD**	**100%**	**1.037.237.500**	**100%**	**1.139.784.262**
2.12.04.201	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan**	**%**	**Balikpapan**	**100%**	**252.900.000**	**APBD**	**100%**	**445.624.000**	**100%**	**704.784.262**
2.12.04.201.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	Balikpapan	6	-	APBD	6	-	6	654.784.262
2.12.04.201.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Balikpapan	1	252.900.000	APBD	1	445.624.000	1	50.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2024				RENCANA AKHIR TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
2.12.04.203	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola**	**%**	**Balikpapan**	**100%**	**340.750.000**	**APBD**	**100%**	**591.613.500**	**100%**	**435.000.000**
2.12.04.203.03	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Balikpapan	3	340.750.000	APBD	3	591.613.500	3	360.000.000
2.12.04.203.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Balikpapan	1	-	APBD	1	-	1	75.000.000
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase dokumen profil kependudukan yang tersusun**	**%**	**Balikpapan**	**100%**	**-**	**APBD**	**100%**	**-**	**100%**	**75.000.000**
2.12.05.201	**Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah dokumen profil kependudukan yang diterbitkan**	**Buku**	**Balikpapan**	**60**	**-**	**APBD**	**60**	**-**	**60**	**75.000.000**
2.12.05.201.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen		1	-	APBD	1	-	1	75.000.000
JUMLAH ANGGARAN						***15.281.000.000***			***16.265.000.000***		***18.050.039.803***

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung visi dan misi Walikota Balikpapan yaitu “Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman” dalam rangka mewujudkan Visi tersebut Dengan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi.
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai.
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan Misi no. 1 yakni “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik”. Adapun tujuan jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sejalan dengan Sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yakni “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah Terhadap Administrasi Kependudukan “.

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah disusun untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan pertimbangan terhadap rencana kinerja dan tercapainya target kinerja dan pendanaan yang dirumuskan dengan tujuan utama yakni untuk memenuhi:

1. Pencapaian Visi, Misi Walikota, Sasaran RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yakni Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan terhadap Administrasi Kependudukan.
2. Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni:
   a. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
   b. Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil;
   c. Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis tekologi informasi;
   d. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

3. Pencapaian target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Perjanjian Kinerja.

Untuk mencapai target kinerja dan pendanaan tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan merumuskan:

1. Program Penunjang Perangkat Daerah, 6 Kegiatan, 17 Sub Kegiatan.
2. Program Pendaftaran Penduduk, 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan.
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, 2 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan.

Dari rumusan program terdapat alokasi anggaran Renstra Tahun 2024 sebesar Rp 16.638.681.373,00 dan Renja 2024 sebesar Rp 18.135.640.380,00 terdapat selisih sebesar Rp 1.496.959.007,00. Sesuai dengan surat Wali Kota Balikpapan nomor : 050/0402/Bappeda-Litbang tanggal 21 Februari 2023 tentang Penyampaian pagu indikatif dan penginputan Ranwal Renja OPD Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada Renja tahun 2024 dengan pagu indikatif sebesar Rp 15.281.000.000,00 (lima belas milyar duaratus delapan puluh satu juta rupiah), dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RANWAL RENSTRA	KEBUTUHAN
				2024	2024
1	2	3	5	10	12
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			14,620,168,324	14.269.946.000
		1 Administrasi Keuangan Perangkat daerah		6,700,000,000	7,201,452,000
			1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	6,700,000,000	7,201,452,000
		2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		200,000,000	543.500.000
			2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200,000,000	543,500,000
		3 Administras Umum Perangkat Daerah		5,115,000,000	4.242.298.000
			3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	0
			4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	900,000,000	699.000.000
			5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000	-
			6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,300,000,000	1.924.956.500
			7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	500,000,000	1,194,000,000
			8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15,000,000	28,070,000
			9 Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	21,271,500
			10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350,000,000	375,000,000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RANWAL RENSTRA	KEBUTUHAN
				2024	2024
1	2	3	5	10	12
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		640,000,000	348,216,000
			11 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500,000,000	258,216,000
			12 Pengadaan Mebel	70,000,000	90,000,000
			13 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70,000,000	-
		5 Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah		1,345,168,324	1,253,700,000
			14 Penyediaan Jasa surat menyurat	120,000,000	84,400,000
			15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250,000,000	133.800.000
			16 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000	-
			17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	945,168,324	1.035.500,000
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		620,000,000	680,780,000
			18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	450,000,000	566,500,000
			19 Pemeliharaan Mebel	20,000,000	15,000,000
			20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150,000,000	99,280,000
02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			574,634,992	186,755,000
		7 Pelayanan Pendaftaran Penduduk		474,634,992	186,755,000
			21 Pendataan penduduk non permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	100,000,000	-
			22 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	374,634,992	186.755,000
		8 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		100,000,000	-
			23 Sosialisai Pendaftaran Penduduk	100,000,000	-
03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			344,780,995	-
		9 Pelayanan Pencatatan Sipil		244,780,995	-
			24 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokument atas Peristiwa Penting	100,000,000	-
			25 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	144,780,995	-
		10 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		100,000,000	-
			26 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	100,000,000	-
04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			1,024,097,062	824,299,000
		11 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		624,097,062	311,255,000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RANWAL RENSTRA	KEBUTUHAN
				2024	2024
1	2	3	5	10	12
			27 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	574,097,062	-
			28 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	50,000,000	311,255,000
		12 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		400,000,000	513,094,000
			29 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	350,000,000	513,074,000
			30 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50,000,000	-
05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			75,000,000	-
		13 Penyusunan Profil Kependudukan		75,000,000	-
			31 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	75,000,000	-
JUMLAH ANGGARAN				***16,638,681,373***	***15,281,000,000***

Sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan nomor : 050/0734/Bappeda-Litbang tanggal 05 Mei 2023 tentang Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai dengan pagu indikatif rancangan akhir Renja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan pagu indikatif sebesar Rp 16.265.000.000,00 (enam belas milyar duaratus enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian penggunaan program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 8
Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENSTRA	RANWAL	RANKHIR
				2024	**2024**	**2024**
1	2	3	4	5	6	6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**			**14.620.168.324**	**14.500.595.000**	**14.978.006.000**
		1 Administrasi Keuangan Perangkat daerah		**6.700.000.000**	**7.201.452.000**	**7.201.452.000**
			1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	6.700.000.000	7.201.452.000	7.201.452.000
		2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**200.000.000**	**543.500.000**	**543.500.000**
			2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	543.500.000	543.500.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		RENSTRA	RANWAL	RANKHIR
					2024	2024	2024
1	2	3	4		5	6	6
		3 Administras Umum Perangkat Daerah			**5.115.000.000**	**4.362.578.806**	**4.937.166.600**
			3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	-	-
			4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	900.000.000	775.280.000	775.279.590
			5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	-	-
			6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.300.000.000	2.219.697.700	1.965.083.200
			7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	500.000.000	968.163.406	1.679.103.800
			8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	15.000.000	28.070.000	28.070.000
			9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	18.750.000	28.165.000
			10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	352.617.700	461.465.010
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**640.000.000**	**416.305.600**	**413.200.000**
			11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	416.305.600	413.200.000
			12	Pengadaan Mebel	70.000.000	-	-
			13	Pengadaan peralatan dan mesin lainya	70.000.000	-	-
		5 Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah			**1.345.168.324**	**1.387.562.200**	**1.175.531.200**
			14	Penyediaan Jasa surat menyurat	120.000.000	80.000.000	79.999.400
			15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	204.000.000	186.602.400
			16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	-	-
			17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	945.168.324	1.103.562.200	908.929.400
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**620.000.000**	**589.196.394**	**707.156.200**
			18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	450.000.000	474.196.394	592.156.200
			19	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	15.000.000	15.000.000
			20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	100.000.000	100.000.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		RENSTRA	RANWAL	RANKHIR
					2024	2024	2024
1	2	3	4		5	6	6
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				**574.634.992**	**186.755.000**	**249.756.500**
		7	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		**474.634.992**	**186.755.000**	**249.756.500**
			1	Pendataan penduduk non permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	100.000.000	-	-
			2	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	374.634.992	186.755.000	249.756.500
		8	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		**100.000.000**	**-**	**-**
			3	Sosialisai Pendaftaran Penduduk	100.000.000	-	-
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				**344.780.995**	**-**	**-**
		Pelayanan Pencatatan Sipil			**244.780.995**	**-**	**-**
			1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokument atas Peristiwa Penting	100.000.000	-	-
			2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	144.780.995	-	-
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			**100.000.000**	**-**	**-**
			3	Fasilitasi terkait pencatatan sipil	100.000.000	-	-
3	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**1.024.097.062**	**593.650.000**	**1.037.237.500**
		8	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		**624.097.062**	**252.900.000**	**445.624.000**
			1	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	574.097.062	-	-
			2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (FKP)	50.000.000	252.900.000	445.624.000
		9	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		**400.000.000**	**340.750.000**	**591.613.500**
			3	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	350.000.000	340.750.000	591.613.500
			4	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi adminsitrasi kependudukan	50.000.000	-	-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		RENSTRA	RANWAL	RANKHIR
					2024	2024	2024
1	2	3	4		5	6	6
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				**75.000.000**	**-**	**-**
		Penyusunan Profil Kependudukan			**75.000.000**	**-**	**-**
			1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	75.000.000	-	-
JUMLAH ANGGARAN					***16.638.681.373***	***15.281.000.000***	***16.265.000.000***

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2024 yang disusun dengan kegiatan prioritas dan rutin (sekretariatan) sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN.
2. Belanja operasional :
   a. Belanja Bimtek.
   b. Belanja barang : ATK, suku cadang, cetakan, makanan dan minuman, alat-alat listrik, koran,
   c. Belanja Jasa : gaji naban, lembur Non PNS, honorarium lintas sektor (kepala PA, operator PA, Kepala KUA se-Balikpapan dan operatot), telpon, fax, SMS center, SMS Gateway, paket pengiriman/surat, pajak kendaraan dinas.
   d. Belanja pemeliharaan : Pemeliharaan kendaraan, penggantian suku cadang, BBM, pemeliharaan peralatan komputer dan jaringan, pemeliharaan peralatan kantor.
   e. Belanja perjalanan dinas.
   f. Belanja Modal.

Program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap pencapaian target kinerja dan anggaran tahun 2024 berguna untuk semua masyarakat pada umumnya dan Kota Balikpapan pada khususnya, Rrencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
   1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
        Dengan memperhatikan Inventarisasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan jumlah ASN sebanyak 43

orang terdiri dari 34 orang PNS dan 9 orang P3K.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

     Kegiatan ini bertujuan untuk penyegaran dan peningkatan SDM bagi pegawai Disdukcapil tentang perubahan peraturan/kebijakan Administrasi Kependudukan dan optimalisasi DUKCAPIL GO DIGITAL dalam konteks kelembagaan, pelayanan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

3. Kegiatan Administrasi Umum.

   Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, merupakan kegiatan administrasi umum penunjang kegiatan kantor rutin yang harus tersedia.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

     Tahun 2024, sewa tanaman, belanja modal home use, pengadaan komputer, laptop, printer menuju SIAK TERPUSAT (layanan Adminduk dalam genggaman), printer fargo pencetak KTP dan pengadaan Belanja Modal UPS (server).
   - Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

     Penyediaan ATK (kertas dan cover, tinta toner), ATK pencetak KTP/KIA (Ribbon, cleaning kit, DDP Film), Natuna (gula pasir, kopi,teh dan minuman), makanan dan minuman Rapat dan makanan tambahan.
   - Sub Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

     Pengalokasian Bantuan Keuangan atau Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan) dengan mekanisme Hibah Barang Pembelian Blanko KTP-el 150.000 keping. Belanja Blanko KIA 5.000 lembar, banner, map kop, spanduk, umbul-2 dan penjilitan.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

     Jasa berlangganan koran dan iklan di koran lokal.
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

     Penyediaan makanan dan minuman tamu .
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Knsultasi SKPD

     Pagu Renstra masih terdapat kekurangan karena tahun 2024 merupakan tahun politik maka Disdukcapil sebagai pengelola Administrasi Kependudukan direncanakan kegiatan luar daerah akan bertambah.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/lapangan.
     Kendaraan dinas yg dipergunakan untuk pelayanan jemput bola bagi penduduk rentan administrasi kondisinya sudah tidak layak pakai untuk dipergunakan sehingga di Tahun 2024 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil bermaksud untuk pengadaan kendaraan Roda 4 sebanyak 1 unit dan belanja sewa kendaraan roda 4 yang diperuntukan untuk jabatan sebanyak 2 unit (kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil).

5. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   - Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat.
     Pengiriman jasa surat menyurat, pengiriman blanko KTP, pengiriman peralatan yang perlu diperbaiki.
   - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
     Belanja jasa telpon, fax, internet, SMS center, SMS gateway.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum.
     Belanja peralatan kebersihan, belanja peralatan kantor lainnya (sarung tangan, masker, tissue basah, tissue halus), dan honor/gaji Non PNS dengan belum adanya penyesuaian gaji Non PNS, dan iuran jaminan/asuransi(JK, JKK, JKM).

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan.
     Belanaja BBM (bahan bakar minyak), penggantian suku cadang, pemeliharaan kendaraan/servise/perawatan, dengan kendaraan dinas R2 sebanyak 16 unit, R4 sebanyak 10 unit total 26 Unit kendaraan dinas.
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan meubel.
     Dipergunakan untuk perbaikan meubel.
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
     Pemeliharaan peralatan : Mesin foto copi, CCTV, mesin absensi, sound system.

b. Program Pendaftaran Penduduk

2. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan.

  Tahun 2024 merupakan tahun politik, antisipasi pemilih pemula dengan mengadakan pelayanan jemput bola dengan melakukan perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah dan gerakan DUKCAPIL GOES TO CAMPUS. Perekaman KTP bagi lansia, dengan dukungan belanja makanan dan minuman kegiatan jemput bola, pemberian honorarium non PNS pencetakan KTP/KIA dan belanja pakaian (kaos).

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

- Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.

  Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan bermaksud mengadakan FKP (Forum Konsultasi Publik), sosialisasi, dengan nara sumber dari pusat dan daerah. Pemberian honorarium 6 Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) dan 6 operator KUA, dan Kepala PA (Pengadilan Agama) dan Operator PA, dalam rangka satu data status perkawinan, pengadaan brosur, spanduk dan cetak lainnya, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman lapangan.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

  Dengan kegiatan pemeliharaan komputer, peralatan computer, peralatan personal komputer :

  a. Belanja pemeliharaan pemeliharaan komputer/komputer unit personal komputer.
  b. Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer.
  c. Belanja pemeliharaan peralatan jaringan.
  d. Belanja pemeliharaan peralatan komputer lainnya
  e. Belanja Modal Pengembangan aplikasi SIAK (penunjang layanan online).
  f. Honorarium non PNS (lembur pelayanan dihari libur/diluar jam kerja).

Dari program, kegiatan dan sub kegiatan perencanaan tahun 2024 dengan akan melakukan kegiatan :

- Pelayanan online permohonan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Pelayanan konsultasi permohonan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Kegiatan jemput bola pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el dengan target penduduk yang belum memiliki KTP-el, pemilih pemula, penduduk rentan dan disabilitas yang direncanakan di wilayah 34 kelurahan;
- Kegiatan jemput bola IKD (Identitas Penduduk Digital) dengan program DUKCAPIL GO TO CAMPUS dengan mendatangi kampus, sekolah-sekolah dan tempat layanan masyarakat;
- Pelayanan mobil keliling;
- Sosialisasi kepada masyarakat, forum konsultasi publik;
- Perencanaan pelayanan di 6 Kecamatan yang berupa pencetakan KTP dan KIA;
- Survei kepuasan masyarakat layanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengolahan data;
- Hibah Blanko KTP-el ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian dalam Negeri.

BAB V
INOVASI

Inovasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk memenuhi Indikator Capaian Kinerja.

Dalam upaya untuk melaksanakan Rencana Aksi dan Inovasi untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan menuju " Tertib Administrasi Kependudukan Menuju Penduduk yang berkualitas" langkah-langkah yang akan dilakukan merupakan INOVASI percepatan pencapaian pelayanan dengan melaksanakan Inovasi sebagai berikut :

a. Pelayanan Dokumen Kependudukan *One Day Service*
b. Pelayanan Integrasi Data Perkawinan *One Stop Service*
c. Pelayanan Mobil Keliling "GLAMOR", Gerai Layanan Mobil Ramah (karena masih pandemic covid-19 untuk sementara pelayanan mobil keliling tidak dilaksanakan).
d. Pelayanan Akta Kelahiran, kematian dan dokumen pencatatan sipil lainnya secara *online* .
e. Pelayanan dokumen kependudukan (perubahan KK, pindah datang) secara Online.
f. Jum'at berbagi untuk sementara tidak dilaksanakan
g. Inovasi pelayanan perekaman/pengambilan KTP-el antrian online.
h. Pelayanan TTE (Tanda Tanda Elektronik) melalui Akta-akta dan dokumen kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kartu Keluarga.

Adapun inovasi sebagai berikut :

1. GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)

   Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau disingkat "GISA" adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintah yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal yakni :

   1. Kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan.
   2. Kesadaran pemanfaatan data kependudukan.
   3. Pentingnya pemutakhiran data kependudukan.
   4. Pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.

“GISA” diharapkan akan terbangunnya ekosistem pemerintahan dan masyarakat yang sadar akan pentingnya adminstrasi kependudukan, dengan target sasaran “GISA” adalah masyarakat, aparatur petugas aparatur petugas pelayanan Dukcapil, dan lembaga pengguna (pemerintah dan swasta). Puncak akhir dari “GISA” adalah terwujudnya Indonesia yang sadar administrasi kependudukan, sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

1. Gerai layanan Mobil Ramah

3. Jum’at berbagi

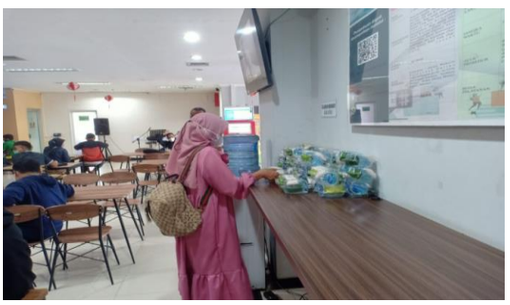

4.Link Pelayanan Online

5. ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)

6.SMS Gate Away

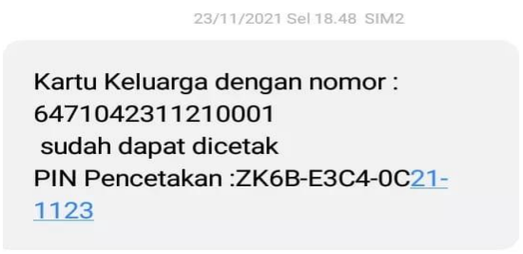

7. WaCat Wargaku ke Capil Aku Tahu)

8.Pengambilan Dokumen melalui Gojek

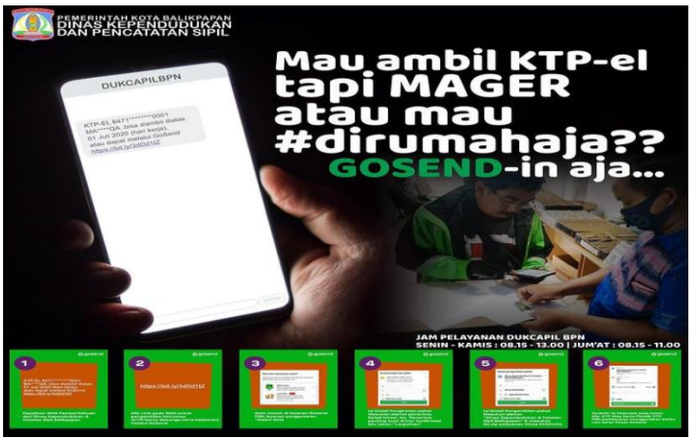

9.Facebook

10. Instagram

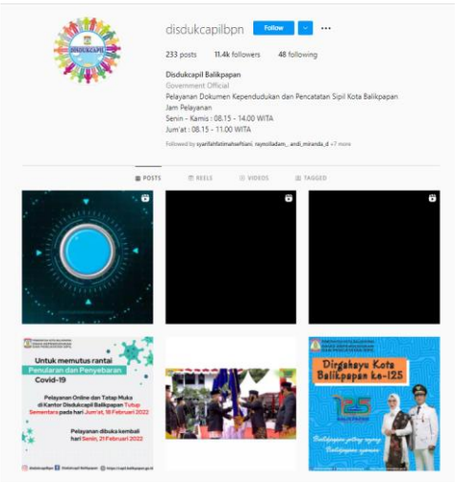

11.WebsiteDukcapil

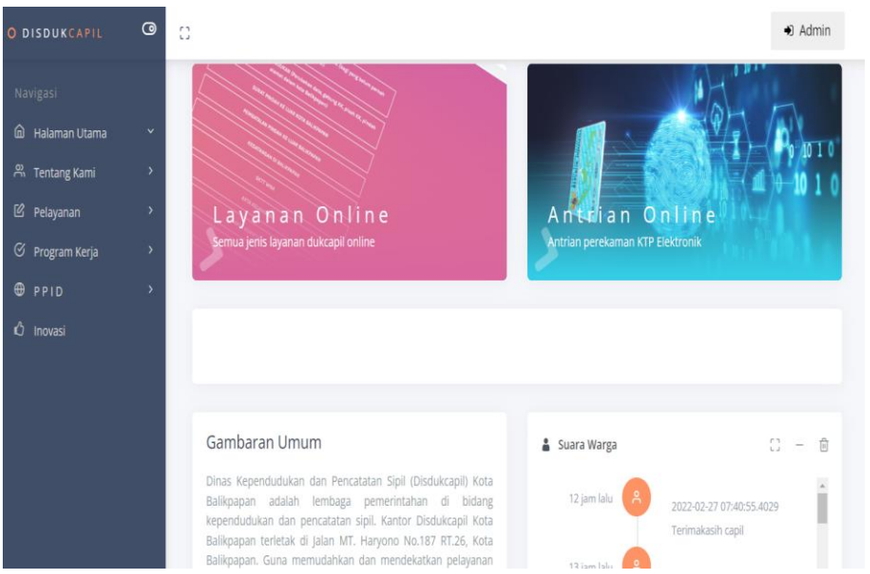

12.Layanan Pengaduan Konsultasi Masyarakat

13.Perekaman KTP-el di Rumah Sakit

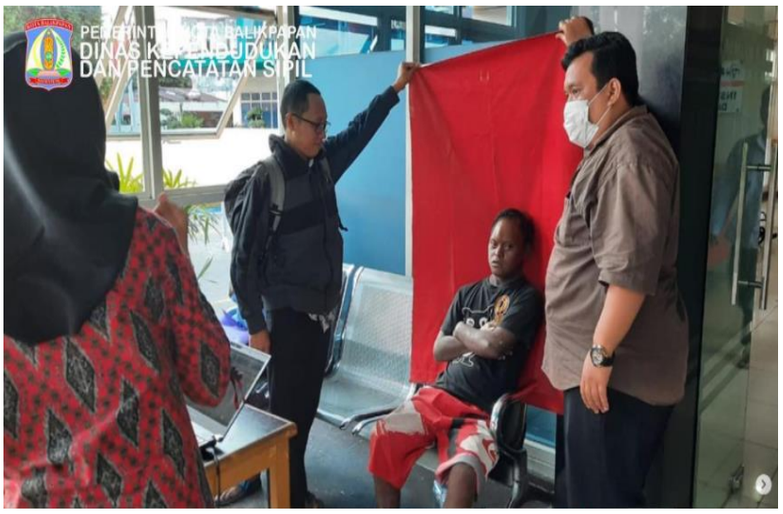

14.Perekaman KTP di Lapas

15.Pelayanan kegiatan pembuatan akte 3 in 1 (akte kelahiran, KIA, KK)

Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) masih menjadi salah satu focus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang di tahun 2022 ini mulai melayani penerbitan KIA dengan jemput bola di sekolah-sekolah di Balikpapan dan kerjasama dengan pihak Kelurahan se-Kota Balikpapan.

16. Rekapitulasi Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pihak ketiga

Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pihak Ketiga

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Nama dan Bidang Kerjasama
1	RSUD Kanujoso Djatiwibowo	Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2014	Persyaratan dan tata cara pelayanan Akta Kelahiran Online di Rumah Sakit dan Puskesmas 24 Jam
2	RSU Tk. II Dr. H. Hardjanto		
3	RSUD Balikpapan		
4	RS Restu Ibu		
5	RS Pertamina		
6	RS Siloam		
7	RS Balikpapan Baru		
8	RSKB Sayang Ibu		
9	RS Bhayangkara		
10	RSIA Permata Hati		
11	RSB Kasih Bunda		
12	RS HERMINA		
13	Poliklinik IBNU SINA		
14	Klinik Kesehatan Ibu & Anak Nabila		
15	Klinik Mitra Sehat		
16	Puskesmas 24 Jam		

17. Rekapitulasi Pemanfaatan Data Kependudukan dengan OPD

Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dengan OPD Terkait Dengan Pemanfaatan Data

No	OPD	Dasar Hukum	Nama dan Bidang Kerjasama
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el dalamlayanan Sistem Interkoneksi Data Kepegawaian antar Perangkat Daerah dengan Steakholder (SIDAK PEDAS)
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el dalam layanan Aplikasi e-Planning
3	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el untuk pelayanan PBB – P2
4	Dinas Kesehatan Kota	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el dalam Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) dan lingkup tugas DKK
5	Dinas Tenaga Kerja	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el dalamlayanan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISKA)

No	OPD	Dasar Hukum	Nama dan Bidang Kerjasama
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el dalam aplikasi seleksi beasiswa (Perguruan Tinggi) secara online bagi penduduk Kota Balikpapan
7	Dinas Perdagangan	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el dalam layanan aplikasi e-retribusi
8	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el dalaml ayanan Sistem Informasi Manajemen IMTN
9	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el dalam layanan aplikasi system informasi pemuda Balikpapan

Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang telah dilakukan yakni rencana tindak lanjut yang telah dilaksanakan dalam pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2022 dengan melakukan kegiatan pelayanan:

1. Pelayanan terintegrasi 3 in 1, 4 in 1, sampai 6 in 1 layanan dalam 1 paket (KTP, KK, Akta Kematian, akta perkawinan, akta lahir dan KIA)
2. Pembuatan KTP melalui on line.
3. Perekaman pembuatan KTP-el yang tidak merubah elemen data boleh diluar domisili.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) dipergunakan untuk percepatan pembuatan akte kelahiran.
5. Bangun Ekosistem : Data dan dokumen kependudukan dapat digunakan untuk semua keperluan.
6. Akta Kelahiran Online.
7. Pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan
8. Pindah penduduk tidak perlu pengantar RT dimohonkan melalui online
9. Penyajian data penduduk sampai tingkat kelurahan.
10. Face Recognition dengan foto KTP el untuk penegakan hukum.
11. DUKCAPIL GO DIGITAL yaitu semua dokumen ditandatangani secara elektronik.
12. Melakukan jemput bola pengambilan data anak sia Sekolah Dasar (SD) dengan mendatangi langsung ke sekolah.

Administrasi kependudukan berhubungan dengan kepemilikan dokumen penduduk yang tersimpan dalam arsip/berkas kependudukan memerlukan waktu dalam pencocokan data kependudukan, untuk menindak lanjuti hal tersebut maka Dinas Kependudukan di tahun 2019 telah melakukan DIGITALISASI BERKAS ARSIP KEPENDUDUKAN (DUKCAPIL GO DIGITAL)

BAB VI
PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan bertekad untuk semakin Go Digital dalam pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (Adminduk) di era digital sekarang masyarakat menginginkan pelayanan publik yang serba cepat termasuk layanan data adminduk. Melalui pelayanan yang serba cepat dan tidak bertele-tele, standar layanan yang diberikan Disdukcapil Kota Balikpapan mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. "Masyarakat senang misalnya membuat KTP elektronik dan akte kelahiran “tidak memerlukan waktu yang lama.

Dengan pelayanan yang berbasis elektronik (TTE) pelayanan yang cepat dan aman juga menjadi faktor kunci yang membawa perubahan paradigma pelayanan publik bidang Adminduk sehingga masyarakat dapat dilayani dari mana saja. Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, mendorong instansi/lembaga pemerintah untuk pemanfaatan sistem elektronik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan aman.

6.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Renja 2024

Dalam penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan secara Nasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2024 siap melaksanakan untuk :

1. Pembenahan sistem pelayanan agar mendapatkan data kependudukan yang akurat.
3. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan kependudukan dan pencatatan sipil, diantaranya dengan pelayanan gerai mal pelayanan publik (MPP), dan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).
4. Data kependudukan dan pencatatan sipil dipergunakan untuk merencanakan dan mengeksekusi program pemerintah.
5. Membuat sistem yang transparan agar miminimalisir kontak dengan petugas untuk mencegah adanya pungutan liar (pungli).
6. Meningkatkan kualitas SDM dengan memperbaiki mentalitas, integritas, dan kompetensi aparatur.
7. Menciptakan budaya kerja yang kompetitif dengan penerapan reward and punishment yang dilakukan secara terus menerus dan terukur.
8. Menghilangkan paradigma lama “ kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah:, untuk mewujudkan pelayanan yang membahagiakan.

Dari 7 point tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sudah dan telah melalukan melakukan pembenahan sistem pelayanan, menyiapkan gerai Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dipusatkan di Kantor DPMPTSP Kota Balikpapan dan sudah tersedia ADM di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Data kependudukan dan pencatatan sipil dipergunakan untuk merencanakan dan mengeksekusi program pemerintah, pelaksanaan permohonan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui "DARING" sehingga akan mengurangi tatap muka dengan masyarakat, dan mempermudah layanan kepada masyarakat peningkatan kualitas SDM dengan memperbaiki mentalitas, integritas, dan kompetensi aparatur akan diusulkan dalam BImbingan Teknis Aparatur pada tahun 2024, dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung SIAK Terpusat (pengadaan komputer).

6.2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2024 :

1. Bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Balikpapan untuk pelaporan peristiwa kematian yang belum dilapor sehingga bisa langsung diterbitkan akta kematian dengan Buku Pokok Pemakaman.
2. Membuka layanan on line pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA).
3. Jemput bola perekaman di Sekolah tingkat SLTA untuk pencapaian tingkat perekaman, dan di Lapas Balikpapan.
4. Jemput bola pelayanan pencetakan Kartu Keluarga (KK) dan KTP bagi masyarakat yang terkena musibah/bencana.
5. Melaksanakan percepatan program Identitas Kependudukan Digital (IKD).
6. Pencetakan dokumen kependudukan dalam pelayanan terintegrasi tidak dilakukan terpisah di pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, tetapi dilakukan oleh 1 (satu) operator.
7. Penuntasan target perekaman wajib KTP-el utama, yaitu wajib KTP melalui jemput bola.
8. Melakukan perekaman wajib KTP pemula tahun 2023 dan 2024 melalui perekaman ke sekolah-sekolah dan gerakan Dukcapil Goes To Campus.

Penyusunan Rencana Kerja yang disusun dengan kegiatan prioritas dan rutin sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik dengan rencana kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN.
2. Belanja operasional :

a. Belanja Bimtek.
b. Belanja barang : ATK, suku cadang, cetakan, makanan dan minuman, alat-alat listrik, koran, hibah blanko KTP-el.
c. Belanja Jasa : gaji naban, lembur Non PNS, honorarium lintas sector (kepala PA, operator PA, Kepala KUA se-Balikpapan dan operatot), telpon, fax, SMS center, SMS Gateway, paket pengiriman/surat, pajak kendaraan dinas.
d. Belanja pemeliharaan : Pemeliharaan kendaraan, penggantian suku cadang, BBM, pemeliharaan peralatan komputer dan jaringan, pemeliharaan peralatan kantor.
e. Belanja perjalanan dinas.
f. Belanja Modal.

Usulan Lintas Instansi yang diusulkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Forum Perangkat Daerah pada tanggal 7 Februari 2023 yakni :

1. Pengecatan gedung kantor
2. Pemasangan Wallpaper Ruang Pelayanan
3. Pembangunan Parkir kendaraan roda 2 (sepeda motor)
4. Pemasangan pintu otomatis lobby masuk kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2024 dengan melakukan kegiatan pelayanan dan terus berbenah baik dalam hal pelayanan maupun dalam penyederhanaan prosedur/birokrasi. Rancangan akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas serta usulan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Semoga Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2024 untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Balikpapan, 10 Agustus 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Balikpapan

TIRTA DEWI

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**16.265.000.000,00**							**16.604.183.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.265.000.000,00**							**16.604.183.500,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**16.265.000.000,00**							**16.604.183.500,00**	
1,	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**-**			**87 Nilai**	**14.978.006.000,00**						**-**	**15.819.063.367,00**	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			82 Nilai	7.201.452.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	7.300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	7.201.452.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		7.300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah*	-			84 Nilai	543.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				43 Orang	543.500.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			82 Nilai	4.937.166.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	5.435.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	775.279.590,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		950.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	1.965.083.200,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publikMewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		3.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	1.679.103.800,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	28.070.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	28.165.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	461.465.010,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			80 Nilai	413.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	413.200.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah*	-			82 Nilai	1.175.531.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	1.354.063.367,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	79.999.400,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	186.602.400,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	908.929.400,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		954.063.367,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*	-			82 Nilai	707.156.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	880.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	592.156.200,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		570.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				36 Unit	15.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	100.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		290.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2,	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk***	**-**			**91,45 %**	**249.756.500,00**						**-**	**375.120.133,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Presentase Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan*	-			100 %	249.756.500,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	-	-	375.120.133,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				3 Laporan	249.756.500,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	-		375.120.133,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik***	**-**			**100 %**	**1.037.237.500,00**						**-**	**410.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Presentase Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan*	-			100 %	445.624.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		**50.000.000,00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	445.624.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik MewujudkanBirokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		**50.000.000,00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Presentase Informasi Administrasi Kependudukan Yang Dikelola*	-			100 %	591.613.500,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	360.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	591.613.500,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		360.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	JUMLAH							**16.265.000.000,00**							**16.604.183.500,00**	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2024

TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Perwali 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan, melaksanakan tugas teknis di Bidang Perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi teknis lalu lintas dan parkir, tekni sangkutan dan terminal, teknis sarana dan teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas perlu disusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2024 dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2024 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan stakeholders yang ada. Rencana Kerja ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan rancangan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, kemudian menyusun agenda kerja tim penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan terakhir penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Tim penyusun dipersiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Adapun susunan tim penyusun terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai Ketua Tim, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai Sekretaris Tim, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi, Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Sarana Lalu Lintas dan PJU, Kepala Seksi Data Informasi dan Sistem Kontrol Kawasan Lalu Lintas, Kepala Bidang Angkutan, Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus, Kepala Seksi Angkutan Orang, Kepala Seksi Pengendalian Operasional, Kepala Bidang Perairan dan Udara, Kepala Seksi Angkutan Laut Sungai Danau dan Penyeberangan, Kepala Seksi Kepelabuhanan & Kebandarudaraan sebagai Anggota Penyusun, Kepala UPTD. dan Kepala Sub Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor, Kepala UPTD. dan Kepala Sub Tata Usaha Pengelola Parkir, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai Anggota Penyusun serta staf perwakilan dari bidang, seksi dan UPTD sebagai Anggota Pengumpul Data dan Pengetikan.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun data dan infomasi yang harus disiapkan antara lain : Peraturan Perundang-undangan yang terkait, dokumen-dokumen seperti RT/RW Kota Balikpapan, Renstra Kementerian Perhubungan serta Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, hasil evaluasi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan periode lalu.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.

1.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.
3. Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor _ Tahun 202x perihal Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
4. Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor _ Tahun 202x tentang Tim Penyusunan Rancana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 202x

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategis pembangunan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan yang telah digariskan dengan melihat prioritas kegiatan dan kemampuan anggaran.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yaitu untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD

Capaian kinerja renja perangkat daerah , merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan, maka capaian kinerja Renja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada akhir tahun 2022 adalah sebagaimana Tabel T-C.29. berikut;

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Balikpapan

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program dan Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)
								Target Kinerja dan Anggaran Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)	
2	**15**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**80**	**87,5**	**76**	**87,5**	**100**	**77**
2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90	86	86	86	96	87
2	15	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	89	100	100	100	100	0
2	15	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	86	86	86	96	87
2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	86	86	86	96	87
2	15	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	86	86	86	96	87

2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	81	81	81	95	80
2	**15**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi**	**93**	**113**	**85**	**113**	**100**	**87**
					Persentase load faktor angkutan orang umum	**62**					**47**
2	15	02	2,04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan	75	93	70	93	100	71
2	15	02	2,05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	75	92,08	67	92	100	69
2	15	02	2,02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	65	113	100	113	100	50
2	15	02	2,03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase penyediaan terminal penumpang angkutan jalan Type-C	55	33	33	33	60	40
2	15	02	2,06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	45	99	70	100	99	42
2	15	02	2,08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan	14	14	10	14	100	11
2	15	02	2,09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27	7	19	7	98	21
2	15	02	2,10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	55	52	51	52	95	52
2	15	02	2,14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	55	50	50	50	91	52
2	**15**	**03**		**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan**	**70**	**59**	**62**	**59**	**85**	**64**
2	15	03	2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	85	87	81	87	100	82
2	15	03	2.19	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase TUKS yang dilakukan pengawasan	35	31	31	31	89	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Indikator Kinerja Utama secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran. Suatu Indikator Kinerja Utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian Indikator Kinerja Utama daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Uraian rincian tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, beserta targetnya dapat disajikan sebagai Tabel T-C.30. dibawah ini :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kota Balikpapan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan.			78.08	78.32	78.56	78.80	79.04	78.66				
2	VC Ratio di Jalan Kota.			0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0.51				
3	Persentase sarana dan prasarana kedermagaan yang dikelola.			57%	59%	63%	64%	65%	62%				
4	Nilai SAKIP OPD.			76,79	77,25	78,75	79,25	80,00	76.14				
5	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.			27,00	28,75	30,50	32,25	34,00					
6	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi.			85%	87%	89%	91%	93%					
7	Persentase load faktor angkutan orang umum.			42%	47%	52%	57%	62%					
8		Persentase penggunaan moda transportasi umum di perkotaan.		4,2%	4,4%	4,8%	5,2%	5,5%					

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
9		Jumlah dermaga penyeberangan.		1	1	1	1	1	1				
10		Jumlah pelabuhan strategis.		4	4	4	4	4	4				
11			Rasio konektivitas kabupaten/kota.	0,62	0,62	0,62	0,62	0,69	0.52				
12			Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C.	35%	40%	45%	50%	55%	66.5%				
13			Terlaksananya pelayanan uji berkala.	15500	16000	16500	17000	17500	14342				
14			Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.	0	1%	0	0	1%					
15			Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota.	41%	42%	43%	44%	45%	41%				

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, bagi pelayanan Dinas Perhubungan selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Pembangunan terminal angkutan penumpang barang (Pembangunan Terminal Parkir, Depo Kontainer Pergudangan dan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)) belum terealisasi;
2. Pengembangan Dermaga Kampung Baru Tengah belum terealisasi;
3. Pengembangan Pelabuhan Somber (mengaktifkan kembali status Pelabuhan Somber untuk aktifitas penyeberangan) belum terealisasi;
4. Pembangunan Terminal Tipe-C (Pemindahan Terminal Damai ke lokasi baru di Jl. Asnawi Arbain) dan beberapa sub terminal belum terealisasi;
5. Penambahan Koridor Sarana Angkutan Umum Massal;

6. Minimnya ketersediaan jalur sepeda;
7. Minimnya presentase zebra cross dan pita penggaduh untuk zona aman sekolah;
8. Minimnya ketersediaan rambu jalan;
9. Minimnya penyediaan Area Traffic Control System (ATCS);
10. Tingginya pelaku Juru Parkir Liar pada lokasi parkir on street;
11. Belum optimalnya presentase pengujian kendaraan bermotor;
12. Belum tersedianya indikator Laik Fungsi Jalan dari sudut pandang manajemen rekayasa lalu lintas menyebabkan perencanaan manajemen lalu lintas dan pemenuhan sarana perlengkapan jalan dilaksanakan secara tidak terstruktur;
13. Belum tersedianya indikator Laik Fungsi Jalan dari sudut pandang manajemen rekayasa lalu lintas menyebabkan perencanaan manajemen lalu lintas dan pemenuhan sarana perlengkapan jalan dilaksanakan secara tidak terstruktur;
14. Pemenuhan estetika Penerangan Jalan Umum masih rendah;
15. Perencanaan dan penganggaran sektor perhubungan dengan stakholder lainnya belum sinergi; dan
16. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional belum terealisasi.

2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja PD

Dalam rangka mencapai visi *"Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman di Huni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"* dan misi ke-3 (tiga) Menyediakan lnfrastruktur Kota Yang Memadai, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai leading sektor merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Program Pengelolaan Pelayaran;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari perencanaan awal untuk dapat melaksanakan program/ kegiatan tersebut diatas sekurang-kurangnya dibutuhkan anggaran Rp.

94.961.762.000,- *(sembilan puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).* Perencanaan awal program/kegiatan dapat dilihat pada tabel T-C.31. berikut;

Tabel T-C.31.
Perencanaan Awal Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal Renja Tahun 2024	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)
Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota.	**2**	**15**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi** **Persentase load faktor angkutan orang umum**	**89** **52**	**58.406.159.969**
		2	15	02	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	32	80.000.000
		2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	55	34.173.659.969
		2	15	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase penyediaan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	45	5.700.000.000
		2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan	73	5.582.500.000
		2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	71	5.750.000.000
		2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	43	1.940.000.000
		2	15	02	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan	12	3.160.000.000
		2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23	1.900.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal Renja Tahun 2024	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)
		2	15	02	2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	53	70.000.000
		2	15	02	2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	53	50.000.000
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa pelayanan penyeberangan.	**2**	**15**	**03**		**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase pelayanan kepelabuhanan.**	**66**	**3.425.000.000**
		2	15	03	2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	83	3.425.000.000
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**2**	**15**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**78**	**33.130.602.031**
		2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88	16.790.796.886
		2	15	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88	1.327.200.000
		2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88	1.998.212.675
		2	15	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88	8.034.152.470
		2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83	4.980.240.000
								TOTAL	**94.961.762.000**

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan di diskusikan dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan Rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kota Balikpapan

Perangkat Daearah : Dinas Perhubungan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam hal ini Dinas Perhubungan merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penyedian infrastruktur transportasi. Transportasi merupakan sistem yang utuh, terdiri dari berbagai sub sistem yang berkaitan satu sama lain. Sub sistem ini meliputi jaringan pelayanan, jaringan infrastruktur dan fasilitas penunjang, sarana atau kendaraan/armada, peraturan dan pengaturan operasional serta manusia sebagai pelaku maupun pengguna yang menikmati manfaat. Sub sistem ini saling mempengaruhi satu sama lain di dalam suatu aturan tertentu, sehingga tidak mungkin berjalan sendiri–sendiri. Keterpaduan ini pada hakekatnya dapat menciptakan efisiensi dan efektifitasnya dalam bentuk kegunaan waktu, kegunaan tempat dan kegunaan wujud.

Dengan demikian transportasi yang merupakan sarana sangat penting dan strategis dalam berbagai perspektif yang tercermin pada semakin lancarnya mobilitas, baik orang maupun barang. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong serta penggerak bagi pertumbuhan wilayah potensial tetapi belum berkembang. Pembangunan perhubungan dalam realita berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan di bidang ini berperan penting pada kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu kebijakan pembangunan perhubungan harus senantiasa berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional maupun pada tatanan perekonomian global.

Dalam rangka pencapaian Tujuan 9 SDGs yaitu Industri, Inovasi dan Infrastruktur, maka Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, yaitu;

1. Jumlah dermaga penyeberangan;
2. Jumlah pelabuhan strategis.

Sedangkan Tujuan 11 SDGs (Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan), maka Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, yaitu;

1. Persentase penggunaan moda transportasi umum di perkotaan.

Perwujudan Tujuan 9 dan Tujuan 11 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu;

1. Meningkatnya tingkat pelayanan jalan, dengan indikator VC Ratio di Jalan Kota;
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa palayanan penyeberangan, dengan indikator Persentase sarana dan prasarana kedermagaan yang dikelola.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Berdasarkan Tema Perencanaan Pembangunan RPJMD 2021-2026, tema pembangunan masuk pada Tahun Ke-III/ 2024 yaitu Mempertahankan Kondusifitas untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan Perluasan Infrastruktur dan Pembangunan SDM untuk mendukung Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas Kota. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, merupakan sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yaitu;

1. Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota;
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa pelayanan penyeberangan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Program pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Program Pengelolaan Pelayaran;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematika dan terpadu untuk memperoleh hasil yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai suatu sasaran tertentu. Penentuan program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kinerja memegang peran yang sangat penting berdasarkan prinsip, pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan berkelanjutan, keberadilan, akuntabilitas, transparan dan kepastian hukum.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk periode Tahun 2024 merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut;

I. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ):
   1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
   2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
   3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe-C; Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
   4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
   5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan;
   6. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
   7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
   8. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
   9. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

II. Program Pengelolaan Pelayaran:

1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

III. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mendukung Visi Kota Balikpapan "*Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman",* dan Misi ke-3 (tiga) Kota Balikpapan: Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai, serta tema pembangunan Tahun Ke-III/ 2024 yaitu Mempertahankan Kondusifitas untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan Perluasan Infrastruktur dan Pembangunan SDM untuk mendukung Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan.

Dengan adanya penyusunan Rencana Kerja program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun perencanaan program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada tabel T-C.33. berikut;

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Balikpapan

Nama Perangkat : Dinas Perhubungan

Kode				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	**15**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi**	**Bpp**	**89**	**58.406.159.969**	**APBD**	**93**	**66.965.884.620**
					Persentase load faktor angkutan orang umum		**52**			**62**	
2	15	02	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan		32	80.000.000		0	0
2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan		55	34.173.659.969		60	39.080.884.620
2	15	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan		45	5.700.000.000		50	5.000.000.000

Kode				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					terminal penumpang angkutan jalan Tipe C						
2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan		73	5.582.500.000		75	5.650.000.000
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan		71	5.750.000.000		73	10.275.000.000
2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota		43	1.940.000.000		44	2.430.000.000
2	15	02	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan		12	3.160.000.000		13	3.160.000.000
2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		23	1.900.000.000		25	1.250.000.000
2	15	02	2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota		53	70.000.000		54	70.000.000
2	15	02	2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		53	50.000.000		54	50.000.000
2	**15**	**03**		**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**66**	**3.425.000.000**		**68**	**5.425.000.000**
2	15	03	2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan		83	3.425.000.000		84	5.425.000.000

Kode				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	**15**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**			**78**	**33.130.602.031**		**79**	**38.290.418.033**
2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		88	16.790.796.886		89	17.294.520.793
2	15	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0	0		88	5.000.000.000
2	15	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		88	1.327.200.000		89	1.459.920.000
2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		88	1.998.212.675		89	2.163.177.943
2	15	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0		81	400.000.000
2	15	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		88	8.034.152.470		89	7.986.863.297
2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		83	4.980.240.000		84	3.985.936.000,00
							TOTAL	**94.961.762.000**			**110.681.302.653**

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ditentukan oleh fungsi perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan memberikan arah bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan ditetapkan untuk menjebatani antara penelitian kebijakan dengan perumusan kebijakan, dan antara perumusan kebijakan dengan penerapan kebijakan. Disamping itu perencanaan dilakukan karena terbatasnya sumber daya dan dalam rangka untuk memperkecil atau mengurangi resiko yang timbul karena ketidakpastian dimasa mendatang.

Perencanaan perhubungan selalu berpegang kepada pendekatan kesisteman agar keterpaduan perangkat keras (hardware) seiring dan sejalan dengan perangkat lunak (software) serta pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Proses perencanaan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan merupakan bagian dari proses perencanaan secara makro nasional yang mempertemukan kepentingan sektoral dengan kepentingan regional dan lokal.

Semoga rencana kerja ini akan dapat memberikan pedoman dan arahan pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan bersama seluruh unit dan perangkat dalam lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas.

Balikpapan, Maret 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN

ELVIN JUNAIDI

RENCANA KERJA

TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2024, disusun berdasarkan ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Dari ketentuan diatas Rencana Kerja (Renja) Perangat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (*common goals*) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak pada Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2024 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2024.

Balikpapan, Februari 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika ,

ADAMIN SIREGAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I PENDAHULUAN		**1**
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	1
1.3	Maksud dan Tujuan	2
1.4	Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		**4**
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Perangkat Daerah	4
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah	27
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	50
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	74
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		**75**
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	75
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	77
3.3	Program dan Kegiatan	78
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		**96**
BAB V PENUTUP		**104**

DAFTAR TABEL

Tabel e.81	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S.D Tahun 2022 Diskominfo Kota Balikpapan	5
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2023	53
Tabel 2.2	Target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2024	58
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Diskominfo Kota Balikpapan	59
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	74
Tabel 3.1	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	76
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	84
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan	96

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (*common goals*) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak pada Perangkat Daerah. Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan RKPD Tahun 2021 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari pembuatan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2024 adalah untuk merumuskan rencana kerja untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1. Tersedianya Dokumen Penjabaran Renstra Diskominfo Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V

PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada akhir tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan telah melakukan Evaluasi terhasap Rencana Kerja (Renja) tahun 2022. Dari hasil evaluasi tersebut dapat kita lihat capaian baik pada Renja Tahun 2022 maupun capaian Renstra Dinas komunikasi dan informatika Kota Balikpapan tahun 2017 – 2021.

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

Target kinerja dimaksud menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan, maka capaian kinerja Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan pada akhir tahun 2022, adalah sebagaimana tabel berikut:

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Perangkat Daerah Diskominfo Kota Balikpapan

Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RKPD

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
											I		II		III		IV												
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	85	9.109.108.990			85	6.045.674.300	0	977.782.797	0	1.214.057.434	0	1.507.441.759	86,89	1.440.559.924	86,89	5.139.841.914	102%	85,02%	86,89	5.139.841.914	102%	56,43%	Diskominfo	Target capaian pada program ini di realisasikan dan telah mencapai target kinerja yang telah ditentukan pada awal Tahun 2022
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DISKOMINFO	Nilai	67	-			65	0	0	0	0	0	0	0	68,12	0	68,12	0	104,80%	0%	68,12	0	102%	0%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DISKOMINFO (Renstra, dan Renja, Renja dan Perubahan)	Dokumen					1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	0%	1	0	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW I Tahun 2022

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen					1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	0%	1	0	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW I Tahun 2022
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	Dokumen					1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100%	0%	1	0	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen					1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	0%	1	0	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW I Tahun 2022
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA	Dokumen					1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100%	0%	1	0	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP (LKJIP)	Dokumen					1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100%	0%	1	0	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II Tahun 2022
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja (evaluasi renstra dan evaluasi renja)	Dokumen					1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	0%	1	0	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW I Tahun 2022
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan administrasi keuangan perangkat daerah	N/A	85	6.655.000.000			85	5.001.536.000	0	906.253.970	0	1.115.783.559	0	1.201.873.769	86,65	1.010.372.601	86,65	4.234.283.899	102%	84,66%	86,65	4.234.283.899	102%	63,63%		Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	Dokumen					26	5.001.536.000	6	906.253.970	8	1.115.783.559	6	1.201.873.769	6	1.010.372.601	26	4.234.283.899	100%	84,66%	26	4.234.283.899	0%	0%		Sub kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap tw dan sudah memenuhi target capaian

																												pada TW IV Tahun 2022
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntansi dengan BPKD	Laporan					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dokumen					1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	0%	1	0	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW I Tahun 2022
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	Laporan					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan	Laporan					12	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	100%	0%	12	0	0%	0%		Sub kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap tw dan sudah memenuhi target capaian pada TW IV Tahun 2022
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	85	-			85	10.000.000	0	0	0	0	0	0	86,77	9.250.000	86,77	9.250.000	102%	93%	86,77	9.250.000	102%	0%		Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD	Dokumen					1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	4.625.000	1	4.625.000	100%	93%	1	4.625.000	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD	Dokumen					1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	4.625.000	1	4.625.000	100%	93%	1	4.625.000	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	85	165.000.000			85	37.260.000	0	0	0	0	0	37.050.000	86,98	0	86,98	37.050.000	102%	99%	86,98	37.050.000	102%	22%		Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarpras disiplin pegawai	alat					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan baju dinas beserta atributnya kelengkapannya	pegawai					50	37.260.000	0	0	46	0	0	37.050.000	0	0	46	37.050.000	92%	99%	46	37.050.000	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah direalisasikan pada TW III Tahun 2022 namun tidak mencapai target jumlah dikarenakan jumlah pagu anggaran yang tidak mencukupi untuk pengadaan seragam sejumlah 50.
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah DUPAK prakom	Prakom					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		

		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang meninggal	orang				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	Pegawai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	85	1.121.000.000			85	387.968.900	0	20.600.251	0	13.241.189	0	178.133.135	86,98	146.699.324	86,98	358.673.899	102%	92,45%	86,98	358.673.899	0%	32,00%	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis				7	7.990.000	0	0	7	0	0	7.990.000	0	0	7	7.990.000	100%	100 %	7	7.990.000	0%	0%	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II Tahun 2022
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	unit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	paket				1	149.978.900	0	0	1	3.975.000	0	50.892.300	0	76.068.000	1	130.935.300	100%	87%	1	130.935.300	0%	0%	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II Tahun 2022
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	jenis				2	20.000.000	0	0	2	0	0	17.150.500	0	1.500.000	2	18.650.500	100%	93%	2	18.650.500	0%	0%	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II dan III Tahun 2022
			Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	buku				50		0		30		20		0		50		100%		50		0%	0%	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buku					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	kotak					1200	10.000.000	0	0	0	0	165	0	81	9.990.000	246	9.990.000	21%	100 %	246	9.990.000	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah direalisasikan sebagian pada TW III terdiri dari 75 Dus air mineral 330 ltr dan 90 kotak snack serta pada tw IV di realisasikan terdiri dari 41 dus air mineral 330 ltr dan 40 kotak snack, terdapat kesalahan pada perhitungan dan perhitungan target kinerja pada penyusunan renja.
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan koordinasi luar dan dalam daerah	kali					100	200.000.000	10	20.600.251	14	9.266.189	26	102.100.335	14	59.141.324	64	191.108.099	64%	96%	64	191.108.099	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah direalisasikan sebagian pada TW I, TW II, TW III, dan TW IV realisasi keuangan mencapai 96% namun seatra target hanya 64% dikarenakan pagu tersebut hanya cukup untuk melakukan 64 kali perjalanan dinas (perubahan harga tiket, akomodasi dll)

		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah implementasi SPBE pada SKPD	dokumen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	85	320.000.000			85	40.010.000	0	0	0	0	0	0	86,98	39.543.770	86,98	39.543.770	102%	99%	86,98	39.543.770	102%	12%	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel	Jenis					2	20.000.000	0	0	0	0	0	0	2	20.000.000	2	20.000.000	100%	100%	2	20.000.000	0%	0%	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya	unit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud	paket					1	20.010.000	0	0	0	0	0	0	1	19.543.770	1	19.543.770	100%	98%	1	19.543.770	0%	0%	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas bangunan	Pos Jaga					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	344.108.990			85	255.142.000	0	35.168.939	0	56.327.704	0	49.307.463	86,93	90.312.826	86,93	231.116.932	102%	90,58%	86,93	231.116.932	0%	67,16%	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	Jenis					2	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1	313.000	1	313.000	50%	16%	1	313.000	0%	0%	Sub kegiatan ini direalisasikan pada TW IV Tahun 2022 dan hanya terealisasi 50% dikarenakan realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa					4	80.000.000	4	12.770.039	4	13.446.021	4	15.709.113	4	17.323.626	4	59.248.799	100%	74,06%	4	59.248.799	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada setiap TW secara rutin Tahun 2022
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan kelengkapan kantor	jenis					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan gedung kantor yang dibersihkan	gedung					1	173.142.000	1	22.398.900	1	42.881.683	1	33.598.350	1	72.676.200	1	171.555.133	100%	99%	1	171.555.133	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada setiap TW secara rutin Tahun 2022
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	504.000.000			85	313.757.400	0	15.759.637	0	28.704.982	0	41.077.392	86,93	144.381.403	86,93	229.923.414	102%	73,28%	86,93	229.923.414	102%	45,62%		Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	unit					3	109.975.000	2	4.783.890	3	23.530.591	3	14.336.323	3	30.429.586	3	73.080.390	100%	66%	3	73.080.390	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada setiap TW secara rutin Tahun 2022
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara (roda 2)	unit					2	133.790.400	2	10.975.747	2	5.174.391	2	26.741.069	2	44.002.728	2	86.893.935	100%	65%	2	86.893.935	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada setiap TW secara rutin Tahun 2022
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara (roda 4)	unit					4		2		4		4		4		4		100%		4		0%	0%		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana aparatur berupa peraltan dan mesin yang mendapatkan pemeliharaan (jenis	unit					2	4.992.000	0	0	1	0	1	0	0	4.992.000	2	4.992.000	100%	100 %	2	4.992.000	0%	0%		Sub kegiatan ini direalisasikan sebagaian pada TW II dan TW III Tahun 2022
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan	kali					2	65.000.000	0	0	0	0	1	0	1	64.957.089	2	64.957.089	100%	100 %	2	64.957.089	0%	0%		Sub kegiatan ini direalisasikan sebagaian pada TW III dan TW IV Tahun 2022
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya daran dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Gedung Kantor					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	-	-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		
	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara;	Persentase	80%	5.221.500.000			80%	4.258.000.000	60%	68.777.154	65%	633.116.121	75%	2.795.038.501	100%	667.672.487	100%	4.164.604.263	125%	98%	65%	4.164.604.263	81%	79,76%		Seluruh aplikasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan telah menggunakan domain pada portal balikpapan.go.id
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Persentase	90%	5.221.500.000			90%	4.258.000.000	60%	68.777.154	65%	633.116.121	75%	2.795.038.501	100%	667.672.487	100%	4.164.604.263	111%	98%	100%	4.164.604.263	111%	79,76%		Seluruh aplikasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan telah menggunakan domain pada portal balikpapan.go.id
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketersediaan domain balikpapan.go.id	domain					1	1.000.000	1	80.000	0	174.000	0	0	0	712.900	1	966.900	100%	97%	1	966.900	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW I Tahun 2022
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase aplikasi daring yang menggunakan subdomain dari balikpapan.go.id	Persentase					100%	10.000.000	25%	60.000	10%	427.000	5%	0	60%	4.583.400	100%	5.070.400	100%	51%	100%	5.070.400	0%	0%		sub kegiatan ini telah mencapai target kinerja pada TW IV tahun 2022

		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dokumen hasil audit jaringan intra daerah	Dokumen					1	4.247.000.000	0	68.637.154	0	632.515.121	0	2.795.038.501	1	662.376.187	1	4.158.566.963	100%	98%	1	4.158.566.963	0%	0%		sub kegiatan ini telah mencapai target kinerja pada TW IV tahun 2022
			Presentase ketersediaan konektivitas jaringan intra pemerintah daerah	Persentase					90%		0%		15%		70%		5%		90%		100%		90%		0%	0%		
	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi		80%	4.030.908.304			80%	2.452.250.000	40%	149.313.150	50%	668.663.513	65%	272.227.787	90%	1.314.843.201	90%	2.405.047.651	113%	98%	90%	2.405.047.651	113%	59,67%		Indikator kinerja program ini telah mencapai target pada TW IV tahun 2022
		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah		80%	4.030.908.304			80%	2.452.250.000	40%	149.313.150	50%	668.663.513	65%	272.227.787	100%	1.314.843.201	100%	2.405.047.651	125%	98%	100%	2.405.047.651	125%	59,67%		Indikator kinerja kegiatan ini telah mencapai target pada TW IV tahun 2022
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase capaian pelaksanaan peta jalan SPBE	Persentase					80%	90.000.000	30%	5.414.400	30%	5.079.000	70%	37.228.238	100%	39.410.222	100%	87.131.860	125%	97%	100%	87.131.860	0%	0%		Sub kegiatan ini telah memenuhi target kinerja pada TW IV Tahun 2022
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Presentase ketersediaan layanan pusat data	Persentase					90%	510.250.000	25%	120.000	90%	305.775.000	90%	0	90%	203.367.600	90%	509.262.600	100%	100%	90%	509.262.600	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II Tahun 2022

		Penyelenggaraam Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sistem komunikasi intra pemerintah daerah berbasis video audio	Perangkat Daerah					30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	100%	0%	30	-	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW III Tahun 2022
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah rakor data dan informasi elektronik	kali					1	50.000.000	0	0	0	2.184.100	0	0	1	40.942.400	1	43.126.500	100%	86%	1	43.126.500	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen hasil audit aplikasi	aplikasi					1	1.275.000.000	0	132.500.000	0	343.181.688	0	176.629.530	1	595.930.266	1	1.248.241.484	100%	98%	1	1.248.241.484	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II hingga TW IV Tahun 2022
			Jumlah aplikasi yang dibangun atau dikembangkan	aplikasi					7		4		0		1		3		8		114%		8		0%	0%		
			Jumlah aplikasi yang dipelihara	aplikasi					20		10		13		0		0		23		115%		23		0%	0%		
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	FGD monev kota cerdas	kali					2	295.000.000	0	5.855.600	1	667.000	1	6.737.100	0	280.486.802	2	293.746.502	100%	99,58%	2	293.746.502	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II dan Tw III Tahun 2022
			Jumlah video publikasi	video					1		0		1		0		0		1		100%		1		0%	0%		
			Peningkatan kapasitas dewan kota cerdas	kali					1		0		1		0		0		1		100%		1		0%	0%		
			Peningkatan kapasitas tim pelaksana kota cerdas	kali					1		0		1		0		0		1		100%		1		0%	0%		
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Pelatihan dan sertifikat GCIO	orang					2	60.000.000	0	0	1	0	1	36.124.694	1	19.977.036	3	56.101.730	150%	94%	3	56.101.730	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada Tw III dan TW IV Tahun 2022. Capaian realisasi ini dapat melebihi target karena 1 pelatihan di

																										laksanakan secara daring
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Dokumen revisi arsitektur dan peta jalan SPBE	dokumen					1	172.000.000	0	5.423.150	0	11.776.725	1	15.508.225	0	134.728.875	1	167.436.975	100%	97%	1	167.436.975	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada Tw III Tahun 2022
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase	80%	3.728.736.796			80%	3.644.482.800	0%	135.216.305	0%	895.714.853	0%	518.475.452	65%	1.676.470.494	65%	3.225.877.104	81%	89%	65%	3.225.877.104	81%	86,51%		Alasan tidak tercapainya persentase masyarakat yang belum mengetahui program prioritas 1. Pada tahun 2022 anggaran publikasi pada DIskominfo Lebih banyak digunakan untuk permintaan publikasi acara ceremonial (seperti ucapan - ucapan selamat datang, hari besar rutin, kunjungan Presiden, PKK dan event nasional lainnya yang dilaksanakan di Balikpapan) yang dipublikasikan daripada program strategis Pemerintah Kota. 2. Keterbatasan SDM, pada tahun 2022 Diskominfo memiliki 4 orang tim peliput dan Publikasi (Jurnalis, Kameramen, Videografer dan

																												Designer Grafis) dengan kondisi terbatas, peliputan dan publikasi semakin tidak dapat berjalan maksimal dikarenakan ada 2 orang dari tim ini yang mengundurkan diri (videografer dan designer grafis) dan tidak kami ganti dikarenakan ada nya kebijakan BKPSDM terkait tenaga bantu. 3. Walaupun telah diback up dengan penambahan anggaran APBD P di pengelolaan konten dan publikasi, hal ini tidak dapat mendukung secara maksimal dikarenakan pengesahan APBD P baru dilaksanakan pada TW IV
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi	persentase	80%	3.728.736.796			80%	3.644.482.800	0%	135.216.305	0%	895.714.853	0%	518.475.452	80%	1.676.470.494	80%	3.225.877.104	100%	89%	80%	3.225.877.104	100%	86,51%		Kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022

			komunikasi (STRAKOM)																							
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Kebijakan	dokumen				1	55.750.000	0	0	0	23.028.000	0	0	0	27.913.012	0	50.941.012	0%	91%	0	50.941.012	0%	0%		Dokumen kebijakan terkait Raperwal tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 masih dalam tahap harmonisasi di bagian Hukum dikarenakan adanya wacana dari BPBD untuk mengambil alih layanan 112 ini dari Diskominfo ke BPBD dan menunggu kesiapan BPBD terkait peralihan tersebut.
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan hasil pemantauan isu publik di media massa dan media sosial	Laporan				1	238.000.000	0	27.451.130	0	55.278.186	0	40.159.845	1	66.749.488	1	189.638.649	100%	80%	1	189.638.649	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
			Jumlah laporan NTPD 112	Laporan				1		0		0		0		1		1		100%		1		0%	0%		
			Jumlah laporan pemantauan aduan masyarakat	Laporan				1		0		0		0		1		1		100%		1		0%	0%		
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring informasi	dokumen				1	210.975.000	0	3.483.150	0	6.824.725	0	5.163.804	1	186.983.275	1	202.454.954	100%	96%	1	202.454.954	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
			Jumlah dokumen penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	dokumen				1		0		0		0		1		1		100%		1		0%	0%		

		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten audio	konten					25	369.000.000	3	27.262.025	8	37.065.342	9	82.482.303	5	177.648.768	25	324.458.438	100%	88%	25	324.458.438	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk konten berita teks hanya terealisasi 71% dikarenakan personel yang mengerjakan berita teks juga melaksanakan pekerjaan pembuatan naskah iklan/caption/naskah komunikasi lainnya, untuk realisasi Jumlah konten audio visual jauh melebihi target dikarenakan pada saat APBD P perhitungan lebih fokus pada perhitungan kebutuhan anggaran sehingga target renja tidak ikut terubah.
			Jumlah konten audio visual	konten					10		3		4		9		152		168		1680 %		168		0%	0%		
			Jumlah konten berita teks	konten					480		80		87		82		94		343		71%		343		0%	0%		
			Jumlah konten design 2 dimensi	konten					480		75		81		137		147		440		92%		440		0%	0%		
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi media luar ruang	publikasi luar ruang					121	2.200.496.800	31	74.300.000	35	557.648.500	13	337.051.500	48	965.804.000	127	1.934.804.000	105%	88%	127	1.934.804.000	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk kegiatan siaran
			Jumlah publikasi media massa cetak	media cetak					50		19		7		10		20		56		112%		56		0%	0%		
			Jumlah publikasi media massa online	publikasi online					160		40		40		40		80		200		125%		200		0%	0%		

			Jumlah publikasi media massa radio	publikasi radio					72		5		24		19		14		62		86%		62		0%	0%		keliling tidak tercapai dikarenakan agenda kegiatan yang cukup padat dan keterbatasan SDM dikarenakan SDM yang melaksanakan Siaran Keliling juga melaksanakan peliputan
			Jumlah publikasi media massa televisi	media televisi					14		0		0		17		3		20		143%		20		0%	0%		
			Jumlah siaran keliling	siaran keliling					24		0		0		0		3		3		13%		3		0%	0%		
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah monev pelayanan informasi publik	monev					1	88.750.000	0	2.720.000	0	-	1	4.014.500	0	75.438.151	1	82.172.651	100%	92,59%	1	82.172.651	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan sebagian pada TW III Tahun 2022 namun untuk indikator jumlah uji konsekuensi tidak ada dikarenakan tidak ada Perangkat Daerah yang mengusulkan Uji Konsekuensi untuk Daftar Informasi Dikecualikan namun untuk rapat kegiatan telah dilaksanakan pada TW IV Tahun 2022, dan telah dilaksanakan sosialisasi bimtek dan monev seluruh perangkat daerah dan hasilnya belum ada usulan baru karena sk
			Jumlah penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik	penilaian					1		0		0		1		0		1		100%		1		0%	0%		
			Jumlah rakor	rakor					1		0		0		1		0		1		100%		1		0%	0%		
			Jumlah uji konsekuensi	uji konsekuensi					1		0		0		0		0		0		0%		0		0%	0%		

																											informasi dikecualikan tahun 2022 masih relevan.
		Layanan Hubungan Media	Jumlah konferensi pers; jumlah Bimtek wartawan; jumlah kegiatan forum media massa	konferensi pers					0	40.500.000	0	0	0	0	0	791.000	0	17.145.500	0	17.936.500	0%	44,29%	0	17.936.500	0%	0%		Pada sub kegiatan ini tidak dilaksanakan konferensi pers dikarenakan kegiatan tersebut masih menjadi bagian pekerjaan dari humas dan protokol Setdakot Balikpapan sehingga untuk mendukung sub kegiatan layanan hubungan media maka dilaksanakan kegiatan pertemuan dengan media massa pada TW IV Tahun 2022, dan pada saat penyusunan APBD perubahan perhitungan lebih fokus pada perhitungan kebutuhan anggaran sehingga target renja tidak ikut terubah yang semestinya memiliki target kinerja sebanyak 2 kali pertemuan media massa.

		Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen manajemen komunikasi krisis	dokumen					1	15.625.000	0	0	0	8.857.600	0	0	1	6.038.300	1	14.895.900	100%	95%	1	14.895.900	0%	0%		Target Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Bimtek sumber daya komunikasi publik	Bimtek					2	49.986.000	0	0	0	0	1	0	1	36.225.000	2	36.225.000	100%	72%	2	36.225.000	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW III dan IV Tahun 2022
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah belanja sewa aplikasi NTPD 112	paket					1	375.400.000	1	0	0	207.012.500	0	48.812.500	0	116.525.000	1	372.350.000	100%	99%	1	372.350.000	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW III Tahun 2022 dan telah mencapai target sebagian namun untuk anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana digeser ke belanja survei pada APBD perubahan.
			Jumlah pemeliharaan rangka media luar ruang	pemeliharaan					6		0	0	0		0		0		0		0%		0		0%	0%		
			Jumlah pengadaan alat-alat studio	pengadaan					2		0	2	0		0		0		2		100%		2		0%	0%		
			Laptop editing video	laptop					2		0	2	0		0		0		2		100%		2		0%	0%		
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	90%	401.829.005			80%	271.900.000	5%	3.680.726	40%	121.689.500	45%	53.482.493	95%	70.683.578	95%	249.536.297	119%	91,78%	1	249.536.297	106%	62,10%		Realisasi melebihi target dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimtek statistik sektoral serta pendampingan dari BPS selaku pembina data daerah.

		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data	Persentase	80%	401.829.005			50%	271.900.000	5%	3.680.726	20%	121.689.500	45%	53.482.493	95%	70.683.578	95%	249.536.297	190%	91,78%	95%	249.536.297	119%	62,10%		Realisasi melebihi target dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimtek statistik sektoral serta pendampingan dari BPS selaku pembina data daerah
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Publikasi Data Statistik Sektoral	buku					1	122.000.000	0	3.680.726	0	4.909.500	0	35.178.793	1	64.178.578	1	107.947.597	100%	88,48%	1	107.947.597	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Bimtek Statistik Bagi Perangkat Daerah	bimtek					1	100.000.000	1	0	0	78.480.000	0	8.684.000	0	6.505.000	1	93.669.000	100%	94%	1	93.669.000	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW I Tahun 2022
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral Perangkat Daerah	dokumen					1	49.900.000	0	0	0	38.300.000	1	9.619.700	0	-	1	47.919.700	100%	96%	1	47.919.700	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW III Tahun 2022
	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;	Persentase	80%	688.656.259			80%	402.990.000	15%	100.000	20%	1.389.200	40%	151.844.000	100%	242.519.800	100%	395.853.000	125%	98,23%	100%	395.853.000	125%	57,48%		

		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	Persentase	80%	688.656.259			80%	402.990.000	15%	100.000	25%	1.389.200	50%	151.844.000	100%	242.519.800	100%	395.853.000	125%	98,23%	100%	395.853.000	125,0%	57,48%		
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	dokumen					1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	100%	100%	1	50.000.000	0%	0%		sub kegiatan ini telah memenuhi target pada TW IV Tahun 2022
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan	dokumen					1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	100%	100%	1	50.000.000	0%	0%		sub kegiatan ini telah memenuhi target pada TW IV Tahun 2022
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dokumen hasil audit keamanan TIK	dokumen					1	102.990.000	0	100.000	0	698.000	0	0	1	100.436.800	1	101.234.800	100%	98,30%	1	101.234.800	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini direalisasikan pada TW IV Tahun 2022 serta jumlah penangangan insiden keamanan informasi telah tercapai sesuai target pada TW I dan TW II Tahun 2022
			Jumlah penanganan insiden keamanan informasi	kali					2		1		1		0		0		2		100%		2		0%	0%		
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan sertifikat elektronik	ASN					2000	200.000.000	148	0	0	691.200	500	151.844.000	1639	42.083.000	2287	194.618.200	114%	97,31%	2287	194.618.200	0%	0%		Sub kegiatan ini sudah tercapai pada TW I, III, dan IV Tahun 2022

Rata-rata capaian kinerja (%)	92,69 %	89,93%			14,76%	8,12 %		
Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN	111,85%	88,89%			0%	0%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN	113,19%	85,09%			91,73%	45%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	110,79%	93,24%			101%	66,99%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah

Penjabaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja yang telah dilaksanakan. Berdasarkan Tabel E.81 Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2022 diatas yang merupakan evaluasi hasil Renja Sampai dengan akhir Triwulan IV, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

1. Total rata – rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh sub kegiatan adalah 111,92 % dengan predikat kinerja “sangat tinggi”
2. Total rata – rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan adalah 113,19 % dengan predikat kinerja “sangat tinggi”
3. Total rata – rata capaian kinerja dengan anggaran dari seluruh program adalah 110,79 % dengan predikat “sangat tingggi”

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indicator program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2022 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2022), adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Program **:** IKM Internal Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 102% dengan realisasi nilai 86,89 dari target IKM Internal Perangkat Daerah dengan nilai 85.

Dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat 4 (empat) kegiatan yakni :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai SAKIP DISKOMINFO

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 104,8% dengan realisasi nilai 68,12 dari target Nilai SAKIP Diskominfo dengan nilai 67.

Dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan yakni :

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen perencanaan DISKOMINFO (Renstra, dan Renja, Renja dan Perubahan)

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target dokumen perencanaan Diskominfo sebanyak 1 dokumen.

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen RKA

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target dokumen RKA sebanyak 1 dokumen.

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen Perubahan RKA

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target dokumen Perubahan RKA sebanyak 1 dokumen.

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen DPA

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target dokumen DPA sebanyak 1 dokumen.

1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen Perubahan DPA

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target dokumen Perubahan DPA sebanyak 1 dokumen.

1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen SAKIP (LKJIP)

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target dokumen SAKIP (LKJIP) sebanyak 1 dokumen.

1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen evaluasi kinerja (evaluasi renstra dan evaluasi renja)

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target dokumen Perubahan evaluasi kinerja sebanyak 1 dokumen.

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 102% dengan realisasi kinerja nilai IKM 86,5 dari target kinerja Nilai IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 85.

Dari kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yakni :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat baik” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 26 dokumen dari target kinerja dokumen gaji dan tunjangan ASN sebanyak 26 dokumen.

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat baik” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen

1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan keuangan bulanan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat baik” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja laporan keuangan bulanan sebanyak 1 dokumen.

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi’ dengan capaian kinerja 102% dengan realisasi kinerja nilai IKM 86,77 dari target kinerja Nilai IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar 85.

Pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdapat 2 (dua) sub kegiatan yakni :

1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator sub Kegiatan :

Dokumen RKBMD

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat baik" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja dokumen RKBMD sebanyak 1 dokumen.

1.3.2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat baik" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD bulanan sebanyak 1 dokumen.

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 102% dengan realisasi kinerja nilai IKM 86,98 dari target kinerja nilai IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 85.

Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 1 (satu) sub kegiatan yakni :

1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah pegawai yang mendapatkan baju dinas beserta atributnya kelengkapannya

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 92% dengan realisasi 46 pegawai dari target kinerja Jumlah pegawai yang mendapatkan baju dinas beserta atributnya kelengkapannya sebanyak 50 pegawai.

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 102% dengan realisasi kinerja nilai IKM 86,98 dari target kinerja IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 85.

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 1 (lima) sub kegiatan yakni :

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat baik” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 7 jenis dari target kinerja Jumlah jenis komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 7 jenis.

1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah bahan logistik kantor

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat baik” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 paket dari target kinerja Jumlah bahan logistik kantor sebanyak 1 paket.

1.5.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan dan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat baik” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 2 jenis dan 50 buku dari target kinerja Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan sebanyak 2

jenis dan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan sebanyak 50 buku.

1.5.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat rendah” dengan capaian kinerja 21% dengan realisasi kinerja 246 dari target kinerja Jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 1200 kotak. Sub kegiatan ini sudah direalisasikan sebagian pada TW III terdiri dari 75 Dus air mineral 330 ltr dan 90 kotak snack serta pada tw IV di realisasikan terdiri dari 41 dus air mineral 330 ltr dan 40 kotak snack, terdapat kesalahan pada perhitungan dan perhitungan target kinerja pada penyusunan renja.

1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Frekuensi rapat dan koordinasi luar dan dalam daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “rendah” dengan capaiakn kinerj 64% dngan realisasi 64 kali dari target kinerja Frekuensi rapat dan koordinasi luar dan dalam daerah sebanyak 100 kali.Sub kegiatan ini sudah direalisasikan sebagian pada TW I, TW II, TW III, dan TW IV realisasi keuangan mencapai 96% namun capaian target kinerja hanya 64% dikarenakan pagu tersebut hanya cukup untuk melakukan 64 kali perjalanan dinas (perubahan harga tiket, akomodasi dll)

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 102% dengan realisasi kinerja nilai IKM 86,98 dari target kinerja IKM Layanan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 85.

Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat 2 (dua) sub kegiatan yakni :

1.6.1 Pengadaan Mebel

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis mebel

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi' dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 2 Jenis dari target kinerja Jumlah Jenis Mebel sebanyak 2 jenis.

1.6.2 Pengadaan Aset Tak Berwujud

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah aset tak berwujud

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi' dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 aset dari target kinerja Jumlah aset tak berwujud sebanyak 1 aset.

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 102% dengan realisasi kinerja nilai IKM 86,93 dari target kinerja IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 85.

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yakni :

1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis surat menyurat

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "rendah" dengan capaian kinerja 50% dengan realisasi kinerja 1 jenis dari target kinerja Jumlah jenis surat

menyurat sebanyak 2 jenis. Sub kegiatan ini direalisasikan pada TW IV Tahun 2022 dan hanya terealisasi 50% dikarenakan realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan.

1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 4 jenis dari target kinerja Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 4 jenis.

1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Luasan gedung kantor yang dibersihkan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 gedung dari target kinerja Luasan gedung kantor yang dibersihkan sebanyak 1 gedung.

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 102% dengan realisasi kinerja nilai IKM 86,93 dari target kinerja IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 85.

Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan terdapat 4 (empat) sub kegiatan, yakni :

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Keegiatan :

Jumlah Kendaraan yang dipelihara

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 3 unit dari target kinerja Jumlah Kendaraan yang dipelihara sebanyak 3 unit.

1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara (roda 2) dan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara (roda 4)

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 2 dan 4 unit dari target kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara (roda 2) dan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara (roda 4) sebanyak 2 dan 4 unit.

1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah sarana dan prasarana aparatur berupa peraltan dan mesin yang mendapatkan pemeliharaan (jenis)

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 2 unit dari target kinerja Jumlah sarana dan prasarana aparatur berupa peralatan dan mesin yang mendapatkan pemeliharaan (jenis) sebanyak 2 unit.

1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

Frekuensi pemeliharaan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 2 kali dari target kinerja Frekuensi pemeliharaan sebanyak 2 kali.

2. Program Aplikasi Informatika

Indikator Program I :

Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 125% dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara sebesar 100%.

Indikator Program II :

Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 113% dengan realisasi kinerja 90% dari target kinerja Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi sebesar 80%.

Dari Program Aplikasi Informatika terdapat 2 (dua) kegiatan yakni :

2.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015

Evaluasi Hasil :

Predikat Kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 111% dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 sebesar 90%.

Pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yakni :

2.1.1 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Ketersediaan domain balikpapan.go.id

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 domain dari target kinerja Ketersediaan domain balikpapan.go.id sebanyak 1 domain.

2.1.2 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Presentase aplikasi daring yang menggunakan subdomain dari balikpapan.go.id

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja Presentase aplikasi daring yang menggunakan subdomain dari balikpapan.go.id sebesar 100%.

2.1.3 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Dokumen hasil audit jaringan intra daerah dan Presentase ketersediaan konektivitas jaringan intra pemerintah daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Dokumen hasil audit jaringan intra daerah sebanyak 1 dokumen dan dengan capaian kinerja 106% dengan realisasi kinerja 95% dari target kinerja Presentase ketersediaan konektivitas jaringan intra pemerintah daerah sebesar 90%.

2.2 Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 125% dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah sebesar 80%.

Pada kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat 8 (delapan) sub kegiatan yakni:

2.2.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Presentase capaian pelaksanaan peta jalan SPBE

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 125% dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja Presentase capaian pelaksanaan peta jalan SPBE sebesar 100%.

2.2.2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Presentase ketersediaan layanan pusat data

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinernya 90% dari target kinerja Presentase ketersediaan layanan pusat data sebesar 90%.

2.2.3 Penyelenggaraam Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sistem komunikasi intra pemerintah daerah berbasis video audio

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 30 Perangkat Daerah dari target kinerja Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sistem komunikasi intra pemerintah daerah berbasis video audio sebanyak 30 Perangkat Daerah.

2.2.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah rakor data dan informasi elektronik

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 kali dari target kinerja Jumlah rakor data dan informasi elektronik sebanyak 1 kali.

2.2.5 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Sub Kegiatan :

Dokumen hasil audit aplikasi, Jumlah aplikasi yang dibangun atau dikembangkan, Jumlah aplikasi yang dipelihara

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Dokumen hasil audit aplikasi sebanyak 1 dokumen. Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 114% dengan realisasi kinerja 8 Aplikasi dari target kinerja Jumlah aplikasi yang dibangun atau dikembangkan sebanyak 7 aplikasi. Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 115% dengan realisasi kinerja 23 Aplikasi dari target kinerja Jumlah aplikasi yang dipelihara sebanyak 20 Aplikasi.

2.2.6 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Indikator Sub Kegiatan :

FGD monev kota cerdas, Jumlah video publikasi, Peningkatan kapasitas dewan kota cerdas, Peningkatan kapasitas tim pelaksana kota cerdas

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 2 kali FGD, 1 Video, 1 kali peningkatan kapasitas, dewan Kota Cerdas, 1 Kali peningkatan kapasitas tim pelaksana kota cerdas dari target kinerja FGD monev kota cerdas sebanyak 2 kali, Jumlah video publikasi sebanyak 1 video, Peningkatan kapasitas dewan kota cerdas sebanyak 1 kali, dan Peningkatan kapasitas tim pelaksana kota cerdas sebanyak 1 kali.

2.2.7 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Indikator Sub Kegiatan :

Pelatihan dan sertifikat GCIO

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 150% dengan realisasi kinerja 3 kali pelatihan dan sertifikat dari target kinerja Pelatihan dan sertifikat GCIO sebanyak 3 kali.

2.2.8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

Indikator Sub Kegiatan :

Dokumen revisi arsitektur dan peta jalan SPBE

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Dokumen revisi arsitektur dan peta jalan SPBE sebanyak 1 dokumen.

3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Program :

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "tinggi" dengan capaian kinerja 81% dengan realisasi kinerja 65% dari target kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 80%. Target kinerja program ini tidak tercapai dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi yakni :

- Pada tahun 2022 anggaran publikasi pada DIskominfo Lebih banyak digunakan untuk permintaan publikasi acara ceremonial (seperti ucapan - ucapan selamat datang, hari besar rutin, kunjungan Presiden, PKK dan event nasional lainnya yang dilaksanakan di Balikpapan) yang dipublikasikan daripada program strategis Pemerintah Kota.
- Keterbatasan SDM, pada tahun 2022 Diskominfo memiliki 4 orang tim peliput dan Publikasi (Jurnalis, Kameramen, Videografer dan Designer Grafis) dengan kondisi terbatas, peliputan dan publikasi semakin tidak

dapat berjalan maksimal dikarenakan ada 2 orang dari tim ini yang mengundurkan diri (videografer dan designer grafis) dan tidak kami ganti dikarenakan ada nya kebijakan BKPSDM terkait tenaga bantu.

- Walaupun telah diback up dengan penambahan anggaran APBD P di pengelolaan konten dan publikasi, hal ini tidak dapat mendukung secara maksimal dikarenakan pengesahan APBD P baru dilaksanakan pada TW IV

Dari Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdapat 1 (satu) kegiatan yakni :

3.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM).

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 80% dari target kinerja Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) sebesar 80%.

Dari kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat 10 (sepuluh) sub kegiatan yakni **:**

3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Kebijakan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat rendah” dengan capaian kinerja 0% dengan kinerja yang tidak terealisasi dari target kinerja yakni 1 Dokumen kebijakan. Dokumen kebijakan terkait Raperwal tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 masih dalam tahap harmonisasi di bagian Hukum dikarenakan adanya wacana dari BPBD untuk mengambil alih layanan 112 ini dari Diskominfo ke BPBD dan menunggu kesiapan BPBD terkait peralihan tersebut. Sehingga target dokumen kebijakan ini belum bisa di realisasikan pada tahun 2022.

3.1.2 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan hasil pemantauan isu publik di media massa dan media social, Jumlah laporan NTPD 112, Jumlah laporan pemantauan aduan masyarakat.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 laporan hasil pemantauan isu publik, 1 laporan NTPD 112, dan 1 laporan pemantauan aduan masyarakat dari target kinerja yakni 1 laporan hasil pemantauan isu publik di media massa dan media social, 1 laporan NTPD 112, 1 laporan pemantauan aduan masyarakat.

3.1.3 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Monitoring informasi dan Jumlah dokumen penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dari realisasi 2 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Monitoring informasi dan Jumlah dokumen penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah sebanyak 2 dokumen.

3.1.4 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah konten audio, Jumlah konten audio visual, Jumlah konten berita teks, dan Jumlah konten design 2 dimensi

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja sebanyak 25 konten dari target kinerja Jumlah konten audio sebanyak 25. Predikat kinerja "sangat tinggi: dengan capaian kinerja 1680% dengan realisasi kinerja 168 konten dari target kinerja Jumlah konten audio visual sebanyak 19 konten. Predikat kinerja "sedang" dengan capaian kinerja 71% dengan realisasi kinerja 343 konten dari target kinerja Jumlah Konten berita teks sebanyak 480 konten. Predikat kinerja "sangat

tinggi" dengan capaian kinerja 92% dengan realisasi kinerja sebanyak 440 konten dari target kinerja Jumlah konten design 2 dimensi sebanyak 480 konten.

Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk konten berita teks hanya terealisasi 71% dikarenakan personel yang mengerjakan berita teks juga melaksanakan pekerjaan pembuatan naskah iklan/caption/naskah komunikasi lainnya, untuk realisasi Jumlah konten audio visual jauh melebihi target dikarenakan pada saat APBD P perhitungan lebih fokus pada perhitungan kebutuhan anggaran sehingga target renja tidak ikut terubah.

3.1.5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah publikasi media luar ruang, Jumlah publikasi media massa cetak, Jumlah publikasi media massa online, Jumlah publikasi media massa radio, Jumlah publikasi media massa televisi, dan Jumlah siaran keliling.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 105% dengan realisasi kinerja 127 kali dari target kinerja Jumlah publikasi media luar ruang sebanyak 121 kali. Pedikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian 112% dengan realisasi kinerja sebanyak 56 kali dari target kinerja Jumlah publikasi media massa cetak sebanyak 56 kali. Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 125% dengan realisasi kinerja sebanyak 200 kali dari target kinerja Jumlah publikasi media massa online sebanyak 160 kali. Predikat kinerja "tinggi" dengan capaian kinerja 86% dengan realisasi kinerja sebanyak 62 kali dati target kinerja Jumlah publikasi media massa radio sebanyak 72 kali. Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 143% dengan realisasi kinerja sebanyak 20 kali dari target kinerja Jumlah publikasi media massa televisi sebanyak 14 kali. Predikat kinerja "sangat rendah" dengan capaian kinerja 13% dengan realisasi kinerja 3 kali dari target kinerja Jumlah siaran keliling sebanyak 24 kali. Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk kegiatan siaran keliling tidak tercapai dikarenakan agenda kegiatan yang cukup padat dan keterbatasan SDM dikarenakan SDM yang melaksanakan Siaran Keliling juga melaksanakan peliputan.

3.1.6 Pelayanan Informasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah monev pelayanan informasi publik, Jumlah penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik, Jumlah rakor dan Jumlah Uji Konsekuensi.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 kali dari target kinerja Jumlah monev pelayanan informasi publik sebanyak 1 kali. Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 kali dari target kinerja Jumlah penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi public sebanyak 1 kali. Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 kali dari target kinerja Jumlah Rakor sebanyak 1 kali. Predikat kinerja “sangat rendah” dikarenakan target kinerja yang tidak tecapai (0%) dari target kinerja Uji Konsekuensi sebanyak 1 kali. Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan sebagian pada TW III Tahun 2022 namun untuk indikator jumlah uji konsekuensi tidak ada dikarenakan tidak ada Perangkat Daerah yang mengusulkan Uji Konsekuensi untuk Daftar Informasi Dikecualikan namun untuk rapat kegiatan telah dilaksanakan pada TW IV Tahun 2022.

3.1.7 Layanan Hubungan Media

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah konferensi pers

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat rendah” dikarenkan pada sub kegiatan ini tidak direalisasikan kegiatan konferensi pers sesuai dengan indikator kinerja pada renja. Pada sub kegiatan ini tidak dilaksanakan konferensi pers dikarenakan kegiatan tersebut masih menjadi bagian pekerjaan dari humas dan protokol Setdakot Balikpapan sehingga untuk mendukung sub kegiatan layanan hubungan media maka dilaksanakan kegiatan pertemuan dengan media massa pada TW IV Tahun 2022.

3.1.8 Manajemen Komunikasi Krisis

Indikator Sub Kegiatan :

Dokumen manajemen komunikasi krisis

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja sebanyak 1 dokumen dari target Dokumen manajemen komunikasi krisis sebanyak 1 dokumen.

3.1.9 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Bimtek sumber daya komunikasi publik

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi 2 bimtek dari target kinerja Jumlah Bimtek sumber daya komunikasi publik sebanyak 2 kali.

3.1.10 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah belanja sewa aplikasi NTPD 112, Jumlah pemeliharaan rangka media luar ruang, Jumlah pengadaan alat-alat studio, dan Laptop editing video.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 kali dari target kinerja Jumlah belanja sewa aplikasi NTPD 112. Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 2 pengadaan dari target kinerja Jumlah pengadaan alat-alat studio sebanyak 2 pengadaan. Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja sebanyak 2 laptop dari target kinerja Laptop editing video sebanyak 2. Predikagt kinerja sangan rendah (0%) untuk indikator Jumlah pemeliharaan rangka media luar ruang dikarenakan Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW III Tahun 2022 dan telah mencapai target sebagian namun untuk anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana digeser ke belanja survei pada APBD perubahan.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator Program :

Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 119% dengan realisasi kinerja 95% dari target kinerja Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sebesar 80%.

Dari Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdapat 1 (satu) kegiatan yakni :

4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 190% dengan realisasi kinerja 95% dari target kinerja Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data sebesar 50%.

Dari Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota terdapat 3 (tiga) sub kegiatan :

4.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Buku Publikasi Data Statistik Sektoral

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 buku dari target kinerja Jumlah Buku Publikasi Data Statistik Sektoral sebanyak 1 buku.

4.1.2 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Bimtek Statistik Bagi Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 bimtek dari target kinerja Jumlah Bimtek Statistik Bagi Perangkat Daerah sebanyak 1 bimtek.

4.1.3 Membangun Metadata Statistik Sektoral

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral Perangkat Daerah sebanyak 1 dokumen.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Indikator Program :

Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 125% dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah sebesar 80%.

Dari Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdapat 1 (satu) kegiatan yakni :

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 125% dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian sebesar 80%.

Dari kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat 4 (emoat) sub kegiatan yakni :

5.1.1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Dokumen kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Dokumen kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah sebanyak 1 dokumen.

5.1.2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Dokumen analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Dokumen analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan sebanyak 1 dokumen.

5.1.3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Indikator Sub Kegiatan :

Dokumen hasil audit keamanan TIK dan Jumlah penanganan insiden keamanan informasi

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dan 2 kali penangan insiden dari target kinerja Dokumen hasil audit keamanan TIK sebanyak 1 dokumen dan Jumlah penanganan insiden keamanan informasi sebanyak 2 kali penanganan.

5.1.4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Penerbitan sertifikat elektronik

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 114% dengan realisasi kinerja sebanyak 2287 sertifikat elektronik dari target kinerja Penerbitan sertifikat elektronik sebanyak 2000.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu–isu penting atau isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pembangunan sarana komunikasi dan informatika di Kota Balikpapan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Komunikasi dan Informatika
    - Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan;
    - Belum optimalnya penyebarluasan informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;
    - Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
    - Informasi pembangunan / program prioritas yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
    - Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;
    - Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kota Balikpapan;

- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
- Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju e-commerce;
- Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya Smart City;
- Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika.

2. Statistik
   - Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
   - Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
   - Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
   - Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.
3. Persandian
   - Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
   - Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
   - Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
   - Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2024 terdapat 5 (lima) program yakni 4 (empat) program urusan dan 1 (satu program penunjang). Dari kelima program tersebut telah dirumuskan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan

Informatika Kota Balikpapan disusun berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi, serta berdasarkan pada sasaran strategis Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran tujuan dan sasaran instansi. Capaian tujuan dan sasaran kota dihasilkan dari tujuan dan sasaran OPD yang telah selaras dengan RPJMD Kota. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian terhadap keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kaltim kepada kabupaten/kota	Hasil Evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Kaltim terkait keterbukaan informasi publik yang terdiri atas : 1. indikator mengumumkan 2. indikator menyediakan, 3. indikator pelayanan informasi publik 4. indikator Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi publik	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain kebijakan SPBE	Penilaian tingkat kematangan indikator kebijakan internal yang mendukung penerapan tim koordinasi SPBE, perencanaan, strategi, manajemen dan audit TIK SPBE	Hasil evaluasi SPBE dari Kementerian PAN-RB, Republik Indonesia dengan kriteria penilaian sebagai berikut : a. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu) : Level 1 – Rintisan b. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua) : Level 2 – Terkelola c. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga) : Level 3 – Terdefinisi d. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat) : Level 4 – Terpadu dan terukur	Kementerian PAN-RB Republik Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika

				e. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima) : Level 5 – Optimum		
		Indeks domain layanan SPBE	Penilaian tingkat kematangan indikator layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan BMN, pengawasan, akuntabilitas, kinerja, pengaduan publik, data terbuka, JDIH, dan layanan publik unggulan lainnya.	Hasil evaluasi SPBE dari Kementerian PAN-RB, Republik Indonesia dengan kriteria penilaian sebagai berikut : f. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu) : Level 1 – Informasi g. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua) : Level 2 – Interaksi h. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga) : Level 3 – Transaksi i. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat) : Level 4 – Kolaborasi j. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima) : Level 5 – Optimum	Kemenerian PAN-RB Republik Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Penilaian tingkat kematangan indikator arsitektur, peta rencana, anggaran, proses bisnis SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinator SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE	Hasil evaluasi SPBE dari Kementerian PAN-RB, Republik Indonesia dengan kriteria penilaian sebagai berikut : k. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu) : Level 1 – Rintisan l. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua) : Level 2 – Terkelola m. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga) : Level 3 – Terdefinisi n. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat) : Level 4 – Terpadu dan terukur o. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima) : Level 5 – Optimum	Kementerian PAN-RB Republik Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika

		Indeks Domain Manajemen SPBE	Penilaian tingkat kematangan indikator manajemen resiko, keamanan informasi, data, aset, SDM, pengetahuan, perubahan, layanan SPBE, audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan SPBE	Hasil evaluasi SPBE dari Kementerian PAN-RB, Republik Indonesia dengan kriteria penilaian sebagai berikut : p. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu) : Level 1 – Rintisan q. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua) : Level 2 – Terkelola r. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga) : Level 3 – Terdefinisi s. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat) : Level 4 – Terpadu dan terukur t. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima) : Level 5 – Optimum	Kementerian PAN-RB Republik Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Merupakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat **PMPRB** adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah	Hasil evaluasi dari penilaian komponen, sub-komponen dan indikator dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pelaksanaan reformasi Birokrasi	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel diatas telah menjelaskan mengenai formulasi perhitungan serta sumber data guna mencapai IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan selain itu pada penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan target dari IKU tersebut, adapun target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 adalah :

Tabel 2.2

Target Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	nilai	89
2	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain kebijakan SPBE	nilai	2,8
		Indeks domain layanan SPBE	nilai	3,75
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	nilai	3,5
		Indeks Domain Manajemen SPBE	nilai	2,3
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	nilai	33

Selain indikator kinerja utama, maka review terhadap rancangan awal dan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat dilihat pada table Tc. 31 berikut :

Tabel TC. 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Diskominfo Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Balikpapan**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**85**	**Rp 7.202.842.900**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Balikpapan**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**85**	**Rp 7.231.731.000**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**Nilai SAKIP DISKOMINFO**	**66**	**Rp -**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**Nilai SAKIP DISKOMINFO**	**66**	**Rp -**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp -	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Rp -	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp -	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp -	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp -	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)**	**85**	**Rp 5.500.000.000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)**	**85**	**Rp 5.500.000.000**	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang	Rp 5.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	Rp 5.500.000.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	Rp -	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 laporan	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp -	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**85**	**Rp -**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**85**	Rp -	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balikpapan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	Rp -	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balikpapan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp -	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	Rp -	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp -	

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**85**	**Rp 45.000.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**85**	**Rp 40.000.000**	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Balikpapan	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	Rp -	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Balikpapan	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	Rp -	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 orang	Rp 45.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	Rp 40.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**85**	**Rp 855.342.900**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**85**	**Rp 904.231.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 20.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 132.800.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	Rp 177.800.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 paket	Rp 325.070.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 paket	Rp 300.070.000	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Rp 26.486.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Rp 26.486.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	Rp 30.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp 29.875.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 laporan	Rp 320.986.900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Rp 350.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85**	**Rp 437.500.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85**	**Rp 437.500.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	1 laporan	Rp 2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	1 Laporan	Rp 2.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 200.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	Rp 15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 15.000.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 220.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 220.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85**	**Rp 365.000.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Balikpapan	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85**	**Rp 350.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 unit	Rp 140.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	Rp 120.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	6 unit	Rp 145.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	R4 6 unit dan R2 4 unit	Rp 130.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 unit	Rp 30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 unit	Rp 30.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Rp -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung kantor	Rp 25.000.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Rp 50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Rp 45.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Balikpapan**	**Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara;**	**80%**	**Rp 4.258.755.700**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Balikpapan**	**Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara;**	**80%**	**Rp 6.758.755.700**	
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015**	**90%**	**Rp 4.258.755.700**	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015**	**90%**	**Rp 6.758.755.700**	
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 domain	Rp -	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Domain	Rp -	

	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp 10.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp 10.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 unit	Rp 4.248.755.700	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 unit	Rp 6.748.755.700	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Balikpapan**	**Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi**	**80%**	**Rp 3.095.195.000**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Balikpapan**	**Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi**	**80%**	**Rp 6.029.389.500**	
	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah**	**80%**	**Rp 3.095.195.000**	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah**	**80%**	**Rp 6.029.389.500**	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp 104.840.500	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp 104.840.500	

	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen	Rp 50.000.000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen	Rp 196.194.500	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Balikpapan	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola (unit)	1 unit	Rp 75.000.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Balikpapan	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola (unit)	1 unit	Rp 350.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 dokumen	Rp 30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 dokumen	Rp 50.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Balikpapan	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	15 pd	Rp 30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Balikpapan	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	15 PD	Rp 40.000.000	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Balikpapan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	12 unit	Rp 1.200.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Balikpapan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	12 unit	Rp 1.663.000.000	

	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Balikpapan	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 layanan	Rp -	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Balikpapan	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 layanan	Rp -	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Balikpapan	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen	Rp 1.335.354.500	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Balikpapan	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen	Rp 3.045.354.500	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	Rp 100.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	Rp 100.000.000	
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 dokumen	Rp 50.000.000	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 dokumen	Rp 180.000.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Balikpapan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ekosistem SPBE	1 dokumen	Rp 120.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Balikpapan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ekosistem SPBE	1 dokumen	Rp 300.000.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Balikpapan**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**80%**	**Rp 5.794.206.400**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Balikpapan**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**80%**	**Rp 9.381.806.400**	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)**	**80%**	**Rp 5.794.206.400**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)**	**80%**	**Rp 9.381.806.400**	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 dokumen	Rp 600.000.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 dokumen	Rp 710.000.000	
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	Rp 300.000.000	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp 300.000.000	

	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	Rp 1.500.000.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	Rp 2.300.000.000	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	Rp 2.669.651.400	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	Rp 4.669.651.400	
	Pelayanan Informasi Publik	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen	Rp 55.275.000	Pelayanan Informasi Publik	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen	Rp 55.275.000	
	Layanan Hubungan Media	Balikpapan	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 layanan	Rp 67.280.000	Layanan Hubungan Media	Balikpapan	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 layanan	Rp 101.280.000	
	Manajemen Komunikasi Krisis	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 dokumen	Rp -	Manajemen Komunikasi Krisis	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 dokumen	Rp -	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Balikpapan	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	72 orang	Rp 102.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Balikpapan	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	72 orang	Rp 102.000.000	
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8 unit	Rp 500.000.000	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8 unit	Rp 1.143.600.000	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Balikpapan**	**Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**85%**	**Rp 321.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Balikpapan**	**Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**85%**	**Rp 616.020.000**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data**	**60%**	**Rp 321.000.000**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data**	**60%**	**Rp 616.020.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Balikpapan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen	Rp 170.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Balikpapan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen	Rp 300.000.000	
	Pengembangan Infrastruktur	Balikpapan	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 unit	Rp -	Pengembangan Infrastruktur	Balikpapan	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 unit	Rp 125.000.000	
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Balikpapan	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	68 orang	Rp 135.000.000	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Balikpapan	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	140 orang	Rp 175.020.000	

	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Balikpapan	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 dokumen	Rp 16.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Balikpapan	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	Rp 16.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Balikpapan**	**Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;**	**80%**	**Rp 300.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Balikpapan**	**Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;**	**80%**	**Rp 647.125.000**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian**	**80%**	**Rp 300.000.000**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian**	**80%**	**Rp 647.125.000**	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan	1 dokumen	Rp -	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan	1 Dokumen	Rp -	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	Rp 50.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp 50.000.000	

	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Balikpapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	Rp 150.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Balikpapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Rp 447.125.000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	22 pd	Rp 100.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	22 PD	Rp 150.000.000	
TOTAL					**Rp 20.972.000.000**	**TOTAL**				**Rp 30.664.827.600**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini berisi tentang usulan dari para pemangku kepentingan yang terkait dan dapat mendorong capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Adapun usulan yang masuk dan telah diverifikasi oleh bidang terkait dapat dilihat pada table berikut :

Tabel Tc.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	-	-	-	-	-

Untuk perencanaan 2024 tidak ada usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN Tahun 2020-2024, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024.

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan

3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Hubungan secara substansi yang ada dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan keterkaitan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kota Balikpapan	Sasaran pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1.	-	-		Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kota Balikpapan	Sasaran pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
2.	-	-	▪ Meningkatkan Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah ▪ .Tersedianya Infrastruktur Bidang Komunikasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat	Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
3.	● Skor hasil nilai Kepuasan Masyarakat. ● Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	● Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik ● Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode dan mutu penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat.	Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
4.	-	-		Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta RKPD, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

Tujuan :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Sasaran :

1. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;

3. Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran jangka menengah seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026, tertuang program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik

   Pada program ini terdapat kegiatan :

   1.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

   - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
   - Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
   - Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
   - Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
   - Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
   - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
   - Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media;
   - Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
   - Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis;
   - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
   - Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Aplikasi Informatika

   Pada program ini terdapat kegiatan :

   2.1 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

   - Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2.2 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;
- Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pada program ini terdapat kegiatan :

3.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;

- Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
- Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral;
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
- Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur;
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

   Pada program ini terdapat kegiatan :

   4.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

   - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
   - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

   4.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

   - Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Pada program ini terdapat kegiatan :

   5.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

   - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

5.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

5.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

5.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

5.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Infromatika Kota Balikpapan dengan sumber dana APBD Kota Balikpapan secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel T.C-33 berikut ini :

Tabel Tc. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**87 nilai**	**Rp 7.252.842.900**	**APBD**		-	**Rp 7.736.551.822**
2	**16**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**87 nilai**	**Rp 5.500.000.000**	**APBD**		-	**Rp 6.050.000.000**
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	28 orang	Rp 5.500.000.000	APBD		-	Rp 6.050.000.000
2	**16**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**87 nilai**	**Rp 45.000.000**	**APBD**		-	Rp -

2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Balikpapan	52 orang	Rp	45.000.000	APBD		-	Rp -
2	**16**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**87 nilai**	**Rp**	**855.342.900**	**APBD**		-	**Rp 950.500.000**
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 paket	Rp	20.000.000	APBD		-	Rp 10.000.000
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	5 paket	Rp	132.800.000	APBD		-	Rp 352.500.000
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Balikpapan	3 paket	Rp	335.070.000	APBD		-	Rp 200.000.000
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	2 paket	Rp	26.486.000	APBD		-	Rp 28.000.000
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Balikpapan	1 Laporan	Rp	20.000.000	APBD		-	Rp 28.000.000

2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	42 Laporan	Rp	320.986.900	APBD		-	Rp 332.000.000
2	**16**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**87 nilai**	**Rp**	**467.500.000**	**APBD**		-	**Rp 328.551.822**
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Balikpapan	1 Laporan	Rp	2.500.000	APBD		-	Rp 3.000.000
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	Balikpapan	12 Laporan	Rp	200.000.000	APBD		-	Rp 110.551.822
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 Laporan	Rp	15.000.000	APBD		-	Rp 15.000.000
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	12 Laporan	Rp	250.000.000	APBD		-	Rp 200.000.000

2	**16**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**87 nilai**	**Rp 385.000.000**	**APBD**		-	**Rp 407.500.000**
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Balikpapan	3 unit	Rp 135.000.000	APBD		-	Rp 182.500.000
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	Balikpapan	6 unit	Rp 170.000.000	APBD		-	Rp 200.000.000
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Balikpapan	33 unit	Rp 30.000.000	APBD		-	Rp 25.000.000
2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Balikpapan	1 unit	Rp 50.000.000	APBD		-	Rp -

2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara;**	**Balikpapan**	**90%**	**Rp 4.258.755.700**	**APBD**		-	**Rp 4.815.000.000**
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015**	**Balikpapan**	**90%**	**Rp 4.258.755.700**	**APBD**		-	**Rp 4.815.000.000**
2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	1 dokumen	Rp 10.000.000	APBD		-	Rp 15.000.000
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Balikpapan	1 unit	Rp 4.248.755.700	APBD		-	Rp 4.800.000.000

2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi**	**Balikpapan**	**85%**	**Rp 2.895.195.000**	**APBD**		-	**Rp 3.438.680.678**
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah**	**Balikpapan**	**80%**	**Rp 2.895.195.000**	**APBD**		-	**Rp 3.438.680.678**
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	1 dokumen	Rp 104.840.500	APBD		-	Rp 493.680.678
2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Balikpapan	1 dokumen	Rp 50.000.000	APBD		-	Rp 100.000.000
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola (unit)	Balikpapan	1 unit	Rp 75.000.000	APBD		-	Rp 500.000.000

2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Balikpapan	1 dokumen	Rp 30.000.000	APBD		-	Rp 60.000.000
2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Balikpapan	6 Perangkat Daerah	Rp 30.000.000	APBD		-	Rp 80.000.000
2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Balikpapan	10 unit	Rp 1.000.000.000	APBD		-	Rp 1.155.000.000
2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Balikpapan	1 dokumen	Rp 1.335.354.500	APBD		-	Rp 400.000.000
2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Balikpapan	1 dokumen	Rp 100.000.000	APBD		-	Rp 250.000.000

2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Balikpapan	1 dokumen	Rp 50.000.000	APBD		-	Rp 100.000.000
2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ekosistem SPBE	Balikpapan	1 dokumen	Rp 120.000.000	APBD		-	Rp 300.000.000
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**Balikpapan**	**80%**	**Rp 9.944.206.400**	**APBD**		-	**Rp 3.072.800.000**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)**	**Balikpapan**	**80%**	**Rp 9.944.206.400**	**APBD**		-	**Rp 3.072.800.000**

2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Balikpapan	1 dokumen	Rp 600.000.000	APBD		-	Rp 279.500.000
2	16	02	2.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 300.000.000	APBD		-	Rp 138.400.000
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Balikpapan	1 dokumen	Rp 1.572.000.000	APBD		-	Rp 344.300.000
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Balikpapan	1 dokumen	Rp 3.547.651.400	APBD		-	Rp 1.124.100.000
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Balikpapan	1 dokumen	Rp 55.275.000	APBD		-	Rp 138.400.000
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Balikpapan	2 layanan	Rp 67.280.000	APBD		-	Rp 105.500.000
2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Balikpapan	72 orang	Rp 102.000.000	APBD		-	Rp 83.750.000

2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	15 unit	Rp 3.700.000.000	APBD		-	Rp 858.850.000
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**Balikpapan**	**90%**	**Rp 321.000.000**	**APBD**		-	**Rp 290.000.000**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data**	**Balikpapan**	**60%**	**Rp 321.000.000**	**APBD**		-	**Rp 290.000.000**

2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Balikpapan	1 dokumen	Rp 170.000.000	APBD		-	Rp 130.000.000
2	20	02	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Balikpapan	68 Orang	Rp 145.000.000	APBD		-	Rp 100.000.000
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Balikpapan	1 dokumen	Rp 6.000.000	APBD		-	Rp 60.000.000
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;**	**Balikpapan**	**80%**	**Rp 300.000.000**	**APBD**		-	**Rp 538.035.341**

2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian**	**Balikpapan**	**80%**	**Rp 300.000.000**	**APBD**		-	**Rp 538.035.341**
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	1 laporan	Rp 50.000.000	APBD		-	Rp 53.035.341
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Balikpapan	1 Laporan	Rp 150.000.000	APBD		-	Rp 200.000.000
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Balikpapan	22 Perangkat Daerah	Rp 100.000.000	APBD		-	Rp 285.000.000
TOTAL									**Rp 24.972.000.000**	**TOTAL**			**Rp 19.891.067.841**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Komunikasi dan Indormatika Kota Balikpapan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Setiap kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program Dinas Komunikasi dan informatika Kota Balikpapan saat ini didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**87 nilai**	**Rp 7.252.842.900**	**APBD**
2	**16**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**87 nilai**	**Rp 5.500.000.000**	**APBD**
2	16	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	28 orang	Rp 5.500.000.000	APBD

2	**16**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**87 nilai**	**Rp 45.000.000**	**APBD**
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Balikpapan	52 orang	Rp 45.000.000	APBD
2	**16**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**87 nilai**	**Rp 855.342.900**	**APBD**
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 paket	Rp 20.000.000	APBD
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	5 paket	Rp 132.800.000	APBD
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Balikpapan	3 paket	Rp 335.070.000	APBD
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	2 paket	Rp 26.486.000	APBD
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Balikpapan	1 Laporan	Rp 20.000.000	APBD
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	42 Laporan	Rp 320.986.900	APBD
2	**16**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**87 nilai**	**Rp 467.500.000**	**APBD**
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Balikpapan	1 Laporan	Rp 2.500.000	APBD
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	Balikpapan	12 Laporan	Rp 200.000.000	APBD

2	16	01	2.08	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 Laporan	Rp 15.000.000	APBD
2	16	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	12 Laporan	Rp 250.000.000	APBD
2	**16**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**87 nilai**	**Rp 385.000.000**	**APBD**
2	16	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Balikpapan	3 unit	Rp 135.000.000	APBD
2	16	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	Balikpapan	6 unit	Rp 170.000.000	APBD
2	16	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Balikpapan	33 unit	Rp 30.000.000	APBD
2	16	01	2.09	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Balikpapan	1 unit	Rp 50.000.000	APBD
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara;**	**Balikpapan**	**90%**	**Rp 4.258.755.700**	**APBD**

2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015**	**Balikpapan**	**90%**	**Rp 4.258.755.700**	**APBD**
2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	1 dokumen	Rp 10.000.000	APBD
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Balikpapan	1 unit	Rp 4.248.755.700	APBD
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi**	**Balikpapan**	**85%**	**Rp 2.895.195.000**	**APBD**
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah**	**Balikpapan**	**80%**	**Rp 2.895.195.000**	**APBD**
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	1 dokumen	Rp 104.840.500	APBD
2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Balikpapan	1 dokumen	Rp 50.000.000	APBD
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola (unit)	Balikpapan	1 unit	Rp 75.000.000	APBD

2	16	03	2.02	00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Balikpapan	1 dokumen	Rp 30.000.000	APBD
2	16	03	2.02	00 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Balikpapan	6 Perangkat Daerah	Rp 30.000.000	APBD
2	16	03	2.02	00 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Balikpapan	10 unit	Rp 1.000.000.000	APBD
2	16	03	2.02	00 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Balikpapan	1 dokumen	Rp 1.335.354.500	APBD
2	16	03	2.02	00 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Balikpapan	1 dokumen	Rp 100.000.000	APBD
2	16	03	2.02	00 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Balikpapan	1 dokumen	Rp 50.000.000	APBD
2	16	03	2.02	00 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ekosistem SPBE	Balikpapan	1 dokumen	Rp 120.000.000	APBD
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**Balikpapan**	**80%**	**Rp 9.944.206.400**	**APBD**

2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)**	**Balikpapan**	**80%**	**Rp 9.944.206.400**	**APBD**
2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Balikpapan	1 dokumen	Rp 600.000.000	APBD
2	16	02	2.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 300.000.000	APBD
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Balikpapan	1 dokumen	Rp 1.572.000.000	APBD
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Balikpapan	1 dokumen	Rp 3.547.651.400	APBD
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Balikpapan	1 dokumen	Rp 55.275.000	APBD
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Balikpapan	2 layanan	Rp 67.280.000	APBD
2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Balikpapan	72 orang	Rp 102.000.000	APBD
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	15 unit	Rp 3.700.000.000	APBD
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					

2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**Balikpapan**	**90%**	**Rp 321.000.000**	**APBD**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data**	**Balikpapan**	**60%**	**Rp 321.000.000**	**APBD**
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Balikpapan	1 dokumen	Rp 170.000.000	APBD
2	20	02	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Balikpapan	68 Orang	Rp 145.000.000	APBD
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Balikpapan	1 dokumen	Rp 6.000.000	APBD
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;**	**Balikpapan**	**80%**	**Rp 300.000.000**	**APBD**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian**	**Balikpapan**	**80%**	**Rp 300.000.000**	**APBD**

2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	1 laporan	Rp 50.000.000	APBD
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Balikpapan	1 Laporan	Rp 150.000.000	APBD
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Balikpapan	22 Perangkat Daerah	Rp 100.000.000	APBD
TOTAL									**Rp 24.972.000.000**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2024 menjadi satu kesatuan dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang- Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Program, Kegiatan, sub kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk matrik masih bersifat indikatif yang harus dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, yakni sebagai berikut :

1. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar evaluasi setiap triwulan, terutama membahas terkait capaian kinerja dan serapan keuangan agar sesuai dengan tata Kelola dan perencanaan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan semua pegawai pada setiap Bidang di Dinas Komunikasi Informatika Kota Balikpapan agar perencanaan dapat dilakukan dengan matang sehingga pelaksanaannya pun dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah;
3. Lebih aktif mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan terkait dengan kegiatan dan agenda penting yang akan dilaksanakan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2024 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2024.

Balikpapan, 07 Juli 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

ADAMIN S

RENCANA AKHIR KERJA

2024

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

KOTA BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan 2021-2026 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan Koperasi, UMKM dan Perindustrian selama periode 2021-2026 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2024). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan pada akhir tahun anggaran 2024.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan

Balikpapan, Agustus 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR GAMBAR 3

DAFTAR TABEL 4

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB.II. HASIL EVALUASI RENJA 2022 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD 22

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 30

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 30

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 31

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 36

BAB V. INOVASI PERANGKAT DAERAH 38

BAB VI. PENUTUP 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Balikpapan 11

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan 16

Tabel 2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan 20

Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian 24

Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Balikpapan... 29

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan 33

Tabel 2.6 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 36

Tabel 2.7 Inovasi Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan..... 38

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, guna menindak lanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, *dan* Evalusi Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan menyusun Dokumen Renja 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan.

Setiap tahun Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Balikpapan.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD. Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian (selanjutnya disingkat DKUMKMP) Kota Balikpapan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54); dan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Wali Kota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja tersebut dapat dikerjakan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DKUMKMP Kota Balikpapan. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja DKUMKMP Kota Balikpapan merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan yang disesuaikan.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program / kegiatan, target keluaran kegiatan dan total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan merupakan dokumen resmi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana anggaran dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan;
- Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan
- Telaah terhadap rancangan akhir RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan;
- Penyempurnaan rancangan kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan;
- Pembahasan forum Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:

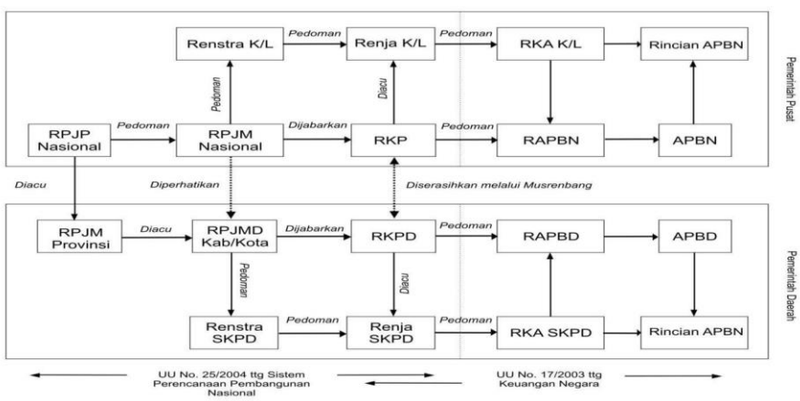

Gambar 1. 1 Skema Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

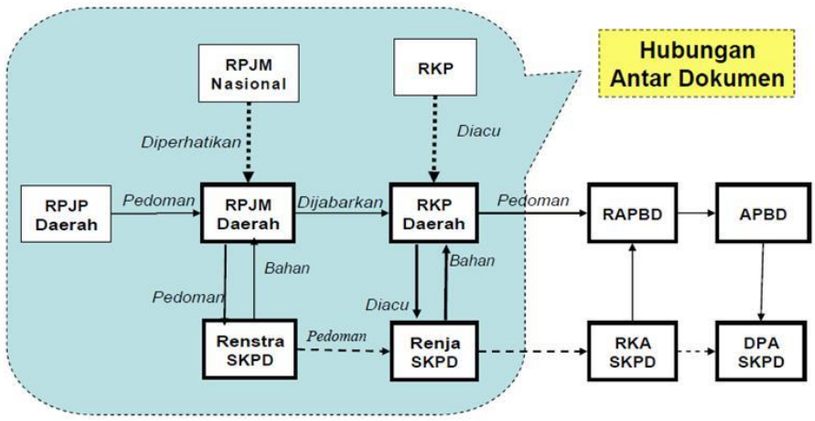

Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RENJA Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sbb :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. KEPMENDAGRI No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan

Tahun 2021 – 2026;

17. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Wali Kota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. penetapan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024;
19. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Balikpapan.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja DKUMKMP Kota Balikpapan disusun dengan tujuan untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan untuk memasukkan program / kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Perubahan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun 2023 yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Review Terhadap Rancangan akhir RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Inovasi Perangkat Daerah

Bab VI : Penutup

BAB.II.

HASIL EVALUASI RENJA 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan

internal / mandiri terhadap realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang, baik keberhasilan pencapaian indikator, sasaran, realisasi penyerapan anggaran keuangan dan fisik terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022.

Pada Tahun Anggaran 2022, DKUMKMP Kota Balikpapan merencanakan pelaksanaan 8 program yang terdiri atas 12 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 30,214,199,875,- Melalui mekanisme perubahan, APBD 2022 menjadi Rp 36.368.074.875,- Adapun target Penerimaan Asli Daerah (PAD) Rp. 115.000.000 , Realisasi anggaran di tahun 2022 sebesar Rp 30.704.433.351,07,- (84.43%) dengan persentase capaian fisik kegiatan sebesar 97,10%. Realisasi PAD sebesar Rp. 136.060.000,-. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:**

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja dan
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya	Persen	50.00	6.53	13.07%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	Persen	24.00	6.53	27.22%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (DAK)	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persen	25.10	8.59	34.22%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (DAK)	Persentase SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan	Persen	6.28	4.58	72.97%
Pendidikan dan latihan UKM dalam daerah kabupaten/kota (DAK)	Persentase Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	Persen	0.18	0.13	71.61%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi sehat	Persen	3.35	2.76	82.60%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	5.23	5.06	96.70%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	81.68	70.52	86.34%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	Persen	5.21	3.19	61.23%
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persen	0.22	0.05	22.95%
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	12.01	6.96	57.94%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	Persen	45.45	40.68	89.49%

Gambar 2. 1
Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja dan
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha simpan pinjam yang masuk dinas terkait	persen	100	100.00	100.00%

Gambar 2. 2
Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan:

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja dan
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam	persen	5.44	5.98	109.94%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	persen	19.87	20.00	100.63%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	persen	12.55	20.00	159.33%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	Persen	0.69	0.72	104.37%
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen	1.10	5.59	506.64%
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (Anggaran DAK)	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah				
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK	persen	52.50	56.58	107.76%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Anggaran DAK)	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK	persen			
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait	Persen	60	87	144%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota	Persen	10.42	12.25	117.58%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	67.00	81.77	122.04%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	nilai	78.58	80.28	102.16%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai	75.00	77.56	103.41%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	nilai	68.00	75.95	111.69%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	nilai	68.00	71.38	104.97%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai	68.00	73.21	107.66%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	68.00	71.59	105.28%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	68.00	73.54	108.15%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	68.00	75.78	111.44%

Gambar 2. 3
Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan

4. **Factor – factor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target**

   a. Masih terdapatnya ketidaksesuaian indikator keluaran antara dokumen Renja dan APBD (DPA/RKA)

   b. Masih terdapatnya beda satuan pada indikator dalam perencanaan di dokumen Renja dan APBD (DPA/RKA)

   c. Terdapat jenis target yang tidak terealisasi;

   d. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan tidak seluruhnya terakomodir dalam APBD;

   e. Target output yang rendah pada saat penyusunan Renstra dan tidak melakukan analisa terhadap rencana dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya;

   f. Perumusan indikator dan metode perhitungan yang kurang tepat mempengaruhi pencapaian target dikarenakan kesulitan untuk melakukan perhitungan

5. **Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor – factor penyebab tersebut**

   a. Melakukan reviu serta penelaahan indikator kinerja program, kegiatan, Sub Kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis yang akan datang;

   b. Menentukan target secara realistis dan berdasar sesuai dengan rumusan perhitungan pencapaian targetnya;

   c. Memiliki data dasar pada setiap indikator kinerja sehingga dapat terukur dan dipertanggung jawabkan;

   d. Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian pada tahun-tahun sebelumnya;

   e. Komitmen bersama seluruh Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Balikpapan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2020)	Target da realisasi kinerja program dan keluaran Kegiatan PD tahun (n-2) (2021)			Target / Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2022	Perkiraan relisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam	6.28					5.44	5.44	86.67
1.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha simpan pinjam yang masuk dinas terkait	100.00					100	100.00	100.00
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	24.06					19.87	19.87	82.61
2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	62.76					12.55	12.55	20.00
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya	56.67					50.00	50.00	88.24
3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	56.00					24.00	24.00	42.86

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2020)	Target da realisasi kinerja program dan keluaran Kegiatan PD tahun (n-2) (2021)			Target / Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2022	Perkiraan relisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (DAK)	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	59.34					25.10	25.10	42.30
4.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (DAK)	Persentase SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan	13.60					6.28	6.28	46.15
4.2	Pendidikan dan latihan UKM dalam daerah kabupaten/kota (DAK)	Persentase Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	0.91					0.18	0.18	20.00
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi sehat	15.06					3.35	3.35	22.22
5.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	8.37					5.23	5.23	62.50
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	88.41					81.68	81.68	92.38
6.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	2.14					0.69	0.69	32.20

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2020)	Target da realisasi kinerja program dan keluaran Kegiatan PD tahun (n-2) (2021)			Target / Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2022	Perkiraan relisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	5.36					5.21	5.21	97.29
7.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.33					0.22	0.22	16.44
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	2.60					**1.10**	**1.10**	**42.52**
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (Anggaran DAK)	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah								
8.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK	72.50					**52.50**	52.50	**72.41**
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Anggaran DAK)	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2020)	Target da realisasi kinerja program dan keluaran Kegiatan PD tahun (n-2) (2021)			Target / Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2022	Perkiraan relisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
9	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	15.69					12.01	12.01	76.54
9.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait	92.86					60	60.00	64.62
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	66.67					45.45	45.45	68.18
10.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota	11.31					10.42	10.42	92.16

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2020)	Target da realisasi kinerja program dan keluaran Kegiatan PD tahun (n-2) (2021)			Target / Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2022	Perkiraan relisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80					67.00	67.00	83.75
10.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	80					78.58	78.58	98.23
10.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85					75.00	75.00	88.24
10.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	78					68.00	68.00	87.18
10.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78					68.00	68.00	87.18
10.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78					68.00	68.00	87.18
10.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78					68.00	68.00	87.18
10.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78					68.00	68.00	87.18
10.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78					68.00	68.00	87.18

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 dan Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2) 2022	Tahun (n-1) 2023	tahun (n) 2024	tahun (n+1) 2025	Tahun (n-2) 2022	Tahun (n-1) 2023	tahun (n) 2024	tahun (n+1) 2025	
1	PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS		24.06%	19.87%	20.92%	21.97%	23.01%	20.00	-	21.97%	23.01%	
2	PERSENTASE PERTUMBUHAN OMSET UMK		5.41%	5.27%	5.29%	5.32%	5.36%	10.96	-	5.32%	5.36%	
3	PERSENTASE PERTUMBUHAN INVESTASI IKM		0.22%	0.02%	0.03%	0.07%	0.12%	6.92	-	0.07%	0.12%	
4	NILAI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH		34.00	27.00	28.75	30.50	32.25	29.65	-	30.50	32.25	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan, maka Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Dalam menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Koperasi UMKM dan

Perindustrian Kota Balikpapan dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

Strengths ***(Kekuatan)***	***Weaknesses*** ***(Kelemahan)***
1. Pemahaman Tentang Koperasi UMKM dan Industri bagi pelaku usaha sudah sangat baik. 2. Terdapatnya produk unggulan UMKM-IKM di Kota Balikpapan 3. Harga jual produk usaha kecil relative terjangkau oleh Masyarakat dan dapat diperdagangkan lagi. 4. Industri agro di Kota Balikpapan cukup menjanjikan. 5. Industri pengolahan merupakan peluang investasi yang cukup menjanjikan 6. Tersedianya pengembangan Kawasan Peruntukan Industri 7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 8. Keberadaan Institut Teknologi Kalimantan dan lembaga pendidikan vokasi lainnya di Kota Balikpapan, baik swasta maupun negeri 9. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi terkait pemabngunan dan pengembangan baik dari SDM sampai infrastruktur Koperasi UMKM dan Perindustrian 10. Pengembangan Sentra Industri Kecil Somber (SIKS) dan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT).	1. Pemahaman Koperasi UMKM dan Industri bagi pelaku usaha mikro kecil menengah masih sangat terbatas. 2. Beberapa bahan baku industri yang tersedia di Kota Balikpapan masih terbatas dan mahal. 3. Inovasi produk masih rendah sehingga produk mudah ditiru oleh pelaku UMKM lain. 4. Produk belum memiliki daya saing. 5. Sarana produksi cenderung tradisional. 6. Tempat produksi cenderung memanfaatkan tempat tinggal. 7. Keterbatasan informasi peluang pasar dalam dan luar negeri karena UMKM masih belum optimal memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). 8. Keterbatasan permodalan serta terbatasnya akses ke lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan bank karena aspek legalitas usaha. 9. Kurangnya pendampingan terhadap IKM setelah pelatihan. 10. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan.

Threats (Ancaman)	Oopportunities (Peluang)
1. Terbatasnya aparatur dan sumber daya manusia pelaku koperasi, UMKM dan industri yang berkualitas. 2. Pendataan koperasi, UMKM, dan industri yang masih kurang optimal. 3. Belum semua Koperasi memiliki kesadaran untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin. 4. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri maupun sentra Industri. 5. Kurangnya anggaran sehingga menyebabkan tidak terlaksananya beberapa pelatihan teknis atau program lainnya yang dapat membantu memperbaiki kualitas usaha UMKM/IKM agar memiliki daya saing lebih tinggi. 6. Semakin majunya IKM dari Jawa baik dari segi produk, kemasan maupun pemasaran . 7. Pandemi Covid-19 yang tidak dapat ditentukan dengan pasti masa berakhirnya.	1. Secara regional Kota Balikpapan terletak di tengah jaringan transportasi darat Trans Kalimantan serta merupakan lintas Trans Nasional. Selain itu Kota Balikpapan juga memiliki Pelabuhan Laut Semayang dan Bandara Internasional Sepinggan. 2. Kota Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara baru yang berpeluang menjadikan produk-produk koperasi/UMKM/IKM sebagai produk unggulan 3. Digitalisasi pendataan/pelaporan koperasi, UMKM, dan industri yang masih dapat dikembangkan sehingga penyajian data dapat dilakukan secara real time. 4. Sinergitas program/kegiatan antar OPD. 5. Dukungan perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung pelaku ekonomi dalam membangun usahanya. 6. Kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pengembangan sektor koperasi, UMKM dan perindustrian. 7. Upaya pengembangan sektor koperasi, UMKM dan perindustrian melalui sumber dana selain APBD Kota, seperti DAK dan Bankeu. Pemanfaatan digital marketing bagi pelaku UMKM/IKM dalam mempromosikan produk/jasanya.

Adapun permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan secara umum dapat digambarkan pada table dibawah ini:

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Data koperasi, UMKM (KUMKM) dan industri di Kota Balikpapan masih dilakukan secara manual (belum akurat / vali d)	- Data koperasi, UMKM dan industri baik yang ada di dalam data ODS maupun OSS masih perlu divalidasi dan diverifikasi ulang karena tidak dapat dipilah berdasarkan kebutuhan. - Sinkronisasi data dan pelaporan antar OPD di dalam penerbitan perizinan belum tersedia	- SDM yang menguasai IT tidak ada
2	Pemanfaatan teknologi masih terbatas dan Produk UMKM masih kalah bersaing dengan produk dari luar Rendahnya	- Terbatasnya SDM pelaku UMKM - Rendahnya manajemen dan pemasaran serta akses permodalan bagi UMKM - Terbatasnya pemanfaatan teknologi oleh koperasi dan UMKM - Belum adanya produk UMKM yang menjadi branding kota	- Terbatasnya anggaran kegiatan peningkatan pengetahuan SDM UMKM - Terbatasnya tenaga pendamping bagi koperasi dan mentor bagi UMKM - Terbatasnya akses pasar bagi produk UMKM
3	Belum tercapainya kegiatan industri yang berwawasan lingkungan	- Terbatasnya IKM yang memanfaatkan teknologi terbarukan di dalam kegiatan industrinya - Rendahnya pemanfaatan energi yang ramah lingkungan dan terbarukan	- Kurangnya kepedulian pelaku industri terhadap resiko lingkungan - Pemanfaatan teknologi industri yang masih rendah, termasuk industry 4.0

		- Rendahnya pengelolaan hasil limbah	- Tidak adanya pejabat pengawas industri

Tabel 2.4
Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan

Aspek kajian	Capaian / kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
		Internal	Eksternal	
Kebutuhan jumlah dan kualitas SDM	Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai	- Minimnya alokasi anggaran di OPD untuk meningkatkan kualitas aparatur	'- Belum adanya Analisa jabatan aparatur guna menentukan jumlah dan kompetensi aparatur yang ditempatkan - Belum adanya rekrutmen pegawai yang memadai	- Sikap dan perilaku kerja Aparatur yang kurang profesional terhadap tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya - Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam kegiatan - Terbatasnya jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi
Data	Data Belum optimal baik secara kuantitas maupun kualitas. -Akses informasi Data masih lemah.	Kurangnya kesadaran akan pentingnya data dalam pengambilan kebijakan. Validitas dan kecukupan data kurang memadai.	Data di Pemerintah Kota Balikpapan belum terintegrasi	- Database yang belum optimal
Pembangunan dan pemeliharaan Sarana di sentra	-Rumah Produksi belum terpenuhi	Terbatasnya anggaran	-Terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Balikpapan	Kondisi bangunan dan fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan

				kurangnya kenyamanan
Belum dimilikinya sistem informasi berbasis web dan android	Aplikasi belum tersedia	SDM pengelola Aplikasi belum tersedia	-Terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Balikpapan	Tidak seimbangnya SDM aparat Dibanding dengan Koperasi yang dilayani.
Pengawasan Koperasi	Pengawasan Koperasi dilakukan secara rutin.	Keterbatasan SDM aparat pengawas koperasi sehingga tidak semua koperasi dapat dimonitoring.	Banyak koperasi yang tidak sesuai alamat. Rendahnya SDM pengurus dan pengawas koperasi	Belum memadai karena terbatasnya SDM dan prasarana penunjang
Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM masih belum memiliki e-marketplace skala Kota Balikpapan	Belum didukung tenaga ahli/staf yang kompeten di bidang IT dan desain kemasan	Terbatasnya anggaran untuk membuat e-marketplace. Belum adanya wadah secara offline untuk membantu memasarkan produk UMKM	Belum memadai karena terbatasnya SDM dan prasarana penunjang

Isu-isu strategis ditentukan berdasarkan faktor-faktor pelayanan DKUMKMP Kota Balikpapan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Data Koperasi, UMKM dan Perindustrian hanya tersajikan didalam Website http://dkumkmp.balikpapan.go.id/
2. Pengolahan dan pelaporan data Koperasi, UMKM dan Perindustrian masih dilakukan secara manual.
3. Perlunya meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen kelembagaan koperasi yang belum aktif.
4. Perlunya peningkatan jumlah sertifikasi pengurus/pengawas/pengelola koperasi.
5. Perlunya peningkatan dan pengembangan kualitas produk wirausaha baru dan UMKM.
6. Rendahnya kemitraan pelaku UMKM dan pengembangan sektor industri kecil dan menengah.

7. Rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) bagi Koperasi dan pelaku UMKM.
8. Rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM.
9. Belum optimalnya akses peminjaman permodalan bagi pelaku UMKM
10. Belum optimalnya kerjasama UMKM dengan area publik untuk promosi produk.
11. Belum optimalnya sentra industri yang berwawasan lingkungan.
12. Belum tuntasnya capaian pembangunan SIKS dan SIKT.
13. Perlunya fasilitasi peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia di bidang Industri kecil dan menengah.
14. Terbatasnya ketersediaaan bahan baku dan bahan penolong di bidang Industri kecil dan menengah.
15. Perlunya peningkatan Teknologi produksi bagi industri kecil dan menengah.
16. Belum tersedianya pejabat fungsional pembina industri dan pengembang kewirausahaan
17. Perlunya peningkatan fasilitasi kepemilikan sertifikasi produk.
18. Belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan, koperasi dan UMKM

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Proses yang dilakukan dalam membandingkan rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Dinas Koperasi , Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan melakukan berbagai tindakan yaitu :

Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat Kota. Tercemin dari adanya

a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi,misi dan program kepala daerah terpilih.
b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah.
c. Mempertimbangkan hasil forum OPD.

Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat-rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi dan Kota. Pendekatan perencanaan ini tercemin pada RKPD berupa :

a. Sinergi dengan RKPD dan Renja Provinsi Kalimantan Timur dan Renja Kementrian
b. Konsistensi dengan Renja Kota Balikpapan
c. Sinergi dan Komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Balikpapan menitik beratkan pada pemberdayaan dari segi ekonomi maupun pendapatan masyarakat yang terwujud melalui kegiatan pelatihan, temu usaha, maupun bimbingan teknis bagi gerakan Koperasi, Pelaku UMKM dan Pelaku Industri di Kota Balikpapan. Dari

proses kegiatan yang berjalan tersebut akan menghasilkan output dan outcome yang benar-benar meningkatkan taraf hidup maupun perekonomian masyarakat seperti berkurangnya pengangguran, tumbuhnya iklim usaha yang kondusif, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi..

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*		*10*	*11*	
1	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Balikpapan**	**Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam**	**persen**	**6.28**	**100,000,000**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Balikpapan**	**Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam**	**persen**	**6.28**	**100,000,000**	
1.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	persentase verifikasi izin usaha simpan pinjam yang masuk dinas terkait	persen	100	100,000,000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	persentase verifikasi izin usaha simpan pinjam yang masuk dinas terkait	persen	100	100,000,000	Pelatihan SKKNI untuk Manager bagi KSP/USP
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Balikpapan**	**Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT**	**persen**	**21.97**	**400,000,000**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Balikpapan**	**Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT**	**persen**	**21.97**	**400,000,000**	
2.2	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	persen	12.55	400,000,000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	persen	12.55	400,000,000	* Pelatihan bagi pengawas Koperasi * Rakor Pengawasan Koperasi Kota Balikpapan * Pendataan Koperasi '* Bimtek Tata Cara Penilaian Kesehatan Koperasi Kota Balikpapan * Pelatihan Rapat Anggota Tahunan (RAT) * Jasa Tenaga Administrasi (Gaji Non PNS)
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Balikpapan**	**Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya**	**Persen**	**53.57**	**100,000,000**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Balikpapan**	**Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya**	**Persen**	**53.57**	**100,000,000**	
3.3	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	Persen	40.00	100,000,000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	Persen	40.00	100,000,000	* Pemeriksaan Kesehatan Koperasi * Reward Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Balikpapan**	**persentase koperasi sehat**	**Persen**	**7.53**	**250,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Balikpapan**	**persentase koperasi sehat**	**Persen**	**7.53**	**250,000,000**	
4.4	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	6.28	250,000,000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	6.28	250,000,000	* Pelatihan Kewirausahaan dan Ketrampilan Sablon * Pelatihan Perkoperasian dan Perencanaan Bisnis Bagi UMKM * Peringatan Harkopnas

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*		*10*	*11*	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Balikpapan**	**Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha**	**Persen**	**84.98**	**2,050,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Balikpapan**	**Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha**	**Persen**	**84.98**	**2,050,000,000**	
5.5	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Balikpapan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	Persen	1.42	2,050,000,000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Balikpapan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	Persen	1.42	2,050,000,000	* Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru * Pelatihan Pengembangan Produksi dan Pengolahann * Pendataan potensi UMKM * Belanja mesin Batik beserta kelangkapannya (alat canting digital) di tambah Operator yang di kontrak selama 1 tahun sebagai pelatih untuk IKM * Pengembangan Aplikasi Sobatumkmbpn * Pemeliharaan Aplikasi Sobatumkmbpn * Jasa Tenaga Administrasi (gaji Non PNS) Kegiatan temu kemitraan usaha mikro (EO) Workshop Kemudahan Perizinan Bagi UMKM * Sosialisasi HKI * Sosialisasi SJPH * Sosialisasi PP * Registrasi Halal Self Declare * Belanja Registrasi PP * Belanja Registrasi Batik Mark * registrasi merek, cipta, nf * Operasional Dekransada seperti makan minum rapat, tamu, bahan/alat pembersih,dll. * Rakernas Dekranas Tingkat Pusat * Studi Tiru / Studi Banding ke daerah yang telah berhasil dalam pengembangan produk kerajinannya serta memilki karakteristik produk kerajinan yang sejenis dan dapat dikembangkan di Kota Balikpapan
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Balikpapan**	**persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya**	**Persen**	**5.28**	**3,848,565,628**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Balikpapan**	**persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya**	**Persen**	**5.28**	**3,848,565,628**	
6.6	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Balikpapan	Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persen	0.25	3,848,565,628	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Balikpapan	Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persen	0.25	3,848,565,628	* Kegiatan Keikutsertaan Pameran/Promosi Dalam dan Luar Daerah * Gebyar UMKM * Bazar UMKM * Kegiatan Pelatihan Kerajinan dan Non Kerajinan Bagi UMKM * UMKM Balikpapan Award (UB Award) * Pegawai Galeri Dekranasda Kota Balikpapan * Penambahan Tenant di bandara + Dekorasi (belum Update SIPD) Dekorasi * Pengembangan produk kriya melalui Dekranasda * Jasa Tenaga Administrasi (gaji Non PNS)

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*		*10*	*11*	
7	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Balikpapan**	**Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah**	**Persen**	**1.62**	**4,111,597,136**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Balikpapan**	**Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah**	**Persen**	**1.62**	**4,111,597,136**	
7.7	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK	persen	62.5	4,111,597,136	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK	persen	62.5	4,111,597,136	* Penyusunan Master Plant Pengembangan Sentra * Operasional UPT SIK * Pemeriksaan / Uji Laboratorium Air Tanah/ Baku dan Limbah Industri di IPAL * Tenaga Kebersihan UPTD SIK di SIKS * Tenaga Keamanan UPTD SIK di SIKT * Jasa Tenaga Teknis Pelayanan Operasional IPAL * Jasa Tenaga Maintenance (Mekanik dan Listrik) UPTD SIK di SIKT * Tenaga administrasi Terampil UPTD SIK * Pemeliharaan Taman dan IPAB SIKT * Pemeilharaan sarana di SIK * Pemeliharaan mesin peralatan di SIK *Belanja Pemeliharaan Lingkungan Sentra (Pemotongan Pohon, Tanaman Laut, Rawa, Pembersihan dan Penataan Lahan Sentra) * Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Kendaraan Operasional Lingkungan Sentra dan IPAL Sentra) * Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Barang Cetak, Kamera CCTV) * Belanja Modal Mebel (Belanja Kursi Pertemuan) * Belanja Modal Alat Pendingin (Belanja Kipas Angin Untuk Kegiatan Pertemuan, Pelatihan, Bimtek, dll di SIKS / SIKT) * Belanja Speaker Portabel Untuk Kunjungan Eduwisata
8	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Balikpapan**	**Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**	**Persen**	**13.89**	**115,000,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Balikpapan**	**Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**	**Persen**	**13.89**	**115,000,000**	
8.8	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait	Persen	80	115,000,000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait	Persen	80	115,000,000	* Sosialisasi Kebijakan Industri/SIINas * Pengawasan Penerapan Sistem Standar Nasional Indonesia (SNI) (AMDK)
9	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Balikpapan**	**persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini**	**Persen**	**61.54**	**210,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Balikpapan**	**persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini**	**Persen**	**61.54**	**210,000,000**	
9.9	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota	Persen	10.86	210,000,000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota	Persen	10.86	210,000,000	* Pemeliharaan Sistem Informasi Teknologi SIYANTI * Kegiatan Sosialisasi * Jasa Tenaga Administrasi (gaji Non PNS) * Cetak Media Publikasi * Publikasi Media Online * Jasa Konsultan Penyusunan Laporan Industri Kota Balikpapan Tahun 2024

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*		*10*	*11*	
10	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Balikpapan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**86**	**10,004,336,236**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Balikpapan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**86**	**10,004,336,236**	
10.10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai	80	6,518,703,400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai	80	6,518,703,400	pembayaran gaji dan tunjangan ASN
10.11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	nilai	72	315,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	nilai	72	315,000,000	*Pakaian Dinas beserta Atribut *Seragam Non PNS Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
10.12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai	72	1,040,632,836	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai	72	1,040,632,836	* pembelian alat listrik dan elektronik (Seperti, Baterai,bola lampu kabel, dll) * Belanja Modal Personal Computer * Belanja Modal Printer * penyediaan alat dapur (seperti : gelas, kompor, pring, sendok,dll) * alat tulis kantor , * Makan minum rapat, * penambah daya tahan tubuh. * belanja barang cetakan, banner, form disposisi surat, kotak arsip, map, spanduk, umbul-umbul, fotocopy, penjilidan, bendera. Dll * Belanja Jasa Iklan/Reklame * Adventorial Media Cetak Regional Balikpapan(Iklan Ucapan HUT Kota dan Kaleidoskop) * Langganan Surat Kabar * Belanja Bahan- Bahan/Bibit Tanaman * Belanja Suvenir/Cendera Mata * Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Makan, snack, Paket buah-buahan) * belanja perjalanan dinas
10.13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	72	320,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	72	320,000,000	* Penyediaan kendaran dinas jabatan berupa Sewa 2 Unit Roda 4 * Belanja Modal Mebel (seperti, Rak Arsip, Lemari Arsip. Sofa Tamu) * Belanja Modal Peralatan Olahraga
10.14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	72	1,165,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	72	1,165,000,000	* pembelian materai 10.000,- * pembayaran tagihan/jasa telepon, air dan listrik * Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih * Belanja Souvenir Produk UMKM Binaan Lokal * Belanja Pakaian Batik Khas Kota Balikpapan * Belanja Jasa Tenaga Ahli (Honor Instruktur senam) * Honorarium Rohaniawan (Penceramah) * Gaji Tenaga Bantu (Naban) Non PNS * belanja jasa pelayanan kebersihan (Outsourcing)

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*		*10*	*11*	
10.15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	72	645,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	72	645,000,000	*pemeliharaan kendaraan dinas. *Pajak kendaraan dinas *Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas * Perbaikan dan Pemeliharaan Meubelair Meja Resepsionis, Meja Tamu, Meja Kerja, Sofa, Lemari dll * Belanja BBM Generator * Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin Fotokopi * Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Audio Visual (Televisi, Sound System, Proyektor, CCTV dan Microphone) * Pemeliharaan Mesin Absensi * Belanja Pemeliharaan Genset * Pemeliharaan dan Perbaikan AC * Belanja Pemeliharaan Komputer * Pemeliharaan Printer * Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor DKUMKMP * Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor (Pengecatan Paving Halaman Kantor)
Jumlah						**21,189,499,000**	**Jumlah**					**21,189,499,000**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terhadap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun hasil pengumpulan informasi dilapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kota, dengan langkah – langkah sebagai berikut :

a. Inventarisasi usulan – usulan program dan kegiatan dari masyarakat
b. Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku
c. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan
d. Memeriksa usulan program/kegiatan sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD membuat rekapitulasi usulan program / kegiatan yang sudah di verifikasi baik yang sudah diterima maupun yang ditolak disebabkan kerena tidak mencantumkan Proposal, lokasi, usulan yang diminta, dll)

Tabel 2.5
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Balikpapan

TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
03-01-2023	Sulfaldi Syam	(DKUMKMP) Pelatihan Peningkatan Produk UMKM	Kursus menjahit bagi warga	Jl. Samratulangi RT 2, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Kariangau
03-01-2023	Sulfaldi Syam	(DKUMKMP) Pelatihan Peningkatan Produk UMKM	Banyak pembuat kue dan makanan yang membutuhkan sertifikasi keamanan makanan (10 orang)	RT 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Kariangau

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Koperasi, UMKM dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Koperasi, UMKM dan Perindustrian sebagai berikut:

1.1.1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah

Visi Kementerian Koperasi dan UMKM

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamanan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

1.1.2. Kementerian Perindustrian

Visi Kementerian Perindustrian :

Pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan :

1. **Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.**
2. **Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan**

   Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.

3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional danMeningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

1.1.3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan adalah sebagai berikut

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan sektor Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan sesuai dengan perubahan ke arah perbaikan sistem pembinaan dengan menetapkan visi. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi. Visi dan misi Rencana Startegis Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan 2021-2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2021-2026, berpedoman pada visi kota Balikpapan yaitu:

"Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman".

Sebagaimana Visi Pembangunan Kota Balikpapan tersebut diatas, untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui **Misi ke 5 yaitu Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif**

3.2.1. Tujuan

Penetapan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang berdasarkan visi misi organisasi.

Tujuan lebih mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi, sebab itu tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Dari uraian di atas, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan dengan tujuannya "**MENINGKATNYA PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAERAH"**

3.2.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Koperasi Berkualitas
2. Meningkatnya Pembinaan Usaha Mikro Daerah Melalui Peningkatan Omset UMK
3. Meningkatnya Investasi Terhadap IKM

3.3. Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam Renja 2024 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam draf dokumen Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan tahun 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi.

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas di Tahun 2024 adalah Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel III.3. Berikut ini:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Kota Balikpapan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2024					Catatan penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	target capaian kinerja		Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana		target Capaian kinerja	Kebutuhan rencana tahun 2025
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam**	**Balikpapan**	**6.28**	**persen**	**100,000,000**	**APBD**		**6.07**	**100,000,000**
1.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha simpan pinjam yang masuk dinas terkait	Balikpapan	100	persen	100,000,000	APBD	Pelatihan SKKNI untuk Manager bagi KSP/USP	100	100,000,000
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT**	**Balikpapan**	**21.97**	**persen**	**400,000,000**	**APBD**		**23.01**	**350,000,000**
2.2	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Balikpapan	12.55	persen	400,000,000	APBD	* Pelatihan bagi pengawas Koperasi * Rakor Pengawasan Koperasi Kota Balikpapan * Pendataan Koperasi '* Bimtek Tata Cara Penilaian Kesehatan Koperasi Kota Balikpapan * Pelatihan Rapat Anggota Tahunan (RAT) * Jasa Tenaga Administrasi (Gaji Non PNS)	12.55	350,000,000
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya**	**Balikpapan**	**53.57**	**Persen**	**100,000,000**	**APBD**		**55.17**	**150,000,000**
3.3	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	Balikpapan	40.00	Persen	100,000,000	APBD	* Pemeriksaan Kesehatan Koperasi * Reward Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	48.00	150,000,000
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**persentase koperasi sehat**	**Balikpapan**	**7.53**	**Persen**	**250,000,000**	**APBD**		**10.88**	**250,000,000**
4.4	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Balikpapan	6.28	Persen	250,000,000	APBD	* Pelatihan Kewirausahaan dan Ketrampilan Sablon * Pelatihan Perkoperasian dan Perencanaan Bisnis Bagi UMKM * Peringatan Harkopnas	7.32	250,000,000
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha**	**Balikpapan**	**84.98**	**Persen**	**2,050,000,000**	**APBD**		**86.68**	**1,450,000,000**
5.5	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	Balikpapan	1.42	Persen	2,050,000,000	APBD	* Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru * Pelatihan Pengembangan Produksi dan Pengolahann * Pendataan potensi UMKM * Belanja mesin Batik beserta kelangkapannya (alat canting digital) di tambah Operator yang di kontrak selama 1 tahun sebagai pelatih untuk IKM * Pengembangan Aplikasi Sobatumkmbpn * Pemeliharaan Aplikasi Sobatumkmbpn * Jasa Tenaga Administrasi (gaji Non PNS) Kegiatan temu kemitraan usaha mikro (EO) Workshop Kemudahan Perizinan Bagi UMKM * Sosialisasi HKI * Sosialisasi SJPH * Sosialisasi PP * Registrasi Halal Self Declare * Belanja Registrasi PP * Belanja Registrasi Batik Mark * registrasi merek, cipta, nf * Operasional Dekransada seperti makan minum rapat, tamu, bahan/alat pembersih,dll. * Rakernas Dekranas Tingkat Pusat * Studi Tiru / Studi Banding ke daerah yang telah berhasil dalam pengembangan produk kerajinannya serta memilki karakteristik produk kerajinan yang sejenis dan dapat dikembangkan di Kota Balikpapan	1.78	1,450,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2024					Catatan penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	target capaian kinerja		Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana		target Capaian kinerja	Kebutuhan rencana tahun 2025
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya**	**Balikpapan**	**5.28**	**Persen**	**3,848,565,628**	**APBD**		**5.32**	**3,200,000,000**
6.6	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi**	**Balikpapan**	**0.25**	**Persen**	**3,848,565,628**	**Persen**	* Kegiatan Keikutsertaan Pameran/Promosi Dalam dan Luar Daerah * Gebyar UMKM * Bazar UMKM * Kegiatan Pelatihan Kerajinan dan Non Kerajinan Bagi UMKM * UMKM Balikpapan Award (UB Award) * Pegawai Galeri Dekranasda Kota Balikpapan * Penambahan Tenant di bandara + Dekorasi (belum Update SIPD) Dekorasi * Pengembangan produk kriya melalui Dekranasda * Jasa Tenaga Administrasi (gaji Non PNS)	0.29	3,200,000,000
7	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah**	**Balikpapan**	**1.62**	**Persen**	**4,111,597,136**	**APBD**		**2.12**	**4,942,846,057**
7.7	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK**	**Balikpapan**	**62.5**	**persen**	**4,111,597,136**	**APBD**	* Penyusunan Master Plant Pengembangan Sentra * Operasional UPT SIK * Pemeriksaan / Uji Laboratorium Air Tanah/ Baku dan Limbah Industri di IPAL * Tenaga Kebersihan UPTD SIK di SIKS * Tenaga Keamanan UPTD SIK di SIKT * Jasa Tenaga Teknis Pelayanan Operasional IPAL * Jasa Tenaga Maintenance (Mekanik dan Listrik) UPTD SIK di SIKT * Tenaga administrasi Terampil UPTD SIK * Pemeliharaan Taman dan IPAB SIKT * Pemeilharaan sarana di SIK * Pemeliharaan mesin peralatan di SIK *Belanja Pemeliharaan Lingkungan Sentra (Pemotongan Pohon, Tanaman Laut, Rawa, Pembersihan dan Penataan Lahan Sentra) * Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Kendaraan Operasional Lingkungan Sentra dan IPAL Sentra) * Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Barang Cetak, Kamera CCTV) * Belanja Modal Mebel (Belanja Kursi Pertemuan) * Belanja Modal Alat Pendingin (Belanja Kipas Angin Untuk Kegiatan Pertemuan, Pelatihan, Bimtek, dll dl SIKS / SIKT) * Belanja Speaker Portabel Untuk Kunjungan Eduwisata * Belanja Handphone Untuk Operasionalisasi Retribusi Kekayaan Daerah Secara Digital * Belanja Pembangunan Gudang Untuk Kantor UPTD SIK * Belanja Pembangunan Gazebo Untuk Eduwisata * Penyusunan Kajian Kebutuhan Sumber Daya Industri bagi Pelaku Industri Kecil * Revitalisasi Inkubator Bisnis (Perbaikan Bangunan Inkubator Bisnis) * Belaja Alat Produksi bagi IKM (Alat Produksi Inkubator Bisnis)	67.5	4,942,846,057
8	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**	**Balikpapan**	**13.89**	**Persen**	**115,000,000**	**APBD**		**14.80**	**120,750,000**
8.8	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait**	**Balikpapan**	**80**	**Persen**	**115,000,000**	**APBD**	* Sosialisasi Kebijakan Industri/SIINas * Pengawasan Penerapan Sistem Standar Nasional Indonesia (SNI) (AMDK)	90	120,750,000
9	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini**	**Balikpapan**	**61.54**	**Persen**	**210,000,000**	**APBD**		**64.29**	**220,500,000**
9.9	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota**	**Balikpapan**	**10.86**	**Persen**	**210,000,000**	**APBD**	* Pemeliharaan Sistem Informasi Teknologi SIYANTI * Kegiatan Sosialisasi * Jasa Tenaga Administrasi (gaji Non PNS) * Cetak Media Publikasi * Publikasi Media Online * Jasa Konsultan Penyusunan Laporan Industri Kota Balikpapan Tahun 2024	11.09	220,500,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2024					Catatan penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	target capaian kinerja		Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana		target Capaian kinerja	Kebutuhan rencana tahun 2025
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
10	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**86**	**Nilai**	**10,004,336,236**	**APBD**		**78**	**10,431,053,048**
10.10	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**80**	**nilai**	**6,518,703,400**	**APBD**	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	83	6,518,703,400
10.11	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**72**	**nilai**	**315,000,000**	**APBD**	*Pakaian Dinas beserta Atribut *Seragam Non PNS Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75	375,000,000
10.12	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**72**	**nilai**	**1,040,632,836**	**APBD**	* pembelian alat listrik dan elektronik (Seperti, Baterai,bola lampu kabel, dll) * Belanja Modal Personal Computer * Belanja Modal Printer * penyediaan alat dapur (seperti : gelas, kompor, pring, sendok,dll) * alat tulis kantor , * Makan minum rapat, * penambah daya tahan tubuh. * belanja barang cetakan, banner, form disposisi surat, kotak arsip, map, spanduk, umbul-umbul, fotocopy, penjilidan, bendera. Dll * Belanja Jasa Iklan/Reklame * Adventorial Media Cetak Regional Balikpapan(Iklan Ucapan HUT Kota dan Kaleidoskop) * Langganan Surat Kabar * Belanja Bahan- Bahan/Bibit Tanaman * Belanja Suvenir/Cendera Mata * Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Makan, snack, Paket buah-buahan) * belanja perjalanan dinas	75	1,152,349,648
10.13	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Balikpapan**	**72**	**Nilai**	**320,000,000**	**APBD**	* Penyediaan kendaran dinas jabatan berupa Sewa 2 Unit Roda 4 * Belanja Modal Mebel (seperti, Rak Arsip, Lemari Arsip. Sofa Tamu) * Belanja Modal Peralatan Olahraga	75	300,000,000
10.14	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**72**	**nilai**	**1,165,000,000**	**APBD**	* pembelian materai 10.000,- * pembayaran tagihan/jasa telepon, air dan listrik * Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih * Belanja Souvenir Produk UMKM Binaan Lokal * Belanja Pakaian Batik Khas Kota Balikpapan * Belanja Jasa Tenaga Ahli (Honor Instruktur senam) * Honorarium Rohaniawan (Penceramah) * Gaji Tenaga Bantu (Naban) Non PNS * belanja jasa pelayanan kebersihan (Outsourcing)	75	1,375,000,000
10.15	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**72**	**nilai**	**645,000,000**	**APBD**	*pemeliharaan kendaraan dinas. *Pajak kendaraan dinas *Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas * Perbaikan dan Pemeliharaan Meubelair Meja Resepsionis, Meja Tamu, Meja Kerja, Sofa, Lemari dll * Belanja BBM Generator * Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin Fotokopi * Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Audio Visual (Televisi, Sound System, Proyektor, CCTV dan Microphone) * Pemeliharaan Mesin Absensi * Belanja Pemeliharaan Genset * Pemeliharaan dan Perbaikan AC * Belanja Pemeliharaan Komputer * Pemeliharaan Printer * Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor DKUMKMP * Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor (Pengecatan Paving Halaman Kantor)	75	710,000,000
Jumlah						**21,189,499,000**	**Jumlah**			**21,215,149,105**

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan namun juga diharapkan bersumber pendanaan lainnya (APBN, BANKEU, DEKON, TP, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif TA. 2024 adalah sbb :

Tabel 2.6

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan dana / pagu indikatif
1	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam**	**100,000,000**
1.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha simpan pinjam yang masuk dinas terkait	100,000,000
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT**	**400,000,000**
2.2	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	400,000,000
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya**	**100,000,000**
3.3	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	100,000,000
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**persentase koperasi sehat**	**250,000,000**
4.4	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	250,000,000
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha**	**2,050,000,000**
5.5	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	2,050,000,000
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya**	**3,848,565,628**
6.6	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3,848,565,628
7	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah**	**4,111,597,136**
7.7	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK	4,111,597,136
8	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**	**115,000,000**
8.8	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait	115,000,000
9	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini**	**210,000,000**
9.9	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota	210,000,000
10	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**10,004,336,236**
10.10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,518,703,400
10.11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	315,000,000
10.12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,040,632,836
10.13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	320,000,000
10.14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,165,000,000
10.15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	645,000,000
Jumlah			**21,189,499,000**

BAB V.

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Selain Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, terdapat beberapa Inovasi yang mana Diharapkan dengan inovasi tersebut dapat memberikan informasi tentang Koperasi, UMKM dan Perindustrian yang lebih akurat, meningkatkan kinerja pegawai, memberikan efektivitas dalam pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, serta memudahkan bagi pelaku usaha untuk melaporkan dan memasarkan hasil Produknya dan stakeholders terkait lebih mudah mengetahui dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Tabel 2.7
Inovasi Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Kota Balikpapan

NO	Gambar	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Terkait Inovasi (Tujuan)	Latar Belakang/Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak (Manfaat)
1		**OPTIMALISASI PROMOSI PRODUK UNGGULAN**	sarana promosi produk unggulan diperusahaan swasta dan Menyusun regulasi daerah yang mn di harapkan tersedianya showcase produk unggulan di perusahaan swasta dan implementasi perwali di instansi pemerintah, BUMN, swasta dan sekolah	Menyusun regulasi bagi kegiatan promosi produk unggulan pelaku usaha IKM, serta pengelolaan pemasaran produk di perusahaan jasa pelayanan, dalam rangka mensosialisasikan produk unggulan Kota Balikpapan	Pemerintah Kota Balikpapan, dan stek holder terkait	Mempermudah promosi dan menciptakan identitas yang dikenal di msyarakat melalui produk unggulan olahan panganan dan kerajinan
2		**" SIKOPIN"** Strategi Peningkatan Pelayanan Melalui Pembangunan Sistim Informasi Koperasi, Umkm Dan Perindustrian Di Kota Balikpapan (Sikopind)	SIKOPIND merupakan layanan sistim Koperasi UMKM dan Perindustrian yang dapat memfasilitasi keperluan pelaku usaha serta pendataan secara digital	Kebutuhan akan layanan data yang berbasis digital sudah bukan hal yang baru saat ini. Pelayanan yang berbasis digital sudah menjadi trend baik di sektor pemerintah maupun non pemerintah, oleh karenannya pemenuhan kebutuhan atau ketersediaan data suatu layanan berbasis digital sudah tidak bisa dihindari	Pemerintah Kota Balikpapan, dan stek holder terkait	Memberikan informasi tentang data Koperasi,UMKM dan Perindustrian yang lebih akurat
3		***SIYANTI*** (SIstem Informasi Pos Layanan Teknologi Tepat Guna)	Untuk menyediakan informasi yang cepat, mudah diakses dan lengkap mengenai masil inovasi dan kegiatan pengembangan teknologi tepat guna di masyarakat	Perlunya aplikasi yang memudahkan dalam pengelolaan data serta akses informasi mengenai inovasi dan teknologi tepat guna	Pemerintah Kota Balikpapan dan Seluruh Masyarakat	Memberikan kemudahan bagi pos layanan teknologi tepat guna dalam mengelola data serta memberikan kemudahan akses informasi teknologi tepat guna dan inovasi bagi masyarakat
4		**"PERIUK NASI"** (Pembayaran Digital Retribusi Kekayaan Daerah di Sentra Industri)	"PERIUK NASI" yang merupakan akronim dari Pembayaran Digital Retribusi Kekayaan Daerah di Sentra Industri Kecil	suatu inovasi yangmendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan Bank Indonesia serta bagian dari target Kepala DKUMKMP di Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2D yang mana sangat diperlukan dalam rangka satu QR CODE untuk semua aplikasi dompet digital (e-wallet) atau digital banking.	Pelaku IKM di Sentra	memberikan kemudahan bagi IKM di Sentra dalam melakukan pembayaran secara praktis dan aman,
5		**Sobat UMKM Balikpapan (APK)**	Aplikasi yang dibuat untuk mempermudah pelaku UMKM Kota Balikpapan untuk memasarkan produknya secara digital dengan mengunduh melalui Playstore Android . "Jual Beli dalam Genggaman"	Belum adanya sistem aplikasi digital pemasaran produk UMKM yang memudahkan pengguna untuk memasarkan produknya.	Pelaku UMKM, Pemerintah Kota Balikpapan dan Seluruh Masyarakat	mempermudah pelaku UMKM untuk memasarkan/Memprom osikan produknya secara digital sehingga masyarakat dapat dengan mudah membeli produk umkm Kota Balikpapan

6		**“KE SIK SOMBER BERPRODUKSI”** Kebijakan sentra industri kecil somber berkonsep produksi, edukasi dan rekreasi	Sentra Industri Kecil (SIK) Somber) merupakan Kawasan sentra industri kecil, mengolah produk bahan baku kedelai, khususnya tahu dan tempe di Kota Balikpapan, yang akan dijadikan sebagai Kawasan Baru berkonsep Produksi, Edukasi dan Rekreasi.	revitalisasi dan moderinisasi alat produksi, sehingga tercipta produksi bersih, hygienis dan ramah lingkungan Produksi : mengutamakan produksi bersih dan hygiene, meningkatkan efisiensi, kualitas, keamanan kerja dan mengurangi dampak lingkungan. Edukasi : Pengembangan edukasi pengolahan, diversifikasi berbahan kedelai ruang, rumah contoh produksi , workshop, pendidikan dan pelatihan Rekreasi : Pengembangan pusat wisata: membuat pusat wisata, tur pabrik, pendidikan interaktif dan kreatif, membuat tempat rekreasi dan kuliner. .	Pemerintah Kota Balikpapan dan Seluruh Masyarakat	Penerapan imflementasi kebijakan dengan kolaborasi dan sinergikan konsep produksi, edukasi, dan rekreasi di SIK Somber dengan stake holder, dapat menjadi daya tarik sebagai tujuan wisata yang unik, menarik dan edukatif
7		**“FITS BALIKPAPAN”** FROM IDEA TO STARTUP (FITS) BALIKPAPAN	Peningkatan peran Koperasi, UMKM dan Industri dalam pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan a.Digitalisasi pendukung data dan informasi OSS (Kemeninves/BKPM) dan ODS (KemenkopUKM). b.Penumbuhan UMKM dan wirausaha baru sebagai indikator capaian target kinerja baru. c.Pengembangan kawasan pengolahan industri kecil menjadi industri kreatif penopang kebutuhan masyarakat dan daerah lainnya	inovasi baru Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan berupa program kerja baru kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat menciptakan wirausaha dan UMKM baru menjadi startup (perusahaan yang sedang mencari dan mengembangkan pasar berbasis internet, teknologi dan web, yang mampu menggerakan perekonomian masyarakat dan jasa dengan tujuan masyarakat dapat mandiri dan mapan)	Pelaku UMKM, Pemerintah Kota Balikpapan dan Seluruh Masyarakat	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim usaha dan daya saing, serta memperluas kesempatan kerja, perlu dilakukan upaya percepatan penumbuhan dan rasio kewirausahaan melalui penumbuhkembangan wirausaha.

BAB VI.

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feed-

back terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan.4
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Kontribusi pelaku usaha sektor Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya sangat besar oleh karena itu harus selalu dikembangkan secara berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Balikpapan, Agustus 2023
Kepala Dinas
Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Kota Balikpapan

HERURESSANDY SETIA KESUMA

LAMPIRAN

SK Renja 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-227/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian perlu membentuk Tim Penyusun Renja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2023 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Renja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Pengarah:
   a. memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian tahun 2024 dan perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian tahun 2023;
   b. mengoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja; dan
   c. menetapkan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian tahun 2024 dan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian tahun 2023.

2. Ketua:
   a. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja;
   b. membantu Pengarah dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Renja;
   c. memimpin penyusunan Renja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian tahun 2021-2026; dan
   d. memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun Renja kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian.

3. Sekretaris:
   a. menyiapkan data dan bahan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian tahun 2024 dan perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian tahun 2023;
   b. mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan pembahasan Tim Penyusun Renja;
   c. melakukan pencatatan hasil pembahasan Tim Penyusun Renja;

d. menyusun konsep laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun Renja; dan
e. mendokumentasikan hasil pekerjaan Tim Penyusun Renja.

4. Anggota:
a. melakukan peninjauan kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya;
b. melakukan analisis kinerja pelayanan;
c. melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
d. merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan berdasarkan Renstra perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian tahun 2021-2026.

KETIGA : Tim Penyusun Renja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua terhitung mulai bulan Januari 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 6 April 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
2. Kepala DKUMKMP Kota Balikpapan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-227/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONEL TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Program dan Keuangan
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah 2. Kepala Bidang Industri Kecil Menengah 3. Kepala Bidang Teknologi dan Sumber Daya Industri 4. Kepala Subbagian Umum 5. Hj. Rabiatun 6. Lily Suhernawati 7. Hairiah 8. Fenti Khastutie 9. Jane Grace A. 10. Zuraidah Lumongga 11. Budi Wahyudi

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

RENJA 2024

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN						**19.189.499.000,00**							**19.215.149.105,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.752.901.864,00**							**15.931.053.048,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**16.752.901.864,00**							**15.931.053.048,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**-**			**86 Nilai**	**10.004.336.236,00**						**-**	**10.431.053.048,00**	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			80 Nilai	6.518.703.400,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP	-	6.518.703.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	6.518.703.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		6.518.703.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			72 Nilai	315.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP	-	375.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	65.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			72 Nilai	1.040.632.836,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP	-	1.152.349.648,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	120.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	240.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		260.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	125.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	55.632.836,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		57.349.648,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				36 Laporan	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		115.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	360.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			72 Nilai	320.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP	-	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	187.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	57.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	75.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			72 Nilai	1.165.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP	-	1.375.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	230.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		235.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	925.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		1.125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			72 Nilai	645.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP	-	710.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	320.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	130.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		140.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	125.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DKUMKMP		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	***Persentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam***	**-**			**6.28 %**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*persentase verifikasi izin usaha simpan pinjam yang masuk dinas terkait*	-			100 %	100.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan	-	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				20 Unit Usaha	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT***	**-**			**21.97 %**	**400.000.000,00**						**-**	**350.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan*	-			12.55 %	400.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan	-	350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				120 Unit Usaha	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				60 Unit Usaha	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase Koperasi yang Meningkat Status Kesehatannya***	**-**			**53.57 %**	**100.000.000,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya*	-			40.00 %	100.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan	-	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				4 Unit Usaha	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase Koperasi Sehat***	**-**			**7.53 %**	**250.000.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah UKMAnggota Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan*	-			6.28 %	250.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan	-	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				30 Unit Usaha	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha***	**-**			**84.98 %**	**2.050.000.000,00**						**-**	**1.450.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*persentase Usaha mikro yang memiliki izin*	-			1.42 %	2.050.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan	-	1.450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				50 Unit Usaha	125.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				90 Unit Usaha	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				15 Orang	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				48 Orang	975.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya***	**-**			**5.28 %**	**3.848.565.628,00**						**-**	**3.200.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi*	-			0.25 %	3.848.565.628,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan	-	3.200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				100 Unit Usaha	3.848.565.628,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan		3.200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.436.597.136,00**							**3.284.096.057,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**2.436.597.136,00**							**3.284.096.057,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah***	**-**			**1.62 %**	**2.111.597.136,00**						**-**	**2.942.846.057,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK (DAK / BanKeu)*	-			62.5 %	2.111.597.136,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	-	2.942.846.057,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				3 Dokumen	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2 Dokumen	911.597.136,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan		1.742.846.057,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait***	**-**			**13.89 %**	**115.000.000,00**						**-**	**120.750.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait*	-			80 %	115.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	-	120.750.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	115.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan		120.750.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini***	**-**			**61.54 %**	**210.000.000,00**						**-**	**220.500.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota*	-			10.86 %	210.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	-	220.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	110.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan		120.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
		UPTD SENTRA INDUSTRI KECIL DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN						**2.000.000.000,00**							**2.000.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.000.000.000,00**							**2.000.000.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**2.000.000.000,00**							**2.000.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah***	**-**			**1.62 %**	**2.000.000.000,00**						**-**	**2.000.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK*	-			62.5 %	2.000.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	-	2.000.000.000,00	UPTD SENTRA INDUSTRI KECIL DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				3 Dokumen	2.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan		2.000.000.000,00	UPTD SENTRA INDUSTRI KECIL DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	J U M L A H							**21.189.499.000,00**							**21.215.149.105,00**	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja erangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen rencana resmi daerah yang ipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.Secara teknis, penyusunan RENJA SKPD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

3. RENJA PD merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Gambar 1.1

Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota

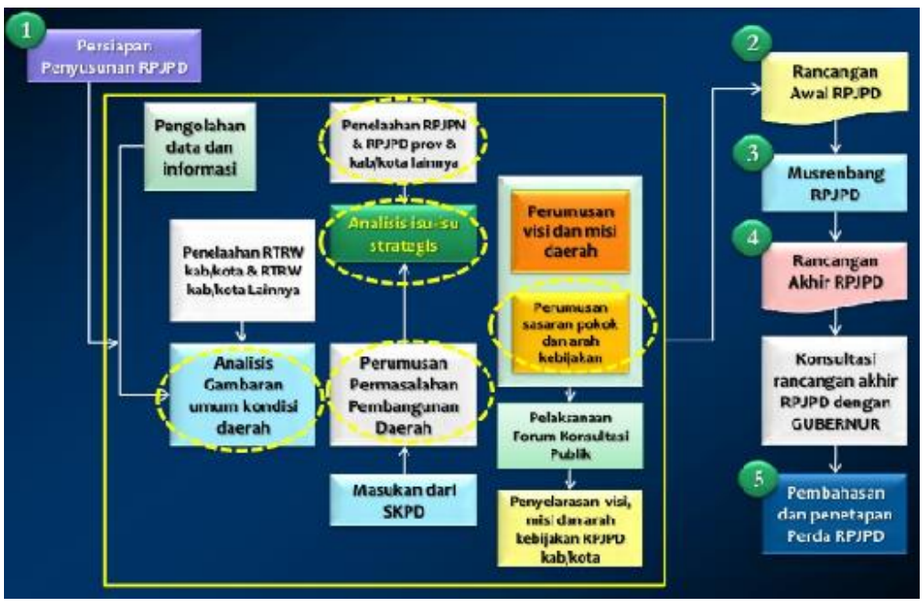

Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA DPMPTSP Tahun 2024 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026;
3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output)

dari Progran, Kegiatan hingga Sub Kegiatan dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari dan menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 DPMPTSP Kota Balikpapan adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT);
14. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2024 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II . HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan sub urusan pemerintahan bidang pelayanan satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi sub urusan pengembangan, promosi, pelayanan, pengendalian, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2022, DPMPTSP Kota Balikpapan menjalankan 6 (enam) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian target, tujuan dan sasaran dinas pada tahun berjalan sesuai Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP tahun 2021-2026. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapa dirincikan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Administrasi Keuangan

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

III. Program Promosi Penanaman Modal

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

IV. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

V. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. **Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
   b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
   c. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. **Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Pagu Anggaran DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2022 (murni) sebesar **Rp 14.312.790.547,-** (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuah Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)**.** Dan berdasarkan dokumen APBD-P Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022 tanggal 3 Okt 2022 dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022, Pagu Anggaran Perubahan DMPTSP Kota Balikpapan menjadi sebesar menjadi **Rp 15.069.915.547,-** (Lima Belas Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Perubahan dilakukan pada dana kegiatan – kegiatan yang dianggap prioritas untuk dilakukan penambahan.

Program dan Kegiatan DMPTSP Kota Balikpapan yang mengalami perubahan setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota

Balikpapan 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terjadi perubahan penjabaran dari pagu Rp 8.957.468.147 menjadi Rp 8.957.468.147
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari Rp 100.000.000 menjadi Rp 530.000.000
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari Rp 149 999 600 menjadi Rp 187.124.600
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari Rp 49.999.800 menjadi Rp 59.999.800
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari Rp 100.000.000 menjadi Rp 250.000.000
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari Rp 549.920.500 menjadi Rp 484.920.500
7. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota dari Rp 465.998.000 menjadi 530.998.000
8. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dari Rp 440.484.500 menjadi Rp 570.484.500
9. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mendapatkan tambahan pagu dari dana DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dari BKPM RI dengan pagu semula Rp 199.994.200 menjadi Rp 558.127.200
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mendapatkan tambahan pagu dari dana DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dari BKPM RI dengan pagu semula Rp 115.000.000 menjadi Rp 155.000.000

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan s/d
Tahun 2022, berdasarkan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran

kinerja ini merupakanhasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran (output) dan hasil (outcome).Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

1. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT),dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut

Secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2022 telah mencapai target yang telah direncanakan dengan level capaian target dalam rentang 80 – 100 % dengan level capaian antara tinggi hingga sangat tinggi. Tahun 2022 Realisasi Pekerjaan Fisik sebesar **95,24 %** dengan Realisasi Keuangan DPMPTSP sebesar **86,78 %** (level capaian dalam kategori Baik) . Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak memenuhi target Keuangan namun tercapai realisasi fisiknya seperti:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

   Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100 % dan penyerapan anggaran hanya sebesar 83,96%. Terdapat SILPA postif (Penghematan)

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100 % dan penyerapan anggaran hanya sebesar 86,16%. Terdapat SILPA postif (Penghematan)

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100 % dan penyerapan anggaran hanya sebesar 71,96 %. Terdapat SILPA positif (Penghematan), karena kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan masih sebagian besar masih dalam kondisi baik sehingga tidak memerlukan service/pemeliharaan.

4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100 % dan penyerapan anggaran hanya sebesar 80,08 %. Terdapat SILPA, karena terdapat paket sosialisasi Pengawasan Penanaman Modal dengan sumber dana DAK Non Fisik yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Fitur Sub Sistem Pengawasan di OSS belum berjalan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 2 pada Rencana Kerja ini.

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Balikpapan

Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2022

1. Presentase Pencapaian Nilai realisasi investasi 100%
2. Nilai Reformasi Birokrasi Pada DPMPTSP Kota Balikpapan 0,11%
3. Presentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat 34,12

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi**	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah**	**80%**	**664.995.000**	**80%**	**657.023.564**	**100%**	**98,80%**	**Tingkat capaian tercapai 100% karena terdapat peningkatan minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal di Kota Balikpapan yang ditandai oleh beberapa audensi penjajakan peluang investasi dari Malaysia serta tindak lanjut waste management oleh Korea Selatan**

		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kenaikan Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**5%**	**664.995.000**	**5%**	**657.023.564**	**100%**	**98,80%**	**Tingkat capaian tercapai 100% karena kegiatan promosi dilaksanakan secara maksimal baik yang menggunakan dana PAD maupun Non PAD (Briefing Session on Indonesia Investment Opportunity oleh Bank Indonesia)**
		Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Jenis Sarana Promosi (Jenis)	4	133.997.000	4	129.016.000	100%	96,28%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal (event)	5	530.998.000	5	528.007.564	100%	99,44%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target

No	**Sasaran**	**Program/ Kegiatan/Sub kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)**	**Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)**		**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)**		**Penjelasan**
1	2	3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Presentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal**	**5%**	**425.761.300**	**0%**	**406.689.813**	**0%**	**95,52%**	**Belum tercapai karena Perda Insentif Kemudahan Berusaha masih dalam proses pengesahan oleh DPRD Kota Balikpapan**

		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali/Raperwali) yang disahkan**	**20%**	**148.310.800**	**20%**	**135.234.762**	**100%**	**91,18%**	Belum tercapai karena Perda Insentif Kemudahan Berusaha masih dalam proses pengesahan oleh DPRD Kota Balikpapan
		Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen rancangan fasilitasi insentif kemudahan investasi (dokumen)	1	148.310.800	1	135.234.762	100%	91,18%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target (Output berupa Naskah Penjelasan yang telah diajukan ke Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023)
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Persentase Dokumen Peta Potensi yang Diterbitkan**	**20%**	**277.450.500**	**0**	**271.455.051**	**100%**	**97,84%**	**Tingkat capaian tercapai 100%**
		Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RUPM Kota Balikpapan (Dokumen)	**1**	127.669.400	1	126.009.700	100%	98,70%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
		Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1	149.781.100	1	145.445.351	100%	97,11%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target

No	**Sasaran**	**Program/ Kegiatan/Sub kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)**	**Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)**		**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)**		**Penjelasan**
1	2	3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	

3		**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya**	**100%**	**713.127.200**	**100%**	**446.941.748**	**100%**	**62,67%**	**Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target karena Fasilitasi dan Pendampingan permasalahan Penanaman Modal dilaksanakan baik secara offline maupun online (zoom) terutama untuk Perusahaan yang berkantor di luar daerah**
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyampaian LKPM (LKPM)**	**300**	**713.127.200**	**2182**	**446.941.748**	**727%**	**62,67%**	**Tingkat Capaian kinerja tercapai 727% dengan realisasi 2182 LKPM dari jumlah 300 LKPM yang ditargetkan**
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah proyek yang dilakukan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	-	0	-	0%	0%	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (PAD)	100	558.127.200	100	446.941.748	100%	80,08%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
			Jumlah Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitasi Penyelesaian permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha (DAK NF FPM) (Kegiatan usaha)	9		0	-	0%	0%	Fitur Sub Sistem Pengawasan di OSS belum berjalan
			Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pelaku Usaha (DAK NF FPM) (Pelaku Usaha)	498		510	-	102,41%	0%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (PAD)	6	115.000.000	16	90.374.922	266,67%	78,59%	Melampaui target karena memaksimalkan kegiatan pengawasan dan pendampingan baik secara offline maupun online

			Jumlah Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha yang memperoleh Pengawasan Penanaman Modal (DAK NF FPM) (Kegiatan Usaha)	16	40.000.000	0	-	0%	0%	Fitur Sub Sistem Pengawasan di OSS belum berjalan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4		**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berlaku efektif**	**84**	**570.484.500**	**91,035**	**551.749.100**	**108,38%**	**97%**	**Melampaui target disebabkan oleh berdasarkan OSS RBA untuk usaha yang berisiko rendah dan menengah rendah izin tersebut langsung terbit tanpa melalui verifikasi instansi teknis/instansi Pusat terkait**
		Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota	**Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi**	**100**	**570.484.500**	**100**	**551.749.100**	**100%**	**97%**	**Tingkat capaian kinerja tercapai 100% karena seluruh permohonan permintaan data melalui PPID DPMPTSP telah terpenuhi**
		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Jenis Media Publikasi Perizinan dan Investasi (jenis)	3	570.484.500	3	551.749.100	100%	97%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target

		Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemeliharaan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan (aplikasi)	4		1		25%		Realisasi tercapai 25% atau sebesar 1 jenis dari 4 jenis yang ditargetkan karena keterbatasan anggaran tahun 2022
			Jumlah pengembangan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan (aplikasi)	4		4		100%		Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
			Jumlah Penyediaan Bahan/Media/Informasi Layanan Perizinan dan Investasi (Jenis media)	3		3		100%		Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	**Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**67**	**811.999.400**	**88,17**	**779.284.742**	**131,60%**	**96%**	**Berdasarkan pengolahan data dari DPMPTSP realisasi tercapai 88,17% jika dibandingkan dengan target 67% dengan jumlah penerbitan sejumlah 13.202 izin jika dibandingkan dengan jumlah permohonan yang diajukan sebesar 14.974 izin**

		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan (Dokumen)**	**11596**	**811.999.400**	**19.965**	**779.284.742**	**172%**	**96%**	**Melampaui target terdapat berbagai fasilitas dan pendampingan dalam pengurusan perizinan baik secara offline maupun online**
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan	6.200	577.000.000	5.571	547.806.198	90%	95%	Belum tercapai karena terdapat beberapa izin yang tidak dapat diterbitkan karena terkendala kurang lengkapnya administrasi perizinan
		Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha	96	85.000.000	221	82.651.220	230%	97%	melampaui target dikarenakan makin meningkatnya pelaku usaha yang mengajukan verifikasi untuk pemenuhan dokumen perizinannya pada DPMPTSP Kota Balikpapan
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan dan konsultasi yang dilayani	10.000	149.999.400	14.173	148.827.324	142%	99%	Melampaui target disebabkan oleh memaksimalkan pelayanan dan pendampingan OSS baik secara offline maupun online
			Jumlah Pelayanan Perizinan Keliling (Kali)	24	182.842.200	24		100%	88%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
			Jumlah survei SKM yang dilaksanakan	1	-	1		100%	0%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target

No	**Sasaran**	**Program/ Kegiatan/Sub kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan**	**Target Kinerja dan Anggaran Renja**	**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran**	**Tingkat Capaian Kinerja dan**	**Penjelasan**

			(output)/Sub Kegiatan (output)	PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		
1	2	3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**78,00**	**11.883.548.147**	**78,02**	**10.146.275.325**	**100,03%**	**85,38%**	**(Tercapai) Hasil responden pengisian kuesioner IKM terhadap pelayanan dinas yang diberikan oleh petugas**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP**	**77,2**	-	**77,57**		**100,48%**	**0%**	Target Nilai SAKIP mencapai 77,57 atau tercapai 100,48% dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 77,2
		Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	-	1		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1		1		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	2		2		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1		1		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	1		1		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP	1	-	1		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kota Balikpapan**	**76,5**	**8.957.468.147**	**78,02**	**7.520.444.176**	**102%**	**83,96%**	**(Tercapai) Hasil responden pengisian kuesioner IKM terhadap pelayanan dinas yang diberikan oleh petugas**
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26	8.957.468.147	26	7.520.444.176	100%	83,96%	Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN
		Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12		12		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntasi dengan BPKD	4		4		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (calk)	1		1		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	2		2		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan	24		24		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi dan Prognosis anggaran	13		13		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

No	**Sasaran**	**Program/ Kegiatan/Sub kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)**	**Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)**		**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)**		**Penjelasan**
1	2	3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**76,5**	-	**78,02**		**102%**	**0**	**(Tercapai) Hasil responden pengisian kuesioner IKM terhadap pelayanan dinas yang diberikan oleh petugas**
		Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	2		2		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Inventaris BMD	1		1		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

		Sub kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Kondisi BMD	1		1		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Kartu Inventaris BMD	59		59		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD	2		2		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen penatausahaan BMD	2		2		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen pemanfaatan BMD	1		1		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

No	**Sasaran**	**Program/ Kegiatan/Sub kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)**	**Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)**		**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)**		**Penjelasan**
1	2	3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**77**	-	**78,02**		**101%**	**0**	**(Tercapai) Hasil responden pengisian kuesioner IKM terhadap pelayanan dinas yang diberikan oleh petugas**

		Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai	1		1		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	70		0		0%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Kepegawaian	12		12		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	12		12		100%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP	60		51		85%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	60		106		177%	0	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Penjelasan

1	2	3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**76**	**1.057.119.400**	**78,02**	**1.042.145.964**	**103%**	**98,58%**	**(Tercapai) Hasil responden pengisian kuesioner IKM terhadap pelayanan dinas yang diberikan oleh petugas**
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	29.995.000	9	29.520.000	100%	98%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	530.000.000	6	523.009.800	100%	99%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	2	187.124.600	2	181.522.500	100%	97,01%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3	59.999.800	3	58.095.800	100%	96,83%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
		Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	100	-	0	0	0%	0,00%	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah (kali)	50	250.000.000	44	249.997.864	88%	100,00%	Tercapai 88% atau sebanyak 44 laporan dari 50 laporan target tidak tercapai disebabkan oleh jumlah perjalanan dinas disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78**	**1.344.920.500**	**78,02**	**1.188.729.460**	**100,03%**	**88,39%**	**(Tercapai) Hasil responden pengisian kuesioner IKM terhadap pelayanan dinas yang diberikan oleh petugas**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	1	10.000.000	1	10.000.000	100%	100,00%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4	484.920.500	4	446.330.677	100%	92,04%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan	3984.5	850.000.000	3.984,5	732.398.783	100%	86,16%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
1	2	3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76**	**524.040.100**	**78,02**	**394.955.725**	**103%**	**75,37%**	**(Tercapai) Hasil responden pengisian kuesioner IKM terhadap pelayanan dinas yang diberikan oleh petugas**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	24	330.000.000	24	237.469.655	100%	71,96%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8	194.040.100	7	157.486.070	88%	81,16%	Terdapat target kinerja yang tidak tercapai yaitu Belanja Pemeliharaan Instalasi air karena kondisi masih baik
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-					
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud	6		4		67%		Jumlah pengembangan aplikasi DPMPTSP Tahun 2022
TOTAL					**15.069.915.547**		**13.078.339.214**			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN								**101,06%**	**43,33%**	

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN	**154,66%**	**68,42%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Sedang**	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**90,0%**	**89,2%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	**Tinggi**	**Tinggi**	

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa :

1. **Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :**
    - **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** dengan tingkat capaian kinerja 0% dan capaian keuangan 95,52% dengan target indikator program yaitu Presentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal dengan target kinerja sebesar 5% namun realisasi kinerja pada tahun 2022 belum tercapai (0%) karena belum tercapai karena Perda Insentif Kemudahan Berusaha masih dalam proses pengesahan oleh DPRD Kota Balikpapan.
2. **Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :**
    - **Program Promosi Penanaman Modal** dengan tingkat capaian kinerja 100% dan capaian keuangan 98,80% dengan target indikator program yaitu Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah dengan target kinerja sebesar 80% dan terealisasi sebesar 80% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100% karena terdapat peningkatan minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal di Kota Balikpapan yang ditandai oleh beberapa audensi penjajakan peluang investasi dari Malaysia serta tindak lanjut waste management oleh Korea Selatan.
    - **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan tingkat capaian kinerja 100% dan capaian keuangan 62,67% dengan target indikator program yaitu Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100% karena Fasilitasi dan Pendampingan permasalahan Penanaman Modal dilaksanakan baik secara offline maupun online (zoom) terutama untuk Perusahaan yang berkantor di luar daerah.

3. **Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :**
    - **Program Pelayanan Penanaman Modal** dengan tingkat capaian kinerja 131,60% dan capaian keuangan 96% dengan target indikator program yaitu Persentase Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan yang diterbitkan dengan target kinerja sebesar 67% dan terealisasi sebesar 88,17% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 131,60% dengan jumlah penerbitan sejumlah 13.202 izin jika dibandingkan dengan jumlah permohonan yang diajukan sebesar 14.974 izin

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan tingkat capaian kinerja 100,03% dan capaian keuangan 85,38% dengan target indikator program yaitu IKM Internal Perangkat Daerah dengan target kinerja Skor IKM sebesar 78,00 dan terealisasi sebesar 78,02 sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100,03% dengan hasil responden pengisian kuesioner IKM terhadap pelayanan dinas yang diberikan oleh petugas tercapai cukup baik.

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

- Masih terdapatnya ketidaksesuaian indikator keluaran antara dokumen Renja dan APBD (DPA/RKA)
- Masih terdapatnya beda satuan pada indikator dalam perencanaan di dokumen Renja dan APBD (DPA/RKA)
- Terdapat jenis target yang tidak terealisasi;
- Program, kegiatan dan Sub Kegiatan tidak seluruhnya terakomodir dalam APBD;
- Target output yang rendah pada saat penyusunan Renstra dan tidak melakukan analisa terhadap rencana dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya;
- Perumusan indikator dan metode perhitungan yang kurang tepat mempengaruhi pencapaian target dikarenakan kesulitan untuk melakukan perhitungan

5. Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

- Melakukan reviu serta penelaahan indikator kinerja program, kegiatan, Sub Kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis yang akan datang;
- Menentukan target secara realistis dan berdasar sesuai dengan rumusan perhitungan pencapaian targetnya;

- Memiliki data dasar pada setiap indikator kinerja sehingga dapat terukur dan dipertanggung jawabkan;
- Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian pada tahun-tahun sebelumnya;
- Komitmen bersama seluruh Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja.

2.2 Analisisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan merupakan instansi teknis dan tidak memiliki SPM, sehingga capaian kinerjanya merupakan capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tupoksinya. .Adapun capaian kinerja DPMPTSP Kota Balikpapan periode yang lalu digambarkan pada tabel T-C .30 di bawah ini :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian / PROYEKSI				Catatan Analisis
			Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	100%	100%	100%	100%	463,26%	N/A	Sesuai Target Renstra		Target dan Realisasi IKU pada tahun 2021 tidak dapat diinput karena perbedaan indikator dengan Renstra yang baru
2	Meningkatnya kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan	34,12	34,13	34,14	34,14	104,28%	N/A			
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	4278,0%	N/A			

Berdasarkan tabel tersebut di atas, capaian kinerja DPMPTSP Kota Balikpapan secara keseluruhan tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.

- **Indikator I "Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi'',** dengan realisasi sebesar **463,26 %** dari target 100% sehingga capaian indikator I sebesar **463,26 %** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi
- **Indikator II "Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan" ,** dengan realisasi sebesar 35,58 dari target 34,12 sehingga capaian sebesar **104.28%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi
- **Indikator III "Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat" ,** dengan realisasi sebesar 4,71 dari target 0,11 sehingga capaian sebesar **4282%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

Dengan demikian maka secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan telah melaksanakan

tugas dan fungsi dalam urusan penanaman modal secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

a. Tingkat Pelayanan DPMPTSP

Secara umum kualitas penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP kota Balikpapan terus menerus mengalami peningkatan, beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan tersebut meliputi :

1. Isu strategis yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Balikpapan pada tahun 2024 adalah terbentuknya Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan yang telah diresmikan secara nasional pada tanggal 5 Desember 2022 sebagai pengembangan yang lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, BUMD dan swasta dan pada pengembangannya akan di *upgrade* menjadi Mal Pelayanan Publik Digital;
2. Pelayanan Pendampingan OSS (Online Single Submission), Antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan perusahaan melalui OSS, maka diperlukan pendampingan secara intensif untuk melakukan proses registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta pengajuan perijinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Jumlah Izin yang melalui OSS DPMPTSP Kota Balikpapan adalah sebanyak 33 Jenis Izin dari total 80 Jenis Izin yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Balikpapan);
3. Mempermudah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Balikpapan melalui beberapa inovasi pelayanan yaitu : SiJempol (Sistem Jemput Bola), Reklame Prioritas, dan sebagainya;
4. Melakukan sosialisasi pelayanan perizinan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial serta melaksanakan kegiatan sosialisasi langsung kepada stakeholder terkait;
5. Penyederhanaan proses perizinan;
6. Memfasilitasi investor apabila ada permasalahan dengan masyarakat;

7. Beberapa pelayanan perizinan hanya dilakukan satu pintu DPMPTSP sehingga masyarakat lebih mudah untuk melakukan pengurusan;
8. Meningkatkan investasi disektor pariwisata dengan kegiatan promosi/pameran baik yang dilaksanakan pada event skala regional maupun event berskala nasional;
9. Meningkatkan sasaran penyelenggaraan promosi investasi dan sosialisasi investasi di Kota Balikpapan.

b. Permasalahan dan hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan tersebut, dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan antara lain :

1. Masih terdapat beberapa Peraturan Menteri yang belum menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi secara elektronik (OSS);
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan kementerian terkait perizinan sehingga jika terjadi masalah teknis perijinan tidak mendapat jawaban yang pasti;
3. Belum terbaharuinya beberapa Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat dan zaman;
4. Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan tentang perizinan;
5. Belum optimalnya pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin atau izin yang sudah kadaluarsa;
6. Sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas sehari-hari tidak maksimal;
7. Sumber daya manusia yang terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi yang memberikan pelayanan perizinan;

8. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat bagi sumber daya manusia di DPMPTSP melalui pelatihan-pelatihan, kursus-kursus serta diklat fungsional;
9. Belum terkininya atau terbaharuinya Standard Operational Procedure (SOP), Standar Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP dan dokumen Pedoman Pelayanan DPMPTSP sebagai acuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
10. Sengketa Kepemilikan tanah sehingga menjadi kendala pada saat pembahasan Izin Prinsip dan IMTN;
11. RTRW dan RDTR yang belum baku sehingga menjadi kendala pada saat pembahasan perizinan seperti izin prinsip, IMB dan sebagainya.

c. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan

Disamping permasalahan yang telah disebutkan pada poin b diatas, DPMPTSP memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam hal meningkatkan pertumbuhan Investasi di Kota Balikpapan. Dengan terus menggiatkan inovasi, DPMPTSP memiliki dinamika tantangan dan peluang sebagai berikut :

- **Pengembangan aplikasi SICANTIK** (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu Untuk Publik) bekerjasama dengan Diskominfo Kota Balikpapan dengan tujuan untuk mempermudah proses penyampaian informasi pelayanan dan tranparansi biaya pengurusan izin.

- **Tracking Barcode dalam SICANTIK** (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu Untuk Publik) sehingga *tracking* proses perizinan dapat diketahui langsung oleh pemohon dengan mudah, cepat dan transparan.

- **SPONTAN (Sistem Pendaftaran Online tanpa antrian)**

  Inovasi SPONTAN aplikasi untuk pemenuhan komitmen dimasa pandemic. Pengajuan dan penerbitan izin bisa didownload langsung via email pemohon.

- **SIBER (sistem Antar Izin Terbit)**

Inovasi SIBER (sistem antar izin terbit) yang dibuat untuk izin yang tidak terbit sesuai SOP dan bekerjasama dengan Ojek Online untuk pengantaran berkasnya.

- **SiJEMPOL (Sistem Jemput Bola Langsung)**

  Merupakan Inovasi yang dirilis bulan Februari 2018, dimana Petugas Perijinan DPMPTSP langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pelayanan perijinan baik perijinan usaha, IMB dan Perijinan lainnya di lokasi yang telah ditetapkan sehingga memperdekat jarak antara masyarakat yang ingin mengurus izin.

- **Simpananku Kopi**

  Merupakan layanan Memudahkan difabel dan manula dalam mengajukan perizinan berusaha dimasa pandemic.izin bisa dijemput dan diantar.

- **Mimbari Online**

  Merupakan layanan untuk mempermudah pengurusan IMB rumah ibadah lebih cepat dan mudah terbit tanpa retribusi

- Kualitas SDM DPMPTSP yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
- Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan teknologi yang memadai;

Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan Perizinan dan Penanaman Modal baik secara pengendalian dan pengawasan beserta evaluasinya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 DPMPTSP Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**Balikpapan**	**Presentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal**	**5%**	**185.250.000**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Balikpapan**	**Presentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal**	**5%**	**185.250.000**	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Presentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali Yang disahkan**	**20%**	**100.000.000**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Presentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali Yang disahkan**	**20%**	**100.000.000**	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Balikpapan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	1	100.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Balikpapan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	1	100.000.000	

	kemudahan Penanaman Modal		Penanaman Modal			kemudahan Penanaman Modal		Modal			
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Presentase dokumen peta potensi yang diterbitkan**	**20%**	**85.250.000**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Presentase dokumen peta potensi yang diterbitkan**	**20%**	**85.250.000**	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	85.250.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	85.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Promosi Penanaman Modal	**Balikpapan**	**Presentase minat invstasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah**	**85%**	**1.078.085.000**	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Balikpapan**	**Presentase minat invstasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah**	**85%**	**693.674.000**	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi	**Balikpapan**	**Presentase kenaikan jumlah kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**5%**	**1.078.085.000**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi**	**Balikpapan**	**Presentase kenaikan jumlah kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**5%**	**693.674.000**	

	kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					**kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Balikpapan	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	162.676.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Balikpapan	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	162.676.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	915.409.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	530.998.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**Balikpapan**	**Presentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi permasalahan penanaman modalnya**	**100%**	**540.000.000**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Balikpapan**	**Presentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi permasalahan penanaman modalnya**	**100%**	**540.000.000**	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Jumlah Penyampaian LKPM**	**330 LKPM**	**540.000.000**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Jumlah Penyampaian LKPM**	**330 LKPM**	**540.000.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Balikpapan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Balikpapan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4	100.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	125	240.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	125	240.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Balikpapan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	10	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Balikpapan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	10	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Penanaman Modal	**Balikpapan**	**Presentase Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan**	**69**	**486.020.000**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	Balikpapan	**Presentase Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan**	**69**	**486.020.000**	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan (Dokumen)**	**11600**	**486.020.000**	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan (Dokumen)**	**11600**	**486.020.000**	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	1500	236.020.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	1500	236.020.000	

	Terintegrasi secara Elektronik		Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Terintegrasi secara Elektronik		Terintegrasi Secara Elektronik			
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Balikpapan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100	100.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Balikpapan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelyanan Terpadu Perizinan dan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10000	150.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelyanan Terpadu Perizinan dan Non	Balikpapan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10000	150.000.000	

	Non Perizinan					Perizinan					
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	**Balikpapan**	**Presentase data dan informasi perizinan yang berlaku efektif**	**86**	**666.820.000**	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	Balikpapan	**Presentase data dan informasi perizinan yang berlaku efektif**	**86**	**555.134.200**	
	Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi**	**100**	**666.820.000**	**Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi**	**100**	**555.134.200**	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	666.820.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	555.134.200	

	secara Elektronik					secara Elektronik					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**80**	**14.164.074.966**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**80**	**13.159.921.800**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**77,6**	**8.875.431.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**77,6**	**8.875.431.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	8.875.431.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	8.875.431.000	

	Administrasi Umum Perangkat daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**78,5**	**1.353.128.300**	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**78,5**	**1.353.128.300**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	43.992.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	43.992.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	199.927.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	199.927.000	
	Penyediaan Bahan	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan	4	536.625.000	Penyediaan Bahan	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik	4	536.625.000	

	Logistik Kantor		Logistik Kantor yang Disediakan			Logistik Kantor		Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	74.999.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	74.999.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	27.585.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	27.585.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	470.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	470.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80**	**3.235.515.666**	**Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80**	**2.231.362.500**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	799.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	550.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	2.426.015.666	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	1.671.362.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79**	**700.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79**	**700.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31	350.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31	350.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	8	250.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	8	250.000.000	

	dan Mesin Lainnya		Dipelihara			Mesin Lainnya		Dipelihara			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	100.000.000	
	TOTAL				**17.120.249.966**					**15.620.000.000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah. Untuk Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) tahun 2024 tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan DPMPTSP berperan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu yang berhubungan langsung dengan masyarakat dunia usaha.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : DPMPTSP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mencapai tujuan bernegara dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan Tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dengan visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

Jika diselaraskan dengan Sembilan program Presiden yang terpilih yaitu yang disebut Nawa Cita, Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Searah dengan strategi pembangunan nasional, tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2018 adalah **"Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan"**.

Maka dapat disusun hubungan antara Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada Rancangan Awal RKP Tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Prioritas Nasional	Program Prioritas
1. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata	1. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
	2. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
	3. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
	4. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
	5. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
	6. Reforma Agraria
	7. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
	8. Percepatan Pembangunan Papua

Dalam Program Prioritas diatas dapat bahwa Program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Balikpapan terdapat pada Program Nasional ke-4 yaitu Pengembangan dunia usaha dan pariwisata. Sedangkan pada pada Program Prioritas pada rancangan awal RKP tahun 2024 termasuk pada program ke-11 yaitu perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.

Tabel 3.1

Telaahan Misi BKPM dan DPMPTSPSP Provinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM	Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Balikpapan
1	2	3	4
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1 Teridentifikasinya dan Terinfokannya Potensi dan Peluang Investasi di Kalimantan Timur serta Terselenggaranya MoU 2 Terwujudnya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Meningkatnya nilai realisasi investasi
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam Modal	3 Tersusunnya Perencanaan Penanaman Modal dan Kebijakan yang Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategi Provinsi	2 Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	4 Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Lebih Mudah dan Cepat 5 Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	

Dari tabel diatas maka dapat dilihat keselarasan antara Misi DPMPTSP Kota Balikpapan dengan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dengan Misi Kementerian terkait yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP

Pendekatan Penyusunan RKP 2024 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan *Money Follow Program.* Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial dengan memperhatikan pada :

- Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan
- Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
- Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

Pendekatan Holistik Tematik berarti pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas DPMPTSP Kota Balikpapan, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar bidang yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas DPMPTSP Kota Balikpapan yang didukung oleh antar bidang.

Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses.

Jika dihubungkan dengan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu, maka pendekatan integratif lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas antar bidang lainnya dalam mendukung meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu baik dari segi kemudahan pelayanan, kemudahan akses informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi serta transparansi dalam hal biaya dan tracking berkas untuk mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan.

Penerapan dalam dokumen Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, pendekatan indikatif dapat diaplikasikan dengan menggabungkan dan mengkombinasikan beberapa program dan kegiatan untuk mencapai satu sasaran strategis.

Sedangkan pendekatan spasial digunakan saat pembahasan usulan kegiatan dan sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit dari Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dirasakan baik masyarakat kota Balikpapan pada

umumnya maupun masyarakat dunia usaha pada khususnya.

Hubungan yang selaras antara Renja dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana kerja Tahun 2024 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA DPMPTSP Tahun 2021-2026 yaitu :

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan periode 2021-2026 sebagai berikut

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan

Sasaran Misi program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Kota Balikpapan dan visi dan misi Walikota terpilih periode 2021-2026 terdiri dari tiga sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan
3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan

Pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kota Balikpapan dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	100%	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi

					Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM & KEGIATAN
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,11%	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pelayanan Perizinan 1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu

					Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 2. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 3. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024, Program dan Kegiatan tahun 2024 disusun berdasarkan :

a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota Balikpapan;
b. Berkolerasi dan bersinergi dengan kebijakan Nasional;
c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan DPMPTSP

Adapun program / Kegiatan / Sub Kegiatan teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
   1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
      a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal
   2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

II. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
   1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
      b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
   1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/ Kota Kegiatan Penyediaan Bahan /Media /Informasi Layanan Perizinan dan Investasi

a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

V. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/ Kota Kegiatan Penyediaan Bahan /Media/Informasi Layanan Perizinan dan Investasi

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

VI. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Fasilitasi Kunjungan Tamu

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Berdasarkan data Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan maka terdapat jumlah program sejumlah 6 program, 10 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Bidang Penanaman Modal					**2.826.896.333**				**4.624.566.000**
I	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Nilai Realisasi Investasi Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal**			**5%**	**185.250.000**	**APBD**		**5%**	**274.087.500**
A	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali/Raperwali) Yang disahkan**			**20%**	**100.000.000**	**APBD**		**20%**	**150.000.000**
	1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam	**Input** 1. SDM	 Orang	1 6	100.000.000	APBD		1	150.000.000

	Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2. Dana	Rp	100.000.000					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran) :							
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1					
			Outcome (Hasil) :							
			Presentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali) yang disahkan	persen	20					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
B	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan**			**20%**	**85.250.000**	**APBD**		**20%**	**124.087.500**

	1. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Input**		1	85.250.000	APBD		1	124.087.500
			1. SDM	Orang	6					
			2. Dana	Rp	85.250.000					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran) :							
			Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1					
			Outcome (Hasil) :							
			Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	persen	20					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

									Kinerja	
II	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah**			**90%**	**693.674.000**	**APBD**		**95%**	**1.024.416.000**
A	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase kenaikan jumlah kegiatan Promosi Penanaman Modal**			**5%**	**693.674.000**	**APBD**		**5%**	**1.024.416.000**
	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	**Input :** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran) :** Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota **Outcome (Hasil) :** Presentase Kenaikan jumlah event yang dilaksanakan	 Orang Rp event bulan Dokumen Persen	1 6 162.676.000 0 12 1 5	162.676.000	APBD		0	-
	2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan	**Input :**		5	530.998.000	APBD		6	1.024.416.000

	Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran) :** Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota **Outcome (Hasil) :** Presentase Kenaikan jumlah event yang dilaksanakan	Orang Rp event bulan Dokumen Persen	6 530.998.000 5 12 5 5							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
III	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Presentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi permasalahan penanaman modalnya**			**100%**	**566.668.000**	**APBD**		**100%**	**729.000.000**
A	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyampaian LKPM**			**330 LPKM**	**566.668.000**	**APBD**		**345 LKPM**	**729.000.000**

	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	**Input :**		4	126.668.000	APBD		4	5.000.000
			1. SDM	Orang	6					
			2. Dana	Rp	126.668.000					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran) :							
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	4					
			Outcome (Hasil) :							
			Jumlah Penyampaian LKPM	LKPM	330					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

	2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	**Input :** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran) :** Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal **Outcome (Hasil) :** Jumlah Penyampaian LKPM	 Orang Rp Paket Bulan Pelaku Usaha LKPM	125 6 240.000.000 1 12 125 330	240.000.000	APBD		150	365.000.000
	3. Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	**Input** 1. SDM 2. Dana	 Orang Rp	10 6 200.000.000	200.000.000	APBD		14	359.000.000

			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran) :							
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	10					
			Outcome (Hasil) :							
			Jumlah Penyampaian LKPM	LKPM	330					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
IV	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan**			**69**	**918.390.800**	**APBD**		**70**	**1.640.250.000**
A	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi**	**Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan (Dokumen)**			**11600**	**918.390.800**	**APBD**		**11610**	**1.640.250.000**

	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
	1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis RisikoTerintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	**Input :** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran) :** Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **Outcome (Hasil) :** Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	 Orang Rp Paket Bulan Pelaku Usaha Persen	1500 21 667.020.000 1 12 1500 69	667.020.000	APBD		1500	1.000.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024	Catatan	Prakiraan Maju Rencana

	Daerah dan Program/Kegiatan							Penting	Tahun 2025	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2. Pemantauan, Analisis, Evaluasim dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	**Input :** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran) :** Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal **Outcome (Hasil) :** Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	 Orang Rp Paket Bulan Unit usaha Persen	100 40 113.381.800 1 12 100 69	113.381.800	APBD		100	250.000.000
	3. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	**Input :** 1. SDM 2. Dana	 Orang Rp.	10000 7 137.989.000	137.989.000	APBD		10000	390.250.000

			3. Sarana Prasarana	Paket	2					
			4. Waktu	bulan	12					
			Output (Keluaran) :							
			Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	10000					
			Outcome (Hasil) :							
			Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Persen	69					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
V	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase data dan informasi perizinan dan non Perizinan yang berlaku efektif**			**86**	**462.913.533**	**APBD**		**87**	**956.812.500**

A	**Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota**	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi			**100**	**462.913.533**	**APBD**		**100**	**956.812.500**
	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	**Input :**		1	462.913.533	APBD		1	956.812.500
			1. SDM	Orang	12					
			2. Dana	Rp	462.913.533					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran) :							
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1					
			Outcome (Hasil) :							
			Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berlaku efektif	Persen	86					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
VI	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**			**80**	**14.292.666.964**	**APBD**		**81**	**13.600.697.000**
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**79**	**9.069.970.800**	**APBD**		**80,5**	**9.735.697.000**
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**Input :**		60	9.069.970.800	APBD		60	9.735.697.000
			1. SDM	Orang	12					
			2. Dana	Rp.	9.069.970.800					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran) :							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	60					
			Outcome (Hasil) :							

			IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	79					
C	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**80,5**	**1.684.254.900**	**APBD**		**80,5**	**1.205.000.000**
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Input :**		1	43.973.100	APBD		1	60.000.000
			1. SDM	Orang	12					
			2. Dana	Rp.	43.973.100					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran) :							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1					
			Outcome (Hasil) :							
			IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	79					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024	Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Penting	2025	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Input :**		7	472.938.400	APBD		13	300.000.000
			1. SDM	Orang	12					
			2. Dana	Rp.	472.938.400					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran) :							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7					
			Outcome (Hasil) :							
			IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	79					
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**Input :**		4	541.944.400	APBD		4	350.000.000
			1. SDM	Orang	12					
			2. Dana	Rp.	541.944.400					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					

			Output (Keluaran) :							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4					
			Outcome (Hasil) :							
			IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	79					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Input :**		3	74.999.000	APBD		3	125.000.000
			1. SDM	Orang	12					
			2. Dana	Rp.	74.999.000					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran) :							

			Jumlah jenis Barang cetakan dan penggandaan	Paket	3					
			Outcome (Hasil) :							
			IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	79					
	5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Input :**		1	80.400.000	APBD		1	20.000.000
			1. SDM	Orang	57					
			2. Dana	Rp.	80.400.000					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran):							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1					
			Outcome (Hasil) :							
			IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	79					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan	Sumber		Target	Kebutuhan

						Dana/Pagu Indikatif	Dana		Capaian Kinerja	Dana/ Pagu Indikatif
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Input :**		40	470.000.000	APBD		45	350.000.000
			1. SDM	Orang	57					
			2. Dana	Rp.	470.000.000					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran):							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	40					
			Outcome (Hasil) :							
			IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	79					
D	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**80**	**2.577.682.400**	**APBD**		**81**	**1.785.000.000**
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Input :**		1	10.000.000	APBD		1	10.000.000
			1. SDM	Orang	12					
			2. Dana	Rp.	10.000.000					
			3. Sarana Prasarana	Jenis	1					
			4. Waktu	Bulan	12					

			Output (Keluaran) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat **Outcome (Hasil) :** IKM Internal Perangkat Daerah	Laporan Skor	1 79						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Input :** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu	 Orang Rp. Paket Bulan	4 12 591.240.900 1 12	591.240.900	APBD		4	800.000.000

			Output (Keluaran) :							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4					
			Outcome (Hasil) :							
			IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	79					
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**Input :**		3	1.976.441.500	APBD		3	975.000.000
			1. SDM	Orang	13					
			2. Dana	Rp.	1.976.441.500					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran) :							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3					
			Outcome (Hasil) :							
			IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	79					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
E	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**79**	**960.758.864**	**APBD**		**80**	**875.000.000**
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**Input :**		24	676.501.564	APBD		36	450.000.000
			1. SDM	Orang	12					
			2. Dana	Rp.	350.000.000					
			3. Sarana Prasarana	Paket	2					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran) :							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24					
			Outcome (Hasil) :							
			IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	79					
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	**Input :**		8	184.311.300	APBD		8	275.000.000

	Lainnya	Dipelihara	1. SDM	Orang	12						
			2. Dana	Rp	184.311.300						
			3. Sarana Prasarana	Paket	1						
			4. Waktu	Bulan	12						
			Output (Keluaran) :								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8						
			Outcome (Hasil) :								
			IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	79						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Input :**		1	99.946.000	APBD		1	150.000.000
			1. SDM	Orang	12					

			2. Dana	Rp	99.946.000						
			3. Sarana Prasarana	Paket	1						
			4. Waktu	Bulan	12						
			Output (Keluaran) :								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1						
			Outcome (Hasil) :								
			IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	79						
				TOTAL		**17.119.563.297**				**18.225.263.000**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disusun berdasarkan tabel sebagai berikut :

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.02	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Presentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal**	**DPMPTSP**	**%**	**5**	**185.250.000**	**APBD**	
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali Yang disahkan**	**DPMPTSP**	**%**	**20**	**100.000.000**	**APBD**	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam	DPMPTSP	Dokumen	1		APBD	

	Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				100.000.000		
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Presentase dokumen peta potensi yang diterbitkan**	**DPMPTSP**	**%**	**20**	**85.250.000**	**APBD**	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Dokumen	1	85.250.000	APBD	Pengembangan Peta Potensi untuk penyusunan profil investasi per sektor, pengembangan aplikasi menjadi trilingual (Indonesia,English dan China)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.03	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Presentase minat invstasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah**	**DPMPTSP**	**%**	**90**	**693.674.000**	**APBD**	

2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase kenaikan jumlah kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**DPMPTSP**	**%**	**5**	**693.674.000**	**APBD**	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Dokumen	0	162.676.000	APBD	Penyusunan Naskah Akademis Perda Strategi Promosi Kota Balikpapan (Belum terdapat contoh Perda Strategi Promosi Penanaman Modal dari BKPM RI)
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Dokumen	5	530.998.000	APBD	5 event pameran Dalam Negeri

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.05	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Presentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi permasalahan penanaman modalnya**	**DPMPTSP**	**%**	**100**	**540.000.000**	**APBD**	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyampaian LKPM**	**DPMPTSP**	**LKPM**	**330**	**540.000.000**	**APBD**	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Kegiatan Usaha	4	100.000.000	APBD	Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bersama Tim Internal PTSP (Tim LKPM Hunter)
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Pelaku Usaha	125	240.000.000	APBD	Kegiatan Sosialisasi Kemudahan Berusaha (PAD) dengan target peserta min. 125 Pelaku Usaha. Saling silang anggaran BimSos (DAK) yg tidak terdapat di Juknis DAK (misal : honorarium narsum

								dari BKPM)
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	DPMPTSP	Kegiatan Usaha	10	200.000.000	APBD	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal melibatkan OPD Teknis (Pengampu Izin)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Presentase Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan**	**DPMPTSP**	**%**	**69**	**486.020.000**	**APBD**	

2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan (Dokumen)**	**DPMPTSP**	**Dokumen**	**11600**	**486.020.000**	**APBD**	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	Pelaku Usaha	1500	236.020.000	APBD	Penyediaan Belanja Cetak Dokumen perizinan dan non perizinan, Makan dan minum rapat Pengendalian Perizinan serta Stiker Pengendalian
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP	Kegiatan Usaha	100	100.000.000	APBD	Kegiatan Sosialisasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelyanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	Orang	10000	150.000.000	APBD	Kegiatan SiJempol (Sistem Jemput Bola Langsung) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di area publik, Fasilitas Paket Internet CUG, Terselenggara Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) External

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.06	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Presentase data dan informasi perizinan yang berlaku efektif**	**DPMPTSP**	**Nilai**	**86**	**555.134.200**	**APBD**	
2.18.06.2.01	**Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota**	**Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi**	**DPMPTSP**	**Nilai**	**100**	**555.134.200**	**APBD**	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	DPMPTSP	Dokumen	1	555.134.200	APBD	Inovasi untuk SKM Online yang terintegrasi dengan antrian online, Pengaduan Mal Pelayanan Publik, Pengembangan SiCantik, Pemeliharaan Jaringan Internet

								MPP serta Penyelenggaraan FKP sesuai amanat PerMenpan RB nomor 16 tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**DPMPTSP**	**Nilai**	**80**	**13.159.921.800**	**APBD**	

2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**DPMPTSP**		**79**	**8.875.431.000**	**APBD**	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Orang/Bulan	60	8.875.431.000	APBD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**DPMPTSP**	**Nilai**	**78,5**	**1.353.128.300**	**APBD**	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	Paket	1	43.992.300	APBD	Penambahan untuk komponen instalasi listrik untuk keperluan MPP
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	Paket	13	199.927.000	APBD	Pembelian Perlatan dan perlengkapan guna mendukung Pelayanan MPPKota Balikpapan
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	Paket	4	536.625.000	APBD	Belanja ATK, Makanan dan Minuman Pegawai, Rapat dan Kunjungan Tamu
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPTSP	Paket	3	74.999.000	APBD	Barang Cetakan dan Penggandaan untuk mendukung pelayanan MPP
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Laporan	1	27.585.000	APBD	Penyediaan Makan minum kunjungan tamu

2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Laporan	40	470.000.000	APBD	Koordinasi dan konsultasi terkait OSS dan Pelayanan Publik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPMPTSP**	**Nilai**	**80**	**2.231.362.500**	**APBD**	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Laporan	1	10.000.000	APBD	Pembelian Materai
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPTSP	Laporan	4	550.000.000	APBD	kenaikan listrik dikarenakan untuk keperluan MPP, Biaya Peningkatan trafo suplai data
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	Laporan	3	1.671.362.500	APBD	Belanja Gaji Non PNS (34 Orang), Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Keamanan

								(Penambahan Pengawas Security)
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPMPTSP**	**Nilai**	**79**	**700.000.000**	**APBD**	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPMPTSP	Unit	31	350.000.000	APBD	Belanja jasa pemeliharaan kendaraan, pajak kendaraan dinas, BBM kendaraan dinas
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	Unit	8	250.000.000	APBD	Belanja jasa Pemeliharaan Komputer, Laptop, Lift, AC dan Genset
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	Unit	1	100.000.000	APBD	Pemeliharaan Prasarana Gedung MPP Kota Balikpapan
TOTAL						**15.620.000.000**		

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 merupakan implementasi dari perencanaan strategis yang ditetapkan dan tersusun sebagai penjabaran dari tahapan-tahapan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan-kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, baik kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik menyatu dan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan pada input, output, outcome, benefit dan impact sebagai bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme perencanaan, skala prioritas serta anggaran yang tersedia.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis;
4. Kontribusi pelaku usaha di segala sektor ekonomi di Kota Balikpapan dalam membantu meningkatkan Investasi dan berpengaruh luas pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berimbas pada makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada umumnya agar selalu dikembangkan yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Balikpapan, Februari 2023

Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan

BOEDI LILIONO

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena telah dilimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 telah dapat disusun dengan baik. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) ini tidaklah lepas dari Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Wali Kota Balikpapan yang terpilih Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Balikpapan.

Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas agar lebih terarah pada tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Sehingga dapat meningkatkan kualitas Kinerja Aparatur dalam Pelayanan dan Pengembangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan.

Akhir kata kepada berbagai pihak dan staf yang telah kerjasama dalam Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 ini, kami ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai dan membimbing dalam menjalankan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan dan direncanakan, sekian dan terimakasih.

Balikpapan, 10 Agustus 2023
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Balikpapan

C.I.RATIH.KUSUMA W

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....1

DAFTAR ISI..... 2

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 LATAR BELAKANG..... 3

1.2 LANDASAN HUKUM..... 4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KERJA TAHUN 2022.. 8

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 8

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 57

2.3 ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 59

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD..... 76

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 80

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... 80

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH..... 81

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN..... 84

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 88

BAB V PENUTUP..... 100

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan merupakan dokumen Perencanaan Kerja Periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan serta penggunaan Anggaran Keuangan DPOP Kota Balikpapan Dalam Periode Tahun Anggaran 2024, juga sebagai implementasi dan penjabaran dari perencanaan strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun .

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode 1 tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) DPOP Kota Balikpapan disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) DPOP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dimana program dan kegiatan dalam RENJA perangkat daerah akan diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
2. RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
3. RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Akhir RENJA DISPORAPAR Tahun 2024 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026
3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari dan menjadi referensi dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Sistem Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Daerah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasfisikasi,Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Darerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 ;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan DISPORAPAR dalam rangka mewujudkan sinegritas antara Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah, serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2024. Penyelengaraan pemerintah di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata yang mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra DISPORAPAR Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja DISPORAPAR Kota Balikpapan Tahun 2024 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permandagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah , maka Rencana Kerja Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

I.1 Latar Belakang :

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3.Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4.Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, sertasusunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33,

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka Pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN KERJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

Walikota Balikpapan terpilih periode 2021-2024 telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi RPJMD Kota Balikpapan periode 2021-2026, yaitu dengan VISI "**TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL** " dan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi
Misi 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai
Misi 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan
Misi 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan pada tahun 2022 maka melaksanakan 2 (dua) urusan, 8 (Delapan) program dan 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan dengan total pagu perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 69.156.315.885,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
								I	II	III	IV						
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7X100%	14=6+12	15=14/5X100%	16	17

					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	IKM	75	72,801,015,000			71.00	11,756,130,092		2,149,078,830		2,487,186,073		2,422,454,778	82.05	3,534,165,508	82.05	10,592,885,189	115.56 %	90.11 %	82.05	10,592,885,189	109.40 %	14.55 %	DPOP	Telah mencapai melampaui target kinerja
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	75	123,100,000			82								81.84	-	81.84	-	99.80 %	0.00 %	81.84	-	109.12 %	0.00 %	DPOP	Tercapai mendekati target kinerja

		Daerah																								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP	Dokumen					1	-	1						1	-	1.00	-	100.00%	0.00%	1.00	-	0.00%	0.00%	DPOP	Terlaksana tanpa pagu anggaran
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	77	39,038,343,000			73	6,512,833,092		1,338,821,497		1,620,293,952		1,484,498,986	81.17	1,440,632,068	81.17	5,884,246,503	111.19%	90.35%	81.17	5,884,246,503	105.42%	15.07%	DPOP	Terlaksana kegiatan rutin
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	-	-			26	6,512,833,092	6	1,338,821,497	7	1,620,293,952	7	1,484,498,986	6	1,440,632,068	26	5,884,246,503	100.00%	90.35%	26.00	5,884,246,503	0.00%	0.00%	DPOP	Terlaksana 13 laporan termasuk Gaji THR dan 13 Tunjangan Ekin di bulan April 2022

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah	Poin	77	10,220,300,000			73	1,553,097,000		65,105,600		561,275,374		246,477,835	83.91	807,847,410	84	1,680,706,219	114.95 %	108.22 %	83.91	1,680,706,219	108.97 %	16.44 %	DP OP	Terlaksana kegiatan rutin
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis					40	55,000,000	16	210,000	16	26,530,500	16	11,986,000	5	11,691,000	53	50,417,500	132.50 %	91.67 %	53.00	50,417,500	0.00 %	0.00 %	DP OP	Terlaksana kegiatan rutin
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis					25	582,000,000	0	-	13	180,708,500	1	57,870,000	11	323,927,710.00	25	562,506,210	100.00 %	96.65 %	25.00	562,506,210	0.00 %	0.00 %	DP OP	Terlaksana kegiatan rutin
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik kantor (ATK)	Jenis					57	375,297,000	45	42,315,000	5	91,899,500	0	82,944,500	3	110,768,800	53	327,927,800	92.98 %	87.38 %	53.00	327,927,800	0.00 %	0.00 %	DP OP	Terlaksana kegiatan rutin
			Jumlah Jenis Obat-Obatan dan P3K	Jenis					5		2		0		0		3		5		100.00 %		5.00		0.00 %		DP OP	Terlaksana kegiatan rutin
			Penyediaan bahan makan minum	Kotak					16000		4416		610		750		1,000		6776		42.35 %		6776.00		0.00 %		DP OP	Terlaksana kegiatan rutin

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Jenis barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis					26	325,800,000	14	-	5	85,901,250	0	-	4	221,610,750	23	307,512,000	88.46%	94.39%	23.00	307,512,000	0.00%	0.00%	DPOP	Terlaksana kegiatan rutin
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan (koran) yang disediakan dalam setahun	Exp					3500	22,000,000	782	2,908,000	212	2,856,000	212	1,220,000	1,500	10,610,000	2706	17,594,000	77.31%	79.97%	2706.00	17,594,000	0.00%	0.00%	DPOP	Terlaksana kegiatan rutin
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan Material	Jenis					38	75,000,000	13	410,000	0	35,063,000	0	10,679,000	25	24,996,500	38	71,148,500	100.00%	94.86%	38.00	71,148,500	0.00%	0.00%	DPOP	Terlaksana kegiatan rutin
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat					100	350,000,000	8	18,212,600	15	103,416,624	10	37,097,435	30	89,840,350	63	248,567,009	63.00%	71.02%	63.00	248,567,009	0.00%	0.00%	DPOP	Terlaksana kegiatan rutin
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Sistem Berbasis	Keg					3	100,000,000	3	1,050,000	0	34,900,000	0	44,680,900	-	14,402,300	3	95,033,200	100.00%	95.03%	3.00	95,033,200	0.00%	0.00%	DPOP	Terlaksana kegiatan rutin

		Elektronik Pada SKPD	Elektronik																						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	77	15,532,572,000			73	2,642,000,000	0	662,509,606	0	240,688,190		459,151,250	84.83	747,714,456	84.83	2,110,063,502	116.21%	79.87%	84.83	2,110,063,502	110.17%	13.58%	DPOP	Terlaksana kegiatan rutin
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Kebutuhan Surat Menyurat	Jenis					2	10,000,000	0	2,366,300	0	2,336,000	0	34,200	2	4,924,800.00	2	9,661,300	100.00%	96.61%	2.00	9,661,300	0.00%	0.00%	DPOP	Terlaksana kegiatan rutin
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan air	Jenis					6	1,484,000,000	0	327,173,275	0	122,907,569	0	174,219,361	6	448,427,025	6	1,072,727,230	100.00%	72.29%	6.00	1,072,727,230	0.00%	0.00%	DPOP	Terlaksana kegiatan rutin
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS dan Jumlah Pihak Ketiga Outsourching	Orang					35	1,148,000,000	0	332,970,031	0	115,444,621	0	284,897,689	29	294,362,631	29	1,027,674,972	82.86%	89.52%	29.00	1,027,674,972	0.00%	0.00%	DPOP	Terlaksana kegiatan rutin : Gaji 21 Naban dan THL, 8

																											outshourcing
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	79	6,119,700,000			75	1,048,200,000		82,642,127		64,928,557		232,326,707	79.6	537,971,574	79.6	379,897,391	106.13 %	36.24 %	79.60	379,897,391	100.76 %	6.21 %	DPOP	Terlaksana kegiatan rutin
		Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Yang Dipelihara	Unit					25	569,200,000	5	82,642,127	5	63,768,519	5	122,545,009	10	145,602,174	25	414,557,829	100.00 %	72.83 %	25.00	414,557,829	0.00 %	0.00 %	DPOP	Terlaksana kegiatan rutin
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	Jenis					9	170,000,000	9	-		1,160,038		74,593,600		88,479,150	9	164,232,788	100.00 %	96.61 %	9.00	164,232,788	0.00 %	0.00 %	DPOP	Terlaksana kegiatan rutin
			Jumlah Penyediaan solar untuk	Liter					2000										-		0.00 %		0.00		0.00 %		DPOP	

			genset																								
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah frekuensi pemeliharaan	Kali					4	342,000,000		-		-		35,188,098	4	303,890,250	4	339,078,348	100.00%	99.15%	4.00	339,078,348	0.00%	0.00%	DPOP	Terlaksana di TW IV
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pemuda yang kreatif, Inovatif dan Mandiri	Persen	2.70	40,260,000,000.00			2.30	6,324,990,000		214,634,900		353,805,600		1,822,822,220	1.036	3,037,817,309	1.036	5,429,080,029	45.04%	85.84%	1.04	5,429,080,029	38.37%	13.49%	DPOP	Terlaksana seluruh kegiatan namun capaian target belum mencapai target kinerja

		Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan kepemudaan	Persen	1.83	29,415,000,000.00			1.83	4,824,990,000	0	99,362,400	0	265,431,100	0	1,822,812,220	1.74	1,969,539,438	1.74	4,157,145,158	95.08 %	86.16 %	1.74	4,157,145,158	95.08 %	14.13 %	DPOP	Terlaksana seluruh kegiatan namun capaian target mendekati target kinerja
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda, KIPAN,	Orang					2000	1,125,000,000	0	-	38	-	81	148,169,160	527	756,673,584	2,527	904,842,744	126.35 %	80.43 %	2527.00	904,842,744	0.00 %	0.00 %	DPOP	Kegiatan Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda,KIPAN,Pepelingasih,Forum Kepemimp

		Pemuda Pelopor	Pepelingasih, Forum Kepemimpinan Pemuda dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda																							inan Pemuda dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda : Pemuda Pelopor , puncak kegiatan di bln Oktober 2022
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Wira usaha Pemula	Jumlah pemuda yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan kewirausahaan pemuda	Orang					80	824,990,000	20	88,502,200	35	79,777,100	35	408,847,341	195	77,658,450	285	654,785,091	356.25 %	79.37 %	285.00	654,785,091	0.00 %	0.00 %	DPOP	Penyelenggaraan Festival Kuliner dan Cinderamata Wirausaha Muda Kota Balikpapan, dan Event Pameran Produk Wirausaha Muda serta
			Jumlah Pemuda Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan	Orang					300		100		125		125		150		500		166.67 %		500.00		0.00 %	DPOP	

																									Pelaksanaan Sosialisasi Kewirausahaan : Kegiatan pelatihan wirausaha TW I-II
		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	Dokumen					1		0		0		1				1		100.00 %		1.00		0.00 %		DPOP	Telah terlaksana Penyusunan Dokumen Koordinasi Strstegis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan (Kajian Grand Design Pembangunan Kepemudaan Kota Balikpapan dan Aplikasi
			Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan pelayanan kepemudaan	Orang					400	600,000,000	100	10,860,200	50	-	50	86,120,000		388,575,874	200	485,556,074	50.00 %	80.93 %	200.00	485,556,074	0.00 %	0.00 %	DPOP	

																										Klinik Kewirausahaan Pemuda)
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan pelatihan Paskibraka	Orang					45	2,275,000,000		-		185,654,000		1,179,675,719	43	746,631,530	43	2,111,961,249	95.56 %	92.83 %	43.00	2,111,961,249	0.00 %	0.00 %	DPOP	Terlaksana Pelaksanaan pemilihan pasukan pengibar bendera : Kegiatan seleksi peserta paskibraka di TW I, pelatihan paskibraka di TW II, puncak kegiatan agustus 2022
			Jumlah Pemuda yang mengikuti seleksi Paskibraka	Orang					200		365		0		0				365			182.50 %		365.00		0.00 %	DPOP	
			Jumlah Pemuda yang terlibat dalam kegiatan Pelatihan Paskibraka	Orang					70		0		77		0				77			110.00 %		77.00		0.00 %	DPOP	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	2.30	24,445,000,000			1.89	1,500,000,000	0.175	115,272,500	0.07	88,374,500	0	10,000	8.33	1,068,277,871	8.58	1,271,934,871	453.70 %	84.80 %	8.58	1,271,934,871	372.83 %	5.20 %	DPOP	Terlaksana kegiatan organisasi kepemudaan, pencairan dana hibah

		kabupaten /Kota																									KNPI 1 M namun ada tambahan pagu hibah 200jt tidak terealisasi karena OKP yang tidak dapat melengkapi dokumen
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten /Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi	Organisasi					1		0		0		0		1		1		100.00 %		1.00		0.00 %		DP OP	Terealisasi di penhujung tutup tahun anggaran 2022 dengan proses yang panjang dan tercapai kesepakatan yang difasilitasi
			Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	Orang					800	1,500,000,000	400	115,272,500	0	88,374,500	1367	10,000		1,068,277,871	14,167	1,271,934,871	1770.88 %	84.80 %	14167.00	1,271,934,871	0.00 %	0.00 %	DP OP	

																											sekda
3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi	Persen	26.20	120,553,000,000			25	36,230,452,493	0.00	1,020,657,500	0.00	952,754,988	0.00	818,158,578	32.64	20,020,287,483	32.64	22,811,858,549	130.56%	62.96%	32.64	22,811,858,549	124.58%	18.92%	DPOP	Terlaksana seluruh kegiatan sampai dengan akhir tahun ditutup dengan kegiatan bowling setelah event besar, POPDA,Porprov , Bpp 10 k dan Puncak Haornas XXXIX
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Jenjang Pendidikan	Persentase Atlet pelajar yang mendapatkan pembinaan	Persentase	32	300,000,000			17										-		0.00%						Tidak dilaksanakan karena pagu tidak mencukupi

		yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota																									
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyedian Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Disediakan Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang Dipelihara							-						-											Tidak dilaksanakan karena pagu tidak mencukupi
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Prestasi di bidang Olahraga	Persentase	38	52,709,660,000			45	21,640,909,993		315,440,400		50,796,900		452,658,880	52.50	13,278,601,001	52.50	14,097,497,181	116.67 %	65.14 %	52.50	14,097,497,181	138.16 %	26.75 %	DPOP	Terlaksana event kota dan mengikuti kejuaraan POPDA Paser dan Porprov Berau

		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten /Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga di daerah	Event					2	3,290,000,000	1	237,480,000	0	43,904,800	1	452,658,880	1	1,872,855,033	3	2,606,898,713	150.00%	79.24%	3.00	2,606,898,713	0.00%	0.00%	DPOP	Pelaksanaan Balikpapan 10 K di tgl.4 Sept 2022, , Sepakbola TW I Hut Kota dan Bowling
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan	Orang					1516	18,350,909,993	0	77,960,400	0	6,892,100	0	-	1,200	11,405,745,968	1,200	11,490,598,468	79.16%	62.62%	1200.00	11,490,598,468	0.00%	0.00%	DPOP	Mengikuti POPDA Kaltim ke XVI di Kab.Paser 10 Oktober-28 Oktober 2022 , PORPROV VII 18 Nov-07 Des 2022 dan koordinasi dan monitoring,mengikuti event di luar kota

		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet yang dibina	Persentase	32	16,287,000,000			20								-		-								Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlet dan Pelatih Yang Mengikuti Pemusatan Pelatihan Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan Tersedianya dokumen kajian olahraga	Orang Orang Dokumen					1500 100 2								-										Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi	Jumlah Atlet yang dibina	Orang					100								-										Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu

		Kabupaten /Kota																									
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten /Kota	Jumlah medali penghargaan	Medali				400							-												Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyedian Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Dokumen				1																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat	Persentaee	100	34,850,000,000		75	5,700,000,000	0	-		750,000,000	0	-	77	398,459,020	77.00	1,148,459,020	102.67 %	20.15 %	77.00	1,148,459,020	77.00 %	3.30 %	DPOP	Ada tambahan dana hibah namun hanya terealisasi 6 lembaga dari total 53 penerima dana hibah

			pembinaan dan pengembangan olahraga																								karena cabor Porprov tidak memungkinkan pencaiaran, waktu dan kelengkapan legalitas/ dokumen
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga Yang Menerima Dana Hibah	Organisasi					53	5,700,000,000	0	-	2	750,000,000	0	-	6	398,459,020	8	1,148,459,020	15.09 %	20.15 %	8.00	1,148,459,020	0.00 %	0.00 %	DPOP	Telah dilaksanakan pemberian dana hibah Kormi dan NPC, sedangkan KONI tidak dapat diberikan karena masih terjadi konflik internal serta

																										tambahan hibah di perubahan, namun hibah cabor tidak terealisasi karena beberapa hal
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dan Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang dibina	Persentase	95	16,406,340,000			78.95	8,889,542,500	1	705,217,100		151,958,088		365,499,698	80.45	6,343,227,462	81.45	7,565,902,348	103.17%	85.11%	81.45	7,565,902,348	85.74%	46.12%	DPOP	Terlaksana kegiatan olahraga rekreasi dan tambahan pagu TU BTT untuk Haornas karena Kota Balikpapan sebagai tuan rumah yang tidak dianggarkan di Renja tahun

																												sebelumnya
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaran Event Olahraga Rekreasi Masyarakat Tingkat Kota	Event					2	7,039,952,500	1	246,354,700		33,176,363	0	103,175,000	1	5,468,930,525	2	5,851,636,588	100.00 %	83.12 %	2.00	5,851,636,588	0.00 %	0.00 %	DPOP	Telah dilaksanakan kegiatan Formas dalam rangka Hut Kota Balikpapan di TW I dan telah dilaksanakan kegiatan Haornas di tgl.9 Sept 2022 (TW III)
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/Pelatihan/Perkumpulan Olahraga Rekreasi dan	Kegiatan					2										-	-								Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu

			Masyarakat																							
		Penyediaan, Pengembangan,dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang terpelihara	Venue					1	1,849,590,000	0	458,862,400	0	118,781,725	0	262,324,698	1	874,296,937	1	1,714,265,760	100.00%	92.68%	1.00	1,714,265,760	0.00%	0.000%	DPOP	Dilaksanakan kegiatan rutin,gaji non pns venue tenis dan venue dayung serta pemeliharaan venue
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Yang Tersedia dan dikembangkan	Venue					1		0		0		0		1		1		100.00%		1.00		0.00%		DPOP	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentase Organisasi Kepramukaan Aktif	Persen	100	5,985,000,000			100	1,000,000,000	0.00	-	0.00	-	0.00	850,000,000	100	150,000,000	100	1,000,000,000	100.00%	100.00%	100.00	1,000,000,000	100.00%	16.71%	DPOP	Terlaksana dan tambahan pagu di perubahan
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan	Organisasi	100	5,985,000,000			1	1,000,000,000	0	-	0	-	0	850,000,000	1	150,000,000	1.00	1,000,000,000	100.00%	100.00%	1.00	1,000,000,000	1.00%	16.71%	DPOP	

			dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan																								
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi	Organisasi					1	1,000,000,000	0	-	0	-	0	850,000,000	1	150,000,000	1	1,000,000,000	100.00%	100.00%	1.00	1,000,000,000	0.00%	0.00%	DPOP	Pemberian Dana Hibah Pramuka
			Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepramukaan	Orang					4000		650 0		0		390 2				10,402		260.05%		10402.00		0.00%	0.00%	DPOP	
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	Persen	6	44,857,000,000			3	5,685,747,000		143,413,132		835,489,487		219,863,520	10.61	3,686,641,020	10.61	4,885,407,159	353.67%	85.92%	10.61	4,885,407,159	176.83%	10.89%	DPOP	
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten	Persentase daya tarik wisata yang terkelola	Persen	77	-			30	-	0.00	-	0.00	-	0.00		0%		-									Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu

		/Kota																									
		Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota	Jumlah SK Penetapan Daya Tarik	SK				1							-			-									Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Kota Balikpapan	Dokumen				2							-			-									Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangankan di Kota Balikpapan	Daya Tarik				2										-									Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Dokumen				2 Dokumen																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu

		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawassan Strategis yang terfasilitasi Pengembangannya	Persen	24	33,167,000,000			10	5,480,000,000	0	141,080,332		835,489,487		219,863,520	10	3,514,664,424	10.00	4,711,097,763	100.00 %	85.97 %	10.00	4,711,097,763	41.67 %	14.20 %	DPOP	Kajian Wisata Bahari dari pagu perubahan dan pemeliharaan dan pengadaan sapras PMSS
		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah SK Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata	Dokumen					1										-									Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Perencanaan Kawasan Strategis Priwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Balikpapan	Dokumen					1	100,000,000							1	99,589,200	1	99,589,200	100.00 %	99.59 %	1.00	99,589,200	0.00 %	0.00 %	DPOP	Terlaksana kajian wisata bahari dari pagu perubahan
		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Yang dikembangkan di Kota	KSP					1							-												Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu

			Balikpapan																								
		Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan prasarana kawasan strategis Pariwisata	Sarana/prasarana					10	5,080,000,000	0	115,874,052	2	804,068,383	2	219,863,520	6	3,183,379,258	10	4,323,185,213	100.00%	85.10%	10.00	4,323,185,213	0.00%	0.00%	DPOP	Pemeliharaan dan pengadaan sapras di pantai manggar
			Jumlah Pengadaan sarana prasarana kawasan strategis pariwisata	Sarana/prasarana					10						1		9		10		100.00%		10.00		0.00%		DPOP	
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kawasan Strategis	Dokumen					1																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang diberdayakan pada	Pokdarwis					16	300,000,000		25,206,280	16	31,421,104	0	-		231,695,966	16	288,323,350	100.00%	96.11%	16.00	288,323,350	0.00%	0.00%	DPOP	Pelatihan pokdarwis

		Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota	Kawasan Strategis Pariwisata di Kota Balikpapan																									
			Jumlah Pokdarwis yang baru dibentuk	Pokdarwis					2											-		0.00 %		0.00		0.00 %		DPOP	
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Balikpapan	Jumlah kawasan strategis Pariwisata Yang menerapkan unsur destinasi pariwisata berkelanjutan	SPKW					1							-												Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Presentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	Persen	12	10,590,000,000			5	55,747,000		-	5	-	0			40,883,695	5	40,883,695	100.00 %	73.34 %	5.00	40,883,695	41.67 %	0.39 %	DPOP	
		Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah SK Penetapan Destinasi Pariwisata	Dokumen					1							-			-									Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu

		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi yang dihasilkan	Dokumen					1							-											Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Dokumen					1							-											Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Pokdarwis yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Pokdarwis					16	55,747,000		-		-		-	16	40,883,695	16	40,883,695	100.00%	73.34%	16.00	40,883,695	0.00%	0.00%	DPOP	Penyuluhan dan pendampingan Kegiatan Sadar Wisata dan Sapta Pesona TW II dan TW IV
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam	Jumlah destinasi pariwisata yang menerapkan	Destinasi					1																		Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu

		pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	unsur destinasi pariwisata berkelanjutan																								
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Sub Jenis Usaha yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Persentase	13	1,100,000,000			8	150,000,000		2,332,800	0	-	0	-	16.72	131,092,901	16.72	133,425,701	209.00 %	88.95 %	16.72	133,425,701	128.62 %	12.13 %	DPOP	
		Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota	Banyaknya Sosialisasi Yang Dilakukan	Kegiatan					2							-			-								Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Investasi Pariwisata	Rupiah					5,000,000,000	150,000,000		2,332,800		-		-	5,000,000,000	131,092,901	5,000,000,000	133,425,701	100.00 %	88.95 %	5,000,000,000	133,425,701	0.00 %	0.00 %	DPOP	Mengikuti Expo investasi Pariwisata di TW III
			Jumlah Usaha Pariwisata Baru	Usaha					20								20		20		100.00 %		20.00		0.00 %			

		Pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Usaha Pariwisata yang belum terdaftar TDUP	Dokumen					1							-											Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata Yang Tersertifikasi	Usaha					5							-											Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	Persen	26	28,945,000,000			17	4,775,000,000	0.00	533,574,744	0.00	835,624,992	0.00	452,291,441	21.42	2,806,119,250	21.42	4,627,610,427	126.00%	96.91%	21.42	4,627,610,427	82.38%	15.99%	DPOP	Terlaksana sesuai rencana di TW I - IV
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	Malam	1.7	28,945,000,000			1.7	4,775,000,000	0	533,574,744	0	835,624,992	0	452,291,441	1.5	2,806,119,250	1.5	4,627,610,427	88.24%	96.91%	1.50	4,627,610,427	88.24%	15.99%	DPOP	Terlaksana sesuai rencana di TW I - IV

		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media Cetak Untuk Promosi	Jenis					3		1		1		1			3		100.00%		3.00		0.00%			Promosi pariwisata melalui media cetak,media eletronik dan media lainnya serta pengadaan souvenir TW I-IV
			Jumlah Media Elektronik Untuk Promosi	Jenis					3	500,000,000	2	30,000,000	0	15,000,000	1	15,000,000		437,125,000	3	497,125,000	100.00%	99.43%	3.00	497,125,000	0.00%	0.00%	DPOP	
			Jumlah Media Lainnya Untuk Promosi	Jenis					3		2		1		0			3		100.00%		3.00		0.00%			
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Event					1									-		0.00%		0.00		0.00%			Penyelenggaraan 11 Event (Art an Culinary Fest,Creative Fest,Balikpapan Fest,Carnival Fest, Eco Tour Balikpapan,Fashion Festival,Fishing
			Jumlah Industri Pariwisata Yang Berpartisipasi pada Event Promosi Pariwisata Didalam Negeri	Industri Pariwisata					10	4,075,000,000	2	503,574,744	2	780,625,698	6	375,241,861		2,283,490,764	10	3,942,933,067	100.00%	96.76%	10.00	3,942,933,067	0.00%	0.00%	DPOP	

			Jumlah Promosi event daerah yang dilaksanakan didalam negeri	Event				11		2		2		5		2		11		100.00%		11.00		0.00%			Competition,Musik Festival,Obor Kalimantan, dan Pelatihan Basic Skill Musisi Profesional Balikpapan)
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen Data Pariwisata	Dokumen				1										-								Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kemitraan dengan insan pariwisata	Mitra				3	200,000,000	1	-	1	39,999,294	1	62,049,580	-	85,503,486	3	187,552,360	100.00%	93.78%	3.00	187,552,360	0.00%	0.00%	DPOP	Pelaksanaan Kegiatan Balikpapan Tourism Board

		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pengembangan Pemasaran Pariwisata di Kota Balikpapan	Dokumen					1						-			-								Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	Persen	35	4,436,000,000			12	200,000,000		24,500,000		-		-	-	163,052,360	-	187,552,360	0.00%	93.78%	0.00	187,552,360	0.00%	4.23%	DPOP	Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang	Jumlah Ruang Kreasi yang dikelola	Sarana	1	2,006,000,000			1	200,000,000	1	24,500,000	0	-	0	-	-	163,052,360	1	187,552,360	100.00%	93.78%	1.00	187,552,360	100.00%	9.35%	DPOP	Terlaksana sesuai rencana di TW I - IV

		Berekspresi, Berpromisi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten /Kota																								
		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah prasarana yang dikembangkan dan direvitalisasi (podcast, prasarana ruangan, fotografi)	Prasarana					3	200,000,000	1	24,500,000	1	-	0	-	1	163,052,360	3	187,552,360	100.00%	93.78%	3.00	187,552,360	0.00%	0.00%	DPOP	Penyedian Perlengkapan Alat Podcast,Perlengkapan Alat-alat Fotografi, dan Sarana Prasarana untuk interior ruang kreatif

		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Sub sektor ekraf yang dikembangkan	Persentase	35	2,430,000,000			12	-		-		-		-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.000	-	0.00%	0.00%	DPOP	Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Pengembangan Riset	Jumlah Dokumen Riset	Dokumen					2																				Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Pengembangan Pendidikan	Jumlah Kegiatan pengembangan pendidikan	Kegiatan					2																				Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Komunitas ekraf yang difasilitasi pendanaan dan pembiayaan	Komunitas					1																				Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Penyediaan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur tersedia (ruang kreatif)	Ruang Kreatif					3																				Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu

		Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah event promosi produk lokal ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri	Kegiatan					3																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Pemberian Insentif	Jumlah Komunitas yang menerima insentif	Komunitas					2																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
			Jumlah pelaku yang menerima insentif	Pelaku					4																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Sosialiasi yang dilakukan	Kegiatan					2																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualny	Produk					4																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu

			a																									
		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen					1																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen					1																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	16	4,909,800,000			8	900,000,000	0.00	236,908,369	0.00	95,834,032	0.00	132,921,474	-	400,495,184	-	866,159,059	0.00%	96.24%	0.000	866,159,059	0.00%	17.64%	DPOP	Terlaksana sesuai rencana

		Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Peserta Pembekalan sektor Kepariwisataan dan Ekraf	Persentase	20	3,919,800,000			10	900,000,000	0	236,908,369	0	95,834,032	0	132,921,474	11.09	400,495,184	11	866,159,059	110.90 %	96.24 %	11.09	866,159,059	55.45 %	22.10 %	DPOP	Terlaksana sesuai rencana
		Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata	Orang					4	500,000,000		28,748,479		94,399,032		1,050,000	4	350,486,740	4	474,684,251	100.00 %	94.94 %	4.00	474,684,251	0.00 %	0.00 %	DPOP	Pelatihan Barista,Pelatihan Podcast,Barista Competition,dan Pelatihan Saka Pariwisata
		Peningkatan Peran Serta Masyrarakat Dalam Pengembangan Kemitraan	Jumlah kegiatan pengembangan kemitraan pariwisata	Orang					1	200,000,000	1	199,889,910		-		-	-		1	199,889,910	100.00 %	99.94 %	1.00	199,889,910	0.00 %	0.00 %	DPOP	Pemilihan Putra Putri Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan

		Pariwisata																									
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah workshop bidang pariwisata yang dilakukan	Kegiatan					2																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja yang Tersertifikasi	Orang					100	200,000,000	0	8,269,980	0	1,435,000	100	131,871,474	-	50,008,444	100	191,584,898	100.00%	95.79%	100.00	191,584,898	0.00%	0.00%	DPOP	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Hotelier , Pramuwisata dan Pembawa Acara (MC)
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi	jumlah Kegiatan Pendampingan Proses Kreasi, Produksi,	Kegiatan					1																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu

		dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif																									
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelatihan/ workshop/kursus bidang ekonomi kreatif yang dilakukan	Kegiatan					1																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pengembangan Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dokumen					1																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu

		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Sub ekraf yang dikembangkan	Persentase	35	990,000,000			12		0						11		11	-	88.42%	0.00%	10.61	-	30.31%	0.00%	DPOP	Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan , bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	Orang					100																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah dukungan fasilitasi bagi pelaku dan Komunitas ekonomi kreatif	Kegiatan					2																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di	Jumlah Pelaku Ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Pelaku usaha					10 Pelaku 2 Usa																			Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu

		Bidang Ekonomi Kreatif	profesi Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif Yang tersertifikasi Usaha					ha																		
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																-	-							Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
		UPTD PANTAI MANGGAR SEGARA SARI							1,949,966,300	-	298,692,852	-	490,668,242	-	482,741,104		585,147,811	-	1,857,250,009	0.00 %	95.25 %	0.00	1,857,250,009	0.00 %	0.00 %	DPOP	
	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	Persen	6	44,857,000,000		3	1,949,966,300		298,692,852	-	490,668,242	-	482,741,104	10.61	585,147,811	10.61	1,857,250,009	353.67 %	95.25 %	10.61	1,857,250,009	176.83 %	4.14 %	DPOP	Operasional UPTD PMSS
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan Strategis yang terfasilitasi pengembang	Persen	24	33,167,000,000		10	1,949,966,300		298,692,852	-	490,668,242	-	482,741,104		585,147,811	-	1,857,250,009	0.00 %	95.25 %	0.00	1,857,250,009	0.00 %	5.60 %	DPOP	

			annya																							
		Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan prasarana yang dikelola UPTD PMSS	Destinasi	1		1		1	1,949,966,300	1	298,692,852	-	490,668,242	-	482,741,104		585,147,811	1	1,857,250,009	100.00 %	95.25 %	2.00	1,857,250,009	200.00 %	0.00 %	DPOP	Operasional UPTD PMSS
Rata-rata capaian kinerja (%)																					124.80 %	81.23 %			32.17 %	5.14 %		
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Renda		

						h		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN	132.20 %	85.18 %			6.61 %	0.09 %		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN	118.86 %	75.86 %			98.33 %	10.78 %		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rend		

																	a h		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													87 .0 8 %	80 .7 0 %			63 .1 6 %	1 4. 0 5 %		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Ti ng gi	Ti ng gi			Sa ng at Re nd ah	S a n ga t R e n d a h		
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja	Merupakan Kegiatan prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target																		
	Kegiatan yang dapat saling sinergi antar bidang pemuda,olahraga dan pariwisata (pelaksanaan puncak Haornas XXXIX , road to haornas dan festival Sandeq dengan bidang pariwisata)																		
	Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2022 yang dikoordinasikan oleh sekretariat tentang target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dalam hal pengawalan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan																		
	Komitmen Pimpinan dan Dukungan Staf, serta adanya regulasi yang mendukung kinerja organisasi,Optimalisasi pemanfaatan SDM DPOP dalam meningkatkan peran pemuda, olahraga dan pariwisata																		

			Optimalisasi peran masyarakat dan mitra kerja DPOP dalam mendukung pelaksanaan program kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Kota Balikpapan													
			Kegiatan perekonomian mulai membaik pasca pandemi, dan bertahap pelaku pariwista dan pelaku ekonomi kreatif mulai bangkit dan menggerakkan perekonomian dan DPOP mendukung pelaku pariwisata dan pelaku ekraf dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan											
			Telah dilaluinya pasca pandemi maka sehingga masyarakat mulai beraktifitas seperti semula termasuk melakukan kegiatan wisata dan didukung Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN dan menjadi magnet daya tarik wisata													
			Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kota Balikpapan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat dilakukan secara optimal.											
Faktor Penghambat pencapaian kinerja			Masih berlangsungnya konflik internal di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Kota Balikpapan tahun 2022 telah menghambat pelaksanaan program kegiatan keolahragaan seperti pada saat pengiriman atlet mengikuti Porprov VII di Berau , dengan 52 Cabor yang terdaftar di KONI namun yang mengikuti hanya 37 Cabor , dan 10 Cabor tidak ikut menyerahkan data untuk proses pendaftaran cabang olahraga Kota Balikpapan , melalui entry by number ke PB Porprov VII yang dilakukan oleh KONI Balikpapan											
			Kurangnya personil/SDM yang kompeten untuk mendukung kegiatan atau event-event yang dilaksanakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata baik bersifat teknis dan administrasi													
			Potensi pariwisata belum dimanfaatkan secara maksimal													
			Belum Optimalnya integrasi program pengembangan pariwisata antara OPD dan Stakeholder													
			Kurangnya dukungan pengusaha obyek wisata dalam membantu pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata													

Tindak Lanjut Yang Diperlukan :	Menjadi bahan evaluasi untuk pencapaian kinerja pada rencana kerja tahun berikutnya																										
	Memotivasi seluruh tim yang terlibat dalam pencapaian kinerja untuk menjadi lebih baik tahun berikutnya																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	Penyesuaian indikator program, satuan dan target dengan yang ada di RPJMD																										
	Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																										

	Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun RPJMD																						

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat melakukan analis kinerja pelayanan perangkat daerah pada Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan maka perlu disajikan dalam bentuk format sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Dinas Pemuda,Olahaga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi capaian Tahun Ke-					Catatan Analis
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	IKM Internal Perangkat Daerah				71	72	73	74	75	82,06					
2.	Presentase Pemuda Yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri				2,30%	2,40%	2,50%	2,60%	2,70%	1,036%					
3.	Presentase Atlet yang Berprestasi				25%	7%	6,2%	7,4%	26,2%	32,64%					
4.	Presetase Organisasi Kepramukaan aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%					
5.	Presentase Peningkatan Daya Tarik Wisata				3%	3%	4%	6%	6%	10,61%					
6	Presentase Pertumbuhan Kunjungan Pariwisata				17%	20%	21%	24%	29%	21,42%					
7	Presentase Sub Sektor Ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektual				12%	18%	24%	29%	35%	0%					
8	Presentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif				8%	10%	12%	14%	16%	0%					

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Hubungan Renstra Kementerian, Provinsi dan Dinas

Kementerian	Provinsi	DPOP
Meningkatnya kapasitas dan potensi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda	Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga
Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam berwirausaha.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Meningkatnya Atlet Berprestasi	Peningkatan prestasi keolahragaan dan seni budaya	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga
Jumlah spending wisman	Meningkatnya kualitas Pemasaran destinasi strategis pariwisata	Meningkatnya lama tinggal wisatawan
Rasio usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan tersertifikasi	Meningkatnya kualitas potensi ekraf di kawasan strategis pariwisata	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Pada dasarnya pelayanan program perangkat daerah diharapkan berhasil mewujudkan kondisi ideal yang telah ditetapkan dalam target tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan tugas dan fungsi. Namun demikian pada pelaksanaannya untuk mencapai kondisi tersebut menghadapi kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dalam melaksanakan pelayanan untuk setiap bidang urusan antara lain sebagai berikut :

Bidang Non Urusan (sekretariat) :

1) Keterbatasan SDM secara kualitas maupun kuantitas
2) Kurangnya pengawasan intern organisasi
3) Budaya kerja pegawai belum optimal

Bidang Kepemudaan :

1) Masih rendahnya peran dan partisipasi pemuda dalam mendorong percepatan pembangunan Kota Balikpapan
2) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan

Bidang Keolahragaan :

1) Kurangnya prestasi keolahragaan Kota Balikpapan di event-event Kejuaraan regional provinsi Kaltim maupun Nasional
2) Kurangnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Kota Balikpapan
3) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan

Bidang Kepariwisataan :

1) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD maupun PDRB Kota Balikpapan masih kurang
2) Belum berkembangnya Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) andalan Kota Balikpapan yang mampu menarik minat pengunjung wisata setidaknya dari berbagai daerah di sekeliling Kota Balikpapan
3) Belum adanya event seni dan budaya unik yang mampu menjadi magnet wisata Kota Balikpapan;
4) Masih rendahnya kesadaran warga kota dalam menciptakan kota ramah wisata yang dapat menarik minat kunjungan wisata;

c. Faktor yang menghambat pencapaian pelayanan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung program nasional adalah :
   1. Keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan untuk meningkatkan potensi maupun prestasi kepemudaan dan keolahragaan Kota Balikpapan
   2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat maupun swasta serta media dalam upaya peningkatan aktifitas kepemudaan maupun keolahragaan
   3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga bagi kesehatan dan kebugaran

   Faktor yang mendorong pencapaian pelayanan Perangkat daerah dalam rangka mendukung program nasional adalah :
   1. Tersedianya pemuda yang dapat dikembangkan bakat dan potensinya dalam bidang kepemudaan maupun keolahragaan
   2. Adanya perkumpulan/klub olahraga yang akan menjadi tempat atau sarana untuk mendidik atau membina atlet berprestasi
   3. Adanya dukungan perangkat daerah lain/mitra/organisasi kemasyarakatan terkait terhadap program kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan

d.Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;

Tantangan Bidang Kepemudaan :

Perkembangan teknologi informasi pada (era digital) berdampak terhadap kehidupan sosial bagi pemuda baik yang bersifat positif maupun negative. Maraknya hoax, kenakalan remaja, kehidupan sex bebas penyalahgunaan narkoba dan lain-lain merupakan bagian dari dampak negative perkembangan teknologi, yang akan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepemudaan ke depan.

Tantangan Bidang Olahraga :

- Belum optimalnya pembinaan dan pembibitan atlit atlit berbakat dan berprestasi
- Perlu diciptakan system yang baik dalam mengoptimalkan pembinaan dan pembibitan atlet berbakat dan berprestasi, salah satunya dengan meningkatkan tenaga pembina yang professional

Tantangan Bidang Pariwisata :

a. Belum tertata dan tergali sepenuhnya potensi kepariwisataan Kota Balikpapan
b. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan dari sektor Pariwisata
c. Belum optimalnya pelaksanaan promosi pariwisata;
d. Tuntutan wisatawan terhadap kebersihan dan kesehatan tempat wisata
e. Kurang baiknya amenitas di destinasi wisata
f. Kurangnya atraksi kepariwisataan
g. Kurangnya SDM pariwisata yang handal yang dapat mengembangankan kepariwisataan Kota Balikpapan

Peluang Kesempatan untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam bidang urusan kepemudaan dan olahraga dan urusan Pariwisata dalam mencapai tujuan organisasi, adalah berupa peluang-peluang sebagai berikut :

Bidang Kepemudaan :

- Jumlah Penduduk usia produktif/Pemuda merupakan potensi/asset yang dapat dikembangkan menjadi motor penggerak pembangunan Kota Balikpapan

Bidang Olahraga :

- Potensi pemuda/bibit atlet yang memungkinkan dapat berpartisipasi dalam pencapaian prestasi disetiap event tingkat wilayah, daerah maupun nasional
- Lembaga Pendidikan/Sekolah dapat dijadikan ujung tombak kegiatan cabang olahraga usia dini
- Organisasi perkumpulan olahraga menjadi tempat pembibitan atlet olahraga yang potensial untuk meraih prestasi

Bidang Pariwisata :

- Letak Kota Balikpapan sebagai daerah perlintasan yang memiliki bandara udara Internasional dan Pelabuhan sehingga strategis sebagai Kota Transit bagi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN
- Tersedianya teknologi yang dapat membuka akses promosi potensi kepariwisataan Kota Balikpapan
- Adanya situs-situs cagar budaya yang belum digali untuk dikembangkan

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah:

No	Tingkat Isu	Isu Strategis		Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)		(4)
	Urusan Kepemudaan			
1.	Internasional:	Peran aktif pemuda dalam pembangunan yang berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*	1.	Keterlibatan Pemuda Balikpapan dalam pembangunan yang berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs).*
			2.	Pemuda Balikpapan berperan aktif dalam event-event internasional.
			3.	Di era globalisasi dan modernisasi Pemuda Balikpapan menguasai iptek dan dapat bersaing di Internasional.
			4.	Pemuda Balikpapan meraih penghargaan tingkat Internasional.
2.	Nasional:	Peningkatan Kualitas Pemuda	1.	Penguatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi lintas pemangku kepentingan serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi.
			2.	Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di Forum Internasional, pertukaran pemuda dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan.
			3.	Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual.
		Peningkatan Indeks Pembangunan	1.	Keterlaksanaan Rencana Aksi Daerah

		Pemuda (IPP) Indonesia		Pelayanan Kepemudaan di daerah
			2.	Optimalisasi peran pemuda melalui OKP dan Komunitas Pemuda
			3.	Implementasi Grand Design/ Road Map Pembangunan Kepemudaan 2020 - 2029
3.	Daerah:	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara DPOP Kota Balikpapan dengan lembaga dan stakeholders terkait dalam implementasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang berkelanjutan	1.	Meningkatkan kinerja kelembagaan penyelenggara pelayanan kepemudaan
			2.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara OPD, lembaga, instansi, dunia usaha dan masyarakat.
		Peningkatan partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan dan daya saing pemuda	1.	Meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberdayaan pemuda untuk peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda(IPP).
			2.	Peningkatan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
		Peningkatan pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila	1.	Meningkatkan peran Gerakan Pramuka dalam rangka pembinaan karakter kepribadian bangsa.
			2.	Meningkatkan upaya pencegahan pemuda dari perilaku berisiko mencakup bahaya narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi, prostitusi, penurunan kualitas moral, perpecahan bangsa serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.
	Urusan Keolahragaan			
1	Internasional:	▪ Peningkatan kuantitas atlit yang berprestasi pada level internasional ▪ Even-even internasional untuk Sport Tourism (Wisata Olahraga) berkolaborasi dengan sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM		▪ Beberapa atlit di Kota Balikpapan memperoleh medali pada tingkat Olimpiade, SEA Games, Asian Games, Paralympic Games ▪ Tersedianya pelatih profesional pada cabor tertentu ▪ Pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga (bonus) ▪ Lengkapnya infrastruktur pendukung seperti bandara, pelabuhan, hotel,

				dsb. ▪ Balikpapan sebagai daerah utama penyangga IKN ▪ Berkembangnya Industri Ekonomi Kreatif di Kota Balikpapan
2	Nasional:	Peningkatan kuantitas atlit yang berprestasi pada level Nasional		▪ Beberapa atlit di Kota Balikpapan memperoleh medali pada tingkat Nasional ▪ Tersedianya pelatih profesional pada cabor tertentu ▪ Pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga (bonus) ▪ Lengkapnya infrastruktur pendukung ▪
3	Daerah:	▪ Peningkatan kuantitas atlit yang berprestasi pada level Daerah/Region (POPDA, POPWIL, PORPROV, PEPARPROV) ▪ Pekan Olahraga Tingkat Kota Pelajar SMA/SMK sederajat		▪ Beberapa atlit di Kota Balikpapan memperoleh medali pada tingkat Nasional ▪ Tersedianya pelatih profesional pada cabor tertentu ▪ Pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga (bonus) ▪ Lengkapnya infrastruktur pendukung
	Urusan Kepariwisataan			
	Internasional:	Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Internasional	1.	Penguasaan Teknologi bagi pelaku pariwisata & ekonomi kreatif
			2.	Sertifikasi profesi standard internasional bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
			3.	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai Kompetensi dan Daya saing yang mumpuni.
		Event-event Internasional Pariwisata	1.	Balikpapan sebagai daerah penyangga IKN
	Nasional:	Event-event Nasional Pariwisata	1.	Balikpapan sebagai daerah penyangga IKN
	Daerah:	Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan dan lama	1.	Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung obyek wisata yang belum memadai dalam pelayanan bagi wisatawan, Penentu Keberhasilan:

		tinggal wisata		Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi 2.Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata. 3.Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan dan ketersediaan lahan. 4. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata 5. Mengikuti kegiatan pameran/ kegiatan pemasaran pariwisata baik didalam dan luar negeri 6. Melaksanakan event-event pariwisata

Mapping Program dan Kegiatan terhadap Isu Pembangunan

URUSAN	PERMASALAHAN		SOLUSI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Masih rendahnya kualitas pemuda yang kreatif, inovatif, dan mandiri (2020 = 0,02%)	-	Peningkatan kualitas Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	Belum adanya pola pemetaan dan arah pembangunan olahraga prestasi Kota Balikpapan	-	Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi
	Ketersediaan sarpras olahraga terbatas dan belum memenuhi standar	-	Peningkatan sarpras olahraga
	Masih rendahnya daya tarik wisata	-	Menyelenggarakan kegiatan olahraga yang dikolaborasikan dengan promosi pariwisata (*sport tourism*)

NO	URUSAN	PERMASALAHAN		SOLUSI
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Terbatasnya SDM kepariwisataan yang berkualitas/memiliki kualifikasi	-	Pelatihan SDM pariwisata dan perhotelan
		Masih rendahnya Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif)	-	Pembangunan Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif
		Masih rendahnya daya tarik wisata	-	Pengembangan sarpras Pantai Manggar Segara Sari
			-	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata
			-	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi sektor ekonomi kreatif

Tagging Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renja 2024	Pagu Renja 2024 (Rp.)	Tagging					
				SDGs	Kemiskinan	Penganggaran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Persentase Pemuda Yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri/**	**2,5%**	**6.955.478.100**			√			
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota/	**Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan/**	**1,83 %**	**3.646.779.000**			√			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1938 Orang	2.000.000.000			√			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	400 Orang	1.200.000.000			√			
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD	1 Dokumen	300.000.000			√			

	Tingkat Kabupaten/Kota								
Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	125 Orang	146.779.000			√			
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	***Persentase prganisasi kepemudaan yang aktif***	**2,1%**	**3.308.699.100**						
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	3.308.699.100						
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Persentase Atlet yang Berprestasi**	**26,2 %**	**18.566.049.200**	√				√	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	**Persentase prestasi dibidang olahraga**	**28%**	**5.750.000.000**	√				√	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.250.000.000	√				√	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	350 Orang	3.500.000.000	√				√	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase atlet yang dbina**	**28%**	**2.096.050.000**	√				√	
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan	1 Pelatda	946.050.000.000	√				√	

	Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)								
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaa	500 Orang	1.100.000.000	√				√	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	50.000.000	√				√	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga**	**100%**	**4.000.000.000**	√				√	
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5 Organisasi	4.000.000.000	√				√	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Persentase olahraga rekreasi yang di bina**	**85%**	**6.719.999.200**	√				√	
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	1.000.000.000	√				√	
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	4 Unit	5.719.999.200	√				√	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif**	**100%**	**1.150.000.000**	√				√	

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**100%**	**1.150.000.000**	√				√	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1.150.000.000	√				√	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**75 Poin**	**15.702.239.125**	√					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**75 Nilai**	**7.730.339.000**	√					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Org/bulan	7.730.339.000	√					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**75 Nilai**	**40.000.000**	√					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40.000.000	√					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**75 Nilai**	**2.677.473.600**	√					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	91.510.000	√					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	506.334.700	√					
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	4 Paket	325.690.000	√					

	Tangga yang Disediakan								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	650.000.000	√					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	494.750.000 ,00	√					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3360 Dokumen	16.800.000	√					
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	12.069.000	√					
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	67.000.000	√					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	363.319.900	√					
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	150.000.000	√					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75 Nilai**	**373.293.925**	√					
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	373.293.925	√					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	75 Nilai	3.559.635.100	√					

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	13.428.000	√					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2.289.544.800	√					
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000	√					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.247.662.300	√					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**77 Nilai**	**1.321.497.500**	√					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	755.720.000	√					
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	15.000.000	√					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	168 Unit	187.053.000	√					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	363.724.500	√					
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata**	**4%**	**3.137.999.100**	√				√	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi**	**17%**	**2.962.999.100**	√				√	

	pengembangannya								
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	220.000.000	√				√	
Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Unit	2.317.999.100	√				√	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	150 Orang	425.000.000						
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	**Investasi Pariwisata Persentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata**	**11%**	**175.000.000**	√				√	
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	175.000.000,00	√				√	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Persentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata**	**21%**	**4.227.498.400**	√				√	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Rata-rata tinggal wisatawan nusantara**	**1.7 Hari**	**4.227.498.400**	√				√	
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	700.000.000	√				√	

Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	600.000.000						
Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Kegiatan	2.927.498.400						
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	**Persentase Sub Sektor Ekraf yang Terfasilitasi dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektualnya**	**24%**	**1.832.427.600,00**	√				√	√
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah ruang kreasi yang dikelola**	**1 Ruang Kreasi**	**300.000.000**	√				√	√
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	300.000.000	√				√	√
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan**	**24%**	**1.532.427.600**	√				√	√
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	600.000.000	√				√	√
Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	782.427.600	√				√	√
Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan/Orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	30 kegiatan	150.000.000						
PROGRAM PENGEMBANGAN	**Persentase Peningkatan**	**12%**	**1.000.000.000**	√				√	√

SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**								
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisatan dan Ekraf**	**15%**	**1.000.000.000**	√				√	√
Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*	20 Orang%	300.000.000						
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	140 Orang	400.000.000	√				√	√
Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	150 Orang	300.000.000	√				√	√
UPTD Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			**3.878.308.475**	√				√	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata**	**4%**	**3.878.308.475**	√				√	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentasi Destinasi Pariwisata yang dikelola*	8,8%	**3.878.308.475**	√				√	
Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	3.728.308.475	√				√	

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	**150.000.000**	√				√	
JUMLAH PAGU 2024			**56.450.000.000**						

2.4.Review terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja

Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal Rencana Kerja 2024					Hasil Analis Kebutuhan (Renstra 2021-2026)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Balikpapan	PERSENTASE PEMUDA YANG KREATIF, INOVATIF DAN MANDIRI	2,50%	6.955.478.100	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Balikpapan	PERSENTASE PEMUDA YANG KREATIF, INOVATIF DAN MANDIRI	2,40%	8.045.000.000	Kegiatan Tahunan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hibah KNPI
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Balikpapan	Persentase organisasi kepramukaan aktif	100%	1.150.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Balikpapan	Persentase organisasi kepramukaan aktif	100,00%	1.150.000.000	Dana Hibah Pramuka
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Balikpapan	Persentase atlet yang berprestasi	6,20%	18.566.049.200	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Balikpapan	Persentase atlet yang berprestasi	7,00%	21.800.000.000	Partisipasi keolahragaan pada event POPROV, Formas, Haornas, Dana Hibah KONI,NPC dan

											KORMI, Peningkatan Sarana Prasaran Olahraga
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Balikpapan	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	4%	7.016.307.575	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Balikpapan	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	3,00%	9.194.000.000	Peningkatan Sapras Destinasi Pariwisata dan Kegiatan Operasional UPTD PMSS
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Balikpapan	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	21%	4.227.498.400	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Balikpapan	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	20,00%	5.750.000.000	Kegiatan Promosi Pariwisata
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Balikpapan	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektual	24%	1.832.427.600	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Balikppan	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektual	18,00%	974.000.000	Program Prioritas Walikota 2021-2026

7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Balikpapan	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	12%	1.000.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Balikpapan	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	10,00%	976.800.000	Program Prioritas Walikota 2021-2026
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	74 Poin	15.702.239.125	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	72 Poin	14.442.939.000	
			TOTAL PAGU		**56.450.000.000**					**62.332.739.000**	

Tabel T-C.32 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/ Volume/Target Kinerja Program dan Kegiatan	Catatan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan / Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Persentase Pemuda Yang Kreatif, Inovatif Dan Mandiri/ Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	2,5% / 2,1%	Pemberian Dana Hibah Untuk Organisasi Kepemudaan : KNPI
2.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan/ Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kota Balikpapan	Persentase organisasi kepramukaan aktif / Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100% / 100%	Pemberian Dana Hibah Untuk Organisasi Kepramukaan : Kwarcab Pramuka Kota Balikpapan
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan / Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kota Balikpapan	Persentase atlet yang berprestasi / Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	6,2% / 100%	Pemberian Dana Hibah Untuk Organisasi Olahraga : KONI,KORMI dan NPC

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu **"Indonesia Yang Mandiri, Adil dan Makmur** yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2023 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV (2020-2024) Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkpribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan, kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
2. Membuat Pemerintahan selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bansa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Mempertegas kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan lima poin penting untuk bisa mencapai sasaran pembangunan nasional atau rencana kerja pemerintah (RKP) 2024.

1. Sasaran dan prioritas pembangunan RKP 2024 menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan RKA K/L dan RKPD.
2. Pentingnya sinergi perencanaan pembangunan antara Renja K/L serta RKPD dengan RKP 2024
3. Perencanaan dan anggaran yang disusun K/L dan pemerintah daerah harus terukur, imperatif dan sesuai dengan amanat presiden “making delivered”, diperkuat melalui mekanisme Clearing House dengan menerapkan prinsip Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).
4. Memperkuat integrasi dan sinergi sumber pendanaan yang mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas, yaitu pendanaan swasta, KPBU, BUMN, dan APBN sebagai sumber terakhir yang digunakan.
5. K/L dan pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan pelaksanaan Major Project dan didukung sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang andal.

Hal-hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan.

Tujuan dan sasaran merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan

permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pemerintah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing
3. Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan
4. Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan Berkelanjutan
5. Terciptanya Pembangunan Ekonomi Inklusif

Berdasarkan Visi dan Misi walikota Balikpapan Tahun 2021-2026 maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan mengemban Tujuan 2 Urusan 2 untuk urusan Kepemudaan, Tujuan 2 Urusan 2 untuk urusan Keolahragaan dan Tujuan 5 Urusan 1 untuk Kepariwisataan,yang dapar dijabarkan sebagai berikut :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Perencanaan	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pemuda		Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0.020	0.021	0.022	0.023	0.024	0.025	0.025
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5%	10%	12%	15%	20%	25%	25%

		Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	6%	10.96 %	15.96%	20.96%	25.96 %	30.96 %	30.96 %
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27	28,75	30,5	32,25	34	34
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional		Angka kunjungan wisatawan	1, 082,273	1,200,000	1,500,000	1,900,000	2,500,000	3,400,000	3,400,000
		Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian akomodasi	26%	30%	36%	45%	50%	53%	53%
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif		Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	N/A	2.20%	2.42%	2.66%	2.93%	3.22 %	3.22 %
		Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	N/A	19.23 %	26.92%	34.62%	42.31 %	46.15 %	46.15 %

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan visi dan misi Walikota Balikpapan dan sesuai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel rencana program dan kegiatan Tahun 2023 dan prakiran maju Tahun 2024 digambarkan dengan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra 2021-2026)		Pagu Dana	
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024 (Pagu Indikatif)	Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	IKM Internal Perangkat Daerah	74	74	15,702,239,125	15,943,471,300
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah	76	76	7,730,339,000	8,558,212,000
1.03	Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76	76	40,000,000	44,000,000
1004	Administrasi Umum perangkat Daerah	IKM layanan administrasi umum Perangkat Daerah	76	76	2,677,473,600	2,303,729,300
1.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan pengadaan BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	75	76	373,293,925	385,000,000
1.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76	76	3,559,635,100	3,364,760,000
1.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78	78	1,321,497,500	1,287,770,000
2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PERSENTASE PEMUDA YANG KREATIF INOVATIF DAN MANDIRI**	25.00%	260%	6,955,478,100	7,311,457,000
2.01	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	183.00%	183.00 %	3,646,779,000	4,011,457,000

2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	21.00%	22.00%	3,308,699,100	3,300,000,000
3.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase atlet yang berprestasi	62.00%	740%	18,566,049,200	20,810,000,000
3.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prestasi dibidang olahraga	28%	32%	5,750,000,000	7,000,000,000
3.02	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Presentase atlet yang dibina	28%	30%	2,096,050,000	2,760,000,000
3.03	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	100%	100%	4,000,000,000	4,400,000,000
3.04	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang di bina	85%	90%	6,719,999,200	6,650,000,000
4.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase organisasi kepramukaan aktif	100%	100%	1,150,000,000	1,270,000,000
4.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	100%	1,150,000,000	1,270,000,000
5.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	4%	6%	3,137,999,100	7,400,000,000
5.01	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi pengembanganny a	17%	22%	2,962,999,100	7,175,000,000
5.02	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	11%	12%	175,000,000	225,000,000

6.	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	21%	24%	4,227,498,400	4,435,000,000
6.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	17 hari	17 hari	4,227,498,400	4,435,000,000
7.	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Terfasilitasi dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektualnya	24%	29%	1,832,427,600	1,290,670,360
7.1	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ruang kreasi yang dikelola	1 Ruang Kreasi	1 Ruang Kreasi	300,000,000	450,000,000
7.2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan	24%	29%	1,532,427,600	840,670,360
8.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	12%	14%	1,000,000,000	1,080,000,000
8.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisatan dan Ekraf	15%	17%	1,000,000,000	830,000,000
	UPTD PENGELOLA KAWASAN WISATA PANTAI MANGGAR SEGARA SARI DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA				3,878,308,475	3,665,000,000
JUMLAH					**56,450,000,000**	**63,205,598,660**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN

PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusunlah program,kegiatan dan sub kegiatan secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan pada tahun 2024.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yaitu melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengembangan bidang olahraga, pemuda dan pariwisata.

Pada tahun 2024, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan akan melaksanakan **8 program** dengan jumlah kegiatan sebanyak **20 kegiatan** dan **50 Sub Kegiatan** yang merupakan implementasi dari 2 (dua) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yaitu urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan urusan Bidang Pariwisata. Lokasi kegiatan keseluruhan dilaksanakan di Kota Balikpapan. Untuk melaksanakan seluruh program kegiatan sub kegiatan tersebut dengan pagu indikatif sebesar **Rp.56.450.000.000**,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan Tahun 2024. Program tersebut terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kode	Program.Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu RENJA 2024
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	IKM Internal Perangkat Daerah	74 Nilai	15.702.239.125
2.19.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah	76 Nilai	**7.730.339.000**
2.19.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang	7.730.339.000
2.19.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76 Nilai	**40.000.000**
2.19.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40.000.000
2.19.01.02.06	Administrasi Umum perangkat Daerah	IKM layanan administrasi umum Perangkat Daerah	76 Nilai	2.677.473.600

2.19.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	91.510.000
2.19.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	325.690.000
2.19.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	196.693.000
2.19.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	9 Paket	650.000.000
2.19.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	3 Paket	494.750.000
2.19.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan yang disediakan	3360 Dokumen	16.800.000,00
2.19.01.02.06.07	Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	4 Paket	12.069.000,00
2.19.01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	67.000.000
2.19.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaranan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	363.319.900
2.19.01.2.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	150.000.000
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76 Nilai	373.293.925
2.19.01.02.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	373.293.925
2.19.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74 Poin	3.559.635.100
2.19.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	13.428.000
2.19.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	4 Laporan	2.289.544.800,0

		disediakan		
2.19.01.02.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000,00
2.19.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	5 Laporan	1.247.662.300
2.19.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76 Poin	1.321.497.500
2.19.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Opaerasional atau Lapangan Yang DIpelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	755.720.000
2.19.01.02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	15.000.000
2.19.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	168 Unit	187.053.000
2.19.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	363.724.000

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Kode	**Program,Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja**	**Pagu RENJA 2024**
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	PERSENTASE PEMUDA YANG KREATIF, INOVATIF DAN MANDIRI	2,5%	6.955.478.100
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	1,83%	3.646.779.000
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari	1938 Orang	2.000.000.000

		Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	400 orang	1.200.000.000
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	125 Orang	146.779.000
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	2,1%	**2.570.031.400**
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	3.308.699.100

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Kode	Program,Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu RENJA 2024
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase atlet yang berprestasi	6,2%	18.566.049.200
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prestasi dibidang olahraga	28%	5.750.000.000
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.250.000.000,00
2.19.03.2.02.04	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	350 orang	3.500.000.000
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang dbina	28%	2.096.050.000
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1 Pelatda	946.050.000
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	500 orang	1.100.000.000
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	50.000.000
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang	100%	4.000.000.000

		memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga		
19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5 Organisasi	4.000.000.000
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang di bina	85%	6.719.999.200,00
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	1.000.000.000
2.19.03.2.05.04	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	4 Unit	5.719.999.200

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Kode	Program,Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu RENJA 2024
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase organisasi kepramukaan aktif	100%	1.150.000.000
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	1.150.000.000
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1.150.000.000

5. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Kode	Program,Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu RENJA 2024
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	4%	3.654.705.300
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi pengembangannya	17%	**3.479.705.300**
3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	220.000.000
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Unit	2.317.999.100,
3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangka	150 Orang	425.000.000
3.26.02.2.04	Penetepan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Perrsentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	4%	175.000.000
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	**175.000.000**

2. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Kode	Program,Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu RENJA 2024
3.26.3	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	21%	4.227.498.400

3.26.3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	1,7 hari	4.227.498.400
3.26.3.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Neger	3 Dokumen	700.000.000
3.26.3.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Kegiatan	2.927.498.400
3.26.3.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	600.000.000

3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kode	Program,Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu RENJA 2024
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	24%	1.832.427.600
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ruang kreasi yang dikelola	1 ruang kreasi	300.000.000
3.26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1 Unit	300.000.000
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan	24%	1.532.427.600

3.26.04.2.02.03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	600.000.000
3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	782.427.600

4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kode	Program,Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu RENJA 2024
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	12%	**1.000.000.000**
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisatan dan Ekraf	15%	1.000.000.000
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 orang	300.000.000
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	140 Orang	400.000.000,0
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	150 Orang	300.000.000
	UPTD PANTAI MANGGAR SEGARA SARI			
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI			**3.878.308.475**

	PARIWISATA			
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Presentase Peningkatan Daya Tarik Wisata**	**3%**	**3.878.308.475**
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 UPTD	3.728.308.475
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000
	TOTAL			**56.450.000.000**

Dalam rangka meningkatkan kualitas Renja dan kualitas pembangunan serta keselarasan dengan inovasi OPD yang akan dicantumkan dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 maka Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan telah memiliki beberapa inovasi yang telah berjalan dan sedang berlangsung di tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian/Nama Inovasi	Pengampu	Keterangan
1.	SIPAN (Sistem Informasi Pemuda Balikpapan) https://sipan.balikpapan.go.id/	Bidang Kepemudaan	
2.	SIPEWIRA (system Informasi Pemuda Wirausaha) http://sipewira.inotive.id/	Bidang Kepemudaan	Pengadaan Tahun 2022
3.	SIDIA (Sistem Informasi Data Induk Atlet) https://sidia.co.id/	Bidang Olahraga	Informasi Data Atlet,Pelatih dan Insan Olahraga
4.	Cinta Balikpapan http://cinta.balikpapan.go.id/	Bidang Pariwisata	Central Informasi Kota Balikpapan
5.	Nada Alun (Pengendalian Sarana Masuk Pantai Manggar https://bit.ly/3BhlotI	UPTD PMSS	- Inovasi Non Digital - Aksi Perubahan KTU UPTD PMSS PKP II Tahun 2020) kerjasama dengan CSR
6.	Pembayaran Non Tunai dengan QRIS Bank Kaltimtara https://bit.ly/3zoFxg8	Kerjasama DPOP dengan Bank Kaltimtara	- Untuk pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga secara non

			tunai/digital
7.	Pesitor Burega (Penyederhaan Sistem Penyetoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga) dengan Perwali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga https://bit.ly/LAPORAN_AKPER_RINA_TRIYANTI	Progam dan Keuangan	- Inovasi Non Digital (Perubahan Perwali Tata Cara Pembayaran Retribusi Tahun 2021) - Aksi Perubahan PKP II Tahun 2020 Sub Koordinator Program dan Keuangan)
8.	Bus Pariwisata City Tour https://bit.ly/3cC9PDv	Hibah dari Bank Kaltimtara Tahun 2020	- Inovasi Non Digital - Wisata keliling kota Balikpapan untuk masyarakat umum
9.	Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat HUT Kota Balikpapan (FORMAS HUT KOTA) https://bit.ly/FORMAS_HUT_KOTA	Bidang Olahraga	- Lomba olahraga yang dikemas dalam model festival dalam rangka mengembangkan olahraga rekreasi masyarakat, olahraga tradisional / permainan masyarakat (misalnya: line dance, BMX, skateboard, airsoftgun, layangan, senam, Kungfu tradisional, sumpit, dsb.) di Kota Balikpapan dengan menggunakan momentum HUT Kota Balikpapan. Dapat juga menggerakkan UMKM dengan menjual makanan-minuman atau menjual merchandise olahraga pada saat event
10.	Hari Olahraga Nasional Festival (HAORNAS FEST) https://bit.ly/HAORNAS_FEST	Bidang Olahraga	- Hari Olahraga Nasional harus diisi dengan berbagai kegiatan keolahragaan, tidak hanya berupa lomba-lomba olahraga,namun dapat juga berupa event lainnya seperti pameran olahraga, parade/pawai olahraga, jalan santai, funbike, funrun, dsb. Selain itu dapat juga bertemakan kreatif, misalnya lomba membuat video konten ucapan HAORNAS, Mural

			keolahragan, duta Olahraga, dan sebagainya
11.	Balikpapan Menuju Juara Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Timur (BAMARA POPDA) https://bit.ly/BAMARA_POPDA	Bidang Olahraga	- Manajemen pengelolaan olahraga Pendidikan/Atlet Pelajar untuk meningkatkan daya saing Kontingen Kota Balikpapan pada ajang POPDA di Kaltim. - Jangka pendek: membentuk tim Manajemen POPDA yang melibatkan berbagai stakeholder keolahragaan dan pendidikan untuk menyeleksi atlet dan pelatih yang akan berlaga pada POPDA. - Jangka menengah : Merencanakan adanya event Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOT) untuk pertamakalinya di Kota Balikpapan, sebagai bagian dari proses pembinaan dan seleksi menuju POPDA. -Jangka Panjang: Membentuk PPLPD (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah) bagi olahraga-olahraga yang menjadi unggulan pada level pelajar di Kota Balikpapan

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan progduk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisas antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Di dalam penyusunan Renja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2023 memerlukan waktu yang cukup panjang dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
b. Di dalam penyusunan Renja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 ini masih belum sempurna, sehingga dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Propinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Dinas).

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan unntuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, yaitu dengan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Perlu menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif melaksanakan koodinasi dengan instansi terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
e. Dalam menerapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan ammanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 ini kami susun sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 10 Agustus 2023
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Balikpapan

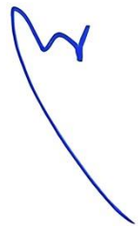

C.I.RATIH.KUSUMA W

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
BAB I **3**
PENDAHULUAN **3**
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7
BAB II **8**
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 ..... **8**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 33
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 68
BAB III **69**
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **69**
3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 69
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 70
3.3. Program dan Kegiatan 71
BAB IV **96**
RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **96**
BAB V **103**
PENUTUP **103**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	8
Tabel 2.2	Hasil Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021	10
Tabel 2.3	T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Balikpapan	40
Tabel 2.4	T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Balikpapan	68
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2023	70
Tabel 3.2	T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	75
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2023	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari 3 tahapan yakni: tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Organisasi Perangkat Daerah merupakan tahapan akhir yang dilaksanakan dan disempurnakan dari Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan daerah melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah ini menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan top-down dan bottom-up.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dengan memperhatikan program prioritas dan penyusunannya sejalan dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagai pedoman kerja dalam 1 (satu) tahun.

Dalam Penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang di lingkup Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dengan melakukan identifikasi permasalahan

dan tantangan yang dirangkum dalam isu-isu strategis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Sedangkan dalam penyusunan nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatannya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2024 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
23. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
24. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Maksud penyusunan dokumen adalah:
   1) Rencana Kerja disusun untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.
   2) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam Perangkat Daerah;
   3) Menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
   4) Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2024.

b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 adalah:
   1) Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2024;
   2) Menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
   3) Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024;
   4) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V INOVASI PERANGKAT DAERAH

Bab VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

Target kinerja dimaksud menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022. Dari hasil pengukuran terhadap

target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022 diperoleh capaian kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Hasil Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**presentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional**		**6.379.710.839**			**4**	**1.077.531.700**		**72.413.770**		**151.784.412**		**218.526.059**	**5**	**505.995.104**	**5**	**948.719.345**	**125,00%**	**88,05%**	**5,00**	**948.719.345**	**0,00%**	**14,87%**	**Dispustakar**	
		Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	**Presentasi peningkatan kunjungan di perpustakaan daerah**		**5.017.710.839**			**10**	**837.203.300**		**68.973.770.00**		**133.484.412,00**		**210.829.159,00**	**196**	**334.886.468,00**	**196**	**748.173.809**	**1960,00 %**	**89,37%**	**196,00**	**748.173.809**	**0,00%**	**14,91%**		
		pengembangan dan oemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	meningkatnya jumlah pengunaan ablikasi ibalikpapan					1.000	29.700.00	72	115.500	114	178.901	377	687.338	440	2.475.676	1.003	3.457.415	100,30%	11,64%	1.003	3.457.415	0,00%	0,00%		
		pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah perpustakaan desa/kelurahan yang dibina					**10**				4		4		2		**10**	**-**	100,00%	**0,00%**	**10**	**-**	0,00%	0,00%		
		pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat daerah/kabupaten/kota	terlaksananya kegiatan lomba literasi tentang budaya balikpapan					0									-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		
		Pembinaan perpustakaanpada satuan Pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota	jumlah perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar yang dibina					30	99.999.800		7.043.600	5	10.563.730	10	17.386.284	10	63.132.594	30	98.126.208	100 00%	98,13%	30	98.126.208	0,00%	0,00%		
		Pembinaan perpustakaan khusus tingkat kabupaten/kota	jumlah perpustakaan khusus yang dibina					2				3						3		150,00%	0,00%	3		0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
		peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah/kota	jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang mengikuti bimtek/pelatihan/seminar					0		5				-		-		5	-	0,00%	0,00%	5		0,00%	0,00%		
		pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota	sumber peningkatan layanan					1	643.566.850	0	48.840.800	-	108.240.863	-	185.054.863	1	249.446.799	1	591.583.351	100,00%	91,92%	1	591.583.351	0,00%	0,00%		
		Pengembangan bahan Pustaka	Meningkatnya jumlah bahan pustaka															**0**		0,00%	0,00%	**0**		0,00%	0,00%		
		Pengelolaan dan pengembangan bahan Pustaka	Terlaksananya kegiatan pengelolaan bahan Pustaka					**2**	49.296.800	0	8.845.870		14.200.892		7.400.674	3	12.484.399	1	42.931.835	15,00%	87,09%	3	42.931,835	0,00%	0,00%		
		Penyusunan data dan informasi perpustakaan tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya data dan informasi perpustakaan tenaga perpustakaan tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat kota balikpapan					1	14.639.850	0	4.128.000	0	300.000		300.000	1,00	7.347.000	1	12.075.000	100,00%	82,48%	1	12.075.000	0,00%	0,00%		
		Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	**Presentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah**		1.362.000.000			11,5	240.328.400		3.440.000.000		18.300.000,00		7.696.900,00	11,98	171.108.636,00	11,98	200.545.536	104,17%	83,45%	11,98	200.545.536	0,00%	14,72%		
		Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan dasar dan Pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi yang dilakukan					**3**	240.328.400	**0**	3.440.000	**1**	18.300.000	**1**	7.696.900	**2**	171.108.636	**4**	200.545.536	**133,33%**	83,45%	**4**	200.545.536	0,00%	0,00%		
		Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota																0		0,00%	0,00%	0		0,00%	0,00%		
		Pemberian penghargaan Gerakan budaya gemar membaca	Terealisasinya pemberian penghargaan Gerakan budaya gemar membaca															0		0,00%	0,00%	0		0,00%	0,00%		
		Pengembangan literasi berbasis inklusi social	Terlaksananya kegiatan literasi berbasis inklusi social yang dilaksanalan															0		0,00%	0,00%	0		0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
		Pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pemilihan duta baca di kota Balikpapan															**0**		0,00%	0,00%	**0**		0,00%	0,00%		
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO																**0**		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		
		Pelestarian naskah kuno milih daerah kabupaten/kota																**0**		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno																**0**		0,00%	0,00%	**0**		0,00%	0,00%		
		Pengembangan pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan																**0**		0,00%	0,00%	**0**		0,00%	0,00%		
		Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota																**0**		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		
		Seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara																**0**		0,00%	0,00%	**0**		0,00%	0,00%		
		Pengolahan dan penyaingan koleksi budaya etnis nusantara																**0**		0,00%	0,00%	**0**		0,00%	0,00%		
2	Meningkatnya layanan kearsipan sesuai standar	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Presentase arsip yang dikelola**		**1.935.078.169**			**60**	**305.923.070**		**20.039.200**		**189.959.748**		**25.493.000**	**60**	**53.041.500**	**60**	**288.533.448**	**100,00%**	**94,32%**	**60,00**	**288.533.448**	0,00%	14,91%		
		Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	**Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis**		**1.291.013.324**			42	**209.924.150**		**10.147.500,00**		**147.807.148,00**		**10.040.000,00**	**42**	**28.436.500,00**	**42**	**196.431.148**	**100,00%**	**93,57%**	**42,00**	**196.431.148**	0,00%	**15,22%**		
		Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip					55	**20.964.900**		**10.134.000**	45	**10.134.000**		**-**	**10,00**	**8.190.000**	**55**	**28.471.500**	**100,00%**	**95,02%**	**5500%**	**28.471.500**	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Persentase arsip inaktif yang diusulkan					55	**29.959.250**			0	**510.000**	25,00	**10.040.000**	**30,00**	**17.321.500**	**55**	**27.871.500**	**100,00%**	**93,03%**	**55**	**27.871.500**	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
		Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Jumlah objek pengawasan yang dinilai					15	**150.000.000**			0	**137.163.148**	0,00	**-**	**21,00**	**2.925.000**	**21**	**140.088.148**	**140,00%**	**93,39%**	**21**	**140.088.148**	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	**Persentase arsip inaktif yang dikelola**		**344.064.845**			75	**49.999.220**			10	**23.586.600,00**		**4.647.000,00**	**50**	**20.000.000,00**	**60**	**48.233.600**	**80,00**	**96,47%**	**60,00**	**48.233.600**	0,00%	14,02%		
		Akuisisi, pengolahan, presvarsi, dan akses arsip statis	Persentase arsip statis yang dapat diakses oleh publik					10	**49.999.220**			0	**23.586.600**	0,00	**4.647.000**	**10,00**	**20.000.000,00**	**10,00**	**48.233.600**	**100,00%**	**96,47%**	**10,00**	**48.233.600**	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	**Persentase jumlah arsip yang dimasukan dalam SIKN/JIKN**		**300.000.000**			100	**45.999.700**	30	**18.806.000,00**	60	**4.505.000,00**	90	**43.868.700**	**90,00%**	**93,37%**	**90,00**	**43.868.700**	**90,00%**	**95,37%**	**90,00**	**43.868.700**	0,00%	**14,62%**		
		Penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kab/kota melalui JIKN	Persentase jumlah arsip yang dapat diakses melalui JIKN					25	**15.999.700**			0	**9.037.800**	0,00	**2.136.000**	**20,00**	**3.630.000**	**20**	**14.803.800**	**80,00%**	**92,53%**	**20**	**14.803.800**	0,00%	0,00%		
		Pemberdayaan kapasitas unt kearsipan dan Lembaga kearsipan daerah kab/kota	Persentase kearsipan yang arsipnya dapat diakses melalui simpul JIKN					10	**30.000.000**		**9.891.700**	8	**9.528.200**	0,00	**8.670.000**	**2,00**	**975.000**	**10**	**29.064.900**	**100,00%**	**96,88%**	**10,00**	**29.064.900**	0,00%	0,00%		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan**		**967.539.085**			10	**159.995.230**		**37.820.800**		**43.636.318**		**27.070.020**	**7**	**45.521.122**	**7**	**154.048.260**	**70,00%**	**96,28%**	**7,00**	**154.048.260**	0,00%	15,92%		
		Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kab/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	**Persentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip**		**185.539.085**			6	**39.995.480**		**-**	0	**13.196.050,00**		**11.010.020,00**	**6**	**14.400.000,00**	**6**	**38.606.070**	**100,00%**	**96,53%**	**6,00**	**38.606.070**	0,00%	20,81%		
		Penilaian/ penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah kegiatan emusnahan arsip yang sesuai NSPK					1	**19.995.480**			0	**9.275.800**	0,00	**9.697.520**	**1,00**		**1**	**18.973.320**	**100,00%**	**94,89%**	**1**	**18.973.320**	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang dilaksanakan oleh pemerintah kota					1	**20.000.000**			0	3.920.250	0,00	1.312.500	**1,00**	14.400.000	1	19.632.750	100,00%	98,16%	1	19.632.750	0,00%	0,00%		
		Perlindungan dan penyelamatan arsip aktif bencana yang berkala kab/kota	**Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana**		**146.000.000**			10	**19.999.750**			0	2.120.000,00	10	4.700.000,00		11,184.000,00	10	18.004.000	100,00%	90,02%	10,00	18.004.000	0,00%	12,33%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
		Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Jumlah kegiatan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana					1	**9.999.750**			0		1,00	4.700.000		4.980.000	1	9.680.000	100,00%	96,80%	1	9.680.000	0,00%	0,00%		
		Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Jumlah kegiatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana					1	**10.000.000**			0	2.120.000	1,00	-		6.204.000	1	8.324.000	100,00%	83,24%	1	8.324.000	0,00%	0,00%		
		Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kab/kota	**Presentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi**		**250.000.000**			15	**50.000.000**		**9.495.800,00**	0	16.626.278,00		11,360.000,00	**0**	11,087.122,00	0	48.559.200	0,00%	97,14%	0,00	48.559.200	0,00%	19,43%		
		Penilaian dan penetapan auntesitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Jumlah arsip statis yang telah diautentasikan sesuai NSPK					150	25.000.000		**9.495.800**	0	3.546.400	0	7.950.000		3.000.000	0	23.992.200	0,00%	95,97%	0	23.992.200	0,00%	0,00%		
		Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Jumlah arsip hasil alih media yang telah diautentasikan sesuai NSPK					50	25.000.000			0	13.079.878	0	3.410.000		8.087.122	0	24.577.000	0,00%	98,31%	0	24.577.000	0,00%	0,00%		
		Pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang	**Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang**		**386.000.000**			**5**	**50.000.000**		**28.325.000,00**	**0**	**11.693.990,00**		**-**	**0**	**8.850.000,00**	**0**	**48.868.990**	**0,00%**	**97,74%**	**0,00**	**48.868.990**	**0,00%**	**12,66%**		
		Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang																0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	**0,00%**	**0,00%**		
		Evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang																0	-	**0,00%**	**0,00%**	0	-	**0,00%**	**0,00%**		
		Penetapan dan pengumuman daftar pencarian arsip (DPA)	Jumlah data pencarian arsip (DPA) yang diumumkan					1	50.000.000		28.325.000	0	11,693.990	0,00	-		8.850.000	0	48.868.990	0,00%	0,00%	0	48.868.990	0,00%	0,00%		
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	**Persentase perizinan penggunaan arsip**		**241.884.771**			**0**	**39.999.850**		**7.500.000**	**-**	**15.013.800**		**6.165.000**	**-**	**9.810.000**	**0**	**38.488.800**	0,00%	**96,22%**	0,00	**38.488.800**	0,00%	**15,91%**		
		Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kab/kota	**Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup**		**241.884.771**			**1**	**39.999.850**		**7.500.000,00**	**0**	**15.013.800,00**		**6.165.000,00**	**0**	**9.810.000,00**	**0**	**38.488.800**	0,00%	**96,22%**	0	**38.488.800**	0,00%	**15,91%**		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
		Penyusunan dan penetaoan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah SOP yang telah ditetapkan					1	19.999.850			0	12.183.500	0	6.165.000		975.000	0	19.323.500	0,00%	96,62%	0	19.323.500	0,00%	0,00%		
		Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah daftar arsip yang bersifat tertutup dan ijin penggunaan yang telah ditetapkan					1	20.000.000		**7.500.000**	0	2.830.300	0	-		8.835.000	0	19.165.300	0,00%	95,83%	0	19.165.300	0,00%	0,00%		
3	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**IKM internal perangkat daerah**	82	50.666.020.931			78	8.778.338.052		1.737.657.489		2.060.964.931		2.039.246.804	79,70%	2,214,788,904	80	8.052.658.128	102,18%	97,09%	79,70	8.052.658.128	97,20%	15,89%		
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	78	50.000.000			70	54.711.400		17.288.950,00		21.256.224,00		10.795.550,00	63,27%	3.780.000,00	63	53.120.724	90,39%	97,09%	63,27	53.120.724	81,12%	106,24%		
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan					2	14.711.400	1	8.288.750		5.994.000		-	1,00	-	2	14.238.750	100,00%	97,09%	2	14.238.750	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA					30	10.000.000		3.458.400	32	5.994.000		436.000		-	32	9.888.400	106,67%	98,88%	32	9.888.400	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA					30	-		-				-	12,00	-	12	-	40,00%	0,00%	12	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA					30	10.000.000		1.705.000		6.269.724		1.543.000	32,00	-	32	9.517.724	106,67%	95,18%	32	9.517.724	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA					30	-		-					12,00	-	12	-	40,00%	0,00%	12	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP					1	10.000.000		1.918.400	1	2.997.500		4.700.500		-	1	9.616.400	100,00%	96,16%	1	9.616.400	0,00%	0,00%		
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja					4,00	10.000.000	1	1.918.400	1		1	4.116.050	1,00	3.780.000	4	9.814.450	100,00%	98,14%	4	9.814.450	0,00%	0,00%		
		Administrasi keuangan perangkat daerah	**IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah**		**24.539.078.375**			**83**	**4.574.041.300**		**963.319.281,00**		**1.200.705.854,00**		**1.176.173.655,00**	**81,23**	**998.774.657,00**	**81**	**4.333.973.447**	**97,87%**	**94,75%**	81,23	**4.333.973.447**	**0,00%**	**17,68%**		
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN					25,00	4.574.041.300	0	963.319.281	0,00	1.200.705.854	0,00	1.176.173.655	25,00	998.774.657	25,00	4.333.973.447	100,00%	94,75%	25,00	4.333.973.447	**0,00%**	**0,00%**		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/vertifikasi keuangan SKPD	Dokumen laporan penatausahaan dan pengujian/vertifikasi keuangan					359		121		197		20,00		233,00		571		159,05%	**0,00%**	571		**0,00%**	**0,00%**		
		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Laporan rekonsiiasi pelaksanaan akuntansi dengan BPKD					12								1,00		2	-	16,67%	0,00%	2		**0,00%**	**0,00%**		
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun					12								12,00		12	-	100,00%	**0,00%**	12		**0,00%**	**0,00%**		
		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan					2,00								2,00		2	-	100,00%	**0,00%**	2		**0,00%**	**0,00%**		
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan					12		3		3		3,00		3,00		12	-	100,00%	**0,00%**	12		**0,00%**	**0,00%**		
		Penyusunan pelaporan analisis prognis realisasi anggaran	Laporan realisasi dan prognis anggaran					12		3		3		3,00		3,00		12	-	100,00%	**0,00%**	12		**0,00%**	**0,00%**		
		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	**IKM layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**					77	-							78,79		79	-	102,32%	0,00%	78,79	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen RKBMD					2				2						2	-	100,00%	0,00%	2	-	0,00%	0,00%		
		Pengamanan barang milik daerah SKPD	Laporan inventaris BMD					6,00		1		2				3,00		6	-	100,00%	0,00%	6	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Laporan kondisi BMD					4		1		1		1		1,00		4	-	100,00%	0,00%	4	-	0,00%	0,00%		
		Pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD																0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		
		Rekonsilasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan rekonsilasi BMD dengan BKPD					2				1				1,00		2	-	100,00%	0,00%	2	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Dokumen penatausahan BMD					5								5,00		5	-	100,00%	0,00%	5	-	0,00%	0,00%		
		Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Dokumen pemanfaatan BMD					1								1,00		1	-	100,00%	0,00%	1	-	0,00%	0,00%		
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	**IKM layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**		767.600.000			80	-							81,23		81	-	101,54%	0,00%	81,23	-	0,00%	0,00%		
		Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah sarpas disiplin pegawai															0		0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atributnya															0		0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		
		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan kepegawaian					10		3		3		3,00		3,00		12		120,00%	0,00%	12	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	Jumlah laporan pelaksanaan system informasi kepegawaian					2								1,00		2	-	100,00%	0,00%	2	-	0,00%	0,00%		
		Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen SKP					46								26,00		26	-	56,52%	0,00%	26	-	0,00%	0,00%		
			Jumlah dokumen SKP					51								18,00		18	-	35,29%	0,00%	18	-	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi																0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		
		Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan																0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan																0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		i
		Administrasi umum perangkat daerah	**IKM layanan administrasi umum perangkat daerah**		**3.728.270.615**			**76**	**968.006.552**		**228.025.145,00**		**192.388.111,00**		**102.388.111,00**	**80,44**	**414.177.011,00**	**80**	**937.311.620**	**105,84%**	**96,83%**	**80,44**	**937.311.620**	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					17	49.998.807				33.067.980		-	17,00		17	49.349.630	98,70%	98,70%	17	49.349.630	0,00%	0,00%		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor					4	413.016.895	8	159.853.000	4	48.042.000		-	44,00		56	407.800.450	98,74%	98,74%	56	407.800.450	0,00%	0,00%		
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga															0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan bahan logistic kantor	Jenis bahan logistik kantor					81	212.091.300		39.148.755		59.720.995		25.902.650	73,00	77.170.840	73	201.943.240	90,12%	95,22%	73	201.943.240	0,00%	0,00%		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah jenis cetakan dan pengadaan							11	58.317.750			0	10.096.790	11,00	26.399.980	11	57.903.100	100,00%	99,29%	11	57.903.100	0,00%	0,00%		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							2	17.995.800	0	2.324.400	0	3.516.400	3,00	5.185.200	3	14.840.400	150,00%	82,47%	3	14.840.400	0,00%	0,00%		
		Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah makan dan minum							250	49.586.000	40	840.000	96	4.311.000	40	18.392.000	287	38.474.800	114,00%	77,59%	287	38.474.800	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah							50	167.000.000	6	25.858.990	8	33.632.946	35	70.841.891	58	167.000.000	118,00%	100,00 %	58	167.000.000	0,00%	0,00%		
		Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD																0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**1.771.000.000**													**0**	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan mebel																0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya																0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**IKM layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**14.349.908.000**			**79**	**2.301.578.800**		**362.837.266,00**		**568.909.372,00**	**79,34**	**495.142.108,00**	**79**	**499.142.108,00**	**79**	**1.925.910.810**	**100,43%**	**83,68%**	**79,34%**	**1.925.910.810**	0,00%	**13,38%**		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik					5	612.588.000		109.525.760		120.730.738	5	131.435.249	5	143.411.000	5	505.102.747	100,00%	82,45%	5	505.102.747	0,00%	0,00%		
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga non PNS yang mendapat gaji					25	1.688.990.800		253.311.506		448.178.634	18	363.708.859	18	355.611.064	18	1.420.808.063	72,00%	84,12%	18	1.420.808.063	0,00%	0,00%		
			Jumlah tenaga professional					1				1				1		1	-	100,00%	0,00%	1	-	0,00%	0,00%		
			Luasan gedungbkantor yang dilayani					22								19		19	-	86,36%	0,00%	19	-	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**IKM layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**5.415.165.941**			**76**	**880.000.000**		**160.186.847,00**		**77.705.370,00**		**255.414.138,00**	**77,69**	**309.035.172,00**	**78**	**802.341.527**	102,22%	91,18%	**77,69**	**802.341.527**	0,00%	0,00%		
		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara					10	150.000.000	10	16.220.317		33.175.720		30.824.342		64.186.288	10	144.406.667	100,00%	96,27%	10	144.406.667	0,00%	0,00%		
		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara					3	100.000.000	3	12.405.750		14.106.650		21.080.206		26.206.659	3	73.799.265	100,00%	73,80%	2	73.799.265	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan mebel	Jumlah jenis mebel					2	30.000.000						-	2	29.842.350	2	29.842.350	100,00%	99,47%	2	29.842.350	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					16	400.000.000	5	84.360.000		30.423.000		103.990.600	9	138.791.875	16	357.565.475	100,00%	89,39%	16	357.565.475	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan/rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya	Frekuensi pemeliharaan					1	200.000.000		47.200.780		-		99.518.990	1	50.008.000	1	196.727.770	100,00%	98,36%	1	196.727.770	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
							I	II	III	IV									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
						10.361.787.902					9.482.447.981								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)												95,50%	50,01%			1,59%	3,66%		
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat Rendah		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN												87,21%	46,12%			0,00%	0,00%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN												Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN												161,74%	82,32%			9,01%	17,35%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN												Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												66,20%	93,07%			32,40%	15,23%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sedang	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor penghambat pencapaian kinerja							1. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan							1. Pencapaian pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal 2. percepatan penyerapan anggaran sesuai progress kegiatan												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD berikutnya:							1. Perlu adanya pemetaan target kinerja di tiap triwulan sehingga beban kinerjanya dapat terbagi merata 2. Menentukan target secara realistis dan berdasar sesuai dengan rumusan perhitungan pencapaian targetnya 3. Memiliki data dasar pada setiap indicator kinerja sehingga dapat terukur										

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan pada tahun 2022 memiliki 5 (lima) progam yang terbagi dalam 15 (lima belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan. Total pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 10.361.787.902,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 91,51% atau sebesar Rp. 9.482.447.981,00.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja seluruh program sebesar 66,20% dengan kriteria penilaian masuk pada predikat “Sedang”
2. Rata-rata capaian kinerja seluruh kegiatan sebesar 161,74% dengan kriteria penilaian masuk pada predikat “Sangat Tinggi”
3. Rata-rata capaian kinerja seluruh sub kegiatan sebesar 87,21% dengan kriteria penilaian masuk pada predikat “Tinggi”

Dari 5 (lima) program pada Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2022, 3 (tiga) diantaranya memiliki capaian kinerja yang “Sangat Tinggi”, dan 1 (satu) program berada di predikat “Sedang” serta 1 (satu) program berada di predikat “Sangat Rendah”. Pada level kegiatan terdapat 10 (sepuluh) yang mendapat predikat “Sangat Tinggi”, bahkan ada yang mencapai lebih dari 100% dikarenakan pada saat perencanaan target kondisi sedang pandemi Covid-19, tetapi pada saat berjalannya kegiatan kondisi sudah berubah menjadi Era New Normal sehingga tidak ada lagi pembatasan dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada 2 (dua) kegiatan yang berada pada predikat “Tinggi” dan ada 3 (tiga) kegiatan yang memperoleh predikat “Sangat Rendah”. Pada level sub kegiatan terdapat 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan ber predikat “Sangat Tinggi , 2 (dua) sub kegiatan berpredikat “Tinggi”, 1 (satu) sub kegiatan berpredikat “Sedang”.

Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2021 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2021), adalah sebagai berikut:

I. Program Pembinaan Perpustakaan

Indikator program : Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar -320,18% dari target 10%, terealisasi -32.02%. Nilai capaian kinerja tersebut dianggap 0.

Penjelasan : Kunjungan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan karena dampak pandemi Covid-19, dimana kebijakan PPKM yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota

membatasi jumlah masyarakat yang berkunjung ke Perpustakaan Daerah Kota Balikpapan (kunjungan onsite, kunjungan website, aktivitas member iBalikpapan)

Pada program ini terdapat dua kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator kegiatan : Jumlah kunjungan Perpustakaan Daerah Kota Balikpapan

   Evaluasi hasil : Predikat kinerja "Sangat Rendah", nilai capaian kinerja sebesar 7,78% dari target 190.000 orang, terealisasi 14.782 orang.

   Penjelasan : Kunjungan tidak sesuai dengan perkiraan karena efek pandemi Covid-19. Kunjungan hanya ada di Perpustakaan Daerah Kota Balikpapan (kunjungan onsite, kunjungan website, aktivitas member iBalikpapan)

   Pada kegiatan ini terdapat satu sub kegiatan, yaitu:

   1.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

   Indikator sub kegiatan : Jumlah Kunjungan Seluruh Perpustakaan di Kota Balikpapan

   Evaluasi hasil : Predikat kinerja "Sangat Rendah", nilai capaian kinerja sebesar 5,07% dari target 291.587 orang, terealisasi 14.782 orang.

   Penjelasan : Kunjungan tidak sesuai dengan perkiraan karena efek pandemi Covid-19. Kunjungan hanya ada di Perpustakaan Daerah Kota Balikpapan (kunjungan onsite, kunjungan website, aktivitas member iBalikpapan)

2. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator kegiatan : Jumlah kunjungan Perpustakaan Daerah Kota Balikpapan

   Evaluasi hasil : Predikat kinerja "Sangat Rendah", nilai capaian kinerja sebesar 7,78% dari target 190.000 orang, terealisasi 14.782 orang.

Penjelasan : Kunjungan tidak sesuai dengan target karena dampak pandemi Covid-19. Kebijakan PPKM membatasi jumlah masyarakat yang berkunjung ke Perpustakaan Daerah Kota Balikpapan (kunjungan onsite, kunjungan website, aktivitas member iBalikpapan)

Pada kegiatan ini terdapat lima sub kegiatan, yaitu:

2.1 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

Indikator sub kegiatan : Jumlah jenis sarana IT yang dikelola

Evaluasi hasil : Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 2 jenis, terealisasi 2 jenis.

2.2 Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan : Penambahan jumlah anggota perpustakaan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja "Sangat Rendah", nilai capaian kinerja sebesar 23,01% dari target 7.000 orang, terealisasi 1.611 orang.

Penjelasan : Serupa dengan permasalahan kunjungan yang terdampak pandemi Covid-19, pembatasan kegiatan masyarakat membuat masyarakat enggan untuk datang dan menjadi anggota perpustakaan.

2.3 Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan

Indikator sub kegiatan : Jumlah Perpustakaan / Taman Baca yang telah dibina

Evaluasi hasil : Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 122,81% dari target 285 perpustakaan/taman baca, terealisasi 350 perpustakaan/taman baca.

Penjelasan : Jumlah perpustakaan/taman baca yang dibina bisa melebihi target karena pada masa pandemi Covid-19, pembinaan dilakukan secara daring (*zoom meeting*) sehingga lebih banyak perpustakaan/taman baca binaan yang dapat dibina.

2.4 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan : Jumlah Bimbingan Teknis Aparatur Perpustakaan yang diselenggarakan

Evaluasi hasil : Sub kegiatan tidak dapat dievaluasi karena sub kegiatan ditiadakan sesuai arahan saat penyusunan anggaran

2.5 Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka

Indikator sub kegiatan : Penambahan jumlah judul koleksi Bahan Pustaka

Evaluasi hasil : Predikat kinerja "Sangat Rendah", nilai capaian kinerja sebesar 35,53% dari target 3.000 judul, 1.066 judul.

Penjelasan : Pendanaan untuk pengadaan buku murni sangat terbatas terkait dengan kondisi APBD sehingga hanya sanggup mengadakan 1.066 judul.

II. Program Pengelolaan Arsip

Indikator program : Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)

Evaluasi hasil : Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 75%, terealisasi 75%.

Pada program ini terdapat tiga kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan : Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 80% dari target 100%, terealisasi 80%.

Pada kegiatan ini terdapat satu sub kegiatan, yaitu:

1.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah jenis sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dipelihara

Evaluasi hasil : Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 83,33% dari target 6 jenis, terealisasi 5 jenis.

b. Indikator sub kegiatan : Volume arsip yang dipelihara

Evaluasi hasil : Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 500, terealisasi 500.

c. Indikator sub kegiatan : Jumlah jenis sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dipelihara

Evaluasi hasil : Indikator tidak dapat dievaluasi karena pelaksanaan kajian ditiadakan sesuai arahan saat penyusunan anggaran

2. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan : Persentase peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 80% dari target 100%, terealisasi 80%.

Pada kegiatan ini terdapat dua sub kegiatan, yaitu:

2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah aplikasi kearsipan yang tersedia

Evaluasi hasil : Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 aplikasi, terealisasi 1 aplikasi.

b. Indikator sub kegiatan : Jumlah peralatan jaringan informasi kearsipan yang dipelihara

Evaluasi hasil : Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 unit, terealisasi 1 unit.

c. Indikator sub kegiatan : Jumlah aplikasi layanan informasi arsip yang disediakan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 aplikasi, terealisasi 1 aplikasi.

2.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota

Indikator sub kegiatan : Jumlah kegiatan sosialisasi penyuluhan kearsipan yang dilaksanakan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 kegiatan, terealisasi 1 kegiatan.

3. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan : Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85,71% dari target 35%, terealisasi 30%.

Pada kegiatan ini terdapat satu sub kegiatan, yaitu:

3.1 Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah sistem katalog data yang disusun

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target 1 katalog, tidak terealisasi.

Penjelasan : Penyusunan sistem katalog tidak diakomodir dalam DPA karena *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19.

b. Indikator sub kegiatan : Jumlah OPD yang didata

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 3 OPD, terealisasi 3 OPD.

c. Indikator sub kegiatan : Jumlah OPD yang telah terdata dan tertata

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 4 OPD, terealisasi 4 OPD.

III. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator program : Persentase kelayakan sarana dan prasarana aparatur

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 99.97% dari target 98.35%, terealisasi 98.32%.

Pada program ini terdapat lima kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 99.97% dari target 98.35%, terealisasi 98.32%.

Pada kegiatan ini terdapat lima sub kegiatan, yaitu:

1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah jenis ATK yang digunakan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 94.52% dari target 73 jenis, terealisasi 69 jenis.

b. Indikator sub kegiatan : Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan tamu

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 61,85% dari target 1350 porsi, terealisasi 835 porsi.

Penjelasan : Dampak dari pandemic Covid-19 menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk dalam koordinasi antar daerah sehingga berpengaruh pada tingkat kunjungan tamu.

1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator sub kegiatan : Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 106,67% dari target 15 jenis, terealisasi 16 jenis.

1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator sub kegiatan : Jumlah jenis alat listrik dan elektronik

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 16 jenis, terealisasi 16 jenis.

1.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator sub kegiatan : Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal Kota Balikpapan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 66,67% dari target 3 jenis, terealisasi 2 jenis.

1.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator sub kegiatan : Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi/konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 29,23% dari target 62 kali, terealisasi 19 kali.

Penjelasan : Dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk dalam koordinasi antar daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 93.49% dari target nilai 82, terealisasi nilai 76.66.

Pada kegiatan ini terdapat satu sub kegiatan, yaitu:

2.1 Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator sub kegiatan : Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 25 dokumen, terealisasi 25 dokumen.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 96.80% dari target nilai 78, terealisasi nilai 75.51.

Pada kegiatan ini terdapat dua sub kegiatan, yaitu:

3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator sub kegiatan : Jumlah penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 75% dari target 4 jasa, terealisasi 3 jasa.

3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah tenaga kebersihan yang bekerja di perangkat daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 111,11% dari target 9 orang, terealisasi 11 orang.

Penjelasan : Perhitungan jumlah tenaga kebersihan didasarkan pada evaluasi pelaksanaan operasional di tahun 2020 dan perhitungan kebutuhan saat awal pembuatan kontrak, dan ternyata diperlukan penambahan.

b. Indikator sub kegiatan : Jumlah petugas keamanan yang bekerja di perangkat daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 50% dari target 18 orang, terealisasi 9 orang.

Penjelasan : Perhitungan jumlah tenaga keamanan didasarkan pada evaluasi pelaksanaan operasional di tahun 2020 dan perhitungan kebutuhan saat awal pembuatan kontrak dan ternyata hanya dibutuhkan 9 orang.

c. Indikator sub kegiatan : Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 41,86% dari target 43 orang, terealisasi 18 orang.

Penjelasan : Target pada dokumen Renja 2021 mengacu pada Renstra 2016-2021 di mana kondisi saat itu jumlah tenaga non PNS sebanyak 43 orang, namun dalam perkembangannya sebagian besar tenaga non PNS tersebut mengundurkan diri.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi hasil : Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 96,37% dari target nilai 75, terealisasi nilai 72,28.

Pada kegiatan ini terdapat lima sub kegiatan, yaitu:

5.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator sub kegiatan : Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 gedung, terealisasi 1 gedung.

5.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator sub kegiatan : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

Evaluasi hasil : Sub kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran.

5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator sub kegiatan : Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 15 peralatan, terealisasi 15 peralatan.

5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan beroperasi dengan baik

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 3 unit, terealisasi unit.

b. Indikator sub kegiatan : Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan STNK kendaraan roda 2

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 3 unit, terealisasi 3 unit.

5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan beroperasi dengan baik

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 10 unit, terealisasi 10 unit.

b. Indikator sub kegiatan : Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan STNK kendaraan roda 2

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 10 unit, terealisasi 10 unit.

6. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : a. Persentase kedisiplinan aparatur

b. Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Evaluasi hasil : Sub kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran.

7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

a. Indikator kegiatan : Persentase peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 95%, terealisasi 95%.

b. Indikator kegiatan : Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan OPD dan Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 95% dari target 100%, terealisasi 95%.

Pada kegiatan ini terdapat tiga sub kegiatan, yaitu:

7.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator sub kegiatan : Jumlah dokumen LKjIP

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

7.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

b. Indikator sub kegiatan : Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi Renstra OPD

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

7.3 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan tahunan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

b. Indikator sub kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang dicetak (buku)

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu–isu penting atau isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan menunjukkan pelayanan yang cukup baik pada urusan bidang Perpustakaan dan urusan bidang Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan juga menemui permasalahan-permasalahan.

Berdasarkan hasil evaluasi Perpustakaan Nasional Tahun 2022 Kota Balikpapan berada di urutan 19 (sembilan belas) Tingkat Kabupaten/Kota. Tahun 2022 Kota Balikpapan memperoleh nilai TGM 42,28 yang masuk dalam predikat Tinggi. Beberapa permasalahan yang dihadapi di tahun 2022 digambarkan secara singkat sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemanfaatan Perpustakaan Digital oleh masyarakat
   Kemajuan teknologi merubah seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga adanya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perpustakaan yang cepat dan mudah diakses. Perpustakaan digital adalah pilihan bagi masyarakat yang memiliki waktu luang yang terbatas tapi tetap ingin mendapatkan informasi. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan telah menyediakan beragam koleksi bahan bacaan melalui aplikasi perpustakan digital iBalikpapan. Dengan perpustakaan digital iBalikpapan, masyarakat masih dapat menikmati berbagai ragam bacaan sebagai rekreasi pikiran tanpa harus keluar dari rumah. Hasil evaluasi dan monitoring tahun 2022 bahwa pengguna perpustakaan digital iBalikpapan sudah mencapai 1.003 pengguna dari total target 1.000 pengguna di tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan perpustakaan digital iBalikpapan sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di kota Balikpapan maka angka tersebut masih dianggap rendah. Saat ini usaha untuk mendongkrak popularitas iBalikpapan di masyarakat yang sedang dilakukan dengan penyampaian informasi melalui media sosial, publikasi ke sekolah-sekolah serta mensosialisasikan kepada masyarakat umum sehingga masyarakat luas mengetahui keberadaan perpustakaan digital iBalikpapan.
2. Rendahnya cakupan perpustakaan yang berstandar nasional
   Standar Nasional Perpustakan (SNP) dimaksudkan untuk menyediaan acuan tentang persyaratan atau ketentuan minimal dalam penyelenggaraan perpustakaan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memenuhi standar ini diharapkan perpustakaan dapat memberikan layanan yang baik dan

berkualitas kepada para pemustaka, serta menjadi pusat kegiatan masyarakat. Di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan baru terdapat 12 perpustakaan yang memiliki predikat berstandar nasional atau terakreditasi, atau sekitar 4% dari jumlah keseluruhan perpustakaan binaan.

3. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan atau inkluisi sosial

   Perpustakaan umum sebagai ruang belajar sepanjang hayat memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat. Untuk itu, perpustakan dituntut mampu melakukan transformasi dengan menjadikan perpustakaan sebagai ruang pelibatan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan belum optimal melibatkan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan. Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan inkluisi sosial ini adalah belum terbangunnya kemitraan dengan pemustaka untuk berpartisipasi.

4. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan kelurahan.

   Perpustakaan kelurahan bisa dipandang sebagai basis pemasyarakatan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat, karena kebutuhan rill masyarakat akan informasi atau buku bisa langsung dipenuhi oleh Perpustakaan kelurahan tanpa harus pergi ke perpustakaan umum di pusat kota. Semakin banyak berdiri perpustakaan kelurahan, maka akan semakin besar kemungkinan masyarakat yang akan dilayani, yang artinya akan semakin meratas pula layanan perpustakaan. Kondisi perpustakaan kelurahan di wilayah Kota Balikpapan dinilai belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah tidak tersedianya tenaga yang khusus mengelola perpustakaan di kelurahan. Faktor lain adalah belum tersedianya ruangan khusus sebagai ruang perpustakaan yang representatif dan dapat diakses oleh masyarakat di masing-masing kelurahan. Kondisi perpustakaan yang ada saat ini hanya berupa pojok-pojok baca yang tersedia di beberapa kelurahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan arsip dinilai belum optimal, padahal pengelolaan arsip yang benar merupakan hal yang sangat krusial dalam tata kelola kearsipan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan

   Di masing-masing Perangkat Daerah, idealnya terdapat 1 orang SDM kearsipan atau Arsiparis. Hingga hari ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan baru memiliki 5 (orang) Arsiparis aktif pada jenjang terampil pelaksana dan mahir, dan belum memiliki Arsiparis untuk jenjang ahli. Sementara itu terdapat 36 (tiga puluh enam) jumlah Organisasi Perangkat Daerah, 34 Kelurahan, 27 Puskesmas, dan belum lagi jumlah BUMD, Ormas/Orpol/perseorangan, dan instansi vertikal yang juga harus dilayani dan dibina. Arsiparis sebagai ujung tombak dari sumber daya manusia kearsipan yang memang secara teknis melakukan kegiatan pengelolaan kearsipan baik statis manupun dinamis sekaligus melaksanaakan pembinaan. Keterbatasan jumlahsumber daya manusia kearsipan (arsiparis) ini mempengaruhi capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam penyelenggaraan kearsipan, dan menjadi salah satu isu penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait untuk menjadi bahan pertimbangan pengadaan tenaga teknis yang cakap dan handal pada level pelaksana, dan di dukung oleh pejabat struktural pada level manajerial sebagai fungsi koordinasi sesuai tingkat kebutuhan yang bersinergi, sehingga komponen dasar penyelengaraan kearsipan yang selama beberapa tahun ini menjadi kendala dapat segera diatasi.

2. Kurangnya Diklat Fungsional Arsiparis yang diikuti oleh arsiparis

   Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan

   pelestarian terhadap arsipnya. Berkaitan dengan hal tersebut arsip perlu

   dikelola dengan baik dalam sebuah kerangka sistem yang benar. Pengelolaan arsip yang baik oleh arsiparis idealnya menjadi bagian yang penting dalam menunjang tercapainya proses pengarsipan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam penyampaian informasi yang ada di lembaga atau instansi. Hal ini membutuhkan arsiparis yang berkualifikasi dan berkompetensi sesuai dalam bidangnya. Kondisi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sendiri menunjukkan masih kurangnya Diklat fungsional arsiparis yang diikuti oleh arsiparis. Tercatat Diklat terakhir yang diikuti adalah di tahun 2016, lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu. Dengan kurangnya keikutseraan arsiparis dalam Diklat fungsional ini

tentunya akan berpengaruh pada kurang optimalnya pengelolaan arsip di Pemerintah Kota Balikpapan. Diharapkan kondisi ini bisa menjadi perhatian oleh instansi terkait dan dapat ditindaklanjuti dengan membuka kesempatan bagi arsiparis agar dapat mengikuti Diklat fungsional kearsipan yang diselenggarakan dengan rutin oleh Arsip Nasional Republik Indonesia setiap tahunnya.

3. Sebagian besar Perangkat Daerah belum memiliki sarana penyimpanan arsip yang sesuai standar

   Seiring dengan berjalannya pekerjaan setiap Perangkat Daerah, maka arsip yang tercipta semakin bertambah setiap saat. Apabila arsip tidak dikelola dengan baik, maka niscaya keberdaan arsip yang tidak teratur malah akan menjadi bumerang bagi pencipta arsip sendiri. Arsip sebagai sumber informasi yang otentik dan terpercaya apabila tidak disimpan menurut kaidah yang benar akan menyulitkan Perangkat Daerah ketika memerlukan arsip sebagai rujukan. Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan bukti hukum akan menjadi masalah ketika tidak dikelola dalam suatu manajemen yang baik. Dalam beberapa kali pertemuan dengan Perangkat Daerah, salah satu tema yang ditanyakan adalah kemungkinan Perangkat Daerah menitipkan arsipnya di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Hal ini sebenarnya memang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 25(a) yang menyebutkan bahwa arsip daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pada pasal tersebut setidaknya ada 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi agar arsip dari Perangkat Daerah bisa diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, yaitu arsip sudah berstatus arsip inaktif (frekuensi pengguannya telah menurun) dan memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka Perangkat Daerah wajib memastikan penyimpanan arsipnya masing-masing namun sayangnya tempat penyimpanan yang tersedia belum memenuhi standar. Diharapkan kondisi ini bisa menjadi perhatian oleh instansi terkait dan dapat ditindaklanjuti dengan mulai membuat prioritas penyediaan sarana penyimpanan arsip yang sesuai standar.

4. Belum tersedianya *Record Center* sebagai ruang penyimpanan arsip inaktif di masing-masing Perangkat Daerah

   Dalam penjelasan pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa penyimpanan arsip inaktif dilakukan pada sentral arsip inaktif atau *record center* sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif pada bangunan yang dirancang untuk penyimpanan arsip. Pusat Arsip atau *record center* merupakan tempat dan semua fasilitas yang didesain khusus untuk menyimpan arsip inaktif. Keberadaan pusat arsip harus melalui perencanaan, artinya pusat arsip tidak begitu saja terjadi karena suatu ruangan penuh dengan tumpukan arsip, lantas disebut pusat arsip. Pusat arsip diciptakan karena kebutuhan organisasi, sehingga ia perlu didesain secara khusus untuk memenuhi kriteria tertentu dan dapat mendukung pencapaian tujuan pengelolaan arsip (ANRI, 2009). Kondisi yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa sampai saat dokumen ini dibuat, belum ada Perangkat Daerah selain Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yang memiliki *record center*. Demi tercapainya tertib arsip di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan perlu pertimbangan dari instansi terkait agar mulai membangun *record center* di masing-masing Perangkat Daerah. Dan supaya pengelolaan *record center* menjadi optimal, maka *record center* harus dirancang sesuai dengan persyaratan yang diatur pada Perka ANRI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Dikaitkan dengan sasaran pada RPJMD 2021-2026 Kota Balikpapan serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip, maka tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip berkaitan erat dengan sasaran ke-2 yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Arsip

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Bpn	PRESENTASE LAYANAN PERPUSTAKAAN YANG MEMENUHI STANDAR NASIONAL	6 %	1.190.156.600	Bpn	PRESENTASE LAYANAN PERPUSTAKAAN YANG MEMENUHI STANDAR NASIONAL	6 %	1.019.156.600	
1	KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	Bpn	PRESENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN DI PERPUSTAKAAN DAERAH	14,00%	919.827.600	Bpn	PRESENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN DI PERPUSTAKAAN DAERAH	14,00%	919.827.600	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.1	Sub Kegiatan PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK	Bpn	JUMLAH LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK YANG DIKEMBANGKAN DENGAN MANAJEMEN LAYANAN TIK BERBASIS ISO20000 (ITSM) INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT)	1 LAYANAN	20.000.000	Bpn	JUMLAH LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK YANG DIKEMBANGKAN DENGAN MANAJEMEN LAYANAN TIK BERBASIS ISO20000 (ITSM) INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT)	1 LAYANAN	20.000.000	
	SUB KEG PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA	BPN	JUMLAH PERPUSTAKAAN PADA	40 PERPUSTA	152.990.000	BPN	JUMLAH PERPUSTAKAAN PADA	5 PERPUS	152.990.000	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KAB/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN		SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN YANG DILAKUKAN PEMBINAAN DALAM MEWUJUDKAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	KAAN			SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN YANG DILAKUKAN PEMBINAAN DALAM MEWUJUDKAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	TAKAAN		
	SUB KEG PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT	BPN	JUMLAH LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN YANG DIKEMBANGKAN TINGKAT KAB/KOTA	2 LAYANAN	423.998.100	BPN	JUMLAH LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN YANG DIKEMBANGKAN TINGKAT KAB/KOTA	2 LAYANAN	423.998.100	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KAB/KOTA		MELALUI PENINGKATAN KOLEKSI				MELALUI PENINGKATAN KOLEKSI			
	SUB KEG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	BPN	JUMLAH BAHAN PERPUSTAKAAN YANG DILAKUKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KEBERAGAMAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN	107.185 EKSEMPLAR	225.000.000	BPN	JUMLAH BAHAN PERPUSTAKAAN YANG DILAKUKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KEBERAGAMAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN	1500 EKSEMPLAR	225.000.000	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	SUB KEG PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	BPN	JUMLAH DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN, TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	4 DOKUMEN	97.839.500	BPN	JUMLAH DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN, TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	4 DOKUMEN	97.839.500	
2	**KEGIATAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KAB/KOTA**	**Bpn**	**PRESENTASE PEMANFAATAN KOLEKSI DI PERPUSTAKAAN DAERAH**	**13,00%**	**174.329.000**	**Bpn**	**PRESENTASE PEMANFAATAN KOLEKSI DI PERPUSTAKAAN DAERAH**	**13,00%**	**174.329.000**	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1	Sub Kegiatan SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT	Bpn	JUMLAH LOKUS PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN	5 LOKUS	127.324.000	Bpn	JUMLAH LOKUS PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN	5 LOKUS	127.324.000	
2.2	Sub Kegiatan PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS	Bpn	JUMLAH PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI WILAYAH	1 PERPUSTAKAAN	143.005.000	Bpn	JUMLAH PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI WILAYAH	1 PERPUSTAKAAN	143.005.000	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	INKLUSI SOSIAL		KAB/KOTA YANG DIKEMBANGKAN				KAB/KOTA YANG DIKEMBANGKAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				**488.000.000**				**488.000.000**	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**BPN**	**PRESENTASE ARSIP YANG DIKELOLA**	**80,00%**	**414.000.000**	**BPN**	**PRESENTASE ARSIP YANG DIKELOLA**	**80,00%**	**414.000.000**	
	KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS KAB/KOTA	**BPN**	**PRESENTASE PENCIPTA ARSIP YANG MENGELOLA ARSIP**	**70,00%**	**284.000.000**	**BPN**	**PRESENTASE PENCIPTA ARSIP YANG MENGELOLA**	**70,00%**	**284.000.000**	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			DINAMIS				**ARSIP DINAMIS**			
	Sub Kegiatan PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS	BPN	JUMLAH NASKAH DINAS YANG DILAKUKAN PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN	100 BERKAS	40.000.000	BPN	JUMLAH NASKAH DINAS YANG DILAKUKAN PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN	100 BERKAS	40.000.000	
	Sub Kegiatan PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KAB/KOTA	BPN	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KAB/KOTA	36 LAPORAN	244.000.000	BPN	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KAB/KOTA	1 LAPORAN	244.000.000	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KEGIATAN ARSIP STATIS DAERAH KAB/KOTA	**BPN**	**PRESENTASE ARSIP STATIS YANG DIKELOLA**	**85,00%**	**100.000.000**	**BPN**	**PRESENTASE ARSIP STATIS YANG DIKELOLA**	**85,00%**	**100.000.000**	
	Sub Kegiatan AKUSISI PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS	BPN	JUMLAH ARSIP STATIS YANG DILAKUKAN AKUSISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI DAN AKSES ARSIP STATIS	650 ARSIP	100.000.000	BPN	JUMLAH ARSIP STATIS YANG DILAKUKAN AKUSISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI DAN AKSES ARSIP STATIS	500 ARSIP	100.000.000	
	KEGIATAN PENGELOLAAN	**BPN**	**PRESENTASE JUMLAH ARSIP YANG**	**100,00%**	**30.000.000**	**BPN**	**PRESENTASE JUMLAH ARSIP YANG**	**100,00 %**	**30.000.000**	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KAB/KOTA		**DIMASUKAN DALAM SIKN/JIKN**				**DIMASUKAN DALAM SIKN/JIKN**			
	Sub Kegiatan PENYEDIAAN INFORMASI AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA MELALUI JIKN	BPN	JUMLAH LAYANAN PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA MELALUI JIKN	50 PENGGUNA	10.000.000	BPN	JUMLAH LAYANAN PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA MELALUI JIKN	50 PENGGUNA	10.000.000	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KAB/KOTA	BPN	JUMLAH LAPORAN HASIL PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KAB/KOTA	1 LAPORAN	20.000.000	BPN	JUMLAH LAPORAN HASIL PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KAB/KOTA	1 LAPORAN	20.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Bpn**	**PRESENTASE ARSIP YANG DILINDUNGI DAN TERSELAMATKAN**	**75,00%**	**62.000.000**	**Bpn**	**PRESENTASE ARSIP YANG DILINDUNGI DAN TERSELAMATKAN**	**75,00%**	**62.000.000**	
	Kegiatan PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN	**Bpn**	**PRESENTASE PENCIPTA ARSIP YANG MELAKUKAN**	**11,00%**	**15.000.000**	**Bpn**	**PRESENTASE PENCIPTA ARSIP YANG MELAKUKAN**	**11,00%**	**15.000.000**	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAG 10 (SEPULUH) TAHUN		**PEMUSNAHAN ARSIP**				**PEMUSNAHAN ARSIP**			
	Sub Kegiatan PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	BPN	JUMLAH ARSIP YANG DILAKUKAN PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	100 ARSIP	**15.000.000**	BPN	JUMLAH ARSIP YANG DILAKUKAN PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10	100 ARSIP	**15.000.000**	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							(SEPULUH) TAHUN			
	Kegiatan PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSEKALA KAB/KOTA	**Bpn**	**PRESENTASE PENCIPTA ARSIP YANG MENDAPATKAN PENYULUHAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA**	**40,00%**	**10.000.000**	**Bpn**	**PRESENTASE PENCIPTA ARSIP YANG MENDAPATKAN PENYULUHAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA**	**40,00%**	**10.000.000**	
	SUB KEG EVAKUASI DAN IDENTIFIKASI ARSIP AKIBAT BENCANA	BPN	JUMLAH ARSIP YANG DILAKUKAN EVAKUASI DAN IDENTIFIKASI ARSIP AKIBAT	50 ARSIP	10.000.000	BPN	JUMLAH DAFTAR AUTENSITAS ARSIP SESUAI PERSYARATAN PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP	50 ARSIP	10.000.000	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			BENCANA				YANG DINILAI DAN DITETAPKAN			
	Kegiatan AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAM ARSIP HASIL ALIH MEDIA KAB/KOTA	**Bpn**	**PRESENTASE ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA YANG TELAH DIAUTENTIKASI**	**45,00%**	**20.000.000**	**Bpn**	**PRESENTASE ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA YANG TELAH DIAUTENTIKASI**	**45,00%**	**20.000.000**	
	SUB KEG PENILAIAN DAN PENETAPAN AUTENSITAS ARSIP SESUAI PERSYARATAN PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP	**Bpn**	JUMLAH DAFTAR AUTENSITAS ARSIP SESUAI PERSYARATAN PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP YANG DINILAI DAN DITETAPKAN	650 ARSIP	20.000.000	**Bpn**	JUMLAH DAFTAR AUTENSITAS ARSIP SESUAI PERSYARATAN PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP YANG DINILAI DAN DITETAPKAN	15 ARSIP	20.000.000	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KEGIATAN PENCARIAN ARSIP STATIS KAB/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG	**Bpn**	**PRESENTASE ARSIP STATIS YANG DINYATAKAN HILANG**	**15,00%**	**17.000.000**	**Bpn**	**PRESENTASE ARSIP STATIS YANG DINYATAKAN HILANG**	**15,00%**	**17.000.000**	
	SUB KEG PENETAPAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR PENCARIAN ARSIP (DPA)	**Bpn**	JUMLAH DAFTAR PENCARIAN ARSIP (DPA) YANG DILAKUKAN PENETAPAN DAN PENGUMUMAN	5 ARSIP	17.000.000	**Bpn**	JUMLAH DAFTAR PENCARIAN ARSIP (DPA) YANG DILAKUKAN PENETAPAN DAN PENGUMUMAN	5 ARSIP	17.000.000	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	**Bpn**	**PRESENTASE PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**100,00 %**	**12.000.000**	**Bpn**	**PRESENTASE PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**100,00 %**	**12.000.000**	
	KEGIATAN PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DI KAB/KOTA	**Bpn**	**PRESENTASE PENERBITAN IZIN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP**	**30,00 %**	**12.000.000**	**Bpn**	**PRESENTASE PENERBITAN IZIN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP**	**30,00 %**	**12.000.000**	
	Sub Kegiatan PENYEDIAAN DAFTAR DAN PENETAPAN IZIN	Bpn	JUMLAH DAFTAR ARSIP HASIL PENYEDIAAN DAFTAR DAN	30 Arsip Arsip	12.000.000	Bpn	JUMLAH DAFTAR ARSIP HASIL PENYEDIAAN DAFTAR	30 Arsip	12.000.000	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP		PENETAPAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP				DAN PENETAPAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP			
					4.005.039.100				**4.005.039.100**	
					4.005.039.100				**4.005.039.100**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	**BPN**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**80,00**	**9.483.760.400**	**Bpn**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**80,00**	**9.483.760.400**	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	**Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Bpn**	**IKM LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**85,00 NILAI**	**5.144.000.000**	**Bpn**	**IKM LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**85,00%**	**5.144.000.000**	
4.1	Sub Kegiatan PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Bpn	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	27 ORANG/BULAN	5.144.000.000	Bpn	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	27 ORANG /BULAN	5.144.000.000	
	KEGIATAN ADMINISTRASI	**BPN**	**IKM LAYANAN ADMINISTRASI**	**82,00 NILAI**	**35.800.000**	**BPN**	**IKM LAYANAN ADMINISTRASI**	**82,00 NILAI**	**35.800.000**	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		**KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**				**KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**			
4.2	Sub Kegiatan PENGADAAN PAKAIAN DINAS BERSERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Bpn	JUMLAH PAKET PAKAIAN DINAD BERSERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	29 PAKET	35.800.000	Bpn	JUMLAH PAKET PAKAIAN DINAD BERSERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	29 PAKET	35.800.000	
	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**BPN**	**IKM HASIL LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**78,00 NILAI**	**651.678.648**	**BPN**	**IKM HASIL LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**78,00 NILAI**	**651.678.648**	
	SUB KEG PENYEDIAAN	BPN	JUMLAH PAKET	1 PAKET	48.921.300	BPN	JUMLAH PAKET	1	48.921.300	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN KANTOR YANG DISEDIAKAN				KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	PAKET		
	SUB KEG PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	BPN	JUMLAH PALET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	3 PAKET	50.000.000	BPN	JUMLAH PALET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	3 PAKET	50.000.000	
	Sub Kegiatan PENYEDIAAN BAHAN	BPN	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR	7 PAKET	241.660.848	Bpn	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR	7 PAKET	241.660.848	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	LOGISTIK KANTOR		YANG DISEDIAKAN				YANG DISEDIAKAN			
	SUB KEG PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGADAAN	BPN	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGADAA YANG DISEDIAKAN	2 PAKET	51.350.000	Bpn	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGADAA YANG DISEDIAKAN	2 PAKET	51.350.000	
	SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-	BPN	JUMLAH DOKUMEN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-	3033 DOKUMEN	21.736.500	BPN	JUMLAH DOKUMEN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-	3033 DOKUMEN	21.736.500	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	UNDANGAN		UNDANGAN YANG DISEDIAKAN				UNDANGAN YANG DISEDIAKAN			
	SUB KEG FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	BPN	JUMLAH LAPORAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	1 LAPORAN	38.010.000	BPN	JUMLAH LAPORAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	1 LAPORAN	38.010.000	
	SUB KEG PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	BPN	JUMLAH LAPORAN PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	12 LAPORAN	200.000.000	BPN	JUMLAH LAPORAN PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	12 LAPORAN	200.000.000	
	Kegiatan PENGADAAN	**Bpn**	**IKM LAYANAN**	**79,00 NILAI**	**136.890.000**	**Bpn**	**IKM LAYANAN**	**79,00**	**136.890.000**	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**NILAI**		
	Sub Kegiatan PENGADAAN MEBEL	Bpn	JUMLAH PAKET MEBEL YANG DISEDIAKAN	27 UNIT	56.890.000	Bpn	JUMLAH PAKET MEBEL YANG DISEDIAKAN	27 UNIT	56.890.000	
	SUB KEG PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	BPN	JUMLAH UNIT SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	1 UNIT	80.000.000	BPN	JUMLAH UNIT SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG	1 UNIT	80.000.000	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							DISEDIAKAN			
	Kegiatan PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Bpn**	**IKM LAYANAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**81,00 NILAI**	**2.696.906.400**	**Bpn**	**IKM LAYANAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**81,00 NILAI**	**2.696.906.400**	
	Sub Kegiatan PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Bpn	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	12 LAPORAN	701.100.000	Bpn	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	12 LAPORAN	701.100.000	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	BPN	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN	12 LAPORAN	1.995.806.400	BPN	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN	12 LAPORAN	1.995.806.400	
	Kegiatan PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Bpn**	**IKM LAYANAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**78,00 NILAI**	**818.485.352**	**Bpn**	**IKM LAYANAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**78,00 NILAI**	**818.485.352**	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Bpn	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA	9 UNIT	202.357.352	Bpn	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA	9 UNIT	202.357.352	
	SUB KEG PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	BPN	JUMLAH KENDARAAN OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN	5 UNIT	246.128.000	BPN	JUMLAH KENDARAAN OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN	5 UNIT	246.128.000	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	OPERASIONAL ATAU LAPANGAN		PAJAKNYA DAN PERIZINANYA				PAJAKNYA DAN PERIZINANYA			
	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	BPN	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA	98 UNIT	270.000.000	BPN	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA	98 UNIT	270.000.000	
	PEMELIHARAAN/REHABILITAS GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	BPN	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI	1 UNIT	100.000.000	BPN	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI	1 UNIT	100.000.000	

No.	Rancangan Awal Pagu Indikatif					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
TOTAL					10.990.917.000				10.990.917.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kebijakan baik oleh kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, Perguruan Tinggi dan dari Perangkat Daerah lain di Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota tidak memuat catatan perubahan untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

Tabel 2.4

T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kota Balikpapan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional, maka yang berkaitan dengan pembangunan perpustakaan, literasi dan pembudayaan kegemaran membaca adalah agenda ke-4 (empat), yaitu "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" dengan sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerjasama antar warga, mencakup: pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa.
2. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter, melalui:

a. Peningkatan budaya literasi, mencakup: (i) pengembangan budaya gemar membaca; (ii) pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi; (ii) peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial;

b. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi, mencakup: (i) pengembangan mitra perpustakaan (*library supporter*); (ii) pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi.

Arah kebijakan nasional bidang kearsipan berdasarkan agenda pembangungan nasional tahun 2020-2024 mengacu pada agenda ke-4 (empat), yaitu "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" dan agenda ke-7 (tujuh), yaitu "Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik."

Pada agenda "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan", sasaran nasional yang terkait dengan kearsipan adalah "Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia".

Sedangkan arah kebijakannya adalah “Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerja sama antar warga” melalui strategi:

1. “Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip” dengan output prioritas nasional:
   a. jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa; dan
   b. jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.
2. “Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa” dengan output prioritas nasional: Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi.

Pada agenda “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, sasaran nasional yang terkait dengan kearsipan adalah “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola” dengan arah kebijakan:

1. “Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis” melalui strategi “Penerapan SPBE Terintegrasi” dengan output prioritas nasional: Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi;
2. “Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja” melalui strategi “Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi” dengan output prioritas nasional: Jumlah K/L dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas dan Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2024

Tujuan	Meningkatnya kualitas literasi masyarakat
Indikator Tujuan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Target Tujuan 2024	20.82

Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan	Meningkatnya layanan kearsipan sesuai standar	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Indikator Sasaran	Persentase peningkatan layanan perpustakaan	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Target Sasaran 2024	10 %	90.30	30,50

3.3. Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dalam Renja 2024 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan, tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) sub kegaiatan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

   Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

   a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      i. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
      ii. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
      iii. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
      iv. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
      v. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

i. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Khusus serta Masyarakat

ii. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

2. Program Pengelolaan Arsip

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

i. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

ii. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

i. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

i. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

ii. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

i. Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

b. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota

i. Sub Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana

c. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

i. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

d. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

i. Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

4. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota

i. Sub Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini terdatap 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

ii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

iii. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

iv. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

v. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

vi. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

vii. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

iv. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

i. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

i. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

ii. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 3.2

T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.161.735.857,00				12.278.108.699,00	
	2 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				10.673.735.857,00				11.741.308.699,00	
	2 3 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal		80,00	9.483.584.800,00				10.432.136.439,00	

No.	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
							DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Perangkat Daerah**								
	2	**23**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**85,00 Nilai**	**5.144.000.000,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**5.658.400.000,00**	
	2	23	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		27 Orang/bulan	5.144.000.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			5.658.400.000,00	
	2	**23**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**82,00 Nilai**	**35.787.500,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**39.380.000,00**	
	2	23	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut		29 Paket	35.787.500,00	PENDAPATA ASLI DAERAH			39.380.000,00	

No.	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Kelengkapan				(PAD)				
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**78,00 Nilai**	**651.858.900,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**716.846.512,00**	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	48.915.200,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			53.813.430,00	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	49.956.600,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			55.000.000,00	

No.	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket	241.660.500,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			265.826.932,0	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	51.350.200,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			56.485.000,00	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3033 Dokumen	22.000.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			23.910.150,00	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	37.976.400,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			41.811.000,00	

No.	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	200.000.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			220.000.000,00	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**79,00 Nilai**	**136.590.700,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**50.579.000,00**	
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		27 Unit	56.591.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			62.579.000,00	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung		1 Unit	79.999.700,00	PENDAPATA ASLI DAERAH			88.000.000,00	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				(PAD)				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**81,00 Nilai**	**2.696.881.200,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**2.966.597.040,00**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	701.155.200,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			771.210.000,00	

No.	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka		12 Laporan	1.995.726.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			2.195.387.040,00	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**78,00 Nilai**	**818.466.500,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**900.333.887,00**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		9 Unit	204.404.600,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			222.593.087,00	

No.	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	246.006.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			270.740.800,00	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		98 Unit	268.057.900,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			297.000.000,00	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita		1 Unit	99.998.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			110.000.000,00	

No.	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
							si								
						PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional**		**6 %**	**1.190.151.057,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**1.309.172.260,00**	
						Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah**		**14,00 %**	**919.826.857,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**1.011.810.360,00**	
						Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik		1 Layanan	20.000.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH			22.000.000,00	

No.	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
							yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				(PAD)				
						Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		5 Perpustakaan	152.990.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			168.289.000,00	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi		2 Layanan	423.997.900,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			466.397.910,00	
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		1500 Eksemplar	224.999.757,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			247.500.000,00	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4 Dokumen	97.839.200,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			107.623.450,0	
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah**		**13,00 %**	**270.324.200,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**297.361.900,00**	
		Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan		5 Lokus	127.324.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			140.056.400,00	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pendidikan								
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		1 Perpustakaan	143.000.200,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			157.305.500,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				**488.000.000,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**536.800.000,00**	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase Arsip yang dikelola**		**80,00 %**	**414.000.000,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**455.400.000,00**	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis**		**70,00 %**	**284.000.000,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**312.400.000,00**	
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		100 Berkas	40.000.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			44.000.000,00	
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Laporan	244.000.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			268.400.000,00	
		Pengelolaan Arsip Statis	**Presentase arsip statis yang**		**85,00 %**	**100.000.000,00**	**PENDAPATA ASLI**			**110.000.000,00**	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Daerah Kabupaten/Kota	**dikelola**				**DAERAH (PAD)**				
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		500 Arsip	100.000.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			110.000.000,00	
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN**		**100,00 %**	**30.000.000,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**33.000.000,00**	
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi,		50 Pengguna	10.000.000,00	PENDAPATA ASLI			11.000.000,00	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				DAERAH (PAD)				
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			22.000.000,00	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan**		**75,00 %**	**62.000.000,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**68.200.000,00**	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	**Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip**		**11,00 %**	**15.000.000,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**16.500.000,00**	
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		100 Arsip	15.000.000,0	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			16.500.000,00	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	**Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana**		**40,00 %**	**10.000.000,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**11.000.000,00**	
		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		50 Arsip	10.000.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			11.000.000,00	
		Autentikasi Arsip Statis dan	**Persentase arsip statis dan**		**45,00 %**	**20.000.000,00**	**PENDAPATA ASLI**			**22.000.000,00**	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	**arsip hasil alih media yang telah diautentikasi**				**DAERAH (PAD)**				
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan		15 Arsip	20.000.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			22.000.000,00	
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	**Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang**		**15,00 %**	**17.000.000,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**18.700.000,00**	
		Penetapan dan Pengumuman Daftar	Jumlah Daftar Pencarian		5 Arsip	17.000.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH			18.700.000,00	

No.	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pencarian Arsip (DPA)	Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				(PAD)				
						PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	**Persentase Perizinan Penggunaan Arsip**		**100,00 %**	**12.000.000,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**13.200.000,00**	
						Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	**Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup**		**30,00 %**	**12.000.000,00**	**PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)**			**13.200.000,00**	
						Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan		30 Arsip	12.000.000,00	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)			13.200.000,00	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup								
	TOTAL					**11.161.735.857,00**				**12.278.108.699,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.144.000.000	PAD
		2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.787.500,00	PAD
		3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.915.200	PAD
			4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.956.600,00	PAD
			5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241.660.500	PAD
			6. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan	51.350.200	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Penggandaan		
			7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.000.000	PAD
			8. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.976.400	PAD
			9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	PAD
		4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	56.591.000	
			11. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.999.700	
		5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	701.155.200	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Daerah			
			13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.995.726.000	PAD
		6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	204.404.600	PAD
			15. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.006.000	PAD
			16. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	268.057.900,	PAD
			17. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.998.000	PAD
2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKA	7. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan	18. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan	20.000.000	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AN	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Perpustakaan Elektronik		
			19. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	152.990.000	PAD
			20. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	423.997.900	PAD
			21. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	224.999.757	PAD
			22. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97.839.200	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	127.324.000	PAD
			24. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	143.000.200	PAD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	9. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	25. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	40.000.000	PAD
			26. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	244.000.000	PAD
		10. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	27. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	100.000.000	PAD
		11. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	28. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	10.000.000	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			29. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	PAD
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	12. Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	30. Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	15.000.000	PAD
		13. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	31. Sub Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	10.000.000	PAD
		14. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	32. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	20.000.000	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		15. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	33. Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	17.000.000	PAD
5.	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	16. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	34. Sub Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12.000.000	PAD

BAB V

PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Selain itu Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan

sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

4. Rencana Kerja (RENJA) OPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya di antaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Dinas).
5. RENJA Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB).
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui Pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
5. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Balikpapan, September 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kota Balikpapan,

ELVIN JUNAIDI
Pembina Utama Muda

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024

DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pangan Pertanian, dan Perikanan Tahun 2023 sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan ini merupakan hasil kompilasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan dan forum Perangkat Daerah serta disinergikan dengan target kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk tahun anggaran yang berkenaan dan disesuaikan nomenklaturnya dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 90. Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Dengan tersusunnya Renja ini, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai pedoman oleh semua pihak yang terkait dengan pembangunan pertanian dan perikanan dalam rangka mewujudkan kemandirian di bidang pangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja ini.

Kepala Dinas Pangan,Pertanian dan Perikanan
Kota Balikpapan

Ir. Sri Wahjuningsih, M.AP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		.....	i
DAFTAR ISI		.....	ii
DAFTAR TABEL		.....	iii
DAFTAR GAMBAR		.....	iv
BAB I.	**PENDAHULUAN**	.....	1
	1.1 Latar Belakang	.....	1
	1.2 Landasan Hukum	.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	.....	3
BAB II.	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**	.....	4
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD	.....	
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPPP Kota Balikpapan	.....	
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPP	.....	
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	.....	
BAB III.	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	.....	
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	.....	
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	.....	
	3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024	.....	
BAB IV.	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	.....	
BAB V.	**INOVASI PERANGKAT DAERAH**	.....	
BAB VI .	**PENUTUP**	.....	

DAFTAR TABEL

Tabel T-C 29	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota	.....	1
Tabel 1	Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan	.....	2
Tabel T-C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	.....	3
Tabel 2	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	.....	4
Tabel 3	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	.....	5
Tabel 4	Posisi DPPP Dalam RPJMD 2021-2026	.....	6
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Renja OPD	.....	7
Tabel 3.3.1	RENCANA KERJA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024	.....	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota	.....	1
Gambar 2	Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan	.....	2
Gambar 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	.....	3
Gambar 2	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	.....	4
Gambar 2	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	.....	5
Gambar 2	Posisi DPPP Dalam RPJMD 2021-2026	.....	6
Gambar 2	Tujuan dan Sasaran Renja OPD	.....	7
Gambar 2	Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024	.....	8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan,pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, prosespenyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan,tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPDmerupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumenRenja OPD yang definitif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2023 didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) DPPP tahun 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.

Sedangkan penyusunan nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatannya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU RINomor 23 Tahun 2014.
4. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
5. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
6. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
7. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

9. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
10. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
11. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 01/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trwals) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.
25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan tahun 2005-2025.
26. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
27. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan.
28. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
29. Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2 Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan tahun 2023;
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II . HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DPPP) berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan. DPPP Kota Balikpapan pada tahun 2022 melaksanakan 3 urusan, 9 program, dan 18 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Administrasi Keuangan

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;

a. Sub Kegiatan Pemberdayaaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal

2. Kegiatan Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

III. Program Pengawasan Keamanan Pangan

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

IV. Program Penyuluhan Pertanian

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

a. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

c. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatn dan Desa

V. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

a. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan.

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

a. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

VI. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha

2. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

a. Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

VII. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

a. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas,Teknologi dan Spesifik Lokasi.

b. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

2. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil

VIII. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian

1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

a. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

IX . Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota

a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

2. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

3. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Pagu Anggaran DPPP Kota Balikpapan Tahun 2022 (murni) sebesar **Rp 21.846.913.100,-. (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Rupiah).**

Berdasarkan dokumen APBD-P Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022 tanggal 3 Okt 2022 dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomer 23 Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022, Pagu Anggaran Perubahan DPPP Kota Balikpapan menjadi sebesar **Rp. 24.371.817.100**,- (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah). Perubahan dilakukan pada dana kegiatan – kegiatan yang dianggap prioritas untuk dilakukan penambahan.

Program dan Kegiatan DPPP Kota Balikpapan yang mengalami perubahan setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari Rp 13.530.994.000 menjadi Rp. 13.597.296.000
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari Rp 100.000.000 memjadi Rp 142.575.000
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari pagu Rp 250.000.000 menjadi Rp 300.000.000
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari pagu semula Rp 1.400.000.000 menjadi Rp.1.410.424.000.000
5. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari pagu Rp 475.000.000 menjadi 870.005.000
6. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha merupakan sub kegiatan Bantuan pendanaan penanggulangan inflasi daerah karena kenaikan BBM sebesar Rp 750.300.000
7. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dari pagu semula Rp 250.000.000 menjadi Rp 370.000.000

8. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Dari semula Rp 399.993.200 menjadi Rp. 474.993.200
9. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa mendapatkan tambahan pagu dari DAK Non Fisik Kementrian Pertanian yang semula dengan pagu Rp 75.000.000 menjadi Rp 86.000.000.
10. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian mendapatkan tambahan pagu dari DAK Non Fisik Kementrian Pertanian yang semula dengan pagu Rp 313.910.700 menjadi Rp 674.910.700
11. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, ini merupakan sub kegiatan baru berupa DAK Non Fisik dan Kementrian Pertanian sebesar Rp. 128.000.000
12. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan dengan pagu semula Rp. 701.930.850 menjadi Rp 1.223.232.850.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan s/d Tahun 2022, berdasarkan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang
diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja ini merupakan
hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran (output) dan
hasil (outcome).Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

1. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat
   pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut

Secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2022 telah mencapai target yang telah direncanakan dengan level capaian target dalam rentang 80 – 100 % dengan level capaian antara tinggi hingga sangat tinggi. Tahun 2022 Realisasi Pekerjaan Fisik sebesar **99,90 %** dengan Realisasi Keuangan DPPP sebesar **86,39 %** (level capaian dalam kategori Baik) . Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak memenuhi target Keuangan namun tercapai realisasi fisiknya seperti:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik.

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100 % dan penyerapan anggaran hanya sebesar 59,93 %. . Terdapat SILPA postif (Penghematan)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100 % dan penyerapan anggaran hanya sebesar 63,27 %. Terdapat SILPA positif (Penghematan), karena peralatan dan mesin masih sebagian besar masih dalam kondisi baik sehingga tidak memerlukan service/pemeliharaan.
3. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha
   Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 93 % dan penyerapan anggaran hanya sebesar 68,82 %. Terdapat SILPA, karena daro target jumlah nelayan yang mendapat bantuan sebanyak 1120 orang ternyata setelah diverifikasi tersisa 800 orang yang layak mendapat bantuan pendanaan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 2 pada Rencana Kerja ini.

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan
Periode Pelaksanaan : 2022
TRIWULAN IV

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada sasaran RKPD Tahun 2022 :

1. Skor Pola Pangan Harapan (87)
2. Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (9%)
3. Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari) (94,5%)
4. Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari) (100%)
5. Persentase keamanan pangan (88%)
6. Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan (17.500 ton)
7. Total Produksi Sub Sektor Hortikultura (120.500 ton)
8. Total Produksi Sub Sektor Perkebunan (9.886 ton)
9. Total Produksi sub sektor peternakan (20.500 ton)
10. Total Produksi Sub Sektor Perikanan (4.489 ton)
11. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (27)

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Hasil Kegiatan PD Tahun 2022			Ket
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	
1	2	3	4		5	7	12=8+9+10+11	13=12/7 x100%	17
					K	K	K	K	

		URUSAN PEMRINTAHAN BIDANG PANGAN							
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Dinas Pangan,Pertanian dan Perikanan	%	75	70	73	104%	Tercapai
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point /angka	82	81	81,91	101%	tercapai
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen		5	12	240%	Melampaui target
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Dokumen		5	12	240%	Melampaui target
	*lakip 2022	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP	Dokumen		20	21	105%	tercapai
	*Monev TW	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen		4	4	100%	tercapai
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Point	75	71	75	105%	tercapai
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JUmlah PNS/ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya selama setahun (OB)	orang bulan		1.120	949	85%	banyak pegawai yg pensiun

		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi dan prognosis anggaran	Laporan		12	9	75%	blm tercapai
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Point	75	71	72	101%	tercapai
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik	Jenis		-	-	0%	tidak dianggarkan
			Perbaikan/pemeliharaan instalasi listrik	paket		-	-		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatandan perlengkapangedung kantor yangdisediakan	Jenis		17	11	65%	tdk tercapai
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang digunakan untuk kegiatan adminsitrasi	Jenis		40	17	43%	penghematan jenis ATK
			Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta	kotak		4.000	3.991	100%	tercapai
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi dalam 1 tahun	Jenis		20	16	80%	blm tercapai
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	Jenis		3	2	67%	blm tercapai
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi perjalanan dinas	Kali		100	100	100%	tercapai

		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	point	75	71	73	103%	tercapai
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat	jenis		2	-	0%	tidak dianggarkan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayar	meteran		12	12	100%	tercapai
			Jumlah rekening listrik yang dibayar	rekening		20	20	100%	tercapai
			Jumlah rekening telpon yang dibayar	saluran		14	14	100%	tercapai
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis pelayanan umum yang disediakan	jenis		3	3	100%	tercapai
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	point	75	71	71	100%	tercapai
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar biaya KIR dan STNK	unit		99	85	86%	tdk tercapai
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit		99	100	101%	tercapai
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh BBM	unit		99	99	100%	tercapai
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit		9	7	78%	tdk tercapai

		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan	Jenis		3	3	100%	tercapai
2	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	0,143	0,024	0,028	117%	Melampaui target
		Kegiatan Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase CPPD	%	16%	9%	7,5%	83%	belum tercapai
		Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah			17	14,92	88%	belum tercapai
			Jumlah Cadangan pangan pemerintah daerah yang dipelihara			17	-	0%	tidak dianggarkan
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;	Peningkatan konsumsi pangan umbi2an	kkal/perk apita/hari	47	40	43	108%	tercapai
		Sub Kegiatan Pemberdayaaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan alternatif pangan lokal	kali		6	6	100%	tercapai
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	0%	100	100	100%	tidak dianggarkan

		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta	peta	5	1	1	100%	tidak dianggarkan
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersedianya hasil analisa data pangan	Dokumen	-	1	1	100%	tidak dianggarkan
	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	%	90%	88%	110%	125%	Melampaui target
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persentase Jumlah sampel aman (kandungan residunyan dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa	%	90%	88%	110%	125%	Melampaui target
		Sub Kegiatan Sub KegiatanPenyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian sampel pangan			100	102	102%	tercapai
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) daerah Kabupaten/Kota			1	1	100%	provinsi
			Sertifikasi/registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) daerah kabupaten/kota			1	1	100%	tercapai

		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN :							
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Ton	22.000	4.200	4.251	101%	tercapai
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina	kelompok	60	30	12	40%	tdk tercapai , tidak dianggarkan
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data produksi perikanan tangkap	dokumen		1	1	100%	tercapai, walau tidak dianggarkan
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah alat tangkap ikan yang disediakan	unit		20	-	0%	tidak dianggarkan
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan yang diberdayakan	nelayan	66	66	100	152%	Melampaui target
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan			4	-	0%	tidak dianggarkan

		Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah pertemuan kelompok (KUB)			12	12	100%	tercapai
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan yang mendapat fasilitas			1.120	841	75%	tdk tercapai
		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	%	100%	100%	100%	100%	tercapai
		Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang beroperasi	TPI	2	2	2	100%	tercapai
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDKP yang diterbitkan	TDKP		210	-	0%	tidak dianggarkan

		Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Standar Operasional Prosedur	SOP		1	-	0%	tidak dianggarkan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	1.521	296	549	185%	Melampaui target
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang diberdayakan	Pembudidaya	500	100	150	150%	Melampaui target
		Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan			2	2	100%	tercapai
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan	jenis	2	2	2	100%	tercapai
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Data produksi pembudidayaan ikan			1	1	100%	tercapai

		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Sarana Prasarana BBI			4	3	75%	tdk tercapai
			Jumlah benih ikan di BBI yang tersedia			780.000	77.720	10%	tdk tercapai
			Jumlah pembangunan/Rehab BBI			4	3	75%	tdk tercapai
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang dibina dan dipantau			100	190	190%	Melampaui target
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	%	35%	15%	15%	100%	tercapai
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan / penggunaan sarana pertanian	%	100%	100%	100%	100%	tercapai
		Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah jenis sarana pendukung pertanian yang diawasi	Jenis		3	3	100%	tercapai
		Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah jenis sarana pendukung pertanian yang didampingi penggunaanya	Jenis		3	3	100%	tercapai

		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)	Ekor	1.330	225	264	117%	Melampaui target
		Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah hewan yang di IB			225	264	117%	Melampaui target
			Jumlah pelaksanaan sosialisasi Inseminasi Buatan (IB)			8	8		
			Pelaksanaan pembinaan teknis agar tersedianya pakan ternak berkualitas dan beranekaragam			2	4		
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	85%	65%	61%	94%	belum tercapai
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah hewan yang dilayani (ekor	Ekor	16.900	3.250	5.060	156%	melampaui target
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan	Jumlah jenis penyakit yang dikendalikan			10	34	340%	melampaui target

		Penyakit Hewan dan Zoonosis							
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pelayanan yang dikelola	jenis	0	2	2	100%	tercapai
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	0	4	4	100%	tercapai
		Kegiatan Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmavet	UPPH	28	20	18	90%	belum tercapai
		Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah lokasi dilaksanakannya pengawasan peredaran produk asal hewan			250	394	158%	melampaui target
		PROGRAM PENHGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan pengendalian dan penanggulangan pertanian	%	60%	40%	0	72%	belum tercapai
		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Ha	1.650	450	472	105%	melampaui target
		Sub Kegiatan Pengendalian	Luas Pengendalian OPT Perkebunan	Ha		300	347	116%	melampaui target

		Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Luas Pengendalian OPT Pertanian Tanaman Pangan	Ha		50	70	140%	melampaui target
			Luas Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	Ha		100	55	55%	tdk tercapai
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Presentase Rekomendasi yang Diterbitkan	%		50	-	0%	tidak dianggarkan
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian	rekomendasi		200	-	0%	tidak dianggarkan
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah jenis perizinan usaha pertanian yang diawasi	jenis		7	-	0%	tidak dianggarkan
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	rekomendasi		30	-	0%	tidak dianggarkan
		Sub Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	rekomendasi		30	-	0%	tidak dianggarkan

		Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan							
		Kegiatan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pengecer	rekomendasi		25	-	0%	tidak dianggarkan
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	rekomendasi		25	-	0%	tidak dianggarkan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	%	60	40	41,54	104%	melampaui target
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)	Laku	1.000	850	905	106%	melampaui target
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Tersedianya Akta Kelompok Tani yang berbadan hukum	kelompok		6	6	100%	tercapai
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang Terlaksana Operasionalnya	BPP		2	2	100%	tercapai
			Jumlah rencana kerja (programa) penyuluhan	dokumen		13			
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit		2	2	100%	tercapai

		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia	%	90	75	75	100%	tercapai
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dibangun / direhab (unit)	unit	10	2	2	100%	tercapai
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Persentase Bangunan RPH yang direhab	%		20%	25%	125%	Melampaui target
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA								94%	
PREDIKAT KINERJA								Sangat Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN								90%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN								Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN								90%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN								Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								100%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:									
1.	Pelaksanaan pengumpulan data statistik semaksimal mungkin kepada nelayan dan petani, sehingga didapatlkan data yang maksimal dan valid.								

2.	Adanya aktifitas pencegahan dan pengendalian serangan OPT (mandiri dan pembentukan brigade).						
3.	Petani jg melakukan intensifikasi secara masif pada tanaman lada seperti melakukan pemangkasan, pemupukan secara instensif dan pemeliharaan tanaman.						
Faktor penghambat pencapaian kinerja :							
1.	Untuk perikanan tangkap banyak nelayan yang tidak melaut karena biaya operasional tdk menutupi dgn perolehan hsl tangkapan, dan juga banyak nelayan andon yg mendaratakan ikannya di daerah lain						
2.	Padi tidak panen di TW 3 karena memasuki musim tanam, akan dipanen pada TW4						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : memaksimalkan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga selesai sesuai jadwal							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : berharap anggaran dapat menyesuaikan dengan Renstra atau Renja agar semua indikator bisa tercapai maksimal							

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa :

1. **Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :**

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dengan tingkat capaian kinerja 67,69 % dan capaian keuangan 83,10 %
- Program Penyuluhan Pertanian dengan tingkat capaian kinerja 53,5 % dan capaian keuangan 65,4%
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan tingkat capaian kinerja 69 % dan capaian keuangan 84 %
- Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian dengan tingkat capaian kinerja yg tidak dapat dihitung Karena merupakan indicator baru dalam RENSTRA

2. **Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :**

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan tingkat capaian kinerja 99 % dan capaian keuangan 95 %
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan tingkat capaian kinerja 98 % dan capaian keuangan 99 %
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan tingkat capaian kinerja 100 % dan capaian keuangan 79 %

3. **Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :**

- PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN dengan tingkat capaian kinerja 103 % dan capaian keuangan 63 %
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan tingkat capaian kinerja 1047 % dan capaian keuangan 84 %
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan tingkat capaian kinerja 1612 % dan capaian keuangan 95 %

2.2. Analisisis Kinerja Pelayanan DPPP Kota Balikpapan

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan merupakan instansi teknis dan tidak memiliki SPM, sehingga capaian kinerjanya merupakan capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tupoksinya. Hanya satu bidang yaitu bidang ketahanan pangan yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) . Adapun capaian kinerja DPPP Kota Balikpapan periode yang lalu digambarkan pada tabel 2.2.1 di bawah ini.

Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 65/ Permentan/ OT.140/ 12/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota sebagai berikut :

Tabel. 1. Capaian SPM Bidang Katahanan Pangan

Jenis Pelayanan Dasar Badan Ketahanan Pangan	SPM		Capaian
	Indikator	Nilai (%)	
Kabupaten /Kota	Balikpapan		
A. Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	99%	95 %
	2. Penguatan Cadangan Pangan	9%	7,5%
B. Distribusi dan Akses Pangan	1. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90	92
	2. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90	94
C. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92,9	85,2
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	97,92	100

TABEL T-C .30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Balikpapan

No.	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Persentase penguatan cadangan pangan	100		9%	10%	12%	14%	7,5%	N/A	8%	9%	
2	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)			94,5%	94,5%	94,5%	95%	95%	N/A	95%	95%	
3	Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)			100%	100%	100%	100%	115%	N/A	100%	100%	
4	Persentase Keamanan Pangan			88%	89%	89%	90%	100%	N/A	100%	100%	
5	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan			17.500	17.800	18.000	18.000	14.081	N/A	14.100	14.110	
6	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura			120.500	126.600	133.000	140.000	187.540	N/A	187.600	187.650	
7	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan			9.886	10.193	10.501	10.809	16.087	N/A	16.100	16.150	
8	Total Produksi Sub Sektor Peternakan			20.500	20.600	20.700	20.800	17.714	N/A	17.725	17.730	
9	Total Produksi Sub Sektor Perikanan			4.489	4.597	4.704	4.812	4.800	N/A	4.850	4.900	

10	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			27	28	29	30	27,41	N/A	28	29	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, capaian kinerja DPPP Kota Balikpapan secara keseluruhan tercapai, kecuali untuk IKK produksi Tanaman Palawija, daging sapi dan telur. Beberapa IKK yang belum tercapai bisa menjadi tantangan untuk ditingkatkan tahun berikutnya.

Capaian kinerja tahun 2021 pada beberapa komoditi menurun cukup siginifikan karena adanya faktor alam yang mempengaruhi panen serta budidaya pertanian/perikanan dan maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi sarana publik lainnya seperti bendungan, pembangunan embung, pembangunan jalan tol dan perumahan.

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 terdapat peningkatan yang signifikan pada komoditas padi, buah-buahan dan sayuran dataran rendah, karet, kelapa, lada dan daging ayam. Realisasi kenaikan produksi palawija, daging sapi, telur, perikanan tangkap dan perikanan budidaya mengalami penurunan dibandingkan dengan angka target.

Realisasi Produksi Palawija mengalami penurunan, hal disebabkan karena adanya penurunan produksi komoditi ubi kayu, ubi jalar dan talas dan penurunan luas tanam beberapa komoditas palawija sehingga mempengaruhi jumlah produksi palawija. Sedangkan produksi tanaman Kelapa dan lada pada tahun 2021 mengalami kenaikan produksi dibandingkan tahun 2020. Meskipun mengalami kenaikan namun harus diantisipasi ditahun mendatang. Hal ini disebabkan Produktifitas tanaman Perkebunan yang semakin turun karena kondisi tanaman Perkebunan yang sebagian besar diatas usia produktif, disisi lain semakin menurunnya luasan lahan kebun tanaman Perkebunan karena kurang berminatnya pekebun usia muda untuk meneruskan lahan kebun yang sudah ada.

Produksi Daging Sapi dan telur tahun 2021 mengalami penurunan, antara lain karena masuknya produk daging beku dan dijual di pasar tradisional dengan harga dibawah daging segar dari RPH, serta akibat pandemi covid 19 berkurangnya daya beli masyarakat sehingga banyak warung dan rumah makan yang tutup, sementara peternak ayam petelur semakin berkurang di Kota Balikpapan, dikarenakan harga pakan yang melonjak naik, sehingga membuat mereka menghentikan usahanya.

Pada Produksi Perikanan Tangkap tidak mencapai angka target akibat cuaca ekstrim, dan dampak pandemi covid 19 nelayan tidak melaut, juga biaya operasional yang tinggi serta daya beli masyarakat yang menurun sehingga banyak warung dan rumah makan yang tutup.

Untuk Perikanan Budidaya juga tidak mencapai angka target, hal ini disebabkan oleh dampak cuaca ekstrim dan musim selatan yang sangat panjang mengakibatkan pembudidaya rumput laut diserang penyakit sehingga gagal panen dan tidak bisa melakukan budidaya di tahun 2021. Akibat dari cuaca ekstrem pula curah hujan tidak dapat diprediksi yang mengakibatkan banjir besar sehingga pembudidaya ikan khususnya budidaya lele,banyak yg gagal panen, sehingga target produksi tidak tercapai.

Selanjutnya dengan adanya Peraturan Menteri (Permen-KP) No. 1 Tahun 2015, pembudidaya kepiting Soka banyak yang stop melakukan budidaya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan DPPP, kajian hasil evaluasi pelaksanaan DPPP, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra DPPP, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPP. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPP, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPP berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra DPPP. Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

a. Kondisi pertanian dan pangan daerah masih belum mantap, terutama karena produksi komoditas pertanian, pangan dan perkebunan terkendala penurunan luas lahan pertanian secara terus menerus.
b. Produk hasil pertanian, pangan dan perkebunan kurang berdaya saing dalam perdagangan bebas.
c. Belum stabilnya tingkat peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produksi tanaman pangan dan hortikultura.
   Beberapa penyebab ketidakstabilan peningkatan produksi, produktifitas, dankualitas produksi tanaman pangan dan hortikultura adalah :

- Sumber Daya Manusia (SDM) petani yang belum sepenuhnya dapat mengadopsi teknologi pertanian.
- Anomali iklim yang tidak dapat diprediksi
- Belum optimalnya penerapan teknologi budidaya yang ramah lingkungan

d. Ketersediaan Pangan
   Dengan adanya kecenderungan alih fungsi lahan yang semakin meningkat, sementara permintaan akan bahan pangan terus meningkat, dikhawatirkan terjadi penurunan cadangan pangan masyarakat. Maka perlu adanya rumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan melalui program-program yang telah direncanakan seperti Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui Kegiatan Penganekaragaman Pangan dengan optimalisasi pemanfaatan pekaranganmelalui konsep kawasan rumah pangan lestari, pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan.
e. Ketersediaan atau jumlah populasi ternak masih kurang memadai.
f. Ketersediaan pakan ternak sapi dan kambing masih kurang memadai.
g. Resiko kesehatan hewan dan ternak masih rawan.
h. Produktifitas budidaya perikanan masih belum optimal.
i. Tingginya ketergantungan penyediaan bahan pangan dari daerah-daerah pemasok.
j. Konsumsi dan Keamanan Pangan

k. Ketergantungan konsumsi pada satu jenis pangan pokok terutama beras, merupakan salah satu titik rawan ketahanan pangan nasional, yang sampai saat ini mindset masyarakat adalah beras sebagai makanan pokok.
l. Keanekaragaman produk pangan berbasis sumberdaya lokal belum dimanfaatkan secara optimal dan teknologi pengelolaan pangan lokal masih sangat terbatas. Keragaman produk pangan dengan citarasa yang menarik sangat terbatas serta kurangnya jaminan.
m. Keamanan produk pangan.

2.3.1. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan DPPP Kota Balikpapan

Seiring dengan dinamika perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, maka DPPP Kota Balikpapan menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar dan memanfaatkan peluang yang ada dalam melaksanakan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan kota. Oleh sebab itu, DPPP Kota Balikpapan harus meningkatkan perannya dalam pembangunan tersebut dalam koridor tupoksinya yang telah ditetapkan.

Tantangan

Secara garis besar, tantangan yang dihadapi oleh DPPP Kota Balikpapan terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, antara lain :

a. Terbatasnya tenaga teknis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
b. Kurangnya staf yang memiliki kemampuan teknis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
c. Semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang telah berubah /alih fungsi menjadi sarana publik lainnya.
d. Kurangnya ketersediaan peralatan dan mesin pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik untuk budidaya, panen, pasca panen maupun perikanan.
e. Kurangnya prasarana pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Peluang

a. Penambahan tenaga teknis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan setara diploma III (D III) dan strata 1 (S1), terutama dalam bidang perencanaan program dan pengolahan data.
b. Perlunya dilakukan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui bimtek, pelatihan dan sebagainya.
c. Perlunya penambahan staf untuk mendukung kelancaran administrasi keuangan, perbendaharaan dan perencanaan program.
d. Penambahan peralatan dan mesin pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
e. Intensifikasi pertanian dengan memanfaatkan luas lahan yang tersedia.

2.3.2. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsinya Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain :

No.	URUSAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Terjadinya penurunan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari 87 di tahun 2021 menjadi 85,2 di tahun 2022	Penguatan Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan aman
		Belum Optimalnya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	Penguatan Penyediaan CPPD
2	PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terbatasnya Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)
			Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
3	PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Meningkatkan Sapras Balai Benih Ikan (BBI)
			Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan . Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	73	**20.590.000.000**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	73	**20.590.000.000**	
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Balikpapan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0.081%	**450.000.000**	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Balikpapan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0.081%	**450.000.000**	
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Balikpapan	Persentase Infrastruktur yang tersedia	30%	**60.000.000**	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Balikpapan	Persentase Infrastruktur yang tersedia	30%	**60.000.000**	
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Balikpapan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	60%	**50.000.000**	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Balikpapan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	60%	**50.000.000**	
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Balikpapan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	89%	**275.000.000**	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Balikpapan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	89%	**275.000.000**	
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Balikpapan	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	50%	**450.000.000**	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Balikpapan	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	50%	**450.000.000**	

7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Balikpapan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	304 ton	**1.430.000.000**	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Balikpapan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	304 ton	**1.430.000.000**	
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Balikpapan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4400 ton	**550.000.000**	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Balikpapan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4400 ton	**550.000.000**	
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Balikpapan	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	25%	**1.000.000.000**	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Balikpapan	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	25%	**1.000.000.000**	
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Balikpapan	Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia	85%	**1.130.000.000**	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Balikpapan	Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia	85%	**1.130.000.000**	
11	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Balikpapan	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	75%	**700.000.000**	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Balikpapan	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	75%	**700.000.000**	
12	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Balikpapan	Persentase Luas Lahan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	50%	**50.000.000**	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Balikpapan	Persentase Luas Lahan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	50%	**50.000.000**	
13	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Balikpapan	Presentase Rekomendasi yang Diterbitkan	60%	**35.000.000**	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Balikpapan	Presentase Rekomendasi yang Diterbitkan	60%	**35.000.000**	

Rancangan awal RKPD tahun 2024 dibuat berdasarkan rencana strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2021-2026 untuk mencapai sasaran-sasaran yang tercantum dalam RPJMD.

Pada rancangan awal tersebut dapat dilihat target-target yang ingin dicapai pada tahun 2024 dan upaya pencapaiannya melalui program dan kegiatan. Dengan melihat hasil evaluasi tahun 2022, permasalahan dan analisis kebutuhan maka disusunlah program dan kegiatan tahun 2024 yang lebih realistis untuk mencapai target-target tersebut. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan terdiri atas 13 program, 24 kegiatan dan 41 sub kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan dan kecamatan dilakukan penjaringan aspirasi dan usulan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya terhadap program dan kegiatan tahun 2024. Hasil yang dikumpulkan menunjukkan terdapat usulan kegiatan dari 2 kecamatan (Timur dan Kota) untuk program dan kegiatan urusan pertanian dan perikanan. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.

Rekapitulasi Usulan Masyarakat

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KOTA BALIKPAPAN

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan	SUB Kegiatan
1	Semenisasi Jalan Usaha Tani	PokTan Daya Taka, BPP Teritip, Kota Balikpapan		1 km	tidak dapat diakomodir	
2	Pipa Paralon/selang ukuran 2 inc ,			10 btg	tidak dapat diakomodir	
3	Pengembangan Tanaman Lengkeng		Peningkatan Produksi Buah2an	100 pohon	dapat diakomodir	
4	Pengembangan Bibit Durian Matahari		Peningkatan Produksi Buah2an	100 pohon	tidak dapat diakomodir	
5	Pengembangan Tanaman Jeruk Nipis		Peningkatan Produksi Buah2an	100 pohon	dapat diakomodir	
6	Pengembangan Tanaman Sawo		Peningkatan Produksi Buah2an	200 pohon	dapat diakomodir	
7	Pengembangan Tanaman Lengkeng	PokTan Bina Bersama, BPP Teritip, Kota Balikpapan	Peningkatan Produksi Buah2an	20 Pohon	dapat diakomodir	
8	Sumur Air Dangkal			1 unit	tidak dapat diakomodir	
9	Mesin Tetas Telur Ayam			1 unit	tidak dapat diakomodir	
10	Bantuan Ternak Kambing			10 betina 2 jantan	tidak dapat diakomodir	
11	Batuan Ternak Sapi ,			2 betina 1 jantan	tidak dapat diakomodir	
12	Pengendalian H/P Tanaman Kelapa		Luas lahan pengendalian OPT Perkebunan		dapat diakomodir	

13	Alat pertanian	RT. 50 Jl. pjhi batakan, Kota Balikpapan Timur	Jumlah alat pertanian yang diberikan		dapat diakomodir	
14	Permohonan Alat bajak pertanian Cultivator 1 Unit	Jl. Joko Tole RT. 58, Kota Balikpapan Tengah	Jumlah alat pertanian yang diberikan		dapat diakomodir	
15	Pelatihan Budidaya pertanian organik	PokTan Sejuta Harapan, BPP Teritip, Kota Balikpapan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	1 paket	dapat diakomodir	
16	Bantuan Cultivator		Jumlah alat pertanian yang diberikan	1 unit	dapat diakomodir	
17	Sumur Air Dangkal			1 unit	tidak dapat diakomodir	
18	Bantuan Ternak Sapi			6 ekor	tidak dapat diakomodir	
19	Sumur Air Dangkal	PokTan Tunas Harapan Indah, BPP Teritip, Kota Balikpapan		1 unit	tidak dapat diakomodir	
20	Bantuan Cultivator		Jumlah alat pertanian yang diberikan	1 unit	dapat diakomodir	
21	Pengembangan Tanaman Cabe		Peningkatan Produksi sayuran dataran rendah	1 Ha	dapat diakomodir	
22	Pengembangan Tanaman Pepaya		Peningkatan Produksi Buah2an	1 Ha	dapat diakomodir	
23	Pelatihan keramba udang ikan kerapu	RT 3,Kariangau Kota Balikpapan				
24	Peningkatan ekonomi melalui pembuatan kolam terpal ikan emas dan nila	RT 13, Kariangau Kota Balikpapan	Jumlah Produksi Perikanan budidaya			
25	Peningkatan ekonomi melalui penyemaian bibit pohon kates dan sayuran (1000 bibit)		Peningkatan Produksi Buah2an dan sayuran	1000 bibit		

Tabel 4.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI HASL POKOK-POKOK PIKIRAN TAHUN 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Pertanian (Pekarangan Pangan Lestari)	RT. 65 KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	Peningkatan Produksi Sayuran dan buah-buahan	1 unit	Usulan ketua Komisi II (Suwanto)
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Pertanian (Pekarangan Pangan Lestari)	RT. 68 KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	Peningkatan Produksi Sayuran dan buah-buahan	1 unit	Usulan ketua Komisi II (Suwanto)
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Pertanian (Pekarangan Pangan Lestari)	RT. 69 KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	Peningkatan Produksi Sayuran dan buah-buahan	1 unit	Usulan ketua Komisi II (Suwanto)
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Pertanian (Pekarangan Pangan Lestari)	RT. 66 KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	Peningkatan Produksi Sayuran dan buah-buahan	1 unit	Usulan ketua Komisi II (Suwanto)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Melihat kapasitas anggaran yang ada pada tahun 2024, sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pembangunan nasional dalam RKP berorientasi pada pendekatan money follows program, atau meninggalkan budaya pembangunan berorientasi money follow function.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, kebijakan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional , Dinas Pangan dan Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Kalimantan Timur.

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah :

“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan “

Sedangkan tema pembangunan untuk provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah :

“Peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan serta menjaga stabilitas politik dan keamanan”

Dan Tema Pembangunan untuk Kota Balikpapan di Tahun 2024 adalah :

“Mempertahankan Kondisifitas untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Lingkungan yang Berkelanjutan”

Pendekatan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan ***Money Follow Program***.
Money Follow Program maksudnya bahwa Penyusunan perencanaan dan penganggarannya tidak lagi bersifat *incremental*, sekedar penambahan proposional atau *Bussines As Usual* tetapi sebaliknya benar –benar mengikuti prioritas pembangunan yang lebih tajam.
Holistik (Perencanaan yang menyeluruh) ,***Tematik***(Jelas dan Focus apa yang mau di bangun) , ***Terintegrasi*** (Menerobos adanya ego sektoral) dan ***Spasial*** (Ke daerahan atau Ke wilayahan).

Prioritas yang terkait langsung dengan Kementerian Pertanian adalah ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian, sedangkan prioritas yang terkait langsung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah peningkatan produksi perikanan .

Tema prioritas ketahanan pangan adalah peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian dan peningkatan pendapatan petani.

Strategi pembangunan pertanian yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian adalah melakukan revitalisasi pertanian dengan fokus pada tujuh aspek dasar yang disebut dengan Tujuh Gema Revitalisasi yang terdiri atas 1) lahan, 2) perbenihan dan pembibitan, 3) infrastruktur dan sarana, 4) sumber daya manusia, 5) pembiayaan petani, 6) kelembagaan petani, dan 7) teknologi dan industri hilir.

Target utama Kementerian Pertanian adalah :

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;
2. Peningkatan diversifikasi pangan;
3. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta
4. Peningkatan kesejahteraan petani.

Kebijakan dan strategi ini di tuangkan dalam 12 program yaitu :

1. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan.
2. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan.
3. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman perkebunan berkelanjutan.
4. Peningkatan swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal.
5. Penyedian dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
6. Penyediaan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian.
7. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
8. Penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing.
9. Pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani.
10. Peningkatan kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.
11. Pengawasan dan peningkatan akuntanbilitas aparatur Kementrian Pertanian.
12. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pertanian.

Tema pembangunan nasional yang diangkat pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024) “ **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan “**

PN 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

1. PN 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
2. PN 3. Meningkatkan sumber daya manusia yangb berkualitas dan berdaya saing
3. PN 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
4. PN 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

5. PN 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
6. PN 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan public

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, sampai tahun 2022 berupaya untuk mendukung terlaksananya prioritas Pembangunan Nasional, khususnya Prioritas 1 ”Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan” yaitu pada program nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, serta ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Program nasional lainnya yang masih terus dijalankan yaitu UPSUS Pajale (Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedele) dalam rangka swasembada pangan dan SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) yang merupakan upaya pemerintah meningkatkan populasi sapi melalui kegiatan optimalisasi reproduksi, menjadikan sapi dan kerbau sebagai komoditas andalan dalam menyediakan pangan hewani secara mandiri untuk seluruh negeri.

Untuk mendukung SIKOMANDAN, kegiatan yang direncanakan yaitu peningkatan produktivitas ternak, peningkatan akseptor inseminasi buatan, penguatan pakan, serta peningkatan kesehatan hewan. Sedangkan untuk mengembangkan kompetensi SDM pertanian, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan pada program kegiatan tahun 2022 akan terus fokus pada pelatihan-pelatihan baik kepada petani maupun penyuluh pertanian. Selain itu pada tahun 2022 juga akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik minat generasi milenial terhadap sektor pertanian sebagai upaya regenerasi sumber daya manusia pertanian.

Beberapa isu strategis bidang kelautan dan perikanan lima tahun ke depan yang akan dihadapi oleh pemerintah Indonesia antara lain masih adanya kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) dan destructive fishing, perbaikan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan daya saing dan nilai tambah industri kelautan dan perikanan, daya saing sumber daya manusia, inovasi teknologi dan riset, serta pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan.

Lima tahun ke depan, arah kebijakan di bidang kelautan dan perikanan adalah membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, kita akan menerapkan prinsip-prinsip pengeloalan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. Tak kalah penting, meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

Sementara itu, untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk perikanan, KKP akan terus mengembangkan sistim rantai dingin terutama di sentra-sentra produksi dan daerah pinggiran. “Untuk memperkuat daya saing industri perikanan, kita perlu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk perikanan, standardisasi mutu, sertifikasi, dan kepatuhan. Kita juga perlu membangun sistem rantai

dingin dan sistem logistik serta meningkatkan akses pasar terutama untuk meningkatkan nilai dan volume ekspor produk perikanan.

Dalam hal memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan, KKP akan melakukan pengembangan industri dan jasa kelautan. Meningkatkan produktivitas garam rakyat, mendorong investasi pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta melanjutkan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu merupakan beberapa prioritas yang akan dilakukan.

Muara dari semua jenis program dan intervensi pembangunan yang dilakukan oleh KKP adalah mewujudkan kesejahteraan stakeholders. Untuk itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kelembagaan pelaku usaha dan memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi mereka. Untuk mencapainya, dibutuhkan pengembangan kewirausahaan dan perluasan jangkauan penyaluran dana kelolaan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tabel.4. Posisi DPPP Dalam RPJMD 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN	OPD
Misi ke-5 Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif	***Tujuan ke-6*** Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	***Sasaran ke-2*** Meningkatnya Ketahanan Pangan	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar : - Pangan Urusan Pilihan - Pertanian - Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3)

Adapun **tujuan** yang akan dicapai dalam rencana kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan tahun 2024 yaitu :

1. Meningkatkan pemenuhan kecukupan bahan pangan di masyarakat;
2. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian untuk kesejahteraan petani;
3. Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan , peternakan, dan perikanan

Sasaran Rencana Kerja tahun 2024 yaitu :

1. Bertambahnya sentra komoditas unggulan, baik tanaman pangan, hortikultura,maupun perkebunan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah;
2. Terpenuhinya ketersediaan bahan pangan pokok di masyarakat;
3. Tercapainya nilai tambah produk pertanian untuk peningkatan pendapatan petani;

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

VISI	**"Terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman"**		
MISI	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan - Memperkuat cadangan pangan daerah - Melaksanakan pemantauan daerah rawan pangan	- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - Pelaksanakan Penanganan Kerawanan Pangan - Pelaksanakan pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
	2. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	- Melakukan diversifikasi dan ketahanan pangan - Pembinaan dan pengembangan pangan lokal dan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	- Peningkatan diversifikasi pangan alternatif - Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi;
		Melakukan survey, data Susenas dan BPS	Pelaksanakan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun.
		Melaksanakan Pengujian Sampel Pangan	Pelaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan
	3. Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dalam rangka meningkatkan produksi hasil pertanian	- Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian - Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Melaksanakan Penyediaan dan pengembangan Sarana Prasarana Pertanian	- Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana pertanian
		Pemberdayaan kelompok usaha tani, ternak dan nelayan secara optimal	- Penyuluhan Pertanian - Perizinan Usaha Pertanian
		Meningkatkan produksi perikanan	Pengelolaan Perikanan Budidaya dan perikanan tangkap
	4. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan anggaran serta meningkatkan kualitas penunjang urusan pemerintah daerah

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program dan kegiatan adalah cara untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disusun sebagaimana pembasahan tersebut di atas. Program dan kegiatan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif merupakan cara untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja DP3 tahun 2023. Oleh sebab itu, program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil, sebagai penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang ditetapkan oleh DP3 Kota Balikpapan dalam Renja Tahun 2024 berdasarkan Permendagri No 90 tahun 2019 , kemudian disempurnakan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan disempurnakan lagi dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan pada tahun 2024 melaksanakan **3 urusan, 13 program, 24 kegiatan dan 41 sub kegiatan.**

TABEL. TC-33 RENCANA KERJA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019

Disempurnakan dengan Kepmendagri 050-5889/2021

Kabupaten/Kota : Kota Balikpapan

SKPD : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan

Kode Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NON URUSAN								
X XX 01	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Balikpapan	73	20.590.000.000	APBD KOTA		74	22.247.000.000
X XX 01 202	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		73	14.900.000.000			74	16.000.000.000
X XX 01 202 01	1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input :			14.900.000.000				16.000.000.000
		- SDM		- 4 orang				- 4 orang	
		- Dana		14.900.000.000				16.000.000.000	
		- Sarana Prasarana		- 1 paket				- 1 paket	
		- Waktu		- 14 bulan				- 14 bulan	
		Output :							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang bulan)		1120				1.120	
X XX 01 205	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		76	100.000.000			77	0

X	XX	01	205	02	2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	Balikpapan	 - 100 orang 100.000.000 - 1 paket - 12 bulan 150	100.000.000			 - 100 orang 0 - 1 paket - 12 bulan 0	
X	XX	01	206		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		73	1.349.000.000	APBD KOTA		74	1.530.000.000
X	XX	01	206	01	3.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor yang Disediakan (paket)	Balikpapan	 - 4 orang 80.000.000 -1 paket - 12 bulan 1 paket	Rp 80.000.000	APBD KOTA		 - 6 orang 100.000.000 -1 paket - 12 bulan 1 paket	Rp 100.000.000
X	XX	01	206	02	3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Balikpapan	 - 4 orang 414.000.000 - 1 paket - 12 bulan 5 paket	Rp 414.000.000			 - 5 orang 450.000.000 - 1 paket - 12 bulan 5 paket	Rp 450.000.000
X	XX	01	206	04	3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : - SDM	Balikpapan	 - 120 pegawai	Rp 350.000.000	APBD KOTA		 - 120 pegawai	Rp 400.000.000

							- Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)		350.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 paket			400.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 paket	
X	XX	01	206	05	3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Balikpapan	- 4 orang 70.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 paket	Rp 70.000.000	APBD KOTA		- 5 orang 95.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 paket	Rp 95.000.000
X	XX	01	206	06	3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Balikpapan	- 4 orang 35.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 dokumen	Rp 35.000.000	APBD KOTA		- 5 orang 35.000.000 - 1 paket - 12 bulan 3 dokumen	Rp 35.000.000
X	XX	01	206	09	3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output :		- 100 orang 400.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp 400.000.000	APBD KOTA		- 100 orang 450.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp 450.000.000

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		100 laporan				120 laporan	
X	XX	01	207		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		70	Rp 300.000.000			72	Rp 400.000.000
X	XX	01	207	05	4.1	Pengadaan Mebel	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)		 4 orang 200.000.000 - 1 paket - 12 bulan 6 unit	Rp 200.000.000			 - 5 orang 200.000.000 - 1 paket - 12 bulan 1 paket	Rp 200.000.000
X	XX	01	207	06	4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)		 4 orang 100.000.000 - 1 paket - 12 bulan 5 unit	Rp 100.000.000			 - 5 orang 200.000.000 - 1 paket - 12 bulan 4 unit	Rp 200.000.000
X	XX	01	208		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		73	Rp 2.300.000.000			74	2.567.000.000
X	XX	01	208	02	5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		 - 4 orang 800.000.000 - 5 bidang, 1 sekretariat, 1 UPTD, BBI dan 2 BPP - 12 bulan 36	Rp 800.000.000			 - 3 orang 960.000.000 - 5 bidang, 1 sekretariat, 1 UPTD, BBI dan 2 BPP - 12 bulan 36	Rp 960.000.000
X	XX	01	208	04	5.3		Input :			1.500.000.000				1.600.000.000

						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)		- 4 orang 1.500.000.000 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan (kebersihan, keamanan, Naban)				- 7 orang 1.600.000.000 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan (kebersihan, keamanan, Naban)	
X	XX	01	209		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		73	Rp 1.740.000.000			74	Rp 1.750.000.000
X	XX	01	209	02	6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Balikpapan	 - 4 orang 941.000.000 - 1 paket - 12 bulan 99	Rp 941.000.000	APBD KOTA		 - 5 orang 800.000.000 - 1 paket - 12 bulan 99	Rp 800.000.000
X	XX	01	209	06	6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Balikpapan	 - 4 orang 199.000.000 - 1 paket - 12 bulan 9 unit	Rp 199.000.000	APBD KOTA		 - 12 orang 225.000.000 - 1 paket - 12 bulan 9 unit	Rp 225.000.000
X	XX	01	209	09	6.3		Input :	Balikpapan		Rp 600.000.000				Rp 725.000.000

						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)		- 4 orang 600.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 unit				- 12 orang 725.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 unit	
						URUSAN PANGAN							
2	09	03			III	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		0,081%	Rp 485.000.000			0,110%	Rp 550.000.000
2	09	03	2.02		8	Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase CPPD		12%	Rp 335.000.000			14%	Rp 350.000.000
2	09	03	2.02	03	8.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (ton)		- 3 orang Rp 335.000.000 - 1 paket - 12 bulan 22 ton	Rp 335.000.000			- 15 orang Rp 350.000.000 - 1 paket - 12 bulan 25 Ton	Rp 350.000.000
2	09	03	2.04		9	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;	Peningkatan konsumsi pangan umbi2an		45 kkal / perkapita /hari	Rp 150.000.000			46 kkal/perkapita/ hari	Rp 200.000.000
2	09	03	2.04	02	9.1	Pemberdayaaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output :		 - 3 orang Rp 150.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp 150.000.000			 - 5 orang Rp 200.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp 200.000.000

							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)		4 laporan				4 laporan	
2	09	04			IV	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan		60%	Rp 35.000.000			60%	Rp 65.000.000
2	09	04	2.01		10	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pangan		1 dokumen	Rp 35.000.000			1 dokumen	Rp 65.000.000
2	09	04	2.01	01	10.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output :		 - 3 orang Rp 35.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp 35.000.000			 - 3 orang - Rp 65.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp 65.000.000
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (dokumen)		1 dokumen				1 dokumen	
2	09	05			V	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	Balikpapan	89%	Rp 220.000.000			90%	Rp 300.000.000
2	09	05	2.01		11	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa		89%	Rp 220.000.000			90%	Rp 300.000.000
2	09	05	2.01	05	11.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output :		 - 3 orang Rp 220.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp 220.000.000			 - 5 orang Rp 300.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp 300.000.000
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)		2 dokumen				2 dokumen	
						URUSAN PERIKANAN								

3	25	03			VI	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	balikpapan	4400	Rp 525.000.000			4300 ton	Rp 825.000.000
3	25	03	2.02		12	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)		62 kelompok	Rp 200.000.000			64 kelompok	Rp 325.000.000
3	25	03	2.02	01	12.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (orang)		 - 5 orang 100.000.000 - 1 paket - 12 bulan 50	 100.000.000			 - 5 orang 200.000.000 - 1 paket - 12 bulan 50	 200.000.000
3	25	03	2.02	02	12.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)		 - 5 orang 100.000.000 - 1 paket - 12 bulan 6 kelompok	Rp 100.000.000			 - 5 orang 125.000.000 - 1 paket - 12 bulan 6 kelompok	Rp 125.000.000
3	25	03	2.03		13	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional		100%	Rp 325.000.000			100%	Rp 500.000.000
3	25	03	2.03	02	13.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)		 - 5 orang 325.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2	Rp 325.000.000			 - 5 orang 500.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2	Rp 500.000.000
3	25	04			VII	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2020 : 275 ton	304	Rp 1.780.000.000			312	Rp 1.595.000.000

3	25	04	2.02		14	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang diberdayakan		120 pembudidaya	Rp 575.000.000			120 Pembudidaya	Rp 185.000.000
3	25	04	2.02	02	14.1	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (kelompok)	 baltim, balut	- 5 orang 50.000.000 - 1 paket - 12 bulan 5 kelompok	Rp 50.000.000			- 5 orang 60.000.000 - 1 paket - 12 bulan 5 kelompok	Rp 60.000.000
3	25	04	2.02	04	14.2	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan (kelompok)	 baltim, balut	 - 5 orang 525.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 kelompok	Rp 525.000.000			 - 5 orang 125.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 kelompok	Rp 125.000.000
3	25	04	2.04		15	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan		2 jenis	Rp 1.205.000.000			2 jenis	Rp 1.410.000.000
3	25	04	2.04	01	15.1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input : - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	 	 55.000.000 - 1 paket - 12 bulan 12 dokumen	 55.000.000			 60.000.000 - 1 paket - 12 bulan 12 dokumen	 60.000.000

3	25	04	2.04	02	15.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)		 - 5 orang 1.100.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 unit	Rp1.100.000.000			 - 5 orang 1.300.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 unit	Rp 1.300.000.000
3	25	04	2.04	05	15.3	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (orang)	 balikpapan	 - 5 orang 50.000.000 - 1 paket - 12 bulan 130 orang	 50.000.000			 - 5 orang 50.000.000 - 1 paket - 12 bulan 130 Pembudidaya	 50.000.000
					URUSAN PERTANIAN										
3	27	02			VIII	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia		25%	1.299.981.600			25%	1.200.000.000
3	27	02	2.01		16	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan /penggunaan sarana pertanian		100%	Rp 1.199.981.600				Rp 1.000.000.000
3	27	02	2.01	01	16.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)		 - 4 orang 699.995.000 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan	Rp 699.995.000			 - 4 orang 850.000.000 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan	Rp 850.000.000

3	27	02	2.01	02	16.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)		 - 4 orang 499.986.600 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan	Rp 499.986.600			 - 4 orang 150.000.000 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan	Rp 150.000.000
3	27	02	2.03		17	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)		275	Rp 100.000.000			250	Rp 200.000.000
3	27	02	2.03	01	17.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	Balikpapan	 - 7 orang 100.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 laporan	Rp 100.000.000			 - 7 orang - 200.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 laporan	Rp 200.000.000
3	27	03			IX	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia		85%	1.130.000.000			85%	1.200.000.000
3	27	03	2.01		18	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian		4 unit	179.993.500			4 unit	200.000.000
3	27	03	2.01	01	18.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan		 - 3 orang 179.993.500 - 1 paket - 12 bulan 1 dokumen	179.993.500			 - 3 orang 200.000.000 - 1 paket - 12 bulan 1 dokumen	200.000.000

							Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (dokumen)							
3	27	03	2.02		19	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dibangun / direhab (unit)		2 unit	Rp 950.000.000			2 unit	Rp1.000.000.000
3	27	03	2.02	07	19.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan				Rp 950.000.000				Rp1.000.000.000
							Input :							
							- SDM		- 10 orang				- 10 orang	
							- Dana		950.000.000				1.000.000.000	
							- Sarana Prasarana		- 1 paket				- 1 paket	
							- Waktu		- 12 bulan				- 12 bulan	
							Output :							
							Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)		1 unit				1 unit	
3	27	04			X	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani		75%	600.000.000			80%	750.000.000
3	27	04	2.01		20	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)		3.350	400.000.000			3450	550.000.000
3	27	04	2.01	01	20.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Input :			400.000.000				550.000.000
							- SDM		- 10 orang				- 10 orang	
							- Dana		400.000.000				550.000.000	
							- Sarana Prasarana		- 1 paket				- 1 paket	
							- Waktu		- 12 bulan				- 12 bulan	
							Output :							
							Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan)		4				4	

3	27	04	2.04		21	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmavet (unit)		24 unit	200.000.000			26 Unit	200.000.000
3	27	04	2.04	02	21.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (laporan)		 - 4 orang 200.000.000 - 1 paket - 12 bulan 4	200.000.000			 - 4 orang 200.000.000 - 1 paket - 12 bulan 4	200.000.000
3	27	05			XI	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		50%	Rp 50.000.000			50%	Rp 75.000.000
3	27	05	2.01		22	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		300 Ha	Rp 50.000.000			300 ha	Rp 75.000.000
3	27	05	2.01	01	22.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	Balikpapan	 - 4 orang 50.000.000 - 1 paket - 12 bulan 300 Ha	50.000.000			 - 4 orang 75.000.000 - 1 paket - 12 bulan 300 ha	75.000.000
3	27	07			XIII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	Balikpapan	50%	Rp 635.000.000			55%	Rp 480.000.000
3	27	07	2.01		24	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)		1000 Laku (latihan dan kunjungan)	Rp 635.000.000			1000 laku (latihan dan kunjungan)	Rp 480.000.000
3	27	07	2.01	02	24.2		Input : - SDM		 - 60 orang	275.000.000			 - 60 orang	

						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	- Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)		275.000.000 - 1 paket - 12 bulan 6 unit				150.000.000 - 1 paket - 12 bulan 6 kelompok	150.000.000
3	27	07	2.01	03	24.1	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)		 - 15 orang 320.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 unit	Rp 320.000.000			 - 25 orang 350.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 unit	Rp 350.000.000
3	27	07	2.01	05	24.3	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit)		 - 60 orang 40.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2	Rp 40.000.000			 - 60 orang 55.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2	Rp 55.000.000
										27.448.975.100				Rp 29.335.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Program, kegiatan,sub kegiatan dan kerangka pembiayaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan pada tahun 2024 melaksanakan **3 urusan, 13 program, 24 kegiatan dan 41 sub kegiatan** dengan rincian sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Kegiatan Administrasi Keuangan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

3. Kegiatan Administrasi Umum

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultansi SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

III. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota

2. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- Pemberdayaaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal.

IV. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

V. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

VI. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

2. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

VII. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

VIII. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

2. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

IX. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.

2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

X. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerak Kabupaten/Kota.

- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

2. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknik Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

XI. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

1. **Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota**.

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

XII. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

XIII. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Adapun mapping program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap Isu Pembangunan bisa kita lihat pada table dibawah ini :

Kode Program /Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		IndikatorKinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif RENJA	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	9	1			**I**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**72 point**	**20.484.000.000**						**X**
2	9	1	202		***1***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***72 point***	***14.900.000.000***						**X**
2	9	1	202	1	1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output** : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang bulan)	 - 4 orang Rp14.900.000.000 - 1 paket - 14 bulan *1120*	14.900.000.000						**X**
					2	***Administrasi Kepegawaian***	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian	*76*	**100.000.000**						
X	XX	1	205	2	2,1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**Input :** - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** **Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)**	 *- 100 Orang* *- Rp 100,000,000* *- 1 Paket* *- 12 Bulan* *150*	**100.000.000**						
X	XX	1	206		***3***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**72 point**	***1.349.000.000***						**X**
X	XX	1	206	1	3,1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor yang Disediakan (paket)	 - 6 orang Rp80.000.000 -1 paket - 12 bulan 1 paket	80.000.000						**X**

X	XX	1	206	2	3,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	 - 5 orang Rp 414.000.000 - 1 paket - 12 bulan 5 paket	414.000.000						
X	XX	1	206	4	3,3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	 - 120 pegawai Rp350.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 paket	350.000.000						**X**
X	XX	1	206	5	3,4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	 - 5 orang Rp70.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 paket	70.000.000						**X**
X	XX	1	206	6	3,5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	 - 5 orang Rp35.000.000 - 1 paket - 12 bulan 3 dokumen	35.000.000						**X**
X	XX	1	206	9	3,6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	 - 100 orang Rp400.000.000 - 1 paket - 12 bulan 100 laporan	400.000.000						**X**

X	XX	1	207		***4***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**70**	**300.000.000**							**X**
X	XX	1	207	5	4,1	Pengadaan Mebel	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	 - 5 orang Rp200.000.000 - 1 paket - 12 bulan 1 paket	200.000.000							**X**
X	XX	1	207	6	4,2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	 - 5 orang Rp100.000.000 - 1 paket - 12 bulan 4 unit	100.000.000							**X**
X	XX	1	208		**5**	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***71 point***	***2.300.000.000***							**X**
X	XX	1	208	2	5,1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output** : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	 - 3 orang Rp800.000.000 - 5 bidang, 1 sekretariat, 1 UPTD, BBI dan 2 BPP - 12 bulan 36	*800.000.000*							**X**
X	XX	1	208	4	5,2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	 - 7 orang Rp1.500.000.000 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan (kebersihan, keamanan, Naban)	1.500.000.000							**X**

X	XX	1	209		*6*	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	72	***1.740.000.000***						**X**
X	XX	1	209	2	6,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	 - 5 orang Rp 941.000.000 - 1 paket - 12 bulan 99	941.000.000						**X**
X	XX	1	209	6	6,2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	 - 5 orang Rp199.000.000 - 1 paket - 12 bulan 9 unit	199.000.000						**X**
X	XX	1	209	9	6,3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	 - 5 orang Rp600.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 unit	600.000.000						**X**
2	9	3			**II**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)**	0,05%	**485.000.000**						**X**
2	9	3	202		***7***	***Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota***	***Persentase CPPD***	***10%***	***335.000.000***						**X**
2	9	3	202	3	7,1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	**Input** : - SDM - Dana	 - 15 orang Rp 335.000.000	335.000.000						**X**

							- Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (ton)	- 1 paket - 12 bulan 20 ton							
2	9	3	204		***8***	***Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;***	**Peningkatan konsumsi pangan umbi2an**	43 kkal/perkapita/hari	**150.000.000**						**X**
2	9	3	204	2	8,1	Pemberdayaaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	 - 3 orang Rp150.000.000 - 1 paket - 12 bulan 4 laporan	150.000.000						**X**
2	9	4			**III**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase penanganan daerah rawan pangan**	**55%**	**35.000.000**						**X**
2	9	4	201		9	***Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan***	***Jumlah Peta Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pangan***	***1 dokumen***	35.000.000						**X**
2	9	4	201	1	9,1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (dokumen)	 - 3 orang Rp 35.000.000 - 1 paket - 12 bulan 1 dokumen	35.000.000						**X**
2	9	5			**IV**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman**	**89%**	**220.000.000**						**X**
2	9	5	201		**10**	***Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentasi jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa***	***89%***	**220.000.000**						**X**
2	9	5	201	5	*10,1*	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana	 - 3 orang Rp 220.000.000 - 1 paket	220.000.000						**X**

						Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	- Waktu **Output :** Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	- 12 bulan 2 dokumen								
3	25	3			**V**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	4300 ton	***525.000.000***							**X**
3	25	3	202		***11***	***Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)***	***60 kelompok***	***200.000.000***							**X**
3	25	3	202	1	*11,1*	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (orang)	 - 5 orang Rp100.000.000 - 1 paket - 12 bulan 50	100.000.000							**X**
3	25	3	202	2	*11,2*	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	 - 5 orang Rp100.000.000 - 1 paket - 12 bulan 6 kelompok	100.000.000							**X**
3	25	3	203		***12***	***Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)***	***Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional***	100%	***325.000.000***							**X**
3	25	3	203	2	*12,1*	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)	 - 5 orang Rp 325.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2	325.000.000							**X**
3	25	4			**VI**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**	**289**	**1.780.000.000**							**X**
3	25	4	202		**13**	***Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil***	***Jumlah pembudidaya yang diberdayakan***	**100 pembudidaya**	**575.000.000**							**X**

3	25	4	202	2	*13,1*	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Input :** - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (kelompok)	 - 5 orang Rp50.000.000 - 1 paket - 12 bulan **5 kelompok**	**50.000.000**						**X**
3	25	4	202	4	*13,2*	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	**Input :** - SDM - Dana - Sarana Prasarana **Output :** Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan (kelompok)	 - 5 orang Rp 525.000.000 - 1 paket **2 kelompok**	**525.000.000**						**X**
3	25	4	204		**14**	***Pengelolaan Pembudidayaan Ikan***	***Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan***	**2 jenis**	***1.205.000.000***						**X**
3	25	4	204	1	*14,1*	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Input :** - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	 - 5 orang Rp55.000.000 - 1 paket - 12 bulan 12 dokumen	55.000.000						**X**
3	25	4	204	2	*14,2*	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Input :** - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	 - 5 orang Rp1.100.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 unit	1.100.000.000						
3	25	4	204	6	*14,3*	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan	**Input :** - SDM - Dana	 - 5 orang Rp50.000.000	50.000.000						**X**

						Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	- Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi (Ha)	- 1 paket - 12 bulan 1.8 Ha								
3	27	2			**VII**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase Sarana Pertanian yang tersedia***	20%	**1.299.981.600**							**X**
3	27	2	201		***15***	***Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian***	***Persentase pemanfaatan /penggunaan sarana pertanian***	***100%***	***1.199.981.600***							**X**
3	27	2	201	1	*15,1*	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	 - 4 orang Rp 699.995..000 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan	699.995..000						**X**
3	27	2	201	2	*15,2*	*Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	 - 4 orang Rp 499.986.600 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan	499.986.600							**X**
3	27	2	203		***16***	***Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)***	225 ekor	***100.000.000***							**X**
3	27	2	203	1	*16,1*	*Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil*	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :**	 - 7 orang 100.000.000 - 1 paket - 12 bulan	100.000.000							**X**

							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	2 laporan							
3	27	3			**VIII**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia**	75%	**179.993.500**						**X**
3	27	3	201		***17***	***Pengembangan Prasarana Pertanian***	***Jumlah Prasarana Pertanian***	4 unit	**179.993.500**						**X**
3	27	3	201	1	*17,1*	*Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B*	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (dokumen)	- 3 orang Rp 179.993.500 - 1 paket - 12 bulan 1 dokumen	179.993.500						**X**
3	27	4			**IX**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani**	***70%***	**600.000.000**						**X**
3	27	4	201		***18***	***Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota***	***Jumlah hewan yang dilayani (ekor)***	3300	**400.000.000**						**X**
3	27	4	201	1	*18,1*	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** *Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan)*	- 10 orang Rp 400.000.000 - 1 paket - 12 bulan 4	400.000.000						**X**
3	27	4	204		***19***	***Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner***	**Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmavet (unit)**	**22 unit**	**200.000.000**						**X**

3	27	4	204	2	*19,1*	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (laporan)	 - 4 orang Rp200.000.000 - 1 paket - 12 bulan 4	200.000.000							**X**
3	27	5			**X**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian**	**50%**	**50.000.000**							**X**
3	27	5	201			**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Luasan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	300 Ha	**50.000.000**							**X**
3	27	5	201	1		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	**Input :** **- SDM** **- Dana** **- Sarana Prasarana** **- Waktu** **Output :** Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan (Ha)	 - 4 Orang Rp 50.000.000 - 1 paket - 12 bulan 300 Ha	50.000.000							**X**
3	27	7			**VI**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani**	**45%**	**635.000.000**							**X**
3	27	7	201		***20***	***Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian***	***Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)***	***900 Laku (latihan dan kunjungan)***	***635.000.000***							**X**
3	27	7	201	3	*20,1*	*Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)	 - 25 orang Rp 335.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 unit	*335.000.000*							**X**
3	27	7	201	2	*20,2*	*Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa*	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :**	 - 60 orang Rp 275.000.000 - 1 paket - 12 bulan	275.000.000							**X**

							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	6 kelompok							
3	27	7	201	5	20,3	*Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota*	**Input** : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Sekolah Lapang Kelompok tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit)	 - 60 orang Rp40.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 Unit	40.000.000							**X**
UPTD RUMAH POTONG HEWAN (RPH)							**Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia**									
3	27	3			**VIII**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Jumlah Prasarana yang dibangun / direhab (unit)***	75%	**950.000.000**							**X**
3	27	3	202		***17***	***Pembangunan Prasarana Pertanian***		***2 unit***	***950.000.000***							**X**
3	27	3	202	7	*20,3*	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan*	**Input :** - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu **Output :** Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	 - 10 orang Rp950.000.000 - 1 paket - 12 bulan 1 unit	950.000.000							**X**
									27. 448.975.100							

BAB V. INOVASI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka peningkatan kualitas Renja dan kualitas pembangunan serta keselarasan dengan inovasi yang akan dicantumlkan dalam RKPD Kota Balikpapan, maka DInas Pangan Pertanian dan Perikanan memiliki beberapa inovasi sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini :

DAFTAR INOVASI

DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	JUDUL INOVASI	NAMA INOVASI	PENGGAGAS	TAHUN	KETERANGAN
1.	Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Petugas Pembibitan	-	Zulkifli Prawirasaputra, S.Pi	2014	PIM IV / KKP
2.	Pembuatan Pakan Ikan Alternatif	Pa'Ikal	Subadi, S.ST	2015	PIM IV
3.	Paranet Solusi Pelindung Intimidasi Hama Terhadap Sayuran dan Ekosistem Ramah Lingkungan	Paranet Spider	Dwi Handono Suno	2015	PIM IV
4.	Menuju Kelurahan Swasembada Pangan Melalui Program One Day One Rice Di Kelurahan Teritip	-	Ir. M. Yosmianto, M.Si	2015	PIM II
5.	Surat Permohonan Sertifikat Veteriner On Line	SUPER SEVEN	drh. M. Bisri	2015	PIM IV
6.	Sistem Aplikasi Perjalanan Dinas	SIAPEDIS	Jumariani	2016	PIM IV
7.	Satu Mutu, Satu Pintu, Satu Harga Bokar (Bahan Olah Karet Rakyat)	SATU-SATU SAHARGA BOKAR	Mujito	2017	PIM III
8.	Asosiasi Cinta Singkong	ACIKO	Hanna S Rahayu, S.Pi	2018	PIM IV
9.	Petani untuk Lada dan Lingkungan Sehat dengan Bio Fungisida	Pull Sehat dengan BioF	Abdul Wahab, SP	2018	PIM IV
10.	Klinik Keliling Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	KLINIK ReKAT	Sri Winaryanti, S.Pi	2019	PIM IV
11.	Pangan Keluarga Mandiri Terpadu	Pagar Mantep	Ir. Heria Prisni	2020	PIM II
12.	Kolam Pembudidayaan Ikan Kota	KOPIKO	M.Idrus, S.Kel	2020	PIM IV
13.	Kampanye kepada Masyarakat untuk tidak membuang2 makanan agar dihabiskan, diambil seperlunya	Makan_Cerdas	Dicky Hariyono, S.Pi	2020	PIM IV
14	Sistem Pelaporan Pupuk Bersubsidi Kota Balikpapan	SILAPUBER Kota Balikpapan	Sri Ernawaty, SP	2020	PIM IV
15.	Pangan Lokal Kuliner di Era Milenial	AKALKU MILENIAL	Dharmawaty, S.Pt	2021	PIM IV
16.	Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan hewan	SIPKAWAN	Intan Aptri Ranti	2021	PIM IV

Rencana Inovasi Tahun 2024

No.	Bidang	Nama Inovasi	Keterangan
1	Perikanan	BU AYI AYU	BUdidAYa Ikan hAruan dan papuYU (Gabus/Haruan dan Pepuyu/betok) Penebaran benih ikan lokal tsb ke perairan umum
2	Pertanian Tanaman Pangan	SI HANI	HilirisaSI HAsil PertaNIan (pengelolaan Pasca panen dan pemasaran Hasil pertanian)
3	Perkebunan	SI SISCA PADA RIANG	Pengelolaan Pasca Panen Lada (EfisienSI proseSIng paSCA PAnen LaDA, meRIca sahANG)
4	Ketahanan Pangan	ADA AKAL	ADA SNACK ADA PANGAN LOKAL

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026. Renja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala Pemerintahan Kota Balikpapan , baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024 yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalananya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

1. akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiataan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
2. penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan tahun 2024.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD Kota Balikpapan tahun 2024.

Balikpapan, 9 Agustus 2023
Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
Kota Balikpapan

Ir. Sri Wahjuningsih, M.AP

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Balikpapan
Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN						**26.498.975.100,00**							**28.355.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.640.000.000,00**							**16.915.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**15.640.000.000,00**							**16.915.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah*	-			**73 point**	**14.900.000.000,00**						-	**16.000.000.000,00**	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			73 Poin	14.900.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	16.000.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1120 Orang/bulan	14.900.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		16.000.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	*Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)*	-			**0,081 %**	**485.000.000,00**						-	**550.000.000,00**	
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase CPPD*	-			12 %	335.000.000,00			-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	350.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				22 Ton	335.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		350.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Peningkatan konsumsi pangan umbi2an*	-			45 kkal/perkapita/hari	150.000.000,00			-	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Laporan	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	*Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan*	-			**60 %**	**35.000.000,00**						-	**65.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah Peta Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pangan*	-			1 dokumen	35.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	65.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		65.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman***	-			**89 %**	**220.000.000,00**						-	**300.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentasi jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa*	-			89 %	220.000.000,00			-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	300.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				2 Dokumen	220.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		300.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**10.858.975.100,00**							**11.440.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**2.305.000.000,00**							**2.420.000.000,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	*Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)*	-			**4400 ton**	**525.000.000,00**						-	**825.000.000,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)*	-			62 Kelompok	200.000.000,00			-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	325.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				6 Kelompok	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		125.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional*	-			100 %	325.000.000,00			-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	500.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2 Layanan	325.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		500.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	*Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)*	-			**304 ton**	**1.780.000.000,00**						-	**1.595.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah pembudidaya yang diberdayakan*	-			120 pembudidaya	575.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	185.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				5 Kelompok	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		60.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				2 Kelompok	525.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		125.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan*	-			2 jenis	1.205.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	1.410.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	55.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		60.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	1.100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		1.300.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				130 Orang	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**8.553.975.100,00**							**9.020.000.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah*	-			**73 point**	**5.789.000.000,00**						-	**6.240.000.000,00**	
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			76 Poin	100.000.000,00			-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				150 Paket	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			73 Poin	1.349.000.000,00			-	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	1.530.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		100.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	414.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		450.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		400.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	70.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		95.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		35.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		450.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			71 Poin	300.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	400.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			73 Poin	2.300.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	2.560.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	800.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		960.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		1.600.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			73 Poin	1.740.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	1.750.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				99 Unit	941.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		800.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	199.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		225.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		725.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	*Persentase Sarana Pertanian yang tersedia*	-			**25 %**	**1.299.981.600,00**						-	**1.200.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Pemanfaatan/penggunaan sarana pertanian*	-			100 %	1.199.981.600,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				3 Laporan	699.995.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		850.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	499.986.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		150.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)*	-			275 ekor	100.000.000,00			-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				2 Laporan	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	*Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia*	-			**85 %**	**179.993.500,00**						-	**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian*	-			4 unit	179.993.500,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	179.993.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang tertayani***	-			**75 %**	**600.000.000,00**						-	**750.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah hewan yang dilayani (ekor)*	-			3350 ekor	400.000.000,00			-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	550.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				4 Laporan	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		550.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmavet (unit)*	-			24 UPPH	200.000.000,00			-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				4 Laporan	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	*Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)*	-			**50 %**	**50.000.000,00**						-	**75.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (hektar)*	-			300 hektar	50.000.000,00			-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	75.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				300 Ha	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		75.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani***	-			**50 %**	**635.000.000,00**						-	**555.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)*	-			1000 LAKU	635.000.000,00			-	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	555.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Unit	275.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		150.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				2 Unit	320.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		350.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				2 Unit	40.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		55.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		UPTD RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN						**950.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**950.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**950.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	*Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia*	-			**85 %**	**950.000.000,00**						-	**1.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dibangun / direhab (unit)	-			2 unit	950.000.000,00			-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	1.000.000.000,00	UPTD RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	950.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		1.000.000.000,00	UPTD RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	JUMLAH							**27.448.975.100,00**							**25.355.000.000,00**	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERDAGANGAN
KOTA BALIKPAPAN

2024

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.3.1 Maksud 2
1.3.2 Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II 4
HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan 33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 47
BAB III 48
TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 48
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan 51
3.3 Program dan Kegiatan 52
BAB IV 65
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 65
BAB V 69
INOVASI PERANGKAT DAERAH 69
BAB VI 71
PENUTUP 71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunandalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rencana Kerja disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PerdaganganKota Balikpapan tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dimana program dan kegiatan dalam Renja Perangkat daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 8Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

13. Peraturan Wali Kota Kota Balikpapan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026

14. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan dalam Perangkat Daerah serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan tahun 2024;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022 Dinas Perdagangan Kota Balikpapan melaksanakan 1 urusan, 7 program dan 21 kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Lembar : 1

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	**01**	**01**	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**84,00**		**76**	**77,45**	**101,91%**		**77**	**92,2%**	**Nilai IKM = 77,45, masuk dalam kategori baik**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80**	**66,23**	**4**	**3,75**	**93,75%**		**70**	**87,5%**	**Nilai Evaluasi LKJIP Tahun 2021=69,98, Tahun 2020=66,23**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan			**1**	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja			2	**2,00**	**100,00%**		**2**	**0,0%**	tercapai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Lembar : 2

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**88**		**80**	**77,44**	**96,80%**		**77**	**88,0%**	**tidak tercapai karena sarana ruangan kantor subbag keuangan sempit, tidak nyaman bagi pengguna layanan**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN			**26**	**26,00**	**100,00%**		**26**	**0,0%**	tercapai
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuanganSKPD			12	**16,00**	**133,33%**		**16**	**0,0%**	tercapai
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntansi dengan BPKD			4	**4,00**	**100,00%**		**4**	**0,0%**	tercapai
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan			2	**2,00**	**100,00%**		**2**	**0,0%**	tercapai
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Se mesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan			**24**	**24,00**	**100,00%**		**24**	**0,0%**	tercapai
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan realisasi dan prognosis anggaran			13	**13,00**	**100,00%**		**13**	**0,0%**	tercapai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

Lembar : 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**78**		**70**	**77,06**	**110,09%**		**77**	**98,8%**	**tercapai**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD			2	**2,00**	**100,00%**		**2**	**0,0%**	tercapai
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan inventaris BMD			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Kondisi BMD			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen kartu inventaris BMD			**14**	**14,00**	**100,00%**		**14**	**0,0%**	tercapai
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD			2	**2,00**	**100,00%**		**2**	**0,0%**	tercapai
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen penatausahaan BMD			**2**	**2,00**	**100,00%**		**2**	**0,0%**	tercapai
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen pemanfaatan BMD			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

Lembar : 4

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**83**		**75**	**77,25**	**103,00%**		**77**	**93,1%**	**tercapai**
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai			6	**4,00**	**66,67%**		**4**	**0,0%**	Pengadaan mesin absensi di 4 UPTD Pasar yang dianggarkan di sub kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada APBD Perubahan 2022
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya			**90**	**0,00**	**0,00%**		**0**	**0,0%**	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Kepegawaian			**1**						Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian			**1**						Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP			**1**						Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek			**15**	**15,00**	**100,00%**		**15**	**0,0%**	Pengadaan bimtek bagi fungsional penera dan pengawas kemetrologian serta bimtek bagi jajaran UPTD yang dianggarkan di bidang dan UPTD

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

Lembar : 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**88**		**80**	**77,25**	**96,56%**		**77**	**87,8%**	**tidak tercapai**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor			10	**10,00**	**100,00%**		**10**	**0,0%**	tercapai
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor			8	**8,00**	**100,00%**		**8**	**0,0%**	tercapai
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga			8	**11,00**	**137,50%**		**11**	**0,0%**	Bantuan CSR dari BRI dan swasta berupa komputer (5 unit), meja, lemari 3 set, kursi, papan nama
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor			3	**3,00**	**100,00%**		**3**	**0,0%**	tercapai
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan			15	**38,00**	**253,33%**		**38**	**0,0%**	realisasi keuangan menyesuaikan dengan volume belanja dari masing masing jenisbarang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			**2**	**2,00**	**100,00%**		**2**	**0,0%**	tercapai
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman			100	**100,00**	**100,00%**		**100**	**0,0%**	Tamu asal dari Pinrang, Enrekang, Kukar
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah			**30**	**42,00**	**140,00%**		**42**	**0,0%**	Indikator tercapai sesuai target
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			**1**						tercapai
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE			**1**						tercapai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

Lembar : 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**78**		**70**	**77,44**	**110,63%**		**77**	**99,3%**	**Terdapat pergantian indikator dan target capaian sehingga sampai dengan TW III tidak dapat diukur dan direncanakan terealisasi dengan indikator dan target yang baru di TW IV**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas			5				**0**	**0,0%**	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai
	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel			5	**5,00**	**100,00%**		**5**	**0,0%**	Bantuan CSR dari BRI dan swasta berupa komputer (5 unit), meja, lemari 3 set, kursi, papan nama
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya			1	**0,00**			**0**	**0,0%**	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya			2	**0,00**			**0**	**0,0%**	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud			4	**0,00**			**0**	**0,0%**	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya			5	**0,00**			**0**	**0,0%**	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			3	**0,00**			**0**	**0,0%**	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Lembar : 7

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**88**		**80**	**77,81**	**97,26%**		**78**	**88,4%**	**tidak tercapai**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat			2	**1,00**	**50,00%**		**1**	**0,0%**	pengadaan materai
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			25	**25,00**	**100,00%**		**25**	**0,0%**	realisasi keuangan menyesuaikan dengan volume pemakaian pada rekening jasa komunikasi dan sumberdaya air
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan perlengkapan kantor			4	**0,00**			**0**	**0,0%**	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan gedung kantor yang dibersihkan			1.415	**1.415,00**	**100,00%**		**1415**	**0,0%**	tercapai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

Lembar : 8

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78**		**70**	**77,91**	**111,30%**		**78**	**99,9%**	**tercapai**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara			40	**23,00**	**57,50%**		**23**	**0,0%**	pemeliharaan kendataan sesuai jumlah kendaraan perorangan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara			10	**8,00**	**80,00%**		**8**	**0,0%**	pemeliharaan kendaraan sesuai jumlah kendaraan operasional
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel			4	**0,00**			**0**	**0,0%**	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			5	**6,00**	**120,00%**		**6**	**0,0%**	tercapai
				Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara			2	**2,00**	**100,00%**		**2**	**0,0%**	pemeliharaan kantor dinas dan UPTD Metrologi
				Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			1	**2,00**	**200,00%**		**2**	**0,0%**	pemeliharaan jaringan listrik pasar pandansari dan pemeliharaan parkir kantor Dinas
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya			3	**0,00**			**0**	**0,0%**	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah jenis pemeliharaan/rehabilitasi tanah yang dilakukan			2	**0,00**			**0**	**0,0%**	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Lembar : 9

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase pelaku usaha yang telah diverifikasi dan memperoleh rekomendasi**	**75**		**50**	**35,06**	**70,13%**		**35**	**46,8%**	**Dari 77 pengajuan lewat OSS, 27 yang lolos verifikasi, 12 ditolak, 38 butuh perbaikan**
				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan**	**75**		**50**	**0,00**	**0,00%**		**0**	**0,0%**	**Karena tergolong resiko rendah, pelaku usaha yang mengurus izin langsung ke OSS tanpa verifikasi dari Disdag**
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang difasilitasi melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			5,00	**0,00**			**0**	**0,0%**	Karena tergolong resiko rendah, pelaku usaha yang mengurus izin langsung ke OSS tanpa verifikasi dari Disdag
				Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**Persentase gudang yang mempunyai TDG**	**63**		**43**	**44,76**	**104,10%**		**45**	**71,1%**	**tercapai**
				Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase rekomendasi penerbitan TDG			5	**0,00**	**0,00%**		**0**	**0,0%**	Disdag tidak menerbitkan rekomendasi, hanya melakukan verifikasi melalui OSS

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Lembar : 10

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	**Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan**	**100**		**100**	**0,00**	**0,00%**		**0**	**0,0%**	**Disdag tidak menerbitkan rekomendasi, hanya melakukan verifikasi melalui OSS**
				Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C			20	**19,00**	**95,00%**		**19**	**0,0%**	Tidak mencapai target karena masih ada 12 dokumen pengajuan yang perlu perbaikan, 6 ditolak karena tidak sesuai ketentuan, 19 yang lolos verifikasi
				Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab/kota**			**100**	**0,00**	**0,00%**		**0**	**0,0%**	**Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022, kewenangan ada di Prov. Kaltim**
				Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat kota			2,00	**0,00**	**0,00%**		**0**	**0,0%**	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022, kewenangan ada di Prov. Kaltim

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Lembar : 11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	**Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu**	**100**		**100**	**100**	**100,00%**		**100**	**100,0%**	**tercapai**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	jumlah SKA yang terbit sesuai ketentuan			4.129	**3.450**	**83,56%**		**3450**	**0,0%**	tidak tercapai karena Salah satu komoditi yg menggunakan SKA adalah CPO dan Kepiting, Tahun 2022 sampai saat ini ada pembatasan ekspor untuk CPO, sehingga ekspor CPO yg menggunakan SKA berkurang. Selain itu ada kebijakan dari Kementerian Kelautan sekitar bulan Oktober bahwa standar mutu komoditi Kepiting ada perubahan, sehingga ekspor produk perikanan dari bulan oktober sampai sekarang berkurang krn komoditi yg ada tidak memenuhi standar.

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Lembar : 12

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola**	**93**		**80,00**	**80,00**	**100,00%**		**80**	**86,0%**	**tercapai**
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**96**		**56**	**70,83**	**126,49%**		**71**	**73,8%**	**tercapai**
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan sarana distribusi perdagangan			5	**7**	**140,00%**		**7**	**0,0%**	tercapai
					Jumlah sarana dan prasarana penunjang sarana distribusi yang dibangun dan direvitalisasi			9	**3**	**33,33%**		**3**	**0,0%**	tidak tercapai karena anggaran difokuskan untuk revitalisasi pasar
					Jumlah sarana dan prasarana penunjang sarana distribusi yang dipelihara			11	**6**	**54,54%**		**6**	**0,0%**	tidak tercapai karena anggaran difokuskan untuk revitalisasi pasar
					Jumlah sarana distribusi yang dibangun dan direvitalisasi			3	**1,00**	**33,33%**		**1**	**0,0%**	perbaikan dan penataan pasar pandansari telah dilaksanakan, untuk revitalisasi pasar basah klandasan tertunda

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Lembar : 13

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan**	**100**		**100**	**100,00**	**100,00%**		**100**	**100,0%**	**tercapai**
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina			4	**4,00**	**100,00%**		**4**	**0,0%**	tercapai
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan			2	**2,00**	**100,00%**		**2**	**0,0%**	tercapai
					Tersedia nya data jumlah pedagang			16	**16,00**	**100,00%**		**16**	**0,0%**	tercapai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

Lembar : 14

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu**	**5**		**5,8**	**10,61**	**54,67%**		**10,61**	**47,13%**	**tidak tercapai karena kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor misal kenaikan BBM**
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah dokumen data stok barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**12**		**12**	**12,00**	**100,00%**		**12**	**100,0%**	**tercapai**
				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Partisipasi Pasar Lelang yang di ikuti			2	**1,00**	**50,00%**		**1**	**0,0%**	tidak tercapai karena pasar lelang lebih banyak diadakan di Indonesia bagian barat sehingga kurang tepat sasaran jika diikuti
					Tersedianya laporan hasil koordinasi terkait kebutuhan pokok dan barang penting			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai
				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya laporan hasil koordinasi terkait aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai
				Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	penyusunan neraca pangan yang dihasilkan			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai
					Tersedianya dokumen hasil monitoring			45	**47,00**	**104,44%**		**47**	**0,0%**	tercapai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Lembar : 15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan**	**78**		**56**	**27,27**	**48,70%**		**27**	**35,0%**	**tidak tercapai karena kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor misal kenaikan BBM**
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu)	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem	Jumlah dokumen hasil pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi			4	**4,00**	**100,00%**		**4**	**0,0%**	lamin etam, sp2kp, sahabat.co, sipkaltim
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pasar khusus			1	**3,00**	**300,00%**		**3**	**0,0%**	tercapai
		Jumlah Laporan hasil pemantauan dan monitoring harga dan stok operasi pasar reguler yang dilaksanakan			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

Lembar : 16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**persentase pupuk bersubsidi yang tersalurkan**	**31**		**28**	**13,00**	**46,43%**		**13**	**41,9%**	**tidak tercapai karena keluarnya Permentan 10 Tahun 2022 yang mengakomidir penyaluran pupuk bersubsidi hanya untuk sub sektor tertentu**
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	jumlah dokumen pengajuan perizinan yang diperiksa			1	**0,00**	**0,00%**		**0**	**0,0%**	tidak memiliki kewenangan memeriksa dokumen perizinan
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Penyaluran dan Penggunaaan Pupuk dan pestisida bersubsidi			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

Lembar : 17

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Nilai ekspor bersih non migas**	**2.050**		**1.175**	**4.029,26**	**342,92%**		**4029**	**196,5%**	**tercapai**
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk**	**100**		**20**	**86,67**	**433,33%**		**87**	**86,7%**	**Target indikator merupakan penambahan dari nilai awal, bukan akumulasi ; realisasi melebihi target**
				Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	kuantitas pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan produk			4	**5,00**	**125,00%**		**5**	**0,0%**	Pelaku usaha yang mendapat pembinaan pengembangan produk Juni : CV. Azra Sentosa Jaya (DDS), BDS Snack (DDS), CV. Yoi Akua Kulture (Rumah Produksi) September : Bahalap (Ditampilkan di House Trade Amsterdam), Cetak Godong (Ditampilkan di House Trade Amsterdam)
				Pameran Dagang Nasional	Kuantitas pelaku usaha yang memperoleh fasillitas pameran dagang nasional			4	**9,00**	**225,00%**		**9**	**0,0%**	Agustus : Bahalap (ICE Apeksi di Padang) September : Bahalap (Tong Tong Fair di Den Haag Belanda), Cetak Godong (Tong Tong Fair di Den Haag Belanda)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Lembar : 18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Pameran Dagang Lokal	Kuantitas pelaku usaha yang memperoleh fasillitas pameran dagang lokal			4	**5,00**	**125,00%**		**5**	**0,0%**	Agustus-September : Eat Me Idn (UMKM Bayan Fair), Bawang Hitam Nikimie (UMKM Bayan Fair), Bunaga (UMKM Bayan Fair), Wedang Dayak (UMKM Bayan Fair), Deli Koffie Indonesia (UMKM Bayan Fair)
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kuantitas pelaku usaha yang memperoleh fasillitas misi dagang			4	**4,00**	**100,00%**		**4**	**0,0%**	September : Amiroh Abon Ikan Asin Layur, Triangle Brownies, Maximalfood
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor			1	**0,00**	**0,00%**		**0**	**0,0%**	sub kegiatan ini tidak dianggarkan di DPA TA.200
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang potensial ekspor			3	**13,00**	**433,33%**		**13**	**0,0%**	Maret : Amiroh Abon Ikan Asin Layur, Yoi Akuakultur, Kampoeng Timur Mei : Cake Salak Kilo, Bahalap September : BDS Snack, Batik Tenun Vi, Batik Shaho

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Lembar : 19

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	76		70	**68,96**	**98,51%**		**69**	**90,7%**	tercapai
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	76		70	**68,96**	**98,51%**		**69**	**90,7%**	tercapai
				Pengawasan/Penyuluh an Metrologi Legal	Jumlah pengawasan metrologi legal			70	**66,00**	**94,29%**		**66**	**0,0%**	tidak tercapai karena kurangnya personil pengawasan metrologi legal
					Persentase kesesuaian BDKT(Barang dalam keadaan terbungkus) yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku			16	**31,76**	**198,50%**		**32**	**0,0%**	tercapai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

Lembar : 20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase pelaku usaha binaan yang meningkat omsetnya**	**80**		**60**	**76,92**	**128,21%**		**77**	**96,2%**	**tercapai**
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran**	**100**		**20**	**76,92**	**384,60%**		**77**	**76,9%**	**Agustus : ICE Apeksi Agustus – Sept : Festival UMKM Bayan Fair September : Tong Tong Fair, Kemitraan UMKM bersama Shopee, Indomaret dan Sarinah**
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah promosi penggunaan produk dalam negeri			4	**8,00**	**200,00%**		**8**	**0,0%**	tercapai
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam rangka pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri			4	**10,00**	**250,00%**		**10**	**0,0%**	tercapai
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah fasilitas sistem dan jaringan Informasi yang tersedia dan dipelihara			2	**0,00**	**0,00%**		**0**	**0,0%**	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Jumlah produk dalam negeri yang terdaftar dalam sistem dan jaringan informasi perdagangan			2	**0,00**	**0,00%**		**0**	**0,0%**	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Lembar : 21

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (UPTD Pasar Wilayah I)	**persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola**	**93,00**		**80,00**	**80,00**	**100,00%**		**80**	**86,0%**	**tercapai**
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**96**		**56**	**70,83**	**126,49%**		**71**	**73,8%**	**tercapai**
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola			5	**5,00**	**100,00%**		**5**	**0,0%**	tercapai
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (UPTD Pasar Wilayah II)	**persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola**	**93,00**		**80,00**	**80,00**	**100,00%**		**80**	**86,0%**	**tercapai**
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**96**		**56**	**70,83**	**126,49%**		**71**	**73,8%**	**tercapai**
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola			1	**1,00**	**100,00%**		**1**	**0,0%**	tercapai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Lembar : 22

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (UPTD Pasar Wilayah III)	**persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola**	**93,00**		**80,00**	**80,00**	**100,00%**		**80**	**86,0%**	**tercapai**
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**96**		**56**	**70,83**	**126,49%**		**71**	**73,8%**	**tercapai**
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola			4	**4,00**	**100,00%**		**4**	**0,0%**	tercapai
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (UPTD Pasar Wilayah IV)	**persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola**	**93,00**		**80,00**	**80,00**	**100,00%**		**80**	**86,0%**	**tercapai**
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**96**		**56**	**70,83**	**126,49%**		**71**	**73,8%**	**tercapai**
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola			2	**2,00**	**100,00%**		**2**	**0,0%**	tercapai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Lembar : 23

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**76**		**70**	**68,96**	**98,51%**		**69**	**90,7%**	**tidak tercapai karena kurangnya kesadaran pedagang pasar dalam melakukan tera/tera ulang**
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan**	**76**		**70**	**68,96**	**98,51%**		**69**	**90,7%**	**tidak tercapai karena kurangnya kesadaran pedagang pasar dalam melakukan tera/tera ulang**
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan			4.500	**3.103,00**	**68,96%**		**3103**	**0,0%**	tidak tercapai karena kurangnya kesadaran pedagang pasar dalam melakukan tera/tera ulang
					Jumlah UTTP yang bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan			4.500	**3.103,00**	**68,96%**		**3103**	**0,0%**	tidak tercapai karena kurangnya kesadaran pedagang pasar dalam melakukan tera/tera ulang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di Bidang Perdagangan yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Mekanisme Kelembagaan

   Kelembagaan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2. Mekanisme Pelaksanaan

   Dengan mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

   Peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional dengan bersendikan:

   a. Kesederhanaan

      Yang dimaksud dengan kesederhanaan meliputi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

   b. Kejelasan dan kepastian

      Kejelasan dan kepastian disini adalah hal-hal yang berkaitan

      dengan :

1. Prosedur atau tata cara pelayanan
2. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif
3. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum
4. Rincian biaya/tariff pelayanan umum dan tatacara pembayarannya
5. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum
7. Hak dan kewajiban baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan umum bersasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan / kelengkapannya, sebagai alat untruk memastikan pemprosesan pelayanan umum
8. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat

c. Keamanan

Keamanan memiliki arti suatu proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan kepastian hokum

d. Keterbukaan

Keterbukaan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

e. Efisiensi

1. Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan.
2. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan, persyaratan dan satuan kerja / instansi pemerintah lain yang terkait.

f. Ekonomis

1. Dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :
2. Nilai barang dan atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran.
3. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

g. Keadilan

Dimaksud dengan sendi keadilan disini adalah keadilan yang merata, dalam arti cakupan / jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.

h. Ketetapan waktu

Yang dimaksud dengan ketetapan waktu disini adalah dalam pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

3. Hasil Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dinas Perdagangan Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan dalam penyusunan Perencanaan, antara Lain :

a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah terkait urusan pemerintahan bidang perdagangan;

b. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

c. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Indikator Kinerja Individu dan Rencana Aksi;

e. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

f. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran ;

g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;

h. Dokumen Rencana Kerja ;

i. Evaluasi pelaksanaan perencanaan melalui rapat kerja dan koordinasi meliputi tingkat pusat, propinsi, dan kota/kabupaten.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2022-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan

Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/Standar Nasioanal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Pertumbuhan nilai ekspor non-migas	-	-	6,51%	6,52%	6,53%	6,54%	19,84%	N/A	6,53%	6,54%	
2	Persentase wajib tera yang melakukan tera/ tera ulang	-	-	78%	81%	84%	86%	69,19%	N/A	84%	86%	
3	Inflasi pangan bergejolak	-	-	(3 - 5)%	(3 - 5)%	(3 - 5)%	(3 - 5)%	5,81%	N/A	(3 - 5)%	(3 - 5)%	
4	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi	-	-	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	N/A	8,33%	8,33%	
5	Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	-	-	8,1%	8,7%	9,4%	10,2%	6,8%	N/A	9,4%	10,2%	
6	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	-	-	27,00	28,75	30,50	32,25	32,89	N/A	30,50	32,25	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kegiatan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penentuan isu strategis pada Renstra Tahun 2021-2026 OPD Perdagangan didasarkan atas sejumlah permasalahan utama yang berkembang pada bidang urusan perdagangan di Kota Balikpapan. Isu strategis tersebut berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh tugas dan fungsi OPD. Beberapa permasalahan dan hambatan diantaranya:

1. Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai dalam mengantisipasi isu – isu perdagangan
2. Sikap dan perilaku kerja Aparatur yang kurang profesional terhadap tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya
3. Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam kegiatan teknis operasional
4. Terbatasnya jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Kemetrologian serta Aparatur PPNS
5. Database perdagangan yang belum optimal
6. Belum adanya sistem informasi yang mendukung database (database masih manual)

7. Kondisi bangunan dan fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan kurangnya kenyamanan bagi pedagang dan pembeli
8. Belum maksimalnya penataan pedagang informal dan penyiapan sarana lokasinya mengakibatkan tata kelola pasar kurang baik
9. Tingkat keamanan, ketertiban, kebersihan sarana perdagangan yang sering kurang ditaati oleh pengguna layanan perdagangan
10. Realisasi retribusi pelayanan pasar masih dibawah target retribusi
11. Pelaku usaha sulit memahami informasi terkait ketentuan-ketentuan ekspor
12. kurangnya promosi yang dilakukan untuk mengembangkan ekspor
13. Masih terdapatnya pelaku usaha yang tidak memiliki ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
14. Minimnya pelaku usaha yang memiliki tanda daftar gudang, surat tanda pendaftaran waralaba (STPW), dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B, C
15. Ketersediaan stok dan harga bahan pokok yang sering terjadi kenaikan harga yang dipengaruhi oleh iklim,musim tanam dan hari besar keagamaan
16. Pencapaian target uji tera yang belum tercapai

Dalam rangka usaha meningkatkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Balikpapan perlu disusun rencana strategi yang berkorelasi dengan Visi dan 5 (lima) Misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Bahwa terkait hal tersebut, penyusunan strategi perlu mempertimbangkan faktor-faktor peluang yang merupakan pendorong dalam bentuk potensi/kekuatan dan kesempatan dan faktor-faktor tantangan yang merupakan hambatan dalam pencapaian visi dan misi OPD Dinas Perdagangan. Adapun faktor-faktor peluang dan faktor tantangan terdeskripsi sebagai berikut

Tantangan

Faktor Internal :

1. Belum tersedianya kompetensi pegawai di bidang pengelolaan pasar dan perdagangan.

2. Kurang maksimal sumber daya aparatur mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya.

3. Kurangnya sistem informasi berbasis teknologi dalam mengakomodir kebutuhan sistem perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan sarana perdagangan

4. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan seperti :

    a) Gedung kantor kurang memadai, hal ini ditinjau dari bangunan dan tata laya out kerja tiap-tiap bagian struktur organisasi,

    b) Jumlah kendaraan operasional masih kurang memadai terhadap sebaran jumlah pasar di Kota Balikpapan.

    c) Peralatan kantor di tiap-tiap UPTD kurang memadai berdasarkan jumlah ketersediaannya.

5. Data dan informasi dan pengarsipan berkas OPD kurang terkelola secara baik karena masih berbasis manual

6. Beberapa Pasar Rakyat kurang terkelola dan terpelihara secara baik ditinjau dari bangun, sarana dan prasana, kebersihan ketertiban dan keamanan pasar, TPS pasar dan utiliti pasar.

7. Potensi PAD dari retribusi pasar dan perdagangan kurang digali secara maksimal.

8. Monitoring dan pengawasan OPD terhadap kegiatan perdagangan kurang optimal.

9. Kurang optimalnya sinergisitas pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemantauan serta evaluasi terhadap bahan dagang konsumsi berbahaya bagi masyarakat.

10. Operasi penertiban pedagang informal tidak memberikan efek jera.

Faktor External :

1. Ketergantungan bahan pokok strategis terhadap daerah pemasok

2. Kurangnya potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan potensi unggulan

3. Daya saing pasar rakyat, toko, warung terhadap keberadaan pasar modern dan swalayan modern di Kota Balikpapan.

4. Masih kurang kesadaran pedagang terhadap kewajiban melakukan tera/tera ulang alat ukur

Peluang

Faktor Internal :

1. Dinas Perdagangan memiliki personal yang memiliki keahlian khusus yaitu Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, Analis Perdagangan dan Pengawas Perdagagan.
2. Adanya potensi dukungan anggaran Revitalisasi Pasar dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kot.
3. Kemitraan yang terjalin baik dengan stakeholder terkait.

Faktor External :

1. Adanya peluang kemitraan sektor perdagangan termasuk internasional dengan rencana beroperasinya Ibu Kota Negara di tahun 2024
2. Kota Balikpapan memiliki fasilitas bangunan Hotel dari bintang 5 hingga bintang 3 dan Guest House.
3. Kota Balikpapan memiliki sejumlah bangunan untuk kegiatan meeting, resepsi perkawinan dan multifungsi.
4. Kota Balikpapan terdapat sejumlah restaurant hingga rumah makan serta resto/café yang tersebar disetiap kawasan kota
5. Kota Balikpapan memiliki jasa penjualan tiket (travel) baik darat, laut dan udara.
6. Kota Balikpapan memiliki UMKM disetiap kecamatan.
4. Kota Balikpapan memiliki pasar dan swalayan modern yang berada pada kawasan perdagangan.
5. Tersedianya sejumlah pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, antara lain :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
2. Penyediaan infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan melalui revitalisasi pasar
3. Kesiapan Kota Balikpapan menghadapai Ibu Kota Negara (IKN) terkait pemenuhan kebutuhan pasokan bahan pokok dan barang penting

4. Pengembangan ekspor dan Peningkatan Promosi produk ekspor
5. Pengendalian Bahan Pokok Strategis
6. Pemetaan sebaran pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan gudang
7. Optimalisasi pengawasan pelaku usaha perdagangan
8. Penguatan dan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Perdagangan
9. Peningkatan PAD melalui Potensi Retribusi Pasar dan Perdagangan
10. Peningkatan Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar
11. Perlindungan Konsumen melalui pengawasan metrologi legal
12. Peningkatan tata kelola layanan kemetrologian

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.31

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Balikpapan

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*	*10*	*11*	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Balikpapan	**persentase pelaku usaha yang telah diverifikasi dan memperoleh rekomendasi**	65%	300.000.000	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Balikpapan	**persentase pelaku usaha yang telah diverifikasi dan memperoleh rekomendasi**	65%	300.000.000	
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Balikpapan	Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayanyang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	65%	150.000.000	**Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	Balikpapan	Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayanyang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	65%	150.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Balikpapan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Balikpapan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 dokumen	150.000.000	
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Balikpapan	Persentase gudang yang mempunyai TDG	53%	100.000.000	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Balikpapan	Persentase gudang yang mempunyai TDG	53%	100.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 dokumen	100.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*	*10*	*11*	
	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Balikpapan	Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan	100%	50.000.000	**Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	Balikpapan	Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan	100%	50.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Balikpapan	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Balikpapan	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 dokumen	50.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Balikpapan	**persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola**	87%	15.812.495.050	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Balikpapan	**persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola**	87%	25.230.095.050	
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	76%	9.312.495.050	**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Balikpapan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	76%	9.312.495.050	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	1 unit	8.612.495.050	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	1 unit	8.612.495.050	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 unit	700.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 unit	700.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*	*10*	*11*	
	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Balikpapan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan	100%	6.500.000.000	**Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Balikpapan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan	100%	15.917.600.000	Penambahan pagu untuk kebutuhan tenaga outsourcing keamanan dan kebersihan
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 dokumen	5.700.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 dokumen	15.117.600.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 dokumen	800.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 dokumen	800.000.000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Balikpapan	**persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu**	5,4%	748.125.000	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Balikpapan	**persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu**	5,4%	748.125.000	
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 laporan	458.125.000	**Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Balikpapan	jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 laporan	458.125.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Balikpapan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 laporan	370.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Balikpapan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 laporan	370.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Balikpapan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 laporan	13.125.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Balikpapan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 laporan	13.125.000	
	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Balikpapan	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 laporan	75.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Balikpapan	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 laporan	75.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*	*10*	*11*	
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan	67%	265.000.000	**Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Balikpapan	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan	67%	265.000.000	
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	265.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	265.000.000	
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	persentase pupuk bersubsidi yang tersalurkan	29%	25.000.000	**Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Balikpapan	persentase pupuk bersubsidi yang tersalurkan	29%	25.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 dokumen	25.000.000	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 dokumen	25.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*	*10*	*11*	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Balikpapan	**nilai ekspor bersih non migas**	1550 juta dollar	232.809.000	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Balikpapan	**nilai ekspor bersih non migas**	1550 juta dollar	232.809.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk	60%	232.809.000	**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Balikpapan	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk	60%	232.809.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	2 pelaku usaha	100.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	2 pelaku usaha	100.000.000	
	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4 pelaku usaha	132.809.000	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4 pelaku usaha	132.809.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Balikpapan**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	73%	682.500.000	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Balikpapan**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	73%	682.500.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Balikpapan	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	73%	682.500.000	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Balikpapan	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	73%	682.500.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Balikpapan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3600 unit	515.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Balikpapan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3600 unit	515.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 orang	167.500.000	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 orang	167.500.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*	*10*	*11*	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Balikpapan	**Persentase pelaku binaan yang meningkat omsetnya**	70%	275.000.000	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Balikpapan	**Persentase pelaku binaan yang meningkat omsetnya**	70%	275.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Balikpapan	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran	60%	275.000.000	**Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Balikpapan	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran	60%	275.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4 UMKM	200.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4 UMKM	200.000.000	
	Sub kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	75.000.000	Sub kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	75.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	80 Poin	16.362.685.000	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Balikpapan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	80 Poin	18.562.685.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	82 Nilai	11.600.000.000	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Balikpapan	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	82 Nilai	11.600.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/ bulan	11.600.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/ bulan	11.600.000.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	79 Nilai	81.000.000	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Balikpapan	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	79 Nilai	81.000.000	
	Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Balikpapan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	25.000.000	Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Balikpapan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	21.000.000	
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	56.000.000	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	60.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*	*10*	*11*	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	84 Nilai	1.272.500.000	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Balikpapan	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	84 Nilai	1.272.500.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	55.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	55.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	210.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	210.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	10.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	320.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	320.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	210.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	210.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	30.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	30.000.000	
	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	37.500.000	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	37.500.000	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	400.000.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	400.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*	*10*	*11*	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	74 Nilai	453.000.000	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Balikpapan	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	74 Nilai	453.000.000	
	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	120.000.000	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	120.000.000	
	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	6 unit	200.000.000	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	6 unit	200.000.000	
	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 unit	83.000.000	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 unit	83.000.000	
	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	50.000.000	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	50.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	84 Nilai	1.570.000.000	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Balikpapan	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	84 Nilai	3.770.000.000	pagu indikatif melebihi pagu renstra karena pengalihan tenaga bantu Sekretariat ke Outsourcing
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	780.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	780.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	780.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	2.987.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*	*10*	*11*	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	72 Nilai	1.386.185.000	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Balikpapan	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	72 Nilai	1.386.185.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	320.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	320.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	220.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	220.000.000	
	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Balikpapan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 unit	61.185.000	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Balikpapan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 unit	61.185.000	
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	152 unit	160.000.000	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	152 unit	160.000.000	
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	450.000.000	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	450.000.000	
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	175.000.000	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	175.000.000	
Jumlah					**34.413.614.050**	**Jumlah**				**46.031.214.050**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk Menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Perdagangan Kota Balikpapan tidak terdapat usulan Musrenbang.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin konsistensi pembangunan antar dokumen perencanaan dan menyamakan persepsi arah kebijakan pembangunan tingkat nasional dampai dengan daerah, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan melaksanakan telaahan Renstra pada Renstra K/L dan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini memiliki maksud agar konsistensi perencanaan yang dituangkan pada Renstra memiliki korelasi dan kesesuaian terhadap dokumen perencanaan diatasnya. Adapun hasil telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Hasil telaahan Renstra Kementerian/Lembaga adalah :

1. Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Dalam Negeri

   Arah kebijakan perdagangan dalam negeri dalam lima tahun ke depan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN 2021-2026 adalah adalah “meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan” melalui:

   a) Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan system logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal serta pemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah;

   b) Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif; serta

   c) Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal di pusat dan di daerah

2. 12 Strategi pembangunan perdagangan dalam negeri selama periode 2021-2026 adalah :

   a) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga, terutama melalui: (i) Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat terutama yang telah berumur di atas 25 tahun, rusak berat dan tidak layak digunakan; (ii) pengembangan rantai supply dingin (cold chain) terutama untuk mendukung distribusi barang yang mudah rusak (perishable) di pasar domestik; (iii) pengembangan sistem informasi perdagangan antar wilayah; (iv) pembangunan dan pengembangan pusat

distribusi propinsi; (v) pembangunan dan pengembangan pusat distribusi regional sebagai tulang punggung system distribusi bahan pokok nasional melalui pengembangan sistem distribusi yang terpadu dengan pusat distribusi propinsi di wilayahnya serta pusat distribusi regional lainnya; serta (vi) pengembangan gudang konvensional dan gudang dengan sistem resi gudang (SRG) yang dapat menunjang sistem distribusi nasional khususnya jika diintegrasikan dengan pusat distribusi propinsi yang ada

b) Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat) melalui pelaksanaan pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat, yang merupakan penyediaan dukungan non fisik untuk pengembangan pasar rakyat yang berkualitas, nyaman, bersih, dan sehat.

c) Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia melalui promosi produk unggulan daerah antar wilayah di Indonesia serta fasilitasi kerjasama dan penurunan hambatan perdagangan antar wilayah Indonesia.

d) Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah melalui pembinaan dan pelatihan, penataan dan peningkatan status pedagang informal, penciptaan pelaku usaha pemula di bidang perdagangan serta pengembangan sistem informasi potensi pasar domestik.

e) Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional yang lebih kondusif, terutama terkait dengan pembenahan prosedur perijinan usaha perdagangan dan penataan perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce)

f) Mendorong penggunaan produk domestik, antara lain melalui: (i) peningkatan proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar domestik; (ii) peningkatan tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri, serta (iii) peningkatan tingkat kesadaran produsen untuk menggunakan kandungan lokal yang lebih tinggi.

g) Meningkatkan perlindungan konsumen, terutama melalui: (i) pengembangan standardisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen; (ii) pemberdayaan konsumen; (iii) peningkatan efektivitas pengawasan barang / jasa dan tertib ukur, serta; (iv) penguatan kapasitas kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan lembaga perlindungan konsumen lainnya di Indonesia. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sangat strategis dalam pemberian perlindungan

kepada konsumen yang dirugikan seiring dengan meningkatnya perekonomian di wilayah kabupaten/kota dan perkembangan global.

h) Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten, baik untuk produk impor maupun produk domestik, untuk mendorong daya saing produk nasional, peningkatan citra kualitas produk ekspor Indonesia di pasar internasional, serta melindungi konsumen dalam negeri dari barang / jasa yang tidak sesuai standar.

i) Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasar domestik, dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok untuk menopang ketahanan pangan nasional.

j) Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga yang transparan.

k) Mendorong pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sistem resi gudang dan pasar lelang sebagai sarana alternatif pembiayaan, tunda jual dan peningkatan efisiensi distribusi.

l) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang perdagangan, dalam rangka: (i) peningkatan kualitas dan kuantitas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengadaan peralatan, tanah, gedung, dan sarana penunjang perdagangan lainnya; serta (ii) peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

3. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran, yaitu:

a) Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama

b) Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hub perdagangan internasional.

c) Meningkatkan diversifikasi produk ekspor

d) Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional

e) Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

f) Meningkatkan perlindungan konsumen

g) Meningkatkan efesiensi sistem distribusi & logistik

h) Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan.

4. Program rencana Strategis

Program kementerian yang terdiri dari sepuluh program utama, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan; (3) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan; (4) Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan; (5) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; (6) Peningkatan Perdagangan Luar Negeri; (7) Peningkatan Perlindungan Konsumen; (8) Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional; (9) Pengembangan Ekspor Nasional; dan (10) Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

5. Hasil Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah yang sangat luas dan didukung sumber daya alam *renewable* yang melimpah, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan melalui hilirisasi (sawit, karet, kayu, dan perikanan kelautan), terlebih Ibu Kota Nusantara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur menjadi tantangan maupun peluang bagi Provinsi Kalimantan Timur. Upaya yang dilakukan untuk menjawab isu strategis tersebut yaitu penetapan *Major Project* Sektor Indagkop & UKM Tahun 2024-2026 di bidang perdagangan adalah inisiasi pembentukan *food station* yang pengelolaannya oleh Perusahaan Daerah untuk mewujudkan ketahanan dan stabilitas stok dan harga barang kebutuhan pokok masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

Tujuan Rencana Strategis Dinas PerdaganganKota Balikpapan Tahun 2021-2026 merujuk kepada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan periode 2021-2026 “terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman”

Tujuan Dinas Perdagangan	Sasaran dinas perdagangan
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan	1. Meningkatnya nilai ekspor komoditas non migas

daerah	2. Meningkatnya perlindungan konsumen 3. Terjaganya stabilitas harga bahan pokok 4. Meningkatnya sarana distribusi yang representatif 5. Meningkatnya pelaku usaha yang tertib berusaha 6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai RPJMD.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah

- Pencapaian visi misi kepala daerah

Tabel 3.3
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Kota Balikpapan dengan Dinas Perdagangan

Visi	Misi	Tujuan Kota Balikpapan	Sasaran Kota Balikpapan	Tujuan Dinas Perdagangan	Sasaran Dinas Perdagangan
Terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman	Misi ke 5 yaitu Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya nilai ekspor komoditas non migas
					Meningkatnya perlindungan konsumen
					Terjaganya stabilitas harga bahan pokok
					Meningkatnya sarana distribusi yang representatif
					Meningkatnya pelaku usaha yang tertib berusaha
					Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perdagangan

Sumber data : RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	keterangan
Program	7	7	
Kegiatan	15	15	

c. Total kebutuhan dana / pagu indikatif

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	keterangan
APBD	43.406.798.000	37.316.733.960	

DAK Fisik/ Non Fisik/ bankue	-	-	
Total	43.406.798.000	37.316.733.960	

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kota Balikpapan selama dua tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERDAGANGAN						**42.628.357.200,00**							**37.255.414.960,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**42.628.357.200,00**							**37.255.414.960,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**42.628.357.200,00**							**37.255.414.960,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**-**			**80 Poin**	**16.440.564.200,00**						**-**	**16.704.500.000,00**	
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			84 Nilai	10.876.372.200,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	11.900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	10.876.372.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		11.900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			79 Nilai	246.320.500,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	59.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	59.440.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		59.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	186.880.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			84 Nilai	1.338.706.900,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	1.354.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	54.985.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	167.529.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	375.982.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		340.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	267.877.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		220.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	101.680.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		32.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	20.652.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		42.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*KM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			74 Nilai	178.997.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	650.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	156.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	22.997.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			84 Nilai	2.962.806.800,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	1.601.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		11.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	756.998.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	2.202.808.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		790.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			74 Nilai	837.360.800,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	1.140.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	249.895.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		330.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	162.054.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		240.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				152 Unit	125.650.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		170.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	299.761.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi***	**-**			**65 %**	**229.723.500,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*"Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan "*	-			65 %	79.723.500,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	79.723.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Persentase gudang yang mempunyai TDG*	-			53 %	100.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				3 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	*Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan*	-			100 %	50.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C														
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				5 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola***	**-**			**87 %**	**24.727.484.400,00**						**-**	**18.966.653.210,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya*	-			76 %	17.277.488.700,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	12.066.653.210,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	17.277.488.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		12.066.653.210,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan*	-			100 %	7.449.995.700,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	6.900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	6.999.995.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		5.900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	449.999.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		1.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu***	**-**			**5,4 %**	**559.135.500,00**						**-**	**650.343.750,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*	-			12 dokumen	203.290.500,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	385.343.750,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	203.290.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		385.343.750,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan*	-			67 %	355.845.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	265.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	355.845.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		265.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Nilai Ekspor Bersih Non Migas***	**-**			**1550 juta dollar**	**287.744.000,00**						**-**	**363.168.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk*	-			60 %	287.744.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	363.168.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				2 Pelaku Usaha	112.744.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		175.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				4 Pelaku Usaha	175.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		188.168.000,00	DINAS PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku***	**-**			**73 %**	**163.640.600,00**						**-**	**170.750.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan*	-			73 %	163.640.600,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	170.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				100 Orang	163.640.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		170.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya***	**-**			**70 %**	**220.065.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran*	-			60 %	220.065.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				4 UMKM	220.065.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
		UPTD PASAR WILAYAH I						**89.992.400,00**							**219.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**89.992.400,00**							**219.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**89.992.400,00**							**219.000.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola***	**-**			**87 %**	**89.992.400,00**						**-**	**219.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya*	-			76 %	89.992.400,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	219.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH I
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	89.992.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		219.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH I
		UPTD PASAR WILAYAH II						**79.971.300,00**							**219.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**79.971.300,00**							**219.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**79.971.300,00**							**219.000.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola***	**-**			**87 %**	**79.971.300,00**						**-**	**219.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya*	-			76 %	79.971.300,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	219.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH II
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	79.971.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		219.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH II
		UPTD PASAR WILAYAH III						**84.945.500,00**							**184.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**84.945.500,00**							**184.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**84.945.500,00**							**184.000.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola***	**-**			**87 %**	**84.945.500,00**						**-**	**184.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya*	-			76 %	84.945.500,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	184.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH III
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	84.945.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		184.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH III
		UPTD PASAR WILAYAH IV						**58.959.600,00**							**144.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**58.959.600,00**							**144.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**58.959.600,00**							**144.000.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola***	**-**			**87 %**	**58.959.600,00**						**-**	**144.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya*	-			76 %	58.959.600,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	144.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH IV
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	58.959.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		144.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH IV
		UPTD METROLOGI						**464.572.000,00**							**560.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**464.572.000,00**							**560.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**464.572.000,00**							**560.000.000,00**	
1.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku***	**-**			**73 %**	**464.572.000,00**						**-**	**560.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan*	-			73 %	464.572.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	560.000.000,00	UPTD METROLOGI
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				3600 Unit	464.572.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		560.000.000,00	UPTD METROLOGI
	J U M L A H							**43.406.798.000,00**							**38.581.414.960,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perdagangan Kota Balikpapan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan namun juga diharapkan bersumber pendanaan lainnya (APBN, BANKEU,DEKON, TP, dan sumber-sumber pendanaan lainnya)

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif TA. 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	229.723.500
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	79.723.500
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	79.723.500
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	100.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	100.000.000
	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	50.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	50.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	25.041.353.200
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17.591.357.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	17.277.488.700
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	313.868.800
	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	7.449.995.700
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6.999.995.800
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	449.999.900
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	559.135.500
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	203.290.500
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	203.290.500
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	355.845.000
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	355.845.000

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	287.744.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	287.744.000
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	112.744.000
	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	175.000.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	628.212.600
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	628.212.600
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	464.572.000
	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	163.640.600
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	220.065.000
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	220.065.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	220.065.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.440.564.200
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.876.372.200
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.876.372.200

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	246.320.500
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.440.500
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	186.880.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.338.706.900
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.985.900
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.529.500
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	375.982.200
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	267.877.300
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	101.680.000
	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.652.000
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	178.997.000
	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.000.000
	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	22.997.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.962.806.800
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	756.998.700
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.202.808.100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	837.360.800
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.895.500
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.054.000
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.650.000
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.761.300
Jumlah		**43.406.798.000**

BAB V
INOVASI PERANGKAT DAERAH

Saat ini sedang dikembangkan beberapa aplikasi dan sistem di Dinas Perdagangan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Perdagangan, beberapa diantaranya yaitu :

a. Sistem Informasi Laporan Ketersediaan Bahan Pokok (SIPORTER BAPOK)

Ketersediaan bahan pokok yang mencukupi bagi masyarakat Kota Balikpapan menjadi salah satu prioritas dalam mempersiapkan Kota Balikpapan menjadi kota penyangga Ibu Kota Negara.Dan tingkat ketergantungan Lebih dari 90% kebutuhan pokok masyarakat Kota Balikpapan masih mengandalkan pasokan dari daerah lain seperti Sulawesi, Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara Barat. Kegiatan monitoring dan pemantauan ketersediaan bahan pokok pada pelaku usaha kurang optimal dimasa pandemic corona virus disease-19,sehingga menyebabkan data laporan stok ketersediaan bahan pokok kurang optimal didapatkan dari pelaku usaha. Padahal kondisi pangan di masa pandemic harus di lakukan pemantauan stok secara konsisten dan periodic. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan sandang dan pokok bagi Manusia. Menjawab permasalahan tersebut maka perlu adanya Sistem Informasi Laporan Ketersediaan Bahan Pokok (SI PORTER BAPOK) adalah Sistem aplikasi yang digunakan untuk menginput laporan stok bahan pokok oleh pelaku usaha secara cepat,tepat sasaran, terintergrasi dan tervalidasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan khususnya pada Dinas Perdagangan. Manfaat dan maksud dari sistem ini adalah untuk menyediakan wadah pelaporan stok bahan pokok dari Pelaku Usaha yang lebih terintergrasi dan sehingga lebih terukurnya data stok bahan pokok yang ada di Kota Balikpapan. Selain itu data base pelaku usaha bahan pokok lebih teratur dan terorganisir dalam satu sistem. Keunggulan dari Sistem Informasi Laporan Ketersediaan Bahan Pokok (SI PORTER BAPOK) ini adalah suatu inovasi layanan pada Dinas Perdagangan yang berkolaborasi dengan pelaku usaha bahan pokok yang ada di Kota Balikpapan bersama dengan Dinas Perdagangan dalam rangka Upaya menjaga stabilisasi Harga bahan pokok dan ketersediaan bahan pokok di Kota Balikpapan. Sistem ini informasi ini mempermudah pelaku usaha dalam melaporkan stok pengadaan dan penyaluran bahan pokok di Kota Balikpapan.

b. Seputar Harga Bahan Pokok Terkini Balikpapan (SAHABAT Balikpapan)

Angka inflasi Kalimantan Timur relative lebih tinggi dibanding kebanyakan provinsi lain di Indonesia. Selain disebabkan belum optimalnya fungsi infrastruktur serta ketergantungan terhadap daerah lain, terhambatnya akses informasi harga juga menjadi sulitnya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjalankan fungsinya. Untuk itu, pengendalian terhadapa berlakunya harga pasar terhadap beberapa kebutuhan, terutama bahan pangan, harus serius dilakukan.

Fluktuasi inflasi yang tinggi bukanlah hal yang positif, meski masyarakat terlihat tak terganggu. Kondisi fluktuasi inflasi akan menyulitkan pemerintah merancang kebijakan, terutama yang berhubungan dengan perekonomian. Untuk menekan angka tersebut, Bank Indonesia Bersama TPID di Balikpapan, Tarakan dan Samarinda tengah mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) untuk mengoptimalkan penghimpunan serta penyampaian informasi mengenai harga kebutuhan.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-3, periode renstra 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2024. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangkamenengah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Perdagangan Kota Balikpapan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2024, dimana Renja Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, maka seluruh aparatur Dinas Perdagangan Kota Balikpapan secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Balikpapan, 10 Agustus 2023

Kepala Dinas Perdagangan

Kota Balikpapan,

HAEMUSRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan karuaniaNya kita masih dikaruniai kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2024.

Setiap tahunnya, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan lebih lanjut dalam Renja. Penyusunan Renja sendiri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 diharapkan menjadi acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program, kegiatan, sub kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjut akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024. Selain itu Rencana Kerja (Renja) 2024 ini diharapkan mempu menjadi alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja perangkat Daerah di tahun 2024 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai.

Nama	Jabatan	Paraf
Andi Muhammad Yusri Ramli	Asisten Administrasi Umum	
Abdul Samad	Kepala Bagian Keuangan	
Ade Agus Kurnia	Analis Kebijakan	

Balikpapan, Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

MUHAIMIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan 15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 17
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah 26
3.3. Program dan Kegiatan 27

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH 44

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH 47

BAB VI PENUTUP 54

DAFTAR TABEL

Tabel	Isi Tabel	Hal
2.1	Hasil capaian strategis Sekretariat Daerah 2021	10
2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sampai dengan Tahun 2022 (Tahun Berjalan)	11
2.3	Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	16
2.4	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Balikpapan	21
2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	25
3.1	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	27
3.2	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024	28
3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	31
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2024	45
5.1	Inovasi Perangkat Daerah	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertemunya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah pada kegiatan tahunan yang kemudian sebelum diimplementasikan, kegiatan yang direncanakan tersebut terlebih dahulu harus disiapkan perencanaan penganggaran untuk mendapatkan pagu dana. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

1) Penyusunan rencana;

2) Penetapan rencana;

3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dan

4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan untuk mencapai visi dan misi Kota Balikpapan adalah suatu hal yang sangat kompleks. Untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan

strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana kerja yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi.

Peningkatan efektifitas kebijakan dan hasil-hasil pembangunan berkembang dinamis sangat pesat, sementara itu di sisi lain kebijakan pembangunan disusun untuk kurun waktu yang lama, yaitu kebijakan jangka panjang, dan kebijakan jangka menengah dan kebijakan tahunan. Oleh karena itu, peran Sekretariat Daerah yang baik diharapkan akan mampu mempertemukan kebijakan pemerintah dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang sangat pesat, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan agar hasil akhirnya akan tepat sasaran.

a. Pengertian Renja

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi untuk menerjemahkan Renstra lima tahunan yang dituangkan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja menjadi mutlak sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran yang ditentukan.

b. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara menyeluruh atau sejajar dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi PD saat ini, evaluasi renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perwali RKPD

2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan

3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan

4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja

   a. Pembentukan Tim Penyusun Renja

   b. Orientasi mengenai Renja

   c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja

   d. Pengumpulan Data dan Informasi

2. Pengolahan Data dan Informasi

   Pada tahapan ini disajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap perumusan penyusunan rancangan Renja

3. Perumusan Rancangan Renja

   a. Pengolahan data dan informasi

   b. Analisis gambaran pelayanan PD

   c. Menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD

   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD

f. Perumusan tujuan dan sasaran

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

h. Perumusan kegiatan prioritas

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD

j. Penyempurnaan rancangan Renja PD

k. Pembahasan Forum PD

l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah

4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD

6. Penetapan Renja

c. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

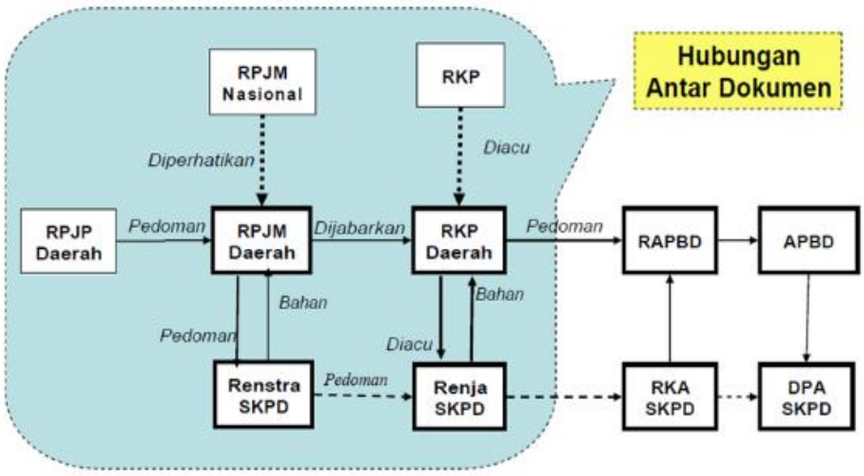

Gambar 1.1.

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**;**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kemudian mencabut PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 11);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
16. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis dan fokus pada pemecahan masalah yang ada serta untuk Meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pembangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai penjabaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan yang selaras dengan Renstra Perangkat daerah
2. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen penganggaran tahun 2024
3. Sebagai bahan evaluasi capaian keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya
4. Memberikan Pedoman dalam pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Berisi latar belakang

1.2 landasan hukum

1.3 maksud dan tujuan

1.4 sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

2.1 hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah,

2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 telaahan terhadap kebijakan Nasional,

3.2 tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rencana Program

4.2 Kegiatan Serta pendanaan Sekretariat Daerah

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.

Lampiran.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra

Sebelum penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan Tahun 2024 terlebih dahulu dilakukan evaluasi Renja Tahun lalu untuk mengetahui sudah sejauh mana capaian keberhasilan sasaran, program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, sehingga penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 sudah berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan tahun sebelumnya.

Kegiatan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan renstra perangkat daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan permasalahan yang dihadapi perangkat daerah serta Faktor-faktor keberhasilan atas capaian kinerja perangkat daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil capaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah sebagai mana yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2022 disajikan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.1
Hasil capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi Capaian	Rasio
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Poin	31,89	33,16	103,98%
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan,kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	95.53%	100,00%	105,26%
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100,00%

Hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2/ T-C.29
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja / Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				Unit perangkat daerah Penanggung jawab
								Target Renja PD Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja PD Tahun 2022		Target Renja PD Tahun 2023 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**400**	**538.559.258.759**			**78,00**	**119.727.537.091**	**79,32**	**104.458.566.987**	**101,69%**	**87,25%**	**79**	**96.187.428.075**	**158,32**	**200.645.995.062**	**39,58%**	**37,26%**	**Asisten Administrasi Umum**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	395	731.572.186			78,00	116.000.000	75,71	94.006.746	97,06%	81,04%	78,5	116.000.000	154,21	210.006.746	39,04%	28,71%	Bagian Keuangan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	395	155.576.956.867			77,00	29.108.943.851	81,17	22.742.257.389	105,42%	78,13%	78	28.630.338.975	159,17	51.372.596.364	40,30%	33,02%	Bagian Keuangan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	424	5.450.000.000			80,00	1.096.500.000	80,17	822.520.520	100,21%	75,01%	82	915.000.000	162,17	1.737.520.520	38,25%	31,88%	Bagian Umum dan Perlengkapan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	424	150.940.441.266			80,00	37.936.329.000	79,22	35.454.198.280	99,03%	93,46%	82	25.576.484.000	161,22	61.030.682.280	38,02%	40,43%	Bagian Umum dan Perlengkapan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	424	35.275.000.000			80,00	8.153.500.000	78,94	7.240.237.887	98,68%	88,80%	82	7.300.000.000	160,94	14.540.237.887	37,96%	41,22%	Bagian Umum dan Perlengkapan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja / Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				Unit perangkat daerah Penanggung jawab
								Target Renja PD Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja PD Tahun 2022		Target Renja PD Tahun 2023 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	424	96.852.200.000			80,00	23.310.000.000	80,78	21.189.149.378	100,98%	90,90%	82	17.812.000.000	162,78	39.001.149.378	38,39%	40,27%	Bagian Umum dan Perlengkapan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	424	59.005.000.000			80,00	13.865.000.000	79,05	11.696.405.245	98,81%	84,36%	82	9.975.000.000	161,05	21.671.405.245	37,98%	36,73%	Bagian Umum dan Perlengkapan
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase	500%	9.899.813.000			100%	1.421.601.940	100%	1.272.508.804	100,00%	89,51%	100%	1.900.000.000	200%	3.172.508.804	40,00%	32,05%	Bagian Umum dan Perlengkapan
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Presentase Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah	Presentase	500%	7.695.000.000			100%	2.100.000.000	100%	1.466.572.880	100,00%	69,84%	100%	1.420.000.000	200%	2.886.572.880	40,00%	37,51%	Bagian Umum dan Perlengkapan
10	Penataan Organisasi	IKM Layanan Penataan Organisasi	Poin	415	4.906.842.663			81,00	762.288.800	77,22	705.042.558	95,33%	92,49%	82	812.605.100	159,22	1.517.647.658	38,37%	30,93%	Bagian Organisasi
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	Prsentase	500%	12.226.432.777			100%	1.857.373.500	100%	1.775.667.300	100,00%	95,60%	100%	1.730.000.000	200%	3.505.667.300	40,00%	28,67%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja / Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				Unit perangkat daerah Penanggung jawab
								Target Renja PD Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja PD Tahun 2022		Target Renja PD Tahun 2023 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
II	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama**	**Presentase**	**497,73%**	**200.745.038.982**			**97,73%**	**36.439.490.150**	**100%**	**31.146.958.544**	**102,32%**	**85,48%**	**100%**	**31.134.403.284**	**200%**	**62.281.361.828**	**40,18%**	**31,03%**	**Asisten Tata Pemerintahan**
12	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	Presentase	500%	111.695.474.672			100%	16.962.932.300	100%	14.141.934.252	100,00%	83,37%	100%	17.751.329.000	200%	31.893.263.252	40,00%	28,55%	Bagian Pemerintahan
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Presentase	450%	61.635.176.015			90%	11.723.329.900	100%	10.223.292.955	111,11%	87,20%	90%	8.628.929.434	190%	18.852.222.389	42,22%	30,59%	Bagian Kesra
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase	500%	10.445.474.379			100%	1.806.704.050	100%	1.398.915.118	100,00%	77,43%	100%	1.954.144.850	200%	3.353.059.968	40,00%	32,10%	Bagian Hukum
15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	Presentase	402,19%	16.968.913.916			69,64%	5.946.523.900	100%	5.382.816.219	143,60%	90,52%	82,40%	2.800.000.000	182,40%	8.182.816.219	45,35%	48,22%	Bagian Kerjasama

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja / Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				Unit perangkat daerah Penanggung jawab
								Target Renja PD Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja PD Tahun 2022		Target Renja PD Tahun 2023 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
III	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan**	**Presentase**	**500%**	**15.506.357.648**			**100,00%**	**2.961.001.437**	**100%**	**2.327.084.150**	**100,00%**	**78,59%**	**100%**	**2.584.146.500**	**200%**	**4.911.230.650**	**40,00%**	**31,67%**	**Asisten Perekonomian dan Pembangunan**
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	Presentase	500%	4.447.933.901			100%	905.018.600	100%	729.394.851	100,00%	80,59%	100%	800.000.000	200%	1.529.394.851	40,00%	34,38%	Bagian Perekonomian
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	Presentase	500%	6.458.023.091			100%	1.128.632.837	100%	798.498.596	100,00%	70,75%	100%	1.014.146.500	200%	1.812.645.096	40,00%	28,07%	Bagian Adm Pembangunan
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Poin	387,8	4.600.400.656			76,00	927.350.000	80,66	799.190.703	106,13%	86,18%	77	770.000.000	157,66	1.569.190.703	40,65%	34,11%	Bagian PBJ

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang telah ditetapkan, sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2021-2026

Sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan nomoe 1 tahun 2022 tentang kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
3. Pemantauan daan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsi.

Dengan rumusan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan diharapkan dapat mejadi landasan meningkatkan Capaian Kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan indikator serta target yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah 2021-2026. Capaian kinerja pelayanan Sekretariat daerah dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2.3/ T-C.30
Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra						Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah			n/a	31.89	32,00	32,10	32,20	32,30	n/a	**33.16**	32,00	32,10	32,20	32,30	
2	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan,kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti			n/a	95.53%	98.03%	98.25%	98.47%	98.69%	100%	**100%**	98.03%	98.25%	98.47%	98.69%	
3	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti			n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Secara umum ada 3 (tiga) isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah pada tahun 2024 antara lain:

1. Personil Sumber daya Manusia / Pegawai Pada Setiap bagian Sekretariat Daerah yang terbatas.

   Permasalahan SDM yang terbatas ini sangat menjadi perhatian bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hal ini karena semakin kompeksnya kebijakan dan aturan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Perangkat Daerah, maka diperlukan juga tenaga menjalakan tugas dengan baik demi mencapai tujuan dan sasaran kinerja perangkat daerah.

2. Penghapusan Tenaga Bantuan / Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan

   Penghapusan tenaga honorer resmi dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut tertuang di dalam Surat Edaran No. B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dijelaskan bahwa pegawai ASN hanya terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK). Dengan kondisi

SDM yang sangat terbatas, penghapusan tenaga PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dikhawatirkan akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam mencapai target kinerja dalam pelaksanaan program/ kegiatan.

3. Fasilitasi pelayanan Tamu dalam mendukung pembangunan IKN

   Dengan ditetapkannya Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Paser Utara (PPU) sebagai Ibu Kota Negara, serta Kota Balikpapan sebagai pintu masuk dan penyangga IKN maka semakin banyak Tamu-tamu kenegaraan baik Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga yang berkunjung ke Kota Balikpapan untuk melihat perkembangan pembangunan IKN tersebut. Hal ini tentunya menjadi perhatian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam melakukan fasilitasi pelayanan tamu dakam mendukung kelancaran pembangunan IKN.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Sekretariat Daerah, maka fungsi dan tugas Sekretariat Daerah Kota Balikpapan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Secara keseluruhan, sesuai dengan hasil Forum OPD yang diselenggarakan pada Tanggal 3 Februari 2023 bahwa analisis kebutuhan pendanaan pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah tahun 2024 dibutuhkan dana sebesar Rp. 185.313.239.531,-,

dimana terdapat beberapa kegiatan yang berdasar analisis membutuhkan pagu indikatif yang sesuai dengan pagu tahun berjalan/2023. Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Walikota Balikpapan Nomor: 050/0402/Bappeda-Litbang tanggal 21 Februari 2023 perihal Penyampaian pagu indikatif dan penginputan Ranwal Renja Tahun 2024 dimana Pagu Indikatif Sekretariat Daerah sebesar Rp. 159.900.838.000,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 25.412.401.531,- dari Usulan hasil Forum OPD sebelumnya. Setelah dilakukan kembali rapat pembahasan pagu Renja 2024 dengan para pemangku kepentingan maka ditetapkan rancangan awal rencana kerja program/ kegiatan prioritas beserta pagu indikatif Renja Sekretariat Daerah tahun 2024.

Berdasarkan hasil kesepakatan Ranwal RKPD pada Sekretariat Daerah terdapat beberapa kegiatan dimana Pagu indikatif Renja 2024 melebihi pagu indikatif Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021-2026 yaitu:

1. Bagian Administrasi Pembangunan
   Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan bertambah sebesar Rp. 598.585.350,-
2. Bagian Organisasi
   Kegiatan Penataan Organisasi bertambah sebesar 50.000.000,-
3. Bagian Hukum
   Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum bertambah sebesar Rp. 525.000.000,-
4. Bagian Perkotaan
   Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah bertambah sebesar Rp. 2.734.024.750,-
5. Bagian Umum dan Perlengkapan
   Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD bertambah sebesar Rp. 445.000.000,-
   Kegiatan Administrasi Umum PD bertambah sebesar Rp. 6.050.000.000,-

Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD bertambah sebesar Rp. 8.336.959.200,-

Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan bertambah sebesar Rp. 1.900.000.000,-

berdasarkan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4/TC.31

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Balikpapan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**80 Poin**	**123.295.857.693**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Balikpapan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**80 Poin**	**137.208.259.224**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	79 Poin	127.600.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	79 Poin	127.600.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79 Poin	31.493.372.873	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79 Poin	31.493.372.873
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 Poin	1.015.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 Poin	1.460.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 Poin	35.200.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 Poin	41.250.000.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Poin	9.750.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Poin	18.086.959.200
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 Poin	24.955.519.210	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 Poin	24.452.061.030

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 Poin	14.175.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 Poin	12.009.529.660
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	2.320.000.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	2.169.370.851
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Balikpapan	Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah	100 %	1.220.000.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Balikpapan	Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah	100 %	3.120.000.000
10	Penataan Organisasi	Balikpapan	IKM Layanan Penataan Organisasi	83 Poin	943.865.610	Penataan Organisasi	Balikpapan	IKM Layanan Penataan Organisasi	83 Poin	943.865.610
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Balikpapan	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	2.095.500.000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Balikpapan	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	2.095.500.000
II	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Balikpapan**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama**	**100%**	**33.183.833.807**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Balikpapan**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama**	**100%**	**44.683.833.807**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
12	Administrasi Tata Pemerintahan	Balikpapan	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	100 %	15.289.529.300	Administrasi Tata Pemerintahan	Balikpapan	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	100 %	24.289.529.300
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Balikpapan	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	90 %	9.491.822.377	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Balikpapan	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	90 %	11.991.822.377
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	2.598.457.380	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	2.598.457.380
15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	83,25 %	5.804.024.750	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	83,25 %	5.804.024.750
III	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Balikpapan**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan**	**100 %**	**3.421.146.500**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Balikpapan**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan**	**100 %**	**3.421.146.500**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Balikpapan	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	100 %	860.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Balikpapan	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	100 %	860.000.000
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Balikpapan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	100 %	1.714.146.500	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Balikpapan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	100 %	1.714.146.500
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	77.6 Poin	847.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	77.6 Poin	847.000.000
Total					**159.900.838.000**	**Total**				**185.313.239.531**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disyahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahuludimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusunrancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai penunjang urusan pemerintahan. Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merupakan Perangkat Daerah non teknis, secara umum tugas pokok dan fungsinya adalah pelayanan terhadap administrasi. Administrasi tersebut berupa Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Administrasi Perekonomian dan Pembangunan serta Administrasi Umum.

Tabel 2.5/ T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. pemerintah telah menetapkan delapan arah kebijakan dalam Rencana kerja pemerintah (RKP) 2024 dengan tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sesuai dengan tema RKP 2024 maka arah dan kebijakan RKP 2024 akan Fokus pada delapan isu prioritas:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Penguatan daya saing
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektifitas
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tujuan serta sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan diatas. Keterkaitan Tujuan dan

Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan		Indikator	Sasaran		Indikator
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Kota Komponen Pelaporan	1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah
			2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan,kesejahte rakyat, hukum dan kerjasama yang ditetap dan ditindaklanjuti
			3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti

3.3. PROGRAM , KEGIATAN dan SUB KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara Kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Adapun program secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan selama satu tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Tahun 2024

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
5	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
9	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
10	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
11	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
18	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
19	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
22	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	Listrik
26	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Kegiatan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
27	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
28	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
30	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
31	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
32	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya
33	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
34	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
35	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
36	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**
37	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
38	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
39	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
10	**Kegiatan Penataan Organisasi**
40	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
41	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
42	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
43	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
44	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
11	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**
45	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
46	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
47	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
II	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
12	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**
48	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
49	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
50	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
13	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**
51	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
52	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
53	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
14	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**
54	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
55	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
56	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
15	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**
57	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
58	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
III	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
16	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**
59	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
60	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
61	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
17	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**
62	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
63	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
64	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
18	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**
65	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
66	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
67	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

TABEL 3.3 / T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah**	**BPP**	**80,00**	**136.295.857.633**		**81,00**	**117.642.438.250**	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Sekretariat Daerah**	**BPP**	**79,00**	**127.600.000**		**79,50**	**174.000.000**	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**BPP**	3 dokumen	33.000.000		2 dokumen	42.000.000	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	**BPP**	3 dokumen	19.800.000		3 dokumen	30.000.000	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	**BPP**	3 dokumen	19.800.000		3 dokumen	30.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**BPP**	6 Laporan	55.000.000		1 Laporan	72.000.000	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Indeks Kepauasan Masyarakat (IKM) Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**BPP**	**79,00**	**31.493.372.873**		**80,00**	**31.692.787.000**	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**BPP**	150 Orang/Bulan	31.245.872.873		152 Orang/Bulan	31.373.787.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**BPP**	2350 dokumen	192.500.000		2450 dokumen	235.000.000	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**BPP**	1 Laporan	22.000.000		1 Laporan	34.000.000	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**BPP**	60 Laporan	33.000.000		60 Laporan	50.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**BPP**	**85,00**	**1.030.000.000**	**- 5.000.000**	**87,00**	**1.250.000.000**	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	**BPP**	2 unit	30.000.000		2 unit	50.000.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	**BPP**	9 paket	1.000.000.000		8 paket	1.200.000.000	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**BPP**	**85,00**	44.250.000.000	**7.148.867.600**	**87,00**	**35.500.000.000**	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**BPP**	3 paket	750.000.000		3 paket	800.000.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**BPP**	24 paket	1.500.000.000		10 paket	2.000.000.000	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**BPP**	10 paket	1.250.000.000		3 paket	1.500.000.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**BPP**	4 paket	15.000.000.000		4 paket	9.500.000.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**BPP**	3 paket	800.000.000		3 paket	900.000.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**BPP**	12 dokumen	450.000.000		60 dokumen	500.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**BPP**	12 laporan	14.000.000.000		12 laporan	7.500.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**BPP**	900 laporan	10.500.000.000		1000 laporan	12.800.000.000	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BPP**	**85,00**	**9.050.000.000**	**2.475.000.000**	**87,00**	**7.800.000.000**	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	**BPP**	1 unit	800.000.000		3 unit	500.000.000	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	**BPP**	1 unit	750.000.000		1 unit	1.250.000.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**BPP**	50 unit	500.000.000		150 unit	500.000.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**BPP**	53 unit	1.500.000.000		100 unit	550.000.000	
4.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	**BPP**	0 unit		**Menghapus Sub Kegiatan**	0 unit	-	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**BPP**	100 unit	2.500.000.000		3 unit	3.500.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**BPP**	3 unit	3.000.000.000		3 unit	1.500.000.000	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BPP**	**85,00**	**26.920.519.210**	**5.442.319.210**	**87,00**	**20.485.000.000**	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**BPP**	0 laporan		**Menghapus Sub Kegiatan**	0 laporan	-	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**BPP**	48 laporan	3.400.000.000		36 laporan	3.200.000.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**BPP**	12 laporan	23.520.519.210		12 laporan	17.285.000.000	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BPP**	**85,00**	**16.385.000.000**	**3.620.000.000**	**87,00**	**13.230.000.000**	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**BPP**	12 unit	1.500.000.000		20 unit	2.000.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**BPP**	152 unit	5.200.000.000		155 unit	5.000.000.000	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	**BPP**	50 unit	160.000.000		50 unit	200.000.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**BPP**	415 unit	1.500.000.000		500 unit	2.000.000.000	
4.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	**BPP**	1 unit	25.000.000		2 unit	30.000.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**BPP**	2 unit	4.500.000.000		3 unit	3.000.000.000	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**BPP**	9 unit	3.500.000.000		3 unit	1.000.000.000	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**BPP**	**100%**	**2.300.000.000**	**320.000.000**	**100%**	**2.075.000.000**	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**BPP**	2 orang/bulan	250.000.000		2 orang/bulan	250.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	**BPP**	1 Paket	300.000.000		1 Paket	600.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**BPP**	2 orang/bulan	1.750.000.000		2 orang/bulan	1.225.000.000	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah**	**BPP**	**100%**	**1.700.000.000**	**- 305.000.000**	**100%**	**1.525.000.000**	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	**BPP**	11 paket	800.000.000		7 paket	800.000.000	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	**BPP**	8 paket	750.000.000		7 paket	600.000.000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	**BPP**	1 paket	150.000.000		1 paket	125.000.000	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**IKM Layanan Penataan Organisasi**	**BPP**	**83,00**	**943.865.550**	**50.000.000**	**84,00**	**1.147.000.000**	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	**BPP**	1 dokumen	204.000.000	**Penambahan 50 Juta untuk Makan dan Minum Rapat**	1 dokumen	270.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	**BPP**	1 laporan	306.900.000		1 laporan	312.000.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	**BPP**	1 dokumen	132.500.000	**Penambahan 50 Juta untuk Makan dan Minum Rapat menggeser pagu sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah**	1 dokumen	175.000.000	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	**BPP**	1 dokumen	200.200.000		1 dokumen	205.000.000	
4.01.01.2.13.045	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	**BPP**	1 dokumen	100.265.550	**Mengurangi pagu 50 Juta bergeser ke sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi**	1 dokumen	185.000.000	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan**	**BPP**	**100%**	**2.095.500.000**		**100%**	**2.763.651.250**	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	**BPP**	4 Laporan	737.000.000		1 Laporan	1.058.000.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	**BPP**	4 Laporan	720.500.000		1 Laporan	806.063.750	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	**BPP**	4 Laporan	638.000.000		1 Laporan	899.587.500	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama**	**BPP**	**100%**	**33.183.833.627**		**100%**	**47.075.427.643**	ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna**	**BPP**	**100%**	**15.289.529.300**	**- 12.000.000.000**	**100%**	**25.959.636.361**	BAGAIN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	**BPP**	5 dokumen	5.303.300.000	**Terdapat Belanja Hibah yang rencana akan dialihkan ke Kesbangpol**	5 dokumen	21.511.406.203	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	**BPP**	4 dokumen	918.000.000		4 dokumen	1.042.184.319	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	**BPP**	4 dokumen	9.068.229.300	**Mengurangi pagu sebesar 3 miliar terkait kegiatan sukuran yang dialihkan pada tahun 2025**	2 dokumen	3.406.045.839	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat**	**BPP**	**90%**	**9.491.822.377**	**-**	**90%**	**15.100.321.279**	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	**BPP**	3 dokumen	7.957.322.377		3 dokumen	13.393.689.063	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	**BPP**	2 dokumen	1.424.500.000		21 dokumen	1.500.000.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	**BPP**	1 dokumen	110.000.000		1 dokumen	206.632.216	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**BPP**	**100%**	**2.598.457.300**	**525.000.000**	**100%**	**2.180.592.638**	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	**BPP**	400 dokumen	481.277.000	**Menambah Pagu sebesar 50 Juta untuk keperluan makan dan minum rapat**	407 dokumen	501.463.904	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	**BPP**	17 kasus	867.180.300		18 kasus	904.128.734	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	**BPP**	400 dokumen	1.250.000.000	**menyesuaikan dengan pagu 2023**	407 dokumen	775.000.000	
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri**	**BPP**	**83,25%**	**5.804.024.650**	**2.734.024.750**	**82,81%**	**3.834.877.365**	BAGIAN KERJASAMA
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	**BPP**	2 dokumen	5.539.024.750	**Menyesuaikan Pagu 2023**	2 dokumen	3.248.366.709	
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	**BPP**	1 dokumen	264.999.900		1 dokumen	586.510.656	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan**	**BPP**	**100%**	**3.421.146.500**		**100%**	**3.278.937.940**	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMABNGUNAN
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun**	**BPP**	**100%**	**860.000.000**		**100%**	**876.325.372**	BAGIAN PEREKONOMIAN
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	**BPP**	8 dokumen	550.000.000		12 dokumen	550.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	**BPP**	4 Laporan	110.000.000		12 Laporan	126.325.372	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	**BPP**	4 dokumen	200.000.000		12 dokumen	200.000.000	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun**	**BPP**	**100%**	**1.714.146.500**	**598.585.350**	**100%**	**1.417.274.667**	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	**BPP**	1 dokumen	238.457.500	**menyesuaikan pagu 2023**	1 dokumen	60.693.600	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	**BPP**	13 Laporan	676.466.500	**menyesuaikan pagu 2023**	2 Laporan	1.046.581.067	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	**BPP**	12 Laporan	799.222.500	**menyesuaikan pagu 2023**	12 Laporan	310.000.000	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**BPP**	**77,6**	**847.000.000**		**78,0**	**985.337.901**	BAGIAN PBJ
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**BPP**	339 dokumen	269.500.000		341 dokumen	283.794.258	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	**BPP**	37 dokumen	374.000.000		38 dokumen	398.043.643	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	**BPP**	110 orang	203.500.000		121 orang	303.500.000	
				TOTAL	**172.900.837.760**		TOTAL	**167.996.803.833**	

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Untuk mewujudkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada.

Program di Sekretariat Daerah adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi, sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang, modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai bagian daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.

Pendanaan indikatif adalah sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Perangkat Daerah wajib memegang prinsip keuangan daerah yaitu harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, Kejujuran dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Pendanaan sendiri nantinya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas atas isi kegiatan yang harus dilaksanakan yang mengutamakan kebutuhan Perangkat Daerah dantentunya harus berdampak pula pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun rencana Program, Kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2024 adalah sebagaimana table berikut.

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	PAGU INDIKATIF	PEJABAT PENGAMPU
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**136.295.857.633**	**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.600.000	BAGIAN KEUANGAN
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.493.372.873	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.030.000.000	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.250.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.050.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.920.519.210	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.385.000.000	
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.300.000.000	
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.700.000.000	
10	Penataan Organisasi	943.865.550	BAGIAN ORGANISASI
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.095.500.000	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

No	Program/Kegiatan	PAGU INDIKATIF	PEJABAT PENGAMPU
II	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**33.183.833.627**	**ASISTEN TATA PEMERINTAHAN**
12	Administrasi Tata Pemerintahan	15.289.529.300	BAGIAN PEMERINTAHAN
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.491.822.377	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.598.457.300	BAGIAN HUKUM
15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	5.804.024.650	BAGIAN PERKOTAAN
III	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**3.421.146.500**	**Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat**
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	860.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.714.146.500	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	847.000.000	BAGIAN PBJ
	TOTAL	**172.900.837.760**	

BAB V
INOVASI PERANGKAT DAERAH

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* atau alat dalam mengakselerasi peningkatan daya saing bagi Pemerintah Daerah. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah meliputi antara lain kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Inovasi pada Perangkat Daerah merupakan sarana bagi Perangkat Daerah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Hal tersebut sebagai upaya mendukung dan mempercepat terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah sebagai mana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah melalui pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah. Adapun beberapa inovasi yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain:

Tabel 5.1
Inovasi Perangkat Daerah

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
1	Sistem Pengendalian dan Monitoring Belanja (SIPEMBELANJA) Bagian Keuangan	√		Aplikasi yang dapat menampilkan progress Pelaksanaan Belanja dimulai dari pembuatan BA Pembayaran sebagai tahap awal, dan penginputan data SPP, SPM hingga SP2D. Sehingga Pengendalian oleh Stakeholder menjadi lebih optimal.	1. Masih terdapat Realisasi Anggaran Kegiatan yang Masih jauh dari Target yang telah ditetapkan.	Stakeholder di Lingkungan Sekretariat Daerah (Pengadministrasi Sub Kegiatan (PASK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengguna Anggaran (PA), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK))	Kemudahan Bagi Para Stakeholder dalam mengakses informasi pelaksanaan belanja kegiatannya, dimulai dari tahap amprahan dokumen hingga terlaksananya pembayaran tagihan.
					2. proses pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta Belanja di Lingkungan Sekretariat Daerah yang belum optimal, Pembebanan Rekening Belanja belum mencerminkan Realisasi Belanja Sesungguhnya.		
					3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tentang penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi		Memudahkan dalam pemantauan nilai realisasi belanja berjalan secara real time.

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
					dan komunikasi untuk memberikan layanan pengguna.		
2	Portal Layanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan (Bagian Hukum)	√	-	Portal Layanan menggunakan scan barcode atau tautan https://linktr.ee/bagianhukumbpp untuk dapat megakses layanan tersebut. Portal layanan tersebut terintegrasi dengan website jdih.balikpapan.go.id yang memudahkan perangkat daerah dan masyarakat Kota Balikpapan dalam mengakses peraturan dan informasi seputar produk hukum yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Menu Portal Layanan : Form Kunjungan Bagian Hukum, Penelusuran Dokumen (pengajuan SK), Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Kontak Person, Alur dan Video Permohonan Pengajuan Perwali dan SK Wali Kota.	Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dalam hal ketersediaan informasi peraturan di Kota Balikpapan, dan memudahkan Perangkat daerah di lingkungan Kota Balikpapan untuk mencari peraturan sehubungan dengan tugas dan fungsi di masing-masing perangkat daerah, serta memudahkan dalam mengetahui proses pengajuan Keputusan Wali Kota yang dimohonkan kepada Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan.	Perangkat daerah dan masyarakat	memberikan informasi atas tahapan alur pengajuan proses produk hukum yang telah di tindaklanjuti oleh Bagian Hukum

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
3	jdih.balikpapan.go.id (Bagian Hukum)	-	√ (Badan Pembinaan Hukum Nasional)		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang bertujuan untuk : a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hokum yang lengkap dan akurat,		memudahkan mencari informasi dan peraturan hukum, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
					serta dapat diakses secara cepat dan mudah; c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesame Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan d. meningkatkan kualitas pembangunan hokum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.		

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
4	SIMASPRO (SISTEM INFORMASI HUMAS DAN PROTOKOL) (Bagian Humas dan Protokol)	√		Tingginya frekwensi kegiatan Pimpinan Daerah belum didukung dengan aplikasi sistem penjadwalan secara digital. Penjadwalan kegiatan yang menjadi bagian tugas Sub Bagian Protokol masih dikerjakan secara manual dengan birokrasi yang sangat panjang. Penjadwalan masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan penginputan jadwal secara manual hanya bisa dilakukan di kantor, sehingga apabila ada surat yang masuk ke meja Protokol diluar jam dinas maka operator harus ke kantor terlebih dahulu untuk melakukan penginputan.	Birokrasi yang terlalu berbelit kerap menuai komplain dari pejabat yang secara mendadak menerima disposisi yang disampaikan Protokol, bahkan tak jarang Pejabat yang disampaikan disposisi tersebut baru memonitor adanya disposisi setelah acara usai, alhasil acara tidak dihadiri. Hal tersebut tentunya akan membuat citra buruk bagi Pemerintah	meningkatnya kemampuan aparatur dalam pemaanfaatan teknologi informasi digital dalam pelaksanaan tugas, memudahkan mekanisme penginputan surat masuk serta meningkatnya kualitas layanan data dan informasi bagi pimpinan. Sedangkan dari sisi eklstrernal aplikasi ini juga mampu menyajikan layanan informasi publik terkait jadwal kegiatan Pemerintah Kota dan menjadi sumber data untuk tracking kehadiran pejabat	

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
5	Website pengelolaan program beasiswa stimulan pendidikan tinggi (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	---	√	Inovasi ini merupakan layanan pendaftaran, persyaratan, ketentuan pengajuan dan pengumuman hasil seleksi beasiswa pendidikan tinggi yang berprestasi dibidang akademik	1.Banyaknya mahasiswa/i calon penerima beasiswa yang mendaftar program beasiswa stimulan sehingga sulit untuk dilakukan secara manual	Mahasiswa/i berprestasi dibidang akademik asal Balikpapan	Memudahkan proses verifikasi berkas pengelolaan beasiswa stimulan

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (steakholder) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk berperan aktif dalam pembangunan. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Aggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ranwal Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi awal pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak– pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Meskipun perlu kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif. Artinya, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Renja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan 2021-2026, dan akan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta menjamin transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaannya.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang dirancang akan dilaksanakan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024. Disadari bahwa dalam penyusunan renja ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukan perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja di masa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2024.

Balikpapan, Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

MUHAIMIN

Rencana Kerja

SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2024 akan menjadi bagian dari rancangan dokumen perencanaan Rancangan Awal Renja yang sudah disusun sebelumnya. Penyusunan Rancangan Akhir Renja ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2022. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024.

Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Balikpapan, Agustus 2023
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan

ARFIANSYAH, S.T, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 30
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 31
3.3 Program dan Kegiatan 32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 50
BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH 54
BAB V PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 13

Tabel 2 : Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 18

Tabel 3 : Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2024 21

Tabel 5 : Tabel T-C.32 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 29

Tabel 6 : Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 34

Tabel 7 : Rancangan Akhir RKPD 2023 50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan nomor 50 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD tersebut, diperlukan adanya rencana kerja tahunan yang memberikan arah dan acuan yang jelas dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun untuk itu Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menyusun Renja sebagai salah satu acuan pelaksanaan kegiatan.

Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan pada pemerintahan daerah yang memuat rencana program dan kegiatan untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Adapun Rencana kerja dan pendanaan mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2023 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan, sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga negara RI Tahun 2015 No 08 Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5670);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;

10. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Balikpapan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

b. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2024 agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Mengemukakan Pengertian Ringkas tentang Renja SKPD keterkaitan antar Renja SKPD dengan Dokumen RKPD Renstra SKPD serta Tindak lanjutnya Proses Penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang Peraturan Perundang undangan serta peraturan Daerah Lainnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: Jumlah program dan jumlah kegiatan. Serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2024.

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan tentang kebijakan serta program inovasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam medukung terlaksanannya tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja perangkat daerah.

BAB VI PENUTUP

Meliputi hal hal yang perlu ditambahkan sebagai kesimpulan atas dokumen Perencanaan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan fasilitasi tugas pokok DPRD, antara lain dukungan fasilitasi dalam administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan nomor 01 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD tersebut, diperlukan adanya rencana kerja tahunan serta evaluasi rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Evaluasi Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan pada pemerintahan daerah yang memuat antara lain capaian kinerja rencana kerja terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dokumen evaluasi rencana kerja ini disusun dengan mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

Target kinerja dimaksud menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indikator program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator : IKM Internal Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Dari target shasil survey internal kepuasan masyarakat (IKM) Internal sebesar 72, dan yang tercapai sebesar 78,04 atau 108,3% dari target yang hendak dicapai.

Pada program ini terdapat 10 (sepuluh) kegiatan, antara lain :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Nilai SAKIP

Evaluasi Hasil : Nilai Sakip sebesar 63,09 dengan predikat Yaitu “Baik”

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi Keuangan Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 73,21 dengan predikat C yaitu “ Kurang Baik”

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi BMD Pada Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil : Kegiatan ini tidak dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 71,43 dengan predikat C yaitu Kurang Baik"

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi Keuangan Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 71,43 dengan predikat C yaitu "Kurang Baik"

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 66,07 dengan predikat "C" yaitu "Kurang Baik"

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 71,43 dengan predikat "C" yaitu "Kurang Baik"

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja : IKM Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 66,07 dengan predikat C yaitu "Kurang Baik"

9) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Indikator Kinerja : IKM Kegiatan Layanan Keuangan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 71,43 dengan predikat C yaitu "Kurang Baik"

10) Layanan Administrasi DPRD

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi DPRD

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 71,43 dengan predikat C yaitu "Kurang Baik

2. Program Pelaksanaan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator : Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi

Evaluasi Hasil :

Dari target 100 % yang tercapai adalah 72 % hal ini dikarenakan mengikuti rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan DPRD. Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan, antara lain :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Indikator Kinerja: Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Evaluasi Hasil: Perolehan persentase sebesar 100%

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Indikator Kinerja: Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran

Evaluasi Hasil: Perolehan persentase sebesar 100%

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Kinerja: Prosentase Terpenuhinya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Evaluasi Hasil: Perolehan persentase sebesar 51,82%

4. **Peningkatan Kapasitas DPRD**

   Indikator Kinerja: Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD

   Evaluasi Hasil: Perolehan persentase sebesar 75%

5. **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**

   Indikator Kinerja: Prosentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

   Evaluasi Hasil: Perolehan persentase sebesar 100%

6. **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**

   Indikator Kinerja: Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan Kode Etik DPRD

   Evaluasi Hasil: Perolehan persentase sebesar 100%

7. **Pembahasan Kerjasama Daerah**

   Indikator Kinerja: Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah

   Evaluasi Hasil: Perolehan persentase sebesar 0% dikarenakan kegiatan ini tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2022

8. **Fasilitasi Tugas DPRD**

   Indikator Kinerja: Prosentase Fasilitasi Tugas DPRD

   Evaluasi Hasil: Perolehan persentase sebesar 83,33%

Adapun dalam evaluasi rencana kerja ini, terdapat kegiatan yang mencapai target, melampaui ataupun yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, berikut adalah faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian target kinerja.

Faktor Pendorong :

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara DPRD Kota Balikpapan dengan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan;
2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan Sekretariat DPRD dalam mencapai Sasaran;

3. Koordinasi yang sinergis antara unit kerja di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan seluruh kegiatan;
4. Dukungan anggaran yang memadai terhadap seluruh program dan kegiatan;
5. Dukungan sarana prasarana dan aparatur.

Faktor Penghambat :

1. Adanya aturan maupun surat edaran dari kemendagri/ pemerintah pusat yang mengatur larangan bepergian ke luar negeri sehingga kegiatan tersebut tidak terlaksana;
2. Adanya beberapa penyesuaian kebutuhan terhadap fasilitasi DPRD ataupun mengikuti kebutuhan kegiatan dan jadwal kerja DPRD;
3. Penyusunan target pada Renstra dinilai terlalu tinggi, sehingga perlu di evaluasi kembali penentuan target pada setiap kegiatan.

Tabel 1

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah:

SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realiasasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10-/4)
4				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	**02**			**SEKRETARIAT DPRD**									
4	**02**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**74**		**80**	**65,85**	**82%**	**72**	**137,85**	**186%**
4	02	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70		66	64,59	98%	68	132,59	189%

4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74		20	20	100%	72	92	124%
4	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	74		70	72	103%	72	144	195%
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74		70	84	120%	72	156	211%
4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74		8	8	100%	72	80	108%
4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74		1	0	0%	5	5	7%
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74		5	5	100%	72	77	104%
4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74		4	4	100%	72	76	103%

4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74		90	71,43	79%	70	141,43	191%
4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	74		100	50	50%	72	122	165%
4	**02**	**02**		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**PRESENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**76%**		**100**	**72,1**	**72%**	**74**	**146,1**	**19224%**
4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%		100	100	100%	100	200	20000%
4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%		100	0	0%	100	100	10000%
4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%		100	51,82	52%	100	151,82	15182%
4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100%		100	75	75%	100	175	17500%

4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%		100	80	80%	100	180	18000%
4	02	02	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%		100	100	100%	100	200	20000%
4	02	02	2.07	Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%		100	0	0%	100	100	10000%
4	02	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100%		100	83,33	83%	100	183,33	18333%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai fasilitator kegiatan DPRD, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Fasilitator kegiatan DPRD Kota Balikpapan. Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan berdasarkan Indikator Kinerja pada Renstra 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana.
2. Persentase Fasilitasi Rapat rapat Dewan Tepat Waktu.
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Sedangkan pada Renstra 2021-2026 indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Nilai Reformasi Birokrasi
3. Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD

Pengukuran tingkat capaian Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah:

SEKRETARIAT DPRD

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN SEKRETARIAT DPRD TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	72	74	76	78					Merupakan Indikator Renstra 2021-2026
			Nilai Reformasi Birokrasi	27	28	29	30	27,01	-	-	-	
			Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	72	74	76	78	64,59	-	-	-	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-SKPD Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada anggota DPRD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja Sekretariat DPRD dapat ditingkatkan lebih efektif dan efisien.

Permasalahan-permasalahan yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

a. Kelembagaan dan Organisasi
   Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang diatur melalui Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini memerlukan penyesuaian kedepannya sehingga dapat meningkatkan daya dukung terhadap fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
b. Dinamika sosial politik yang berkembang, adanya masa transisi keanggotaan DPRD periode baru sehingga berpengaruh pada perencanaan kinerja alat-alat kelengkapan DPRD yang kemudian turut mempengaruhi pada capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun masa transisi tersebut;
c. Tugas utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD;
d. Adanya aturan-aturan baru yang mendukung pelaksanaan tugas namun membutuhkan pemahaman aturan serta waktu dalam melakukan penyesuaian, seperti input Pokir ke dalam SIPD, dan juga aturan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Permendagri 90/ 2019.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Sekretariat DPRD, maka fungsi dan tugas Sekretariat DPRD terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2024

Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah:

SEKRETARIAT DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		5	6	7	9	10	11		12	13
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BALIKPAPAN**	**IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**74**	**Rp 80.858.048.258**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BALIKPAPAN**	**IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**74**	**Rp 97.631.232.000**	
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP	70	Rp 50.395.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP	70	Rp 200.000.000	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74	Rp 5.709.104.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74	Rp 5.709.104.000	
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	74	Rp -	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	74	Rp -	

5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74	Rp 530.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74	Rp 700.000.000	Batik dan PDH ASN, Bimtek Asn
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74	Rp 16.129.428.697	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74	Rp 18.871.136.082	Belanja Alat Listrik, Belanja Mebelair Dan Perlengkapan Peralatan Gedung Paripurna Baru, Natura Pimpinan, Komisi dan Sekretariat, Rapat dan Demo, Mamin Tamu, alat kebersihan, Fotokopi, pengganda an rutin, Koran Nasional, Lokal, Perjalanan dinas rutin (luar negeri dan dalam negeri)

7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	Rp	900.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	Rp	1.800.000.000	Belanja Kendaraan dinas operasional, HIACE VIP
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74	Rp	5.558.368.634	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74	Rp	8.000.000.000	Penambahan daya untuk Videotron di 2023, Servis AC, CCTV, Komputer, pemeliharaan, Jasa Kemanan, Kebersihan, taman, Non ASN
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	Rp	1.500.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	Rp	2.400.000.000	Pemeliharaan Kendaraan dan BBM. Pemeliharaan Gedung Kantor, Psripurna, rumah dinas

10	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Balikpapan	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74	Rp 40.614.072.066	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Balikpapan	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74	Rp 40.772.128.000	Gaji DPRD, 5 Jenis (Pakaian Adat dan Pakaian Dinas), Medical Check Up 45 Anggota DPRD
11	Layanan Administrasi DPRD	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi DPRD	74	Rp 9.951.528.282	Layanan Administrasi DPRD	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi DPRD	74	Rp 11.750.000.000	PAW , LHKPN, SK, Pengadaan Peralatan Perlengkapan Fraksi, Mamin, Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD (Sewa gedung dll), Paripurna Istimewa Hut Kota, Penyediaan Jasa kemanan, kebersihan ,belanja home use, natura rumah dinas

12	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**BALIKPAPAN**	**PRESENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**76**	**Rp 35.011.782.742**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**BALIKPAPAN**	**PRESENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**76**	**Rp 52.755.072.898**	
13	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	Rp 8.895.973.400	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	Rp 12.045.083.148	Fasilitasi Rapat-rapat Bapemperda, Koordinasi dan Konsultasi Bapemperda , Rapat-rapat penyusunan Perda, Koordinasi dan Konsultasi, Rapat-rapat, dan FGD Kajian per komisi, pansus
14	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	Rp 3.099.989.800	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	Rp 4.207.291.000	Koordinasi dan Konsultasi dan Rapat-rapat Badan Anggaran

15	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Rp 3.800.000.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Rp 4.800.000.000	Koordinasi dan Konsultasi, Rapat-Rapat , RDP, Sidak, Kunlap per Komisi
16	Peningkatan Kapasitas DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100	Rp 6.180.819.962	Peningkatan Kapasitas DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100	Rp 12.330.000.000	Bimtek Anggota DPRD Baru (lemhanas) , Bimtek DPRD dan Bimtek Fraksi, Kerjasama media massa, belanja dekorasi, souvenir, Tenaga Ahli untuk Pimpinan dan 7 Fraksi selama 11 bulan, Koordinasi dan konsultasi penyusunan program kerja DPRD, kehumasan

17	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	Rp 6.309.999.600	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	Rp 8.500.000.000	Kegiatan Dialog Warga per komisi, penginputan dan verifikasi pokir pada aplikasi SIPD, Koordinasi dan Konsultasi, Rapat-rapat, Kegiatan reses 45 anggota DPRD selama 3 kali masa sidang
18	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	Rp 900.000.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	Rp 1.200.000.000	Koordinasi dan konsultasi, rapat-rapat Badan Kehormatan
19	Pembahasan Kerjasama Daerah	Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100	Rp 325.000.000	Pembahasan Kerjasama Daerah	Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100	Rp 400.000.000	Koordinasi dan Konsultasi, rapat-rapat

20	Fasilitasi Tugas DPRD	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100	Rp	5.499.999.980	Fasilitasi Tugas DPRD	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100	Rp	9.272.698.750	Koordinasi dan Konsultasi, rapat-rapat Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD, Pansus

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 4

Tabel T-C.32

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2024 Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah:

SEKRETARIAT DPRD

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Makmur, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam

kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan visi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan “Meningkatkan kualitas dan Efektifitas Fasilitasi dan Fungsi DPRD Kota Balikpapan “ serta dengan memperhatikan Misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yaitu :

1. Menyelenggarakan pelayanan prima dan memfasilitasi sarana dan prasarana guna peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD
2. Menyelenggarakan Pelayanan yang memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan.
3. Melaksanakan Tertib administrasi sesuai dengan Peraturan dan ketentuan untuk mendukung akuntabitas akuntabilitas kinerja Setwan dan Anggota DPRD.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Renja Sekretariat DPRD disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan dan dapat mencapai target kinerja yang diharapkan.

Adapun sasaran dari tersusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan ini, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Balikpapan terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dijabarkan sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta aturan turunannya yang mengatur Program, Kegiatan sampai dengan subkegiatan Sekretariat DPRD;
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang diberi pendanaan, antara lain :
    1. Jumlah Program sebanyak 2 (dua) Program, Jumlah Kegiatan sebanyak 16 (enam belas) Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 61 (enam puluh satu) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kota Balikpapan, dikarenakan seluruh program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan program dan kegiatan yang sifatnya memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Balikpapan
3. Pendanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan bersumber dari APBD Kota Balikpapan

c. Terdapat ketidak sesuaian antara rancangan awal pendanaan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :
   1. Rencana pendanaan pembangunan Gedung kantor Sekretariat DPRD;
   2. Rencana kebutuhan pendanaan pembelian/ pemeliharaan aplikasi;
   3. Rencana kebutuhan pendanaan Kerjasama dengan media online;
   4. Rencana kebutuhan bimtek DPRD;
   5. Rencana kebutuhan koordinasi konsultasi tenaga ahli;
   6. Rencana kebutuhan koordinasi konsultasi 7 (tujuh) fraksi.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah:

SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**								
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**BALIKPAPAN**	**74**	**80.858.048.258**	**APBD**		**76**	**104.588.500.000**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP**	**Balikpapan**	**70**	**50.395.600**	**APBD**		**72**	**60.000.000**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Balikpapan	1	-	APBD		1	-
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Balikpapan	1	12.598.900	APBD		1	15.000.000

4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Balikpapan	3	12.598.900	APBD		3	15.000.000
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Balikpapan	1	12.598.900	APBD		1	15.000.000
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Balikpapan	3	12.598.900	APBD		3	15.000.000
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP	Balikpapan	3	-	APBD		3	-
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Balikpapan	3	-	APBD		3	-
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**74**	**5.709.104.000**	**APBD**		**76**	**5.300.286.000**
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	30	5.709.104.000	APBD		13	5.300.286.000
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi	Balikpapan	1	-	APBD		1	-
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Balikpapan	1	-	APBD		1	-
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi dengan BPKD	Balikpapan	1	-	APBD		1	-
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Balikpapan	1	-	APBD		1	-

4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Balikpapan	1	-	APBD		1	-
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	Balikpapan	1	-	APBD		1	-
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi dan Prognosis Anggaran	Balikpapan	1	-	APBD		1	-
4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**74**	**-**	**APBD**		**76**	**-**
4	02	01	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD	Balikpapan	1	-	APBD		1	-
4	02	01	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Inventaris BMD	Balikpapan	1	-	APBD		1	-
4	02	01	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Rekonsiliasi BMD dengan BPKD	Balikpapan	1	-	APBD		1	-
4	02	01	2.03	4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penatausahaan BMD	Balikpapan	1	-	APBD		1	-
4	02	01	2.03	5	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Pemanfaatan BMD	Balikpapan	1	-	APBD		1	-
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**74**	**445.150.979**	**APBD**		**76**	**391.661.886**
4	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarpras Disiplin Pegawai	Balikpapan	1	-	APBD		1	-

4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Balikpapan	30	25.171.400	APBD	Pakaian Mahligai dan PDH ASN	31	88.660.000
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Kepegawaian	Balikpapan	1	-	APBD		1	-
4	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balikpapan	1	-	APBD		1	-
4	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen SKP	Balikpapan	1	-	APBD		1	-
4	02	01	2.05	06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Balikpapan	30	419.979.579	APBD	Bimtek ASN	36	303.001.886
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**74**	**16.129.428.697**	**APBD**		**76**	**20.525.866.903**
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	23	75.000.000	APBD	Belanja Alat Listrik Rutin	23	199.650.000
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Jumlah Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	10	750.000.000	APBD	Belanja Mebeler dan Perlengkapan Peralatan Gedung Paripurna Baru	5	1.800.000.000

4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Balikpapan	15	700.000.000	APBD	Penyediaan peralatan rumah tangga (home use, tool set, bendera dll)	5	1.452.000.000
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balikpapan	5	750.000.000	APBD	Natura Pimpinan, Komisi dan Sekretariat. Rapat dan Demo, Mamin Tamu, alat kebersihan	5	1.200.000.000
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	2	150.000.000	APBD	Fotokopi, penggandaan rutin	2	605.500.000
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Balikpapan	4	200.000.000	APBD	Koran Nasional, Lokal (Sekretariat dan 45 anggota dprd)	4	598.950.000
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	295	3.071.000.000	APBD	Menyesuaikan kebutuhan rapat-rapat tamu pimpinan	295	4.021.766.903
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	4	10.433.428.697	APBD	Perjalanan dinas rutin (luar negeri dan dalam negeri)	3	10.648.000.000

4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**74**	**900.000.000**	**APBD**		**76**	**998.250.000**
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Balikpapan	1	900.000.000	APBD	Belanja Kendaraan dinas operasional HIACE VIP	5	998.250.000
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Balikpapan**	**74**	**5.558.368.634**	**APBD**		**76**	**7.296.300.000**
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Surat-menyurat	Balikpapan	3	-	APBD		3	-
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jenis Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang Disediakan	Balikpapan	4	800.000.000	APBD	Penambahan daya untuk Videotron di 2023	3	1.064.800.000
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	5	1.524.525.873	APBD	Servis AC, CCTV, Komputer, pemeliharaan	5	1.996.500.000
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	4	3.233.842.761	APBD	Jasa Kemanan, Kebersihan, taman, Non ASN	3263	4.235.000.000

4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**74**	**1.500.000.000**	**APBD**		**76**	**11.616.000.000**
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Balikpapan	29	1.000.000.000	APBD	Pemeliharaan Kendaraan dan BBM	29	1.331.000.000
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Balikpapan	2	500.000.000	APBD	Pemeliharaan Gedung Kantor, Paripurna, rumah dinas	4	3.630.000.000
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	0	-	APBD		2	6.655.000.000
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Balikpapan**	**74**	**40.614.072.066**	**APBD**		**76**	**49.375.485.211**
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Balikpapan	45	39.525.102.066	APBD	Gaji DPRD	45	48.309.285.211
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Balikpapan	5	850.470.000	APBD	5 Jenis (Pakaian Adat dan Pakaian Dinas)	45	800.000.000

4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Balikpapan	45	238.500.000	APBD	Medical Check Up 45 Anggota DPRD	45	266.200.000
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**IKM Layanan Administrasi DPRD**	**Balikpapan**	**74**	**9.951.528.282**	**APBD**		**76**	**9.024.650.000**
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Balikpapan	10	50.000.000	APBD	PAW , LHKPN, SK	10	199.650.000
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Balikpapan	7	200.000.000	APBD	Pengadaan Peralatan Perlengkapan Fraksi, dan Mamin	6	800.000.000
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Balikpapan	200	7.391.640.596	APBD	Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD (Sewa gedung dll), Paripurna Istimewa Hut Kota	270	5.000.000.000
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Balikpapan	10	2.309.887.686	APBD	Penyediaan Jasa kemanan, kebersihan, belanja home use, natura rumah dinas	4	3.025.000.000

4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**PRESENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD YANG TERFASILITASI**	**BALIKPAPAN**	**76%**	**35.011.782.742**	**APBD**		**78%**	**42.777.714.112**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Balikpapan**	**100%**	**8.895.973.400**	**APBD**		**100%**	**8.532.214.112**
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Balikpapan	5	50.000.000	APBD	Fasilitasi Rapat-rapat Bapemperda	5	50.000.000
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Balikpapan	40	3.500.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi Bapemperda , Rapat-rapat penyusunan Perda	40	4.023.014.112
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan yang diselenggarakan dalam satu tahun	Balikpapan	5	2.400.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi, Rapat-rapat, dan FGD Kajian per komisi	4	2.129.600.000

4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Balikpapan	5	2.400.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi, Rapat-rapat, dan FGD Naskah Akademik per komisi	4	2.129.600.000
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Balikpapan	1	545.973.400	APBD	Koordinasi dan Konsultasi , Rapat-Rapat , Pansus	1	200.000.000
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Balikpapan**	**100%**	**3.099.989.800**	**APBD**		**100%**	**2.700.000.000**
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Balikpapan	1	650.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi dan Rapat-rapat Badan Anggaran	1	450.000.000
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Balikpapan	1	650.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi dan Rapat-rapat Badan Anggaran	1	450.000.000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Balikpapan	1	650.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi dan Rapat-rapat Badan Anggaran	1	450.000.000
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Balikpapan	1	650.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi dan Rapat-rapat Badan Anggaran	1	450.000.000

4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Balikpapan	2	249.999.800	APBD	Koordinasi dan Konsultasi dan Rapat-rapat Badan Anggaran	2	450.000.000
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Balikpapan	1	249.990.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi dan Rapat-rapat Badan Anggaran	1	450.000.000
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Balikpapan**	**100%**	**3.800.000.000**	**APBD**		**100%**	**19.100.000.000**
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Balikpapan	48	550.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi, Rapat-Rapat , RDP, Sidak, Kunlap per Komisi	48	2.400.000.000
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang InfrastruktuInfrastruktur	Balikpapan	24	550.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi, Rapat-Rapat , RDP, Sidak, Kunlap per Komisi	24	2.400.000.000
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Balikpapan	48	550.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi, Rapat-Rapat , RDP, Sidak, Kunlap per Komisi	48	2.400.000.000

4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Balikpapan	48	550.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi, Rapat-Rapat , RDP, Sidak, Kunlap per Komisi	48	2.400.000.000
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Balikpapan	24	550.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi, Rapat-Rapat , RDP, Sidak, Kunlap per Komisi	24	2.400.000.000
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Balikpapan	1	550.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi, Rapat-Rapat , RDP, Sidak, Kunlap per Komisi	1	2.300.000.000
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Balikpapan	1	250.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi, Rapat-Rapat , RDP, Sidak, Kunlap per Komisi	1	2.300.000.000
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Balikpapan	1	250.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi, Rapat-Rapat	1	2.500.000.000

4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Balikpapan**	**100%**	**6.180.819.962**	**APBD**		**100%**	**5.683.195.254**
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Balikpapan	45	565.000.000	APBD	Bimtek Anggota DPRD Baru (lemhanas)	5	200.000.000
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Balikpapan	45	2.000.000.000	APBD	Bimtek DPRD dan Bimtek Fraksi	90	1.000.000.000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Balikpapan	35	2.500.000.000	APBD	Kerjasama media massa, belanja dekorasi, souvenir	12	3.000.000.000
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Balikpapan	5	595.840.383	APBD	5 org kelompok pakar pimpinan selama 11 bulan	6	796.195.254
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Balikpapan	7	419.979.579	APBD	Tenaga Ahli untuk 7 Fraksi selama 11 bulan	6	250.000.000
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Balikpapan	4	50.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi kehumasan	48	250.000.000

4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	Balikpapan	1	50.000.000	APBD	Koordinasi dan konsultasi penyusunan program kerja DPRD	1	187.000.000
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Balikpapan**	**100%**	**6.309.999.600**	**APBD**		**100%**	**3.497.304.746**
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah selama Satu Tahun	Balikpapan	12	-	APBD		12	-
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Balikpapan	1	3.800.000.000	APBD	Kegiatan Dialog Warga per komisi, penginputan dan verifikasi pokir pada aplikasi SIPD, Koordinasi dan Konsultasi, Rapat-rapat	1	165.000.000
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Balikpapan	3	2.509.999.600	APBD	Kegiatan reses 45 anggota DPRD selama 3 kali masa sidang	3	3.332.304.746
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik**	**Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Balikpapan**	**100%**	**900.000.000**	**APBD**		**100%**	**680.000.000**

4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Balikpapan	1	400.000.000	APBD	Koordinasi dan konsultasi, rapat-rapat Badan Kehormatan	1	350.000.000
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Balikpapan	1	500.000.000	APBD	Koordinasi dan konsultasi, rapat-rapat Badan Kehormatan	1	330.000.000
4	**02**	**02**	**2,07**		**Pembahasan Kerjasama Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah**	**Balikpapan**	**100%**	**325.000.000**	**APBD**		**100%**	**475.000.000**
4	02	02	2,07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Balikpapan	2	200.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi, rapat-rapat	2	275.000.000
4	02	02	2,07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Balikpapan	2	125.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi, rapat-rapat	2	200.000.000
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi**	**Balikpapan**	**100%**	**5.499.999.980**	**APBD**		**100%**	**2.110.000.000**

4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Balikpapan	1	299.999.980	APBD	Koordinasi dan Konsultasi, rapat-rapat Badan Musyawarah	1	450.000.000
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	Balikpapan	16	3.000.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi, rapat-rapat Badan Musyawarah	16	1.500.000.000
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Balikpapan	12	1.000.000.000	APBD	Rapat Pimpinan, Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD	12	160.000.000
4	02	02	2.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksanannya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Balikpapan	5	1.200.000.000	APBD	Koordinasi dan Konsultasi, rapat-rapat Pansus		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan. Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan.

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dari kebijakan yang telah dibuat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Adapun rancangan akhir Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Rancangan Akhir RKPD 2024

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BALIKPAPAN**	**IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**74**	**Rp 88.488.241.748**

2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP	70	Rp	50.399.600
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74	Rp	5.709.104.000
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	74	Rp	-
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74	Rp	530.000.000
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74	Rp	18.871.136.082
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	Rp	1.800.000.000
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74	Rp	8.000.000.000
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	Rp	1.900.000.000

10	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Balikpapan	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74	Rp	41.263.602.066
11	Layanan Administrasi DPRD	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi DPRD	74	Rp	10.364.000.000
12	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**BALIKPAPAN**	**PRESENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**76**	**Rp**	**42.418.063.150**
13	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	Rp	11.015.072.800
14	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	Rp	4.207.291.000
15	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Rp	3.450.000.000
16	Peningkatan Kapasitas DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100	Rp	11.243.000.000

17	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	Rp	5.159.999.600
18	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	Rp	800.000.000
19	Pembahasan Kerjasama Daerah	Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100	Rp	300.000.000
20	Fasilitasi Tugas DPRD	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100	Rp	6.242.699750

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Salah satunya dengan melakukan terobosan-terobosan inovatif untuk pencapaian target kinerja dan tujuan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga inovasi daerah menjadi bagian penting dari pembangunan. Beberapa yang menjadikan prinsip dasar pengembangan inovasi daerah meliputi cara berpikir strategis dan konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi Inovasi Daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah, Stratregi inovasi daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya saing daerah, berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan menetapkan tujuan yang jelas serta capaian yang rasional. Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kita secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik/holistik, ketidaklinieran sifatnya, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pemerintah Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman, dan mewujudkan misi ke 1 Pemerintahan yang baik maka diperlukan sebuah strategi peningkatan layanan pemerintahan berbasis digital, modern, adaptif, mengikuti era dan perkembangan zaman yang di mulai dari masing – masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada DPRD Kota Balikpapan dalam menjalankan Fungsi dan kewenangannya (Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Penganggaran) maka dilaksanakan pembahasan antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan seluruh elemen Sekretariat DPRD Kota Balikpapan untuk merumuskan isu strategis yang menjadi fokus penguatan pemberian layanan dan fasilitasi DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, dengan hasil sebagai berikut.

1. Pelayanan dan Fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan masih bersifat Konvensional;
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM sehingga pelayanan dan fasilitasi sangat lambat, tidak efektif dan efisien serta tidak trasnparan;
3. Pendokumentasian, pengarsipan dokumen penting belum berjalan dengan baik;
4. Belum optimalnya sinergitas antar lembaga;
5. Belum tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi antara Eksekutif, Legislatif dan masyarakat.

Si Dilan atau Sistem Digital Melayani merupakan sebuah terobosan yang dihadirkan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka menciptakan sebuah layanan yang berbasis digital guna memberikan layanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Terobosan ini juga merupakan sarana dalam rangka membangun harmonisasi antara eksekutif dengan legislatif yang muaranya mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Kota Balikpapan.

Dalam konsep besar Si Dilan merupakan perwujudan dari rencana implementasi RPJMN Pemerintah Republik Indonesia dalam Agenda prioritas ke 8 yang lebih di kenal sebagai Nawacita ke 2 Pemerintahan Jokowi – Ma'ruf yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. Sejalan dengan itu Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. Sejalan dengan itu Pemerintah Kota Balikpapan dalam RPJMD telah menetapkan Visi Kota Balikpapan sebagai Kota Terkemuka dan Kota Modern dengan Misi ke 1 adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai Misi ke 1 Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik maka di butuhkan strategi dan terobosan untuk memulai dan mengubah sistem layanan pemerintahan dari konvensional menjadi layanan digitalisasi. Sistem Digital ini merupakan alat dalam rangka menghadirkan layanan yang memenuhi prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Prinsip tersebut yaitu layanan cepat, tepat, efektif dan efisien serta transparan.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan penyusunan KUA PPAS Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Renstra Sekreatariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Adapun Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan melalui perencanaan kegiatan yang berkualitas. Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dan sebagai instrument pengukuran capaian kinerja organisasi. Pelaksanaan penyusunan serta penetapan dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan yang berkualitas.

Akhir kata, semoga Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dan segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Balikpapan, Agustus 2023
Sekretaris DPRD

ARFIANSYAH, S.T, M.Si

bappedalitbang.balikpapan.go.id

RENCANA KERJA
RENJA 2024

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BALIKPAPAN

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan 2024 akan menjadi bagian dari rancangan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada periode tersebut.

Penyusunan Renja ini merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024 memuat usulan program, kegiatan beserta subkegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024. Serta menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Balikpapan, Juli 2023

Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan,

Murni

DARTAR ISI

Kata Pengantar			.....	i
Daftar Isi			.....	ii
Daftar Tabel			.....	iii
Bab I		Pendahuluan	.....	1
	1.1	Latar Belakang	.....	1
	1.2	Landasan Hukum	.....	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	.....	2
	1.4	Sistematika Penulisan	.....	3
Bab II		Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	.....	4
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	.....	4
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	.....	18
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	.....	21
	2.4	Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	.....	26
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	.....	29
Bab III		Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	.....	31
	3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	.....	31
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	.....	32
Bab IV		Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	.....	36
Bab V		Penutup	.....	51
	5.1	Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	.....	51
	5.2	Kaidah-kaidah pelaksanaan	.....	51
	4.3	Rencana Tindak Lanjut	.....	52

DARTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja SKPD sampai dengan Tahun 2022 Kota Balikpapan	.....	5
Tabel	2.3	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	.....	21
Tabel	2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Balikpapan	.....	30
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Balikpapan	.....	37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 125 maka Bappeda Litbang melaksanakan penyusunan Renja yang merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2024.

Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2024 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Peambangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan

dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2024;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Ranwal Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD serta Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bappeda Litbang

Capaian kinerja Renja Bappeda Litbang, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Bappeda Litbang.

Target kinerja dimaksud menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Bappeda Litbang untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, maka capaian kinerja Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada akhir tahun 2022, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Bappeda Litbang Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Indeks Kepauasan Masyarakat (Internal)**	**85,50**	**11.245.481.000**	**0**	**1.569.415.610**	**0**	**2.420.224.926**	**82,14**	**2.698.748.101**	**0**	**2.152.837.884**	**82,14**	**8.841.226.521**	**96%**	**78,62%**	**Belum semua responden memberikan penilaian terhadap pelayanan Sekretariat, hal ini terlihat dari jumlah responden seharusnya 28 orang namun yang telah mengembalikan hanya 23 orang karena ada 5 orang pegawai orang tidak mengembalikan kuisioner**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Sakip Bappeda Litbang**	**82,98**	-	**0**	**-**	**0**	**-**	**83,35**	**-**	**0**	**-**	83,35	0	**100,45%**	**0%**	Capaian Kinerja berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sakip Bappeda Litbang Tahun 2021 yang dievaluasi pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	-	0	-	0	-	2	-	0	-	2	-	100%	0%	Dokumen perencanaan Bappeda Litbang yang disusun pada tahun 2022 adalah dokumen Renja Murni Tahun 2023 dan dokumen Renja Perubahan tahun 2022
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	0%	Realisasi berdasarkan dokumen RKA Murni Tahun 2023
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1	-	100%	0%	Realisasi berdasarkan dokumen RKA Perubahan Tahun 2022
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	100%	0%	Realisasi berdasarkan dokumen DPA Murni Tahun 2023
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	0%	Realisasi berdasarkan dokumen DPA Perubahan Tahun 2022
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	100%	0%	Realisasi berdasarkan dokumen LKJIP Bappeda Litbang yang tersusun pada tahun 2022 untuk evaluasi kinerja tahun 2021
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	2	-	2	-	0	-	0	-	0	-	2	-	100%	0%	Realisasi berdasarkan dokumen evaluasi IKU dan IKI Pegawai Bappeda Litbang tahun 2022
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah	85,75	8.064.731.000	0	1.353.148.003	0	1.593.274.707	81,47	1.893.275.376	0	1.171.080.386	81,47	6.010.778.472	**95%**	**74,5%**	Belum semua responden memberikan penilaian terhadap pelayanan Sekretariat, hal ini terlihat dari jumlah responden seharusnya 28 orang namun yang telah mengembalikan hanya 23 orang karena ada 5 orang pegawai orang tidak mengembalikan kuisioner
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	28	8.064.731.000	6	1.353.148.003	8	1.593.274.707	6	1.893.275.376	8	1.171.080.386	28	6.010.778.472	100%	74,5%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi	1	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuanga SKPD	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	laporan Rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntasi dengan BPKD	6	-	0	-	3	-	0	-	3	-	6	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	2	-	1	-	0	-	0	-	1	-	2	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan Keuangan Bulanan	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi dan Prognosis Anggaran	2	-	0	-	1	-	0	-	1	-	2	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM layanann adminisytrasi barang milik daerah	0	-	0	-	0	-		-		-	0	-	**0%**	**0,0%**	Kegiatan ini bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengadaan dan pemeliharaan BMD, sehingga tidak diukur indikatornya
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD	2	-	0	-	0	-	2	-	0	-	2	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Inventasris BMD	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Kondisi BMD	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Kartu Inventaris BMD	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi BMD dengan BPKD	2	-	1	-	0	-	1	-	0	-	2	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan BMD	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Pemanfaatan BMD	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	83,50	-	0	-	0	-	82,91	-	0	-	82,91	-	**99%**	**0,0%**	Belum semua responden memberikan penilaian terhadap pelayanan Sekretariat, hal ini terlihat dari jumlah responden seharusnya 28 orang namun yang telah mengembalikan hanya 23 orang karena ada 5 orang pegawai orang tidak mengembalikan kuisioner
	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarpras Displin Pegawai	1	-	1	-	1	-	1	-	0	-	1	-	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta	40	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	Sub Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022 karena adanya kebijakan level Kota, bahwa tahun 2022 tidak ada Pengadaan Pakaian Dinas

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Atributnya Kelengkapannya															Beserta Atribut Kelengkapannya
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Kepegawaian	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pelaksanaan sistem informasi Kepegawaian	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen SKP	43	-	33	-	0	-	0	-	0	-	33	-	76,7%	0,0%	Realisasi berdasarkan jumlah pegawai pada tahun 2022, terjadi perpindahan/mutasi pegawai sehingga realisasi tidak sesuai dengan target awal
	Sub Kegiatan Pendidikan dan PelatihanPegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	43	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	2,3%	0,0%	Sub kegiatan ini berdasarkan panggilan diklat dari BKPSDM
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan Sosialisasi	2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	Sub Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	43	-	0	-	0	-		-		-	0	-	0,0%	0,0%	Sub Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi umum perangkat daerah	85,50	1.885.750.000	0	80.743.600	0	645.539.791	82,91	587.584.298	0	497.196.529	82,91	1.811.064.218	**97%**	**96,0%**	Belum semua responden memberikan penilaian terhadap pelayanan Sekretariat, hal ini terlihat dari jumlah responden seharusnya 28 orang namun yang telah mengembalikan hanya 23 orang karena ada 5 orang pegawai orang tidak mengembalikan kuisioner
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15	10.000.000	0	-	0	-	4	2.851.590	2	3.936.060	6	6.787.650	40,0%	67,9%	Realisasi berdasarkan belanja kebutuhan komponen listrik sebanyak 9 jenis komponen
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	10	525.000.000	6	-	1	284.342.500	2	169.680.150	1	55.250.250	10	509.272.900	100,0%	97,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan RumahTangga	4	-	0	-	0	-	-	-			0	-	0,0%	0,0%	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistic kantor	3	463.250.000	3	49.794.690	3	90.409.307	3	105.357.771	3	188.307.947	3	433.869.715	100,0%	93,7%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3	125.000.000	3	4.665.200	3	54.218.670	3	20.377.180	3	28.549.400	3	107.810.450	100,0%	86,2%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	2.500.000	0	-	0	-	2	495.000	-	1.980.000	2	2.475.000	100,0%	99,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	500	40.000.000	150	1.456.400	197	4.955.500	103	7.994.250	335	16.468.350	785	30.874.500	157,0%	77,2%	Terjadi peningkatan jumlah kunjungan tamu pada tahun 2022, sehingga realisasi melebihi target
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	236	720.000.000	41	24.827.310	87	211.613.814	108	280.828.357	91	202.704.522	327	719.974.003	138,6%	100,0%	Adanya penambahan pelaksanaan kegiatan koordinasi
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKP	12	-	0	-	0	-	12	-	-		12	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE	1	-	0	-	0	-	1	-	-		1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	82,00	-	0	-	0	-	81,83	-	-	-	81,83	-	**100%**	**0,0%**	Belum semua responden memberikan penilaian terhadap pelayanan Sekretariat, halini terlihat dari jumlah responden seharusnya 28 orang namun yang telahmengembalikan hanya 23 orang karena ada 5 orang pegawai orang tidakmengembalikan kuisioner
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	1	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0,0%	0,0%	Sub Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0,0%	0,0%	Sub Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel	2	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0,0%	0,0%	Sub Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	3	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0,0%	0,0%	Sub Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	85,45	585.000.000	0	90.221.462	0	127.784.965	81,74	120.657.213	0	151.729.922	81,74	490.393.562	**96%**	**83,8%**	Belum semua responden memberikan penilaian terhadap pelayanan Sekretariat, hal ini terlihat dari jumlah responden seharusnya 28 orang namun yang telah mengembalikan hanya 23 orang karena ada 5 orang pegawai orang tidak mengembalikan kuisioner
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2	3.000.000	2	721.000	2	657.725	2	736.000	2	500.000	2	2.614.725	100,0%	87,2%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5	18.000.000	4	2.711.010	4	2.763.988	4	4.505.358	4	4.580.781	4	14.561.137	80,0%	80,9%	Realisasi berdasarkan jumlah rekening yang dibayarkan setiap bulannnya yaitu, rekening pembayaran air, telpon, zoom dan speedy (internet)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	30.000.000	2	5.841.000	2	3.894.000	2	8.917.920	2	7.788.000	2	26.440.920	66,7%	88,1%	Realisasi berdasarkan pelaksanaan sewa tanaman dan jasa laundry
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS	10	534.000.000	8	80.948.452	8	120.469.252	8	106.497.935	8	138.861.141	8	446.776.780	80,0%	83,7%	Jumlah tenaga honorer yang aktive di Bappeda Litbang hanya 8 orang
		Jumlah tenaga Profesional	1		0		0		0	-	0	-	0				
		Luasan Gedung Kantor yang dilayani	900		900		900		900	-	900	-	900		100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	81,05	710.000.000	0	45.302.545	0	53.625.463	82,01	97.231.214	0	332.831.047	82,01	528.990.269	**101%**	**74,5%**	Belum semua responden memberikan penilaian terhadap pelayanan Sekretariat, hal ini terlihat dari jumlah responden seharusnya 28 orang namun yang telah mengembalikan hanya 23 orang karena ada 5 orang pegawai orang tidak mengembalikan kuisioner
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	10	240.000.000	4	29.016.775	2	22.435.663	2	37.637.100	2	70.967.871	10	160.057.409	100,0%	66,7%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan dinas	12	120.000.000	4	16.285.770	2	20.200.800	6	25.403.339	0	37.489.663	12	99.379.572	100,0%	82,8%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	oprasional/lapangan yang dipelihara															
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel	3	30.000.000	0	0	0		3	29.961.675	0	-	3	29.961.675	100,0%	99,9%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9	70.000.000	0	0	1	10.989.000	5	4.229.100	0	31.030.050	6	46.248.150	66,7%	66,1%	Realisasi berdasarkan belanja kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai kebutuhan yaitu 6 jenis
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	1	250.000.000	0	0	0	0	1	-	0	193.343.463	1	193343463,00	100,0%	77,3%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
4	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32,76	3.300.000.000	0	34.946.000	29,96	868.774.947	0	575.589.586	0	1.288.740.124	29,96	2.768.050.657	**91,45%**	**83,88%**	Capaian Kinerja berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sakip Kota Balikpapan Tahun 2021 yang dievaluasi oleh Tim KemenpanRB pada tahun 2022
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	0	970.000.000	0	34.946.000	0	377.178.227	0	159.891.763	2,38	365.744.976	2,38	937.760.966	**0%**	**96,7%**	Pada awal tahun perencanan Renstra 2021-2026, indikator ini masih dianggap NA pada tahun 2022, namun pada pelaksanaannya ternyata indikator ini mampu diukur
	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumentasi Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1	-	0	-	0	-	1	-	0		1	0,00	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijkan lainnya	1	-	0	-	0	-	1	-	0		1	0,00	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	-	0	-	0	-	2	-	0		2	0,00	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	1	-	0	-	0	-	1	-	0		1	0,00	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1	970.000.000	0	34.946.000	1	377.178.227	0	159.891.763	0	365.744.976	1	937.760.966	100,0%	96,7%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Juknis/ bahan Musrenbang Kecamatan	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	0,00	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	2	-	0	-	1	-	1	-	0		2	0,00	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	100	1.450.000.000	0	62.178.000	0	269.082.240	0	105.650.000	100	578.421.050	100	1.015.331.290	**100%**	**70,0%**	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan	20	1.200.000.000	0	49.550.000	0	176.650.000	20	82.550.000	0	516.550.000	20	825.300.000	100,0%	68,8%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembangunan Daerah															
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Forum Datu data	3	150.000.000	0	12.628.000	0	92.085.920	3	23.100.000	0	10.306.000	3	138.119.920	100,0%	92,1%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	100.000.000	0	-	0	346.320	1	-	0	51.565.050	1	51.911.370	100,0%	51,9%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	0	880.000.000	0	0	0	222.514.480	0	310.047.823	2,48	344.574.098	2,48	877.136.401	**0%**	**99,7%**	Pada awal tahun perencanan Renstra 2021-2026, indikator ini masih dianggap NA pada tahun 2022, namun pada pelaksanaannya ternyata indikator ini mampu diukur
	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Capaian Koordinasi Pengendalian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen RPJMD dan RKPD Kota Balikpapan	20	750.000.000	0	-	0	199.360.000	20	249.183.673	0	299.983.938	20	748.527.611	100,0%	99,8%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pengendalian PelaksanaanKerjasama Daerah	Capaian PengendalianKinerja PelaksanaanKerjasama Daerah	20	-	0	-	0	-	20	-	0	-	20	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penyediaan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20	130.000.000	0	-	0	23.154.480	20	60.864.150	0	44.590.160	20	128.608.790	100,0%	98,9%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	23,460	0	0	-	21,55	-	0,00	-	0,00	-	**21,55**	**-**	**92%**	**0,00%**	Capaian Kinerja berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sakip Kota Balikpapan Tahun 2021 yang dievaluasi oleh Tim KemenpanRB pada tahun 2022
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	-	0	-	0	-	0	-	100	-	100	-	**100%**	**0,0%**	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Unit Kerja yang diasistensi	47	-	47	-	47	-	47	-	47	-	47	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-	13	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	24	-	24	-	24	-	24	-	24	-	24	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Unit Kerja yang diasistensi	827	-	827	-	827	-	827	-	827	-	827	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	-	2	-	0	-	0	-	0	-	2	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	-		-		-		-	100	-	100	-	**100%**	**0,0%**	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bidang SDA (RPJP, RPJMD, dan RKPD)															
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Unit Kerja yang diasistensi	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Perekonomian	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub KegiatanAsistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Unit Kerja yang diasistensi	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen Pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	-		-		-		-	100	-	100	-	**100%**	**0,0%**	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktut (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Unit Kerja yang diasistensi	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah BidangInfrastruktur	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Unit Kerja yang diasistensi	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Kewilayahan	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Pelaporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	0	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bidang Kewilayahan	Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan															
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100	3.375.000.000	0	8.008.000	0	222.369.125		1.194.046.646	100	1.739.667.952	100	3.164.091.723	**100%**	**93,75%**	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	100	500.000.000	0	-	0	-		74.585.100	100,00	323.652.803	100,00	398.237.903	**100%**	**79,6%**	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang OTDA	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0	0	0,0%	0,0%	Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0	0	0,0%	0,0%	Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0	0	0,0%	0,0%	Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	400.000.000	0	-		-	1	74.585.100	0	323.652.803	1	398.237.903	100,0%	99,6%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0,0%	0,0%	Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	-	0	-		-	0	-	0	-	0	0	0,0%	0,0%	Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Data base hasil Penelitian dan Peraturan	1	100.000.000	0	-		-	0	-	1	-	1	-	100,0%	0,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Perumusan	Jumlah Laporan	1	-		-		-		-	0	-	0	0	0,0%	0,0%	

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan															
	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1	-		-		-		-	0	-	0	0	0,0%	0,0%	Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	1	-		-		-		-	0	-	0	0	0,0%	0,0%	Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	100	450.000.000	0	-		62.545.725		187.173.195	100	199.432.962	100	449.151.882	**100%**	**99,8%**	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2	-		-		-		-	0	-	0	0	0,0%	0,0%	
	Sub kegiatanpenelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	1	199.432.962	1	199.432.962	100,0%	99,7%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang kesehatan	1	250.000.000	0	0		62.545.725	1	187.173.195	0	-	1	249718920	100,0%	99,9%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100	1.650.000.000		-		159.823.400		819.215.600	100	653.550.481	100	1.632.589.481	**100%**	**98,9%**	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub kegiatan penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	100.000.000		-		-		-	1	99.877.800	1	99.877.800	100,0%	99,9%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	DokumenPenelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	0	-	0	-		-	0	-	0	-	0	0	0,0%	0,0%	Sub Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena: 1. Penilaian kinerja BUMD diserahkan sepenuhnya pada akuntan publik (independen) yang menjadi tanggungjawab BUMD sendiri yang tentunya sudah diatur dalam rumah tangga BUMD; 2. Kajian Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Permendagri 77 Tahun 2020 pelaksanaannya pada BPKAD selaku PPKD

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
					I		II		III		IV						
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub kegiatanpenelitian dan pengembangan pertanian perkebunan dan pangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan pertanian perkebunan dan pangan	1	150.000.000		-		-		-	1	149.884.000	1	149.884.000	100,0%	99,9%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2	600.000.000	0	-		-	2	179.922.000	0	403.788.681	2	583.710.681	100,0%	97,3%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1	800.000.000	0	-		159.823.400	1	639.293.600	0	-	1	799.117.000	100,0%	99,9%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	6	775.000.000		8.008.000		-		113.072.751	6	563.031.706	6	684.112.457	**100%**	**88,3%**	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	350.000.000	0	-		-	0	104.994.900	2	244.988.100	2	349.983.000	100,0%	100,0%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	175.000.000	0	-		-	0	-	1	163.852.319	1	163.852.319	100,0%	93,6%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif kepada stakeholder terkait	1	100.000.000	0	-		-	0	-	1	94.390.000	1	94.390.000	100,0%	94,4%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen pelaksanaan Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	1	100.000.000	0	-		-	0	8.077.851	1	24.489.247	1	32.567.098	100,0%	32,6%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Dokumen pelaksanaan proses hak kekayaan Intelektual	1	50.000.000	0	8.008.000		-	0	-	1	35.312.040	1	43.320.040	100,0%	86,6%	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
														Rata-rata capaian kinerja (%)	**82,91%**	**31,31%**	
														Predikat Kinerja	**Tinggi**	**Sangat Rendah**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN															**82,53%**	**26,66%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN															**Tinggi**	**Sangat Rendah**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN															**81,67%**	**87,45%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN															**Tinggi**	**Tinggi**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															**94,85%**	**64,06%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															**Sangat Tinggi**	**Rendah**	

Penjabaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja yang Telah dilaksanakan

Berdasarkan Tabel 2.1. Pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2022 di atas yang merupakan evaluasi hasil Renja sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2022, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

1. Total rata-rata capaian dari seluruh sub kegiatan adalah 82,53% untuk capaian kinerja dengan predikat "**tinggi**" dan 26,66% untuk capaian keuangan dengan predikat "**sangat rendah**".

   Capaian kinerja tidak 100% karena terdapat jenis target pada sub kegiatan yang sudah direncanakan pada tahap Renja, namun tidak terakomodir pada tahap APBD. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya tidak jadi dilaksanakan, sehingga capaian kinerjanya 0%, karena pada tahun 2022 terdapat kebijakan yang tidak memperkenankan untuk melakukan pengadaan tersebut. Selain itu, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi juga memiliki capaian kinerja yang sangat rendah yaitu 2,3% dikarena pada tahun 2022 hanya ada 1 orang yang mengikuti panggilan Diklat yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Balikpapan. Berikutnya adalah Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki capaian 0%, dikarenakan sub kegiatan ini tidak diakomodir di APBD 2022. Berikutnya adalah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang capaian kinerjanya hanya 40%, hal ini dikarenakan Realisasi berdasarkan belanja kebutuhan komponen listrik sebanyak 9 jenis komponen. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga capaiannya 0% dikarenakan Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022. Untuk semua sub kegiatan pengadaan tidak dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga capaian kinerjanya 0%. Dan untuk sub kegiatan di bidang litbang, rencana yang tertuang di Renja 2022 tapi tidak di akomodir di APBD 2022, sehingga capaian kinerja juga menjadi 0%.

   Rendahnya capaian keuangan pada seluruh sub kegiatan dikarenakan adanya subkegiatan yang memiliki kinerja yang dapat diukur, namun tidak memiliki anggaran/pagu, sehingga mempengaruhi rata-rata terhadap capaian keuangan.

2. Total rata-rata capaian dari seluruh kegiatan adalah 81,67% untuk capaian kinerja dengan predikat kinerja "**tinggi**" dan 87,45% untuk capaian keuangan dengan predikat "**tinggi**"

   Secara keseluruhan capaian tersebut sudah baik, namun belum mencapai 100% dikarenakan terdapat jenis target kinerja yang tidak terealisasi, yaitu pada kegiatan

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut pengelolaannya langsung dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Balikpapan. Selain itu pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan serta Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, capaian kinerja dianggap 0% karena pembagi yang masih NA. Hal ini karena pada awal tahun perencanan Renstra 2021-2026, indikator ini masih dianggap NA pada tahun 2022, namun pada pelaksanaannya ternyata indikator ini mampu diukur.

Sedangkan realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan adanya sisa belanja dari kontrak kerja maupun pengadaan.

3. Total rata-rata capaian dari seluruh program adalah 94,85% untuk kinerja dengan predikat "**sangat tinggi**" dan 64,06% untuk keuangan dengan predikat "**rendah**".

   Predikat kinerja tersebut merupakan pencapaian yang harus dipertahankan, namun perlu upaya untuk peningkatan capaian agar sesuai target yang ditetapkan. Hal ini terkait dengan Survey Kepuasan Masyarakt Internal dan peningkatan nilai SAKIP Kota Balikpapan untuk Komponen Perencanaan, Pengukuran dan Capaian Kinerja.

   Sedangkan untuk capaian keuangan predikatnya rendah dikarenakan ada 1 program yang memiliki kinerja namun tidak memiliki pagu anggaran yaitu Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

   Langkah dalam mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target adalah sebagai berikut:

   a. Melakukan reviu serta penelaahan indikator kinerja program dan kegiatan;
   b. Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian pada tahun-tahun sebelumnya;
   c. Menentukan target secara realistis dan berdasar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Kelembagaan

   Kelembagaan Bappeda Litbang Kota Balikpapan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah.

2. Mekanisme Perencanaan

   Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

   Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah *(top-down);* dan bawah atas *(bottom-up).* Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

3. Hasil Kinerja

   Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:

a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang: Penyusunan RPJPD 2005 –2025 Kota Balikpapan;
b. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek: Perencanaan umum, Forum PD, Penyusunan RKPD Kota Balikpapan, Penetapan RKPD, Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2022;
c. Dokumen Perencanaan Teknis Antara lain :
    - Penyusunan dokumen indeks kulaitas perencanaan Kota Balikpapan;
    - Kajian /penelitian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Balikpapan;
    - Kajian Rencana penanggulanagn kemiskinan daerah (RPKD) Kota Balikpapan;
    - Penyusunan dokumen studi kelayakan rumah sakit di kecamatan Balikpapan Timur;
    - Penyusunan profil invenstasi Kota Balikpapan;
    - Penyusunan RAD pangan dan gizi Kota Balikpapan;
    - Kajian penangan abrasi Pantai Manggar Segarasari;
    - Penyusunan dokumenkajian survey indeks pelayanan infrastruktur dan kota layak huni;
    - Penyusunan Dokumen kajian rencana induk kelitbangan;
    - Penyusunan dokumen kajian road map SIDa Kota Balikpapan 2021-2026.
e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota maupun forum Organsasi Perangkat Daerah (OPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama TAPD Kota Balikpapan;
f. Evaluasi dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	56,22	51,51	91,62%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60	57,88	96,46%
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,5	34,25	105,38%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Balikpapan

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam perencanaan pembangunan Nasional isu strategis yang diusung adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas. Selaras dengan tema tersebut, Provinsi Kalimantan Timur dalam perencanaan pembangunannya menetapkan tema Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi dan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Nilai tambah Ekonomi.

Isu-isu strategis pembangunan Kota Balikpapan dengan mengacu pada tema pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Daerah, Pengendalian Kuantitas Penduduk Dan Perluasan Lapangan Kerja;
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Serta Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Dan Berketahanan Bencana;
3. Peningkatan Ketersediaan Infrastuktur Yang Berorientasi Pada Konsep Hijau (Green City);
4. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Yang Berwawasan Lingkungan (Green Economy);
5. Pemantapan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Setelah memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan serta isu-isu strategis pembangunan Kota Balikpapan tersebut di atas, maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan diperlukan Perencanaan pembangunan yang baik sehingga akan menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik yang diharapkan memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Peningkatan Kualitas SDM dan Pemerataan Akses Layanan Dasar Berkualitas Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi menjadi tema dalam penyusunan perencanaan pembangunan (RKPD) Kota Balikpapan tahun 2024. Pada tahapan ini perlu diperhatikan isu strategis yang berkaitan dengan penunjukkan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara serta serta isu lingkungan yang harus tetap menjadi prioritas pembangunan karena dampak degradasi lingkungan di kota Balikpapan sangat terasa.

Beberapa arahan penting dalam penyusunan rencana pembangunan kedepan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, dan Profesional;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas;
4. Mewujudkan Kota yang Aman, Tertib, dan Ramah Lingkungan;

5. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Merata;
6. Peningkatan Sektor Ekonomi yang Kreatif.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagai unsur perencana, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pembangunan dengan baik. Salah satunya dengan mengawal proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan dan memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota.

Bappeda Litbang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu menyampaikan konsep perencanaan tahun 2024 kepada Perangkat Daerah dengan peningkatan Kualitas *Money Follow Program* dengan pendekatan konsep *Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial* (HITS) dan *Inklusif*, antara lain sebagai berikut:

- Money Follow Program : Penyusunan perencanaan dan penganggarannya tidak lagi bersifat *incremental*, sekedar penambahan proposional atau *Bussines As Usual*
- Sebaliknya : Benar –benar mengikuti prioritas pembangunan yang lebih tajam.
- Holistik : Perencanaan yang menyeluruh;
- Tematik : Jelas dan Focus apa yang mau di bangun;
- Terintegrasi: Menerobos adanya ego sektoral;
- Spasial : Ke daerahan atau Ke wilayahan
- Inklusif : Menyeluruh, meliputi segala aspek dan usia

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal (Kekuatan,,Kelemahan, Peluang dan Tantangan). Maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan ekternal. Analisa internal meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesess*), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (*opportunity*) dan peluang (*treaths*). Analisis SWOT yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram analisa berikut ini.

Analisa Lingkungan (Internal Dan Eksternal)
Analisa SWOT Bappeda Litbang
Kota Balikpapan

ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL / ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL		S. STRENGTH (KEKUATAN)		W. WEAKNESSES (KELEMAHAN)	
		1	Adanya sistem perencanaan di seluruh bidang	1	Data dasar (basic data) perencanaan belum omptimal
		2	Adanya komitmen seluruh komponen perencana	2	Data hasil pembangunan kota terbatas
		3	Jumlah sdm secara umum memadai	3	Belum memadainya jumlah tenaga teknis perencanaan, penelitian dan pengkajian
		4	Koordinasi cukup baik antar PD	4	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
O. OPPORTUNITY (PELUANG)		**SO**		**WO**	
1	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi	1	Adanya SDM perencana yang memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	1	Meningkatkan kerjasaam dalam analisa data hasil pembangunan
2	Adanya kesempatan untuk mengembangkan atau meningkatkan profesionalisme aparatur	2	Adanya dana untuk mengembangkan profesionalisme aparatur	2	Mengoptimalkan teknologi informasi dalam memenuhi basic data
3	Adanya kepercayaan eksetrnal terhadap perencanaan pembangunan	3	Melaksanakan system perencanaan dalam menignkatkan perencanaan pembangunan	3	Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dan peneliti
4	Adanya reformasi, transparansi dan akuntabilitas	4	Memanfaatkan kemampuan SDM untuk melakukan reformasi , transparansi dan tingkat akuntabilitas	4	Mengoptimalkan data hasil pembangunan kota untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencana pembangunan
T. THREATS (ANCAMAN)		**ST**		**WT**	
1	Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah	1	Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mensosialisasikan perencanaan pembangunan	1	Mengoptimalisasi data hasil pembangunan untuk mengurangi persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah
2	Masih adanya ego sektoral dalam	2	Meningkatkan koordinasi untuk meminimalisir ego	2	Mengoptimalisasi data dasar dan menghilangkan ego

	perencanaan pembangunan		sektoral		sektoral dalam proses perencanaan pembangunan
3	Tuntutan dan aspirasi semakn beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan	3	Menampung dan memperhatikan aspirasi masyarakat	3	Meningkatkan kinerja aparatur
4	Masih adanya kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat	4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	4	Meningkatkan proses perencanaan yang tepat waktu

Sumber : Hasil Analisa

Hasil Analisa Lingkungan tersebut diatas yang merupakan isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pokok Bappeda Litbang Kota Balikpapan antara lain :

1. Terbukanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan.

   Keterbukaan informasi dan teknologi mendorong adanya kesempatan untuk lebih meningkatkan kerjasama daerah dengan daerah lain, lembaga swasta maupun lembaga lain dalam mengupayakan pembangunan yang lebih baik, termasuk di dalamnya dalam perencanaan pembangunan yang didukung dengan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan.
2. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal.

   Sistem perencanaan pembangunan yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004) memiliki kepastian yang tetap yang harus dilaksanakan di dalam menyusun perencanaan pembangunan di semua urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan semakin meningkat kualitasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada.
3. Perlu optimalisasi *database* pembangunan.

   Data merupakan cermin dari realisasi kondisi yang ada dan sebagai dasar didalam melakukan perencanaan pembangunan. Namun kondisi kesiapan data pembangunan daerah dirasakan masih belum optimal, ketersediaannya masih terbatas. Sehingga dapat memperlambat perencanaan pembangunan dan sebagai salah satu solusinya adalah perlu dilakukan pembaharuan data secara periodik dan berkelanjutan dengan variasi berbagai jenis data serta melakukan kerjasama dengan BPS untuk validasi data.
4. Adanya komitmen seluruh komponen perencana.

Komitmen komponen perencana ini sangat penting untuk mewujudkan perencanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan faktor yang dirasa perlu dibenahi dan dianggap sebagai penghambat dari pelaksanaan pemerintahan di Bappeda Litbang Kota Balikpapan antara lain :

1) Data Dasar *(Database)* dan data pembangunan belum optimal;
2) Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Ranwal Renja Bappeda Litbang Tahun 2024 merupakan tahun kedua untuk RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Dalam perencanaan pembangunan kota Balikpapan terdapat beberapa permasalahan utama yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manuasia;
2. Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur;
4. Peningktaan kualitas lingkungan hidup;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel.

Adapun prioritas pembangunan kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Penguatan kinerj pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Ketahanan bencana dan kondusifitas daerah;
5. Pembangunan ekonomi inklusif;
6. Peningkatan kualitas infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup.

Dengan bertemakan mempertahankan kondusifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan lingkungan yang berkelanjutan, fokus pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi inklusif;
2. Pembangunan sumber daya manusia;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup;
4. Penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK;

5. Kondusifitas daerah.

Sedangkan program prioritas pembangunan kota Balikpapan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi inklusif;
   - Pengendalian harga dan stok bapokting
     - Prog. Sarana distribusi perdagangan
     - Prog. Stabilisasi harga bapokting
     - Prog. P3DN
     - Prog. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
   - Wirausaha baru dan umkm berkelas
     - Program pemberdayaan umkm
     - Program pengembangan umkm
     - Program perlindungan & jaminan sosial
   - Pengembangan kota mice, pariwisata dan ekonomi kreatif
     - Prog. Peningkatan daya tarik destinasi
     - Prog. Pengembangan sumber daya pariwisata & ekonomi kreatif
     - Prog. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
   - Iklim dunia usaha dan investasi
     - Prog. Pengembangan iklim pm
     - Prog. Pengendalian pelaksanaan pm prog
     - Promosi penanaman modal
2. Pembangunan sumber daya manusia
   - Bina mental
     - Prog. Pengelolaan pendidikan
     - Prog. Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
     - Prog. Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
   - Penurunan angka stunting
     - Prog. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
     - Prog. Pengelolaan pendidikan
     - Prog. Peningkatan kualitas keluarga
     - Prog. Pembinaan keluarga berencana
   - Penurunan angka tpt dan kemisikinan ekstrem

- Prog. Pengembangan iklim pm
- Prog. Penempatan tenaga kerja
- Prog. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- Prog. Promosi penanaman modal

- Peningkatan gemar membaca
  - Prog. Pembinaan perpustakaan
  - Prog pengelolaan pendidikan
- Integrasi aids, tuberkolosis, malaria
  - Prog. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
  - Prog. Kawasan permukiman
  - Prog. Rehabilitasi sosial

3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup;
   - Pengendalian banjir
     - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
     - Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
   - Penataan kawasan terintegrasi
     - Program Kawasan Permukiman(DAK Integrasi);
     - Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
     - Program Pengelolaan dan PengembanganSistem Air Limbah
     - Program Pengelolaan Persampahan& Program Pengembangan Sistem dan PengelolaanPersampahan Regional
   - Penataan wajah kota
     - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
     - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
     - Program Penyelenggaraan Jalan
     - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4. Penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK;
   - Aparatur Birokrasi yang Kapebel
     - Prog. Kepegawaian daerah
     - Prog. Pengembangan sumber daya manusia
   - Sadar Tertib Arsip
     - Prog. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

- Prog. Pengelolaan arsip
- Prog. Perlindungan dan penyelamatan arsip

- Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
  - Prog. Penyelenggaraan pengawasan
  - Prog. Kebijakan, pendampingan dan asistensi
- Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - Prog. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan
  - Prog. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

5. Kondusifitas daerah
   - Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana
     - Program Penanggulangan Bencana
   - Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik
     - Program Penanggulangan Bencana
   - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak
     - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Serta Etika Budaya Politik
   - Antisipasi Persiapan Kota sebagai Mitra IKN
     - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
   - Peningkatan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran
     - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda Litbang. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat

Daerah. Bappeda Litbang Kota Balikpapan tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Bappeda Litbang berperan sebagai koordinator penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Litbang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu **Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur** yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2024 berada pada tahap jangka menengah yang ke-lima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi **Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan tujuh agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan, yaitu

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber day amanusi yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrasutruktur untuk mendukung pengambangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Litbang

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Tahun 2005 – 2025, RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 serta memperhatikan RKP Tahun 2023.

Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman". Misi dari Kepala Daerah Terpilih adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif

Terdapat 9 prioritas Kepala Daerah Terpilih antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan birokrasi pemerintahan
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
3. Pengentasan kemisikinan
4. Penyediaan air minum yang sehat dan merata
5. Pengendalian banjir
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kondisi sosial yang nyaman
7. Pengembangan balikpapan sebagai kota mice dan wisata:
8. Pengembangan balikpapan sebagai kota kreatif
9. Revitalisasi perusda

Dalam mendukung prioritas pembangunan kota Balikpapan tahun 2024 dengan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana Bappeda Litbang melaksanakan unsur penunjang urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan, maka Bappeda Litbang pada tahun 2024 menyusun perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
   1.1. Sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan;
   1.1. Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   1.2. Sub kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   1.1. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
   1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
      1.1. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
      1.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia
   2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
      1.1. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
      1.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
   3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
      1.1. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
      1.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

c. Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan sebagai berikut :
   1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
      1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan

Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1.2. Sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi

1.3. Sub kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;

1.1. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

1.2. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

1.1. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

1.2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

1.3. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

1.1. Sub kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dn Penerapan Teknologi

1.2. Sub kegiatan Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

1.3. Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

1.4. Sub kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Selain melaksanakan urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan Bappeda Litbang juga melaksanakan program non urusan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

1.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

1.1. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.2. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

1.1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logisyik Kantor

1.4. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.5. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
1.6. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
1.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.2. Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.3. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
1.4. Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.3. Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel
1.4. Sub kegiatan Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya
1.5. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada perencanaan tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Bappeda Litbang

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**18.749.874.000,00**							**19.182.151.000,00**	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						**18.749.874.000,00**							**19.182.151.000,00**	
PERENCANAAN						**9.931.114.000,00**							**10.810.000.000,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**-**			**85,60 nilai**	**8.216.114.000,00**						**-**	**9.200.000.000,00**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			85,85 nilai	8.000.000.000,00			-	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	9.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	8.000.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		9.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			81,15 nilai	216.114.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	-	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	216.114.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	***Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja***	**-**			**20,35 nilai**	**1.710.000.000,00**						**-**	**1.600.000.000,00**	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses*	-			1,87	1.710.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	1.600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	1.710.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		1.600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	***Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja***	**-**			**22,662 nilai**	**5.000.000,00**						**-**	**10.000.000,00**	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	-			100 %	5.000.000,00			-	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	-	-	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
-						**4.998.760.000,00**							**6.447.151.000,00**	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	***Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja***	**-**			**20,35 nilai**	**1.885.000.000,00**						**-**	**2.700.000.000,00**	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan*	-			100 %	1.135.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	1.900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	800.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		1.700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	335.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pengendalian, Evaluasi	*Indeks Kualitas*	-			2,97	750.000.000,00			Memperkua t	Mewujudka n Birokrasi	Masyarakat	-	800.000.000,00	BADAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut*								Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	dan Aparatur			PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	750.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	***Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja***	**-**			**22,662 nilai**	**25.000.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		10 .000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	-			100 %	10.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	20 .000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		10 .000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		10 .000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	-			100 %	5.000.000,00			-	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	-	-	10 .000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
-						**3.820.000.000,00**							**1.925.000.000,00**	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	***Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti***	**-**			**100 %**	**3.820.000.000,00**						**-**	**1.925.000.000,00**	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti*	-			100 %	350.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	-	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi														

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				2 Laporan	325.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	25.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti*	-			100 %	1.100.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	600.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	500.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti*	-			100 %	1.620.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	270.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	500.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	850.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi*	-			4 dokumen	750.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	875.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang				1 Laporan	150.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan	Masyarakat dan Aparatur		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi								Publik	Publik				
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	300.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	175.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	125.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
-						**4.998.760.000,00**							**6.447.151.000,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**-**			**85,60 nilai**	**3.088.760.000,00**						**-**	**3.697.151.000,00**	
Administrasi Kepegawaian	*IKM Layanan Administrasi*	-			83,6 nilai	730.000.000,00			Memperkua t Stabilitas	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih,	Masyarakat dan Aparatur	-	900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Perangkat Daerah	*Kepegawaian Perangkat Daerah*								Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik				PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				47 Orang	650.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			85,6 nilai	1.306.760.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	1.752.151.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	280.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		439.651.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	400.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	80.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				480 Dokumen	6.760.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu														
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	30.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	500.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		745.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			85,55 nilai	763.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	680.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	24.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		36.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	35.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	700.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			83,6 nilai	730.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	80.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*	-			81,15 nilai	284.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Daerah													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	161.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pemeliharaan Mebel														
	Jumlah Mebel yang Dipelihara				232 Unit	15.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				188 Unit	58.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi				1 Unit	50.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP OPD*	-			83,18 nilai	5.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	-	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Birokrasi Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan Berorie ntasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						18.749.874.000,00							**19.182.151.000,0**	

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari dari Rencana Strategis Bappeda Litbang Tahun 2021 – 2026. Dimana Renja ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026.

Pada Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024 ini terdiri dari 4 Program, 16 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka selanjutnya akan ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Serta untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda Litbang, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026, yang didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-

prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja Bappeda Litbang tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
2. Renja Bappeda Litbang Tahun 2024 didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, Ranwal/Rankhir RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Bappeda Litbang);
3. Renja akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2024 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien;
2. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
3. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Litbang Kota Balikpapan, maka seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan secara berjenjang,

bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Balikpapan, Juli 2023

Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan,

Murni

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk arah bagi program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kota Balikpapan dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kota Balikpapan. Sebagai suatu dokumen rencana pelaksanaan program dan kegiatan, maka wajar apabila Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen renja perangkat daerah diikuti proses pemantauan, evaluasi dan revieu bertahap atas pelaksanaannya/implementasinya.

Rencana Kerja merupakan juga komponen dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dilanjutkan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran lebih rinci dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) mencakup periode tahunan. Rencana Kerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target – target capaian berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja adalah perencanaan pada unit organisasi Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kota Balikpapan yang pada saat penyusunan harus sinergi dan sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yakni RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra OPD.

Dokumen rencana kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kota Balikpapan perlu menetapkan Rencana Kerja tahun 2024. Penetapan Rencana Kerja merupakan

target yang harus dicapai dan akan dievaluasi melalui LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kota Balikpapan berupaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang akan menunjang keberhasilan pembangunan nasional, untuk itu maka perlu disusun rencana pembangunan Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang spesifik, tepat tujuan dan sasaran dengan tetap berlandasakan pada aturan yang berlaku, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700) ;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032.
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
21. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja perangkat daerah masih bersifat indikatif dan disinergikan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan yang merupakan rangkaian kegiatan berkelanjutan saat penyusunan RKPD.

Penyusunan kebutuhan dan kegiatan perangkat daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan dan mempertimbangkan capaian kinerja yang ada. Rumusan program dan kegiatan didasarkan atas pertimbangan urutan prioritas daerah dan menyesuaikan pagu dana indikatif yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian Renstra BPPDRD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan
3.3 Program dan Kegiatan Usulan 2024

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN YANG LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BPPDRD

Dalam rangka penyusunan Renja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024, diperlukan hasil evaluasi Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang diuraikan dalam lampiran 1 Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja BPPDRD dan pencapaian Renstra BPPDRD. Selain itu, salah satu target kinerja yang di gunakan dalam mengukur keberhasilan Program dan Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPDRD Tahun 2021 serta Program dan Kegiatan berdasarkan pencapaian atau realisasi APBD tiap Program dan Kegiatan, antara lain :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra BPPDRD s/d Tahun 2023

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	**1,321.97**	**474.40**						
2	5	02	04	201		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	17.08	-1.68						
3	5	02	04	201	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	n/a	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052	1	**1**	**100%**
4	5	02	04	201	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	n/a	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052	2	**2**	**100%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	5	02	04	201	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8	n/a	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052	8	**8**	**100%**
6	5	02	04	201	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3	n/a	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052	3	**3**	**100%**
7	5	02	04	201	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	1	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052	1	**2**	**200%**
8	5	02	04	201	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	n/a	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052	1	**1**	**100%**
9	5	02	04	20	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	13,000	n/a	Indikator berbeda dikarenakan	Indikator berbeda dikarenakan	Indikator berbeda dikarenakan	15,000	**15,000**	**115%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				1		Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052			
10	5	02	04	201	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	10,200	9500	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052	200,000	**209,500**	**2054%**
11	5	02	04	201	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11	n/a	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052	11	**11**	**100%**
12	5	02	04	201	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1	n/a	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052	1	**1**	**100%**
13	5	02	04	201	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	18,112	89891	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	18,112	**108,003**	**596%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 051	sebelum terbitnya Kemendagri 052			
14	5	02	04	201	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	700	n/a	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052	550	**550**	**79%**
15	5	02	04	201	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	2	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052	2	**4**	**200%**
16	5	02	04	201	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	2	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052	2	**4**	**200%**
17	5	02	04	201	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052	1	**1**	**0%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
18	**X**	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)**								
19	X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
20	X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	6	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**6**	**600%**
21	X	XX	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**5**	**500%**
22	X	XX	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	-	**5**	**500%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
							RKA-SKPD			Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
23	X	X X	0 1	2 0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**5**	**500%**
24	X	X X	0 1	2 0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**5**	**500%**
25	X	X X	0 1	2 0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**5**	**500%**
26	X	X X	0 1	2 0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	-	**5**	**500%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
27	X	X X	0 1	2 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)								
28	X	X X	0 1	2 0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	888	74	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	105	**179**	**20%**
29	X	X X	0 1	2 0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	74	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**74**	**7400%**
30	X	X X	0 1	2 0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44,509	40313	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**40,313**	**91%**
31	X	X X	0 1	2 0	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	296	74	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	**74**	**25%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				2						sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
32	X	X X	0 1	2 0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	25	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**25**	**500%**
33	X	X X	0 1	2 0 2	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10	50	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**50**	**500%**
34	X	X X	0 1	2 0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	100	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**100**	**500%**
35	X	X X	0 1	2 0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	10	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	-	**10**	**500%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
36	X	X X	0 1	2 0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Nilai)								
37	X	X X	0 1	2 0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**5**	**500%**
38	X	X X	0 1	2 0 3	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	95	70	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**70**	**74%**
39	X	X X	0 1	2 0 3	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	85	60	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**60**	**71%**
40	X	X X	0 1	2 0	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	80	60	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	**60**	**75%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				3		Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD			sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
41	X	X X	0 1	2 0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	-	**0%**
42	X	X X	0 1	2 0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	95	70	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**70**	**74%**
43	X	X X	0 1	2 0 3	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	100	70	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**70**	**70%**
44	X	X X	0 1	2 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)								
45	X	X X	0 1	2 0	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	86	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	**86**	**4300%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				5		Pegawai				sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
46	X	X X	0 1	2 0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	92	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**92**	**9200%**
47	X	X X	0 1	2 0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	90	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**90**	**9000%**
48	X	X X	0 1	2 0 5	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	90	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**90**	**9000%**
49	X	X X	0 1	2 0 5	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	75	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**75**	**7500%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
55	X	X X	0 1	2 0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	25	**25**	**0%**
56	X	X X	0 1	2 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)								
57	X	X X	0 1	2 0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**-**	**0%**
58	X	X X	0 1	2 0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	1	**1**	**7%**
59	X	X X	0 1	2 0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**-**	**0%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
60	X	X X	0 1	2 0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	10	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	2	**12**	**240%**
61	X	X X	0 1	2 0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	12	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	2	**14**	**93%**
62	X	X X	0 1	2 0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	12	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**12**	**80%**
63	X	X X	0 1	2 0 6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	45	39	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**39**	**87%**
64	X	X X	0 1	2 0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	**-**	**0%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
65	X	X X	0 1	2 0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	1	**3**	**150%**
66	X	X X	0 1	2 0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**-**	**0%**
67	X	X X	0 1	2 0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	3	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**3**	**60%**
68	X	X X	0 1	2 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)								

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
69	X	X X	0 1	2 0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	-	**0%**
70	X	X X	0 1	2 0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	4	**4**	**0%**
71	X	X X	0 1	2 0 7	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	-	**0%**
72	X	X X	0 1	2 0 7	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	-	**0%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
73	X	X X	0 1	2 0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	-	**0%**
74	X	X X	0 1	2 0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	-	**0%**
75	X	X X	0 1	2 0 7	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	-	**0%**
76	X	X X	0 1	2 0 7	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	-	**0%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
77	X	X X	0 1	2 0 7	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	-	**0%**
78	X	X X	0 1	2 0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	-	**0%**
79	X	X X	0 1	2 0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	-	**0%**
80	X	X X	0 1	2 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)								
81	X	X X	0 1	2 0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	10	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	-	**10**	**0%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
82	X	X X	0 1	2 0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	180	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	3	**183**	**508%**
83	X	X X	0 1	2 0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	15	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**15**	**500%**
84	X	X X	0 1	2 0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	336	1,680	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	4	**1,684**	**501%**
85	X	X X	0 1	2 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)								

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
86	X	X X	0 1	2 0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**5**	**0%**
87	X	X X	0 1	2 0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	74	**79**	**2633%**
88	X	X X	0 1	2 0 9	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**5**	**0%**
89	X	X X	0 1	2 0 9	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**-**	**0%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
90	X	X X	0 1	2 0 9	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**5**	**250%**
91	X	X X	0 1	2 0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	100	**105**	**3500%**
92	X	X X	0 1	2 0 9	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**5**	**0%**
93	X	X X	0 1	2 0 9	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	**5**	**0%**

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
94	X	X X	0 1	2 0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	-	0%
95	X	X X	0 1	2 0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	1	6	0%
96	X	X X	0 1	2 0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	-	5	250%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

Tabel 2.2 Capaian Realisasi Kinerja Instansi BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	14.20	14.34	101%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah BPPDRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	27.00	30.72	114%	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Pengolahan Data, BPPDRD tahun 2022

Berdasarkan Capaian Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi BPPDRD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022, selanjutnya dilakukan analisis capaian realisasi terhadap target IKU tahun 2022, Adapun analisis terdeskripsi sebagai berikut.

a. **Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Realisasi capaian dari target indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 14.20% sampai Tahun 2022 terealisasi sebesar 14.34% dengan tingkat capaian kinerja 101 % artinya kinerja pada Perjanjian Kinerja Kepala BPPDRD pada tahun 2022 dinyatakan “TERCAPAI” dengan kriteria penilaian Realisasi Kinerja “SANGAT TINGGI”.

Realisasi tersebut berdasarkan data penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.3 Jumlah Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Uraian	2021	2022	Peningkatan / Penurunan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	728,707,687,211.00	811,249,650,355.18	82,541,963,144.18
Pajak Daerah	537,513,232,779.32	623,584,889,978.40	86,071,657,199.08
Retribusi Daerah	42,954,418,943.77	40,110,966,976.50	(2,843,451,967.27)
Pajak dan Retribusi Daerah	580,467,651,723.09	663,695,856,954.90	83,228,205,231.81

b. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Penilaian mandiri reformasi birokrasi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan terhadap 2 (dua) komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit dinilai dengan menggunakan teknik “criteria referrenced test” yaitu dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk komponen hasil, dinilai dengan menggunakan hasil survei eksternal pelaksanaan reformasi birokrasi, ketercapaian kinerja kementerian, dan informasi terkini terkait Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kriteria penilaian tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi.

Tabel 2.4 Perbandingan Realisasi Capaian dan Target Renstra padaTahun 2021-2024 sebagai berikut :

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2024	2022	2023	2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)				**780.71**	**852.37**	**1,062.03**					
2	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)				5.02	8.04	11.05					
3	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1	1	1					
4	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1	1	1					
5	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				6	8	8					
6	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1	1	1					
7	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1,438	3,851	8,415					
8	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1	1	1					
9	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				9,000	9,000	9,000					
10	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				9,690	9,884	10,082					
11	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5,280	5,544	5,821					

12	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1	1	1					
13	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				18,112	18,112	18,113					
14	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				500	550	600					
15	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2	2	2					
16	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4	2	2					
17	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1	1	1					
18	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)				82	83	84					
19	Nilai SAKIP				65	69	71					
20	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2	1	1					
21	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	1	1					
22	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1	1	1					
23	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1	1	1					
24	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1	1	1					
25	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1	1	1					

26	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1	1	1					
27	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)				84	88	92					
28	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				888	888	888					
29	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1	1	1					
30	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				41,119	41,942	42,780					
31	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				296	296	296					
32	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5	5	5					
33	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				10	10	10					
34	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20	20	20					
35	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2	2	2					
36	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Nilai)				80	85	90					
37	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1	1	1					
38	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				75	80	85					
39	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik				65	70	75					

	Daerah SKPD											
40	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				64	68	72					
41	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1	1	1					
42	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				75	80	85					
43	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				75	80	86					
44	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)				77	79	81					
45	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2	2	2					
46	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1	1	1					
47	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1	1	1					
48	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1	1	1					
49	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1	1	1					
50	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	-	-					
51	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)				-	-	-					
52	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15	15	15					
53	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15	15	15					

54	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30	30	30					
55	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5	5	5					
56	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15	15	15					
57	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15	15	15					
58	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	-	45					
59	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3	3	3					
60	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2	2	2					
61	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12	12	12					
62	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	3	5					
63	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)				80	82	84					
64	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	-	6					
65	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3	3	3					
66	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2	-	-					
67	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1	1	-					
68	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)				85	86	89					
69	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36	36	36					

70	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	3	3					
71	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)				85	86	89					
72	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	-	-					
73	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3	3	3					
74	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				-	0	0					
75	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				-	-	-					
76	Jumlah Mebel yang Dipelihara				-	2	2					
77	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3	3	3					
78	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				-	-	-					
79	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				-	-	-					
80	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	-	-					
81	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2	2					
82	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2	2					

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Permasalahan pada Rancangan Awal RKPD pada badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kota Balikpapan terkait Urusan Pemerintahan Bidang keuangan, yaitu :

No.	Urusan	Permasalahan	Solusi
1	Keuangan	Belum optimalnya Pembayaran Retribusi Non Tunai	Penguatan Aplikasi Pembayaran Non Tunai (Retribusi)
		Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Mengoptimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 2.5 Permasalahan RKPD BPPDRD

Berdasarkan Peraturan Wali Nomor 43 Tahun 2016 Kota Balikpapan tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPDRD merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di Bidang Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BPPDRD memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
3. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
5. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;

6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
7. Pelaksanaan sosialisasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, BPPDRD Kota Balikpapan ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi BPPDRD, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Program, Pengelolaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga Kantor, Perlengkapan, Protokol, Hubungan Masyarakat, Layanan Informasi dan Pengaduan, Pembinaan Pelayanan Publik, Kearsipan, Surat Menyurat serta Evaluasi dan Pelaporan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.

Sekretariat membawahkan Subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggungjawab langsung pada Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
g. Pengelolaan anggaran Badan dan penerimaan Pajak Daerah;

h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
j. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
k. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
l. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
m. Pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
n. Pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
o. Pengoordinasian bidang dan UPT;
p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan.

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi Subbidang yang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, pemeriksaan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah;
d. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
e. Pengendalian pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah serta menghimpun dan mengelola data, objek dan subjek Wajib Pajak Daerah;
f. Pengendalian pelaksanaan pendataan sumber Pajak Daerah;
g. Pengendalian pelaksanaan penetapan Pajak Daerah;
h. Pengendalian pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah;
i. Pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek Wajib Pajak Daerah dilapangan terhadap laporan data yang disampaikan Wajib Pajak Daerah;

j. Pengendalian penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan mendokumentasikan surat perpajakan yang terkait dengan pendataan;
k. Pengendalian pelaksanaan validasi data sumber pendapatan Pajak Daerah;
l. Pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidaksesuaian data terhadap Objek Pajak Daerah;
m. Pengendalian pelaksanakan penghitungan dan penetapan nilai objek Pajak Daerah;
n. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek Pajak Daerah;
o. Pelaksanaan fasilitasi permasalahan proses pelayanan wajib Pajak Daerah;
p. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Bidang PBB P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penetapan, perhitungan, penerbitan ketetapan Pajak yang terutang serta penatausahaan SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran PBB P2 dan ketetapan BPHTB.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang PBB P2 dan BPHTB;
b. Perumusan kebijakan teknis pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan, penetapan PBB P2 dan BPHTB;
d. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
e. Pengendalian pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB melalui SPPT serta pemeriksaan lapangan;

f. Pengendalian penyusunan daftar induk Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB, dan penyampaian surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
g. Pengendalian penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi PBB P2 dan BPHTB;
h. Pengendalian pelaksanaan perhitungan penetapan nilai PBB P2 dan BPHTB serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek PBB P2 dan BPHTB;
i. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendistribusian SPPT PBB P2 dan BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
j. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan terkait proses pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penagihan dan Pembukuan

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan;
b. Perumusan kebijakan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
c. Pelaksanaan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai kewenangannya;
d. Pelaksanaan pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
e. Pengendalian pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi Pajak Daerah;
f. Pelaksanaan penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan Pajak Daerah;

g. Pelaksanaan pengendalian penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
h. Pelaksanaan klasifikasi tunggakan Pajak Daerah;
i. Pengendalian tunggakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
j. Pengendalian pelaksanaan penagihan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
k. Pengendalian pelaksanaan penerbitan surat tagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelayanan keberatan Pajak Daerah;
m. Penghitungan dan penentuan besaran angsuran pembayaran tunggakan Pajak Daerah;
n. Pelaksanaan evaluasi penerimaan, tunggakan dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan dan layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
o. Pengendalian penyelenggaran pemindahbukuan atas penerimaan awal Pajak Daerah dan penerimaan akhir akibat terjadinya restitusi;
p. Pelaksanaan inventarisir permasalahan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan sebagai bahan pengendalian Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahkan subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional_menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
b. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Pengumpulan dan pengolahan data dalamrangka perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
d. Pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
e. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan untuk perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
f. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
g. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
h. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;
i. Penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
j. Pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
k. Perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
l. Pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenaiPajak Daerah dan Retribusi Daerah;
m. Pengendalian mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
n. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
o. Pengoordinasian perumusan Standar Operasional Prosedur/ Standar Pelayanan di bidang pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
p. Pengendalian pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Merujuk pada tugas dan fungsi BPPDRD Kota Balikpapan, terdapat beberapa isu- isu Penting, antara lain :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau peningkatan kualitas aparatur daerah bidang perpajakan adalah mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transparan dan akuntabel
2. Menggali sumber sumber pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan peningkatan akurasi data potensi penerimaan pajak
3. Pertumbuhan ekonomi kreatif kota adalah menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja, magnet bagi wisatawan, mampu menumbuhkan potensi ekonominya dan menampung gerakan ekonomi baru bagi warganya. Kota menjadi rumah bagi bisnis, organisasi, dan individu kreatif, karakter lokal, dan kerarifan lokal merupakan kekuatan kreatif warga dan kota
4. Optimalisasi peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD
5. Peningkatan intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas
6. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

a. Perlunya penyesuaian dan orientasi tugas pokok dan fungsi yang baru terhadap Pejabat Struktural dan staf, dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah baru,
b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki;
c. Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur;
d. Kurangnya keterlibatan Masyarakat dalam memberikan informasi potensi Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun Peluang Badan Pengelola Pajak daerah dan retribusi Daerah adalah Sebagai berikut :

a. Dasar hukum yang kuat dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pajak/ Retribusi Daerah;
b. Adanya dukungan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
c. Koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
d. Dukungan dari salah satu BUMN dan BUMD bidang perbankan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telahaan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra OPD dan tingkat kinerja oleh OPD, sesuai arahan kepala Daerah sesuai prioritas program /kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review rancangan awal RKPD BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah seperti table 2.4 berikut ini :

Tabel. 2.6
Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Balikpapan	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	1062.03	6,297,498,380	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Balikpapan	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	1062.03	9,357,498,380	
2	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Balikpapan	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	11.05	6,297,498,380	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Balikpapan	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	11.05	9,357,498,380	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	84	37,939,394,373	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	84	33,879,598,620	
4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	71	75,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	71	100,000,000	
5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	92	28,340,280,958	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	92	29,327,598,620	
6	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Nilai)	90	315,000,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Nilai)	90	-	
7	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	81	490,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	81	200,000,000	
8	Kegiatan Administrasi Umum	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum	84	3,582,113,415	Kegiatan Administrasi Umum	Balikpapan	IKM Layanan Administras	84	2,400,000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah (Nilai)			Perangkat Daerah		i Umum Perangkat Daerah (Nilai)		0	
9	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)	84	2,315,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)	84	190,000,000	
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	91	1,460,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	91	800,000,000	
11	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	89	1,362,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	89	862,000,000	
TOTAL					44,236,892,753	TOTAL				43,237,097,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada wajib pajak, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel. 2.7

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No.	Program/kegiatan	Lokasi	Indicator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan ***)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Program dan kegiatan Pelayanan Terhadap Wajib Pajak yang terkait dengan Kebutuhan Wajib Pajak dan untuk pencapaian target PAD Kota Balikpapan tidak diusulkan melalui Proses Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan sampai kepada Forum OPD yang dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Kota Balikpapan.

BAB III

TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan IK (Indikator Kinerja) di lingkungan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

Misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan berdasarkan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur dan Kementrian Keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Telaahan Misi Kementrian Keuangan, dan Badan Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Misi Kementrian Keuangan Republik Indonesia	Misi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur	Misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan
Menarik dan mempertahankan Talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pegawai	Meningkatkan Profesionalisme aparatur
	Meningkatkan Kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain	Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Mencapai tingkat kepatuhan Pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat	Meningkatkan mutu pelayanan prima yang merata dan mudah terjangkau oleh masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat
	Meningkatkan Kontribusi yang optimal bagi APBD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

3.2.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Kota, yaitu :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah;

3.2.2. SASARAN

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehinggga dapat diukur dan lebih spesifik.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah :

1. **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**

   dengan indikator sasaran :

   Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. **Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**

   dengan indikator sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak dan Retibusi Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondisi akhir Capaian Tujuan /Sasaran
					2023	2024	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**Indikator Tujuan:** Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	**24,21**	**36,88**	**41.42**	**44.17**	**44.74**	**44.40**	**44.40**
			Indikator Sasaran: Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	**17.99**	**26.40**	**35.57**	**60.17**	**72.41**	**83.31**	**83.31**

Tabel 3.3 Program Dan Kegiatan Usulan Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)**	**Balikpapan**	**1,062.03**	**9,357,498,380**	**APBD**		**1,192.01**	**12,594,996,760.00**
5	**2**	**4**	**2**	**1**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)**	**Balikpapan**	**11.05**	**9,357,498,380**	**APBD**		**72.41**	**12,594,996,760**
5	2	4	201	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	200,000,000	APBD		1	1,200,000,000.00
5	2	4	201	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengmbangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	250,000,000	APBD		1	750,000,000.00
5	2	4	201	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	Balikpapan	8	1,325,000,000	APBD		8	650,000,000.00
5	2	4	201	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	Balikpapan	1	860,000,000	APBD		1	900,000,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4	201	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	Balikpapan	8415	250,000,000	APBD		8415	1,000,000,000.00
5	2	4	201	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	Balikpapan	1	1,700,000,000	APBD		1	2,100,000,000.00
5	2	4	201	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	Balikpapan	9	3,000,000,000	APBD		9	1,300,000,000.00
5	2	4	201	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	10082	250,000,000	APBD		10082	400,000,000.00
5	2	4	201	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	Balikpapan	11	200,000,000	APBD		11	500,000,000.00
5	2	4	201	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	Balikpapan	1	200,000,000	APBD		1	500,000,000.00
5	2	4	201	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	18113	160,000,000	APBD		18113	550,000,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4	201	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	600	100,000,000	APBD		600	500,000,000.00
5	2	4	201	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	2	100,000,000	APBD		2	400,000,000.00
5	2	4	201	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Balikpapan	2	762,498,380	APBD		2	1,844,996,760.00
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)**	**Balikpapan**	**84**	**33,379,598,620**	**APBD**		**85**	**32,838,199,086**
5	**02**	**01**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)**	**Balikpapan**	**71**	**100,000,000**	**APBD**		**73**	**3,582,113,415.00**
	02	01	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	1	75,000,000	APBD		1	20,000,000.00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02	01	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeah (Laporan)	Balikpapan	2	25,000,000	APBD		2	20,000,000.00
02	**01**	**2**	**2**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)**	**Balikpapan**	**92**	**29,327,598,620**	**APBD**		**96**	**28,286,199,086**
02	01	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Balikpapan	105	29,327,598,620	APBD		105	28,286,199,086.00
02	**01**	**203**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)**	**Balikpapan**	**81**	**200,000,000**	**APBD**		**85**	**300,000,000**
02	01	203	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Balikpapan	50	200,000,000	APBD		50	300,000,000.00
02	**01**	**2**	**6**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)**	**Balikpapan**	**84**	**2,000,000,000**	**APBD**		**85**	**2,400,000,000**
02	01	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Balikpapan	15	300,000,000	APBD		15	300,000,000.00
02	01	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Balikpapan	5	550,000,000	APBD		5	550,000,000.00
02	01	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Balikpapan	15	750,000,000	APBD		15	750,000,000.00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02	01	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Balikpapan	3	100,000,000	APBD		3	100,000,000.00
5 02	01	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Balikpapan	3	100,000,000	APBD		3	500,000,000.00
02	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinami pada SKPD (Dokumen)	Balikpapan	12	200,000,000	APBD		12	200,000,000.00
5 02	**01**	**2**	**7**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)**	**Balikpapan**	**84**	**190,000,000**	**APBD**		**86**	**190,000,000**
02	01	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan(Unit)	Balikpapan	6	190,000,000	APBD		6	190,000,000.00
02	**01**	**2**	**8**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)**	**Balikpapan**	**91**	**800,000,000**	**APBD**		**93**	**800,000,000**
02	01	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Balikpapan						0.00
02	01	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Balikpapan	336	800,000,000	APBD		336	800,000,000.00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02	**01**	**2**	**9**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)**	**Balikpapan**	**89**	**862,000,000**	**APBD**		**93**	**862,000,000**
02	01	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Balikpapan	3	612,000,000	APBD		3	612,000,000.00
02	01	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Balikpapan	3	250,000,000	APBD		3	250,000,000.00

3.3 Maping Program dan Kegiatan terhadap Isu Pembangunan

Tabel 3.4 Maping Program dan Kegiatan BPPDRD terhadap Isu Pembangunan

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR	Target Renja 2024	Pagu Renja (Rp)	Tagging					
URUSAN BIDANG URUSAN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	02	04			**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)**	**1,062.03**	**7,931,393,340**						
5	02	04	201		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)**	**11.05**		□					
5	02	04	201	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1 Dokumen		□					
5	02	04	201	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengmbangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1 Dokumen		□□□					
5	02	04	201	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	8 Laporan						□	
5	02	04	201	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1 Unit						□	
5	02	04	201	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	8415 Laporan		□					

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR	Target Renja 2024	Pagu Renja (Rp)	Tagging					
URUSAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	02	04	201	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1 Laporan						□	
5	02	04	201	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	9 Objek Pajak		□					
5	02	04	201	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	10082 Dokumen		□					
5	02	04	201	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	11 Layanan						□	
5	02	04	201	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	1 Dokumen		□					
5	02	04	201	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	18113 Dokumen		□					
5	02	04	201	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	600 Dokumen		□					
5	02	04	201	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	2 Dokumen		□					
5	02	04	201	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	2 Laporan		□					

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja

Pada Tahun 2024 Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan memiliki 2 Program dan 9 Kegiatan serta 27 Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah dan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif sebesar Rp. 44.955.991.000,-, sebagaimana table berikut ini :

Program dan Kegiatan yang telah diuraikan di atas sebagai bagian dari upaya BPPDRD dalam rangka pencapaian target. Renstra Organisasi Perangkat Daerah BPPDRD Kota Balikpapan disesuaikan dengan target capaian kinerja serta kebutuhan pagu dana pada Tahun 2024. Harapan yang ingin dicapai adalah agar segenap Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal dan berdaya guna sesuai dengan target yang terus direncanakan dan ujungnya adalah pada peningkatan pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan.

Tabel 4.1 Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH						**61,237,040,252.00**							**64,789,595,380.00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**61,237,040,252.00**							**64,789,595,380.00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**61,237,040,252.00**							**64,789,595,380.00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**-**			**84 Nilai**	**52,131,134,372.00**						**-**	**52,194,598,620.00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP*	-			71 Poin	99,594,000.00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	40,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	74,670,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		20,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	24,924,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)*	-			96 Nilai	47,327,598,620.00			-	-	-	-	47,327,598,620.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/bulan	47,327,598,620.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47,327,598,620.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)*	-			83 Nilai	200,000,000.00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	300,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	200,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		300,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)*	-			85 Nilai	2,252,886,300.00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	2,200,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	424,053,500.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		300,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	553,911,800.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		550,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	475,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	99,921,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		100,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	500,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	200,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)*	-			86 Nilai	290,030,552.00			-	-	-	-	490,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	204,696,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	85,334,552.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		190,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)*	-			93 Nilai	961,189,700.00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	975,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	174,978,200.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		175,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	786,211,500.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)*	-			93 Nilai	999,835,200.00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	862,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				75 Unit	674,995,200.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		612,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	324,840,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		250,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***	**-**			**1.062,03 Milyar**	**9,105,905,880.00**						**-**	**12,594,996,760.00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	-			11.05 %	9,105,905,880.00			-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan	-	12,594,996,760.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	200,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		1,200,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	250,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		750,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				8 Laporan	1,324,989,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		650,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Unit	887,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		900,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	250,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		1,000,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1,699,981,780.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		2,100,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				15000 Obyek Pajak	2,999,555,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		1,300,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				200000 Dokumen	249,987,200.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		400,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11 Layanan	228,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Wajib Pajak Kota Balikpapan		500,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	200,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		500,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				18.113 Dokumen	160,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Wajib Pajak Kota Balikpapan		550,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				550 Dokumen	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Wajib Pajak Kota Balikpapan		500,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		400,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	456,392,900.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Wajib Pajak Kota Balikpapan		1,844,996,760.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	J U M L A H							**61,237,040,252.00**							**64,789,595,380.00**	

BAB V
INOVASI

Adapun inovasi yang dilakukan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Antara lain :

Tabel 5.1 Inovasi BPPDRD

No.	Nama Inovasi	Fungsi
1.	Sipawlin	Pendaftaran Wajib Pajak Online
2.	e-sptpd	Pelaporan Pajak Online
3.	Portal Payment	Digitalisasi Pembayaran Pajak (non-Tunai)
4.	Display Pajak	Digitalisasi Pelayanan Pajak
5.	Satgas Monalisa	Satuan Tugas Monitoring Alat Perekam Transaksi

BAB V
P E N U T U P

Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategik, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan recognized dan responsed oleh semua stake holdersnya. Perumusan perencanaan strategik akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni top-down dan bottom-up approach.

Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan telah menetapkan arah yang akan dituju olehnya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang ada.

Rencana Kerja yang disusun dan dirumuskan tersebut harus mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi. Rencana Kerja adalah salah satu bagian terpenting dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP). Perjanjian Kinerja merupakan janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan kepada atasan langsungnya. Rencana Kerja memberikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun anggaran tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena telah dilimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 telah dapat disusun dengan baik. Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini tidaklah lepas dari Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan terpilih Periode Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Balikpapan.

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan agar lebih terarah pada tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Sehingga dapat meningkatkan kualitas Kinerja Aparatur dalam Pelayanan dan Pengembangan Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan.

Akhir kata kepada berbagai pihak dan staf yang telah kerjasama dalam Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan ini, kami ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai dan membimbing dalam menjalankan Program dan Kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan, sekian dan terimakasih.

Balikpapan, 18 Agustus 2023
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Balikpapan

AGUS BUDI PRASETYO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 0
DAFTAR ISI 1
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKAD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 8
2.2 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada BKAD 53
2.3 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja 55
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Lintas OPD 31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33
3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional 33
3.2 Tujuan dan Sasara Renja Perangkat Daerah 34
3.2 Program dan Kegiatan 35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGAT DAERAH 55
BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH 63
BAB VI PENUTUP 66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rancangan Rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan merupakan dokumen Rancangan Perencanaan Kerja Periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan serta penggunaan Anggaran Keuangan BKAD Kota Balikpapan Dalam Periode Tahun Anggaran 2024, juga sebagai implementasi dan penjabaran dari perencanaan strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode 1 tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) BKAD Kota Balikpapan disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) BKAD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 (dalam proses penyusunan), dimana program dan kegiatan dalam RENJA perangkat daerah akan diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
2. RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

3. RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana RENJA BKAD Tahun 2023 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026
3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari dan menjadi referensi dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Sistem Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Daerah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasfisikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Darerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
14. Peraturan Wali Kota Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan BKAD dalam rangka mewujudkan sinegritas antara Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan dalam Perangkat Daerah, serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024. Penyelengaraan pemerintah di bidang Pengelolaan Keuangan yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra BKAD Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja BKAD Kota Balikpapan Tahun 2024 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) BKAD Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Peraturan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Petunjuk Teknis, Jadwal dan tahapan Peyusunan dokumen RKPD dan Reja PD Tahun 204 serta Perubahan RKPD dan Renja PD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

1.1 Latar Belakang:

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusanan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Lintas OPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka Pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidaksesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKAD
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021

Berdasarkan Rencana Strategis BKAD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan pada tahun 2022 Rencana Kerja Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 melaksanakan 3 (tiga) Program 15 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. 3 Program terdiri dari :
    1) Program Penunjang Urusaan Pemerintah Daerah Kab/kota
    2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
    3) Program Pengelolaan Barang Milk Daerah
2. 15 Kegiatan terdiri dari :
    1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    10) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
    11) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
    12) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
    13) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
    14) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

15) Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
											I		II		III		IV												
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x 100%		14=6+12		15=14/5X 100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase Peningkatan BMD yang terkelola**	**Presentase**	**100%**	**90.023.928.000,00**			**100%**	**27.038.600.000,00**		**2.781.389.345,00**		**5.704.792.403**		**3.679.057.467,00**	**100%**	**14.483.394.590,00**	**100%**	**26.648.633.805**	**100%**	**98,56%**	**100%**	**26.648.633.805,00**	**100%**	**29,60%**	**BKAD**	**Tercapai**
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Prensentase pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Presentase**	**100%**	**90.023.928.000,00**			**100%**	**27.038.600.000,00**		**2.781.389.345,00**	**0**	**5.704.792.403,00**	**0**	**3.679.057.467,00**	**100%**	**14.483.394.590,00**	**100%**	**26.648.633.805**	**100%**	**98,56%**	**100%**	**26.648.633.805,00**	**100%**	**29,60%**	**BKAD**	**Tercapai**

		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola						11	27.038.600.000,00	0	2.781.389.345,00		5.704.792.403		3.679.057.467	11	14.483.394.590	11	26.648.633.805	100%	98,56 %	11	26.648.633.805,00	0	0	BKAD	Tercapai (Gedung yang dikelola sebagai berikut :BIC, BSCC Dome, Squash, GKB, Stadion Batakan, Capil & DP3AKB, Gadis, Asmaba Makassar, Asmaba Malang, Asmaba Jogjakarta)
																							0	-				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indek kepuasan masyarakat (IKM) Internal perangkat Daerah**	**poin**	**82,5**	**195.366.176.500,00**			**74,5**	**22.654.815.277,00**		**2.391.786.206,00**	**0**	**3.182.607.502,00**		**3.402.189.789,00**	**74,5**	**4.415.785.498,00**	**74,5**	**13.392.368.995,00**	**100%**	**59,11 %**	**74,5**	**13.392.368.995,00**	**90,30%**	**6,86 %**	**BKAD**	**Tercapai**

	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Sakip**	**poin**	**75**	**1.434.100.000,00**			**55**	**199.997.700,00**		**56.882.762,00**		**28.132.058,00**	**54,05**	**27.619.527,00**		**16.952.986,00**	**54,05**	**129.587.333,00**	**98%**	**64,79%**	**54,05**	**129.587.333,00**	**72,07%**	**9,04%**	**BKAD**	**Adanya Kenaikan pada Nilai SAKIP Tahun 2020 dengan Hasil Evaluasi 51,63**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen				-	89	24.998.500,00		12.160.764,00		3.550.003	0	4.980.533	89	3.800.000	89	24.491.300,00	100%	97,97%	89	24.491.300,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA	Dokumen				-	89	24.999.600,00	89	14.639.427,00		3.550.000		6.302.594		-	89	24.492.021,00	100%	97,97%	89	24.492.021,00	0%	0%	BKAD	Tercapai

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					89	0		0		0					89	-	100%	0,00%	89	-	0%	0%	BKAD	Sub Kegiatan ini tidak ADA anggrannya pada DPA Tahun 2022
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen					89	0		0		0					89	-	100%	0,00%	89	-	0%	0%	BKAD	Sub Kegiatan ini tidak ADA anggrannya pada DPA Tahun 2022
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					89										89	-	100%	0,00%	89	-	0%	0%	BKAD	Sub Kegiatan ini tidak ADA anggrannya pada DPA Tahun 2022

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP (LKJIP)	Dokumen					1	24.999.800,00		8.448.561,00	1	7.632.900		4.410.000		4.000.828	1	24.492.289,00	100%	97,97%	1	24.492.289,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi Perangkat Daera	Dokumen					4	124.999.800,00	1	21.634.010,00	1	13.399.155	1	11.926.400	1	9.152.158	4	56.111.723,00	100%	44,89%	4	56.111.723,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase**	**100%**	**163.671.561.000,00**		-	**100%**	**16.820.648.377,00**		**1.833.662.793,00**		**2.257.642.992,00**		**2.244.069.445,00**	**100%**	**1.796.306.304,00**	**100%**	**8.131.681.534,00**	**100%**	**48,34%**	**100%**	**8.131.681.534,00**	**100%**	**4,97%**	**BKAD**	**Tercapai**

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai BPKD yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	Orang					55	16.735.714.427,00	0	1.805.291.373,00		2.230.441.373		2.240.414.445	55	1.771.775.904	55	8.047.923.095,00	100%	48,09%	55	8.047.923.095,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen administrasi	Dokumen					60	-		0		0			60		60	-	100%	0,00%	60	-	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Dokumen					12	49.999.950,00	3	20.550.420,00	3	9.457.219		-	6	19.155.600	12	49.163.239,00	100%	98,33%	12	49.163.239,00	0%	0%	BKAD	Tercapai

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen					1	14.999.700,00		7.821.000,00		1.592.000		-	1	5.374.800	1	14.787.800,00	100%	98,59%	1	14.787.800,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan	Laporan					36	19.934.300,00	9		9	16.152.400	9	3.655.000	9	-	36	19.807.400,00	100%	99,36%	36	19.807.400,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
			Jumlah laporan keuangan Semesteran	Laporan					2		0		1				1		2	-	100%	0,00%	2	-	0%	0%	BKAD	Tercapai
			jumlah laporan keuangan Triwuwulanan	Laporan					4		1		1		1		1		4	-	100%	0,00%	4	-	0%	0%	BKAD	Tercapai
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentase**	**100%**	**95.000.000**			**100%**		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100%**	**-**	**100%**	**0,00%**	**100%**	**-**	**100%**	**0%**	**BKAD**	**Tercapai**

		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	Dokumen					2	0	0	0	0	0			2		**2**	-	100%	0,00%	2	-	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Presentase**	**100%**	**365.255.000**	-	-	**100%**	**49.999.900**		**28.263.000**		**9.750.000**		**11.630.900**	**100%**	-	**100%**	**49.643.900,00**	**100%**	**99,29%**	**100%**	**49.643.900,00**	**100%**	**13,59%**	**BKAD**	**Tercapai**
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen					1								1		1	-	100%	0,00%	100%	-	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	jumlah surat tanda setoran (sts)retribusi daerah SKPD	Dokumen					245	20.000.000,00	129	12.819.000,00	87		109	6.981.000	85		410	19.800.000,00	167%	99,00%	410	19.800.000,00		0%	BKAD	Bertambahnya sewa lahan untuk kantin sekolah dan pembayaran

																											rumah dinas
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen					1	29.999.900,00		15.444.000,00		9.750.000		4.649.900	1		1	29.843.900,00	100%	99,48%	1	29.843.900,00		0%	BPKD	Tercapai
5		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase**	**100%**	**2.296.785.000**			**100%**	**275.000.000,00**	-	-	-	-		-	**100%**	**206.786.826,00**	**100%**	**206.786.826,00**	**100%**	**75,20%**	**100%**	**206.786.826,00**	**100%**	**9,00%**	**BKAD**	**Tercapai**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	orang					20	75.000.000,00					8			74.139.950	8	74.139.950,00	40%	98,85%	8	74.139.950,00	0%	0%	BKAD	Hanya 8 peserta yang ikut
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yg mengikuti bimtek	orang					80	200.000.000,00							14	132.646.876	14	132.646.876,00	18%	66,32%	14	132.646.876,00	0%	0%	BKAD	Hanya 14 peserta yang ikut kegiatan BIMTEK

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase**	**100%**	**12.271.251.000**			**100%**	**2.282.198.400,00**		**323.311.388,00**		**454.105.069,00**		**549.105.754,00**	**100%**	**801.883.475,00**	**100%**	**2.128.405.686,00**	**100%**	**93,26%**	**100%**	**2.128.405.686,00**	**100%**	**17,34%**	**BKAD**	**Tercapai**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dan jenis komponen/ instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis					10	63.011.600,00			9	24.722.500		20.099.200		17.975.300	9	62.797.000,00	90%	99,66%	9	62.797.000,00	0%	0%	BKAD	Hanya ada 9 jenis komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis					28	823.450.000,00	14	179.500.000,00		113.630.000		250.253.250	14	201.140.350	28	744.523.600,00	100%	90,42%	28	744.523.600,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlaj jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis					3	38.994.000,00				12.574.464		11.056.936	3	15.218.100	3	38.849.500,00	100%	99,63%	3	38.849.500,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jenis bahan logistik kantor	Jenis					6	576.749.800,00	6	81.978.835,00		112.381.275		90.311.220		256.695.700	6	541.367.030,00	100%	93,87%	6	541.367.030,00	0%	0%	BKAD	Tercapai

		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	jenis barang cetakan dan pengganda an	Jenis					10	59.993.000,00	10	13.977.920,00		13.064.150		-		27.258.000	10	54.300.070,00	100%	90,51%	10	54.300.070,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bacaan dan peraturanperundangundangan yang tersedia	Jenis					3	30.000.000,00	0	2.116.653,00		7.458.920		10.540.800	3	8.424.000	3	28.540.373,00	100%	95,13%	3	28.540.373,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman	Kotak					500	20.000.000,00							1	20.000.000	1	20.000.000,00	0%	100,00%	1	20.000.000,00	0%	0%	BKAD	Belanjanya 1 paket
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah/frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi	Paket					80	600.000.000,00	20	25.937.980,00	74	170.273.760	42	147.044.348	45	225.472.025	181	568.728.113,00	226%	94,79%	181	568.728.113,00	0%	0%	BKAD	Kinerja Melebihi target karena banyaknya undangan yang harus di hadiri/ dikuti

		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah jenis penatausahaan arsip dinamis	Jenis					1	70.000.000,00		19.800.000,00			1	19.800.000		29.700.000	1	69.300.000,00	100%	99,00%	1	69.300.000,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase**	**100%**	**5.250.386.000**			**100%**	**928.500.000,00**	**0**	-		**41.000.000,00**	-	**30.000.000,00**	**100%**	**804.410.000,00**	**100%**	**875.410.000,00**	**100%**	**94,28%**	**100%**	**875.410.000,00**	**100%**	**16,67%**	**BKAD**	**Tercapai**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas ataukendaraandinas jabatan	Unit					6										-	-	0%	0%	0	-	0%	0%	BKAD	Pagu Dana penggeseran

		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan operasional atau lapangan	Unit					10	460.000.000,00							6	459.900.000	6	459.900.000,00	60%	99,98%	6	459.900.000,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis sarana dan prasaranapendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Paket					1	468.500.000,00			1	41.000.000		30.000.000		344.510.000	1	415.510.000,00	100%	88,69%	1	415.510.000,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase**	**100%**	**4.456.723.000**			**100%**	**743.470.900,00**		**141.844.463,00**		**182.614.838,00**		**145.329.990,00**	**100%**	**238.081.673,00**	**100%**	**707.870.964,00**	**100%**	**95,21%**	**100%**	**707.870.964,00**	**100%**	**15,88%**	**BKAD**	**Tercapai**

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis					3	45.000.000,00			0	4.917.000		-	3	26.694.120	3	31.611.120,00	100%	70,25 %	3	31.611.120,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis jasa pelayanan kantor yang tersedia	Jenis					3	698.470.900,00	0	141.844.463,00		177.697.838		145.329.990	3	211.387.553	3	676.259.844,00	100%	96,82 %	3	676.259.844,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase**	**100 %**	**5.525.115.500**			**100 %**	**1.355.000.000,00**		**7.821.800,00**		**209.362.545,00**		**394.434.173,00**	**100 %**	**551.364.234,00**	**100 %**	**1.162.982.752,00**	**100%**	**85,83 %**	**100 %**	**1.162.982.752,00**	**100%**	**21,05%**	**BKAD**	**Tercapai**

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Unit					30	605.000.000,00	3	7.821.800,00	10	96.027.310	7	123.194.174	10	196.849.634	30	423.892.918,00	100%	70,06%	30	423.892.918,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	Jenis					5	170.000.000,00			1	13.392.500		71.739.999	4	82.464.600	5	167.597.099,00	100%	98,59%	5	167.597.099,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah aplikasi/ATB yang terpelihara	Jenis					2	20.000.000,00							1	20.000.000	1	20.000.000,00	50%	100,00%	1	20.000.000,00	0%	0%	BKAD	jumlah aplikasi/ATB yang terpelihara hanya 1

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor	Paket					1	260.000.000,00					1	199.500.000		59.850.000	1	259.350.000,00	100%	99,75%	1	259.350.000,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Paket					1	300.000.000,00			1	99.942.735		-		192.200.000	1	292.142.735,00	100%	97,38%	1	292.142.735,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, PAPBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu**	**Prosentase**	**100%**	**126.753.096.000,00**		**-**	**100%**	**60.146.314.164,00**		**205.342.991,00**		**10.849.269.798,00**		**1.621.863.594,00**	**100%**	**28.679.208.759,37**	**100%**	**41.355.685.142,37**	**100%**	**68,76%**	**100%**	**41.355.685.142,37**	**100%**	**32,63%**	**BKAD**	**Tercapai**

		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Capaian kinerja Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Prosentase**	**100%**	**14.396.985.000**		**-**	**100%**	**3.392.238.300,00**		**97.927.521,00**		**221.850.150,00**		**532.703.176,00**	**100%**	**1.995.641.788,00**	**100%**	**2.848.122.635,00**	**100%**	**83,96%**	**100%**	**2.848.122.635,00**	**100%**	**19,78%**	**BKAD**	**Tercapai**
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	Dokumen					2	139.878.800,00					2	119.185.650		6.962.350	2	126.148.000,00	100%	90,18%	2	126.148.000,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	Dokumen					2	55.882.800,00					2	26.361.600		9.702.700	2	36.064.300,00	100%	64,54%	2	36.064.300,00	0%	0%	BKAD	Tercapai

		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen					36	556.649.300,00							36	525.433.096	36	525.433.096,00	100%	94,39%	36	525.433.096,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD	DPA					1500	281.924.300,00	2876			36.824.000		-		236.793.540	2.876	273.617.540,00	192%	97,05%	2876	273.617.540,00	0%	0%	BKAD	Penambahan Sub Kegiatan Baru pada OPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	DPA					1500	297.188.400,00						44.375.000	1698	190.354.112	1.698	234.729.112,00	113%	78,98%	1698	234.729.112,00	0%	0%	BKAD	Penambahan Sub Kegiatan Baru pada OPD

		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen PERDA APBD dan PERWALI Penjabaran APBD	Dokumen					2	249.998.500,00	2	70.228.146,00		59.834.000		34.512.000		57.038.750	2	221.612.896,00	100%	88,65%	2	221.612.896,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen PERDA Perubahan APBD dan PERWALI Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen					2	299.998.900,00				57.363.750	2	3.252.400		174.050.500	2	234.666.650,00	100%	78,22%	2	234.666.650,00	0%	0%	BKAD	Tercapai

		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran Ketetapan Kepala Daerah(perda,Perwal,SK, SE,S1)	Dokumen					11	621.423.400,00	11	14.358.300,00	5	36.412.200		-	12	411.307.217	28	462.077.717,00	255%	74,36%	28	462.077.717,00	0%	0%	BKAD	Bertambahnya Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran Ketetapan Kepala Daerah
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen perencanaan anggaran pendapatan APBD Murni dan perubahan	Dokumen					2	77.498.900,00	1	13.341.075,00		31.416.200	1	11.987.300		1.972.150	2	58.716.725,00	100%	75,76%	2	58.716.725,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan anggaran belanja APBD Murni dan perubahan	Dokumen					2								2		2	-	100%	0,00%	2	-	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen perencanaan anggaran pembiayaan APBD Murni dan perubahan	Dokumen					2								2		2	-	100%	0,00%	2	-	0%	0%	BKAD	Tercapai

		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis perencanaan anggarran	kali					1	811.795.000,00						293.029.226	1	382.027.373	1	675.056.599,00	100%	83,16 %	1	675.056.599,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
			Jumlah sosialisasi perencanaan pengganggaran daerah	kali					1								1		1	-	100%	0,00%	1	-	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Capaian kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Presentase**	**100%**	**8.089.257.500**			**100%**	**1.984.900.000,00**		**26.327.220,00**		**392.738.946,00**		**284.682.142,00**	**100%**	**1.121.614.355,00**	**100%**	**1.825.362.663,00**	**100%**	**91,96 %**	**100%**	**1.825.362.663,00**	**100%**	**22,57%**	**BKAD**	**Tercapai**
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen dan koordinasi pengelolaan Kas Daerah	Dokumen					4	75.000.000,00	1	9.162.717,00	1	57.929.242	1	-	1	5.000.602	4	72.092.561,00	100%	96,12 %	4	72.092.561,00	0%	0%	BKAD	Tercapai

		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	jumlah dokumen penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penertiban anggaran Kas SPD	Dokumen					432	75.000.000,00	40	14.101.000,00		13.229.600	72	-	104	21.553.772	216	48.884.372,00	50 %	65,18 %	216	48.884.372,00	0%	0%	BKAD	Kebijakan pada penentuan SPD beruba h dari triwula n menjadi Semeste r
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah SP2D yang Tercetak	Lembar					23000	550.000.000,00	1687	3.063.503,00	4430	235.651.472	5731	193.778.357	11311	112.625.895	23.159	545.119.227,00	101%	99,11 %	23159	545.119.227,00	0%	0%	BKAD	Bertambahnya anggaran pada OPD
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah dokumen pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Dokumen					2	100.000.000,00						51.021.855	2	24.772.474	2	75.794.329,00	100%	75,79 %	2	75.794.329,00	0%	0%	BKAD	Tercapai

		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	jumlah perjanjian kerja sama (PKS) lembaga keuangan bank dan lembaga kekuangan bukan bank	pcs					5						1				1	-	20 %	0,00%	1	-	0%	0%	BKAD	Penawaran Bunga Deposito lebih rendah

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	jumlah laporan realisasi penerimaaandan pengeluaran kasdaerah, laporan Aliran Kasdan pelaksanaaan pemungutan pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga	Laporan					532	125.000.000,00	160		160		205	38.519.016	187	69.975.000	712	108.494.016,00	134%	86,80%	712	108.494.016,00	0%	0%	BKAD	Berdasarkan Rekening Koran penerimaan dan pengeluaran Kasda

		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	jumlah dokumen penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Dokumen					1											-	-	0%	0,00%	0	0	0%	0%	BKAD	Tidak ada kegiatan Piutang
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	jumlah Dokumen Rekonsiliasi data penerimaandan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan istansi terkait	Dokumen					1	125.000.000,00				61.164.050	1	1.362.914		55.000.000	1	117.526.964,00	100%	94,02%	1	117.526.964,00	0%	0%	BKAD	Tercapai

		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	jumlah Dokumen petunjuk teknis administrasi keuangany ang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jabawan sub kegiatan	Dokumen					7	64.900.000,00				24.764.582		-		-		-	24.764.582,00	0%	38,16 %	0	24.764.582,00	0%	0%	BKAD	Dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jabawan menunggu pembahasan dari Bagian Hukum

		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD	opd			36		36	870.000.000,00					36			832.686.612	36	832.686.612,00	100%	95,71 %	72	832.686.612,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Presentase**	**100%**	**16.277.430.000**			**100%**	**2.677.179.800,00**	**0**	-		**302.653.033,00**		**804.478.276,00**	**100%**	**378.065.037,00**	**100%**	**148519634600%**	**100%**	**55,48 %**	**100%**	**1.485.196.346,00**	**100%**	**9,12 %**	**BKAD**	**Tercapai**
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Dokumen					2	80.000.000,00				4.307.100		61.713.944	2	-	2	66.021.044,00	100%	82,53 %	2	66.021.044,00	0%	0%	BKAD	Tercapai

		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah berita acara Rekonsiliasi laporan keuangan OPD	Berita Acara					36	89.042.800,00						10.003.450	36	14.017.860	36	24.021.310,00	100%	26,98%	36	24.021.310,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	Laporan					36	125.000.000,00						12.086.842	36	72.886.955	36	84.973.797,00	100%	67,98%	36	84.973.797,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	dokumen					7	125.000.000,00			7	4.900.000					7	4.900.000,00	100%	3,92%	7	4.900.000,00	0%	0%	BKAD	Tercapai

		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota	Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang pertangungjawabanan ggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten /kota	Dokumen					2	500.000.000,00				218.338.636	2	8.981.850		41.163.470	2	268.483.956,00	100%	53,70%	2	268.483.956,00	0%	0%	BKAD	Tercapai

		Penyusunan Tanggapan /Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan /tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen					1	55.000.000,00			1					20.327.000	1	20.327.000,00	100%	36,96%	1	20.327.000,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen penyelesaian TP_TGR	Dokumen					1	193.137.000,00									-	-	0%	0,00%	0	-	0%	0%	BKAD	Tidak ada pelaksanaan majelis TP_TGR Tahun Anggaran 2022
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen analisis laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Dokumen					1								1		1	-	100%	0,00%	1	-	0%	0%	BKAD	Tercapai

		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan panduan teknik operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintaahan daerah	Dokumen					1	100.000.000,00				874.125		11.821.500	1	56.006.500	1	68.702.125,00	100%	68,70%	1	68.702.125,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang di buat	Dokumen					1	75.000.000,00									-	-	0%	0,00%	0	-	0%	0%	BKAD	Menunggu jadwal pembahasan Perwal Sisdur dari Bagian Hukum (Produk Hukum belum ada)
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada PPK , bendahara penerima dan bendahara pengeluaran opd	kali					1	1.060.000.000,00			0	31.561.172	1	587.305.372		162.166.400	1	781.032.944,00	100%	73,68%	1	781.032.944,00	0%	0%	BKAD	Tercapai

		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada PPK-BLUD	kali					1	275.000.000,00			1	42.672.000		112.565.318		11.496.852	1	166.734.170,00	100%	60,63%	1	166.734.170,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen statistik keuangan pemerintahan daerah	kali					1										-	-	0%	0,00%	0	-	0%	0%	BKAD	Tidak dilaksanakan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Presentase**	**100%**	**84.631.618.500**			**100%**	**50.211.396.064,00**		**81.088.250,00**		**9.767.690.000,00**		-	**100%**	**23.776.227.859,37**	**100%**	**33.625.006.109,37**	**100%**	**66,97%**	100%	**33.625.006.109,37**	**100%**	**39,73%**	**BKAD**	**Tercapai**

		Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah	Dokumen					1										-	-	0%	0,00%	0	-	0%	0%	BKAD	Tidak ada pelasanaan kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	jumlah kajian investasi pemerintah daerah	Dokumen					3	100.000.000,00							1	99.000.000	1	99.000.000,00	33%	99,00%	1	99.000.000,00	0%	0%	BKAD	Hanya ada 1 kajian investasi pemerintah daerah pada Bankaltim Tara
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	jumlah dokumen analisisperencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Dokumen					1										-	-	0%		0	-	0%	0%	BKAD	Karena tidak ada alokasi anggaran dalam pelaksanaannya

		Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Alokasi subsidi	Laporan					1										-	-	0%		0	-	0%	0%	BKAD	Pemerintah tidak memberikan Alokasi Subsidi
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dokumen laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak	Laporan					1	50.111.396.064,00	0	81.088.250,00		9.767.690.000		-	1	23.677.227.859	1	33.526.006.109,37	100%	66,90%	1	33.526.006.109,37	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara**	**presentase**	**100%**	**3.357.805.000**			**100%**	**1.880.600.000**	**0**	-		**164.337.669**		-	**100%**	**1.407.659.720**	**100%**	**1.571.997.389,00**	**100%**	**83,59%**	**100%**	**1.571.997.389,00**	**100%**	**46,82%**	**BKAD**	**Tercapai**

		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	presentase					70										-	-	0%		0	-	0%	0%	BKAD	
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintahan daerah bidang keuangan daerah	Dokumen					1	350.000.000,00			1	137.400.000		-		187.400.000	1	324.800.000,00	100%	92,80%	1	324.800.000,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi/ bimbingan teknis aplikas	kali					1	1.530.600.000,00				26.937.669		-	1	1.220.259.720	1	1.247.197.389,00	100%	81,48%	1	1.247.197.389,00	0%	0%	BKAD	Tercapai

		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Prensentase Peningkatan BMD yang terkelola**	**Presentase**	**100%**	**25.763.522.000,00**			**100%**	**5.769.705.800,00**		**47.750.290,00**		**437.263.211,00**		**714.850.549,00**	**100%**	**1.513.764.334,20**	**100%**	**2.713.628.384,20**	**100%**	**47,03%**	**100%**	**2.713.628.384,20**	**100%**	**10,53%**	**BKAD**	**Tercapai**
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Presentase**	**100%**	**25.763.522.000**			**100%**	**5.769.705.800,00**		**47.750.290,00**		**437.263.211,00**		**714.850.549,00**	**100%**	**1.513.764.334,20**	**100%**	**2.713.628.384,20**	**100%**	**47,03%**	**100%**	**2.713.628.384,20**	**100%**	**10,53%**	**BKAD**	**Tercapai**
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga pemerintah daerah	Dokumen					1	647.475.000,00				18.905.340	1	290.949.800		43.486.000	1	353.341.140,00	100%	54,57%	1	353.341.140,00	0%	0%	BKAD	Target Tercapai

		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah dalam penyusunan RKA	Dokumen					1	124.999.800,00							1	109.690.576	1	109.690.576,00	100%	87,75%	1	109.690.576,00	0%	0%	BKAD	terkendala dalam proses penyusunan draft Perjanjian Kerjasama dgn pihak ke 3
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam penyusunan APBD	Dokumen					2	230.000.000,00				13.840.419		13.025.000	2	100.015.152	2	126.880.571,00	100%	55,17%	2	126.880.571,00	0%	0%	BKAD	Target Tercapai
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi pengelolaan barang milik daerah yang disusun	Dokumen					2	100.000.000,00									-	-	0%	0,00%	0	-	0%	0%	BKAD	Penyusunan Kebijakan Pengelola BMD menunggu peraturan terbaru dari Kepmendagri

		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan barang milik daerah dan laporan barang persedian	Laporan					2	680.000.000,00		7.226.340,00		55.268.385	2	289.785.049		69.038.444	2	421.318.218,00	100%	61,96%	2	421.318.218,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi BMD	Laporan					36	200.000.000,00							36	120.349.007	36	120.349.007,00	100%	60,17%	36	120.349.007,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset tanah Pemkot yang proses sertifikasi	Bidang					50	1.737.250.000,00	13	13.933.770,00		172.841.347		78.903.030	28	486.327.166,20	41	752.005.313,20	82%	43,29%	41	752.005.313,20	0%	0%	BKAD	Terbit Sertifikat 11 Bidang, 30 Bidang proses sertifikat di Pertanahan dan 9 bidang proses kelengkapan administrasi di BKAD

		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah yang disusun	Dokumen					4	1.000.000.000,00				49.901.500	3	6.416.466	1	224.189.779	4	280.507.745,00	100%	28,05 %	4	280.507.745,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen					15	479.981.000,00		10.857.180,00		45.784.690	10	35.771.204	5	152.627.622	15	245.040.696,00	100%	51,05 %	15	245.040.696,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan					36	170.000.000,00		15.733.000,00		4.044.370		-	36	9.845.000	36	29.622.370,00	100%	17,42 %	36	29.622.370,00	0%	0%	BKAD	Tercapai

		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan keuanganpemerintadaerah oleh TIM dari BPKP Perwakilan Propinsi Kaltim	Dokumen					1	200.000.000,00				76.677.160	1	-		75.698.768	1	152.375.928,00	100%	76,19 %	1	152.375.928,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi regulasi pengelolaan barang milik daerah	Kegiatan					1	200.000.000,00				122.496.820			1	122.496.820	1	122.496.820,00	100%	61,25 %	1	122.496.820,00	0%	0%	BKAD	Tercapai
																			0									
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**89,90%**	**63,50 %**			**17,21%**	**3,15 %**		
Predikat Kinerja																					**Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
TOTAL ANGGARAN DAN REALIASAI SELURUH SUB KEGIATAN				**437.906.722.500,00**	**-**	**-**		**115.609.435.241,00**	**-**	**5.426.268.832,00**	**-**	**20.173.932.914,00**	**-**	**9.417.961.399,00**	**76,50**	**49.092.153.181,57**		**84.110.316.326,57**										

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**87,29%**	**64,25 %**			**0%**	**0%**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				**94 %**	**69,63 %**			**92 %**	**16,81%**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				**80 %**	**54,69 %**			**78 %**	**15,92%**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				**Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Tinggi**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja							Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Instansi dan Mulainya penerapan teknologi aplikasi pada beberapa program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja																						

Faktor Penghambat pencapaian kinerja	Lemahnya/ kekurang pemahaman para aparatur terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah; Lemahnya tingkat koordinasi antar bidang;Adanya perubahan dan atau tumpang tindih regulasi daripemerintah pusat/ provinsi
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	Peningkatan pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan regulasi pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan keterampilan penggunaan teknologi aplikasi pengelolaan keuangan daerah
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	Semua pegawai harus saling mendukung dan mengerti tupksi dalam pelaksanaan pekerjaan dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia

2.1 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Untuk dapat melakukan analis kinerja pelayanan perangkat daerah pada Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan maka perlu disajikan dalam bentukformat sebagai berikut

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKD Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BKAD		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BKAD	27	28,75	30,5	32,25	32,16		30,5	32,25	
2	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel		Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A				

2.2 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada BKAD

Isu strategis BKAD Kota Balikpapan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan dimasa yang akan datang dan berdampak positif bagi pembangunan masyarakat sebagai entitas. Isu strategis akan berdampak buruk apabila hal yang menjadi kelemahan dan kendala tidak terantisipasi dengan baik. Dan akan menghilangkan potensi positif apabila kekuatan dan peluang tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka isu-isu strategis Badan BKAD Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

No	Isu Strategis BKAD Tahun 2023 dan Tahun 2024	Pengaruh	Dampak
1	PERUBAHAN DATABASE DAN DOMAIN APLIKASI SIPD (SIPD.GO.ID menjadi SIPD.RI) di Tahun Anggaran 2024	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah berpotensi terganggu dan mengalami keterlambatan	Penurunan Nilai RB dan MCP KPK
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpotensi terganggu	Penurunan Opini WTP
2	PENYESUAIAN KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN BARU (UU NO. 1 TAHUN 2022 HKPD PENERAPAN TA 2024)	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Pengelolaan Perbendaharaan, dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Khususnya terkait Penyesuaian Regulasi Pegelolaan Daerah yang berdampak	Penurunan Opini WTP
3	PENGGUNAAN SIPD PENUH di Tahun 2023 (TANPA APLIKASI PENDAMPING LAIN)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah berpotensi terlambat.	Penurunan Opini WTP

4	PENERAPAN DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah berpotensi	Penurunan Opini WTP
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah akan terhambat	Penurunan Opini WTP
5	PENERAPAN DAN PENYUSUNAN SSH, SBU, HSPK & ASB	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penurunan Nilai MCP KPK dan Opini WTP
6	PENERAPAN PENENTUAN MASA BMD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penurunan Opini WTP

2.3 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan (Rp.000)**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Balikpapan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**77,5**	**38.914.150**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Balikpapan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**77,5**	**29.570.823,75**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**Nilai SAKIP**	**65**	**286.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**Nilai SAKIP**	**65**	**285.999,60**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 dokumen	27.499,60	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	89 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	89 dokumen	27.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balikpapan	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	89 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balikpapan	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	89 dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	89 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	89 dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang terusun	89 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang terusun	89 dokumen	27.500	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen SAKIP (LKJIP)	1 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen SAKIP (LKJIP)	1 laporan	38.500	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	4 dokumen		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	4 dokumen	165.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**32.633.100**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**21.981.596,4**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Persentase Gaji dan Tunjangan Pegawai BPKD yang dibayarkan	55 orang/bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Persentase Gaji dan Tunjangan Pegawai BPKD yang dibayarkan	55 orang/bulan	21.500.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balikpapan	Jumlah dokumen administrasi yang tersusun	60 Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balikpapan	Jumlah dokumen administrasi yang tersusun	60 Dokumen	378.756,2	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Balikpapan	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Balikpapan	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	60.499,3	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	5 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	5 laporan	18.150	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Balikpapan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	36 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Balikpapan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	36 laporan	24.191	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**20.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**20.000**	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen RKBMD yang terususun	2 dokumen		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen RKBMD yang terususun	2 dokumen	20.000	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**1**	**60.500**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100%**	**60.499,6**	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen kajian perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1 Dokumen		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen kajian perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1 Dokumen	-	
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Balikpapan	Persentase jenis retribusi daerah yang terpungut	245 Dokumen		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Balikpapan	Persentase jenis retribusi daerah yang terpungut	245 Dokumen	24.200	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12 Dokumen		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12 Dokumen	36.299,6	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**463.500**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**161.920,1**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80 paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80 paket	161.920,1	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat yang meningkat kapasitasnya	20 orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat yang meningkat kapasitasnya	20 orang		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah pegawai yg mengikuti bimtek yang meningkat kapasitasnya	80 orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah pegawai yg mengikuti bimtek yang meningkat kapasitasnya	80 orang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**2.432.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**3.008.652,9**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah dan jenis komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	1 paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah dan jenis komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	1 paket	56.027,5	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 paket	1.287.534,5	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia yang tersedia yang tersedia	2 paket		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia yang tersedia yang tersedia	2 paket	30.229,3	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	jenis bahan logistik kantor yang tersedia	7 paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	jenis bahan logistik kantor yang tersedia	7 paket	454.946	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 paket		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 paket	41.547	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	jumlah jenis bacaan dan peraturanperundang undangan yang tersedia	6000 dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	jumlah jenis bacaan dan peraturanperundang undangan yang tersedia	6000 dokumen	43.225	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	jumlah makanan dan minuman yang tersedia	2 laporan		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	jumlah makanan dan minuman yang tersedia	2 laporan	60.334	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	jumlah/frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi	80 laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	jumlah/frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi	80 laporan	786.500	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	jumlah jenis arsip dinamis	1 dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	jumlah jenis arsip dinamis	1 dokumen	248.309,6	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.040.600**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**928.287**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	jumlah kendaraan perorangandinas ataukendaraandinas jabatan yang tersedia	4 unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	jumlah kendaraan perorangandinas ataukendaraandinas jabatan yang tersedia	4 unit	156.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang tersedia	4 unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang tersedia	4 unit	530.532	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	jumlah jenis sarana dan prasaranapendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	39 unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	jumlah jenis sarana dan prasaranapendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	39 unit	241.755	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**883.300**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**943.283,95**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	156.786	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 laporan	786.497,95	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.095.050**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.560.584,2**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	28 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	28 unit	874.289,2	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	jumlah jenis peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	5 unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	jumlah jenis peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	5 unit	168.795	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Balikpapan	jumlah jenis ATB yang terpelihara	2 unit		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Balikpapan	jumlah jenis ATB yang terpelihara	2 unit	17.500	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	jumlah gedung kantor yang terpemeliharaan/rehab	1 unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	jumlah gedung kantor yang terpemeliharaan/rehab	1 unit	300.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	200.000	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**620.000**	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat yang meningkat kapasitasnya	20 orang	310.000	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah pegawai yg mengikuti bimtek yang meningkat kapasitasnya	80 orang	310.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Balikpapan**	**Persentase tahapan penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta realisaasi APBD yang tepat waktu**	**100%**	**24.840.192**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Balikpapan**	**Persentase tahapan penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta realisaasi APBD yang tepat waktu**	**100%**	**25.679.489**	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Balikpapan**	**Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaan Daerah**	**100%**	**2.843.500**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Balikpapan	**Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaan Daerah**	**100%**	**4.627.989**	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Balikpapan	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	2 Dokumen	242.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Balikpapan	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	2 Dokumen	348.343	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun	2 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun	2 Dokumen	49.762	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan PPKD	464 dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan PPKD	464 dokumen	798.510	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah DPA SKPD dan PPKD yang terverifikasi	464 dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah DPA SKPD dan PPKD yang terverifikasi	464 dokumen	375.719	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Perubahan DPA SKPD dan PPKD yang terverifikasi	464 dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Perubahan DPA SKPD dan PPKD yang terverifikasi	464 dokumen	398.750	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Balikpapan	Jumlah dokumen PERDA APBD dan PERWALI Penjabaran APBD	2 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Balikpapan	Jumlah dokumen PERDA APBD dan PERWALI Penjabaran APBD	2 Dokumen	302.500	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Balikpapan	Jumlah Dokumen PERDA Perubahan APBD dan PERWALI Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Balikpapan	Jumlah Dokumen PERDA Perubahan APBD dan PERWALI Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	309.032	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Balikpapan	Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran Ketetapan Kepala Daerah yang diterbitkan	11 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Balikpapan	Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran Ketetapan Kepala Daerah yang diterbitkan	11 Dokumen	849.463	

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan APBD Murni dan perubahan	2 dokumen		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan APBD Murni dan perubahan	2 dokumen	120.000	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran Belanja APBD Murni dan perubahan	2 dokumen		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran Belanja APBD Murni dan perubahan	2 dokumen	50.000	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan APBD Murni dan perubahan	2 Dokumen		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan APBD Murni dan perubahan	2 Dokumen	50.000	
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis perencanaan anggaran	600 0rang		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis perencanaan anggaran	600 0rang	975.910	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Balikpapan**	**capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah**	**100%**	**1.603.250**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Balikpapan**	**capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah**	**100%**	**2.868.849,5**	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil koordinasi pengelolaan Kas Daerah	13 dokumen		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil koordinasi pengelolaan Kas Daerah	13 dokumen	90.750	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Balikpapan	jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	144 dokumen		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Balikpapan	jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	144 dokumen	50.000	
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Balikpapan	Jumlah SP2D yang diterbitkan	23000 lembar		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Balikpapan	Jumlah SP2D yang diterbitkan	23000 lembar	400.000	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Balikpapan	jumlah dokumen laporan pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	4 dokumen		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Balikpapan	jumlah dokumen laporan pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	4 dokumen	75.000	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Balikpapan	jumlah perjanjian kerja sama (PKS) lembaga keuangan bank dan lembaga kekuangan bukan bank	2 PKS		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Balikpapan	jumlah perjanjian kerja sama (PKS) lembaga keuangan bank dan lembaga kekuangan bukan bank	2 PKS		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Balikpapan	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Balikpapan	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 laporan	125.000	
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Balikpapan	jumlah dokumen hasil koordinasi Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 dokumen		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Balikpapan	jumlah dokumen hasil koordinasi Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 dokumen	-	

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Balikpapan	jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaandan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	2 dokumen		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Balikpapan	jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaandan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	2 dokumen	50.000	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Balikpapan	jumlah Dokumen petunjuk teknis administrasi keuanganyang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jabawan sub kegiatan	4 dokumen		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Balikpapan	jumlah Dokumen petunjuk teknis administrasi keuanganyang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jabawan sub kegiatan	4 dokumen	50.000	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	384 orang		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	384 orang	2.028.099,5	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Balikpapan**	**capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah**	**100%**	**3.361.350**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Balikpapan**	**capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah**	**100%**	**3.861.350**	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai SAP	24 Laporan		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai SAP	24 Laporan	181.500	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	13 Dokumen		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	13 Dokumen	121.000	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Balikpapan	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Balikpapan	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	181.500	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 laporan		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 laporan	295.350	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	181.500	

Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	90.750	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	242.000	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan panduan teknik operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintaahan daerah	1 Dokumen		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan panduan teknik operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintaahan daerah	1 Dokumen	174.750	
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah sistem prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang di buat	1 Dokumen		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah sistem prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang di buat	1 Dokumen		
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	105 orang		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	105 orang	1.993.000	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota	28 lembaga		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota	28 lembaga	400.000	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Balikpapan**	**Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**16.366.592**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Balikpapan**	**Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**11.441.250**	
Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Balikpapan	jumlah dokumen pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah	1 Dokumen		Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Balikpapan	jumlah dokumen pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah	1 Dokumen	-	
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Balikpapan	jumlah laporan hasil kajian investasi pemerintah daerah yang tersusun	3 laporan		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Balikpapan	jumlah laporan hasil kajian investasi pemerintah daerah yang tersusun	3 laporan	240.000	
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Balikpapan	jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	1 laporan		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Balikpapan	jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	1 laporan	-	
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Balikpapan	Jumlah lembaga penerima subsidi	1 lembaga		Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Balikpapan	Jumlah lembaga penerima subsidi	1 lembaga	210.000	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Balikpapan	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 laporan		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Balikpapan	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 laporan	10.991.250	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Balikpapan**	**Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara**	**100%**	**665.500**	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Balikpapan**	**Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara**	**100%**	**2.880.051**	
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen	30.000	

Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	175.000	
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 orang		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 orang	2.675.050,8	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Balikpapan**	**Persentase peningkatan BMD yang terkelola**	**100%**	**22.990.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Balikpapan**	**Persentase peningkatan BMD yang terkelola**	**100%**	**53.472.169,1**	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Balikpapan**	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**22.990.000**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Balikpapan**	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**53.472.169,1**	
Penyusunan Standar Harga	Balikpapan	Jumlah dokumen standar satuan harga pemerintah daerah yang tersusun	1 dokumen		Penyusunan Standar Harga	Balikpapan	Jumlah dokumen standar satuan harga pemerintah daerah yang tersusun	1 dokumen	670.000	
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah dalam penyusunan RKA yang tersusun	1 dokumen		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah dalam penyusunan RKA yang tersusun	1 dokumen	324.999,6	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam penyusunan APBD yang tersusun	2 dokumen		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam penyusunan APBD yang tersusun	2 dokumen	664.999,8	
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dokumen		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dokumen	36.395	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah dan persediaan yang tersusun	2 laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah dan persediaan yang tersusun	2 laporan	484.000	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi BMD	36 laporan		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi BMD	36 laporan	350.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 laporan		Pengamanan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 laporan	4.723.037,8	
Penilaian Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah	3 laporan		Penilaian Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah	3 laporan	604.998,6	
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Gedung Milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola	11 Gedung		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Gedung Milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola	11 Gedung	43.239.239	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen	1.099.999,3	

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	181.500	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	1 laporan		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	1 laporan	265.000	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72 orang		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72 orang	828.000	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Lintas OPD

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024

No	Kegiatan	Lokasi	Vol	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengecatan Gedung	Kantor DISDUKCAPIL	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
2	Peluasan Lahan Parkir	Kantor DISDUKCAPIL	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
3	Pemasangan Pintu otomatis menggunakan sensor pada ruang pelayanan publik	Kantor DISDUKCAPIL	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
4	Pemasangan wallpaper pada ruangan pelayanan publik	Kantor DISDUKCAPIL	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
5	Pemasangan Guilding Blok pada ruang pelayanan untuk penyandang Disabilitas	Kantor DISDUKCAPIL	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
6	Pemasangan kode braille pada tombol indikator lift	Kantor DISDUKCAPIL	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
7	Pengecatan ruangan lantai 1, 3 dan 4	Kantor Dinas Ketenaga Kerjaan	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
8	Penggantian karpet di ruang kepala Dinas, Sekretaris dan Musholla di lantai 4	Kantor Dinas Ketenaga Kerjaan	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
9	Perbaikan vertikal blind/gorden	Kantor Dinas Ketenaga Kerjaan	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
10	Perbaikan ruangan pelayanan Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja di lantai 1	Kantor Dinas Ketenaga Kerjaan	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
11	Perbaikan sarana dan prasarana pada ruang pelayanan dan ruang bendahara	Kantor BPPDRD	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
12	Penecatan dindin ruangan	Kantor BKPSDM	1 Paket	Kegiatan di UPTD

				BPKD
13	Perbaikan plafon	Kantor BKPSDM	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
14	Perbaikan dan perawatan AC	Kantor BKPSDM	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
15	Penggantian bola lampu	Kantor BKPSDM	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
16	Perbaikan jendela	Kantor BKPSDM	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
17	Pembuatan gedung untuk tempat menyimpan barang barang aset kantor yang rusak	DP3AKB	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
18	Penggantian beberapa bohlam lampu biasa dan lampu neon	DP3AKB	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
19	Perbaikan toilet serta wastafel kamar kecil dan dapur kantor	DP3AKB	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
20	Pengecekan dan perbaikan jalur AC di lantai 2 karena sudah beberapa kali terjadi bocor dan rembes	DP3AKB	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
21	Penggantian atau pencucian gorden kantor yang sudah terlalu lama masa pakainya	DP3AKB	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD
22	Pemasangan wallpaper kaca jendela di ruangan - ruangan agar tidak terpapar cahaya matahari secara langsung karena cukup mengganggu kegiatan - kegiatan seperti rapat dan penerimaan tamu	DP3AKB	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Pembangunan daerah menjadi pondasi dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Sehingga, pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Direktorat Jenderal Bina Keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri memiliki visi sebagai berikut:

> "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Partisifatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif"

Berdasarkan visi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tersebut, terkandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif

   Dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, berarti mewujudkan penyusunan anggaran dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

b. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan

   Pengelolaan keuangan daerah yang transparan berarti menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

c. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien

   Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien berarti memperoleh hasil sesuai dengan target yang ditetapkan serta memperoleh hasil yang maksimal dengan menggunakan masukan yang minimal.

d. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

   Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berarti mewujudkan pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Pengelolaan keuangan daerah yang kompetitif

   Pengelolaan keuangan daerah yang kompetititf merupakan bentuk implementasi pengelolaan keuangan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang dapat dibandingkan dengan yang lain.

3.2 Tujuan dan Sasara Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi walikota Balikpapan yang telah ditetapkan, maka BKAD Kota Balikpapan menetapkan tujuan selama periode 2022 -2026, yaitu:

Tabel C-25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79	80	81	82	83
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BKAD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BKAD	27	28,75	30,5	32,25	34
		Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

3.2 Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan visi dan misi Walikota Balikpapan dan sesuai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

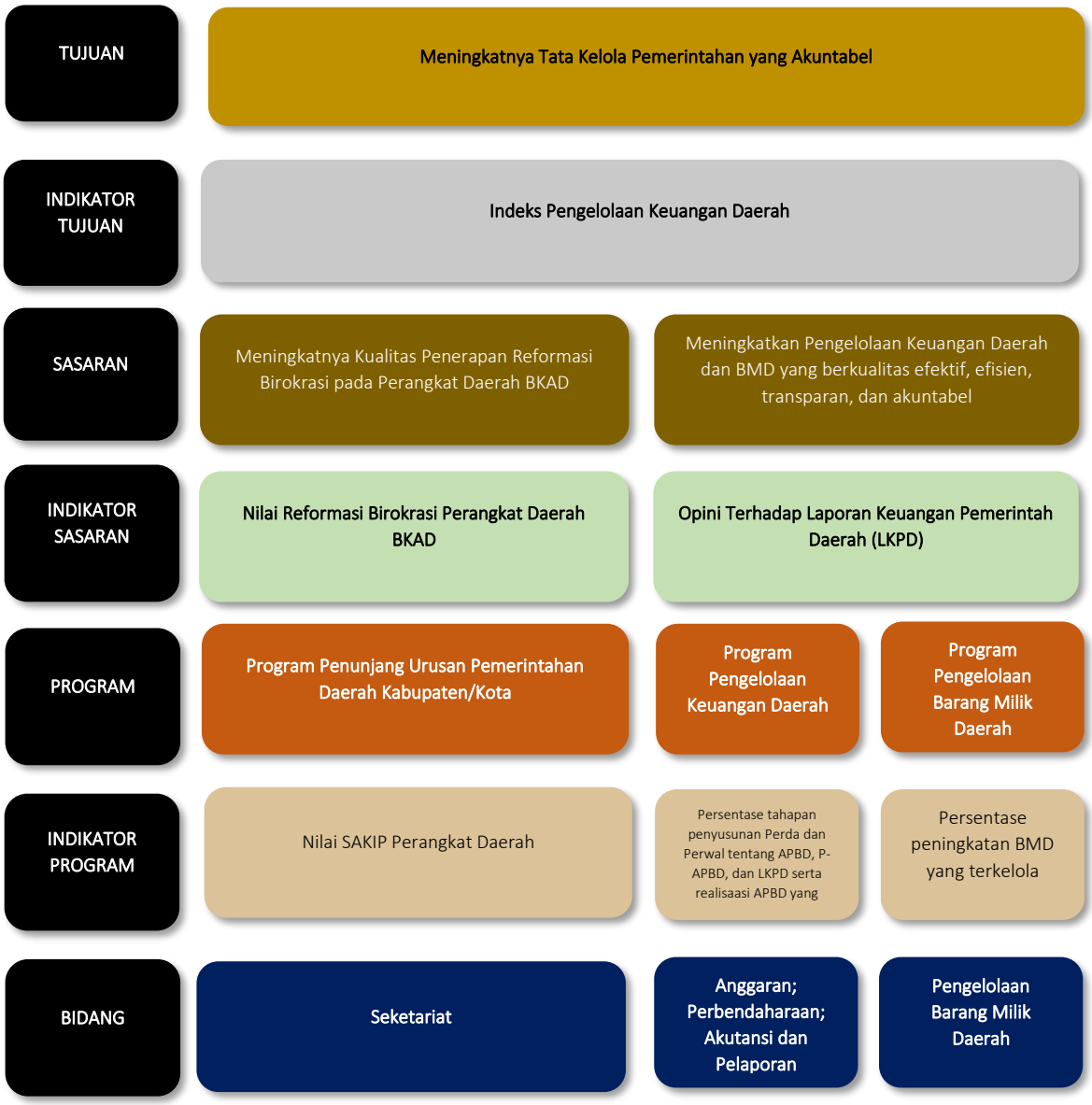

Tabel rencana program dan kegiatan Tahun 2024 dan prakiran maju Tahun 2025 digambarkan dengan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				62.415.791.950,00					79.469.205.000,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				62.415.791.950,00					79.469.205.000,00
5	02				KEUANGAN				61.795.791.950,00					79.003.355.000,00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				28.337.888.550,00					41.572.715.000,00
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				285.999.600,00					298.600.000,00
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89 Dokumen	65 poin	27.499.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89 Dokumen	28.000.000,00
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	89 Dokumen	65 poin	27.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	89 Dokumen	28.000.000,00
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	89 Dokumen	65 poin	27.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	89 Dokumen	28.000.000,00
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	65 poin	38.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	40.600.000,00
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	65 poin	165.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	174.000.000,00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.981.596.400,00					35.146.410.000,00
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	100 %	21.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	35.000.000.000,00
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	100 %	378.756.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	33.275.000,00
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100 %	60.499.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	66.550.000,00
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	100 %	18.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	19.965.000,00
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan	100 %	24.190.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan	26.620.000,00
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000,00					25.000.000,00
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	100 %	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				60.499.600,00					66.550.000,00
5	02	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah									
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	245 Laporan	100 %	24.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	245 Laporan	26.620.000,00
5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	100 %	36.299.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pengelolaan	12 Dokumen	39.930.000,00

												Retribusi Daerah		
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				161.920.100,00					40.000.000,00
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	100 %	161.920.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	40.000.000,00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.611.367.700,00					2.675.310.000,00
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100 %	56.027.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.895.000,00
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	100 %	1.090.198.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	1.064.800.000,00
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	100 %	30.229.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	33.275.000,00
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	100 %	454.946.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	479.160.000,00
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100 %	41.547.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.930.000,00
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6000 Dokumen	100 %	43.225.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6000 Dokumen	53.240.000,00
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	100 %	60.334.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	26.620.000,00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	100 %	786.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	865.150.000,00
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100 %	48.360.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	53.240.000,00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				928.287.000,00					1.144.660.000,00
5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	100 %	156.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	266.200.000,00
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	100 %	530.532.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	612.260.000,00
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39 Unit	100 %	241.755.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39 Unit	266.200.000,00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				943.283.950,00					971.630.000,00
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	100 %	156.786.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	106.480.000,00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	100 %	786.497.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	865.150.000,00
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.344.934.200,00					1.204.555.000,00
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	100 %	874.289.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	678.810.000,00
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	100 %	168.795.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	186.340.000,00
5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	100 %	17.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	26.620.000,00
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100 %	163.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	179.685.000,00
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100 %	121.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	133.100.000,00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				24.806.938.500,00					28.317.520.000,00
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				4.627.989.000,00					3.152.850.000,00
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	100 %	348.343.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	266.200.000,00
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	100 %	49.762.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	199.650.000,00

5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									
						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	464 Dokumen	100 %	798.510.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	464 Dokumen	332.750.000,00
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD									
						Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	464 Dokumen	100 %	375.719.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	464 Dokumen	266.200.000,00
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD									
						Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	464 Dokumen	100 %	398.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	464 Dokumen	332.750.000,00
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	100 %	302.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	332.750.000,00
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	100 %	309.032.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	399.300.000,00
5	02	02	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									

			01	09										
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	11 Dokumen	100 %	849.463.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	11 Dokumen	224.650.000,00
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	100 %	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	133.100.000,00
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	55.000.000,00
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	55.000.000,00
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang	100 %	975.910.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang	555.500.000,00
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				2.368.849.500,00					1.663.575.000,00
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	13 Dokumen	100 %	90.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	13 Dokumen	99.825.000,00
5	02	02	2.02	003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	144 Dokumen	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	144 Dokumen	99.825.000,00
5	02	02	2.02	004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah									
						Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	23000 Dokumen	100 %	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	23000 Dokumen	498.950.000,00
5	02	02	2.02	005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	100 %	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	133.100.000,00
5	02	02	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									

						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	100 %	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	199.650.000,00
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait									
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	166.375.000,00
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan									

						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4 Dokumen	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4 Dokumen	66.550.000,00
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	384 Orang	100 %	1.528.099.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	384 Orang	399.300.000,00
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				3.361.350.000,00					3.479.325.000,00
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah									
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24 Laporan	100 %	181.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24 Laporan	199.650.000,00
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban									
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	13 Dokumen	100 %	121.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	13 Dokumen	133.100.000,00
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									

						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	100 %	181.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	199.650.000,00
5	02	02	2.03	004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	100 %	295.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	665.500.000,00
5	02	02	2.03	005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100 %	181.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	199.650.000,00
5	02	02	2.03	006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									
						Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	100 %	90.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	99.825.000,00
5	02	02	2.	00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah									

			03	07										
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	100 %	242.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	266.200.000,00
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah									
						Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100 %	174.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	133.100.000,00
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	105 Orang	100 %	1.493.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	105 Orang	1.183.350.000,00
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota									
						Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	28 Lembaga	100 %	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	28 Lembaga	399.300.000,00
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				12.441.250.000,00					19.289.720.000,00
5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah									

						Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	3 Laporan	100 %	240.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	3 Laporan	133.100.000,00
5	02	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi									
						Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	100 %	1.210.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	1.331.000.000,00
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	100 %	10.991.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	17.825.620.000,00
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				2.007.500.000,00					732.050.000,00
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah									
						Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	100 %	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	133.100.000,00
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah									
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	100 %	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	465.850.000,00
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									

						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	100 %	1.802.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	133.100.000,00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				8.650.964.900,00					9.113.120.000,00
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				8.650.964.900,00					9.113.120.000,00
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga									
						Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	100 %	670.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	680.000.000,00
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah									
						Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	100 %	324.999.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	399.650.000,00
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah									
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	100 %	359.996.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	392.820.000,00
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah									
						Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	100 %	36.395.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	133.100.000,00
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	100 %	484.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	532.400.000,00
5	02	03	2.	00	Inventarisasi Barang Milik Daerah									

			01	06										
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36 Laporan	100 %	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36 Laporan	360.000.000,00
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Laporan	100 %	3.446.075.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Laporan	3.450.000.000,00
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah									
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	100 %	604.998.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	665.500.000,00
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen	100 %	1.099.999.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen	1.200.000.000,00
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	100 %	181.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	199.650.000,00
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									

						Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	100 %	265.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	270.000.000,00
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72 Orang	100 %	828.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72 Orang	830.000.000,00
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				620.000.000,00					465.850.000,00
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				620.000.000,00					465.850.000,00
5	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				620.000.000,00					465.850.000,00
5	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	100 %	310.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	133.100.000,00
5	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	100 %	310.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	332.750.000,00
					UPTD Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah				32.883.800.000,00					19.672.180.000,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				32.883.800.000,00					19.672.180.000,00
5	02				KEUANGAN				32.883.800.000,00					19.672.180.000,00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				32.883.800.000,00					19.672.180.000,00
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				32.883.800.000,00					19.672.180.000,00
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah									

						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Laporan	100 undefined	32.883.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Laporan	19.672.180.000,00
								TOTAL	**95.299.591.950,00**					**99.141.385.000,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusunlah program, kegiatan, dan sub kegiatan secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut disusun susai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan yaitu melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

Pada tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan akan melaksanakan 3 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 dan 84 Sub Kegiatan. Untuk melaksanakan seluruh program kegiatan dan sub kegiatan tersebut dengan pagu indikatif sebesar Rp.108.722.479.150,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan Tahun 2024. Program tersebut terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Kebutuhan (Rp.000)
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**77,5**	**29.570.823,75**
5	**2**	**1**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP**	**65**	**285.999,60**
5	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 dokumen	27.499,60
5	2	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	89 dokumen	27.500
5	2	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	89 dokumen	
5	2	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	89 dokumen	
5	2	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang terusun	89 dokumen	27.500
5	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP (LKJIP)	1 laporan	38.500
5	2	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	4 dokumen	165.000
5	**2**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**21.981.596,4**

5	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan Pegawai BPKD yang dibayarkan	55 orang/bulan	21.500.000
5	2	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi yang tersusun	60 Dokumen	378.756,2
5	2	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	60.499,3
5	2	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	5 laporan	18.150
5	2	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	36 laporan	24.191
5	**2**	**1**	**02.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**20.000**
5	2	1	02.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang terususun	2 dokumen	20.000
5	**2**	**1**	**02.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100%**	**60.499,6**
5	**2**	**1**	**02.04**	**1**	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen kajian perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1 Dokumen	-
5	**2**	**1**	**02.04**	**5**	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase jenis retribusi daerah yang terpungut	245 Dokumen	24.200
5	**2**	**1**	**02.04**	**7**	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12 Dokumen	36.299,6
5	**2**	**1**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**161.920,1**
5	2	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80 paket	161.920,1
5	2	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat yang meningkat kapasitasnya	20 orang	
5	2	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yg mengikuti bimtek yang meningkat kapasitasnya	80 orang	
5	**2**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**3.008.652,9**
5	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	1 paket	56.027,5
5	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 paket	1.287.534,5
5	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia yang tersedia yang tersedia	2 paket	30.229,3
5	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jenis bahan logistik kantor yang tersedia	7 paket	454.946

5	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 paket	41.547
5	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bacaan dan peraturanperundang undangan yang tersedia	6000 dokumen	43.225
5	2	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman yang tersedia	2 laporan	60.334
5	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah/frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi	80 laporan	786.500
5	2	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah jenis arsip dinamis	1 dokumen	248.309,6
5	**2**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**928.287**
5	2	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangandinas ataukendaraandinas jabatan yang tersedia	4 unit	156.000
5	2	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang tersedia	4 unit	530.532
5	2	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis sarana dan prasaranapendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	39 unit	241.755
5	**2**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**943.283,95**
5	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	156.786
5	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 laporan	786.497,95
5	**2**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.560.584,2**
5	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	28 unit	874.289,2
5	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	5 unit	168.795
5	2	1	02.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah jenis ATB yang terpelihara	2 unit	17.500
5	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terpemeliharaan/rehab	1 unit	300.000
5	2	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	200.000
5	**4**	**1**			**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**620.000**
5	4	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat yang meningkat kapasitasnya	20 orang	310.000
5	4	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yg mengikuti bimtek yang meningkat kapasitasnya	80 orang	310.000

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Kebutuhan (Rp.000)
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase tahapan penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta realisaasi APBD yang tepat waktu**	**100%**	**25.679.489**
5	**2**	**2**	**02.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaan Daerah**	**100%**	**4.627.989**
5	2	2	02.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	2 Dokumen	348.343
5	2	2	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun	2 Dokumen	49.762
5	2	2	02.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan PPKD	464 dokumen	798.510
5	2	2	02.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD dan PPKD yang terverifikasi	464 dokumen	375.719
5	2	2	02.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD dan PPKD yang terverifikasi	464 dokumen	398.750
5	2	2	02.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen PERDA APBD dan PERWALI Penjabaran APBD	2 Dokumen	302.500
5	2	2	02.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen PERDA Perubahan APBD dan PERWALI Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	309.032
5	2	2	02.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran Ketetapan Kepala Daerah yang diterbitkan	11 Dokumen	849.463
5	2	2	02.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan APBD Murni dan perubahan	2 dokumen	120.000
5	2	2	02.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran Belanja APBD Murni dan perubahan	2 dokumen	50.000
5	2	2	02.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan APBD Murni dan perubahan	2 Dokumen	50.000
5	2	2	02.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis perencanaan anggaran	600 0rang	975.910
5	**2**	**2**	**02.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah**	**100%**	**2.868.849,5**
5	2	2	02.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi pengelolaan Kas Daerah	13 dokumen	90.750

5	2	2	02.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	144 dokumen	50.000
5	2	2	02.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah SP2D yang diterbitkan	23000 lembar	400.000
5	2	2	02.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah dokumen laporan pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	4 dokumen	75.000
5	2	2	02.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	jumlah perjanjian kerja sama (PKS) lembaga keuangan bank dan lembaga kekuangan bukan bank	2 PKS	
5	2	2	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 laporan	125.000
5	2	2	02.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	jumlah dokumen hasil koordinasi Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 dokumen	-
5	2	2	02.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaandan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	2 dokumen	50.000
5	2	2	02.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	jumlah Dokumen petunjuk teknis administrasi keuanganyang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jabawan sub kegiatan	4 dokumen	50.000
5	2	2	02.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	384 orang	2.028.099,5
5	**2**	**2**	**02.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah**	**100%**	**3.861.350**
5	2	2	02.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai SAP	24 Laporan	181.500
5	2	2	02.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	13 Dokumen	121.000

5	2	2	02.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	181.500
5	2	2	02.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 laporan	295.350
5	2	2	02.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	181.500
5	2	2	02.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	90.750
5	2	2	02.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	242.000
5	2	2	02.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan panduan teknik operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintaahan daerah	1 Dokumen	174.750
5	2	2	02.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang di buat	1 Dokumen	
5	2	2	02.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	105 orang	1.993.000
5	2	2	02.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota	28 lembaga	400.000
5	**2**	**2**	**02.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**11.441.250**
5	2	2	02.04	1	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah	1 Dokumen	-
5	2	2	02.04	2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	jumlah laporan hasil kajian investasi pemerintah daerah yang tersusun	3 laporan	240.000
5	2	2	02.04	6	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	1 laporan	-
5	2	2	02.04	7	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah lembaga penerima subsidi	1 lembaga	210.000
5	2	2	02.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 laporan	10.991.250

5	**2**	**2**	**02.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara**	**100%**	**2.880.051**
5	2	2	02.05	1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen	30.000
5	2	2	02.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	175.000
5	2	2	02.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 orang	2.675.050,8

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Kebutuhan (Rp.000)
5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase peningkatan BMD yang terkelola**	**100%**	**53.472.169,1**
5	**2**	**3**	**02.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**53.472.169,1**
5	2	3	02.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga pemerintah daerah yang tersusun	1 dokumen	670.000
5	2	3	02.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah dalam penyusunan RKA yang tersusun	1 dokumen	324.999,6
5	2	3	02.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam penyusunan APBD yang tersusun	2 dokumen	664.999,8
5	2	3	02.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dokumen	36.395
5	2	3	02.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah dan persediaan yang tersusun	2 laporan	484.000
5	2	3	02.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi BMD	36 laporan	350.000
5	2	3	02.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 laporan	4.723.037,8
5	2	3	02.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah	3 laporan	604.998,6
5	2	3	02.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola	11 Gedung	43.239.239

5	2	3	02.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen	1.099.999,3
5	2	3	02.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	181.500
5	2	3	02.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	1 laporan	265.000
5	2	3	02.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72 orang	828.000

BAB V
INOVASI PERANGKAT DAERAH

Inovasi BKAD adalah upaya mengenalkan sesuatu yang baru, sebuah proyek, praktik atau ide, yang nantinya akan digunakan untuk peningkatan kinerja, pengukuran kinerja tata pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dalam periode tertentu. Beberapa bentuk inovasi yang diterapkan di BKAD sampai dengan saat ini, sebagai berikut:

No	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Terkait Inovasi
(1)	(2)	(3)
1	Penerbitan Regulasi Dan Dokumentasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (PROPAGANDA)	Pengumpulan dan penyediaan dokumen-dokumen pendukung operasional aplikasi SIPKD seperti dokumentasi sistem dan regulasi teknis untuk mengatur ruang lingkup kerja admin dan operator
2	Stop Kelebihan Gaji Dan Tunjangan Asn Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (SATU ASPIRASI)	menyusun regulasi berupa Keputusan Wali Kota yang memberikan hak akses kepada BPKD sebagai pengelola gaji ASN dengan cara mengaktifkan menu “BUP Diaktifkan” pada aplikasi SIM Gaji Taspen (aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola gaji ASN)
3	Standar Pelayanan Dan Sumber Informasi – BPKD (TRANSFORMASI)	Kemudahan informasi dalam alur pelayanan dan jaminan kualitas pelayanan BPKD
4	Peningkatan Tertib Administrasi Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan BLUD (Tiba Si Julak)	penerbitan Peraturan Walikota Balikpapan tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah sebagai payung hukum acuan dari sistem dan prosedur pengelolaan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kota Balikpapan
5	Pedoman Tata Cara Pembayaran Belanja Daerah	Penerbitan pedoman yang berfungsi : Sebagai Alat Pengendali ,pengawasan dan pemeriksaan ,khususnya dalam pelaksanaan pembayatan belanja daerah; Upaya untuk meningkatkan kinerja Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam melaksanakan

		Pembayaran belanja daerah, Mewujudkan keterpaduan dan keserasian administrasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah.
6	Sistem Pelayanan Secara Online (SYMPOL)	Sistem Informasi Secara Online adalah sistem informasi yang dirancang bangun berbasis web berfungsi untuk mempermudah dalam pelayanan informasi khusus nya dalam penyewaan Gedung Pemeintah kepada masyarakat secara online.
7	Rekonsiliasi Dan Analisa Pendapatan Pajak Dan Retribusi (RELEPANSI)	Sistem berbasis web yang menyajikan format rekonsiliasi antara BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) selaku konsolidator dengan Perangkat Daerah penyusun Laporan Keuangan OPD, yang didalamnya menyajikan komponen perhitungan nilai realisasi dan nilai piutang pendapatan yang dilaksanakan OPD secara berkala.
No	**Nama Inovasi**	**Penjelasan Singkat Terkait Inovasi**
(1)	(2)	(3)
8	Optimalisasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah Kota Balikpapan	rangkaian system dan gagasan guna terciptanya pencatatan asset yang riil dan akuntabel terutama di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan
9	Sistem Aplikasi Dokumen Pemusnahan dan Penghapusan BMD (SIAPKU PESAN BAMDA)	Aplikasi baru berbasis web yang memiliki berbagai macam template yang bisa diupdate untuk pengajuan usulan pemusnahan ataupun penghapusan BMD juga menyediakan informasi proses pengajuan usulan
10	Sistem Informasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana Gedung (SIPP SPG) Pada UPTD PPGP Kota Balikpapan	Sistem Informasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana Gedung adalah aplikasi berbasis web untuk pelaporan data pemeliharaan dan perawatan terhadap asset, sarana dan

		prasarana pada gedung yang dikelola oleh UPTD PPGP BPKAD Kota Balikpapan
11	Sistem Informasi Pengesahan Belanja Operasional Sekolah	Sistem Informasi Pengesahan Belanja Operasional Sekolah yang terintegrasi dan berbasis web
12	Sistem Informasi Pemetaan Aset Tanah (SIPANAH)	Sistem Informasi berbasis web yang terintegrasi secara keruangan dengan peta digital mealui rancang bangun Sistem Informasi Geografis yang mengakomodir informasi aset tanah milik Pemerintah Kota Balikpapan

BAB VI
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagai Pedoman, Landasan dan referensi dalam melaksanakan kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan menerapkan prinsip efisiensi, efektibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian program dan kegiatan.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention). Menekankan pentingnya keterpaduaan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara instansi dengan tetap diperhatikan peran tanggungjawab/ tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah di programkan dapat di manfaatkan antara lain melalui perencanaan.

Rancangan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.

Selain itu, Rancangan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2024 ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran program, dan kegiatan.

Demikian kami sampaikan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2024 ini kami susun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TERIMA KASIH

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasaran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunaan Nasional beserta peraturan perundangan turunannya mengamanatkan bahwa perlu dokumen perencanaan mulai dari RPJMN, RPJMD, RKPD, Renstra PD, hingga Renja PD.

Program Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota BalikpapanTahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang ke-3 dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yaitu :

VISI:

TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN

MISI ke-1:

Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan berupaya melakukan peningkatkan kualitas layanan kepegawaian, melaksananakan manajemen ASN berbasis Sistem Merit melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang terencana.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi 2020-2024;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Nomor: 800/096/ BKPSDM Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah untuk menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2024 secara khusus disusun dengan tujuan:

a. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024;
b. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2024;
c. Menjadi landasan sarana pengendali program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasng bidang.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Rencana kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, visi dan misi, Tugas Pokok dan Fungsi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, serta sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Dearah lain .

BAB III . TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelasan telaahan terhadap kebijakan-kebijakan nasional, tujuan, sasaran, dan inikator sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelasan rencana kerja, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

1. Evaluasi Kinerja Pelayanan

Pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan rencana kerja (renja) tahun 2022. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.

Pada APBD tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan pagu murni sebesar **Rp.22.819.152.050 menjadi** 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan pagu sebesar **Rp.23.169.152.050** pada mekanisme perubahan. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai yang dihapuskan anggarannya dikarenakan di alihkan ke sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dan kajian pemberian penghargaan belum di susun di tahun 2022. Adapun realisasi anggaran tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel .2.1

Realisasi Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan

Tahun 2022

PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	%
22.819.152.050,00	**23.169.152.050,00**	**18.241.432.487,00**	**78.73**

Adapun Tabel pencapaian kinerja pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan. selama kurun waktu tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan

Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RKPD

Indeks Profeionalisme ASN= 55%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya Profesionalitas ASN**		**Indeks Profesionalitas ASN**	55								51,19		**51,19**		**93,07%**		
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan	88%	**1.751.794.450**		**26.773.000**		**331.472.122**		**210.846.337**	**74,89%**	**332.675.952**	**74,89%**	**901.767.411**	**85,10%**	**51,48%**	**terdapat 25.11% tidak sesuai kualifikasi**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja															
			Presentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	20%	**2.541.437.750**		**11.449.450**		**99.585.702**		**395.488.864**	**20,00%**	**1.234.524.798**	**20,00%**	**1.741.048.814**	**100,00%**	**68,51%**	**realisasi terintegrasi 1 aplikasi yaitu e kompetensi dari target yang harus terintegrasi dengan penilaian kinerja, kompetensi, penegakan disiplin, dan pengembangan pegawai**
			Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	97,81%	**632.127.950**		**2.700.000**		**22.966.400**		**44.176.667**	97,81%	**272.994.098**	**97,81%**	**342.837.165**	**100,00%**	**54,24%**	**belum seluruh PNS melaporkan SKP 2022**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	3,93%	**1.762.957.550**		**320.591.000**		**102.682.465**		**568.607.661**	**0,69%**	**334.037.496**	**0,69%**	**1.325.918.622**	**17,44%**	**75,21%**	**nilai kualifikasi sebesar 11.67**
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Kualitas Data ASN	**100,0%**	**2.541.437.750**	**0**	**11.449.450**	**0**	**99.585.702**	**0**	**395.488.864**	**100,00%**	**1.234.524.798**	**100,00 %**	**1.741.048.814**	**100,00 %**	**68,51%**	**100% data valid**
			Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar	**100,0%**								**100,00%**		**100,00 %**		**100,00 %**		508 PPK sesuai jabatan yang dilamar
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah	Jumlah usulan formasi pemenuhan rencana	**863**	**57.889.000**	**805**	**0,00**	**51**	-	**0**	**16.890.809**	**0**	**28.268.742**	**856**	**45.159.551**	**99,19%**	**78,01%**	formasi diajukan sesuai dengan rencana

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	kebutuhan ASN															kebutuhan tahun 2022
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pemenuhan kebutuhan ASN melalui Seleksi Pengadan ASN lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	**250,00**	**847.870.500**	**0**	**1.000.000**	**0**	**14.945.500**	**0**	**2.155.000**		**336.716.641**	**0**	**354.817.141**	**0,00%**	**41,85%**	Proses hasil seleksi PPPK guru dan tenaga kesehatan masih menunngu penilaian dari pusat dan untuk PPPK formasi teknis dalam proses seleksi admnistrasi
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah dokumen klaim taspen yang diusulkan	**200,00**	**1.040.819.850**	**56**	**10.449.450**	**62**	**46.846.644**	**48**	**230.940.394**	**43**	**562.481.638**	**209**	**850.718.126**	**104,50 %**	**81,74%**	usulan klaim taspen menyesuaikan jumlah yang pensiun karena BUP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		dan APS
			Jumlah fasilitasi yang diberikan terhadaP lembaga profesi ASN	**13,00**		**1**		**4**		**4**		**4**		**13**		**100,00 %**		target sesuai layanan dalam DPA
			Jumlah penerbitan SK Pensiun PNS	**200,00**		**57**		**63**		**68**		**34**		**222**		**111,00 %**		usulan pengusulan SK Pensiun menyesuaikan jumlah yang pensiun karena BUP dan APS
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawai	**4,00**	**333.921.500**	**0**	**0,00**	**0**	**26.056.248**	**0**	**17.785.855**	**4**	**236.619.723**	**4**	**280.461.826**	**100,00 %**	**83,99%**	sesuai target 4 pengembangan aplikasi SMPEG

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			an															
			Jumlah Sosialisasi Aplikasi Kepegawaian	**1,00**		**0**		**0**		**0**		**1**		**1**		**100,00 %**		
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah badge PNS yang dicetak	**1875**	**260.936.900**	**397**	**0,00**	**595**	**11.737.310**	**796**	**127.716.806**	**173**	**70.438.054**	**1961**	**209.892.170**	**104,59 %**	**80,44%**	sesuai data mutasi pegawai dan usulan dari perangkat daerah dikarenakan hilang dan rusak

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah buku DUK yang dicetak	**6**		**6**				**0**				**6**		**100,00 %**		sesuai target
			Jumlah Buku Kumpulan Peraturan Kepegawaian yang dicetak	**50**		**0**		**0**		**50**				**50**		**100,00 %**		sesuai target
			Jumlah buku profil yang dicetak	**50**		**50**		**0**		**0**				**50**		**100,00 %**		sesuai target
			Jumlah buku Saku yang dicetak	**300**		**0**		**300**		**0**				**300**		**100,00 %**		sesuai target

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Elektronik Kepegawaian	**12**		**3**		**3**		**3**		**3**		**12**		**100,00 %**		sesuai target
			Jumlah Pemutakhiran Data Fisik ASN pada Aplikasi Arsip	**2500**		**1242**		**925**		**837**		**32**		**3036**		**121,44 %**		melebihi target dikarenakan menyesuaikan adanya perubahan data pegawai
			Jumlah penerbitan Kartu Istri PNS dan Kartu Suami PNS	**175,00**		**59**		**0**		**0**				**59**		**33,71%**		kurang dari target karena tidak adanya penerimaan CPNSD
			Jumlah penerbitan Kartu Pegawai	**175,00**		**12**		**0**		**0**				**12**		**6,86%**		kurang dari target karena tidak adanya

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		penerimaan CPNSD
			Jumlah rekonsiliasi Data kepegawaian	**1**								**1**		**1**		**100,00 %**		sesuai target
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja	87%	**1.751.794.450**	**0**	**26.773.000**	**0**	**331.472.122**	**0**	**210.846.337**	**74,89%**	**332.675.952**	**74,89%**	**901.767.411**	**86,08%**	**51,48%**	realisasi keuangan rendah karena kegiatan seleksi terbuka untuk 3 fomasi jabatan dilaksnakan di januari 2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu	100%								**100,00%**		**100,00 %**		**100,00 %**		
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah penerbitan SK Mutasi antar Instansi Vertikal/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kab/Kota	**30,00**	**99.710.600**	**8**	-	**7**	**8.942.842**	**12**	**56.456.387**	**11**	**17.088.742**	**38**	**82.487.971**	**126,67 %**	**82,73%**	melebihi target karena banyaknya mutasi masuk ke balikpapan
			Jumlah penerbitan SK Mutasi Pelaksana antar PD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	**20,00**		**11**		**5**		**1**		**4**		**21**		**105,00 %**		melebihi target karena pemenuhan formasi jabatan pelaksana yang kosong di perangkat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		daerah
			Jumlah penerbitan SK Perpanjangan THL	**1,00**		**1**		**0**		**0**		**0**		**1**		**100,00 %**		sesuai target
			Jumlah penerbitan surat KGB	**10,00**		**0**		**4**		**0**		**6**		**10**		**100,00 %**		sesuai target

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah penerbitan SK kenaikan pangkat	**700,00**	**69.999.950**	**0**	**1.783.000**	**461**	**3.136.000**	**0**	**11.921.800**	**281**	**45.665.760**	**742**	**62.506.560**	**106,00 %**	**89,30%**	melebihi taret sesuai daftar penjagaan kepangkatan yang dilaksanakan pada periode April dan Oktober
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Penerbitan SK Mutasi JPT Pratama, Administrator dan Pengawas	**27,00**	**1.582.083.900**	**4**	**24.990.000**	**2**	**319.393.280**	**1**	**142.468.150**	**65**	**269.921.450**	**72**	**756.772.880**	**266,67 %**	**47,83%**	melebihi target karena adanya mutasi dan rotasi untuk pemenuhan jabatan kosong

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Pengisian JPT Pratama	**15,00**		**9**						**1**		**10**		**66,67%**		Menunggu arahan dari PPK untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka di Triwulan I Tahun 2023
		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar	**0,368%**	**1.762.957.550**	**0,24 %**	**320.591.000**	**0,02%**	**102.682.465**	**0,02%**	**568.607.661**	**0,00%**	**334.037.496**	**0,29%**	**1.325.918.622**	**77,80%**	**75,21%**	Terdapat 13 fasilitasi PNS Tugas Belajar namun terdapat terdapat penawaran tugas belajar S2 tidak terpenuhi formasinya
			Persentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi	**20,760 %**								**19,35%**		**19,35%**		**93,20%**		belum adanya fasilitas assesment center yang memadai

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS yang terpetakan kompetensinya	**160,00**	**493.828.600**	**0**	**0,00**	**60**	**1.540.000**	**75**	**143.493.256**	**44,00**	**137.702.020**	**179**	**282.735.276**	**111,88 %**	**57,25%**	melebihi target dikarenakan adanya penambahan uji kompetensi untuk jabatan fungsional
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	**13,00**	**1.091.490.750**	**11**	**320.591.000**	**1**	**101.142.465**	**1**	**404.366.295**	**0,00**	**158.943.356**	**13**	**985.043.116**	**100,00 %**	**90,25%**	terdapat penawaran tugas belajar S2 namun tidak semua formasi terpenuhi

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah fasilitasi pengusulan dupak	**3,00**	**177.638.200**	**0**	**0,00**	**0**	-		**20.748.110**	**3,00**	**37.392.120**	**3**	**58.140.230**	**100,00 %**	**32,73%**	sesuai target namun keuangan sangat rendah karena sosialsiasi Pembinaan Jabatan Fungsional ASN belum dilaksanakan
			Jumlah penerbitan SK Jabatan Fungsional	**220,00**		**116**		**106**		**66**		**77,00**		**365**		**165,91 %**		melebihi target dikarenakan adanya peyetaraan jabatan fungsional

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN**	5,00%	**632.127.950**	**0,0%**	**2.700.000**	**0,0%**	**22.966.400**	**0**	**44.176.667**	**22.2%**	**272.994.098**	**22.2%**	**342.837.165**	**444%**	**54,24%**	Kasus disiplin PNS Tahun 2021 sebanyak 9 di tahun 2022 sebanyak 7 kasus
			Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	7,37%								**8,72%**		**8,72%**		**118,27 %**		sesuai hasil verifikasi pengusulan tanda jasa satya lancana karya satya

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan evaluasi Kinerja PNS	**1,00**	**307.587.500**	**1**	**2.700.000**	**0**	**4.220.000**		**14.570.000**		**120.532.311**	**1**	**142.022.311**	**100,00 %**	**46,17%**	Pelaksanaan study tiru e kinerja ke kabupaten sleman tidak diikuti oleh seluruh tim e kinerja dikarenakan bertepatan dengan tugas pimpinan yang lainnya
			Jumlah sosialisasi penyusunan Penilaian Kinerja PNS	**1,00**		**1**		**0**						**1**		**100,00 %**		sesuai target

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Tim Penilaian Kinerja yang Mengikuti Pembelajaran Tentang Sistem Manajemen Kinerja	**20,00**		**0**		**0**		**0**		**19,00**		**19**		**95,00%**		Pelaksanaan study tiru e kinerja ke kabupaten sleman tidak diikuti oleh seluruh tim e kinerja dikarenakan bertepatan dengan tugas pimpinan yang lainnya
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan	**0,00**		**0**	**0,00**	**0**		**0**	-		-	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	anggaran dihapuskan di pergeseran

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang memperoleh Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya	**300,00**	**64.245.150**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**7.003.050**	**396,00**	**34.099.240**	**396**	**41.102.290**	**132,00 %**	**63,98%**	Usulan satya lancana sesuai dengan usulan perangkat daerah, namun realisasi keuangan rendah karena efisiensi perjalanan dinas
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tingkat kehadiran ke perangkat daerah	**12,00**	**86.539.850**	**3**	**0,00**	**3**	**16.046.400**	**3**	**17.603.617**	**3,00**	**37.425.686**	**12**	**71.075.703**	**100,00 %**	**82,13%**	sesuai terget

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah pemeriksaan uji kesehatan dalam rangka pemberian cuti sakit pegawai	**30,00**		**10**		**7**		**11**		**6,00**		**34**		**113,33 %**		sesuai usulan perangkat daerah
			Jumlah surat cuti (cuti tahunan dan cuti besar JPT Pratama , cuti alasan penting PNS, cuti diluar tanggungan negara PNS, cuti sakit PNS) yang diterbitkan	**125,00**		**14**		**32**		**54**		**45,00**		**145**		**116,00 %**		sesuai usulan perangkat daerah

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah sosialisasi peraturan kepegawaian	**1,00**		**1**		**0**		**0**		**0,00**		**1**		**100,00 %**		sesuai terget
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin	**12,00**	**91.561.550**	**2**	**0,00**	**1**		**0**	-	**6,00**	**56.830.587**	**9**	**56.830.587**	**75,00%**	**62,07%**	terdapat 9 SK pelanggaran disiplin PNS, namun realisasi keuangan rendah karena efisiensi perjalanan dinas
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah penyelesaian kasus permohonan / penolakan izin perkawinan dan perceraian	**12,00**	**82.193.900**	**2**	**0,00**	**1**	**2.700.000**	**2**	**5.000.000**	**5,00**	**24.106.274**	**10**	**31.806.274**	**83,33%**	**38,70%**	Dikarenakan tidak terdapat koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait di luar kota balikpapan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	**17,39%**	**6.588.124.350**	**1,80 %**	**553.499.475**	**2,40%**	**256.633.233**	**2,73%**	**1.813.301.03**	**3,06%**	**2.659.315.018**	**9,98%**	**5.282.748.758**	**57,41%**	**80,19%**	target dalam renja 692 melebihi terget renstra 682 dikarenakan bertambahnya jumlah PNS yang mengikuti pelatihan teknis umum
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana	16,58%	**2.273.784.700**	**3,04 %**	**430.000**	**1,53%**	**118.354.850**	**5,11%**	**253.555.065**	**5,98%**	**1.532.387.818**	**15,66%**	**1.904.727.733**	**94,44%**	**83,77%**	tidak sesuai target dikarenakan tidak terlaksanakanya pelatihan PPNS

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			pengembangan kompetensi															
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan teknis umum	**692,00**	**2.237.127.950**	**125**	**430.000**	**63**	**118.354.850**	**210**	**251.481.065**	**246,00**	**1.505.541.284**	**644**	**1.875.807.199**	**93,06%**	**83,85%**	tidak sesuai target dikarenakan tidak terlaksanakanya pelatihan PPNS
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,	Jumlah Dokumen Analisis	**1,00**	**36.656.750**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**2.074.000**	**1,00**	**26.846.534**	**1**	**28.920.534**	**100,00 %**	**78,90%**	sesuai target namun

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kebutuhan Diklat															realisasi keuangan sedang karena adanya efisiensi belanja ATK
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pasca Diklat	**1,00**						**0**		**1,00**		**1**		**100,00 %**		sesuai target

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi	19,20%	**4.314.339.650**	**0,56 %**	**553.069.475**	**3,27%**	**138.278.383**	**0,35%**	**1.559.745.967**	**0,13%**	**1.126.927.200**	**4,31%**	**3.378.021.025**	**22,44%**	**78,30%**	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Jumlah CPNS yang lulus Diklat pelatihan dasar CPNS	**187**	**4.314.339.650**	**0**	**553.069.475**	**187**	**138.278.383**	**0**	**1.559.745.967**		**1.126.927.200**	**187**	**3.378.021.025**	**100,00 %**	**78,30%**	sesuai target

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kepemimpinan, dan Prajabatan																
			Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	**46**		**25**		**3**		**18**				**46**		**100,00 %**		sesuai target
			Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	**25**		**6**		**3**		**0**		**3**		**12**		**48,00%**		pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional sesuai usulan dari perangkat daerah, pemanggilan dari instansi pembina dan ketersediaan anggaran

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan Penjenjangan	**20**		**2**		**1**		**3**		**5**		**11**		**55,00%**		pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional sesuai usulan dari perangkat daerah, pemanggilan dari instansi pembina dan ketersediaan anggaran
			Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi	**20**		**0**		**0**		**0**				**0**		**0,00%**		tidak adanya usulan uji kompetensi jabatan fungsional

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada perangkat daeran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan (renstra)		**Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM**	**34,04**				**34,06**						**34,06**		**100,06 %**		sesuai target
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	**Indeks Kepuasan Layanan**	**80,00**	**9.892.710.000**		**1.745.944.859**		**2.420.988.09**		**2.374.155.568**	**78,02**	**2.106.023.193**	**78,02**	**8.647.111.717**	**97,53%**	**87,41%**	**hasil dari survey IKM Internal**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Intenal Perangkat Daerah**															
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP**	**80,00**				**89,95**					-	**89,95**		**112,44 %**	-	sesuai hasil LKE inspektorat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	**2**	-	**1**	-	**0**		**1**				**2**	-	**100,00 %**	-	sesua target
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	**35**	-	**33**	-	**0**		**0**				**33**	-	**94,29%**	-	terdapat 1 sub kegiatankegiatan yang dihapuskan diusulan dan 1 sub kegiatan yang dihapuskan di

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		pergeseran
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	**35**	-	**33**	-	**0**		**0**				**33**	-	**94,29%**	-	terdapat 1 sub kegiatankegiatan yang dihapuskan diusulan dan 1 sub kegiatan yang dihapuskan di pergeseran

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	**35**	-	**33**	-	**0**		**0**				**33**	-	**94,29%**	-	terdapat 1 sub kegiatanke giatan yang dihapuskan diusulan dan 1 sub kegiatan yang dihapuskan di pergeseran
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA	**35**	-	**33**	-	**0**		**0**				**33**	-	**94,29%**	-	terdapat 1 sub kegiatanke giatan yang dihapuskan diusulan dan 1 sub kegiatan yang dihapuskan di pergeseran

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen lkjip	**1**	-	**1**	-	**0**		**0**				**1**	-	**100,00 %**	-	terdapat 1 sub kegiatanke giatan yang dihapuskan diusulan dan 1 sub kegiatan yang dihapuskan di pergeseran
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	**6**	-	**0**	-	**0**		**0**		**1**		**1**	-	**16,67%**	-	terdapat 1 sub kegiatanke giatan yang dihapuskan diusulan dan 1 sub kegiatan yang dihapuskan di pergeseran

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**80,00**	**8.467.336.600**	**0**	**1.659.535.057**	**0**	**2.103.969.674**	**0**	**2.075.089.848**	**77,08**	**1.741.730.801**	**77,08**	**7.580.325.380**	**96,35%**	**89,52%**	hasil dari survey IKM Internal
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	**14**	**8.467.336.600**	**3**	**1.659.535.057**	**5**	**2.103.969.674**	**3**	**2.075.089.848**	**3**	**1.741.730.801**	**14**	**7.580.325.380**	**100,00 %**	**89,52%**	sesuai target namun terdapat belanja gaji dan tunjangan PPPK yang tidak terealisasi karena belum ada SK Penempatan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi dokumen spj keuangan	**800**	-	**141**	-	**340**		**537**		**1036**		**2054**	-	**256,75 %**	-	melebihi target dikarenakan banyaknya frekuensi SPJ belanja
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen rekonsiliasi laporan keuangan	**4**	-	**1**	-	**1**		**1**		**1**		**4**	-	**100,00 %**	-	sesuai target
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	**1**	-	**0**	-	**0**				**1**		**1**	-	**100,00 %**	-	sesuai target
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	**2**	-	**2**	-	**0**						**2**	-	**100,00 %**	-	sesuai target

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	**12**	-	**3**	-	**3**		**3**		**3**		**12**	-	**100,00 %**	-	sesuai target
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	**12**		**3**		**3**		**3**		**3**		**12**		**100,00 %**		sesuai target
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**80,00**	**45.900.000**	**0**	-		-			**80,80**	**39.101.900**	**80,80**	**39.101.900**	**101,00 %**	**85,19%**	**sesuai hasil survey IKM**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN BKPSDM yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta atributnyanya	**0,00**	-	**0**		**0**		**0**				**0**		**0,00%**	**0,00%**	rasionalisasi anggaran
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS BKPSDM Yang mengikuti Diklat/Pelatihan	29	**45.900.000**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	-	**23**	**39.101.900**	**23**	**39.101.900**	**79,31%**	**85,19%**	penyesuaian target dengan harga per paket kontribusi peserta
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**80,00**	**889.027.600**	**0**	**20.290.945**		**238.874.430**		**235.625.494**	**77,81**	**240.019.143**	**77,81**	**734.810.012**	**97,26%**	**82,65%**	**sesuai hasil survey IKM**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	**12,00**	**268.666.250**	**0**	**0,00**	**4**	**78.612.700**	**0**	**75.979.500**	**6**	**53.353.250**	**10**	**207.945.450**	**83,33%**	**77,40%**	tidak terlaksananya belanja raised floor server dikarenakan kesalahan spek pada DPA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan/ minuman harian pegawai	2750	**288.692.500**	**200**	**0,00**	**550**	**93.626.700**	**1050**	**46.138.500**	**600**	**89.870.900**	**2400**	**229.636.100**	**87,27%**	**79,54%**	terdapat belanja makan minum tamu yang tidak terealisasi maksimal dikarenakan menyesuaiakan jumlah tamu yan datang ke bkpsdm
			Jumlah makanan/ minuman kegiatan/pelatihan	1600		**0**		**829**		**80**		**290**		**1199**		**74,94%**		menyesuaikan jumlah kegiatan rapat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah makanan/ minuman rapat pegawai	1600		**310**		**465**		**500**		**285**		**1560**		**97,50%**		menyesuaikan jumlah kegiatan rapat
			Jumlah makanan/ minuman tamu	200		**40**		**10**		**20**		**50**		**120**		**60,00%**		menyesuaikan jumlah tamu
			Jumlah penyediaan alat tulis kantor	885		**460**		**0**		**343**		**224**		**1027**		**116,05 %**		melebihi target dikarenakan target lebih besar di dpa
			Jumlah peyediaan peralatan Kebersihan	366		**0**		**199**				**134**		**333**		**90,98%**		Terdapat Belanja Alat/Bahan Pembersih Kantor dan Perabot Kantor yang tidak dibelanjakan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan	2402	**74.999.850**	**0**	**0,00**	**1193**	**15.250.000**	**875**	**6.775.600**	**80**	**27.070.250**	**2148**	**49.095.850**	**89,43%**	**65,46%**	untuk belanja cetak pengganda aan sesuai dengan kebutuhan
			Jumlah penyediaan bahan dekorasi	1		**0**		**0**		**0**		**1**		**1**		**100,00 %**		
			Jumlah penyediaan pengandaa n	60571		**1376 6**		**0**		**7528**		**12776**		**34070**		**56,25%**		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	**1235**	**6.669.000**	**295**	**513.000,00**	**275**	**1.998.000**	**325**	**1.728.000**	**300**	**2.214.000**	**1195**	**6.453.000**	**96,76%**	**96,76%**	menyesuai kan hari kerja
		Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan	**88,00**	**250.000.000**	**15**	**19.777.945**	**21**	**49.387.030**	**22**	**105.003.894**	**17**	**67.510.743**	**75**	**241.679.612**	**85,23%**	**96,67%**	menyesuai kan urgensi

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Konsultasi															
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80,00**	**164.328.000**	**0**	**34.205.277**		**27.259.252**		**30.873.327**	**80,07**	**29.775.105**	**80,07**	**122.112.961**	**100,09 %**	**74,31%**	**sesuai hasil survey IKM**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedian materai untuk administrasi	**200,00**	**14.000.000**	**100**	**2.366.500**	**100**	**1.217.500**		**360.000**		**751.500**	**200**	**4.695.500**	**100,00 %**	**33,54%**	realisasi belanja paket pengiriman sesuai usulan dari bidang
			Jumlah Surat dinas yang terkirim	**12,00**		**3**		**3**		**3**		**3**		**12**	-	**100,00 %**		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Pembayaran Pemakaian Jasa Komunikasi	**12,00**	**127.440.000**	**3**	**26.614.052,00**	**3**	**20.958.602**	**3**	**25.288.602**	**3**	**22.057.305**	**12**	**94.918.561**	**100,00 %**	**74,48%**	sesuai target namun belanja Jasa Internet tidak terserap maksimal dikarenakan sesuai kebutuhan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen Pembayaran Jasa Tenaga Adminstrasi / Teknis perkantoran dalam satu tahun	**13,00**	**22.888.000**	**3**	**5.224.725,00**	**4**	**5.083.150**	**3**	**5.224.725**	**3**	**6.966.300**	**13**	**22.498.900**	**100,00 %**	**98,30%**	sesuai target namun terdapat pengembalian belanja karena potongan absensi

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80,00**	**326.117.800**	**0**	**31.913.580**	**0**	**50.884.741**	**0**	**32.566.899**	**76,59**	**55.396.244**	**76,59**	**170.761.464**	**95,74%**	**52,36%**	**sesuai hasil survei IKM**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan Bahan bakar kendaraan dinas/gas kendaraan dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)	9204,00	192.911.000	971	28.658.831	1056	15.709.741	3093	27.266.649	562	34.317.075	5682	105.952.296	61,73%	54,92%	Dalam Renja tahun 2022 terdapat sub kegiatan baru untuk pemeliharaan mobil operasional ambulan dari KORPRI
			Jumlah Perawatan Kendaraan Bermotor roda dua	32,00		3		1		2		4		10		31,25%		belanja servis dan suku cadang sesuai

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		usulan bidang
			Jumlah Perawatan Kendaraan Bermotor roda empat	22,00		4		1		4		5		14		63,64%		belanja servis dan suku cadang sesuai usulan bidang
			Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2	15,00		1		2		5		6		14		93,33%		Jadwal pembayaran STNK kendaraan jabatan sesuai jadwal namun untuk mobil ambulan di sub kegiatan kendaraan operasioanal

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional/ lapangan yang dipelihara	**1,00**	31.706.800	**1**	3.254.749	**0**		**0**			**529.169**	**1**	3.783.918	**100,00 %**	11,93%	Jadwal pembayaran STNK sesuai jadwal , belanja servis dan suku cadang untuk mobil ambulan masih bersifat pemeliharaan rutin karena mobil masih baru,
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**168**	**101.500.000**	**25**		**2**	**35.175.000**	**11**	**5.300.250**	**7**	**20.550.000**	**45**	**61.025.250**	**26,79%**	**60,12%**	kurang optimanya penjagaan pemeliharaan peralatan kantor

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Penjelasan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5X100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					23.169.152.050		**2.326.217.334**		**3.009.093.452**		**4.398.302.937**				**18.241.432.487**		**78,73%**	
														Rata-rata capaian kinerja (%)		**60,54%**	**53,70%**	
														Predikat Kinerja		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																**91,35%**	**48,92%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																**93,01%**	**66,29%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																**Sangat Tinggi**	**Sedang**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																**76,25%**	**69,50%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																**Tinggi**	**Sedang**	

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Balikpapan

kode	urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran s/d tahun (2021)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022						Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2023		perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d 2023			
							Target Renja PD Tahun (2022)		Realisasi Renja PD Tahun (2022)		Tingkat Realisasi 2022 (%)				realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra perangkat daerah (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5,03,02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	445,68 %	**3.946.880.500**			88%	**1.751.794.450**	**74,89%**	**901.767.411**	**85,10%**	**51,48 %**	**88,80%**	**670.000.000**	**163,69 %**	**1.571.767.411**	**36,73%**	**22,85 %**
		Presentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	300,00 %	**16.922.964.805**			20%	**2.541.437.750**	**20,00%**	**1.741.048.814**	**100,00 %**	**68,51 %**	**40,00%**	**2.362.978.950**	**60,00%**	**4.104.027.764**	**20,00%**	**10,29 %**

kode	urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran s/d tahun (2021)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022						Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2023		perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d 2023			
							Target Renja PD Tahun (2022)		Realisasi Renja PD Tahun (2022)		Tingkat Realisasi 2022 (%)				realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra perangkat daerah (%)	
		Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	491,12 %	5.127.839.100			97,81%	632.127.950	97,81%	342.837.165	100,00 %	54,24 %	97,99%	350.999.700	195,80 %	693.836.865	39,87%	6,69%
		Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	13,76%	14.653.786.750			3,93%	1.762.957.550	0,69%	1.325.918.622	17,44%	75,21 %	3,68%	2.313.403.000	4,37%	3.639.321.622	31,73%	9,05%
5,03,02,2,01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Kualitas Data ASN	500,00 %	16.922.964.805			100,0%	2.541.437.750	100,00 %	1.741.048.814	100,00 %	68,51 %	100,00 %	2.362.978.950	200,00 %	4.104.027.764	40,00%	10,29 %
		Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar	500,00 %				100,0%		100,00 %		100,00 %		100,00 %		200,00 %	-	40,00%	

kode	urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran s/d tahun (2021)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022						Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2023		perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d 2023			
							Target Renja PD Tahun (2022)		Realisasi Renja PD Tahun (2022)		Tingkat Realisasi 2022 (%)				realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra perangkat daerah (%)	
5,03,02,2,02	**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja	443,52 %	**3.539.499.500**			87%	**1.751.794.450**	**74,89%**	**901.767.411**	**86,08%**	**51,48 %**	88,20%	**670.000.000**	**163,09 %**	**1.571.767.411**	**36,77%**	**25,48 %**
		Persentase Pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu	500,00 %				100%		**100,00 %**		**100,00 %**		100%		**200,00 %**	-	**40,00%**	
5,03,02,2,03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar	1,526%	**14.653.786.750**			**0,368%**	**1.762.957.550**	**0,29%**	**1.325.918.622**	**77,80%**	**75,21 %**	**0,330%**	**2.313.403.000**	**0,62%**	**3.639.321.622**	**40,36%**	**9,05%**
		Persentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi	128,62 %				**20,760 %**		**19,35%**		**93,20%**		**22,00%**		**41,35%**	-	**32,15%**	

kode	urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran s/d tahun (2021)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022						Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2023		perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d 2023			
							Target Renja PD Tahun (2022)		Realisasi Renja PD Tahun (2022)		Tingkat Realisasi 2022 (%)				realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra perangkat daerah (%)	
5,03,02,2,04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	27,95%	5.127.839.100			5,00%	632.127.950	-160%	342.837.165	-3200%	54,24 %	8,06%	350.999.700	-151,94 %	693.836.865	-543,61 %	6,69%
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	44,45%				7,37%		8,72%		118,27 %		5,2%		13,92%	-	31,31%	
5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															-		
5,04,02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	100%	41.291.001.559			17,39%	6.588.124.350	9,98%	5.282.748.758	57,41%	80,19 %	14,91%	6.373.001.550	24,89%	11.655.750.308	24,89%	12,79 %

kode	urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran s/d tahun (2021)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022						Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2023		perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d 2023			
							Target Renja PD Tahun (2022)		Realisasi Renja PD Tahun (2022)		Tingkat Realisasi 2022 (%)				realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra perangkat daerah (%)	
5,04,02,2,01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi	100%	15.182.966.450			16,58%	2.273.784.700	15,66%	1.904.727.733	94,44%	83,77 %	15,61%	3.498.850.350	31,27%	5.403.578.083	31,27%	12,55 %
5,04,02,2,02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi	100%	26.108.035.109			19,20%	4.314.339.650	4,31%	3.378.021.025	22,44%	78,30 %	13,35%	2.874.151.200	17,66%	6.252.172.225	17,66%	12,94 %
5,03,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Intenal Perangkat Daerah	410,0	59.905.362.586			80,00	9.892.710.000	78,02	8.647.111.717	97,53%	87,41 %	81	10.616.530.250	159,02	19.263.641.967	19,03%	14,43 %

kode	urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran s/d tahun (2021)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022						Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2023		perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d 2023			
							Target Renja PD Tahun (2022)		Realisasi Renja PD Tahun (2022)		Tingkat Realisasi 2022 (%)				realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra perangkat daerah (%)	
5,03,01,2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	410,0	47.384.227.850			80,00	8.467.336.600	77,08	7.580.325.380	96,35%	89,52 %	81	8.800.000.000	158,08	16.380.325.380	18,80%	16,00 %
5,03,01,2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	410,0	455.200.000			80,00	45.900.000	80,80	39.101.900	101,00 %	85,19 %			80,80	39.101.900	19,71%	8,59%
5,03,01,2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	410,0	8.787.537.250			80,00	889.027.600	77,81	734.810.012	97,26%	82,65 %	81	1.264.670.250	158,81	1.999.480.262	18,98%	8,36%
5,03,01,2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410,0	844.377.636			80,00	164.328.000	80,07	122.112.961	100,09 %	74,31 %	81	168.460.000	161,07	290.572.961	19,53%	14,46 %

kode	urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran s/d tahun (2021)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022						Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2023		perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d 2023			
							Target Renja PD Tahun (2022)		Realisasi Renja PD Tahun (2022)		Tingkat Realisasi 2022 (%)				realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra perangkat daerah (%)	
5,03,01,2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410,0	1.757.403.200			80,00	326.117.800	76,59	170.761.464	95,74%	52,36 %	81	383.400.000	157,59	554.161.464	18,68%	9,50%

Berdasarkan tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan tersebut diatas, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

1. Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Sub Kegiatan Sebesar 91,35% Predikat Kinerja "Sangat Tinggi" dan Capaian Anggaran sebesar 48,92 % Predikat Kinerja "sangat Rendah";
2. Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan Sebesar 93,01% Predikat Kinerja "Sangat Tinggi" dan Capaian Anggaran sebesar 66,29% Predikat Kinerja "Sedang";
3. Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program Sebesar 85, 81% % Predikat Kinerja "Tinggi" dan Capaian Anggaran sebesar 69,50% Predikat Kinerja "Sedang".

Capaian kinerja pada program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah dengan indikator:
   a. Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja dengan capaian 85,10% dikarenakan masih terdapat penempatan pegawai yang belum sesuai kualifikasi pendidikan dikarenakan kurangnya PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan namun masih bisa dilaksanakan karena ASN dituntut untuk dapat multi talenta dimanapun ditempatkan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya PNS Kota Balikpapan dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 sehingga Pemerintah Kota Balikpapan telah mengeluarkan kebijakan pemutihan status tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sesuai Surat Edaran Walikota Balikpapan nomor 800/1228/BKPSDM/2022 Tentang Pemutihan Statsus Izin Belajar Dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan pemerintah kota Balikpapan yang dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan PNS.
   b. Presentase sistem informasi ASN yang terintegrasi dengan realisasi sebesar 100% sudah sesuai target.
   c. Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik dengan realisasi sebesar 100% sudah sesuai target.
   d. Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN dengan realisasi sebesar 17.44% dikarenakan adanya penawaran formasi tugas belajar S2 yang tidak terpenuhi yaitu S2 Psikologi Profesi, S2 Magister Penginderaan Jauh, S2 Pengelolaan Sumber Daya Air, S2 Teknik Air

Tanah, S2 Magister Pebangunan Konsentrasi Manajemen Daerah, dan S2 Magister Kesehatan konsentrasi pengembangan SDM Kesehatan. Selain itu dikarenakan Hal tersebut dikarenakan kurangnya PNS Kota Balikpapan dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 sehingga Pemerintah Kota Balikpapan telah mengeluarkan kebijakan pemutihan status tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sesuai Surat Edaran Walikota Balikpapan nomor 800/1228/BKPSDM/2022 Tentang Pemutihan Statsus Izin Belajar Dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan pemerintah kota Balikpapan yang dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan PNS.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Nilai Kepuasan Layanan BKPSDM (Skor) dengan realisasi 97.23% dikarenakan masih terdapat layanan ineternal yang masih kurang seperti layanan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan layanan keuangan yang masih belum mempunyai standar syarat berkas SPJ masing-masing belanja.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi dan capaian sebesar 57,41%, dikarenakan terdapat pelatihan yang tidak terlaksana karena tidak adanya jadwal dari penyelenggara pelatihan dan keterbatasan kuota peserta pelatihan kepemimpinan dari KDOD LAN dan BPSDM. Pada pelatihan jabatan fungsional tergantung dari usulan perangkat daerah dan jadwal instansi Pembina masing-masing
4. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan indikatoe:
   a. Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar dengan realisasi sebesar 100% sesuai target
   b. Persentase Kualitas Data ASN dengan realisasi sebesar 100% sesuai target
   c. Persentase fasilitasi kegiatan Lembaga Profesi ASN (Korpri) dengan realisasi sebesar 100% sesuai target
5. Mutasi dan Promosi ASN dengan indikator:
   a. Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan realisasi sebesar 86,08%, dikarenakan masih terdapat penempatan pegawai yang belum sesuai kualifikasi pendidikan dikarenakan kurangnya PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan namun masih bisa dilaksanakan karena ASN

dituntut untuk dapat multi talenta dimanapun ditempatkan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya PNS Kota Balikpapan dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 sehingga Pemerintah Kota Balikpapan telah mengeluarkan kebijakan pemutihan status tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sesuai Surat Edaran Walikota Balikpapan nomor 800/1228/BKPSDM/2022 Tentang Pemutihan Statsus Izin Belajar Dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan pemerintah kota Balikpapan yang dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan PNS.

b. Persentase Pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu dengan realisasi 100% sesuai target

6. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan indikator kegiatan:
   a. Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar dengan realisasi sebesar 77,80% dikarenakan adanya penawaran formasi tugas belajar yang tidak terpenuhi yaitu S2 Psikologi Profesi, S2 Magister Penginderaan Jauh, S2 Pengelolaan Sumber Daya Air, S2 Teknik Air Tanah, S2 Magister Pebangunan Konsentrasi Manajemen Daerah, dan S2 Magister Kesehatan konsentrasi pengembangan SDM Kesehatan.
   b. Persentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi dengan realisasi sebesar 93,19%, dikarenakan masih banyaknya jabatan pelaksana yang belum dilakukan penilaian kompetensi. Hal tersebut karena terbatasnya SDM Assesor dan sarana prasarana *assessment center* sehingga dilaksanakan secara bertahap.
7. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan indikator kegiatan:
   a. Persentase ASN yang memperoleh penghargaan dengan realsiasi sebesar 118,27%, melebihi target dikarenakan sesuai dengan usulan perangkat daerah.
   b. Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN dengan realisasi -32% dikarenakan tidak terjadi penurunan namun penambahan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dimana tahun 2021 sebanyak 5 SK ditahun 2022 sebanyak 13 SK.
8. Pengembangan Kompetensi Teknis dengan indikator Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi dengan realisasi sebesar 94,44% dikarenakan terdapat pelatihan yang tidak terlaksana karena tidak adanya jadwal dari penyelenggara pelatihan serta tergantung dari usulan perangkat daerah.
9. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

dengan indikator nilai SAKIP BKPSDM dengan realsiasi sebesar 112,44% sesuai dengan hasil LKE SAKIP dari Inspektorat.

10. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar 96.35% , adanya penilaian dari responden dimana layanan keuangan yang masih belum terdapat standar syarat SPJ belanja.
11. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian 101%.
12. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian 97,26% dikarenakan adanya penilaian dari responden dimana masih adanya sarana komunikasi seperti telpon dan mesin fax yang belum berfungsi, serta kebersihan ruangan dan toilet perlu ditingkatkan.
13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan realisasi sebesar 100,09%
14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian sebesar 95,74% dikarenakan masih belum adanya kartu kendali pemeliharaan sehingga pemeliharaan kendaraan dapat terjadwal.

Beberapa capaian target kinerja dan realisasi keuangan pada sub kegiatan yang masih kriteria rendah atau realisasi keuangan dibawah 65% sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan realisasi target kinerja 0 dan keuangan 41,85% dikarenakan Proses rekruitmen CASN oleh pemerintah pusat dilaksnakan di akhir tahun 2022 sehinggga berlanjut di tahun anggaran 2023.
2. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian dengan realisasi target kinerja Jumlah penerbitan Kartu Istri PNS dan Kartu Suami PNS sebesar 33,71% dan Jumlah penerbitan Kartu Pegawai 6.86% dikarenakan tidak adanya penerimaan CPNSD di tahun 2022.
3. Pengelolaan Promosi ASN dengan realisasi keuangan sebesar 47,83% dikarenakan Proses Seleksi Terbuka menunggu arahan dari Walikota untuk dilaksanakan di Triwulan I Tahun 2023.

4. Pengelolaan pemetaan kompetensi ASN dengan realisasi sebesar 57,25% dikarenakan mengakomodir arahan dari pimpinan untuk pelaksanaan Jobvit untuk seluruh JPT Pratama
5. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN dengan realisasi keuangan sebesar 32,73% dikarenakan sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional ASN tidak terlaksana.
6. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan realisasi sebesar 46,17% dikarenakan Pelaksanaan study tiru penerapan pengelolaan kinerja ke kabupaten sleman tidak diikuti oleh seluruh tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Tunjangan Kerja Daerah dikarenakan bertepatan dengan tugas pimpinan yang lainnya.
7. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai dengan realisasi keuangan sebesar 63,98% dikarenakan efisiensi perjalanan dinas.
8. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan realisasi keuangan sebesar 62,07% dikarenakan efisiensi perjalanan dinas.
9. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawaidengan realisasi keuangan sebesar 38,37% dikarenakan tidak terdapat koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait di luar kota balikpapan.
10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi Jumlah penyediaan pengandaan sebesar 56,25% dan realisasi keuangan sebesar 65,46% dikarenakan untuk belanja cetak penggandaan sesuai dengan kebutuhan.
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi keuangan sebesar 33,54% dikarenakan untuk belanja paket pengiriman sesuai dengan kebutuhan.
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah penyediaan Bahan bakar kendaraan dinas/gas kendaraan dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) dengan realisasi sebesar 61,73%, Jumlah Perawatan Kendaraan Bermotor roda dua sebesar 31,25%, Jumlah Perawatan Kendaraan Bermotor roda empat sebesar 63,64%, dengan realisasi anggaran sebesar 54,92% dikarenakan belum adanya kartu kendali service kendaraan dinas jabatan.
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas operasional/lapangan dengan realisasi keuangan sebesar 1,97% dikarenakan belanja servis dan suku cadang untuk mobil ambulan masih bersifat pemeliharaan rutin karena mobil masih baru.
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi kinerja sebesar 26,79% dan realisasi keuangan 60,12% dikarenakan belum tersedianya kartu kendali pemeliharaan peralatan kantor

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2022 yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan, target, realisasi, dan capaian dapat diuraikan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahu 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6*100
1.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	1 . Indeks Profesionalitas ASN	Skor	51,21	62	82,60%
		2 . Indeks NSPK Manajemen ASN	Skor	61	100	61,00%
		3 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	107,97%	144,56%	74,69%
		4 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	20,16%	20,23%	99,68%
		5 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	59,39%	111,18%	53,42%
2.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan	1 . Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan	Nilai	34,06	34,69	98,18%
		2 . Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan	Nilai	89,95	90,56	99,33%

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan dari 7 indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci belum seluruhnya mencapai target jangka menengah pada Renstra, hal ini dikarenakan baru pelaksanaan tahun kesatu dalam target indikator kinerja jangka menengah pada Renstra, selanjutnya akan akan terus ditingkatkan capaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.

Pada table 2.3 diperoleh pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis dengan realisasi capaian sebagai berikut:

1. Sasaran I **'' Meningkatnya Profesionalitas ASN''**

- **Indikator I (IKU) 'Indeks Profesionalitas ASN'',** dengan realisasi sebesar **51,21** dari target 55 sehingga capaian sebesar **93,11%** dengan **kriteria''Sangat Tinggi'';**
- **Indikator II (IKK)** "Indeks NSPK Manajemen ASN" dengan realisasi sebesar **61** dari target 60 sehingga capaian sebesar **101.67%** dengan **kriteria'' Sangat Tinggi'';**
- **Indikator III (IKK) ''Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan),** dengan realisasi sebesar **107,12%** dari target **100,80%** sehingga capaian sebesar **107,12%** dengan **kriteria '' Sangat Tinggi'';**
- **Indikator IV (IKK) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan),** dengan realisasi sebesar **20,16%** dari target **12,70%** sehingga capaian sebesar **158,75%** dengan **kriteria '' Sangat Tinggi''**
- **Indikator V (IKK) ''Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan),** dengan realisasi sebesar **59,39%** dari target **89,40%** sehingga capaian sebesar **66,43%** dengan **kriteria '' Rendah ''.**

2. Sasaran II " **Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan**

- **Indikator I ''Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan'',** dengan realisasi sebesar **34,03** dari target **34,06** sehingga capaian sebesar **100,09%,** dengan **kriteria ''Sangat Tinggi''**

- **Indikator II (IKK) ''Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan'',** dengan realisasi sebesar **89,95** dari target **89,5** sehingga capaian sebesar **100,50%,** dengan **kriteria ''Sangat Tinggi''**

Adapun seluruh capain indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan

NO	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Profesionalitas ASN			55,00	57	59	61	51,19		59	61	
2	Indeks NSPK Manajemen ASN			60,00	34,06	34,25	34,42	61		34,25	34,42	
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100,80%	110,30 %	120,65 %	131,56 %	107, 97%		120,65 %	131,56 %	
4	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			12,69%	14,65%	16,45%	18,27%	20,16%		16,45%	18,27%	
5	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			89,43%	69,50 %	71,43%	78,33%	59,39%		71,43%	78,33%	
6	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja			88%	88,80%	89,16%	90,81%	74,89%		88,91%	89,16%	
7	Presentase sistem informasi ASN yang terintegrasi			20%	40,00%	80,00%	100,00 %	20,00%		60,00%	80,00%	
8	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik			97,81%	97,99%	98,36%	98,79%	97,81%		98,17%	98,36%	
9	Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN			3,93%	3,68%	1,91%	1,59%	0,69 %		2,65%	1,91%	
10	Persentase Kualitas Data ASN			100,0%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100, 00%		100,00 %	100,00 %	

NO	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar			100,0%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100, 00%		100,00 %	100,00 %	
46	Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN			5,00%	8,06%	8,81%	9,65%	- 160 %		5,60%	5,88%	
47	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan			7,37%	5,2%	5,56%	5,88%	8,72 %		8,81%	9,65%	
60	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi			17,39%	14,91%	24,64%	18,95%	9,98 %		24,64%	18,95%	
61	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi			16,58%	15,61%	25,94%	17,02%	15,6 6%		25,94%	17,02%	
71	Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM			34,04	34,06	34,25	34,42	34,06		34,25	34,42	
72	Indeks Kepuasan Layanan Intenal Perangkat Daerah			80,00	81	82	83	78,02		82	83	
73	Nilai SAKIP			89,50	89,75	90,00	90,25	89,95		90,00	90,25	
81	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			80,00	81	82	83	77,08		82	83	
89	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			80,00	81	82	83	80,80		82	83	
92	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			80,00	81	82	83	77,81		82	83	
105	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80,00	81	82	83	80,07		82	83	
110	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80,00	81	82	83	76,59		82	83	

2.2.2 Realisasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan tahun 2022 pagu dan realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan dapat dirinci sebagai berikut:

Anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan T.A. 2022 semua bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2022.

Adapun jumlah rincian pelaksanaan anggaran tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel .2.4
Realisasi Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan
Tahun 2022

PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	%
22.819.152.050,00	**23.169.152.050,00**	**18.241.432.487,00**	**78.73**

Pada APBD tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan pagu murni sebesar **Rp.22.819.152.050 menjadi** 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan pagu sebesar **Rp.23.169.152.050** pada mekanisme perubahan. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai yang dihapuskan anggarannya dikarenakan di alihkan ke sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dan kajian pemberian penghargaan belum di susun di tahun 2022**.**

Adapun rincian program dan kegiatan dalam belanja langsung sebagai berikut:

Tabel 2.5

Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan

Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.467.336.600,00	7.580.325.380,00	89,52
	5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.900.000,00	39.101.900,00	85,19
	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.666.250,00	207.945.450,00	77,4
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	288.692.500,00	229.636.100,00	79,54
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.999.850,00	49.095.850,00	65,46
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.669.000,00	6.453.000,00	96,76
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	250.000.000,00	241.679.612,00	96,67
	5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000,00	4.695.500,00	33,54
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.440.000,00	94.918.561,00	74,48
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.888.000,00	22.498.900,00	98,3
	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.911.000,00	105.952.296,00	54,92
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.706.800,00	3.783.918,00	11,93
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.500.000,00	61.025.250,00	60,12

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	57.889.000,00	45.159.551,00	78,01
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	847.870.500,00	354.817.141,00	41,85
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.040.819.850,00	850.718.126,00	81,74
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	333.921.500,00	280.461.826,00	83,99
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	260.936.900,00	209.892.170,00	80,44
	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			
	Pengelolaan Mutasi ASN	99.710.600,00	82.487.971,00	82,73
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	69.999.950,00	62.506.560,00	89,3
	Pengelolaan Promosi ASN	1.582.083.900,00	756.772.880,00	47,83
	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			
	Pengelolaan Assessment Center	493.828.600,00	282.735.276,00	57,25
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.091.490.750,00	985.043.116,00	90,25
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	177.638.200,00	58.140.230,00	32,73
	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	307.587.500,00	142.022.311,00	46,17
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	64.245.150,00	41.102.290,00	63,98
	Pembinaan Disiplin ASN	86.539.850,00	71.075.703,00	82,13
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	91.561.550,00	56.830.587,00	62,07
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	82.193.900,00	31.806.274,00	38,7
3	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis			
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2.237.127.950,00	1.875.807.199,00	83,85

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	36.656.750,00	28.920.534,00	78,9
	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4.314.339.650,00	3.378.021.025,00	78,3
	T O T A L K E S E L U R U H A N	**23.169.152.050,00**	**18.241.432.487,00**	**78.73**

Adapun identifikasi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan renja Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja Renja Tahun 2022

Adapun faktor pendorong untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program-program, dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang profesional yang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang kerja;
2. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku.
3. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan perencanaan ;
4. Koordinasi dan kerjasama yang baik secara internal dan dengan instansi terkait.

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Renja Tahun 2022

Adapun identifikasi faktor penghambat pelaksanaan renja Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuian indikator kinerja sub kegiatan di renja dengan di

renstra dikarenakan terdapat perubahan Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020 yang dimutakhirkan kembali dengan Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021 yang telah terdapat penetapan indikator sub kegiatan.

2. Adanya ketidakkonsistenan antara jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran antara dokumen Renstra, Renja dan APBD dikarenakan adanya penyesuaian anggaran KUA-PPAS yang lebih rendah dari anggaran program dan kegiatan pada Dokumen Renstra dan Renja Awal.
3. Adanya penyesuaian anggaran sesuai KUA-PPAS maka target kinerja juga menyesuaian anggaran, apabila anggaran kegiatan lebih sedikit dari usulan renja maka target kinerja pun akan berkurang.
4. Adanya program dan kegiatan terkait perencanaan dan evaluasi pada dokumen Renstra yang tidak dilaksanakan pada APBD karena dianalisis kurang prioritas karena menyesuaikan anggaran KUA-PPAS.
5. Kurangnya komitmen untuk merealisasikan target kinerja dan anggaran sesuai dengan rencana anggaran kas.
6. Penyusunan draf penyusunan RKA Tahun 2022 sebagai bahan perencanaan yang disusun pada awal tahun 2021 berdasarkan pada standarisasi tahun 2021 sedangkan penyusunan standarisasi tahun 2022 ditetapkan sekitar triwulan IV Tahun 2021 sehingga pada saat penyusunan RKA Tahun 2022 berubah menyesuaikan standar tahun 2022 dan terdapat selisih jumlah anggaran.
7. Pada kegiatan seleksi promosi terbuka untuk JPT yang lowong masih menunggu perintah PPK.
8. Pada kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan struktural dan pendidikan dan pelatihan tugas dan fungsi sangat tergantung pada jadwal penyelenggaran pendidikan yaitu KDOD LAN Samarinda dan BPSDM. Sehingga kuota peserta ditentukan oleh pihak penyelenggara.
9. Adanya penawaran tugas belajar yang tidak terpenuhi formasinya.
10. Adanya perubahan peraturan kepegawaian baru dari instansi pusat yang harus segera ditindaklanjuti dan disosialisasikan sehingga membutuhkan waktu untuk penerapannya, misal Permenpan nomor 8 tahun 2021 tentang mamnajemen kinerja pegawai yang telah dirubah sesuai nomor 6 tahun 2

Adapun Realisasi Anggaran per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel.2.6
Pengukuran Realisasi Keuangan pada Setiap Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA			PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN		
				TARGET	REALSIASI	CAPAIAN			PAGU	REALSIASI	CAPAIAN
1		2		3	4	5	6		7	8	9
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	1	Indeks Profesionalitas ASN	55	51,24	93,16%		**JUMLAH PAGU PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**13.276.442.050**	**9.594.320.770**	72,27%
								PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**6.688.317.700**	4.311.572.012	64,46%
							1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.541.437.750	1.741.048.814	68,51%
								Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	*57.889.000*	45.159.551	78,01%
								Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*847.870.500*	354.817.141	41,85%
								Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	*1.040.819.850*	850.718.126	81,74%
								Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	*333.921.500*	280.461.826	83,99%
								Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	*260.936.900*	209.892.170	80,44%
							2	Mutasi dan Promosi ASN	1.751.794.450	901.767.411	51,48%
								Pengelolaan Mutasi ASN	*99.710.600*	82.487.971	82,73%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN		
			TARGET	REALSIASI	CAPAIAN			PAGU	REALSIASI	CAPAIAN
1		2	3	4	5	6		7	8	9
							Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*69.999.950*	62.506.560	89,30%
							Pengelolaan Promosi ASN	*1.582.083.900*	756.772.880	47,83%
						3	Pengembangan Kompetensi ASN	1.762.957.550	1.325.918.622	75,21%
							Pengelolaan Assessment Center	*493.828.600*	282.735.276	57,25%
							Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	*1.091.490.750*	985.043.116	90,25%
							Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	*177.638.200*	58.140.230	32,73%
						4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	632.127.950	342.837.165	54,24%
							Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*307.587.500*	142.022.311	46,17%
							Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	*64.245.150*	41.102.290	63,98%
							Pembinaan Disiplin ASN	*86.539.850*	71.075.703	82,13%
							Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	*91.561.550*	56.830.587	62,07%
							Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	*82.193.900*	31.806.274	38,70%
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**6.588.124.350**	5.282.748.758	80,19%
						1.	Pengembangan Kompetensi Teknis	2.273.784.700	1.904.727.733	83,77%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA			PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN		
				TARGET	REALSIASI	CAPAIAN			PAGU	REALSIASI	CAPAIAN
1		2		3	4	5	6		7	8	9
								Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	*2.237.127.950*	1.875.807.199	83,85%
								Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	*36.656.750*	28.920.534	78,90%
							2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.314.339.650	3.378.021.025	78,30%
								Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*4.314.339.650*	3.378.021.025	
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian	2	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan	34,03	34,06	100,09%		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.892.710.000,00**	8.647.111.717	87,41%
							1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.467.336.600,00	7.580.325.380	89,52%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN		
			TARGET	REALSIASI	CAPAIAN			PAGU	REALSIASI	CAPAIAN
1		2	3	4	5	6		7	8	9
	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan					*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*8.467.336.600,00*	7.580.325.380	89,52%
						2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.900.000,00	39.101.900	85,19%
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*45.900.000,00*	39.101.900	85,19%
						3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	889.027.600,00	734.810.012	82,65%
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*268.666.250,00*	207.945.450	77,40%
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*288.692.500,00*	229.636.100	79,54%
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*74.999.850,00*	49.095.850	65,46%
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*6.669.000,00*	6.453.000	96,76%
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	*250.000.000,00*	241.679.612	96,67%
						4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.328.000,00	122.112.961	74,31%
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*14.000.000,00*	4.695.500	33,54%
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*127.440.000,00*	94.918.561	74,48%
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*22.888.000,00*	22.498.900	98,30%
						5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.117.800,00	170.761.464	52,36%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA			PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN		
				TARGET	REALSIASI	CAPAIAN			PAGU	REALSIASI	CAPAIAN
1		2		3	4	5	6		7	8	9
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*192.911.000,00*	105.952.296	54,92%
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*31.706.800,00*	3.783.918	11,93%
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*101.500.000,00*	61.025.250	60,12%
Jumlah Sasaran I									***9.892.710.000***	**8.647.111.717**	**87,41%**
Jumlah Sasaran I dan II									***23.169.152.050***	***18.241.432.487***	**78,73%**

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

Dalam penyusunan rencana kerja (renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2024 dilakukan terlebih dahulu inventarisasi isu-isu strategis untuk mennetukan prioritas penggunaan anggaran sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Balikpan yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.

Adapun isu-isu utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang kepegawaian di Kota Balikpapan berdasakan sistem merit , yaitu sebagai berikut :

a. Masih Adanya gap kompetensi dan kualifikasi ASN
b. Masih adanya pelanggaran disiplin ASN
c. Mekanisme pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi belum ada
d. Penerapan manajemen talenta dan pola karir
e. Pengelolaan Manajemen Kinerja
f. Penyetaraan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional
g. Data pegawai yang sesuai dalam Sistem Informasi Kepegawaian

Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi berdasarkan road map reformasi birokrasi, diantaranya:

1) Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan
2) Pembangunan Assesment Center yang memiliki fungsi dalam menyusun berbagai dokumen acuan bagi pengembangan pegawai, di antaranya dalam penyusunan:
   - dokumen standar kompetensi manajerial
   - dokumen standar kompetensi bidang
   - metoda/alat ukur peniliaian kompetensi
   - calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan
   - kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional
   - bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center
3) Belum dibentuk unit pusat penilaian kompetensi pegawai karena keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran dan SDM assessor

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022, maka Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

a. Menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya;
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
b. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
d. Penyelenggaraan pengadaan, pemberhentiaan dan informasi kepegawaian aparatur sipil negara;
e. Pelaksanaan mutasi dan promosi aparatur sipil negara;
f. Pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;
g. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi, data dan dokumen aparatur sipil negara;
h. Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi aparatur sipil negara;
i. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian manajemen aparatur sipil negara;
j. Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
k. Penentuan dan pembinaan pola karier aparatur sipil negara;

l. pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
m. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
o. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas:

a. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
b. administrasi keuangan;
c. administrasi barang milik Daerah pada Dinas;
d. administrasi kepegawaian;
e. administrasi umum;
f. pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
g. pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
h. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
i. layanan informasi dan pengaduan; dan
j. pembinaan pelayanan publik**.**

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
g. pengelolaan anggaran Badan;
h. pelaksanaan administrasi keuangan;
i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
k. pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;

l. pengelolaan pengaduan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
m. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
n. pengoordinasian bidang dan UPT;
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan.

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

a penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
b perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan aparatur sipil negara;
c perumusan petunjuk teknis di bidang pengembangan aparatur sipil negara;
d penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis, fungsional dan pra jabatan/pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
e perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian tugas belajar dan izin belajar;
f pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah;
g penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
h pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain yang berhubungan dengan pengembangan aparatur sipil negara;
i penyelenggaraan penilaian kompetensi dan pembinaan jabatan fungsional;
j penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pengembangan aparatur sipil negara;
k pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
l dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Mutasi

Mempunyai tugas melaksanakan tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Mutasi. Dengan menyelenggarakan fungsi:

a penyusunan program dan kegiatan Bidang Mutasi;
b perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kinerja dan mutasi aparatur sipil Negara;
c perumusan petunjuk teknis di bidang penilaian kinerja dan mutasi aparatur sipil Negara;
d perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian penempatan dalam jabatan
e perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian mutasi dan kepangkatan
f perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian rotasi dan promosi jabatan structural
g pelaksanaan pembinaan pola karier aparatur sipil negara
h penyusunan kebijakan pola karier aparatur sipil negara
i pelaksanaan pemantauan dan evaluasi teknis penilaian capaian kinerja aparatur sipil Negara
j pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan penilaian sasaran kinerja pegawai terhadap seluruh pegawai negeri sipil
k pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
l perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian pembinaan dan penghargaan aparatur sipil negara
m pelaksanaan pemberian pertimbangan dan evaluasi kedudukan hukum masalah pegawai
n pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
o pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Pembinaan dan Informasi ASN

Bidang Pembinaan dan Informasi ASN mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pembinaan dan Informasi ASN.

Pembinaan dan Informasi ASN menyelenggarakan fungsi :

a penyusunan program dan kegiatan Bidang Pembinaan dan Informasi Aparatur Sipil Negara

b perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian aparatur sipil Negara

c perumusan petunjuk teknis di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian aparatur sipil Negara

d perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian data dan sistem informasi aparatur sipil negara

e perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian dokumen aparatur sipil Negara

f perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian kesejahteraan aparatur sipil Negara

g perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian fasilitasi pembinaan dan administrasi kelembagaan profesi aparatur sipil negara (korps pegawai Republik Indonesia dan lembaga profesi aparatur sipil negara lainnya)

h perumusan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara

i perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian pengadaan calon aparatur sipil negara dan pengangkatan calon aparatur sipil negara
menjadi aparatur sipil negara serta pemberhentian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

j pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertangggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

k pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 terdiri atas:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, yang membawahkan:
   1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
   2. Subbagian Umum;
c. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dengan Substansi:
   1. Substansi Pengembangan Aparatur Sipil Negara;
   2. Substansi Pendidikan dan Pelatihan
   3. Substansi Kompetensi dan Kinerja.

d. Bidang Mutasi, dengan Substansi:
   1. Substansi Perencanaan dan Pengadaan ASN;
   2. Substansi Mutasi Umum; dan
   3. Substansi Mutasi Jabatan.

e. Bidang Pembinaan dan Informasi ASN, yang membawahkan:
   1. Substansi Pembinaan ASN;
   2. Substansi Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan
   3. Substansi Subbid. Kesejahteraan Dan Fasilitasi Profesi ASN

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsiona

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi

Tabel: 2.7

Sarana dan Prasarana

Terkait langsung dengan pelayanan

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	02.02.01.01.003	Station Wagon	9	Baik
2	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	8	Baik
3	02.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) / Mesin ketik elektrik	7	Baik
4	02.05.01.02.012	Mesin Penghitung Uang	1	Baik
5	02.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	1	Baik

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
6	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	3	Baik
7	02.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
8	02.06.01.04.045	Mesin Barcode	2	Baik
9	02.06.02.07.005	Mesin Finger Print Door	2	
10	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	7	Baik
11	02.05.02.04.004	A.C. Split	3	Baik
12	02.08.07.02.046	Air Purlier	5	Baik
13	02.10.01.01.008	Komputer Jaringan lainnya	1	Baik
14	02.10.01.02.001	P.C Unit	70	Baik
15	02.10.01.01.001	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Baik
16	02.10.01.02.002	Lap Top / Note book	34	Baik
17	02.10.01.02.009	Tablet PC	7	Baik
18	02.10.02.02.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	6	Baik
19	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	52	Baik
20	02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	7	Baik
21	02.06.02.06.007	Screen/layar proyektor	3	Baik
22	02.10.02.04.001	Server	5	Baik
23	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	1	Baik
24	02.08.03.03.033	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	1	Baik
25	02.03.03.01.064	Memori Programmer	2	Baik
26	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	4	Baik
27	02.05.02.06.008	Sound System	9	Baik
28	02.05.01.05.047	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	7	Baik
29	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya (hardisk Eksternal)	10	Baik
30	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu / meja komputer	41	Baik
31	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	29	Baik
32	02.05.01.04.003	Rak Besi	4	Baik
33	02.06.01.02.126	Camera Digital	12	Baik
34	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
35	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	40	Baik
36	02.08.01.12.024	Stabilizer	1	Baik
37	02.05.02.06.002	Televisi	6	Baik
38	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	4	Baik
39	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya (troly)	2	Baik
40	02.05.01.05.024	Hand Metal Detector	2	Baik
41	02.05.01.04.007	Brandkas	1	Baik
42	02.05.01.05.005	White Board	3	Baik

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
43	02.05.02.06.036	Tangga Aluminium	1	Baik
44	02.05.02.06.038	Dispenser	2	Baik
45	02.05.02.06.047	Coffee Maker	1	Baik
46	02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	1	Baik
47	02.06.02.01.010	Facsimile	1	Baik
48	02.06.03.47.005	sumber tenaga lainnya (dst)/accu	1	Baik
49	02.07.01.01.169	Alat Kedokteran umum lainnya (thermogun)	3	Baik
50	02.08.07.02.046	Air Purlier	5	Baik
51	02.08.07.03.013	Portable Noise Monitoring	1	Baik
52	02.10.01.01.003	Local Area Network (LAN)	1	Baik
53	02.10.02.04.024	Switch	4	Baik
		Jumlah Kondisi Baik	436	
1	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Rusak
2	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2	Rusak
3	02.05.01.04.002	Lemari	13	Rusak
4	02.05.01.05.005	White Board	1	Rusak
5	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	1	Rusak
6	02.05.02.01.013	Meja Podium	1	Rusak
7	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	19	Rusak
8	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	13	Rusak
9	02.05.02.01.032	Kursi Putar	4	Rusak
10	02.05.02.01.039	Meja Komputer	1	Rusak
11	02.05.02.01.050	Meubeleur lainnya	50	Rusak
12	02.05.02.04.003	A.C. Window	6	Rusak
13	02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat dan Pegawai	6	Rusak
14	02.05.03.06.004	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	Rusak
15	02.05.03.07.009	Buffet Kaca	1	Rusak
16	02.10.01.01.008	Komputer Jaringan lainnya	2	Rusak
17	02.10.01.02.001	P.C Unit	3	Rusak
18	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Rusak
19	02.10.02.04.005	Netware Interface External	2	Rusak
20	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	1	Rusak
		Jumlah Kondisi Rusak	134	

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana BKPSDM Kota Balikpapan 76,5% kondisi baik dan 23,5% dalam kondisi rusak , hal ini disebabkan dimana BKPSDM sudah mengusulkan penghapusan barang yang rusak namun belum selesai prosesnya.

2.4 Review tentang Rancangan Akhir SKPD

Review Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2024 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan sebagaimana tersebut pada tabel review terhadap rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan tidak terdapat usulan dari masyarakat. Namun telah dilaksanakan forum perangkat Daerah Tahun 2023 dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Awal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2024 yang dihadiri oleh peserta dari perangkat daerah sebagaimana terlampir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunan, secara operasional bidang kepegawaian tercantum dalam Urusan Wajib Kepegawaian. Adapun telaah urusan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi yang selaras dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan adalah sebagai beikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional		
1	Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan	Arahan RPJMN 2020-2024 (Tahap IV)	Mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetetif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing
2	Keselarasan Tema Pembangunan Nasional		Memantapkan Pemulihan Ekonomi Dan Sistem Kesehatan Menuju Transformasi Ekonomi Yang Inklusif
B	Provinsi		
1	Keselarasan Tema Provinsi Kaltim	RKPD 2024 Provinsi Kaltim	Peningkatan Daya Saing SDM Dan Insfrastruktur Wilayah Yang Andal Untuk PercepatanTranformasi ekonomi inklusi dan berkelanjutan
C.	Kota Balikpapan		
1	Keselarasan Tema Kota Balikpapan	RKPD 2024Kota Balikpapan	Mempertahankan Kondusifitas Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Insklusif Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan

- Arahan RPJMN 2020-2024 (Tahap IV) dengan tema Mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetetif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing;
- Tema RKPD Tahun 2024 Provinsi Kaltim adalah Peningkatan Daya Saing SDM Dan Insfrastruktur Wilayah Yang Andal Untuk PercepatanTranformasi ekonomi inklusi dan berkelanjutan ;
- Tema RKPD 2024 Kota Balikpapan adalah Mempertahankan Kondusifitas Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Insklusif Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Pencapaian tujuan dan sasaran renja menggunakan perencanaan secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial (HITS)

Gambar 3.1

Pendekatan Substansi Perencanaan HITS

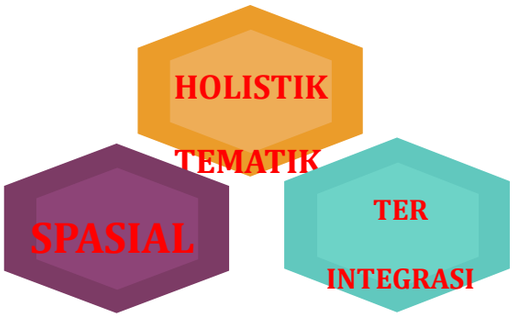

Penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas

Keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional

Kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
Reformasi Birokrasi

↓

PROGRAM PRIORITAS PROVINSI KALTIM
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

↓

PROGRAM PRIORITAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BALIKPAPAN

Hulu

- Penetapan Kegiatan di setiap tahapan
- Penetapan Sasaran di setiap tahapan
- Penetapan Indikator di setiap tahapan

Hilir

Gambar 3.2

Integrasi Substansi Program Prioriras

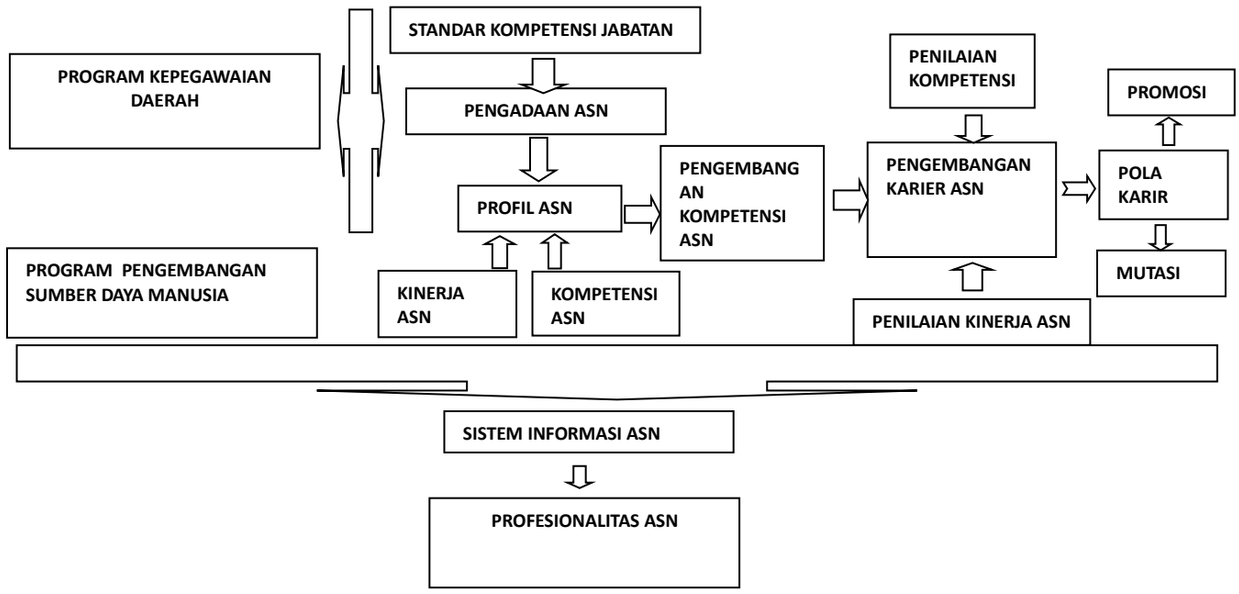

Gambar 3.3

Sistem Pengembangan Kompetensi ASN

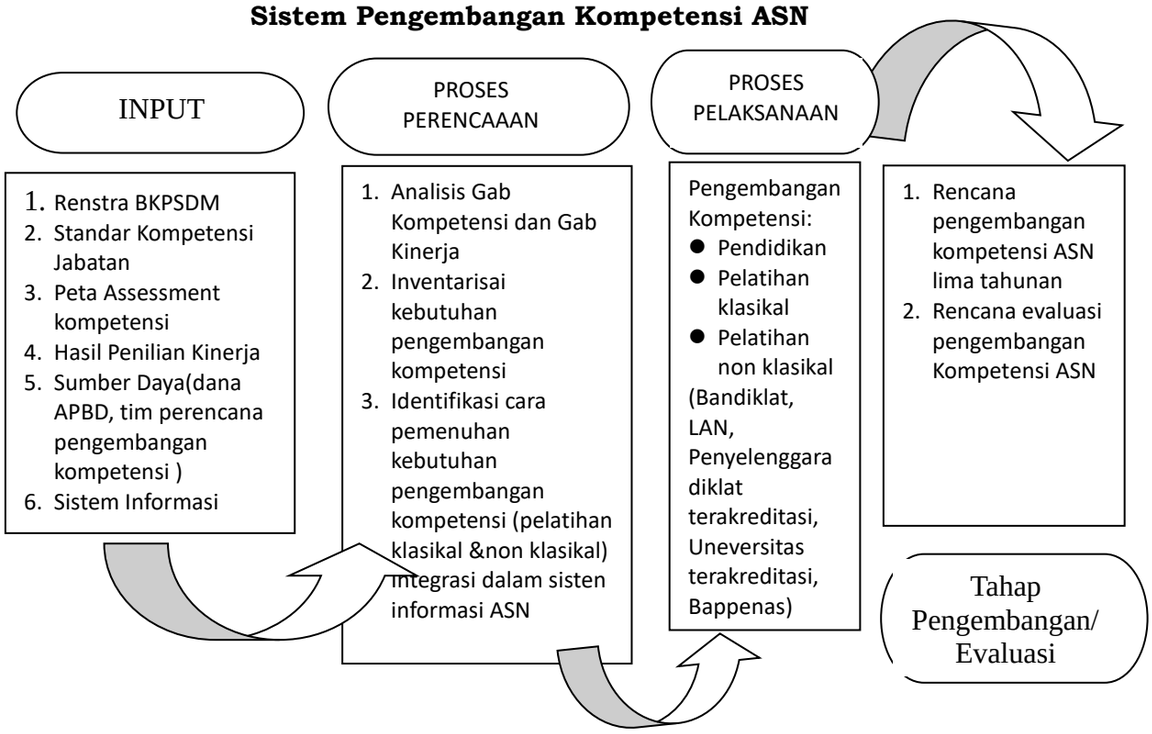

❖ Pendekatan Perencanaan Holistik – Tematik dalam penetapan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan menekankan pada pentingnya mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar OPD maupun Instansi terkait baik provinsi maupun pusat, Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan Manajemen ASN yang profesional, seperti, BKD provinsi Kaltim, BKD Kabupaten/Kota, BKN Regional VIII Banjarbaru, BKN Pusat, KASN, Kementerian dalam Negeri, Kemenpan dan RB, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Agama, Universitas/Lembaga Swasta untuk kerjasama Lembaga Assesor, Lembaga penyelenggara diklat serta univeritas terakreditasi untuk pengembangan kompetensi ASN.

- Pendekatan integratif lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu OPD dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada OPD lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan Manajemen ASN dengan program dan kegiatan prioritas sangat berkaitan dengan program dan kegiatan OPD lainnya , yaitu:
  - Pengadaan ASN yang sesuai standar kompetensi dan bezzeting PNS (Anjab dan ABK)
  - Pengukuran gab kompetensi juga harus dilakukan oleh masing-masing OPD
  - Pengembangan kompetensi melalui diklat tugas dan fungsi tentunya membutuhkan data analisis kesenjangan pegawai dan daftar prioritas diklat PNS dari OPD
  - Peningkatan disiplin dan kinerja membutuhkan tim penanganan disiplin dan evalusi kinerja antar OPD
  - Penyediaan data ASN yang akurat melalui up dating data dalam SIMPEG PNS dan Non PNS BKPSDM yang terintegrasi dengan perangkat daerah.
  - Penyusunan kebijkan pemberian tunjangan kinerja untuk ASN juga melibatkan instansi terkait yaitu Inspektorat, Bappeda-Litbang, BKAD, Diskominfo Dan Bagian Organisasi
- Perencanaan spasial dengan menelaah sebaran wilayah pelaksanaan program dan kegiatan antara lain:
  - Dalam rangka Penataan Aparatur yang tujuannya menjamin tersedianya jumlah Aparatur Sipil Negara yang tepat dalam memberikan pelayanan publik sampai dengan ke wilayah pinggiran kota diperlukan adanya rencana redistribusi pegawai;
  - Pengembangan Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dengan tujuan peningkatan kompetensi dan kapabilitas guna mengembangkan karier PNS sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan kebutuhan yang menunjang pelayanan publik harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan Aparatur yang professional dalam menghadapi perubahan kondisi perekonomian mengingat Kota Balikpapan sebagai pusat perdagangan, industri dan pintu gerbang Wilayah Indonesia Timur .
  - Evaluasi Pengembangan kompetensi /evaluasi pasca diklat dalam penerapan di unit kerja masing-masing alumni diklat
  - Target sosialisasi peraturan kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai ke Perangkat Daerah yang terindikasi pegawai yang melakukan pelanggaran

disiplin berdasarkan monitoring dn evaluasi tingkat kehadiran,

- Pembinaan jabatan fugsional ke seluruh perangkat daerah untuk pemenuhan jabatan fungsional.
- Peningkatan sistem jaringan pelayanan kepegawaian melalui pengembangan SIMPEG PNS dan Non PNS dan aplikasi e-government lainnya, diharapkan mampu terjangkau ke seluruh wilayah guna kualitas pelayanan kepegawaian daerah.

Dari uraian sistem perencanaan diatas dapat disimpulkan program dan kegiatan prioritas dilaksanakan untuk menyelenggarakan manajemen ASN yang profesional sehingga menciptakan ASN yang profesional (berintegritas dan berkompetensi) yang selanjutnya akan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Adapun Tujuan dan sasaran penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah :

a. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan dalam Rencana Program/Kegiatan Prioritas Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024;

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024;

c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan

d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan di antara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan

e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan

f. Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis merupakan instrumen pencapaian visi dan misi organisasi. Visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan adalah visi dan misi dari Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

VISI

TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN

MISI KE-1

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

Dalam mewujudkan visi tersebut serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan mengacu pada misi kesatu. Untuk mencapai misi tersebut maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tujuan 1 : **Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel Melalui Penerapan Sistem Merit**

Sasaran 1 : **Meningkatnya Profesionalitas ASN**

Adapun matrik tujuan dan sasaran serta indikator utama jangka menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tabel Tujuan dan Sasaran Serta Indikator Utama Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel Melalui Penerapan Sistem Merit		Indeks Sistem Merit	0.62	0.69	0.73	0.76	0.80	0.84	0.84
2		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	47.87	55	57	59	61	62	62
3		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai RB BKPSDM	32.36	34.03	34.06	34.25	34.42	34.69	34.69

BAB
IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan yang terdapat pada 2 urusan yaitu urusan kepegawaian, dan urusan pendidikan dan pelatihan telah menyusun rancangan akhir rencana kerja tahun 2024 dan menguraikan dalam 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp 21.634.912.807,00** yang berasal dari APBD Kota Balikpapan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Program Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan

Merupakan Prioritas Program yang menjadi Urusan Wajib pada Belanja Langsung, dengan usulan program dan pagu anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.1

Usulan Progam Prioritas

NO	PROGRAM	PAGU DANA
1	KEPEGAWAIAN DAERAH	5.092.323.300,00
2	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.169.773.474
	JUMLAH	10.162.096.774,00

Adapun program kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia terdiri dari 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Usulan Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Prioritas

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
KEPEGAWAIAN DAERAH	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
			2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
			3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
			4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
			5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
			6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
	2	Mutasi dan Promosi ASN	1	Pengelolaan Mutasi ASN
			2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
			3	Pengelolaan Promosi ASN
	3	Pengembangan Kompetensi ASN	1	Pengelolaan Assessment Center
			2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
			3	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
	4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
			3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
			4	Pembinaan Disiplin ASN
			5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
			6	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	Pengembangan Kompetensi Teknis	1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
	2	Sertifikasi,Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial danFungsional	1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

b. Program Pendukung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan

Merupakan program untuk mendukung pelaksanaan program utama (Urusan Wajib / Belanja Langsung), dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Usulan Progam Pendukung

NO	PROGRAM	PAGU DANA
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**11.472.816.033,00**
	JUMLAH	**11.472.816.033,00**

Berdasarkan tabel diatas, program kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia terdiri dari 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.4

Usulan Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pendukung

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4.2 RENCANA ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2024

Adapun rekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan hasil input melalui https://sipd-ri.kemendagri.go.id sebagaimana terlampir.

Program, kegiatan, sub kegiatan proritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 direncanakan untuk mendukung tindak lanjut penerapan Sistem Merit Manajemen ASN. Berdasarkan Surat Keputusan KASN Nomor 106/KEP.KASN/C/XI/2022 Tentang Penerapan Sistem Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. ditetapkan pada kategori III (Baik) dengan nilai 266 dan Indeks 0.65.

Adapun tindak lanjut penerapan Sistem Merit Manajemen ASN yaitu sebagia berikut:

Tabel 4.4

Tindak Lanjut Atas Hasil Verifikasi Penilan Sistem Merit Manajemen ASN Tahun 2022

No	Aspek	Indikator		Catatan Sub-Aspek	Tindak lanjut	Sub Kegiatan
1	Perencanaan Kebutuhan	1	Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK;	Telah menyusun peta jabatan yang sudah ditetapkan PPK dan rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 tahun, namun rencana kebutuhan belum dirinci menurut jenis jabatan 1. Mohon melampirkan rincian rencana kebutuhan pegawai jangka menengah berdasarkan jenis jabatan 2. Mohon melampirkan sampling 2 OPD Anjab ABK tahun 2022	Menyusun rencana kebutuhan rincian rencana kebutuhan pegawai jangka menengah berdasarkan jenis jabatan	*Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN*

No	Aspek	Indikator		Catatan Sub-Aspek	Tindak lanjut	Sub Kegiatan
		2	Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;	Telah tersedia data kepegawaian dalam SIMPEG, diperbarui secara berkala, namun perlu menunjukan telah terintegrasi dengan data kompetensi dan kinerja 1. Perlu menunjukan integrasi dua arah dengan sistem informasi kepegawaian lainnya	terintegrasi data kepegawaian dalam SIMPEG dengan data kompetensi dan kinerja/ integrasi dua arah dengan sistem informasi kepegawaian lainnya	1. *Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian* 2. *Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian*
		3	Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir;	Telah tersedia data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam jangka waktu 5 tahun namun perlu menunjukkan dalam profil pegawai di SIMPEG		1. *Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian* 2. *Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian* *3.* Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
		4	Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun);	Telah menyusun rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 tahun, namun belum dirinci berdasarkan jenis jabatan 1. Mohon melampirkan rincian rencana kebutuhan pegawai jangka menengah berdasarkan jenis jabatan	menyusun rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 tahun dengan rincian rencana kebutuhan pegawai jangka menengah berdasarkan jenis jabatan	*1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN* *2. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN*
		Catatan KASN untuk Aspek 1 : 1) Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan pegawai jangka menengah 5 tahun yang dirinci berdasarkan jenis jabatan, sesuai dengan Anjab ABK yang telah ditetapkan oleh PPK; 2) Mengintegrasikan data kepegawaian dalam SIMPEG dengan data kinerja dan pengembangan karier pegawai.				
2	Pengadaan	1	Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan;	Rencana pemngadaan ASN tahun berjalan telah berdasarkan Anjab ABK sesuai dengan potensi daerah dan prioritas pembangunan		*1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN* *2. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN*

No	Aspek	Indikator		Catatan Sub-Aspek	Tindak lanjut	Sub Kegiatan
		2	Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Telah memiliki kebijakan internal tentang pengadaan ASN yang mengatur tentang tata cara pengadaan pegawai dan diperbarui sesuai kebutuhan 1. Terlampir alur mutasi, baik mutasi masuk maupun keluar. Apakah ditetapkan oleh PPK? 2. Alur mutasi tersebut apakah juga mengatur pengadaan ASN dari Instansi kedinasan (IPDN, STAN, STIS, dll) ?	Menyusun Alur/SOP Rotasi, promosi dan mutasi dan pengadaan ASN dari Instansi kedinasan (IPDN, STAN, STIS, dll) yang ditetapkan PPK	*1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK* *2. Pengelolaan Mutasi ASN* *3. Pengelolaan Promosi ASN*
		3	Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Penetapan hasil penerimaan calon ASN dilakukan secara obyektif dan transparan 1. Mohon melampirkan sampling laporan pengadaan melalui mekanisme mutasi masuk 2. mohon melampirkan sampling laporan pengadaan ASN dari sekolah kedinasan (STAN, STIS, IPDN, Perhubungan, dll). Dapat melampirkan SK penempatan atau surat permohonan dari instansi asal		*1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK* *2. Pengelolaan Mutasi ASN* *3. Pengelolaan Promosi ASN*
		4	Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS;	Telah melaksanakan Latsar kurang dari satu tahun sejak diangkat menjadi CPNS dan telah menyusun evaluasi pasca latsar untuk CPNS T.A 2019, namun perlu menunjukan laporan pelaksanan PKTBT kepada seluruh CPNS 1. Bentuk pelatihan apa yang diberikan oleh Pemkot Balikpapan	memberikan pelatihan kepada CPNSD dimasa sebelum menyelesaikan Latsar dan menyusun evaluasi pasca latsar untuk CPNS.	*Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*

No	Aspek	Indikator		Catatan Sub-Aspek	Tindak lanjut	Sub Kegiatan
				kepada para CPNS dimasa sebelum CPNS menyelesaikan Latsar dalam rangka memenuhi program PKTBT? Mohon melampirkan laporan pelaksanaan PKTBT kepada para CPNS T.A 2019 dan 2021 2. Evaluasi pasca Latsar telah dilaksanakan oleh internal instansi terhadap alumni Latsar CPNS T.A 2019		
		5	Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar;	Telah menunjukkan 100% kesesuaian pengangkatan CPNS ke PNS sesuai formasi dan unit kerja yang dilamar 1. mohon melamoirkan bukti dukung tambahan terkait daftar nominatif, SK CPNS dan SK PNS tahun anggaran terakhir		*Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*
		Catatan KASN untuk Aspek 2 : 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan internal terkait pengadaan ASN yang diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan; 2) Melaksanakan program pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan program Latsar kepada para CPNS sebagaimana diatur dalam PERLAN 1/2021 dan KEPKA LAN 93/2021.				
3	Pengembangan Karir	1	Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;	Telah menetapkan SKJ untuk JPT, namun perlu menunjukan penetapan SKJ untuk jabatan lainnya 1. Mohon melampirkan penetapan SKJ untuk JA, Pengawas dan Pelaksana	Menyusun SKJ seluruh jabatan	Bagian organisasi

No	Aspek	Indikator		Catatan Sub-Aspek	Tindak lanjut	Sub Kegiatan
		2	Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi;	Telah melaksanakan pemetaan kompetensi untuk sebagian pegawai pada setiap level jabatan, namun perlu menunjukan pelaksanaannya secara berkala yang dikelola kedalam profil pegawai 1. Pemetaan kompetensi telah dikelola dalam e-kompetensi. Namun perlu menunjukan integrasi dengan profil pegawai di SIMPEG 2. Pemetaan kompetensi telah dikelola dalam e-kompetensi. Mohon menunjukan tangkap layar sampling laporan hasil pemetaan kompetensi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 yang dikelola dalam aplikasi	Pemetaan kompetensi kompetensi secara berkala dan data hasil penilaian kompeteni dikelola dalam e-kompetensi dan terintegrasi dengan profil pegawai di SIMPEG	*Pengelolaan Assessment Center*
		3	Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;	Belum menunjukkan pembangunan talent pool yang memetakan pegawai dalam 9 box grid talent berdasarkan potensi dan kinerja pegawai	menindaklanjuti hasil kajian manajemen talenta	*1. Pengelolaan Assessment Center* *2. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*
		4	Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimba ng-kan pola karir instansi;	Belum menunjukkan mekanisme rencana suksesi		*1. Pengelolaan Assessment Center* *2. . Pengelolaan Mutasi ASN* *3. Pengelolaan Promosi ASN*
		5	Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;	Teah tersedia analisis kesenjangan kualifikasi kepada seluruh pegawai dan tersedia analisis kesenjangan kompetensi untuk sebagian pegawai disetiap level jabatan namun belum menunjukan perbaruan secara berkala.	Update data Analisis kesenjangan kualifikasi kepada seluruh pegawai dan tersedia analisis kesenjangan kompetensi untuk sebagian pegawai disetiap level jabatan secara	*1. Pengelolaan Assessment Center* *2. Pembinaan, Pengoordinasian , Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan*

No	Aspek	Indikator		Catatan Sub-Aspek	Tindak lanjut	Sub Kegiatan
					berkala.	*Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*
		6	Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;	Belum menunjukan pelaksanaan analisis kesenjangan kinerja yang dilakukan secara terukur berdasarkan hasil Target dan Realisasi SKP	menyusun dokumen analisis kesenjangan kinerja yang dilakukan secara terukur berdasarkan hasil Target dan Realisasi SKP	*Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*
		7	Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;	Telah tersedia strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka waktu 1 tahun yang juga sudah masuk dalam dokumen Renstra Instansi 1. Kedepan diharapkan perencanaan strategi pengembangan kompetensi tidak hanya melalui jalur klasikal, tetapi juga melalui jalur non klasikal		1. *Penyelenggaraaan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum* 2. *Penyelenggaraaan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan* 3. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		8	Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;	Telah tersedia program diklat untuk memenuhi kewajiban 20JP pertahun untuk setiap pegawai, namun belum menunjukan program diklat berdasarkan hasil dari gap kompetensi dan	program diklat berdasarkan hasil dari gap kompetensi dan kinerja pegawai sesuai dengan prioritas dan ketersediaan anggaran	*Penyelenggaraaan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan*

No	Aspek	Indikator		Catatan Sub-Aspek	Tindak lanjut	Sub Kegiatan
				kinerja pegawai		*Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*
		9	Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;	Sedang menyusun SK Walikota tentang manajemen pengembangan kompetensi pegawai yang didalamnya terdapat rencana program peningkatan kompetensi melalui praktik kerja 1. Apakah sudah ada rencana pelaksanaannya?	menyusun SK Walikota tentang manajemen pengembangan kompetensi pegawai	*1.Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum* *2.* Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		10	Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;	Telah menyusun pedoman pelaksanaan coaching, mentoring dan belajar mandiri, namun perlu menunjukan pelaksanaannya secara terjadwal 1. Apakah Pemkot Balikpapan sudah mulai melaksanakan kegiatan coaching mentoring berdasarkan pedoman yang disusun? 2. Apakah pedoman tersebut sudah disosialisasikan untuk dapat dilaksanakan di seluruh OPD? 3. Kegiatan konseling menggunakan pendekatan perlindungan terhadap kondisi kejiwaan pegawai 4. Untuk pelaksanaan evaluasi hasil coaching mentoring bisa dilakukan berkala setelah coaching untuk perkembangan permasalahan/kompet	menyusun SK Walikota tentang manajemen pengembangan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan coaching, mentoring dan belajar mandiri,	*1.Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*

No	Aspek	Indikator		Catatan Sub-Aspek	Tindak lanjut	Sub Kegiatan
				ensi/kinerja		
		Catatan KASN untuk Aspek 3 : 1) Menyusun dan menetapkan SKJ setiap level jabatan sesuai dengan peta jabatan terbaru; 2) Melaksanakan pemetaan kompetensi untuk setiap level jabatan secara berkala yang telah dikelola dalam profil pegawai pada sistem informasi; 3) Menyusun kebijakan internal terkait Manajemen Talenta serta mekanisme akuisisi talenta yang telah ditetapkan PPK dengan mengacu pada PERMENPAN 3 Tahun 2020; 4) Membangun sistem informasi untuk mengakomodir pemetaan talenta dan rencana suksesi; 5) Menyusun analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi seluruh pegawai yang diperbarui secara berkala; 6) Menyusun analisis kesenjangan kinerja untuk seluruh pegawai dan diperbarui secara berkala; 7) Menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai serta pelaksanaan diklat berdasarkan hasil analisis kesenjangan per individu pegawai yang dikaitkan dengan kebutuhan organisasi; 8) Melaksanakan program praktik kerja dan/atau pertukaran pegawai secara terjadwal dan dievaluasi; 9) Menyusun pedoman dan melaksanakan program coaching & mentoring secara terjadwal serta dievaluasi.				
4	Promosi dan Mutasi	1	Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/	Belum menunjukan kebijakan internal terkait pola karier pegawai minimal mengatur tentang pola	menindaklanjuti hasil kajian manajemen pola karir	*1. Pengelolaan Mutasi ASN* 2. *Pengelolaan Promosi ASN* *3. Pengelolaan*

No	Aspek	Indikator		Catatan Sub-Aspek	Tindak lanjut	Sub Kegiatan
			Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir;	karier secara vertikal, horizontal dan diagonal		*Kenaikan Pangkat ASN*
		2	Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;	Telah menetapkan kebijakan internal terkait pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan mekanisme promosi mutasi, namun belum mengacu pada talent pool dan rencana suksesi.	menindaklanjuti hasil kajian manajemen pola karir	*1. Pengelolaan Mutasi ASN* 2. *Pengelolaan Promosi ASN*
		3	Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif;	Telah melaksanakan pengisian JPT secara terbuka di lingkup nasional, namun belum menunjukkan pengisian jabatan Administrator dan Pengawas dengan metode assessment. 1. Mohon melampirkan laporan pelaksanaan pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas melalui metode assessment	menindaklanjuti hasil kajian manajemen pola karir	*1. Pengelolaan Mutasi ASN* 2. *Pengelolaan Promosi ASN*
		Catatan KASN untuk Aspek 4 : 1) Menyusun dan menetapkan rancangan peraturan pola karier yang telah disesuaikan dengan manajemen talenta dan rencana suksesi; 2) Menetapkan kebijakan internal terkait mekanisme pengisian JPT secara terbuka, serta tata cara promosi dan mutasi, yang disesuaikan dengan manajemen talenta dan rencana suksesi.				
5	Manajemen Kinerja	1	Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	Telah menyusun kontrak kinerja bagi seluruh pegawai yang diturunkan dari Renstra Instansi 1. Mohon melampirkan bukti dukung tambahan terkait sampling perjanjian kinerja pada OPD lain	sosialisasi penyusunan dan penilaian SKP serta evaluasinya	*Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*

No	Aspek	Indikator		Catatan Sub-Aspek	Tindak lanjut	Sub Kegiatan
		2	Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif;	Telah melaksanakan penjagaan terhadap target dan realisasi perjanjian kinerja pegawai per triwulan namun perlu menunjukan pengukuran kualitas kinerja melalui penilaian SKP 1. Mohon melampirkan penilaian SKP pegawai tahun 2021 (sample dari SKP 2 periode tahun 2021 BKPSDM)	evaluasi realisasi kinerja berdasarkan SKP	*Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*
		3	Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;	Terlampir penilaian kinerja per triwulan seluruh pegawai disertai dialog kinerja dan analisis kesenjangan ketercapaian kinerja, namun penilaian kinerja masih secara manual belum melalui aplikasi e-kinerja	Pengukuran kinerja berdasarkan SKP	*Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*
		4	Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;	Telah melakukan analisis permasalahan kinerja pada setiap laporan realisasi kinerja triwulan serta menyusun strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun perlu menunjukan pelaksanaan strategi mengatasi masalah tersebut oleh pegawai 1. Apakah analisis permasalahan kinerja telah direkapitulasi berkala agar lebih terstruktur dalam penyusunan strategi mengatasi masalah kinerja ?	Menyusun analisis kesenjangan kinerja	*Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*

No	Aspek	Indikator		Catatan Sub-Aspek	Tindak lanjut	Sub Kegiatan
		5	Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir;	Hasil penilaian kinerja telah menjadi dasar dalam pengisian JPT secara terbuka, serta untuk pengisian JA dan Pengawas melalui pertimbangan tim penilai kinerja, namun belum menjadi salah satu aspek utama dalam penetapan talent pool 1. Aspek Kinerja kedepan dapat dijadikan salah satu sumbu utama pada proses akuisisi talenta dalam kebijakan manajemen talenta instansi 2. Penilaian kinerja telah digunakan untuk kebijakan internal pemberian reward kepada pegawai dengan kinerja tinggi dengan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi	menindaklanjuti kajian manajemen talenta	*1.Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* *2.* Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
		Catatan KASN untuk Aspek 5 : 1) Melaksanakan penilaian kinerja berkala sebulan sekali berdasarkan target SKP Bulanan yang disertai dialog kinerja; 2) Menyusun analisis permasalahan kinerja berdasarkan hasil analisis kesenjangan kinerja individu pegawai dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut; 3) Menjadikan hasil penilaian kinerja sebagai salah satu aspek utama dalam penetapan talent pool.				
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	1	Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;	Pemberian Tunjangan Kinerja telah memperhitungkan aspek penilaian kinerja dengan bobot lebih besar dari pada disiplin, namun belum menjadi pertimbangan utama berdasarkan realisasi target kinerja sesuai SKP 1. Telah menetapkan kebijakan internal tentang pembayaran tunjangan kinerja, dengan pembobotan penilaian kinerja (60%) lebih besar dari pada aspek disiplin (40%). 2. Bobot penilaian kinerja merupakan akumulasi dari capaian aktivitas harian dan perilaku kerja, belum berdasarkan realisasi	Mengembangkan aplikasi e kinerja berdasarkan capaian kinerja sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja SKP	*1.Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* *2. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai* *3.* Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

No	Aspek	Indikator		Catatan Sub-Aspek	Tindak lanjut	Sub Kegiatan
				target kinerja sesuai pada SKP		
		2	Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi;	Telah menetapkan kebijakan internal pada beberapa OPD untuk memberi penghargaan kepada pegawai berprestasi, namun perlu menunjukan pelaksanaannya secara periodik 1. Kedepan agar dapat disusun kebijakan pemberian penghargaan pegawai berprestasi yang diimplementasikan kepada seluruh OPD	penerapan kajian pemberian penghargaan ASN berprestasi	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
		3	Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;	Telah menetapkan kebijakan tentang kode etik dan kode perilaku dan membentuk Majelis Kode Etik dan menegakan peraturan tersebut secara konsisten 1. Dapat melaksanakan sosialisasi kebijakan kode etik, kode perilaku dan disiplin secara berkala kepada seluruh pegawai di berbagai media instansi (website, mading setiap OPD, apel pagi, dll)?	sosialisasi kebijakan kode etik, kode perilaku dan disiplin secara berkala kepada seluruh pegawai	1.Pembinaan Disiplin ASN 2. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 3. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
		4	Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;	Pengelolaan data disiplin kode etik dan kode perilaku dikelola dalam sistem informasi namun belum menunjukan telah terintegrasi dengan SAPK BKN	Pengelolaan data disiplin kode etik dan kode perilaku dikelola dalam sistem informasi yang terintegrasi dengan SAPK BKN	1.Pembinaan Disiplin ASN 2. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 3. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
		Catatan KASN untuk Aspek 6 : 1) Memperhitungkan hasil penilaian kinerja berdasarkan realisasi SKP Bulanan sebagai faktor utama dalam pemberian tunjangan kinerja; 2) Melaksanakan pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi secara terjadwal; 3) Mengintegrasikan data penegakan disiplin, kode etik, dan kode perilaku dengan sistem BKN secara dua arah.				
7	Perlindungan dan Pelayanan	1	Kebijakan perlindungan untuk pegawai	Telah menetapkan kebijakan pemberian perlindungan kepada	melaksanakan kegiatan pembekalan	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

No	Aspek	Indikator		Catatan Sub-Aspek	Tindak lanjut	Sub Kegiatan
			(diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional);	pegawai dan telah dilaksanakan secara terjadwal 1. Telah memberikan perlindungan kepada pegawai berupa program konseling 2. Telah memberikan program bantuan penanganan kematian untuk PNS, salah satunya dengan membentuk SK Tim penanganan 3. Pernah melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi pegawai yang tersandung kasus hukum sampling tahun 2018, Apakah Pemkot Balikpapan mengelola data rekapitulasi jumlah pegawai yang mengajukan perlindungan hukum dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir? 4. Apakah Pemkot Balikpapan telah kembali melaksanakan kegiatan pembekalan pra pensiun bagi pegawai yang memasuki BUP? 5. Seluruh bentuk perlindungan yang dimiliki instansi dapat ditetapkan melalui kebijakan internal, baik secara keseluruhan atau parsial per program	pra pensiun bagi pegawai yang memasuki BUP	
		2	Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;	Telah menyediakan sistem informasi untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		Catatan KASN untuk Aspek 7 : 1) Pelaksanaan pemberian perlindungan dan bantuan kepada pegawai ditetapkan dalam kebijakan internal dan dilaksanakan secara terjadwal.				

No	Aspek	Indikator		Catatan Sub-Aspek	Tindak lanjut	Sub Kegiatan
8	Sistem Informasi	1	Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	Telah memiliki sistem informasi kepegawaian online (SIMPEG), namun perlu menunjukan integrasi dua arah dengan sistem penilaian kinerja (e-kinerja) dan pembinaan pegawai (e- kompetensi)	mengembangakan sistem informasi kepegawaian online (SIMPEG) yang menunjukan integrasi dua arah dengan sistem penilaian kinerja (e-kinerja) dan pembinaan pegawai (e-kompetensi)	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		2	Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online;	Telah membangun e-kinerja untuk basis pembayaran TPP namun belum terintegrasi dengan pengembangan karir 1. Agar menunjukkan penggunaan e- kinerja untuk penilaian kinerja pegawai Demo e-kinerja	mengembangkan aplikasi e-kinerja dan pengembangan karir terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		3	Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;	Pelayanan administrasi kepegawaian seluruhnya dilakukan menggunakan e-office dan terhubung dengan sistem dashboard pimpinan		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		4	Pembangunan dan penggunaan asessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi;	Telah memanfaatkan assessment centre untuk pemetaan kompetensi pegawai setiap level jabatan secara berkala Demo e-kompetensi		1. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2. Pengelolaan Assessment Center

BAB
V
PENUTUP

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai perangkat daerah yang paling bertanggung jawab dalam peningkatan kinerja dan pembentukan sikap profesional aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga harus melaksanakan rencana aksi untuk meningkatkan profesionalitas ASN melalui manajemen ASN yang berbasis Sistem Merit yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran dan target kinerja.

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran dan target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan, maka pada tahun anggaran 2024. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan merencanakan program kerja yang terdiri dari 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub kegiatan yang terdapat pagu APBD. Program kerja tersebut akan menjadi acuan bagi setiap bidang-bidang dalam menjalankan rencana aksi pelaksanaan kegiatan dengan harapan dapat direalisasikan secara efektif dan efesien guna mendukung visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2024, semoga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun 2024 sesuai perencanaan program kerja dan menghasilkan outcome yang berkualitas.

Balikpapan, 22 Mei 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BALIKPAPAN

PURNOMO. M, S.Sos, MM

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Laily Fauzijah	Sekr. BKPSDM	
2	Asih M	Kasubag. Program dan Keuangan	

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 Inspektorat Kota Balikpapan.

Tantangan Inspektorat Kota Balikpapan untuk saat ini adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kota Balikpapan dalam rangka Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka Inspektorat Kota Balikpapan menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang sesuai dan selaras dengan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi rencana program dan kegiatan Inspektorat Kota Balikpapan pada tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

D. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini memuat Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Periode 2021-2026

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan

mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampiran Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Lampiran tabel Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
   Misal:
   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
   b. Pencapaian SDGs,
   c. Pengentasan kemiskinan,
   d. Pencapaian NSPK dan SPM,
   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
   f. Pengembangan daerah terisolir,
   g. Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Berisikan rencana kerja dan pagu pendanaan indikatif serta perkiraan pada tahun selanjutnya.

Bab V Inovasi Perangkat Daerah

Bab VI Penutup
Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.
   Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Periode 2021-2026

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2023, serta progress pencapaian kinerja dalam Renstra Periode 2021-2026 sehingga dapat teridentifikasi capaian Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 capaian realisasi program/kegiatan untuk fisik sebesar 92,69% dan keuangan sebesar 87,44% . Sedangkan untuk capaian realisasi fisik dan keuangan pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2023 diperkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2022, dapat dilihat capaian dari alokasi dana yang telah dianggarkan untuk 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan antara lain adalah :

1) Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Indikator progam: Peningkatan Kualitas Layanan Internal
   Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 84,50 dari target yang ditetapkan sebesar 82, terealisasi sebesar 103,5%

   Pada Program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu:

   1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      Indikator program: Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 14,08 dari target yang ditetapkan sebesar 17, terealisasi sebesar 82,82%

      Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
      a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      Indikator program: Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 14,08 dari target yang ditetapkan sebesar 17, terealisasi sebesar 82,82%

      Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
      a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Indikator program: Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 14,08 dari target yang ditetapkan sebesar 17, terealisasi sebesar 82,82%

   Pada kegiatan ini terdapat 5 (lima) sub kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Indikator program: Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 14,08 dari target yang ditetapkan sebesar 17, terealisasi sebesar 82,82%

   Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
   a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Indikator program: Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 14,08 dari target yang ditetapkan sebesar 17, terealisasi sebesar 82,82%

   Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
   a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
   b. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Indikator program: Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 14,08 dari target yang ditetapkan sebesar 17, terealisasi sebesar 82,82%

   Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
   Indikator program: Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85,24% dari target yang ditetapkan sebesar 83,33%, terealisasi sebesar 102,29%.

Pada Program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengawasan Internal
   Indikator program: Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan
   Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 37,61% dari target yang ditetapkan sebesar 41,67%, terealisasi sebesar 90,26%

   Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
   a. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2. Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
   Indikator program: Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan
   Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 47,62 dari target yang ditetapkan sebesar 41,67%, terealisasi sebesar 114,28%

   Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
   a. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
   b. Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah

3) Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Indikator program: Persentase terlaksananya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85% dari target yang ditetapkan sebesar 85%, terealisasi sebesar 100%

Pada Program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
   Indikator program: Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan
   Evaluasi hasil: : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 42,50% dari target yang ditetapkan sebesar 42,50%, terealisasi sebesar 100%

   Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
   a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan

2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
   Indikator program: Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan

Evaluasi hasil: : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 42,50% dari target yang ditetapkan sebesar 42,50%, terealisasi sebesar 100%

Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

b. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
d. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
e. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penegakan Integritas

Dari target sasaran kinerja untuk program kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2022 yaitu

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Inspektorat Kota Balikpapan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Deaerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daeraj s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
				Inspektorat									
6				Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6	01			Inspektorat Daerah									
6	01	02		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	436,65%		83,33%	85,24%	102,29%	85,33%	170,57%	39,06%
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan	432,50%		41,67%	37,61%	90,26%	85,50%	123,11%	28,46%
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan	407,50%		41,67%	37,61%	114,28%	80,50%	118,11%	28,98%
6	01	03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	375%		85%	85%	100%	63,33%	148,33%	39,55%
6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan	450%		42,50%	42,50%	100%	86,67%	129,17%	28,70%

1				2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan	300%		42,50%	42,50%	100%	40%	82,50%	27,50%
6	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Layanan Internal	430%		82%	84,50%	103,50%	84%	168,50%	39,18%
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	430%		17%	14,08%	82,82%	84%	96,90%	22,53%
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	430%		17%	14,08%	82,82%	84%	96,90%	22,53%
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	430%		17%	14,08%	82,82%	84%	96,90%	22,53%
6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	430%		17%	14,08%	82,82%	84%	96,90%	22,53%
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	430%		17%	14,08%	82,82%	84%	96,90%	22,53%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kota Balikpapan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Inspektorat merupakan unsur pembantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Balikpapan berfungsi sebagai :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan mengampu 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
2			Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	-	
3			Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Dengan berkembangnya peran Inspektorat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, maka terdapat permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain :

a. SDM yang dimiliki masih belum memadai, terutama dari segi kuantitas;
b. Banyaknya mandatori pengawasan yang harus dilakukan oleh APIP yang tidak sebanding dengan jumlah APIP sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.

Dalam upaya mencapai sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik guna mewujudkan Pemerintahan yang bersih bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga perlu ditentukan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Kota Balikpapan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Balikpapan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menentukan isu-isu strategis antara lain :

a. Dukungan *stakeholder* terkait peran Inspektorat Kota Balikpapan dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mengingat Tahun 2013 s.d 2021 Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan opini WTP dari BPK-RI, maka ini menjadi tantangan bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kota Balikpapan agar Pemerintah Kota Balikpapan tetap dapat mempertahankan opini WTP tersebut;
b. Lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, karena masih adanya temuan yang berulang dari hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK RI. Kondisi ini merupakan amanat atau tambahan bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang lebih efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance dan clean government*, tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah yang belum mampu diterapkan dengan baik.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Balikpapan pada tahun 2024 masuk pada prioritas RKPD Kota Balikpapan dengan penjelasan sebagaimana berikut :

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Balikpapan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	87,33%	1.715.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Balikpapan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	87,33%	1.715.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Balikpapan	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	86,50%	1.085.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Balikpapan	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	86,50%	1.085.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Balikpapan	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	81,50%	630.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Balikpapan	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	81,50%	630.000	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	75%	1.950.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	75%	1.950.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Balikpapan	Persentase kinerja perumusan regulasi daerah di bidang pengawasan yang telah	90%	168.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Balikpapan	Persentase kinerja perumusan regulasi daerah di bidang pengawasan yang telah	90%	168.000	

			dilaksanakan					dilaksanakan			
	Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Persentase kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	60%	1.782.000	Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Persentase kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	60%	1.782.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	86%	16.335.086	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	86%	16.335.086	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86%	10.643.292	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86%	10.643.292	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86%	1.572.650	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86%	1.572.650	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86%	1.009.757,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86%	1.009.757,1	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86%	897.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86%	897.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang	86%	1.103.523,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang	86%	1.103.523,1	

	Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah			Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86%	1.108.363,8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86%	1.108.363,8	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung dengan Misi ke 1 (satu), yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik” adalah sebagai berikut:

a. Reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien.
b. Membangun sistem pengawasan yang handal serta meningkatkan pengawasan fungsional internal pemerintah, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat.
c. Optimalisasi penyusunan APBD yang efektif dan efisien serta optimalisasi penerimaan daerah.
d. Optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah.
e. Optimalisasi perencanaan pembangunan untuk acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Tujuan adalah pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu. Perumusan tujuan harus spesifik, realistis, dapat menggambarkan fungsi layanan (sesuai tupoksi), serta mampu menjawab/memberikan solusi permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah.

Sebagai penjabaran misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, maka perumusan tujuan Perangkat Daerah disusun berdasarkan kriteria berikut :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi pembangunan
2. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah
3. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan
4. Dirumuskan dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Tujuan Inspektorat Kota Balikpapan yang hendak dicapai pada lima tahun ke depan (2021 – 2026) merupakan penjabaran dari misi pembangunan ke satu, yaitu: “mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik”.

Adapun rumusan tujuan Inspektorat adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Akuntabel.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dapat dilaksanakan dalam jangka menengah (lima tahun).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan sasaran Perangkat Daerah antara lain : keterkaitan dengan tujuan, tugas fungsi Perangkat Daerah, kelompok sasaran dan profil penyelenggaraan layanan.

Ditinjau dari cascading kinerja, maka penetapan sasaran kinerja berada pada level pimpinan Perangkat Daerah (eselon II) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikatornya disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Balikpapan
Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN DAN SASARAN
(1)	(2)	(3)	(5)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Akuntabel		Indikator Tujuan : Maturitas SPIP	Level 3
		Indikator Tujuan : Nilai SAKIP	75.54
	Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Indikator Sasaran : Kapabilitas APIP	Level 3
	Meningkatnya Nilai SAKIP	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi	7.42
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32.44

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan, 2023.

3.3 Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas Inspektorat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Administrasi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun kegiatan/sub kegiatan pada program tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
   - 1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
     - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
     - 1.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
     - 1.1.3 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
     - 1.1.4 Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
     - 1.1.5 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
   - 1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
     - 1.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
     - 1.2.2 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Administrasi
   - 2.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
     - 2.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
   - 2.2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
     - 2.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
     - 2.2.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
     - 2.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
     - 2.2.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - 3.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - 3.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - 3.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - 3.2.1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
     - 3.2.2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
   - 3.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - 3.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
     - 3.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - 3.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     - 3.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan
     - 3.3.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3.3.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.4. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

3.6.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

3.6.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.6.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.7.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3.7.2. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud

3.7.3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kelompok Sasaran dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas pada Inspektorat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023 yaitu :

- OPD di Lingkungan Pemkot Balikpapan Kota Balikpapan

Kelompok Sasaran dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang pada Inspektorat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023 yaitu :

- PNS Inspektorat Kota Balikpapan
- Inspektorat Kota Balikpapan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Inspektorat Kota Balikpapan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					INSPEKTORAT								20,000,086,000					19,553,084,394.00
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								20,000,086,000					19,553,084,394.00
6	01				INSPEKTORAT DAERAH								20,000,086,000					19,553,084,394.00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								1,715,000,000					911,510,487.00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								1,085,000,000					116,981,127.00
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
						Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87,33 %	53 Laporan	86,50 %	425,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	53 Laporan	0.00
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													

						Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87,33 %	4 Dokumen	86,50 %	660,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	116,981,127.00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								630,000,000					794,529,360.00
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													
						Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87,33 %	3 Laporan	81,5%	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	192,903,040.00
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													
						Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87,33 %	13 Laporan	81,5%	555,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	13 Laporan	601,626,320.00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								1,950,000,000					1,033,145,646.00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								168,000,000					74,612,296.00
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan													

						Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75%	2 Rekomendasi	90%	168,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	74,612,296.00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi								1,782,000,000					958,533,350.00
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah													
						Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75%	36 perangkat daerah	60%	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 perangkat daerah	310,609,050.00
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
						Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75%	36 perangkat daerah	60%	87,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 perangkat daerah	96,361,550.00
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
						Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75%	3 Kegiatan	60%	490,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pembera ntasan Korupsi	3 Kegiatan	49,326,750.00

6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													
						Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75%	20 perangkat daerah	60%	205,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20 perangkat daerah	502,236,000.00
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								16,335,086,000					17,608,428,261.00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,643,292,000					12,268,417,761.00
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	46 Orang/bulan	86	10,643,292,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	12,268,417,761.00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1,572,650,000					1,844,766,000.00
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	4 Paket	86	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	0.00
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	30 Orang	86	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	843,321,600.00
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	48 Orang	86	772,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	1,001,444,400.00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,009,757,100					1,299,771,000.00
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	2 Paket	86	20,371,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15,147,000.00
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	3 Paket	86	87,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengk apan Kantor yang Disediakan	3 Paket	511,830,000.00
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	7 Paket	86	261,335,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	270,567,000.00
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	2 Paket	86	138,050,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	139,887,000.00
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	10 Dokumen	86	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	0.00
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86	37 Laporan	86	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Laporan	362,340,000.00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								897,500,000					0.00
6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	2 Unit	86	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0.00
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	5 Unit	86	297,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0.00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,103,523,100					1,135,876,500.00
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	4 Laporan	86	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4,158,000.00
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	12 Laporan	86	192,950,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	275,220,000.00
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	12 Laporan	86	904,572,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	856,498,500.00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,108,363,800					1,059,597,000.00
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	33 Unit	86	716,531,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	703,890,000.00
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	50 Unit	86	199,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	144,936,000.00
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	86	1 Unit	86	192,182,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	210,771,000
												TOTAL	20,000,086,000					19,553,084,394

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2024 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2021-2026. Dalam Rencana Kerja Tahun 2024 ini dijelaskan langkah untuk mencapai target-target yang ingin dicapai, penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Rencana Kerja tahun 2024 ini merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan bagi seluruh APIP di Inspektorat Kota Balikpapan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2024. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Keberhasilan kegiatan pengawasan dapat mendukung tercapainya Visi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yaitu , “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman” dengan misi ke 1 (satu), yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik”.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah Kota Balikpapan juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yangtelah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya.

Balikpapan, Agustus 2023

INSPEKTUR
KOTA BALIKPAPAN

SILVIA RAHMADINA

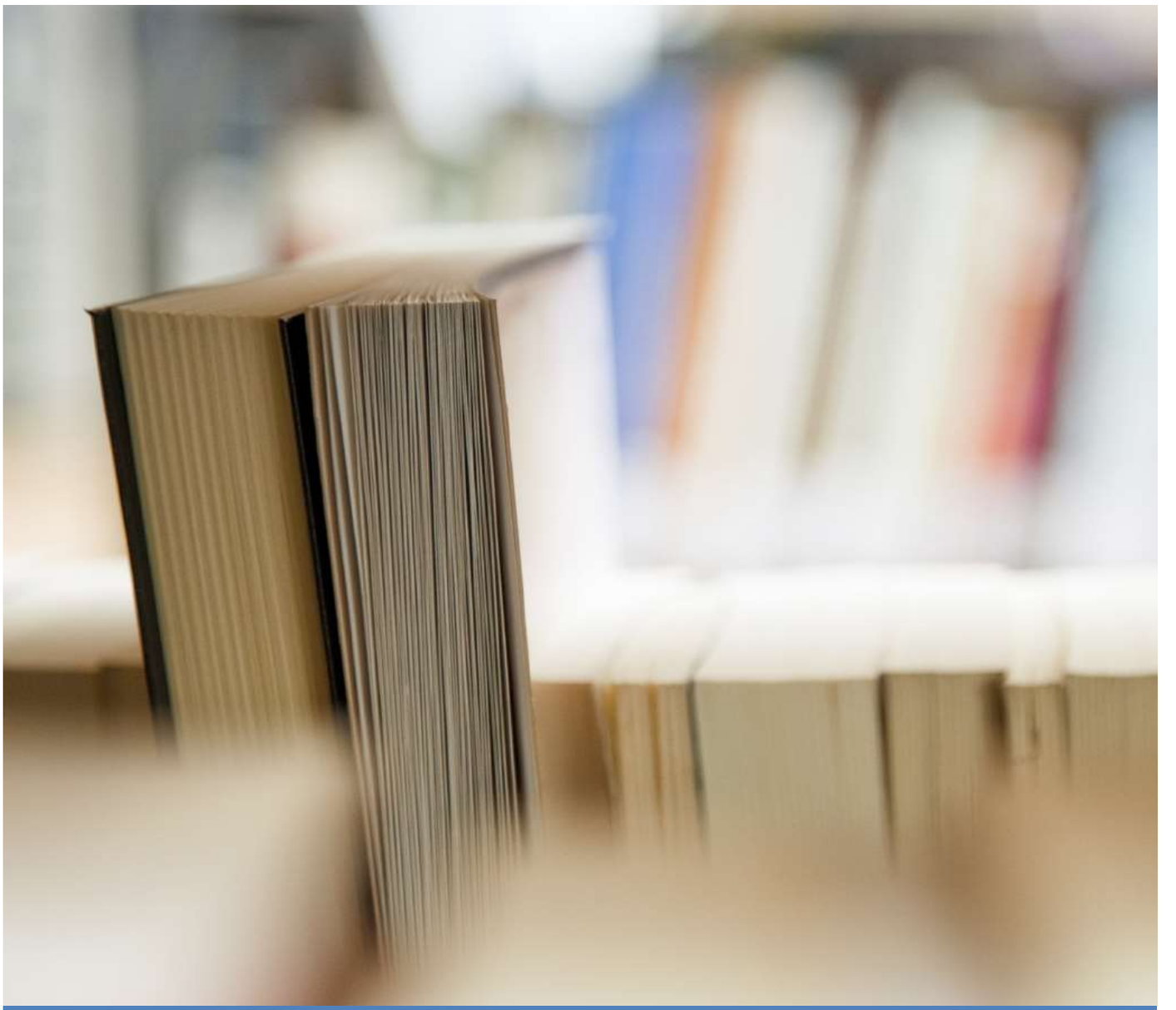

RENJA 2024

Kecamatan Balikpapan Barat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Barat merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Kecamatan Balikpapan Barat dalam periode Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Barat disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dimana program dan kegiatan dalam Renja Perangkat daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
7. Perwali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Barat disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan perubahan tahunan Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2023;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Perubahan Balikpapan Barat Tahun 2023 meliputi:

BAB	I	PENDAHULUAN. Berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
BAB	II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU. Berisi tentang: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH. Berisi tentang: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD, serta Program dan Kegiatan.
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. Berisi tentang: Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 beserta kerangka pendanaan berdasarkan Renstra 2023.
BAB	IV	PENUTUP Berisi tentang: Kesimpulan, Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT SAMPAI DENGAN JULI TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Barat Sampai Dengan Juli Tahun 2023

Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Evaluasi Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Barat Tahun Lalu mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021-2026, memiliki tujuan yang selaras dengan RPJMD Tahun 2021-2026 yakni*" Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik, dengan Indikator Tujuan adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat* ***". Sasaran Pertama, "***Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban umum", sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan. ***Sasaran Kedua****, "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan*", yang akan diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Balikpapan Barat.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kecamatan Balikpapan Barat pada tahun 2023 melaksanakan 1 (satu) urusan, 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Balikpapan Barat melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp **22.889.348.052,00** (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Lima Puluh Dua Rupiah). Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp **22,114,850,233** (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Adapun Realisasi Anggaran s/d agustus 2023 sebesar Rp **9.921.592.104,00** (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Seratus Empat Rupiah).

Pengukuran dan evaluasi kinerja Kecamatan Balikpapan Barat dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Adapun tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Kecamatan Balikpapan Barat dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja PD sampai dengan Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
									I		II		III		IV												
1	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**91,979,766,687.00**			**70.00**	**14,970,224,812.00**	**-**		**0%**	**4,900,495,089.00**	**-**				**0%**	**6,303,168,675.00**	**0%**	**42%**	**-**	**6,303,168,675.00**	**0%**	**7%**	**KEC. BARAT**	**Terdapat perbedaan indikator dan juga sudah ada pergantian Renstra sehingga kolom 6 tidak bisa diisi**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**15,000,000.00**			**68.77**	**-**	**-**	**-**	**69.97**	**-**	**-**	**-**			**62.25**	**-**	**91%**	**0%**	**62.25**	**-**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	**Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2023.**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen				1	-	1	-		-					1	-	100%	0%	**1**	**-**	0%	**-**	KEC. BARAT	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2023

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	Dokumen				1	-	1	-		-					1	-	100%	0%	**1**	**-**	0%	**-**	KEC. BARAT	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2023
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Renstra dan Renja	Dokumen				2	-	-	-	-	-	-		2		2	-	100%	0%	**2**	**-**	0%	**-**	KEC. BARAT	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2023
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Poin**	**60,561,219,920.00**			**82**	**10,906,109,364.00**	**-**	**-**	**-**	**4,900,495,089.00**	**-**	**-**		**-**	**-**	**4,900,495,089.00**	**0%**	**45%**	**-**	**4,900,495,089.00**	**0%**	**8%**	**KEC. BARAT**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Dokumen				28	10,906,109,364.00	6		10	4,900,495,089.00	6		6		28	4,900,495,089.00	100%	45%	**28**	**4,900,495,089.00**	-	**-**	KEC. BARAT	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**IKM Layana Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Poin**	**327,500,000.00**			**70**	**73,100,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	-	**-**	**0%**	**0%**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	**Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2023.**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Orang				-	73,100,000.00	-	-	-	-		-			-	-	0%	0%	**-**	**-**	0%	0%	KEC. BARAT	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2023
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**8,307,731,940.00**			**70**	**1,297,239,100.00**	**-**	**-**	**-**	**432,958,227.00**	**-**	**-**		**-**	**-**	**432,958,227.00**	**0%**	**33%**	**-**	**432,958,227.00**	**0%**	**5%**	**KEC. BARAT**	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen/penerangan Bangunan Kantor	Jenis				8	26,955,800.00	8			26,047,000.00		-			8	26,047,000.00	100%	97%	**8**	**26,047,000.00**	0%	0%	KEC. BARAT	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis				6	262,744,000.00	-	-	-	49,909,800.00	5		1		6	49,909,800.00	100%	19%	**6**	**49,909,800.00**	0%	0%	KEC. BARAT	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Jenis				55	430,796,600.00			55	132,291,600.00					55	132,291,600.00	100%	31%	**55**	**132,291,600.00**	0%	0%	KEC. BARAT	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis				12	74,990,700.00	-	-	12	3,369,400.00					12	3,369,400.00	100%	4%	**12**	**3,369,400.00**	0%	0%	KEC. BARAT	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	Eksemplar				2,015	153,452,000.00	504		504	44,182,000.00					1,008	44,182,000.00	50%	29%	**1,008**	**44,182,000.00**	0%	0%	KEC. BARAT	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi untuk tamu	Kotak				150	6,300,000.00	-	-		-	42		108		150	-	100%	0%	**150**	**-**	0%	0%	KEC. BARAT	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Orang				55	342,000,000.00	2		34	177,158,427.00	7				43	177,158,427.00	78%	52%	**43**	**177,158,427.00**	0%	0%	KEC. BARAT	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**3,646,200,000.00**			**70**	**68,800,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit				-	68,800,000.00	-	-	-	-	-	-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	KEC. BARAT	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2023
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Derah**	**Poin**	**12,861,783,255.00**			**70**	**1,905,136,348.00**	**-**	**-**	**-**	**776,924,859.00**	**-**	**-**		**-**	**-**	**776,924,859.00**	**0%**	**41%**	**-**	**776,924,859.00**	**0%**	**6%**	**KEC. BARAT**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen surat	dokumen				50	1,200,000.00				-		-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	KEC. BARAT	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	rekening				35	349,573,000.00	-		20	145,436,242.00	-				20	145,436,242.00	57%	42%	**20**	**145,436,242.00**	0%	0%	KEC. BARAT	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Pembayaran Honor dalam satu tahun	Dokumen				27	1,554,363,348.00	6		9	631,488,617.00					15	631,488,617.00	56%	41%	**15**	**631,488,617.00**	0%	0%	KEC. BARAT	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**6,260,331,572.00**			**70**	**719,840,000.00**	**-**	**-**	**-**	**192,790,500.00**	**-**	**-**		**-**	**-**	**192,790,500.00**	**0%**	**27%**	**-**	**192,790,500.00**	**0%**	**3%**	**KEC. BARAT**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara	Unit				30	520,300,000.00	7		7	179,757,351.00	8				22	179,757,351.00	73%	35%	**22**	**179,757,351.00**	0%	0%	KEC. BARAT	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	Unit				25	25,400,000.00	6		6	2,310,549.00	13				25	2,310,549.00	100%	9%	**25**	**2,310,549.00**	0%	0%	KEC. BARAT	
	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jenis				9	114,140,000.00	9		-	10,722,600.00	-				9	10,722,600.00	100%	9%	**9**	**10,722,600.00**	0%	0%	KEC. BARAT	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit				9	60,000,000.00	-	-	-	-	-	-	9		9	-	100%	0%	**9**	**-**	0%	0%	KEC. BARAT	

2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**%**	**4,666,646,307.00**			**100**	**278,691,450.00**		**-**	**-**	**181,659,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35,850,475.00**	**0%**	**13%**	**-**	**35,850,475.00**	**0%**	**1%**	**KEC. BARAT**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentasae rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti**	**%**	**3,442,973,595.00**			**100**	**188,704,000.00**	**-**	**-**	**-**	**13,975,400.00**		**-**	**100**	**-**	**100**	**8,978,900.00**	**100%**	**5%**	**100**	**8,978,900.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan				62	141,421,000.00			28	8,978,900.00	31		**3**		62	8,978,900.00	100%	6%	62	8,978,900.00	0%	0%	KEC. BARAT	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan				1	47,283,000.00	1		-	4,996,500.00	-				1	-	100%	0%	1	-	0%			

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Persentase Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan yang ada dikecamatan yang berkualitas**	**%**	**611,836,356.00**			**100**	**19,987,700.00**	**-**	**-**	**-**	**6,365,500.00**	**-**	**-**	**100**	**-**	**100**	**6,365,500.00**	**100%**	**32%**	**100**	**6,365,500.00**	**0%**	**1%**	**KEC. BARAT**	**Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2023**
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Koordiansi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kegiatan				4	9,987,700.00	4	-	-	6,365,500.00	-	-			4	6,365,500.00	100%	64%	4	6,365,500.00	0%	0%	KEC. BARAT	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis				2	10,000,000.00	1	-	1	-	-				2	-	100%	0%	2	-	0%	0%	KEC. BARAT	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kegiatan	**611,836,356.00**			**100**	**69,999,750.00**	**-**	**-**	**-**	**161,318,500.00**	**-**	**-**	**100**	**-**	**100**	**20,506,075.00**	**100%**	**29%**	**100**	**20,506,075.00**	**0%**	**3%**	**KEC. BARAT**	**Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2023**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan				100	69,999,750.00		-		20,506,075.00		-		-		20,506,075.00	0%	29%	-	20,506,075.00	0%	0%	KEC. BARAT	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Persen**	**26,104,235,329.00**			**25.35**	**904,419,290.00**	**-**	**-**	**-**	**133,966,250.00**		**-**	**23.37**	**1,130,000.00**	**23.37**	**107,744,000.00**	**92%**	**12%**	**23**	**107,744,000.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam mebangun kelurahan**	**%**	**7,751,360,470.00**			**100**	**92,499,950.00**	**-**	**-**	**-**	**27,352,250.00**		**-**			**-**		**0%**	**0%**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tingkat Kecamatan)	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kegiatan				2	19,999,950.00	2		-	19,725,250.00					2	19,725,250.00	100%	99%	2	19,725,250.00	0%	0%	KEC. BARAT	
Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	Dokumen				9	72,500,000.00	5		1	7,627,000.00	3				9	7,627,000.00	100%	11%	9	7,627,000.00	0%	0%	KEC. BARAT	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**Persen**	**18,352,874,859.00**			**100**	**811,919,340.00**	**-**	**-**	**-**	**106,614,000.00**		**-**	**100**	**1,130,000.00**	**100**	**107,744,000.00**	**100%**	**13%**	**100**	**107,744,000.00**	**0%**	**1%**	**KEC. BARAT**	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Lembaga				1	588,964,050.00	1		-	43,129,500.00	-				1	43,129,500.00	100%	7%	1	43,129,500.00	0%	0%	KEC. BARAT	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi masyarakat terlaksana	Kegiatan				2	196,999,290.00	1		1	49,588,300.00					2	49,588,300.00	100%	25%	2	49,588,300.00	0%	0%	KEC. BARAT	realisasi diatas target karena adanya penambahan pagu dari Pokir Dewan
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	Kegiatan				2	25,956,000.00	1		1	13,896,200.00	-	-		1,130,000.00	2	15,026,200.00	100%	58%	2	15,026,200.00	0%	0%	KEC. BARAT	

3.a	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Persen**				**25.35**	**1,012,874,200.00**	**-**	**-**	**-**	**560,915,602.00**	**-**	**-**	**21.78**	**-**	**21.78**	**560,915,602.00**	**86%**	**55%**	**22**	**560,915,602.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
3.a	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Baru Ilir)**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam mebangun kelurahan**	**%**				**100**	**341,418,000.00**	**-**	**-**		**294,518,000.00**	**-**	**-**	**100**	**-**	**100**	**294,518,000.00**	**100%**	**86%**	**100**	**294,518,000.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rencana Pembanguinan Kelurahan	Kegiatan				1	8,168,000.00	1		-	8,168,000.00	-	-			1	8,168,000.00	100%	100%	**1**	8,168,000.00	0%	0%	KEC. BARAT	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan Sarana dan Prasarana Keluahan Gunung Sari Ulu	Usulan				4	333,250,000.00	-	-		286,350,000.00	4	-			4	286,350,000.00	100%	86%	**4**	286,350,000.00	0%	0%	KEC. BARAT	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Baru Ilir)	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**Persen**				**100**	**671,456,200.00**	**-**	**-**	**-**	**266,397,602.00**	**-**	**-**	**100**	**-**	**100**	**266,397,602.00**	**100%**	**40%**	**100**	**266,397,602.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Baru Ilir)	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Lembaga				2	671,456,200.00	2		-	266,397,602.00	-				2	266,397,602.00	100%	40%	**2**	266,397,602.00	0%	0%	KEC. BARAT	

3.b	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Persen**				**25.35**	**1,023,701,450.00**	**-**	**9,422,100.00**	**-**	**276,362,648.00**	**-**	**-**	**35.49**	**-**	**25.00**	**285,784,748.00**	**99%**	**28%**	**25**	**285,784,748.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Baru Tengah)	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam mebangun kelurahan**	**%**				**100**	**434,422,100.00**	**-**	**9,422,100.00**		**99,600,000.00**	**0**	**-**	**100**		**100**	**109,022,100.00**	**100%**	**25%**	**100**	**9,422,100.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Kegiatan				1	9,422,100.00	1	9,422,100.00	-		-	-			1	9,422,100.00	100%	100%	**1**	9,422,100.00	0%	0%	KEC. BARAT	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan Gunung Sari Ilir	Usulan				4	425,000,000.00	-	-	-	99,600,000.00	4	-		-	4	99,600,000.00	100%	23%	**4**	99,600,000.00	0%	0%	KEC. BARAT	realisasi diatas target karena adanya penambahan pagu dari Pokir Dewan
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Baru Tengah)	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**Persen**				**100**	**589,279,350.00**	**-**	**-**	**-**	**176,762,648.00**	**-**	**-**	**100**	**-**	**100**	**176,762,648.00**	**100%**	**30%**	**100**	**176,762,648.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan di Kelurahan	Lembaga				2	589,279,350.00	2		-	176,762,648.00	-				2	176,762,648.00	100%	30%	**2**	176,762,648.00	0%	0%	KEC. BARAT	

3.c	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Persen**				**25.35**	**1,039,788,800.00**	**-**	**-**	**-**	**334,017,786.00**	**-**	**-**	**13.18**	**-**	**13.18**	**334,017,786.00**	**52%**	**32%**	**13**	**334,017,786.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Baru Ulu)	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam mebangun kelurahan**	**%**				**100**	**460,335,050.00**	**-**	**-**	**-**	**106,340,050.00**	**0**	**-**	**100**	**-**	**100**	**106,340,050.00**	**100%**	**23%**	**100**	**106,340,050.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Kegiatan				1	6,740,050.00	1		-	6,740,050.00	-	-			1	6,740,050.00	100%	100%	**1**	6,740,050.00	0%	0%	KEC. BARAT	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan	Usulan				6	439,995,000.00		-	-	99,600,000.00	6				6	99,600,000.00	100%	23%	**6**	99,600,000.00	0%	0%	KEC. BARAT	Sub Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
	Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Usulan				1	13,600,000.00		-	-	-	1				1	-	100%	0%	**1**	-	0%	0%	KEC. BARAT	

	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Baru Ulu)	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**Persen**				**100**	**579,453,750.00**	**100**	**-**	**-**	**227,677,736.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**227,677,736.00**	**100%**	**39%**	**100**	**227,677,736.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Lembaga				2	579,453,750.00	2		-	227,677,736.00					2	227,677,736.00	100%	39%	**2**	227,677,736.00	0%	0%	KEC. BARAT	
3.d	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Persen**				**25.35**	**821,702,100.00**	**-**	**7,025,000.00**		**232,087,117.00**		**-**	**14.20**	**-**	14.20	**118,010,000.00**	**56%**	**14%**	**14**	**118,010,000.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Margasari)	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam mebangun kelurahan**	**%**				**100**	**426,385,000.00**	**-**	**-**	**-**	**110,985,000.00**		**-**	**100**	**-**	**100**	**110,985,000.00**	**100%**	**26%**	**100**	**110,985,000.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	**Target Kinerja akan tercapai pada TW IV**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Kegiatan				1	11,385,000.00	1		-	11,385,000.00	-	-			1	11,385,000.00	100%	100%	**1**	11,385,000.00	0%	0%	KEC. BARAT	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan Sarana dan Prasarana Keluahan Karang Jati	Usulan				2	400,000,000.00	-	-	1	99,600,000.00		-	1.00	-	2	99,600,000.00	100%	25%	**2**	99,600,000.00	0%	0%	KEC. BARAT	TargetKinerja akan tercapai pada TW IV

	Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Usulan				1	15,000,000.00	-	-	-	-	1				1	-	100%	0%	**1**	-	0%	0%	KEC. BARAT	TargetKinerja akan tercapai pada TW IV
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Margasari)	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**Persen**				**100**	**395,317,100.00**	**-**	**7,025,000.00**	**-**	**121,102,117.00**		**-**	**100**	**-**	**100**	**7,025,000.00**	**100%**	**2%**	**100**	**7,025,000.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Margasari	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Lembaga				2	388,292,100.00		-		121,102,117.00					-	121,102,117.00	0%	31%	**-**	121,102,117.00	0%	0%		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Margasari	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Lembaga				2	7,025,000.00	2	7,025,000.00	-	-					2	7,025,000.00	100%	100%	**2**	7,025,000.00	0%	0%	KEC. BARAT	
3.e	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Persen**				**25.35**	**1,860,869,550.00**	**-**	**-**	**-**	**182,663,419.00**		**-**	**24.94**	**-**	24.94	**182,663,419.00**	**98%**	**10%**	**25**	**182,663,419.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Margo Mulyo)	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam mebangun kelurahan**	**%**				**100**	**1,299,500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**9,300,000.00**		**-**	**100**	**-**	100	**9,300,000.00**	**100%**	**1%**	**100**	**9,300,000.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	**Target Kinerja akan tercapai pada TW IV**

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Kegiatan				1	9,500,000.00	1		-	9,300,000.00	-	-			1	9,300,000.00	100%	98%	**1**	9,300,000.00	0%	0%	KEC. BARAT	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan mekar sari	usulan				4	1,230,000,000.00	-	-	4	-					4	-	100%	0%	**4**	-	0%	0%	KEC. BARAT	
	Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	usulan				1	60,000,000.00	-	-	-	-		-	1		1	-	100%	0%	**1**	-	0%	0%	KEC. BARAT	TargetKinerja akan tercapai pada TW IV
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Margo Mulyo)	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**Persen**				**100**	**561,369,550.00**	**-**	**-**	**-**	**173,363,419.00**		**-**	**100**	**-**	100	**173,363,419.00**	**100%**	**31%**	**100**	**173,363,419.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Lembaga				2	561,369,550.00	2		-	173,363,419.00					2	173,363,419.00	100%	31%	**2**	173,363,419.00	0%	0%	KEC. BARAT	
3.f	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Persen**				**25.35**	**608,747,000.00**	**-**	**-**	**-**	**137,425,702.00**		**-**	**30.64**	**-**	25.10	**137,425,702.00**	**99%**	**23%**	**25**	**137,425,702.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kariangau)	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam mebangun kelurahan**	**%**				**100**	**367,998,800.00**	**-**	**-**		**49,911,800.00**		**-**	**100**	**-**	100	**49,911,800.00**	**100%**	**14%**	**100**	**49,911,800.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	**Target Kinerja akan tercapai pada TW IV**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rencana Pembanguinan Kelurahan	Kegiatan				1	6,998,800.00	1		-	6,849,300.00	-	-			1	6,849,300.00	100%	98%	**1**	6,849,300.00	0%	0%	KEC. BARAT	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Rejo	Usulan				5	293,500,000.00	-	-	-	43,062,500.00		-	5.00		5	43,062,500.00	100%	15%	**5**	43,062,500.00	0%	0%	KEC. BARAT	TargetKinerja akan tercapai pada TW IV
	Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Usulan				2	67,500,000.00	-	-	-	-		-	2.00		2	-	100%	0%	**2**	-	0%	0%	KEC. BARAT	TargetKinerja akan tercapai pada TW IV
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kariangau)	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**Persen**				**100**	**240,748,200.00**	**-**	**-**	**-**	**87,513,902.00**		**-**	**100**		100	**87,513,902.00**	**100%**	**36%**	**100**	**87,513,902.00**	**0%**	**0%**	**KEC. BARAT**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Kariangau	Lembaga				2	240,748,200.00	2			87,513,902.00					2	87,513,902.00	100%	36%	**2**	87,513,902.00	0%	0%	KEC. BARAT	

4	**PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordiansi dengan instansi vertikal dalam upaya penyelenggaraan trantibum di keamatan yang optimal**	**Persen**	**1,474,283,405.00**			**100**	**368,329,400.00**	**100**	**-**	**-**	**40,000,000.00**		**-**			100	**40,000,000.00**	**100%**	**11%**	**-**	**40,000,000.00**	**0%**	**3%**	**KEC. BARAT**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persenatase rekomendasi hasil koordinasi yang dilakasanakan o;eh kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum**	**%**	**1,474,283,405.00**			**100**	**368,329,400.00**	**-**	**-**		**40,000,000.00**		**-**			-	**40,000,000.00**	**0%**	**11%**	**-**	**40,000,000.00**	**0%**	**3%**	**KEC. BARAT**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen pembayaran Honor Petugas ketertiban dan keamanan umum	Dokumen				12	368,329,400.00	3		3	40,000,000.00	3		3.00		12	40,000,000.00	100%		**12**		0%	0%		realisasi diatas target karena adanya penambahan pagu dari Pokir Dewan
		Kegiatan sinergitas Trantibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kegiatan				12		3		3		3		3.00		12		100%	11%	**12**	40,000,000.00	0%	0%	KEC. BARAT	
JUMLAH								**22,889,348,052.00**		**16,447,100.00**		**6,979,593,013.00**		**-**		**1,130,000.00**		**8,105,580,407.00**									

Rata-rata capaian kinerja (%)	79.85 %	29.49 %			-	-		
Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Rendah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN	85.72 %	33.26 %			0.00	0.00		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN	Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN	67.62 %	23.55 %			0.00	1%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	48.05 %	23.99 %			0.00	0.11		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja	1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan 2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan Kecamatan Balikpapan Tengah dalam mencapai Sasaran 3. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku
Faktor Penghambat pencapaian kinerja	

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	

Disusun di:

Balikpapan, Juli 2023

Camat Balikpapan Barat

Kota Balikpapan

M ARIF FADILLAH

Dievaluasi di:

Balikpapan, Juli 2023

Kepala Bappeda Litbang

Kota Balikpapan

MURNI

Sumber : Form e81 Evaluasi Renja Per Agustus 2023 (data diolah)

Adapun hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi capaiannya sebesar 68,56 Poin dengan realisasi keuangan sebesar *83,21%* dalam kategori Tinggi pada **Renja 2022** sedangkan **realisasi Renstra 2016-2021** yaitu *98%* dalam Ketegori *Sangat Tinggi* dan realisasi keuangan *93,43%* dalam Kategori Sangat Tinggi. Tingkat capaian ***Sub Kegiatan*** **berdasarkan Renja 2021** sebesar *110,40%* dalam kategori *Sangat Tinggi* dan persentase realisasi keuangan *110,40%* dalam kategori *Sangat Tinggi*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh Sub Kegiatan sebesar *77,39%* dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *114,67%* dalam kategori Sangat *Tinggi.* Tingkat capaian ***Kegiatan*** dalam seluruh program **berdasarkan Renja 2021** sebesar *32,93%* dalam kategori *Sangat Rendah* dan persentase realisasi keuangan *64,74%* dalam kategori *Rendah.*Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh kegiatan sebesar *72,00%* dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *106,36%* dalam kategori Sangat *Tinggi.*

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik realisasi capaiannya sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar *86,44%* dalam kategori Tinggi pada **Renja 2021** sedangkan **realisasi Renstra 2016-2021** yaitu *100%* dalam Ketegori Sangat Tinggi dan realisasi keuangan *102,57%* dalam Kategori Sangat Tinggi. Tingkat capaian ***Sub Kegiatan*** **berdasarkan Renja 2021** sebesar *78,31%* dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan *68,74%* dalam kategori *Sedang*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh Sub Kegiatan sebesar *94,50%* dalam kategori *Sangat Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *93,21%* dalam kategori Sangat *Tinggi.* Tingkat capaian ***Kegiatan*** dalam seluruh program **berdasarkan Renja 2021** sebesar *73,33%* dalam kategori *Sedang* dan persentase realisasi keuangan *73,36%* dalam kategori *Sedang.*Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh kegiatan sebesar *146,11%* dalam kategori *Sangat Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *92,60%* dalam kategori *Tinggi.**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan realisasi capaiannya sebesar 10% dengan realisasi

keuangan sebesar *71,08%* dalam kategori *Sedang* pada **Renja 2021** sedangkan **realisasi Renstra 2016-2021** yaitu *100%* dalam Ketegori Sangat Tinggi dan realisasi keuangan *62,21%* dalam Kategori *Sedang*. Tingkat capaian ***Sub Kegiatan*** **berdasarkan Renja 2021** sebesar *78,56%* dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan *67,11%* dalam kategori *Sedang*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh Sub Kegiatan sebesar *69,42%* dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *72,03%* dalam kategori *Tinggi.* Tingkat capaian ***Kegiatan*** dalam seluruh program **berdasarkan Renja 2021** sebesar *80%* dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan *82,03%* dalam kategori *Tinggi.*Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh kegiatan sebesar *139,86%* dalam kategori *Sangat Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *78,04%* dalam kategori *Tinggi.*

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi capaiannya sebesar 89% dengan realisasi keuangan sebesar *11,13%* dalam kategori *Sangat Rendah* pada **Renja 2021** sedangkan **realisasi Renstra 2016-2021** yaitu *89%* dalam Ketegori *Tinggi* dan realisasi keuangan *50,28%* dalam Kategori *Sedang*. Tingkat capaian ***Sub Kegiatan*** **berdasarkan Renja 2021** sebesar *11,13%* dalam kategori *Sangat Rendah* dan persentase realisasi keuangan *11,13%* dalam kategori *Sangat Rendah*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh **Sub Kegiatan** sebesar *50,19%* dalam kategori *Sangat Rendah* dan persentase realisasi keuangan sebesar *50,28%* dalam kategori *Sangat Rendah.* Tingkat capaian ***Kegiatan*** dalam seluruh program **berdasarkan Renja 2021** sebesar *20%* dalam kategori *Sangat Rendah* dan persentase realisasi keuangan *11,13%* dalam kategori *Sangat Rendah.*Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh kegiatan sebesar *68%* dalam kategori *Sedang* dan persentase realisasi keuangan sebesar *50%* dalam kategori *Sangat Rendah.*

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Barat dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2023 berdasarkan

Renstra Kota Balikpapan 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Evaluasi Renja Tahun 2021 Beserta Predikat Berdasarkan Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2016-2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV										
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah**	**97,94 %**	**Sangat Tinggi/Berhasil**	**93,43%**	**Sangat Tinggi/Berhasil**	70	Poin	80.787.965.192		63.208.355.083	70 Poin		14.745.022.734		2.395.850.628		5.973.430.395		8.825.325.525	68,56 %	12.269.107.870	68,56	98,00%	12.269.107.870	83,21 %	68,56	75.477.462.953	98 %	93,43 %	Kec.Balikpapan Barat
2		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Capaian Kinerja (RKPD)**	**88,00 %**	**Tinggi/Berhasil**	**76,02%**	**Tinggi/Berhasil**	100%		230.000.000	68%		157.000.000	20%		29.999.450		0		6.855.950		15.476.450	20,00 %	17.856.450	20%	20%	17.856.450	59,52 %	88%	174.856.450	88,00 %	76,02 %	Kec.Balikpapan Barat
3		Penyusunan Dokume	Jumlah dokumen	80,97 %	Tinggi/Berhasil	117,96%	Sangat Tinggi	2	Doku	30.000.000	1	Dokumen	23.000.000	1	Dokumen	19.999.550	0	0	1	6.855.950	1	12.389.450	1	12.389.450	1	61,95%	12.389.450	61,95 %	2	35.3	80,97 %	117,96%	Kec.Balikpap

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		n Perencanaan Perangkat Daerah	perencanaan 5 tahunan				/Berhasil		men																				89.450			an Barat
4			Jumlah dokumen perencanaan tahunan					7	Dokumen	20.000.000	5	Dokumen	14.000.000	1	Dokumen	0																	Kec.Balikpapan Barat
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan	92,45 %	Sangat Tinggi/Berhasil	69,70%	Sedang/Berhasil	6	Dokumen	180.000.000	5	Dokumen	120.000.000	1	Dokumen	9.999.900	0	0	0	0	1	3.087.000	1	5.467.000	1	54,67%	5.467.000	54,67 %	6	125.467.000	92,45 %	69,70 %	Kec.Balikpapan Barat
6			Jumlah Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKJIP)					7	Dokumen	180.000.000	6	Dokumen	154.000.000	1	Dokumen	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0,00%	6	154.000.000	85,71 %	85,56 %	Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
			(Dokumen)																														
7		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**103,00 %**	**Sangat Tinggi/Berhasil**	**96,38%**	**Sangat Tinggi/Berhasil**	-	Poin	64.775.560.000	-	Poin	53.493.467.000	-	Poin	10.559.614.000		2.117.036.207		4.767.029.377		6.886.037.269	68,56	8.935.005.431	68,56	69%	8.935.005.431	84,61 %	68,56	62.428.472.431	69 %	96,38 %	Kec.Balikpapan Barat
8		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya gaji ASN Kecamatan Balikpapan Barat	107,69 %	Sangat Tinggi/Berhasil			24	Dokumen	64.775.560.000	14	Dokumen	53.493.467.000	14	Dokumen	10.559.614.000	3	2.117.036.207	6	4.767.029.377	9	6.886.037.269	12	8.935.005.431	12	84,61 %	8.935.005.431	84,61 %	26	62.428.472.431	107,69 %	96,38 %	Kec.Balikpapan Barat
9		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur**	**40,00 %**	**Sangat Rendah**	**194,56%**	**Sangat Tinggi/Berhasil**	100%		56.597.000	40 %		110.116.500	20%				0		0		0		-	0	0	0	0	40%	110.116.500	40,00 %	194,56%	Kec.Balikpapan Barat
10		Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pakaian dinas yang	0,00%	Tidak terakomodir dalam	0,00 %	Tidak terakomodir	100	Orang	56.597.000	15	Orang	11.250.000	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-		-	-			15	-	0,00%	0,00%	Kec.Balikpap

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		Beserta Kelengkapannya	disediakan (steel)		Renja 2021		dalam Renja 2021																									an Barat
11		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian adat daerah yang diadakan	0,00%	Tidak terakomodir dalam Renja 2022	0,00%	Tidak terakomodir dalam Renja 2022	35	Orang	139.105.000	14	Orang	98.866.500	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				14	-	0,00%	0,00%	Kec.Balikpapan Barat
12		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah**	**58,00 %**	**Rendah**	**57,24%**	**Rendah**	100%		5.707.378.692	38%		2.134.397.615	20%		1.687.902.192		18.895.750		193.275.600		429.371.600	20%	1.275.599.137	20%	20%	1.275.599.137	75,57%	58%	3.409.996.752	58,00 %	59,75 %	Kec.Balikpapan Barat
13		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangun	Jumlah Komponen Listrik dan penerangan bangunan kantor	104,28 %	Sangat Tinggi/Berhasil	97,40%	Sangat Tinggi/Berhasil	63	Jenis	108.883.000	53	Jenis	87.906.500	13	Jenis	18.585.700	0	0	13	18.147.900	13	18.147.900	13	18.147.900	13	97,64%	18.147.900	97,64 %	66	106.054.400	104,28 %	97,40 %	Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		an Kantor																														
14		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor Kecamatan	211,33 %	Sangat Tinggi/Berhasil	228,70%	Sangat Tinggi/Berhasil	20	Jenis	396.355.000	15	Jenis	468.454.800	20	Jenis	321.305.000	0	0	0	0	8	132.850.000	27	438.022.000	27	136,33%	438.022.000	136,33 %	42	906.476.800	211,33 %	228,70%	Kec.Ballikpapan Barat
15		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor dikeluarahan (jenis)	40,00 %	Sangat Rendah	16,94%	Sangat Rendah	100	Jenis	1.371.478.000	40	Jenis	232.260.600	20	Jenis	290.746.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0,00%	40	232.260.600	40,00 %	16,94 %	Kec.Ballikpapan Barat
16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan Administrasi (jenis)	83,04 %	Tinggi/Berhasil	147,40%	Sangat Tinggi/Berhasil	605	Jenis	450.068.942	412	Jenis	306.579.300	114	Jenis	450.068.942	2	8.500.000	27	106.934.700	38	150.107.700	90	356.826.400	90	79,28%	356.826.400	79,28 %	502	663.405.700	83,04 %	147,40%	Kec.Ballikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
17			Jumlah tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat pegawai (orang)	63,65 %	Rendah	56,98%	Rendah	784	Orang	1.062.916.500	350	Orang	462.375.000	149	Orang	215.677.500	0	0	0	0	0	0	149	143.234.500	149	100,00%	143.234.500	66,41 %	499	605.609.500	63,65 %	56,98 %	Kec.Balikpapan Barat
18			Jumlah kegiatan olahraga melalui kegiatan senam bersama	66,67 %	Sedang/Berhasil	18,26%	Sangat Rendah	51	Kali	95.730.000	34	Kali	17.480.000	11	Kali	20.316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0,00%	34	17.480.000	66,67 %	18,26 %	Kec.Balikpapan Barat
19		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan admini	68,92 %	Sedang/Berhasil	64,37%	Sedang/Berhasil	95	Jenis	376.402.250	50	Jenis	179.345.000	19	Jenis	77.294.550	0	1.540.000	4	17.758.000	12	49.136.000	15	62.957.550	15	81,45%	62.957.550	81,45 %	65	242.302.550	68,92 %	64,37 %	Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV										
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
			strasi dalam 1 tahun																														
20		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk camat, sekretaris, 4 Kepala seksi dan 2 kasubag	66,39 %	Sedang/Berhasil	175,57%	Sangat Tinggi/Berhasil	18	Jenis	95.810.000	9	Jenis	46.680.000	3	Jenis	123.552.000	0	0	1	40.171.500	2	68.866.500	3	121.531.500	3	98,36%	121.531.500	98,36 %	12	168.211.500	66,39 %	175,57%	Kec.Balikpapan Barat
21		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	36,44 %	Sangat Rendah	26,76%	Sangat Rendah	235	Orang	1.749.735.000	50	Orang	333.316.415	45	Orang	170.356.500	2	8.855.750	3	10.263.500	3	10.263.500	36	134.879.287	36	79,17%	134.879.287	79,17 %	86	468.195.702	36,44 %	26,76 %	Kec.Balikpapan Barat
22		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeri**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**92,00 %**	**Sangat Tinggi/Berhasil**	**92,16%**	**Sangat Tinggi/Berhasil**	-	Poin	9.044.748.500	-	Poin	6.656.866.595	-	Poin	1.796.311.092		205.932.226		728.298.680		1.110.713.260	68,56	1.678.784.330	68,56	69%	1.678.784.330	93,46 %	68,56	8.335.650.925	69 %	92,16 %	Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		ntahan Daaerah	**Pemerintahan Daerah**																													
23		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	49,34 %	Sangat Rendah	83,98%	Tinggi/Berhasil	2116	Rekening	1.741.987.000	1015	Rekening	1.205.636.003	35	Rekening	309.500.000	2	49.509.613	5	121.540.477	7	189.088.230	29	257.250.684	29	83,12%	257.250.684	83,12 %	1044	1.462.886.687	49,34 %	83,98 %	Kec.Balikpapan Barat
24		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai non-PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun (orang)	88,86 %	Tinggi/Berhasil	95,94%	Sangat Tinggi/Berhasil	409	Orang	6.644.970.000	308	Orang	4.953.597.860	58	Orang	1.486.811.092	6	156.422.613	24	606.758.203	36	921.625.030	55	1.421.533.646	55	95,61%	1.421.533.646	95,61 %	363	6.375.131.506	88,86 %	95,94 %	Kec.Balikpapan Barat
25			Jumlah Penggunaan Bahan Peralat	65,08 %	Sedang/Berhasil	75,65%	Tinggi/Berhasil	189	Jenis	657.791.500	123	Jenis	497.632.732	36	Jenis	74.055.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00 %	123	497.632.732	65,08 %	75,65 %	Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
			an Kebersihan Kantor (jenis)																													
26		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kelayakan sarana dan prasarana aparatur (persen)**	**108,00 %**	**Sangat Tinggi/Berhasil**	**118,02%**	**Sangat Tinggi/Berhasil**	100%		973.681.000	88 %		656.507.373	20%		671.196.000		53.986.445		277.970.788		383.726.946	20%	505.097.022	20%	20%	505.097.022	75,25 %	108 %	1.161.604.395	108,00 %	119,30%	Kec.Balikpapan Barat
27		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dan STNK kendaraan R2 dalam 1 tahun	53,11 %	Rendah	464,81%	Sangat Tinggi/Berhasil	362	Unit	77.797.000	154	Unit	35.847.400	63	Unit	536.327.000	6	53.986.445	19	162.585.388	26	219.731.546	38	325.758.822	38	60,74%	325.758.822	60,74 %	192	361.606.222	53,11 %	464,81%	Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		atau Lapangan																														
28		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor kecamatan dan kelurahan	60,07 %	Rendah	79,63%	Tinggi /Berhasil	1060	Unit	610.549.000	435	Unit	379.476.173	224	Jenis	118.478.000	0	0	86	45.220.000	128	67.625.000	202	106.692.800	202	90,05%	106.692.800	90,05 %	637	486.168.973	60,07 %	79,63 %	Kec.Balikpapan Barat
29		Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor kecamatan dan kelurahan	131,82 %	Sangat Tinggi /Berhasil	105, 62%	Sangat Tinggi /Berhasil	20	Paket	285.335.000	8	Paket	241.183.800	5	Paket	16.391.000	0	0	5	16.300.000	5	16.300.000	18	60.200.000	18	367,27%	60.200.000	367,27 %	26	301.383.800	131,82 %	105,62%	Kec.Balikpapan Barat
30		Penyediaan Rumah Jabatan / Dinas Camat dan Lurah	Jumlah rumah dinas camat dan lurah kecamatan Balikpapan	75,32 %	Sedang/Berhasil	104, 05%	Sangat Tinggi /Berhasil	35	Paket	289.641.000	0	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	60.200.000	4	26	301.383.800	75,32 %	104,05%	Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
			Barat (unit)																													
31		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	38,36 %	Sangat Rendah	59,12%	Rendah	378	Jenis	890.945.960	145	Jenis	526.765.785	224	Jenis	118.478.000	0	0	86	45.220.000	128	67.625.000	0	0	0	0,00 %	0	0,00%	145	526.765.785	38,36 %	59,12 %	Kec.Ballikpapan Barat
32		Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	jumlah kartu keluarga yang diterbitkan	44,55 %	Sangat Rendah	46,74%	Sangat Rendah	63000	KK	149.286.000	23940	KK	57.325.000	10500	KK	31.648.400	0	0	2869	8.645.400	4129	12.445.400	4129	12445400	4129	39,32%	12.445.400	39,32 %	28069	69.770.400	44,55 %	46,74 %	Kec.Ballikpapan Barat
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																									**110,40%**		**110,40%**			**77,39 %**	**114,67%**	
Predikat Kinerja																									**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																									**32,93%**		**64,74 %**			**72,00 %**	**106,36%**	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV										
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja																									Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sedang	Sangat Tinggi	
33		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat	100,00 %	Sangat Tinggi/Berhasil	102,57%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		14.919.220.000	85,81 %		12.768.035.100	20%		2.927.177.000		222.000.000		840.345.050		1.459.925.850	100,00%	2.505.141.019		100,00%	2.505.141.019	85,58 %	100 %	15.273.176.119	100,00 %	102,37%		Kec.Balikpapan Barat
34		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat	63,00 %	Rendah	56,12%	Rendah	100%		771.669.000	43 %		302.017.500	20%		252.295.600		0		1.785.000		5.320.000	20,00 %	101.888.050	20%	20,00%	101.888.050	40,38 %	63%	403.905.550	63,00 %	52,34 %		Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
			Kecamatan yang ditindaklanjuti																													
35		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	99,10 %	Sangat Tinggi/Berhasil	101,98%	Sangat Tinggi/Berhasil	320	Usulan	87.001.000	304	Usulan	85.150.000	70	Usulan	19.045.000	0	0	7	1.785.000	13	3.570.000	13	3.570.000	13	18,75%	3.570.000	18,75 %	317	88.720.000	99,10 %	101,98%	Kec.Ballikpapan Barat
36		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi komsos	44,14 %	Sangat Rendah	52,42%	Sangat Rendah	720	Orang	601.282.000	260	Orang	216.867.500	120	Orang	204.087.600	0	0	0	0	1	1.750.000	58	98.318.050	58	48,17%	98.318.050	48,17 %	318	315.185.550	44,14 %	52,42 %	Kec.Ballikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		Kecamatan																														
37			jumlah dokumen profil kecamatan	16,67 %	Sangat Rendah	24,18%	Sangat Rendah	90	Dokumen	83.386.000	0	Dokumen	0	15	Dokumen	29.163.000	0	0	0	0	0	0	15	20.163.000	15	100,00%	20.163.000	69,14 %	15	20.163.000	16,67 %	24,18 %	Kec.Balikpapan Barat
38		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase PMKS Miskin yang terlayani	88,00 %	Tinggi/Berhasil	68,43%	Sedang/Berhasil	100%		747.960.000	68 %		505.780.000	20%		163.475.750		0		2.447.700		2.447.700	20%	6.017.700	20%	20%	6.017.700	3,68%	88%	511.797.700	88,00 %	68,43 %	Kec.Balikpapan Barat
39		Fasilitasi Percepatan Pencapaian	jumlah pelaksanaan sosialisasi progra	166,67 %	Sangat Tinggi/Berhasil	65,07%	Sedang/Berhasil	30	Orang	647.552.000	20	Orang	415.372.000	30	Orang	138.013.750	0	0	0	2.447.700	1	2.447.700	30	6.017.700	30	100,00%	6.017.700	4,36%	50	421.389.700	166,67 %	65,07 %	Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	m keluarga harapan																													
40		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	Jumlah kegiatan pendataan keluarga miskin	89,99 %	Tinggi/Berhasil	90,04%	Sangat Tinggi/Berhasil	7006	Kegiatan	100.408.000	6305	Kegiatan	90.408.000	6	Kegiatan	25.462.000	0		0	0	0	0		-	0	0,00 %	0	0,00%	6305	90.408.000	89,99 %	90,04 %	Kec.Balikpapan Barat
41		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase pelayanan administrasi terpadu Kecamatn (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	64,00 %	Rendah	52,72%	Rendah	100%		334.108.000	44 %		147.737.600	70%		72.405.650		0		12.612.350		24.158.150	20%	28.408.150	20%	20,00%	28.408.150	39,23 %	64%	176.145.750	64,00 %	52,72 %	Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
42		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (IMTN)	jumlah IMTN yg di terbitkan	50,54 %	Rendah	52,72%	Rendah	9000	Ijin	334.108.000	3960	Ijin	147.737.600	1500	Ijin	72.405.650	0	0	261	12.612.350	501	24.158.150	589	28.408.150	589	39,23%	28.408.150	39,23 %	4549	176.145.750	50,54 %	52,72 %	Kec.Balikpapan Barat
43		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Baru Ilir)**	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat	200,00 %	Sangat Tinggi/Berhasil	113,34%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		**3.004.330.000**	100%		2.835.000.000	100 %		585.000.000		94.500.000		236.250.000		330.750.000	100%	570.132.542	100 %	100,00%	570.132.542	97,46 %	200 %	3.405.132.542	200,00 %	113,34%	Kelurahan Baru Ilir

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
44		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah RT yang melaksanakan layanan di Kelurahan	83,50 %	Tinggi/Berhasil	113,34%	Sangat Tinggi/Berhasil	378	RT	3.004.330.000	315	RT	2.835.000.000	63	RT	585.000.000	0	94.500.000	0	236.250.000	0	330.750.000	1	570.132.542	1	97,46%	570.132.542	97,46 %	316	3.405.132.542	83,50 %	113,34%	Kelurahan Baru Ilir
45		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Baru Tengah)**	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat	200,00 %	Sangat Tinggi/Berhasil	97,15%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		3.004.330.000	100%		2.430.000.000	100 %		486.000.000		0		162.000.000		324.000.000	100%	488.685.036	100 %	100 %	488.685.036	100,55 %	200 %	2.918.685.036	200,00 %	97,15 %	Kelurahan Baru Tengah

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
46		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah RT yang melaksanakan layanan di Kelurahan	100,00 %	Sangat Tinggi/Berhasil	97,15%	Sangat Tinggi/Berhasil	324	RT	3.004.330.000	270	RT	2.430.000.000	54	RT	486.000.000	0	0	18	162.000.000	36	324.000.000	54	488.685.036	54	100,55%	488.685.036	100,55 %	324	2.918.685.036	100,09 %	97,15 %	Kelurahan Baru Tengah
47		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Baru Ulu)**	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat	200,00 %	Sangat Tinggi/Berhasil	113,34%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		2.527.491.000	100%		2.385.000.000	100 %		477.000.000		79.500.000		198.750.000		318.000.000	100%	479.635.314	100 %	100 %	479.635.314	100,55 %	200 %	2.864.635.314	200,00 %	113,34%	Kelurahan Baru Ulu

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
48		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah RT yang melaksanakan layanan di Kelurahan	100,09 %	Sangat Tinggi/Berhasil	113,34%	Sangat Tinggi/Berhasil	318	RT	2.527.491.000	265	RT	2.385.000.000	53	RT	477.000.000	9	79.500.000	22	198.750.000	35	318.000.000	53	479.635.314	53	100,55%	479.635.314	100,55 %	318	2.864.635.314	100,09 %	113,34%	Kelurahan Baru Ulu
49		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kariangau)**	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat	200,00 %	Sangat Tinggi/Berhasil	115,93%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		619.801.000	100%		585.000.000	100 %		153.000.000		0		29.250.000		60.750.000	100%	133.545.565	100 %	100 %	133.545.565	87,28 %	200 %	718.545.565	200,00 %	115,93%	Kelurahan Kariangau

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
50		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah RT yang melaksanakan layanan di Kelurahan	102,36 %	Sangat Tinggi/Berhasil	115,93%	Sangat Tinggi/Berhasil	78	RT	619.801.000	65	RT	585.000.000	17	RT	153.000.000	0	0	3	29.250.000	7	60.750.000	15	133.545.565	15	87,28%	133.545.565	87,28 %	80	718.545.565	102,36 %	115,93%	Kelurahan Karangau
51		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Margasari)**	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat	200,00 %	Sangat Tinggi/Berhasil	113,37%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		1.525.670.000	100%		1.440.000.000	100 %		288.000.000		48.000.000		96.000.000		192.000.000	100%	289.591.132	100 %	100 %	289.591.132	100,55 %	2	1.729.591.132	200,00 %	113,37%	Kelurahan Margasari

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
52		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah RT yang melaksanakan layanan di Kelurahan	100,09 %	Sangat Tinggi/Berhasil	113,37%	Sangat Tinggi/Berhasil	192	RT	1.525.670.000	160	RT	1.440.000.000	32	RT	288.000.000	5	48.000.000	11	96.000.000	21	192.000.000	32	289.591.132	32	100,55%	289.591.132	100,55 %	192	1.729.591.132	100,09 %	113,37%	Kelurahan Margasari
53		**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Margomulyo)**	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional per tahun	100,00 %	Sangat Tinggi/Berhasil	106,75%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		2.383.861.000	100%		2.137.500.000	100 %		450.000.000		0		101.250.000		202.500.000	100%	407.237.530	100 %	100 %	407.237.530	90,50 %	200 %	2.544.737.530	100,00 %	106,75%	Kelurahan Margomulyo

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
54		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah RT yang melaksanakan layanan di Kelurahan	98,42 %	Sangat Tinggi /Berhasil	106,75%	Sangat Tinggi /Berhasil	300	RT	2.383.861.000	250	RT	2.137.500.000	50	RT	450.000.000	0	0	11	101.250.000	23	202.500.000	45	407.237.530	45	90,50%	407.237.530	90,50 %	295	2.547.737.530	98,42 %	106,75%	Kelurahan Margomulyo
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																									**78,31%**		**68,74 %**			**94,50 %**	**93,21 %**	
Predikat Kinerja																									**Tinggi**		**Sedang**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																									**73,33%**		**73,36 %**			**146,11 %**	**92,60 %**	
Predikat Kinerja																									**Sedang**		**Sedang**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV								
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
55		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase potensi peningkatan nilai swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan	10,00 %	Sangat Tinggi/Berhasil	62,21%	Rendah	100%		10.872.685.800			4.219.218.155	20%		3.374.583.400		9.414.500		42.658.300		137.460.900	10,00 %	2.398.547.310	10,00%	10,00%	2.398.547.310	71,08 %	10,00%	6.617.765.465	10,00 %	60,87 %	Kec.Balikpapan Barat
56		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan	49,91 %	Sangat Rendah	52,69%	Rendah	100%		6.147.139.000	30 %		1.838.558.375	20%		2.098.831.600		0		11.121.000		11.121.000	20,00 %	1.400.477.250	20,00%	20,00%	1.400.477.250	66,73 %	50%	3.239.035.625	49,91 %	52,69 %	Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
			dan Kota																													
57		**Peresentase peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan dan Kota, persentase sekolah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan, persentase peran serta dalam pembinaan**	Persentase sekolah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan																													

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		keluarga sejahtera																														
58			Presentase peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Sejahtera																													
59		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KBM)	Jumlah pelaksanaaan kerja bakti massal	46,85 %	Sangat Rendah	39,68%	Sangat Rendah	18	Kegiatan	421.326.000	6	Kegiatan	143.000.000	7	Kegiatan	69.615.000	0	0	0	0	0	0	2	24.200.000	2	34,76%	24.200.000	34,76 %	8	167.200.000	46,85 %	39,68 %	Kec.Balikpapan Barat
60		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Peserta STQ	49,58 %	Sangat Rendah	53,65%	Rendah	240	Orang	5.725.813.000	71	Orang	1.695.558.375	48	Orang	2.029.216.600	0	0	0	11.121.000	0	11.121.000	48	1.376.277.250	48	100,00%	1.376.277.250	67,82 %	119	3.071.835.625	49,58 %	53,65 %	Kec.Balikpapan Barat
61			jumlah pelaksanaan lomba					6		795.599.000	5		298.900.000	1	RT												0						Kec.Balikpap

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
			kebersihan lingkungan RT																													an Barat
62			jumlah pelaksanaan lomba dan penyuluhan PPKBD, BKB, UP2KS, P2WKSS, BKR, BKL, GSI, PHBS, KB KES, KB Lestari, LBSI, Keluarga Harmonis, Posyandu					78	Jenis	1.873.207.000	65	Jenis	431.281.500	13	Jenis												0						Kec.Balikpapan Barat
63			jumlah lomba dan pembin					24	Kegiatan	345.061.000	16	Kegiatan	2.030.625	4	Kegiatan												0						Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV										
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
			aan kesehatan																														
64			jumlah peserta yang terpilih /terseleksi STQ pertahun					270	Orang	1.545.000.000	0	Orang	0	48	Orang													0						Kec.Balikpapan Barat
65			jumlah pelaksanaan lomba administrasi dan Bimtek RT					12	Kegiatan	1.136.744.000	10	Kegiatan	939.346.250	2	Kegiatan													0						Kec.Balikpapan Barat
66			jumlah pembinaan pemerintah melalui pembinaan dan evaluasi kelurahan					36	Kegiatan	30.202.000	24	Kegiatan	24.000.000	6	Kegiatan													0						Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV										
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
67		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	56,00 %	Rendah	43,33%	Sangat Rendah	100%		1.753.945.500	36 %		586.364.500	20%		358.396.800		0		7.547.700		71.886.300	20,00 %	173.690.550	20,00%	20,00%	173.690.550	48,46 %	56%	760.055.050	56,00 %	43,33 %	Kec.Balikpapan Barat
68			Persentase Peran Serta Masyarakat																														
69			Persentase Pengembangan dalam mendukung pelayanan masyarakat																														
70		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakata	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kesejah	88,48 %	Tinggi/Berhasil	90,62%	Sangat Tinggi/Berhasil	27	Organisasi	284.039.000	15	Organisasi	210.105.000	3	Organisasi	58.459.250	0	0	0	1.320.000	0	1.320.000	10	47.279.250	10	323,50%	47.279.250	80,88 %	25	257.384.250	91,50 %	90,62 %	Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		n (PKK Kecamatan)	teraan sosial kemasyarakatan tingkat kecamatan																													
71		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (KLA)	Jumlah Peserta sosialisasi Forum Layak Anak	40,67 %	Sangat Rendah	39,74%	Sangat Rendah	110	Orang	348.886.000	44	Orang	138.000.000	80	Orang	71.607.750	0	0	0	0	0	0	1	660.000	1	0,92 %	660.000	0,92%	45	138.660.000	40,67 %	39,74 %	Kec.Balikpapan Barat
72		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (IUMK)	Jumlah izin yang diterbitkan	28,59 %	Sangat Rendah	30,60%	Sangat Rendah	600	Izin	861.550.500	120	Izin	173.359.500	100	Izin	175.267.300	0	0	3	4.551.700	37	64.435.300	52	90.315.300	52	51,53%	90.315.300	51,53 %	172	263.674.800	28,59 %	30,60 %	Kec.Balikpapan Barat
73		Fasilitasi Pemanfatan Teknologi Tepat	Jumlah sosialisasi TTG atau/ Posyan	36,13 %	Sangat Rendah	38,67%	Sangat Rendah	24	Kali	259.470.000	6	Kali	64.900.000	4	Kali	53.062.500	0	0	0	1.676.000	0	6.131.000	3	35.436.000	3	66,78%	35.436.000	66,78 %	9	100.336.000	36,13 %	38,67 %	Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV										
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		Guna (TTG)	tek LPM																														
74		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Baru Ilir**	**Peresentase peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan dan Kota, persentase sekolah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan, persentase peran serta dalam**	207,00 %	Sangat Tinggi/Berhasil	157,14%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		480.264.300	107%		298.329.000	100 %		160.026.500		9.414.500		9.414.500		15.650.500	100%	141.502.810	100 %	100 %	141.502.810	88,42 %	207 %	439.831.810	207,00 %	91,58 %	Kelurahan Baru Ilir

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
			pembinaan keluarga sejahtera																													
75		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	89,91 %	Tinggi/Berhasil	79,23%	Tinggi/Berhasil	30	Usulan	19.242.300	25	Usulan	13.825.000	5	Usulan	3.601.500	2	1.421.500	2	1.421.500	2	1.421.500	2	1.421.500	2	39,47%	1.421.500	39,47 %	27	15.246.500	89,91 %	79,23 %	Kelurahan Baru Ilir
76		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah hasil kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan (jenis)	160,03 %	Sangat Tinggi/Berhasil	285,05%	Sangat Tinggi/Berhasil	56	Jenis	328.841.000	43	Jenis	252.384.000	14	Jenis	128.475.000	0	0	0	0	0	0	12	113.830.310	12	88,60%	113.830.310	88,60 %	55	366.214.310	98,94 %	11 1,37%	Kelurahan Baru Ilir

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
77		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah PKK yang terbina dan terfasilitasi	65,99 %	Sedang/Berhasil	44,16%	Sangat Rendah	27	Organisasi	132.181.000	15	Organisasi	32.120.000	3	Organisasi	27.950.000	1	7.993.000	1	7.993.000	2	14.229.000	3	26.251.000	3	93,92%	26.251.000	93,92 %	18	58.371.000	65,99 %	44,16 %	Kelurahan Baru Ilir
78		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Baru Tengah**	**Persentase peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan dan Kota, persentase sekolah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan,**	174,00 %	Sangat Tinggi/Berhasil	106,74%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		514.667.300	74 %		357.458.750	100 %		162.727.200		0		0		8.434.500	100%	154.839.000	100 %	100 %	154.839.000	95,15 %	174 %	512.297.750	174,00 %	99,54 %	Kelurahan Baru Tengah

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
			persentase peran serta dalam pembinaan keluarga sejahtera																													
79		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	83,33 %	Tinggi/Berhasil	83,36%	Tinggi/Berhasil	30	Usulan	18.942.300	25	Usulan	15.790.000	5	Usulan	3.580.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0,00 %	0	0,00%	25	15.790.000	83,33 %	83,36 %	Kelurahan Baru Tengah
80		Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah hasil kegiatan pembangunan	168,94 %	Sangat Tinggi/Berhasil	120,47%	Sangat Tinggi/Berhasil	56	Kegiatan	363.544.000	46	Kegiatan	268.127.500	14	Kegiatan	131.275.000	0	0	0	0	0	0	14	128.012.500	14	97,51%	128.012.500	97,51 %	60	396.140.000	106,52 %	108,97%	Kelurahan Baru Tengah

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		Kelurahan	lingkungan kelurahan (jenis)																													
81		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah PKK yang terbina dan terfasilitasi	66,25 %	Sedang/Berhasil	75,93%	Tinggi/Berhasil	27	Organisasi	132.181.000	15	Organisasi	73.541.250	3	Organisasi	27.872.200	0	0	0	0	1	8.434.500	3	26.826.500	3	96,25%	26.826.500	96,25 %	18	100.367.750	66,25 %	75,93 %	Kelurahan Baru Tengah
82		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Baru Ulu**	**Peresentase peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan dan Kota, persentase sekolah yang**	161,00 %	Sangat Tinggi/Berhasil	88,18%	Tinggi/Berhasil	100%		509.075.300	61 %		309.852.700	100 %		162.751.800		0		11.890.100		11.890.100	100%	139.064.650	100 %	100 %	139.064.650	85,45 %	161 %	448.917.350	161,00 %	88,18 %	Kelurahan Baru Ulu

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		mendapatkan fasilitasi pembinaan, persentase peran serta dalam pembinaan keluarga sejahtera																														
83		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	92,33 %	Sangat Tinggi /Berhasil	93,02%	Sangat Tinggi /Berhasil	30	Usulan	18.942.300	25	Usulan	15.675.000	5	Usulan	3.600.500	0	0	3	1.944.500	3	1.944.500	3	1.944.500	3	54,01%	1.944.500	54,01 %	28	17.619.500	92,33 %	93,02 %	Kelurahan Baru Ulu

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
84		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah hasil kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan (jenis)	147,21 %	Sangat Tinggi/Berhasil	104,85%	Sangat Tinggi/Berhasil	77	Jenis	357.952.000	55	Jenis	255.039.500	18	Jenis	131.220.200	0	0	0	0	0	0	16	120.274.550	16	91,66%	120.274.550	91,66 %	71	375.314.050	92,86 %	104,85%	Kelurahan Baru Ulu
85		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial kemasyarakatan	58,55 %	Rendah	42,35%	Rendah	27	Organisasi	132.181.000	14	Organisasi	39.138.200	3	Organisasi	27.931.100	0	0	1	9.945.600	1	9.945.600	2	16.845.600	2	60,31%	16.845.600	60,31 %	16	55.983.800	58,55 %	42,35 %	Kelurahan Baru Ulu
86		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kariangau**	**Peresentase peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keaga**	159,00 %	Sangat Tinggi/Berhasil	90,30%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		476.433.300	59 %		272.810.330	100 %		162.511.500		0		2.025.000		2.025.000	100%	157.389.650	100 %	100 %	157.389.650	96,85 %	159 %	430.199.980	159,00 %	90,30 %	Kelurahan Kariangau

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		maan di tingkat Kecamatan dan Kota, persentase sekolah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan, persentase peran serta dalam pembinaan keluarga sejahtera																														
87		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekono	92,81 %	Tinggi/Berhasil	102,11%	Sangat Tinggi/Berhasil	30	Usulan	17.442.300	25	Usulan	15.785.000	5	Usulan	3.562.500	0	0	3	2.025.000	3	2.025.000	3	2.025.000	3	56,84%	2.025.000	56,84 %	28	17.810.000	92,81 %	102,11%	Kelurahan Karangau

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	mi dan sosial budaya																													
88		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah hasil kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan (jenis)	165,40 %	Sangat Tinggi/Berhasil	96,26%	Sangat Tinggi/Berhasil	48	Jenis	326.810.000	27	Jenis	185.259.330	12	Jenis	131.000.000	0	0	0	0	0	0	12	129.339.650	12	98,73%	129.339.650	98,73 %	39	314.598.980	80,93 %	96,26 %	Kelurahan Karangau
89		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah PKK yang terbina dan terfasilitasi	65,90 %	Sedang/Berhasil	73,98%	Sedang/Berhasil	27	Organisasi	132.181.000	15	Organisasi	71.766.000	3	Organisasi	27.949.000	0	0	0	0	0	0	3	26.025.000	3	93,12%	26.025.000	93,12 %	18	97.791.000	65,90 %	73,98 %	Kelurahan Karangau
90		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Peresentase peningkatan prestasi di**	171,00 %	Sangat Tinggi/Berhasil	91,58%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		499.267.800	71 %		355.825.000	100 %		106.511.500		0		660.000		16.453.500	100%	101.409.000	100 %	100 %	101.409.000	95,21 %	171 %	457.234.000	171,00 %	91,58 %	Kelurahan Margasari

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		Margasari	bidang seni, budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan dan Kota, persentase sekolah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan, persentase peran serta dalam pembinaan keluarga sejahtera																													

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
91		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	19,75 %	Sangat Rendah	22,29%	Sangat Rendah	30	Usulan	18.941.800	5	Usulan	3.562.500	5	Usulan	3.562.500	0	0	1	660.000	1	660.000	1	660.000	1	18,53%	660.000	18,53 %	6	4.222.500	19,75 %	22,29 %	Kelurahan Margasari
92		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah SPGRM	155,09 %	Sangat Tinggi /Berhasil	94,78%	Sangat Tinggi /Berhasil	53	Kegiatan	353.565.000	39	Kegiatan	261.662.500	14	Kegiatan	75.000.000	0	0	0	0	0	0	14	73.458.000	14	97,94%	73.458.000	97,94 %	53	335.120.500	99,46 %	94,78 %	Kelurahan Margasari
93		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah PKK yang terbina dan terfasilitasi	66,41 %	Rendah	93,00%	Sangat Tinggi /Berhasil	27	Organisasi	126.761.000	15	Organisasi	90.600.000	3	Organisasi	27.949.000	0	0	0	0	2	15.793.500	3	27.291.000	3	97,65%	27.291.000	97,65 %	18	117.891.000	66,41 %	93,00 %	Kelurahan Margasari

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV										
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
94		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Margo Mulyo**	**Presentase peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan dan Kota, persentase sekolah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan, persentase peran serta dalam pembinaan keluar**	141,00 %	Sangat Tinggi/Berhasil	67,13%	Sedang/Berhasil	100%		491.893.300	41 %		200.019.500	100 %		162.826.500		0		0		0	100%	130.174.400	100 %	100 %	130.174.400	79,95 %	141 %	330.193.900	141,00 %	67,13 %	Kelurahan Margomulyo

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
			ga sejahtera																													
95		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	91,73 %	Sangat Tinggi/Berhasil	84,38%	Sangat Tinggi/Berhasil	30	Usulan	18.742.300	25	Usulan	14.000.000	5	Usulan	3.601.500	0	0	0	0	0	0	3	1.815.000	3	50,40%	1.815.000	50,40 %	28	15.815.000	91,73 %	84,38 %	Kelurahan Margomulyo
96		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah hasil kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan (jenis)	141,69 %	Sangat Tinggi/Berhasil	71,01%	Sedang/Berhasil	57	Jenis	340.970.000	9	Jenis	140.519.500	14	Jenis	131.275.000	0	0	0	0	0	0	11	101.609.400	11	77,40%	101.609.400	77,40 %	20	242.128.900	34,80 %	71,01 %	Kelurahan Margomulyo

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
97		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah PKK yang terbina dan terfasilitasi	66,19 %	Sedang/Berhasil	54,66%	Rendah	27	Organisasi	132.181.000	15	Organisasi	45.500.000	3	Organisasi	27.950.000	0	0	0	0	0	0	3	26.750.000	3	95,71%	26.750.000	95,71 %	18	72.250.000	66,19 %	54,66 %	Kelurahan Margomulyo
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																									**78,56%**		**67,11 %**			**69,42 %**	**72,03 %**	
Predikat Kinerja																									**Tinggi**		**Sedang**			**Sedang**	**Sedang**	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																									**80,00%**		**82,03 %**			**139,86 %**	**78,04 %**	
Predikat Kinerja																									**Tinggi**		**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
98		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan	89,00 %	Tinggi/Berhasil	50,28%	Sangat Rendah	100%		1.468.257.000	48 %		706.244.000	20%		286.999.900		0		0		14.836.500	89,00 %	31.936.500	89,00%	89,00%	31.936.500	11,13 %	89,00%	738.180.500	89,00 %	50,28 %	Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
			yang optimal																													
99		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase koordinasi dengan instansi vertikal dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum	68,00 %	Sedang/Berhasil	50,28%	Sangat Rendah	100%		1.468.257.000	48 %		706.244.000	20%		286.999.900		0		0		14.836.500	20,00 %	31.936.500	20%	20,00%	31.936.500	11,13 %	68%	738.180.500	68,00 %	50,28 %	Kec.Balikpapan Barat
100		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	Jumlah Rakor Trantibum di wilayah Kecamatan	50,19 %	Sedang/Berhasil	50,28%	Sangat Rendah	240	Kali	1.468.257.000	116	Kali	706.244.000	40	Kali	286.999.900	0	0	0	0	2	14.836.500	4	31.936.500	4	11,13%	31.936.500	11,13 %	120	738.180.500	50,19 %	50,28 %	Kec.Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5			6			7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
		di Wilayah Kecamatan																														
101			Jumlah pravelensi jumlah penurunan narkoba	0,00%	Tidak terakomodir dalam renja 2021	0,00 %	Tidak terakomodir dalam renja 2021	24	Kegiatan	109.606.000	0	Kegiatan	0	4	Kegiatan	38.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Kec.Ballikpapan Barat
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																									**11,13%**		**11,13 %**			**50,19 %**	**50,28 %**	
Predikat Kinerja																									**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																									**20,00%**		**11,13 %**			**68 %**	**50 %**	
Predikat Kinerja																									**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**			**Sedang**	**Sangat Rendah**	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
1	2	3	4	K		RP		5		6		7			8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100 %		15
								K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian Program Keselurahan																							74%			63%			74 %	77 %	
Predikat Kinerja																							Sedang			Sangat Rendah			Sedang	Tinggi	
Rata-rata capaian Kegiatan Keseluruhan																							52%			58%			106 %	82 %	
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi	
Rata-rata capaian Sub Kegiatan Keseluruhan																							70%			64%			73 %	83 %	
Predikat Kinerja																							Sedang			Sangat Rendah			Sedang	Tinggi	

Sumber Data : Form e81 Evaluasi Renja (Data Diolah)

Tabel 2.4

Realisasi Program RPJMD Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	**Indikator**			**Tahun...(thn n-2)**	**Tahun .... (thn n-1)**	**Tahun 2023**		**Tahun 2024**		**Tahun ....(thn n-2)**	**Tahun .... (n-1)**	**Tahun 2021**		**Tahun 2022**	**Catatan**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**		**8**		**9**	**10**	**11**		**12**	**13**
1	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	N/A	N/A	68,5	Poin	69,5	Poin			68,12	Poin		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	-	N/A	80,16	82.25	Poin	80,51	Poin			-	Poin		
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	N/A	N/A	27	Poin	27.5	Poin			25,44	Poin		
4	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	-	-	N/A	100	100	%	100	%			100%	Poin		
5	Persentase Rata-rata	-	-	N/A	N/A	16	%	16	%			10%	%		

	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan														
6	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	-	-	N/A	N/A	100	%	100	%			89%	%		
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	-	-	N/A	N/A	70,5	Poin	70,5	Poin			68,56	Poin		

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi capaiannya sebesar 68,56 Poin. Realisasi keuangan berdasarkan Renstra 2016-2021 yaitu 93,43% termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh Sub Kegiatan sebesar *77,39%* dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *114,67%* dalam kategori Sangat *Tinggi.*Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh kegiatan sebesar *72,00%* dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *106,36%* dalam kategori Sangat *Tinggi.*

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik realisasi capaiannya sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar **realisasi Renstra 2016-2021** yaitu *100%* dalam Ketegori Sangat Tinggi dan realisasi keuangan *102,57%* dalam Kategori Sangat Tinggi. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh Sub Kegiatan sebesar *94,50%* dalam kategori *Sangat Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *93,21%* dalam kategori Sangat *Tinggi.*Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh kegiatan sebesar *146,11%* dalam kategori *Sanga*t *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *92,60%* dalam kategori *Tinggi.**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan realisasi capaiannya sebesar 10% **realisasi Renstra 2016-2021** yaitu *100%* dalam Ketegori Sangat Tinggi dan realisasi keuangan *62,21%* dalam Kategori *Sedang.*Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh Sub Kegiatan sebesar *69,42%* dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *72,03%* dalam kategori *Tinggi.* Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh kegiatan sebesar *139,86%* dalam kategori *Sangat Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *78,04%* dalam kategori *Tinggi.*

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi capaiannya sebesar 89% dengan **realisasi Renstra 2016-2021** yaitu *89%* dalam Ketegori *Tinggi* dan realisasi keuangan *50,28%* dalam Kategori *Sedang*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh **Sub Kegiatan** sebesar *50,19%* dalam kategori *Sangat Rendah* dan persentase realisasi keuangan sebesar *50,28%* dalam kategori *Sangat Rendah.* Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh kegiatan sebesar *68%* dalam kategori *Sedang* dan persentase realisasi keuangan sebesar *50%* dalam kategori *Sangat*

Rendah.

Berdasarkan evaluasi hasil Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021, maka ditemui beberapa faktor penghambat yang merupakan kendala dalam keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut :

2.2.1 Faktor Penghambat

1. Adanya status PPKM darurat (level 3) menjadi darurat mikro (level 4) pada triwulan pertama hingga kedua menyebabkan terhambatnya kegiatan dilaksanakan;
2. Perubahan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk pemetaan terhadap kode klasifikasi program, kegiatan terbaru sesuai dengan peraturan tersebut sehingga terdapat penggabungan kegiatan menjadi sub kegiatan yang mengakibatkan realisasi kinerja yang kurang maksimal;
3. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran terkait evaluasi renja dikarenakan pergantian pejabat pada triwulan III, menjadikan mereka *shock culture* sehingga sering terjadi human error dalam entri kegiatan;
4. Adanya refocussing anggaran pada sub kegiatan sehingga capaian rata-rata realisasi keuangan menyesuaiakan keadaan keuangan, ketika dalam keadaan defisit maka capaian realisasi keuangan menjadi menurun;
5. Adanya sub kegiatan yang telah terakomodir dalam renstra yang tidak dilaksanakan dikarenakan disesuaikan dengan kondisi fiskal keuangan daerah dan program prioritas Kota Balikpapan setiap tahunnya.

2.2.2 Faktor Pendorong

Selain menghadapi faktor penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat juga beberapa hal sebagai faktor pendorong keberhasilan. Adapun faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan

program dan kegiatan sehingga mendukung pencapaian target kinerja, meliputi:

1. Terciptanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan PPTK untuk merealisasikan anggaran sesuai dengan anggaran pergeseran yang sudah diinput;
2. Koordinasi yang baik antar unit kerja di dalam Kecamatan Balikpapan Barat dengan membentuk jaringan perencanaan hingga tingkat sub bidang/Sub Bagian, sehingga eksekusi bisa dilaksanakan langsung di tingkat Subbid/Subbag. Sub Bagian Perencaaan dan pelaporan tinggal mengendalikan, mengevaluasi, dan meng approve secara by sistem;
3. Adanya refocussing anggaran pada sub kegiatan sehingga capaian rata-rata realisasi keuangan menyesuaiakan keadaan keuangan, semakin tinggi anggaran yang ditambahkan semakin tinggi realisasinya begitupun sebaliknya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi kecamatan Balikpapan Barat

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Barat berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2016-2021.

Sesuai tugas pokok fungsi kecamatan, mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Barat yang mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, kententraman dan ketertiban, maka tantangan yang akan dihadapi kecamatan yaitu:

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan pegawai terkait penggunaan teknologi informasi terkini;
2. Kurangnya pengetahuan SDM pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan rendahnya realiasi kinerja yang berimplikasi pada menurunnya anggaran;
3. Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas;dan
4. Sarana dan Prasarana pelayanan publik yang ada di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat masih perlu peningkatan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Barat selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Barat, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Balikpapan Barat 5 (lima) tahun kedepan antara lain, seperti dalam tabel 2.3

Tabel 2.3

Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Aspek Kajian (Masalah Pokok)	Capaian Kondisi Saat ini (Masalah)	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan (Akar Masalah)
			Internal	Eksternal	
Pelayanan Publik	Dokumen Standar Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan telah tersedia	Perwal No. 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Keputusan Camat Balikpapan Barat tentang Penetapan SOP dan Standar Pelayanan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Barat	Komitmen pegawai dalam mematuhi SOP dan SP perlu terus ditingkatkan	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas tinggi
	Media Informasi kepada masyaraka t tersedia	Keputusan WaliKota Balikpapan tentang Petugas PPID	Keterbatasan SDM Aparatur dalam penyajian informasi yang belum optimal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat menuntut ketersediaan informasi yang dibutuhkan

Aspek Kajian (Masalah Pokok)	Capaian Kondisi Saat ini (Masalah)	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan (Akar Masalah)
			Internal	Eksternal	
				Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
	Pelayanan responsif gender	Keputusan Camat Balikpapan Barat tentang Penetapan SOP dan Standar Pelayanan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Barat	Keterbatasan sarana pelayanan yang responsif gender	Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah	Tuntutan pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh kalangan masyarakat
Penyelenggaraan Pembangunan di wilayah Kecamatan	Usulan Perencaan Pembangunan telah dilaksanakan setiap tahun	Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan di Kecamatan Berita Acara	Perbaikan sarana dan prasarana ditentukan dalam skala prioritas dikarenakan anggaran yang terbatas	Peran serta masyarakat dalam pembangunan	Tidak semua usulan Pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi

Aspek Kajian (Masalah Pokok)	Capaian Kondisi Saat ini (Masalah)	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan (Akar Masalah)
			Internal	Eksternal	
		hasil Musrenbang Tk. Kecamatan			
Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Masih belum optimalnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan trantibum di Kecamatan Balikpapan Barat	Peraturan Daerah tentang Trantibum Peraturan Daerah tentang Perijinan	Keterbatasan kemampuan (kapasitas) SDM di Kecamatan Balikpapan Barat dalam hal penegakan Sarana dan Prasarana Pengawasan belum maksimal	Pemahaman dan Kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan trantibum dan perijinan	Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariatif menyulitkan pengawasan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban; Belum optimalnya proses pengawasan perizinan oleh Perangkat Daerah Teknis

Aspek Kajian (Masalah Pokok)	Capaian Kondisi Saat ini (Masalah)	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan (Akar Masalah)
			Internal	Eksternal	
Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan sesuai Program dan Kegiatan serta dana yang ada dikecamatan	Aturan terkait Pemberdayaan masyarakat	Program, Kegiatan serta Anggaran Pemerintah yang terkait dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Peran serta pelaku usaha dalam mendukung pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya hasil pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat
Tertib administrasi pemerintahan dan pertanahan	Data administrasi pertanahan terdokumentasi kan	Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara Perwali Nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah	Belum tersedia bank data dokumentasi pertanahan yang terintegrasi Belum tersedianya ruang khusus arsip warkah IMTN yang memadai	PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Kurangnya pemahaman masyarakat (pemohon) berkaitan dengan persyaratan dan mekanisme IMTN	Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah yang tumpang tindih Kurangnya pemahaman masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam tahapan proses IMTN berdampak

Aspek Kajian (Masalah Pokok)	Capaian Kondisi Saat ini (Masalah)	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan (Akar Masalah)
			Internal	Eksternal	
		Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ijin Membuka Tanah Negara	Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan IMTN kurang memadai		pada waktu penyelesaian IMTN menjadi lebih lama

No	KELURAHAN		Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	**KEL. MARGASARI**	a	Penanganan Sampah Kawasan Pemukiman Atas Air Margasari	Adanya penumpukan sampah di bawah pemukiman atas air yang meliputi 16 RT, dengan luas sekitar 25 Ha	Kel. Margasari merupakan muara dari 3 (tiga) Parit Besar yang mengalir ke pemukiman atas air : sungai samping diklat pertamina, sungai sekitar GPMI, sungai pasar pandan sari
		b	Tidak tertibnya bongkar muat barang di sekitar lokasi Pasar Pandansari	Belum tersedianya sarana khusus bongkar muat sembako	Kawasan sekitar Kelurahan Margasari menjadi kumuh, dan bermunculan PKL yang sulit dikendalikan
2	**KEL. BARU ILIR**	a	Kemacetan Antrian BBM di sepanjang sisi jalan Let. Jend. Soeprapto	Mengganggu kenyamanan pengguna jalan serta pemilik usaha	Tidak ada jadwal yang tetap untuk pengisian BBM (solar bersubsidi)
		b	Genangan/Banjir di sepanjang Let.Jend. Soeprapto (BNI sd Kecamatan)	Mengganggu kenyamanan pengguna jalan	Drainase tidak menampung air ketika curah hujan tinggi,
					Pembuangan air yang tidak lancar
3	**KEL. BARU TENGAH**	a	Adanya penumpukan Sampah di area Jl. Let. Jend Soeprapto di Raja Malaysia dan SD 002 Balikpapan Barat	Timbulnya penumpukan sampah di luar areal TPS, Trotoar, Drainase	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dan tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan
		b	Tidak tersedianya lahan parkir	Menimbulkan kemacetan di	Tidak adanya lahan parkir mandiri bagi

No	KELURAHAN		Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			khusus angkutan umum	sepanjang Jl. Let Jend Soeprapto	pemilik angkutan umum
		c	Beralih fungsinya terminal transit angkutan umum menjadi tempat parkir kendaraan pribadi bagi pekerja yang melakukan penyeberangan ke PPU	Fungsi Terminal transit angkutan umum tidak sesuai peruntukannya	Terjadinya kesemrawutan dan kemacetan arus lalu lintas kendaraan di Jl. 21 Januari
4	**KEL. KARIANGAU**	a	Banjir yang terjadi di Jl. Sultan Hasanuddin RT 12 dan 13	Akses jalan menuju pelabuhan Ferry dan Kawasan Industri Kariangau tidak dapat dilewati	Adanya banjir kiriman dari Kel. Karang Joang padasaat hujan deras
					Belum tersedianya bendali air
		b	Loket Pelayanan kurang representatif	Kenyamanan pengguna layanan kurang maksimal	Terbatasnya ruang pelayanan baik untuk laktasi maupun ruang tunggu
5	**KEL. MARGO MULYO**	a	Banjir yang terjadi di kawasan Jl. Gn. Empat RT 13, 14, 15, 16, 17,dan 50	aliran drainase yang tersumbat dan tidak lancar	Sedimentasi di muara aliran primer kawasan mangrove
		b	terjadi penumpukan sampah di sepanjang Jl. Bambang Sutikno	menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat, banjir dan menimbulkan aroma tidak sedap	Tidak tersedianya TPS di sepanjang JL. Bambang Sutikno kawasan konservasi mangrove

No	KELURAHAN		Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
6	**SEKSI PEMERINTAHAN**	a	Setiap permohonan IMTN memiliki masalah khusus masing-masing	Banyaknya permohonan IMTN yang tertunda	Pemohon tidak menyampaikan kelengkapan berkas sesuai jadwal yang ditetapkan pasca peninjauan
					Belum adanya instrumen pengingat kepada pemohon
		b	Belum tersedianya gedung arsip vital khusus Warkah IMTN	Tingginya resiko kehilangan dan kerusakan arsip,	Belum tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan arsip

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review awal rancangan RKPD yakni dengan melaksanakan forum OPD Kecamatan Balikpapan Barat. Pelaksanaan forum OPD tersebut bertujuan untuk menyelaraskan target pada indikator Renstra 2021-2026 beserta Pagu Indikatif dengan hasil kebutuhan yang didapatkan dalam Forum OPD. Forum OPD tersebut mengundang seluruh PPTK dan staf Kecamatan dan Kelurahan hingga Bappedalitbang. Berikut hasil rancangan awal RKPD Tahun 2023 Kota Balikpapan.

Tabel 2.4

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Balikpapan

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana		Catatan analisa
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti**	100%	100%	**877.230.000**	**1.008.176.000**	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana		Catatan analisa
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	766.230.000	870.026.000	
1.2	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	100%	**25.000.000**	**50.000.000**	
1.3	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	**86.000.000**	**88.150.000**	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	18%	**4.281.845.000**	**4.921.020.000**	
2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	1.445.691.600	1.915.699.000	
2.2	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	100%	2.836.153.400	3.005.321.000	penambahan pagu anggaran pada sub kegiatan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan sebesar 300.000.000, dengan rincian 120.000.000 Bunda PAUD tingkat

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana		Catatan analisa
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
							kecamatan dan 180.000.000 Bunda PAUD tingkat kelurahan dengan pagu per kelurahan sebesar 30.000.000 untuk 6 kelurahan
3	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan yang optimal**	100%	100%	**281.800.000**	**323.900.000**	
3.1	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase rekomendasihasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum**	100%	100%	**281.800.000**	**323.900.000**	
4	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**71**	**71,5**	**14.750.663.957**	**16.952.461.645**	
4.1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	**69**	**69,5**	-	**39.400.000**	
4.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan**	**70,25**	**70,5**	**10.906.109.364**	**10.900.000.000**	**Penambahan pagu anggaran sebesar 135.052.000 pada sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 20.592 eksemplar Kaltim Post, 5.980 eksemplar Balikpapan Post.**
4.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik**	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**61**	**62**	**-**	**-**	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana		Catatan analisa
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Daerah Pada Perangkat Daerah						
4.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61	62	100.000.000	100.000.000	
4.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	66	67	1.237.182.649	1.551.332.000	
4.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66	67	68.800.000	96.300.000	
4.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66	67	1.630.571.944	2.813.425.645	Penambahan pagu anggaran sebesar 243.075.482 untuk tenaga bantuan dengan rincian 54 orang tenaga administrasi sesuai dengan surat edaran nomer 561.4/0012/Org tanggal 05 januari 2022 tentang pemberian gaji/upah tenaga bantuan (asn)
4.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66	67	808.000.000	1.452.004.000	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan Tahun 2023 dilaksanakan dengan mekanisme Rakor Pembangunan Kelurahan yang dihadiri oleh seluruh ketua RT, LP, hingga Karang Taruna, kemudian usulan dari kelurahan dikumpulkan

dan dibahas pada Musrenbang Kecamatan dengan menentukan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah terkait, Kecamatan, bahkan dengan swadaya masyarakat. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda Litbang. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.5

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
Kelurahan Marga Sari						
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	3 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprapto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	150 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	3 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	4 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprapto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	151 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	4 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	5 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprapto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	152 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
14	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	5 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
15	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	6 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprapto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	153 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	6 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
20	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
21	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
22	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	7 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
23	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprapto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	154 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
24	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	7 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
25	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
26	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
27	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	8 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
28	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprapto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	155 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
29	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	8 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
30	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
31	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
32	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	9 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
33	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprapto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	156 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
34	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	9 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
35	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
36	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
37	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	10 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
38	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprapto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	157 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
39	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	10 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
40	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
41	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
42	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	11 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
43	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprapto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	158 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
44	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	11 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
45	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
46	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
47	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	12 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
48	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprapto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	159 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
49	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	12 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
50	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
51	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemukiman Atas Air RT. 29 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, **Marga Sari**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	P = 800 M L = 5 M	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	
52	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku Laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, **Marga Sari**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	120 M (3x40)	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	
53	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 21 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, **Marga Sari**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	L = 2,5 M P = 50 M	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	
54	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 29 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, **Marga Sari**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	P = ± 400 M L = 2 M	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	
55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Semoi Perumahan Guru RT. 13 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, **Marga Sari**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	P = 104 M L = 3,00 M T = 10 CM	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	
Kelurahan Kariangau						
56	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 15 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan jalan pemukiman di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Jalan sudah rusak
57	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Ruhui Rahayu RT 6 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat (lebar jalan < 4 meter.)	Jalan rawan lakalantas dan kriminal
58	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Kartini RT 5 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Pelatihan Pengembangan UMKM di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Meningkatk an UMKM Hidroponik
59	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan	RT 9 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana		(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	belujm ada pelatihan welder bagi remaja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemberdayaan Kelurahan		Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana			putus sekloah
60	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 9 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Belum ada pelatihan alat berat bagi warga belum bkerja/phk
61	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 12 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	belum ada pelatihan kuliner
62	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 12 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Belum ada pelatihan montir bagi pemuda putus sekolah
63	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 12 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Pelatihan Pengembangan UMKM di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Belum ada pelatihan pengemban gan umkm utk hidroponik
64	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 12 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Belum ada pelatihan kerja budidaya ikan air tawar
65	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 16 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	belum ada pelatihan mengelas untuk remaja putus sekolah
66	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 16 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Belum ada pelatihan menjahit untuk meningkatk an umkm
67	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 16 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Pelatihan Pengembangan UMKM di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Belum ada pelatihan hidroponik bagi umkm
68	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 16 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Pelatihan Pengembangan UMKM di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	pemgemba ngan umkm melalui budidaya tanaman dalam polibag blm ada

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
69	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sultan Hasanuddin RT 14, mulai gerbang pelabuhan ferry ke kantor lurah **Kariangau**, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana	2000 m x 6 m	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan rusak berat
70	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Selok Baru RT 8 **Kariangau**, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana	3000 m x 10 m	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan masih pengerasan dan berbahaya bagi kendaraan bermotor
71	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Ruhuy Rahayu RT 6 **Kariangau**, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana	500 m x 5 m	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan sudah rusak parah
72	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Sultan Hasanuddin RT 4 Samping SDN 020 **Kariangau**, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana	150 m x 0,6 m x 0,4	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Belum ada drainase sehingga air meluap ke jalan
73	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Karya Bakti RT 13 **Kariangau**, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana	200 m x 0,5 m x 0,4 m	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Belum tersedia drainase
Kelurahan Baru Ulu						
74	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Wolter Monginsidi RT. 53 - 1.2241823623360508, 116.81718829320026, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 35 M Lebar : 50 Cm Tinggi : 10 Cm	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
75	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sultan Hasanuddin RT.40 - 1.228895, 116.814958, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 400 M Lebar dalam : 40 Cm Tinggi : 50 Cm Tebal : 15 Cm	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
76	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprapto RT. 51 -1.227408, 116.813525, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 30 M Lebar : 0.5 M Tinggi : 80 Cm	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
77	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprapto RT. 51 -1.227384, 116.812801, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 70 M Lebar : 0.5 M Kedalaman : 1 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
78	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprapto RT. 51 -1.227950, 116.813120, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	panjang : 100 M Lebar : 0.5 M Kedalaman : 1 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
79	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Wolter Monginsidi RT. 32 - 1.222494, 116.817714, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 25 M Lebar : 40 Cm Kedalaman : 50 Cm	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
80	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprapto RT.12 - 1.2255615767386872, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 200 M Lebar : 40 Kedalam 50 Cm	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
81	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Gang SMAN 3 Jl. Wolter Monginsidi RT.53 - 1.222688, 116.817130, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 65 M Lebar : 2 M Tebal : 10 Cm	(SPGRM) Perbaikan jalan pemukiman di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
82	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Wolter Monginsidi RT. 22 - 1.222562, 116.812360, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Perbaikan jalan pemukiman di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
83	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprapto RT. 51 -1.227438, 116.812989, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 50 M Lebar : 0,5 M Tinggi : 1 M	(Dana Kelurahan) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
84	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprapto RT. 51 -1.227797, 116.812932, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 70 M Lebar : 0.5 M Kedalaman : 1 M	(Dana Kelurahan) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
85	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprapto RT. 51 - 1.227438,116.812989, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 50 M Lebar : 3 M	(Dana Kelurahan) Perbaikan jalan pemukiman di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
86	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Wolter Monginsidi RT. 53 - 1.2234656403360988, 116.81728398426132, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	4 titik	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat (lebar jalan < 4 meter.)	
87	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan	Jl. Wolter Monginsidi RT. 42 - 1.226602, 116.812523, Kota	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	5 Titik	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemberdayaan Kelurahan	Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana		Kecamatan Balikpapan Barat (lebar jalan < 4 meter.)	
88	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
89	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Komplek Perumahan Guru RT. 39 (Kelurahan Baru Ulu), Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Pelatihan Pengembangan UMKM di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
90	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jln.Letjen Suprapto RT.04 Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, **Baru Ulu**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	P:122m L;2m	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	
91	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Wolter Monginsidi RT 18, 21, 22, 23, 26, 31, 47, dan RT 49, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, **Baru Ulu**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang 300 Meter Lebar 6 Meter Tebal 10 Cm	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	
92	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Kompleks Perumahan Guru RT 27 Kel.Baru Ulu, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, **Baru Ulu**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	P. 120m L.1m	Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	
93	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprapto Jalan Gang RT. 6, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, **Baru Ulu**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	P = 10 M L = 7 M	Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	
94	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Wolter Monginsidi RT. 53 -1.222688, 116.817221, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, **Baru Ulu**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana		Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	
Kelurahan Baru Tengah						
95	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT.05, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Tengah Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
96	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. 21 Januari Baru Arang RT.07 RT.08 RT.47, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Tengah Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
97	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jalan Sultan Hassanuddin RT 35 Kelurahan BaruTengah, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Tengah Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
98	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jl. sultan hasanuddin Gang Aman RT.19, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, **Baru Tengah**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Tengah Yang Terlaksana	T = 4 M, P = 45 M	Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	turap siring ulin rusak
99	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. 15 Oktober Gang Sepakat RT.15, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, **Baru Tengah**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Tengah Yang Terlaksana		Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Penutup dan Drainase rusak
100	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Soeprapto RT.27, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, **Baru Tengah**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Tengah Yang Terlaksana	P = 220 M, L = 0,5 M, T = 0,5 M	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	
101	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT.50, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, **Baru Tengah**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Tengah Yang Terlaksana		Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	
102	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jl. Letjend Soeprapto RT.29, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, **Baru Tengah**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Tengah Yang Terlaksana	P = 120 M L = 2 M	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	
Kelurahan Baru Ilir						
103	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprapto RT 06 Kel BAru Ilir (-1.234274,116.820708), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
104	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Gunung Gembira Rt 08 Kel Baru Ilir (-1.232894,116.820718), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
105	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Asrama Bukit RT 12 Kel Baru Ilir (-1.230905,116.821426), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
106	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan	Jl Karang Anyar RT 60 Kel BAru ILir (-1.240558,116.830767),	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemberdayaan Kelurahan	Kota Balikpapan	Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana			
107	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Adil Makmur RT 21 Kel Baru Ilir (-1.232850,116.823774), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
108	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Gunung Gembira RT 04 Kel BAru Ilir (-1.233978,11.819179), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Perbaikan jalan pemukiman di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
109	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Karang Anyar RT 47 Kel Baru Ilir (-1.236911,116.829015), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
110	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Adil Makmur RT 21 Kel Baru ILir (-1.232850,116.823774), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Perbaikan jalan pemukiman di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
111	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Karang Anyar RT 53 Kel BAru Ilir (-1.235993,116.829807), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
112	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Gunung Polisi RT 56 Kel Baru Ilir (-1.239072,116.831185), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Perbaikan jalan pemukiman di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
113	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jl. gunung Polisi Rt 47 Kel **Baru Ilir** (-1.235696,116.829064), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana	P: 200 M, L :2 M,	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	
114	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Gunung Polisi Rt 45 Kel **Baru Ilir** (-11.235532,116.828581), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana	P: 200 M, L : 0,4 M, T: 0,4 M	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	
115	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sultan Hasanuddin RT 02 Kel **Baru Ilir** (-1.233168,116.818807), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana	P: 100 M, L : 1 M, T: 0,6 M	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Drainase RT 02
116	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan	Jl Sultan Hasanuddin RT 03 Kel **Baru Ilir** (-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	P: 200 M, L: 2-3 M	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemberdayaan Kelurahan	1.233814,116.818870), Kota Balikpapan	Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana			lingkungan RT 03
117	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Gunung Gembira RT 04 Kel **Baru Ilir** (-1.233978,11.819179), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana	P: 80 M, L: 0,75 M, T: 0,5 M	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Drainase RT 04
Kelurahan Margomulyo						
118	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 46 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	M2	Perbaikan Posyandu	
119	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 11 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	P : 12 M L : 4 M T : 4 M	Perbaikan Posyandu	
120	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 44 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	M2	Perbaikan Posyandu	
121	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 24 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	P : 4 m L : 6 M T : 4 M	Perbaikan Posyandu	
122	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 38 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	P : 4,5 M L : 1 M T : 0,8 M	Gorong-Gorong	
123	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 27 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	L : 5 M T : 4 M	Perbaikan Gapura	
124	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	PKK Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	50 Orang	Pelatihan SDM Kader Posyandu	
125	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	PPATBM Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	15 Orang	Pelatihan SDM Kader PPATBM	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
126	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 11Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	2	PJU	
127	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 42 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	3	PJU	
128	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 18 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	7	PJU	
129	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 48 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	M2	Pelatihan Penjahit	
130	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 11Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	10 Orang	Pelatihan UMKM	
131	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 48 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	10 Orang	Pelatihan ngelas (WELDER)	
132	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 15 **Margo Mulyo**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	P: 100 M, L: 2 M, T: 1 M	Pengerukan sedimen pada sungai/drainase primer	Normalisasi Saluran Drainase SMAN 8
133	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 49 **Margo Mulyo**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	P: 70 M, L: 1,5 M, T: 1,7 M	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perbaikan Drainase
134	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 14, RT. 15, RT. 42, RT. 41, dan RT. 40 **Margo Mulyo**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	P: 800 M, L: 4 M, T: 0,05M	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Peningkatan Jalan Aspal (Jalan Tepian)
135	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 16 **Margo Mulyo**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	P: 125 M, L: 0,5 M, T: 0,6 M	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Drainase Baru

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
136	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 41 **Margo Mulyo**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	P: 20 M, L: 2 M, T: 1,5 M	Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Tambahan siring

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Renstra Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021-2026, Tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementrian/lembaga dikarenakan Renstra Kecamatan hanya berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Barat

Visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yaitu "Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman", dengan Misi sebagai berikut, *Misi kesatu* Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik, *Misi kedua* Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi, *Misi ketiga* Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang memadai, *Misi keempat* Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan, *Misi kelima* Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif.

Dari kelima misi di atas, ditetapkan Tujuan dari RPJMD yaitu *Tujuan kesatu*, Meningkatkan profesionalitas dan transparansi birokrasi, tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, *Tujuan kedua*, Meningkatkan SDM yang unggul, sehat dan berdaya saing, tujuan ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia, *Tujuan Ketiga*, Meningkatkan kinerja layanan infrastruktur perkotaan, yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, *Tujuan keempat*, Mewujudkan Lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan, yang diukur dengan indikator Indeks *Liveable City*, *Tujuan kelima*, Terciptanya pembangunan ekonomi inklusif, yang diukur dengan indikator "Indeks Gini".

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 maka Kecamatan Balikpapan Selatan secara fungsi dan tugas Kecamatan terkait erat dengan Misi ke-1, yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik.

2.3.1

Tujuan

Dalam menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pelayanan publik, maka tujuan jangka menengah Kecamatan Balikpapan Barat adalah: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik,

dengan Indikator Tujuan adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

2.3.2

Sasaran

Sasaran periode tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu *Sasaran kesatu*, Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban umum, sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan. *Sasaran Kedua,* Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, yang akan diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Balikpapan Barat.

Tabel 3.2

Hubungan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan				
VISI : TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN				
MISI I :				
1. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah Kecamatan	Peningkatan fungsi fasilitasi koordinasi dan manajemen internal	Perbaikan tata kelola administrasi dan sarana-prasarana perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik baik dari segi SDM dan Sarana-Prasarana	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

	ketenteraman dan ketertiban umum		pengetahuan dan teknologi	
			Perbaikan tata laksana penyelenggaran pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	
			Pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi	
			Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan publik	
		Penguatan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, ketentraman dan ketertiban lingkungan di Wilayah Kecamatan	Program pemberdayaan masyarakat dan kelurahan

		Fasilitasi kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan	Pembinaan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan lomba tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
		Tingkat pelaksanaan kegiatan trantibum di Kecamatan	Peningkatan koordinasi dan trantibum di Kecamatan yang Optimal	Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum

Sumber: Renstra Kecamatan Balikpapan Barat 2021-2026

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						target	Target	target	target	target	target		
1	2	3	4	5	9	10	12	14	16	18	20	22	23
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan				**Indeks Kepuasan Masyarakat**	80,37	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05	85,05	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban umum			**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	80,16	80,36	80,46	80,51	80,56	80,61	80,61	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						target	Target	target	target	target	target		
1	2	3	4	5	9	10	12	14	16	18	20	22	23
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti**									
		7.01.02.2.02	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.02.2.04	**Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	N/A	16%	17%	18%	19%	20%	20%	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						target	Target	target	target	target	target		
1	2	3	4	5	9	10	12	14	16	18	20	22	23
				Kelurahan yang terlaksana									
		7.01.03.2.03.01	**Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan yang optimal**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.04.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
	Meningkatnya Kualitas implementasi reformasi birokrasi di Perangkat Daerah			**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan**	N/A	27	27,25	27,5	28	28,25	28,25	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**N/A**	**70,5**	**71**	**71,5**	**72**	**72,5**	**72,5**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						target	Target	target	target	target	target		
1	2	3	4	5	9	10	12	14	16	18	20	22	23
			Daerah Kabupaten/Kota	***Internal Perangkat Daerah***									
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	**68,15**	**68,5**	**69,00**	**69,50**	**70,00**	**70,50**	**70,50**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan**	**N/A**	**70**	**70,25**	**70,50**	**71**	**71,25**	**71,50**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**N/A**	**60**	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**N/A**	**60**	**61**	**62**	**63**	**64**	**64**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**N/A**	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**69**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	N/A	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**69**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**N/A**	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**69**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						target	Target	target	target	target	target		
1	2	3	4	5	9	10	12	14	16	18	20	22	23
			Pemerintahan Daaerah	**Pemerintahan Daerah**									
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**N/A**	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**69**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Barat yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai RPJMD.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Balikpapan Barat selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program/Kegiatan
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber : Renstra Kecamatan Balikpapan Barat 2021-2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**83,66**	**18.620.857.645**	**APBD**			
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**28**	**16.868.061.645**	**APBD**			
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**72**	**16.868.061.645**	**APBD**			
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**69,5**	**-**	**APBD**			
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan**	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**70,5**	**10.900.000.000**	**APBD**			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Barat	66 Orang/Bulan	**10.900.000.000**	**APBD**			
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**62**	**100.000.000**	**APBD**			

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Balikpapan Barat	70 Paket	**100.000.000**	**APBD**			
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**67**	**1.536.332.000**	**APBD**			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Balikpapan Barat	13 Paket	**18.000.000**	**APBD**			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Balikpapan Barat	20 Paket	**580.000.000**	**APBD**			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kecamatan Balikpapan Barat	2 Paket	**460.352.000**	**APBD**			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Balikpapan Barat	17 Paket	**80.000.000**	**APBD**			
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Balikpapan Barat	2 Dokumen	**18.480.000**	**APBD**			
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kecamatan Balikpapan Barat	200 Laporan	**9.500.000**	**APBD**			

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Barat	11 Laporan	**370.000.000**	**APBD**			
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**67**	**96.300.000**	**APBD**			
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kecamatan Balikpapan Barat	3 Unit	**96.300.000**	**APBD**			
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**67**	**2.813.425.645**	**APBD**			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Balikpapan Barat	12 Laporan	**1.200.000**	**APBD**			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kecamatan Balikpapan Barat	408 Laporan	**350.215.000**	**APBD**			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Balikpapan Barat	57 laporan	2.462.010.645	**APBD**			

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**67**	**1.422.004.000**	**APBD**			
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Balikpapan Barat	35 Unit	**558.379.000**	**APBD**			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	Kecamatan Balikpapan Barat	4 Unit	**23.625.000**	**APBD**			
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Balikpapan Barat	13 Unit	**140.000.000**	**APBD**			
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Balikpapan Barat	9 Unit	**700.000.000**	**APBD**			
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**80,51**	**1.752.796.000**	**APBD**			
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti**	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**100**	**1.008.176.000**	**APBD**			
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintaha**	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**100**	**870.026.000**	**APBD**			

		n di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti							
7.01.02.2.01 .01	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Balikpapan Barat	1 Laporan	**870.026.000**	**APBD**			
7.01.02.2.01 .02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Barat	3 Dokumen	-	**APBD**			
7.01.02.2.02	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas**	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**100**	**50.000.000**	**APBD**			
7.01.02.2.02 .01	Sub Kegiatan : Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Barat	4 Dokumen	**25.000.000**	**APBD**			
7.01.02.2.02 .03	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Barat	1 Laporan	**25.000.000**	**APBD**			

7.01.02.2.04	**Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan**	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**100%**	**88.150.000**	**APBD**			
7.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	Kecamatan Balikpapan Barat	250 Dokumen	**88.150.000**	**APBD**			
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**18%**	**420.720.000**	**APBD**			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana**	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**100%**	**115.600.000**	**APBD**			
7.01.03.2.02.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Barat	10 Lembaga Kemasyarakatan	-	**APBD**			
7.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan : Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Kecamatan Balikpapan Barat	3 Laporan	**115.600.000**	**APBD**			
7.01.03.2.03.01	**Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Barat**		**305.120.000**	**APBD**			
7.01.03.2.03.01	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kecamatan Balikpapan Barat	3 Lembaga Kemasyarakatan	**80.000.000**	**APBD**			

7.01.03.2.03.04	Sub kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat terlaksana	Kecamatan Balikpapan Barat	2 Laporan	**179.200.000**	**APBD**			
7.01.03.2.03.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Barat	1 Laporan	**45.920.000**	**APBD**			
7.01.04.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum**	Kecamatan Balikpapan Barat	100%	**323.900.000**	**APBD**			
7.01.04.2.01.01	Sub kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Barat	12 Laporan	**323.900.000**	**APBD**			
7	**Unsur Kewilayahan**								
7.1	**Kecamatan**				772.290.000				
7.1.3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				772.290.000				
7.1.3.2.2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				161.500.000				

7.01.03.2.02.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Baru Ilir	7 Lembaga Kemasyarakatan	**16.500.000**	**APBD**			
7.01.03.2.02.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Kelurahan Baru ilir	7 Unit	**145.000.000**	**APBD**			
7.1.3.2.3	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**610.790.000**				
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kelurahan Baru ilir	1 Lembaga Kemasyarakatan	**610.790.000**	**APBD**			
7	**Unsur Kewilayahan**								
7.1	**Kecamatan**				671.435.000				
7.1.3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				671.435.000				
7.1.3.2.2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				154.500.000				
7.01.03.2.02.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Baru Tengah	6 Lembaga Kemasyarakatan	**16.500.000**	**APBD**			
7.01.03.2.02.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Kelurahan Baru Tengah	6 Unit	**138.000.000**	**APBD**			

7.1.3.2.3	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**516.935.000**				
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kelurahan Baru Tengah	1 Lembaga Kemasyarakatan	**516.935.000**	**APBD**			
7	**Unsur Kewilayahan**								
7.1	**Kecamatan**				798.500.000				
7.1.3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				798.500.000				
7.1.3.2.2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				291.181.000				
7.01.03.2.02.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Baru Ulu	4 Lembaga Kemasyarakatan	**16.500.000**	**APBD**			
7.01.03.2.02.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Kelurahan Baru Ulu	4 Unit	**150.000.000**	**APBD**			
7.01.03.2.02.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Baru Ulu	2 Pokmas/Ormas	**124.681.000**	**APBD**			
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**507.319.000**				
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kelurahan Baru Ulu	1 Lembaga Kemasyarakatan	**507.319.000**	**APBD**			
7	**Unsur Kewilayahan**								

7.1	**Kecamatan**				571.500.000				
7.1.3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				571.500.000				
7.1.3.2.2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				260.559.500				
7.01.03.2.02.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Margasari	Kelurahan Margasari	3 Lembaga Kemasyarakatan	**16.500.000**	**APBD**			
7.01.03.2.02.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Kelurahan Margasari	3 Unit	**142.000.000**	**APBD**			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Margasari	2 Pokmas/Ormas	**102.059.500**	**APBD**			
7.1.3.2.3	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				310.940.500				
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan Kelurahan Margasari	Kelurahan Margasari	1 Lembaga Kemasyarakatan	**310.940.500**	**APBD**			
7.01.03.2.03.03	Sub kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang disediakan	Kelurahan Margasari	-	-	**APBD**			
7	**Unsur Kewilayahan**								

7.1	**Kecamatan**				812.500.000				
7.1.3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				812.500.000				
7.1.3.2.2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				333.609.000				
7.01.03.2.02.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Margo Mulyo	5 Lembaga Kemasyarakatan	**16.500.000**	**APBD**			
7.01.03.2.02.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Kelurahan Margo Mulyo	9 Unit	**133.000.000**	**APBD**			
7.01.03.2.02.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Margo Mulyo	2 Pokmas/Ormas	**184.109.000**	**APBD**			
7.1.3.2.3	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**478.891.000**				
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kelurahan Margo Mulyo	1 Lembaga Kemasyarakatan	**478.891.000**	**APBD**			
7	**Unsur Kewilayahan**								
7.1	**Kecamatan**				400.800.000				
7.1.3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				400.800.000				

7.1.3.2.2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				230.474.500				
7.01.03.2.02.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kariangau	5 Lembaga Kemasyarakatan	**16.500.000**	**APBD**			
7.01.03.2.02.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Kelurahan Kariangau	5 Unit	**141.000.000**	**APBD**			
7.01.03.2.02.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kariangau	4 Pokmas/Ormas	**72.974.500**	**APBD**			
7.1.3.2.3	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				170.325.500				
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kelurahan Kariangau	1 Lembaga Kemasyarakatan	**170.325.500**	**APBD**			

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2023 merupakan penjabaran dari dari Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021 – 2026. Dimana Renja ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026.

Pada Renja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2023 ini terdiri dari 4 Program dan 11 Kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka selanjutnya akan ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renja sesuai dengan waktu yang tetal ditentukan.

Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Kecamatan Balikpapan Barat yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Serta untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Barat , baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Ranwal Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis

(Renstra) Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2021 – 2026, yang didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2023 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Seksi baik di Kelurahan maupun yang ada di Kecamatan;
2. Renja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
3. Renja Kecamatan Balikpapn Barat Tahun 2023 didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, Ranwal/Rankhir RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Kecamatan Balikpapan Barat);
4. Didalam penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2023 masih belum sempurna, terkait dengan pemahaman Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
5. Renja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2023, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2023 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Balikpapan Barat dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Balikpapan Barat perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan

program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2023 dengan efektif dan efisien;

2. Perlu adanya penetapan *reward and punishment* terhadap seluruh aparatur Kecamatan Balikpapan Barat;

3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;

4. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Barat , maka seluruh aparatur Kecamatan Balikpapan Barat secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Balikpapan, 09 Agustus 2023

Camat Balikpapan Barat ,

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Muhammad Arif Fadhilah

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Balikpapan

Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT								19.763.485.500,00					21.226.155.577,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								19.751.985.500,00					21.211.155.577,00
7	01				KECAMATAN								17.856.906.100,00					19.082.476.177,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								17.856.906.100,00					19.082.476.177,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								27.900.000,00					42.000.000,00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	1 Dokumen	70.00 Poin	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.000.000,00
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	60 Dokumen	70.00 Poin	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60 Dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	60 Dokumen	70.00 Poin	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	60 Dokumen	2.000.000,00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	2 Laporan	70.00 Poin	18.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	27.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.900.000.000,00					11.827.244.800,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	71 Orang/bulan	71 Poin	10.900.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	11.827.244.800,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100.000.000,00					100.000.000,00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	70 Paket	63 Poin	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	100.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.683.517.752,00					2.752.165.752,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	13 Paket	68 Poin	28.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	30.000.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	40 Paket	68 Poin	1.218.213.752,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	1.220.213.752,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	2 Paket	68 Poin	664.352.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	665.000.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	17 Paket	68 Poin	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	120.000.000,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	2 Dokumen	68 Poin	153.452.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	154.452.000,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	420 Laporan	68 Poin	9.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	420 Laporan	12.500.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	50 Laporan	68 Poin	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	550.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								346.300.000,00					375.000.000,00
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	4 Unit	68 Poin	346.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	375.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.314.563.348,00					2.336.200.000,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Layanan Penyediaan Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	12 Laporan	68 Poin	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	408 Laporan	68 Poin	370.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	408 Laporan	390.000.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	5 Laporan	68 Poin	1.943.363.348,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.945.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.484.625.000,00					1.649.865.625,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	40 Unit	68 Poin	590.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	614.600.000,00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	15 Unit	68 Poin	23.625.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	76.265.625,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	11 Unit	68 Poin	140.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	154.000.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	21 Unit	68 Poin	731.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	805.000.000,00
7	01				KECAMATAN								1.895.079.400,00					2.128.679.400,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								463.150.000,00					631.000.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								345.000.000,00					420.000.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
						Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	245.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	265.000.000,00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
						Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	155.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								30.000.000,00					40.000.000,00

7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan												
						Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan yang Ada di Kecamatan yang Berkualitas	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	100 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	20.000.000,00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan yang Ada di Kecamatan yang Berkualitas	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	100 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	20.000.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								88.150.000,00				171.000.000,00
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha												
						Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	250 Dokumen	100 %	88.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	250 Dokumen	171.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.043.600.000,00				1.108.350.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								123.600.000,00				168.000.000,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												

						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	19 %	34 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	34 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan												
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 %	9 Laporan	100 %	53.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 Laporan	88.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								920.000.000,00					940.350.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 %	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	670.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	680.000.000,00
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	19 %	2 Laporan	100 %	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	210.000.000,00
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													

						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 %	1 Laporan	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	50.350.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								388.329.400,00					389.329.400,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								388.329.400,00					389.329.400,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
						Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	100 %	388.329.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	389.329.400,00
X					-								11.500.000,00					15.000.000,00
X	XX				-								11.500.000,00					15.000.000,00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11.500.000,00					15.000.000,00
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11.500.000,00					15.000.000,00
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	60 Dokumen	70.00 Poin	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	60 Dokumen	2.000.000,00
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	72 Poin 72 Poin	1 Laporan	70.00 Poin	10.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13.000.000,00
					KELURAHAN BARU ILIR								1.282.608.000,00					1.215.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.282.608.000,00					1.215.000.000,00
7	01				KECAMATAN								1.282.608.000,00					1.215.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.282.608.000,00					1.215.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								194.000.000,00					210.000.000,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	19 %	35 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	19 %	7 Unit	100 %	185.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	200.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								1.088.608.000,00					1.005.000.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	19 %	63 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	1.088.608.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	63 Lembaga Kemasyarakatan	1.005.000.000,00
					KELURAHAN BARU TENGAH								1.147.528.000,00					1.165.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.147.528.000,00					1.165.000.000,00
7	01				KECAMATAN								1.147.528.000,00					1.165.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.147.528.000,00					1.165.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								195.000.000,00					205.000.000,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	19 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	19 %	6 Unit	100 %	185.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	190.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								952.528.000,00					960.000.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	19 %	54 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	952.528.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	54 Lembaga Kemasyarakatan	960.000.000,00
					KELURAHAN BARU ULU								1.156.448.000,00					1.175.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.156.448.000,00					1.175.000.000,00
7	01				KECAMATAN								1.156.448.000,00					1.175.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.156.448.000,00					1.175.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								220.000.000,00					235.000.000,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	19 %	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	19 %	7 Unit	100 %	185.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	190.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	19 %	7 Pokmas / Ormas	100 %	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	25.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								936.448.000,00					940.000.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													

						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	19 %	53 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	936.448.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	53 Lembaga Kemasyarakatan	940.000.000,00
					KELURAHAN MARGASARI								841.912.000,00					854.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								841.912.000,00					854.000.000,00
7	01				KECAMATAN								841.912.000,00					854.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								841.912.000,00					854.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								217.000.000,00					225.000.000,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	19 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	19 %	3 Unit	100 %	185.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	210.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	19 %	2 Pokmas / Ormas	100 %	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	0,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								624.912.000,00					629.000.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	19 %	32 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	616.912.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	32 Lembaga Kemasyarakatan	620.000.000,00
7	01	03	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	19 %	3 Unit	100 %	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	3 Unit	9.000.000,00
					KELURAHAN MARGO MULYO								1.199.220.000,00					1.328.893.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.199.220.000,00					1.328.893.000,00
7	01				KECAMATAN								1.199.220.000,00					1.328.893.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.199.220.000,00					1.328.893.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								384.500.000,00					513.893.000,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	19 %	5 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	15.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	19 %	5 Unit	100 %	185.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	190.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	19 %	2 Pokmas / Ormas	100 %	184.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	303.893.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								814.720.000,00					815.000.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													

						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	19 %	45 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	814.720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	45 Lembaga Kemasyarakatan	815.000.000,00
					KELURAHAN KARIANGAU								582.146.500,00					650.958.500,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								582.146.500,00					650.958.500,00
7	01				KECAMATAN								582.146.500,00					650.958.500,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								582.146.500,00					650.958.500,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								193.474.500,00					260.958.500,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	19 %	5 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	16.500.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	19 %	5 Unit	100 %	141.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	150.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	19 %	4 Pokmas / Ormas	100 %	42.974.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	94.458.500,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								388.672.000,00					390.000.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	19 %	17 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	388.672.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	17 Lembaga Kemasyarakatan	390.000.000,00
TOTAL													**25.973.348.000,00**					**27.615.007.077,00**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadhirat Allah SWT, karena atas ijin dan perlindungan- Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan peraturan tersebut diamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah tahun berikutnya.

Untuk memenuhi ketentuan diatas, maka Kecamatan Balikpapan Tengah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang terdiri dari 4 (Empat) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 52 (Lima puluh dua) Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 28.618.288.000,- (Dua puluh delapan milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dialokasikan melalui APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2024 ini dijadikan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan bagi seluruh jajaran Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

Balikpapan, Agustus 2023

Camat Balikpapan Tengah

AGUNG BUDI WIBOWO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 19
2.4 Review terhadap RKPD 22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 63
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 63
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 63
3.3 Program dan Kegiatan 64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 81
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 81
4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota 81
BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH 82
BAB VI PENUTUP 93
6.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 93
6.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 93
6.3 Rencana Tindak Lanjut 94

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022 5
TABEL 2.2 PENGUKURAN KINERJA UTAMA KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH 8
TABEL 2.3 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERTANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 10
TABEL 2.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH..... 19
TABEL 2.5 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2024..... 23
TABEL 2.6 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023 .. 34
TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025..... 66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perencanaan yang spesifik. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif diperlukan perencanaan yang matang dan terarah.

Perencanaan disusun baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Kerja perangkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026, yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Secara legal dan formal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. tahun 2024 ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

14. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;

15. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Stategis Perangkat Daaerah Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

RENJA Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Adapun Tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Tengah yaitu :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2024 ;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PrioritasPlafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD berjalan. Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap RENJA, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun Lalu mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Perangkat Daerah (DPPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022 dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022. Adapun realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
A	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Kecamatan**	**15.268.849.346**	**13.089.927.715**	**85,73%**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**15.268.849.346**	**13.089.927.715**	**85,73%**
a	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.551.957.000**	**8.785.375.308**	**83,26%**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.551.957.000	8.785.375.308	83,26%
b	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.374.076.000**	**1.321.776.100**	**96,19%**
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.952.000	34.952.000	100%
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.400.000	107.490.000	99,16%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	592.149.000	544.702.900	91,99%
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	179.155.000	176.105.000	98,30%
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	131.420.000	131.356.500	99,95%
7	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	5.460.000	91%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322.000.000	321.709.700	99,91%
c	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**225.000.000**	**225.000.000**	**100%**
9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.000.000	225.000.000	100%
d	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.132.775.400**	**1.917.495.813**	**89,91%**
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	472.749.000	281.673.846	59,58%
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.660.026.400	1.635.821.967	98,54%
e	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**985.040.946**	**840.280.494**	**85,30%**
12	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	277.000.000	211.370.120	76,31%
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.740.946	188.117.374	71,33%
14	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	244.300.000	242.062.000	99,08%
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	198.731.000	99,37%
B	**Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum**	**5.934.795.740**	**5.829.932.646**	**98,23%**
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**819.255.550**	**770.056.850**	**93,99%**
f	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**680.305.600**	**634.362.300**	**93,25%**
16	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	680.305.600	634.362.300	93,25%
g	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**58.950.000**	**57.027.500**	**96,74%**
17	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.400.000	2.370.000	98,75%
18	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.550.000	54.657.500	96,65%
h	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**79.999.950**	**78.667.050**	**98,33%**
19	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	79.999.950	78.667.050	98,33%
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**631.299.400**	**622.711.300**	**98,64%**
i	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**241.224.000**	**238.964.400**	**99,06%**
20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tingkat Kecamatan)	175.062.400	173.920.000	99,35%
21	Evaluasi Kelurahan	66.161.600	65.044.400	98,31%
j	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**390.075.400**	**383.746.900**	**98,38%**
22	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	65.799.500	65.159.500	99,03%
23	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	74.827.150	71.225.650	95,19%
24	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	234.216.950	232.335.550	99,20%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
25	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15.231.800	15.026.200	98,65%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (GUNUNG SARI ULU)	**564.702.800**	**561.640.544**	**99,46%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Gunung Sari Ulu)	**124.025.000**	**123.383.800**	**99,48%**
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.025.000	8.951.000	99,18%
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.000.000	84.569.000	99,49%
28	Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan	30.000.000	29.863.800	99,55%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Gunung Sari Ulu)	**440.677.800**	**438.256.744**	**99,45%**
29	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	440.677.800	438.256.744	99,45%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (GUNUNG SARI ILIR)	**900.487.590**	**883.448.180**	**98,11%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Gunung Sari Ilir)	**201.018.150**	**194.973.800**	**96,99%**
30	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.750.950	11.650.950	99,15%
31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	169.267.200	163.831.600	96,79%
32	Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan	20.000.000	19.491.250	97,46%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Gunung Sari Ilir)	**699.469.440**	**688.474.380**	**98,43%**
33	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	699.469.440	688.474.380	98,43%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KARANG REJO)	**1.016.485.700**	**1.006.748.709**	**99,04%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Karang Rejo)	**129.785.600**	**127.505.445**	**98,24%**
34	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.030.000	14.230.000	94,68%
35	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	82.935.600	81.635.445	98,43%
36	Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan	31.820.000	31.640.000	99,43%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Karang Rejo)	**886.700.100**	**879.243.264**	**99,16%**
37	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	886.700.100	879.243.264	99,16%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KARANG JATI)	**492.835.700**	**485.637.776**	**98,54%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Karang Jati)	**124.240.000**	**122.042.500**	**98,23%**
38	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.240.000	9.170.000	99,24%
39	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	95.000.000	94.105.000	99,06%
40	Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan	20.000.000	18.767.500	93,84%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Karang Jati)	**368.595.700**	**363.595.276**	**98,64%**
41	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	368.595.700	363.595.276	98,64%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (MEKAR SARI)	**520.858.000**	**517.933.875**	**99,44%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Mekar Sari)	**124.695.000**	**123.461.215**	**99,01%**
42	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.695.000	9.535.000	98,35%
43	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	95.000.000	94.234.715	99,19%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
44	Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan	20.000.000	19.691.500	98,46%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Mekar Sari)	**396.163.000**	**394.472.660**	**99,57%**
45	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	396.163.000	394.472.660	99,57%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (SUMBER REJO)	**726.987.000**	**724.784.712**	**99,70%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Sumber Rejo)	**125.483.700**	**125.055.560**	**99,66%**
46	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.483.700	10.403.700	99,24%
47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.000.000	83.651.860	99,59%
48	Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan	31.000.000	31.000.000	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Sumber Rejo)	**601.503.300**	**599.729.152**	**99,71%**
49	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	601.503.300	599.729.152	99,71%
IV	**PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM**	**261.884.000**	**256.970.700**	**98,12%**
k	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**261.884.000**	**256.970.700**	**98,12%**
50	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Terkait	261.884.000	256.970.700	98,12%
Total		**21.203.645.086**	**18.919.860.361**	**89,23%**

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 50 (Lima puluh) sub kegiatan pada Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebesar Rp. 21.203.645.086,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 18.919.860.361,- (89,23 %).

Evaluasi pengukuran Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah didasarkan pada Sasaran Strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80,85	86,63	107%
2.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	27	29,82	110%

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2022 dalam kategori **berkinerja Sangat Baik** dengan rincian sebagai

berikut:

a. Pencapaian Sasaran "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum" dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 107% atau predikat "*Sangat Tinggi*".
b. Pencapaian Sasaran "Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah" dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mencapai 110% atau predikat "*Sangat Tinggi*".

Evaluasi Realisasi program/kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut:

a. Program yang Memenuhi Target
   Sebanyak 2 program yang memenuhi target ditentukan yaitu program pemerintahan dan pelayanan publik dan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.
b. Program yang Melebihi Target
   Sebanyak 2 program yang melebihi target yang ditentukan yaitu Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana Tabel T-C.29 berikut:

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Pertangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kota Balikpapan

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2023)		
									Target Renja Perangakt Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2023	Realisasi Capaian Progrm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Nilai	351,5	90,79	70	79,44	113%	70,15	240,38	68%
01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	352,94	N/A	70	69,97	100%	70,15	140,12	40%
01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	351,5	N/A	70	83,25	119%	70,15	153,40	44%
01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layana Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	351,5	N/A	70	-	0%	70,15	70,15	20%
01	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	351,5	N/A	70	75,04	107%	70,15	145,19	41%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2023)		
									Target Renja Perangakt Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2023	Realisasi Capaian Progrm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	351,5	N/A	70	81,25	116%	70,15	151,40	43%
01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Derah	Poin	351,5	N/A	70	79,03	113%	70,15	149,18	42%
01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	351,5	N/A	70	78,63	112%	70,15	148,78	42%
01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Persen	500	100	100	100	100	100	300	60%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2023)		
									Target Renja Perangakt Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2023	Realisasi Capaian Progrm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasae rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%
01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan yang ada dikecamatan yang berkualitas	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%
01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai standar pelayanan	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2023)		
									Target Renja Perangakt Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2023	Realisasi Capaian Progrm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen	63,75	N/A	12,75	23,37	1,83	12,75	36,12	57%
01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam mebangun kelurahan	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%
01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen	63,75	N/A	12,75	21,78	171%	12,75	34,53	54%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2023)		
									Target Renja Perangakt Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2023	Realisasi Capaian Progrm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Gunung Sari Ulu)	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam mebangun kelurahan	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%
01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Gunung Sari Ulu)	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen	63,75	N/A	12,75	35,49	278%	12,75	48,24	76%
01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Gunung Sari Ilir)	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam mebangun kelurahan	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2023)		
									Target Renja Perangakt Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2023	Realisasi Capaian Progrm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
01	03	2,03		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Gunung Sari Ilir)	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen	63,75	N/A	12,75	13,18	103%	12,75	25,93	41%
01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Karang Rejo)	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam mebangun kelurahan	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%
01	03	2,03		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Karang Rejo)	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2023)		
									Target Renja Perangakt Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2023	Realisasi Capaian Progrm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen	63,75	N/A	12,75	14,20	111%	12,75	26,95	42%
01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Karang Jati)	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam mebangun kelurahan	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%
01	03	2,03		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Karang Jati)	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen	63,75	N/A	12,75	24,94	196%	12,75	37,69	59%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2023)		
									Target Renja Perangakt Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2023	Realisasi Capaian Progrm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Mekar Sari)	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam mebangun kelurahan	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%
01	03	2,03		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Mekar Sari)	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen	63,75	N/A	12,75	30,64	240%	12,75	43,39	68%
01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Sumber Rejo)	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam mebangun kelurahan	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2023)		
									Target Renja Perangakt Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2023	Realisasi Capaian Progrm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
01	03	2,03		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Sumber Rejo)	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%
01	04			PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordiansi dengan instansi vertikal dalam upaya penyelenggaraan trantibum di keamatan yang optimal	Persen	500	100	100	100	100	100	300	60%
01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persenatase rekomendasi hasil koordinasi yang dilakasanakan oleh kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Persen	500	N/A	100	100	100	100	200	40%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah dengan realisasi pelaksanaanya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah

Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Thn 2020 (n-2)	Thn 2021 (n-1)	Thn 2022 (n)	Thn 2023 (n+1)	Thn 2020 (n-2)	Thn 2021 (n-1)	Thn 2022 (n)	Thn 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			80,55	80,75	80,85	81	80,70	84,13	86,63	86,63	
2	Nilai Reformasi Birokrasi PD					27	27,25	N/A	N/A	29,82	29,82	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016. Adapun isu-isu penting terkait tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah antara lain :

1. Pelayanan Publik
   a. Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas
   b. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik
   c. Digitalisasi dan berbagai layanan baik di Kecamatan maupun di Kelurahan
   d. Tuntutan Pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh kalangan masyarakat yang normal, kebutuhan khusus, pra sejahtera, kesetaraan gender hingga keterbatasan pemahaman online
2. Penyelenggaraan Pembangunan
   a. Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara

b. Terbatasnya anggaran hingga kurangnya dukungan kepedulian warga tentang fasilitas umum
c. Terdapat daerah yang rawan bencana baik, banjir, tanah longsor maupun bencana lainnya

3. Keamanan dan Ketertiban Umum Lingkungan
   a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban serta kebersihan lingkungan hidup
   b. Diperlukan sinergitas berbagai instansi dan kalangan dalam menjaga secara bersama keamanan yang kondusif
4. Pemberdayaan Masyarakat
   a. Belum optimalnya pembinaan terkait pemberdayaan masyarakat
   b. Rendahnya partisipasi masyrakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
   c. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
   d. Diperlukannya sinkronisasi pengurusan ijin usaha dari aturan pusat hingga ke daerah
5. Tertib Administrasi Pemerintahan dan pertanahan
   a. Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah yang bermasalah/ tumpang tindih
   b. Terbatasnya sarana pendukung baik secara administrasi maupun sarana lainnya yang mendukung tertib administrasi dan lokasi tanah
6. Manajemen Internal
   a. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal
   b. Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan kurang memadai
   c. Terbatasnya anggaran pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia
   d. Perubahan aturan yang harus disinergikan dengan kondisi masyarakat maupun wilayah kerja.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagaiberikut :

1. Kualitas dan kuantitas Staf yang kurang memadai
2. Sarana dan prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan dan Kelurahan.
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan;
4. Pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan pegawai terkait penggunaan teknologi informasi terkini.

5. Kecamatan Balikpapan Tengah belum ditetapkan sebagai perangkat daerah yang termasuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sehingga perlu kerjasama seluruh pihak untuk mewujudkan Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai bagian dari Zona Integritas Pemerintah Kota Balikpapan.
6. Terjadinya Pandemi Covid 19 yang belum dapat diperkirakan berakhirnya.
7. Data aset Kecamatan Balikpapan Tengah yang belum tersusun dengan baik.
8. Adanya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yang disebabkan Persepsi yang belum sama antar Pelaku Pembangunan terhadap konsepsi Pembangunan yang berwawasan lingkungan.
9. Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kelurahan Mekar Sari yang masih menyewa/belum kembali dibangun oleh Pemerintah.

Sedangkan peluang yang bisa menjadi pendorong bagi Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemimpin, pejabat struktural dengan para staf Kelurahan dan Kecamatan agar tercipta suasana kerja dan pelayanan publik yang harmonis dan kondusif;
2. Koordinasi yang baik dan kepedulian dari lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan swasta yang baik dalam membantu dan mendukung peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
3. Tuntutan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Balikpapan Tengah dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai baik secara klasikal maupun dalam jaringan (daring).
5. Akses informasi yang cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme sejaan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
7. Tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat sebagai pendorong usaha mikro kecil menengah ke atas.

2.4 Review terhadap RKPD

Proses rancangan RENJA Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2024 berdasarkan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Kota Balikpapan ditetapkan. Selain ini dalam Menyusun rancangan RENJA SKPD juga mendasari pada Renstra 2021 – 2026 yang telah disahkan pula. Hal tersebut sebagai dasar dalam Menyusun Program dan kegiatan pada RKPD tahun 2024 dimana besaran anggaran yang direncanakan Kecamatan Balikpapan Tengah disesuaikan dengan kebutuhan dari kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetap oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra OPD

Berikut adalah tabel review terhadap RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan :

Tabel 2.5 Review terhadap RKPD tahun 2024

Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN ADMINISTRASI				**17.370.036.250,00**	**KECAMATAN ADMINISTRASI**				**17.370.036.250,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**70.45 Poin**	**17.370.036.250,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**86,63 Poin**	**17.481.152.048,00**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**70.45 Poin**	**10.602.718.724,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		***IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**70.45 Poin**	**10.602.718.724,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/b ulan	10.602.718.724,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	55 Orang/bulan	10.602.718.724,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**70.45 Poin**	**79.852.500,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		***IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**70.45 Poin**	**79.616.000,00**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	79.852.500,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	55 Paket	79.616.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**70.45 Poin**	**2.371.661.600,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		***IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**70.45 Poin**	**2.485.533.100,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.951.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	34.949.400,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	57 Paket	486.475.100,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	57 Paket	600.372.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	812.595.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	7 Paket	812.583.900,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	281.220.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	281.220.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	22900 Dokumen	131.420.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	22900 Dokumen	131.417.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	25.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	5 Laporan	24.990.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	600.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	10 Laporan	600.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**70.45 Poin**	**540.369.200,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		***IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**70.45 Poin**	**539.178.724,00**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	250.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	1 Unit	249.611.700,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	55.369.200,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	54.667.024,00	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	235.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	234.900.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**70.45 Poin**	**2.326.004.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**70.45 Poin**	**2.325.305.800,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	450.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	449.311.200,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 Laporan	1.876.004.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	38 Laporan	1.875.994.600,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**70.45 Poin**	**1.449.430.226,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**70.45 Poin**	**1.448.799.700,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	277.235.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	11 Unit	277.124.700,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	344.162.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	30 Unit	344.017.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 Unit	228.033.226,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	210 Unit	227.740.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	600.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	6 Unit	599.918.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti**	**100 %**	**699.991.900,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		***Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti***	**100 %**	**699.991.900,00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti**	**100 %**	**534.696.300,00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		***Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti***	**100 %**	**534.696.300,00**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	234.696.300,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	3 Laporan	234.696.300,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	300.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	5 Dokumen	300.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas**	**100 %**	**80.295.600,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		***Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas***	**100 %**	**80.295.600,00**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	80.295.600,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	6 Laporan	80.295.600,00	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayanai Sesuai Standar Pelayanan**	**100 %**	**85.000.000,00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		***Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayanai Sesuai Standar Pelayanan***	**100 %**	**85.000.000,00**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	300 Dokumen	85.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	300 Dokumen	85.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase Ratarata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**	**12,75 %**	**1.625.004.650,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.625.004.000,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**120.372.450,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana***	**100 %**	**120.372.200,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30 Lembaga Kemasyarakatan	59.516.250,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	30 Lembaga Kemasyarakatan	59.516.200,00	
	Evaluasi Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	60.856.200,00	Evaluasi Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	2 Laporan	60.856.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan**	**100 %**	**1.504.632.200,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		***Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan***	**100 %**	**1.504.631.800,00**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyara katan	858.463.400,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	1 Lembaga K emasyarakat an	858.463.400,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8 Laporan	359.217.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	8 Laporan	359.216.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kel/Desa					Kel/Desa				
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	286.951.800,00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	4 Laporan	286.951.500,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal**	**100 %**	**827.700.200,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		***Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal***	**100 %**	**827.700.200,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum**	**100 %**	**827.700.200,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		***Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum***	**100 %**	**827.700.200,00**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40 Laporan	827.700.200,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	40 Laporan	827.700.200,00	
	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU				**1.140.852.500,00**	**KELURAHAN GUNUNG SARI ULU**				**1.220.852.500,00**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase Ratarata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**	**12,75 %**	**1.140.852.500,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.220.852.500,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**371.804.500,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana***	**100 %**	**451.804.500,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45 Lembaga Kemasyarakatan	21.804.500,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	45 Lembaga Kemasyarakatan	21.804.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	41 Unit	268.567.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	41 Unit	348.567.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	81.433.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	81.433.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan**	**100 %**	**769.048.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		***Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan***	**100 %**	**769.048.000,00**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	44 Lembaga Kemasyarakatan	769.048.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	44 Lembaga Kemasyarakatan	769.048.000,00	
	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR				**1.579.276.500,00**	**KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR**				**1.658.779.900,00**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.579.276.500,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.658.779.900,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**377.004.500,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana***	**100 %**	**456.507.900,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	73 Lembaga Kemasyarakatan	27.004.500,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	73 Lembaga Kemasyarakatan	27.004.100,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	230.993.200,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	8 Unit	310.497.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	119.006.800,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	119.006.800,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan**	**100 %**	**1.202.272.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		***Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan***	**100 %**	**1.202.272.000,00**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	71 Lembaga Kemasyarakatan	1.202.272.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	71 Lembaga Kemasyarakatan	1.202.272.000,00	
	KELURAHAN KARANG REJO				**1.862.720.500,00**	**KELURAHAN KARANG REJO**				**1.950.511.150,00**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.862.720.500,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.950.511.150,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**382.204.500,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana***	**100 %**	**470.136.850,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	91 Lembaga Kemasyarakatan	32.204.500,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	91 Lembaga Kemasyarakatan	32.084.500,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	63 Unit	300.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	63 Unit	388.091.950,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	49.960.400,00	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan**	**100 %**	**1.480.516.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		***Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan***	**100 %**	**1.480.374.300,00**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	89 Lembaga Kemasyarakatan	1.480.516.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	89 Lembaga Kemasyarakatan	1.480.374.300,00	
	KELURAHAN KARANG JATI				**1.014.988.500,00**	**KELURAHAN KARANG JATI**				**1.014.758.300,00**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.014.988.500,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.014.758.300,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**369.204.500,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana***	**100 %**	**369.200.600,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	37 Lembaga Kemasyarakatan	19.204.500,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	37 Lembaga Kemasyarakatan	19.204.500,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	329.786.300,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	16 Unit	329.782.600,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	20.213.700,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	20.213.500,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan**	**100 %**	**645.784.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		***Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan***	**100 %**	**645.557.700,00**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	35 Lembaga Kemasyarakatan	645.784.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	35 Lembaga Kemasyarakatan	645.557.700,00	
	KELURAHAN MEKAR SARI				**1.076.020.500,00**	**KELURAHAN MEKAR SARI**				**1.122.914.680,00**	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.076.020.500,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.122.914.680,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**369.204.500,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana***	**100 %**	**416.576.380,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	41 Lembaga Kemasyarakatan	19.204.500,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	41 Lembaga Kemasyarakatan	19.167.800,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	64 Unit	237.761.100,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	64 Unit	285.208.680,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	112.238.900,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	5 Pokmas / Ormas	112.199.900,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan**	**100 %**	**706.816.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		***Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan***	**100 %**	**706.338.300,00**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	39 Lembaga Kemasyarakatan	706.816.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	39 Lembaga Kemasyarakatan	706.338.300,00	
	KELURAHAN SUMBER REJO				**1.421.696.500,00**	**KELURAHAN SUMBER REJO**				**1.512.516.500,00**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.512.516.500,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.512.516.500,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana**	**100 %**	**374.404.500,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana***	**100 %**	**465.224.500,00**	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	63 Lembaga Kemasyarakatan	24.404.500,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	63 Lembaga Kemasyarakatan	24.404.500,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	327.663.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	27 Unit	418.483.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	22.337.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	22.337.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan**	**100 %**	**1.047.292.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		***Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan***	**100 %**	**1.047.292.000,00**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	61 Lembaga Kemasyarakatan	1.047.292.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	61 Lembaga Kemasyarakatan	1.047.292.000,00	
JUMLAH					**28.618.288.000,00**	**JUMLAH**				**29.114.181.178,00**	

Berdasarkan hasil review pada tabel 2.5 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah kegiatan yang telah tercantum pada RKPD adalah sebanyak 4(empat) Program 12(dua belas) kegiatan dengan 52(lima puluh dua) Sub Kegiatan Berdasarkan evaluasi, masukan dan saran melalui Forum Perangkat Daerah jumlah kegiatan pada RKPD tetap 4(empat) Program 12(dua belas) kegiatan dengan 52(lima puluh dua) Sub Kegiatan.
2. Dalam hal perencanaan anggaran, masih dapat memenuhi sesuai dengan kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan yang terkait tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah diperole melaluo Forum Musyawarah Perenvanaan Pembangunan (Musrenbang) ditingkat Kecamatan dan Kota. Hasil Musrenbang Kecamatan berupa usulan Prioritas Musrenbang yang disampaikan oleh masing-masing Kelurahan pada saat Forum SPKD/Musrenbang Kota yang diselenggarakan pada tanggal Fisik yang diselenggarakan Tahun 2023. Terdapat beberapa usulan dari delegasi Kelurahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan tengah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Balikpapan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Kelurahan Gunung Sari Ulu					
1	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan pengelolaan sampah masih banyak anak dan remaja tidak mengetahui manfaat pengolahan sampah Volume : 1 Kegiatan	Gunung sari Ulu
2	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Anak dan Remaja belum ada edukasi pengelolaan keuangan bagi anak dan remaja	Gunung sari Ulu (DANKEL 10)
3	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Edukasi Tanggung Jawab dan Pengendalian Diri pada anak belum ada edukasi penumbuhan sifat tanggung jawab dan pengendalian diri anak Volume : 1 Kegiatan	Gunung sari Ulu
4	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Edukasi Penanaman Jiwa Anti Korupsi bagi Anak belum ada edukasi anti korupsi bagi anak Volume : 1 Kegiatan	Gunung sari Ulu
5	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Pelatihan Character Building bagi Anak belum adanya pelatihan pembentukkan karakter dan penggalian potensi anak Volume : 1	Gunung sari Ulu

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	
6	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penguatan peran anak sebagai pelopor dan pelapor dalam penanganan Bullying dan Kesehatan Mental Belum adanya edukasi penanganan dan pencegahan bullying dan kesadaran kesehatan mental anak Volume : 1 Kegiatan	Gunung sari Ulu
7	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pola Asuh Anak masih adanya kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak Volume : 1 Kegitan	Gunung sari Ulu
8	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan kewirausahaan bagi Generasi Z belum ada edukasi kewirausahaan bagi generasi muda volume:1 kegiatan	Gunung sari Ulu
9	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan penanganan Kebakaran di Lingkungan Rumah Tangga dan langkah langkah yg di ambil apabila di rumah ada kebocoran tabung gas volume : 1 kegiatan	Gunung sari Ulu
10	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Capacity Building Belum adanya kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan seluruh stakeholder kelurahan volume:1 kegiatan	Gunung sari Ulu
11	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Investasi Saham bagi Pemula Banyak warga yang tidak memahami investasi saham volume: 1 kegiatan	Gunung sari Ulu
12	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Bahasa Isyarat untuk mewujudkan Kelurahan Ramah Difabel Banyak warga yang kesulitan berkomunikasi dengan kaum difabel volume : 1 kegiatan	Gunung sari Ulu (DANKEL 9)
13	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan pengembangan kompetensi pelaku UMKM Banyak pelaku umkm belum memiliki legalitas dan tidak memenuhi standar produksi volume : 1 kegiatan	Gunung sari Ulu (DANKEL 6)
14	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan membatik Belum terfasilitasinya penggiat batik volume:1 kegiatan	Gunung sari Ulu
15	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Edukasi Gerakan Zero Anak Putus Sekolah (Zero ATS) Masih terdapat kasus anak putus sekolah volume: 1 kegiatan	Gunung sari Ulu
16	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943,	Jumlah Pokmas/Ormas yang	Pelatihan Konten Kreatif belum ada pelatihan agar warga bijak membuat konten	Gunung sari Ulu

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	116.846817 , Kota Balikpapan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	media sosial volume : 1 kegiatan	
17	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Edukasi Kelas Pengasuhan perlu edukasi masyarakat untuk upaya pencegahan kekerasan pada anak volume : 1 kegiatan	Gunung sari Ulu
18	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Tata Rias Belum terfasilitasinya warga yang memiliki keterampilan merias Volume: 1 kegiatan	Gunung sari Ulu
19	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) Tingginya kenakalan pada anak karena pola asuh yang kurang tepat volume:1 kegiatan	Gunung sari Ulu
20	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pembekalan Calon Pengantin Rendahnya kesadaran akan tanggung jawab pernikahan volume: 1 kegiatan	Gunung sari Ulu
21	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader PPART Belum terfasilitasinya kegiatan penguatan kapasitas PPART volume:1 kegiatan	Gunung sari Ulu
22	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kampung Pustaka RT.16 , -1.258722, 116.842895 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Edukasi Pendidikan Seks Usia Dini Belum efektifnya upaya pencegahan pernikahan dini dan kasus LGBT volume: 1 kegiatan	Gunung sari Ulu (DANKEL 8)
23	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kampung Pustaka RT.16 , -1.258722, 116.842895 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Edukasi Pola Asuh Anak Penurunan adab pada anak dan Masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak volume: 1 kegiatan	Gunung sari Ulu
24	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kampung Pustaka RT.16 , -1.258722, 116.842895 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan pemberdayaan literasi media dan informasi Tingkat literasi masyarakat masih rendah Volume: 1 kegiatan	Gunung sari Ulu
25	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.40, -1.255187, 116.852269 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada bangunan posyandu p : 2 m , l : 2 m , t : 3 m	Gunung sari Ulu (SPGRM 9)
26	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.40,-1.257234, 116.848391 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Parit rusak sebagian masih berupa tanah p: 90 m , l : 0,30 m , t:0,30 m	Gunung sari Ulu (SPGRM 4)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
27	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.39, -1.252306, 116.850863 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lokasi jalan menurun ketika hujan air menggerus tanah dan menyebabkan longsor p : 80 m , l : 0,40 m , t : 0,40 m	Gunung sari Ulu(SPG RM 6)
28	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.30 ,-1.256581, 116.847805 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	atap, plafon, lantai dan dinding posyandu perlu perbaikan p : 5 m , l : 2 m , t : 3 m	Gunung sari Ulu
29	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.29 , -1.258880, 116.848898 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lingkngan belum memiliki posyandu p : 4m , l : 4 m , t : 3 m	Gunung sari Ulu(SPG RM 7)
30	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT.29 , -1.258880, 116.848898 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan pembuatan kompos. Banyaknya sampah daun kering di kawasan RT.29 volume : 1 Kegiatan	Gunung sari Ulu
31	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.26, -1.256287, 116.843722 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lingkungan belum memiliki tiang PJU volume : 4 titik	Gunung sari Ulu(DANKEL 2)
32	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pengembangan Modal Usaha bagi pelaku UMKM. Banyak pemilik usaha kesulitan mengembangkan modal Banyak pemilik usaha kesulitan mengembangkan modal Volume : 1 Kegiatan	Gunung sari Ulu
33	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.15 ,-1.258553, 116.844187 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	atap dan lantai musholah rusak dan cat dinding kusam p : 7 m , l : 8 m , t : 3 m	Gunung sari Ulu
34	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.14 Gg.Sampurna , -1.258665, 116.846213 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lantai dan Dinding parit rusak p : 60 m , l : 0,5 m , t : 1 m	Gunung sari Ulu(SPG RM 2)
35	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.41, -1.255187, 116.852269 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada bangunan posyandu p : 6 m , l : 4 m , t : 3 m	Gunung sari Ulu
36	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Gg. Kerukunan RT.37,-1.257526, 116.848094 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	atap, plafon, lantai dan dinding posyandu perlu perbaikan p : 4 m , l : 4 m , t : 3 m	Gunung sari Ulu(SPG RM 5)
37	Program : Pemberdayaan	RT.16 , -1.259809,	Jumlah Sarana	Lingkungan belum memiliki	Gunung

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	116.845059 , Kota Balikpapan	dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	tiang pju volume : 5 titik	sari Ulu(DAN KEL 3)
38	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.11 Jalan menuju TPA Nurul Jadid , -1.259703, 116.841611, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan rusak dan berlubang p : 67,5 m , l : 1,5 m , t :0,10 m	Gunung sari Ulu
39	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.11 Gg.Famili , -1.259438, 116.840877, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan rusak , sebagian berupa tanah p : 80 m , l : 1,5 m , t :0,10 m	Gunung sari Ulu(SPG RM 1)
40	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.11 Gg.TPA, -1.259703, 116.841611, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan Rusak p : 25 m , l : 1,5 m , t :0,10 m	Gunung sari Ulu
41	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.10 , -1.259809, 116.845059, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan Retak P: 50 M, L: 2.5 M, T: 0,10 M	Gunung sari Ulu(SPG RM 8)
42	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.10 , -1.259951, 116.840795 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 titik belum ada tiang PJU, 1 titik belum ada ornamen Volume : 5 Titik	Gunung sari Ulu(DAN KEL 4)
43	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.09 , -1.260591, 116.840813, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Plafon dan atap mushollah rusak p : 8 m , l : 7 m , t : 3 m	Gunung sari Ulu
44	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.08 Gg.Nasri, -1.262232, 116.839921 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Atap dan dinding bangunan poyandu rusak p : 4 m , l : 4 m , t : 3 m	Gunung sari Ulu(SPG RM 10)
45	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.06, -1.260834, 116.845032, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Parit rusak, sebagian berupa tanah p : 50 m , l : 0,5 m , t : 0,40 m	Gunung sari Ulu
46	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana	RT.06 , -1.259904, 116.845193, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lingkungan gelap dan belum memiliki tiang lampu volume : 4 titik	Gunung sari Ulu(DAN KEL 5)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Kelurahan				
47	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.06 , -1.259809, 116.845059 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Penerangan Jalan Umum Rusak Volume : 2 Titik	Gunung sari Ulu(DAN KEL 1)
48	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Banyak warga yang masih belum mengetahui tata cara pengurusan jenazah	Gunung sari Ulu(DAN KEL 7)
49	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.02 -1.260729, 116.846395, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan masih berupa tanah p: 75 m , l : 2 m , t : 0,10 m	Gunung sari Ulu(SPG RM 3)
50	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.01 JL.Wiraswasta, -1.263225, 116.849008, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan Rusak dan berlubang , p: 50 m , l:1,5 m, t: 0,10 m	Gunung sari Ulu
Kelurahan Gunung Sari Ilir					
51	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.46, JL. MILONO (GG PETERNAKAN), Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan drainase dan jembatan	Gunung sari Ilir
52	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.46, JL. MILONO, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan drainase	Gunung sari Ilir
53	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 46, JL. MILONO, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	semenisasi jalan	Gunung sari Ilir
54	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.27, JL. MEKAR SARI, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan drainase	Gunung sari Ilir
55	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.27, JL. MEKAR SARI, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	penambahan jalan (gang masjid al fatihah)	Gunung sari Ilir
56	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan :	RT.66, JL. KARYA MURNI, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	pembangunan posyandu	Gunung sari Ilir

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Terbangun		
57	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.53, JL. JEND A YANI (PREVAB), Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan drainase RT.53	Gunung sari Ilir
58	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.30, JL. KAMBOJA, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan drainase RT.30	Gunung sari Ilir
59	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.20, JL. MEKAR SARI, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan drainase RT.20	Gunung sari Ilir
60	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.63, JL. TARUNA SARI, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	semenisasi jalan	Gunung sari Ilir
61	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.54, JL. JEND A YANI, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	pembuatan penutup drainase	Gunung sari Ilir
62	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.51, JL. RE MARTADINATA, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	semenisasi jalan yang rusak	Gunung sari Ilir
63	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 41, JL. JEND A YANI, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PERBAIKAN DRAINASE (TEMBUSAN RT.42)	Gunung sari Ilir
64	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.20, JL. MEKAR SARI, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan drainase	Gunung sari Ilir
65	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 12, JL. ABADI, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	semenisasi jalan	Gunung sari Ilir
66	Program : Pemberdayaan	RT.12, JL. ABADI,	Jumlah Sarana	Semenisasi jalan	Gunung

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Balikpapan	dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		sari Ilir
67	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT.66, JL. KARYA MURNI, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pelatihan perbengkelan, pelatihan pembuatan roti dan kue, pelatihan percetakan, pelatihan multimedia, pelatihan marketing	Gunung sari Ilir
68	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT.6, JL. BANJAR, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pelatihan menjahit, pelatihan tata rias, pelatihan pembuatan roti dan kue, pelatihan hidropnik, pelatihan salon	Gunung sari Ilir
69	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT.3, JL.MAYJEND SUTOYO, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pelatihan hidropnik	Gunung sari Ilir
70	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT.54, JL. JEND A YANI, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pelatihan pembuatan roti dan kue	Gunung sari Ilir
71	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT.49, JL. JEND A YANI, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pelatihan membatik, pelatihan hidroponik, pelatihan menjahit, pelatihan kewirausahaan UMKM, pelatihan peternakan ikan	Gunung sari Ilir
Kelurahan Karang Rejo					
72	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	jl.P.A.Antasari No.21 RT.63, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan PUSKESSOS (Pusat Kesejahteraan Sosial)	Karang Rejo(DANKEL 8)
73	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jl.P.Antasari No.21 RT.63, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan dan PPATBM (Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	Karang Rejo(DANKEL 11)
74	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jl.P.Antasari No.21 RT.63, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Satgas Bersinar (Pembinaan dan Pelatihan Pemberantasan Narkoba)	Karang Rejo(DANKEL 10)
75	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jl.P.Antasari No.21 RT.63 , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan dan Pembinaan Poskamling LPM	Karang Rejo
76	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan	Jl.P.Antasari No.21 RT.63, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	Peltihan Mengemudi	Karang Rejo(DANKEL 9)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Masyarakat Kelurahan		Kelurahan		
77	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl.Jend.A.Yani RT.23, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan siring	Karang Rejo(SP GRM 17)
78	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. wiraswasta Rt. 70, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Peningkatan / Perbaikan Jalan	Karang Rejo(DA NKEL 5)
79	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	JL. rohani RT.50, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan POSYANDU rt. 50	Karang Rejo
80	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. senayan RT.74, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembuatan dan perbaikan parit / drainase	Karang Rejo(SP GRM 15)
81	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. p. antasari RT. 05, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan parit/drainase	Karang Rejo(SP GRM 16)
82	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. sulawesi rt. 59, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan bak sampah	Karang Rejo(SP GRM 14)
83	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. dr. sutomo rt. 61, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan parit / drainase	Karang Rejo(SP GRM 13)
84	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	jl. p. antasari rt. 63, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pelatihan membuat naget lele dan membuat kacang disco	Karang Rejo(DA NKEL 7)
85	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	jl. jend. a. yani (hotel pasifik), Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pelatihan pemantapan pengurus kadarkum	Karang Rejo(DA NKEL 6)
86	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana	jl. dr. sutomo rt. 16, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan parit	Karang Rejo(SP GRM 12)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Kelurahan				
87	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. karang rejo ll rt. 11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan drainase/parit	Karang Rejo(DANKEL 4)
88	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. d.i. panjaitan (gang kecipir) rt. 81, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan posyandu	Karang Rejo(SPGRM 11)
89	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. swadaya rt. 38, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	pemasangan keramik dan penggantian pintu dan jendela	Karang Rejo(DANKEL 1)
90	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. jend. a. yani rt. 20, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan jalan gang	Karang Rejo
91	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. dr. sutomo rt. 29, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan jalan gang	Karang Rejo(SPGRM 9)
92	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. karang rejo ll rt. 12, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan jalan gang	Karang Rejo(SPGRM 1)
93	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. senayan (gang abadi) rt. 75, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan jalan	Karang Rejo(SPGRM 4)
94	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. jend. a. yani rt. 23, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan dan pelebaran posyandu	Karang Rejo(SPGRM 5)
95	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. karang rejo ll rt. 009, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan siring	Karang Rejo(SPGRM 2)
96	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub	jl. p. antasari rt. 65, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan parit	Karang Rejo(SPGRM 6)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
97	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. karang rejo ll rt. 009, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan parit	Karang Rejo(SP GRM 3)
98	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. D.i. panjaitan rt 80, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	renovasi dan pembuatan toilet posyandu	Karang Rejo(SP GRM 8)
99	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. p. antasari (gang rahayu 2) rt. 007, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan dinding, dan wc posyandu	Karang Rejo(SP GRM 10)
100	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P.Antasari Rt. 68, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan (untuk pemasangan keramik lantai, atap dan dinding)	Karang Rejo(SP GRM 7)
Kelurahan Karang Jati					
101	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 19, Jl. Panorama Atas, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	jalan lingkungan banyak permukaan yg tidak rata, berlubang-lubang, jalan lingkungan bertangga banyak pecah-pecah, tidak aman bagi pengguna jalan lingkungann RT, panjang jalan 150 m	Karang Jati
102	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 10, JL. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	pembentukan kader kesehatan khusus bagi remaja, pembentukan kader posyandu remaja, pengenalan remaja akan pentingnya kesehatan remaja, menekan angka pergaulan bebas, pengembangan ruang konsultasi kesehatan dan psikologi anak dan remaja	Karang Jati
103	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT 10, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pelatihan membatik, untuk penambahan pengetahuan akan budaya membatik, membuka peluang usaha, menjaga budaya dan kesenian daerah	Karang Jati
104	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 18, Jl. Karang Jati Dalam, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	penerangan jalan lingkungan kurang, penerangan minim cahaya, dekat dengan posyandu RT 18	Karang Jati(DA NKEL 9)
105	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 22, JL. Karang Jati Dalam, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan drainase yg bolong-bolong dan penutupan drainase agar ruas jalan lingkungan lebih luas	Karang Jati(DA NKEL 6)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
106	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 11, Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	jalan gg mangga (l0rong tk al madinah)rusak, permukaan tidak rata, semen sebagian sudah hilang	Karang Jati(SP GRM 3)
107	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 10, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	permukaan jalan gg. pertamini pecah-pecah dan tidak rata	Karang Jati(DA NKEL 7)
108	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 10, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	jalan GG. Kost Hj. Ririn permukaan jalan pecah-pecah, semenisasi rusak, jalan tidak rata	Karang Jati(SP GRM 6)
109	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 10, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	permukaan jalan GG. Inpress tidak rata, banyak jalan pecah, jalan menanjak, semennya mulai rusak	Karang Jati
110	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 10, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	permukaan jalan GG. untung tidak rata, jalan banyak rusak dan pecah-pecah	Karang Jati(SP GRM 7)
111	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 10, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	permukaan jalan tidak rata, jalan pecah, di samping rumah ibu Suginem	Karang Jati(SP GRM 8)
112	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 10, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	saluran drainase perlu perbaikan , banyak saluran bolong, arus air tidak sesuai jalur	Karang Jati
113	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 10, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan atap, perbaikan dan pemeliharaan dinding bangunan posyandu/gedung serbaguna RT	Karang Jati
114	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 10, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kurangnya penerangan di jalan lingkungan RT, minim lampu jalan RT, usulan 8 titik	Karang Jati
115	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan	RT 10, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	kegiatan sosialisasi tentang narkoba sebagai upaya untuk mencegah anak-anak dan remaja menggunakan narkoba, menambahkan pengetahuan akan bahaya	Karang Jati

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Masyarakat Kelurahan		Kelurahan	narkoba dan segala akibat dari penggunaan narkoba	
116	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT 10, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pelatihan dokter cilik untuk anak, untuk penambahan pengetahuan, melatih kepekaan sosial anak akan kesehatan diri dan lingkungan	Karang Jati
117	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT 10, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pelatihan pengolahan dan membuat aneka kue dan pangan, untuk variasi makan untuk disajikan bagi keluarga, dan penambahan sumber penghasilan bagi keluarga	Karang Jati
118	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT 10, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pelatihan menjahit, untuk penambahan ilmu pengetahuan, dan juga peluang penambahan penghasilan bagi keluarga (ibu rumah tangga)	Karang Jati
119	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT 10, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pengadaan pelatihan dan pembekalan Kesehatan bagi masyarakat	Karang Jati
120	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT 10, Jl.Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pelatihan pemadaman kebakaran dikarenakan kondisi lingkungan RT yg menanjak, sempit, perumahan berdekatan/berdempetan rawan kebakaran	Karang Jati
121	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT 10, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	untuk menambahkan pengetahuan masyarakat mengenai tata cara fardu kifayah	Karang Jati
122	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 17, Jl. Karang Jati Dalam, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	jalan lingkungan banyak yg pecah, permukaan jalan tidak rata dan berlubang	Karang Jati(DA NKEL 3)
123	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 16, Jl. Karang Jati Dalam, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	badan parit berlubang, perbaikan disertai penutupan parit untuk memperluas jalan	Karang Jati(SP GRM 2)
124	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 14, Jl. Jend. A. Yani, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	jalan lingkungan rusak, pecah, permukaan jalan retak	Karang Jati(DA NKEL 4)
125	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 11, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	penerangan jalan minim, tidak memiliki penerangan jalan di lingkungan RT yg menanjak	Karang Jati(DA NKEL 10)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
126	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 09, Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	saluran banyak berlubang	Karang Jati(SP GRM 4)
127	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 09, karang jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	permukaan jalan tidak rata, jalan banyak yang pecah dan berlubang	Karang Jati(SP GRM 9)
128	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 05, Jl. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	jalan berlubang, permukaan jalan tidak rata	Karang Jati
129	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT 22, JL. Karang Jati Dalam, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	untuk peningkatan sumber daya masyarakat, penambahan sumber mata pencaharian, variasi masakan keluarga dalam olahan ayam goreng tepung (fried chicken)	Karang Jati
130	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 22, JL. Karang Jati Dalam, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	belum memiliki posyandu RT sendiri, kegiatan posyandu hanya di rumah ketua RT	Karang Jati
131	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 04, Jl. Jend A Yani, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	penerangan jalan lingkungan RT minim/kurang terang	Karang Jati(DA NKEL 8)
132	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 07, JL. Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	tidak adanya penerangan pada jalan lingkungan RT, penerangan minim	Karang Jati
133	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 07, JL.Karang Jawa, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	saluran drainase mengalami kebocoran, sebagian saluran drainase tertutup/dinding drainase runtuh	Karang Jati(SP GRM 5)
134	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 23 jl. panorama, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	jalan berlubang, permukaan jalan tidak rata	Karang Jati(DA NKEL 1)
135	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	TP PKK Kelurahan Karang Jati, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Menjahit: Untuk peningkatan sumber daya masyarakat mengenai metode menjahit dan pola pakaian dan sekaligus sebagai sumber tambahan pendapatan penghasilan	Karang Jati

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
				keluarga	
136	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 04 Jl. Jend.A.Yani Gang Kacamata Optik Indra, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalanan yang pecah-pecah dan licin	Karang Jati(DA NKEL 5)
137	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 06 Jl. Karang Jawa Dalam Gang Sekolah , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengembangan Budi Daya Ikan Lele	Karang Jati
138	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 18 Jl. Karang Jati Dalam Gang Milco, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kondisi Jalan Paving Pecah dan berlubang	Karang Jati(DA NKEL 2)
139	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT 18 JL. KARANG JATI DALAM GANG MILCO, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kondisi paret sudah tidak layak karena pecah dan berlubang pada dasar paret sehingga menyebabkan aliran air limbah paret merembes ke dinding rumah warga	Karang Jati(SP GRM 1)
Kelurahan Mekar Sari					
140	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Hendriawan Sie RT.30, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kondisi selokan pemukiman kurang memadai	Mekar Sari
141	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. RE Martadinata RT. 18, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kurang penerangan pada jalan pemukiman	Mekar Sari(DA NKEL 12)
142	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. RE Martadinata RT. 18, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kurang penerangan pada wilayah pemukiman	Mekar Sari(DA NKEL 11)
143	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pelatihan Menjahit	Mekar Sari
144	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. RE Martadinata RT. 19 Gang Jurang, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kondisi siring kurang memadai	Mekar Sari(DA NKEL 10)
145	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jl. Merdeka RT. 19 Gang Jurang, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	Kondisi jalanan cukup sempit dan siring menghalangi akses jalan	Mekar Sari(DA NKEL 9)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Terbangun		
146	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Merdeka RT. 36 Gang Mushola, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kondisi drainase kurang memadai	Mekar Sari(DANKEL 8)
147	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Hendriawan sie RT. 31 Gang Al Hidayah, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kondisi drainase kurang memadai	Mekar Sari(DANKEL 7)
148	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Hendriawan sie RT. 31 Gang Al Hidayah, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terdapat kerusakan pada beberapa bagian badan jalan	Mekar Sari(DANKEL 6)
149	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. RE Martadinata RT. 27 gang sawo 2, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kurang penerangan pada jalan pemukiman	Mekar Sari(DANKEL 5)
150	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. RE Martadinata RT. 27 Gang Sawo 1, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kurang penerangan pada jalan pemukiman	Mekar Sari(DANKEL 4)
151	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. RE Martadinata RT. 27 Gang Advokat 3, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kurang penerangan pada jalan pemukiman	Mekar Sari(DANKEL 3)
152	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. RE Martadinata RT. 27 Gang Advokat 2, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kurang penerangan pada jalan pemukiman	Mekar Sari(DANKEL 2)
153	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. RE Martadinata RT. 27 Gang Advokat 1, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kurang penerangan pada jalan pemukiman	Mekar Sari(DANKEL 1)
154	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. RE Martadinata RT. 25 Gang Advokat, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terdapat kerusakan pada beberapa bagian badan jalan	Mekar Sari
15	Program : Pemberdayaan	Jl. Merdeka RT 18,	Jumlah Sarana	Kondisi badan jalan sekitar	Mekar

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
5	Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Balikpapan	dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	posyandu kurang memadai	Sari(SP GRM 5)
156	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. RE Martadinata RT. 28 Gang Woles, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kondisi selokan pemukiman kurang memadai	Mekar Sari(SP GRM 4)
157	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Merdeka RT. 36 Gang Mushola, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Badan siring tidak memadai, kontur tanah berbukit dan kawasan padat penduduk (Panjang = 14 M, Tinggi = 2 M)	Mekar Sari(SP GRM 3)
158	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader Bina Keluarga Lansia	Mekar Sari
159	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja	Mekar Sari(DANKEL 16)
160	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita	Mekar Sari
161	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader Posyandu	Mekar Sari(DANKEL 13)
162	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Usia Remaja	Mekar Sari
163	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Mekar Sari
164	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Tanggap Bencana Kebakaran	Mekar Sari(DANKEL 14)
165	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (First Aid)	Mekar Sari(DANKEL 15)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Masyarakat di Kelurahan		
166	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Fardhu Kifayah	Mekar Sari
167	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Hidroponik	Mekar Sari
168	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Tata Rias	Mekar Sari
169	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Olahan Makanan	Mekar Sari(DANKEL 17)
170	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Membatik	Mekar Sari
171	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Martadinata RT 22 Gang Margamulya tembus Jl. Martadinata, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Akses jalan kurang memadai	Mekar Sari(SPGRM 2)
172	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Swadaya RT 32 Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terdapat kerusakan pada badan jalan	Mekar Sari(SPGRM 1)
Kelurahan Sumber Rejo					
173	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jl. Sumber Rejo I RT. 34 No. 04 (Kantor Kelurahan Sumber Rejo), Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan PMBA (Pemberian makan Bayi dan Balita) guna menekan percepatan penurunan Stunting di wilayah Kelurahan Sumber Rejo 1 Paket Pelatihan	Sumber Rejo(DANKEL 6)
174	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jl. Sumber Rejo I RT. 34 No. 04 (Kantor Kelurahan Sumber Rejo), Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pembuatan Abon berbahan dasar Ikan Lele 1 Paket Pelatihan	Sumber Rejo(DANKEL 7)
175	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jl. Sumber Rejo I RT. 34 No. 04 (Kantor Kelurahan Sumber Rejo), Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pembuatan Amplang berbahan dasar Kangkung 1 Paket Pelatihan	Sumber Rejo(DANKEL 8)
17	Program : Pemberdayaan	Jl. Sumber Rejo I	Jumlah	Pelatihan Pengolahan	Sumber

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
6	Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT. 34 No. 04 (Kantor Kelurahan Sumber Rejo), Kota Balikpapan	Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Makanan berbahan dasar Kangkung 1 Paket pelatihan	Rejo(DANKEL 9)
177	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jl. Sumber Rejo I RT. 34 No. 04 (Kantor Kelurahan Sumber Rejo), Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Fardhu Kifayah 1 Paket pelatihan	Sumber Rejo(DANKEL 10)
178	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Mayor Pol Zainal Arifin VII RT. 59 GG. Yasmin, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan / Perbaikan jalan P = 80m, L = 2m T = 15cm	Sumber Rejo(SPGRM 11)
179	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Joko Tole RT. 58, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU 15 titik	Sumber Rejo(DANKEL 11)
180	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sungai Ampal RT. 57, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan P = 29m, L = 40cm, T = 40cm	Sumber Rejo
181	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sungai Ampal RT. 57 GG. Manda, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan P = 38m, L = 2m, T = 2cm	Sumber Rejo
182	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sungai Ampal RT. 57 GG. Posyandu, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan P = 174m, L = 1m, T = 10cm	Sumber Rejo
183	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	I. Sungai Ampal RT. 57, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan P = 144m, L = 1.9m, T = 2cm	Sumber Rejo
184	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Mayor Pol Zainal Arifin RT. 56 GG. Sumber rejeki, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU 3 Titik	Sumber Rejo
185	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Guntur Damai RT. 56, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan P = 100m, L = 3m, T = 15cm	Sumber Rejo
18	Program : Pemberdayaan	Jl. P. Antasari RT.	Jumlah Sarana	Perbaikan jalan P = 150m, L =	Sumber

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
6	Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	55, Kota Balikpapan	dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.5m, T = 10cm	Rejo
187	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sungai Ampal RT. 54, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU 10 titik	Sumber Rejo
188	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sungai Ampal Perum Mawija RT. 53, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan drainase P = 100m, L = 50cm, T = 50cm	Sumber Rejo
189	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sungai Ampal Perum Mawija RT. 53, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan P = 80m, L = 4m, T = 15cm	Sumber Rejo
190	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber RejoV RT. 52, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Penerangan Jalan Umum 8 titik	Sumber Rejo
191	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 50, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan P = 100m, L = 2m, T = 10cm	Sumber Rejo
192	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Bonto Bulaeng RT. 49, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan P = 50m, L = 2m, T = 15cm	Sumber Rejo(SP GRM 10)
193	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Bonto Bulaeng RT. 49, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan P = 50m, L = 4m, T = 20cm	Sumber Rejo
194	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. D.I Panjaitan RT. 47, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU 10 titik dan Pemeliharaan PJU 2 titik	Sumber Rejo
195	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jl. D.I Panjaitan RT. 47, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan P = 70m, L =2m, T = 15cm	Sumber Rejo

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Kelurahan				
196	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo V RT. 46, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Posyandu P = 4m, L= 6m	Sumber Rejo(DANKEL 5)
197	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo V RT. 46 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU 2 Titik	Sumber Rejo
198	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Joko Tole 5 RT. 45, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan P = 50m, L = 4m, T = 20cm	Sumber Rejo
199	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sungai Ampal RT. 45, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Penerangan Jalan Umum 3 titik	Sumber Rejo
200	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl Sungai Ampal RT. 45, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Gedung Posyandu 2 Lantai P = 8m, L = 8m	Sumber Rejo
201	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Joko Tole 1 RT. 44, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan drainase P = 100m, L = 75cm, T = 70cm	Sumber Rejo
202	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sungai Ampal RT. 43, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Peerangan Jalan Umum 3 titik	Sumber Rejo
203	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sungai Ampal RT. 43, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan drainase rusak P = 40m, L = 60cm, T = 60cm	Sumber Rejo
204	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sungai Ampal RT. 43, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan drainase P = 40m, L = 60cm, T = 60cm	Sumber Rejo
205	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sungai Ampal RT. 43, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan rusak dan retak P = 90m, L = 3m	Sumber Rejo

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
206	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo I RT. 41, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU 5 Titik dan Pemeliharan PJU 3 Titik	Sumber Rejo
207	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo III RT. 39, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Jalan Pemukiman P = 65m, L = 3m	Sumber Rejo
208	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo II RT. 37, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Tutup Drainase P = 10m, L = 1.5m dan P = 3m, L = 1.5m	Sumber Rejo
209	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo II RT. 37, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan drainase baru P = 50m, L = 1m	Sumber Rejo
210	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo II RT. 37, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan P = 40m, L = 4m, T = 15cm	Sumber Rejo
211	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo I RT. 35, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Penerangan Jalan Umum 3 Titik	Sumber Rejo
212	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo RT. 34 GG. Salon Karlina, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan rusak P = 100m, L = 3m, T = 15cm	Sumber Rejo
213	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo I RT. 34 GG. Kwini, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan rusak P = 75m, L = 3m, T = 15cm	Sumber Rejo
214	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Binaraga RT. 34 GG. Kelurahan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan rusak P = 100m, L = 3m, T = 15cm	Sumber Rejo
215	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jl. Binaraga RT. 34, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	Pengadaan Penerangan Jalan Umum 10 Titik	Sumber Rejo

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Terbangun		
216	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Binaraga RT. 33 GG. Swadaya, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan rusak P = 50m, L = 3m, T = 15cm	Sumber Rejo
217	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Binaraga RT. 33 GG. Swadaya, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase rusak P = 50m, L = 40ccm, T = 40cm	Sumber Rejo(SP GRM 9)
218	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Binaraga RT. 33 GG. Karya Jepara, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan rusak P = 100m, L = 3m, T = 15cm	Sumber Rejo
219	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl D.I.Panjaitan RT. 32 GG. Cipta Karya, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Penerangan Jalan Umum 8 Titik	Sumber Rejo
220	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl Binaraga RT. 31 GG. Swadaya, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan drainase rusak dan retak P = 55m, L = 40cm, T = 40cm	Sumber Rejo(SP GRM 8)
221	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl Binaraga RT. 31 GG. Swadaya, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan / Perbaikan Drainase rusak P = 76m, L = 40cm, T = 60cm	Sumber Rejo
222	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl Binaraga RT. 31 GG Mushola, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan rusak dan retak P = 83m, L = 3m, T = 15cm	Sumber Rejo
223	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl AMD RT. 30 GG Mawija, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan rusak dan retak P = 50m, L = 2.5m	Sumber Rejo(SP GRM 7)
224	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl AMD RT. 30 GG III, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan rusak dan retak P = 50m, L = 1.5m	Sumber Rejo
22	Program : Pemberdayaan	Jl D.I.Panjaitan RT.	Jumlah Sarana	Pengadaan Penerangan	Sumber

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
5	Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	29, Kota Balikpapan	dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan Umum 7 Titik	Rejo
226	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl D.I.Panjaitan RT. 29, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase rusak P = 50m, L = 40cm, T = 1m	Sumber Rejo(DANKEL 4)
227	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl D.I.Panjaitan RT. 29, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase rusak P = 50m, L = 60cm, T = 1m	Sumber Rejo
228	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl D.I.Panjaitan RT. 29, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan rusak P = 110m, L = 2m	Sumber Rejo
229	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl D.I.Panjaitan RT. 28 GG. Adpel, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Penerangan Jalan Umum 5 Titik	Sumber Rejo
230	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl D.I.Panjaitan RT. 28 GG. Adpel, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan rusak P = 100m, L = 1m	Sumber Rejo
231	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan SMART 26 Kelurahan Sumber Rejo	Sumber Rejo
232	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. D.I Panjaitan RT. 26, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU 2 titik	Sumber Rejo
233	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. D.I Panjaitan RT. 25, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU 4 titik	Sumber Rejo
234	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. D.I Panjaitan RT. 25, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Posyandu P = 4m, L = 3m, T = 3m	Sumber Rejo(DANKEL 3)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
235	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Letjend S. Parman RT. 24, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU 1 titik	Sumber Rejo
236	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Letjend S. Parman RT. 23, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU 2 titik	Sumber Rejo
237	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Letjend S. Parman RT. 23 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan pemukiman P = 100m, L = 1m	Sumber Rejo(SP GRM 6)
238	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Letjend S. Parman RT. 22 GG. Klinik Nabila, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU 1 titik	Sumber Rejo
239	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Letjend S. Parman RT. 22 GG. Klinik Nabila, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan pemukiman Rusak P = 70m, L = 2m	Sumber Rejo
240	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Letjend S. Parman RT. 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU 3 titik	Sumber Rejo
241	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Letjend S. Parman RT. 19, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 5 Titik	Sumber Rejo
242	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 18, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Drainase P = 50m, L = 30m, L = 40cm	Sumber Rejo
243	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 18, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PerbaikanJalan rusakP = 50m, L = 1.5m, T = 10cm	Sumber Rejo(SP GRM 5)
244	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan	Jl. P. Antasari RT. 17 GG Kesatuan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Penerangan Jalan Umum 2 Titik	Sumber Rejo

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Sarana dan Prasarana Kelurahan				
245	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 17, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Jalan rusak P = 100m, L= 1.5m	Sumber Rejo
246	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 17, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase P = 50m, L = 50m T = 80cm	Sumber Rejo
247	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT.15, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan posyandu rusak P = 4m, L = 6m	Sumber Rejo(DANKEL 2)
248	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT.15, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Semenisasi / cor bahu Jalan P = 100m, L = 1m	Sumber Rejo
249	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT.14, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Penerangan Jalan Umum 10 titik	Sumber Rejo
250	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P Antasari RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Penerangan Jalan Umum 3 titik	Sumber Rejo
251	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P Antasari RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan drainase rusak P = 60m, L = 30cm, T = 30cm	Sumber Rejo
252	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P Antasari RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan drainase rusak P = 15m, L = 20cm, T = 20cm	Sumber Rejo(SPGRM 4)
253	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P Antasari RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan drainase rusak P = 20m, L = 40cm, T = 20cm	Sumber Rejo
254	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan :	Jl. P Antasari RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	Perbaikan drainase rusak P = 20m, L = 38cm, T = 60cm	Sumber Rejo

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Terbangun		
255	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P Antasari RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan drainase rusak P = 30m, L = 65cm, T = 40cm	Sumber Rejo
256	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P Antasari RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan drainase rusak P = 30m, L = 30cm, T = 30cm	Sumber Rejo
257	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT.11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan/semenisasi Jalan rusak P = 30m, L = 3m, T = 15cm	Sumber Rejo
258	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT.11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan/semenisasi Jalan rusak P = 50m, L = 3m, T = 15cm	Sumber Rejo
259	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT.11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase rusak P = 30m, L = 40cm, T = 40cm	Sumber Rejo
260	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT.11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase rusak P = 20m, L = 40cm, T = 40cm	Sumber Rejo(SP GRM 2)
261	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT.11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase rusak P = 30m, L = 50cm, T = 50cm	Sumber Rejo(SP GRM 3)
262	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT.11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase rusak P = 27m, L = 50cm, T = 50cm	Sumber Rejo
263	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT.11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase rusak P = 15m, L = 40cm, T = 40cm	Sumber Rejo
26	Program : Pemberdayaan	Jl. P. Antasari	Jumlah Sarana	Perbaikan Drainase rusak P =	Sumber

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
4	Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.11, Kota Balikpapan	dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20m, L = 50cm, T = 50cm	Rejo
265	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT.11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase rusak P = 15m, L = 50cm, T = 50cm	Sumber Rejo
266	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT.11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase rusak P = 25m, L = 50cm, T = 50cm	Sumber Rejo
267	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT.11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase rusak P = 25m, L = 50cm, T = 60cm	Sumber Rejo
268	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT.11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase Rusak P = 10m, L = 50cm, T = 60cm	Sumber Rejo
269	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 09 GG SD Impres, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Penerangan Jalan Umum 4 Titik	Sumber Rejo
270	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 09, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan/Semenisasi Jalan P = 60m, L = 1.5m	Sumber Rejo(SP GRM 1)
271	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 09, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase Rusak P = 50m, L = 50cm, T = 50m	Sumber Rejo
272	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. DR. Sutomo RT. 07 GG. Persatuan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Penerangan Jalan Umum 2 titik	Sumber Rejo
273	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jl. DR. Sutomo RT.06, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan dan Pengecatan Posyandu Luas = 20m2	Sumber Rejo(DANKEL 1)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Kelurahan				
274	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanKegiatan : Pemberdayaan KelurahanSub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. DR. sutomo RT.05, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Penerangan Jalan umum 2 titik	Sumber Rejo
275	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Bonto Bulaeng RT. 03, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan rusak, retak dan berlubang	Sumber Rejo
276	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Bonto Bulaeng RT. 03, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Penerangan Jalan Umum 2 titik	Sumber Rejo
277	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Bonto Bulaeng RT. 03, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase lantai dasar drainase rusak P = 6m, L = 2m T = 22 cm	Sumber Rejo
278	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Bonto Bulaeng RT. 02 GG I atas, Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan Rusak, Retak dan Berlubang P = 85m, L = 3m	Sumber Rejo
279	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Bonto Bulaeng RT. 01 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharan Lampu PJU 3 Titik	Sumber Rejo
280	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Bonto Bulaeng RT. 01 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU 4 titik	Sumber Rejo
281	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Bonto Bulaeng RT. 01 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Drainase P = 71 m, L = 60 cm, T = 50 cm	Sumber Rejo

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 maka Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
1.	Peningkatan Kapasitas dan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pelayanan yang berkualitas dan penguatan inovasi	1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
		2.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adapatif, profesional, proaktif, dan inovatif
		3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

Berdasarkan hasil telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, maka Kecamatan Balikpapan Tengah dapat berperan untuk mencapai Tujuan Peningkatan Kapasitas dan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pelayanan yang berkualitas dan penguatan inovasi, dimana Sasaran Strategis yang mendukung tercapainya tujuan adalah Sasaran Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adapatif, profesional, proaktif, dan inovatif dan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Hal ini selaras dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah yang berperan dalam pemberian pelayanan publik pada garda terdepan dan melaksanakan urusan kewilayahan, serta berkewajiban untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur yang ada di Kecamatan agar dapat mendukung pemberian pelayanan publik yang berkualitas sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2024 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan

Indikator Tujuan/Target :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/83,66

SASARAN 1:

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum

Indikator Sasaran/Target :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kecamatan/ 81,15

SASARAN 2:

Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Kecamatan

Indikator Sasaran/Target :

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/ 27,50

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1) Mempedomani RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026;
2) Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
3) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Balikpapan Tengah;

5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Tengah pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) program yang terdiri dari 1 program penunjang dan 3 program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
2) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Tengah pada tahun 2024 adalah sebanyak 12 (tiga belas) kegiatan terdiri dari 6 kegiatan program penunjang dan 6 kegiatan program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
3) Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Tengah pada tahun 2024 adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) sub kegiatan;
4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 29.114.181.178,00 yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:
    a) Dana sebesar Rp 11.633.029.130,00 untuk program dan kegiatan penunjang;
    b) Dana sebesar Rp 17.481.152.048,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan (prioritas);

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 Kecamatan Balikpapan Tengah untuk sumber dana APBD Kota Balikpapan secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel T.C-33 berikut ini:

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kota Balikpapan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH				**20.633.848.148,00**					**22.575.006.299,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**20.633.848.148,00**					**22.575.006.299,00**
7.01	**KECAMATAN**				**20.633.848.148,00**					**22.575.006.299,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***		**86,63 Poin**	**17.481.152.048,00**			***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**86,63 Poin**	**19.107.039.874,00**
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		70.45 Poin	10.602.718.724,00		-	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	70.45 Poin	11.662.990.552,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	55 Orang/bulan	10.602.718.724,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	55 Orang/bulan	11.662.990.552,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		70.45 Poin	79.616.000,00		-	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	70.45 Poin	87.837.750,00
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	55 Paket	79.616.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	55 Paket	87.837.750,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*		70.45 Poin	2.485.533.100,00		-	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	70.45 Poin	2.608.827.760,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	1 Paket	34.949.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	38.446.650,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	57 Paket	600.372.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	57 Paket	535.122.610,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	7 Paket	812.583.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	7 Paket	893.854.500,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	2 Paket	281.220.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	309.342.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	22900 Dokumen	131.417.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	22900 Dokumen	144.562.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	5 Laporan	24.990.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	5 Laporan	27.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	10 Laporan	600.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	10 Laporan	660.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		70.45 Poin	539.178.724,00		-	*IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	70.45 Poin	594.406.120,00
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	1 Unit	249.611.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	1 Unit	275.000.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	1 Unit	54.667.024,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	60.906.120,00
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	1 Unit	234.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	258.500.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		70.45 Poin	2.325.305.800,00		-	*IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	70.45 Poin	2.558.604.400,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua	36 Laporan	449.311.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	495.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kel/Desa							
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	38 Laporan	1.875.994.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	38 Laporan	2.063.604.400,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		70.45 Poin	1.448.799.700,00		-	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	70.45 Poin	1.594.373.292,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	11 Unit	277.124.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	11 Unit	304.958.500,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	30 Unit	344.017.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	30 Unit	378.578.200,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	210 Unit	227.740.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	210 Unit	250.836.592,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	6 Unit	599.918.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	6 Unit	660.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti***		**100 %**	**699.991.900,00**			***Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti***	**100 %**	**769.991.090,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti*		100 %	534.696.300,00		-	*Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti*	100 %	588.165.930,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	3 Laporan	234.696.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	3 Laporan	258.165.930,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	5 Dokumen	330.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas*		100 %	80.295.600,00		-	*Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas*	100 %	88.325.160,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua	6 Laporan	80.295.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah*	6 Laporan	88.325.160,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kecamatan	Kel/Desa					*Kecamatan*		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayanai Sesuai Standar Pelayanan*		100 %	85.000.000,00		-	*Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayanai Sesuai Standar Pelayanan*	100 %	93.500.000,00
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	300 Dokumen	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	300 Dokumen	93.500.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***		**23,37 %**	**1.625.004.000,00**			***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.787.505.115,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana*		100 %	120.372.200,00		-	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana*	100 %	132.409.695,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	30 Lembaga Kemasyarakatan	59.516.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	30 Lembaga Kemasyarakatan	65.467.875,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	2 Laporan	60.856.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	2 Laporan	66.941.820,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*		100 %	1.504.631.800,00		-	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*	100 %	1.655.095.420,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	858.463.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	1 Lembaga Kemasyarakatan	944.309.740,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	8 Laporan	359.216.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	8 Laporan	395.138.700,00
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	4 Laporan	286.951.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	4 Laporan	315.646.980,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal***		**100 %**	**827.700.200,00**			***Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal***	**100 %**	**910.470.220,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum*		100 %	827.700.200,00		-	*Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum*	100 %	910.470.220,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	40 Laporan	827.700.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	40 Laporan	910.470.220,00
	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU				**1.220.852.500,00**					**1.254.937.750,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.220.852.500,00**					**1.254.937.750,00**
7.01	**KECAMATAN**				**1.220.852.500,00**					**1.254.937.750,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***		**23,37 %**	**1.220.852.500,00**			***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.254.937.750,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana*		100 %	451.804.500,00		-	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana*	100 %	408.984.950,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	45 Lembaga Kemasyarakatan	21.804.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	45 Lembaga Kemasyarakatan	23.984.950,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	41 Unit	348.567.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	41 Unit	295.423.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	1 Pokmas / Ormas	81.433.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	89.576.300,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*		100 %	769.048.000,00		-	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*	100 %	845.952.800,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	44 Lembaga Kemasyarakatan	769.048.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	44 Lembaga Kemasyarakatan	845.952.800,00
	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR				**1.658.779.900,00**					**1.737.204.150,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.658.779.900,00**					**1.737.204.150,00**
7.01	**KECAMATAN**				**1.658.779.900,00**					**1.737.204.150,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***		**23,37 %**	**1.658.779.900,00**			***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.737.204.150,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana*		100 %	456.507.900,00		-	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana*	100 %	414.704.950,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	73 Lembaga Kemasyarakatan	27.004.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	73 Lembaga Kemasyarakatan	29.704.950,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	8 Unit	310.497.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	8 Unit	254.092.520,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	2 Pokmas / Ormas	119.006.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	130.907.480,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*		100 %	1.202.272.000,00		-	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*	100 %	1.322.499.200,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	71 Lembaga Kemasyarakatan	1.202.272.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	71 Lembaga Kemasyarakatan	1.322.499.200,00
	KELURAHAN KARANG REJO				**1.950.511.150,00**					**2.045.992.550,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.950.511.150,00**					**2.045.992.550,00**
7.01	**KECAMATAN**				**1.950.511.150,00**					**2.045.992.550,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***		**23,37 %**	**1.950.511.150,00**			***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**2.045.992.550,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana*		100 %	470.136.850,00		-	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana*	100 %	417.424.950,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	91 Lembaga Kemasyarakatan	32.084.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	91 Lembaga Kemasyarakatan	32.424.950,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	63 Unit	388.091.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	63 Unit	330.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	2 Pokmas / Ormas	49.960.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	55.000.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*		100 %	1.480.374.300,00		-	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*	100 %	1.628.567.600,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	89 Lembaga Kemasyarakatan	1.480.374.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	89 Lembaga Kemasyarakatan	1.628.567.600,00
	KELURAHAN KARANG JATI				**1.014.758.300,00**					**1.116.487.350,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.014.758.300,00**					**1.116.487.350,00**
7.01	**KECAMATAN**				**1.014.758.300,00**					**1.116.487.350,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun***		**23,37 %**	**1.014.758.300,00**			***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun***	**23,37 %**	**1.116.487.350,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kelurahan						***Kelurahan***		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana*		100 %	369.200.600,00		-	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana*	100 %	406.124.950,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	37 Lembaga Kemasyarakatan	19.204.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	37 Lembaga Kemasyarakatan	21.124.950,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	16 Unit	329.782.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	16 Unit	362.764.930,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	1 Pokmas / Ormas	20.213.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	22.235.070,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*		100 %	645.557.700,00		-	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*	100 %	710.362.400,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	35 Lembaga Kemasyarakatan	645.557.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	35 Lembaga Kemasyarakatan	710.362.400,00
	KELURAHAN MEKAR SARI				**1.122.914.680,00**					**1.183.622.550,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.122.914.680,00**					**1.183.622.550,00**
7.01	**KECAMATAN**				**1.122.914.680,00**					**1.183.622.550,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***		**23,37 %**	**1.122.914.680,00**			***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.183.622.550,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana*		100 %	416.576.380,00		-	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana*	100 %	406.124.950,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	41 Lembaga Kemasyarakatan	19.167.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	41 Lembaga Kemasyarakatan	21.124.950,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	64 Unit	285.208.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	64 Unit	261.537.210,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	5 Pokmas / Ormas	112.199.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	5 Pokmas / Ormas	123.462.790,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*		100 %	706.338.300,00		-	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*	100 %	777.497.600,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan	39 Lembaga Kemasyarakatan	706.338.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	39 Lembaga Kemasyarakatan	777.497.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tengah, Mekar Sari							
	KELURAHAN SUMBER REJO				**1.512.516.500,00**					**1.563.866.150,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.512.516.500,00**					**1.563.866.150,00**
7.01	**KECAMATAN**				**1.512.516.500,00**					**1.563.866.150,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***		**23,37 %**	**1.512.516.500,00**			***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**23,37 %**	**1.563.866.150,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana*		100 %	465.224.500,00		-	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana*	100 %	411.844.950,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	63 Lembaga Kemasyarakatan	24.404.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	63 Lembaga Kemasyarakatan	26.844.950,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	27 Unit	418.483.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	27 Unit	360.429.300,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	2 Pokmas / Ormas	22.337.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	24.570.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*		100 %	1.047.292.000,00		-	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*	100 %	1.152.021.200,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	61 Lembaga Kemasyarakatan	1.047.292.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	61 Lembaga Kemasyarakatan	1.152.021.200,00
J U M L A H					**29.114.181.178,00**					**31.477.116.799,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III dalam Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Balikpapan.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah yaitu menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai OPD yang bersinggungan/berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Balikpapan Tengah berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan public guna memperoleh kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Disamping hal tersebut, Kecamatan Balikpapan Tengah terus berupaya untuk melaksanaan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Oleh karena itu, secara tidak langsung Kecamatan Balikpapan Tengah mendukung priorotas Pemerintah Kota dalam mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat Kota.

BAB V
INOVASI PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Balikpapan Tengah beserta Kelurahan berkomitmen terus berupaya meningkatkan pelayanan baik yang secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat melalui inovasi, adapun beberapa inovasi yang telah dilakukan diantaranya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**INOVASI EKSTERNAL**										
1	BERHATI Bersih,Sehat dan Indah	V	X	Inovasi LPM berupa gerakan sadar kebersihan dengan melibatkan CSR untuk menciptakan lingkungan bersih, indah dan warga yang sehat serta strategi peningkatan swadaya masyarakat	Rendahnya kesadaran warga masyarakat terkait kebersihan lingkungan sekitar dan masih banyak laporan kasus penyakit menular seperti demam berdarah	2023	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Gunung Sari Ulu	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan terlaksananya pencegahan penyakit menular	-	https://www.instagram.com/p/CnXC2gAvVwd/?igshid=MDJmNzVkMjY=
2	TBL KAMPUS Taekwondo Balikpapan Lion oleh Kampung Pustaka	V	X	Inovasi Pengurus KAMPUS melalui kegiatan ekstrakulikuler Taekwondo dalam rangka pembinaan anak dan remaja lingkungan kelurahan	Fasilitasi pembinaan anak dan remaja melalui kegiatan ekstrakulikuler yang murah masih minim	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Anak dan Remaja Kelurahan Gunung Sari Ulu	Terlaksananya pembinaan anak dan remaja melalui kegiatan ekstrakulikuler		https://www.instagram.com/reel/ChPHdhhlc4G/?igshid=MDJmNzVkMjY=
3	EDUKASI PENDIDIKAN SEKS USIA DINI PPATBM	V	X	Inovasi PPATBM melalui kegiatan edukasi pendidikan seks usia dini (5-10 tahun) dalam rangka pencegahan kasus pernikahan dini, asusila anak dan	Masih minimnya kegiatan edukasi yang ditujukan kepada anak-anak	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Anak Usia Dini di Lingkungan Kelurahan Gunung Sari Ulu	Terlaksananya kegiatan edukasi, pencegahan kasus pernikahan dini, asusila dan meningkatnya kemampuan menjaga diri sendiri bagi anak usia dini		https://www.instagram.com/reel/CiiTBRcAwQY/?igshid=MDJmNzVkMjY=

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				peningkatan kemampuan menjaga diri sendiri							
4	LES PRIVAT KARANG TARUNA & KAMPUS	V	X	Inovasi Karang Taruna dan Pengurus KAMPUS melalui kegiatan les privat gratis bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan relawan	Fasilitasi pembinaan anak dan remaja melalui kegiatan ektrakulikuler yang murah masih minim	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Anak dan Remaja Kelurahan Gunung Sari Ulu	Terlaksananya pembinaan anak dan remaja melalui kegiatan ekstrakulikuler		https://www.instagram.com/p/Cn_1IwiPdo2/?igshid=MDJmNzVkMjY=
5	SESI QnA Forum Anak	V	X	Inovasi Forum Anak melalui kegiatan sesi Tanya jawab bersama narasumber yang nantinya dikemas menjadi video edukasi via instagram	Belum tersedianya konten edukasi bagi anak dan remaja yang praktis, murah dan dapat diakses kapanpun	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Anak dan Remaja Kelurahan Gunung Sari Ulu	Tersedianya konten edukasi bagi anak dan remaja		https://www.instagram.com/reel/CjtpkQIPuBZ/?igshid=MDJmNzVkMjY=
6	SMART 26	V	X	Pelayanan kepada warga tingkat RUKUN TETANGGA 26 Kelurahan Sumber Rejo untuk mendapat Surat Pengantar yang akan dipergunakan dalam kepengurusan pelayanan di Kantor Kelurahan Sumber Rejo	Permasalahan waktu Ketua RT yang bekerja dalam memberikan pelayanan kepada warganya	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Warga RT 26 Kelurahan Sumber Rejo	Pelayanan yang cepat, tepat dan dengan aturan waktu bisa kapan saja dilayani	-	https://linktr.ee/SMART_26

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	WISATA EDUKASI KANG BEJO	V	X	Kebun kangkung yang dijadikan wisata edukasi Sumber Rejo ini merupakan hasil kerja para kelompok tani yang bersama-sama mengembangkan sayur kangkung tersebut. kampung sayur dan wisata edukasi Kelurahan Sumber Rejo ini bisa jadi pembelajaran bagi pelajar dan mahasiswa sebagai bahan dan tempat penelitian untuk mengetahui bagaimana cara bercocok tanam dengan baik. Melalui kampung kangkung yang dijadikan wisata edukasi ini, harapannya masyarakat sekitar bisa mengembangkan lagi lahan kosong yang tidak dipakai menjadi sentra	peningkatan perekonomian bagi masyarakat sekitar dan mendorong perekonomian warga	2019	Masih berjalan hingga saat ini	Masyarakat Kota Balikpapan	Menambah income ekonomi keluarga masyarakat sekitar		https://www.instagram.com/wisatakangbejo/

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				sayuran							
8	ANYAMAN MAS BEJO (Anjungan Pelayanan Mandiri Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo)	V	X	Sebuah inovasi guna peningkatan kualitas pelayanan dan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan online yang ada di Pemerintah Kota Balikpapan, melakukan pencetakan dokumen kependudukan, pencatatan sipil dan perizinan usaha (NIB, IUMK).	mempermudah masyarakat serta memberikan link informasi tentang Kota Balikpapan yang dapat diakses oleh masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo lebih mudah dalam kepengurusan pelayanan pemerintah kota Balikpapan	-	https://anyamanmasbejo.my.id/
9	HALTE SEDEKAH	V	X	Inovasi Kelurahan dari Inisiatif warga yang ingin berbagi sedekah dan beramal sholeh kepada warga kurang mampu dan untuk menggerakkan partisipasi swadaya warga yang berekonomi mampu agar	keinginan dari warga yang tergerak untuk mengajak sesama untuk bersedekah dan beramal sholeh kepada warga kurang mampu dengan swadaya dari, oleh dan untuk warga berupa barang kebutuhan pokok	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Karang Rejo dan warga di luar wilayah Karang rejo yang membutuhkan barang kebutuhan pokok berupa sayur, telor, gula dan lain-lain	Dengan adanya Halte sedekah warga yang mampu dapat menyalurkan sedekahnya sehingga dapat meringankan sedikit beban perekonomian bagi warga kurang mampu terkhusus di hari jum"at	Di resmikan oleh Walikota Balikpapan Kelurahan Karang Rejo sebagai Kampung Sedekah.	-

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				berbagi sedekah kebutuhan makanan rumah tangga kepada warga yang membutuhkan							
10	BANK SAMPAH RT.78 dan RT.26/27	V	X	Inovasi Pengurus Rukun Tetangga (RT) di lingkungan kelurahan tehadap Sampah daur ulang atau sampah anorganik untuk didaur ulang	Rendahnya kesadaran warga masyarakat terhadap Sampah daur ulang atau sampah anorganik yang bisa ditukarkan ke bank sampah sebagai tambahan penghasilan	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Warga seputar wilayah RT.dan warga Kelurahan Karang Rejo	Menambah pendapatan keuangan keluarga dengan mengumpulkan sampah yang dapat di jual ke bank sampah sehingga mendapat penghasilan tambahan dari sampah tersebut dan agar meningkatnya pemahaman warga akan pentingnya kebersihan		-
11	TTG	V	X	Inovasi Karang Taruna berupa Teknologi Energi Surya di Rumah Tinggal dalam rangka merancang inovasi dari barang-barang bekas tak terpakai dibuat inovasi teknologi tepat guna untuk diikutsertakan dalam lomba TTG dan dapat mengurangi	pengembangan Potensi diri untuk mengembangkan ide dan aplikasi ilmu baik yang didapat disekolah maupun dari pengalaman untuk mengurangi pemakaian listrik PLN dan dapat diikut sertakan dalam lomba TTG	2022	Masih berjalan hingga saat ini	rumah sendiri dan dapat ditularkan keahlian tersebut kepada warga khususnya remaja untuk membuat inovasi teknologi energi surya dirumah masing-masing	Terlaksananya kegiatan edukasi, bagi para remaja dalam mengembangkan ide dan ilmu untuk membuat inovasi dari benda-benda yang tidak terpakai sebagai inovasi, guna menjadi solusi alternatif mengurangi pemakaian listrik PLN	juara 1 lomba TTG tingkat Kecamatan balikpapan Tengah dan juara 1 TTG tingkat Kota Balikpapan	-

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				penggunaan listrik dari PLN dirumah sendiri							
12	PPATBM	V	X	Inovasi PPATBM melalui kegiatan edukasi pendidikan seks usia dini (5-10 tahun) dalam rangka pencegahan kasus pernikahan dini, asusila anak , KDRT dalam rumah tangga dan peningkatan kemampuan menjaga diri sendiri	Masih minimnya kegiatan edukasi yang ditujukan kepada orang tua dan anak-anak remaja tehadap seks bebas sebelum menikah	2022	Masih berjalan hingga saat ini	orang tua dan Anak remaja di Lingkungan Kelurahan Karang Rejo	orang tua dan remaja dapat membentengi diri dari pergaulan bebas dan seks bebas sehingga mengurangi angka kehamilan diluar nikah dan pernikahan dini		-
13	DAUN KELOR	V	X	Inovasi warga Kelurahan Karang Rejo yang menjadikan Daun Kelor yang awalnya hanya di konsumsi di lingkungan keluarga dalam rumah yang pada akhirnya dapat di olah menjadi berbagai macam olahan makanan berbahan baku Daun Kelor seperti Susu Kelor, Brownies Kelor, Kuker	mensosialisasilan pengolahan daun kelor yang bisa di olah menjadi berbagai macam makanan dan minuman tidak hanya untuk di buat Sayur pendamping makan nasi saja.	2019	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Karang Rejo, teman , rekan kerja, keluarga serta semua orang yang sudah merasakan olahan daun Kelor	Menambah pendapatan keuangan keluarga dengan adanya usaha rumahan dari olahan daun kelor.		-

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kelor, Puding Kelor, Nugget Kelor dll							
14	KWT (Kelompok Wanita Tani)	V	X	Inovasi Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Karang Rejo yang memanfaatkan lahan sebagai media penanaman Sayur mayur yang di mulai dengan Pembibitan, Penyemaian, Penanaman, Pemupukan, perawatan dan Panen	Pemanfataan lahan kosong yang sebelumnya di tumbuhin rumput liar .	2020	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Karang Rejo khususnya warga RT.wilayah sekitar	Menambah pendapatan keuangan keluarga dengan menjual hasil panen ke warga sekitar dan warga di luar wilayah RT.		-
15	Perabot Rumah Tangga dari bahan Bekas	V	X	Inovasi Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Karang Rejo yang menjadikan bahan bahan sisa / bekas berupa koran dan kain jeans yang sudah tidak terpakai di olah menjadi barang-barang yang dapat di manfaatkan seperti Meja, kursi dll	adanya bahan bekas/bahan sisa yang tidak terpakai seperti koran dan kain jeans untuk dibuat kerajinan perabotan rumah tangga	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Karang Rejo khususnya warga RT.wilayah sekitar	untuk digunakan sebagai bahan peraboran rumah dan dapat menambah pendapatan keuangan keluarga dengan adanya Kegiatan membuat perabotan rumah tangga dari bahan bahan bekas (Daur ulang)		-
16	PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS	V	X	Kecamatan Balikpapan	Akses setor sampah menjadi	2022	Masih berjalan	Seluruh Masyarakat	Mengurangi jumlah sampah yang	Mulai menjadi percontohan	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cirowaste.ciroapp

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	ONLINE BERSAMA CIRO WASTE			Tengah bekerjasama dengan Ciro Waste yang hadir memberikan edukasi dan kemudahan bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ciro Waste adalah waste management technology yang menghubungkan 3 elemen penting dalam rantai daur ulang sampah yaitu masyarakat, bank sampah dan industri daur ulang. Ciro Waste menawarkan layanan jemput bola sampah sehingga sampah tidak perlu dibuang namun cukup dipilah kemudian dijemput langsung untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Dengan produk	lebih mudah, proses transaksi cepat dan penentuan harga yang transparan membuat masyarakat menjadi sadar akan pentingnya memilah sampah sehingga dapat mengurangi volume sampah yang menumpuk. Pemilahan sampah penting dilakukan karena nantinya dapat meningkatkan jumlah sampah yang akan didaur ulang, sehingga mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA karena kapasitasnya yang sudah semakin overload.		hingga saat ini dan sudah mulai berjalan pada setiap kelurahan dan rukun tetangga (RT)	se-Kecamatan Balikpapan Tengah	berakhir di TPA karena sudah dilakukan pemilahan mandiri oleh masyarakat dan dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat dikarenakan akses dan kemudahan yang didapatkan.	bagi Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Barat yang mulai menerapkan di wilayahnya	

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				digital berupa aplikasi CIROES yang menghadirkan layanan jual beli sampah secara online yang mudah, cepat dan transparan.							
II	**INOVASI INTERNAL**										
1	DISPOR (Disposisi dan Pelaporan online)	V	X	Pelaksanaan disposisi surat dan pelaporan hasil disposisi secara online melalui Grup Whats APP khusus surat masuk	Disposisi surat agar lebih cepat mendapatkan respon bawahan, dikarenakan aplikasi Whats App lebih sering dipergunakan sehari-hari	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Tengah	Disposisi surat dan pelaporan hasil disposisi atasan secara cepat dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti	-	
2	SI GAWAI (SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN)	V	X	Sistem informasi berupa aplikasi yang menjadi wadah dokumen kepegawaian terkait kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan satya lencana, yang memiliki fitur pengingat dan pemberitahuan melalui email dan whatsapp	Masih terjadinya keterlambatan pengajuan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dikarenakan kealpaan dalam pengecekan duk berkala serta ketidaklengkapan dokumen pendukung	2021	Masih berjalan hingga saat ini, namum sementara ada gangguan server	Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah	tidak terjadinya keterlambatan pengajuan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala serta memudahkan pegawai dalam proses pengajuannya.	Direplikasi oleh Kecamatan Balikpapan Utara dan di kembangkan oleh kecamatan Balikpapan Barat	http://sigawai.sidingin.com/
3	BILIK PENGADUAN	V	X	Inovasi kelurahan dalam menangani angka Pengaduan dan	Banyaknya warga masyarakat penyandang Kesejahteraan	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Karang Rejo	mendengarkan dan mencari solusi dari keluhan/perselisihan warga Kelurahan Karang Rejo yang	-	-

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				laporan permasalahan warga masyarakat terkait kesejahteraan sosial , Infrastruktur, Keamanan Lingkungan , sampah , watas tanah di wilayah kelurahan Karang Rejo	Sosial (PMKS), masih ada warga yang buang sampah tidak tepat waktu, Infrastruktur yang rusak akibat bencana, warga yang berselisih paham masalah tanah perwatasan				terdampak PMKS, menjadikan lingkungan wilayah setempat menjadi bersih, aman dari segala tindak kejahatan dan memediasi warga berselisih paham .		
4	ONE DAY SERVICE	V	X	Inovasi kelurahan dalam layanan bidang pemerintahan berbasis Whats app	proyek perubahan Kasi pemerintahan dan Pelayanan publik untuk memudahkan warga Kelurahan karang Rejo mengurus surat pengantar atau surat keterangan secara online	2021	2022 karena telah ada aplikasi yankel	Warga Kelurahan Karang Rejo terutama warga yang bekerja	Terciptanya Pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat sehingga memudahkan warga untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan dari Kelurahan Karang Rejo		-

BAB VI
PENUTUP

6.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Utara tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Utara. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal.

b. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (contoh tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

6.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional.Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan seksi;

2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;

3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.;

4. Renja Kecamatan Balikpapan Tengah di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RENJA Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RENJA Kota Balikpapan dan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah);

5. Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang

lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.

3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.

4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.

6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.

7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2024 ini dapat kami sampaikan, untuk dapat dijadikan bahan seperlunya.

Balikpapan, Agustus 2023
CAMAT BALIKPAPAN TENGAH

AGUNG BUDI WIBOWO

RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
TAHUN 2024

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024, disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaran kecamatan serta mensinkronkan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapaianya visi dan misi Kota dalam Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Kota dan RPJMD Kota Balikpapan.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Renja ini belum sepenuhnya sempurna. Namun, hasil penyusunan ini dapat dijadikan bahan acuan atas perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan agar tahun mendatang pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Balikpapan, Maret 2023
Camat Balikpapan Kota,

ROSIN SUPARLAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	5
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		8
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Peragkat Daerah	8
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah	18
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		45
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	46
3.3	Program dan Kegiatan	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		63
BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH		64
BAB VI PENUTUP		65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun Anggaran 2022	8
Tabel 2.2	Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2022	12
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kecamatan Balikpapan Kota	14
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Kota	19
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	22
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	37
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024	46
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15 ayat 1 bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, bersama ini Kecamatan Balikpapan Kota sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Balikpapan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Penyusunan Renja Perangkaa Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kerja sesuai tuntuan masyarakat maupun stakehorders lainnya sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Kota merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kecamatan Balikpapan Kota untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Balikpapan.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan untuk mencapai visi dan misi Kota Balikpapan adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana kerja yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi.

Pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Balikpapan. Dengan demikian diharapkan seluruh

elemen masyarakat Kota Balikpapan akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yaitu "Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman", dengan Misi sebagai berikut, *Misi kesatu* Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik, *Misi kedua* Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi, *Misi ketiga* Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang memadai, *Misi keempat* Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan, *Misi kelima* Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif.

Kegiatan pelayanan publik, selain sebagai bagian dari kewajiban pemerintah terhadap masyarakatnya, untuk mengukur seberapa jauh penerimaan masyarakat terhadap program-program pelayanan kepada masyarakat luas dan usulan-usulan perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disadari sepenuhnya bahwa peran Kecamatan Balikpapan Kota akan mampu menciptakan pelayanan prima yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini Perangkat Daerah dan masyarakat luas. Kecamatan Balikpapan Kota sebagai bagian dari garda terdepan lembaga Pemerintah Kota Balikpapan yang sangat dekat dan turut bertanggung jawab terhadap implementasi program pembangunan Pemerintahan Kota Balikpapan, senantiasa menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RENJA) Tahun 2024 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi, misi, dan agenda pembangunan.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun Renja berfungsi untuk menerjemahkan Renstra lima tahunan yang dituangkan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja menjadi mutlak

sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran yang ditentukan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara menyeluruh atau sejajar dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi PD saat ini, evaluasi renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perwali RKPD
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanan yang diusulkan
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja
   a. Pembentukan Tim Penyusun Renja
   b. Orientasi mengenai Renja
   c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja

d. Pengumpulan Data dan Informasi

2. Pengolahan Data dan Informasi

   Pada tahapan ini disajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap perumusan penyusunan rancangan Renja

3. Perumusan Rancangan Renja

   a. Pengolahan data dan informasi

   b. Analisis gambaran pelayanan PD

   c. Menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD

   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

   e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD

   f. Perumusan tujuan dan sasaran

   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

   h. Perumusan kegiatan prioritas

   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD

   j. Penyempurnaan rancangan Renja PD

   k. Pembahasan Forum PD

   l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah

4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD

6. Penetapan Renja

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Perangkat Daerah merupakan

penjabaran dari Renstra PD yang merupakan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

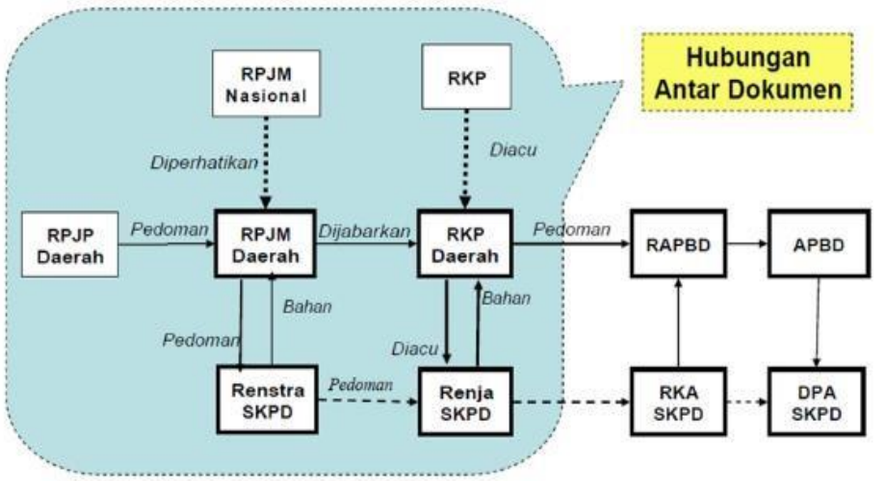

Gambar 1.1.

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
11. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Stategis Perangkat Daaerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Balikpapan Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis dan fokus pada pemecahan masalah yang ada.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024 adalah:

1. Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui advokasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan dan antar PD, Stakeholders, masyarakat.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Kecamatan Balikpapan Kota baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi dan manajemen.
4. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.
5. Sebagai pusat informasi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyaring data dan bahan baik untuk

dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Balikpapan Kota tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Peragkat Daerah

Kegiatan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2022 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2022. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Kota
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**2.021.861.900**	**652.994.300**	**32,30%**
1.1	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan**	**1.906.862.000**	**545.873.900**	**28,63%**
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.906.862.000	545.873.900	28,63%
1.2	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan**	**24.999.900**	**18.492.400**	**73,79%**
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	14.999.900	8.727.400	58,18%
	Peningkatan Efekifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	9.765.000	97,65%
1.3	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**90.000.000**	**88.628.000**	**98,48%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	90.000.000	88.628.000	98,48%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.823.216.350**	**3.759.295.922**	**98,33%**
2.1	**KECAMATAN**	**774.257.750**	**741.306.550**	**95,74%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**378.297.350**	**351.745.750**	**92,98%**
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	264.999.000	239.043.300	90,21%
	Evaluasi Kelurahan	113.298.350	112.702.450	99,47%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**395.960.400**	**389.560.800**	**98,38%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	160.000.000	157.376.900	98,36%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	49.999.700	48.448.200	96,90%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	147.998.200	147.080.700	99,38%
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	37.962.500	36.655.000	96,56%
2.2	**KELURAHAN KLANDASAN ULU**	**568.999.400**	**568.381.640**	**99,89%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**144.999.550**	**144.999.550**	**100%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.999.750	19.999.750	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	99.999.800	99.999.800	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	25.000.000	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**423.999.850**	**423.328.090**	**99,85%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	423.999.850	423.382.090	99,85%
2.3	**KELURAHAN KLANDASAN ILIR**	**770.000.000**	**766.921.060**	**99,60%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**145.000.000**	**143.583.500**	**99,02%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000	19.622.000	98,11%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	98.961.500	98,96%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	25.000.000	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**625.000.000**	**623.337.560**	**99,73%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	625.000.000	623.337.560	99,73%
2.4	**KELURAHAN DAMAI**	**564.998.400**	**549.913.341**	**97,33%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**145.000.000**	**133.723.865**	**92,22%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	**20.000.000**	20.000.000	100%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	88.725.000	88,73%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	24.998.865	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**419.998.400**	**416.189.476**	**99,09%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	419.998.400	416.189.476	99,09%
2.5	**KELURAHAN PRAPATAN**	**531.964.900**	**529.981.814**	**99,63%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**144.968.300**	**144.476.138**	**99,66%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.975.000	19.674.000	98,49%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	124.993.300	124.802.138	99,85%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0	0%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**386.996.600**	**385.505.676**	**99,61%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	386.996.600	385.505.676	99,61%
2.6	**KELURAHAN TELAGA SARI**	**612.995.900**	**602.791.517**	**98,34%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**144.997.100**	**137.288.625**	**94,68%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.998.800	19.878.300	99,40%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	99.998.700	92.517.325	92,52%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24.999.600	24.893.000	99,57%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**467.998.800**	**465.502.892**	**99,47%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	467.998.800	465.502.892	99,47%
3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**175.847.400**	**125.445.700**	**71,34%**
3.1	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	175.847.400	125.445.700	71,34%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	175.847.400	125.445.700	71,34%
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.948.705.300**	**11.978.392.122**	**80,12%**
4.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan**	**19.998.000**	**19.311.300**	**96,57%**

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	19.998.000	19.311.300	96,57%
4.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.873.389.000**	**7.649.935.763**	**77,48%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.873.389.000	7.649.935.763	77,48%
4.3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**-**	**-**
4.4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.676.730.900**	**1.551.682.010**	**92,54%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.772.000	48.772.000	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	413.280.000	400.855.350	96,99%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	637.783.900	532.026.500	83,42%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	96.000.000	94.000.000	97,92%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	198.920.000	194.250.500	97,65%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.975.000	281.777.660	99,93%
4.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170.000.000	170.000.000	100%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	170.000.000	170.000.000	100%
4.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.220.804.400**	**1.867.522.461**	**84,09%**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	448.735.500	237.829.172	53,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.772.068.900	1.629.693.289	91,97%
4.6	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**987.783.000**	**719.940.588**	**72,88%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	563.933.000	309.517.154	54,89%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.850.000	121.346.525	90,66%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	199.604.249	99,80%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.000.000	89.472.660	99,41%
	Jumlah	**20.969.630.950**	**16.516.128.044**	**78,76%**

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan dengan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan pada Kecamatan Balikpapan Kota adalah sebesar Rp. 20.969.630.950,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 16.516.128.044,- (78,76 %) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.453.502.906 (21,23%).

Evaluasi pengukuran Kinerja Kecamatan Balikpapan Kota didasarkan pada Sasaran Strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	77,96	85,93	110,22 %
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27,00	31,76	117,63 %

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Kota tahun 2022 dalam mencapai target masih **berkinerja baik** meski terdapat satu target yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. adapun rincian sebagai berikut:

a. Pencapaian Sasaran "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum" dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 110,22% atau predikat "*sangat tinggi*".
b. Pencapaian Sasaran "Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah" dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mencapai 117,63% atau predikat "*sangat tinggi*".

Evaluasi Realisasi program/kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut:

a. Program yang Memenuhi Target

   Sebanyak 1 program yang memenuhi target ditentukan yaitu program pemerintahan dan pelayanan publik;

b. Program yang Melebihi Target

   Sebanyak 2 program yang melebihi target yang ditentukan yaitu Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota;

c. Program yang Tidak Memenuhi Target

   Sebanyak 1 program yang tidak memenuhi target yang ditentukan yaitu program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Faktor penyebab tidak memenuhi target adalah tidak berjalannya kegiatan Razia dan rakor trantibum sesuai perencanaan. Implikasi yang timbul adalah realisasi keuangan yang berdampak untuk program tersebut yang hanya mencapai 71,34%.

   Untuk perbaikan kedepan, kepala seksi (kasi) yang menangani program tersebut untuk menyusun rencana kegiatan lebih baik menyesuaikan tingkat kebutuhan dan jumlah personil serta melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah di buat.

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana Tabel T-C.29 berikut:

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2024
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

Kode					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7					**URUSAN KEWILAYAHAN**									
7	01				**KECAMATAN**									
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah**	**398**	**N/A**	**79,4**	**79,21**	**100%**	**79,5**	**158,71**	**40%**
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	347,75	N/A	69,35	53,9	78%	69,45	123,35	35%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Admnisitrasi Keuangan Perangkat Daerah	398	N/A	79,4	80,73	102%	79,5	160,23	40%
7	01	01	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	398	N/A	79,4	80,94	102%	79,5	160,44	40%

Kode					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	398	N/A	79,4	76,67	97%	79,5	156,17	39%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	398	N/A	79,4	77,6	98%	79,5	157,1	39%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	398	N/A	79,4	80,1	101%	79,5	159,6	40%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	398	N/A	79,4	77,6	98%	79,5	157,1	39%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**500**	**N/A**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**200**	**40%**

Kode					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	02	2.01		Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	500	N/A	100	100	100,00	100	200	40%
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	500	N/A	100	100	100,00	100	200	40%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	500	N/A	100	100	100,00	100	200	40%
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**52**	**N/A**	**16,35**	**9,43**	**57,68**	**16,45**	**25,88**	**50%**

Kode					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200	40%
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500	87,5	60	60	100,00	166,67	314,17	63%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	**500**	**96,82**	**100**	**99,18**	**99,18**	**100,00**	**296**	**59%**
7	01	04	2.01		Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	500	96,82	100	99,18	99,18	100,00	296	59%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Kota, kinerja pelayanan di Kecamatan Balikpapan Kota dapat dilihat sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
   Kinerja pelayanan publik yang diberikan langsung kepada masyarakat diukur melalui survei kepuasan masyarakat (SKM). Adapun pelayanan publik yang disurvei adalah pelayanan yang diberikan melalui loket pelayanan.

2. Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan
   Kinerja Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan mencakup partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan kelurahan seperti kerja bakti, SPGRM, dana kelurahan, keikutsertaan dalam Lembaga masyarakat tingkat kelurahan dan lainnya.

3. Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal
   Kinerja Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan mencakup Razia Yustisi/Penertiban Rumah Kos/PKL/Miras /Bangunan Tidak Ber IMB/Pengajuan Lahan/Razia TPS dan koordinasi trantibum dengan kepolisian, TNI dan instansi vertikal lainnya.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah
   Kinerja Pelayanan IKM Internal dilakukan dengan mengukur pelayanan yang diberikan secretariat kecamatan kepada pegawai internal mencakup pelayanan keuangan, kepegawaian, pemeliharaan dan lainnya.

Tabel T.C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Kota

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah			79,40	79,50	79,60	79,70	79,21	79,50	79,60	79,70	
2	Presentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Presentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan			10,00	10,20	10,40	10,60	13,00	10,20	10,40	10,60	
4	Presentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal			100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 2022 terhadap indikator utama sudah cukup baik, dimana hampir semua target dapat tercapai kecuali Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan yang tidak mencapai target namun masih dalam taraf yang baik yaitu realisasi sebesar 85,93 dari target 77,96.

Adapun permasalahan dan hambatan utama Kecamatan Balikpapan Kota yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik, adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kekosongan jabatan dalam struktur organisasi Kecamatan dan pejabat yang memasuki usia pensiun dalam waktu dekat sehingga dikhawatirkan akan menambah kekosongan pejabat struktural di kecamatan Balikpapan Kota;
2. Jumlah staf baik PNS maupun Non-PNS yang masih kurang memadai baik dari sisi kuantitas yang sangat terbatas dan sisi kualitas yang masih belum menunjang pelaksanaan kegiatan;
3. Adanya isu pengalihdayaan Tenaga Non-PNS yang apabila dilakukan cukup berdampak bagi Kecamatan. Hal tersebut karena selama ini kekurangan staf PNS di Kecamatan dan Kelurahan dicover oleh Tenaga Non-PNS; dan
4. Sarana dan prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan. Hal tersebut cukup berdampak terhadap pelayanan di Kecamatan dimana hasil IKM Kecamatan turun pada tahun 2022 dikarenakan sarpras pelayanan yang dikeluhkan oleh masyarakat;

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Balikpapan Kota, yaitu sebagai berikut:

a. PPTK kurang proaktif dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai perencanaan dan anggaran yang ditentukan, sehingga dalam realisasi kegiatan agak sedikit terhambat;
b. Usulan pembangunan (SPGRM dan Dankel) masih terdapat yang belum tertampung dalam pengganggaran. Banyaknya usulan yang masuk dengan anggaran yang terbatas sehingga terdapat usulan pembangunan yang tidak dapat diakomodir oleh Kecamatan; dan
c. Adanya Perubahan Kebijakan yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan (Penundaan Acara tingkat Kota seperti MTQ, Peralihan pengunaan Jenis BBM, Penyesuaian penjabaran sub kegiatan, Kenaikan DO RT dan lain sebagainya);

Berdasarkan hambatan serta tantangan dan peluang di atas, berikut adalah rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan sebagai berikut:

a. Peningkatan sistem pelayanan dan TI sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik di Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengusulkan usulan pembangunan dalam musrenbang sehingga usulan-usulan masyarakat dapat terakomodir dengan baik;
c. Melakukan adaptasi yang cepat dan tepat terhadap segala perubahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan seperti perubahan kebijakan pusat, daerah dan lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD.

Secara umum, hasil *review* terhadap Rancangan Awal RKPD tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan di luar Rancangan Awal Renja Kecamatan Balikpapan Kota. Masih mengacu dengan Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Kota 2021-2026, Adapun program prioritas Kecamatan Balikpapan Kota adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**79,60 Poin**	**18.376.499.286**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**79,60 Poin**	**18.376.499.286**	
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**69,55 Poin**	**19.998.300**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**69,55 Poin**	**19.998.300**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	19.998.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	19.998.300	
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**IKM Layanan Admnisitrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**79,60 Poin**	**10.044.374.186**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**IKM Layanan Admnisitrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**79,60 Poin**	**10.044.374.186**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan	10.044.374.186	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan	10.044.374.186	
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**79,60 Poin**	**700.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**79,60 Poin**	**700.000.000**	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	700.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	700.000.000	
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**79,60 Poin**	**2.316.531.300**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**79,60 Poin**	**2.316.531.300**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.765.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.765.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	500.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	500.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 Paket	1.026.986.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 Paket	1.026.986.300	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	100.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	175.780.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	175.780.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	485.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	485.000.000	
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79,60 Poin**	**420.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79,60 Poin**	**420.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	170.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	170.000.000	
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**79,60 Poin**	**2.782.745.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**79,60 Poin**	**2.782.745.500**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	748.735.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	748.735.500	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Laporan	2.034.010.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Laporan	2.034.010.000	
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**79,60 Poin**	**2.092.850.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**79,60 Poin**	**2.092.850.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	666.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	666.100.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	165 Unit	148.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	165 Unit	148.750.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	948.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	948.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	330.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	330.000.000	

2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**100%**	**357.889.740**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**100%**	**357.889.740**	
VIII	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasipenyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti**	**100%**	**160.810.625**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasipenyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti**	**100%**	**160.810.625**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	160.810.625	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	160.810.625	
IX	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas**	**100%**	**107.079.115**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas**	**100%**	**107.079.115**	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	15.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	15.000.000	

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	92.079.115	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	92.079.115	
X	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan**	**100%**	**90.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan**	**100%**	**90.000.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen NonPerizinan Usaha yangDilaksanakan	200 Dokumen	90.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen NonPerizinan Usaha yangDilaksanakan	200 Dokumen	90.000.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**10,40%**	**1.307.804.200**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**10,40%**	**1.307.804.200**	
XI	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**100%**	**150.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**100%**	**150.000.000**	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	50.000.000	
XII	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakat di kecamatan**	**100%**	**1.157.804.200**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakat di kecamatan**	**100%**	**1.157.804.200**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	867.504.200	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	867.504.200	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	200.400.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	200.400.000	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	89.900.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	89.900.000	

4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yangoptimal**	**100%**	**622.429.474**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yangoptimal**	**100%**	**622.429.474**	
XIII	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum**	**100%**	**622.429.474**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum**	**100%**	**622.429.474**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	622.429.474	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	622.429.474	
	Kelurahan Klandasan Ulu					**Kelurahan Klandasan Ulu**					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**10,40%**	**997.694.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**10,40%**	**997.694.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**100%**	**198.540.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**100%**	**198.540.000**	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60 Lembaga Kemasyarakatan	18.540.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60 Lembaga Kemasyarakatan	18.540.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	100.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	80.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	80.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**100%**	**799.154.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**100%**	**799.154.000**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	44 Lembaga Kemasyarakatan	799.154.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	44 Lembaga Kemasyarakatan	799.154.000	
	Kelurahan Klandasan Ilir					**Kelurahan Klandasan Ilir**					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**10,40%**	**1.352.858.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**10,40%**	**1.352.858.000**	

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**100%**	**208.150.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**100%**	**208.150.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	85 Lembaga Kemasyarakatan	28.150.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	85 Lembaga Kemasyarakatan	28.150.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	100.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	80.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	80.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**100%**	**1.144.708.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**100%**	**1.144.708.000**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	66 Lembaga Kemasyarakatan	1.144.708.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	66 Lembaga Kemasyarakatan	1.144.708.000	
	Kelurahan Damai					**Kelurahan Damai**					

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**10,40%**	**933.126.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**10,40%**	**933.126.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**100%**	**196.800.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**100%**	**196.800.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Damai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	70 Lembaga Kemasyarakatan	16.800.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Damai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	70 Lembaga Kemasyarakatan	16.800.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Damai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Damai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	100.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Damai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	80.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Damai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	80.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**100%**	**736.236.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**100%**	**736.236.000**	

	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Damai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	40 Lembaga Kemasyarakatan	736.326.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Damai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	40 Lembaga Kemasyarakatan	736.326.000	
	Kelurahan Prapatan					**Kelurahan Prapatan**					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**10,40%**	**933.123.500**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**10,40%**	**933.123.500**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**100%**	**196.797.500**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**100%**	**196.797.500**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Prapatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54 Lembaga Kemasyarakatan	16.797.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Prapatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54 Lembaga Kemasyarakatan	16.797.500	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Prapatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Prapatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	100.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Prapatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	80.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Prapatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	80.000.000	

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**100%**	**736.326.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**100%**	**736.326.000**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Prapatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	40 Lembaga Kemasyarakatan	736.326.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Prapatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	40 Lembaga Kemasyarakatan	736.326.000	
	Kelurahan Telaga Sari					**Kelurahan Telaga Sari**					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**10,40%**	**1.078.386.800**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**10,40%**	**1.078.386.800**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**100%**	**200.697.800**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**100%**	**200.697.800**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	80 Lembaga Kemasyarakatan	20.697.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	80 Lembaga Kemasyarakatan	20.697.800	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	100.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	100.000.000	

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	80.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	80.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**100%**	**877.689.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**100%**	**877.689.000**	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	49 Lembaga Kemasyarakatn	877.689.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	49 Lembaga Kemasyarakatan	877.689.000	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota. Selain itu, usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang mana penjaringan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi SIPD-RI. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi berjenjang dari Kelurahan hingga Kecamatan berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan.

Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Balikpapan Kota sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang terverifikasi akan dimasukkan ke dalam RKPD dan Renja Kecamatan. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	***Kelurahan Klandasan Ulu***				
1	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Cendrawasih RT. 39	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Ukuran P= 3 M, L= 2.5 M, T= 2.40 M	SPGRM
2	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend. Sudirman RT 6	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Ukuran P= 54 M, L= 0.5M, T=0.5M	SPGRM
3	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend. Sudirman RT 3	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Ukuran P=150M, T=0.5M	SPGRM
4	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Meratus Baru RT 44	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3.5M	SPGRM
5	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Milono RT. 45	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Ukuran P= 5 M, L= 30 CM, T= 40 cm	SPGRM
6	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend. Sudirman RT. 4	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Ukuran P = 4 M, L= 3 M	SPGRM
7	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Klandasan Ulu 42 RT	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN

II	***Kelurahan Klandasan Ilir***				
1	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend. Sudirman RT. 28	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
2	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend. Sudirman RT 59	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
3	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend. Sudirman RT 59	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
4	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Mayjen Sutoyo RT. 31	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
5	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Gang Samping Aston, Jl. Jend Sudirman RT.32	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
6	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Mayjend Sutoyo RT. 60	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
7	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Bukit Niaga RT.14	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
8	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
9	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN

10	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
11	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Blora I RT. 24	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
12	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Mayjen Sutoyo RT. 49	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
13	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
14	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
15	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
16	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN

17	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 16	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
18	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 16	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
19	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 16	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
20	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 16	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
III	***Kelurahan Damai***				
1	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. AL Makmur RT. 32	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
2	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Siaga RT. 24 di belakang Penjahit Tejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
3	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 21	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

4	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. AL Makmur 2 RT.14	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
5	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jendral Sudirman RT 06 Gang Swadaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
6	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 13	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
7	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Siaga Dalam RT 36	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
8	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Siaga Asri RT 26	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
9	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 1	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
10	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 17	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
11	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 16	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
12	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Gang Kurtilang RT 05	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN

13	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Gang Kurtilang RT 06	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
14	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Panggalang gg 5 RT 28	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
15	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. MT. Haryono RT 24 di samping dealer Yamaha	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
16	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend. Sudirman RT 22 Gang TK Aba 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
17	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 16	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
18	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 16	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
19	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 16	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
20	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 16	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN

IV	***Kelurahan Prapatan***				
1	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan RT 25	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
2	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan RT 25	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
3	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan RT 25	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
4	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan RT. 36	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
5	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan RT. 36	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
6	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan RT. 36	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
7	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan RT. 29	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
8	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan RT. 26	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
V	***Kelurahan Telaga Sari***				

1	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 19 Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
2	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Telogorejo RT. 26	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
3	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 32 Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
4	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 04 Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
5	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Dalam RT. 08	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
6	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 35 Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraantugas dan fungsi PD yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai alur diagram sebagai berikut:

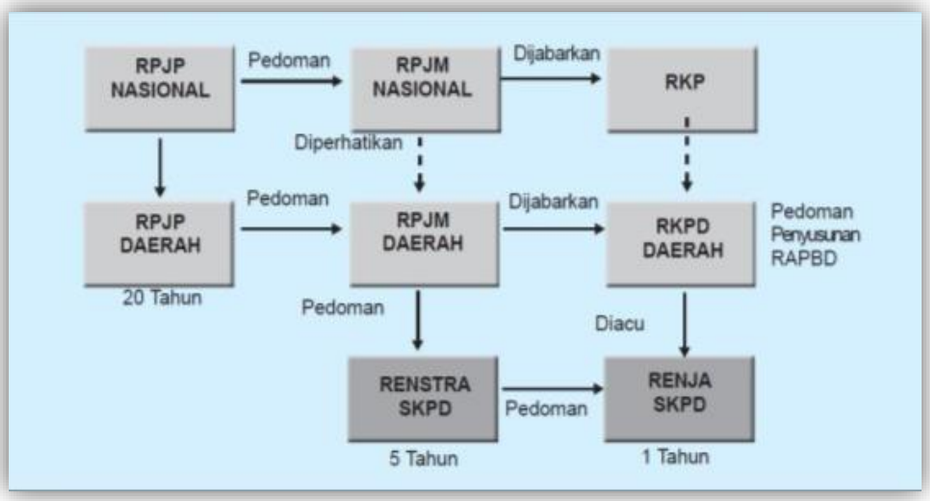

Gambar 3.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk merumuskan prioritaspelaksanaan tugas dan perencanaan program/kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga Visi dan Misi PD dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan Akuntabilitas Publik. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Balikpapan Kota adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
3. Pengembangan database kecamatan;
4. Pembentukan tim satgas layanan pengaduan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan;
6. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi-Misi Wali Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu : "Terwujudnya Balikpapan sebagia Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman" serta dengan memperhatikan salah satu Misi ke-1 yaitu "Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik". Maka rumusan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Balikpapan Kota adalah "*Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan*".

Selain itu, Kecamatan Balikpapan Kota juga menentukan sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah.

Selanjutnya, tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024 dapat dilihat seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	78,10
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27,20

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1) Mempedomani RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026;
2) Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
3) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Balikpapan Kota;
5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan di sempurnakan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah
   1. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
   2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   1. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
   2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    2 Evaluasi Kelurahan
    3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Klandasan Ulu

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Klandasan Ilir
5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai
6 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Prapatan
7 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Telaga Sari
8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klandasan Ulu
9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klandasan Ilir
10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai
11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prapatan
12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Telaga Sari
13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Klandasan Ulu
14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Klandasan Ilir
15 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai
16 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prapatan
17 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Telaga Sari

12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Klandasan Ulu
3 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Klandasan Ilir
4 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai
5 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Prapatan
6 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Telaga Sari
8 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) program yang terdiri dari 1 program penunjang dan 3 program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
2) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 2024 adalah sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan terdiri dari 7 kegiatan program penunjang dan 6 kegiatan kegiatan program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
3) Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 2024 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan;
4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 27.097.232.386,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:
    a) Dana sebesar Rp 18.520.132.686,- untuk program dan kegiatan penunjang;
    b) Dana sebesar Rp 8.577.099.700,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan (prioritas);

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 Kecamatan Balikpapan Kota untuk sumber dana APBD Kota Balikpapan secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel T.C-33 berikut ini.

Tabel T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	01				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**79,21 Poin**	**18.520.132.686**	**PAD**		**79,70 Poin**	**17.838.807.133**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**69,55 Poin**	**22.975.400**	**PAD**		**69,65 Poin**	**40.000.000**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	3 Dokumen	22.975.400	PAD		3 Dokumen	40.000.000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Admnisitrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**79,60 Poin**	**10.044.374.186**	**PAD**		**79,70 Poin**	**11.000.000.000**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Kota	75 Orang/Bulan	10.044.374.186	PAD		75 Orang/Bulan	11.000.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	79,60 Poin	**700.000.000**	PAD			**770.000.000**
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Balikpapan Kota	75 Orang	700.000.000	PAD		75 Orang	770.000.000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**79,60 Poin**	**2.392.742.200**	**PAD**		**79,70 Poin**	**2.276.807.133**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	1 Paket	50.000.000	PAD		1 Paket	60.000.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	34 Paket	499.988.100	PAD		34 Paket	557.000.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	37 Paket	1.016.978.200	PAD		37 Paket	750.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	7 Paket	99.999.900	PAD		7 Paket	240.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	12 Dokumen	175.776.000	PAD		12 Dokumen	155.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Kota	20 Laporan	550.000.000	PAD		20 Laporan	514.807.133

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					SKPD								
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**79,60 Poin**	**490.000.000**	**PAD**		**79,70 Poin**	**552.000.000**
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	1 Unit	250.000.000	PAD		1 Unit	275.000.000
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	1 Unit	170.000.000	PAD		1 Unit	200.000.000
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	1 Unit	70.000.000	PAD		1 Unit	77.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	79,60 Poin	2.695.660.900	PAD			1.550.000.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	12 Laporan	648.735.300	PAD			600.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	26 Laporan	2.046.925.600	PAD			950.000.000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**79,60 Poin**	**2.174.380.000**	**PAD**		**79,70 Poin**	**1.650.000.000**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Balikpapan Kota	34 Unit	647.680.000	PAD		34 Unit	750.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Balikpapan Kota	165 Unit	148.700.000	PAD		165 Unit	300.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Balikpapan Kota	6 Unit	948.000.000	PAD		6 Unit	350.000.000
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Balikpapan Kota	6 Unit	430.000.000	PAD		6 Unit	250.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**100%**	**307.889.700**	**PAD**		**100%**	**977.318.175**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**100%**	**160.810.625**	**PAD**		**100%**	**841.318.175**
7	01	02	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Kota	3 Laporan	160.810.625	PAD		3 Laporan	841.318.175
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**100%**	**57.079.100**	**PAD**		**100%**	**31.000.000**
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	2 Dokumen	15.000.000	PAD		2 Dokumen	18.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	1 Laporan	41.079.100	PAD		1 Laporan	13.000.000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan**	**Kecamatan BalikpapannKota**	**100%**	**90.000.000**	**PAD**		**100%**	**105.000.000**
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Balikpapan Kota	200 Dokumen	90.000.000	PAD		200 Dokumen	105.000.000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**10,40%**	**1.234.390.400**	**PAD**		**10,60%**	**715.000.000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**100%**	**149.999.600**	**PAD**		**100%**	**240.000.000**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	50 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	PAD		50 Lembaga Kemasyarakatan	140.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan HasilEvaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	1 Laporan	49.999.600	PAD		1 Laporan	100.000.000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakat di kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**100%**	**1.084.390.800**	**PAD**		**100%**	**475.000.000**
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Balikpapan Kota	2 Lembaga Kemasyarakatan	657.008.000	PAD		2 Lembaga Kemasyarakatan	175.000.000
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan	2 Laporan	337.483.200	PAD		2 Laporan	180.000.000
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Kota	1 Laporan	89.899.600	PAD		1 Laporan	120.000.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**100%**	**575.196.600**	**PAD**		**100%**	**249.301.288**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**100%**	**575.196.600**	**PAD**		**100%**	**249.301.288**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	4 Laporan	575.196.600	PAD		4 Laporan	249.301.288

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**				**KELURAHAN KLANDASAN ULU KECAMATAN**								
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Kecamatan BalikpapanKota**	**10,40%**	**1.440.209.000**	**PAD**		**10,60%**	**735.000.000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**Kecamatan BalikpapanKota**	**100%**	**536.916.000**	**PAD**		**100%**	**735.000.000**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ulu	60 Lembaga Kemasyarakatan	18.540.000	PAD		60 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Klandasan Ulu	3 Unit	488.375.000	PAD		3 Unit	185.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ulu	2 Pokmas/ Ormas	30.000.000	PAD		2 Pokmas/ Ormas	50.000.000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**100%**	**903.294.000**	**PAD**		**100%**	**470.000.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan KlandasanUlu	44 Lembaga Kemasyarakatan	903.294.000	PAD		44 Lembaga Kemasyarakatan	470.000.000
					Kelurahan Klandasan Ilir								
7	**01**				**KECAMATAN**				**1.629.599.600**				**935.000.000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Kecamatan BalikpapanKota**	**10,40%**	**1.629.599.600**	**PAD**		**10,60%**	**935.000.000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**100%**	**289.951.600**	**PAD**		**100%**	**265.000.000**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ilir	85 Lembaga Kemasyarakatan	28.150.000	PAD		85 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Klandasan Ilir	3 Unit	231.801.600	PAD		3 Unit	185.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ilir	2 Pokmas/ Ormas	30.000.000	PAD		2 Pokmas/ Ormas	50.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**100%**	**1.339.648.000**	**PAD**		**100%**	**670.000.000**
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Klandasan Ilir	66 Lembaga Kemasyarakatan	1.339.648.000	PAD		66 Lembaga Kemasyarakatan	670.000.000
					Kelurahan Damai								
7	**01**				**KECAMATAN**				**1.084.905.900**				**725.000.000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Kecamatan BalikpapannKota**	**10,40%**	**1.084.905.900**	**PAD**		**10,60%**	**725.000.000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**Kecamatan Balikpapan**	**100%**	**250.179.900**	**PAD**		**100%**	**265.000.000**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Damai	70 Lembaga Kemasyarakatan	16.800.000	PAD		70 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Damai	3 Unit	203.379.900	PAD		3 Unit	185.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Damai	2 Pokmas/ Ormas	30.000.000	PAD		2 Pokmas/ Ormas	50.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**100%**	**834.726.000**	**PAD**		**100%**	**460.000.000**
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Damai	40 Lembaga Kemasyarakatan	834.726.000	PAD		40 Lembaga Kemasyarakatan	460.000.000
					Kelurahan Prapatan								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan**	**Balikpapan Kota**	**10,40%**	**1.062.013.500**	PAD		**10,40%**	**725.000.000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**Balikpapan Kota**	**100%**	**223.487.500**	PAD		**100%**	**265.000.000**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Prapatan	54 Lembaga Kemasyarakatan	16.797.500	PAD		54 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Prapatan	3 Unit	176.690.000	PAD		3 Unit	185.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Prapatan	2 Pokmas/ Ormas	30.000.000	PAD		2 Pokmas/ Ormas	50.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**100%**	**838.526.000**	**PAD**		**100%**	**460.000.000**
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Prapatan	40 Lembaga Kemasyarakatan	838.526.000	PAD		40 Lembaga Kemasyarakatan	460.000.000
					Kelurahan Telaga Sari								
7	**01**				**KECAMATAN**				**1.242.895.000**				**785.000.000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Kecamatan BalikpapanKota**	**10,40%**	**1.242.895.000**	**PAD**		**10,60%**	**785.000.000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**Kecamatan BalikpapanKota**	**100%**	**227.386.200**	**PAD**		**100%**	**265.000.000**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	80 Lembaga Kemasyarakatan	20.697.800	PAD		80 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Telaga Sari	3 Unit	176.689.800	PAD		3 Unit	185.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	2 Pokmas/ Ormas	**29.998.900**	PAD		2 Pokmas/ Ormas	50.000.000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**100%**	**1.015.508.800**	**PAD**		**100%**	**520.000.000**
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Telaga Sari	49 Lembaga Kemasyarakatan	1.015.508.800	PAD		49 Lembaga Kemasyarakatan	520.000.000
J U M L AH									**27.097.232.386**				**23.685.426.596**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III dalam Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Balikpapan.

3.5 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Kota yaitu menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai OPD yang bersinggugan/berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Balikpapan Kota berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna memperoleh kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Disamping hal tersebut, Kecamatan Balikpapan Kota terus berupaya untuk melaksanaan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Oleh karena itu, secara tidak langsung Kecamatan Balikpapan Kota mendukung priorotas Pemerintah Kota dalam mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat Kota.

BAB V
INOVASI PERANGKAT DAERAH

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Adapun Inovasi yang ada di Kecamatan Balikpapan Kota sebanyak 1 (satu) inovasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1.	Nama Inovasi	:	Sistem Informasi Agenda Telaga Sari (SI Agen TALAS)
	Inisiasi Inovasi	:	**Inisiasi Mandiri**
	Penjelasan Singkat Inovasi	:	SI Agen Talas merupakan sebuah aplikasi yang dimiliki fungsi sebagai alat bantu kerja petugas Administrasi baik di Sekreatariat maupun di Pelayanan untuk melakukan pencatatan atau penomoran Surat Masuk, Surat Keluar dan Pencatatan Pelayanan Harian secara elektronik.
	Latar Belakang/ Alasan	:	Penyimpanan arsip belum teratur, belum teradministrasinya laporan tindak lanjut dari disposisi surat
	Waktu Pelaksanaan Inovasi		
	Tanggal Pembuatan	:	Mei 2021
	Tanggal Pelaksanaan	:	Juni 2021
	Penerima Manfaat Inovasi	:	Aparatur kelurahan dan warga terkait kemanan data
	Dampak	:	Tertibnya Administrasi pencatatan dan penomoran surat di Kelurahan Telaga Sari serta mempermudah mencari data layanan
	Apresiasi atau Penghargaan	:	-
	Tautan Pelaksanaan Inovasi	:	http://siagentalas.com

BAB VI
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Kota tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Kota. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal.

b. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (contoh tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Seksi, Subbag, Kelurahan dan seluruh staf Kecamatan Balikpapan Kota secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi aparatur Kecamatan Balikpapan Kota dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Kecamatan Balikpapan Kota serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Balikpapan, Maret 2023

CAMAT BALIKPAPAN KOTA,

ROSIN SUPARLAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA						**20.129.762.000,00**							**21.550.246.517,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**20.129.762.000,00**							**21.550.246.517,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**20.129.762.000,00**							**21.550.246.517,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**-**			**81,85 Poin**	**17.790.762.000,00**						**-**	**19.220.888.994,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Kecamatan*	-			74.75 Poin	31.500.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	36.300.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	16.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		18.150.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		18.150.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			67.00 Poin	11.750.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	13.482.792.133,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	11.750.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		13.482.792.133,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			67.00 Poin	72.500.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	0,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	72.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			67.00 Poin	1.675.307.700,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	1.497.608.297,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		32.065.415,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	338.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		322.258.818,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	577.610.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		551.561.164,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	76.257.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		85.962.500,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	148.340.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		78.080.400,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	24.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		9.680.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	480.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		418.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			67.00 Poin	288.670.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	275.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	288.670.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		275.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			67.00 Poin	2.602.784.300,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	3.100.124.520,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	520.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		592.250.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.082.784.300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		2.507.874.520,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			67.00 Poin	1.370.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	829.064.044,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	470.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		543.950.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		205.456.040,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	700.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		79.658.004,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti***	**-**			**100 %**	**680.000.000,00**						**-**	**813.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti*	-			100 %	480.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	543.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	360.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		393.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	120.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas*	-			100 %	100.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	140.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				3 Dokumen	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		70.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	40.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		70.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan*	-			100 %	100.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	130.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				800 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		130.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**-**			**17 %**	**1.094.000.000,00**						**-**	**1.036.750.909,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana*	-			100 %	153.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	204.240.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				85 Lembaga Kemasyarakatan	78.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6 Laporan	75.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		174.240.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*	-			70 %	941.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	832.510.909,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	675.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		591.225.789,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	220.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		188.385.120,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	46.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		52.900.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal***	**-**			**100 %**	**565.000.000,00**						**-**	**479.606.614,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum*	-			100 %	565.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	479.606.614,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				35 Laporan	565.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		479.606.614,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
		KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU						**1.013.276.000,00**							**945.622.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.013.276.000,00**							**945.622.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.013.276.000,00**							**945.622.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**-**			**17 %**	**1.013.276.000,00**						**-**	**945.622.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana*	-			100 %	345.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	245.622.000,00	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				40 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		15.972.000,00	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		199.650.000,00	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*	-			75 %	668.276.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	700.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				38 Lembaga Kemasyarakatan	668.276.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		700.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU
		KELURAHAN KARANG JOANG						**1.448.634.000,00**							**1.422.615.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.448.634.000,00**							**1.422.615.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.448.634.000,00**							**1.422.615.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**-**			**17 %**	**1.448.634.000,00**						**-**	**1.422.615.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana*	-			100 %	348.150.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	222.615.000,00	KELURAHAN KARANG JOANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				68 Lembaga Kemasyarakatan	18.150.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		19.965.000,00	KELURAHAN KARANG JOANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		199.650.000,00	KELURAHAN KARANG JOANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		3.000.000,00	KELURAHAN KARANG JOANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*	-			75 %	1.100.484.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	1.200.000.000,00	KELURAHAN KARANG JOANG
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				66 Lembaga Kemasyarakatan	1.100.484.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		1.200.000.000,00	KELURAHAN KARANG JOANG
		KELURAHAN GRAHA INDAH						**1.562.122.000,00**							**1.549.615.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.562.122.000,00**							**1.549.615.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.562.122.000,00**							**1.549.615.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**-**			**17 %**	**1.562.122.000,00**						**-**	**1.549.615.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana*	-			100 %	338.150.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	249.615.000,00	KELURAHAN GRAHA INDAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				76 Lembaga Kemasyarakatan	18.150.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		19.965.000,00	KELURAHAN GRAHA INDAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		199.650.000,00	KELURAHAN GRAHA INDAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	KELURAHAN GRAHA INDAH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*	-			75 %	1.223.972.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	1.300.000.000,00	KELURAHAN GRAHA INDAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				74 Lembaga Kemasyarakatan	1.223.972.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		1.300.000.000,00	KELURAHAN GRAHA INDAH
		KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA						**1.371.454.000,00**							**1.349.615.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.371.454.000,00**							**1.349.615.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.371.454.000,00**							**1.349.615.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**-**			**17 %**	**1.371.454.000,00**						**-**	**1.349.615.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana*	-			100 %	348.150.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	249.615.000,00	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				63 Lembaga Kemasyarakatan	18.150.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		19.965.000,00	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	310.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		199.650.000,00	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*	-			75 %	1.023.304.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	1.100.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				61 Lembaga Kemasyarakatan	1.023.304.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		1.100.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA
		KELURAHAN MUARA RAPAK						**1.788.226.000,00**							**1.749.615.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.788.226.000,00**							**1.749.615.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.788.226.000,00**							**1.749.615.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**-**			**17 %**	**1.788.226.000,00**						**-**	**1.749.615.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana*	-			100 %	348.150.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	249.615.000,00	KELURAHAN MUARA RAPAK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				90 Lembaga Kemasyarakatan	18.150.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		19.965.000,00	KELURAHAN MUARA RAPAK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		199.650.000,00	KELURAHAN MUARA RAPAK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	KELURAHAN MUARA RAPAK
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*	-			75 %	1.440.076.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	1.500.000.000,00	KELURAHAN MUARA RAPAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				88 Lembaga Kemasyarakatan	1.440.076.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		1.500.000.000,00	KELURAHAN MUARA RAPAK
		KELURAHAN BATU AMPAR						**1.639.302.000,00**							**1.649.615.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.639.302.000,00**							**1.649.615.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.639.302.000,00**							**1.649.615.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan***	**-**			**17 %**	**1.639.302.000,00**						**-**	**1.649.615.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana*	-			100 %	338.150.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	249.615.000,00	KELURAHAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				81 Lembaga Kemasyarakatan	18.150.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		19.965.000,00	KELURAHAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		199.650.000,00	KELURAHAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	KELURAHAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan*	-			75 %	1.301.152.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	1.400.000.000,00	KELURAHAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				79 Lembaga Kemasyarakatan	1.301.152.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		1.400.000.000,00	KELURAHAN BATU AMPAR
	J U M L A H							**28.952.776.000,00**							**30.216.943.517,00**	

RANKHIR RENJA 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024, disusun berdasarkan ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2016 – 2021 yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Mengacu ketentuan diatas, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah melalui pengendalian dan evaluasi Renja sebagai Laporan untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 juga dapat menjadi sumber informasi yang cukup untuk implementasi dan sasaran kerja, rencana anggaran dan rencana strategis pada tahun anggaran selanjutnya. Laporan Evaluasi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur perbaikan Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan serta sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh apatur Kecamatan Balikpapan Selatan sesuai dengan Tupoksinya.

Kami menyadari dalam penyusunan evaluasi hasil Renja ini belum sepenuhnya sempurna. Namun, hasil penyusunan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan agar tahun mendatang pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Balikpapan, Agustus 2023

Camat Balikpapan Selatan

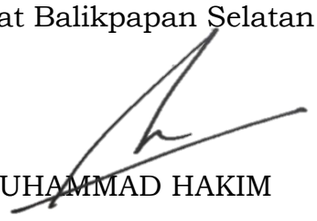

MUHAMMAD HAKIM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.1.1. Pengertian Renja 2
1.1.2. Proses Penyusunan Renja 2
1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 3
1.2 Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23
BAB III 45
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 45
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Selatan 45
3.3 Program Dan Kegiatan 46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN 70
BAB V INOVASI KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN 76
BAB VI 82
PENUTUP 82
5.1 Catatan Penting 82
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 82
5.3 Rencana Tindak Lanjut 83

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertemunya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah pada kegiatan tahunan yang kemudian sebelum diimplementasikan, kegiatan yang direncanakan tersebut terlebih dahulu harus disiapkan perencanaan penganggaran untuk mendapatkan pagu dana. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

1) Penyusunan rencana;
2) Penetapan rencana;
3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan untukmencapai visi dan misi Kota Balikpapan adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana kerja yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi.

Pembangunanyang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalamkegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Balikpapan. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Balikpapan akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”, dengan Misi sebagai berikut, *Misi kesatu* Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik, *Misi kedua* Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi, *Misi ketiga* Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang memadai, *Misi keempat* Mewujudkan

Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan, *Misi kelima* Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif.

Kegiatan pelayanan publik, selain sebagai bagian dari kewajiban pemerintah terhadap masyarakatnya, untuk mengukur seberapa jauh penerimaan masyarakat terhadap program-program pelayanan kepada masyarakat luas dan usulan-usulan perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disadari sepenuhnya bahwa peran Kecamatan Balikpapan Selatan akan mampu menciptakan pelayanan prima yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini Perangkat Daerah dan masyarakat luas. Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai bagian dari garda terdepan lembaga Pemerintah Kota Balikpapan yang sangat dekat dan turut bertanggung jawab terhadap implementasi program pembangunan Pemerintahan Kota Balikpapan, senantiasa menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RENJA) Tahun 2023 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi, misi, dan agenda pembangunan.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun Renja berfungsi untuk menerjemahkan Renstra lima tahunan yang dituangkan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja menjadi mutlak sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran yang ditentukan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara menyeluruh atau sejajar dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi PD saat ini, evaluasi renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perwali RKPD
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanan yang diusulkan
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja

a. Pembentukan Tim Penyusun Renja
b. Orientasi mengenai Renja
c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
d. Pengumpulan Data dan Informasi

2. Pengolahan Data dan Informasi

   Pada tahapan ini disajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap perumusan penyusunan rancangan Renja

3. Perumusan Rancangan Renja
   a. Pengolahan data dan informasi
   b. Analisis gambaran pelayanan PD
   c. Menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
   e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD
   f. Perumusan tujuan dan sasaran
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
   h. Perumusan kegiatan prioritas
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD
   j. Penyempurnaan rancangan Renja PD
   k. Pembahasan Forum PD
   l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD
6. Penetapan Renja

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

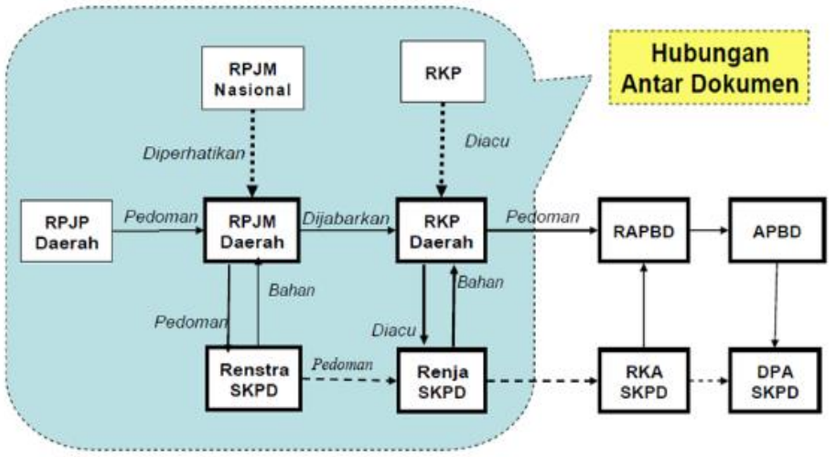

Gambar 1.1.

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
16. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi;
17. Rancangan Awal RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023;
18. Surat Wali Kota Balikpapan Nomor : 050/0180/Bappeda-Litbang Tanggal 28 Januari 2022 Perihal Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis dan fokus pada pemecahan masalah yang ada.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 adalah:

1. Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui advokasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan dan antar PD, Stakeholders, masyarakat.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Kecamatan Balikpapan Selatan baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi dan manajemen.
4. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.

5. Sebagai pusat informasi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyaring data dan bahan baik untuk dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2023 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2021. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**880.473.500**	**863.178.300**	**17.295.200**	**98.03%**
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**766.500.000**	**754.394.500**	**12.105.500**	**98.42%**
	Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	766.500.000	754.394.500	12.105.500	98.42%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	**35.988.300**	**32.128.800**	**3.859.500**	**89.27%**
	Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	23.994.800	23.614.800	380.000	98.42%

	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.993.500	8.514.000	3.479.500	70.98%
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	**77.985.200**	**76.655.000**	**1.320.200**	**98.30%**
	Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	77.985.200	76.655.000	1.320.200	98.30%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**5.818.753.750**	**5.695.815.480**	**122.938.270**	**97.88%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**2.256.313.000**	**2.195.239.109**	**61.073.891**	**97.29%**
	Subkegiatan Evaluasi Kelurahan	139.996.500	134.764.000	5.232.500	96.26%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggan	12.000.000	11.915.000	85.000	99.26%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggan Baru	11.998.350	11.923.350	75.000	99.37%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Bahagia	12.000.000	11.607.000	393.000	96.73%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggan Raya	11.999.900	11.909.900	90.000	99.25%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sungainangka	29.999.550	29.274.850	724.700	97.58%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Baru	12.000.000	10.740.000	1.260.000	89.50%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat	12.000.000	11.907.200	92.800	99.23%

	Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Bahagia				
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan	205.000.000	201.248.041	3.751.959	98.17%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan Baru	288.176.000	286.071.020	2.104.980	99.27%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Bahagia	196.895.000	182.238.500	14.656.500	92.56%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan Raya	236.999.800	228.610.800	8.389.000	96.46%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungainangka	211.999.700	208.356.688	3.643.012	98.28%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Baru	160.250.000	151.501.860	8.748.140	94.54%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Bahagia	214.999.800	214.571.300	428.500	99.80%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan	50.000.000	49.847.600	152.400	99.70%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia	50.000.000	50.000.000	0	100%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan Raya	50.000.000	49.600.000	400.000	99.20%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungainangka	50.000.000	49.847.600	152.400	99.70%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Baru	50.000.000	46.095.000	3.905.000	92.19%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	50.000.000	49.720.000	280.000	99.44%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Balikpapan Selatan)	199.998.500	193.385.500	6.613.000	96.69%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga	**3.562.440.750**	**3.500.576.371**	**61.864.379**	**98.26%**

	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
	Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	34.998.700	34.188.700	810.000	97.69%
	Subkegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	34.975.200	30.985.000	3.990.200	88.59%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	82.500.000	81.960.000	540.000	99.35%
	Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	54.982.300	49.526.800	5.455.500	90.08%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai Bahagia	406.988.300	406.060.644	927.656	99.77%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan Raya	343.499.950	342.426.989	1.072.961	99.69%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai Baru	236.000.000	225.701.948	10.298.052	95.64%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan Baru	605.497.000	601.236.338	4.260.662	99.30%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Bahagia	578.000.000	575.717.096	2.282.904	99.61%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan	696.999.700	686.940.580	10.059.120	98.56%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Nangka	487.999.600	465.832.276	22.167.324	95.46%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**350.987.800**	**331.455.800**	**19.532.000**	**94.44%**
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**350.987.800**	**331.455.800**	**19.532.000**	**94.44%**
	Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	350.987.800	331.455.800	19.532.000	94.44%

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**17.751.673.000**	**15.821.138.900**	**1.930.534.100**	**89.12**
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**12.327.854.000**	**10.872.211.314**	**1.455.642.686**	**88.19%**
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.327.854.000	10.872.211.314	1.455.642.686	88.19%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**77.500.000**	**76.820.000**	**680.000**	**99.12%**
	Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	77.500.000	76.820.000	680.000	99.12%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.846.233.000**	**1.724.385.348**	**121.847.652**	**93.40%**
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000	148.916.000	1.084.000	99.28%
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	610.980.000	528.580.600	82.399.400	86.51%
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	159.995.000	158.763.000	1.232.000	99.23%
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	178.608.000	157.225.000	21.383.000	88.03%
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	416.400.000	407.996.000	8.404.000	97.98%
	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.250.000	13.050.000	7.200.000	64.44%
	SubkegiatanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.000.000	309.854.748	145.252	99.95%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**200.000.000**	**200.000.000**	**0**	**100%**
	Sub Kegiatan Pegadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	0	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.359.536.000**	**2.022.540.366**	**336.995.634**	**85.71%**
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	459.536.000	327.878.658	131.657.342	71.35%
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.900.000.000	1.694.661.708	205.338.292	89.19%

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.038.300.000**	**1.015.051.872**	**23.248.128**	**97.76%**
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	472.300.000	457.939.352	14.360.648	96.96%
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.000.000	21.986.550	4.013.450	84.56%
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.000.000	137.319.970	2.680.030	98.09%
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	397.806.000	2.194.000	99.45%
Jumlah		24.899.638.050	22.801.458.480	2.098.179.6570	91.57%

Pengukuran Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan didasarkan pada Sasaran Strategis dan Capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2. 2
Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	80,50	81,11
	Meningkatnya Kualitas reformasi birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	27	29,41

Tabel 2. 3

T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	URUSAN KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publlik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan yang	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%

	yang ada di Kecamatan	ada di Kecamatan yang berkualitas								
7.01.02.2.04	Pelaksnaaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pelayanan Adminitrasi Terpadu (PATEN) yang dilayani sesuai standar pelayanan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	241%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.04	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksnaakan oleh kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	365	n/a	71	80,22	112,99%	72	15222%	41,70%
7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP kecamatan	360	n/a	68	69,20	101,76%	70	13920%	38,67%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	365	n/a	71	80,77	113,76%	72	15277%	41,85%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	365	n/a	71	77,16	108,68%	72	14916%	40,87%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	365	n/a	71	78,29	110,27%	72	15029%	41,18%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365	n/a	71	81,49	114,77%	72	15349%	42,05%

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365	n/a	71	78,29	110,27%	72	15029%	41,18%
	Kelurahan			n/a					0%	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%

7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Perwali Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peniingkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
e. pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
i. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
j. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
k. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ada beberapa faktor permasalahan kinerja pelayanan sampai dengan tahun 2022 yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas tinggi
2. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik
3. Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara
4. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban serta kebersihan lingkungan hidup
5. Masalah sosial yang timbul akibat kepadatan penduduk yang tinggi
6. Kecenderungan timbulnya bencana yang diakibatkan kondisi geografis wilayah yang berbukit-bukit
7. Belum optimalnya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat
8. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
9. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
10. Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah

11. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal
12. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kurang memadai

Langkah-langkah yang diambil untuk peningkatan Kinerja melalui Indikator Kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah Kecamatan Balikpapan Selatan, yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
   Kinerja pelayanan publik yang diberikan langsung kepada masyarakat diukur melalui survei kepuasan masyarakat (SKM). Adapun pelayanan publik yang disurvei adalah pelayanan yang diberikan melalui loket pelayanan.
2. Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan
   Kinerja Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan mencakup partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan kelurahan seperti kerja bakti, SPGRM, dana kelurahan, keikutsertaan dalam Lembaga masyarakat tingkat kelurahan dan lainnya.
3. Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal
   Kinerja Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan mencakup Razia Yustisi/Penertiban Rumah Kos/PKL/Miras/Bangunan Tidak Ber IMB/Pengajuan Lahan/Razia TPS dan koordinasi trantibum dengan kepolisian, TNI dan instansi vertikal lainnya.
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah
   Kinerja Pelayanan IKM Internal dilakukan dengan mengukur pelayanan yang diberikan secretariat kecamatan kepada pegawai internal mencakup pelayanan keuangan, kepegawaian, pemeliharaan dan lainnya.

Tabel 2. 4
TC.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			82,25	82,85	83,66	84,38	80,22	80,22	83,66	84,38	
	Persentase Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan			8,00	8,25	8,5	8,75	19,27 %	19,27 %	8,5	8,75	
	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	yang optimal										
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			71	72	73	74	80,22	80,22	73	74	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada pelaksanaan Musrenbangnas RPJMN Tahun 2020-2024 pada tanggal 16 Desember 2019, disampaikan 5 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 – 2024 yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan dinamis;
2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian;
3. Menyederhanakan Regulasi yang menjadi kendala perubahan untuk kemajuan utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengoptimalkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Menyederhanakan Birokrasi melalui pemangkasan proses yang panjang untuk mempermudah investasi;
5. Transformasi Ekonomi, dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa.

Selanjutnya Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur periode 2019-2023, yang menjadi salah satu input bagi perumusan visi, misi dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur pada periode berkenaan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas daya saing SDM daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja;
2. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana;
3. Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada konsep hijau (green city);
4. Peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berwawasan lingkungan (green economy);
5. Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya faktor- faktor seperti capaian kinerja rencana strategis lima tahun lalu, peluang dan tantangan yang dihadapi, telaah terhadap visi dan misi Wali Kota , maka Isu-Isu strategis di Kecamatan Balikpapan Selatan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan ke depan meliputi :

1. Tuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009;
2. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keselarasan perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan pada tingkat pemerintahan;
4. Optimalisasi pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah;
5. Ketersediaan sumber daya pemerintahan baik SDM aparatur dan sistem informasi pelayanan publik yang proporsional sesuai kebutuhan ideal;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadapkebutuhan Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Selatan. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2022-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Kecamatan Balikpapan Selatan, maka fungsi dan tugas Kecamatan Balikpapan Selatan terkaiterat dengan pencapaian Misi ke-1: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 5
T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Balikpapan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**100%**	**604.072.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**100%**	**604.072.000,00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti**	**100%**	**336.755.000,00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti**	**100%**	**336.755.000,00**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	215.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	215.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	121.755.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	121.755.000,00	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas**	**100%**	**204.072.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas**	**100%**	**204.072.000,00**	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	9.072.000,00	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	9.072.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	195.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	195.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan**	**100%**	**63.245.000,00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan**	**100%**	**63.245.000,00**	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	790 Dokumen	63.245.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	790 Dokumen	63.245.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.098.550.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.098.550.000,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana**	**100%**	**98.550.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana**	**100%**	**98.550.000,00**	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tingkat Kecamatan)	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tingkat Kecamatan)	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 lembaga kemasyarakatan	25.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 lembaga kemasyarakatan	25.000.000,00	
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 laporan	73.550.000,00	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 laporan	73.550.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**1.000.000.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**1.000.000.000,00**	

	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 lembaga kemasyarakatan	800.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 lembaga kemasyarakatan	800.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	150.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	150.000.000,00	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	50.000.000,00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	50.000.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	**100%**	**620.000.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	**100%**	**620.000.000,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum**	**100%**	**620.000.000,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum**	**100%**	**620.000.000,00**	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19 laporan	620.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19 laporan	620.000.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah**	**72 poin**	**20.125.370.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah**	**72 poin**	**20.125.370.000,00**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**70 poin**	**10.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**70 poin**	**10.000.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	Kecamatan Balikpapan Selatan	jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	Kecamatan Balikpapan Selatan	jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	10.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**72 poin**	**12.565.556.480,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**72 poin**	**12.565.556.480,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	66 orang/bulan	12.565.556.480,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	66 orang/bulan	12.565.556.480,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**72 poin**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**72 poin**	**-**	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	1 paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	1 paket	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Kecamatan Balikpapan Selatan			-	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Kecamatan Balikpapan Selatan			-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**72 poin**	**2.107.367.374,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**72 poin**	**2.107.367.374,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 paket	135.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 paket	135.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	10 paket	399.596.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	10 paket	399.596.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	0 Jenis	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	0 Jenis	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Jenis Bahan Logisttik Kantor	29 paket	754.671.374,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Jenis Bahan Logisttik Kantor	29 paket	754.671.374,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 paket	200.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 paket	200.000.000,00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	12 dokumen	168.100.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	12 dokumen	168.100.000,00	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah konsumsi untuk tamu	12 laporan	20.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah konsumsi untuk tamu	12 laporan	20.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Selatan	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	18 laporan	430.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Selatan	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	18 laporan	430.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**605.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**605.000.000,00**	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 Unit	250.000.000,00	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 Unit	250.000.000,00	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis mebel	1 unit	100.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis mebel	1 unit	100.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	0	5.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	0	5.000.000,00	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah aset tak berwujud	0	50.000.000,00	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah aset tak berwujud	0	50.000.000,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Luas bangunan	1 unit	200.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Luas bangunan	1 unit	200.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72 poin**	**2.766.127.600,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72 poin**	**2.766.127.600,00**	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 laporan	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 laporan	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	12 laporan	490.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	12 laporan	490.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	jumlah lapooran penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		2.276.127.600,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	jumlah lapooran penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		2.276.127.600,00	
		Kecamatan Balikpapan Selatan	Kebersihan kantor kecamatan	12 laporan			Kecamatan Balikpapan Selatan	Kebersihan kantor kecamatan	12 laporan		
		Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Tenaga Non PNS				Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Tenaga Non PNS			
		Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Tenaga Profesional				Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Tenaga Profesional			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2.071.318.546,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2.071.318.546,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	54 unit	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	54 unit	15.000.000,00	

	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis mebel yang terpelihara		-	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis mebel yang terpelihara		-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	297 unit	180.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	297 unit	180.000.000,00	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Frekuensi Pemelihaaraan	4 gedung	1.255.872.400,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Frekuensi Pemelihaaraan	4 gedung	1.255.872.400,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	-	
	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Selatan		54 unit	620.446.146,00	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Selatan		54 unit	620.446.146,00	
	Kelurahan										
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kelurahan Damai Bahagia**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.119.682.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Damai Bahagia**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.119.682.000,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kelurahan Damai Bahagia**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia**	**100%**	**340.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Damai Bahagia**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia**	**100%**	**340.000.000,00**	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46 lembaga kemasyarakatan	15.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46 lembaga kemasyarakatan	15.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	265.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	265.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kelurahan Damai Bahagia**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**779.682.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Damai Bahagia**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**779.682.000,00**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	43 lembaga kemasyarakatan	779.682.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	43 lembaga kemasyarakatan	779.682.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kelurahan Sepinggan Raya**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.012.372.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Sepinggan Raya**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.012.372.000,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kelurahan Sepinggan Raya**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan raya**	**100%**	**340.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Sepinggan Raya**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan raya**	**100%**	**340.000.000,00**	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 lembaga kemasyarakatan	15.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 lembaga kemasyarakatan	15.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	265.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	265.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kelurahan Sepinggan Raya**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**672.372.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Sepinggan Raya**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**672.372.000,00**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	**Kelurahan Sepinggan Raya**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakatan	672.372.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	**Kelurahan Sepinggan Raya**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakatan	672.372.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kelurahan Sepinggan Raya**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**828.412.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Sepinggan Raya**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**828.412.000,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kelurahan Sepinggan Raya**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Baru**	**100%**	**340.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Sepinggan Raya**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Baru**	**100%**	**340.000.000,00**	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	**Kelurahan Sepinggan Raya**	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 lembaga kemasyarakatan	15.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	**Kelurahan Sepinggan Raya**	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 lembaga kemasyarakatan	15.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	**Kelurahan Sepinggan Raya**	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	265.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	**Kelurahan Sepinggan Raya**	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	265.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**Kelurahan Sepinggan Raya**	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**Kelurahan Sepinggan Raya**	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kelurahan Sepinggan Raya**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**488.412.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Sepinggan Raya**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**488.412.000,00**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	24 lembaga kemasyarakatan	488.412.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	24 lembaga kemasyarakatan	488.412.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kelurahan Sepinggan Baru**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.487.602.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Sepinggan Baru**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.487.602.000,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kelurahan Sepinggan Baru**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan Baru**	**100%**	**340.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Sepinggan Baru**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan Baru**	**100%**	**340.000.000,00**	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	69 lembaga kemasyasrakatan	15.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	69 lembaga kemasyasrakatan	15.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	265.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	265.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kelurahan Sepinggan Baru**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**1.147.602.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Sepinggan Baru**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**1.147.602.000,00**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	66 lembaga kemasyarakatan	1.147.602.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	66 lembaga kemasyarakatan	1.147.602.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kelurahan Gunung Bahagia**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.410.952.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Gunung Bahagia**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.410.952.000,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kelurahan Gunung Bahagia**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia**	**100%**	**340.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Gunung Bahagia**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia**	**100%**	**340.000.000,00**	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64 lembaga kemasyarakatan	15.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64 lembaga kemasyarakatan	15.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	265.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	265.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kelurahan Gunung Bahagia**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**1.070.952.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Gunung Bahagia**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**1.070.952.000,00**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	61 lembaga kemasyarakatan	1.070.952.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	61 lembaga kemasyarakatan	1.070.952.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kelurahan Sepinggan**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.567.252.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Sepinggan**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.567.252.000,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kelurahan Sepinggan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan**	**100%**	**343.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Sepinggan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan**	**100%**	**343.000.000,00**	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75 lembaga kemasyarakatan	18.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75 lembaga kemasyarakatan	18.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	265.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	265.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kelurahan Sepinggan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**		**1.224.252.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Sepinggan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**		**1.224.252.000,00**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	46 lembaga kemasyarakatan	1.224.252.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	46 lembaga kemasyarakatan	1.224.252.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kelurahan Sungai Nangka**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.196.332.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Sungai Nangka**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.196.332.000,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kelurahan Sungai Nangka**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka**	**100%**	**340.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Sungai Nangka**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka**	**100%**	**340.000.000,00**	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**100%**	15.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**100%**	15.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	265.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	265.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kelurahan Sungai Nangka**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**856.332.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Sungai Nangka**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**856.332.000,00**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	48 lembaga kemasyarakatan	856.332.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	48 lembaga kemasyarakatan	856.332.000,00	

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Balikpapan

Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/Pembangunan Jembatan RT. 12	Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 12 Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 5 m, L : 3.5 m T : 25 cm	
	Perbaikan Siring / Perbaikan Siring RT. 30	Jl. Mulawarman RT. 30 Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 8 m L : 5 m	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan/Perbaikan Saluran Drainase RT. 6	Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 6 Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 250 m, L : 2 m T : 15 cm	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan/Perbaikan Saluran Drainase RT. 3	Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 3 Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 150 m, L : 1 m T : 30 cm	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan/Perbaikan Saluran Drainase RT. 14	Jl Ratte Daeng RT. 14 Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 15 m, L : 50 cm T : 15 cm	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/Pembangunan Jembatan RT. 10	Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 10 Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 4 m, L : 2 m T : 20 cm	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan/Perbaikan Saluran Drainase RT. 13	Jl. Syarifuddin Yoes RT. 13 Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 200 m, L : 50 cm	
	Infrastruktur/Masyarakat	RT.07 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 500 m Lebar : 60 cm Tinggi : 60 cm	
	Infrastruktur/Masyarakat	RT.08 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 467 m Lebar : 60 cm Tinggi : 60 cm	
	Infrastruktur/Masyarakat	RT.10 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 300 m Lebar : 70 cm Tinggi : 80 cm	

	Infrastruktur/Masyarakat	RT.11 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 100 m Lebar : 4 m	
	Infrastruktur/Masyarakat	RT.16 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 175 m Lebar : 5 m	
	Infrastruktur/Masyarakat	RT.22 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 300 m Lebar : 4 m	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.27 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 35 M, Lebar = 80 Cm, Tinggi = 70 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.18 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 70 M, Lebar = 1 M, Tinggi = 80 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.31 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 80 M, Lebar = 80 Cm, Tinggi = 50 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.37 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang= 250 M, Lebar = 50 Cm, Tinggi = 50 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.56 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 200 , Lebar = 60 Cm, Tinggi = 50 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.61 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 375 M, Lebar = 50 Cm, Tinggi = 50 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.66 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 50 M, Lebar = 40 Cm, Tinggi = 50 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.68 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 150 M, Lebar = 40 Cm, Tinggi = 70 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.12 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 80 M, Lebar = 50 Cm, Tinggi = 50 Cm	

	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	RT.19 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 144 M, Lebar = 30 Cm, Tinggi = 40 Cm	
	Pembangunan/Perbaikan drainase dan selokan pemukiman	RT.25 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 56 M, Lebar = 1 M, Tinggi = 1 M	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter	RT.36 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 70 M, Lebar = 1.5 M, T = 1.5 M	
	Pembangunan/Perbaikan drainase dan selokan pemukiman	RT.21 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 18 M, Lebar = 2 M, Tinggi = 2.75 M	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter) di RT. 24	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	400 Meter	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter) di RT. 22 KE TPS RT. 21	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	350 Meter	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter) Lanjutan di RT. 15 Perbatasan RT. 10	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	200 Meter	
	Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan / Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter) Jalan utama BDS II	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1500 Meter	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter) Arah dari RT. 07 menuju RT. 01	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	400 Meter	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter) Lanjutan di Belakang Warung Khoirul RT. 37	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	150 Meter	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter) di BJBJ RT. 30 Belakang Jamrud	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	300 Meter	
	Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan /Perum Poka BAA 26-BAA 34 RT. 12 ,Kota Balikpapan	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	500 Meter	

	Jembatan/Peninggian Jembatan	Gg. Surya 1 RT. 11 Kelurahan Damai Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	4 x 6 m	
	Jembatan/Perbaikan Pondasi Jembatan	Jl. Tulip RT. 06 Kelurahan Damai Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	
	Drainase/Dinding Drainase Kiri Kanan	Depan Masjid Al Ikhwan RT. 08 Kelurahan Damai Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	60 m	
	Drainase/Pelebaran Drainase	Masjid Namira RT. 15 Kelurahan Damai Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	118x1.2x1m	
		RT.38 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.39 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.50 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.54 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.13 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.27 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.37 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.20 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.17 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan		

			yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/ Parit lama ketutupan tanah RT 30, jl Bhineka, Kota Balikpapan P= 500 M	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Parit buntu RT 54, jl batu piruz, Kota Balikpapan P= 120 M	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Jalan Lingkungan / jalan rusak RT 32, Sepinggan baru, Kota Balikpapan P= 200 M L= 5 M KETEBALAN 15 CM	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Parit rusak RT 32, Sepinggan baru, Kota Balikpapan P= 200 M L= 60 cm Kedalaman 60 cm	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Jalan Lingkungan/jalan rusak RT 20, perum her mandiri I blok a, Kota Balikpapan P= 130 M L= 3 M Ketebalan 15 cm	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/ Parit rusak RT 5, Jl. Kavling Blok I RT.5 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan P= 90 M L= 1 M Kedalaman 80 cm	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Parit rusak RT 29, Jl. Praja Muda I kanan, Kota Balikpapan P= 140 M L= 0,5 M Kedalaman 60 CM	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/ Parit rusak RT 29 Jl. Praja Muda I kiri , Kota Balikpapan	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2021 berada pada tahap jangka menengah yang kedua yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan Visi sebagai berikut :

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Mempermudah Investasi untuk Lapangan Kerja
4. Reformasi Birokrasi
5. APBN yang tepat sasaran.

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur terpilih menjadi lokasi Ibu Kota Negara yang baru. Hal ini menjadikan Kota Balikpapan harus siap dan berbenah diri sebagai Kota Penyangga dari daerah calon IKN. IKN akan menjadi representasi kemajuab bangsa yang unggul, dimana Visi Ibu Kota adalah sebagai katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia. Pendekatan dari Visi IKN adalah :

1. Mencerminkan Identitas Bangsa
2. Menjamin keberlanjutan Sosiali, Ekonomi, Lingkungan
3. Mewujudkan Kota yang Cerdas, Modern dan berstandar Internasional

Hal-hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 Pemerintah Kota Balikpapan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Selatan

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tujuan serta sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Selatan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan diatas. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Balikpapan Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.

TUJUAN DAN SASARAN

	TUJUAN		SASARAN
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentramana dan Ketertiban Umum
		2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Adapun program secara keseluruhan yang diselenggarakan Kecamatan Balikpapan Selatan selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Kewilayahan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
			Pengadaan Aset tak berwujud
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Evaluasi Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			Fasilitasi Pemanfataan Teknologi Tepat Guna

	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN								**22.447.992.000,00**				**24.119.786.165,00**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								**22.447.992.000,00**				**24.119.786.165,00**
7	**01**				**KECAMATAN**								**2.322.622.000,00**				**2.551.111.271,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**604.072.000,00**				**1.143.854.299,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**336.755.000,00**				**480.000.000,00**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
						Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 laporan Laporan	100 %	215.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha	7 laporan Laporan	230.000.000,00

								ditindaklanjuti								n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
						Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 dokumen Dokumen	100 %	121.755.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen Dokume n	250.000.000,00
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**204.072.000,00**					**438.854.299,00**
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan													
						Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %	9.072.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokum en	313.854.299,00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Persentase Pengaduan Pelayanan Administra	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintaha	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,	100 %	1 Laporan	100 %	195.000.000,00	PENDAPATAN ASLI		Jumlah Laporan Peningkatan	1 Laporan	125.000.000,00

						tif Yang Ditindaklanjuti	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	Semua Kel/Desa					DAERAH (PAD)		Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**63.245.000,00**					**225.000.000,00**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													
						Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	790 Dokumen	100 %	63.245.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	790 Dokumen	225.000.000,00
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1.098.550.000,00**					**941.806.163,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**98.550.000,00**					**141.806.163,00**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	100 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	100 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00

																Pembangun a n di Kelurahan		
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	2 Laporan	100 %	73.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	126.806.163,00
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**1.000.000.000,00**					**800.000.000,00**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	11 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	800.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 Lembaga Kemasyarakatan	700.000.000,00
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	1 Laporan	100 %	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	50.000.000,00
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													

						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	1 Laporan	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	50.000.000,00
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**620.000.000,00**					**465.450.809,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**620.000.000,00**					**465.450.809,00**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
						Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	19 Laporan	100 %	620.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19 Laporan	465.450.809,00
7	**01**				**KECAMATAN ADMINISTRASI**								**20.125.370.000,00**					**21.568.674.894,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**20.125.370.000,00**					**21.568.674.894,00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10.000.000,00**					**10.000.000,00**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	4 Dokumen	72 Poin	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**12.565.556.480,00**					**14.000.000.000,00**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	68 Orang/bulan	73 Poin	12.565.556.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	14.000.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2.107.367.374,00**					**2.748.674.894,00**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73Poin	8 Paket	73 Poin	135.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	150.000.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	10 Paket	73 Poin	399.596.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	324.000.000,00

																yang Disediakan		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	29 Paket	73 Poin	754.671.374,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	1.319.674.894,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	3 Paket	73 Poin	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	170.000.000,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	12 Dokumen	73 Poin	168.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	135.000.000,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	12 Laporan	73 Poin	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	150.000.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	18 Laporan	73 Poin	430.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	500.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**605.000.000,00**					**910.000.000,00**
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	1 Unit	73 Poin	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	250.000.000,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	10 Unit	73 Poin	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	110.000.000,00

								Pemerintah Daerah									
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	2 Unit	73 Poin	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	300.000.000,00
7	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud												
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	1 Unit	73 Poin	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	1 Unit	73 Poin	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2.766.127.600,00**				**2.600.000.000,00**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	12 Laporan	73 Poin	490.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	775.000.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	12 Laporan	73 Poin	2.276.127.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.825.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2.071.318.546,00**					**1.300.000.000,00**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	54 Unit	73 Poin	620.446.146,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54 Unit	500.000.000,00

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	54 Unit	73 Poin	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	150.000.000,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	297 Unit	73 Poin	180.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	297 Unit	300.000.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	7 Unit	73 Poin	1.255.872.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	350.000.000,00
					KELURAHAN DAMAI BAHAGIA								**1.119.682.000,00**					**865.000.000,00**

7	**01**				**KECAMATAN**								**1.119.682.000,00**					**865.000.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**1.119.682.000,00**					**865.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**340.000.000,00**					**365.000.000,00**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	43 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	43 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	270.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyaraka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,	8.5 %	1 Pokmas / Ormas	100 %	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang	1 Pokmas / Ormas	80.000.000,00

						t dalam Membangun Kelurahan	Masyarakat di Kelurahan	yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Semua Kel/Desa							Melaksanaka n Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan			
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**779.682.000,00**						**500.000.000,00**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	8.5 %	43 Lembaga K emasyarakatan	100 %	779.682.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	43 Lembaga Kemasyarakatan	500.000.000,00
					KELURAHAN SEPINGGAN RAYA								**1.012.372.000,00**						**762.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**340.000.000,00**						**362.000.000,00**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	8.5 %	39 Lembaga K emasyarakatan	100 %	15.000.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00

7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	270.000.000,00	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	8.5 %	1 Pokmas / Ormas	100 %	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	80.000.000,00	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**672.372.000,00**					**400.000.000,00**	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	8.5 %	36 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	672.372.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan	400.000.000,00	
					KELURAHAN DAMAI BARU								**828.412.000,00**					**662.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**340.000.000,00**					**362.000.000,00**	

7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	8.5 %	27 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	270.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	8.5 %	1 Pokmas / Ormas	100 %	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	80.000.000,00

7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**488.412.000,00**					**300.000.000,00**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	24 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	488.412.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	24 Lembaga Kemasyarakatan	300.000.000,00
					KELURAHAN SEPINGGAN BARU								**1.487.602.000,00**					**1.062.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**340.000.000,00**					**362.000.000,00**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	8.5 %	69 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	69 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	10 Unit	270.000.000,00

						Membangun Kelurahan		berkualitas dalam membangun Kelurahan								Terbangun			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	8.5 %	1 Pokmas / Ormas	100 %	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	80.000.000,00
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**1.147.602.000,00**					**700.000.000,00**	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	8.5 %	66 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	1.147.602.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	66 Lembaga Kemasyarakatan	700.000.000,00
					KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA								**1.410.952.000,00**					**1.062.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**340.000.000,00**					**362.000.000,00**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	8.5 %	64 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpa	64 Lembaga Kemasya	12.000.000,00

						Membangun Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	berkualitas dalam membangun Kelurahan								rtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Kelurahan	rakatan	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	270.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	8.5 %	1 Pokmas / Ormas	100 %	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanaka n Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	80.000.000,00
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**1.070.952.000,00**					**700.000.000,00**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	8.5 %	61 Lembaga K emasya	100 %	1.070.952.000,00	PENDAPATAN ASLI		Jumlah Lembaga Ke masyarak	61 Lembaga Kemas	700.000.000,00

						Masyarakat dalam Membangun Kelurahan		atan di Kecamatan	Semua Kel/Desa		rakatan			DAERAH (PAD)		ata n yang Diselenggarakan	ya rakatan	
					KELURAHAN SEPINGGAN								**1.567.252.000,00**					**1.102.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**343.000.000,00**					**402.000.000,00**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	8.5 %	75 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	75 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	300.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	Persentase kegiatan	- Kota Balikpapan,	8.5 %	1 Pokmas	100 %	60.000.000,00	PENDAPATAN		Jumlah Pokmas	1 Pokma	90.000.000,00

						Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Balikpapan Selatan, Sepinggan		/ Ormas			ASLI DAERAH (PAD)		dan Ormas yang Melaksanaka n Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan	s / Ormas	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**1.224.252.000,00**					**700.000.000,00**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	8.5 %	46 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	1.224.252.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	46 Lembaga Kemasyarakatan	700.000.000,00
					KELURAHAN SUNGAI NANGKA								**1.196.332.000,00**					**912.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**340.000.000,00**					**362.000.000,00**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	8.5 %	51 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangu	51 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00

																na n di Kelurahan		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	270.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	8.5 %	1 Pokmas / Ormas	100 %	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	80.000.000,00
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**856.332.000,00**					**550.000.000,00**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	8.5 %	48 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	856.332.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	48 Lembaga Kemasyarakatan	550.000.000,00
												TOTAL	**31.070.596.000,00**					**30.546.786.165,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Untuk mewujudkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada.

Program di Kecamatan Balikpapan Selatan adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi, sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang, modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai bagian daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.

Pendanaan indikatif adalah sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Perangkat Daerah wajib memegang prinsip keuangan daerah yaitu harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, Kejujuran dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Pendanaan sendiri nantinya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas atas isi kegiatan yang harus dilaksanakan yang mengutamakan kebutuhan Perangkat Daerah dantentunya harus berdampak pula pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun rencana Program, Kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan TA 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Tahun 2024	
			Target capaian kinerja	Pagu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	604.376.600,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	336.754.600,00

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	215.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	121.754.600,00
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas**	**100%**	**204.072.000,00**
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	9.072.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	195.000.000,00
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan**	**100%**	**63.550.000,00**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	790 Dokumen	63.550.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.273.568.400,00**
7.01.03.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana**	**100%**	**98.547.000,00**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 lembaga kemasyarakatan	24.996.000,00
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 laporan	73.551.000,00
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**1.175.021.400,00**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 lembaga kemasyarakatan	850.000.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	274.999.400,00
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	50.022.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	100%	**699.999.500,00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum**	**100%**	**699.999.500,00**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	19 laporan	699.999.500,00

		Wilayah Kecamatan		
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	**27,25**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah**	**72 poin**	**19.720.212.426,00**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**70 poin**	**10.000.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	10.000.000,00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**72 poin**	**12.565.556.480,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	66 orang/bulan	12.565.556.480,00
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**72 poin**	**-**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	1 paket	-
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**72 poin**	**2.257.368.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 paket	135.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	10 paket	399.596.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logisttik Kantor	29 paket	789.338.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 paket	265.334.000,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	12 dokumen	168.100.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi untuk tamu	12 laporan	20.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	18 laporan	480.000.000,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**604.944.000,00**
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 Unit	250.000.000,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel	1 unit	100.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	0	4.944.000,00
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud	0	50.000.000,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas bangunan	1 unit	200.000.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72 poin**	**2.616.025.400,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 laporan	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	12 laporan	490.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah lapooran penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		-
		Kebersihan kantor kecamatan	12 laporan	2.126.025.400,00
		Jumlah Tenaga Non PNS		-
		Jumlah Tenaga Profesional		-

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.666.318.546,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	54 unit	15.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	297 unit	180.000.000,00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemelihaaraan	4 gedung	850.872.400,00
	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		54 unit	620.446.146,00
				22.298.156.926,00
Kelurahan				
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.119.682.000,00**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia**	**100%**	**340.000.000,00**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46 lembaga kemasyarakatan	15.000.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	42 unit	265.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**779.682.000,00**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	43 lembaga kemasyarakatan	779.682.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.062.372.000,00**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan raya**	**100%**	**390.000.000,00**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 lembaga kemasyarakatan	15.000.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	58 unit	315.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**672.372.000,00**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakatan	672.372.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**828.407.800,00**

7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Baru**	**100%**	**339.996.000,00**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 lembaga kemasyarakatan	14.999.900,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	60 unit	264.999.700,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	59.996.400,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**488.411.800,00**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	24 lembaga kemasyarakatan	488.411.800,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.487.601.600,00**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan Baru**	**100%**	**339.999.600,00**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	69 lembaga kemasyasrakatan	14.999.700,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	48 unit	264.999.900,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**1.147.602.000,00**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	66 lembaga kemasyarakatan	1.147.602.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.610.904.600,00**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia**	**100%**	**539.956.600,00**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64 lembaga kemasyarakatan	14.990.900,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	414.965.700,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	110.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**1.070.948.000,00**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	61 lembaga kemasyarakatan	1.070.948.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.767.133.100,00**

7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan**	**100%**	**542.881.400,00**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75 lembaga kemasyarakatan	17.999.500,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	136 unit	414.882.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	109.999.900,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**		**1.224.251.700,00**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	46 lembaga kemasyarakatan	1.224.251.700,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**8,25%**	**1.396.332.000,00**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka**	**100%**	**540.000.000,00**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**100%**	15.000.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	27 unit	415.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	110.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**100%**	**856.332.000,00**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	48 lembaga kemasyarakatan	856.332.000,00
				31.570.590.026,00

BAB V
INOVASI KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Adapun Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara sebanyak 2 (dua) inovasi dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**INOVASI EKSTERNAL**										
1	SENANG SAMPAH (Semangat Menabung dan Timbang Sampah)	V	X	Gerakan membangkitkan kembali semangat masyarakat dan pemilik usaha untuk melakukan pemilahan sampah dan pemberdayaan Bank Sampah di Kelurahan Sungai Nangka	Permasalahan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi lingkungan Kelurahan, dengan mendorong warga masyarakat dan pemilik usaha rumah makan untuk menjadi nasabah Bank sampah diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi kelestarian lingkungan	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Masyarakat Kelurahan Sungai Nangka	Bank Sampah yang sudah ada di Kelurahan Sungai Nangka dapat aktif dan berkembang	-	https://www.instagram.com/senangsampah.id/
2	DIGDAYA SUKA (Digitalisasi Data Swadaya Sungai Nangka)	V	X	Sistem penyampaian usulan masyarakat di bidang pembangunan dan sistem pelaporan swadaya secara online di Kelurahan Sungai Nangka	Data pemberdayaan masyarakat kerap tidak terdata dengan baik, dengan adanya pendataan melalui sistem digital diharapkan dapat dilakukan pencatatan data dengan baik dan tersaji dengan lengkap	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Ketua RT Kelurahan Sungai Nangka	Data Pemberdayaan Masyarakat tersaji dengan baik dan lengkap di Kelurahan Sungai Nangka	-	digdayasuka@gmail.com

3	SISWA MAS (Sistem Informasi Pelaporan Swadaya Masyarakat)	V	X	Sistem pelaporan swadaya masyarakat melalui aplikasi siswamas.balikpapan.go.id	Pelaporan data swadaya masyarakat yang sebelumnya manual dapat tercatat dengan baik melalui suatu sistem aplikasi atau website	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Ketua RT Kecamatan Balikpapan Selatan	Data swadaya masyarakat dapat tercatat dan tersaji dengan lengkap	-	http://103.144.82.54:8873/login.php
4	MAS DARLING (Masyarakat Sadar Lingkungan Tempat Tinggal Pendatang)	V	X	Gerakan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan penduduk pendatang di Kelurahan Sepinggan Baru	Masyarakat kerap kali tidak mengetahui adanya penduduk pendatang di wilayah tempat tinggal	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Pemilik Rumah Sewa dan Kost Kelurahan Sepinggan Baru	Warga pendatang tercatat dan terdaftar di Ketua RT	-	https://www.youtube.com/watch?v=ohcJNiJGRbM&t=12s
5	ALADIN SERAYA (Anjungan Layanan Aduan dan Informasi Kelurahan Sepinggan Raya)	V	X	Sistem layanan aduan dan informasi versi online yang dapat di akses melalui bit.ly/AladinSeraya.	Masyarakat memerlukan saluran komunikasi yang cepat, efektif dan efisien	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Sepinggan Raya	Masyarakat dapat menyampaikan aduan/pertanyaan/informasi secara online melalui link tersebut dan akan direspon/ditanggapi sesuai SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, Aladin Seraya juga menyediakan akses link untuk informasi pelayanan online: 1. Disdukcapil Balikpapan 2. Pelayanan IUMK melalui OSS 3. Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi oleh PLKB Sepinggan Raya.	-	https://aladinseraya.wordpress.com/anjungan-layanan-aduan-dan-informasi-kelurahan-sepinggan-raya/

6	SIGRA-PSR (Sinergi Penanganan Ketertiban Warga Pendatang Sepinggan Raya)	V	X	Peningkatan Pola penanganan, pengawasan dan pembinaan terkait pelayanan kepada masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dan lingkungan hidup dalam satu wilayah kelurahan, dengan memberdayakan unsur masyarakat melalui kerjasama LPM serta RT dari permasalahan ketertiban dan keamanan di dalam wilayah Kelurahan Sepinggan Raya.	Perlu adanya sinergi dalam penanganan masalah trantibum di wilayah Kelurahan	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Sepinggan Raya	Seluruh unsur masyarakat dapat mengkoordinasikan terkait bidang trantibum secara cepat dan tepat	-	
7	GENETIK SERAYA (Gerakan Nelayan Kreatif Kelurahan Sepinggan Raya)	V	X	Pembentukan Kelompok Nelayan dan pemberdayaan Nelayan di RT. 28 dan RT. 29 Kelurahan Sepinggan Raya	Pantai Seraya dan Nelayan yang berada di sekitarnya perlu terkoordinir dengan baik	2019	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Sepinggan Raya	Warga yang bermukim dan menjadi nelayan di arean Pantai Seraya dapat terkoordinir dan terberdayakan dengan baik	-	
8	AYO MANCING (Aksi Gotong Royong Mantap Cegah Stunting)	V	X	Gerakan gotong royong dan menjalin kerjasama seluruh pihak dan masyarakat untuk peduli dalam pencegahan dan penanganan kasus stunting	Masih terdapat kasus Stunting di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kecamatan Balikpapan Selatan	Terdorongnya masyarakat untuk terlibat untuk pencegahan dan penanganan kasus stunting	-	https://www.instagram.com/p/Cl2-InYP04k/
9	BUTIK LOKET (Buku Tamu, link informasi dan Survei Kepuasan Online disediakan di Loket Pelayanan)	V	X	Mengukur tingkat kepuasan layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna secara langsung setelah menerima pelayanan melalui scan barcode yang disediakan di loket pelayanan	Buku Tamu dan survei kepuasan layanan harus ditulis manual	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan	Data tamu dan hasil survei kepuasan dapat segera diketahui secara cepat	-	http://linktr.ee/kecamatanbalsel
II	**INOVASI INTERNAL**										

10	Digitalisasi Barang Inventaris	V	X	Memberikan kode barcode pada setiap barang inventaris di kantor Kecamatan Balikpapan Selatan dalam rangka tertib administrasi barang inventaris	Barang Inventaris belum terdokumentasikan dengan baik	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan	Melalui scan barcode, dapat ditemukan dengan mudah informasi yang ada pada BMD	-	
11	Kendali Serapan Anggaran dan Monitoring Keuangan Online	V	X	Sistem pengendalian serapan anggaran dan monitoring penggunaan APBD oleh PPTK secara online	Penggunaan anggaran belum terpantau dengan baik	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan	Melalui pemantauan secara online maka akan memudahkan bagi Camat selaku PA untuk memantau kinerja dari setiap PPTK dalam pengelolaan anggaran	-	https://www.youtube.com/watch?v=flcbX4uHIE4&t=59s
12	Balsel Belajar	V	X	Komunitas belajar pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan untuk mendorong minat pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan untuk mempelajari hal-hal baru yang mendorong peningkatan produktivitas pegawai dan kinerja organisasi atau mempelajari bidang di luar tugas dan fungsi sehari-hari namun dapat mendukung kinerja organisasi, bentuk kegiatan meliputi sosialisasi, sharing session, kunjungan ke Kecamatan dan Kelurahan berprestasi yang berada di Kota Balikpapan.	Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin cepat yang mengharuskan pegawai Kecamatan dan Kelurahan sebagai garda terdepan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dapat menyampaikan informasi atau menyajikan pelayanan yang tepat ke masyarakat	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Membuka wawasan dan pengetahuan pegawai terkait ilmu dan informasi penunjang tugas dan fungsi inti aparatur Kecamatan dan Kelurahan	-	https://www.instagram.com/p/CnTvCy1BJAb/ https://www.instagram.com/p/CkutXp_v3Wx/

13	Gelora BERAKHLAK	V	X	Penempatan Banner di kantor Kecamatan dan seluruh kantor Kelurahan se-Kecamatan Balikpapan Selatan tentang Core Values ASN BERAKHLAK dan kewajiban Pegawai mengucapkan/Yel-Yel Core Values ASN BERAKHLAK pada setiap Apel Senin	Core Values ASN BERAKHLAK wajib diinternalisasi ke seluruh pegawai, untuk memudahkan pegawai menghafalkan dan memahaminya, dilakukan pengucapan Core Values ASN BERAKHLAK pada setiap Apel di hari senin.	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Pegawai senantiasa mengingat dan mengimplementasikan Core Values ASN BERAKHLAK	-	https://www.instagram.com/p/ClyLLqYv4oD/
14	DISPOR (Disposisi dan Pelaporan online)	V	X	Pelaksanaan disposisi surat dan pelaporan hasil disposisi secara online melalui Grup Whats APP khusus surat masuk	Disposisi surat agar lebih cepat mendapatkan respon bawahan, dikarenakan aplikasi Whats App lebih sering dipergunakan sehari-hari	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Disposisi surat dan pelaporan hasil disposisi atasan secara cepat dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti	-	
15	BALKON (Buku Administrasi Layanan Kantor Online)	V	X	Pencatatan nomor surat keluar secara online	Pada saat hari libur, kerap kali terdapat surat yang harus segera dikirimkan melalui eoffice, dan pegawai kesulitan untuk memperoleh nomor surat karena Buku pencatatan berada di kantor	2023	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Kasubbag umum dan pegawai mudah mendapatkan nomor surat dan tidak akan ada penomoran yang ganda	-	-

BAB VI

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Utara. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal.

b. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (contoh tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Seksi, Subbag, Kelurahan dan seluruh staf Kecamatan Balikpapan Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Kecamatan Balikpapan Selatan serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Balikpapan, Agustus 2023

Camat Balikpapan Selatan

MUHAMMAD HAKIM

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolonganNya maka Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam Renja ini menyajikan keseluruhan rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Balikpapan Timur dan bagaimana mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Diharapkan dengan adanya Renja ini, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Timur dapat mengarah pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur khususnya dan masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Dokumen Renja ini kami ucapkan terima kasih.

Balikpapan, Februari 2023

CAMAT BALIKPAPAN TIMUR
ttd

MUSTAMIN, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 2

1.4 Sistematika Penulisan..... 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Peragkat Daerah..... 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah..... 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 16

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 65

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah..... 66

3.3 Program dan Kegiatan..... 67

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 84

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH..... 85

BAB VI PENUTUP..... 86

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15 ayat 1 bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, bersama ini Kecamatan Balikpapan Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Balikpapan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kerja sesuai tuntutan masyarakat maupun stakeholders lainnya sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk

menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan pererncanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja PD Kecamatan Balikpapan Timur merupakan dokumen perencanaan PD Kecamatan Balikpapan Timur untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Balikpapan.

Dengan adanya Renja diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022 harus mengacu pada kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaannya harus disertai tanggung jawab yang nyata agar berdaya guna

serta tepat sasaran. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan oleh pelaku pembangunan baik di tingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (Kelurahan/Desa), Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi dan Negara disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara Penyusunan Renja OPD Kecamatan harus mengacu pada RKPD Pemerintah Kota, karena RKPD Kota yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Kota. RKPD Provinsi yang ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Provinsi dan rancangan akhir RKPD Kota. RKPD Kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Tahap proses penyusunan APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dari proses penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setelah RPJP Daerah ditetapkan, tugas selanjutnya adalah Pemerintah Daerah menetapkan RPJM Daerah yang memuat uraian dan penjabaran mengenai visi, misidan program kepala daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, program serta kegiatan PD yang dituangkan dalam renstra dengan acuan kerangka pagu indikatif. RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kepala daerah dilantik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (3). Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setiap tahunnya bedasarkaan acuan RPJMD, renstra, renja dan memperhatikan RKP dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar untuk penyusunan APBD. Prosesperencanaan dari RPJP Daerah, RPJM Daerah sampai dengan RKP Daerah sesuai denganUndang-undang Nomor 25 Tahun 2005 berada di Bappeda Litbang.

Proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 dan 35 menyatakan kepala daerah menyusun kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berdasarkan RKPD dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disepakati dalam nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD maka kepala Daerah menyusun surat edaran perihal pedoman penyusunan RKA-PD/PPKD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin olehSekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanadaerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.

Setelah KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) disepakati bersama kepala daerah dan DPRD melalui nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan RKA-PD sebagai acuan/pedoman kepala PD menyusun RKAPD. Pedoman penyusunan RKA-PD dalam bentuk surat edaran yang akanditandatangani oleh kepala daerah disiapkan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).Surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-PD mencakup: (a) prioritaspembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; (b) alokasi plafon anggaransementara untuk setiap program/kegiatan PD; (c) batas waktu penyampaian RKA-PDkepada PPKD; dan (d) dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisisstandar belanja dan standar satuan harga.

Proses selanjutnya adalah PPKD sesuai dengan aturan perundang-undangan menyusun rancangan Peraturan Daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah untuk disampaikan ke DPRD dan selanjutnya dibahas serta disepakati bersama yang dituangkandalam nota kesepakatan antara kepala

daerah dan pimpinan DPRD. Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui proses berikutnya adalah tahapan evaluasi keGubernur untuk mendapat persetujuan, tata cara evaluasi dan lainnya telah diatur dalamperaturan perundang-undangan.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2022 disusun atas dasar:

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

j. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

k. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

m. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;

n. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

o. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);

p. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

q. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021;

r. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan untuk periode 1 (satu) tahun, yakni tahun 2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan 2021-2026 merupakan Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja-PD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.Renja-PD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-PD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-PD ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA.

Proses penyusunan RPJMD harus sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan mengacu pada kaidah penyusunan

dokumen perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu menggunakan 4 pendekatan:

1. Teknokratis adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan logika pikir ilmiah oleh lembaga atau struktur yang secara fungsional bertugas untuk itu berdasarkan data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat dan pegawai profesional.

2. Politisi adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan Kepala Daerah terpilih, pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

3. *Top down* adalah Proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga atau departemen atau daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya.

4. *Bottom up* adalah Proses perencanaan dimulai dari perencanaan hirarki paling bawah baru ke atas yang diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Tahun 2023 adalah penyusunan rancangan teknokratis, kemudian dilanjutkan di Tahun 2024 dengan pendekatan politis (penyesuaian dengan visi misi Kepala Daerah terpilih) serta pendekatan *top down* dan *bottom up* dengan *public* melalui Musrenbang RPJMD.

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur dimaksud untuk menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik, bersih, bertanggung jawab bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Good Governance*) serta berdaya guna dan berhasil guna untuk tujuan keberhasilan pembangunan.

Adapun tujuan dari Renja ini adalah sebagai dokumen perencanaan untuk mengakomodasi semua sasaran yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	12.658.549.600	11.101.672.767	87,70
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.438.891.400	7.201.330.526	85,34
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.438.891.400	7.201.330.526	85,34
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.375.714.200	1.319.572.850	95,92
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.900.000	19.871.500	95,08
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	277.954.000	272.290.400	97,96
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	437.425.200	415.455.050	94,98
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.900.000	54.410.400	89,34

No.	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	93.535.000	73.201.500	78,26
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.500.000	21.844.000	97,08
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462.500.000	462.500.000	100,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah	1.908.294.000	1.700.604.523	89,12
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	458.994.000	289.720.329	63,12
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.449.300.000	1.410.884.194	97,35
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935.650.000	880.164.868	94,07
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	370.550.000	341.593.433	92,19
	Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	16.924.800	56,42
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	89.413.150	99,35
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.100.000	432.233.485	97,11
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	824.896.100	774.227.150	93,86
6	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	693.948.300	648.409.250	93,44
	Sub kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	693.948.300	648.409.250	93,44
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	20.947.800	20.043.300	95,68

No.	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	20.947.800	20.043.300	95,68
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	110.000.000	105.774.600	96,16
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	110.000.000	105.774.600	96,16
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	599.399.700	574.822.040	95,90
9	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	275.400.000	269.750.000	97,95
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	228.000.000	223.600.000	98,07
	Evaluasi Kelurahan	47.400.000	46.150.000	97,36
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	323.999.700	305.072.040	94,16
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	110.000.000	94.097.500	85,54
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	-		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	159.999.700	158.902.340	99,31
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	54.000.000	52.072.200	96,43
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	169.865.300	140.866.500	82,93
11	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	169.865.300	140.866.500	82,93
	Sub kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	169.865.300	140.866.500	82,93
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	568.534.750	530.150.329	93,25
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.599.950	7.890.000	74,43
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	10.599.950	7.890.000	74,43

No.	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
13	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	209.272.550	174.652.085	83,46
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	169.272.550	168.552.085	99,57
	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	40.000.000	6.100.000	15,25
14	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	348.662.250	347.608.244	99,70
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	348.662.250	347.608.244	99,70
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	748.682.200	710.237.928	94,87
15	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.600.000	10.234.600	96,55
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	10.600.000	10.234.600	96,55
16	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	220.200.000	185.686.400	84,33
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	180.200.000	146.706.400	81,41
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40.000.000	38.980.000	97,45
17	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	517.882.200	514.316.928	99,31
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	517.882.200	514.316.928	99,31
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	754.608.400	748.666.301	99,21
18	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.599.400	9.636.400	90,91
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	10.599.400	9.636.400	90,91
19	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	264.736.500	262.550.725	99,17
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	264.736.500	262.550.725	99,17
20	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	479.272.500	476.479.176	99,42
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	479.272.500	476.479.176	99,42
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.212.691.600	1.208.884.567	99,69

No.	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
21	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.199.350	12.962.600	98,21
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	13.199.350	12.962.600	98,21
22	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	231.106.600	230.477.600	99,73
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	216.126.600	215.497.600	99,71
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.980.000	14.980.000	100,00
23	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	968.385.650	965.444.367	99,70
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	968.385.650	965.444.367	99,70
	Jumlah	17.537.227.650	15.789.527.582	90,03

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan dengan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan pada Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebesar Rp. 17.537.227.650,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 15.789.527.582,- (90,03 %) dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.747.700.068,- (9,97%). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi keuangan tahun 2022 lebih tinggi daripada tahun 2021 yang mencapai 83,20%.

Evaluasi pengukuran Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur didasarkan pada Sasaran Strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	lndeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	77,96	81,51	104,55
2	Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	27	27,46	101,70

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2022 dalam mencapai target masih berkinerja

sangat baik karena semua target sasaran strategis melampaui target yang telah ditetapkan. adapun rincian sebagai berikut:

a. Pencapaian Sasaran “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 104,55 % atau predikat “*sangat tinggi*”.
b. Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mencapai 101,70% atau predikat “*sangat tinggi*”.

Evaluasi Realisasi program/kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut:

a. Program yang Memenuhi Target

   Belum ada program yang memenuhi target ditentukan;

b. Program yang Melebihi Target

   Belum ada program yang melebihi target ditentukan;

c. Program yang Tidak Memenuhi Target

   Semua program tidak memenuhi target yang ditentukan.

   Untuk perbaikan kedepan, kepala seksi (kasi) yang menangani program tersebut untuk menyusun rencana kegiatan lebih baik menyesuaikan tingkat kebutuhan dan jumlah personil serta melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah di buat.

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana Tabel T-C.29 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	398	79,32	79,4	79,32	99,90	79,5	238,14	59,83%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	347,75	69,25	69,35	69,06	99,58	69,45	207,76	59,74%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Admnisitrasi Keuangan Perangkat Daerah	398	79,32	79,4	79,32	99,90	79,5	238,14	59,83%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	398	79,32	79,4	79,32	99,90	79,5	238,14	59,83%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398	79,32	79,4	79,32	99,90	79,5	238,14	59,83%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398	79,32	79,4	79,32	99,90	79,5	238,14	59,83%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398	79,32	79,4	79,32	99,90	79,5	238,14	59,83%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398	79,32	79,4	79,32	99,90	79,5	238,14	59,83%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase engaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	500	100	100	87,52	87,52	100	287,52	57,50%
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	500	N/A	100	100	100,00	100	200	40,00%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Persentase penyelenggaraan urusan	500	N/A	100	100	100,00	100	200	40,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan								
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	500	N/A	100	62,57	62,57	100	162,57	32,51%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,75	N/A	16,35	9,43	57,68	16,45	25,88	154,51 %
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200	40,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	500	87,5	60	60	100,00	166,67	314,17	62,83%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	500	96,82	100	99,18	99,18	100,00	296,00	59,20%
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	500	96,82	100	99,18	99,18	100,00	296,00	59,20%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	82,75	N/A	16,35	13,37	81,77	16,45	29,82	36,04%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200,00	40,00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200,00	40,00%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	500	N/A	60	60	100,00	100,00	160,00	32,00%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	82,75	N/A	16,35	12,76	78,04	16,45	29,21	35,30%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200,00	40,00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200,00	40,00%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	500	N/A	60	60	100,00	100,00	160,00	32,00%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	82,75	N/A	16,35	11,25	68,81	16,45	27,7	33,47%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200,00	40,00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200,00	40,00%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	500	N/A	60	60	100,00	100,00	160,00	32,00%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	82,75	N/A	16,35	9,63	58,90	16,45	26,08	31,52%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200,00	40,00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200,00	40,00%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	500	N/A	60	60	100,00	100,00	160,00	32,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur, kinerja pelayanan di Kecamatan Balikpapan Timur dapat dilihat sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

   Kinerja pelayanan publik yang diberikan langsung kepada masyarakat diukur melalui survei kepuasan masyarakat (SKM). Adapun pelayanan publik yang disurvei adalah pelayanan yang diberikan melalui loket pelayanan.

2. Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

   Kinerja Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan mencakup partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan kelurahan seperti kerja bakti, SPGRM, dana kelurahan, keikutsertaan dalam Lembaga masyarakat tingkat kelurahan dan lainnya.

3. Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal

   Kinerja Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan mencakup Razia Yustisi/Penertiban Rumah Kos/PKL/Miras/Bangunan Tidak Ber IMB/Pengajuan Lahan/Razia TPS dan koordinasi trantibum dengan kepolisian, TNI dan instansi vertikal lainnya.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah

   Kinerja Pelayanan IKM Internal dilakukan dengan mengukur pelayanan yang diberikan secretariat kecamatan kepada pegawai internal mencakup pelayanan keuangan, kepegawaian, pemeliharaan dan lainnya.

Tabel T.C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah			79,4	79,5	79,6	79,7	79,32	79,32	79,4	79,5	
2	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	87,52	100	100	100	
3	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan			16,35	16,45	16,55	16,65	11,29	9,43	9,55	9,56	
4	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal			100	100	100	100	99,18	99,18	99,2	99,3	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2022 terhadap indikator utama masih belum baik, dimana semua target belum tercapai.

Adapun permasalahan dan hambatan utama Kecamatan Balikpapan Timur yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik, adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik

a. Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas

b. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik

c. Tuntutan pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh kalangan masyarakat (kesetaraan Gender)

2. Penyelenggaraan Pembangunan

a. Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara

3. Keamanan dan Ketertiban Umum Lingkungan

a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban serta kebersihan lingkungan hidup

4. Pemberdayaan Masyarakat

a. Belum optimalnya pembinaan terkait pemberdayaan masyarakat

b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

c. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

5. Tertib Administrasi Pemerintahan dan Pertanahan

a. Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah yang bermasalah/ tumpang tindih

6. Manajemen Internal

a. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal

b. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kurang memadai

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur, yaitu sebagai berikut:

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan pegawai terkait penggunaan teknologi informasi terkini;
2. Kurangnya pengetahuan SDM pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan rendahnya realiasi kinerja yang berimplikasi pada menurunnya anggaran;
3. Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas;dan
4. Sarana dan Prasarana pelayanan publik yang ada di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur masih perlu peningkatan.

Sedangkan peluang yang bisa menjadi pendorong bagi Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;dan
4. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanan pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD.

Secara umum, hasil *review* terhadap Rancangan Awal RKPD tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan di luar Rancangan Awal Renja Kecamatan Balikpapan Timur. Masih mengacu dengan Dokumen

Renstra Kecamatan Balikpapan 2021-2026, Adapun program prioritas Kecamatan Balikpapan Timur adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Balikpapan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Balikpapan Timur	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	79,6		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Balikpapan Timur	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	79,6		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,55		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,55		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Admnisitrasi Keuangan Perangkat Daerah	79,6		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Admnisitrasi Keuangan Perangkat Daerah	79,6		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	9.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	9.000.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79,6		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79,6		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balikp	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	46.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Kecamatan Balik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	46.200.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		apan Timur				Kelengkapannya	papan Timur				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,6		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	25.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	400.504.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	400.504.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	625.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	625.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	60.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	60.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	90.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	90.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	495.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	495.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,6		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 unit	553.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 unit	553.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,6		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	450.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	450.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.485.022.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.485.022.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kecamatan Balikp	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	79,6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kecamatan Balik	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	79,6		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pemerintahan Daerah	apan Timur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Urusan Pemerintahan Daerah	papan Timur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 unit	400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 unit	400.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	235.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	235.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	105.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	105.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	750.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	750.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	4 laporan	500.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	4 laporan	500.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Instansi Vertikal Terkait			Instansi Vertikal Terkait		Instansi Vertikal Terkait			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata	4 dokumen	197.523.900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	197.523.900	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100%		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	45.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	45.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1440 dokumen	152.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1440 dokumen	152.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,65 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,65 %		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	65 lembaga kemasyarakatan	40.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	65 lembaga kemasyarakatan	40.000.000	
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 laporan	100.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 laporan	100.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 lembaga kemasyarakatan	2.700.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 lembaga kemasyarakatan	2.700.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka	2 laporan	250.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	250.000.000	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	50.000.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	50.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Balikp	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di	100%		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Kecamatan Balik	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		apan Timur	Kecamatan yang optimal			KETERTIBAN UMUM	papan Timur	Kecamatan yang optimal			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 laporan	835.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 laporan	835.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN LAMARU	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN LAMARU	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 lembaga kemasyarakatan	25.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 lembaga kemasyarakatan	25.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang Terbangun	4 unit	250.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	250.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakatan	605.456.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakatan	605.456.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN MANGGAR BARU	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN MANGGAR BARU	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54 lembaga kemasyarakatan	25.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54 lembaga kemasyarakatan	25.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	250.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	250.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 pokmas		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 pokmas		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	54 lembaga kemasyarakatan	882.218.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	54 lembaga kemasyarakatan	882.218.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN TERITIP	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN TERITIP	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	50 lembag kemasyarakatan	25.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	50 lembag kemasyarakatan	25.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pembangunan di Kelurahan			n di Kelurahan		Pembangunan di Kelurahan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	250.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	250.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	50 lembag kemasyarakatan	820.682.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	50 lembag kemasyarakatan	820.682.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN MANGGAR	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam	16,45 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN MANGGAR	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam	16,45 %		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			membangun kelurahan					membangun kelurahan			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	102 lembaga kemasyarakatan	36.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	102 lembaga kemasyarakatan	36.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 unit	250.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 unit	250.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 pokmas		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 pokmas		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Masyarakat di Kelurahan					Masyarakat di Kelurahan			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	102 lembaga kemasyarakatan	1.620.650.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	102 lembaga kemasyarakatan	1.620.650.000	
	JUMLAH.....				24.679.257.000					24.679.257.000	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota. Selain itu, usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang mana penjaringan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi SIPD-RI. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi berjenjang dari Kelurahan hingga Kecamatan berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan.

Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Balikpapan Timur sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang terverifikasi akan dimasukkan ke dalam RKPD dan Renja Kecamatan. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
I. Sub Kegiatan Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan					
KELURAHAN MANGGAR					
	Pembangunan/perbaikan psyandu	Jl. PJHI Gg Madinah RT. 14	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40M2	Dana Kelurahan
	Pembangunan/perbaikan Drainase Lingkungan	Jl. Mulawarman Gg. Sepakat RT 47	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P= 235m	Dana Kelurahan
	Pembangunan/perbaikan Jalan Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan RT. 16	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P= 90m x L= 2 m	SPGRM
	Pembangunan/perbaikan Drainase Lingkungan	Jl. Mulawarman Gg. Sepakat RT 47	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P= 235m	SPGRM
	Pembangunan/perbaikan Drainase Lingkungan	RT. 15	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P= 300m x L= 40 cm	SPGRM
	Pembangunan/perbaikan Drainase Lingkungan	RT 82	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
KELURAHAN MANGGAR BARU					
	Pengadaan/Pemeliharaan PJU pada jalan pemukiman	JL. Mulawarman gg sidorame RT 38	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lebar jalan < 4 meter (1 paket)	Dana Kelurahan
	Pengadaan/Pemeliharaan PJU pada jalan pemukiman	jl. Perjuangan RT 48	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lebar jalan < 4 meter (6 Tiang lampu)	Dana Kelurahan
	Pengadaan/Pemeliharaan PJU pada jalan pemukiman	Jl. Persatuan RT 31	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lebar jalan < 4 meter	Dana Kelurahan
	Pengadaan Perlengkapan Posyandu dan Posbindu	Jl. Persatuan RT 32	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
	Pengadaan Perlengkapan Posyandu dan Posbindu	Jl. Rekreasi RT 36	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(3,5x3)m	Dana Kelurahan
	Pembangunan/Perbaikan jalan pemukiman	Jl. Persatuan RT 45	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
	Pengadaan Perlengkapan Posyandu dan Posbindu	Jl. Tengiri RT 23	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
	Pengadaan/Pemeliharaan PJU pada jalan pemukiman	Jl. Banjar Gg Kates 4; Gg kates 5 RT 43	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lebar jalan < 4 meter (3 tiang)	Dana Kelurahan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
	Pengadaan/Pemeliharaan PJU pada jalan pemukiman	Jl. Tanjung Kelor RT 20	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lebar jalan < 4 meter (3 tiang)	Dana Kelurahan
	Pengadaan/Pemeliharaan PJU pada jalan pemukiman	JL. Lumba-lumba	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lebar jalan < 4 meter (6 tiang)	Dana Kelurahan
	Pembangunan Perbaikan Jalan Pemukiman	Jln Mulawarman Gg Bakula RT 05	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(150x1,5)m	SPGRM
	Pembangunan Perbaikan Jalan Pemukiman	Jl. Persatuan RT 01	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(50x1,5)m	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan drainase dan selokan pemukiman	Jl. Rekreaksi Gg Bersama I RT.37	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P 100 m	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan Posyandu dan Posbindu	Jl. Tanjung Kelor RT10	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4x4 m	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan jalan pemukiman	Jl. Tanjung, Gapura Masuk RT 29	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan Posyandu dan Posbindu	Jl. Rekreasi RT 46	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan jalan pemukiman	GG. Marhadi RT 30	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
	Pembangunan/Perbaikan jalan pemukiman	Jl. Mulawarman Gg Tukang RT 17	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	160 M	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan jalan pemukiman	Jl. Rekreasi RT 14	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(23 X l 2)M	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan jalan pemukiman	Jl. Lumba-lumba RT 08	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70 M	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan Posyandu dan Posbindu	Jl. persatuan(depan mushola Assalam RT 50	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(4X3)M	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan Posyandu dan Posbindu	Jl. Persatuan RT 03	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
KELURAHAN LAMARU					
	Peingkatan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 10 gang Barokah 4 dan gang Barokah 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
	Peingkatan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 14 gang Mentari dan gang Barokah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
	Peingkatan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 18 gang Setya 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
	Peingkatan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 20 gang Menteng,gang Bersama,gg Utomo,gg Prancis 1, gg Prancis 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
	Peingkatan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 32 Petinggi Husaini 1 dan gg Petinggi Husaini 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
	Semenisasi jalan lingkungan	Gg Saka RT 21	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(P:180m, L: 3m)	SPGRM
	Semenisasi jalan lingkungan	Gg Prancis 1 RT 30	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(P:180m, L: 3m)	SPGRM
	Semenisasi jalan lingkungan	Gg belakang Posyandu RT 12	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(P:75 m, L: 1,5m	SPGRM
KELURAHAN TERITIP					
	Semenisasi Jalan Lingkungan	Gg. Keluarga RT.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=50m x L=2m	Dana Kelurahan
	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT.04	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=70m x L=2m	Dana Kelurahan
	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jl. MI RT.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=100m xL=2m	Dana Kelurahan
	Semenisasi Jalan Lingkungan	Gg. Melati RT.02	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=100m xL=2m	Dana Kelurahan
	Pembangunan/Perbaikan Drainase Lingkungan	Gg.Keluarga RT.07	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=100m xL=0,5m	Dana Kelurahan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
	Semenisasi Jalan Lingkungan	Gg. Warga RT 20	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=75m x L=2,5m	Dana Kelurahan
	Semenisasi Jalan Lingkungan	Gg. Keluarga RT.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=50m x L=2m	Dana Kelurahan
	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT.04	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=70m x L=2m	Dana Kelurahan
	Pembangunan/Perbaikan Drainase Lingkungan	RT.19	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=100m xL=0,5m	Dana Kelurahan
	Semenisasi Jalan Lingkungan	Gg. Swarga RT 29	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=200m x L=3m	Dana Kelurahan
	Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan	RT.03	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=50mx L=3m	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan	RT.14	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=150m x L=3m	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan	Gg.Belukus RT.47	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=200m x L=2,5m	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan	RT.39	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=80mx L=2m	SPGRM
I. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
KELURAHAN MANGGAR					

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
	Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan	RT.21; RT.24	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	260 Orang	SPGRM

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraantugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai alur diagram sebagai berikut :

Gambar 3.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk merumuskan prioritaspelaksanaan tugas dan perencanaan program/kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga Visi dan Misi Perangkat Daerah dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan Akuntabilitas Publik. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Balikpapan Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
3. Pengembangan data base Kecamatan;
4. Pembentukan tim / satgas layanan pengaduan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan; serta
6. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi-Misi Wali Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu : "Terwujudnya Balikpapan sebagia Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman" serta dengan memperhatikan salah satu Misi ke-1 yaitu "Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik". Maka rumusan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Balikpapan Timur adalah "*Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan*".

Selain itu, Kecamatan Balikpapan Timur juga menentukan sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah.

Selanjutnya, tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 dapat dilihat seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
) (1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	78,10

		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27,20

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1) Mempedomani RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2021-2026;
2) Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
3) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Balikpapan Timur;
5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan di sempurnakan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    1. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
    1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
    2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    2. Evaluasi Kelurahan
    3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manggar
    4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manggar Baru
    5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamaru
    6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Teritip
    9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar
    10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar Baru
    11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lamaru
    12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teritip
    15. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggar
    16. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggar Baru
    17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lamaru
    18. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teritip
12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
    2. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggar
    3. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggar Baru
    4. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lamaru

5. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Teritip
6. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
7. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) program yang terdiri dari 1 program penunjang dan 3 program pelaksanaan pembangunan (prioritas);

2) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2024 adalah sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan terdiri dari 7 kegiatan program penunjang dan 6 kegiatan kegiatan program pelaksanaan pembangunan (prioritas);

3) Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2024 adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) sub kegiatan;

4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 24.679.257.000,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana sebesar Rp 14.769.727.100,- untuk program dan kegiatan penunjang;

b) Dana sebesar Rp 9.909.529.900,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan (prioritas);

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 Kecamatan Balikpapan Timur untuk sumber dana APBD Kota Balikpapan secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel T.C-33 berikut ini.

Tabel T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79,6		APBD		79,7	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	69,55				69,65	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	4 dokumen	50.000.000,00	APBD		4 dokumen	55.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Admnisitrasi	Kecamatan Balikpa	79,6				79,7	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Keuangan Perangkat Daerah	pan Timur						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Timur	60	8.877.919.999,00	APBD		60	9.900.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79,6				79,7	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79,6	1.612.956.600,00	APBD		79,7	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	8 paket	25.000.000,00	APBD		8 paket	27.500.000,00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	10 paket	400.152.700,00	APBD		10 paket	440.554.950,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	2 paket	552.803.900,00	APBD		2 paket	687.500.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	10 paket	60.000.000,00	APBD		10 paket	66.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	12 dokumen	80.000.000,00			12 dokumen	99.000.000,00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Timur	12 laporan	495.000.000,00	APBD		12 laporan	544.500.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79,6	552.706.000,00			79,7	-
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	13 unit	552.706.000,00	APBD		13 unit	608.300.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kecamatan Balikpapan Timur	79,6	1.885.021.800,00	APBD		79,7	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	12 laporan	400.000.000,00			12 laporan	495.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	12 laporan	1.485.021.800,00	APBD		12 laporan	1.633.524.860,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kecamatan Balikpapan Timur	79,6	1.639.984.200,00	APBD		79,7	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Balikpapan Timur	34 unit	399.990.500,00	APBD		34 unit	440.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Balikpapan Timur	2 unit	234.994.200,00	APBD		2 unit	258.500.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Balikpa	15 unit	104.999.500,00			15 unit	115.500.000,00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			pan Timur						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Balikpapan Timur	12 unit	900.000.000,00			12 unit	825.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	845.000.000,00	APBD		100%	-
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	650.000.000,00	APBD		100%	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Timur	4 laporan	500.000.000,00			4 laporan	550.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata	Kecamatan Balikpapan Timur	4 dokumen	150.000.000	APBD		4 dokumen	217.276.290,00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	45.000.000,00			100%	-
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	3 Dokumen	45.000.000,00			3 Dokumen	49.500.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	3 laporan		APBD		3 laporan	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	150.000.000			100%	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Balikpapan Timur	1440 dokumen	150.000.000,00			1440 dokumen	167.200.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	16,65%	3.140.000.000,00	APBD		16,65%	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	140.000.000,00	APBD		100%	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	65 lembaga kemasyarakatan	40.000.000,00			65 lembaga kemasyarakatan	44.000.000,00
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	3 laporan	100.000.000,00	APBD		3 laporan	110.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	140.000.000,00	APBD		100%	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Balikpapan Timur	5 lembaga kemasyarakatan	2.700.000.000,00	APBD		5 lembaga kemasyarakatan	2.970.000.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka	Kecamatan Balikpapan Timur	2 laporan	250.000.000,00			2 laporan	275.000.000,00
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Timur	2 laporan	50.000.000,00			2 laporan	55.000.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Kecamatan Balikpapan Timur	100%		APBD		100%	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Kecamatan Balikpapan Timur	100%				100%	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	8 laporan	835.017.800,00			8 laporan	918.500.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam	Kelurahan Lamaru	16,45%		APBD		16,45%	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		membangun kelurahan							
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kelurahan Lamaru	100%		APBD		100%	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Lamaru	36 lembaga kemasyarakatan	25.000.000,00			36 lembaga kemasyarakatan	27.500.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Lamaru	4 unit	300.000.000,00	APBD		4 unit	275.000.000,00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kelurahan Lamaru	100%				100%	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Lamaru	36 lembaga kemasyarakatan	708.232.800,00			36 lembaga kemasyarakatan	666.001.600,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kelurahan Manggar Baru	16,45%		APBD		16,45%	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kelurahan Manggar Baru	100%		APBD		100%	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	Kelurahan Manggar Baru	54 lembaga kemasyarakatan	25.000.000,00			54 lembaga kemasyarakatan	27.500.000,00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Manggar Baru	9 unit	299.982.100,00			9 unit	275.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manggar Baru	2 pokmas		APBD		2 pokmas	-
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kelurahan Manggar Baru	100%				100%	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Manggar Baru	54 lembaga kemasyarakatan	1.007.240.100,00			54 lembaga kemasyarakatan	970.439.800,00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kelurahan Teritip	16,45%		APBD		16,45%	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kelurahan Teritip	100%		APBD		100%	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Teritip	50 lembag kemasyarakatan	25.999.600,00			50 lembag kemasyarakatan	27.500.000,00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Teritip	6 unit	750.000.000,00	APBD		6 unit	275.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kelurahan Teritip	100%				100%	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Teritip	50 lembag kemasyarakatan	939.730.300,00			50 lembag kemasyarakatan	902.750.200,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kelurahan Manggar	16,45%		APBD		16,45%	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan Manggar	100%		APBD		100%	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Kelurahan yang terlaksana							
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Manggar	102 lembaga kemasyarakatan	36.000.000,00			102 lembaga kemasyarakatan	39.600.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Manggar	15 unit	350.000.000,00			15 unit	275.000.000,00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manggar	2 pokmas		APBD		2 pokmas	-
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kelurahan Manggar	100%				100%	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Manggar	102 lembaga kemasyarakatan	1.932.321.900,00			102 lembaga kemasyarakatan	1.782.715.000,00
	JUMLAH..... ..				**25.837.113.199,00**				27.147.182.700,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Timur untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III dalam Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Balikpapan.

3.5 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Timur yaitu menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai OPD yang bersinggugan/berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Balikpapan Timur berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan public guna memperoleh kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Disamping hal tersebut, Kecamatan Balikpapan Timur terus berupaya untuk melaksanaan

pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Oleh karena itu, secara tidak langsung Kecamatan Balikpapan Timur mendukung priorotas Pemerintah Kota dalam mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat Kota.

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Adapun Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Balikpapan Timur sebanyak 2 (dua) inovasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1.	Nama Inovasi	:	TIPS TERITIP (Transparansi Informasi Pembangunan Sapras Kelurahan Teritip)
	Inisiasi Inovasi	:	Inisiasi Mandiri
	Penjelasan Singkat Inovasi	:	TIPS TERITIP merupakan transparansi informasi publik terkait pembangunan sarana dan prasarana di Wilayah Kelurahan Teritip.
	Latar Belakang/ Alasan	:	Masih kurangnya transparani pada tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kelurahan Teritip.
	Waktu Pelaksanaan Inovasi		

Tanggal Pembuatan	:	Agustus 2021
Tanggal Pelaksanaan	:	Septembet 2021
Penerima Manfaat Inovasi	:	20 Ketua RT Kelurahan Teritip
Dampak	:	Terciptanya transparansi informasi pembangunan Sapras di Kelurahan Teritip
Apresiasi atau Penghargaan	:	-
Tautan Pelaksanaan Inovasi	:	Qr Code dan link https://bit.ly/tips_teritip

2. Nama Inovasi : Sistem Informasi Balikpapan Timur (SIBALTIM)

Inisiasi Inovasi	:	Inisiasi Mandiri
Penjelasan Singkat Inovasi	:	Kebutuhan mandiri dari perangkat gawai di masing-masing Pegawai
Latar Belakang/ Alasan	:	- Perkembangan yang sangat pesat akan informasi teknologi digunakan pada masing-masing pegawai
Waktu Pelaksanaan Inovasi		
Tanggal Pembuatan	:	11 Oktober 2021
Tanggal Pelaksanaan	:	22 Oktober 2021
Penerima Manfaat Inovasi	:	Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Balikpapan Timur
Dampak	:	Memberi Kemudahan dari pegawai dalam mengkases Informasi Kepegawaian
Apresiasi atau Penghargaan	:	-
Tautan Pelaksanaan Inovasi	:	https://youtu.be/Nu7r5Og8TjU

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan Rencana Pambangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun ke depan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Balikpapan Timur untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja PD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra Perangkat Daerah (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerjasecara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan programdan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian dan pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yangtelah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2024 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 merupakan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Balikpapan Timur pada periode Tahun 2024. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Balikpapan Timur yang

pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Kecamatan Balikpapan Timur serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Balikpapan, 10 Agustus 2023

CAMAT BALIKPAPAN

ttd

MUSTAMIN, SE

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena telah dilimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2024 telah dapat disusun dengan baik. Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini tidaklah lepas dari Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Wali Kota Balikpapan yang terpilih Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan.

Berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas agar lebih terarah pada tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Sehingga dapat meningkatkan kualitas Kinerja Aparatur dalam Pelayanan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.

Akhir kata kepada berbagai pihak dan staf yang telah kerjasama dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2024 ini, kami ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai dan membimbing dalam menjalankan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan dan direncanakan, sekian dan terimakasih.

Balikpapan, 10 Maret 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....1

DAFTAR ISI..... 2

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 LATAR BELAKANG..... 3

1.2 LANDASAN HUKUM..... 4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KERJA TAHUN 2022..... 8

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 8

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 34

2.3 ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ... 37

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD..... 45

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 48

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... 48

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH..... 49

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN..... 51

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 56

BAB V PENUTUP..... 69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan merupakan dokumen Perencanaan Kerja Periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan serta penggunaan Anggaran Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Dalam Periode Tahun Anggaran 2024, juga sebagai implementasi dan penjabaran dari perencanaan strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun .

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode 1 tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dimana program dan kegiatan dalam RENJA perangkat daerah akan diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
2. RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
3. RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2024 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026
3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari dan menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Sistem Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Daerah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tah
7. un 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasfisikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Darerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 ;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan sinegritas antara Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah, serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2022. Penyelengaraan pemerintah di bidangpolitik dan wawasan kebangsaan yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2024 ini adalah untuk menjadi acuan dlam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permandagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah , maka Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

I.1 Latar Belakang :

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3.Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4.Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, sertasusunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33,

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

Pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;

c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN KERJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

Walikota Balikpapan terpilih periode 2021-2024 telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi RPJMD Kota Balikpapan periode 2021-2026, yaitu dengan VISI "**TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL** " dan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi
Misi 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai
Misi 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan
Misi 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan pada tahun 2022 maka melaksanakan 2 (dua) urusan, 6 (Enam) program dan 11 (Sebelas) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan total pagu perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 12.732.583.732,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RKPD

1. Persentase Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi
2. Persentase partisipasi lembaga politik dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat
3. Persentase Konflik Sosial yang tertangani

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab
							I		II		III		IV											
1	2	3	4		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	80,00	3.380.002.040		864.360.485		1.414.429.418		1.234.824.103	80,02	1.586.694.062	80,02	5.100.308.068	100,03%	150,90%	80,02	4.273.433.175	0,00%	21,31%	Bada Kesb ngpo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,00	-	-	-	-	-	50,11	-			50,11	-	83,52%	0,00%	50,11	-	64,24%	0,00%	

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun	Dokumen	1,00		1,00	-	-	-	-	-		-	1,00	-	100,00%	0,00%	1			
			Jumlah dokumen perencanaan tahunan	Dokumen	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-		-	1,00	-	100,00%	0,00%	1	-	0	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan	Dokumen	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1,00	-	100,00%	0,00%		-		
			Jumlah laporan hasil pelaksanaan RENSTRA OPD	Dokumen	1,00	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	80,00	3.643.942.598	-	710.276.125	-	956.967.329	-	958.051.025	80,08	759.819.169	80,08	3.385.113.648	100,10%	92,90%	80,08	3.385.113.648	0,00%	29,69%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan	14,00	3.643.942.598	3,00	710.276.125	4,00	956.967.329	4,00	958.051.025	3	759.819.169	14,00	3.385.113.648	100,00%	92,90%	14	3.385.113.648	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	80,00	63.600.000	-	-	-	-	-	13.320.000	80,45	-	80,45	13.320.000	100,57%	0,00%	80,45	13.320.000	0,00%	3,58%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Orang	25,00	13.600.000	-	-	-	-	25,00	13.320.000	0,00	-	25,00	13.320.000	100,00%	97,94%	25	13.320.000	0,00%	0,00%	

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	78,00	641.725.602	-	107.607.795	-	265.368.159	-	119.947.348	78,47	416.902.560	78,47	492.923.302	100,60%	76,81%	78,47	492.923.302	0,00%	13,55%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jenis	8,00	24.989.000	4,00	10.461.000	4,00	12.154.500	-	-	0	-	8,00	22.615.500	100,00%	90,50%	8	22.615.500	0,00%	0,00%

			Bangunan Kantor																		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis	16,00	127.000.000	-	-	9,00	90.780.000	-	-	7	202.224.240	16,00	293.004.240	100,00%	230,71%	16	293.004.240	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Jenis	7,00	199.731.100	4,00	65.530.000	3,00	29.206.750	-	44.015.250	0	43.124.550	7,00	181.876.550	100,00%	91,06%	7	181.876.550	0,00%	0,00%

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis	7,00	76.724.900	-	-	6,00	32.040.150	-	22.216.650	1	14.567.640	7,00	68.824.440	100,00%	89,70%	7	68.824.440	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	3,00	19.993.440	3,00	2.832.000	-	4.416.000	-	4.416.000	0	5.856.000	3,00	17.520.000	100,00%	87,63%	3	17.520.000	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Kali	50,00	326.000.000	8,00	28.784.795	14,00	96.770.759	3,00	49.299.448	20,00	151.130.130	45,00	325.985.132	90,00%	100,00%	45	325.985.132	0,00%	0,00%

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	80,00	271.639.438	-	34.800.108	-	56.187.015	-	90.288.213	80,74	63.852.351	80,74	181.275.336	100,93%	66,73%	80,74	181.275.336	0,00%	11,08%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	60,00	59.998.000	12,00	12.516.206	12,00	12.468.662	9,00	14.155.110	9	17.240.282	42,00	56.380.260	70,00%	93,97%	42	56.380.260	0,00%	0,00%	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS	Orang	6,00	191.637.000	6,00	22.283.902	-	43.718.353	-	76.133.103	0	46.612.069	6,00	188.747.427	100,00%	98,49%	6	188.747.427	0,00%	0,00%
			Luasan Gedung Kantor yang dilayani	m^2	874,00		874,00		-		-				874,00		100,00%		874		0,00%	0,00%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	80,00	274.000.000	-	11.676.457	-	135.906.915	-	53.217.517	80,36	346.119.982	80,36	200.800.889	100,45%	73,28%	80,36	200.800.889	0,00%	9,01%

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit	12,00	222.000.000	8,00	11.676.457	-	16.648.527	4,00	49.193.767	0	103.944.795	12,00	181.463.546	100,00%	81,74%	12	181.463.546	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jenis	6,00	74.950.000	-	-	5,00	20.258.388	1,00	4.023.750	0	43.325.187	6,00	67.607.325	100,00%	90,20%	6	67.607.325	0,00%	0,00%	

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	10,00	100.000.000	-	-	6,00	99.000.000	-	-	4	198.850.000	10,00	297.850.000	100,00%	297,85%	10	297.850.000	0,00%	0,00%	
2	Meningkatnya pembangunan demokrasi dan politik di daerah	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat terhadap 4 Konsensus Nasional	%	60,00	395.000.000	-	45.779.540	100,00	232.422.728	-	114.592.812	0,00	334.699.930	100,00	727.495.010	166,67%	184,18%	100,00	727.495.010	0,00%	17,13%	Bada Kesb ngpo

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	%	100,00	395.000.000	-	45.779.540	121,00	232.422.728	-	114.592.812	0%	334.699.930	121,00	727.495.010	121,00%	184,18%	100%	727.495.010	0,00%	17,13%	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	5,00	9.999.650	-	2.418.130	2,00	2.500.000	1,00	2.500.000	0	2.500.000	3,00	9.918.130	60,00%	99,18%	3	9.918.130	0,00%	0,00%	

		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan	5,00	19.999.300	-	10.536.410	3,00	1.817.000	-	2.500.000	1	4.409.000	4,00	19.262.410	80,00%	96,32%	4	19.262.410	0,000%	0,00%
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsa	Kegiatan	5,00	350.000.000	-	32.825.000	5,00	122.581.168	-	29.878.560		159.188.100	5,00	344.472.828	100,00%	98,42%	5	344.472.828	0,000%	0,00%

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan	8,00	349.999.500	-		5,00	105.524.560	-	46.675.992	3	152.478.499	8,00	304.679.051	100,00%	0,87	8	304.679.051	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	12,00	64.997.750	1,00	-	3,00	-	-	33.038.260		16.124.331	4,00	49.162.591	33,33%	75,64%	4	49.162.591	#DIV/0!	#DIV/0!

3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN SERTA ETIKA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	%	66,67	1.554.997.960	-	10.210.101	-	41.515.681	66,67	63.731.646	0,00	1.457.351.186	66,67	1.572.808.614	100,00 %	101,15 %	66,67	1.572.808.614	0,00 %	16,73 %	Bada Kesb ngpo
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	%	100,00	1.554.997.960	-	10.210.101	-	41.515.681	50,00	63.731.646	50,00	1.457.351.186	100,00	1.572.808.614	100,00 %	101,15 %	20 %	1.572.808.614	20,00 %	16,73 %	

		Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																				
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	%	100,00	1.608.215.142	-	10.210.101	-	36.663.931	75,00	28.891.646	25	1.431.191.186	100,00	1.506.956.864	100,00%	93,70%	100	1.506.956.864	0,00%	0,00%	

			serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan realisasi Bantuan keuangan Partai politik																			
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Jumlah Laporan TP3D dan realisasi Bankeu Parpol	Dokumen	2,00	99.995.000	-	-	-	4.851.750	-	34.840.000	2	26.160.000	2,00	65.851.750	100,00%	65,86%	2	65.851.750	0,000%	0,00%	
			Jumlah Monitoring Perkembangan Politik dan situasi lainnya	Kegiatan	12,00		3,00		3,00		3,00		3		12,00		100,00%		12		0,000%	0,00%	

		Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																				
4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan yang Telah Melaporan pada Pemerintah Kota Balikpapan	%	83,00	970.000.000	19,00	9.922.000	36,00	96.813.750	-	115.989.914		1.247.872.049	55,00	222.725.664	66,27 %	22,96 %	55,00	222.725.664	0,00 %	3,80%	Bada Kesb ngpc
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan Ormas	%	100,00	970.000.000	-	9.922.000	50,00	96.813.750	6,00	115.989.914		1.247.872.049	56,00	222.725.664	56,00 %	22,96 %	5600%	222.725.664	0,00 %	3,80%	
		Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	Jumlah dokumen hibah dan bansos yang diverifikasi	Dokumen	4,00	119.999.800	-	900.000	-	51.125.100	2,00	36.804.914	2	16.186.200	4,00	105.016.214	100,00 %	87,51 %	4	105.016.214	0,00 %	0,00%	

		Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen	2,00	150.000.000	-	-	-	39.097.650	1,00	55.403.300	1	41.430.920	1,00	135.931.870	50,00 %	90,62 %	1	135.931.870	0,00 %	0,00%
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa	Kegiatan	10,00	236.025.000	-	9.022.000	6,00	4.551.000	2,00	22.219.200	2	106.131.789	10,00	141.923.989	100,00 %	%	10	141.923.989	0,00 %	0,00%

		dan Ormas Asing di Daerah	ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah																		
		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Penyaluran Hibah dan Bansos bidang Kesatuan Bangsa dan Ormas	Berkas	4,00	500.000.000	-	-	-	-	-	-	4	1.000.000.000	4,00	1.000.000.000	100,00%	200,00%	4	1.000.000.000	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Pengawasan dan Mediasi sengketa ormas	Kegiatan	12,00	100.000.000	3,00	-	3,00	2.040.000	3,00	1.562.500	3,00	84.123.140	12,00	87.725.640	100,00%	87,73%	12	87.725.640	0,00%	0,00%

		Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pendataan kelembagaan Ormas secara digital	Kegiatan	1,00		-		-		-		1		1,00		100,00%		1	-	0,00%	0,00%	
5	Meningkatkannya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GN	%	80,00	600.000.000	25,00	13.791.200	25,00	274.190.786	15,00	170.785.149	15,00	525.034.158	80,00	458.767.135	100,00%	76,46%	8000%	458.767.135	0,00%	12,64%	Bada Kesb ngpo
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	%	100,00	600.000.000	25,00	13.791.200	25,00	274.190.786	25,00	170.785.149	25,00	525.034.158	100,00	458.767.135	100,00%	76,46%	10000%	458.767.135	0,00%	12,64%	

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Presentase Pelaksanaan Koordinasi Tim P4GN dan PN dan Fasilitasi Pencegahan Penggunaan Narkoba	%	100,00	517.000.000	15,00	8.150.000	35,00	165.759.500	25,00	149.075.465	25	464.123.270	100,00	787.108.235	100,00%	152,25%	100	787.108.235	0,000%	0,00%
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	Laporan	24,00	200.000.000	6,00	5.641.200	6,00	108.431.286	6,00	21.709.684	6	60.910.888	24,00	196.693.058	100,00%	98,35%	24	196.693.058	0,000%	0,00%

		Penghayatan Kepercayaan di Daerah																			
6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Monitoring Potensi Konflik	%	80,00	1.200.000.000	15,00	218.000.000	30,00	237.811.800	20,00	494.657.344		933.017.719	65,00	1.883.486.863	81,25 %	156,96 %	6500%	1.883.486.863	0,00 %	25,08 %	Bada Kesb ngpo
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	%	100,00	1.200.000.000	20,00	218.000.000	20,00	237.811.800	30,00	494.657.344		933.017.719	70,00	1.883.486.863	70,00 %	156,96 %	70,00	1.883.486.863	0,00 %	25,08 %	

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kegiatan	42,00	199.986.100	9,00	-	9,00	47.011.800	18,00	61.261.594	6	88.353.894	42,00	196.627.288	100,00%	98,32%	42	196.627.288	0,00%	0,00%	

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daera	Kegiatan	42,00	130.000.000	9,00	-	9,00	15.000.000	18,00	84.708.000	14	30.000.000	50,00	129.708.000	119,05%	99,78%	50	129.708.000	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pertemuan Forkopimda	Kegiatan	24,00	1.104.000.000	7,00	218.000.000	5,00	175.800.000	8,00	348.687.750	14	814.663.825	34,00	1.557.151.575	141,67%	141,05%	34	1.557.151.575	0,00%	0,00%

| | | |

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	102,37 %	115,43 %			0,00%	16,12 %		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja	1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Balikpapan
Faktor Penghambat pencapaian kinerja	1. Pemberlakuan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 menjadi hambatan dalam melakukan penyesuaian indikator kinerja karena berubahnya nomenklatur program dan kegiatan serta adanya sub kegiatan sesuai peraturan tersebut. Sedangkan dalam dokumen Renstra periode tahun 2016-2021 tahun 2021 merupakan periode akhir Renstra Perangkat Daerah;
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	1. Perlu dilakukan percepatan khususnya dalam serapan realisasi anggaran mengingat rata-rata capaian realisasi anggaran pada akhir triwulan I yang masih berada dibawah 20%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat melakukan analis kinerja pelayanan perangkat daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan maka perlu disajikan dalam bentuk format sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi capaian Tahun Ke-					Catatan Analis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		27	28	28	29	30	33,33					
2.	Presentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat		67%	80%	100%	67%	67%	67%					
3.	Presetase Konflik Sosial Yang Tertangani		80%	83%	88%	88%	89%	80%					

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Berdasarkan Perwali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki fungsi dan tugas yaitu

Bagian Kesatu Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan - 4 - budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dal am negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;

Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

a. penyusunan program;

b. pengelolaan urusan keuangan;

c. kepegawaian;

d. rumah tangga kantor;

e. perlengkapan;

f. protokol;

g. hubungan masyarakat;

h. layanan informasi dan pengaduan;

i. pembinaan pelayanan publik;

j. kearsipan;

k. surat menyurat;

dan l. evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;

b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;

c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;

d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;

g. pengelolaan anggaran Dinas;

h. pelaksanaan administrasi keuangan;

i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;

k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;

l. pengelolaan pengaduan masyarakat;

m. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu;

n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi; melaksanaan tugas lainnyayang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (tugas merumuskan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan sebagian tugas Badan di bidang: a. ideologi; b. wawasan kebangsaan; c. bela negara; d. karakter bangsa; e. pembauran kebangsaan; f. bhineka tunggal ika; g. sejarah kebangsaan; h. ketahanan ekonomi; i. sosial; j. budaya; k. fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika; l. fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini; m. fasilitasi kerjasama intelijen; n. fasilitasi pemantauan orang asing; o. fasilitasi tenaga keija asing dan Lembaga asing; p. fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah; q. fasilitasi kewaspadaan perbatasan antar negara; dan r. fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,

kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang:

a. pendidikan politik; b. etika budaya politik; c. peningkatan demokrasi; d. fasilitasi kelembagaan pemerintahan; e. fasilitasi perwakilan dan partai politik; f. fasilitasi pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah; g. fasilitasi pemantauan situasi politik; h. pendaftaran organisasi kemasyarakatan; i. pemberdayaan organisasi kemasyarakatan; j. evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan; dan k. pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :
Pada dasarnya pelayanan program perangkat daerah diharapkan berhasil mewujudkan kondisi ideal yang telah ditetapkan dalam target tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan tugas dan fungsi. Namun demikian pada pelaksanaannya untuk mencapai kondisi tersebut menghadapi kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam melaksanakan pelayanan untuk setiap bidang urusan antara lain sebagai berikut :
Bidang Non Urusan (sekretariat) :
1) Keterbatasan SDM secara kualitas maupun kuantitas
2) Kurangnya pengawasan intern organisasi
3) Budaya kerja pegawai belum optimal

Bidang Politik Dalam Negeri dan organisasi Masyarakat :
1) Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam melaporkan Oragnisasi Masyarakat (ORMAS) serta tidak melaporkan ORMAS tersebut yang sudah tidak aktif pada Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan
2) Belum optimalnya pelaporan LPJ yang telah diberikan ke masing - masing Politik dan Organisasi Masyarakat yang telah diberikan bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan sehingga banyaknya Laporan LPJ yang terlambat.

c. Faktor yang menghambat pencapaian pelayanan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung program nasional adalah :
1. Masih belum ada data yang actual tentang para pekerja asing dan ormas asing dikarenakan masih di bawah naungan Dirjend Imigran dan Kejaksaan sehingga Keterbatasan data – data actual mengenai informasi tersebut di Kota Balikpapan
2. Masih belum di oktimalkan peran FPK dan FKDM yang kegiatannya belum sampai ke kelurahan sehingga perlu sinergisitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Balikpapan sebagai fasilitasi.

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD1946, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) dilingkungan Masyarakat luas.

Tagging Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Pagu Ranwal	Tagging					
				Satuan	Tahun 2024	Tahun 2024	SDGs	Kemiskinan	Penganggaran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
						83.187.882.000						
						83.187.882.000						
8.01.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**		**Poin**	**80**	**9.255.257.100**	√					
8.01.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**Poin**	**65**	-	√					
8.01.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	-	√					
8.01.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	-	√					
8.01.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	-	√					

8.01.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	-	√					
8.01.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	-	√					
8.01.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**80,5**		√					
8.01.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/Bulan	25	5.500.000.000	√					
8.01.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**81**		√					
8.01.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Orang	25	50.000.000	√					
8.01.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	20	350.000.000	√					
8.01.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**80**		√					
8.01.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Paket	Paket	8	30.000.000	√					

		gan Bangunan Kantor yang Disediakan										
8.01.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket		145.000.000	√ √					
8.01.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	4	550.000.000	√					
8.01.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	7	58.850.000	√					
8.01.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	80	200.000.000	√					
8.01.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	20	100.000.000	√					
8.01.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	30	300.000.000	√					
8.01.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**80**		√					

8.01.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit	1	156.000.000	√					
8.01.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	2	80.000.000	√					
8.01.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Paket	1	50.000.000	√					
8.01.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Poin**	**82**		√					
8.01.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	36	75.000.000	√					
8.01.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	5	700.407.100	√					
8.01.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Poin**	**80**		√					

8.01.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	450.000.000	√					
8.01.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	9	100.000.000	√					
8.01.1.2.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	30.000.000	√					
8.01.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	280.000.000	√					
8.01.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	50.000.000	√					
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase pelaksanaan fasilitasi pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional**		**%**	**64**	**4.973.191.040**				√		
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter**	**Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional**		**%**	**100**	**4.973.191.040**				√		

	Kebangsaan											
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Dokumen	Dokumen	1	25.000.000				√		
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Dokumen	Dokumen	2	500.000.000				√		
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Orang	Orang	43	2.700.000.000				√		

		Sejarah Kebangsaan										
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Orang	Orang	300	948.191.040				√		
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	Laporan	4	100.000.000				√		

	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	2050	700.000.000				√		
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		Orang	43					√		
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN SERTA ETIKA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik**		**%**	**100**	**62.499.863.160**				√		

8.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan**		%	**100**	**62.499.863.160**				√		
8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	10.050.000				√		

8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	Dokumen	Dokumen	2	54.641.763.960				√		
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Orang	100	226.135.600				√		

8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Orang	100	106.700.000				√		
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Laporan	1	7.515.213.600				√		

8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan**		**%**	**85**	**954.570.700**				√		
8.01.04.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas**		%	**100**	**954.570.700**				√		
8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	Dokumen	Dokumen	5	13.400.000				√		
8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	10.050.000				√		

8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Orang	Orang	250	370.910.700				√		
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Orang	100	183.400.000				√		
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Laporan	Laporan	1	376.810.000				√		

8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GN**		**%**	**88**	**1.360.000.000**				√		
8.01.05.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN**		%	**100**	**1.360.000.000**				√		
8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	25.000.000				√		
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang	Dokumen	Dokumen	1	35.000.000				√		

		Disusun										
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	400	350.000.000				√		
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	250	600.000.000				√		

8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Laporan	48	350.000.000				√		
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Monitoring Potensi Konflik**		**%**	**88**	**4.145.000.000**				√		
8.01.06.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana**		%	**100**	**4.145.000.000**				√		

8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	30.000.000				√		
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	500.000.000				√		

8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Orang	30	1.250.000.000				√		
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Orang	30	365.000.000				√		

8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Laporan	192	450.000.000				√		
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	48	1.550.000.000				√		
	JUMLAH					**83.187.882.000**						

2.4.Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2024 Badan Kesatuan bangsa dan Kota Balikpapan

Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Balikpapan	Indeks Keouasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	9.231.535.700,00	Kota Balikpapan	80 Poin	10.675.000.000,00	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Balikpapan	Persentase pelaksanaan fasilitasi pemahaman masyarakat terhadap 4 konsensus Nasional	64%	4.973.077.900,00	Kota Balikpapan	66%	7.413.400.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Balikpapan	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	100%	9.818.761.000,00	Kota Balikpapan	100%	840.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Balikpapan	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyrakatan yang telah melapor pada Pemerintah Kota Balikpapan	85%	632.294.600,00	Kota Balikpapan	89%	975.050.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Balikpapan	Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GNFasilitasi	92%	1.359.874.100,00	Kota Balikpapan	98%	1.489.791.040,00	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Balikpapan	Persentase Monitoring potensi konflik	88%	16.144.935.000,00	Kota Balikpapan	88%	4.150.000.000,00	
				42.160.478.300,00			**25.093.341.040,00**	

Tabel T-C.32 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/ Volume/Target Kinerja Program dan Kegiatan	Catatan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Balikpapan	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakat yang Telah Melaporan pada Pemerintahan Kota Balikpapan	84%	Pemberian Dana Hibah Untuk Organisasi Kemasyarakatan : Keluarga Perantau Masyarakat Bone
2.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENGANANAN KONFLIK	Kota Balikpapan	Persentase Monitoring Potensi Konflik	84%	Pemberian Dana Hibah Untuk Organisasi Vertikal

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu **"Indonesia Yang Mandiri, Adil dan Makmur** yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2023 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV (2020-2024) Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkpribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas

dalam pemerintahan kedepan, kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
2. Membuat Pemerintahan selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bansa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Mempertegas kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan lima poin penting untuk bisa mencapai sasaran pembangunan nasional atau rencana kerja pemerintah (RKP) 2024.

1. Sasaran dan prioritas pembangunan RKP 2024 menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan RKA K/L dan RKPD.
2. Pentingnya sinergi perencanaan pembangunan antara Renja K/L serta RKPD dengan RKP 2024
3. Perencanaan dan anggaran yang disusun K/L dan pemerintah daerah harus terukur, imperatif dan sesuai dengan amanat presiden “making delivered”, diperkuat melalui mekanisme Clearing House dengan menerapkan prinsip Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).
4. Memperkuat integrasi dan sinergi sumber pendanaan yang mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas, yaitu pendanaan swasta, KPBU, BUMN, dan APBN sebagai sumber terakhir yang digunakan.
5. K/L dan pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan pelaksanaan Major Project dan didukung sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang andal.

Hal-hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.

Tujuan dan sasaran merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pemerintah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing
3. Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan
4. Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan Berkelanjutan
5. Terciptanya Pembangunan Ekonomi Inklusif

Berdasarkan Visi dan Misi walikota Balikpapan Tahun 2021-2026 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan mengemban Misi ke 4 Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan,yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				(n-2) 2020	(n) 2022	(n+1) 2023	(n+2) 2024	(n+3) 2025	(n+4) 2026	
	Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,56	0,8	0,82	0,85	0,86	0,88	0,88

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27	28	28	29	30	30
		Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	n/a	67%	80%	100%	67%	67%	67%
		Meningkatkannya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Presentase Konflik Sosial yang tertangani	64,50%	80%	83%	88%	88%	89%	89%

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan visi dan misi Walikota Balikpapan dan sesuai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN

- PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
- PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI

Tabel rencana program dan kegiatan Tahun 2023 dan prakiran maju Tahun 2024 digambarkan dengan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							42.160.478.300,00		25.543.341.040,00
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							42.160.478.300,00		25.543.341.040,00
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							42.160.478.300,00		25.543.341.040,00
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							9.231.535.700,00		10.675.000.000,00
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5.500.000.000,00		6.600.000.000,00
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84	25 Orang/bulan	81 Poin	5.500.000.000,00	25 Orang/bulan	6.600.000.000,00
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							248.200.000,00		410.000.000,00
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84	25 Pkt	81 Poin	48.200.000,00	25 Paket	60.000.000,00
8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84	25 Org	81 Poin	200.000.000,00	25 Orang	350.000.000,00
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.518.855.500,00		1.690.000.000,00
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84	1 Pkt	81 Poin	29.999.800,00	1 Paket	35.000.000,00
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84	10 Pkt	81 Poin	292.031.700,00	10 Paket	200.000.000,00
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84	9 Pkt	81 Poin	537.965.900,00	9 Paket	660.000.000,00
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84	2 Paket	81 Poin	58.831.600,00	2 Paket	65.000.000,00
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84	50 Dok	81 Poin	199.876.500,00	50 Dok	250.000.000,00
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat	84	20 Lap	81 Poin	100.150.000,00	20 Lap	120.000.000,00

						Daerah		Daerah						
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84	30 Lap	81 Poin	300.000.000,00	30 Lap	360.000.000,00
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							262.451.800,00		200.000.000,00
8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	84	1 Unit	-	156.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00
8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	84	2 Unit	-	63.124.000,00	2 Unit	0,00
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	84	5 Unit	-	43.327.800,00	5 Unit	0,00
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							777.553.600,00		800.000.000,00
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84	37 Lap	82 Poin	86.432.500,00	37 Lap	80.000.000,00
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84	5 Lap	82 Poin	691.121.100,00	5 Lap	720.000.000,00
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							924.474.800,00		975.000.000,00
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84	18 Unit	81 Poin	449.771.800,00	18 Unit	490.000.000,00
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha	84	78 Unit	81 Poin	105.354.000,00	78 Unit	120.000.000,00

								n Daerah						
8	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84	1 Unit	81 Poin	30.000.000,00	1 Unit	35.000.000,00
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84	1 Unit	81 Poin	283.429.000,00	1 Unit	280.000.000,00
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84	1 Unit	81 Poin	55.920.000,00	1 Unit	50.000.000,00
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							4.973.077.900,00		7.413.400.000,00
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							4.973.077.900,00		7.413.400.000,00
8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	1 Dok	100 %	24.991.000,00	1 Dok	35.000.000,00
8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	2 Dok	100 %	499.950.000,00	2 Dok	500.000.000,00
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	43 Org	100 %	400.000.000,00	43 Orang	2.700.000.000,00

							dan Sejarah Kebangsaan							
8	01	02	2.01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	300 Org	100 %	948.137.000,00	300 Org	828.400.000,00
8	01	02	2.01	005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	4 Lap	100 %	100.000.000,00	4 Lap	100.000.000,00
8	01	02	2.01	006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara									
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	2050 Kel	100 %	699.999.900,00	2050 Kel	750.000.000,00
8	01	02	2.01	008	Pembentukan Paskibraka									
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Paskibraka	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	43 Org	100 %	2.300.000.000,00	43 Org	2.500.000.000,00
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								9.818.761.000,00		840.100.000,00
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								9.818.761.000,00		840.100.000,00
8	01	03	2.01	001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									

						Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	100	1 Dok	100 %	10.050.000,00	1 Dok	10.050.000
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
						Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	100 %	2 Dok	100 %	2.231.067.800,00	2 Dok	10.050.000
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
						Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	100 %	100 Org	100 %	97.646.400,00	100 Org	250.000.000
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
						Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	100 %	100 Org	100 %	106.700.000,00	100 Org	120.000.000

8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
						Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	100 %	1 Lap	100 %	7.373.296.800,00	1 Lap	450.000.000
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							632.294.600,00		975.050.000,00
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							632.294.600,00		975.050.000,00
8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
						Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	85 %	5 Dok	100 %	13.400.000,00	5 Dok	15.000.000,00
8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
						Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	85	1 Dok	100 %	10.050.000,00	1 Dok	10.050.000,00
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
						Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	85 %	250 Org	100 %	189.118.200,00	250 Orang	400.000.000,00
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
						Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	85 %	100 Orang	100 %	183.271.400,00	100 Orang	200.000.000,00

							Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
						Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	85 %	1 Lap	100 %	236.455.000,00	1 Lap	350.000.000,00
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							1.359.874.100,00		1.489.791.040,00
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							1.359.874.100,00		1.489.791.040,00
8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
						Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	92 %	1 Dok	100 %	24.991.000,00	1 Dok	35.000.000,00
8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
						Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	92 %	1 Dok	100 %	34.962.400,00	1 Dok	35.000.000,00
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
						Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	92 %	400 Orang	100 %	349.997.500,00	400 Orang	469.791.040,00
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									

						Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	92 %	250 Orang	100 %	599.956.200,00	250 Orang	600.000.000,00
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
						Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	92 %	48 Lap	100 %	349.967.000,00	48 Laporan	350.000.000,00
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							16.144.935.000,00		4.150.000.000,00
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							16.144.935.000,00		4.150.000.000,00
8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
						Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	1 Dok	100 %	12.029.960.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
						Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	1 Dokumen	100 %	499.975.600,00	1 Dokumen	500.000.000,00

8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
						Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	30 Org	100 %	1.249.999.400,00	30 Orang	1.250.000.000,00
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
						Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	30 Org	100 %	365.000.000,00	30 Orang	365.000.000,00
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
						Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	192 Lap	100 %	450.000.000,00	192 Laporan	450.000.000,00
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									
						Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	24 Dok	100 %	1.550.000.000,00	24 Dokumen	1.550.000.000,00
											TOTAL	**42.160.478.300,00**		**25.093.341.040,00**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusunlah program,kegiatan dan sub kegiatan secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan pada tahun 2024.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan yaitu meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota.

Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan akan melaksanakan **6 program** dengan jumlah kegiatan sebanyak **11 kegiatan** dan **52 Sub Kegiatan** yang merupakan implementasi dari tuajan renstra 2021-2026 Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota. Lokasi kegiatan keseluruhan dilaksanakan di Kota Balikpapan. Untuk melaksanakan seluruh program kegiatan sub kegiatan tersebut dengan pagu indikatif sebesar **Rp.83.187.882.000**,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan Tahun 2024. Program tersebut terdiri dari :

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Pagu Ranwal
				Satuan	Tahun 2024	Tahun 2024
						83.187.882.000
						83.187.882.000
8.01.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**		**Poin**	**80**	**9.255.257.100**
8.01.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**Poin**	**65**	-
8.01.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	-
8.01.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	-
8.01.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	-
8.01.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	-
8.01.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	-
8.01.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**80,5**	
8.01.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang	Orang/b	Orang /	25	

	Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ulan	Bulan		5.500.000.000
8.01.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**81**	
8.01.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Orang	25	50.000.000
8.01.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	20	350.000.000
8.01.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**80**	
8.01.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	8	30.000.000
8.01.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket		145.000.000
8.01.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	4	550.000.000
8.01.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	7	58.850.000
8.01.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	80	200.000.000
8.01.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	20	100.000.000
8.01.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	30	300.000.000
8.01.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**80**	
8.01.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit	1	156.000.000
8.01.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	2	80.000.000
8.01.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Paket	1	50.000.000
8.01.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Poin**	**82**	
8.01.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	36	75.000.000
8.01.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	5	700.407.100
8.01.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Poin**	**80**	
8.01.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	450.000.000

	Jabatan					
8.01.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	9	100.000.000
8.01.1.2.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	30.000.000
8.01.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	280.000.000
8.01.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	50.000.000
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase pelaksanaan fasilitasi pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional**		**%**	**64**	**4.973.191.040**
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional**		**%**	**100**	**4.973.191.040**
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	25.000.000
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen	2	500.000.000
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Orang	43	2.700.000.000
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Orang	300	948.191.040
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	Laporan	4	100.000.000

	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	2050	700.000.000
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		Orang	43	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN SERTA ETIKA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik**		**%**	**100**	**62.499.863.160**
8.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan**		%	**100**	**62.499.863.160**
8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	10.050.000
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	2	54.641.763.960
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Orang	Orang	100	226.135.600

		serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Orang	100	106.700.000
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Laporan	1	7.515.213.600
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan**		**%**	**85**	**954.570.700**
8.01.04.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas**		%	**100**	**954.570.700**
8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	5	13.400.000
8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	10.050.000
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Orang	250	370.910.700

8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Orang	100	183.400.000
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Laporan	1	376.810.000
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GN**		**%**	**88**	**1.360.000.000**
8.01.05.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN**		%	**100**	**1.360.000.000**
8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	25.000.000
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	35.000.000
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	400	350.000.000
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	250	600.000.000

8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Laporan	48	350.000.000
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Monitoring Potensi Konflik**		**%**	**88**	**4.145.000.000**
8.01.06.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana**		%	**100**	**4.145.000.000**
8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	30.000.000
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	500.000.000
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Orang	30	1.250.000.000
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	Orang	Orang	30	365.000.000

	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Laporan	192	450.000.000
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	48	1.550.000.000
	JUMLAH					**83.187.882.000**

Dalam rangka meningkatkan kualitas Renja dan kualitas pembangunan serta keselarasan dengan inovasi OPD yang akan dicantumkan dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan telah memiliki beberapa inovasi yang telah berjalan dan sedang berlangsung di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian/Nama Inovasi	Pengampu	Keterangan
1.	SIPERKASA (Sistem Perhitungan dan Rekapitulasi Suara untuk mempermudah perhitungan Kotak Suara Pada Pemilu Kada) https://siperkasa.balikpapan.go.id/	Bidang Politik Dalam Negeri dan organisasi Kemasyarakatan	Pengadaan Tahun 2019
2.	PEWIRA (Sistem Peta Kerawanan Wilayah Daerah untuk menghimpun data rawan konflik dan informasi bencana) http://pewirabalikpapan.inotive.go.id/	Bidang Wawasan Kebangsaan	Pengadaan Tahun 2022
3.	PR CAK BIMO (Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Bidang Melalui ON LINE) http://prcakbimo.balikpapan.go.id//	Keuangan	Pengadaan Tahun 2021
4.	Satu Ormas (Sistem Layanan Terpadu Organisasi Kemasyarakatan) http://satuormas.balikpapan.go.id/	Bidang Politik Dalam Negeri dan organisasi Kemasyarakatan	Pengadaan Tahun 2022

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan progduk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisas antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Di dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2023 memerlukan waktu yang cukup panjang dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
b. Di dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2024 ini masih belum sempurna, sehingga dalam upaya

sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Propinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Badan).

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan unntuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, yaitu dengan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Perlu menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif melaksanakan koodinasi dengan instansi terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
e. Dalam menerapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan ammanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2024 ini kami susun sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.